



Infografis PILKADA Serentak 2024

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Jawa Timur



Rinda Lolita Melanwati, S.Si., M.Stat.

Insan Qoriawan, S.Si., M.Sos.

Rinda Lolita Melanwati, S.Si., M.Stat.
Insan Qoriawan, S.Si., M.Sos.

INFOGRAFIS PILKADA SERENTAK 2024
Gubernur dan Wakil Gubernur
Bupati dan Wakil Bupati
Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
se-Jawa Timur



Penerbit Forind

INFOGRAFIS PILKADA SERENTAK 2024

Gubernur dan Wakil Gubernur
Bupati dan Wakil Bupati
Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
se-Jawa Timur

Copyright©:

Rinda Lolita Melanwati, S.Si., M.Stat.

Insan Qoriawan, S.Si., M.Sos.

Cover & Layout: Tim Forind

Diterbitkan oleh Forind
Jl. Raya Tlogomas 05 No. 24 Tlogomas
Malang Jawa Timur

Infografis Pilkada Serentak 2024/Melanwati & Qoriawan
Malang: Forind, 2025
17,5 x 25 cm
xviii + 806 hlm

Cetakan Pertama: Juni 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku **"Infografis Pilkada Serentak 2024: Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Jawa Timur"** dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai dokumentasi komprehensif pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur, yang merupakan bagian dari sejarah demokrasi Indonesia dalam penyelenggaraan pemilihan pertama kalinya secara serentak di seluruh Indonesia.

Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, memiliki peran strategis dalam peta politik nasional. Melalui buku ini, kami berupaya menyajikan informasi yang lengkap dan terstruktur mengenai seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024, mulai dari perencanaan hingga hasil akhir pemilihan. Penyajian dalam bentuk infografis dipilih untuk memudahkan pembaca dari berbagai kalangan dalam memahami kompleksitas penyelenggaraan Pilkada.

Buku ini terdiri dari tiga puluh sembilan bagian yang mencakup berbagai aspek penting penyelenggaraan Pilkada, termasuk perencanaan anggaran, pembentukan badan *ad hoc*, pemutakhiran data pemilih, proses pencalonan, sosialisasi, kampanye, logistik, hingga hasil Pilkada. Kami juga menyertakan berbagai inovasi yang diterapkan KPU Jawa Timur dalam penyelenggaraan Pilkada, termasuk penggunaan teknologi *e-government* dan sistem digital dalam proses administrasi pemilihan.

Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Jawa Timur tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Jawa Timur
4. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur
6. Seluruh masyarakat Jawa Timur yang telah berpartisipasi aktif dalam Pilkada Serentak 2024

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi berbagai kalangan, baik akademisi, profesional, maupun masyarakat umum dalam memahami proses demokratisasi di tingkat lokal.

Lebih dari itu, kami berharap dokumentasi ini dapat menjadi pembelajaran berharga untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam memahami proses, tahapan, dan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii

BAGIAN 1. JAWA TIMUR	1
1. Penyaluran Dana Hibah Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	3
2. Perencanaan Anggaran Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 202 4	4
3. Badan <i>Ad Hoc</i>	5
a) Pembentukan Badan <i>Ad Hoc</i>	6
b) Sebaran Demografi Badan <i>Ad Hoc</i> Berdasarkan Jenis Kelamin	6
c) Sebaran Demografi Badan <i>Ad Hoc</i> Berdasarkan Kelompok Usia	7
d) Sebaran Demografi Badan <i>Ad Hoc</i> Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
e) Keterlibatan Penyandang Disabilitas Badan <i>Ad Hoc</i>	10
4. Pemutakhiran Data	11
a) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap	11
b) Sebaran Demografi Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan Jenis Kelamin	11
c) Sebaran Demografi Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan Jenis Pemilih dan Kelompok Usia	12
d) Sebaran Klasifikasi Penyandang Disabilitas Pada Daftar Pemilih Tetap	14
5. Pencalonan	15
a) Sebaran Pasangan Calon Kepala Daerah Pemilihan Serentak Provinsi Jawa Timur	15
b) Sebaran Demografi Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Jenis Kelamin	16

c)	Sebaran Demografi Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
d)	Visi dan Misi Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur	18
6.	Sosialisasi	19
a)	Sosialisasi Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur.....	19
b)	Penggunaan Media Pada Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur	20
7.	Kampanye	20
a)	Fasilitas KPU dalam Penyelenggaraan Kampanye.....	21
b)	Pemanfaatan Platform Media Sosial dalam	
c)	Penyelenggaraan Kampanye	22
8.	Logistik	22
a)	Metode Pengadaan Logistik	22
b)	Jumlah Pengadaan Logistik	22
9.	Hasil Pilkada Serentak	23
a)	Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2024	24
b)	Penggunaan Hak Pilih (DPT, DPTb, dan DPK)	25
BAGIAN 2. KABUPATEN PACITAN		28
1.	Profil Singkat	28
2.	Badan <i>Ad Hoc</i>	28
3.	Pemutakhiran Data	32
4.	Pencalonan	34
5.	Sosialisasi dan Kampanye.....	38
6.	Logistik	39
7.	Hasil Pilkada Serentak	40
BAGIAN 3. KABUPATEN PONOROGO		43
1.	Profil Singkat	43
2.	Badan <i>Ad Hoc</i>	43
3.	Pemutakhiran Data	47
4.	Pencalonan	49
5.	Sosialisasi dan Kampanye.....	53

6. Logistik	54
7. Hasil Pilkada Serentak	55
BAGIAN 4. KABUPATEN TRENGGALEK	59
1. Perencanaan Program dan Anggaran	59
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	60
3. Pemutakhiran Data	64
4. Pencalonan	68
5. Sosialisasi dan Kampanye	70
6. Logistik	72
7. Hasil Pilkada Serentak	74
BAGIAN 5. KABUPATEN TULUNGAGUNG	77
1. Perencanaan Program dan Anggaran	77
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	79
3. Pemutakhiran Data	83
4. Pencalonan	86
5. Sosialisasi dan Kampanye	89
6. Logistik	93
7. Hasil Pilkada Serentak	95
BAGIAN 6. KABUPATEN BLITAR	98
1. Perencanaan Program dan Anggaran	98
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	100
3. Pemutakhiran Data	103
4. Pencalonan	107
5. Sosialisasi dan Kampanye	110
6. Logistik	113
7. Hasil Pilkada Serentak	114
BAGIAN 7. KABUPATEN KEDIRI	117
1. Perencanaan Program dan Anggaran	117
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	119
3. Pemutakhiran Data	122
4. Pencalonan	126
5. Sosialisasi dan Kampanye	130

6. Logistik	131
7. Hasil Pilkada Serentak	133
BAGIAN 8. KABUPATEN MALANG	136
1. Perencanaan Program dan Anggaran	136
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	138
3. Pemutakhiran Data	142
4. Pencalonan	146
5. Sosialisasi dan Kampanye	149
6. Logistik	152
7. Hasil Pilkada Serentak	154
BAGIAN 9. KABUPATEN LUMAJANG	156
1. Perencanaan Program dan Anggaran	156
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	158
3. Pemutakhiran Data	161
4. Pencalonan	164
5. Sosialisasi dan Kampanye	167
6. Logistik	169
7. Hasil Pilkada Serentak	171
BAGIAN 10. KABUPATEN JEMBER	173
1. Perencanaan Program dan Anggaran	173
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	175
3. Pemutakhiran Data	179
4. Pencalonan	183
5. Sosialisasi dan Kampanye	187
6. Logistik	189
7. Hasil Pilkada Serentak	191
BAGIAN 11. KABUPATEN BANYUWANGI	193
1. Perencanaan Program dan Anggaran	193
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	195
3. Pemutakhiran Data	198
4. Pencalonan	201
5. Sosialisasi dan Kampanye	204

6. Logistik	206
7. Hasil Pilkada Serentak	208
BAGIAN 12. KABUPATEN BONDOWOSO	211
1. Perencanaan Program dan Anggaran	211
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	213
3. Pemutakhiran Data	216
4. Pencalonan	219
5. Sosialisasi dan Kampanye	222
6. Logistik	224
7. Hasil Pilkada Serentak	225
BAGIAN 13. KABUPATEN SITUBONDO	228
1. Perencanaan Program dan Anggaran	228
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	230
3. Pemutakhiran Data	233
4. Pencalonan	237
5. Sosialisasi dan Kampanye	240
6. Logistik	244
7. Hasil Pilkada Serentak	247
BAGIAN 14. KABUPATEN PROBOLINGGO	249
1. Perencanaan Program dan Anggaran	249
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	251
3. Pemutakhiran Data	255
4. Pencalonan	258
5. Sosialisasi dan Kampanye	261
6. Logistik	264
7. Hasil Pilkada Serentak	265
BAGIAN 15. KABUPATEN PASURUAN	267
1. Perencanaan Program dan Anggaran	267
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	269
3. Pemutakhiran Data	272
4. Pencalonan	276
5. Sosialisasi dan Kampanye	279

6. Logistik	282
7. Hasil Pilkada Serentak	285
BAGIAN 16. KABUPATEN SIDOARJO	287
1. Perencanaan Program dan Anggaran	287
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	289
3. Pemutakhiran Data	292
4. Pencalonan	296
5. Sosialisasi dan Kampanye	299
6. Logistik	302
7. Hasil Pilkada Serentak	304
BAGIAN 17. KABUPATEN MOJOKERTO	307
1. Perencanaan Program dan Anggaran	307
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	310
3. Pemutakhiran Data	312
4. Pencalonan	316
5. Sosialisasi dan Kampanye	319
6. Logistik	322
7. Hasil Pilkada Serentak	324
BAGIAN 18. KABUPATEN JOMBANG	327
1. Perencanaan Program dan Anggaran	327
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	329
3. Pemutakhiran Data	333
4. Pencalonan	337
5. Sosialisasi dan Kampanye	340
6. Logistik	344
7. Hasil Pilkada Serentak	346
BAGIAN 19. KABUPATEN NGANJUK	348
1. Perencanaan Program dan Anggaran	348
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	349
3. Pemutakhiran Data	353
4. Pencalonan	356
5. Sosialisasi dan Kampanye	359

6. Logistik	364
7. Hasil Pilkada Serentak	366
BAGIAN 20. KABUPATEN MADIUN	369
1. Perencanaan Program dan Anggaran	369
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	371
3. Pemutakhiran Data	374
4. Pencalonan	377
5. Sosialisasi dan Kampanye	380
6. Logistik	383
7. Hasil Pilkada Serentak	384
BAGIAN 21. KABUPATEN MAGETAN	387
1. Perencanaan Program dan Anggaran	387
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	389
3. Pemutakhiran Data	392
4. Pencalonan	396
5. Sosialisasi dan Kampanye	399
6. Logistik	402
7. Hasil Pilkada Serentak	404
BAGIAN 22. KABUPATEN NGAWI	407
1. Perencanaan Program dan Anggaran	407
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	409
3. Pemutakhiran Data	413
4. Pencalonan	417
5. Sosialisasi dan Kampanye	420
6. Logistik	424
7. Hasil Pilkada Serentak	426
BAGIAN 23. KABUPATEN BOJONEGORO	429
1. Perencanaan Program dan Anggaran	429
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	431
3. Pemutakhiran Data	435
4. Pencalonan	439
5. Sosialisasi dan Kampanye	444

6. Logistik	446
7. Hasil Pilkada Serentak	448
BAGIAN 24. KABUPATEN TUBAN	451
1. Perencanaan Program dan Anggaran	451
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	453
3. Pemutakhiran Data	457
4. Pencalonan	461
5. Sosialisasi dan Kampanye	464
6. Logistik	468
7. Hasil Pilkada Serentak	470
BAGIAN 25. KABUPATEN LAMONGAN	473
1. Perencanaan Program dan Anggaran	473
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	475
3. Pemutakhiran Data	478
4. Pencalonan	482
5. Sosialisasi dan Kampanye	485
6. Logistik	489
7. Hasil Pilkada Serentak	491
BAGIAN 26. KABUPATEN GRESIK	493
1. Perencanaan Program dan Anggaran	493
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	496
3. Pemutakhiran Data	499
4. Pencalonan	503
5. Sosialisasi dan Kampanye	505
6. Logistik	508
7. Hasil Pilkada Serentak	510
BAGIAN 27. KABUPATEN BANGKALAN	513
1. Perencanaan Program dan Anggaran	513
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	515
3. Pemutakhiran Data	519
4. Pencalonan	523
5. Sosialisasi dan Kampanye	526

6. Logistik	530
7. Hasil Pilkada Serentak	531
BAGIAN 28. KABUPATEN SAMPANG	533
1. Perencanaan Program dan Anggaran	533
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	535
3. Pemutakhiran Data	539
4. Pencalonan	542
5. Sosialisasi dan Kampanye	545
6. Logistik	549
7. Hasil Pilkada Serentak	551
BAGIAN 29. KABUPATEN PAMEKASAN	553
1. Perencanaan Program dan Anggaran	553
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	556
3. Pemutakhiran Data	560
4. Pencalonan	564
5. Sosialisasi dan Kampanye	567
6. Logistik	572
7. Hasil Pilkada Serentak	574
BAGIAN 30. KABUPATEN SUMENEP	577
1. Perencanaan Program dan Anggaran	577
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	579
3. Pemutakhiran Data	583
4. Pencalonan	587
5. Sosialisasi dan Kampanye	590
6. Logistik	595
7. Hasil Pilkada Serentak	597
BAGIAN 31. KABUPATEN KEDIRI	600
1. Perencanaan Program dan Anggaran	600
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	602
3. Pemutakhiran Data	606
4. Pencalonan	610
5. Sosialisasi dan Kampanye	614

6. Logistik	619
7. Hasil Pilkada Serentak	621
BAGIAN 32. KOTA BLITAR	624
1. Perencanaan Program dan Anggaran	624
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	625
3. Pemutakhiran Data	629
4. Pencalonan	633
5. Sosialisasi dan Kampanye	636
6. Logistik	641
7. Hasil Pilkada Serentak	643
BAGIAN 33. KOTA MALANG	645
1. Perencanaan Program dan Anggaran	645
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	647
3. Pemutakhiran Data	651
4. Pencalonan	655
5. Sosialisasi dan Kampanye	659
6. Logistik	666
7. Hasil Pilkada Serentak	668
BAGIAN 34. KOTA PROBOLINGGO	670
1. Perencanaan Program dan Anggaran	670
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	672
3. Pemutakhiran Data	676
4. Pencalonan	680
5. Sosialisasi dan Kampanye	683
6. Logistik	692
7. Hasil Pilkada Serentak	694
BAGIAN 35. KOTA PASURUAN	696
1. Perencanaan Program dan Anggaran	696
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	697
3. Pemutakhiran Data	701
4. Pencalonan	705
5. Sosialisasi dan Kampanye	707

6. Logistik	712
7. Hasil Pilkada Serentak	714
BAGIAN 36. KOTA MOJOKERTO	716
1. Perencanaan Program dan Anggaran	716
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	718
3. Pemutakhiran Data	722
4. Pencalonan	726
5. Sosialisasi dan Kampanye	729
6. Logistik	735
7. Hasil Pilkada Serentak	736
BAGIAN 37. KOTA MADIUN	739
1. Perencanaan Program dan Anggaran	739
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	741
3. Pemutakhiran Data	745
4. Pencalonan	749
5. Sosialisasi dan Kampanye	753
6. Logistik	756
7. Hasil Pilkada Serentak	757
BAGIAN 38. KOTA SURABAYA	760
1. Perencanaan Program dan Anggaran	760
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	762
3. Pemutakhiran Data	765
4. Pencalonan	769
5. Sosialisasi dan Kampanye	771
6. Logistik	778
7. Hasil Pilkada Serentak	779
BAGIAN 39. KOTA BATU	782
1. Perencanaan Program dan Anggaran	782
2. Badan <i>Ad Hoc</i>	784
3. Pemutakhiran Data	787
4. Pencalonan	791
5. Sosialisasi dan Kampanye	794

6. Logistik	801
7. Hasil Pilkada Serentak	803
BIOGRAFI PENULIS	805

Rinda Lolita Melanwati, S.Si., M.Stat.

Insan Qoriawan, S.Si., M.Sos.

INFOGRAFIS PILKADA SERENTAK 2024

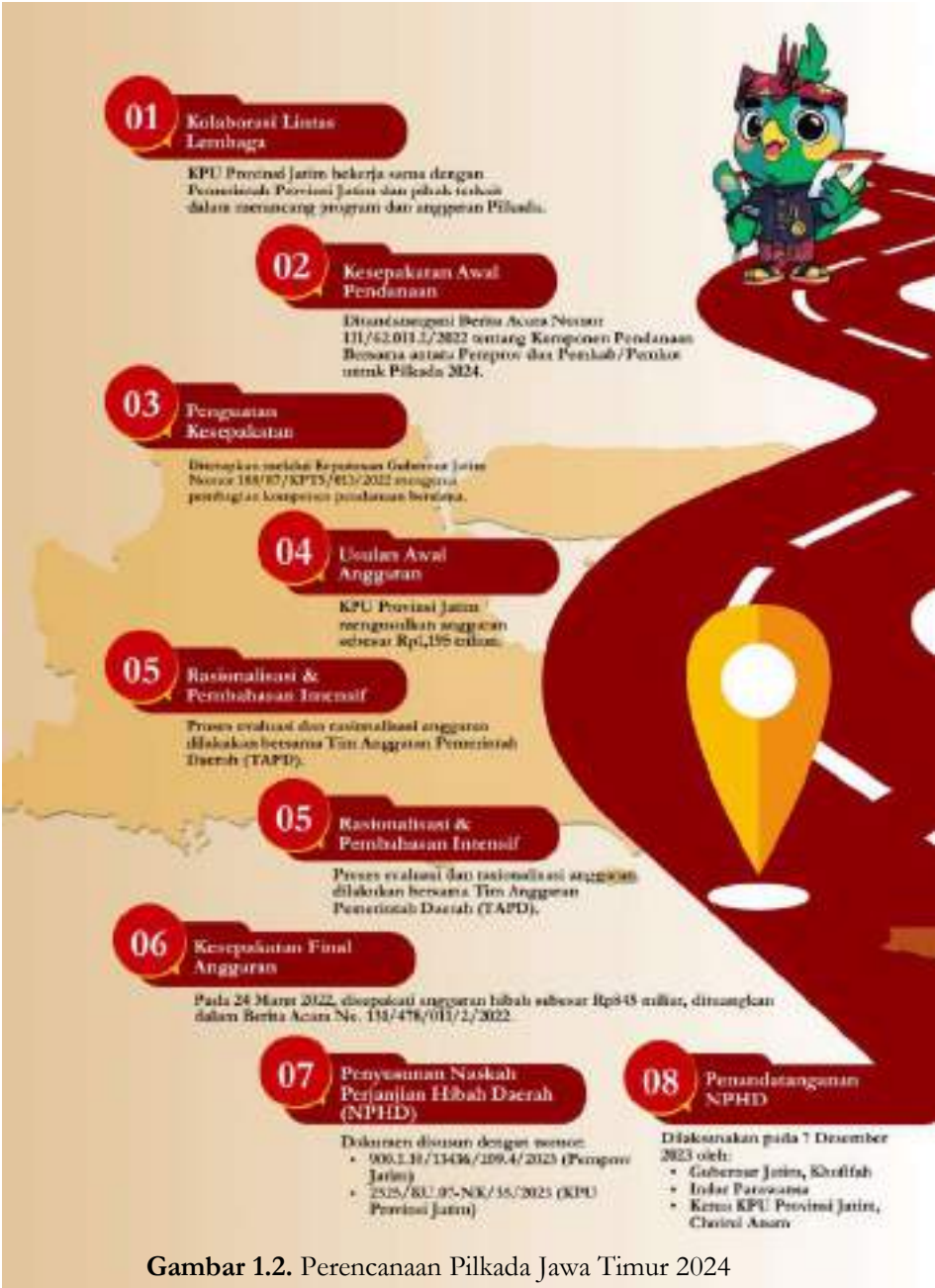
Gubernur dan Wakil Gubernur
Bupati dan Wakil Bupati
Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
se-Jawa Timur

Dalam rangka penyusunan program dan anggaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, KPU Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara tidak bekerja secara terpisah. Diperlukan kolaborasi erat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pihak-pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran proses tersebut.

Tahapan penyusunan anggaran hibah dimulai dengan adanya kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 131/62. 011.2/2022 mengenai Komponen Pendanaan Bersama Pilkada Serentak Tahun 2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kesepakatan ini kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/87/KPTS/ 013/2022 tentang Komponen Pendanaan Bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Pada awalnya, KPU Provinsi Jawa Timur mengusulkan anggaran sebesar Rp1.195.733.242.820 (satu triliun seratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) untuk penyelenggaraan pemilihan tersebut. Proses pembahasan yang mencakup rasionalisasi anggaran dilakukan secara intensif, hingga akhirnya pada tanggal 24 Maret 2022 tercapai kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan KPU Provinsi Jawa Timur. Nilai anggaran hibah disepakati sebesar Rp845.000.000.000 (delapan ratus empat puluh lima miliar rupiah), sebagaimana tercantum dalam Berita Acara No. 131/478/011/2/2022 mengenai Desk Pembahasan Usulan Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024.

Kesepakatan tersebut selanjutnya menjadi landasan penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Komisi pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, dengan dokumen dengan nomor 900.1.10/13436/209.4/2023 dan 2525/ KU.07-NK/35/2023. Naskah tersebut ditandatangani pada 7 Desember 2023 oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam.

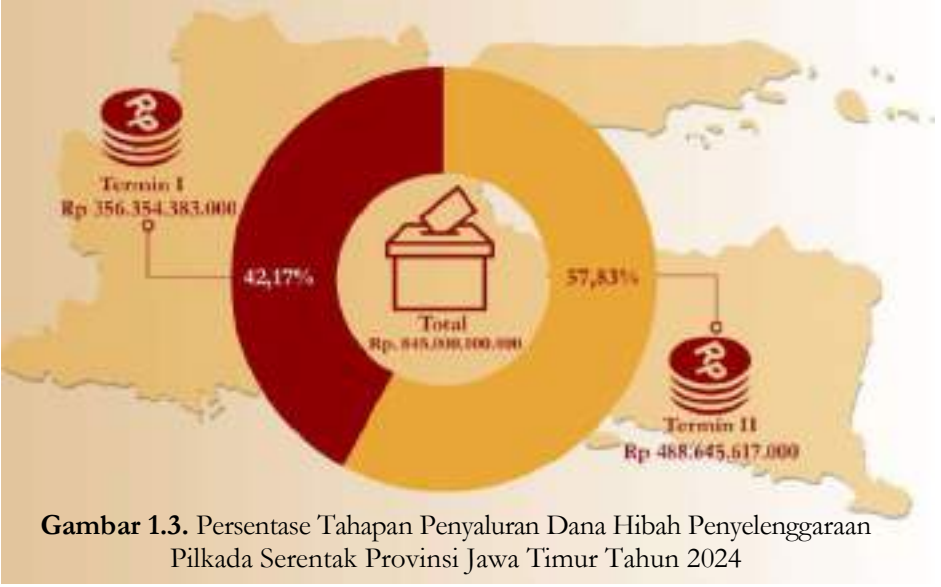


Gambar 1.2. Perencanaan Pilkada Jawa Timur 2024

1. Penyaluran Dana Hibah Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan dana hibah sebesar Rp845 miliar. Dana tersebut disalurkan secara bertahap melalui dua termin.

Rincian proporsi penyaluran dana hibah disajikan pada gambar 1.3, yang memberikan gambaran distribusi persentase anggaran untuk mendukung kelancaran seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah provinsi.

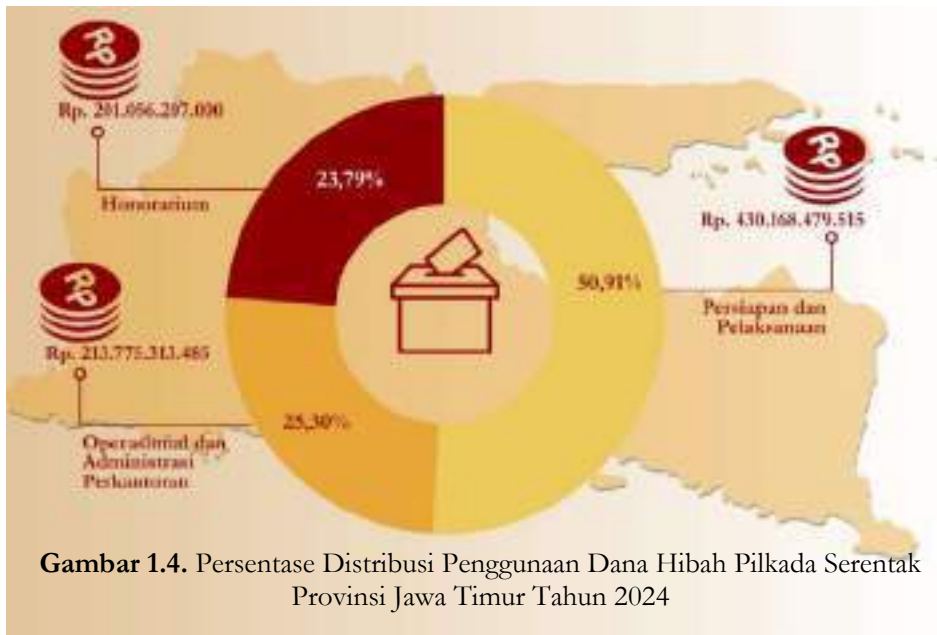


Gambar 1.3. Persentase Tahapan Penyaluran Dana Hibah Penyelenggaraan Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Pada Termin 1, jumlah dana yang disalurkan Rp488.645.617.000 atau sebesar 57,83% dari total anggaran hibah yang telah disepakati. Sementara itu, pada Termin 2, dana yang disalurkan sebesar Rp 356.354.383.000 atau sebesar 42,17% dari keseluruhan anggaran. Skema penyaluran secara bertahap ini menunjukkan pendekatan strategis dalam pengelolaan keuangan, yang bertujuan untuk menjamin efektivitas pemanfaatan anggaran serta pengawasan yang lebih optimal terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.

2. Perencanaan Anggaran Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Distribusi anggaran hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur dirancang ke dalam tiga kategori utama, yaitu Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan, Operasional dan Administrasi Perkantoran, serta Honorarium. Pembagian ini mencerminkan prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan di lapangan. Proporsi alokasi anggaran untuk masing-masing komponen tersebut disajikan pada gambar 1.4, guna memberikan pemahaman yang komprehensif terkait struktur perencanaan keuangan dalam mendukung suksesnya pemilihan.



Alokasi dana hibah yang dibagi dalam tiga komponen utama menunjukkan bahwa porsi terbesar digunakan untuk komponen Persiapan dan Pelaksanaan, yakni sebesar Rp430.168.479.515 atau 50,91% dari total anggaran hibah. Proporsi ini menandakan bahwa tahapan awal dan proses teknis dalam pemilihan memerlukan perhatian dan pendanaan yang paling besar. Komponen kedua adalah Operasional dan Administrasi Perkantoran, yang mendapatkan alokasi sebesar Rp213.775.313.485 atau 25,30% dari total dana. Anggaran ini digunakan untuk mendukung aspek administratif, keperluan logistik kantor, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya yang menunjang kelancaran penyelenggaraan pemilihan. Adapun Honorarium dialokasikan sebesar Rp201.056.207.000 atau 23,79% dari keseluruhan anggaran. Dana ini digunakan untuk membayar honor bagi petugas penyelenggara yang terlibat secara langsung dalam berbagai tahapan kegiatan pemilihan.

Komposisi alokasi ini menggambarkan adanya pendekatan perencanaan anggaran yang terstruktur dan disesuaikan dengan kebutuhan. Penekanan pada kelancaran pelaksanaan kegiatan, efisiensi dalam operasional, serta penghargaan terhadap kontribusi sumber daya manusia menjadi dasar dari strategi distribusi anggaran ini.

3. **Badan Ad Hoc**

KPU Provinsi Jawa Timur melalui KPU Kabupaten/Kota melakukan penataan struktur organisasi dan pengelolaan personalia penyelenggara

pemilihan dengan membentuk atau mengangkat badan penyelenggara *ad hoc*. Badan ini memiliki peran strategis dalam menjalankan tahapan pilkada di seluruh tingkatan wilayah, mulai dari kecamatan hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).

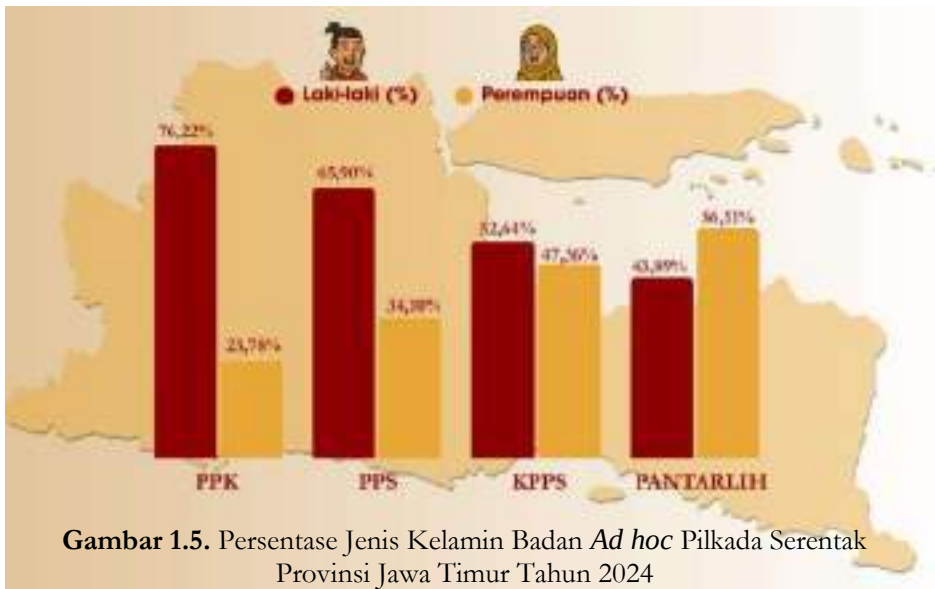
a) Pembentukan Badan *Ad Hoc*

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pilkada serentak di 38 Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi Jawa Timur membentuk badan *ad hoc* pada berbagai jenjang wilayah administrasi. Jumlah badan *ad hoc* yang terbentuk meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 666 kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 8.494 desa/kelurahan, serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih/PPDP) di 60.751 Tempat Pemungutan Suara. Pembentukan badan ini disesuaikan dengan kebutuhan lapangan guna menjamin terlaksananya setiap tahapan secara menyeluruh. Adapun masa tugas masing-masing badan *ad hoc* tersebut ditetapkan sebagai berikut:

- a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertugas selama 9 (sembilan) bulan, dimulai sejak tanggal pelantikan.
- b. Panitia Pemungutan Suara (PPS) bertugas selama 8 (delapan) bulan, dimulai sejak tanggal pelantikan.
- c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertugas 1 (satu) bulan, dimulai sejak tanggal pelantikan.
- d. Pantarlih bertugas selama 1 (satu) bulan, sesuai dengan masa kerja dalam tahapan pemutakhiran data pemilih.

b) Sebaran Demografi Badan *Ad Hoc* Berdasarkan Jenis Kelamin

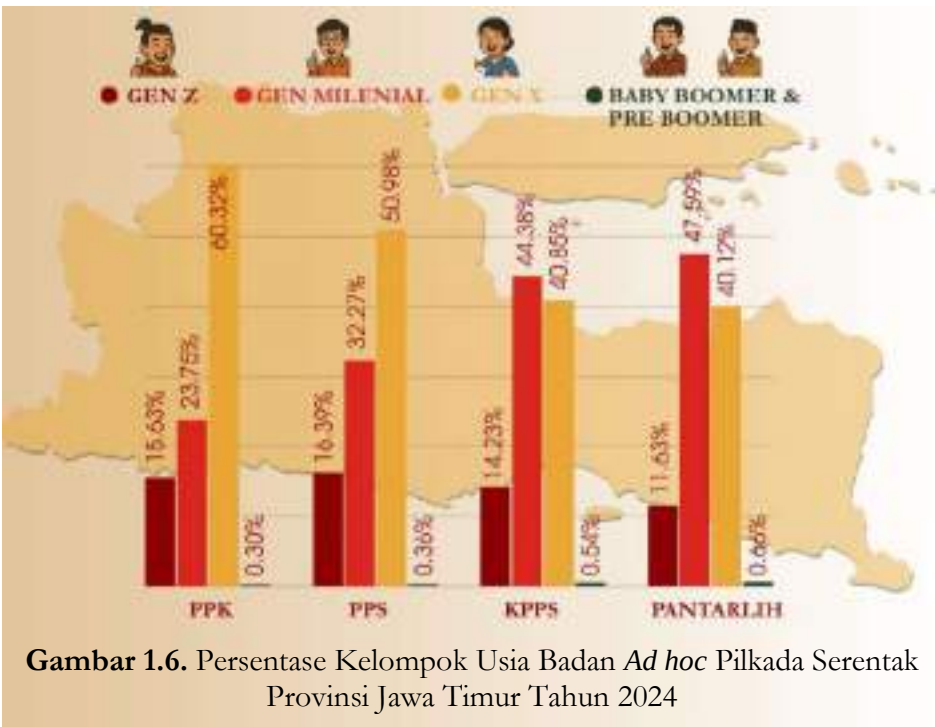
Komposisi badan *ad hoc* di Jawa Timur memperlihatkan komitmen terhadap kesetaraan gender. Rekrutmen dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pilkada. Pemetaan berdasarkan jenis kelamin digunakan untuk mengidentifikasi tingkat keterlibatan perempuan dalam struktur penyelenggara dan menjadi dasar bagi kebijakan afirmatif yang berkeadilan. Adapun sebaran demografi badan *ad hoc* pada pilkada serentak di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin disajikan pada gambar 1.5 berikut.



Distribusi anggota badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin menunjukkan keterlibatan yang cukup beragam antara laki-laki dan perempuan di seluruh kelompok. Pada tingkat PPK, sebanyak 76,22% atau 2.538 orang adalah laki-laki, sedangkan perempuan berjumlah 792 orang (23,78%). Di tingkat PPS, laki-laki mendominasi dengan 65,90% (16.798 orang), sementara perempuan mencakup 34,10% (8.694 orang). Komposisi lebih seimbang terlihat pada tingkat KPPS, dengan 226.589 laki-laki (52,64%) dan 203.840 perempuan (47,36%) dari total 430.429 anggota. Menariknya, proporsi berbalik pada tingkat Pantarlih, di mana perempuan lebih dominan dengan 56,11% (65.209 orang), dibandingkan laki-laki yang berjumlah 51.011 orang (43,89%). Data ini menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam badan *ad hoc* semakin meningkat, khususnya pada level teknis pemutakhiran data pemilih.

c) Sebaran Demografi Badan *Ad Hoc* Berdasarkan Kelompok Usia

Anggota badan *ad hoc* berasal dari berbagai kelompok usia yang mencer-minkan keragaman demografis. Klasifikasi ini digunakan untuk mengetahui distribusi usia anggota penyelenggara, yang berpengaruh pada dinamika kerja, kesiapan fisik, dan adaptasi terhadap teknologi. Partisipasi lintas generasi ini menjadi kekuatan tersendiri dalam menja-min kelancaran proses penyelenggaraan. Adapun sebaran demografi badan *ad hoc* pada pilkada serentak di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 1.6 berikut.



Distribusi kelompok usia anggota badan *ad hoc* Pilkada Serentak di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 menunjukkan dominasi kelompok usia produktif, khususnya rentang usia 28 – 43 tahun. Pada tingkat PPK, kelompok ini mencakup 60,32% (2.007 orang) dari total anggota, disusul usia 18–27 tahun sebesar 23,75% (790 orang), dan usia 44–59 tahun sebanyak 15,63% (520 orang). Komposisi serupa juga terlihat di tingkat PPS, dengan 50,98% (13.415 orang) berasal dari usia 28–43 tahun, 32,27% (8.492 orang) dari usia 18–27 tahun, dan 16,39% (4.312 orang) dari usia 44–59 tahun.

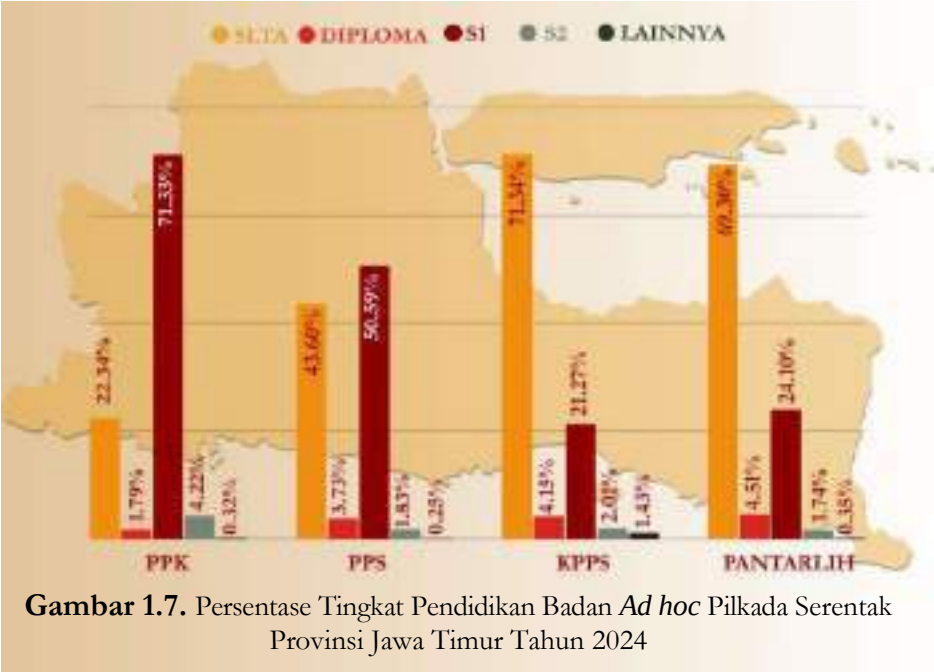
Sementara pada KPPS, kelompok usia 18–27 tahun mendominasi sebesar 42,75% (157.337 orang), sedikit lebih tinggi dibanding usia 28–43 tahun (40,85%) atau 150.360 orang, sedangkan kelompok usia 44–59 tahun mencakup 14,23% (52.356 orang). Untuk Pantarlih, mayoritas juga berasal dari usia 18–27 tahun (45,39%) atau 46.026 orang, diikuti usia 28–43 tahun (40,12%) atau 40.683 orang, dan usia 44–59 tahun (11,63%) atau 11.792 orang.

Partisipasi dari kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas) sangat kecil, di bawah 1,00% di seluruh jenjang badan *ad hoc*. Sementara itu, keikutsertaan usia 17 tahun cenderung kecil, kecuali di KPPS dan Pantarlih masing-masing sebesar 1,63% (5.983 orang) dan 2,20% (2.230 orang). Data ini

menegaskan bahwa pelibatan badan *ad hoc* sangat didominasi oleh kalangan usia muda (Gen Z) dan dewasa awal (Gen Milenial), yang secara umum memiliki kapasitas fisik dan adaptabilitas yang baik terhadap dinamika kerja lapangan.

d) Sebaran Demografi Badan Ad Hoc Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Latar belakang pendidikan para anggota badan *ad hoc* menunjukkan sebaran yang beragam, mulai dari lulusan sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Klasifikasi ini penting untuk merancang materi pelatihan yang tepat sasaran serta memastikan kemampuan anggota dalam memahami regulasi, prosedur teknis, dan administrasi pilkada secara menyeluruh. Adapun sebaran demografi badan *ad hoc* pada pilkada serentak di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikan disajikan pada gambar 1.7 berikut.



Gambar 1.7. Persentase Tingkat Pendidikan Badan *Ad hoc* Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

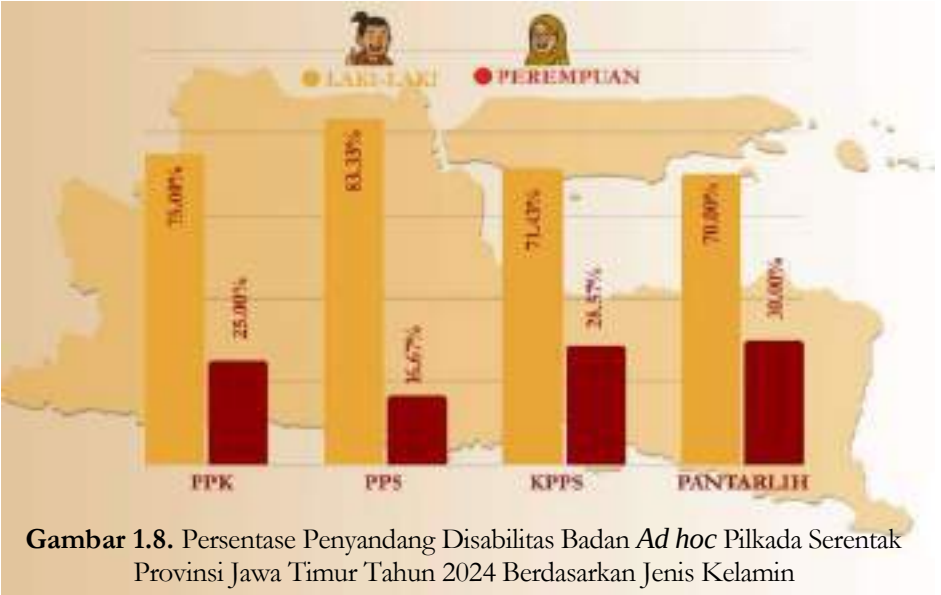
Tingkat pendidikan anggota badan *ad hoc* di Provinsi Jawa Timur beragam pada masing-masing jenjang. Pada tingkat PPK, mayoritas anggota merupakan lulusan S1, yaitu sebanyak 2.264 orang (71,33%), diikuti oleh lulusan SLTA sebanyak 709 orang (22,34%), serta lulusan S2 sebanyak 134 orang (4,22%). Di tingkat PPS, lulusan S1 masih mendominasi dengan 12.665 orang (50,59%), disusul SLTA sebanyak 10.922 orang (43,6%). Berbeda halnya dengan komposisi di tingkat KPPS dan Pantarlih, di mana lulusan

SLTA menjadi yang paling dominan: sebanyak 269.523 orang (71,34%) di KPPS dan 70.099 orang (69,30%) di Pantarlih. Proporsi lulusan S1 di kedua jenjang tersebut jauh lebih rendah, yaitu 21,27% (80.353 orang) di KPPS dan 24,10% (24.377 orang) di Pantarlih. Sementara itu, lulusan Diploma, S2, dan kategori pendidikan lainnya memiliki persentase kecil di seluruh jenjang, masing-masing kurang dari 6.00%

Data ini menunjukkan bahwa pada level teknis seperti KPPS dan Pantarlih, mayoritas penyelenggara berasal dari pendidikan menengah atas, sedangkan untuk struktur yang lebih strategis seperti PPK dan PPS, keterlibatan tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan tinggi lebih dominan. Hal ini sejalan dengan kompleksitas tugas yang diemban oleh masing-masing badan *ad hoc*.

e) Keterlibatan Penyandang Disabilitas Badan Ad Hoc

Sebagai bentuk implementasi pilkada yang inklusif, KPU Provinsi Jawa Timur juga melibatkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari badan *ad hoc*. Partisipasi kelompok difabel mencerminkan komitmen terhadap pilkada yang adil, setara, dan tidak diskriminatif. Keterlibatan ini tidak hanya memperluas akses, tetapi juga memperkuat nilai demokrasi yang menghargai keberagaman. Adapun sebaran penyandang disabilitas badan *ad hoc* pada pilkada serentak di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin disajikan pada gambar 1.8 berikut.



Partisipasi penyandang disabilitas dalam badan *ad hoc* pilkada di Provinsi Jawa Timur menunjukkan komitmen terhadap penyelenggaraan pilkada yang inklusif. Total terdapat 27 penyelenggara disabilitas yang tersebar di empat jenjang badan *ad hoc*. Di tingkat PPK, terdapat 4 orang dengan disabilitas, terdiri dari 3 laki-laki (75,00%) dan 1 perempuan (25,00%). Pada PPS, terdapat 6 orang, dengan dominasi laki-laki sebanyak 5 orang (83,33%) dan 1 perempuan (16,67%). Sementara itu, pada tingkat KPPS, jumlah penyelenggara disabilitas mencapai 7 orang, terdiri dari 5 laki-laki (71,43%) dan 2 perempuan (28,57%). Untuk Pantarlih, tercatat 10 penyelenggara disabilitas, yang terdiri dari 7 laki-laki (70,00%) dan 3 perempuan (30,00%). Data ini mencerminkan upaya positif dalam memberikan ruang partisipasi kepada penyandang disabilitas, meskipun masih dalam jumlah terbatas. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat inklusivitas, tetapi juga menjadi indikator bahwa pilkada semakin menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

4. Pemutakhiran Data

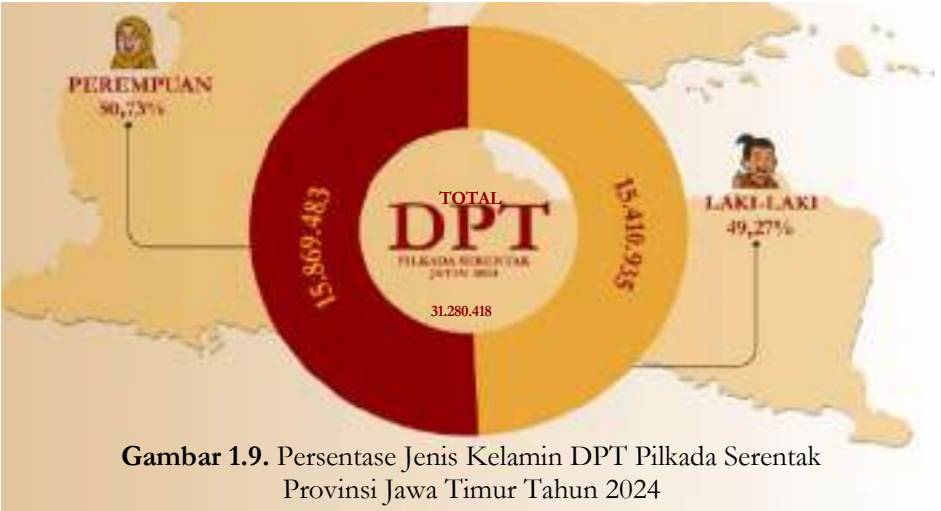
a) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan momentum penting dalam demokrasi Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Timur, yang mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak. Salah satu aspek krusial dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pilkada adalah pemutakhiran data pemilih, yang bertujuan memastikan keakuratan dan kelengkapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Proses ini melibatkan pencocokan dan pembaruan data guna mengakomodasi pemilih yang memenuhi syarat serta mengecualikan yang tidak lagi berhak. Tahapan ini berlangsung dari 31 Mei hingga 24 Juli 2024, berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 yang mengatur teknis pelaksanaannya. Untuk Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur, jumlah DPT tercatat sebanyak 31.280.418 orang yang tersebar di 38 kabupaten/kota. Validasi data ini menjadi dasar utama bagi terselenggaranya pilkada yang tertib, adil, dan inklusif.

b) Sebaran Demografi Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan Jenis Kelamin

Distribusi pemilih menurut jenis kelamin dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 ditampilkan dalam gambar 1.9. Penyajian ini memberikan gambaran proporsi antara pemilih laki-laki dan perempuan, yang menjadi salah satu indikator penting dalam memahami struktur demografis pemilih secara menyeluruh.

Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, tercatat sebanyak 31.280.418 pemilih. Dari jumlah tersebut, 15.410.935 orang (49,27%) merupakan pemilih laki-laki, sementara 15.869.483 orang (50,73%) adalah pemilih perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki proporsi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki dalam struktur demografis pemilih, mencerminkan peran strategis pemilih perempuan dalam proses demokrasi di Jawa Timur.



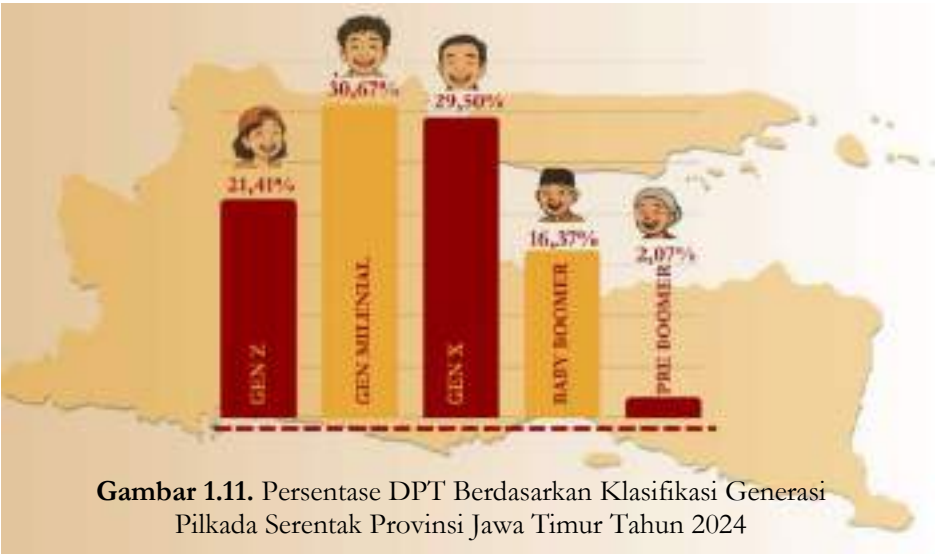
c) **Sebaran Demografi Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan Jenis Pemilih dan Kelompok Usia**

Pemetaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut jenis pemilih dan kelompok usia menyajikan gambaran menyeluruh mengenai struktur demografis pemilih pada Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Informasi ini menjadi dasar penting dalam mengidentifikasi karakteristik pemilih dari berbagai kelompok umur, termasuk pemilih pemula dan non pemula. Sebaran tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan strategi sosialisasi serta edukasi pemilih yang lebih tepat sasaran. Adapun secara lengkap terkait klasifikasi jenis pemilih berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam gambar 1.10.



Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, jumlah pemilih pemula tercatat sebanyak 435.715 orang atau 1,39% dari total pemilih. Dari jumlah tersebut, 228.582 orang (52,46%) merupakan laki-laki dan 207.133 orang (47,54%) perempuan. Kehadiran pemilih pemula meskipun kecil secara proporsi, tetap memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi generasi muda dalam demokrasi.

Selanjutnya, sebaran pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan kelompok usia memberikan wawasan penting mengenai struktur demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Informasi ini tidak hanya merefleksikan keragaman usia pemilih, tetapi juga dapat dijadikan dasar dalam merancang strategi partisipasi, sosialisasi, serta pendidikan pemilih yang lebih adaptif terhadap karakter masing-masing kelompok usia. Adapun klasifikasi kelompok usia pemilih disajikan dalam gambar 1.11.



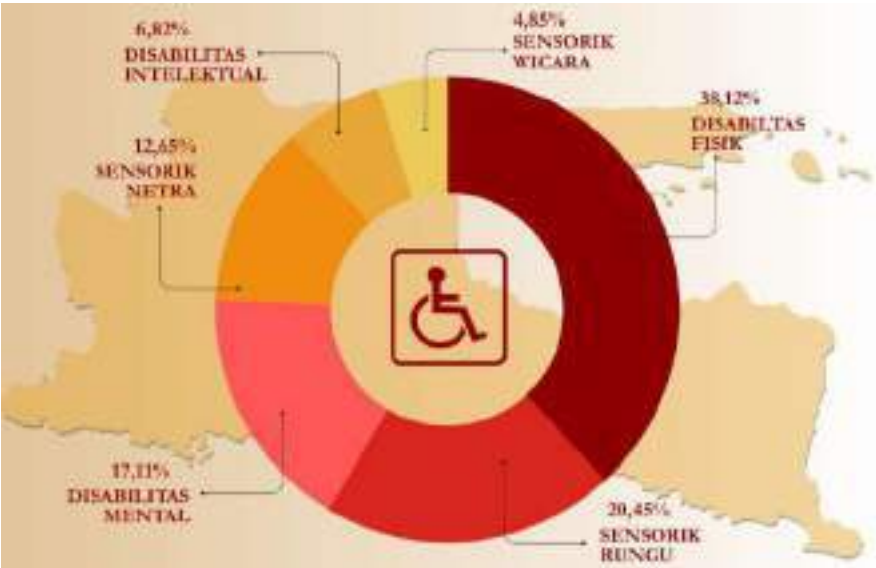
Gambar 1.11. Persentase DPT Berdasarkan Klasifikasi Generasi Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Sebaran pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 menunjukkan dominasi kelompok usia produktif. Dari total 31.280.418 pemilih, kelompok usia 28–43 tahun menjadi yang terbanyak dengan 9.592.498 orang (30,67%), diikuti usia 44–59 tahun sebanyak 9.227.941 orang (29,50%). Pemilih usia 18–27 tahun juga memberikan kontribusi signifikan sebesar 6.111.768 orang (19,54%), sedangkan pemilih usia 60–78 tahun berjumlah 5.120.134 orang (16,37%). Adapun kelompok usia 17 tahun tercatat sebanyak 582.092 orang (1,86%),

dan usia di atas 79 tahun berjumlah 645.985 orang (2,07%). Komposisi ini mencerminkan bahwa mayoritas pemilih berada pada usia aktif, yang memiliki potensi besar dalam menentukan arah kepemimpinan daerah melalui partisipasi politik yang tinggi.

d) Sebaran Klasifikasi Penyandang Disabilitas Pada Daftar Pemilih Tetap

Sebagai wujud komitmen terhadap penyelenggaraan pilkada yang inklusif dan ramah disabilitas, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 juga mencatat keberadaan pemilih dari kalangan penyandang disabilitas. Total terdapat 128.200 pemilih disabilitas yang telah terdaftar, dengan klasifikasi yang mencakup berbagai jenis disabilitas, yakni fisik, mental, intelektual, sensorik rungu, sensorik wicara, dan sensorik netra. Adapun klasifikasi kelompok penyandang disabilitas disajikan dalam gambar 1.12.



Gambar 1.12. Persentase Penyandang Disabilitas DPT Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, tercatat sebanyak 128.200 pemilih disabilitas yang tersebar dalam berbagai klasifikasi. Kelompok terbanyak adalah penyandang disabilitas fisik sebanyak 48.870 orang (38,12%), diikuti oleh sensorik rungu sebanyak 26.218 orang (20,45%), dan disabilitas mental

sebanyak 21.933 orang (17,11%). Selanjutnya, terdapat 16.216 orang (12,65%) penyandang sensorik netra, 8.740 orang (6,8%) disabilitas intelektual, dan 6.223 orang (4,85%) penyandang sensorik wicara. Data ini mencerminkan komitmen terhadap pilkada yang inklusif dengan memastikan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya secara setara dan terfasilitasi dengan baik.

5. Pencalonan

Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 merupakan bagian dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara nasional yang dijadwalkan pada 27 November 2024. Proses pencalonan dalam PILKADA ini menjadi salah satu tahapan penting dalam menjaring calon pemimpin daerah yang diharapkan mampu membawa kemajuan bagi masyarakat Jawa Timur.

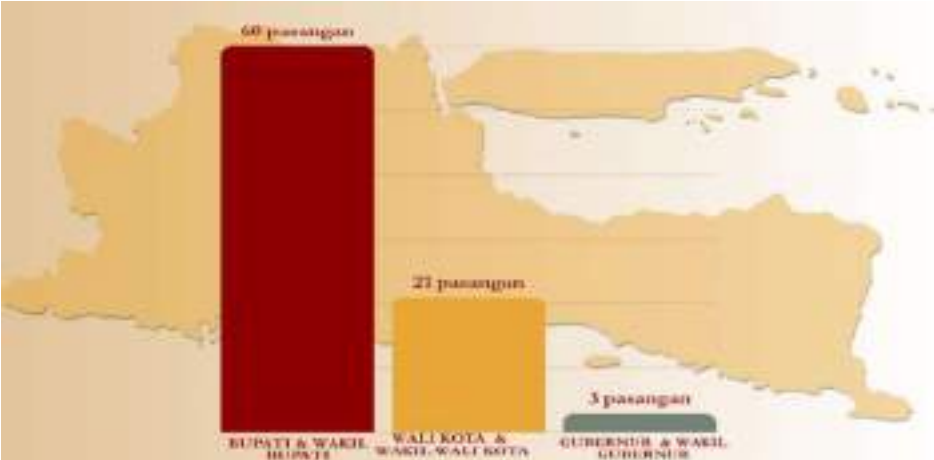
Proses pencalonan diawali dengan pengumpulan dukungan bagi calon perseorangan yang berlangsung dari 5 Mei hingga 19 Agustus 2024, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam seleksi awal calon. Selanjutnya, KPU Jawa Timur membuka pendaftaran pasangan calon pada 24–26 Agustus 2024, yang dilanjutkan dengan masa pendaftaran resmi pada 27–29 Agustus 2024 oleh partai politik atau gabungannya. Verifikasi dan penelitian dokumen persyaratan dilakukan oleh KPU Jawa Timur mulai 27 Agustus hingga 21 September 2024 untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan pencalonan. Penetapan pasangan calon dilakukan pada 22 September 2024, diikuti masa kampanye mulai 25 September hingga 23 November 2024. Tahapan ini berpuncak pada hari pemungutan suara, yakni 27 November 2024, di mana masyarakat Jawa Timur akan menyalurkan hak pilihnya. Rangkaian ini dirancang untuk menjamin proses Pilkada yang demokratis, terbuka, dan berintegritas.

a) Sebaran Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur

Sebaran pasangan calon kepala daerah yang ditetapkan pada Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 mencerminkan partisipasi politik yang merata di seluruh wilayah kabupaten/kota. Setiap daerah memiliki dinamika politik tersendiri yang tercermin dari jumlah dan komposisi pasangan calon yang mendaftar. Adapun secara lengkap disajikan dalam gambar 1.13.

Pada Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, tercatat sebanyak 84 pasangan calon kepala daerah yang ditetapkan dalam

kontestasi politik. Dari jumlah tersebut, terdapat 60 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, 21 pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota, serta 3 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Data ini menunjukkan tingginya antusiasme dan partisipasi politik di tingkat daerah, sekaligus mencerminkan dinamika demokrasi lokal yang aktif di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.



Gambar 1.13. Jumlah Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

b) **Sebaran Demografi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Jenis Kelamin**

Sebaran pasangan calon kepala daerah berdasarkan jenis kelamin pada Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 menjadi indikator penting dalam menilai tingkat partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik daerah. Adapun sebaran demografi pasangan calon kepala daerah berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam gambar 1.14.

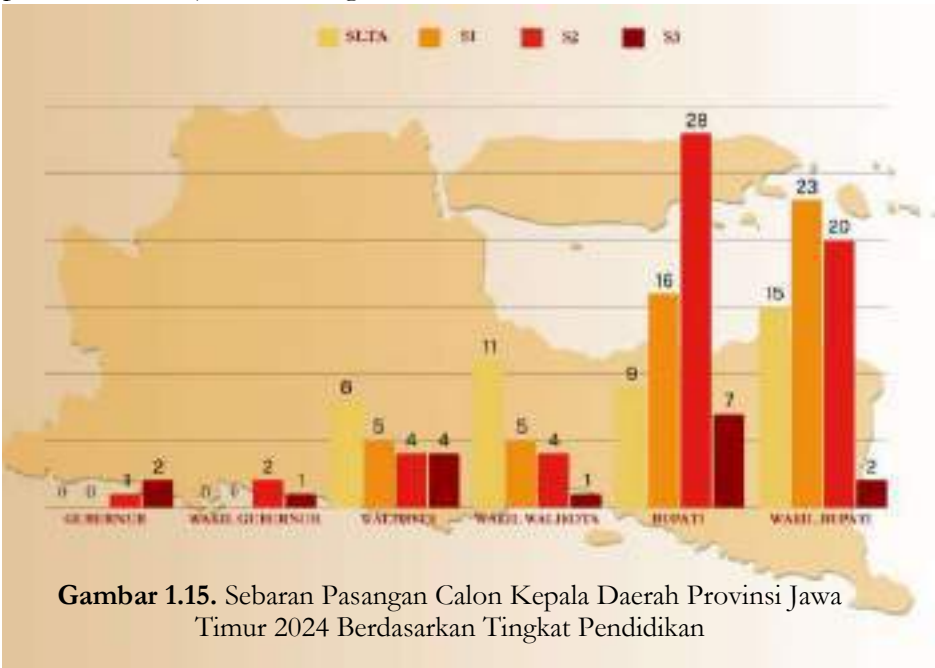


Gambar 1.14. Sebaran Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 1.14 menggambarkan komposisi jenis kelamin dari pasangan calon yang berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Pada tingkat provinsi, terdapat tiga calon gubernur perempuan dan tiga calon wakil gubernur laki-laki. Sementara itu, untuk calon wali kota, sebanyak 15 orang berjenis kelamin laki-laki dan 6 orang perempuan. Pada posisi wakil wali kota, jumlahnya terdiri dari 17 laki-laki dan 4 perempuan. Untuk jabatan bupati, dominasi calon laki-laki juga terlihat jelas, dengan jumlah mencapai 53 orang, sedangkan calon perempuan hanya 7 orang. Pada posisi wakil bupati, tercatat 46 laki-laki dan 14 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kontestasi kepala daerah masih relatif rendah, meskipun sudah mulai menunjukkan partisipasi di berbagai jenjang pencalonan.

c) **Sebaran Demografi Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang berkompetisi dalam kontestasi politik lokal. Adapun sebaran demografi pasangan calon kepala daerah berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam gambar 1.15.



Gambar 1.15 menunjukkan bahwa calon kepala daerah pada Pemilihan Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 didominasi oleh mereka yang berlatar belakang pendidikan tinggi, khususnya lulusan Strata 2 (S2) sebanyak 59 orang, dan Strata 1 (S1) sebanyak 49 orang. Sementara itu, terdapat 43 calon dengan latar pendidikan SLTA, dan 17 calon dengan pendidikan Strata 3 (S3). Jabatan Bupati dan Wakil Bupati menjadi posisi dengan jumlah calon terbanyak, didominasi oleh lulusan S2, diikuti oleh S1. Tren serupa juga terlihat pada posisi Wali kota dan Wakil Wali kota, serta Gubernur dan Wakil Gubernur, meskipun jumlah calonnya lebih sedikit. Data ini mengindikasikan bahwa pendidikan tinggi semakin menjadi modal penting dalam kontestasi politik lokal, meskipun masih terdapat keragaman tingkat pendidikan di kalangan para kandidat.

d) Visi dan Misi Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur

Visi dan misi yang diusung oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 mencerminkan arah dan prioritas pembangunan yang akan mereka bawa jika terpilih memimpin. Setiap pasangan calon menghadirkan gagasan strategis yang menggambarkan komitmen mereka terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Visi dan Misi Pasangan Calon Gubernur - Wakil Gubernur disajikan pada gambar 1.16.



Gambar 1.16. Ringkasan Visi dan Misi Pasangan Calon Kepala Daerah

Perbedaan visi dan misi antar pasangan calon mencerminkan be-ragam pendekatan dalam membangun Jawa Timur ke depan, memberi masyarakat pilihan rasional berdasarkan program kerja yang ditawarkan, sehingga pilkada tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang pertarungan ide dan strategi pembangunan.

6. Sosialisasi

a) Sosialisasi Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur

KPU Provinsi Jawa Timur melaksanakan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2024 melalui berbagai pendekatan yang kreatif dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Media sosialisasi yang digunakan mencakup pengenalan *jingle*, peluncuran maskot, dan kegiatan Kirab Maskot. Selain itu, KPU juga menggelar beragam aktivitas seperti *Goes to Campus*, tatap muka langsung dengan pemilih, pertunjukan seni budaya, pembentukan media *center*, hingga edukasi pemilih secara tidak langsung. Strategi ini dirancang untuk meningkat-kan kesadaran publik dan mendorong partisipasi aktif dalam seluruh tahapan pemilihan.



Gambar 1.17. Maskot PILKADA Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Penggunaan maskot dalam sebuah kegiatan besar yang melibatkan partisipasi publik secara luas, seperti PILKADA, memiliki peran strategis dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat secara lebih dekat dan efektif. Maskot berfungsi sebagai simbol visual yang merepresentasikan nilai, semangat, dan karakter dari perhelatan yang diselenggarakan. Dalam konteks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, diperkenalkan maskot bernama Jalih, singkatan dari "Jatim Memilih". Jalih melambangkan harapan masyarakat terhadap proses demokrasi yang

jujur, adil, dan transparan. Jalih digambarkan sebagai seekor burung jantan yang membawa paku dan surat suara, serta mengenakan pakaian adat Jawa Timur. Hal ini mencerminkan bahwa PILKADA merupakan bagian dari budaya masyarakat yang harus dijalankan dengan menjunjung tinggi etika dan martabat. Pakaian tradisional yang dikenakan juga menjadi simbol bahwa pemimpin ideal adalah sosok yang membumi dan dekat dengan rakyat.

Selain peluncuran maskot, KPU Jawa Timur juga menyelenggarakan berbagai kegiatan pendukung seperti jalan sehat, deklarasi kampanye damai, lomba jurnalistik foto dan video, serta penyebaran alat peraga sosialisasi (APS) dan bahan sosialisasi (BS). Seluruh rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam memilih pemimpin daerahnya pada 27 November 2024.

b) Penggunaan Media Pada Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur

Media memegang peranan penting dalam mendukung suksesnya Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, khususnya dalam hal penyebaran informasi dan peningkatan partisipasi pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur secara aktif menjalin kerja sama dengan berbagai media melalui kegiatan seperti media *gathering*, salah satunya bertajuk "Sinergi Jurnalis dalam Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024". Kegiatan ini bertujuan mengajak insan pers untuk turut serta menyampaikan informasi tahapan pilkada secara luas dan tepat sasaran.

Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur juga berperan dalam mendorong lembaga penyiaran publik (LPP) dan lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) agar bersinergi dengan KPU dalam memproduksi program siaran bertema PILKADA. Inisiatif ini dimaksudkan untuk menjamin penyiaran yang bersifat netral, edukatif, dan informatif, sekaligus mencegah penyebaran informasi keliru atau menyesatkan kepada masyarakat. Kolaborasi menciptakan ruang informasi publik yang sehat dan mendukung terciptanya pilkada yang berintegritas.

7. Kampanye

Menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang akan digelar serentak pada 27 November 2024, masa kampanye menjadi salah satu momen krusial dalam tahapan Pilkada. Kampanye yang berlangsung mulai 25 September hingga 23 November 2024 dimanfaatkan

secara maksimal oleh para pasangan calon untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan memaparkan gagasan serta program kerja mereka.

a) Fasilitas KPU dalam Penyelenggaraan Kampanye

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan berbagai fasilitas kampanye bagi pasangan calon (Paslon) guna memastikan proses demokrasi yang adil dan transparan. KPU memfasilitasi pemasangan Alat Peraga kampanye (APK) seperti baliho, spanduk, dan umbul-umbul di lokasi yang telah ditentukan. Pemasangan APK dilakukan di titik-titik yang telah ditetapkan oleh KPU, dengan memperhatikan aturan seperti larangan pemasangan di tempat ibadah, institusi pendidikan, dan kantor pemerintahan.

KPU juga menyediakan Bahan Kampanye (BK) yang mencakup selebaran, brosur, pamflet, dan poster. Setiap Paslon menerima jumlah yang sama untuk memastikan kesetaraan dalam penyebaran informasi. Guna meningkatkan jangkauan informasi, KPU memfasilitasi kampanye di media massa.

Penyelenggaraan debat publik antar paslon juga difasilitasi oleh KPU untuk wadah penyampaian visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat. Kegiatan ini disiarkan melalui berbagai media untuk memastikan aksesibilitas informasi bagi seluruh pemilih.

Kampanye di Pilkada Jawa Timur 2024 berjalan dinamis dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Setiap pasangan calon mengusung tema dan isu yang mencerminkan kebutuhan serta potensi wilayah Jawa Timur. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penanggulangan kemiskinan serta penguatan ekonomi kerakyatan menjadi isu-isu sentral yang diangkat dalam kampanye.

Para kandidat melakukan kampanye secara langsung melalui pertemuan terbatas, dialog publik, kunjungan ke desa-desa, dan kampanye akbar. Selain itu, pemanfaatan media sosial dan platform digital menjadi instrumen penting dalam menyampaikan pesan politik mereka secara lebih luas dan cepat, terutama kepada pemilih muda.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur juga menekankan pentingnya kampanye yang bersih, damai, dan beretika. Para calon diimbau untuk menghindari praktik kampanye negatif, seperti *boaks*, ujaran kebencian, dan politik uang. Sebaliknya, kampanye harus menjadi ajang pendidikan politik, di mana masyarakat diberi ruang untuk memahami profil, visi, dan program masing-masing calon.

Dengan kampanye yang berlangsung secara tertib dan substansial, diharapkan masyarakat Jawa Timur dapat menggunakan hak pilihnya secara

cerdas dan bertanggung jawab. Pilkada ini bukan hanya memilih pemimpin lima tahun ke depan, tetapi juga menentukan arah pembangunan Jawa Timur di masa mendatang.

b) Pemanfaatan *Platform* Media Sosial dalam Penyelenggaraan Kampanye

Di era digital, pemanfaatan media sosial menjadi salah satu strategi utama dalam kampanye politik, termasuk pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur Tahun 2024. Setiap pasangan calon memaksimalkan kehadiran mereka di berbagai platform media sosial untuk memperluas jangkauan komunikasi politik dan menyampaikan program kerja secara lebih cepat dan interaktif, khususnya kepada pemilih muda dan pemilih yang lahir di era digital,

Jumlah akun media sosial yang dimiliki oleh pasangan calon beragam, dengan mayoritas aktif di platform populer seperti Instagram, Facebook, Twitter (X), TikTok, dan YouTube. Media sosial digunakan untuk membagikan konten kampanye, agenda kegiatan, pernyataan resmi, hingga video pendek yang menampilkan visi-misi secara menarik dan mudah dipahami.

Pemanfaatan media sosial tidak hanya memperkuat *branding* calon, tetapi juga membuka ruang dialog dua arah antara kandidat dan masyarakat. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pasangan calon tidak hanya hadir secara fisik di lapangan, tetapi juga aktif membangun komunikasi digital sebagai bagian dari strategi kampanye yang adaptif dan modern.

8. Logistik

a) Metode Pengadaan Logistik

Logistik PILKADA dipenuhi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan berdasarkan peraturan logistik yang berlaku. Mekanisme pengadaan logistik Pilkada 2024 mengacu kepada mekanisme pengadaan barang/jasa yaitu melalui Katalog Sektoral (E-Katalog Sektoral). Pada tahapan ini, pelaksanaan pengadaan logistik KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota difasilitasi serta disupervisi oleh KPU Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

b) Jumlah Pengadaan Logistik

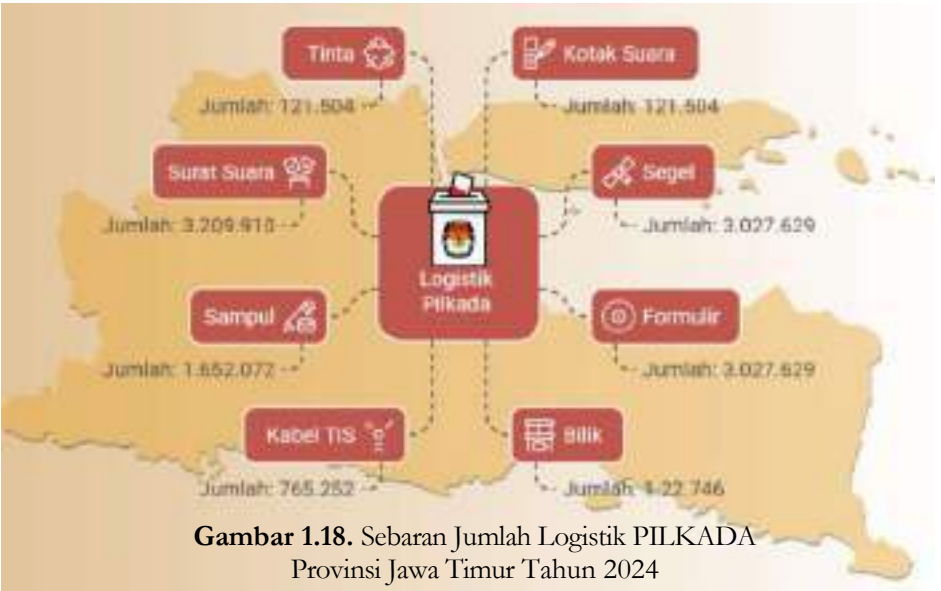
Rincian jumlah pengadaan logistik disesuaikan dengan jumlah TPS, DPT, dan perangkat penyelenggara, serta memperhatikan potensi kebutuhan

tambahan di wilayah tertentu. Adapun jumlah sebaran logistik pada Pilkada Serentak (PILKADA) di Provinsi Jawa Timur secara lengkap disajikan pada gambar 1.18.

Logistik merupakan komponen penting dalam memastikan proses pemilihan berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan standar pilkada yang berlaku. Dari gambar 1.18 dapat kita lihat bahwa Surat Suara memiliki jumlah terbanyak yaitu lebih dari 3,2 Juta lembar atau sekitar 27% dari total logistik yang dipersiapkan.

Segel dan Set Formulir masing-masing berjumlah lebih dari 3 juta. Segel digunakan untuk menjamin keamanan dan keaslian dokumen serta kotak suara, sedangkan set formulir digunakan untuk pencatatan dan pelaporan hasil pemungutan suara.

Sampul disediakan sebanyak 1,6 Juta, berfungsi untuk mengemas dokumen penting dalam proses pemungutan dan perhitungan suara. Kemudian ada Kabel TIS sebanyak lebih dari 765 ribu, yang digunakan sebagai bagian dari sistem keamanan logistik. Serta ada Bilik suara, tinta, dan kota suara yang masing-masing berjumlah lebih dari 122 ribu, 121 ribu, dan 75 ribu.



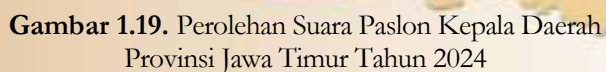
Gambar 1.18. Sebaran Jumlah Logistik PILKADA Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

9. Hasil Pilkada Serentak

Pilkada Serentak Tahun 2024 menjadi momentum penting dalam perjalanan demokrasi lokal di Provinsi Jawa Timur. Dengan jumlah pemilih yang sangat besar dan wilayah yang luas, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi strategis dalam peta politik nasional. Pemilihan Gubernur dan

Proses pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 berjalan secara umum dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Masyarakat Jawa Timur sangat antusias mengikuti agenda lima tahunan ini mencerminkan kesadaran politik yang tinggi dan kepercayaan terhadap proses demokrasi.

Hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 disajikan pada gambar 1.19. Hasil yang disajikan mencakup jumlah suara sah yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon, persentase perolehan suara, serta sebaran suara berdasarkan wilayah kabupaten/kota seluruh Provinsi Jawa Timur secara total.

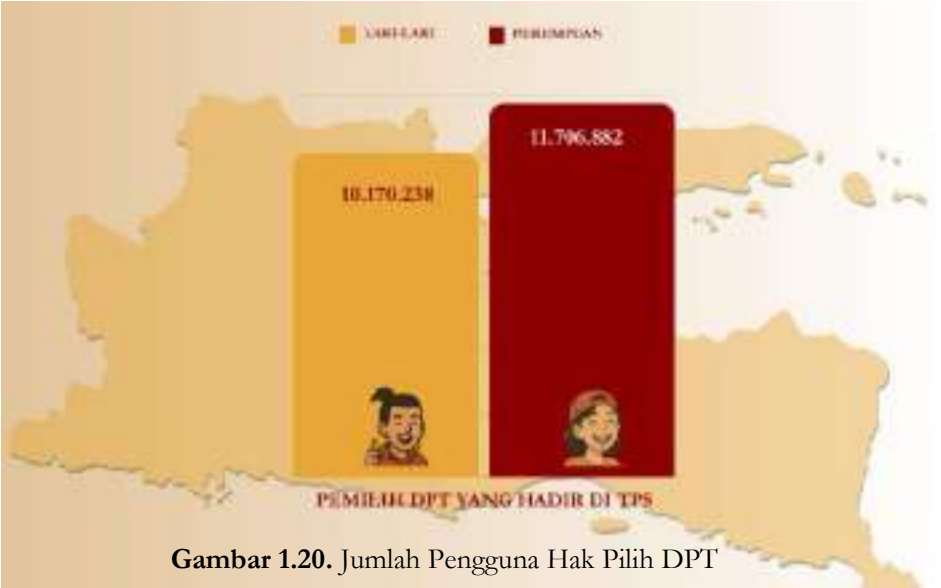


24 | Pilkada Jatim Serentak 2024

suara 12.192.165, sedangkan pasangan calon Dr. (H.C.) Ir. Tri Rismaharini, M.T dan Zahrul Azhar Asumta, S.IP., M.Kes sebesar 32,52% dengan total suara 6.743.095. Serta yang terakhir pasangan calon Hj. Luluk Nur Ihamidah, M.Si. dan H. Lukmanul Khakim, M.Si. sebesar 8,67% dengan total suara sebesar 1.797.332.

b) Penggunaan Hak Pilih (DPT, DPTb, dan DPK)

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 berdasarkan tiga kategori utama pemilih, yaitu DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), dan DPK (Daftar Pemilih Khusus). DPT mencakup pemilih yang telah terdaftar secara resmi dan memilih di TPS sesuai domisili. Sementara itu, DPTb mencakup pemilih yang memilih di TPS berbeda karena alasan sah seperti tugas atau kondisi kesehatan, dan DPK meliputi pemilih yang tidak terdaftar namun tetap memenuhi syarat dengan menunjukkan KTP-el. Adapun penyajian penggunaan hak pilih secara lengkap disajikan pada gambar 1.20 hingga gambar 1.22.

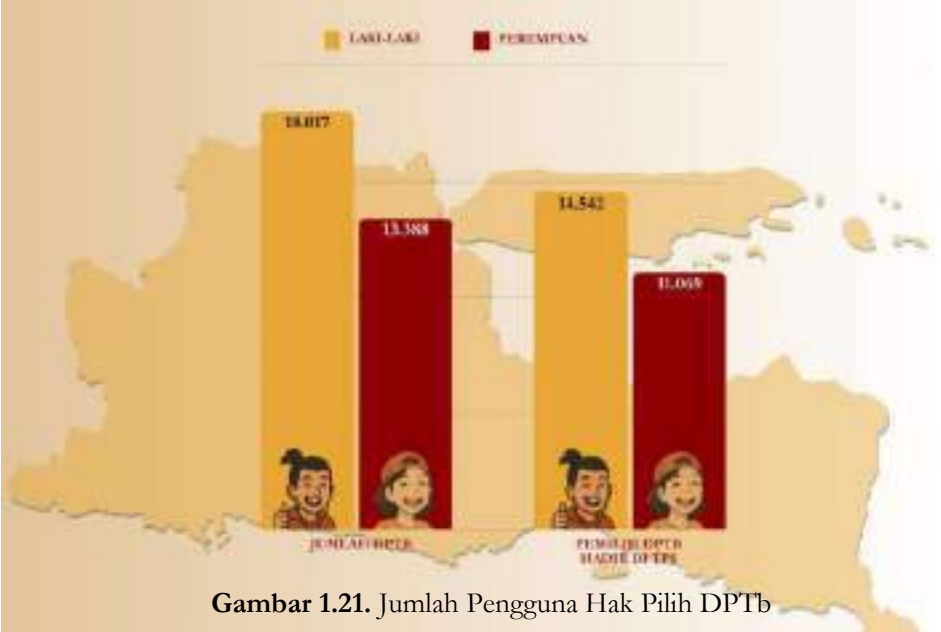


Gambar 1.20. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT

Gambar 1.20 menggambarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdiri dari dua kategori utama, yaitu Pengguna Terdaftar dan Pengguna Hak Pilih, serta dibedakan berdasarkan jenis kelamin: laki-laki (kuning) dan perempuan (merah). Dari sisi jumlah pemilih terdaftar, terlihat bahwa pemilih perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki. Pemilih

perempuan sebanyak lebih dari 15,8 juta jiwa sedangkan laki-laki sebanyak 15,4 juta jiwa.

Ketika melihat data pengguna hak pilih, yaitu mereka yang benar-benar menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara, terlihat bahwa partisipasi pemilih perempuan tetap lebih tinggi. Dengan total lebih dari 11,7 juta pemilih dari perempuan serta lebih dari 10,1 juta pemilih laki-laki.

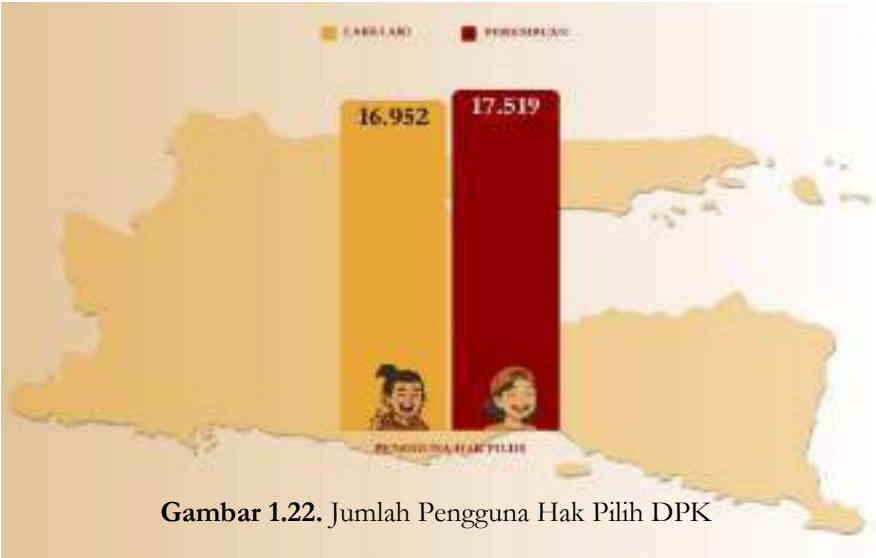


Gambar 1.21. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb

Gambar 1.21 menggambarkan data Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang terdiri dari dua kategori utama, yaitu Pengguna Terdaftar dan Pengguna Hak Pilih, serta dibedakan berdasarkan jenis kelamin: laki-laki (kuning) dan perempuan (merah).

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 116, DPTb adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT suatu TPS tetapi tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS asal karena alasan tertentu sesuai ketentuan. Untuk menggunakan hak pilih di TPS tujuan, pemilih wajib melapor ke PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota dengan menunjukkan KTP-el atau KK, serta melampirkan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar dari TPS asal, paling lambat tujuh hari sebelum hari pemungutan suara. Dari sisi jumlah pemilih terdaftar, terlihat bahwa pemilih laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan, yaitu sebanyak 18.017 jiwa untuk laki-laki dan 13.388 jiwa untuk perempuan.

Ketika melihat data pengguna hak pilih, yaitu mereka yang benar-benar menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara, terlihat bahwa partisipasi pemilih laki-laki tetap lebih tinggi dengan total 14.542 pemilih dari laki-laki serta 11.069 pemilih perempuan.



Gambar 1.22. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK

Gambar 1.22 menggambarkan data Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang hanya terdiri dari satu kategori utama, yaitu Pengguna Hak Pilih, serta dibedakan berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki (kuning) dan perempuan (merah). Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, DPK adalah pemilih yang memiliki KTP-el dan berdomisili sesuai wilayah TPS, namun belum terdaftar dalam DPT maupun DPTb. Pemilih dalam DPK tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, dengan syarat datang ke TPS satu jam sebelum pemungutan suara berakhir. Data pengguna hak pilih menunjukkan bahwa partisipasi pemilih perempuan lebih tinggi, dengan total 17.519 pemilih laki-laki dan 16.952 pemilih perempuan.

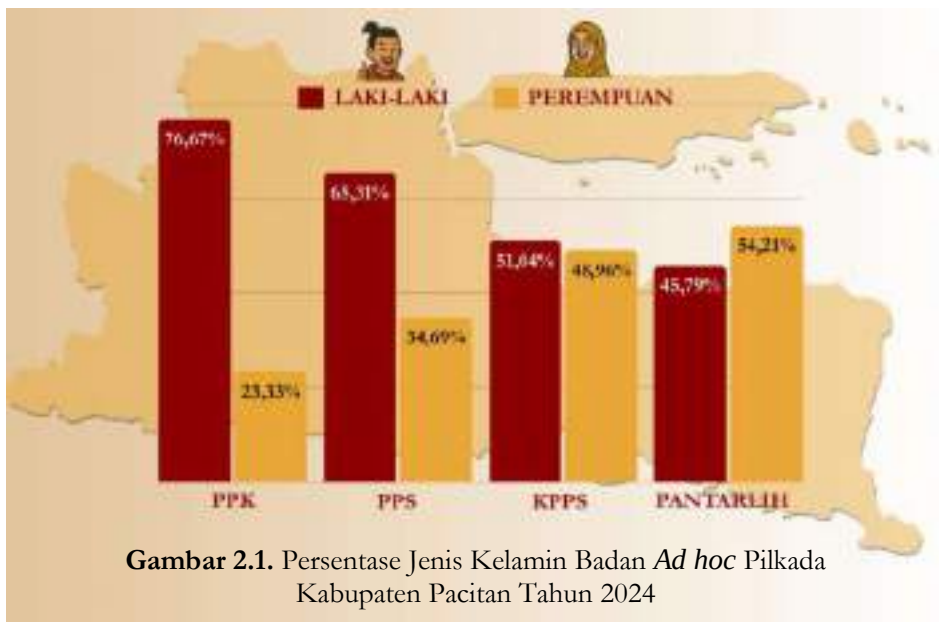
KABUPATEN PACITAN

1. Profil Singkat

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu daerah di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini dikenal sebagai “Kota Seribu Goa” karena memiliki banyak destinasi wisata alam, terutama goa-goa karst yang unik dan pantai-pantai indah di pesisir selatan Pulau Jawa. Secara administratif, Kabupaten Pacitan terdiri dari 12 kecamatan dan 172 desa/kelurahan, dengan luas wilayah sekitar 1.389 km². Dengan jumlah penduduk lebih dari 600.000 jiwa. Komposisi demografis Pacitan didominasi oleh masyarakat agraris, dengan sektor pertanian dan perikanan sebagai penopang utama ekonomi daerah.

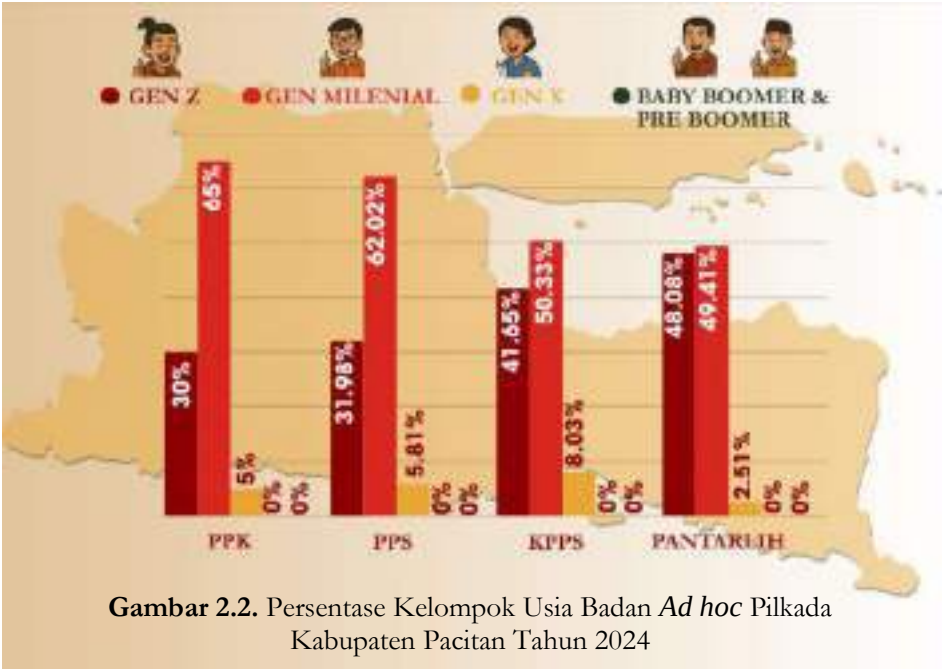
2. Badan *Ad hoc*

Pada penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Pacitan, telah dibentuk Badan *ad hoc* yang terdiri dari berbagai elemen penyelenggara pilkada di tingkat lokal. Jumlah personel yang terlibat meliputi 60 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 516 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), 7.028 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan 1.876 orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Setiap unsur ini tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan desa/kelurahan di Pacitan guna memastikan proses pilkada berjalan secara efektif, efisien, dan partisipatif. Adapun sebaran demografi berdasarkan jenis kelamin disajikan pada gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 menunjukkan keterwakilan gender yang beragam di setiap jenjang penyelenggara. Di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), terdapat 46 laki-laki (76,67%) dan 14 perempuan (23,33%). Pada Panitia Pemungutan Suara (PPS), jumlah laki-laki mencapai 337 orang (65,31%), sementara perempuan sebanyak 179 orang (34,69%). Di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), komposisinya relatif seimbang, yaitu 3.587 laki-laki (51,04%) dan 3.441 perempuan (48,96%). Sementara itu, pada tingkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), perempuan mendominasi dengan 1.017 orang (54,21%) dibandingkan 859 laki-laki (45,79%). Komposisi ini mencerminkan upaya inklusivitas dan partisipasi yang merata antara laki-laki dan perempuan dalam penyelenggaraan Pilkada di Pacitan.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Pacitan Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 2.2 berikut.

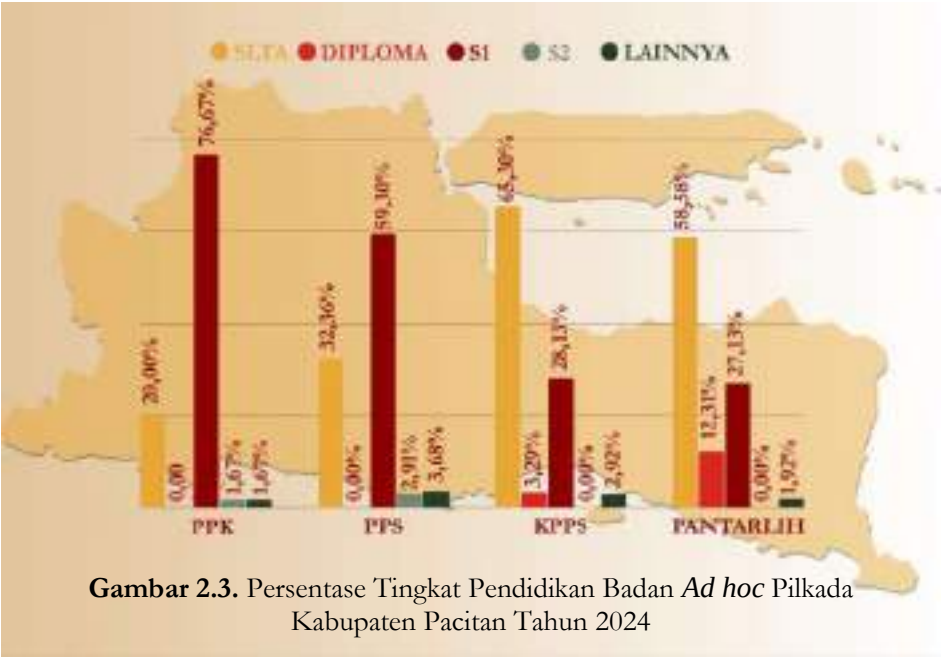


Gambar 2.2. Persentase Kelompok Usia Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Pacitan Tahun 2024

Distribusi kelompok usia badan *ad hoc* Pilkada 2024 Kabupaten Pacitan pada gambar 2.2 menunjukkan dominasi usia produktif di semua jenjang penyelenggara. Mayoritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berasal dari kelompok usia 28–43 tahun, yaitu sebanyak 39 orang (65,00%), disusul oleh usia 18–27 tahun sebanyak 18 orang (30,00%), dan usia 44–59 tahun sebanyak 3 orang (5,00%). Pola serupa juga terlihat pada Panitia Pemungutan Suara (PPS), di mana usia 28–43 tahun mendominasi dengan 320 orang (62,02%), diikuti oleh 165 orang (31,98%) berusia 18–27 tahun, dan 30 orang (5,81%) berusia 44–59 tahun. Pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kelompok usia 28–43 tahun merupakan yang terbanyak, yaitu 3.537 orang (50,33%), diikuti oleh 2.924 orang (41,61%) usia 18–27 tahun, dan 564 orang (8,03%) usia 44–59 tahun. Sementara itu, di tingkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), mayoritas berasal dari usia 28–43 tahun sebanyak 927 orang (49,41%), diikuti usia 18–27 tahun sebanyak 902 orang (48,08%), dan sisanya 47 orang (2,51%) dari kelompok usia 44–59 tahun. Tidak terdapat anggota dari kelompok usia 60 tahun ke atas maupun usia 17 tahun, kecuali 3 orang KPPS (0,04%) berusia 17 tahun.

Data ini menunjukkan bahwa pelibatan Badan *ad hoc* didominasi oleh usia produktif muda dan dewasa. Selanjutnya, sebaran demografi Badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Pacitan Tahun 2024 berdasarkan tingkat

pendidikan disajikan pada gambar 2.3 berikut. Gambar ini menggambarkan proporsi tingkat pendidikan terakhir anggota PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih, yang mencerminkan latar belakang pendidikan penyelenggara pilkada di tingkat lokal.



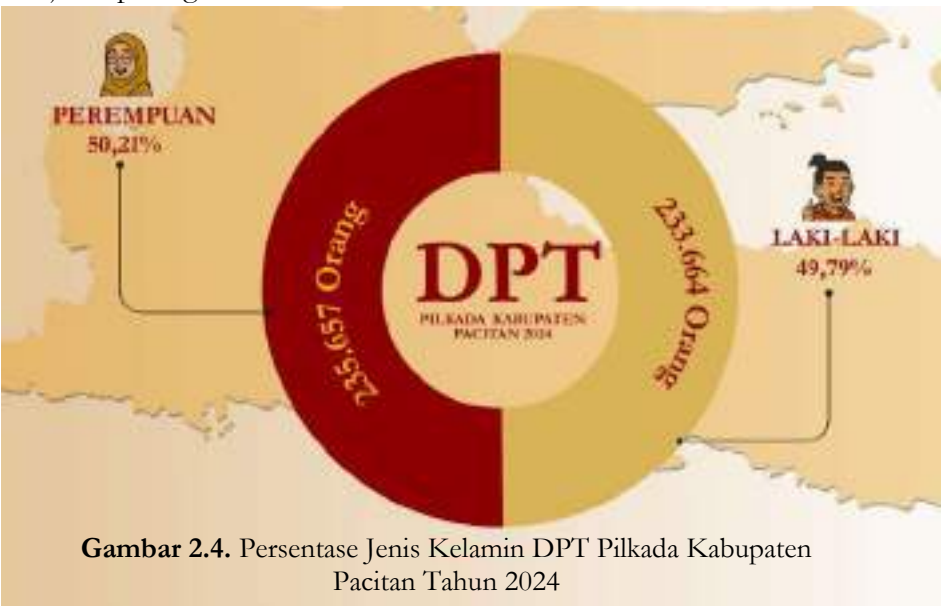
Tingkat pendidikan anggota Badan *ad hoc* Pilkada 2024 Ka-bupaten Pacitan pada gambar 2.3 menunjukkan keragaman di setiap jenjang penyelenggara. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), mayoritas berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 46 orang (76,67%), diikuti oleh lulusan SLTA sebanyak 12 orang (20,00%), serta masing-masing 1 orang (1,67%) berlatar belakang pendidikan S2 dan kategori lainnya. Di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), dominasi juga dipegang oleh lulusan S1 sebanyak 306 orang (59,30%), diikuti oleh lulusan SLTA sebanyak 167 orang (32,36%), kemudian S2 (2,91%), dan kategori lainnya (3,68%). Untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mayoritas berasal dari lulusan SLTA sebanyak 4.589 orang (65,30%), disusul lulusan S1 sebanyak 1.977 orang (28,13%), Diploma (3,29%), dan lainnya (2,92%). Sementara itu, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) juga didominasi lulusan SLTA sebanyak 1.099 orang (58,58%), diikuti lulusan S1 sebanyak 509 orang (27,13%), Diploma sebanyak 231 orang (12,31%), dan sisanya berasal dari kategori lainnya (1,92%) serta hanya 1 orang (0,05%) yang berpendidikan S2. Komposisi ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan menengah masih

mendominasi di lapangan, keterlibatan lulusan perguruan tinggi juga cukup tinggi, terutama di tingkat PPK dan PPS.

Dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Pacitan, data menunjukkan bahwa belum terdapat keterlibatan penyandang disabilitas dalam komposisi Badan *ad hoc*, baik pada tingkat PPK, PPS, KPPS, maupun Pantarlih. Ke depan, keterlibatan penyandang disabilitas perlu lebih didorong agar pelaksanaan pilkada benar-benar mencerminkan prinsip partisipasi tanpa diskriminasi.

3. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Pacitan dilakukan secara bertahap guna memastikan validitas daftar pemilih. Proses dimulai dengan penetapan Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi (DPHS) sebanyak 476.752 pemilih, yang kemudian disaring melalui pencocokan dan penelitian (coklit) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 470.276 pemilih. Setelah melalui proses perbaikan, ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 469.321 pemilih. Proses ini mencerminkan proses validasi yang ketat demi menjamin hak pilih warga secara sah dan akurat. Adapun sebaran demografi DPT Pilkada Kabupaten Pacitan berdasarkan jenis kelamin disajikan pada gambar 2.4 berikut.



Berdasarkan gambar 2.4, komposisi DPT Kabupaten Pacitan Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan proporsi yang hampir seimbang.

Pemilih laki-laki tercatat sebanyak 233.664 orang (49,79%), sementara pemilih perempuan sedikit lebih banyak, yaitu 235.657 orang (50,21%) dari total 469.321 pemilih. Data ini mencerminkan partisipasi yang merata antara laki-laki dan perempuan dalam Pilkada di Kabupaten Pacitan.

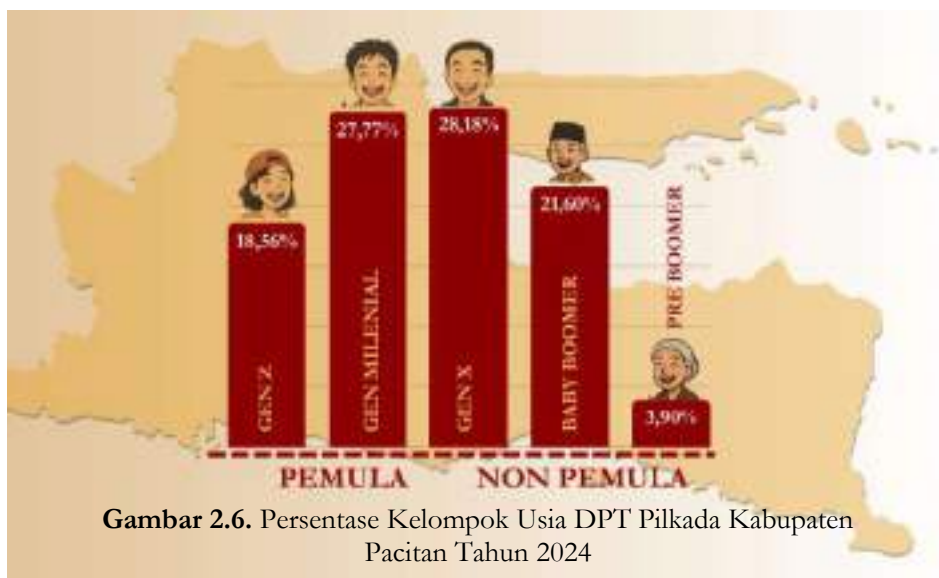
Pemetaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut karakteristik pemilih dibagi menjadi dua, yaitu pemilih pemula. Adapun secara lengkap disajikan dalam gambar 2.5.



Gambar 2.5. Persentase Status Pemilih DPT Pilkada Kabupaten Pacitan Tahun 2024

Sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 Kabupaten Pacitan berdasarkan status pemilih menunjukkan bahwa dari total 469.321 pemilih, terdapat 5.919 orang (1,26%) yang tergolong sebagai pemilih pemula, terdiri atas 3.104 laki-laki (52,44%) dan 2.815 perempuan (47,56%). Data ini mencerminkan bahwa partisipasi pemilih dalam Pilkada Pacitan 2024 didominasi oleh kelompok pemilih yang telah memiliki pengalaman memilih sebelumnya, namun tetap menunjukkan adanya partisipasi yang cukup signifikan dari pemilih muda yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya.

Sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pacitan pada Pilkada 2024 berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran mengenai komposisi usia pemilih yang akan menggunakan hak suaranya. Informasi ini penting untuk memahami karakteristik demografi pemilih serta menjadi dasar dalam menyusun strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang tepat sasaran. Sebaran lengkap pemilih berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 2.6.



Sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 Kabupaten Pacitan pada gambar 2.6 didominasi oleh pemilih usia produktif. Kelompok usia 44–59 tahun merupakan yang terbanyak, dengan jumlah 132.262 orang (28,18%), disusul oleh usia 28–43 tahun sebanyak 130.319 orang (27,77%). Selanjutnya, pemilih berusia 60–78 tahun tercatat sebanyak 101.355 orang (21,60%), sementara kelompok usia 18–27 tahun mencapai 79.486 orang (16,94%). Pemilih pemula yang berusia 17 tahun berjumlah 7.602 orang (1,62%), dan yang berusia di atas 79 tahun tercatat sebanyak 18.297 orang (3,90%). Mayoritas pemilih berasal dari usia dewasa dan lansia aktif, dengan kehadiran pemilih muda yang tetap signifikan, mencerminkan keberagaman usia dalam partisipasi pilkada di Kabupaten Pacitan.

4. Pencalonan

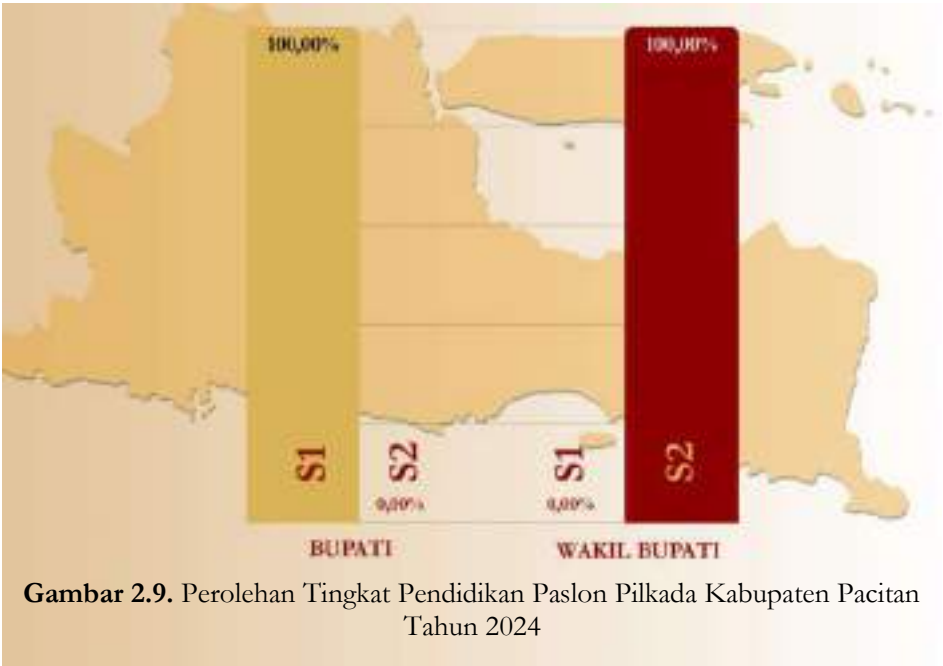
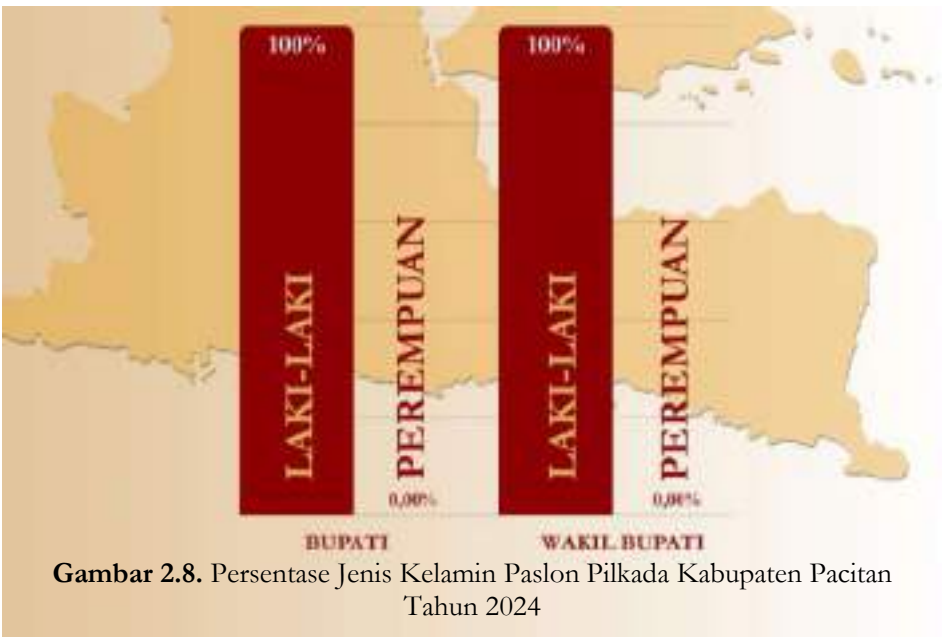
Tahapan pencalonan dalam Pilkada Kabupaten Pacitan Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan jadwal serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh proses, mulai dari pendaftaran pasangan calon, pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan, penetapan pasangan calon, hingga pengundian nomor urut, telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh KPU Kabupaten Pacitan. Berdasarkan hasil penetapan resmi, terdapat dua pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk berkompetisi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan. Informasi mengenai pasangan calon dan partai pengusung disajikan

pada gambar 2.7, sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.



Berdasarkan gambar 2.7, masing-masing pasangan diusung oleh koalisi partai politik yang berbeda yang mencerminkan keberagaman dukungan politik serta dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang di wilayah Pacitan. Seluruh pasangan calon telah melalui proses klarifikasi dan verifikasi administrasi yang ketat, serta dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan, baik dari jalur partai politik maupun dukungan masyarakat. Penetapan ini menjadi titik awal bagi pasangan calon untuk melaksanakan kampanye secara adil, damai, dan demokratis hingga hari pemungutan suara.

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan disajikan pada gambar 2.8 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan disajikan pada gambar 2.9.



Sebaran jenis kelamin pasangan calon pada gambar 2.8, menunjukkan bahwa 100% calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berjenis kelamin laki-laki. Meskipun secara regulasi tidak terdapat pembatasan gender, komposisi ini mencerminkan bahwa representasi perempuan dalam kontestasi politik

lokal di Kabupaten Pacitan belum terlihat dalam tahapan pencalonan tahun 2024. Sehingga, menjadi catatan penting dalam upaya mendorong partisipasi politik perempuan yang lebih inklusif pada pemilihan umum di masa mendatang.

Tingkat pendidikan pasangan calon Pilkada Kabupaten Pacitan Tahun 2024 yang terdistribusi pada gambar 2.9, menunjukkan bahwa seluruh calon Bupati berpendidikan Sarjana (S1) (100,00%), sementara seluruh calon Wakil Bupati berpendidikan Pascasarjana (S2) (100,00%). Komposisi ini mencerminkan bahwa semua pasangan calon memiliki rekam jejak pendidikan yang kuat, serta menunjukkan distribusi jenjang pendidikan yang melengkapi satu sama lain antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam setiap pasangan.

Visi dan misi yang diusung oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati mencerminkan arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan jika terpilih memimpin. Setiap pasangan calon menghadirkan gagasan strategis yang menggambarkan komitmen mereka terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor yang disajikan pada gambar 2.10.

Renny Wahidana, S.E.P.
Ed. Oka (Pacar) DOKI Widyia Saputra (Head), M.K.M.

VISION:
"Mewujudkan masyarakat Pacitan yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia."

Mission:
1. Meningkatkan kemandirian desa melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Izzatun Nur Hayati, S.S.
Gugah Yumartah, S.Sos, M.H.P.

VISION:
"Pacitan Semakin Sejahtera dan Bahagia" dengan slogan "Melanjutkan yang Baik, Memperbaiki yang Kurang."

Mission:
1. Pemberantasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
3. Penguatan partisipasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
4. Reformasi birokrasi untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Gambar 2.10. Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kabupaten Pacitan Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

Sosialisasi merupakan tahapan penting dalam rangka meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Pacitan. KPU Kabupaten Pacitan secara aktif melaksanakan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media massa dan digital. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mengawali peluncuran resmi maskot Pilkada Bupati (Pilbup) 2024 dengan menggelar kirab maskot. Acara ini mengusung tema "Pilkada Serentak sebagai Sarana Integrasi Keberagaman Budaya di Jawa Timur", dengan tagline "Gumregah Jumangkah" yang berarti "Bangkit dan Melangkah". Peluncuran tersebut dilaksanakan pada Rabu (24/7/2024), sekaligus memperkenalkan maskot resmi Pilkada Pacitan, Sinampurno, beserta *jingle* dan *tagline* KPU Pacitan.



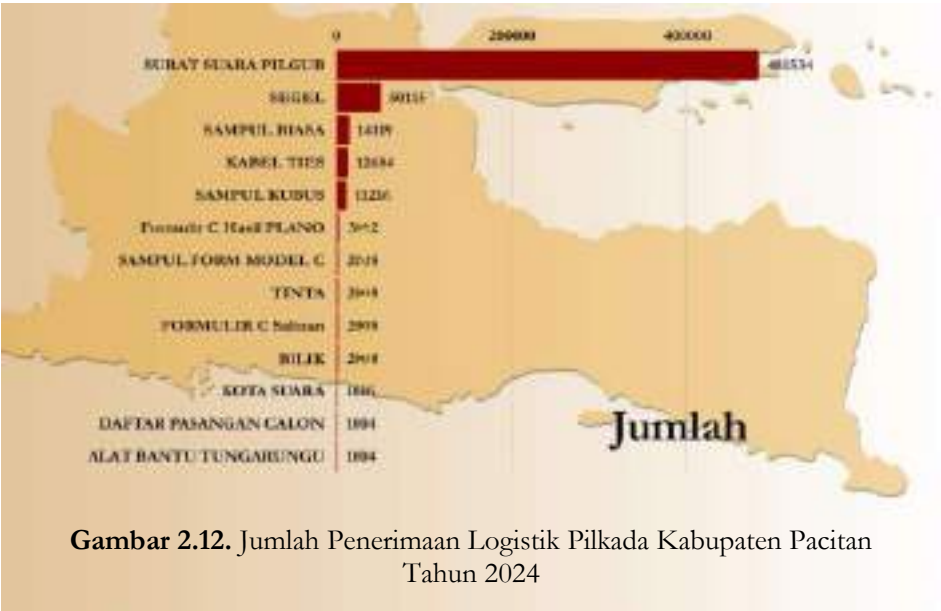
Gambar 2.11. Maskot Pilkada Kabupaten Pacitan Tahun 2024

Sinampurno bukan sekadar maskot visual, tetapi memiliki makna simbolis yang mendalam. Dalam tradisi lokal, Sinampurno dikenal sebagai tokoh yang mampu mengusir wabah, melambangkan harapan akan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Sinampurno sebagai maskot Pilkada mencerminkan semangat untuk menciptakan pemilihan yang sehat, damai, dan penuh kegembiraan. Peluncuran maskot ini menjadi bagian dari upaya

KPU Pacitan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024. Acara peluncuran diwarnai dengan berbagai pertunjukan seni budaya lokal seperti tari gambyong, reog, dan kesenian ronthek, serta kirab maskot yang melibatkan masyarakat luas. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan proses demokrasi kepada masyarakat melalui pendekatan budaya yang familiar dan menyenangkan. Dengan mengangkat Sinampurno sebagai maskot, KPU Pacitan berharap dapat menyampaikan pesan bahwa Pilkada adalah pesta demokrasi yang harus dirayakan dengan semangat kebersamaan, keceriaan, dan tanggung jawab bersama untuk masa depan Kabupaten Pacitan yang lebih baik.

6. Logistik

KPU Kabupaten Pacitan telah menerima berbagai kebutuhan logistik untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 secara optimal. Beberapa komponen penting yang diterima meliputi 1.004 alat bantu disabilitas, 1.016 kotak suara, 2.008 bilik suara, serta perlengkapan administrasi seperti formulir, tinta, dan sampul. Selain itu, diterima pula 50.115 segel, 12.684 kabel ties, dan 481.534 surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Seluruh logistik ini memastikan kesiapan teknis di TPS dan mendukung terselenggaranya pilkada yang inklusif, tertib, dan terpercaya. Adapun distribusi logistik secara lengkap disajikan pada gambar 2.12.



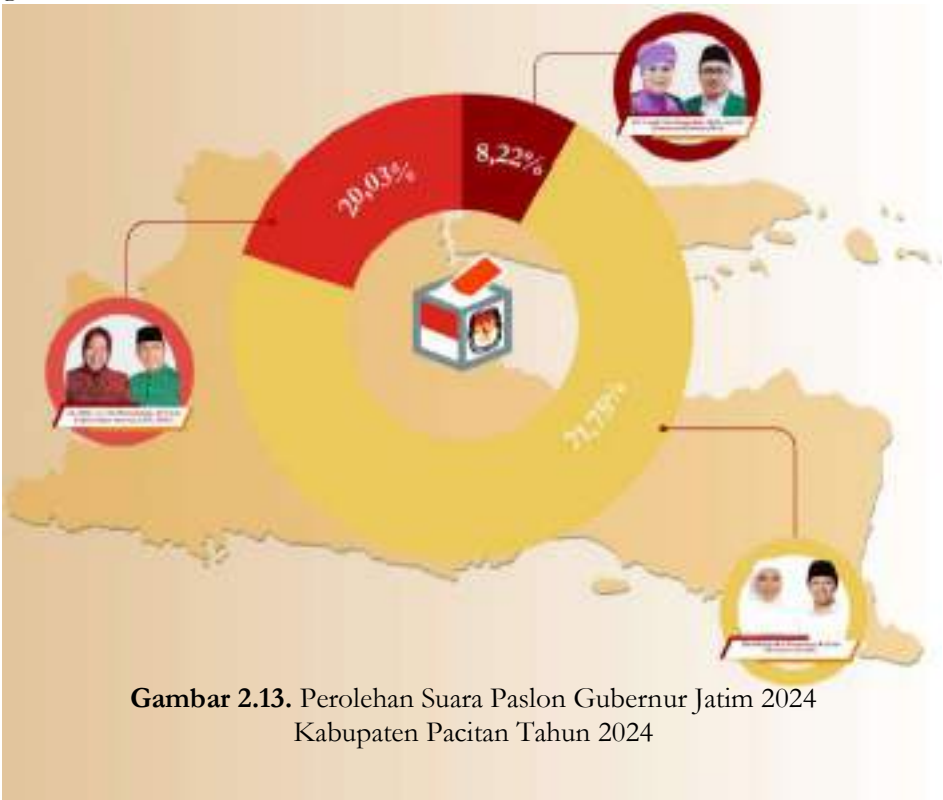
Gambar 2.12. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kabupaten Pacitan Tahun 2024

Untuk mendukung kelancaran pendistribusian logistik Pemilihan Tahun

2024 di Kabupaten Pacitan, KPU Provinsi Jawa Timur memanfaatkan mobil truk sebagai moda transportasi utama hingga ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebanyak 26 unit truk digunakan untuk pengiriman logistik ke tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 24 unit untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan 172 unit truk dikerahkan untuk menjangkau seluruh TPS di wilayah Pacitan. Pemanfaatan moda transportasi ini menunjukkan kesiapan KPU dalam memastikan logistik pilkada terdistribusi secara tepat waktu dan merata ke seluruh wilayah kabupaten.

7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara di Kabupaten Pacitan disajikan pada gambar 2.13.



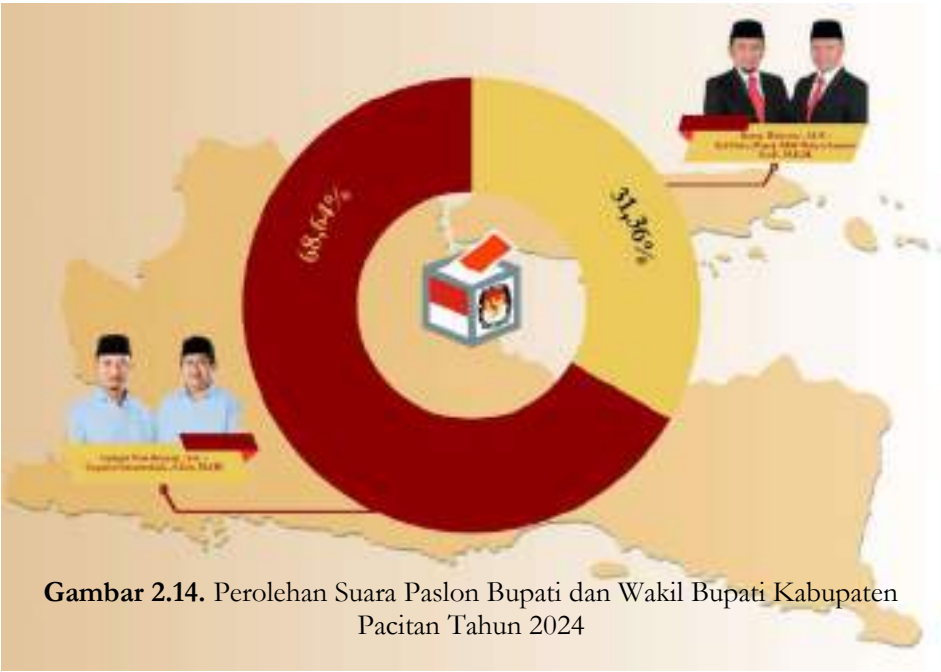
Gambar 2.13. Perolehan Suara Paslon Gubernur Jatim 2024 Kabupaten Pacitan Tahun 2024

Hasil perolehan suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Pacitan pada Pilkada 2024 menunjukkan

dominasi pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestjanto Dardak yang meraih dukungan tertinggi sebanyak 208.372 suara (71,75%). Di posisi kedua, pasangan Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T. – Zahrul Azhar Asumta Gus Hans, S.IP., M.Kes. memperoleh 58.158 suara (20,03%), sementara pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah, M.Si. – H. Lukmanul Khakim, M.Si. mendapatkan 23.880 suara (8,22%). Data ini menunjukkan keunggulan signifikan Khofifah–Emil di wilayah Pacitan, dengan selisih suara yang cukup besar dibandingkan dua pasangan lainnya.

Hasil perolehan suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Pacitan pada Pilkada 2024 menunjukkan dominasi pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestjanto Dardak yang meraih dukungan tertinggi sebanyak 208.372 suara (71,75%). Di posisi kedua, pasangan Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T. – Zahrul Azhar Asumta Gus Hans, S.IP., M.Kes. memperoleh 58.158 suara (20,03%), sementara pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah, M.Si. – H. Lukmanul Khakim, M.Si. mendapatkan 23.880 suara (8,22%). Data ini menunjukkan keunggulan signifikan Khofifah–Emil di wilayah Pacitan, dengan selisih suara yang cukup besar dibandingkan dua pasangan lainnya.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada Pilkada 2024 disajikan pada gambar 2.14.



Gambar 2.14. Perolehan Suara Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan Tahun 2024

Hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Pacitan Tahun 2024

menunjukkan bahwa pasangan Indrata Nur Bayuaji, S.S. – Gagarin Sumrambah, S.Sos., M.HP. meraih suara terbanyak dengan jumlah 199.410 suara (68,64%), mengungguli pasangan Ronny Wahyono, S.I.P. – Kol Ckm (Purn) Drh. Wahyu Saptono Hadi, M.K.M. yang memperoleh 91.108 suara (31,36%) dari total 290.518 suara sah. Hasil ini mencerminkan dukungan mayoritas pemilih Pacitan terhadap petahana Indrata–Gagarin untuk kembali memimpin daerah pada periode mendatang.

KABUPATEN PONOROGO

1. Profil Singkat

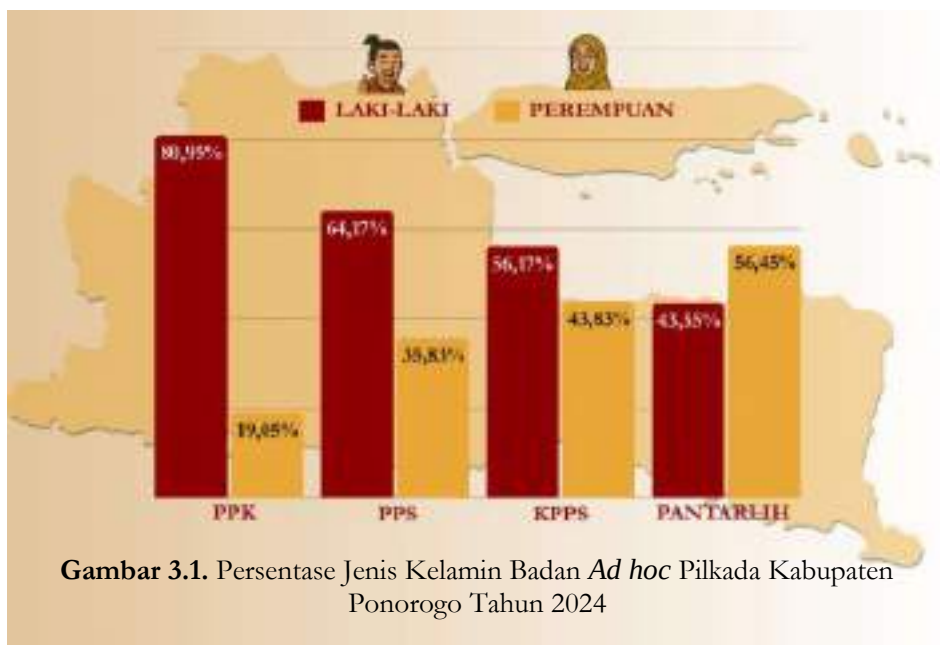
Kabupaten Ponorogo terletak di wilayah barat daya Provinsi Jawa Timur dan dikenal luas sebagai “Kota Reog” karena kekayaan budayanya yang khas. Secara administratif, Kabupaten Ponorogo terdiri atas 21 kecamatan, 26 kelurahan, dan 281 desa. Wilayah ini memiliki kontur geografis yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan, dengan jumlah penduduk lebih dari 900 ribu jiwa.

Dalam konteks politik, Ponorogo termasuk kabupaten dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi dalam setiap gelaran pilkada. Pemerintah daerah dan penyelenggara pilkada setempat aktif mendorong keterlibatan masyarakat, termasuk kelompok pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas.

2. Badan *Ad hoc*

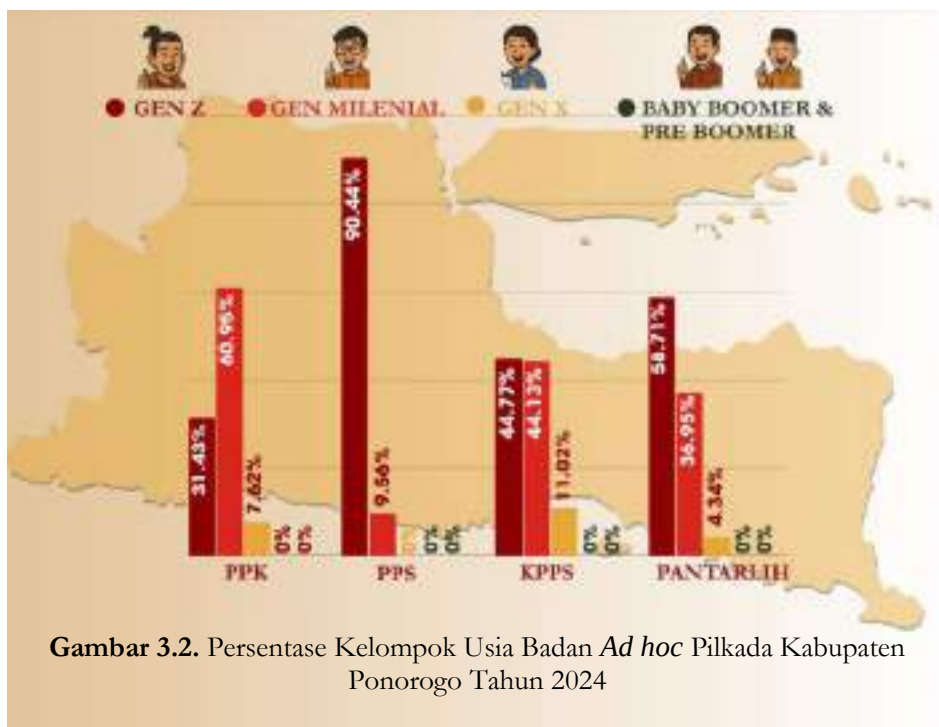
Pada penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Ponorogo, telah dibentuk Badan *ad hoc* yang terdiri dari berbagai elemen penyelenggara pilkada di tingkat lokal. Jumlah personel yang terlibat meliputi 105 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 921 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), 10.633 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan 2.909 orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Setiap unsur ini tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan desa/kelurahan di Ponorogo guna memastikan proses pilkada berjalan secara efektif, efisien, dan partisipatif.

Badan *ad hoc* ini tersebar di seluruh 21 kecamatan, dengan komposisi yang mempertimbangkan keterwakilan perempuan, usia produktif, dan integritas penyelenggara. Adapun sebaran demografi berdasarkan jenis kelamin disajikan pada gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 menunjukkan partisipasi yang cukup beragam antara laki-laki dan perempuan di setiap tingkatan penyelenggara badan *ad hoc*. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebanyak 85 orang (80,95%) berjenis kelamin laki-laki dan 20 orang (19,05%) perempuan. Untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), laki-laki berjumlah 591 orang (64,17%) dan perempuan 330 orang (35,83%). Komposisi di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) lebih seimbang, yaitu 5.973 laki-laki (56,17%) dan 4.660 perempuan (43,83%). Sementara itu, pada tingkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), justru perempuan lebih dominan dengan 1.642 orang (56,45%), dibandingkan laki-laki sebanyak 1.267 orang (43,55%). Data ini mencerminkan upaya penyelenggara dalam mendorong keterlibatan perempuan, khususnya di tingkat pelaksana lapangan.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 3.2 berikut.

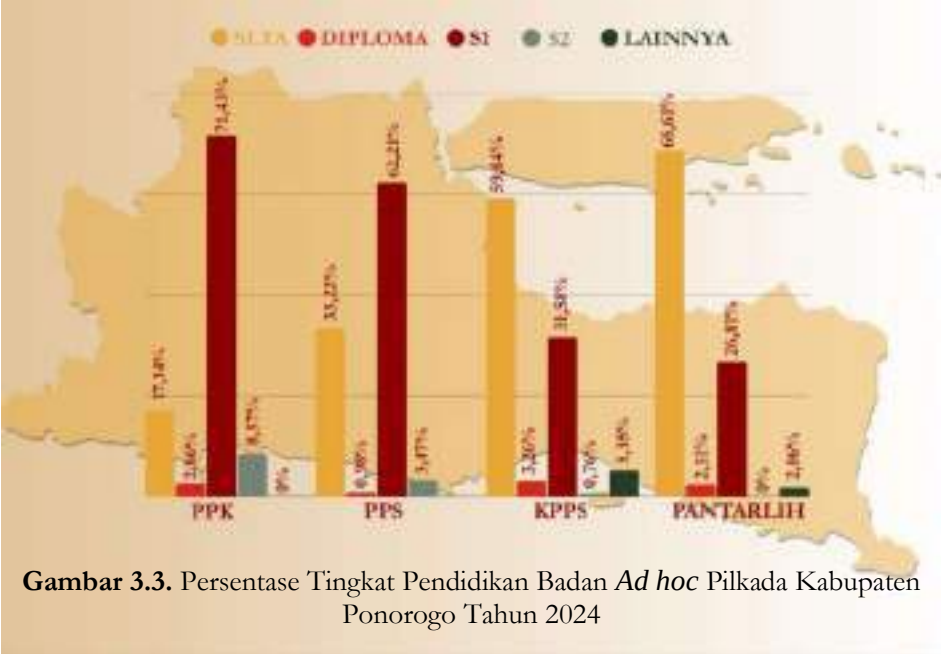


Sebaran demografi badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia pada gambar 3.2 menunjukkan dominasi usia produktif, terutama dari rentang usia 18 hingga 43 tahun. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), mayoritas anggota berasal dari kelompok usia 28–43 tahun sebanyak 64 orang (60,95%), disusul usia 18–27 tahun sebanyak 33 orang (31,43%), dan 8 orang (7,62%) dari kelompok usia 44–59 tahun. Di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), kelompok 18–27 tahun mendominasi dengan 434 orang (47,12%), diikuti usia 17 tahun sebanyak 399 orang (43,32%), dan sisanya dari usia 28–59 tahun. Komposisi serupa juga terlihat pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dengan jumlah terbanyak berasal dari usia 18–27 tahun sebanyak 4.760 orang (44,77%), disusul usia 28–43 tahun sebanyak 4.692 orang (44,13%), dan kelompok usia 44–59 tahun sebanyak 1.172 orang (11,02%). Sementara di tingkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), usia 18–27 tahun kembali mendominasi sebanyak 1.708 orang (58,71%), diikuti oleh usia 28–43 tahun sebanyak 1.075 orang (36,95%).

Badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Ponorogo didominasi oleh kalangan muda dan dewasa produktif, mencerminkan semangat partisipasi generasi muda dalam mendukung penyelenggaraan pilkada yang inklusif dan energik.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar

3.3 berikut. Gambar ini menggambarkan proporsi tingkat pendidikan terakhir anggota PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih, yang mencerminkan latar belakang pendidikan penyelenggara pilkada di tingkat lokal.



Gambar 3.3. Persentase Tingkat Pendidikan Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2024

Gambar 3.3 menunjukkan variasi latar belakang pendidikan yang cukup beragam di tiap tingkatan penyelenggara. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), mayoritas anggota berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 75 orang (71,43%), disusul oleh lulusan SLTA 18 orang (17,14%), dan Pascasarjana (S2) sebanyak 9 orang (8,57%). Pendidikan Diploma hanya diikuti 3 orang (2,86%), dan tidak terdapat anggota dengan kategori pendidikan lainnya.

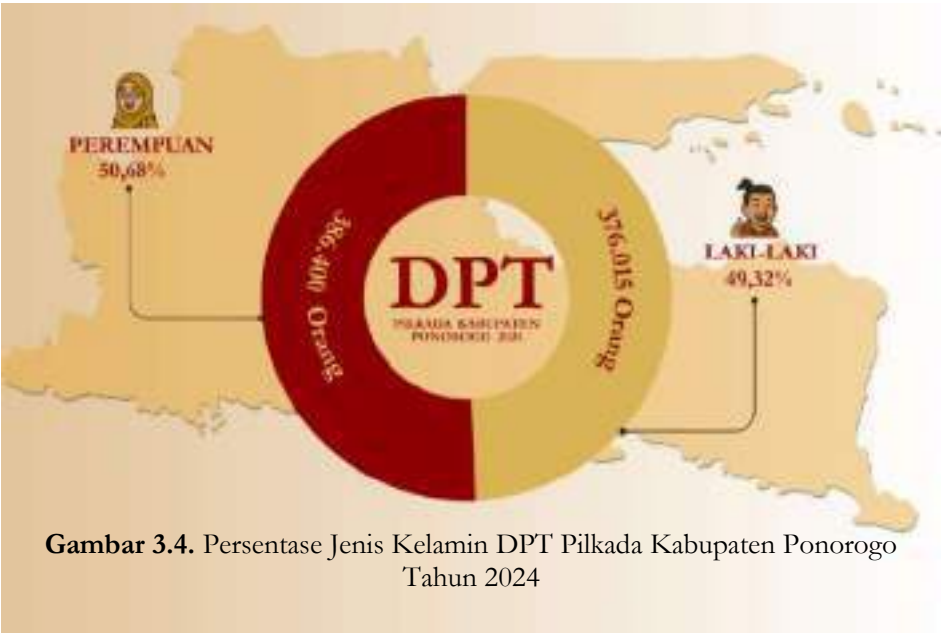
Di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), komposisi pendidikan juga didominasi oleh lulusan S1 sebanyak 573 orang (62,21%), kemudian SLTA 306 orang (33,22%), S2 sebanyak 32 orang (3,47%), serta Diploma 9 orang (0,98%) dan lainnya 1 orang (0,11%). Untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sebagian besar merupakan lulusan SLTA sebanyak 6.278 orang (59,04%), diikuti S1 sebanyak 3.358 orang (31,58%), dan kategori lainnya 569 orang (5,35%). Sementara itu, Diploma dan S2 masing-masing berjumlah 347 orang (3,26%) dan 81 orang (0,76%). Pada tingkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), pendidikan SLTA kembali mendominasi dengan 1.996 orang (68,61%), disusul S1 780 orang (26,81%), Diploma 73 orang (2,51%), dan kategori lainnya sebanyak 60 orang (2,06%).

Dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Ponorogo, data

menunjukkan bahwa belum terdapat keterlibatan penyandang disabilitas dalam komposisi Badan *ad hoc*, baik pada tingkat PPK, PPS, KPPS, maupun Pantarlih. Ke depan, keterlibatan penyandang disabilitas perlu lebih didorong agar pelaksanaan pilkada benar-benar mencerminkan prinsip partisipasi tanpa diskriminasi.

3. Pemutakhiran Data

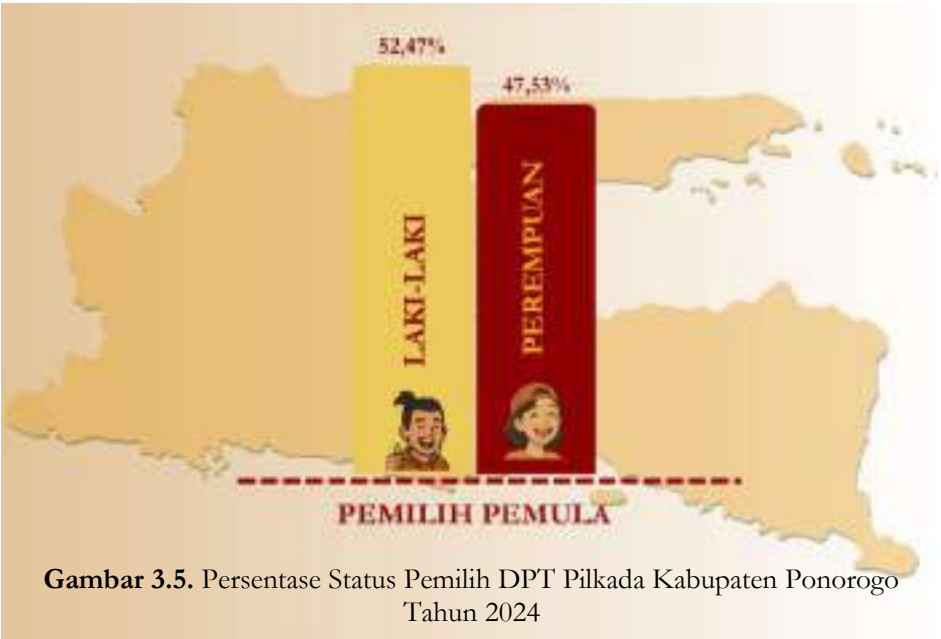
Tahapan pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 berlangsung secara berjenjang dan akurat untuk menjamin keabsahan daftar pemilih. Proses ini dimulai dengan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi (DPHS) sebanyak 771.168 jiwa, yang kemudian disempurnakan melalui pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan oleh Pantarlih. Hasilnya menghasilkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 763.825 pemilih. Setelah dilakukan perbaikan, klarifikasi, serta menerima masukan dari masyarakat, KPU Kabupaten Ponorogo menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 762.415 orang. Penurunan jumlah dari DPHS ke DPT mencerminkan proses pemutakhiran yang ketat dan valid, memastikan bahwa hanya pemilih yang memenuhi syarat yang tercatat secara sah dalam daftar pemilih. Adapun sebaran demografi DPT Pilkada Kabupaten Ponorogo berdasarkan jenis kelamin disajikan pada gambar 3.4 berikut.



Gambar 3.4. Persentase Jenis Kelamin DPT Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2024

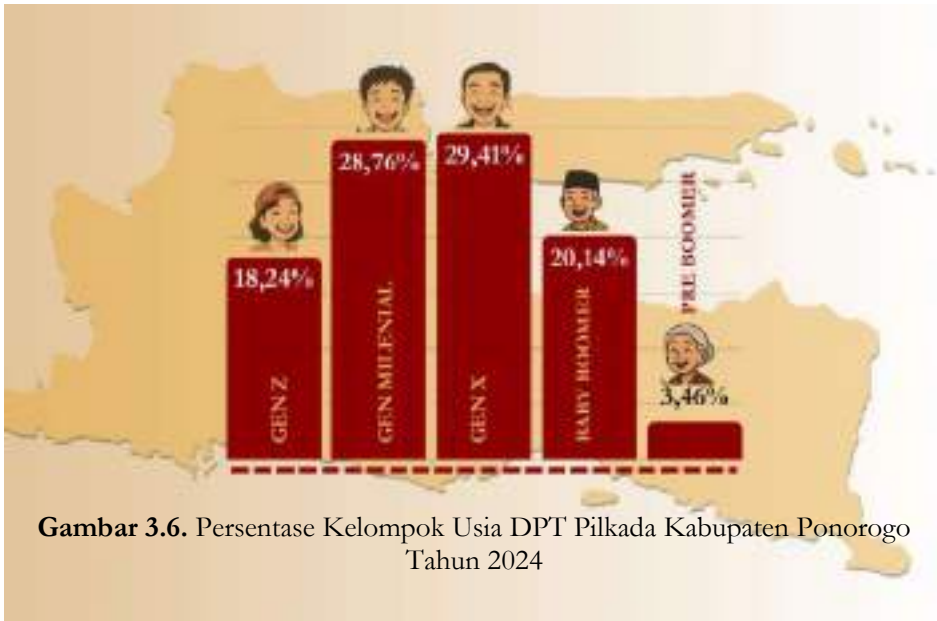
Sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan proporsi yang relatif seimbang. Jumlah pemilih laki-laki tercatat sebanyak 376.015 orang (49,32%), sedangkan pemilih perempuan mencapai 386.400 orang (50,68%), dari total 762.415 pemilih. Komposisi ini mencerminkan keterwakilan gender yang hampir merata dalam partisipasi pemilih, dengan sedikit dominasi dari pemilih perempuan. Data ini menjadi indikator penting dalam perencanaan strategi partisipasi dan pelayanan pemilih secara adil dan setara.

Pemetaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut karakteristik pemilih pemula. Adapun secara lengkap disajikan dalam gambar 3.5.



Berdasarkan gambar 3.5, status pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total 762.415 pemilih, terdapat 9.767 orang yang tergolong sebagai pemilih pemula, terdiri atas 5.125 laki-laki (52,47%) dan 4.642 perempuan (47,53%). Data ini mencerminkan adanya partisipasi generasi muda yang mulai menggunakan hak pilihnya, serta dominasi pemilih berpengalaman dalam komposisi keseluruhan.

Sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ponorogo pada Pilkada 2024 berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran mengenai komposisi usia pemilih yang akan menggunakan hak suaranya yang disajikan pada gambar 3.6.



Berdasarkan gambar 3.6 kelompok usia menunjukkan dominasi pemilih dari kelompok usia produktif dan dewasa. Kelompok usia 44–59 tahun merupakan yang terbanyak dengan jumlah 224.197 pemilih (29,41%), diikuti oleh usia 28–43 tahun sebanyak 219.265 pemilih (28,76%), dan usia 60–78 tahun sebanyak 153.580 pemilih (20,14%). Sementara itu, kelompok usia muda 18–27 tahun tercatat sebanyak 126.781 orang (16,63%), dan pemilih pemula usia 17 tahun sebanyak 12.239 orang (1,61%). Adapun pemilih usia lanjut di atas 79 tahun berjumlah 26.353 orang (3,46%). Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pemilih berada pada usia matang dan produktif, dengan partisipasi yang tetap terlihat dari kalangan muda maupun lansia.

4. Pencalonan

Tahapan pencalonan dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Ponorogo sesuai dengan jadwal nasional dan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Proses ini mencakup beberapa tahapan penting, mulai dari pendaftaran pasangan calon, verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen, penetapan pasangan calon, hingga pengundian nomor urut.

Pendaftaran pasangan calon dibuka untuk partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat dukungan kursi DPRD, serta calon perseorangan jika ada yang mengajukan. Setelah menerima berkas

pendaftaran, KPU melakukan verifikasi administrasi dan klarifikasi dokumen syarat calon dan syarat pencalonan. Pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat ditetapkan secara resmi sebagai peserta Pilkada. Setelah penetapan, KPU Ponorogo melanjutkan ke tahapan pengundian nomor urut pasangan calon, yang menjadi identitas resmi dalam kegiatan kampanye dan pencoblosan. Seluruh tahapan pencalonan dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, dan diawasi oleh Bawaslu serta *stakeholder* terkait guna menjamin keadilan dan transparansi dalam proses demokrasi lokal. Berdasarkan hasil penetapan resmi, terdapat dua pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk berkompetisi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo. Informasi mengenai pasangan calon dan partai pengusung disajikan pada gambar 3.7, sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.



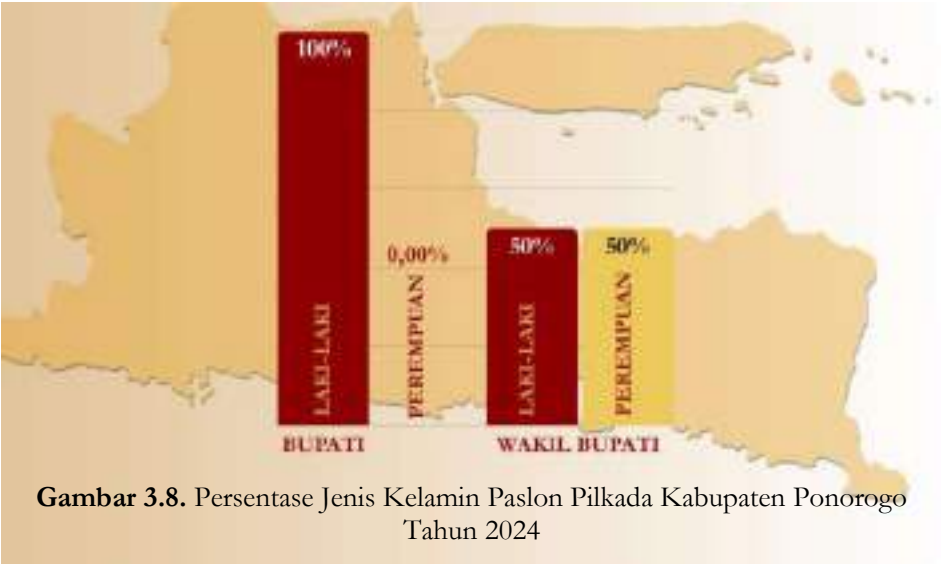
Gambar 3.7. Daftar Nama Paslon Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2024

Berdasarkan gambar 3.7, masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo diusung oleh koalisi partai politik yang beragam, mencerminkan pluralitas dukungan politik serta dinamika aspirasi masyarakat di wilayah tersebut. Seluruh pasangan calon telah melalui tahapan seleksi yang ketat, termasuk proses klarifikasi dan verifikasi administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta dinyatakan memenuhi syarat pencalonan melalui jalur partai politik.

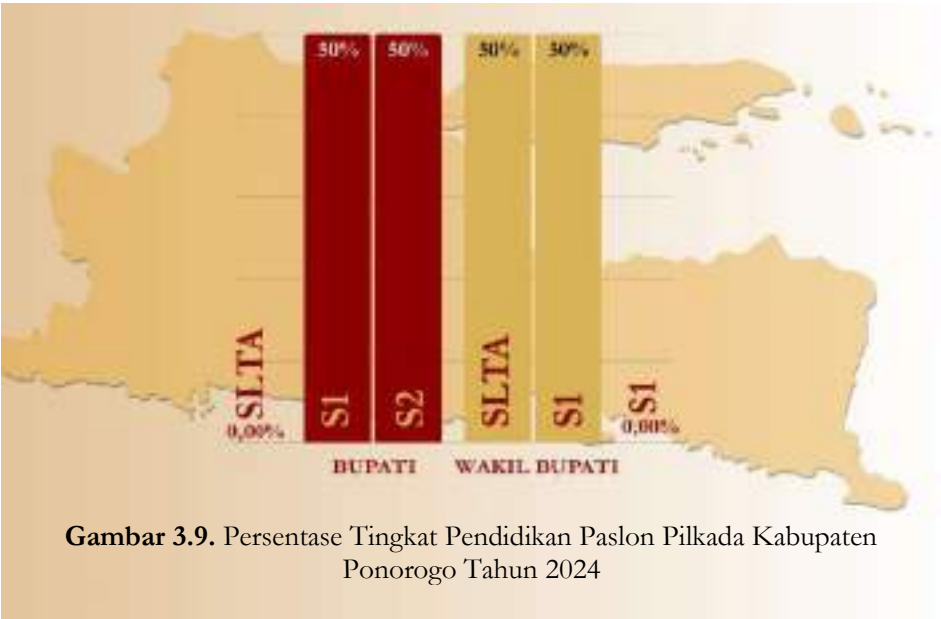
Penetapan pasangan calon ini menjadi tonggak awal dimulainya tahapan kampanye, yang diharapkan berlangsung secara adil, damai, dan demokratis hingga hari pemungutan suara. Proses ini menegaskan komitmen

penyelenggara pilkada dalam menjaga integritas dan kredibilitas pelaksanaan Pilkada di tingkat daerah.

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo ditampilkan pada gambar 3.8, yang memberikan gambaran representasi gender dalam kontestasi politik lokal. Sementara itu, gambar 3.9 menyajikan sebaran tingkat pendidikan para pasangan calon, yang mencerminkan latar belakang kapabilitas dan kompetensi masing-masing individu dalam mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah.



Gambar 3.8. Persentase Jenis Kelamin Paslon Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2024



Gambar 3.9. Persentase Tingkat Pendidikan Paslon Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2024

Berdasarkan gambar 3.9, sebanyak 75% pasangan calon berjenis kelamin laki-laki dan 25% perempuan. Seluruh calon Bupati adalah laki-laki, sementara posisi Wakil Bupati menunjukkan representasi setara antara laki-laki dan perempuan (masing-masing 50%), menandakan adanya partisipasi perempuan dalam kontestasi politik lokal.

Pada gambar 3.9, sebaran tingkat pendidikan menunjukkan bahwa 50% calon berpendidikan S1, sementara sisanya terdiri dari lulusan SLTA dan S2. Semua calon Bupati memiliki latar belakang pendidikan tinggi (S1 dan S2), sedangkan calon Wakil Bupati terdiri dari lulusan SLTA dan S1. Komposisi ini mencerminkan bahwa mayoritas calon memiliki kapasitas akademik yang memadai untuk menjalankan tugas pemerintahan.

Visi dan misi yang diusung oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo menjadi cerminan dari arah pembangunan serta prioritas kebijakan yang akan mereka realisasikan apabila memperoleh mandat dari rakyat. Dalam konteks Pilkada Serentak 2024, masing-masing pasangan calon hadir dengan gagasan strategis dan program unggulan yang menggambarkan komitmen mereka terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Ponorogo. Ringkasan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon dapat dilihat pada gambar 3.10.

Drs. H. Ipong Muchlisani – Segura Lobar Kusumadaru	H. Sugiat Sanjaya, SH., MH., – Lusyairita, SH
Visi : "Nelayani Ponorogo"	Visi : "Mewujudkan Ponorogo sebagai episentrum wisata budaya dan peradaban"
Misi : 1. Meningkatkan ketahanan pangan melalui program-program pertanian yang berkelanjutan. 2. Mengembangkan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.	Misi : 1. Melakukan pembangunan Monumen Reng dan Museum Pendidikan sebagai ikon wisata. 2. Mengembangkan sirkuit ekonomi untuk mendukung ekonomi lokal dan pariwisata. 3. Meningkatkan sektor pertanian melalui modernisasi dan dukungan kepada petani. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur dasar.

Gambar 3.10. Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

Sosialisasi dan kampanye merupakan bagian penting dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi pasangan calon memperkenalkan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat. Dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2024, tahapan kampanye dilaksanakan setelah penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo. Kegiatan sosialisasi dan kampanye difasilitasi oleh KPU dan dilaksanakan dalam koridor regulasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU terkait kampanye. Seluruh pasangan calon memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan berbagai metode kampanye, antara lain:

- a. Pertemuan terbatas dan tatap muka, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keterbukaan dan inklusivitas.
- b. Penyebaran bahan kampanye, seperti pamflet, selebaran, dan alat peraga kampanye (APK) yang dipasang di lokasi-lokasi yang telah ditentukan.
- c. Kampanye media massa dan media sosial, dengan tetap mengedepankan etika informasi, penyampaian pesan yang edukatif, serta larangan menyebarkan *hoaks* atau ujaran kebencian.
- d. Debat publik antar pasangan calon, yang diselenggarakan oleh KPU sebagai forum penyampaian gagasan secara terbuka di hadapan publik.

Dalam pelaksanaannya, kampanye berjalan dengan suasana yang relatif kondusif dan demokratis, didukung oleh keterlibatan aktif masyarakat, media lokal, serta pemantau pilkada. Aparat keamanan, Bawaslu, dan KPU bersinergi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas kampanye berlangsung adil, berimbang, dan bebas dari intimidasi atau pelanggaran hukum.



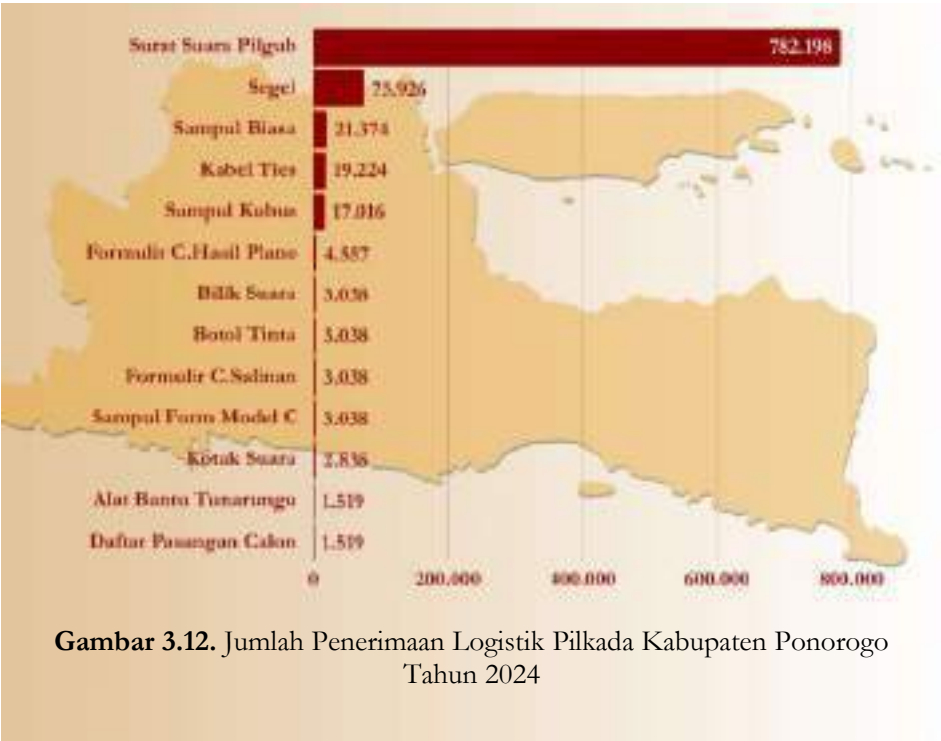
Gambar 3.11. Maskot Pilkada Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo secara resmi meluncurkan maskot Pilkada 2024 bernama *Si Singo Barong* pada tanggal 22 Juni 2024. Maskot ini terinspirasi dari karakter ikonik dalam seni Reog Ponorogo, yakni *Singo Barong*, yang melambangkan kekuatan dan kearifan budaya lokal. Pemilihan *Si Singo Barong* sebagai maskot bertujuan untuk mendorong partisipasi publik dalam pilkada serta mengangkat kembali nilai-nilai kultural khas Ponorogo sebagai bagian dari identitas demokrasi daerah.

6. Logistik

Distribusi logistik untuk penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 mencakup berbagai komponen penting guna mendukung kelancaran proses pemungutan suara. Beberapa komponen penting mencakup surat suara untuk Pilgub yang mencapai 782.198 lembar, yang mencerminkan proyeksi kebutuhan sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Komponen lainnya yang juga diterima dalam jumlah besar antara lain segel sebanyak 75.926 unit, sampul biasa sebanyak 21.374 buah, kabel ties 19.224 buah, serta sampul kubus sebanyak 17.016 buah. Untuk pelaksanaan teknis di Tempat Pemungutan Suara (TPS), disediakan 4.557 lembar formulir C. Hasil Plano, 3.038 buah bilik suara, 3.038 botol tinta, 3.038 set formulir C. Salinan, serta jumlah yang sama untuk sampul form model C. Selain itu, diterima pula 2.835 kotak suara, 1.519 alat bantu tunarungu, dan 1.519 daftar pasangan calon. Seluruh logistik ini

merupakan bagian dari upaya KPU Kabupaten Ponorogo untuk memastikan tahapan pilkada berjalan transparan, inklusif, dan sesuai prosedur. Secara lengkap disajikan pada gambar 3.12.



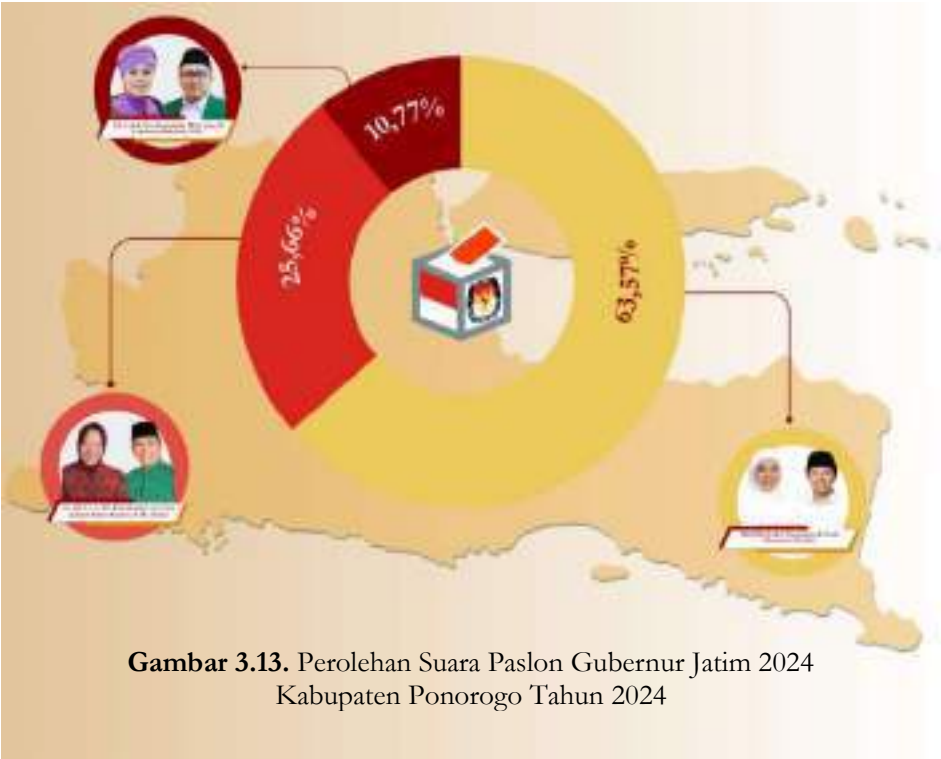
Gambar 3.12. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2024

Untuk memastikan kelancaran distribusi logistik Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Ponorogo, KPU Provinsi Jawa Timur mengandalkan truk sebagai moda transportasi utama. Sebanyak 10 unit truk digunakan untuk mendistribusikan logistik ke tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sementara 21 unit lainnya diarahkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS). Penggunaan moda transportasi ini mencerminkan kesiapan dan komitmen KPU dalam menjamin bahwa seluruh logistik pilkada dapat didistribusikan secara tepat waktu, aman, dan merata ke seluruh wilayah kecamatan dan desa di Ponorogo.

7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten

Ponorogo disajikan pada gambar 3.13.



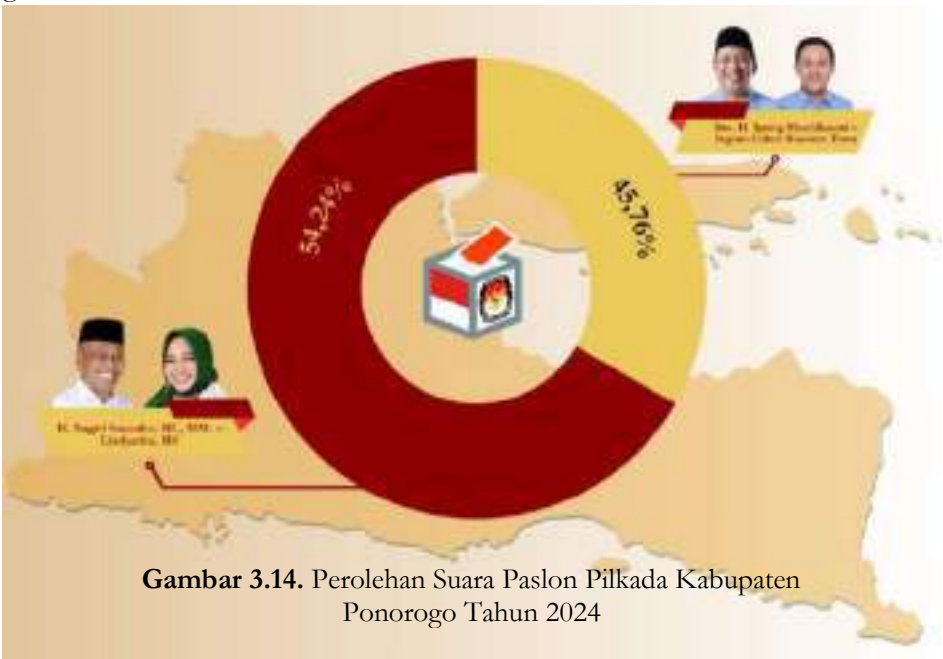
Gambar 3.13. Perolehan Suara Paslon Gubernur Jatim 2024 Kabupaten Ponorogo Tahun 2024

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara di Kabupaten Ponorogo, pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestjanto Dardak memperoleh dukungan suara tertinggi dengan jumlah 346.065 suara, yang setara dengan 63,57% dari total suara sah. Pasangan ini menunjukkan dominasi kuat dalam preferensi pemilih di wilayah tersebut. Di urutan kedua, pasangan Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T. – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), S.IP., M.Kes. meraih 139.670 suara atau sebesar 25,66%, menunjukkan dukungan yang signifikan meskipun tidak dominan. Sementara itu, pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah, M.Si. – H. Lukmanul Khakim, M.Si. memperoleh 58.657 suara, atau sekitar 10,77% dari total suara sah. Secara keseluruhan, jumlah suara sah yang masuk tercatat sebanyak 544.392 suara. Komposisi ini mencerminkan kecenderungan pemilih Ponorogo yang mayoritas masih mendukung petahana, namun tetap memberi ruang kompetisi sehat bagi calon lain.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara di Kabupaten Ponorogo, pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestjanto Dardak memperoleh dukungan suara tertinggi dengan jumlah 346.065 suara, yang setara dengan 63,57% dari total suara sah. Pasangan ini menunjukkan dominasi kuat dalam preferensi

pemilih di wilayah tersebut. Di urutan kedua, pasangan Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T. – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), S.IP., M.Kes. meraih 139.670 suara atau sebesar 25,66%, menunjukkan dukungan yang signifikan meskipun tidak dominan. Sementara itu, pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah, M.Si. – H. Lukmanul Khakim, M.Si. memperoleh 58.657 suara, atau sekitar 10,77% dari total suara sah. Secara keseluruhan, jumlah suara sah yang masuk tercatat sebanyak 544.392 suara. Komposisi ini mencerminkan kecenderungan pemilih Ponorogo yang mayoritas masih mendukung petahana, namun tetap memberi ruang kompetisi sehat bagi calon lain.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo pada Pilkada 2024 disajikan pada gambar 3.14.



Gambar 3.14. Perolehan Suara Paslon Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2024

Pasangan petahana H. Sugiri Sancoko, SE., MM. – Lisdyarita, SH. meraih kemenangan dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo 2024 dengan perolehan 300.790 suara, setara dengan 54,24% dari total suara sah. Di sisi lain, pasangan Drs. H. Ipong Muchlissoni – Segoro Luhur Kusumo Daru memperoleh 254.618 suara, atau 45,76%. Hasil ini menunjukkan, H. Sugiri Sancoko, SE., MM. – Lisdyarita, SH. melanjutkan kepemimpinan mereka untuk periode kedua. Dari sisi persebaran wilayah, pasangan H. Sugiri Sancoko, SE., MM. – Lisdyarita, SH. unggul di 13 kecamatan, termasuk kecamatan strategis seperti Ponorogo Kota, Babadan, Jetis, dan Siman. Sementara itu, pasangan Drs.

H. Ipong Muchlissoni – Segoro Luhur Kusumo Daru memperoleh kemenangan di 8 kecamatan, antara lain Ngrayun, Pulung, dan Sawoo. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada ini mencapai 574.973 pemilih, dengan 555.408 suara sah dan 19.565 suara tidak sah. Capaian ini menunjukkan tingginya antusiasme dan kesadaran demokratis warga Ponorogo dalam menentukan arah kepemimpinan daerah untuk lima tahun ke depan.

BAGIAN 4

KABUPATEN TRENGGALEK

1. Perencanaan Program dan Anggaran

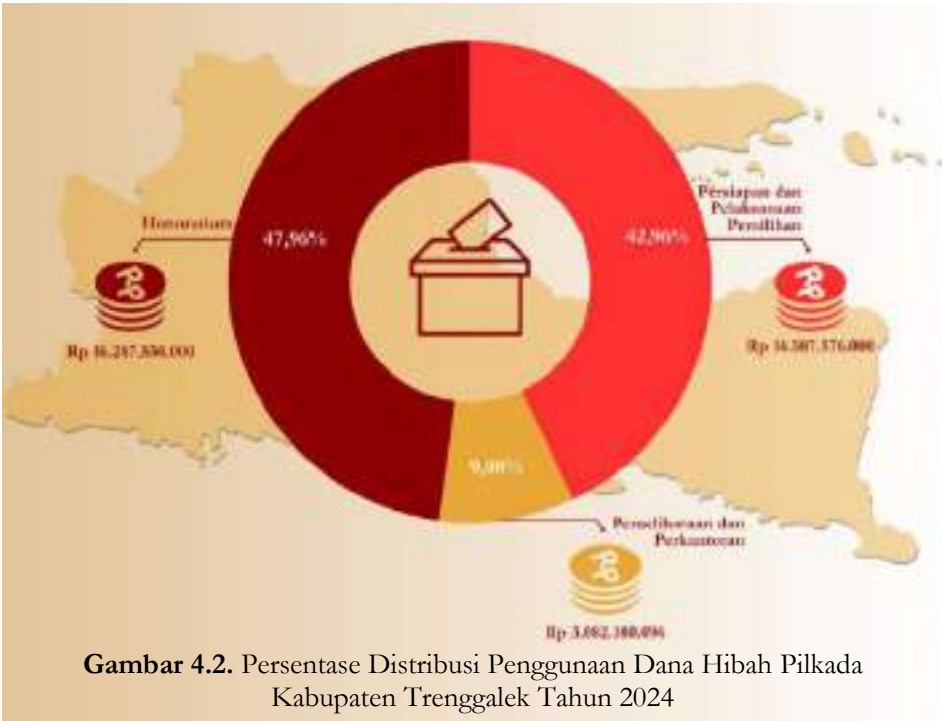
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek secara resmi telah menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebesar Rp50.000.000.000 untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Penanda-tanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan pada tanggal 3 November 2023 dengan merujuk pada dua nomor dokumen, Nomor: 900/1681/406.028/2023 dari pihak Pemerintah Daerah dan Nomor: 1029/KU.07-PKS/3503/2023 dari pihak KPU Kabupaten Trenggalek. Dana hibah tersebut disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama dicairkan bulan November 2023, sementara tahap kedua direalisasikan pada bulan Februari 2024. Bantuan dana ini memegang peran krusial dalam mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada di daerah Kabupaten Trenggalek, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan alokasi anggaran yang telah disepakati. Rincian distribusi dana hibah dalam dua tahap tersebut ditampilkan pada gambar 4.1 berikut.



Dana hibah Pilkada Tahun 2024 diterima oleh KPU Kabupaten Trenggalek terbagi ke dalam tiga klasifikasi anggaran utama. Klasifikasi

pertama Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan dengan persentase realisasi sebesar 62,62%. Klasifikasi kedua mencakup Pemeliharaan dan Perkantoran yang terealisasi sebesar 67,07%. Sementara itu, klasifikasi ketiga, yaitu Honorarium bagi PPS, Sekretariat PPS, dan KPPS, mencatat tingkat realisasi tertinggi sebesar 95,56%. Secara kumulatif, total realisasi anggaran Pilkada Tahun 2024 di lingkungan KPU Kabupaten Trenggalek mencapai 88,06%. Adapun untuk Tahun Anggaran 2025, hingga saat ini belum terdapat realisasi anggaran karena masih menunggu proses SP2HL.

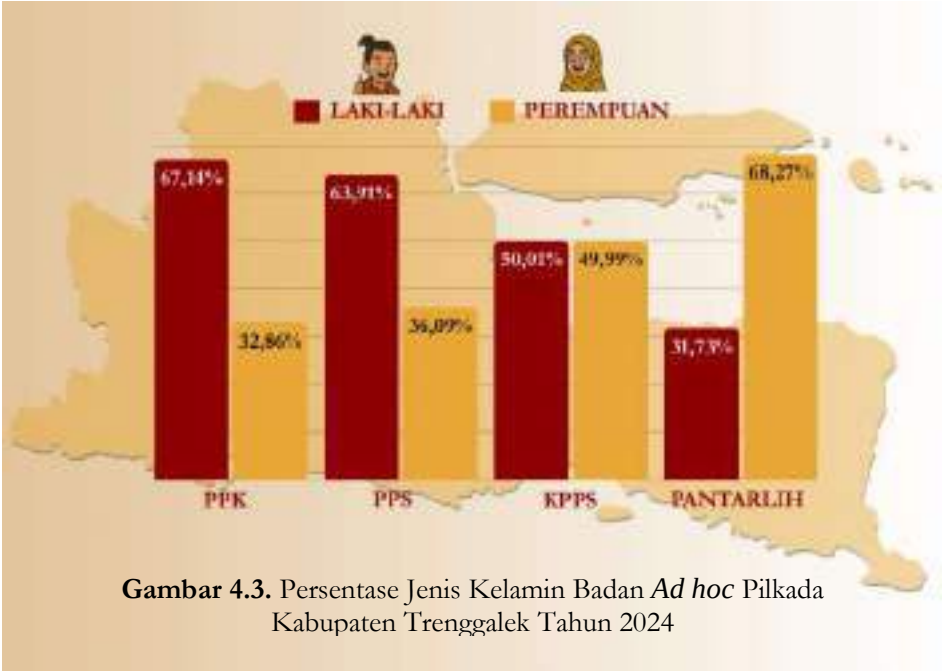
Komposisi realisasi dana hibah berdasarkan klasifikasi anggaran tersebut dapat dilihat pada gambar 4.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.



2. **Badan Ad hoc**

KPU Kabupaten Trenggalek telah membentuk sebanyak 10.527 orang anggota badan *ad hoc* untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pembentukan ini merujuk pada regulasi terbaru, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, yang memuat pedoman teknis pembentukan badan *ad hoc* dalam

rangka penyelenggaraan Pilkada serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Langkah ini merupakan bagian dari strategi kelembagaan untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pilkada di tingkat lokal yang profesional, transparan, dan akuntabel. Badan *ad hoc* yang terbentuk tersebar secara merata di seluruh kecamatan dan desa/kelurahan Kabupaten Trenggalek dengan total 10.527 anggota, yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 70 orang, Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 471 orang, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlilh) sebanyak 2.181 orang, serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan unsur terbanyak, yaitu 7.805 orang. Adapun sebaran demografi berdasarkan jenis kelamin disajikan pada gambar 4.3 berikut.

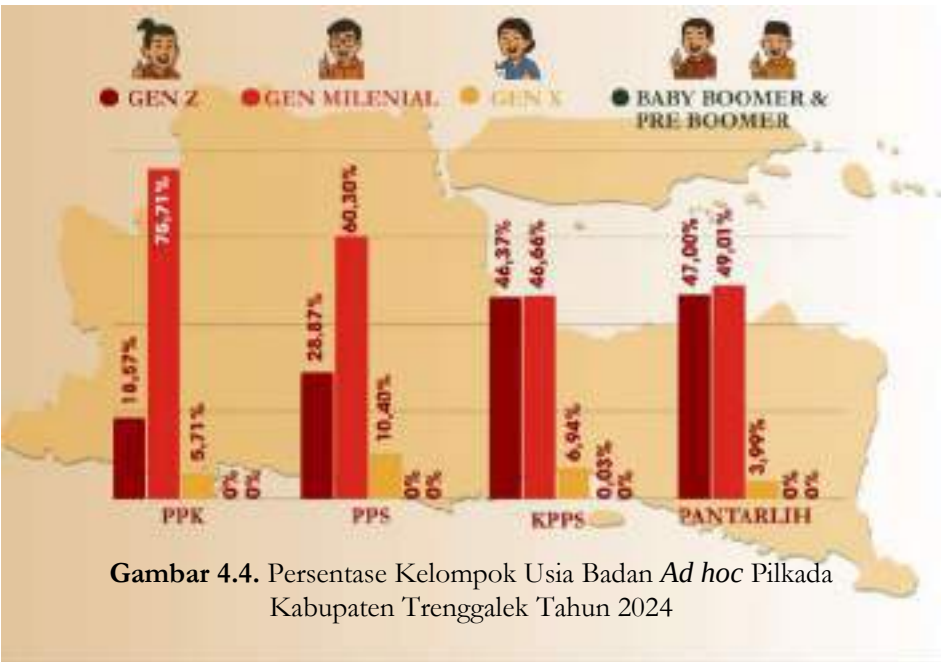


Gambar 4.3. Persentase Jenis Kelamin Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

Berdasarkan gambar 4.3, komposisi keanggotaan didominasi oleh laki-laki pada beberapa struktur, namun juga menunjukkan representasi perempuan yang cukup signifikan, terutama pada kelompok tertentu. Untuk PPK, dari total 70 anggota, sebanyak 47 orang atau 67,14% merupakan laki-laki, sedangkan 23 orang atau 32,86% adalah perempuan. Pada PPS, dari total 471 anggota, laki-laki berjumlah 301 orang (63,91%) dan perempuan sebanyak 170 orang (36,09%). Komposisi keanggotaan KPPS tercatat sangat seimbang, dengan 3.903 orang laki-laki (50,01%) dan 3.902 orang perempuan (49,99%) dari total 7.805 anggota. Sementara itu, pada

Pantarlih, proporsinya justru didominasi oleh perempuan, yakni sebanyak 1.489 orang (68,27%), sedangkan laki-laki berjumlah 692 orang (31,73%) dari total 2.181 petugas.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 4.4 berikut.

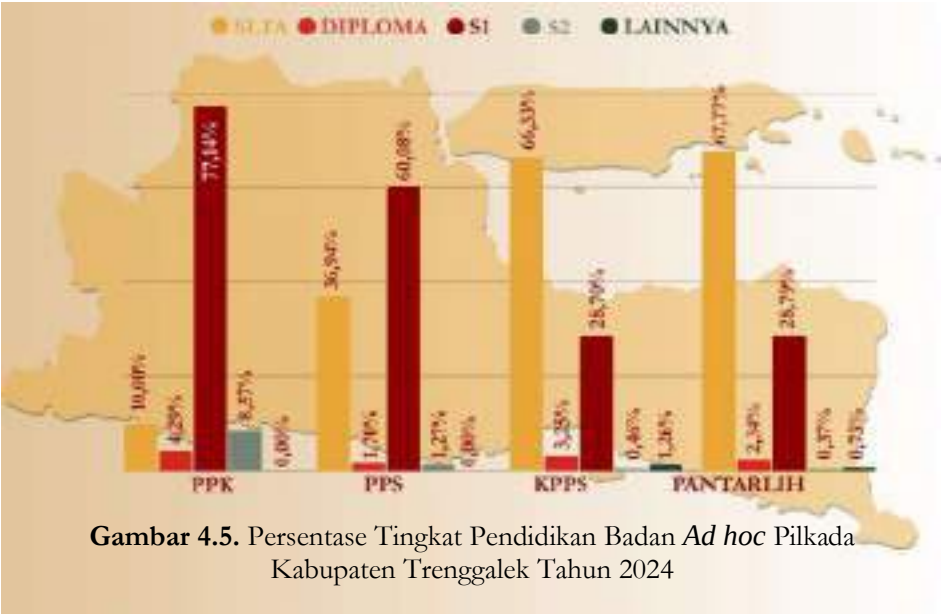


Gambar 4.4. Persentase Kelompok Usia Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa mayoritas anggota berada pada rentang usia produktif, khususnya usia 28–43 tahun dan 18–27 tahun. Pada tingkat PPK, kelompok usia 28–43 tahun mendominasi dengan 53 orang (75,71%), diikuti kelompok usia 18–27 tahun sebanyak 13 orang (18,57%) dan usia 44–59 tahun sebanyak 4 orang (5,71%). Untuk PPS, proporsi terbanyak berasal dari usia 28–43 tahun dengan 284 orang (60,30%), disusul usia 18–27 tahun sebanyak 136 orang (28,87%), dan usia 44–59 tahun sebanyak 49 orang (10,40%). Komposisi usia KPPS relatif merata antara dua kelompok besar, yakni usia 28–43 tahun sebanyak 3.642 orang (46,66%) dan usia 18–27 tahun sebanyak 3.619 orang (46,37%). Kelompok usia 44–59 tahun menyumbang 542 orang (6,94%), sedangkan kelompok usia di atasnya sangat kecil (0,03%) dan tidak ada yang berusia di bawah 18 tahun. Sementara itu, Pantarlih, mayoritas berasal dari usia 28–43 tahun sebanyak 1.069 orang (49,01%) dan usia 18–27 tahun sebanyak 1.025 orang (47,00%). Hanya 87 orang (3,99%) berasal dari usia 44–59 tahun, dan tidak ada petugas dari kelompok usia

lainnya. Data ini mencerminkan bahwa pelibatan generasi muda dan usia produktif cukup dominan dalam tingkat Badan *Ad hoc* Pemilihan, menunjukkan semangat partisipasi aktif dari kalangan usia muda hingga menengah dalam penyelenggaraan Pilkada.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 4.5.



Gambar 4.5. Persentase Tingkat Pendidikan Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

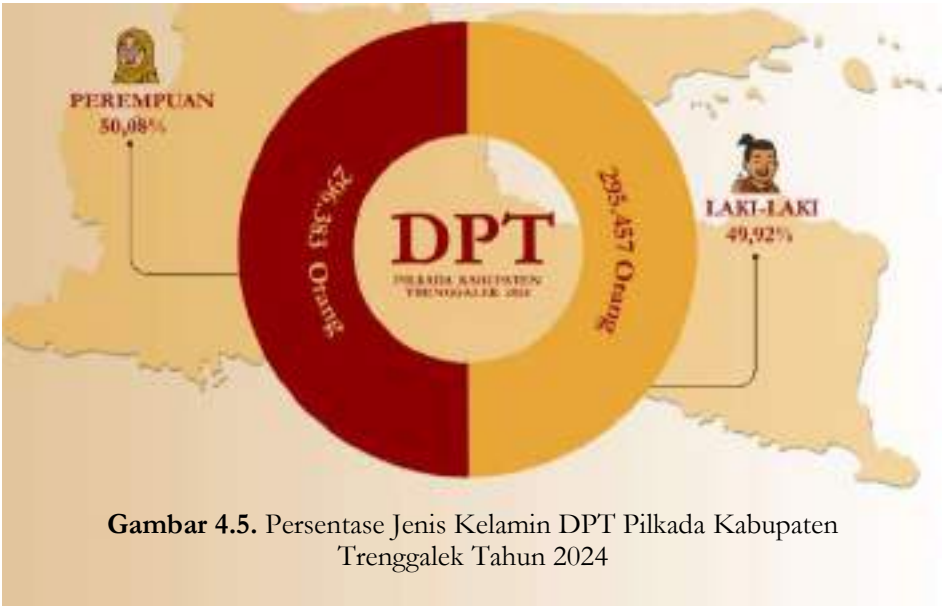
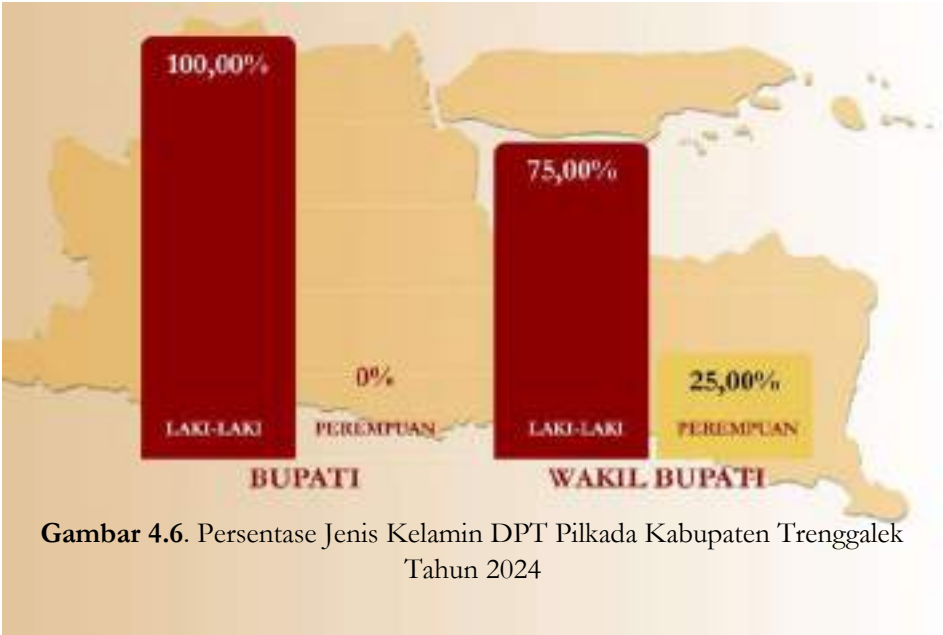
Berdasarkan gambar 4.5 mayoritas anggota berasal dari jenjang pendidikan menengah atas (SLTA) dan sarjana (S1), meskipun terdapat variasi antar unsur penyelenggara. Pada unsur PPK, sebagian besar anggotanya merupakan lulusan S1 sebanyak 54 orang (77,14%), disusul lulusan S2 sebanyak 6 orang (8,57%), SLTA sebanyak 7 orang (10,00%), dan Diploma 3 orang (4,29%). Untuk PPS, sebanyak 60,08% anggotanya merupakan lulusan S1 (283 orang), sedangkan 36,94% lainnya lulusan SLTA (174 orang). Sisanya berasal dari jenjang Diploma (1,70%) dan S2 (1,27%). Di tingkat KPPS, komposisi pendidikan didominasi oleh lulusan SLTA sebanyak 5.177 orang (66,33%), diikuti oleh S1 sebanyak 2.240 orang (28,70%), lulusan Diploma (3,25%), serta sebagian kecil lulusan S2 (0,46%) dan pendidikan lainnya (1,26%). Sementara pada unsur Pantarlih, sebagian besar juga merupakan lulusan SLTA, yakni sebanyak 1.478 orang (67,77%), kemudian lulusan S1 sebanyak 628 orang (28,79%), disusul Diploma (2,34%), S2 (0,37%), serta kategori pendidikan lainnya (0,73%). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas

penyelenggara pilkada di tingkat akar rumput berasal dari kalangan berpendidikan menengah, dengan proporsi lulusan sarjana cukup tinggi di level struktural seperti PPK dan PPS. Komposisi ini mencerminkan inklusivitas dalam rekrutmen serta ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dari berbagai latar belakang pendidikan.

Dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Trenggalek, data menunjukkan bahwa belum terdapat keterlibatan penyandang disabilitas dalam komposisi badan *ad hoc*, baik pada tingkat PPK, PPS, KPPS, maupun Pantarlih. Ke depan, keterlibatan penyandang disabilitas (jika ada) perlu lebih didorong agar pelaksanaan pilkada benar-benar mencerminkan prinsip partisipasi tanpa diskriminasi.

3. Pemutakhiran Data

KPU Kabupaten Trenggalek secara resmi telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Penetapan ini dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Trenggalek Nomor: 205/PL.02.1-BA/3503/2024 tertanggal 19 September 2024, yang memuat hasil Rekapitulasi DPT Tingkat Kabupaten dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024. Penetapan DPT tersebut dilakukan melalui rapat pleno terbuka yang diselenggarakan di Hotel Bukit Jaas Permai, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perwakilan partai politik, Bawaslu, TNI/Polri, dan instansi terkait lainnya. Langkah ini menandai kesiapan administratif KPU Kabupaten Trenggalek dalam memastikan hak pilih warga terlindungi serta penyelenggaraan pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang inklusif dan akuntabel. Adapun sebaran demografi DPT Pilkada Kabupaten Trenggalek berdasarkan jenis kelamin disajikan pada gambar 4.6 berikut.



Berdasarkan hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Tahun 2024 di daerah Kabupaten Trenggalek, jumlah total pemilih tercatat sebanyak 591.840 orang. Komposisi pemilih menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa distribusi yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan. Tercatat

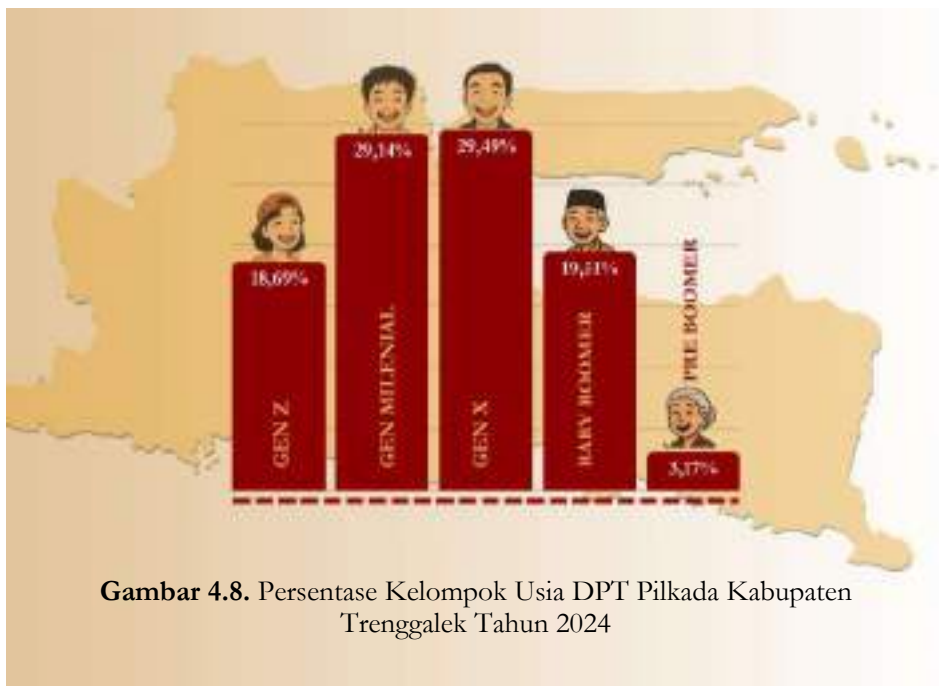
sebanyak 295.457 pemilih laki-laki atau setara dengan 49,92% dari total DPT, sementara pemilih perempuan berjumlah 296.383 orang, atau sebesar 50,08%.

Pemetaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut karakteristik pemilih dibagi menjadi dua, yaitu pemilih pemula. Adapun secara lengkap disajikan dalam gambar 4.7.



Berdasarkan status pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek, kategori pemilih pemula mencakup sebanyak 7.343 orang, terdiri dari 3.785 laki-laki (51,55%) dan 3.558 perempuan (48,45%).

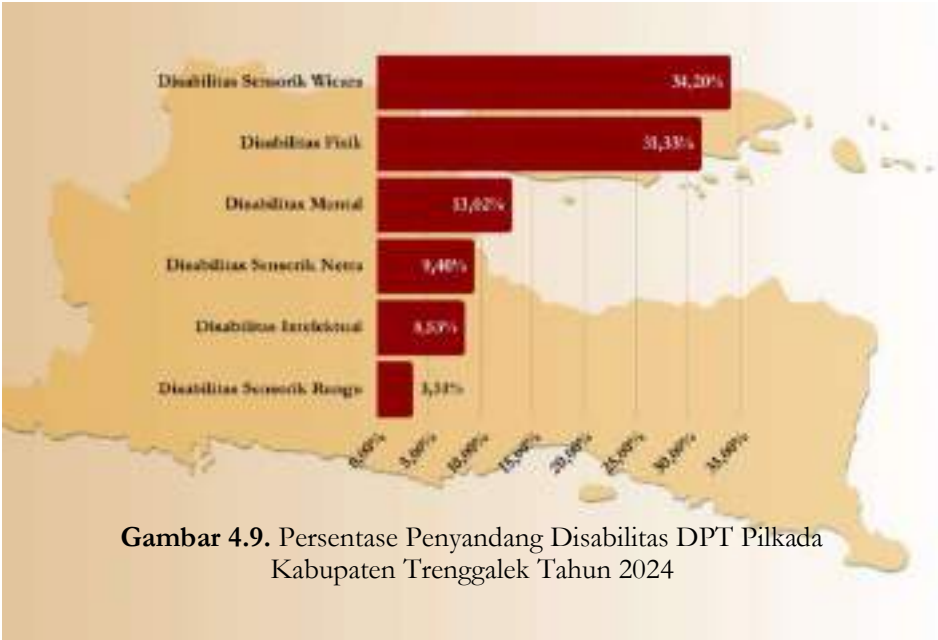
Sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Trenggalek pada Pilkada 2024 berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran mengenai komposisi usia pemilih yang akan menggunakan hak suaranya yang disajikan pada gambar 4.8.



Gambar 4.8. Persentase Kelompok Usia DPT Pilkada Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

Berdasarkan gambar 4.8, terlihat bahwa mayoritas pemilih berada pada rentang usia produktif. Dari total 591.840 pemilih, kelompok usia 44–59 tahun menjadi yang terbanyak dengan jumlah 174.537 orang atau setara 29,49%, diikuti usia 28–43 tahun sebanyak 172.443 orang (29,14%). Kelompok usia 60–78 tahun menyumbang 115.470 pemilih (19,51%), sedangkan pemilih usia 18–27 tahun berjumlah 101.989 orang (17,23%). Kelompok usia paling muda, yaitu 17 tahun, tercatat sebanyak 8.617 orang (1,46%), dan pemilih usia di atas 79 tahun tercatat sebanyak 18.784 orang (3,17%). Komposisi ini mencerminkan dominasi pemilih usia dewasa dan lansia dalam DPT, namun tetap menunjukkan keterlibatan pemilih muda yang cukup baik. Sebaran usia yang beragam ini menjadi potensi dalam membangun partisipasi elektoral yang representatif dan menyeluruh di Kabupaten Trenggalek.

Pada Pilkada Tahun 2024, jumlah pemilih disabilitas di Kabupaten Trenggalek tercatat sebanyak 3.786 orang yang tersebar pada beberapa klasifikasi yang disajikan pada gambar 4.9.



Gambar 4.9. Persentase Penyandang Disabilitas DPT Pilkada Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

Berdasarkan gambar 4.9, Kategori terbanyak berasal dari Disabilitas Sensorik Wicara sebanyak 1.295 orang atau setara dengan 34,20% dari total pemilih disabilitas. Diikuti oleh Disabilitas Fisik sebanyak 1.186 orang (31,33%), dan Disabilitas Mental sebanyak 493 orang (13,02%). Selanjutnya, Disabilitas Sensorik Netra tercatat sebanyak 356 orang (9,40%), Disabilitas Intelektual sebanyak 323 orang (8,53%), dan yang paling sedikit adalah Disabilitas Sensorik Rungu sebanyak 133 orang (3,51%). Sebaran ini menunjukkan pentingnya komitmen penyelenggara pilkada dalam menjamin aksesibilitas dan pelayanan yang ramah disabilitas di setiap tahapan pemilihan, sehingga hak politik penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara setara dan bermartabat.

4. Pencalonan

Tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024 diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Trenggalek sesuai dengan jadwal nasional serta ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Seluruh tahapan telah dilaksanakan secara sistematis, mulai dari penelitian dan verifikasi dokumen administrasi, pemeriksaan kesehatan, hingga klarifikasi dan validasi akhir terhadap bakal pasangan calon. Setelah melalui rangkaian tersebut, KPU Kabupaten Trenggalek secara resmi menetapkan satu pasangan calon yang mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024. Penetapan ini dituangkan dalam dua dokumen resmi, yaitu:

1. Berita Acara Nomor: 210/PL.02.3-BA/3503/2024 tentang *Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024*, dan
2. Surat Keputusan Nomor: 743 Tahun 2024 tentang *Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024*.

Kedua dokumen tersebut ditetapkan pada tanggal 22 September 2024, dan menjadi dasar legal yang sah atas pencalonan pasangan tersebut dalam kontestasi Pilkada serentak.

Berdasarkan hasil penetapan tersebut, hanya terdapat satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak berkompetisi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024. Informasi lebih lanjut mengenai nama pasangan calon serta partai politik pengusungnya disajikan secara rinci dalam gambar 4.10, sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.



Penetapan pasangan calon ini menjadi tonggak awal dimulainya tahapan kampanye, yang diharapkan berlangsung secara adil, damai, dan demokratis hingga hari pemungutan suara. Proses ini menegaskan komitmen penyelenggara pilkada dalam menjaga integritas dan kredibilitas pelaksanaan Pilkada di tingkat daerah. Dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024, pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Trenggalek memiliki latar belakang

pendidikan yang berbeda namun saling melengkapi. Calon Bupati, Mochamad Nur Arifin, telah menempuh pendidikan terakhir di jenjang Strata Dua (S2) di Universitas Airlangga. Sementara itu, Calon Wakil Bupati, Syah Nata Negara, memiliki latar belakang pendidikan terakhir di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam penetapan nomor urut, Pasangan Nomor Urut 1 adalah kolom kosong (tidak bergambar) sesuai ketentuan pemilihan dengan calon tunggal. Sementara itu, Pasangan Nomor Urut 2 adalah pasangan Mochamad Nur Arifin dan Syah Muhammad Nata Negara yang secara resmi telah ditetapkan sebagai peserta Pilkada 2024. Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 4.11.



Gambar 4.11. Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

KPU Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dengan pendekatan yang menysasar beragam segmen masyarakat. Metode sosialisasi yang digunakan mencakup sosialisasi berbasis segmen pemilih, seperti pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas, serta tokoh masyarakat. Selain itu, sosialisasi berbasis media juga dilakukan sebagai bagian dari strategi penyebaran informasi yang lebih luas dan efektif. Untuk setiap kegiatan sosialisasi, jumlah target peserta ditetapkan antara 50 hingga 150

orang, dengan pertimbangan agar materi yang disampaikan dapat diterima secara optimal dan peserta mampu memahami dengan baik informasi terkait tahapan Pilkada 2024 yang disampaikan oleh KPU. Dalam kegiatan sosialisasi melalui media gathering, KPU Kabupaten Trenggalek turut melibatkan sekitar 60 orang perwakilan media massa, baik dari media cetak, elektronik, maupun media daring. Kehadiran insan pers ini menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi dua arah antara penyelenggara pilkada dan publik melalui pemberitaan yang akurat dan edukatif.

KPU Kabupaten Trenggalek memperkenalkan maskot Pilkada 2024 yang diberi nama GALIH dan GALUH. Keduanya merupakan pasangan gajah putih, yang diambil dari hewan mitologi dan cerita legenda masyarakat Trenggalek.



Gambar 4.12. Maskot Pilkada Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

GALIH dan GALUH, maskot Pilkada Trenggalek 2024, merupakan pasangan gajah putih yang melambangkan kehidupan penuh pengorbanan, dijalani dengan hati yang putih—simbol kejujuran, ketulusan, dan integritas dalam demokrasi. GALIH (Trenggalek Memilih) sebagai gajah jantan dan GALUH (Trenggalek Luhur) sebagai gajah betina mencerminkan kesetaraan suara laki-laki dan perempuan, serta semangat inklusivitas dalam Pilkada. Dengan wajah ceria, warna putih dominan, dan sepatu olahraga yang dikenakan, keduanya menggambarkan semangat aktif dan siap bergerak dalam menyosialisasikan Pilkada, terutama kepada pemilih pemula dan generasi muda. Maskot ini mengajak masyarakat untuk menjadikan hak pilih sebagai wujud nilai luhur dan pengamalan Pancasila.

Partisipasi aktif diharapkan melahirkan pemimpin yang amanah dan menjadikan Trenggalek sebagai kabupaten yang demokratis dan bermartabat.

KPU Kabupaten Trenggalek telah menetapkan fasilitas kampanye bagi pasangan calon berdasarkan Berita Acara Nomor: 217/PL.02.4-BA/3503/2024 tanggal 28 September 2024. Fasilitas kampanye yang disediakan meliputi Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye (BK), serta iklan kampanye di media massa. Selain itu, KPU juga memfasilitasi debat publik sebagai sarana penyampaian visi, misi, dan program kerja pasangan calon kepada masyarakat. Debat publik tersebut diselenggarakan sebanyak satu kali, yakni pada tanggal 6 November 2025, bertempat di HARRIS Hotel & Conventions Surabaya, dan disiarkan secara langsung oleh Kompas TV. Debat ini mengangkat tema-tema strategis seperti pembangunan daerah, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta penguatan demokrasi di tingkat lokal.

Dalam pelaksanaan kampanye daring, pasangan calon turut memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi politik yang efektif, khususnya untuk menjangkau pemilih muda dan pemilih pemula. Terdapat dua akun Instagram resmi yang digunakan, yaitu @avinml milik Calon Bupati Mochamad Nur Arifin dan @syahmn milik Calon Wakil Bupati Syah Muhamad Nata Negara. Keduanya aktif mempublikasikan kegiatan kampanye, program kerja, serta pesan-pesan politik dengan mengukung tagar kampanye #pangguh sebagai simbol semangat dan konsistensi dalam membangun Trenggalek.

6. Logistik

KPU Kabupaten Trenggalek telah melakukan pendataan dan penyusunan strategi logistik secara menyeluruh. Kegiatan ini mencakup perencanaan jumlah kebutuhan, metode pengadaan, moda transportasi distribusi, penugasan petugas *setting* dan *packing*, serta analisis kondisi geografis wilayah pendistribusian. Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan logistik yang merujuk pada Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024, KPU Kabupaten Trenggalek menetapkan berbagai jenis perlengkapan logistik yang mencakup bilik suara, surat suara, tinta, kotak suara, alat tulis, lem, label, segel, serta berbagai jenis formulir dan sampul administrasi. Total kebutuhan logistik yang dicatat mencakup ribuan unit perlengkapan untuk melayani 1.115 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh kecamatan. Secara lengkap disajikan pada gambar 4.13.



Gambar 4.13. Jumlah Penerimaan Logistik Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

Dalam pendistribusian logistik, KPU Kabupaten Trenggalek menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai mitra resmi pengangkutan, guna memastikan pengiriman logistik dari tingkat kabupaten ke kecamatan hingga ke TPS berjalan lancar dan tepat waktu. Selain itu, KPU juga mengerahkan sejumlah petugas *setting* dan *packing* untuk menyiapkan logistik sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS. Meskipun secara geografis Kabupaten Trenggalek memiliki wilayah yang tergolong sulit dijangkau, seperti beberapa titik pada daerah Kecamatan Munjungan, Pule, Bendungan, dan Dongko, seluruh proses distribusi logistik tetap berjalan sesuai jadwal tanpa hambatan yang berarti. Hal ini menjadi indikator kesiapan teknis KPU dalam menyelenggarakan pilkada yang efektif, efisien, dan merata hingga ke wilayah dengan aksesibilitas terbatas.



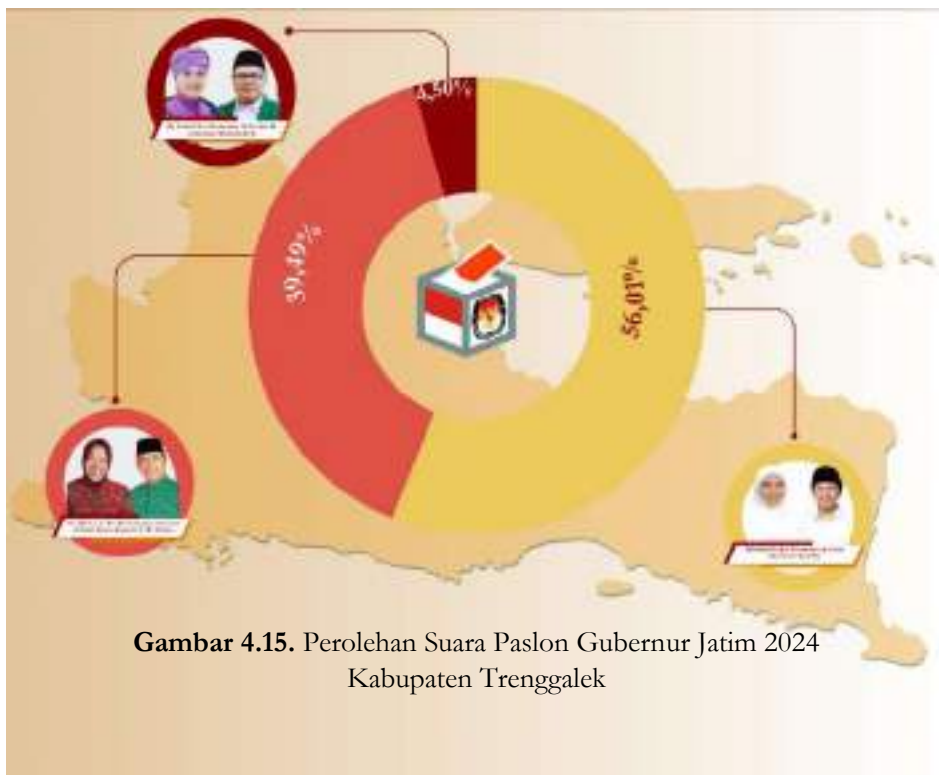


Gambar 4.14. Pendistribusian Logistik Pilkada Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

Dalam rangka distribusi logistik Pemilihan Tahun 2024 hingga ke tingkat TPS di Kabupaten Trenggalek, KPU setempat mengerahkan dua jenis moda transportasi utama, yaitu mobil truk dan mobil pick-up. Tercatat sebanyak 25 unit mobil truk digunakan untuk mendistribusikan logistik dari tingkat KPU ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Sementara itu, 50 unit mobil pick-up dikerahkan untuk mendukung distribusi lanjutan dari tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara) menuju ke masing-masing TPS. Pemilihan moda transportasi ini disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan distribusi logistik agar tepat waktu dan aman sampai ke tujuan.

7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Trenggalek disajikan pada gambar 4.15.



Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak meraih dukungan tertinggi dengan jumlah suara sebesar 198.753 (56,01%), unggul signifikan dibandingkan pasangan lainnya. Di posisi kedua, pasangan Dr. (H.C.) Ir. Tri Rismaharini, M.T. – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), S.I.P., M.Kes. memperoleh 140.121 suara (39,49%), menunjukkan basis dukungan yang cukup besar meskipun belum mampu menyaingi pasangan petahana. Sementara itu, pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah, M.Si. – H. Lukmanul Hakim, M.Si. berada di urutan terakhir dengan perolehan suara sebanyak 15.958 (4,50%). Total suara sah yang masuk tercatat sebanyak 354.832 suara, mencerminkan partisipasi publik dalam menentukan arah kepemimpinan provinsi ke depan.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek pada Pilkada 2024 disajikan pada gambar 4.16.



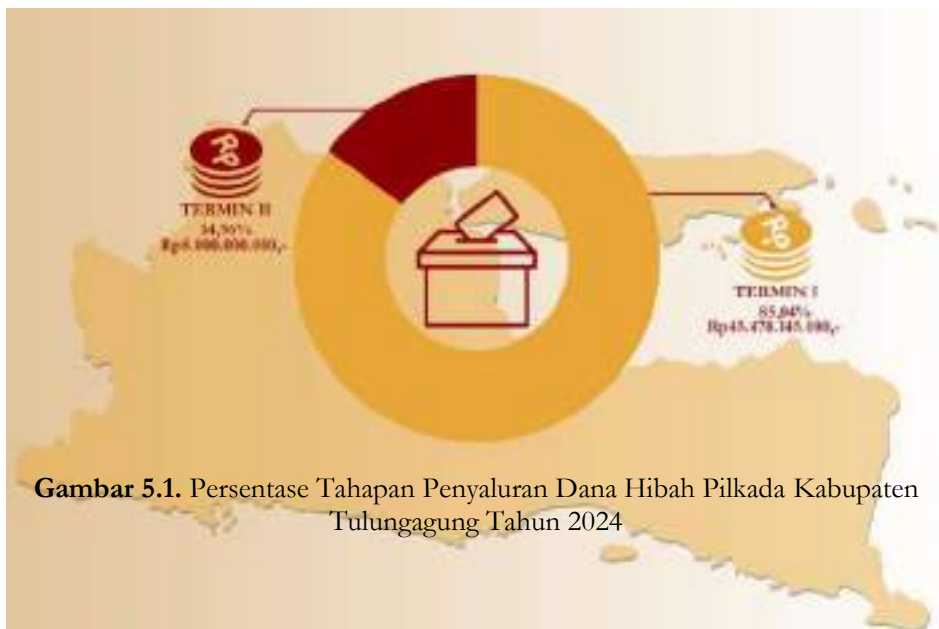
Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, pasangan Mochamad Nur Arifin – Syah Muhamad Nata Negara berhasil meraih kemenangan telak dengan memperoleh 282.576 suara (80,80%), menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi terhadap kepemimpinan mereka. Sementara itu, opsi kolom kosong dipilih oleh 67.131 pemilih (19,20%), mencerminkan adanya bagian masyarakat yang memilih untuk tidak memberikan suara kepada calon manapun. Total partisipasi suara pada pemilihan ini menunjukkan dinamika demokrasi yang kuat dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kepemimpinan daerah.

KABUPATEN TULUNGAGUNG

1. Perencanaan Program dan Anggaran

KPU Kabupaten Tulungagung menyusun rencana program dan anggaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 543 Tahun 2022, yang mengatur standar teknis penyusunan anggaran kebutuhan barang/jasa serta honorarium penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dalam proses penyusunannya, KPU Tulungagung juga mengacu pada skema pembiayaan bersama (*sharing budget*) dengan pemerintah provinsi, karena Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dalam agenda Pilkada Serentak 2024. Skema pembiayaan bersama tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/87/KPTS/013/2022.

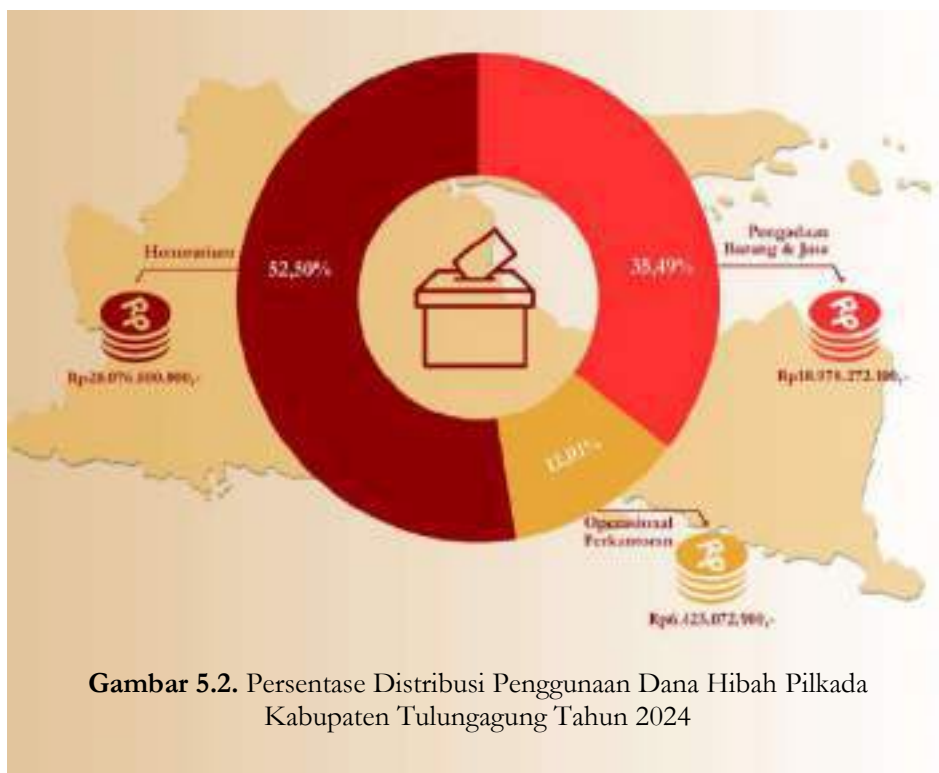
Pembahasan lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tulungagung, yang menghasilkan kesepakatan atas Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) untuk penyelenggaraan Pilkada sebesar Rp53.478.145.000 yang direncanakan dicairkan dalam dua tahap. Rincian distribusi dana hibah dalam dua tahap tersebut ditampilkan pada gambar 5.1 berikut.



Gambar 5.1. Persentase Tahapan Penyaluran Dana Hibah Pilkada Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

Termin I sebesar Rp8.000.000.000 (14,96%) pada Tahun Anggaran 2023, dan Termin II sebesar Rp45.478.145.000 (85,04%) pada Tahun Anggaran 2024. Kesepakatan resmi dituangkan dalam Berita Acara Bersama antara KPU dan TAPD dengan Nomor 200/1655/49.03/2023 dan Nomor 398/PP.01.2-BA/3504/2023, yang menjadi dasar pelaksanaan penganggaran dan pencairan dana hibah secara bertahap.

Selanjutnya, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan pada 20 November 2024 di Pendopo Kongas Arum Kusumaningbangsa, yang tertuang dalam NPHD Nomor 200.2/2093/35.04/2023 dan Nomor 2/KU.07-PKS/3504/2023, sebagai bentuk formalisasi komitmen pendanaan antara Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan KPU Kabupaten Tulungagung. Komposisi realisasi dana hibah berdasarkan klasifikasi anggaran tersebut dapat dilihat pada gambar 5.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.

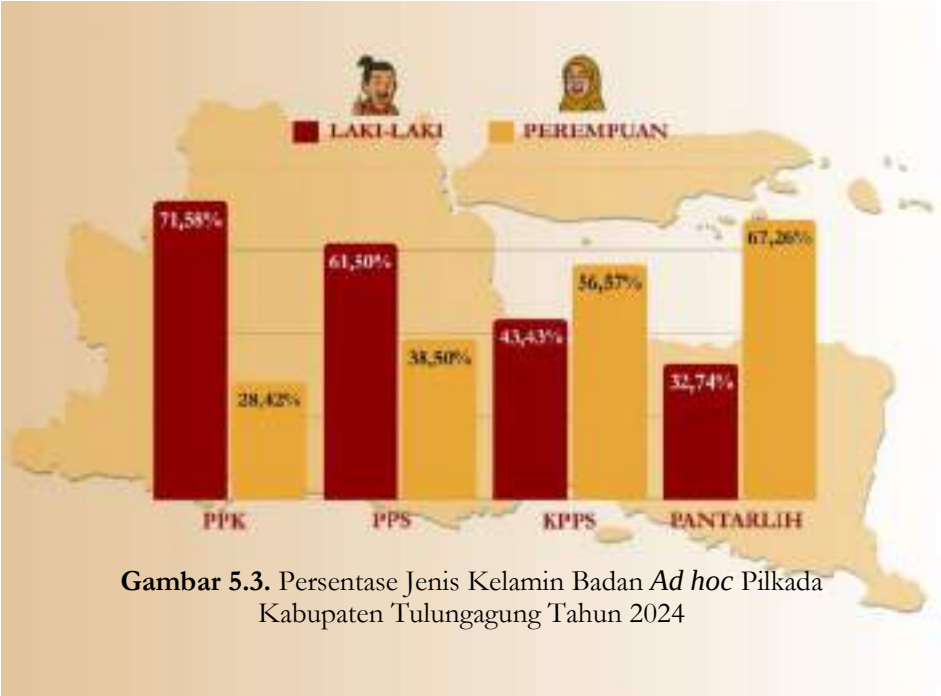


Anggaran hibah untuk penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 sebesar Rp53.478.145.000 dialokasikan ke dalam tiga komponen utama. Sebagian besar anggaran, yakni sebesar Rp28.076.800.000 (52,50%), diperuntukkan bagi komponen honorarium, yang mencakup pembayaran bagi badan *ad hoc* dan petugas pemilihan. Selanjutnya, Rp18.978.272.100 (35,49%) dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa, meliputi logistik pilkada dan kebutuhan teknis lainnya. Sementara itu, komponen operasional perkantoran mendapatkan alokasi sebesar Rp6.423.072.900 (12,01%), guna mendukung kegiatan administrasi, koordinasi, serta operasional kelembagaan KPU Tulungagung selama tahapan Pilkada berlangsung. Komposisi ini mencerminkan prioritas anggaran yang berfokus `pada pelaksanaan teknis dan dukungan sumber daya manusia.

2. Badan *Ad hoc*

Pembentukan badan *ad hoc* untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 merujuk pada PKPU Nomor 8 Tahun 2022, yang mengatur struktur dan tata kerja badan *ad hoc* pilkada. Berdasarkan

regulasi tersebut, KPU Tulungagung menetapkan empat jenis badan *ad hoc*, yakni PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih, sesuai kebutuhan wilayah dan jumlah TPS. PPK dibentuk sebanyak 95 orang untuk 19 kecamatan, dan PPS sebanyak 813 orang di seluruh desa/kelurahan. Untuk mendukung pemutakhiran data pemilih, Pantarlih ditetapkan sebanyak 3.195 orang di 1.616 TPS sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2024. Sedangkan KPPS dibentuk sebanyak 11.410 orang untuk 1.630 TPS. Sebaran demografi berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 5.3 berikut.

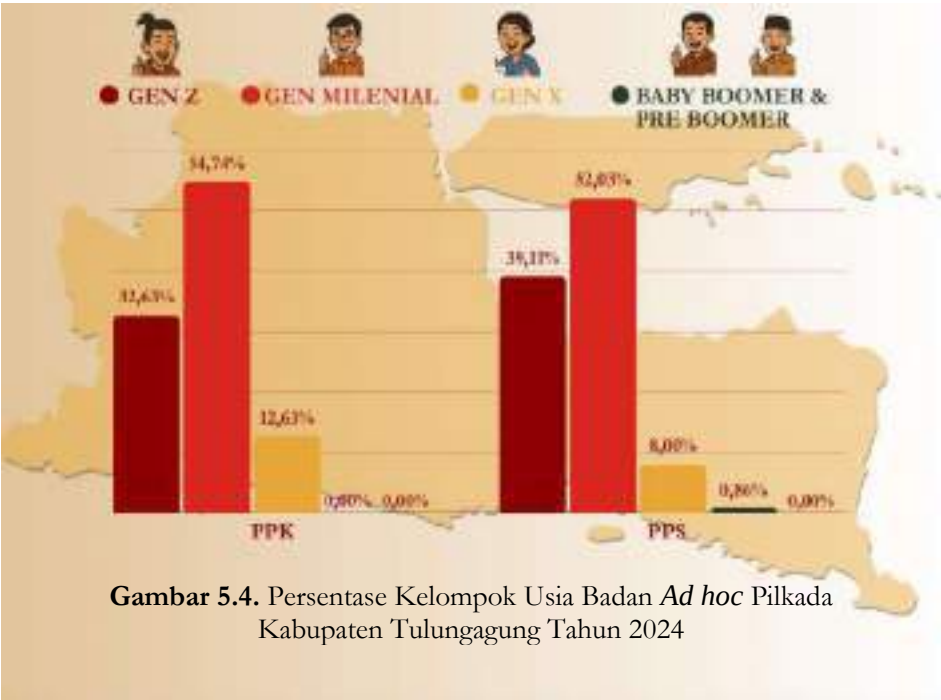


Gambar 5.3. Persentase Jenis Kelamin Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

Distribusi jenis kelamin pada penyelenggara badan *ad hoc* di Kabupaten Tulungagung menunjukkan dominasi yang bervariasi antara laki-laki dan perempuan di tiap tingkatan. Pada tingkat PPK, laki-laki mendominasi dengan jumlah 68 orang (71,58%), sementara perempuan sebanyak 27 orang (28,42%). Komposisi serupa terjadi di tingkat PPS, di mana laki-laki berjumlah 500 orang (61,50%) dan perempuan sebanyak 313 orang (38,50%). Sementara itu, pola ini berbalik di tingkat KPPS dan Pantarlih. Pada KPPS, perempuan mendominasi dengan 6.463 orang (56,57%), dibandingkan 4.962 laki-laki (43,43%). Demikian pula pada Pantarlih, perempuan berjumlah 2.149 orang (67,26%), lebih banyak dari 1.046 laki-laki (32,74%). Komposisi ini mencerminkan keterlibatan

signifikan perempuan dalam penyelenggaraan pilkada, terutama di tingkat TPS dan dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 5.4 berikut.



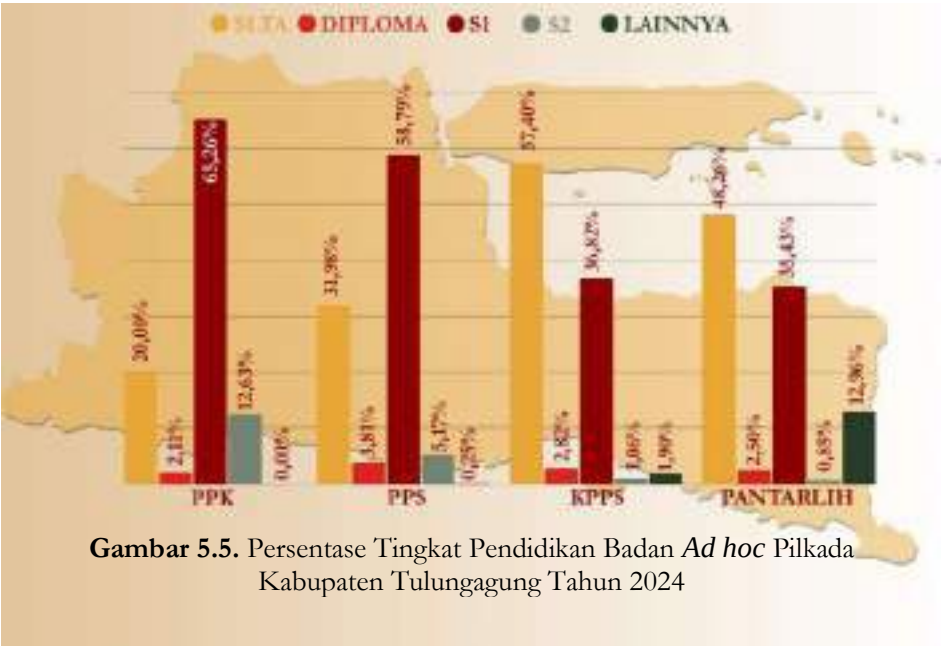
Gambar 5.4. Persentase Kelompok Usia Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

Komposisi usia anggota PPK dan PPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tulungagung menunjukkan dominasi kelompok usia produktif. Pada tingkat PPK, mayoritas anggota berada dalam rentang usia 28–43 tahun, yakni sebanyak 52 orang (54,74%), disusul oleh kelompok usia 18–27 tahun sebanyak 31 orang (32,63%). Kelompok usia 44–59 tahun hanya mencakup 12 orang (12,63%), sementara tidak ada anggota PPK yang berasal dari kelompok usia di atas 59 tahun maupun usia 17 tahun.

Kondisi serupa juga tampak pada struktur usia PPS. Kelompok usia 28–43 tahun merupakan yang terbesar, yakni 423 orang (52,03%), kemudian diikuti oleh usia 18–27 tahun sebanyak 318 orang (39,11%). Kelompok usia 44–59 tahun mencakup 65 orang (8,00%), dan terdapat 7 orang (0,86%) yang berasal dari kelompok usia 60–78 tahun. Tidak ada anggota PPS yang berasal dari usia 17 tahun atau di atas 79 tahun. Data ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan badan *ad hoc* didominasi oleh generasi muda dan usia kerja produktif, yang diharapkan dapat

mendukung efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pilkada di tingkat kecamatan dan desa.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 5.5.



Gambar 5.5. Persentase Tingkat Pendidikan Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

Komposisi tingkat pendidikan badan *ad hoc* pada Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa mayoritas anggota berasal dari kalangan berpendidikan tinggi, terutama pada jenjang S1. Pada tingkat PPK, sebanyak 62 orang (65,26%) merupakan lulusan S1, diikuti oleh 12 orang (12,63%) berlatar belakang S2, dan 19 orang (20,00%) lulusan SLTA. Sementara itu, lulusan Diploma hanya berjumlah 2 orang (2,11%). Pada jenjang PPS, komposisi pendidikan serupa terlihat, dengan dominasi lulusan S1 sebanyak 478 orang (58,79%), disusul SLTA sebanyak 260 orang (31,98%), S2 sebanyak 42 orang (5,17%), dan Diploma sebanyak 31 orang (3,81%). Terdapat 2 orang (0,25%) dari kategori pendidikan lainnya. Berbeda dengan komposisi PPK dan PPS, pada tingkatan KPPS dan Pantarlih komposisi pendidikan menunjukkan dominasi lulusan SLTA, yaitu masing-masing 6.558 orang (57,40%) dan 1.542 orang (48,26%). Diikuti oleh lulusan S1 masing-masing sebanyak 4.207 orang (36,82%) dan 1.132 orang (35,43%). Untuk lulusan S2, jumlahnya relatif kecil yakni 121 orang (1,06%) di KPPS dan 27 orang

(0,85%) di Pantarlih. Kategori pendidikan lainnya cukup signifikan pada Pantarlih sebanyak 414 orang (12,96%), yang kemungkinan besar mencakup non-formal atau belum menyelesaikan jenjang tertentu. Distribusi ini mencerminkan keberagaman latar belakang pendidikan penyelenggara *ad hoc*, dengan kecenderungan pendidikan tinggi pada PPK dan PPS, serta dominasi pendidikan menengah atas (SLTA) pada KPPS dan Pantarlih yang lebih bersifat teknis operasional di lapangan.

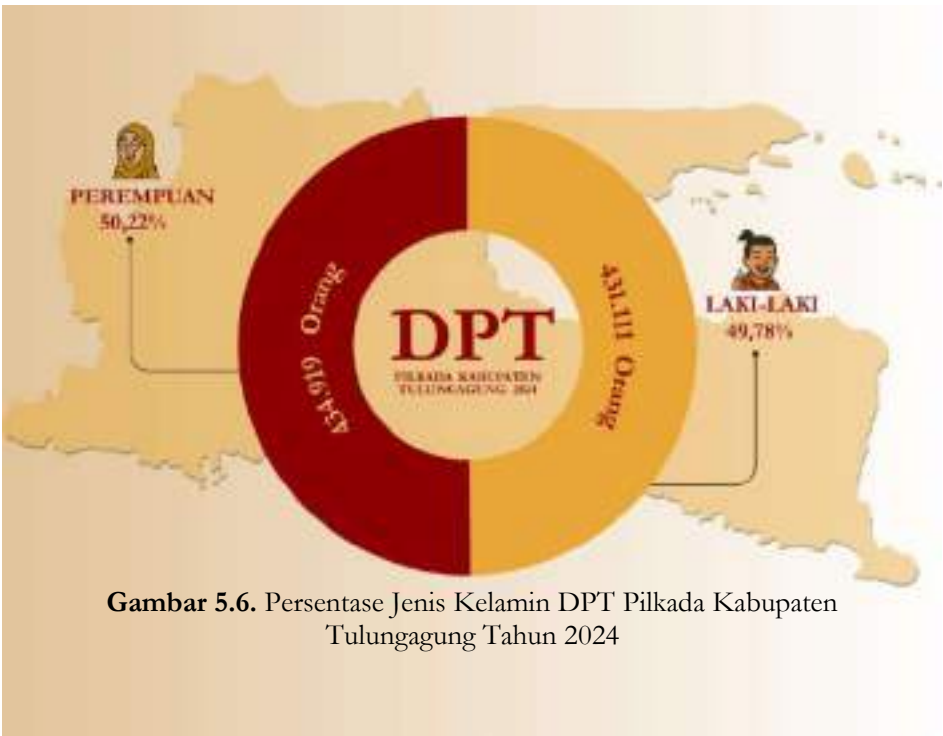
Dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Tulungagung, tercatat adanya keterlibatan 1 orang penyandang disabilitas sebagai bagian dari Badan *ad hoc* pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kehadiran penyelenggara dari kalangan difabel ini mencerminkan upaya inklusivitas dalam proses demokrasi, meskipun jumlahnya masih sangat terbatas. KPU Kabupaten Tulungagung menunjukkan komitmen untuk memberikan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dalam proses penyelenggaraan pilkada.

3. Pemutakhiran Data

KPU Kabupaten Tulungagung memulai tahapan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 dengan melakukan pemetaan DP4 hasil sinkronisasi yang diterima melalui surat KPU RI Nomor 806/PL.02-SD/14/2024 tanggal 27 Mei 2024. Sebanyak 875.182 pemilih dipetakan ke dalam 1.464 TPS, namun karena rata-rata pemilih melebihi batas maksimal 600 orang per TPS sesuai PKPU Nomor 7 Tahun 2024, dilakukan pemetaan ulang menjadi 1.616 TPS. Tahap selanjutnya adalah Coklit yang dilaksanakan oleh Pantarlih dari tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024 untuk mencocokkan data pemilih dengan dokumen kependudukan. Hasil Coklit dituangkan dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang disusun PPS bersama Pantarlih pada 25–31 Juli 2024, disusul dengan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPHP serentak di tingkat PPS (3 Agustus) dan PPK (7 Agustus).

KPU Tulungagung juga menetapkan TPS Lokasi Khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Tulungagung berdasarkan permohonan dari pihak lapas melalui surat Nomor W.15.PAS.PAS.26-UM.01.01-1152. Sebanyak 2 TPS khusus didirikan di Lapas dengan jumlah pemilih 647 orang. Pada tahap penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), KPU menerima permohonan penambahan 12 TPS dari beberapa desa di Kecamatan Sendang, Karangrejo, Kalidawir, dan Tanggunggunung. Total DPS yang ditetapkan berjumlah 868.039 pemilih terdiri atas 432.125 laki-

laki dan 435.914 perempuan, tersebar di 1.640 TPS (1.638 reguler dan 2 lokasi khusus) pada 19 kecamatan dan 271 desa/kelurahan. Selanjutnya, pada tahap penyusunan DPSHP, KPU menerima data mutakhir Lahir-Mati-Pindah-Datang (LAMPID) dari Kemendagri melalui KPU RI. Setelah proses pembersihan data ganda dan koreksi lainnya, ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui rapat pleno terbuka pada 20 September 2024, dengan total 866.030 pemilih. Adapun sebaran demografi DPT Pilkada Kabupaten Tulungagung berdasarkan jenis kelamin disajikan pada gambar 5.6 berikut.



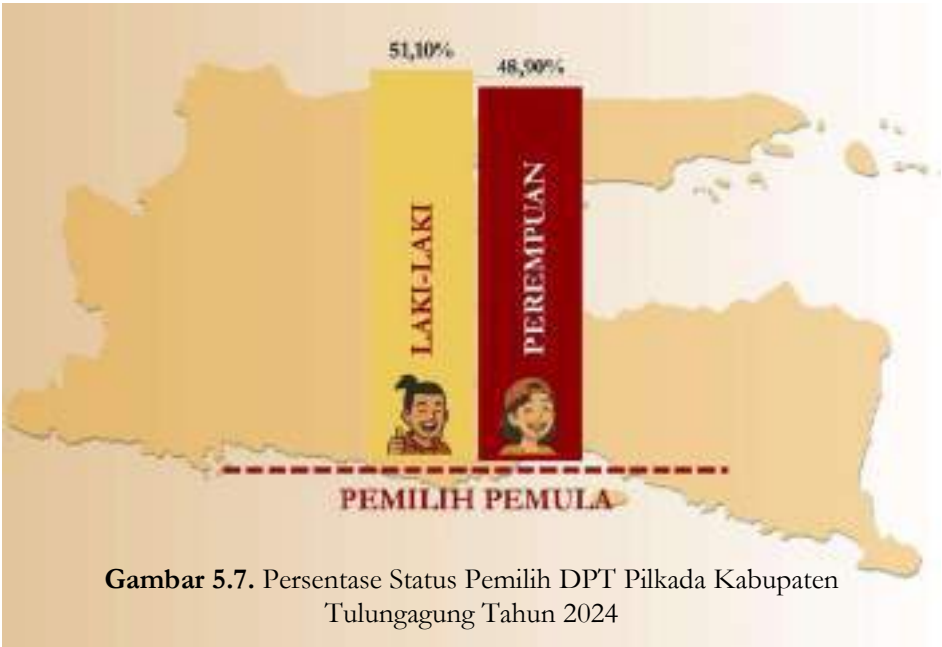
Gambar 5.6. Persentase Jenis Kelamin DPT Pilkada Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

Berdasarkan hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Tulungagung menunjukkan komposisi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Tercatat sebanyak 431.111 pemilih laki-laki (49,78%) dan 434.919 pemilih perempuan (50,22%), mencerminkan partisipasi pemilih yang merata antar jenis kelamin dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini.

Berdasarkan hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Tulungagung menunjukkan komposisi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Tercatat sebanyak 431.111 pemilih laki-laki (49,78%) dan 434.919 pemilih perempuan (50,22%),

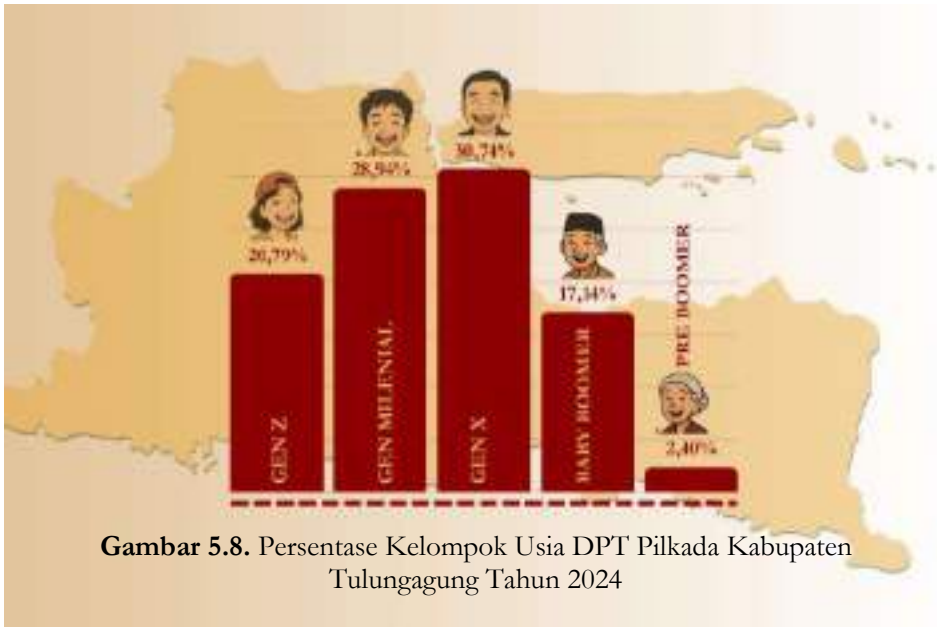
mencerminkan partisipasi pemilih yang merata antar jenis kelamin dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini.

Pemetaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut karakteristik pemilih dibagi menjadi dua, yaitu pemilih pemula. Adapun secara lengkap disajikan dalam gambar 5.7.



Berdasarkan status pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024, terdapat 15.555 pemilih pemula, terdiri dari 7.948 laki-laki (51,10%) dan 7.607 perempuan (48,90%).

Sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tulungagung pada Pilkada 2024 berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran mengenai komposisi usia pemilih yang akan menggunakan hak suaranya yang disajikan pada gambar 5.8.



Sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 didominasi oleh kelompok usia produktif dan dewasa akhir. Kelompok usia 44–59 tahun tercatat sebagai yang terbanyak, yakni 266.213 pemilih (30,74%), diikuti oleh kelompok 28–43 tahun sebanyak 250.607 pemilih (28,94%). Usia 18–27 tahun mencakup 164.419 pemilih (18,99%), sedangkan pemilih lansia (60–78 tahun) sebanyak 148.440 orang (17,14%). Pemilih usia >79 tahun berjumlah 20.796 orang (2,40%), dan pemilih usia 17 tahun berjumlah 15.555 orang (1,80%).

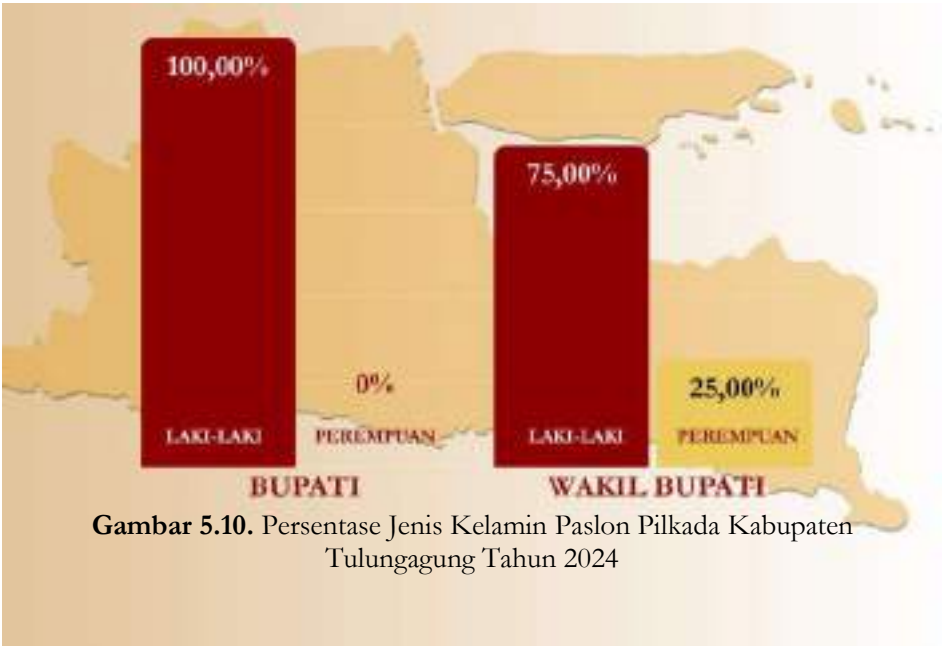
4. Pencalonan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 menjadi momentum penting dalam menentukan arah kepemimpinan dan pembangunan daerah. Salah satu jalur pencalonan yang tersedia adalah jalur perseorangan, yang memungkinkan individu non-partai untuk maju sebagai calon kepala daerah. Namun, untuk mencalonkan diri melalui jalur ini, terdapat sejumlah persyaratan administratif dan dukungan masyarakat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dari KPU Kabupaten Tulungagung.

Setelah membuka layanan *helpdesk* pencalonan perseorangan hingga batas waktu yang ditetapkan, tidak ada calon yang mendaftar melalui jalur ini. Artinya, seluruh peserta Pilkada 2024 di Kabupaten Tulungagung berasal dari jalur partai politik.

Gambar 5.9. Persentase Kelompok Usia DPT Pilkada Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung disajikan pada gambar 5.10 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung disajikan pada gambar 5.11.



Gambar 5.10. Persentase Jenis Kelamin Paslon Pilkada Kabupaten Tulungagung Tahun 2024



Gambar 5.11. Persentase Tingkat Pendidikan Paslon Pilkada Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

Komposisi jenis kelamin pada pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh calon Bupati (4 orang) merupakan laki-laki (100%). Sementara itu, dari empat calon Wakil Bupati, terdapat 3 laki-laki (75%) dan 1 perempuan (25%).

Data ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kontestasi kepala daerah masih terbatas, khususnya pada posisi calon Bupati. Sementara itu, dari sisi latar belakang pendidikan, mayoritas calon Bupati Tulungagung Tahun 2024 merupakan lulusan S2, yaitu sebanyak 3 orang (75%), dan 1 orang (25%) berpendidikan terakhir SLTA. Sedangkan, seluruh calon Wakil Bupati (4 orang) memiliki latar belakang pendidikan S1 (100%), tanpa ada yang berlatar belakang SLTA maupun S2. Komposisi ini menunjukkan bahwa calon kepala daerah umumnya memiliki tingkat pendidikan tinggi, yang diharapkan berkontribusi pada kualitas kepemimpinan dan kebijakan ke depan.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 5.12.



Gambar 5.12. Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

KPU Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dengan pendekatan yang menysasar beragam segmen masyarakat. Metode sosialisasi yang digunakan mencakup sosialisasi berbasis segmen pemilih, seperti pemilih pemula, perempuan, serta tokoh masyarakat. Selain itu, sosialisasi berbasis media juga dilakukan sebagai bagian dari strategi penyebaran informasi yang lebih luas dan efektif.

Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024, sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam Pilkada dilakukan melalui dua pendekatan

utama, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Kegiatan langsung meliputi peluncuran pilkada, deklarasi damai, forum temu warga, hingga *goes to school/campus*. Sedangkan sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media cetak, elektronik, media sosial, serta penyebaran alat dan bahan kampanye seperti spanduk, baliho, dan suvenir.

KPU Tulungagung melaksanakan sosialisasi di tiga tingkat:

1. Kabupaten – oleh KPU Tulungagung, mencakup berbagai kegiatan publik dan media massa.
2. Kecamatan – oleh PPK, dengan kegiatan seperti forum warga dan sosialisasi tahapan pilkada.
3. Desa/Kelurahan – oleh PPS, fokus pada forum warga dan kegiatan keliling (ledang).

Sosialisasi menjangkau berbagai segmen masyarakat, termasuk pemilih pemula, muda, perempuan, penyandang disabilitas, komunitas, hingga kelompok keagamaan.

Beberapa kegiatan besar antara lain:

1. Peluncuran Pilkada diikuti oleh 2.500 peserta
2. *Goes to Campus dan Goes to School* menjangkau 1.870 peserta
3. Forum dan diskusi bersama ormas dan mahasiswa, seperti GMNI, Korps HMI-Wati, IMM, PMII, serta Dharma Wanita Persatuan.

KPU juga aktif di media sosial resmi, yakni:

1. Instagram: @kputulungagung
2. TikTok: @kputulungagung
3. X (Twitter): @kpu_tulungagung
4. YouTube: KPU Tulungagung

Selain itu, KPU memproduksi berbagai alat peraga dan suvenir sosialisasi, antara lain: spanduk, baliho, *roll banner*, boneka maskot “Si Suta”, kaos, *tumbler*, *mug*, vandel, hingga gantungan kunci.



Gambar 5.13. Maskot Pilkada Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

Maskot resmi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 adalah SI SUTA (Suara Tulungagung) yang mengambil bentuk Reog Kendang, sebuah representasi dari kesenian khas Tulungagung. Pemilihan Reog Kendang sebagai maskot terinspirasi dari filosofi seni ini, di mana kendang digambarkan menyerupai sosok manusia lengkap dengan anggota badan, sambil memegang alat coblos dan papan bertuliskan “Rabu, 27 November 2024” sebagai hari pemungutan suara.

Makna filosofis Reog Kendang terletak pada kerja kolektif: dimainkan oleh beberapa orang dengan peran berbeda namun saling melengkapi untuk menghasilkan harmoni irama dan tarian. Nilai ini diangkat sebagai simbol harapan agar seluruh elemen masyarakat Tulungagung dapat bersatu, bergotong royong, dan guyup rukun dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024.

Semangat ini sejalan dengan *tagline* Pilkada Tulungagung 2024, yaitu: “*Megung Sengkuhyung Pilkada Tulungagung*”, yang mengajak semua pihak untuk turut serta menyemarakkan dan menjaga kualitas demokrasi di Bumi Tulungagung.

Pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024. Kampanye

dapat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat, pemasangan alat peraga kampanye, iklan melalui media massa cetak dan elektronik, serta kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. KPU Kabupaten Tulungagung memfasilitasi empat metode kampanye, yaitu debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK), dan iklan di media cetak serta elektronik. Debat publik dilaksanakan dua kali, masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan tema “Peningkatan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung” dan pada tanggal 22 November 2024 dengan tema “Menyelesaikan Persoalan Daerah, Menyeraskan Pembangunan Daerah, serta Memperkokoh Persatuan Negara Republik Indonesia dan Bangsa.” Sementara itu, dalam hal penyebaran bahan kampanye, KPU memfasilitasi produksi selebaran, brosur, dan pamflet, yang kemudian diserahkan kepada masing-masing pasangan calon untuk disebarkan kepada masyarakat. Adapun desain bahan kampanye disiapkan langsung oleh pasangan calon.





Gambar 5.14. Bahan Kampanye Pilkada Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

6. Logistik

Logistik memegang peranan krusial dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024. Tanpa dukungan logistik yang memadai, proses pemilihan tidak akan dapat berjalan. Logistik berfungsi untuk menjamin hak setiap warga dalam memberikan suara, sehingga harus memenuhi prinsip tepat spesifikasi teknis, kualitas, kuantitas, prosedur, waktu, anggaran, dan sasaran. Tahapan pengadaan logistik dimulai setelah penyusunan rencana anggaran dan biaya oleh unsur-unsur terkait, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ). Pengadaan logistik dilaksanakan oleh dua level, yakni KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Tulungagung, dengan metode *E-Purchasing* yang dikonsolidasikan secara nasional.

Penandatanganan kontrak pengadaan logistik dilaksanakan secara nasional di Jakarta dan terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup kontrak pengadaan kotak suara, bilik suara, dan segel, sementara tahap kedua mencakup surat suara, alat bantu tuna netra, daftar pasangan calon, formulir C. Hasil-KWK, salinannya, serta berbagai jenis

sampul (kubus, biasa, dan formulir). Seluruh proses dilakukan secara terencana untuk memastikan logistik tersedia tepat waktu dan sesuai kebutuhan di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung. Rincian distribusi logistik secara lengkap disajikan pada gambar 5.15.



Gambar 5.15. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

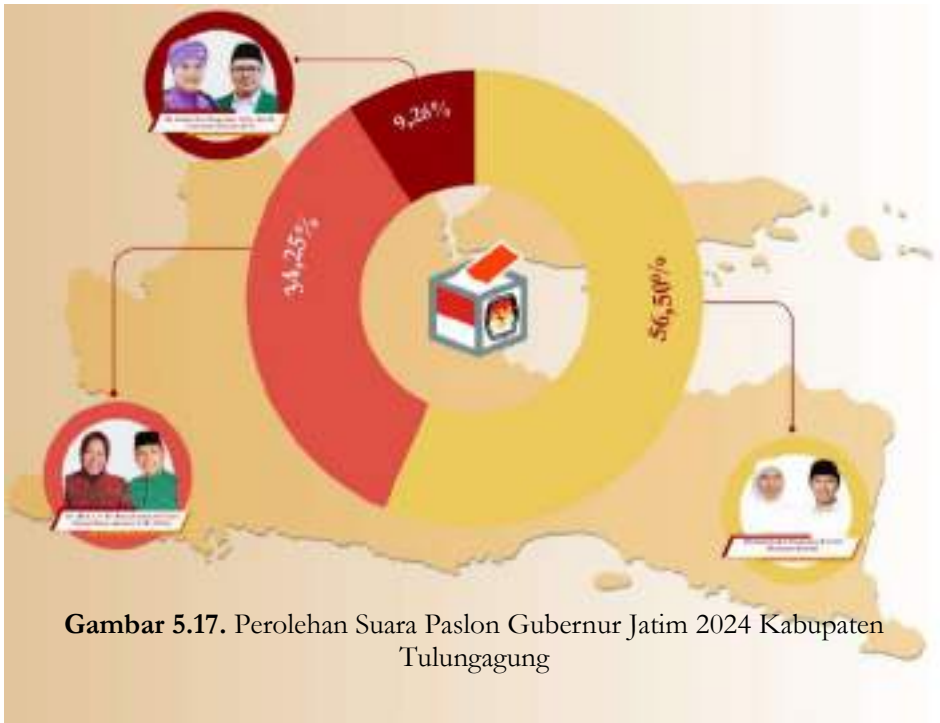
Dalam pelaksanaan distribusi logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, KPU Kabupaten Tulungagung menggunakan dua jenis moda transportasi utama, yakni mobil truk dan mobil pick-up, sesuai dengan kebutuhan di masing-masing tingkat wilayah. Berdasarkan data, untuk distribusi dari KPU ke tingkat PPK digunakan 41 unit mobil truk, kemudian 43 unit mobil truk juga digunakan untuk mengantar logistik ke PPS. Selanjutnya, untuk distribusi logistik hingga ke tingkat TPS, digunakan 2 unit mobil truk serta 269 unit mobil pick-up. Sementara itu, moda transportasi udara seperti pesawat atau helikopter tidak digunakan karena seluruh wilayah distribusi dapat dijangkau melalui jalur darat. Pemilihan jenis transportasi ini disesuaikan dengan kondisi geografis serta efektivitas pengiriman logistik ke seluruh pelosok Kabupaten Tulungagung.



Gambar 5.16. Proses Persiapan dan Distribusi Logistik Pilkada Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

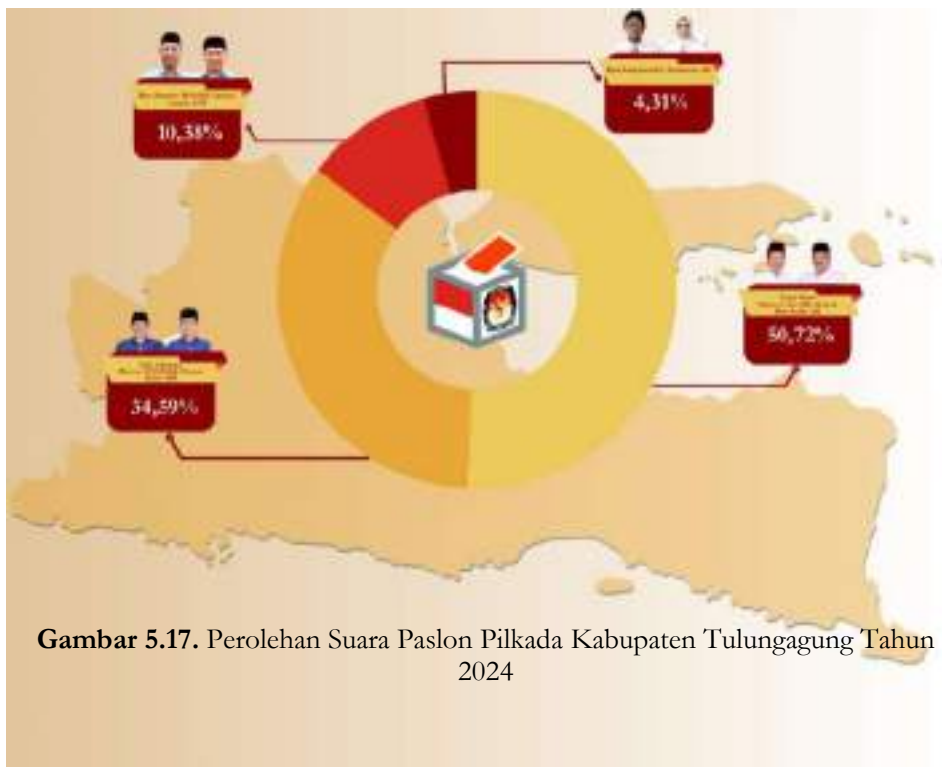
7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Tulungagung disajikan pada gambar 5.17.



Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Kabupaten Tulungagung, pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak memperoleh suara terbanyak dengan total 327.853 suara (56,50%), unggul dari pasangan lainnya. Di posisi kedua, pasangan Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) meraih 198.721 suara (34,25%), disusul oleh pasangan Luluk Nur Ihamidah – Lukmanul Hakim yang memperoleh 53.718 suara (9,26%). Hasil ini mencerminkan dominasi dukungan masyarakat Tulungagung terhadap pasangan petahana dalam kontestasi pemilihan gubernur.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung pada Pilkada 2024 disajikan pada gambar 5.18.



Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 menunjukkan bahwa pasangan Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M. berhasil memperoleh suara terbanyak dengan 297.882 suara, yang setara dengan 50,72% dari total suara sah. Kemenangan ini menunjukkan dukungan yang kuat dari masyarakat Tulungagung terhadap pasangan tersebut, yang berhasil meraih lebih dari separuh suara pemilih dalam satu putaran pemilihan. Di posisi kedua, pasangan Des. Maryoto Birowo, M.M. – Didik Girnoto Yekti, S.A.P. memperoleh 203.107 suara atau 34,59%. Sementara itu, pasangan Drs. Santoso, M.Si. – KH. Samsul Umam, S.Pd. menempati peringkat ketiga dengan perolehan 60.962 suara (10,38%), dan pasangan Budi Setijahadi – Hj. Susilowati, S.E. berada di posisi keempat dengan 25.298 suara (4,31%).

BAGIAN 6 _____

KABUPATEN BLITAR

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Blitar telah dilaksanakan pada hari Senin, 13 November 2024. Penanda-tanganan ini dilakukan secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Blitar, dengan nilai hibah sebesar Rp64.000.000.000 (enam puluh empat miliar rupiah). Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 6.1 berikut.

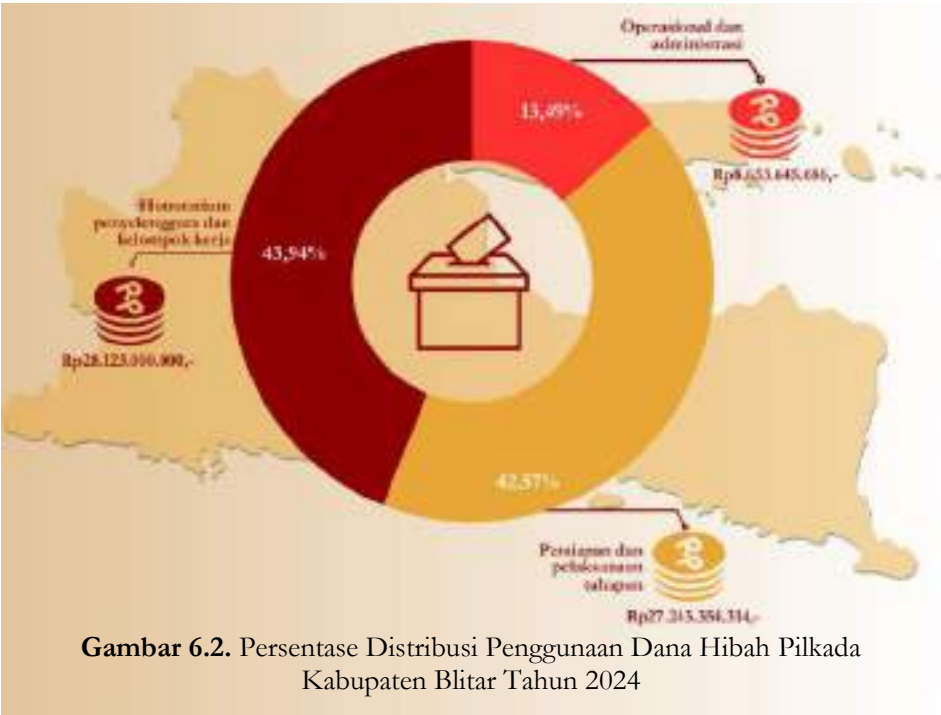


Skema penyaluran dana hibah untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Blitar dilaksanakan secara bertahap dalam dua termin pencairan. Tahap pertama sebesar Rp25.600.000.000 atau 40% dari total anggaran dicairkan 14 hari setelah penandatanganan NPHD. Dana ini digunakan untuk mendukung kesiapan awal tahapan Pilkada, termasuk sosialisasi, perencanaan teknis, dan kebutuhan kelembagaan KPU Kabupaten Blitar.

Sementara itu, tahap kedua sebesar Rp38.400.000.000 atau 60% dari total dana hibah dijadwalkan dicairkan lima bulan sebelum hari

pemungutan suara. Dana ini difokuskan untuk menjamin ketersediaan logistik pilkada, kebutuhan operasional badan *ad hoc*, serta pelaksanaan tahapan inti seperti pemutakhiran data pemilih, kampanye, dan pemungutan suara. Skema pencairan bertahap ini dirancang untuk memastikan efisiensi, akuntabilitas, dan kelancaran seluruh proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Blitar.

Komposisi realisasi dana hibah berdasarkan klasifikasi anggaran tersebut dapat dilihat pada gambar 6.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.

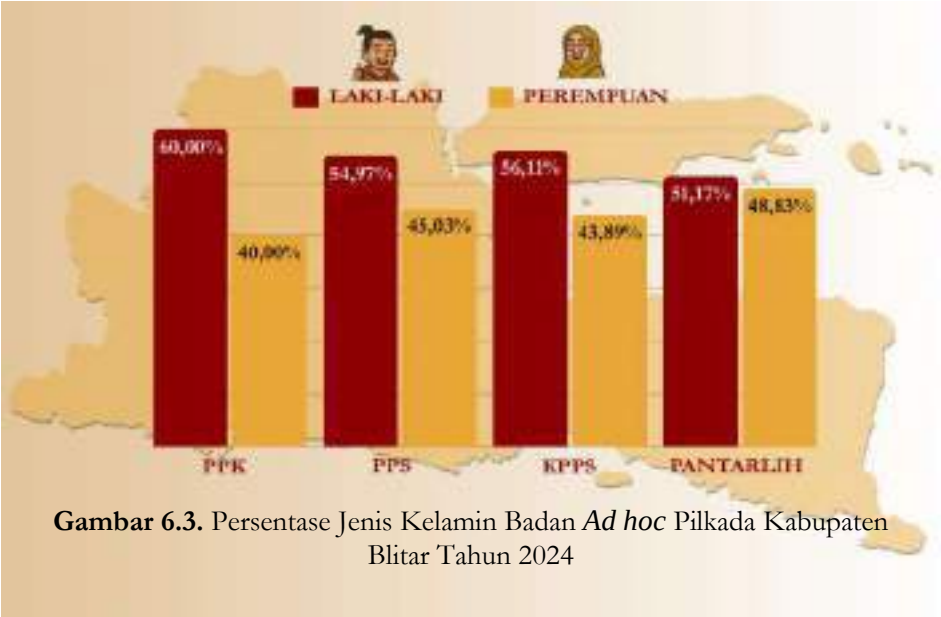


Gambar 6.2. Persentase Distribusi Penggunaan Dana Hibah Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024

Anggaran hibah Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024 terbagi dalam tiga komponen utama. Alokasi terbesar sebesar Rp28,123 miliar (43,94%) digunakan untuk honorarium penyelenggara dan kelompok kerja. Selanjutnya, Rp27,243 miliar (42,57%) dialokasikan untuk persiapan dan pelaksanaan tahapan, termasuk logistik dan sosialisasi. Sementara itu, Rp8,633 miliar (13,49%) digunakan untuk operasional dan administrasi kelembagaan. Skema ini disusun untuk menjamin pelaksanaan pilkada yang efektif dan akuntabel.

2. **Badan *Ad hoc***

Pembentukan badan *ad hoc* untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2024 merujuk pada PKPU Nomor 8 Tahun 2022, yang mengatur struktur dan tata kerja badan *ad hoc* pilkada. Untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024, telah dibentuk sebanyak 16.737 personel badan *ad hoc*. Komposisinya terdiri atas 110 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 744 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), 3.535 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dan 12.348 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Jumlah ini menunjukkan kesiapan kelembagaan teknis di seluruh tingkatan untuk menyukseskan setiap tahapan pilkada secara menyeluruh. Sebaran demografi berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 6.3 berikut.

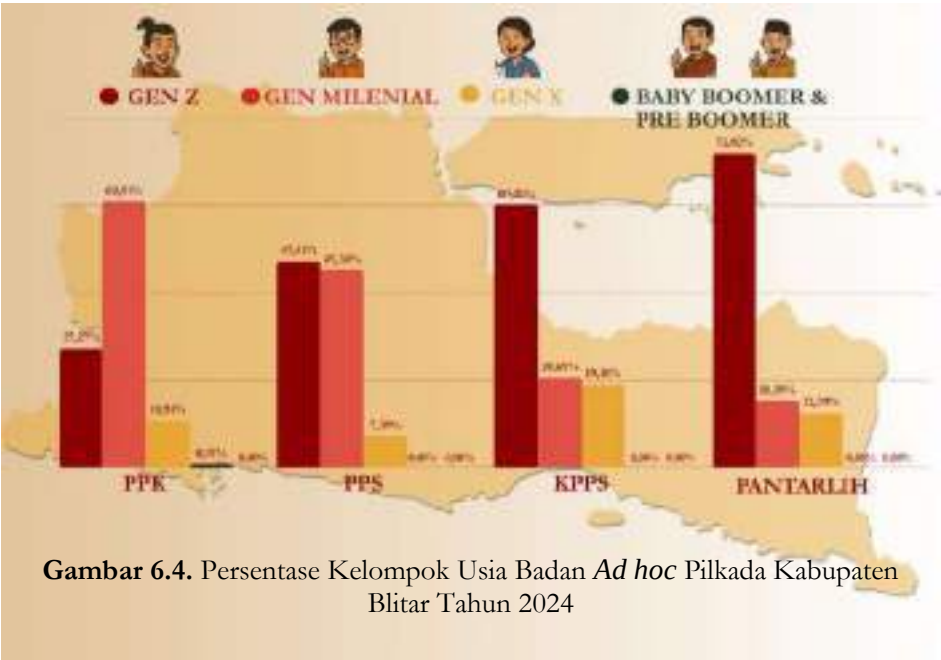


Gambar 6.3. Persentase Jenis Kelamin Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024

Sebaran badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan keterlibatan yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, meskipun laki-laki masih mendominasi di sebagian besar jenjang. Pada tingkat PPK, terdapat 66 laki-laki (60%) dan 44 perempuan (40%). Sementara itu, pada PPS, laki-laki berjumlah 409 orang (54,97%), dan perempuan 335 orang (45,03%). Di tingkat KPPS, dominasi laki-laki juga terlihat dengan 6.928 orang (56,11%), sedangkan perempuan berjumlah 5.420 orang (43,89%). Untuk Pantarlih, perbandingan antara jenis kelamin lebih seimbang, dengan 1.809 laki-laki (51,17%) dan 1.726 perempuan (48,83%). Data ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan

dalam penyelenggaraan pilkada semakin kuat, terutama di tingkat lapangan seperti KPPS dan Pantarlih, meskipun keterlibatan laki-laki masih lebih dominan secara keseluruhan.

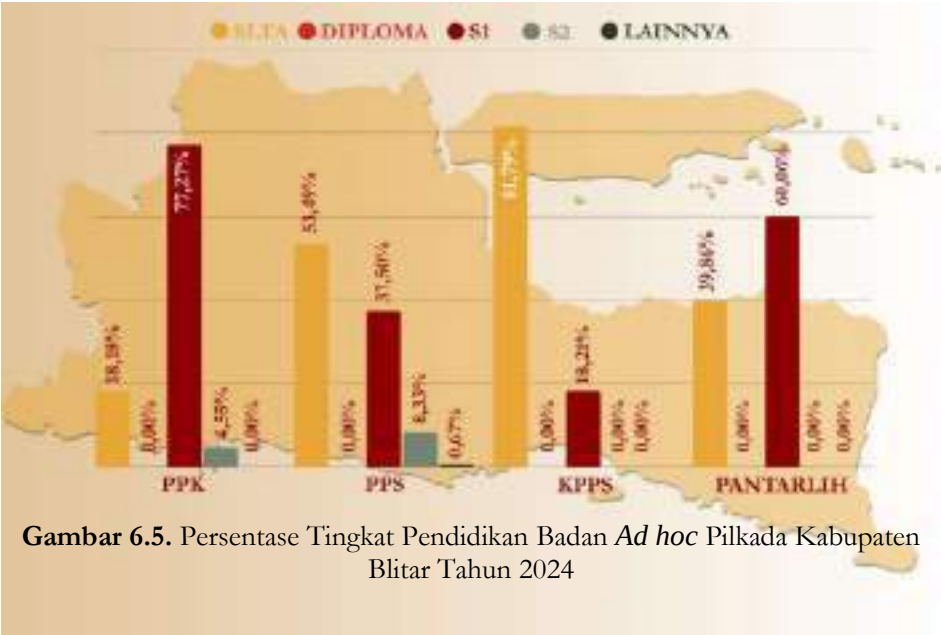
Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 6.4 berikut.



Sebaran usia badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024 menunjukkan dominasi usia produktif, khususnya pada rentang 18–27 tahun dan 28–43 tahun. Pada tingkat Pantarlih, kelompok usia 18–27 tahun merupakan mayoritas dengan 2.546 orang (72,02%), disusul usia 28–43 tahun sebanyak 544 orang (15,39%). Pola serupa terlihat pada KPPS, di mana usia 18–27 tahun mencapai 7.435 orang (60,21%), sementara usia 28–43 tahun berjumlah 2.555 orang (20,69%). Untuk PPS, proporsi terbanyak juga berasal dari usia 18–27 tahun yaitu 352 orang (47,31%), diikuti oleh 337 orang (45,30%) pada kelompok usia 28–43 tahun. Sedangkan di tingkat PPK, mayoritas berasal dari kelompok usia 28–43 tahun dengan 67 orang (60,91%), dan usia 18–27 tahun sebanyak 30 orang (27,27%). Sementara itu, keterlibatan dari kelompok usia 44–59 tahun masih ada namun terbatas, dan usia 60 tahun ke atas hanya tercatat satu orang di tingkat PPK dan PPS. Data ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pilkada 2024 sangat ditopang oleh generasi muda, terutama dalam peran teknis di lapangan

seperti Pantarlih dan KPPS.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 6.5.



Gambar 6.5. Persentase Tingkat Pendidikan Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024

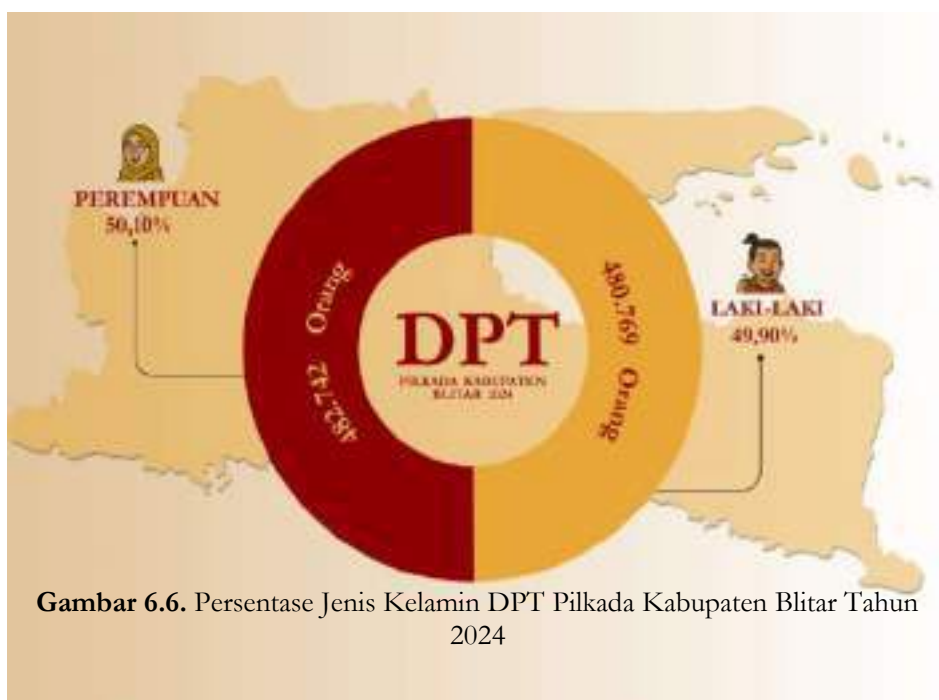
Sebaran tingkat pendidikan badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024 menunjukkan bahwa mayoritas anggota memiliki latar belakang pendidikan menengah dan tinggi, dengan distribusi yang bervariasi di setiap jenjang. Pada tingkat PPK, dominasi berasal dari lulusan S1 sebanyak 85 orang (77,27%), diikuti oleh S2 sebanyak 5 orang (4,55%), dan SLTA 20 orang (18,18%). Sementara itu, pada tingkat PPS, sebagian besar anggota berasal dari lulusan SLTA sebanyak 398 orang (53,49%), disusul oleh S1 sebanyak 279 orang (37,50%), dan S2 sebanyak 62 orang (8,33%). Terdapat juga 5 orang (0,67%) dari kategori pendidikan lainnya. Komposisi pendidikan KPPS menunjukkan dominasi lulusan SLTA sebanyak 10.099 orang (81,79%), sedangkan S1 hanya 2.249 orang (18,21%). Pada tingkat Pantarlih, mayoritas berasal dari lulusan S1 sebanyak 2.123 orang (60,06%), dan SLTA sebanyak 1.409 orang (39,86%), dengan 3 orang (0,08%) berlatar belakang pendidikan S2. Data ini menunjukkan bahwa keterlibatan tenaga muda dengan latar belakang pendidikan tinggi cukup besar di tingkat PPK dan Pantarlih, sementara peran teknis seperti KPPS masih banyak diisi oleh lulusan SLTA. Sebaran ini mencerminkan keberagaman kapasitas pendidikan

dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada yang inklusif dan partisipatif.

Dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Blitar, tercatat 1 orang penyandang disabilitas menjadi bagian dari badan *ad hoc* pada tingkat PPK. Keterlibatan ini menjadi simbol komitmen KPU Kabupaten Blitar dalam mewujudkan pilkada yang inklusif dan partisipatif, dengan memberikan ruang yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok difabel. Meskipun jumlahnya masih terbatas, kehadiran penyelenggara dari kalangan disabilitas mencerminkan langkah positif menuju penyelenggaraan pilkada yang lebih ramah dan adil bagi semua warga negara.

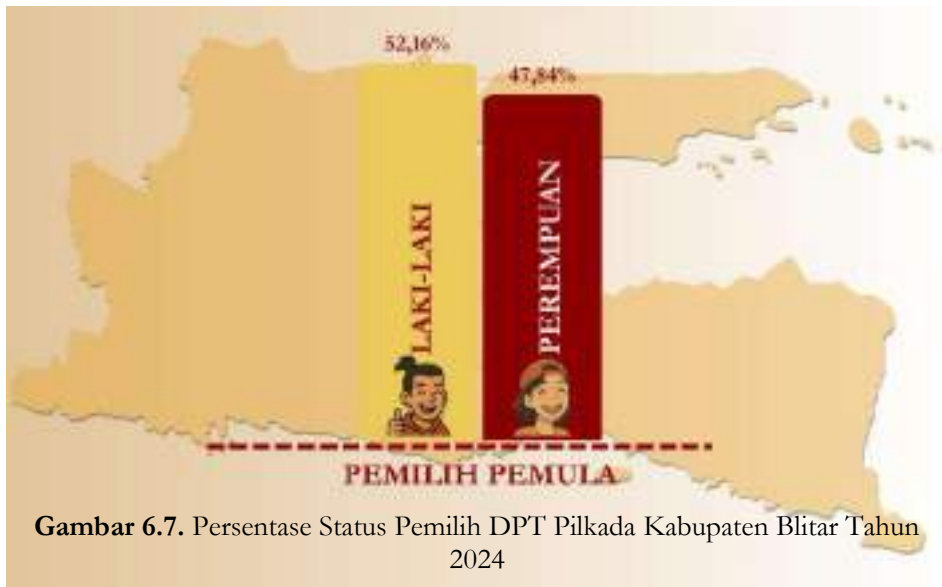
3. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat terdaftar secara sah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). KPU Kabupaten Blitar melaksanakan proses ini secara berjenjang dan berpedoman pada ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih. Salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak adalah tersusunnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang valid, akurat, dan mencerminkan hak konstitusional warga negara. KPU Kabupaten Blitar telah menetapkan DPT Pilkada Serentak Tahun 2024 melalui tahapan pemutakhiran data secara berjenjang, mulai dari pencocokan dan penelitian (Coklit), penyusunan DPS, hingga pleno penetapan DPT di tingkat kabupaten. Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah DPT Kabupaten Blitar mencapai 963.511 pemilih. Adapun sebaran demografi DPT Pilkada Kabupaten Blitar berdasarkan jenis kelamin disajikan pada gambar 6.6 berikut.



Berdasarkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Blitar, jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin menunjukkan komposisi yang seimbang. Terdapat 480.769 pemilih laki-laki (49,90%) dan 482.742 pemilih perempuan (50,10%). Keseimbangan ini mencerminkan potensi partisipasi pemilih yang merata antara laki-laki dan perempuan dalam proses demokrasi lokal. Data ini juga menjadi acuan penting dalam penyusunan strategi sosialisasi dan pelayanan pemilih, termasuk penyediaan logistik dan fasilitas pemungutan suara yang ramah gender.

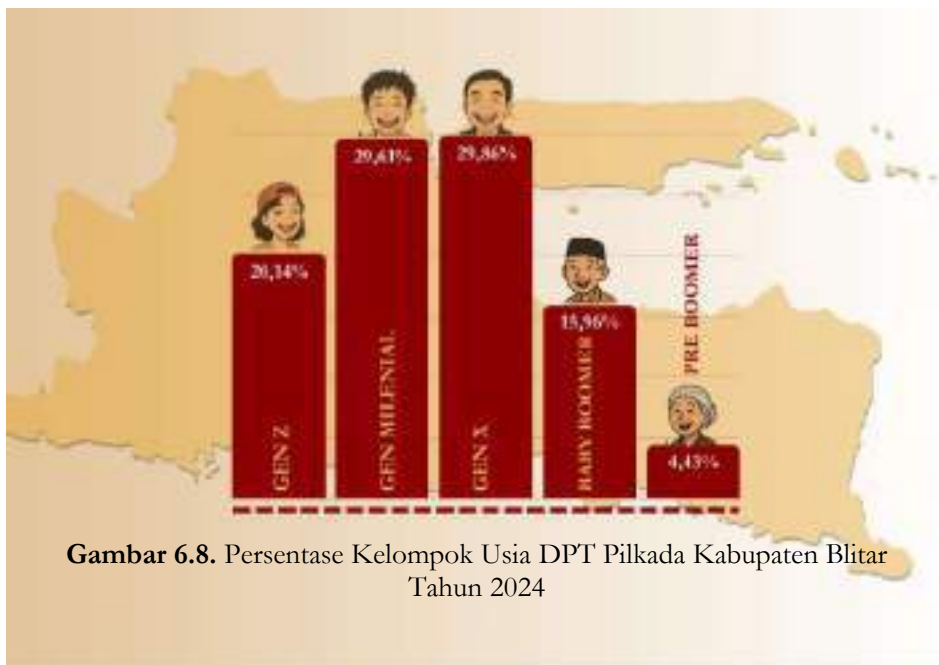
Pemetaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut karakteristik pemilih dibagi menjadi dua, yaitu pemilih pemula. Adapun secara lengkap disajikan dalam gambar 6.7.



Gambar 6.7. Persentase Status Pemilih DPT Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024

Berdasarkan status pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Blitar Tahun 2024, tercatat sebanyak 12.794 pemilih pemula, yang terdiri atas 6.673 laki-laki (52,16%) dan 6.121 perempuan (47,84%). Meskipun jumlah pemilih pemula masih relatif kecil, keberadaan mereka menjadi indikator penting bagi KPU untuk menyusun strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih menasar generasi muda, khususnya dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula.

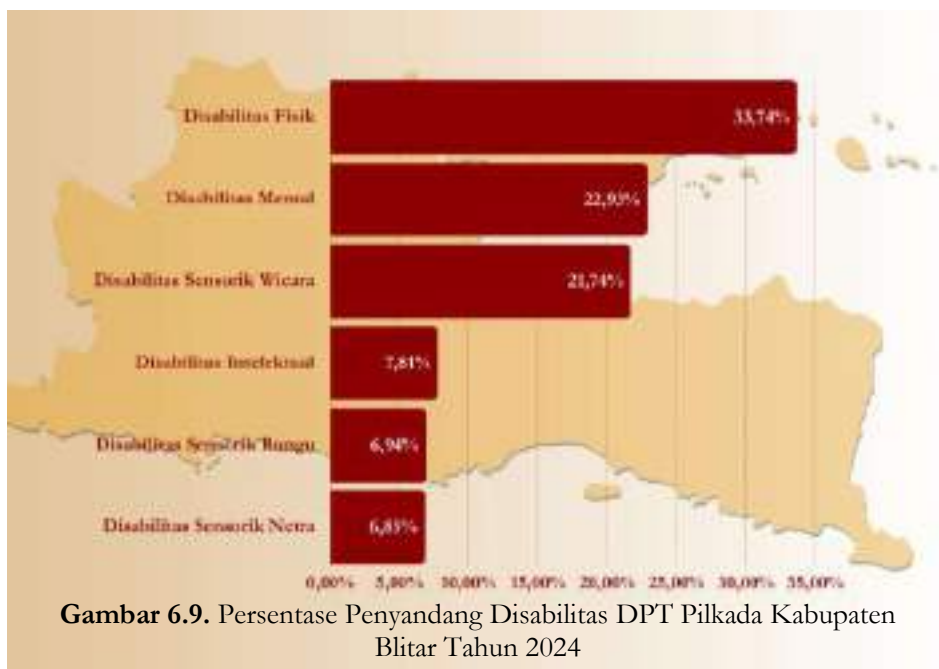
Adapun sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih detail mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024. Informasi ini disajikan dalam gambar 6.8 berikut.



Gambar 6.8. Persentase Kelompok Usia DPT Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024

Sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Blitar Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi pemilih dari kelompok usia produktif dan dewasa. Kelompok usia 44–59 tahun tercatat sebagai yang terbesar dengan 287.701 pemilih (29,86%), disusul oleh kelompok usia 28–43 tahun sebanyak 285.337 pemilih (29,61%). Kedua kelompok ini secara kumulatif mencerminkan hampir 60% dari total pemilih, yang menunjukkan bahwa mayoritas DPT berada dalam kategori usia kerja dan dewasa aktif. Selanjutnya, kelompok usia 18–27 tahun mencakup 177.361 pemilih (18,41%), sementara pemilih berusia 60–78 tahun berjumlah 171.451 orang (17,79%), menunjukkan bahwa proporsi lansia juga cukup signifikan. Adapun pemilih berusia di atas 79 tahun tercatat sebanyak 24.946 orang (2,59%), sedangkan pemilih berusia 17 tahun berjumlah 16.715 orang (1,73%).

Sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten Blitar Tahun 2024 disajikan pada gambar 6.9, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Kelompok disabilitas terbesar berasal dari disabilitas fisik sebanyak 1.867 pemilih (33,74%), diikuti oleh disabilitas mental sebanyak 1.269 pemilih (22,93%), dan disabilitas sensorik wicara sebanyak 1.203 pemilih (21,74%). Sementara itu, pemilih dengan disabilitas intelektual tercatat sebanyak 432 orang (7,81%), disabilitas sensorik rungu sebanyak 384 orang (6,94%), dan disabilitas sensorik netra sebanyak 379 orang (6,85%). Data ini menjadi rujukan penting bagi KPU Kabupaten Blitar dalam menyediakan aksesibilitas yang inklusif di Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk penyediaan alat bantu, pendamping, serta desain tata letak yang ramah disabilitas. Pendekatan berbasis kebutuhan pemilih ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pilkada yang adil, setara, dan partisipatif bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

4. Pencalonan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar Tahun 2024 merupakan momentum strategis dalam menentukan arah kepemimpinan serta kebijakan pembangunan daerah ke depan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, terdapat dua jalur pencalonan yang dapat ditempuh oleh calon kepala daerah, yaitu melalui jalur partai politik dan jalur perseorangan. Jalur perseorangan memberikan ruang bagi individu yang tidak terafiliasi dengan partai politik untuk maju, asalkan memenuhi syarat administratif serta

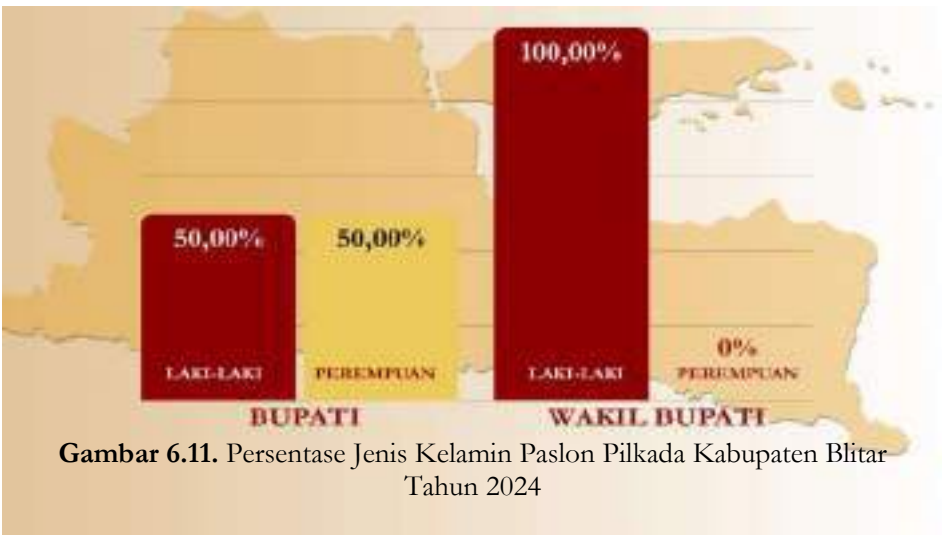
dukungan masyarakat yang telah ditetapkan oleh KPU. Namun demikian, hingga batas waktu pendaftaran pencalonan perseorangan ditutup, tidak terdapat satupun bakal calon yang mendaftarkan diri melalui jalur ini.

Dengan demikian, seluruh pasangan calon pada Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024 berasal dari jalur partai politik atau gabungan partai politik. Setelah dibuka masa pendaftaran dan dilakukan proses verifikasi administratif, dua pasangan calon resmi dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2024. Pasangan calon nomor urut 1 adalah Drs. Rijanto, MM – Beky Herdhiansah, dan pasangan calon nomor urut 2 adalah Rini Syarifah – Abdul Ghoni. Kedua pasangan tersebut akan bersaing dalam kontestasi demokrasi untuk mendapatkan mandat kepemimpinan dari masyarakat Kabupaten Blitar. Informasi mengenai pasangan calon dan partai pengusung disajikan pada gambar 6.10, sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.

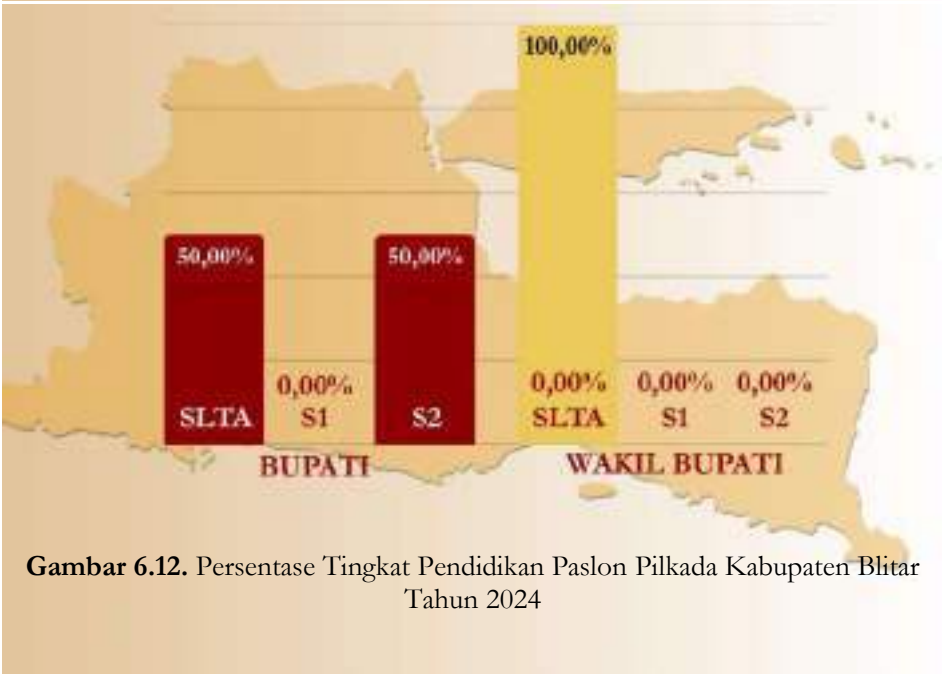


Gambar 6.10. Daftar Nama Paslon Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar disajikan pada gambar 6.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar disajikan pada gambar 6.12.



Gambar 6.11. Persentase Jenis Kelamin Paslon Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024



Gambar 6.12. Persentase Tingkat Pendidikan Paslon Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024

Berdasarkan data pada gambar 6.12, komposisi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar Tahun 2024 menunjukkan dinamika menarik terkait jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Pada posisi ganti ini: Bupati, terdapat representasi gender yang seimbang, dengan satu laki-laki dan satu perempuan (masing-masing 50%), mencerminkan mulai terwujudnya partisipasi perempuan dalam kontestasi politik lokal. Sebaliknya, pada posisi Wakil Bupati, seluruh calon berjenis kelamin laki-laki (100%), menunjukkan

belum adanya keterwakilan perempuan di posisi tersebut. Dari sisi pendidikan, calon Bupati menunjukkan keberagaman, masing-masing berasal dari latar belakang SLTA (50%) dan S2 (50%). Namun, seluruh calon Wakil Bupati merupakan lulusan SLTA (100%), tanpa keterwakilan dari jenjang pendidikan tinggi. Kondisi ini menjadi refleksi penting dalam mendorong inklusivitas dan peningkatan kualitas SDM politik, serta memperkuat peran perempuan dan akademisi dalam struktur kepemimpinan daerah di masa mendatang.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 6.13.



**Drs. Irijanto, MM -
Beky Hurdibansoh**

VISI
Kabupaten Blitar Bersaya dan Berjaya

MISI

1. Meningkatkan peranan muda berkeadilan, berkeadilan, sehat jasmani dan rohani, berprestasi yang baik dan keluarga stabil yang siap mengemban Indonesia Emas.
2. Menjadikan pemerintahan elektronik berbasis point to point dengan infrastruktur yang mampu melayani lingkungan dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan respons terhadap kebutuhan masyarakat melalui media media, melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
4. Meningkatkan daya dukung dan daya saing pelayanan publik berbasis teknologi, internet dan transparan.
5. Menjaga kelestarian, kebersihan, dan mutu air serta perlindungan dari segala bentuk ancaman dan bencana.
6. Menjaga ketersediaan layanan dasar kesehatan dan merata untuk seluruh masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.



Rini Syarifah - Abdul Ghoni

VISI
Bersama Menuju Kabupaten Blitar Maju dan Sejahtera, Rakyat dan Tercipta Wawasan Global

MISI

1. Meningkatkan kualitas & daya saing SDM, penguatan peran perempuan dan disabilitas serta membangun generasi muda berdaya saing global.
2. Mendorong pembangunan ekonomi berbasis teknologi dan agro industri, ekonomi kreatif, pariwisata, dan kewirausahaan.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui peningkatan akses transportasi yang berkelanjutan dan tanggap bencana.
4. Menjaga ketersediaan dan kualitas layanan publik yang bebas korupsi.
5. Meningkatkan keselamatan masyarakat, lingkungan dan budaya serta toleransi antarumat beragama.

Gambar 6.13. Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

KPU Kabupaten Blitar telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dengan pendekatan yang menysasar beragam segmen masyarakat. Dalam pelaksanaan sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Blitar menyesuaikan metode yang digunakan dengan segmen dan jangkauan

target audiens. Sosialisasi dilakukan melalui lima metode utama, yang masing-masing dirancang untuk menjangkau lapisan masyarakat secara efektif. Pada metode tatap muka langsung yang dilaksanakan bersama komunitas warga dengan narasumber seluruh komisioner KPU target partisipasi ditetapkan berkisar antara 50 hingga 150 orang per kegiatan, agar komunikasi tetap berjalan dua arah secara efektif dan substantif.

Sementara itu, tiga metode lainnya yaitu melalui media sosial (Instagram, Facebook, website, dan TikTok), penyebaran media cetak seperti spanduk, banner, umbul-umbul, pamflet, dan brosur, serta iklan di media cetak dan elektronik (radio dan televisi) memiliki jangkauan yang lebih luas dan tidak dibatasi secara kuantitatif, karena ditujukan untuk menjangkau publik secara masif dan berkelanjutan.

Adapun metode kelima, yaitu kirab demokrasi dan ledang (sosialisasi keliling) bersama PPS, bertujuan memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke wilayah pedesaan dan pelosok, dengan harapan dapat menjangkau pemilih secara langsung di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau media daring. Seluruh pendekatan ini mencerminkan upaya KPU Blitar dalam menyelenggarakan sosialisasi yang adaptif, partisipatif, dan menyeluruh.



Gambar 6.14. Maskot Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024

Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2024 adalah SI JATRIL, yang merupakan akronim dari “*Rakjat Blitar Memilih*”. Maskot ini diadaptasi dari kesenian tradisional Jaranan Tril, sebuah tarian khas

Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Pemilihan Si Jatril sebagai maskot bukan sekadar simbol budaya lokal, tetapi juga menggambarkan semangat, dinamika, dan kegembiraan yang melekat dalam gerakan tari Jaranan Tril. Maskot tersebut juga merepresentasikan semangat bersama seluruh unsur dalam pemilihan penyelenggara, pemilih, peserta pemilihan, serta masyarakat luas dalam menyukseskan Pemilihan Serentak 2024. Dengan semangat yang sama, Si Jatril menjadi ikon demokrasi yang membumi, inklusif, dan berakar kuat pada identitas budaya lokal Blitar.

Sebagai bagian dari upaya menciptakan kampanye yang adil dan setara, KPU Kabupaten Blitar memberikan fasilitasi kepada seluruh pasangan calon dalam bentuk alat peraga kampanye (APK), bahan kampanye (BK), penayangan iklan kampanye, serta penyelenggaraan debat publik. Untuk mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat, KPU menggandeng berbagai media elektronik, yang mencakup 4 stasiun televisi, 6 media radio, dan 16 media daring/online lokal dan regional. Debat publik yang difasilitasi oleh KPU dilaksanakan sebanyak dua kali. Namun demikian, debat kedua tidak berjalan optimal akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap tata tertib debat antar pasangan calon. Meskipun telah dilakukan beberapa kali mediasi untuk mencapai kesepakatan, tidak tercapai kesepakatan, sehingga debat terpaksa dihentikan dan tidak dilanjutkan ke sesi debat berikutnya.



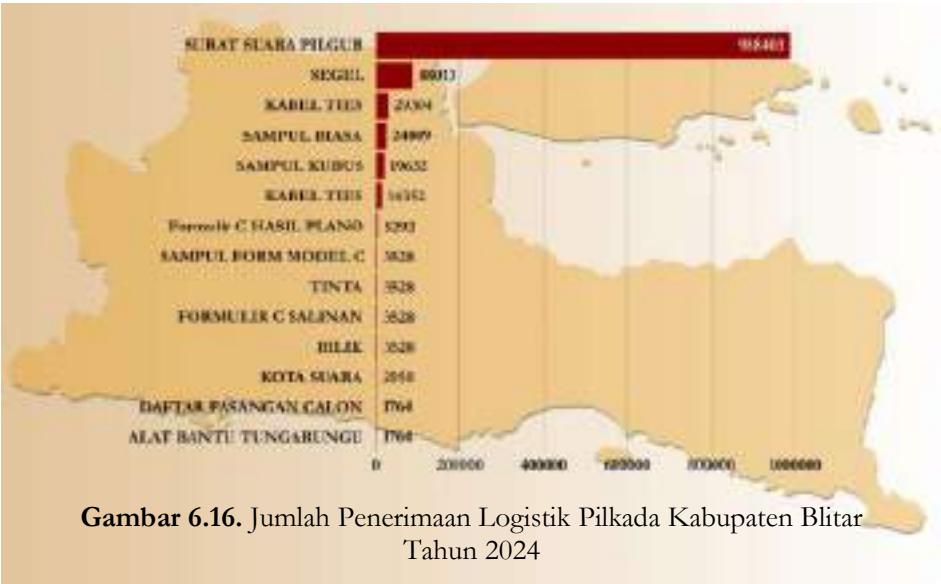
Gambar 6.15. Fasilitas Kampanye KPU Kabupaten Blitar Tahun 2024

6. Logistik

Pengadaan logistik untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar Tahun 2024 dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Blitar dengan menerapkan dua metode utama, yaitu pembelian secara elektronik (*e-purchasing*) dan pengadaan langsung. Beberapa item logistik yang tergolong strategis dan bersifat nasional, seperti surat suara, wajib dilakukan melalui sistem *e-purchasing* karena termasuk kategori barang yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional.

Proses *e-purchasing* ini dilaksanakan secara konsolidasi nasional yang dipandu oleh Biro Logistik Sekretariat Jenderal KPU RI, dan diikuti oleh KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Meskipun pengadaan dilakukan secara nasional, penentuan harga limit tetap diserahkan kepada masing-masing satuan kerja (satker). Selain pengadaan melalui konsolidasi nasional, beberapa kebutuhan logistik lainnya diadakan melalui mekanisme mini kompetisi, yang pelaksanaannya dipandu oleh KPU Provinsi Jawa Timur sebagai koordinator wilayah bagi KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Seluruh tahapan pengadaan dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi guna menjamin ketersediaan logistik tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai standar kualitas. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 6.16, yang memuat data kebutuhan serta jalur distribusi logistik pemilihan ke seluruh kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Blitar.



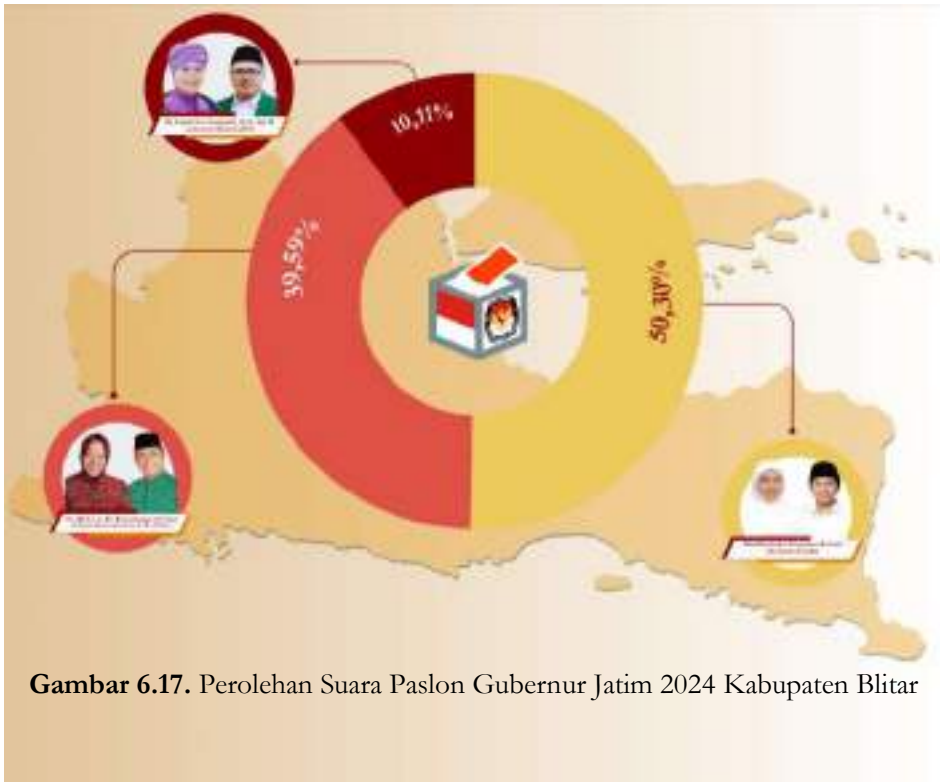
Gambar 6.16. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024

Distribusi logistik ini dilaksanakan secara terkoordinasi, mengingat medan geografis Kabupaten Blitar yang cukup luas dan mencakup wilayah pedesaan. Tercatat sebanyak 22 unit mobil truk digunakan untuk mendistribusikan logistik dalam skala besar, seperti dari gudang utama ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kabupaten Blitar memiliki kondisi geografis yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga wilayah perbukitan dan pegunungan. Tantangan geografis ini menjadi perhatian khusus dalam perencanaan distribusi logistik Pilkada Serentak Tahun 2024. Terdapat setidaknya 7 kecamatan yang memiliki wilayah dengan aksesibilitas sulit, terutama di sejumlah desa yang berada di daerah terpencil atau medan berat. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi: Doko, Wlingi, Selorejo, Panggungrejo, Wates, Wonotirto, dan Bakung. Desa-desa di kecamatan ini umumnya memiliki akses jalan yang sempit, berbatu, atau berbukit, sehingga memerlukan moda transportasi logistik yang adaptif dan tepat guna.

Dalam rangka untuk mendukung jangkauan wilayah yang lebih spesifik dan fleksibel, digunakan 764 unit mobil pick up yang mengantar logistik hingga ke tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS). Selain itu, guna menjangkau daerah yang sulit diakses kendaraan roda empat, terutama wilayah pedalaman dan perbukitan, dikerahkan 1.000 unit sepeda motor untuk memastikan logistik pilkada sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara tepat waktu dan aman. Kombinasi moda transportasi ini mencerminkan kesiapan teknis dan komitmen KPU Kabupaten Blitar dalam menjamin kelancaran distribusi logistik pemilihan di seluruh pelosok daerah.

7. Hasil Pilkada Serentak

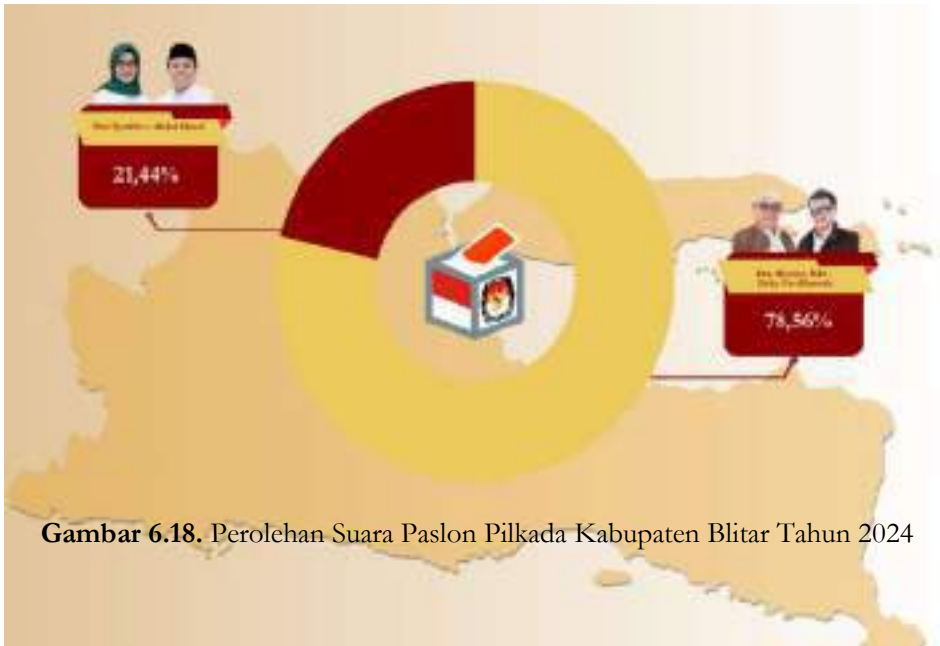
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Blitar disajikan pada gambar 6.17.



Gambar 6.17. Perolehan Suara Paslon Gubernur Jatim 2024 Kabupaten Blitar

Total suara sah yang masuk tercatat sebanyak 626.810 suara, menunjukkan partisipasi pemilih yang cukup tinggi di Kabupaten Blitar. Hasil ini merefleksikan preferensi politik masyarakat terhadap pasangan petahana yang unggul secara signifikan dibanding kandidat lainnya, sekaligus memperlihatkan dinamika kompetisi yang cukup ketat antara posisi kedua dan pertama.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar pada Pilkada 2024 disajikan pada gambar 6.18.



Gambar 6.18. Perolehan Suara Paslon Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024

Hasil rekapitulasi suara Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 315.269 suara (50,30%), menempatkan mereka di posisi pertama. Disusul oleh pasangan Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) yang meraih 248.178 suara (39,59%), serta pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah – H. Lukmanul Hakim yang memperoleh 63.363 suara (10,11%).

Hasil rekapitulasi suara Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024 menunjukkan bahwa pasangan Drs. Rijanto, MM – Beky Herdihansah meraih kemenangan telak dengan total perolehan suara sebanyak 504.655 suara, atau setara dengan 78,56% dari total suara sah. Sementara itu, pasangan Rini Syarifah – Abdul Ghoni memperoleh 137.706 suara, atau sebesar 21,44%. Selisih perolehan yang cukup signifikan ini mencerminkan dominasi dukungan masyarakat Kabupaten Blitar terhadap pasangan Rijanto – Beky, sekaligus mengindikasikan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap visi, program kerja, dan rekam jejak kepemimpinan pasangan tersebut.

BAGIAN 7

KABUPATEN KEDIRI

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Perencanaan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2024 telah dilakukan secara bertahap dan terencana sejak awal. Penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dimulai pada bulan September 2021, yang kemudian ditindaklanjuti melalui rapat pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Kediri pada 21 September 2021. Hasil dari rapat tersebut menyepakati estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp89.905.662.550, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 400/4052/418.54/2021.

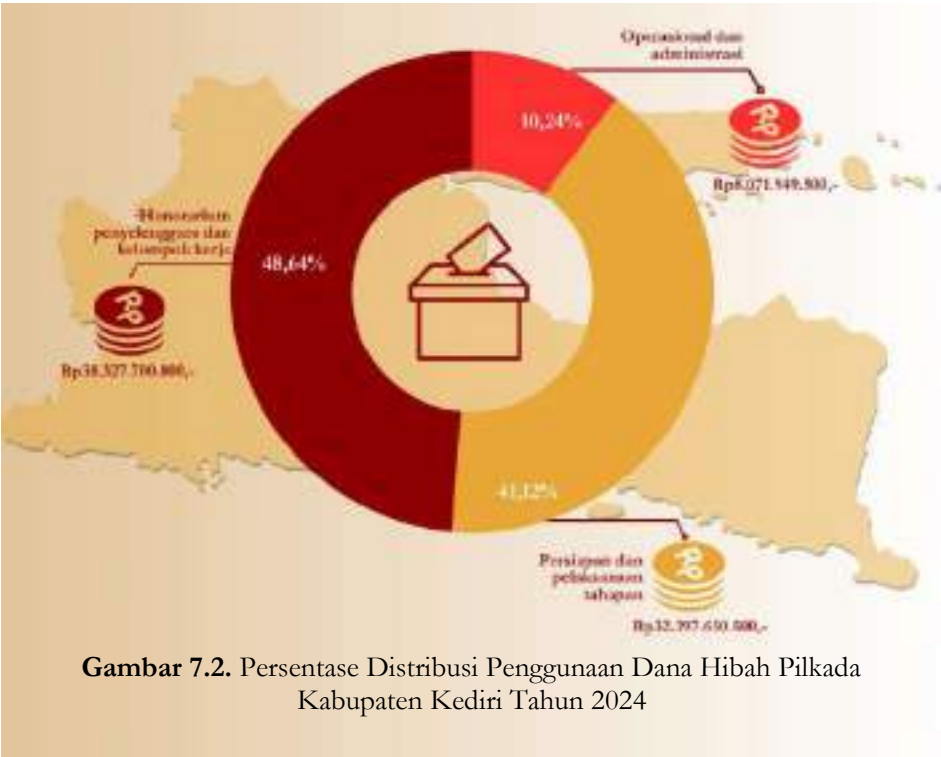
Menjelang tahapan Pilkada 2024, KPU Kabupaten Kediri menyampaikan proposal dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Surat Nomor 461/PP.01.2-SD/3506/3/2023 pada 7 Agustus 2023, untuk dilakukan proses pencermatan. Selanjutnya, pada 8 September 2023, kembali dilaksanakan Rapat Pembahasan Kebutuhan Anggaran, dan dari hasil forum tersebut disepakati bahwa dari usulan sebesar Rp89.905.662.550, yang disetujui adalah sebesar Rp78.795.300.000. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 7.1 berikut.



Skema penyaluran dana hibah untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kediri dilaksanakan secara

bertahap dalam dua termin pencairan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 900/2790/418.01/2023. Termin pertama sebesar Rp31.518.920.000 atau 40% dari total dana dicairkan pada Tahun Anggaran 2023 sebagai dukungan awal untuk tahapan persiapan, termasuk pembentukan badan *ad hoc* dan kegiatan sosialisasi. Sementara itu, termin kedua sebesar Rp47.278.380.000 atau 60% dialokasikan untuk Tahun Anggaran 2024, mencakup pembiayaan tahapan inti seperti pengadaan logistik, pelatihan penyelenggara, dan pelaksanaan pemungutan suara. Skema pencairan bertahap ini dirancang untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tahapan pilkada, dengan pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel.

Komposisi realisasi dana hibah berdasarkan klasifikasi anggaran tersebut dapat dilihat pada gambar 7.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.



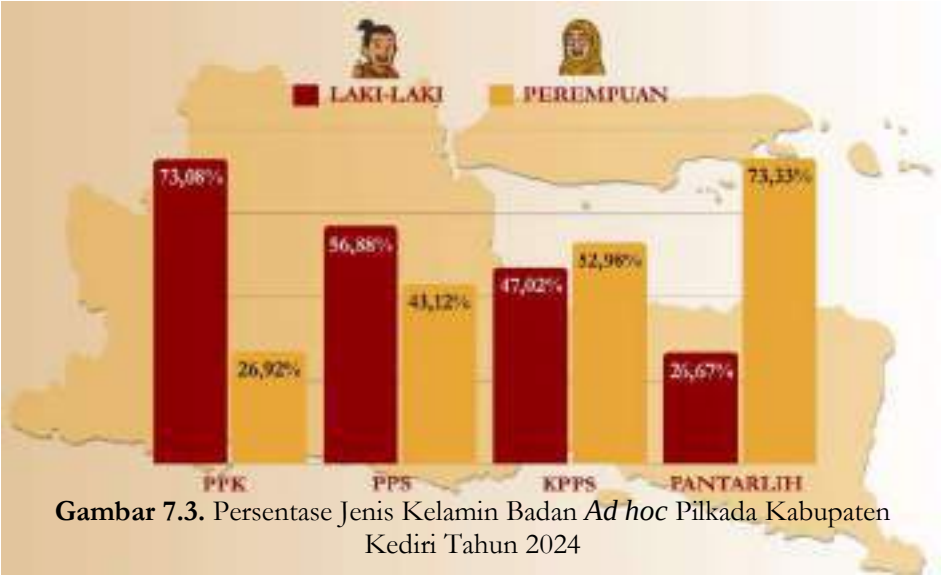
Gambar 7.2. Persentase Distribusi Penggunaan Dana Hibah Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2024

Anggaran hibah Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2024 dialokasikan ke dalam tiga komponen utama. Komponen terbesar adalah honorarium sebesar Rp38,33 miliar (48,64%), mencerminkan besarnya kebutuhan terhadap

tenaga penyelenggara pilkada. Selanjutnya, Rp32,40 miliar (41,12%) dialokasikan untuk tahapan persiapan dan pelaksanaan, termasuk kegiatan teknis seperti sosialisasi, logistik, dan pelatihan. Sisanya, Rp8,07 miliar (10,24%) digunakan untuk operasional dan administrasi perkantoran, seperti kebutuhan logistik internal dan dukungan kelembagaan.

2. **Badan Ad hoc**

Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Kediri membentuk badan *ad hoc* sebagai penyelenggara teknis di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Kabupaten Kediri terdiri atas 26 kecamatan, 1 kelurahan, dan 343 desa, dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Provinsi Jawa Timur. Sesuai ketentuan, dibentuk 5 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada setiap kecamatan, serta 3 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada setiap desa dan kelurahan. Di tingkat TPS, KPU menetapkan sebanyak 2.348 Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di seluruh wilayah adminis-tratif Kabupaten Kediri. Pembentukan badan *ad hoc* ini menjadi fondasi utama dalam menjalankan tahapan pilkada secara langsung, berjenjang, dan berbasis wilayah. Sebaran demografi berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 7.3 berikut.

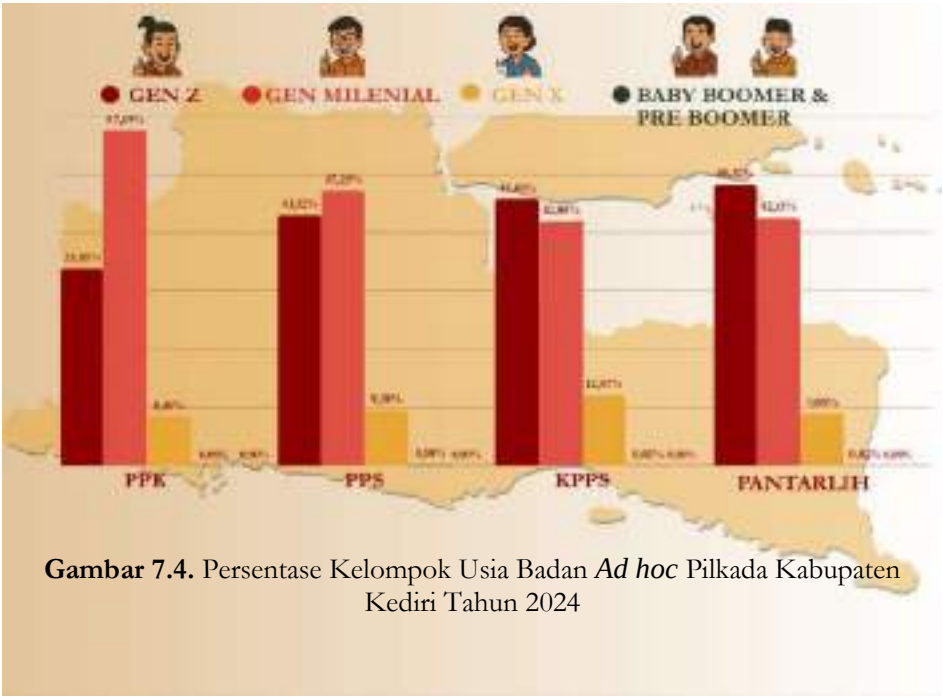


Gambar 7.3. Persentase Jenis Kelamin Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2024

Sebaran badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan keterwakilan gender yang cukup beragam di setiap jenjang. Pada tingkat PPK, komposisi masih didominasi oleh laki-laki sebanyak 73,08% (95 orang), sementara perempuan

berjumlah 26,92% (35 orang). Di tingkat PPS, keterlibatan perempuan mulai meningkat, yaitu 43,12% (445 orang) dari total 1.032 anggota. Sebaliknya, dominasi perempuan lebih tampak pada KPPS, dengan jumlah 8.708 orang (52,98%), mengungguli laki-laki yang berjumlah 7.728 orang (47,02%). Komposisi paling mencolok terdapat pada Pantarlih, di mana perempuan mendominasi sebanyak 73,33% (3.413 orang), sedangkan laki-laki hanya 26,67% (1.241 orang). Data ini mencerminkan peningkatan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pilkada di tingkat akar rumput, terutama pada peran teknis dan langsung di lapangan, seperti KPPS dan Pantarlih.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kab. Kediri Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 7.4 berikut.

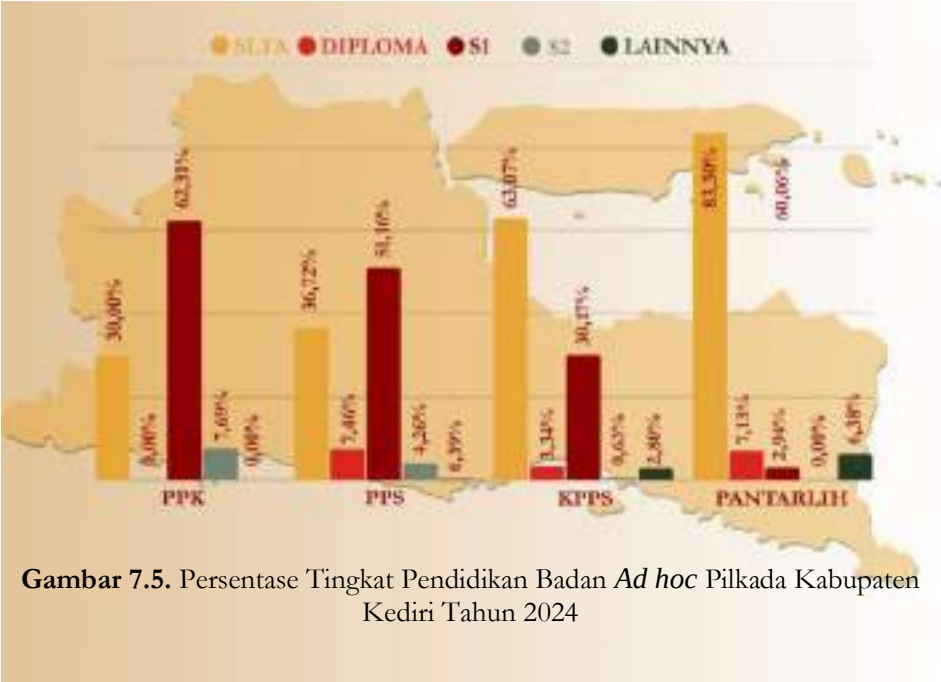


Gambar 7.4. Persentase Kelompok Usia Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2024

Sebaran usia badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2024 menunjukkan dominasi kelompok usia muda dan produktif. Pada jenjang PPK, mayoritas berasal dari usia 28–43 tahun sebanyak 57,69% (75 orang), disusul oleh kelompok 18–27 tahun sebesar 33,85% (44 orang), sementara usia 44–59 tahun hanya 8,46% (11 orang), dan tidak ada anggota dari usia di atas 60 tahun. Komposisi serupa terlihat pada tingkat PPS, di mana kelompok usia 28–43 tahun mendominasi dengan 47,29% (488 orang), diikuti oleh 18–27 tahun sebanyak 43,12% (445 orang). Kelompok usia 44–

59 tahun tercatat sebanyak 9,50% (98 orang), dan hanya 1 orang (0,10%) dari kelompok usia 60–78 tahun. Di tingkat KPPS, distribusi usia lebih merata antara dua kelompok utama: 45,80% (7.528 orang) dari usia 18–27 tahun, dan 42,05% (6.911 orang) dari usia 28–43 tahun. Kelompok 44–59 tahun berjumlah 12,07% (1.984 orang), sementara usia di atas 60 tahun sangat minim (0,02% atau 4 orang), dan hanya 9 orang (0,05%) berasal dari usia 17 tahun. Pada jenjang Pantarlih, sebagian besar berasal dari usia 18–27 tahun sebesar 48,37% (2.251 orang), disusul oleh 28–43 tahun sebesar 42,61% (1.983 orang). Sementara itu, kelompok 44–59 tahun mencakup 9,00% (419 orang), dan hanya 1 orang (0,02%) dari usia 60–78 tahun. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Kediri sangat didominasi oleh generasi muda, khususnya usia 18–43 tahun yang secara konsisten mengisi lebih dari 80% komposisi di semua jenjang yang menunjukkan potensi besar dari generasi muda dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pilkada di tingkat lokal.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 7.5.



Gambar 7.5. Persentase Tingkat Pendidikan Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2024

Sebaran tingkat pendidikan badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2024 menunjukkan dominasi lulusan SLTA di semua jenjang, terutama pada level teknis lapangan. Pada jenjang PPK, sebagian besar berasal dari

pendidikan tinggi, dengan 62,31% (81 orang) lulusan S1, dan 7,69% (10 orang) lulusan S2, sementara lulusan SLTA sebanyak 30,00% (39 orang). Di tingkat PPS, lulusan S1 masih mendominasi sebesar 51,16% (528 orang), diikuti oleh lulusan SLTA sebesar 36,72% (379 orang). Lulusan diploma mencapai 7,46% (77 orang), sementara lulusan S2 dan kategori lainnya masing-masing menyumbang 4,26% (44 orang) dan 0,39% (4 orang). Pada jenjang KPPS, proporsi terbesar berasal dari SLTA sebesar 63,07% (10.366 orang), diikuti oleh S1 sebesar 30,17% (4.958 orang). Lulusan diploma hanya 3,34% (549 orang), sementara lulusan S2 dan kategori lainnya masing-masing 0,63% (103 orang) dan 2,80% (460 orang). Tingkat pendidikan paling rendah terlihat pada jenjang Pantarlih, di mana 83,30% (3.877 orang) merupakan lulusan SLTA, sementara lulusan S1 hanya 2,94% (137 orang). Lulusan diploma tercatat 7,13% (332 orang), dan lulusan S2 hanya 0,24% (11 orang). Serta katagori lainnya mencapai 6,38% (297 orang).

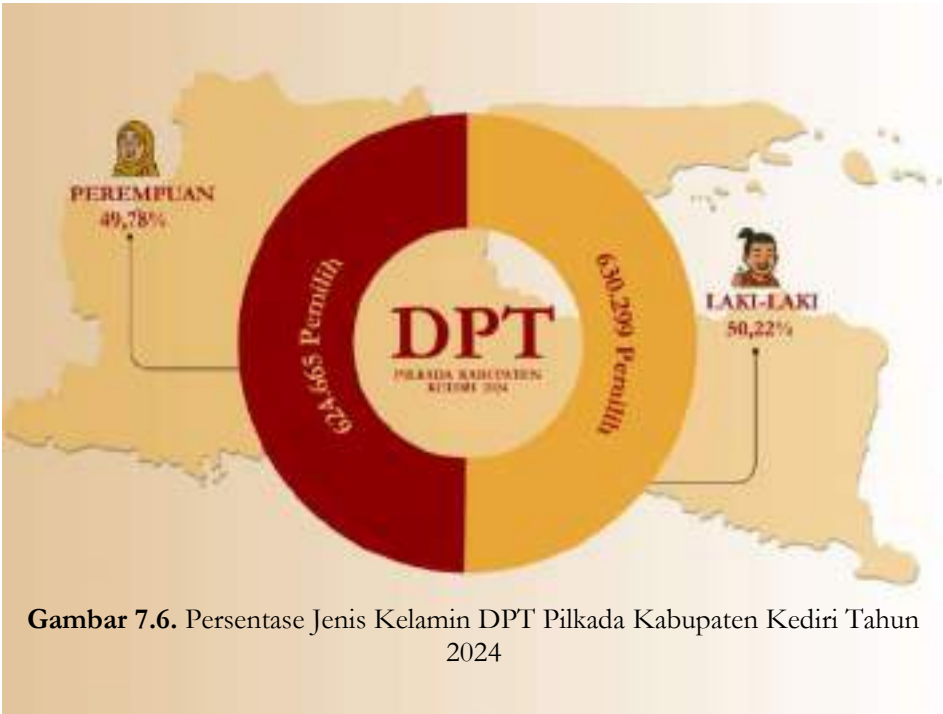
Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Kediri tidak mencatat adanya penyelenggara *ad hoc* yang berasal dari kalangan penyandang disabilitas. Meskipun rekrutmen badan *ad hoc* dilakukan secara terbuka dan inklusif, tidak ada individu penyandang disabilitas yang mendaftar maupun terlibat dalam struktur PPK, PPS, KPPS, maupun Pantarlih. Sehingga menjadi catatan penting dalam upaya mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif, serta perlunya strategi afirmatif ke depan agar kelompok disabilitas juga memiliki ruang peran dalam penyelenggaraan pilkada.

3. Pemutakhiran Data

Proses pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Kediri untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 dimulai dengan diterimanya Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU RI, yang selanjutnya disandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pilkada sebelumnya. Hasil penyandingan ini menghasilkan Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi (DPHS) yang menjadi dasar awal pemetaan pemilih. DPHS tersebut kemudian dipetakan ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan ketentuan maksimal 600 pemilih per TPS, sesuai dengan regulasi. Pemetaan ini dituangkan dalam Formulir A-Daftar Pemilih, yang menjadi dasar bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) secara langsung ke rumah-rumah pemilih.

Setelah tahapan Coklit selesai, data hasil pencocokan kemudian disusun oleh PPS, diverifikasi oleh PPK, dan ditetapkan sebagai Daftar

Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten Kediri. DPS ini kemudian diumumkan ke publik untuk menerima masukan dan tanggapan masyarakat, serta dievaluasi melalui *self-assessment* internal KPU secara nasional, guna membersihkan potensi data ganda, data anomali, atau data tidak valid. Melalui proses pemutakhiran yang berlapis ini, jumlah pemilih cenderung menurun, yang menjadi indikator positif bahwa data pemilih semakin bersih dan akurat. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang ditetapkan di tingkat kabupaten, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kediri tercatat sebanyak 1.254.964 pemilih, dengan rincian jumlah pemilih laki-laki dan perempuan sebagaimana ditampilkan pada *chart* gambar 7.6.



Gambar 7.6. Persentase Jenis Kelamin DPT Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2024

Berdasarkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kediri Tahun 2024, jumlah total pemilih tercatat sebanyak 1.254.964 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 630.299 pemilih (50,22%) adalah laki-laki, sementara 624.665 pemilih (49,78%) adalah perempuan. Komposisi ini mencerminkan keseimbangan gender yang cukup proporsional, yang menunjukkan bahwa potensi partisipasi politik antara laki-laki dan perempuan dalam Pilkada Serentak 2024 relatif setara.

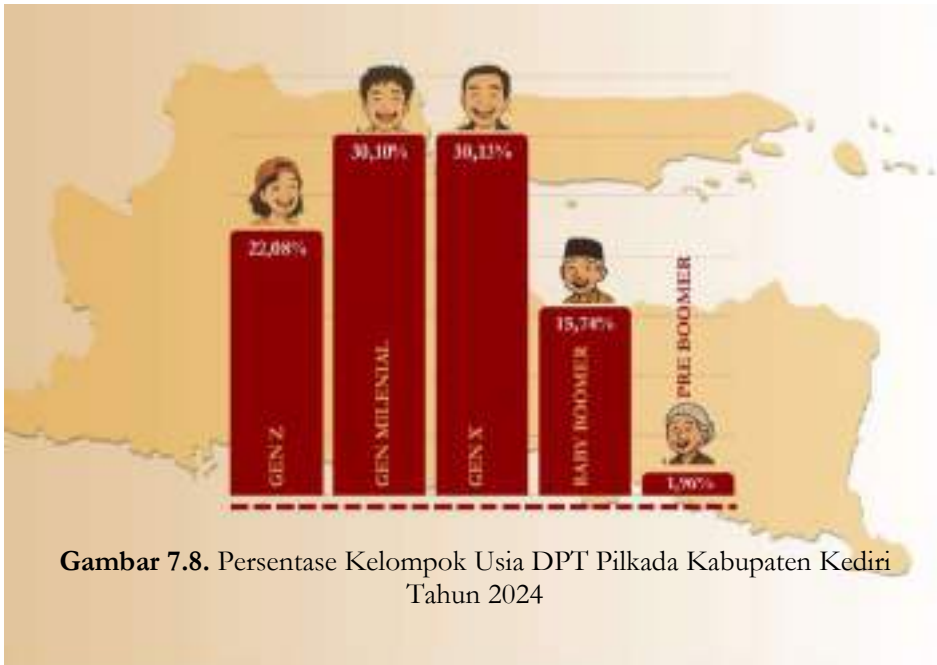
Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yakni pemilih pemula dan pemilih non-pemula. Pemetaan ini berguna untuk memahami

karakteristik usia pemilih serta untuk merancang strategi sosialisasi yang lebih tepat sasaran, terutama kepada kelompok pemilih muda. Rincian lengkap terkait status pemilih disajikan pada gambar 7.7.



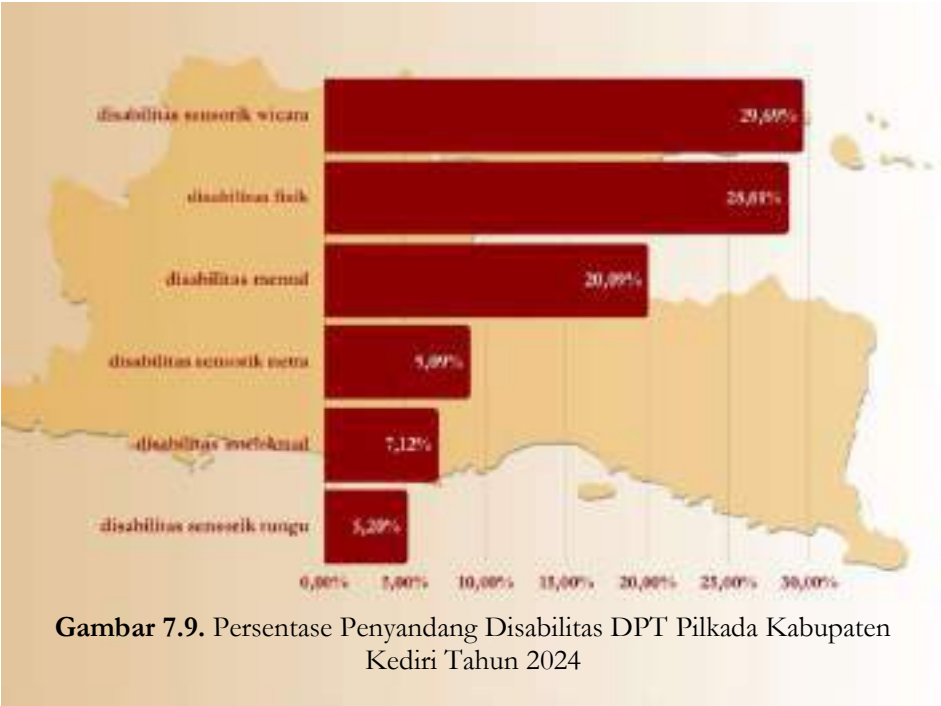
Berdasarkan klasifikasi status pemilih, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kediri Tahun 2024 terdiri dari 26.168 pemilih pemula. Pemilih pemula yakni mereka yang baru pertama kali menggunakan hak pilih mencakup 2,09% dari total DPT, dengan rincian 13.547 laki-laki (51,77%) dan 12.621 perempuan (48,23%).

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 7.8.



Sebaran pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kediri Tahun 2024 menunjukkan bahwa mayoritas pemilih berada pada kelompok usia produktif. Kelompok usia 44–59 tahun menjadi yang terbanyak, dengan jumlah 378.077 orang (30,13%), diikuti oleh usia 28–43 tahun sebanyak 377.753 orang (30,10%). Kedua kelompok ini secara keseluruhan mencakup lebih dari 60% total pemilih, yang mencerminkan dominasi kelompok usia dewasa dalam struktur demografis pemilih di Kabupaten Kediri. Sementara itu, kelompok usia 18–27 tahun tercatat sebanyak 250.822 pemilih (19,99%), dan usia 17 tahun yang umumnya tergolong sebagai pemilih pemula berjumlah 26.168 orang (2,09%). Kehadiran kelompok usia muda ini penting untuk diperhatikan dalam strategi sosialisasi yang berbasis digital dan partisipatif. Adapun pemilih dari kelompok usia 60–78 tahun berjumlah 197.564 orang (15,74%), sementara pemilih usia lebih dari 79 tahun sebanyak 24.580 orang (1,96%). Meski proporsinya lebih kecil, kelompok lansia tetap menjadi bagian penting dari partisipasi demokrasi, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam hal aksesibilitas dan layanan di TPS. Distribusi ini menunjukkan bahwa Pilkada 2024 di Kabupaten Kediri akan banyak dipengaruhi oleh kelompok usia dewasa dan paruh baya, sementara kelompok muda tetap menjadi segmen strategis dalam membentuk basis pemilih masa depan.

Sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten Kediri Tahun 2024 disajikan pada gambar 7.9, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kediri Tahun 2024, tercatat sebanyak 6.207 pemilih merupakan penyandang disabilitas yang tersebar dalam enam kategori utama. Kelompok terbesar berasal dari penyandang disabilitas sensorik wicara, yakni sebanyak 1.843 orang (29,69%), disusul oleh disabilitas fisik sebanyak 1.788 orang (28,81%). Kategori ketiga terbanyak adalah disabilitas mental dengan 1.247 orang (20,09%), diikuti oleh disabilitas sensorik netra sebanyak 564 orang (9,09%), disabilitas intelektual sebanyak 442 orang (7,12%), dan disabilitas sensorik rungu sebanyak 323 orang (5,20%). Data ini menunjukkan bahwa kelompok disabilitas memiliki representasi yang signifikan dalam DPT dan perlu mendapat perhatian serius, baik dari sisi aksesibilitas TPS, ketersediaan alat bantu, maupun layanan informasi yang ramah disabilitas untuk memastikan pilkada yang inklusif dan partisipatif bagi seluruh warga negara.

4. Pencalonan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2024

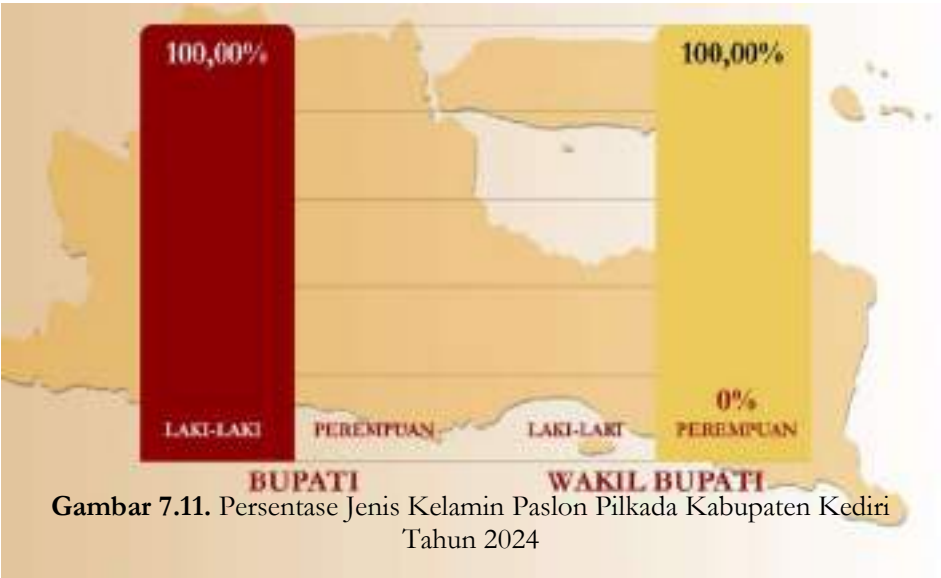
merupakan momentum strategis dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan pembangunan daerah di masa mendatang. Dalam pelaksanaan tahapan pencalonan, KPU Kabupaten Kediri telah menerbitkan Keputusan Nomor 1177 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, bakal calon dari jalur perseorangan diwajibkan mengumpulkan minimal 82.092 dukungan yang tersebar di setidaknya 14 kecamatan dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri. Namun, hingga berakhirnya masa pendaftaran, tidak ada bakal pasangan calon perseorangan yang mengajukan diri. Dengan demikian, seluruh pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta Pilkada 2024 berasal dari jalur partai politik atau gabungan partai politik.

Setelah melalui proses penelitian administrasi dan klarifikasi dokumen persyaratan calon, KPU Kabupaten Kediri menetapkan dua pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta resmi Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2024. Kedua pasangan calon tersebut akan berkompetisi dalam kontestasi demokrasi guna meraih mandat kepemimpinan dari masyarakat. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada gambar 7.10 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.



Gambar 7.10. Daftar Nama Paslon Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2024

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri disajikan pada gambar 7.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri disajikan pada gambar 7.12.



Gambar 7.11 menampilkan persentase jenis kelamin pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2024. Data menunjukkan adanya keseimbangan gender secara keseluruhan, dengan komposisi 50% laki-laki dan 50% perempuan. Namun, jika ditinjau per posisi, seluruh calon Bupati adalah laki-laki (100%), sedangkan seluruh calon Wakil Bupati adalah

perempuan (100%). Hal ini mencerminkan representasi gender yang merata, meskipun masih terdapat kecenderungan distribusi peran yang terpisah berdasarkan posisi dalam struktur pasangan calon.

Sementara itu, gambar 7.11 menunjukkan persentase tingkat pendidikan pasangan calon. Komposisi ini memperlihatkan keragaman latar belakang akademik para kandidat. Pada posisi Bupati, masing-masing satu orang merupakan lulusan SLTA (50%) dan S1 (50%), tanpa ada kandidat dari jenjang S2. Di sisi lain, Wakil Bupati terdiri atas satu lulusan S1 (50%) dan satu lulusan S2 (50%). Secara total, dari empat kandidat, 50% berlatar belakang pendidikan S1, dan masing-masing 25% dari jenjang SLTA dan S2.

Komposisi ini tidak hanya menggambarkan keberagaman pendidikan formal para calon, tetapi juga memberi indikasi bahwa calon-calon kepala daerah yang maju berasal dari spektrum kompetensi dan pengalaman yang berbeda, yang berpotensi memperkaya pilihan pemilih dalam menentukan pemimpin daerah.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 7.13, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



**H. Dedy Widyanarko –
Dra. Muchotomah, M.HI.,**

VISI
"Memajukan Desa Mandiri dan Kita
Merasa Kediri yang Berkah"

MISI

1. Penguatan peran dan
kemampuan;
2. Pengembangan sumber daya manusia
yang unggul dan berdaya saing berdasar
nilai agama dan budaya;
3. Mengembangkan pengorganisasian;
4. Penguatan pemerintahan ekonomi di
masyarakat;
5. Mengurangi kesenjangan dan
menciptakan kesejahteraan;
6. Menjadikan desa yang best dan
sejahtera;
7. Kediri Aman dan Berkah;
8. Transformasi Desa Kita berbudaya;
9. Mengoptimalkan peran Lembaga
pengembangan badan riset dan inovasi
daerah (BIRENDA).



**H. Hanindhito Hilmawan
Prastama, S.H. – Hj. Dewi Marthy
Lita, S.T.,**

VISI
"Kabupaten Kediri berbudaya, religius,
Makmur, Sejahtera dan Berkeadilan"

MISI

1. Pengembangan SDM yang berkualitas
unggul dan berdaya saing serta
"Kualitas Religius";
2. Pengembangan ekonomi masyarakat
sejahtera pertumbuhan melalui
pemerintahan pemerintah lokal;
3. Reformasi birokrasi dan tata kelola
pemerintahan;
4. Pengembangan Pariwisata, seni budaya,
olahraga dan kesehatan pemuda;
5. Penguatan kemandirian wilayah melalui
tata kelola desa dan keberlanjutan
lingkungan;
6. Kemendut Desa untuk kesejahteraan
masyarakat;
7. Kemendut Desa untuk kesejahteraan
masyarakat.

Gambar 7.13. Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

KPU Kabupaten Kediri telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dengan pendekatan partisipatif yang menyasar beragam segmen masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih serta pemahaman publik terhadap tahapan dan tata cara pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024. Dalam pelaksanaannya, KPU menerapkan beragam metode yang mencakup forum warga, diskusi, seminar, lokakarya, pelatihan, ceramah, simulasi, gelar wicara (*talkshow*), hingga pemanfaatan budaya lokal atau tradisional. Pendekatan ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan kultural masyarakat Kediri, sehingga penyampaian informasi menjadi lebih efektif dan diterima secara luas. Sasaran utama kegiatan sosialisasi mencakup seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemilih pemula dan muda, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga tokoh masyarakat dan pemilih lansia. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan media komunikasi, baik daring maupun luring. Secara keseluruhan, KPU Kabupaten Kediri menargetkan keterlibatan hingga 30.000 peserta dalam kegiatan sosialisasi ini. Untuk memperluas jangkauan informasi, KPU juga menggandeng 140 media yang terdiri dari media cetak, elektronik, dan digital. Keterlibatan media secara intensif ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh informasi penting terkait Pilkada dapat tersampaikan secara merata, akurat, dan tepat sasaran kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kediri.



Gambar 7.14. Maskot Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2024

mengangkat tema historis dari masa kejayaan Kerajaan Kediri di era Raja Jayabaya. Terinspirasi dari sosok Narasimha Avatara inkarnasi Dewa Wisnu berwujud manusia berkepala singa. Maskot ini diberi nama "Si Nara", yang melambangkan kekuatan, kejayaan, dan perlindungan. Dengan mengenakan busana adat Wdihan Kadiri Mapanji dan mahkota simbol kebesaran, Si Nara menjadi representasi kepemimpinan bermartabat dan semangat Pilkada jujur demi kemakmuran Kediri. Selain sebagai ikon visual, maskot ini juga berfungsi sebagai sarana edukatif untuk meningkatkan partisipasi dan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dalam demokrasi.

Selanjutnya, dalam rangka menjamin prinsip kesetaraan antar peserta pemilihan, KPU Kabupaten Kediri memberikan berbagai bentuk fasilitasi kampanye kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Fasilitasi ini mencakup penyediaan Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye (BK), iklan kampanye melalui berbagai media, serta pelaksanaan debat publik antar pasangan calon. Untuk APK, KPU menyediakan 5 baliho dan 1.376 spanduk yang disebar secara proporsional di wilayah Kabupaten Kediri. Sementara itu, BK difasilitasi dalam bentuk 300.000 selebaran, 150.000 brosur, 300.000 pamflet, dan 300.000 poster, dengan desain berasal dari masing-masing pasangan calon dan dicetak oleh KPU. Publikasi melalui media massa, KPU juga memfasilitasi iklan kampanye dengan jangkauan luas, yaitu melalui 11 media cetak, 8 media televisi, dan 7 media radio, guna memperluas akses informasi kepada masyarakat secara merata.

Selain itu, KPU Kabupaten Kediri menyelenggarakan dua kali debat publik antar pasangan calon. Debat pertama mengangkat tema: *"Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memajukan Daerah, Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Menyelesaikan Persoalan Daerah."* Sedangkan debat kedua bertema: *"Menyerasikan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dan Provinsi dengan Nasional serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan."*

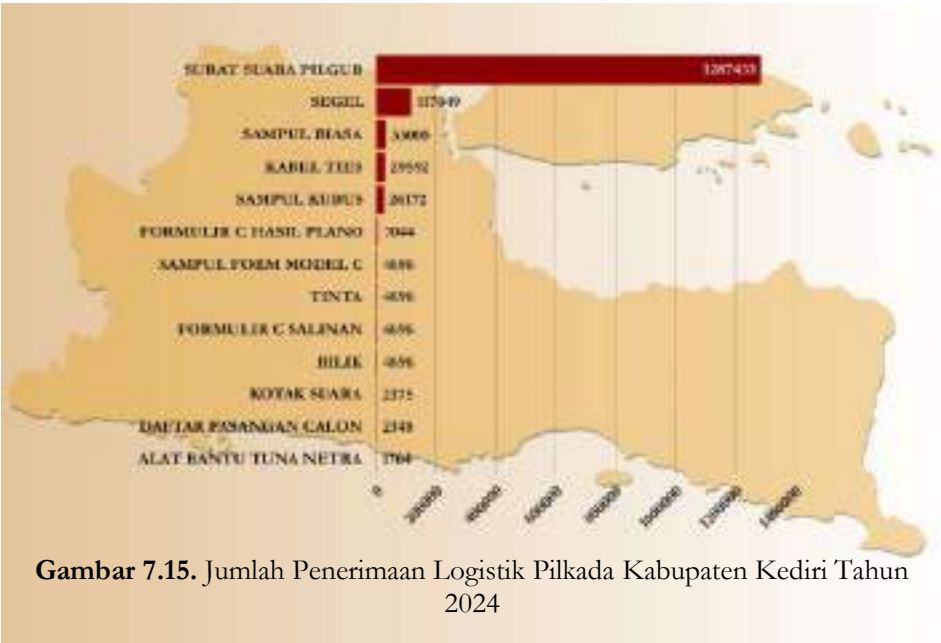
Pelaksanaan fasilitasi kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, memperkuat literasi politik masyarakat, serta mendorong keterlibatan pemilih secara aktif dan kritis dalam menentukan pilihannya.

6. Logistik

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada, KPU Kabupaten Kediri melaksanakan proses pengadaan logistik secara transparan dan efisien melalui metode *e-purchasing* atau *e-catalog*. Melalui sistem ini,

pejabat pengadaan melakukan pemilihan barang secara daring sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Setelah proses pemilihan selesai, dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak pengadaan sebagai bentuk kesepakatan resmi antara pihak penyedia dan KPU.

Seluruh tahapan pengadaan dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi guna menjamin ketersediaan logistik tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai standar kualitas. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 7.15, yang memuat data kebutuhan serta jalur distribusi logistik pemilihan ke seluruh kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Kediri.



Gambar 7.15. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2024

Setelah proses pengadaan barang logistik rampung, KPU Kabupaten Kediri melanjutkan ke tahap setting dan packing logistik yang dilaksanakan di Gudang KPU. Proses ini melibatkan 15 orang petugas yang bertugas menghitung dan memasukkan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam sampul, yang dikemas secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, desa, hingga kecamatan. Tahapan ini dilakukan secara cermat untuk memastikan tidak ada kekeliruan dalam jumlah maupun penempatan logistik. Selanjutnya, logistik yang telah dikemas didistribusikan ke seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kediri menggunakan 10 armada truk diesel yang dilengkapi dengan penutup terpal guna menjaga keamanan dan kerahasiaan logistik selama proses pengiriman. Distribusi ini menjadi langkah krusial dalam

menjamin kesiapan logistik di seluruh TPS sebelum hari pemungutan suara.

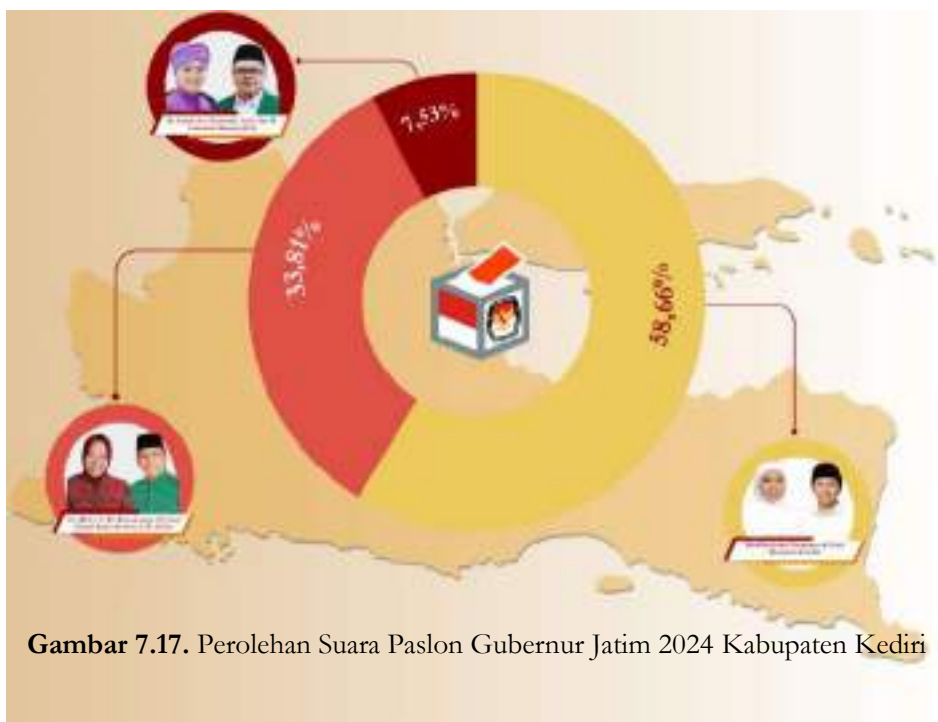


Gambar 7.16. Moda Transportasi Distribusi Logistik Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2024

Dalam proses pendistribusian logistik, tantangan terbesar dihadapi pada wilayah Kecamatan Mojo dan Ngancar. Kedua wilayah ini memiliki kondisi geografis yang cukup sulit karena terletak di daerah pegunungan dengan jarak yang relatif jauh dari gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Kediri. Selain itu, akses jalan menuju lokasi tersebut tergolong sempit dan berliku, sehingga memerlukan kehati-hatian ekstra dalam proses pengangkutan. Kendati demikian, KPU tetap berkomitmen untuk memastikan seluruh logistik tiba tepat waktu dan dalam kondisi aman di setiap kecamatan, termasuk wilayah dengan medan berat sekalipun, demi menjamin kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2024.

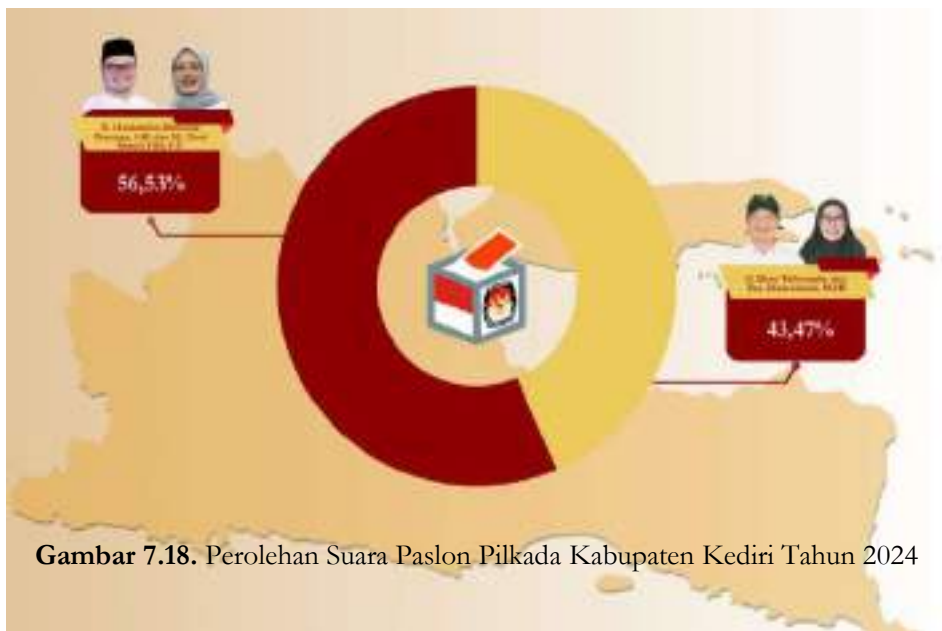
7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Kediri disajikan pada gambar 7.17.



Hasil rekapitulasi suara Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestjanto Dardak unggul dengan perolehan suara terbanyak, yaitu sebanyak 499.765 suara atau 58,66% dari total suara sah. Di posisi kedua, pasangan Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T. dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), S.IP., M.Kes. memperoleh 288.035 suara atau 33,81%, disusul oleh pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah, M.Si. dan H. Lukmanul Khakim, M.Si. yang meraih 64.123 suara atau 7,53%. Perolehan suara ini menegaskan dominasi pasangan petahana di Kabupaten Kediri serta mencerminkan preferensi politik masyarakat dalam kontestasi Pilkada 2024.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 7.18.



Hasil rekapitulasi suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 menunjukkan bahwa pasangan H. Hanindhito Himawan Pramana, S.H. dan Hj. Dewi Mariya Ulfa, S.T. meraih kemenangan dengan perolehan suara sebanyak 489.900 suara atau 56,53% dari total suara sah. Sementara itu, pasangan H. Deny Widyanarko dan Dra. Mudawamah, M.HI. memperoleh 376.770 suara, setara dengan 43,47%. Kemenangan ini menunjukkan bahwa mayoritas pemilih di Kabupaten Kediri masih memberikan kepercayaan kepada pasangan petahanan untuk melanjutkan kepemimpinan pada periode berikutnya. Hasil ini juga mencerminkan antusiasme masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah melalui mekanisme demokrasi.

BAGIAN 8

KABUPATEN MALANG

1. Perencanaan Program dan Anggaran

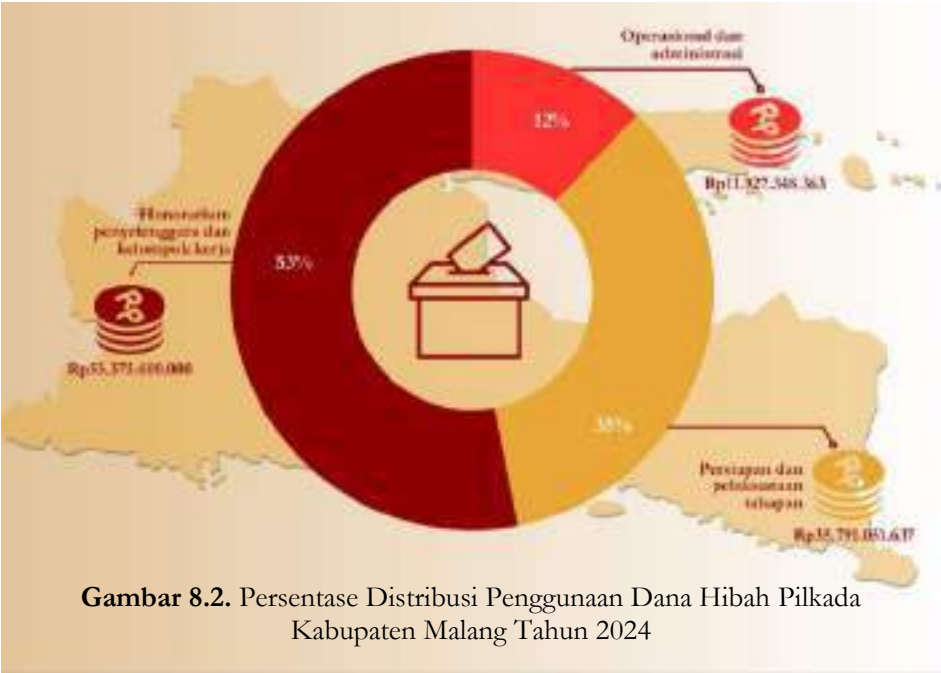
Dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Malang mengalokasikan anggaran hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang sebesar Rp101.094.000.000. Anggaran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin terselenggaranya proses demokrasi secara independen, transparan, dan akuntabel. Mekanisme pencairan anggaran dilakukan dalam dua tahap (termin) untuk menyesuaikan kebutuhan operasional pada masing-masing tahapan penyelenggaraan. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 8.1 berikut.



Gambar 8.1. Persentase Tahapan Penyaluran Dana Hibah Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2024

Skema penyaluran termin pertama sebesar 40% atau senilai Rp40.437.600.000 dicairkan pada awal tahapan pelaksanaan, guna membiayai kebutuhan awal seperti persiapan logistik, rekrutmen badan *ad hoc*, serta penyusunan perencanaan teknis. Sementara itu, termin kedua sebesar 60% atau Rp60.656.400.000 dicairkan pada tahap selanjutnya untuk menutupi kebutuhan pelaksanaan, distribusi logistik, honorarium penyelenggara, dan evaluasi akhir kegiatan.

Adapun alokasi realisasi dana hibah berdasarkan klasifikasi anggaran tersebut dapat dilihat pada gambar 8.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.



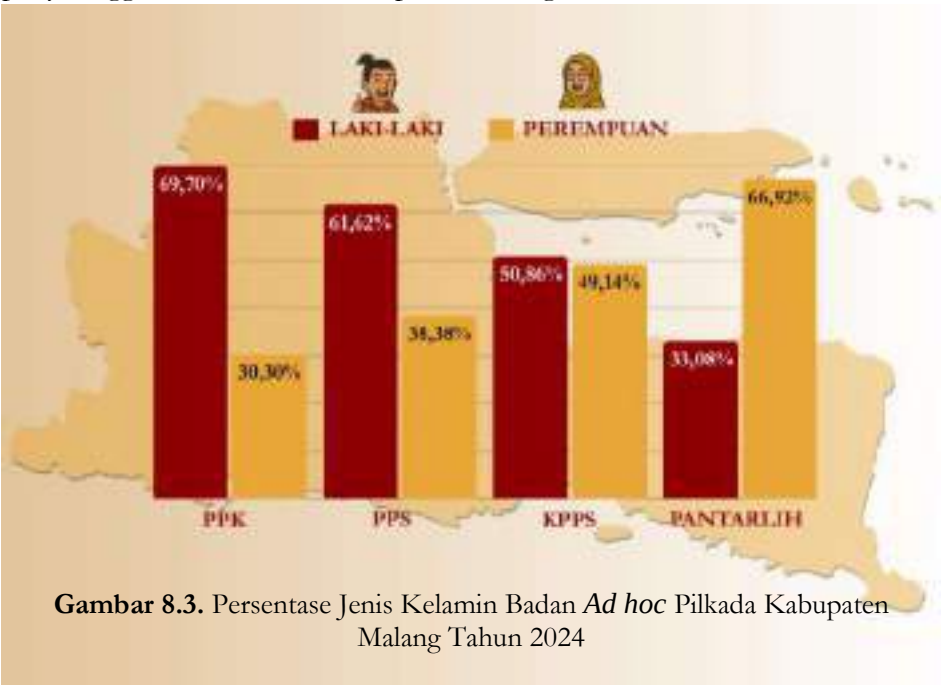
Alokasi distribusi anggaran mencakup tiga komponen utama. Pertama, untuk tahapan persiapan dan pelaksanaan sebesar 35% dari total anggaran, yaitu Rp35.791.051.637, yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi, bimtek, pengadaan perlengkapan pilkada, serta tahapan verifikasi dan pencalonan. Kedua, alokasi untuk operasional dan administrasi sebesar 12% atau Rp11.927.348.363, mencakup kebutuhan administratif kantor, pemeliharaan perangkat sistem informasi, hingga pengadaan sarana pendukung teknis lainnya. Komponen ketiga dan terbesar adalah anggaran untuk honorarium badan *ad hoc*, yaitu PPK, Sekretariat PPS, serta KPPS yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa, dengan total nilai mencapai Rp53.375.600.000 atau sekitar 53% dari total anggaran.

Distribusi anggaran yang proporsional ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan Pilkada yang berintegritas dan inklusif, serta memastikan setiap tahapan berlangsung dengan optimal. Pengalokasian terbesar untuk honorarium badan *ad hoc* mencerminkan pentingnya peran penyelenggara di lapangan sebagai ujung tombak pelaksanaan teknis Pilkada. Selain itu, struktur

penganggaran yang sistematis juga menjadi bentuk pertanggung-jawaban publik terhadap penggunaan dana negara dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Malang.

2. **Badan Ad hoc**

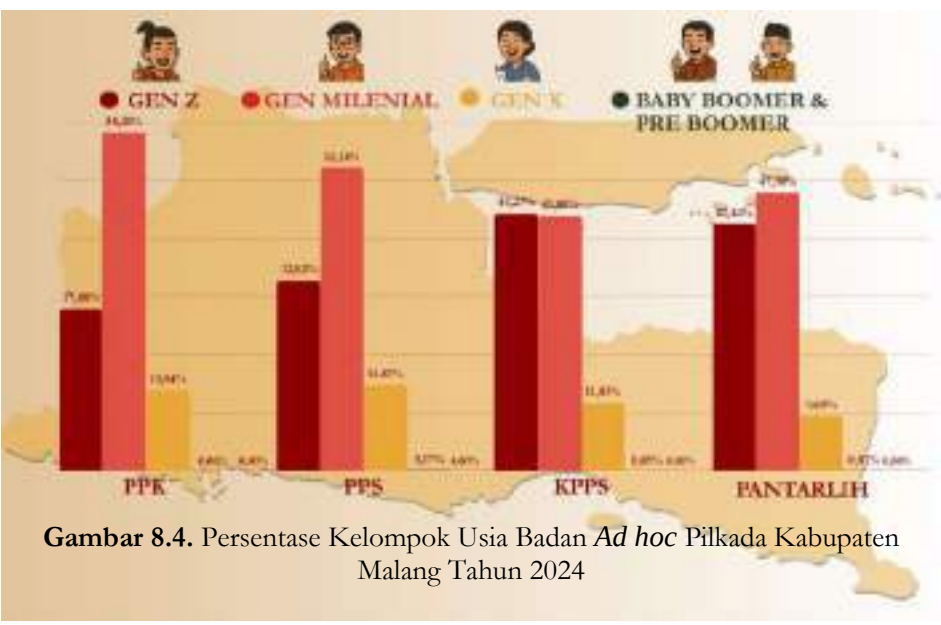
Sebagai pelaksana teknis di lapangan, KPU Kabupaten Malang membentuk badan *ad hoc* untuk mendukung kelancaran Pilkada Serentak 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Struktur badan *ad hoc* mencakup PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat desa/kelurahan, KPPS di setiap TPS, serta Pantarlih yang bertugas dalam pemutakhiran data pemilih. Dengan cakupan wilayah yang luas (33 kecamatan, 12 kelurahan, dan 378 desa) pembentukan badan *ad hoc* menjadi strategi penting untuk memastikan pelaksanaan tahapan Pilkada berjalan efektif dan menjangkau seluruh wilayah. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan mengedepankan prinsip profesionalisme, keterwakilan perempuan, serta inklusivitas lintas generasi. Badan *ad hoc* tidak hanya menjalankan fungsi teknis, tetapi juga menjadi representasi nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal. Komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 8.3, yang memperlihatkan distribusi antara laki-laki dan perempuan dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Malang.



Sebaran demografi badan *ad hoc* Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Malang menunjukkan partisipasi yang cukup beragam antara laki-laki dan perempuan di seluruh jenjang penyelenggara. Pada tingkat PPK, dari total 165 anggota, sebanyak 115 orang (69,70%) merupakan laki-laki, sedangkan 50 orang (30,30%) adalah perempuan. Di tingkat PPS, dari total 1.170 anggota, tercatat 721 orang (61,62%) laki-laki dan 449 orang (38,38%) perempuan. Menariknya, di tingkat KPPS yang berjumlah 28.294 orang, komposisi antara laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Laki-laki tercatat sebanyak 14.389 orang (50,86%), sementara perempuan sebanyak 13.905 orang (49,14%), mencerminkan keterwakilan gender yang relatif proporsional. Adapun pada jenjang Pantarlih yang berjumlah 7.602 orang, perempuan mendominasi dengan 5.087 orang (66,92%), sedangkan laki-laki berjumlah 2.515 orang (33,08%).

Komposisi ini menunjukkan bahwa meskipun pada tingkat PPK dan PPS masih didominasi laki-laki, partisipasi perempuan mengalami peningkatan yang besar terutama di tingkat KPPS dan Pantarlih.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 8.4 berikut.

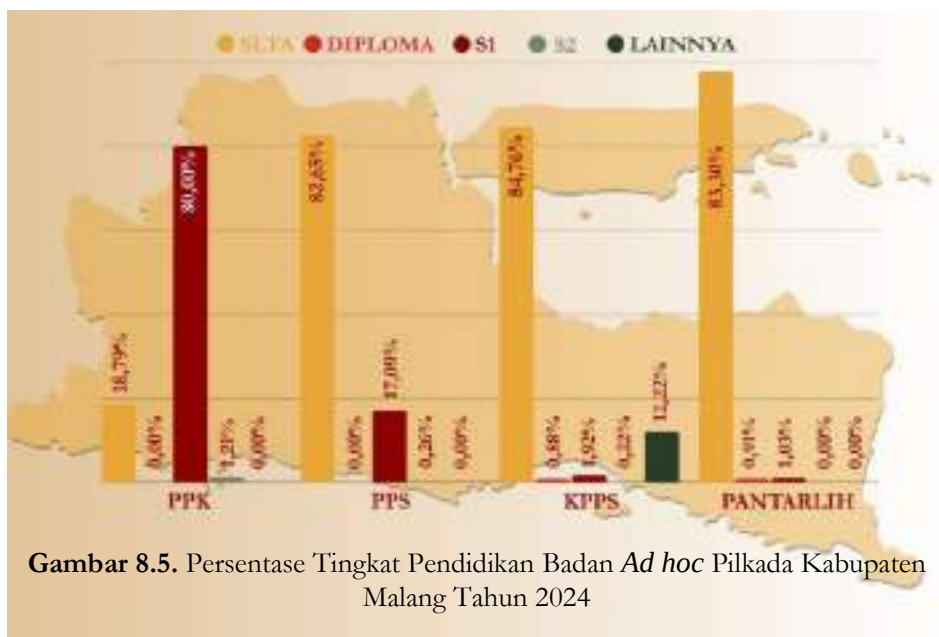


Sebaran demografi badan *ad hoc* Pilkada Serentak 2024 Kabupaten Malang berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi usia produktif pada seluruh jenjang penyelenggara. Di tingkat PPK, dari total 165 orang,

mayoritas berasal dari kelompok usia 28–43 tahun sebanyak 96 orang (58,18%), diikuti oleh usia 18–27 tahun sebanyak 46 orang (27,88%), serta 23 orang (13,94%) dari kelompok usia 44–59 tahun. Komposisi serupa juga terlihat pada PPS dengan total 1.170 orang, di mana kelompok usia 28–43 tahun mendominasi sebanyak 610 orang (52,14%), disusul oleh usia 18–27 tahun sebanyak 384 orang (32,82%), dan usia 44–59 tahun sebanyak 174 orang (14,87%). Hanya terdapat 2 orang (0,17%) dari kelompok usia 60–78 tahun, dan tidak ada dari kategori usia lainnya. Pada jenjang KPPS yang berjumlah 28.294 orang, komposisi usia hampir seimbang antara dua kelompok dominan. Kelompok usia 18–27 tahun tercatat sebanyak 12.499 orang (44,18%), diikuti sangat dekat oleh kelompok 28–43 tahun sebanyak 12.414 orang (43,88%). Kelompok usia 44–59 tahun berjumlah 3.347 orang (11,83%), sedangkan kelompok usia di bawah 18 tahun atau di atas 60 tahun sangat minim, masing-masing hanya 25 orang (0,09%), 8 orang (0,03%), dan 1 orang (0,00%) dari kategori usia >79 tahun.

Sementara itu, di tingkat Pantarlih yang berjumlah 7.602 orang, dominasi usia juga berada pada rentang 28–43 tahun sebanyak 3.641 orang (47,90%), diikuti oleh kelompok 18–27 tahun sebanyak 3.223 orang (42,40%), dan 730 orang (9,60%) dari kelompok usia 44–59 tahun. Jumlah Pantarlih dari kelompok usia 17 tahun, 60–78 tahun, dan lainnya sangat kecil, masing-masing hanya 3 orang (0,04%), 5 orang (0,07%), dan tidak ada dari kategori usia >79 tahun. Data ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Malang sangat mengandalkan kelompok usia produktif sebagai kekuatan utama dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Partisipasi dominan dari generasi muda (usia 18–43 tahun) memberikan indikasi positif terhadap regenerasi penyelenggara pilkada serta peningkatan kapasitas demokrasi yang lebih dinamis dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 8.5.



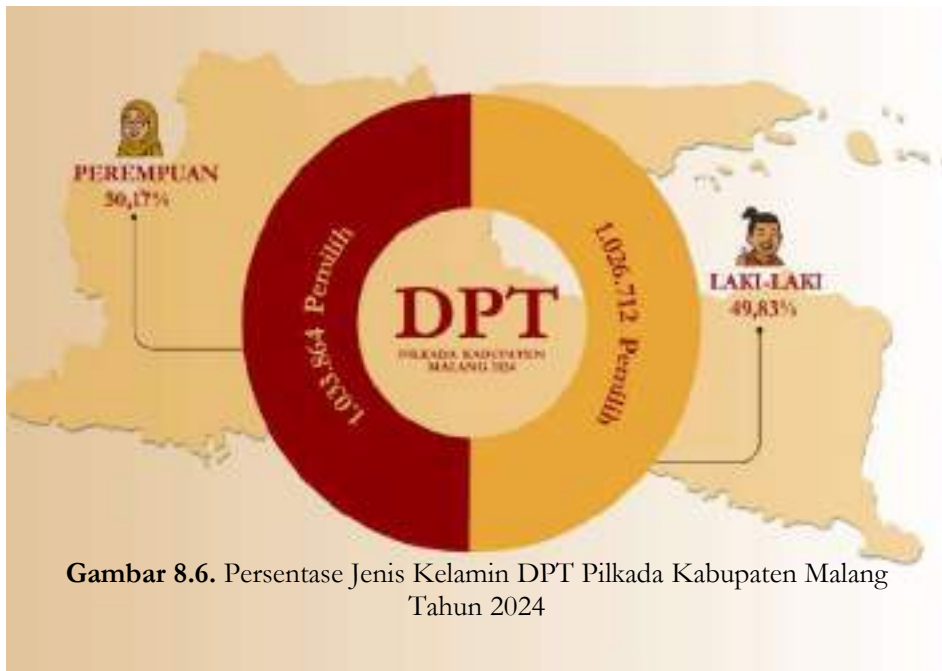
Sebaran tingkat pendidikan badan *ad hoc* Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Malang memperlihatkan variasi latar belakang akademik yang signifikan di tiap jenjang penyelenggara. Pada tingkat PPK yang berjumlah 165 orang, mayoritas berpendidikan tinggi, dengan 132 orang (80,00%) merupakan lulusan S1, 2 orang (1,21%) bergelar S2, dan 31 orang (18,79%) berlatar belakang SLTA. Sementara itu, pada tingkat PPS yang berjumlah 1.170 orang, dominasi pendidikan menengah cukup besar, dengan 967 orang (82,65%) berlatar belakang SLTA. Sebanyak 200 orang (17,09%) berpendidikan S1, dan 3 orang (0,26%) bergelar S2. Pada tingkat KPPS yang merupakan badan *ad hoc* dengan jumlah terbesar yaitu 28.294 orang, sebagian besar berasal dari lulusan SLTA, yaitu 23.981 orang (84,76%). Selain itu, terdapat 543 orang (1,92%) berpendidikan S1, 63 orang (0,22%) bergelar S2, dan 249 orang (0,88%) lulusan diploma, dan terdapat 3.458 orang (12,22%) yang tercatat dalam kategori lainnya. Adapun pada tingkat Pantarlih, mayoritas besar berasal dari lulusan SLTA sebanyak 7.455 orang (98,07%), diikuti oleh 78 orang (1,03%) lulusan S1 dan 69 orang (0,91%) lulusan diploma. Data ini menunjukkan bahwa pada jenjang PPK cenderung diisi oleh individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mencerminkan kebutuhan kapasitas analitis dan koordinatif yang lebih besar. Di sisi lain, pada tingkat KPPS dan Pantarlih yang berperan langsung dalam pelayanan pemilih di lapangan, mayoritas berasal dari jenjang SLTA, dengan proporsi pendidikan tinggi yang relatif kecil namun tetap signifikan untuk mendukung profesionalisme pelaksanaan teknis pilkada.

Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Malang tidak mencatat adanya penyelenggara *ad hoc* yang berasal dari kalangan penyandang disabilitas. Meskipun rekrutmen badan *ad hoc* dilakukan secara terbuka dan inklusif, tidak ada individu penyandang disabilitas yang mendaftar maupun terlibat dalam struktur PPK, PPS, KPPS, maupun Pantarlih. Sehingga menjadi catatan penting dalam upaya mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif, serta perlunya strategi afirmatif ke depan agar kelompok disabilitas juga memiliki ruang peran dalam penyelenggaraan pilkada.

3. Pemutakhiran Data

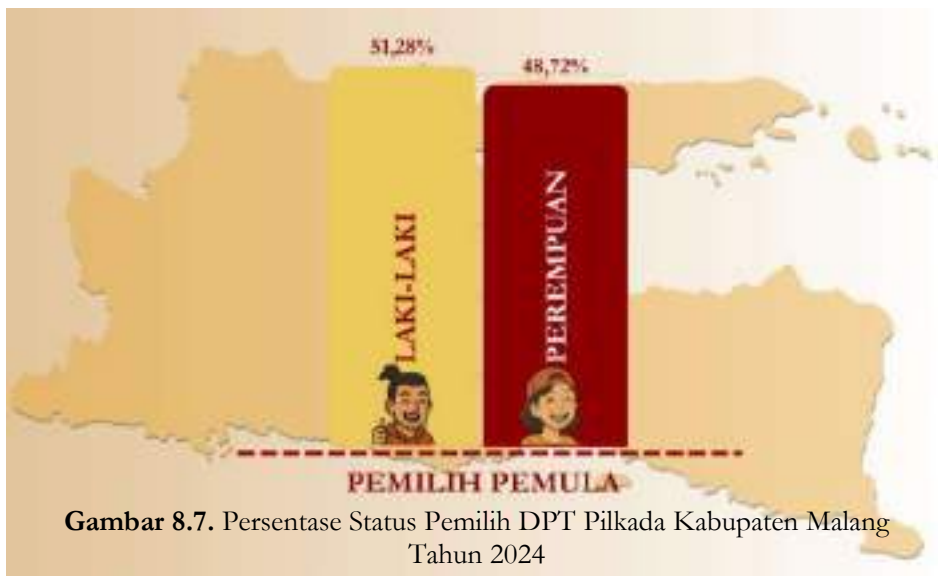
Proses pemutakhiran data pemilih menjadi tahapan penting dalam Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Malang untuk memastikan akurasi dan validitas daftar pemilih. Kegiatan ini dilakukan oleh Pantarlih melalui metode *door-to-door* guna mencocokkan data administrasi dengan kondisi riil di lapangan. Jumlah awal pemilih berdasarkan DP4 tercatat sebanyak 2.046.889 jiwa, yang kemudian meningkat menjadi 2.065.986 jiwa dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah proses verifikasi. Kenaikan ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan cokolit yang berhasil menjaring pemilih baru, termasuk pemilih pemula dan pindahan.

KPU Kabupaten Malang juga membuka ruang partisipasi publik melalui uji publik DPS untuk menjamin transparansi dan inklusivitas. Hasil akhirnya, ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.060.576 pemilih, tersebar di 33 kecamatan, 390 desa/kelurahan, dan 4.042 TPS. Pemutakhiran ini dilakukan dengan prinsip inklusif, melibatkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan warga di wilayah terpencil, serta memanfaatkan teknologi informasi guna mencegah data ganda. Tahapan ini menjadi fondasi penting bagi terselenggaranya Pilkada Kabupaten Malang 2024 yang adil, partisipatif, dan berintegritas. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 8.6 berikut.



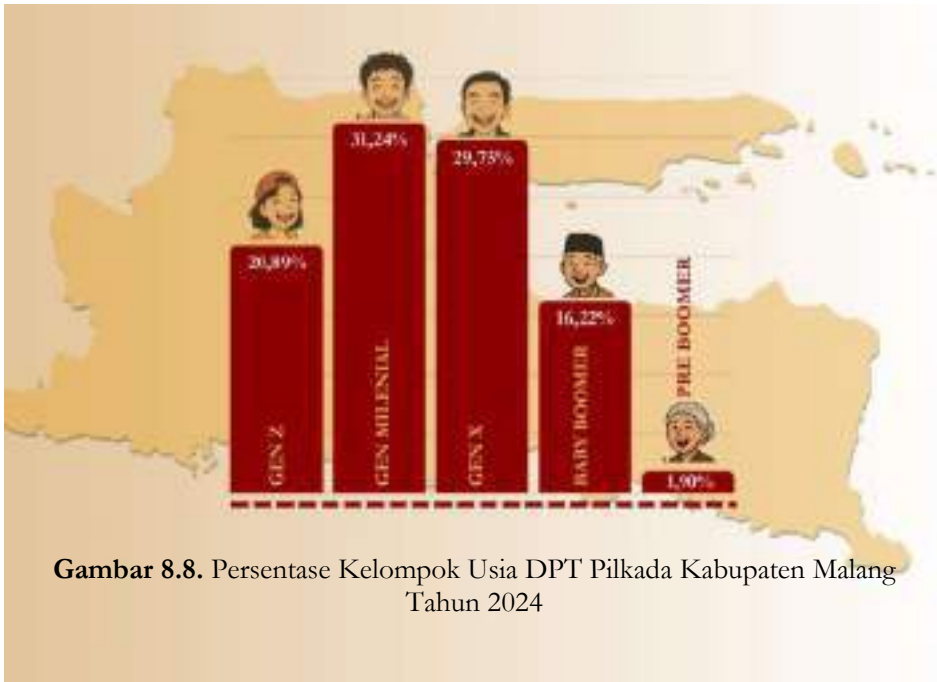
Berdasarkan hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Malang, sebaran pemilih berdasarkan jenis kelamin menunjukkan komposisi yang nyaris seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dari total 2.060.576 pemilih, sebanyak 1.026.712 orang (49,83%) adalah pemilih laki-laki, sementara 1.033.864 orang (50,17%) adalah pemilih perempuan. Komposisi ini mencerminkan keterwakilan gender yang proporsional dalam daftar pemilih, serta menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pilkada sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Keseimbangan ini menjadi indikator positif terhadap inklusivitas dan representasi gender dalam demokrasi lokal di Kabupaten Malang.

Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni pemilih pemula dan pemilih non-pemula. Klasifikasi ini penting untuk memahami karakteristik demografi usia pemilih, serta menjadi dasar dalam menyusun strategi sosialisasi yang lebih efektif, terutama untuk menjangkau kelompok pemilih muda yang cenderung membutuhkan pendekatan edukatif yang khas. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 8.7 berikut.



Berdasarkan klasifikasi status pemilih, total pemilih pemula tercatat sebanyak 34.004 orang, terdiri atas 17.437 laki-laki (51,28%) dan 16.567 perempuan (48,72%). Komposisi ini menunjukkan bahwa kelompok muda yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya didominasi oleh laki-laki, meskipun selisihnya tidak terlalu signifikan. Sementara itu, kategori pemilih non-pemula berjumlah 2.026.572 orang, dengan komposisi 1.009.275 laki-laki (49,80%) dan 1.017.297 perempuan (50,20%). Data ini menggambarkan bahwa pada kategori pemilih yang telah memiliki pengalaman memilih sebelumnya, dominasi jumlah sedikit bergeser ke perempuan.

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 8.8.

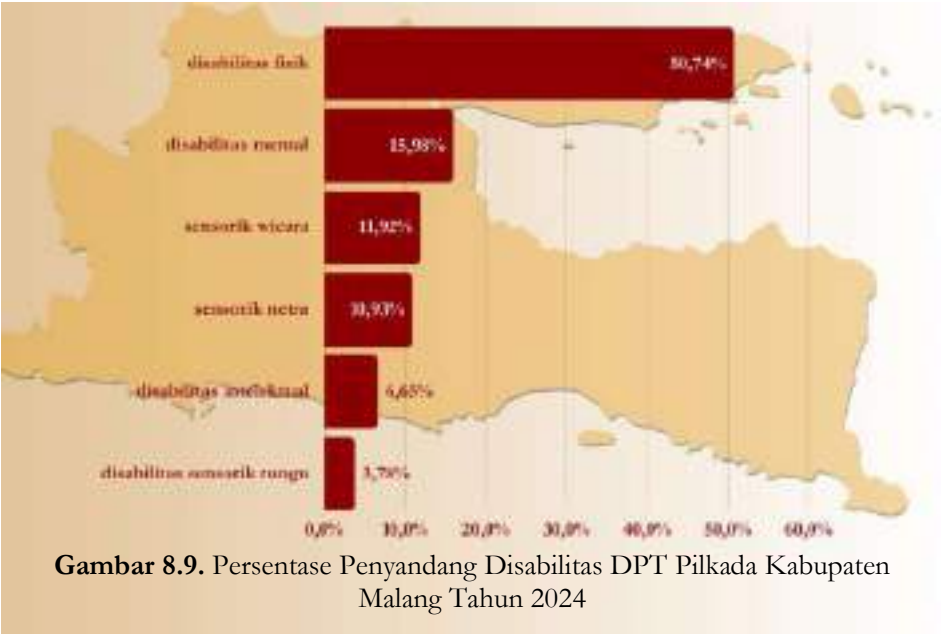


Gambar 8.8. Persentase Kelompok Usia DPT Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2024

Sebaran DPT berdasarkan kelompok usia menunjukkan distribusi pemilih yang cukup merata, dengan dominasi dari kelompok usia produktif. Dari total 2.060.576 pemilih, kelompok usia terbanyak berasal dari rentang 28–43 tahun, yaitu sebanyak 643.806 pemilih (31,24%), disusul oleh kelompok usia 44–59 tahun dengan 612.993 pemilih (29,75%). Kedua kelompok ini mencerminkan segmentasi usia produktif yang memiliki potensi besar dalam pengambilan keputusan politik. Kelompok usia 18–27 tahun berjumlah 396.453 pemilih (19,24%), yang juga menunjukkan besarnya keterlibatan generasi muda dalam Pilkada. Sementara itu, kelompok usia 60–78 tahun mencatat 334.272 pemilih (16,22%), menunjukkan bahwa lansia tetap menjadi segmen penting dalam partisipasi politik. Adapun pemilih berusia 17 tahun, yang merupakan pemilih pemula, berjumlah 34.004 orang (1,65%), menandai partisipasi generasi baru dalam demokrasi elektoral. Di sisi lain, terdapat 39.048 pemilih (1,90%) yang berusia di atas 79 tahun, menunjukkan bahwa kelompok usia lanjut masih cukup aktif menggunakan hak pilihnya. Distribusi usia ini memberikan gambaran strategis bagi penyelenggara dan peserta pilkada dalam merancang pendekatan kampanye dan sosialisasi yang sesuai dengan karakteristik demografi pemilih di Kabupaten Malang.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten Malang Tahun 2024 disajikan pada gambar 8.9, yang menunjukkan jumlah dan

persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



KPU Kabupaten Malang menegaskan komitmennya terhadap prinsip inklusivitas dengan mencatat secara khusus 8.096 pemilih penyandang disabilitas dalam DPT Pilkada Serentak 2024. Dari jumlah tersebut, kelompok disabilitas fisik mendominasi dengan 4.108 orang (50,74%), disusul oleh disabilitas mental sebanyak 1.294 orang (15,98%), sensorik wicara sebanyak 965 orang (11,92%), serta sensorik netra sebanyak 885 orang (10,93%). Sementara itu, disabilitas intelektual tercatat sebanyak 538 orang (6,65%) dan sensorik runtu sebanyak 306 orang (3,78%). Pencatatan ini mencerminkan keterlibatan seluruh kelompok disabilitas dalam proses demokrasi dan menjadi langkah strategis untuk memastikan akses terhadap hak pilih yang setara. KPU juga menekankan pentingnya penyediaan sarana dan informasi yang ramah disabilitas, guna mendukung pelaksanaan Pilkada yang inklusif, adil, dan bebas diskriminasi bagi seluruh warga masyarakat.

4. Pencalonan

Tahapan pencalonan dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Malang dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai pencalonan kepala daerah. Proses ini mencakup pengumuman pendaftaran, penerimaan berkas persyaratan,

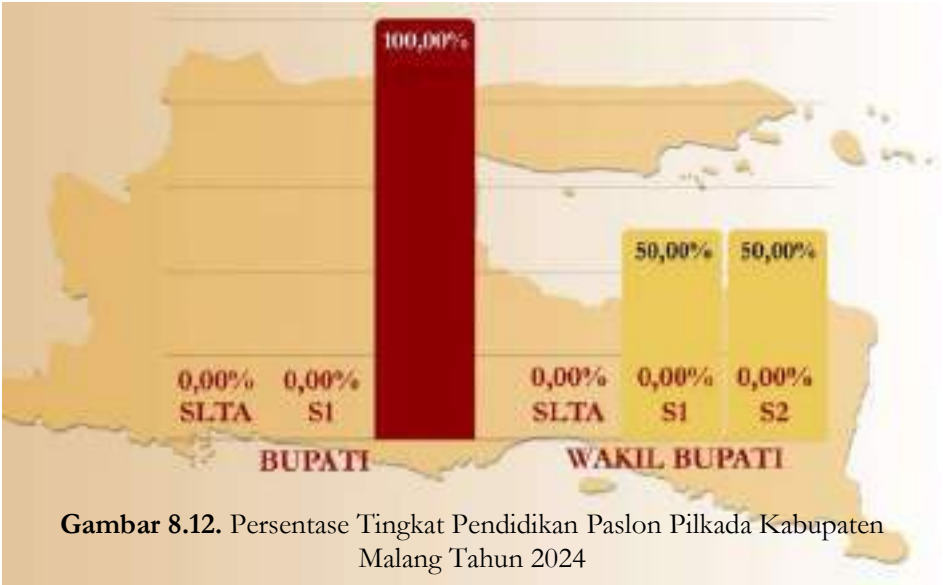
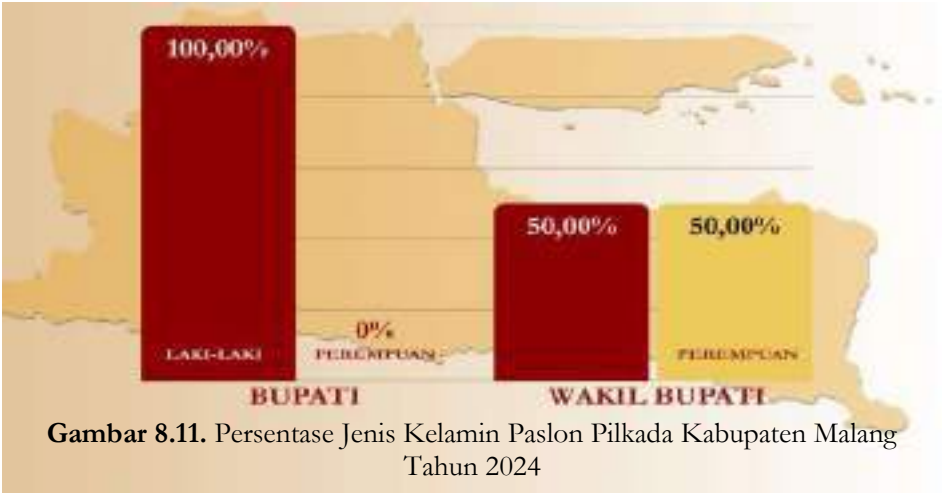
verifikasi administrasi dan faktual, serta penetapan pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada. Pada Pilkada Kabupaten Malang tahun ini, terdapat dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malang. Kedua pasangan calon tersebut mendaftar melalui jalur partai politik dan/atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan berdasarkan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Malang. Tidak terdapat pasangan calon dari jalur perseorangan pada Pilkada 2024.

Seluruh proses pencalonan berlangsung secara terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pelayanan prima. Verifikasi dilakukan secara ketat terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan, seperti surat dukungan partai politik, syarat kesehatan, dan syarat pencalonan pribadi calon kepala daerah dan wakilnya. Setelah dinyatakan lolos verifikasi, kedua pasangan calon ditetapkan dalam rapat pleno terbuka dan dilanjutkan dengan pengundian nomor urut yang disaksikan oleh Bawaslu, partai pengusung, dan perwakilan masyarakat. Penetapan ini menandai dimulainya tahapan kompetisi politik secara resmi di Kabupaten Malang. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada gambar 8.10 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.



Gambar 8.10. Daftar Nama Paslon Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2024

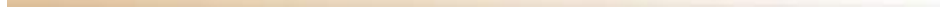
Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang disajikan pada gambar 8.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang disajikan pada gambar 8.12.



Pada Pilkada Serentak Tahun 2024, terdapat dua calon Bupati, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki (100%), dan dua calon Wakil Bupati yang terdiri dari satu laki-laki (50%) dan satu perempuan (50%). Komposisi ini menunjukkan keterwakilan gender dalam pencalonan kepala daerah masih didominasi laki-laki, namun keterlibatan perempuan pada posisi wakil menjadi indikasi awal ke arah representasi politik yang lebih setara.

Dari sisi tingkat pendidikan, seluruh calon Bupati memiliki kualifikasi pendidikan S2 (100%), menunjukkan bahwa keduanya berasal dari latar belakang akademik yang tinggi. Untuk calon Wakil Bupati, masing-masing memiliki latar belakang pendidikan S1 (50%) dan S2 (50%), mencerminkan

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 8.13, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



Sosialisasi Pilkada merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih dan pemahaman masyarakat terhadap proses serta pentingnya penggunaan hak suara. KPU Kabupaten Malang menerapkan dua metode utama dalam pelaksanaan sosialisasi. Pertama, melalui penyebaran informasi lewat media, baik media online (23 *platform*) maupun media cetak (6 outlet), yang berperan aktif menyampaikan informasi terkait tahapan dan jadwal Pilkada kepada publik secara luas. Kedua, melalui pendidikan pemilih yang dilaksanakan dalam

bentuk sosialisasi langsung kepada masyarakat serta program Sekolah Pemilih yang menasar pemilih pemula, seperti pelajar dan mahasiswa, untuk menumbuhkan kesadaran demokratis sejak dini.

Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), target pelaksanaan sosialisasi adalah sebanyak 72 kegiatan, dengan maksimal peserta 50 orang per kegiatan, sehingga total sasaran yang ingin dicapai adalah 3.600 orang. Strategi ini menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Malang dalam menjadikan pemilih sebagai subjek aktif demokrasi melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan inklusif.



Gambar 8.14. Maskot Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2024

KPU Kabupaten Malang memperkenalkan maskot resmi bernama CAK MALIH. Maskot ini mengambil bentuk burung cucak hijau, satwa yang dikenal cerdas, energik, dan memiliki suara merdu—mewakili karakter masyarakat Malang yang dinamis, vokal, dan berjiwa partisipatif. Nama "CAK" diambil dari sapaan khas masyarakat Jawa Timur, khususnya di wilayah Kabupaten Malang, yang bermakna akrab, bersahabat, dan dekat dengan rakyat.

Sementara itu, "MALIH" merupakan akronim dari "MALang memiLIH", yang menjadi seruan moral dan ajakan partisipatif agar seluruh masyarakat Kabupaten Malang turut aktif menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024. CAK MALIH tidak hanya menjadi simbol visual Pilkada, tetapi juga berfungsi sebagai media edukasi dan kampanye yang membumikan pesan

demokrasi secara lebih ringan dan menyenangkan. Melalui maskot ini, KPU Kabupaten Malang berharap dapat menumbuhkan kesadaran bersama bahwa pilkada bukan sekadar rutinitas politik, melainkan momentum kolektif untuk menentukan arah pembangunan daerah.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, KPU Kabupaten Malang memberikan fasilitasi kampanye kepada masing-masing pasangan calon dalam bentuk Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye (BK), Iklan Kampanye, dan Debat Publik. Seluruh tahapan kampanye dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan akses antar kandidat, serta tetap memperhatikan norma hukum, etika politik, dan ketertiban umum. Melalui kampanye yang sehat dan teratur, diharapkan masyarakat dapat mengenali calon pemimpinnya secara lebih baik dan memberikan suara secara rasional dan bertanggung jawab.



CALON BUPATI dan WAKIL BUPATI MALANG 2024-2029

SALAF
P. SANUSI - L. LATIFAH SUKONI

Lanjutkan!

A. BALIHO
Jumlah fasilitasi 5 buah

B. UMBUL-UMBUL
Jumlah Fasilitasi 20 x
33 kecamatan = 660

C. SPANDUK
Jumlah fasilitasi 2 x
390 desa/kelurahan
=780



DEBAT PUBLIK PERTAMA
PILKADA CALON BUPATI & WAKIL BUPATI MALANG
2024-2029



DEBAT PUBLIK KEDUA
PILKADA CALON BUPATI & WAKIL BUPATI MALANG
2024-2029

Gambar 8.15. Fasilitas Kampanye KPU Kab. Malang Tahun 2024

Kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang pada Pilkada 2024 aktif memanfaatkan *platform* digital sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi politik.

Paslon Nomor Urut 1 (Sanusi – Latifah) memanfaatkan media sosial sebagai berikut:

- Instagram: Mengoperasikan 3 akun aktif, yaitu @abahsanusin1, @salaf.center, dan @tetapabah.
- TikTok: Mengelola 2 akun, yaitu @sanusilatifah01 dan @latifah.sanusi.

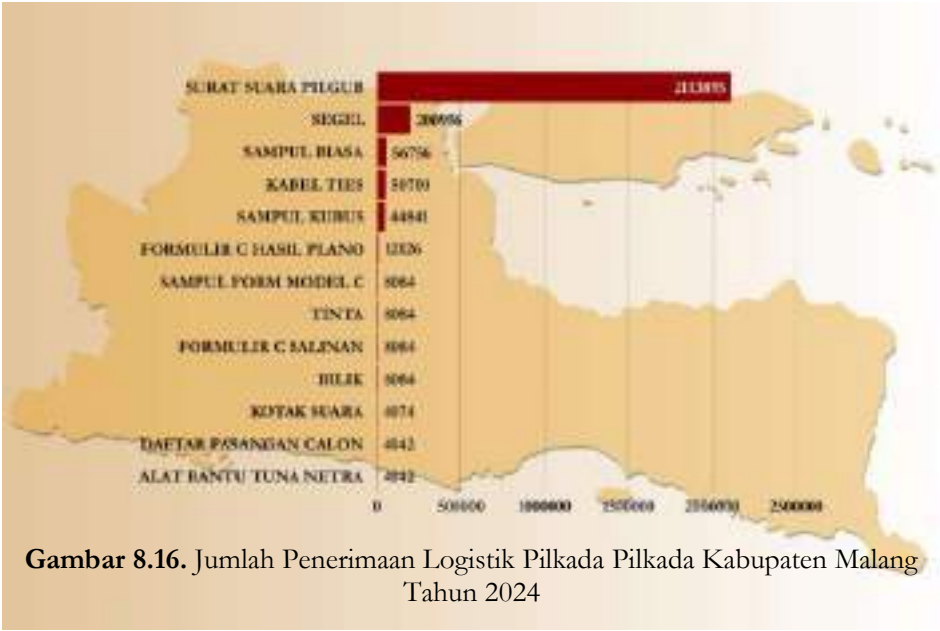
Sementara itu, Paslon Nomor Urut 2 (Gunawan HS – dr. Umar Usman) memiliki jangkauan digital yang juga kuat:

- Instagram: Mengelola 4 akun, yaitu @bupatimalang2024, @abahgun_official, @siaptandang.official, dan @bupati.malanggemilang.
- TikTok: Terdapat 2 akun aktif, yakni @abahgun.official dan @relawan.nasionalis.

Penggunaan media sosial oleh kedua paslon mencerminkan tren kampanye modern yang berorientasi pada pemilih muda dan pengguna internet aktif. *Platform* seperti Instagram dan TikTok menjadi sarana efektif untuk membangun interaksi langsung, menyebarkan narasi kampanye, serta memperkuat keterlibatan publik secara digital selama masa kampanye Pilkada.

6. Logistik

Pengadaan logistik untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Malang dilaksanakan oleh sekretariat KPU Kabupaten Malang sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses pengadaan barang/jasa logistik dilakukan melalui mekanisme swakelola dan/atau penyedia, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sebagaimana ketentuan yang berlaku. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 8.16, yang memuat data kebutuhan serta jalur distribusi logistik pemilihan ke seluruh kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Malang.



Gambar 8.16. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2024

Seluruh kegiatan *setting* dan *packing* perlengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dipusatkan di Gudang Bulog, Jalan Raya Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Proses ini melibatkan 175 tenaga kerja, terdiri dari 50 laki-laki dan 125 perempuan, yang bertugas untuk menyortir, memeriksa, mengemas, dan menyiapkan perlengkapan TPS sesuai kebutuhan. Distribusi logistik Pilkada menggunakan moda transportasi truk, dengan pengiriman dilakukan secara bertahap selama tiga hari, yaitu pada tanggal 23, 24, dan 25 November 2024.



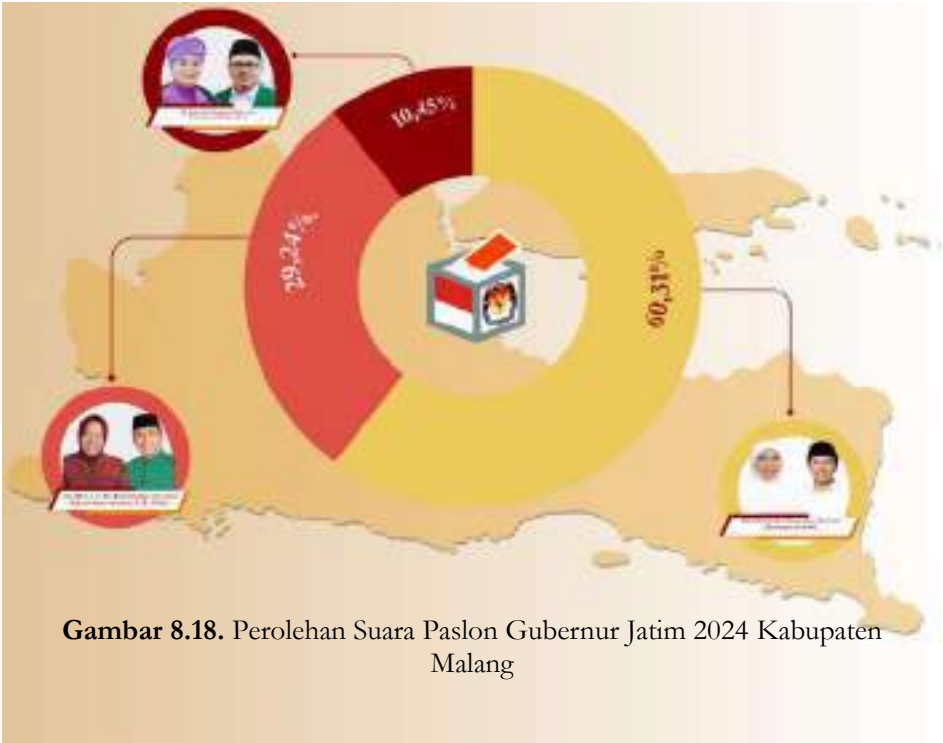
Gambar 8.17. Moda Transportasi Distribusi Logistik Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2024

Pada hari pertama, distribusi menyasar 12 kecamatan, termasuk wilayah dengan medan geografis menantang seperti Kecamatan Ampelgading, Bantur, Tirtoyudo, dan Sumbermanjing Wetan. Penjadwalan distribusi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor jarak, kondisi jalan, serta kesiapan

perangkat kecamatan dan desa untuk menerima logistik tepat waktu. Seluruh rangkaian kegiatan logistik ini menjadi fondasi penting dalam mendukung keberlangsungan Pilkada yang tertib, aman, dan sesuai jadwal. Kesiapan logistik yang baik tidak hanya menjamin kelancaran teknis pemungutan suara, tetapi juga menjadi indikator profesionalisme KPU Kabupaten Malang dalam menjalankan tugas konstitusional secara menyeluruh.

7. Hasil Pilkada Serentak

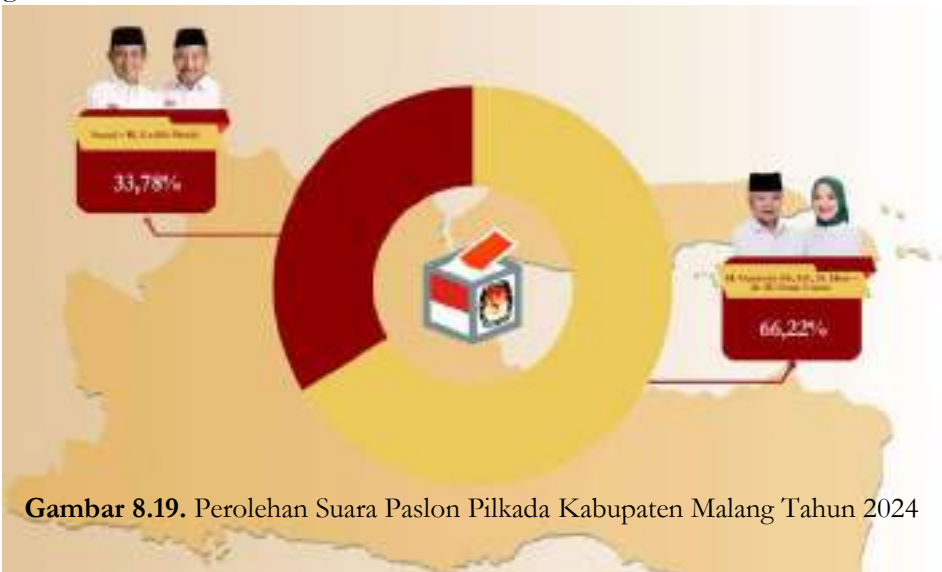
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Malang disajikan pada gambar 8.18.



Hasil rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Malang pada Pilkada Serentak Tahun 2024 menunjukkan bahwa pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestjanto Dardak memperoleh suara terbanyak, yakni sebanyak 715.176 suara atau 60,31% dari total suara sah. Di posisi kedua, pasangan Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta

(Gus Hans) meraih 346.803 suara atau 29,24%. Sementara itu, pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah – H. Lukmanul Khakim memperoleh 123.889 suara, atau 10,45% dari total suara sah. Hasil ini menunjukkan dominasi suara pasangan petahana Khofifah–Emil di wilayah Kabupaten Malang, mencerminkan tingginya tingkat penerimaan masyarakat terhadap kinerja mereka selama masa jabatan sebelumnya. Di sisi lain, perolehan suara pasangan Risma–Gus Hans dan Luluk–Lukman mencerminkan dinamika kompetisi yang tetap sehat dan demokratis.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 8.19.



Gambar 8.19. Perolehan Suara Paslon Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2024

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2024, pasangan Sanusi – Hj. Latifah Shohib meraih kemenangan dengan total perolehan suara sebanyak 782.356 suara, atau setara dengan 66,22% dari total suara sah. Sementara itu, pasangan H. Gunawan HS, SH., M. Hum – dr. H. Umar Usman memperoleh 399.144 suara, atau 33,78% dari total suara sah. Dengan jumlah total suara sah mencapai 1.181.500 suara, hasil ini menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi serta proses demokrasi yang berjalan secara kompetitif dan kondusif. Kemenangan pasangan petahana mencerminkan kepercayaan publik yang masih kuat terhadap keberlanjutan kepemimpinan dan program-program pembangunan yang telah dijalankan sebelumnya. Perolehan suara ini sekaligus menjadi indikator preferensi masyarakat Kabupaten Malang terhadap visi, misi, serta rekam jejak masing-masing pasangan calon, yang telah disosialisasikan selama masa kampanye secara terbuka dan akuntabel.

BAGIAN 9

KABUPATEN LUMAJANG

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Tahapan perencanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lumajang diawali dengan proses panjang pembahasan dana hibah antara KPU Kabupaten Lumajang dan Pemerintah Daerah. Proses ini dimulai sejak September 2022, melalui serangkaian audiensi dan pembahasan intensif bersama DPRD Kabupaten Lumajang, serta koordinasi lintas instansi dan perangkat daerah terkait perencanaan teknis dan pembiayaan pilkada.

Hasil dari proses tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 20 November 2023 dengan anggaran yang disepakati sebesar Rp51.000.000.000. Penandatanganan NPHD ini menjadi tonggak awal kesiapan pendanaan penyelenggaraan Pilkada 2024. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 9.1 berikut.

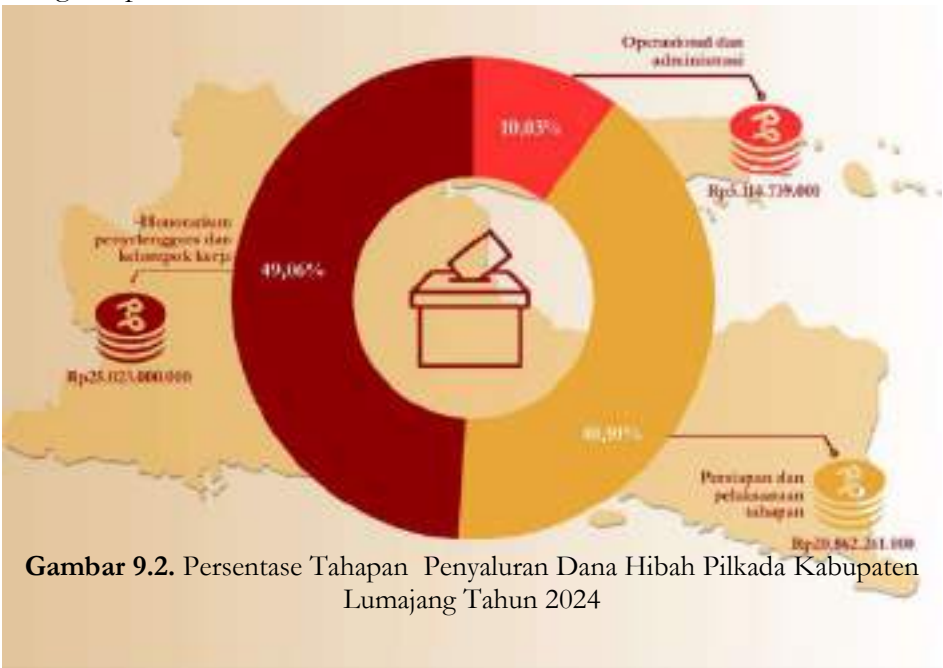


Gambar 2.1. Persentase Tahapan Penyaluran Dana Hibah Pilkada Kabupaten Lumajang Tahun 2024

Pencairan dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lumajang dilakukan dalam dua tahap (termin). Termin pertama dicairkan pada bulan Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp20.400.000.000 (40%), dan digunakan untuk membiayai tahapan awal penyelenggaraan, seperti perencanaan, pembentukan badan *ad hoc*, serta kegiatan persiapan teknis

lainnya. Selanjutnya, termin kedua dicairkan pada bulan Juni 2024 senilai Rp30.600.000.000 (60%), yang diperuntukkan bagi pembiayaan tahapan inti pelaksanaan Pilkada, termasuk pengadaan logistik, pelaksanaan pemungutan suara, serta honorarium penyelenggara hingga tahapan akhir rekapitulasi dan pelaporan.

Adapun alokasi realisasi dana hibah berdasarkan klasifikasi anggaran tersebut dapat dilihat pada gambar 9.2 yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.



Alokasi anggaran hibah Pilkada Kabupaten Lumajang Tahun 2024 terbagi ke dalam tiga komponen utama, dengan porsi terbesar diarahkan untuk kebutuhan honorarium penyelenggara.

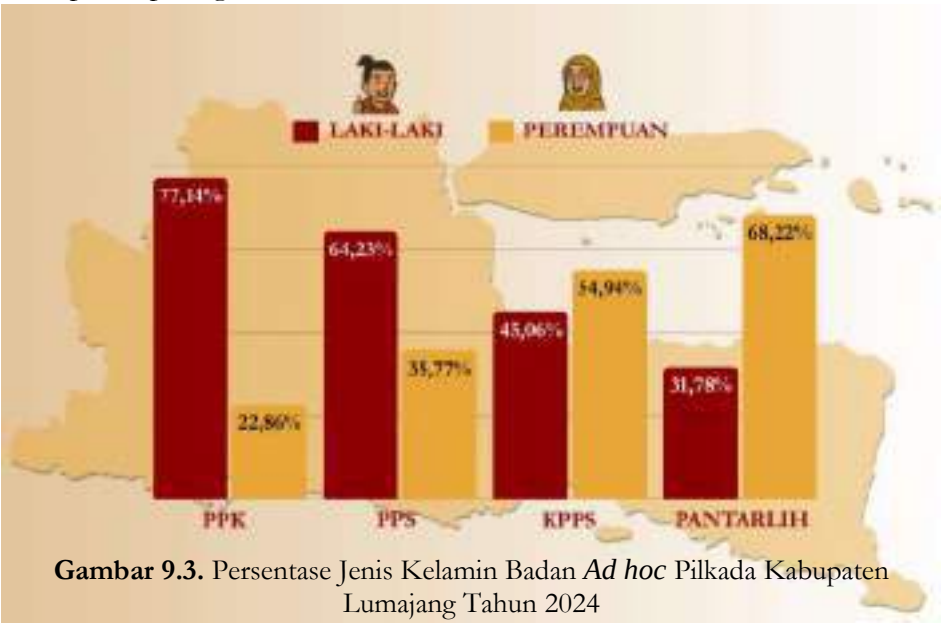
Komponen honorarium mendapatkan alokasi sebesar Rp25.023.000.000 atau sekitar 49,06% dari total anggaran hibah, menunjukkan fokus utama pada pemenuhan hak dan insentif bagi badan *ad hoc* seperti PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih yang menjadi pelaksana teknis di lapangan. Selanjutnya, anggaran untuk tahapan persiapan dan pelaksanaan mencapai Rp20.862.261.000 atau setara dengan 40,91% dari total anggaran. Dana ini digunakan untuk kegiatan seperti sosialisasi, bimbingan teknis, pengadaan perlengkapan, serta pelaksanaan tahapan verifikasi dan pencalonan. Sementara itu, alokasi terkecil dialokasikan untuk operasional dan administrasi, yaitu sebesar Rp5.114.739.000

atau 10,03%. Dana ini mencakup kebutuhan administratif kantor, pemeliharaan sistem informasi, serta penyediaan sarana pendukung penyelenggaraan teknis lainnya.

2. **Badan Ad hoc**

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Lumajang membentuk sebanyak 19.401 penyelenggara badan *ad hoc*. Struktur ini mencakup Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Petugas Ketertiban TPS, serta sekretariat di setiap tingkatan.

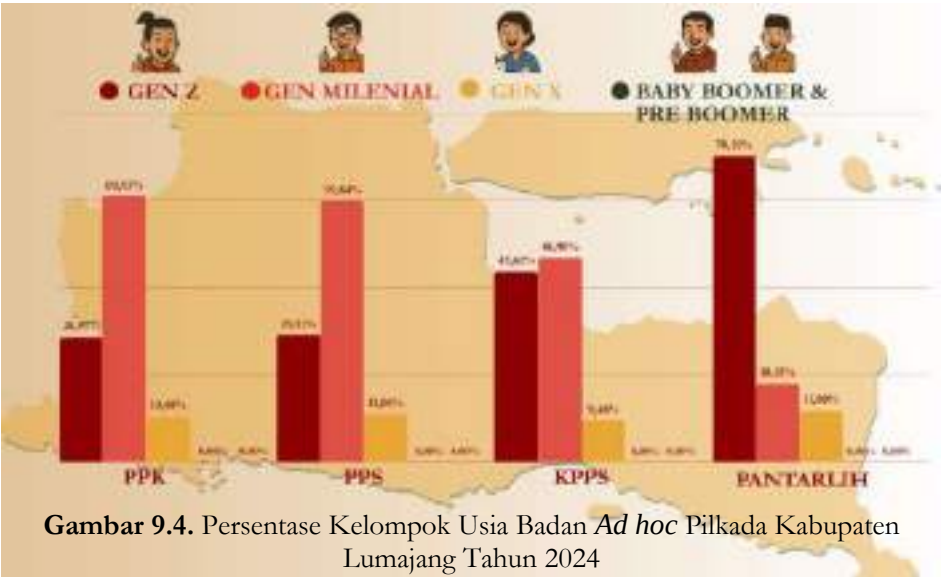
Proses pembentukan badan *ad hoc* dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, dan profesional, dengan mengacu pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc, serta Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 sebagai pedoman teknis terbaru. Prinsip inklusivitas, keterwakilan gender, dan partisipasi lintas usia juga menjadi perhatian dalam setiap tahapan rekrutmen. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 9.3.



Sebaran badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Lumajang Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan komposisi yang bervariasi di setiap tingkatan. Pada tingkat PPK yang berjumlah 105 orang, sebanyak 81 orang

(77,14%) adalah laki-laki dan 24 orang (22,86%) perempuan. Dominasi laki-laki juga terlihat pada PPS dengan total 615 orang, yang terdiri atas 395 laki-laki (64,23%) dan 220 perempuan (35,77%). Dari total 11.550 anggota KPPS, sebanyak 6.345 orang (54,94%) adalah perempuan, melampaui jumlah laki-laki yang mencapai 5.205 orang (45,06%). Sementara itu, di tingkat Pantarlih, partisipasi perempuan tercatat lebih tinggi, yaitu 2.151 orang (68,22%), dibandingkan dengan laki-laki sebanyak 1.002 orang (31,78%) dari total 3.153 petugas.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Lumajang Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 9.4 berikut.

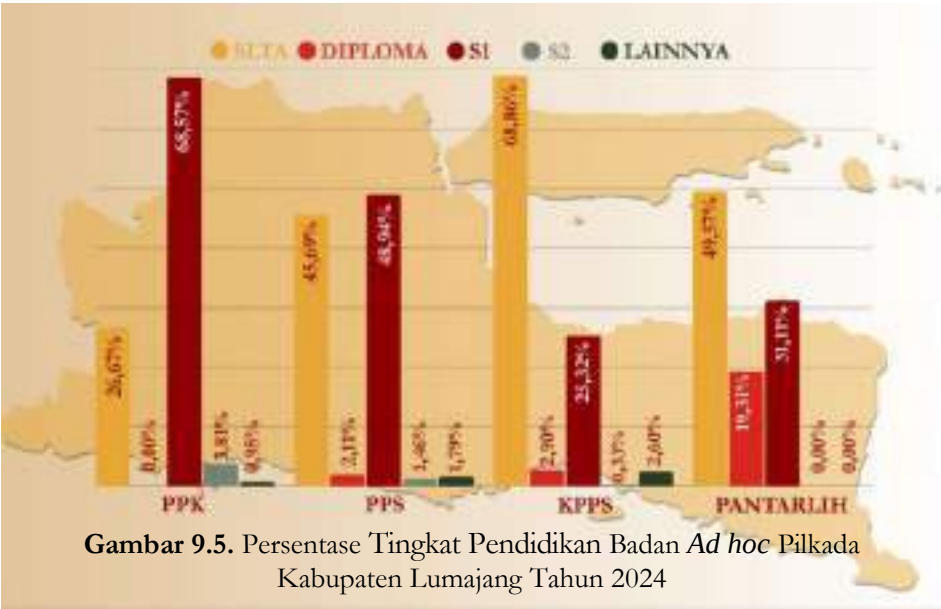


Gambar 9.4. Persentase Kelompok Usia Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Lumajang Tahun 2024

Sebaran usia badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Lumajang Tahun 2024 memperlihatkan dominasi kelompok usia produktif, khususnya pada rentang usia 18–43 tahun, di semua tingkatan penyelenggara. Pada tingkat PPK yang berjumlah 105 orang, sebagian besar berada pada rentang usia 28–43 tahun sebanyak 64 orang (60,95%), disusul usia 18–27 tahun sebanyak 30 orang (28,57%), dan 44–59 tahun sebanyak 11 orang (10,48%). Komposisi serupa terlihat pada PPS dengan total 615 orang, didominasi oleh usia 28–43 tahun sebanyak 368 orang (59,84%), kemudian 18–27 tahun sebanyak 179 orang (29,11%), dan 44–59 tahun sebanyak 68 orang (11,06%). Pada tingkat KPPS yang berjumlah 11.550 orang, distribusi usia relatif merata antara kelompok 28–43 tahun sebanyak 5.417 orang (46,90%) dan 18–27 tahun sebanyak 5.035 orang (43,59%), sedangkan usia 44–59 tahun tercatat sebanyak 1.095 orang

(9,48%), dan hanya terdapat 3 orang (0,03%) dari usia 17 tahun. Sementara itu, Pantarlih yang berjumlah 3.153 orang didominasi oleh usia 18–27 tahun sebanyak 2.213 orang (70,19%), disusul oleh usia 28–43 tahun sebanyak 568 orang (18,01%), dan usia 44–59 tahun sebanyak 372 orang (11,80%). Data ini menegaskan bahwa badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Lumajang didominasi oleh generasi muda dan usia produktif, khususnya di tingkat teknis seperti KPPS dan Pantarlih.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Lumajang Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 9.5.



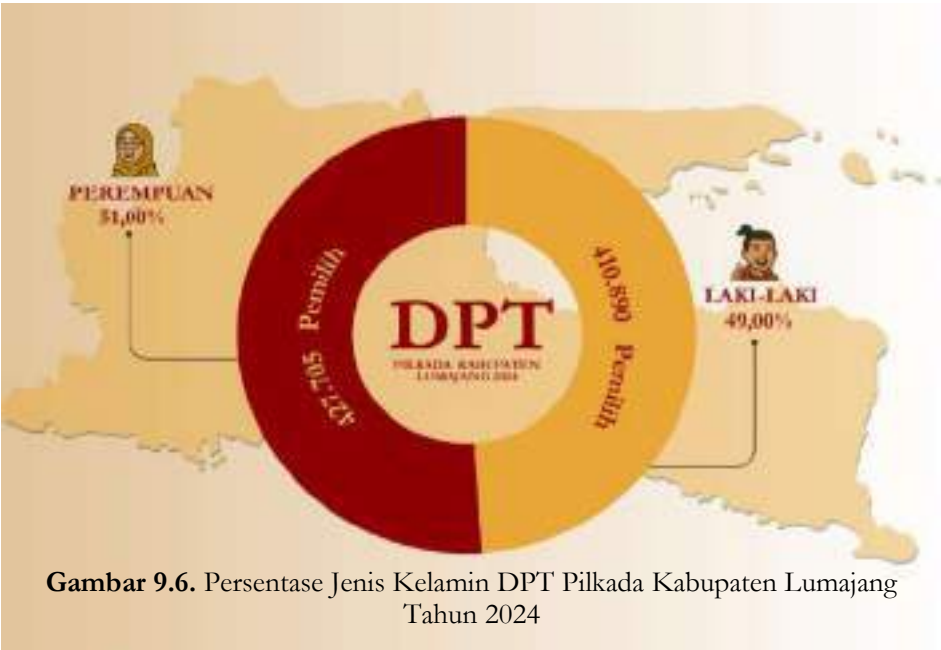
Sebaran tingkat pendidikan badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Lumajang menunjukkan, pada tingkat PPK, mayoritas berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 72 orang (68,57%), diikuti SLTA sebanyak 28 orang (26,67%), S2 sebanyak 4 orang (3,81%), dan satu orang (0,95%) dari kategori pendidikan lainnya. Untuk PPS yang berjumlah 615 orang, komposisinya cukup berimbang antara lulusan S1 sebanyak 301 orang (48,94%) dan SLTA sebanyak 281 orang (45,69%). Selebihnya, terdapat 13 orang (2,11%) lulusan Diploma, 9 orang (1,46%) lulusan S2, dan 11 orang (1,79%) dari kategori pendidikan lainnya. Tingkat pendidikan KPPS didominasi oleh lulusan SLTA sebanyak 7.953 orang (68,86%), diikuti oleh S1 sebanyak 2.924 orang (25,32%), Diploma sebanyak 335 orang (2,90%), pendidikan lainnya sebanyak 300 orang (2,60%), dan lulusan S2 sebanyak 38 orang (0,33%). Sementara itu,

Pantarlih menunjukkan komposisi yang lebih tersebar, dengan 49,57% lulusan SLTA (1.563 orang), 31,11% lulusan S1 (981 orang), dan 19,31% lulusan Diploma (609 orang).

Sebagai bentuk komitmen terhadap pilkada yang inklusif, KPU Kabupaten Lumajang mencatat adanya keterlibatan penyandang disabilitas dalam struktur penyelenggara *ad hoc*, khususnya pada tingkat KPPS. Dari total 11.550 anggota KPPS, terdapat 6 orang penyandang disabilitas fisik, yang terdiri dari 4 laki-laki dan 2 perempuan.

3. Pemutakhiran Data

Tahapan pemutakhiran data pemilih merupakan proses krusial dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Proses ini diawali dari kegiatan Coklit oleh Pantarlih, dilanjutkan dengan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), kemudian DPS Hasil Perbaikan (DPSHP), hingga akhirnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berdasarkan hasil penetapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lumajang, jumlah pemilih dalam DPT tercatat sebanyak 838.595 orang. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 9.6 berikut.



Berdasarkan hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lumajang, jumlah total pemilih tercatat sebanyak 838.595 orang. Dari jumlah tersebut, 410.890 orang (49,00%)

merupakan pemilih laki-laki, sementara 427.705 orang (51,00%) merupakan pemilih perempuan.

Komposisi ini menunjukkan bahwa pemilih perempuan sedikit lebih dominan dibandingkan laki-laki, dengan selisih sebesar 1%. Kondisi ini menjadi indikator positif terhadap partisipasi perempuan dalam proses demokrasi, sekaligus memperkuat pentingnya pendekatan sosialisasi dan edukasi pemilih yang inklusif dan responsif terhadap gender.

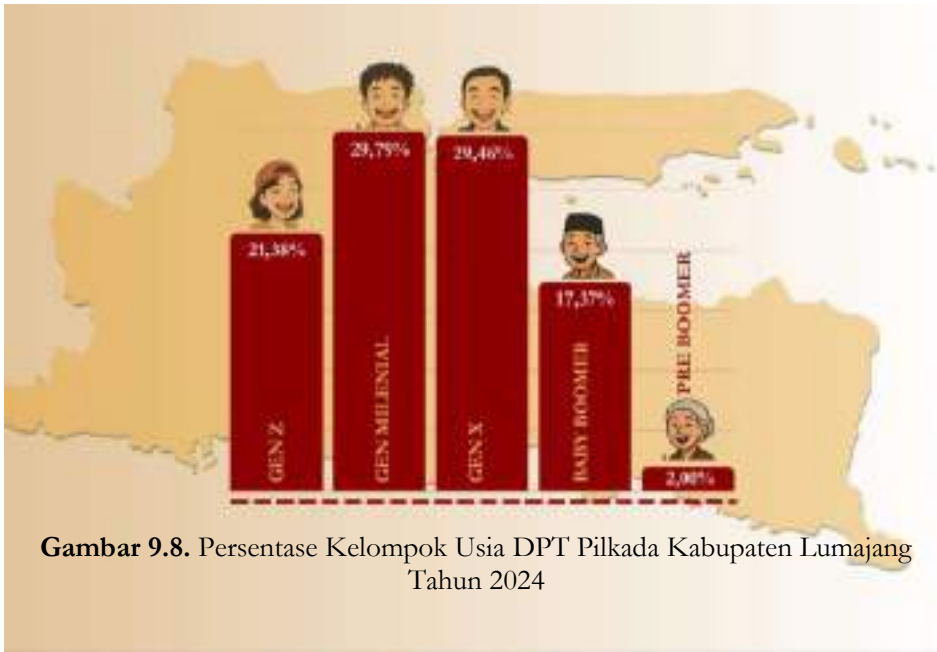
Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 9.7 berikut.



Berdasarkan klasifikasi status pemilih, dari total 838.595 pemilih, tercatat sebanyak 12.783 orang (1,52%) merupakan pemilih pemula, yaitu mereka yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, terdiri dari 6.592 laki-laki (51,57%) dan 6.191 perempuan (48,43%).

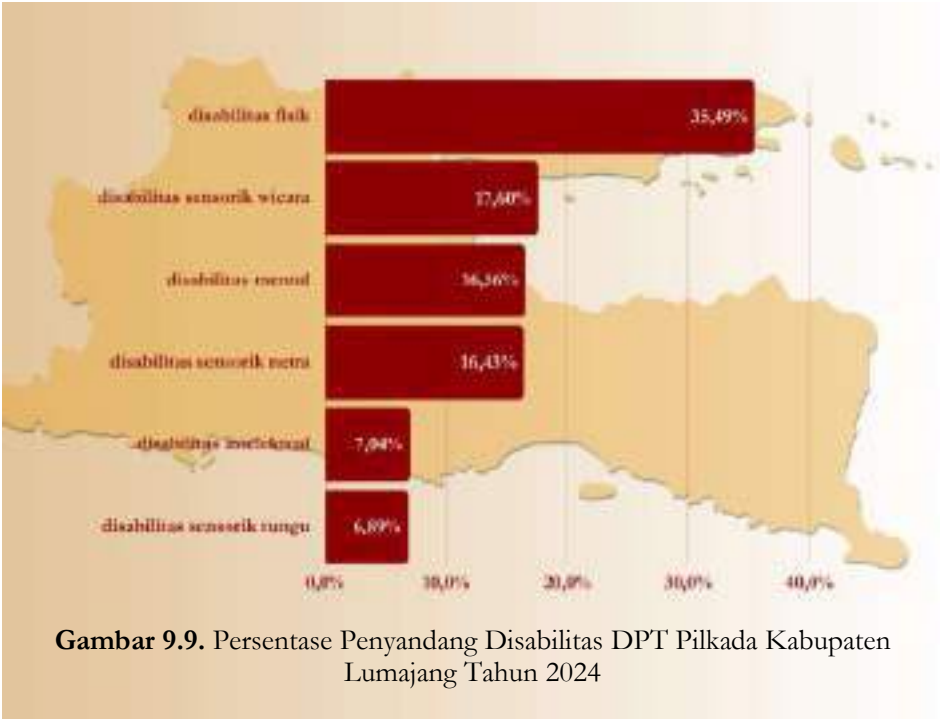
Distribusi ini menunjukkan bahwa mayoritas pemilih di Kabupaten Lumajang berasal dari kelompok non-pemula, namun kehadiran lebih dari 12 ribu pemilih pemula juga menjadi segmen strategis yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, terutama melalui pendekatan digital dan partisipatif.

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 9.8.



Berdasarkan klasifikasi usia, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Lumajang Tahun 2024 didominasi oleh kelompok usia produktif. Dari total 838.595 pemilih, kelompok usia 28–43 tahun merupakan yang terbesar, yaitu sebanyak 249.797 orang (29,79%), disusul oleh kelompok usia 44–59 tahun sebanyak 247.075 orang (29,46%). Pemilih dari kelompok usia 18–27 tahun juga memberikan kontribusi besar dengan jumlah 163.216 orang (19,46%), mencerminkan pentingnya peran generasi muda dalam pelaksanaan demokrasi. Sementara itu, kelompok 60–78 tahun tercatat sebanyak 145.630 orang (17,37%), dan pemilih usia lebih dari 79 tahun sebanyak 16.813 orang (2,00%). Adapun pemilih berusia 17 tahun berjumlah 16.064 orang (1,92%). Keberadaan mereka menjadi segmen penting dalam upaya pendidikan pemilih berbasis usia dan pendekatan inklusif.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten Lumajang Tahun 2024 disajikan pada gambar 9.9, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Sebagai bentuk komitmen terhadap pilkada yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, KPU Kabupaten Lumajang mencatat terdapat 4.035 pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak Tahun 2024. Dari jumlah tersebut, kelompok dengan jumlah tertinggi adalah disabilitas fisik sebanyak 1.432 orang (35,49%). Disusul oleh pemilih dengan disabilitas sensorik wicara sebanyak 710 orang (17,60%), disabilitas mental sebanyak 668 orang (16,56%), dan disabilitas sensorik netra sebanyak 663 orang (16,43%). Sementara itu, pemilih dengan disabilitas intelektual tercatat sebanyak 284 orang (7,04%), dan disabilitas sensorik rungu sebanyak 278 orang (6,89%). Keberadaan pemilih disabilitas ini mempertegas pentingnya aksesibilitas dalam seluruh tahapan Pilkada, termasuk penyediaan logistik ramah disabilitas, akses informasi yang setara, serta pendampingan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Data ini menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa hak politik penyandang disabilitas terlindungi dan terfasilitasi secara optimal.

4. Pencalonan

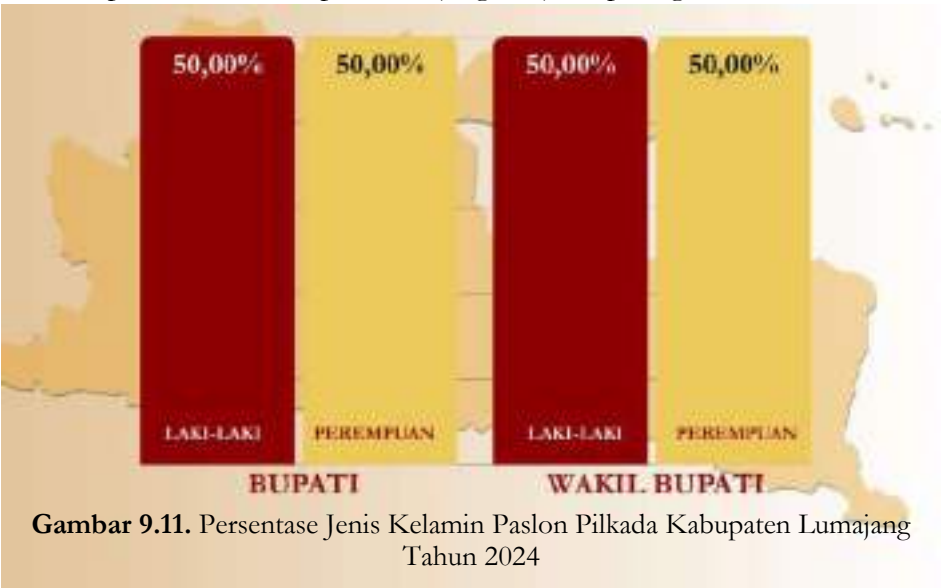
Tahapan pencalonan dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lumajang menghasilkan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang

ditetapkan secara resmi oleh KPU Kabupaten Lumajang. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 146/PL.02.03-BA/3508/2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Lumajang Nomor: 1264 Tahun 2024, penetapan pasangan calon dilakukan pada tanggal 22 September 2024 setelah melalui tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penilaian kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada gambar 9.10 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.

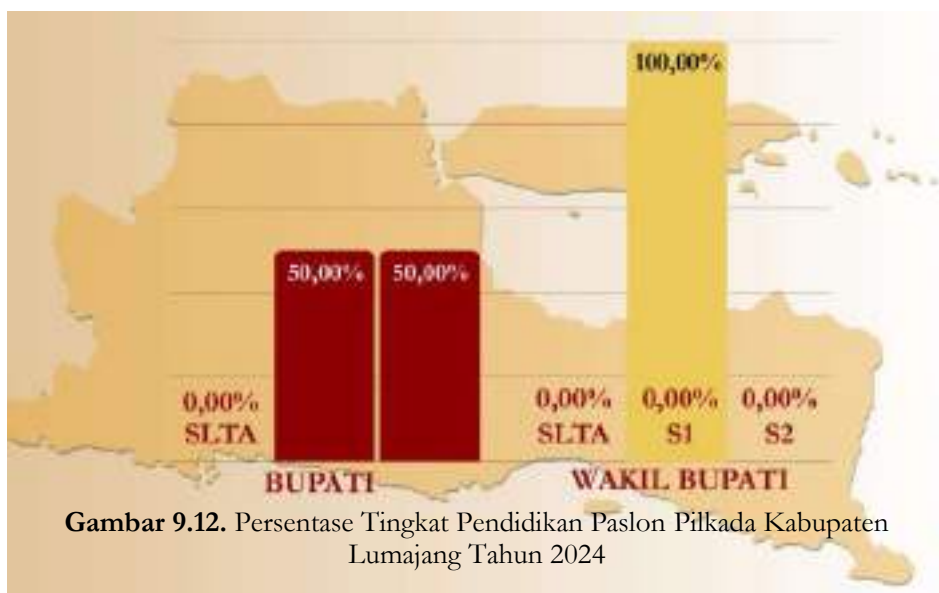


Gambar 9.10. Daftar Nama Paslon Pilkada Kabupaten Lumajang Tahun 2024

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang disajikan pada gambar 9.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang disajikan pada gambar 9.12.



Gambar 9.11. Persentase Jenis Kelamin Paslon Pilkada Kabupaten Lumajang Tahun 2024



Dari sisi sebaran jenis kelamin, dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang menunjukkan komposisi yang seimbang. Baik untuk posisi bupati maupun wakil bupati, masing-masing diisi oleh satu laki-laki dan satu perempuan, sehingga secara keseluruhan terdapat dua calon laki-laki dan dua calon perempuan, yang mencerminkan proporsi 50% untuk masing-masing gender. Komposisi ini menandai keterwakilan gender yang setara dalam kontestasi politik lokal tahun 2024. Sementara dari segi tingkat pendidikan, seluruh pasangan calon memiliki latar belakang akademik tinggi, dengan dominasi pada jenjang pendidikan S2 dan S3. Untuk posisi bupati, satu calon bergelar magister (S2) dan satu lainnya telah menempuh pendidikan hingga doktoral (S3). Sedangkan pada posisi wakil bupati, kedua calon merupakan lulusan S2. Secara total, terdapat 3 orang berlatar belakang pendidikan magister (75%) dan 1 orang bergelar doktor (25%) dari total 4 orang pasangan calon. Kombinasi antara keseimbangan gender dan tingkat pendidikan tinggi ini menunjukkan bahwa kontestasi Pilkada Kabupaten Lumajang 2024 diisi oleh kandidat dengan kapasitas akademik yang kuat dan representasi gender yang seimbang, yang diharapkan mampu membawa kepemimpinan daerah yang berkualitas dan inklusif.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 9.13, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



Gambar 9.13. Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kabupaten Lumajang Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

KPU Kabupaten Lumajang menerapkan berbagai metode sosialisasi dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Lumajang Tahun 2024 yang dirancang untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat, mulai dari pemilih pemula hingga kelompok rentan. Sosialisasi Pilkada Kabupaten Lumajang 2024 diawali dengan metode tatap muka, yang menyasar 22 segmen masyarakat berbeda, seperti pemilih pemula, penyandang disabilitas, komunitas budaya, perempuan, hingga pemilih di lokasi khusus seperti Lapas. Kegiatan dikemas secara interaktif melalui pemutaran film edukatif, grebek pasar, dan partisipasi *car free day*. Sementara itu, metode kedua dilakukan melalui media massa, dengan melibatkan 53 media online, 2 televisi lokal, 2 radio, dan 3 media cetak untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan kesadaran partisipatif masyarakat dalam tahapan Pilkada.

Selain melalui pertemuan langsung, KPU Kabupaten Lumajang memaksimalkan media sosial dan *platform* digital seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan TikTok untuk menysasar pemilih muda melalui konten infografis, video pendek, reels, dan siaran langsung. Di sisi lain, metode konvensional seperti spanduk, baliho, dan brosur juga tetap dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat di wilayah dengan akses digital terbatas, didistribusikan melalui jaringan PPK dan PPS di 21 kecamatan dan 205 kelurahan/desa.



Gambar 9.14. Maskot Pilkada Kabupaten Lumajang Tahun 2024

Maskot Pilkada Kabupaten Lumajang 2024 diberi nama SUJALI, akronim dari “Sukseskan Lumajang Memilih,” yang hadir sebagai simbol semangat demokrasi yang damai dan bijaksana. Wujud SUJALI berupa kambing Etawa dipilih karena memiliki filosofi mendalam: hewan cerdas, bermanfaat, cinta damai, serta memiliki nilai religius dan historis, sesuai dengan akar budaya masyarakat Lumajang. Dalam penampilannya, SUJALI mengenakan baju adat Jawa bernuansa batik floral, mencerminkan kesederhanaan, kekayaan alam, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Dengan ekspresi ramah dan ceria, SUJALI mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif, memilih dengan bijak, dan menjaga kondusivitas Pilkada demi masa depan Lumajang yang lebih baik.

Sebagai upaya mendukung kampanye yang adil dan setara, KPU

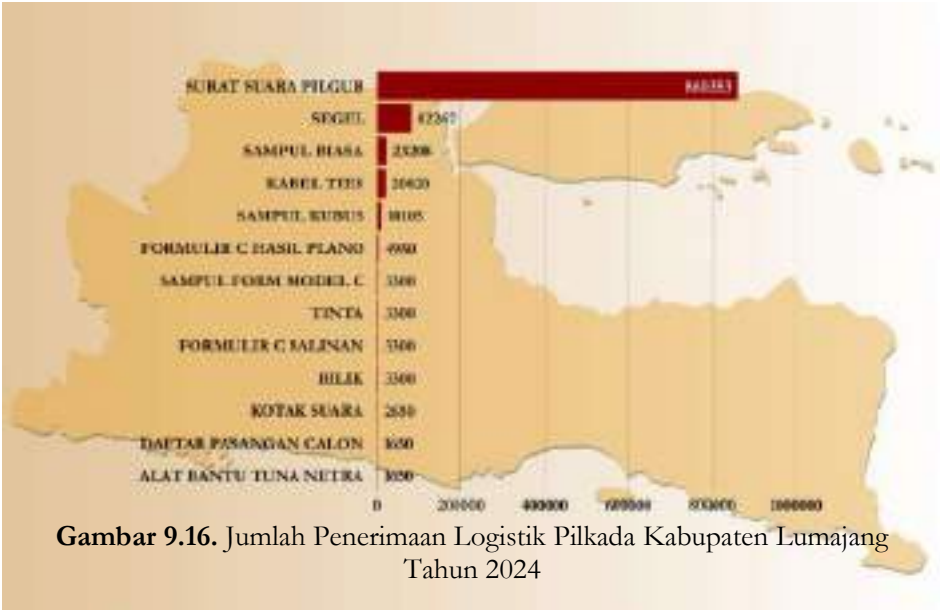
Kabupaten Lumajang memfasilitasi pasangan calon dengan alat peraga kampanye (APK), bahan kampanye (BK), iklan kampanye, serta debat publik sesuai Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024. Setiap paslon difasilitasi 5 baliho, 10 umbul-umbul per kecamatan, 2 spanduk per desa/kelurahan di 205 wilayah, serta 3 billboard dan 1 billboard dua sisi, seluruhnya berbahan flexy 300 gram dengan cetak digital satu muka. Untuk BK, masing-masing paslon menerima 15.000 poster, 50.000 pamflet, 50.000 brosur, dan 50.000 selebaran, dicetak berwarna pada bahan ivory dan HVS. Penayangan iklan kampanye berlangsung 14 hari dari 10 hingga 23 November 2024, meliputi media cetak (gambar), radio (audio 60 detik), dan televisi (audio visual 30 detik), dengan frekuensi penayangan yang telah ditentukan. Selain itu, KPU juga menyelenggarakan dua kali debat publik antar paslon untuk memberikan ruang penyampaian visi dan program secara terbuka kepada publik.



Gambar 9.15. Fasilitas Kampanye KPU Kabupaten Lumajang Tahun 2024

6. Logistik

Pengadaan logistik Pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan oleh dua tingkatan, yaitu Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur untuk kebutuhan pemilihan gubernur, dan Sekretariat KPU Kabupaten Lumajang untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Metode pengadaan yang digunakan mencakup *e-katalog* dan pengadaan langsung, sesuai dengan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah. Proses ini menghasilkan sejumlah Surat Perintah Kerja (SPK) yang menjadi dasar hukum dan operasional pengadaan, mencakup spesifikasi teknis, waktu pelaksanaan, serta jaminan akuntabilitas. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 9.16, yang memuat data kebutuhan serta jalur distribusi logistik pemilihan ke seluruh kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Lumajang.



Distribusi logistik Pilkada Kabupaten Lumajang 2024 dilaksanakan secara berjenjang dan terkoordinasi. Dari gudang KPU ke tingkat kecamatan (PPK), pengiriman dilakukan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, dengan moda transportasi disesuaikan kondisi geografis masing-masing wilayah. Distribusi dari PPK ke desa/kelurahan (PPS) menggunakan truk, pickup, dan untuk wilayah terpencil, seperti TPS-TPS tertentu, digunakan sepeda motor.

Proses setting, packing, dan pengecekan logistik dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan secara swakelola oleh KPU dengan melibatkan 25 mahasiswa lokal, sementara tahap kedua atau *double checking* melibatkan 310 petugas *ad hoc* (PPK dan PPS) untuk memastikan kelengkapan logistik di tiap wilayah.

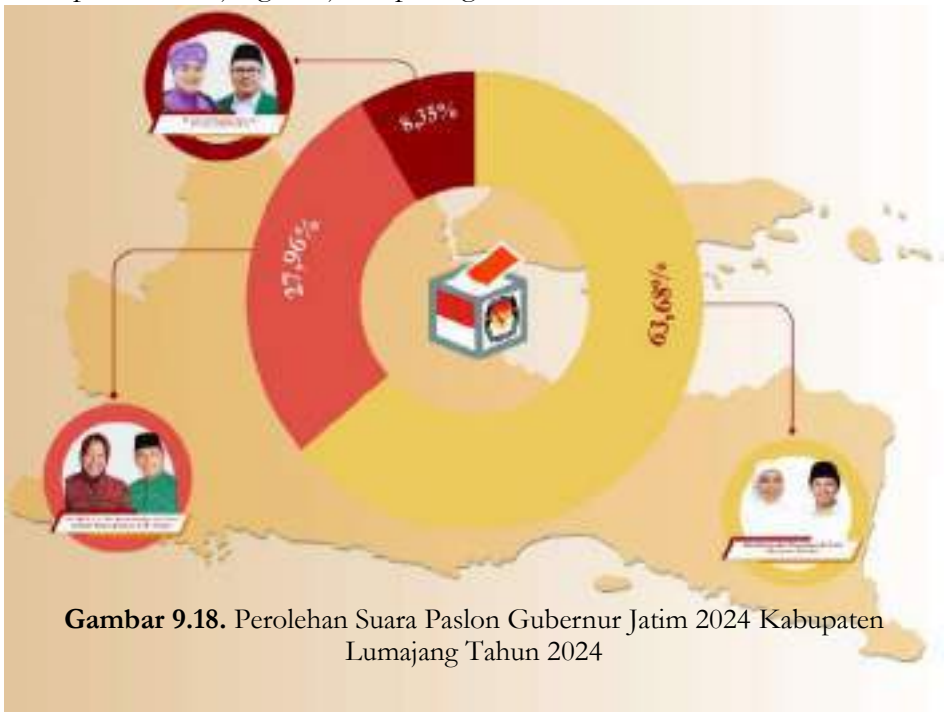
Distribusi dari gudang ke PPK berjalan lancar, meski beberapa kecamatan seperti Tempursari dan Pronojiwo yang berada di daerah pegunungan memerlukan antisipasi khusus, terutama saat musim hujan. Sementara distribusi dari PPS ke TPS mendapat perhatian khusus di TPS Kali Gede, yang hanya bisa diakses dengan motor GOPRAK (modifikasi) melewati medan terjal. Seluruh distribusi didukung pengamanan oleh TNI, Polri, dan PKD, dan logistik berhasil diterima dengan lengkap, tepat waktu, dan sesuai sasaran pada 26 November 2024 (H-1) menjelang hari pemungutan suara.



Gambar 9.17. Moda Transportasi Distribusi Logistik Pilkada Kabupaten Lumajang Tahun 2024

7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Lumajang disajikan pada gambar 9.18.



Gambar 9.18. Perolehan Suara Paslon Gubernur Jatim 2024 Kabupaten Lumajang Tahun 2024

Hasil rekapitulasi suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Lumajang menunjukkan dominasi pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak yang memperoleh 386.016 suara atau

63,68% dari total suara sah. Pasangan ini unggul jauh dari dua kontestan lainnya, yaitu Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) yang meraih 169.501 suara atau 27,96%, serta Hj. Luluk Nur Ihamidah – H. Lukmanul Khakim yang mendapatkan 50.636 suara atau setara dengan 8,35%. Hasil ini mencerminkan kuatnya dukungan masyarakat Kabupaten Lumajang terhadap pasangan petahana dalam kontestasi pemilihan tingkat provinsi.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 9.19.



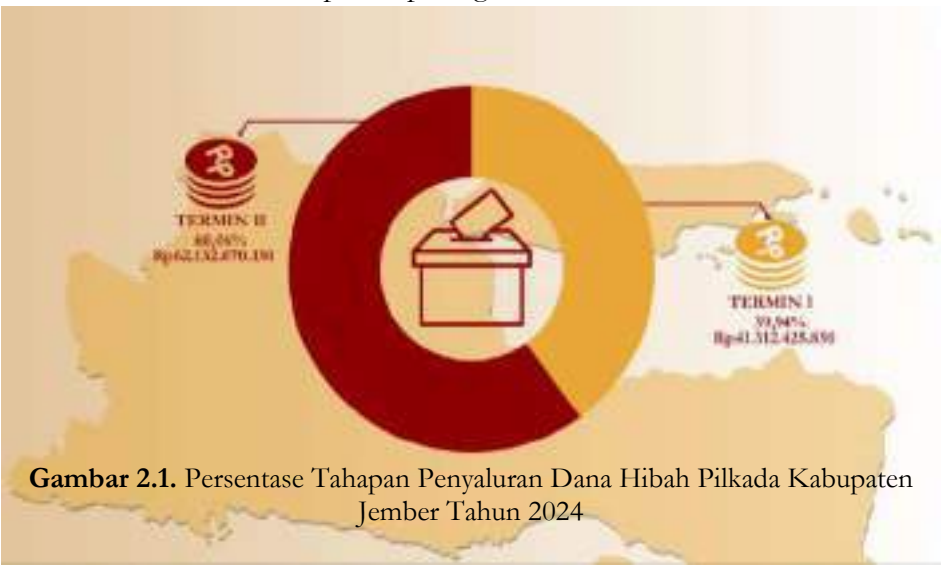
Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Kabupaten Lumajang Tahun 2024, pasangan Ir. Indah Amperawati – Yudha Adji Kusuma unggul tipis dengan perolehan 320.942 suara atau 51,13% dari total suara sah. Sementara itu, pasangan Thoriqul Haq – Lucita Izza Rafika memperoleh 306.738 suara atau 48,87%. Selisih suara yang relatif kecil menunjukkan kontestasi yang cukup kompetitif dan dinamis di tingkat kabupaten. Dengan demikian, pasangan Indah–Yudha ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2024.

BAGIAN 10

KABUPATEN JEMBER

1. Perencanaan Program dan Anggaran

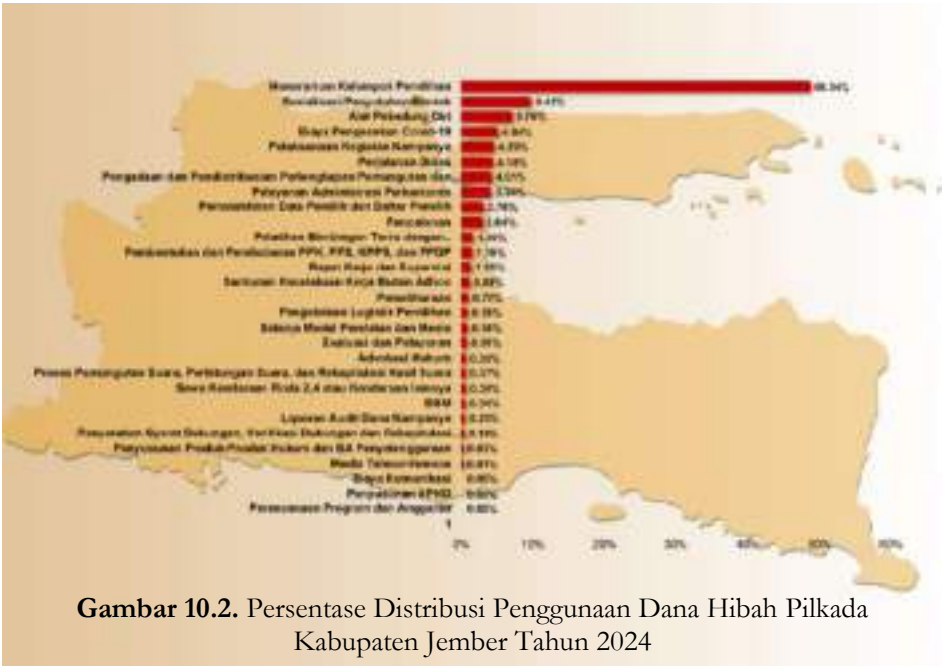
Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan alokasi dana hibah sebesar Rp103.444.496.000 untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Penyaluran dana ini dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani pada 9 November 2023 oleh Bupati Jember dan Ketua KPU Kabupaten Jember. Penandatanganan NPHD tersebut tertuang dalam dokumen resmi dengan Nomor: 270/01/35.09.415/2023 dari pihak pemerintah daerah dan Nomor: 573/KU.07-NK/3509/2023 dari pihak KPU Jember. Komitmen anggaran ini menjadi dasar hukum sekaligus jaminan terhadap kelancaran pembiayaan seluruh tahapan Pilkada serentak di Kabupaten Jember. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 10.1 berikut.



Dana hibah Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024 dicairkan dalam dua tahap. Termin pertama sebesar Rp41.312.425.850 atau setara dengan 39,94% dari total dana hibah, dicairkan pada awal tahapan penyelenggaraan sebagai pendanaan awal kegiatan operasional. Sementara itu, termin kedua senilai Rp62.132.070.150 atau 60,06% dialokasikan untuk pembiayaan tahapan lanjutan, termasuk pelaksanaan teknis

pemungutan suara dan dukungan logistik. Dengan total dana mencapai Rp103.444.496.000, struktur pencairan ini dirancang untuk mendukung keberlangsungan setiap tahap Pilkada secara berkelanjutan dan akuntabel.

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 10.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.



Distribusi anggaran Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024 menunjukkan bahwa komponen terbesar dialokasikan untuk honorarium badan *ad hoc*, yaitu sebesar Rp50.001.200.000 atau 48,34% dari total anggaran hibah. Komponen terbesar berikutnya adalah sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis dengan nilai Rp9.747.450.000 (9,42%), diikuti oleh pengadaan alat pelindung diri (APD) sebesar Rp6.989.909.000 (6,76%), yang menunjukkan komitmen terhadap keselamatan penyelenggara di masa pascapandemi. Alokasi yang cukup besar juga diberikan pada pengadaan logistik pemungutan dan penghitungan suara, kampanye, dan perjalanan dinas, masing-masing sebesar 4–5% dari total anggaran. Kegiatan teknis lainnya seperti pemutakhiran data pemilih, pencalonan, dan audit dana kampanye mendapatkan porsi yang proporsional sesuai kebutuhan tahapan. Beberapa alokasi dengan porsi kecil namun tetap penting adalah santunan kecelakaan kerja badan *ad hoc* (0,89%), media telekonferensi, serta pengelolaan logistik dan sewa kendaraan, yang memperlihatkan perhatian pada aspek

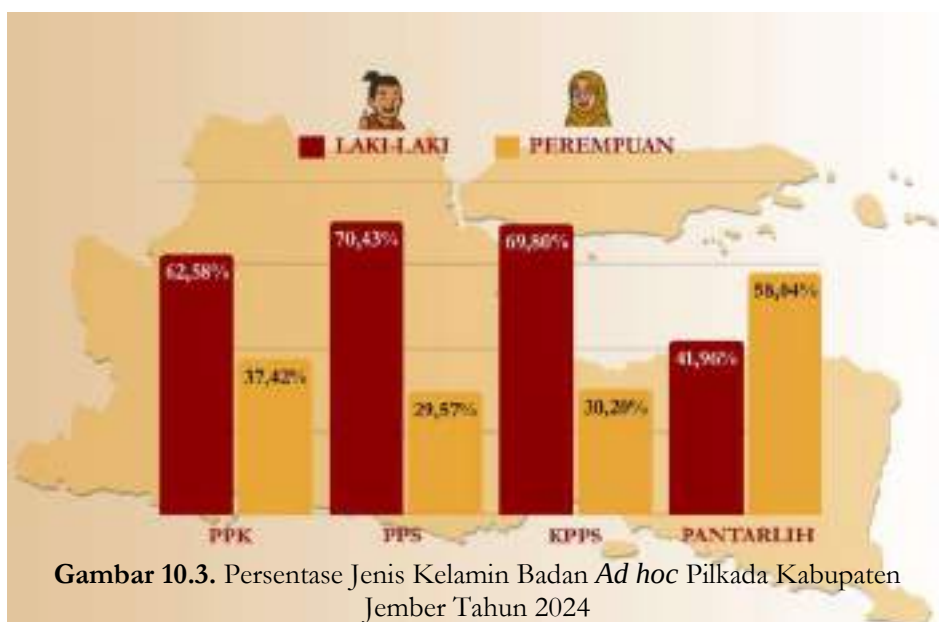
dukungan teknis dan keselamatan kerja. Komposisi anggaran ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana Pilkada Jember difokuskan keberlangsungan operasional penyelenggaraan, peningkatan kapasitas SDM, serta pemenuhan aspek logistik dan kesela-matan secara merata dan akuntabel.

2. Badan *Ad hoc*

KPU Kabupaten Jember membentuk badan *ad hoc* untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Pembentukan badan *ad hoc* ini menjadi ujung tombak pelaksanaan teknis di lapangan.

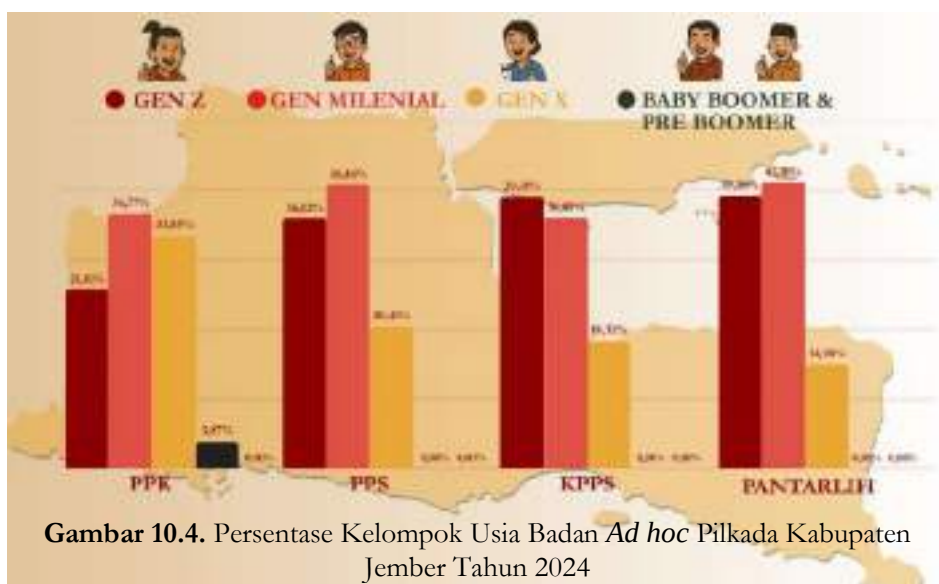
Tingginya animo masyarakat Jember untuk bergabung sebagai penyelenggara menunjukkan antusiasme dan kepedulian yang tinggi terhadap proses demokrasi lokal. Tercermin dari jumlah pendaftar pada setiap tahapan yang selalu melebihi kebutuhan formasi, baik di tingkat kecamatan, desa, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS). Proses seleksi dilakukan secara terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi, dengan tetap memperhatikan prinsip keterwakilan gender, generasi, serta pemerataan wilayah.

Badan *ad hoc* yang terbentuk bukan hanya bertugas menyele-enggarakan pilkada secara administratif dan teknis, tetapi juga berperan penting dalam menjaga integritas pilkada, mengedukasi pemilih, serta membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Dengan total ribuan anggota badan *ad hoc* yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jember, kesiapan dan profesionalisme penyelenggara menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 10.3.



Sebaran demografi badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan proporsi yang bervariasi di tiap jenjang penyelenggara. Pada tingkat PPK, dari total 155 anggota, 97 orang (62,58%) adalah laki-laki dan 58 orang (37,42%) perempuan. Komposisi serupa juga terlihat pada PPS, yang terdiri dari 524 laki-laki (70,43%) dan 220 perempuan (29,57%) dari total 744 anggota. Ketimpangan partisipasi gender sedikit menyempit pada tingkat KPPS, di mana dari total 28.322 anggota, 19.769 orang (69,80%) adalah laki-laki dan 8.553 orang (30,20%) perempuan. Sementara itu, di tingkat Pantarlih, justru terjadi dominasi perempuan, dengan 4.400 orang (58,04%) dibandingkan 3.181 laki-laki (41,96%) dari total 7.581 petugas. Komposisi ini mencerminkan bahwa meskipun keterlibatan laki-laki masih dominan di struktur pengambilan keputusan seperti PPK dan PPS, partisipasi perempuan meningkat secara signifikan pada tingkatan teknis lapangan, terutama dalam peran sebagai Pantarlih yang menunjukkan indikator positif terhadap upaya penyelenggaraan Pilkada yang lebih inklusif dan representatif secara gender di Kabupaten Jember.

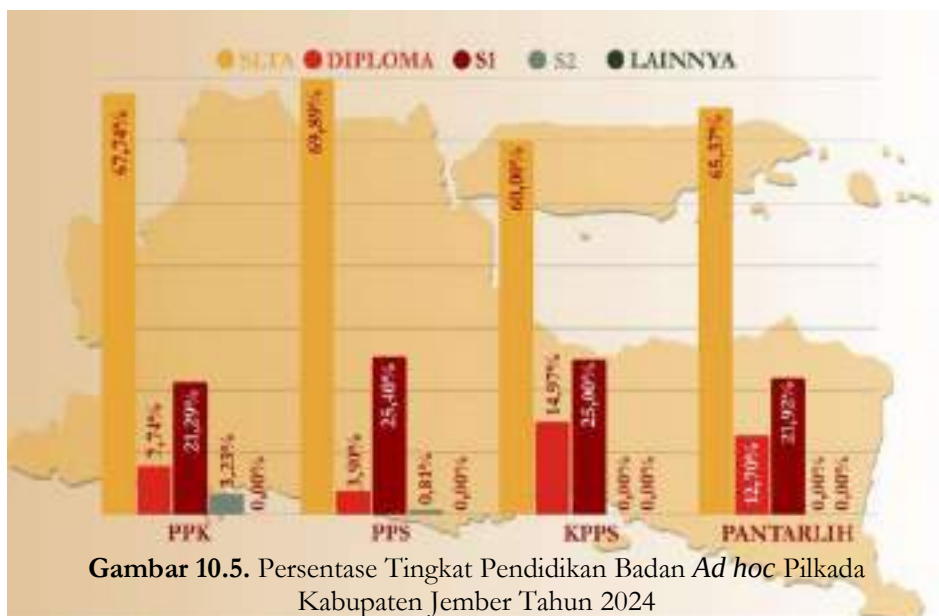
Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 10.4 berikut.



Gambar 10.4. Persentase Kelompok Usia Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024

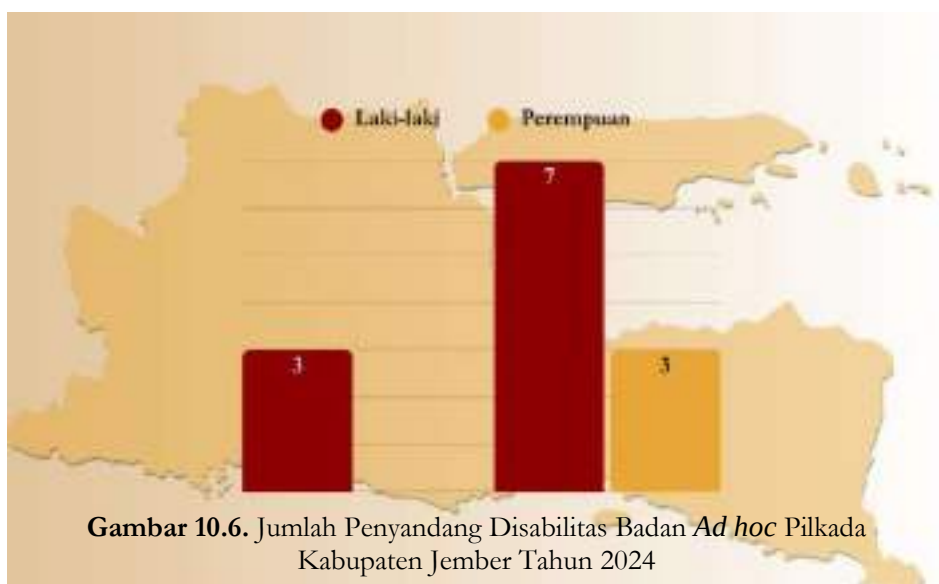
Sebaran demografi berdasarkan kelompok usia menunjukkan pada tingkat PPK, dari total 155 anggota, sebanyak 40 orang (25,81%) berusia 18–27 tahun, 57 orang (36,77%) berusia 28–43 tahun, dan 52 orang (33,55%) berada di rentang 44–59 tahun. Hanya 6 orang (3,87%) yang berusia 60–78 tahun. Komposisi serupa juga terlihat pada PPS, dengan mayoritas berusia 28–43 tahun (40,86%) dan 18–27 tahun (36,02%), disusul oleh kelompok 44–59 tahun (20,43%). Di tingkat KPSS, distribusi usia lebih merata dengan dominasi usia 28–43 tahun (36,05%), diikuti oleh usia 18–27 tahun (27,31%), dan kelompok 44–59 tahun (18,32%). Menariknya, terdapat 3.362 anggota KPSS (11,87%) yang berusia 17 tahun, menandakan pelibatan generasimuda dalam penyelenggaraan teknis di TPS. Untuk Pantarlih, proporsi tertinggi berada pada rentang 28–43 tahun (41,20%) dan 18–27 tahun (39,26%), sedangkan kelompok usia 44–59 tahun hanya menyumbang 14,98%. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Jember berhasil mendorong partisipasi generasi muda dan usia produktif dalam struktur penyelenggara pilkada, yang menjadi modal penting dalam menciptakan Pilkada yang adaptif, energik, dan responsif terhadap dinamika lapangan.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 10.5.



Sebaran demografi berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas anggota badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Jember 2024 berasal dari lulusan SLTA/ sederajat, dengan persentase yang cukup dominan di semua jenjang penyelenggara. Pada tingkat PPK, dari total 155 anggota, sebanyak 105 orang (67,74%) berlatar belakang SLTA, diikuti oleh 33 orang (21,29%) berpendidikan S1, 12 orang (7,74%) lulusan Diploma, dan 5 orang (3,23%) lulusan S2. Komposisi serupa terlihat pada PPS, di mana dari 744 anggota, sebanyak 520 orang (69,89%) berlatar belakang SLTA, 189 orang (25,40%) lulusan S1, 29 orang (3,90%) lulusan Diploma, dan hanya 6 orang (0,81%) lulusan S2. Di tingkat KPPS, sebaran pendidikan cukup bervariasi. Dari 28.322 anggota, 60,00% atau 16.993 orang merupakan lulusan SLTA, 25,00% atau 7.080 orang lulusan S1, dan 14,97% atau 4.240 orang lulusan Diploma. Hanya 9 orang (0,03%) yang memiliki gelar S2. Sementara pada Pantarlih, dari total 7.581 petugas, mayoritas (65,37%) merupakan lulusan SLTA, diikuti oleh 21,92% lulusan S1, dan 12,70% lulusan Diploma. Keberagaman tingkat pendidikan ini berkontribusi pada dinamika kerja yang kolaboratif dan adaptif dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pilkada yang inklusif, KPU Kabupaten Jember mencatat adanya keterlibatan penyandang disabilitas dalam struktur penyelenggara *ad hoc*.



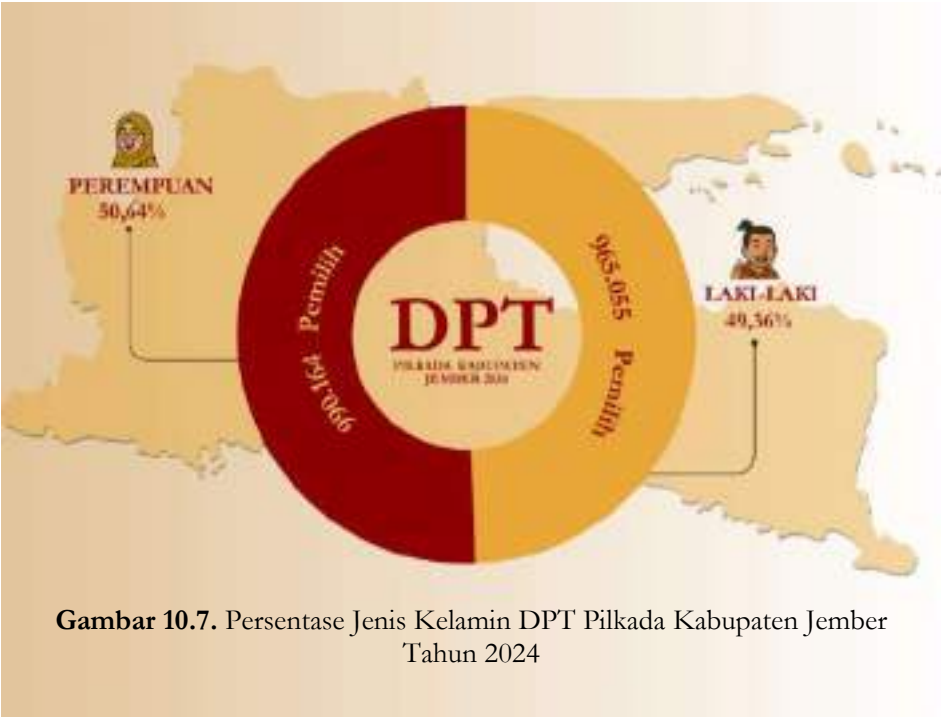
Berdasarkan gambar 10.6, terdapat 3 orang penyelenggara penyandang disabilitas yang tergabung dalam PPS dan 10 orang di tingkat Pantarlih. Seluruh penyandang disabilitas yang tergabung dalam PPS berjenis kelamin laki-laki (100%), sementara di tingkat Pantarlih, terdapat 7 laki-laki (70%) dan 3 perempuan (30%). Partisipasi penyandang disabilitas sudah mulai terakomodasi dalam struktur penyelenggara Pilkada yang menjadi langkah awal penting dalam mendorong pilkada yang inklusif dan setara, serta membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan kelompok rentan di masa mendatang.

3. Pemutakhiran Data

Proses pemutakhiran data pemilih Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Jember dimulai dari penerimaan data DP4 hasil sinkronisasi nasional. Selanjutnya dilakukan pemetaan TPS dengan ketentuan maksimal 600 pemilih per TPS, tanpa memisahkan warga berdasarkan RT/RW, serta mempertimbangkan kedekatan lokasi dan kondisi geografis wilayah terpencil. Setelah proses pencermatan bersama PPK dan PPS serta pelaksanaan coklit oleh Pantarlih, KPU menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) melalui Berita Acara Nomor 191/PL.02.01-BA/ 3509/2024 tanggal 11 Agustus 2024.

DPS kemudian diumumkan ke publik untuk menerima masukan dari masyarakat, tokoh lokal, dan Bawaslu, yang ditindaklanjuti menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Proses ditutup dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 20 September 2024 melalui

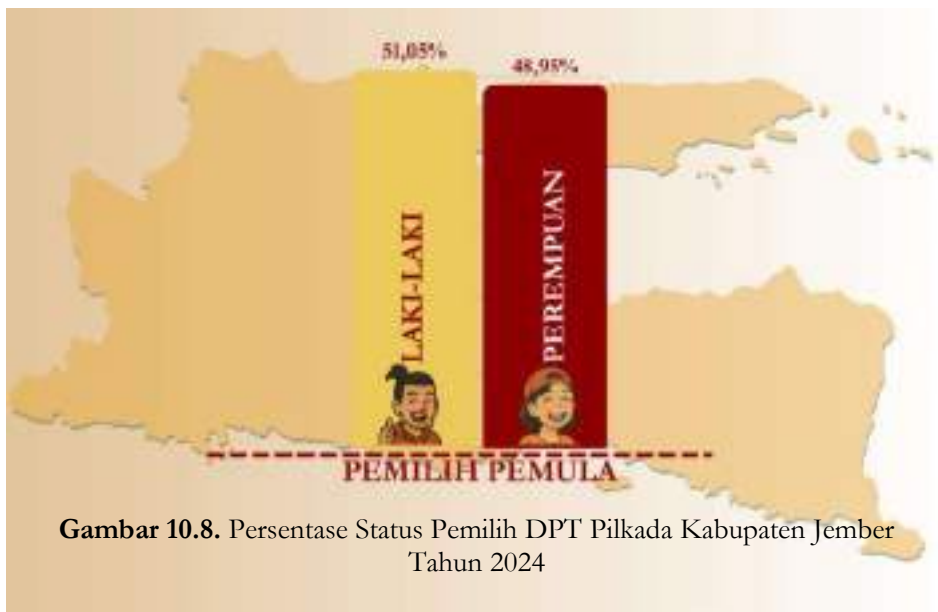
Berita Acara Nomor 226/PL/02.01-BA/3509/2024. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 10.7 berikut.



Gambar 10.7. Persentase Jenis Kelamin DPT Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024

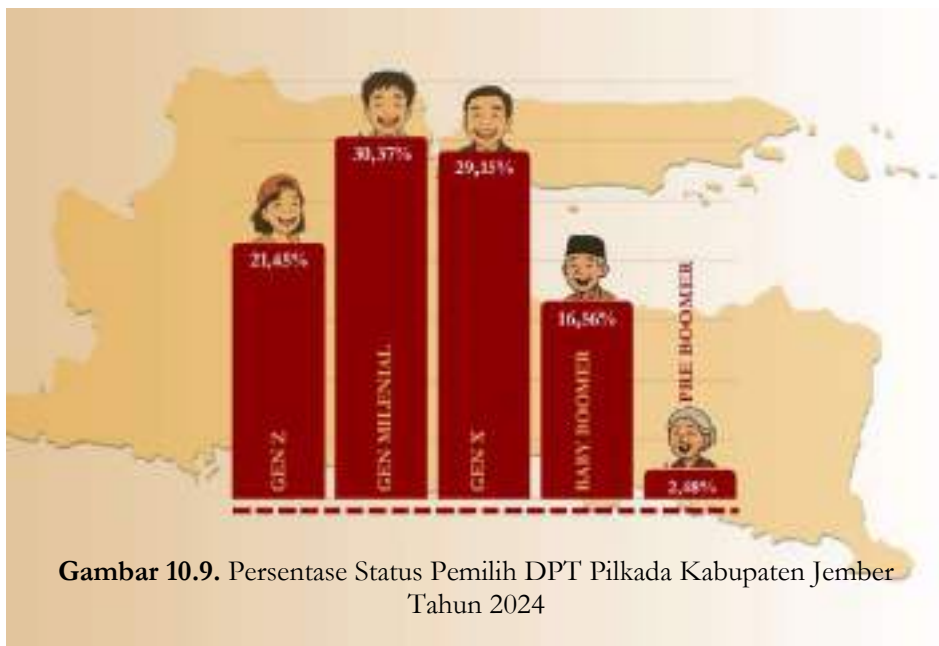
Berdasarkan hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Jember, total pemilih tercatat sebanyak 1.955.219 orang, dengan komposisi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Sebanyak 965.055 pemilih laki-laki atau sekitar 49,36%, sedangkan 990.164 pemilih perempuan atau sebesar 50,64%.

Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 10.8 berikut.



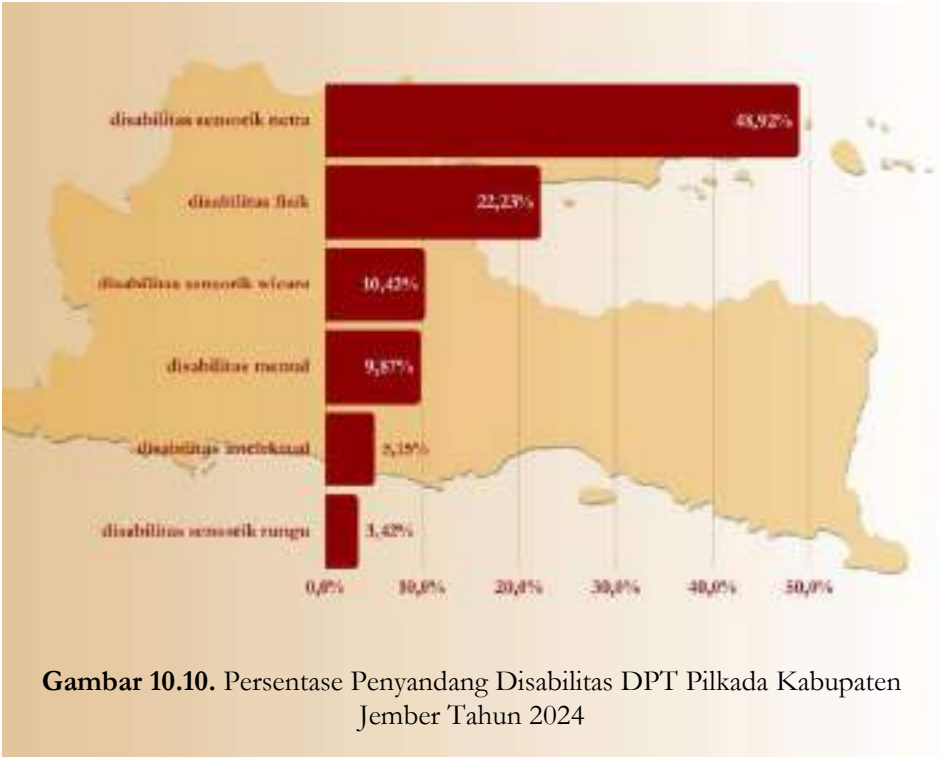
Sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jember Tahun 2024 berdasarkan status pemilih menunjukkan bahwa dari total 1.955.219 pemilih, sebanyak 22.777 orang (1,16%) merupakan pemilih pemula. Dari jumlah tersebut, 11.628 orang (51,05%) adalah laki-laki dan 11.149 orang (48,95%) adalah perempuan. Temuan ini menjadi dasar penting bagi KPU Kabupaten Jember dalam menyusun strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih adaptif, terutama dalam menysasar pemilih pemula yang merupakan generasi baru dalam demokrasi.

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 10.9.



Sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan kelompok usia di Kabupaten Jember menunjukkan dominasi pemilih usia produktif. Dari total 1.955.219 pemilih, kelompok usia 28–43 tahun merupakan yang terbesar, dengan 593.719 pemilih (30,37%), diikuti oleh kelompok usia 44–59 tahun sebanyak 569.933 pemilih (29,15%). Pemilih usia 18–27 tahun juga menempati proporsi yang besar, yaitu 382.999 orang (19,59%), mencerminkan pentingnya pendekatan digital dan segmentasi generasi muda dalam strategi sosialisasi pilkada. Sementara itu, pemilih usia 60–78 tahun tercatat sebanyak 323.700 orang (16,56%), dan pemilih lanjut usia di atas 79 tahun berjumlah 48.448 orang (2,48%). Adapun pemilih usia 17 tahun, yang sebagian besar merupakan pemilih pemula, berjumlah 36.420 orang (1,86%).

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten Jember Tahun 2024 disajikan pada gambar 10.10, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



KPU Kabupaten Jember mencatat sebanyak 4.935 pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak Tahun 2024. Dari jumlah tersebut, penyandang disabilitas sensorik netra mendominasi dengan 2.414 orang (48,92%), diikuti oleh disabilitas fisik sebanyak 1.097 orang (22,23%). Kelompok disabilitas sensorik wicara tercatat sebanyak 514 orang (10,42%), sementara penyandang disabilitas mental berjumlah 487 orang (9,87%), dan disabilitas intelektual sebanyak 254 orang (5,15%). Adapun disabilitas sensorik tungg tercatat sebanyak 169 orang (3,42%).

Data ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas telah terakomodasi dalam DPT secara inklusif. KPU Kabupaten Jember menegaskan komitmennya menyediakan fasilitas dan informasi pilkada yang ramah disabilitas guna menjamin hak pilih seluruh warga negara, tanpa diskriminasi.

4. Pencalonan

Tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pada tahap awal, KPU Kabupaten Jember membuka kesempatan pencalonan melalui dua jalur, yaitu jalur

perseorangan dan jalur partai politik. Dari jalur perseorangan, terdapat satu bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri, yaitu M. Jaddin Wajad dan Arismaya Parahita, dengan menyerahkan 142.458 dukungan masyarakat sebagai syarat dukungan minimal. Setelah dilakukan proses verifikasi administrasi awal, pasangan ini dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), sehingga diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Namun, berdasarkan hasil verifikasi faktual, pasangan tersebut kembali dinyatakan BMS, sehingga tidak dapat melanjutkan ke tahap pencalonan berikutnya.

Sementara itu, dari jalur partai politik, KPU Kabupaten Jember menerima dua bakal pasangan calon yang telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan dukungan partai politik. Setelah melalui proses pemeriksaan kelengkapan dokumen, klarifikasi, dan tahapan verifikasi yang diperlukan, kedua pasangan ini ditetapkan sebagai Daftar Pasangan Calon Tetap (DCT). Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada gambar 10.11 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.

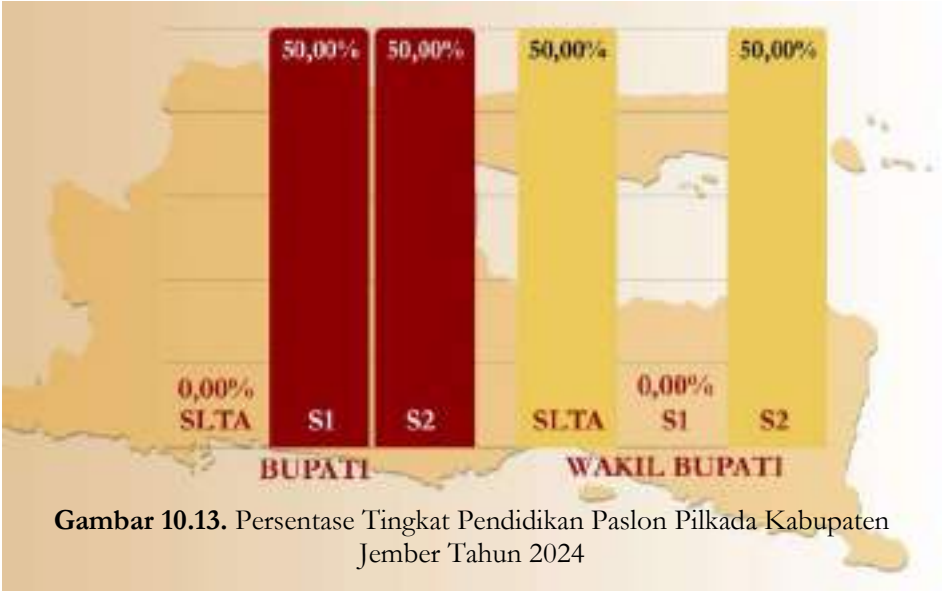


Gambar 10.11. Daftar Nama Paslon Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember disajikan pada gambar 10.12 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember disajikan pada gambar 10.13.



Gambar 10.12. Persentase Jenis Kelamin Paslon Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024



Gambar 10.13. Persentase Tingkat Pendidikan Paslon Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024

Berdasarkan jenis kelamin gambar 10.12, seluruh calon kepala daerah yang ditetapkan dalam Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024 merupakan laki-laki. Tercatat ada 2 calon Bupati dan 2 calon Wakil Bupati, sehingga total terdapat 4 calon laki-laki (100%) dan tidak ada calon perempuan (0%). Komposisi ini mencerminkan minimnya keterwakilan perempuan dalam kontestasi calon kepala daerah, yang menjadi catatan penting bagi pen-guatan partisipasi politik perempuan ke depan.

Dari sisi latar belakang pendidikan gambar 10.13, seluruh pasangan calon menunjukkan kualifikasi pendidikan yang cukup baik. Untuk calon Bupati, masing-masing memiliki latar belakang pendidikan S1 dan S2, dengan proporsi 50% lulusan S1 dan 50% lulusan S2. Seme-ntara itu, dua calon Wakil Bupati terdiri dari satu lulusan SLTA (50%) dan satu lulusan S2 (50%). Secara keseluruhan, dari total 4 calon, terdapat 1 orang lulusan SLTA (25%), 1 orang lulusan S1 (25%), dan 2 orang lulusan S2 (50%), yang menunjukkan bahwa mayoritas calon memiliki pendidikan tinggi, yaitu jenjang magister dan menunjukkan kualitas akademik yang relatif baik di antara para kandidat, yang diharapkan mampu membawa visi dan kebijakan pembangunan yang strategis bagi Kabupaten Jember.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 10.14, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



Ir. Hendy Siswanto, S.T., IPU, ASEAN Eng – Mah. Balya Tirjana
Pasangan

VISI
Wakil Jember Apik dan Kuwat dengan
Friendly Strong, Kesehatan dan
Aseknasi

MISI

1. Mengembangkan pemerintahan elektronik berlandaskan dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen
2. Pemberdayaan kota akan secara menyeluruh
3. Profesional dalam tata kelola pemerintahan
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terintegrasi
5. Jember dicat hijau
6. Pembangunan infrastruktur publik yang aman/muda di semua wilayah Jember
7. Menjadi kabupaten nyata ber-keadilan



Muhammad Fauzi, SE, M.Sc. – Dr. Djoko Santoso, S.H., M.H
Pasangan

VISI
Dagang Cita Wajdan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju

MISI

1. Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pemberdayaan sosial
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan kreatif
3. Membangun birokrasi yang profesional, harmonis, dan disiplin
4. Membangun infrastruktur yang berkualitas, akseptabel, nyata, dan berkeadilan
5. Menjadikan Desa Mandiri berbasis potensi lokal yang berdaya guna
6. Merumuskan kembali konsep policy dan tata kelola sumber daya alam yang berdaya guna dan berkeadilan
7. Penguatan kemandirian pangan dan ekonomi kerakyatan dengan memfasilitasi proses produk pertanian dan kesehatan
8. Mengembangkan industri kreatif dengan pengembangan pariwisata
9. Penguatan nilai-nilai budaya sebagai nilai yang adaptif, inovatif, dan berkeadilan untuk membangun ekonomi berbasis kearifan lokal pembangunan

Gambar 10.14. Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

Dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024, KPU Kabupaten Jember menerapkan berbagai metode sosialisasi pendidikan pemilih yang dirancang secara partisipatif dan inklusif. Sosialisasi ini dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka, diskusi kelompok, penayangan film edukatif, hingga pemanfaatan media massa dan digital untuk menjangkau segmen yang lebih luas. Sasaran sosialisasi mencakup enam kelompok utama, yakni masyarakat umum, pemilih pemula, kelompok keagamaan, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, serta pemilih di lokasi khusus seperti Lapas.

Kehadiran peserta dalam setiap kegiatan cukup signifikan, dengan rata-rata 50–100 peserta pada segmen masyarakat umum, 80–150 peserta pada pemilih pemula, serta 30–100 peserta untuk kelompok lainnya. Untuk memperkuat penyebaran informasi, KPU Jember juga meng-gandeng berbagai media lokal, meliputi media cetak seperti Memorandum, Radar Jember, dan Jawa Pos; media radio seperti RRI, KISS FM, Prosalina, dan Soka Radio; serta televisi lokal seperti JTV, KJTV, Jember 1 TV, Kompas TV Jember, dan F TV Jember. Pendekatan yang beragam ini menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Jember dalam menye-lenggarakan pendidikan pemilih yang merata, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses demokrasi.



Gambar 10.15. Makot Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024

Maskot Pilkada Kabupaten Jember 2024 diberi nama Si Ndalung, terinspirasi dari istilah *Pandhalungan*, yang mencerminkan identitas masyarakat Jember yang multietnis. Nama ini dipilih untuk mem-pertegas peran KPU Kabupaten Jember sebagai lembaga yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Si Ndalung berbentuk *bantal TPS* yang ceria (menggenggam surat suara di tangan kiri dan paku di tangan kanan) merepresentasikan tiga elemen utama dalam proses pemungutan suara. Maskot ini mengenakan aksesoris khas batik Pendalungan Pasadeng, batik asli Jember hasil karya para perajin lokal, sebagai simbol dukungan terhadap produk budaya daerah. Penampilannya unik karena meng-gabungkan udeng (laki-laki) dan selendang merah-putih (perempuan dan nasionalisme), menjadikannya tokoh netral secara gender sekaligus sarat makna kebangsaan. Di bagian dada tersemat logo KPU Kabupaten Jember, menandakan peran kelembagaan dalam penyelenggaraan Pilkada. Ekspresi gembira sambil memperlihatkan surat suara dan paku meng-gambarkan ajakan kepada masyarakat untuk mencoblos secara sadar, bahagia, dan bertanggung jawab sesuai prinsip luber dan jurdil. Tagline “Budaya Pandhalungan Budaya Memilih!” menjadi seruan kuat bagi seluruh warga Jember untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada Serentak 2024 sebagai bagian dari budaya demokrasi lokal yang bermartabat.

KPU Kabupaten Jember menyediakan berbagai fasilitas Untuk mendukung tahapan kampanye Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024, yang mencakup Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye (BK), iklan kampanye, serta pelaksanaan tiga sesi debat publik. Sesuai Keputusan KPU Nomor 1220 Tahun 2024, tiap pasangan calon mendapat APK berupa 5 baliho, 2 spanduk per desa/kelurahan, dan 20 umbul-umbul per kecamatan dengan bahan flexy 280 gram. Selain itu, masing-masing paslon difasilitasi 146.641 lembar selebaran, brosur, pamflet, dan poster berwarna.

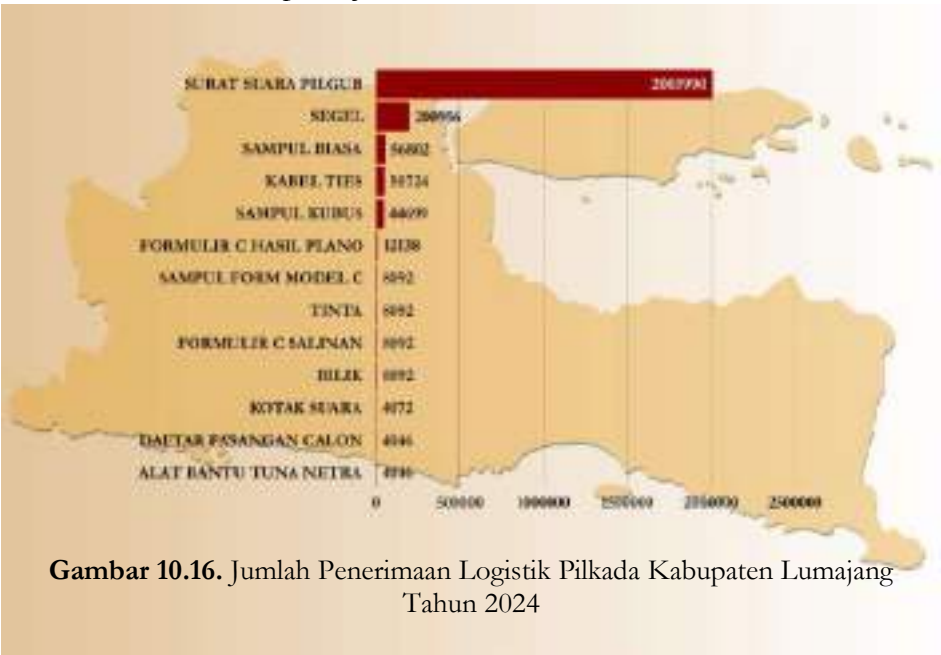
Fasilitas iklan kampanye oleh KPU Kabupaten Jember dilaksanakan melalui beragam media lokal, mencakup media cetak seperti Memorandum, Radar Jember, dan Jawa Pos; media radio seperti RRI, KISS FM, dan Prosalina; serta televisi lokal seperti JTV, KJTV, dan Kompas TV Jember. Setiap pasangan calon memperoleh alokasi iklan yang setara baik dalam format cetak, audio, maupun audiovisual. Sebagai bentuk edukasi politik, KPU juga menggelar tiga debat publik. Debat pertama berlangsung pada 26 Oktober 2024 di New Sari Utama Convention Hall dengan tema pembangunan dan kebutuhan dasar. Debat kedua pada 9 November 2024 membahas pelayanan publik dan tata kelola birokrasi, dan debat ketiga pada 23 November 2024 mengangkat isu budaya dan ketahanan sosial yang

dilaksanakan di Ball Room Cempaka Hotel.

Selain itu, masing-masing pasangan calon juga aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye digital. Paslon nomor urut 1 (Hendy Siswanto dan Muh. Balya Firjaun Barlaman) tercatat memiliki 10 akun Instagram, 7 Facebook, 10 TikTok, 2 YouTube, dan 3 akun Twitter (X). Sedangkan paslon nomor urut 2 (Muhammad Fawait dan Djoko Susanto) memiliki 8 akun Instagram, 5 Facebook, 10 TikTok, 1 YouTube, dan 1 Twitter (X). Keberadaan media sosial ini menjadi kanal strategis dalam menjangkau pemilih digital, khususnya generasi muda.

6. Logistik

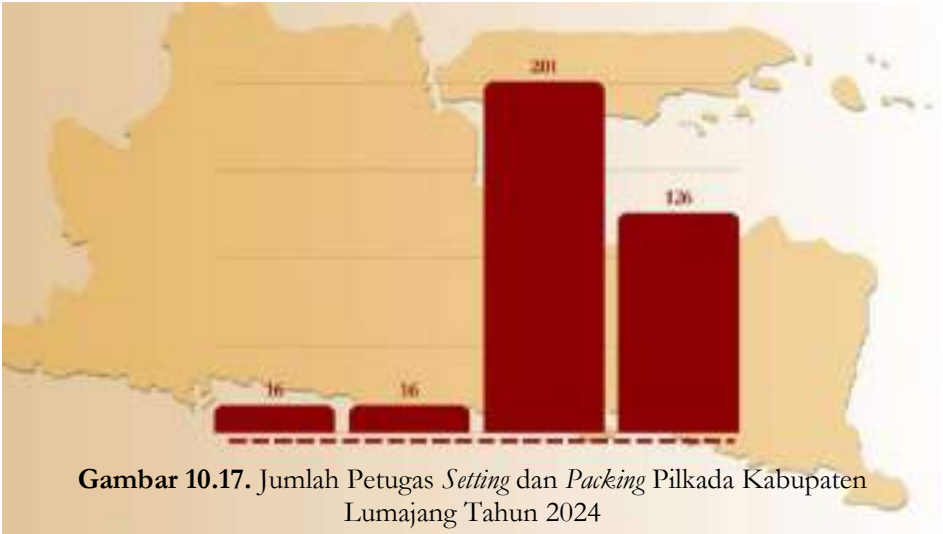
KPU Kabupaten Jember melaksanakan pengadaan logistik dengan dua metode utama, yaitu pengadaan konsolidasi dan melalui *E-Catalogue*. Kedua metode ini dipilih untuk memastikan efisiensi, ketepatan jenis, serta jumlah logistik yang sangat krusial bagi kesuksesan pelaksanaan pemilu-ngutan suara. Distribusi logistik pilkada merupakan bagian krusial dalam tahapan pelaksanaan Pilkada yang menentukan kesiapan teknis di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Efektivitas distribusi tidak hanya menyangkut jadwal yang tepat waktu, tetapi juga kemampuan menjangkau wilayah terpencil secara adil. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 10.16, yang memuat data kebutuhan serta jalur distribusi logistik pemilihan ke seluruh kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Jember.



Gambar 10.16. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kabupaten Lumajang Tahun 2024

Distribusi logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Jember telah dilaksanakan secara bertahap sejak tanggal 20 hingga 24 November 2024. Kegiatan ini mencakup pengiriman logistik ke 248 desa/kelurahan dan total 4.046 TPS. Setiap hari, logistik dikirim ke 36 hingga 57 desa, dengan jumlah TPS berkisar antara 691 hingga 980 per hari. Jumlah kotak suara dan kantong plastik disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Salah satu tantangan geografis yang unik terjadi di Kecamatan Tempurejo, di mana terdapat satu desa yang hanya dapat dijangkau menggunakan transportasi tradisional berupa kuda. Kondisi medan yang sulit dan tidak dapat dilalui kendaraan bermotor menjadikan alternatif ini sebagai solusi utama. Kondisi ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Jember dalam menjamin distribusi logistik yang meny-eluruh, inklusif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah yang paling sulit dijangkau.

Distribusi logistik dilaksanakan mulai tanggal 20 hingga 24 November 2024 dengan menysasar total 248 desa/kelurahan dan 4.046 TPS. Pada setiap tanggal, didistribusikan logistik ke 36–57 desa, mencakup antara 691 hingga 980 TPS per hari. Jumlah kotak suara dan kantong plastik yang dikirim tiap hari disesuaikan secara proporsional dengan kebutuhan per wilayah. Dalam distribusi logistik ini, terdapat satu desa di Kecamatan Tempurejo yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan alat transportasi tradisional berupa kuda, karena kondisi geografis yang sulit diakses kendaraan bermotor. Kondisi ini menunjukkan upaya maksimal KPU Kabupaten Jember untuk menjangkau seluruh wilayah, tanpa terkecuali, demi menjamin hak pilih setiap warga negara.



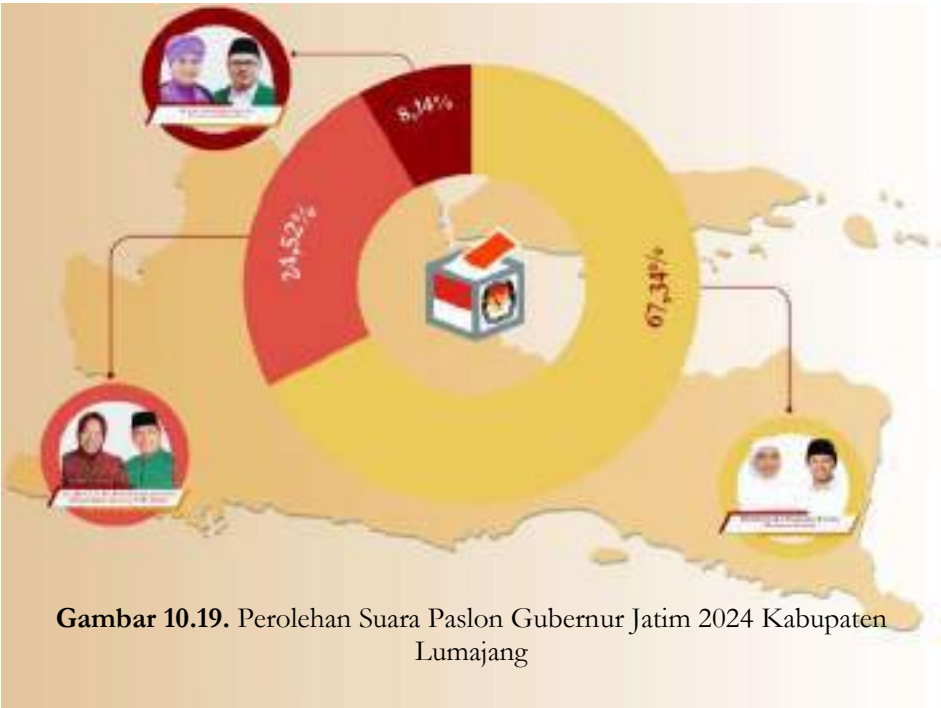
Gambar 10.17. Jumlah Petugas *Setting* dan *Packing* Pilkada Kabupaten Lumajang Tahun 2024



Gambar 10.18. Moda Transportasi Distribusi Logistik Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024

7. Hasil Pilkada Serentak

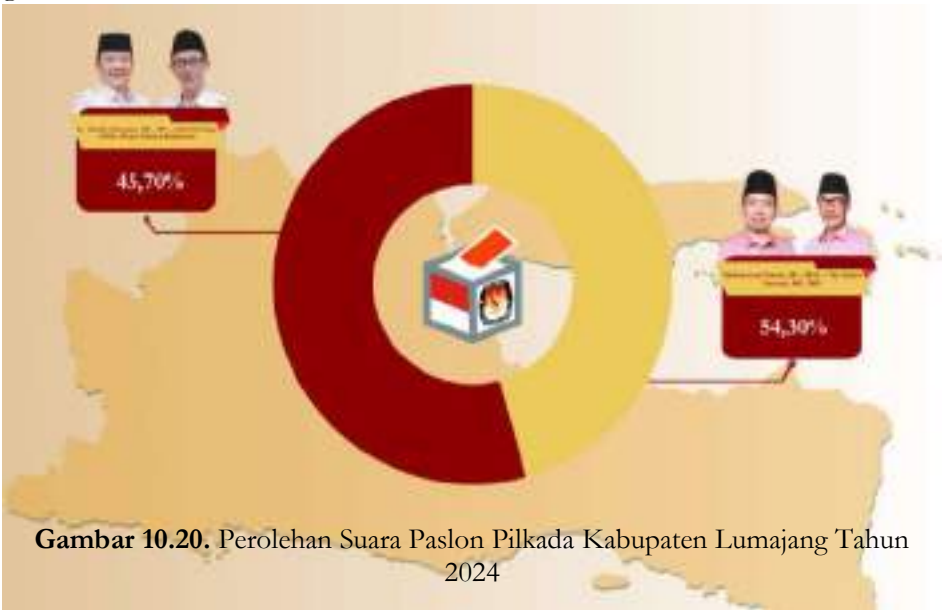
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Jember disajikan pada gambar 10.19.



Gambar 10.19. Perolehan Suara Paslon Gubernur Jatim 2024 Kabupaten Lumajang

Berdasarkan hasil perolehan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Jember Tahun 2024, pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestjanto Dardak meraih dukungan tertinggi dengan 723.833 suara atau sebesar 67,34% dari total suara sah. Di urutan kedua, pasangan Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) memperoleh 263.533 suara atau 24,52%. Sementara itu, pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah – H. Lukmanul Hakim mendapatkan 87.510 suara, setara dengan 8,14%. Total suara sah yang terkumpul di Kabupaten Jember mencapai 1.074.876 suara, mencerminkan tingkat partisipasi politik masyarakat yang cukup tinggi dalam pemilihan kepala daerah tingkat provinsi.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 10.20.



Gambar 10.20. Perolehan Suara Paslon Pilkada Kabupaten Lumajang Tahun 2024

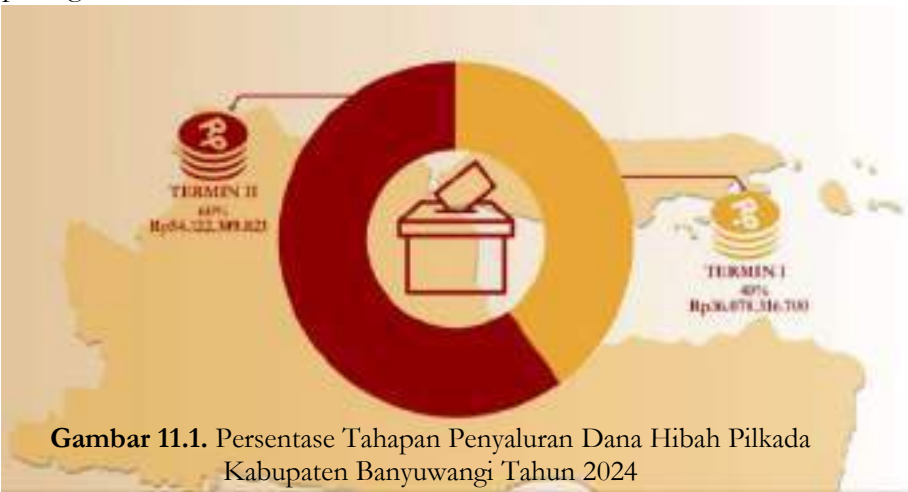
Berdasarkan hasil perolehan suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024, pasangan Muhammad Fawait, SE., M.Sc. – Dr. Djoko Susanto, SH., MH. unggul dengan 588.761 suara atau setara 54,30% dari total suara sah. Sementara itu, pasangan Ir. Hendy Siswanto, ST., IPU., ASEAN Eng. – Muh. Balya Firjaun Barlamman memperoleh 495.499 suara atau sebesar 45,70%. Dengan selisih suara mencapai 93.262, hasil ini menunjukkan kemenangan pasangan Fawait–Djoko atas petahana Hendy–Balya dalam kontestasi dua pasangan calon di Kabupaten Jember.

BAGIAN 11

KABUPATEN BANYUWANGI

1. Perencanaan Program dan Anggaran

KPU Kabupaten Banyuwangi memulai proses perencanaan anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan menyusun Rencana Kebutuhan Biaya sejak Agustus 2022. Langkah selanjutnya dilakukan pada 13 Januari 2023, di mana KPU Kabupaten Banyuwangi secara resmi mengajukan proposal anggaran hibah kepada Bupati Banyuwangi. Setelah melalui serangkaian rapat koordinasi intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banyuwangi, proses ini mencapai kesepakatan pada tanggal 10 November 2023. Kesepakatan dituangkan dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan nomor: 900/1366/429.206/2023 – 01/HM.03.1-NK/3510/2023. Total nilai hibah yang disetujui untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 adalah sebesar Rp90.200.626.523. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 11.1 berikut.

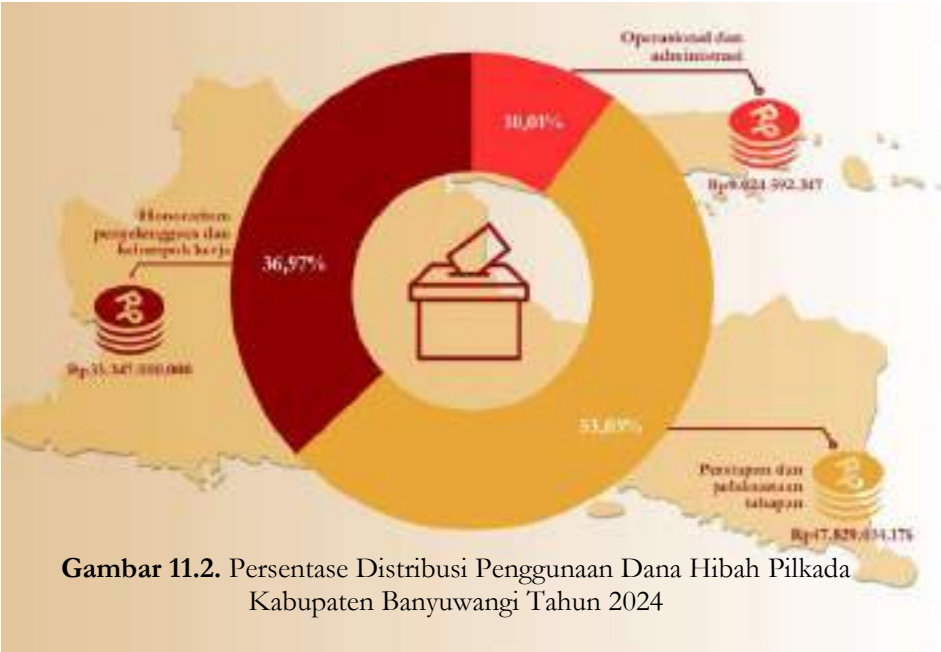


Gambar 11.1. Persentase Tahapan Penyaluran Dana Hibah Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

Dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 disalurkan dalam dua termin. Termin pertama dicairkan sebesar Rp36.078.316.700 atau 40% dari total dana hibah, yang difokuskan untuk mendukung kebutuhan awal tahapan persiapan, seperti perencanaan, sosialisasi,

serta pembentukan badan *ad hoc*. Selanjutnya, termin kedua sebesar Rp54.122.309.823 atau 60%, dialokasikan pembiayaan tahapan lanjutan, termasuk pemutakhiran data pemilih, pengadaan logistik, pelaksanaan pemungutan suara, dan operasional lainnya.

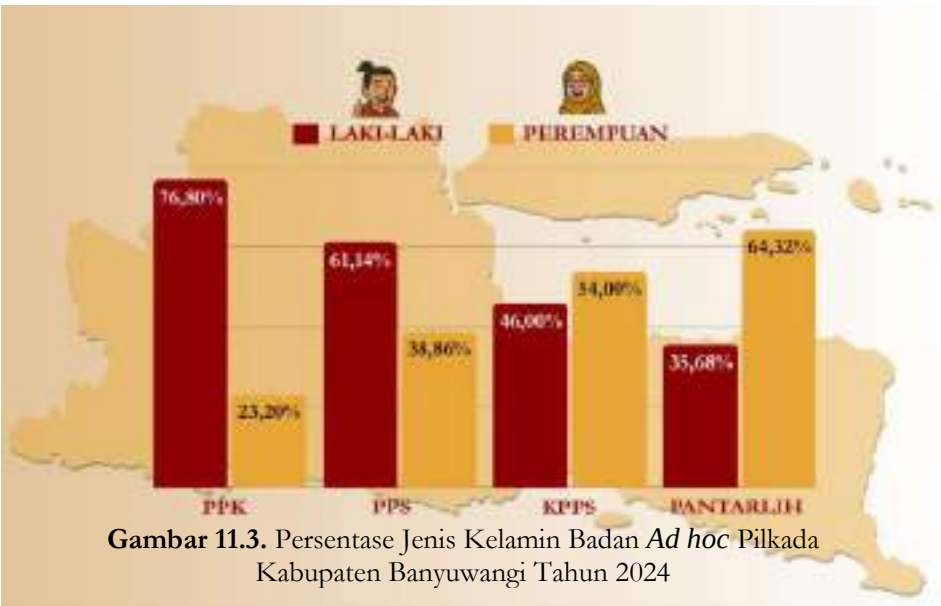
Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 11.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.



Alokasi dana hibah Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 terbagi ke dalam tiga komponen utama. Komponen terbesar adalah Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan, yang menyerap Rp47.829.034.176 atau 53,03% dari total anggaran. Dana ini digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan inti seperti sosialisasi, verifikasi data, pelatihan, dan pengadaan perlengkapan. Selanjutnya, komponen Honorarium Pokja dan Penyelenggara Pemilihan, seperti PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih, memperoleh alokasi sebesar Rp33.347.000.000 atau 36,97%, mencerminkan pentingnya dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan teknis Pilkada. Sementara itu, alokasi terkecil adalah untuk Operasional dan Administrasi Perkantoran, yakni sebesar Rp9.024.592.347 atau 10,01%, yang mencakup keperluan logistik kantor, pemeliharaan sistem informasi, serta kebutuhan administratif lainnya.

2. **Badan *Ad hoc***

KPU Kabupaten Banyuwangi membentuk badan *ad hoc* untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Keberadaan badan *ad hoc* menjadi komponen penting yang menjamin kelancaran setiap tahapan. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 11.3.

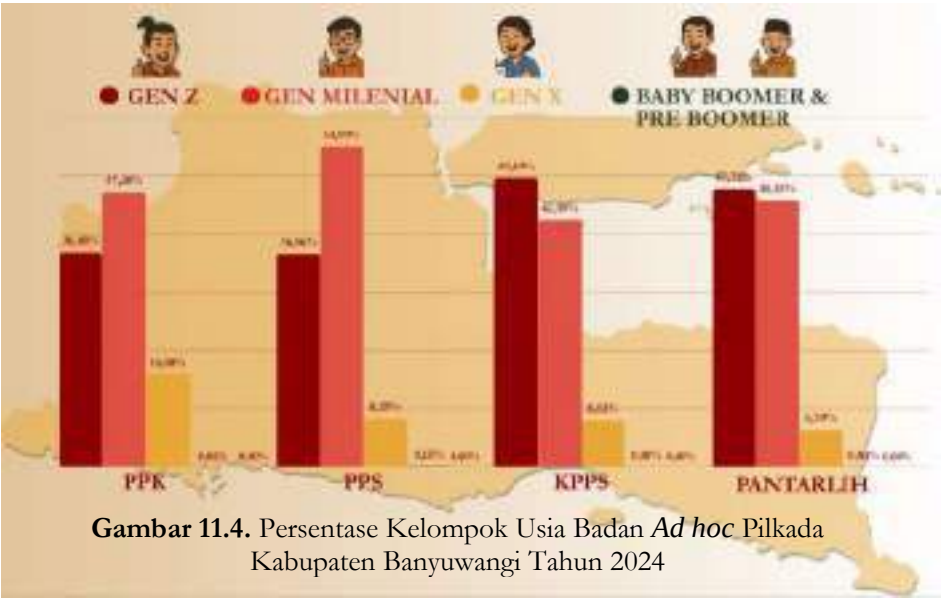


Gambar 11.3. Persentase Jenis Kelamin Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

Sebaran demografi badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan adanya kecenderungan dominasi laki-laki di tingkat struktural, namun partisipasi perempuan lebih besar di pelaksana teknis. Pada tingkat PPK, dari total 125 anggota, sebanyak 96 orang (76,80%) adalah laki-laki dan 29 orang (23,20%) perempuan. Pada PPS yang berjumlah 651 orang, laki-laki mencapai 398 orang (61,14%) dan perempuan 253 orang (38,86%). Sebaliknya, dominasi perempuan terlihat lebih menonjol pada kelompok teknis lapangan. Dari total 19.124 anggota KPPS, terdapat 10.327 perempuan (54,00%) dan 8.797 laki-laki (46,00%). Sementara itu, pada posisi Pantarlih, jumlah perempuan mencapai 3.302 orang (64,32%), jauh lebih tinggi dibanding laki-laki yang berjumlah 1.832 orang (35,68%) dari total 5.134 petugas. Komposisi ini mencerminkan partisipasi aktif perempuan yang

berdampak dalam pelaksanaan pilkada di tingkat akar rumput, menjadi indikator positif bagi kesetaraan gender dalam penyelenggaraan demokrasi lokal di Banyuwangi.

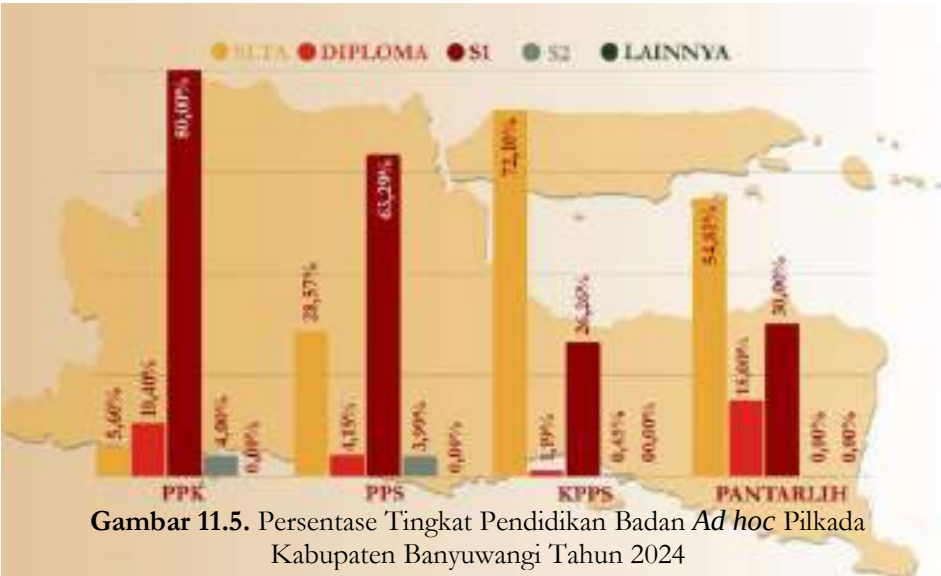
Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 11.4 berikut.



Gambar 11.4. Persentase Kelompok Usia Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

Sebaran demografi badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi usia produktif, khususnya di rentang 18 hingga 43 tahun. Pada tingkat PPK, dari total 125 orang, mayoritas berasal dari kelompok usia 28–43 tahun sebanyak 59 orang (47,20%), diikuti oleh usia 18–27 tahun sebanyak 46 orang (36,80%), dan sisanya 20 orang (16,00%) berusia 44–59 tahun. Untuk PPS, dari 651 anggota, 358 orang (54,99%) berusia 28–43 tahun, 238 orang (36,56%) berusia 18–27 tahun, dan hanya 54 orang (8,29%) berusia 44–59 tahun. Satu orang tercatat berusia 60–78 tahun. Komposisi serupa juga terjadi pada KPPS, di mana dari total 19.124 orang, sebagian besar berusia 18–27 tahun sebanyak 9.486 orang (49,60%) dan 8.104 orang (42,38%) berusia 28–43 tahun. Hanya 1.533 orang (8,02%) berada dalam kelompok usia 44–59 tahun. Adapun Pantarlih didominasi oleh usia 18–27 tahun sebanyak 2.451 orang (47,74%), diikuti usia 28–43 tahun sebanyak 2.353 orang (45,83%), dan 328 orang (6,39%) berada di kelompok usia 44–59 tahun. Hanya 2 orang (0,04%) tercatat berusia 60–78 tahun.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *Ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 11.5.



Gambar 11.5. Persentase Tingkat Pendidikan Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

Sebaran demografi badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan variasi latar belakang akademik yang cukup beragam di tiap jenjang kepillkadaan. Pada tingkat PPK, dari 125 orang, mayoritas (80,00%) memiliki pendidikan Sarjana (S1), diikuti oleh Diploma sebanyak 13 orang (10,40%), S2 sebanyak 5 orang (4,00%), dan SLTA hanya 7 orang (5,60%). Untuk PPS, dari total 651 anggota, mayoritas juga berasal dari lulusan S1 sebanyak 412 orang (63,29%), kemudian SLTA sebanyak 186 orang (28,57%), S2 sebanyak 26 orang (3,99%), dan Diploma sebanyak 27 orang (4,15%). Pada tingkat KPPS, dari 19.124 anggota, sebagian besar merupakan lulusan SLTA sebanyak 13.789 orang (72,10%), diikuti oleh S1 sebanyak 5.022 orang (26,26%), sementara Diploma hanya 227 orang (1,19%) dan S2 sebanyak 86 orang (0,45%). Adapun pada Pantarlih, dari 5.134 petugas, mayoritas juga berasal dari SLTA sebanyak 2.814 orang (54,81%), diikuti oleh S1 sebanyak 1.540 orang (30,00%), Diploma sebanyak 770 orang (15,00%), dan S2 hanya 10 orang (0,19%).

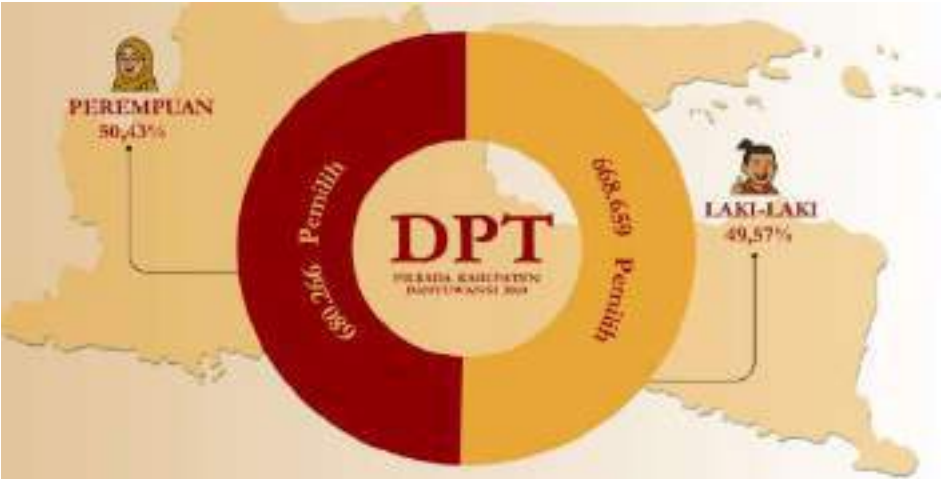
Dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 tidak terdapat petugas badan *ad hoc* yang berasal dari kelompok penyandang disabilitas. Ketiadaan penyandang disabilitas dalam jajaran badan *ad hoc* menjadi catatan penting bagi KPU Kabupaten Banyuwangi untuk memperkuat strategi afirmatif ke depan, meliputi penguatan akses informasi

dan komunikasi yang ramah disabilitas, pemberian ruang partisipasi yang adaptif, serta pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam proses sosialisasi dan rekrutmen.

3. Pemutakhiran Data

Proses pemutakhiran data pemilih dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi secara bertahap dan berjenjang, dengan berpedoman pada regulasi nasional serta prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan tahapan pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024, jumlah pemilih menunjukkan dinamika penyempurnaan dari satu tahap ke tahap berikutnya.

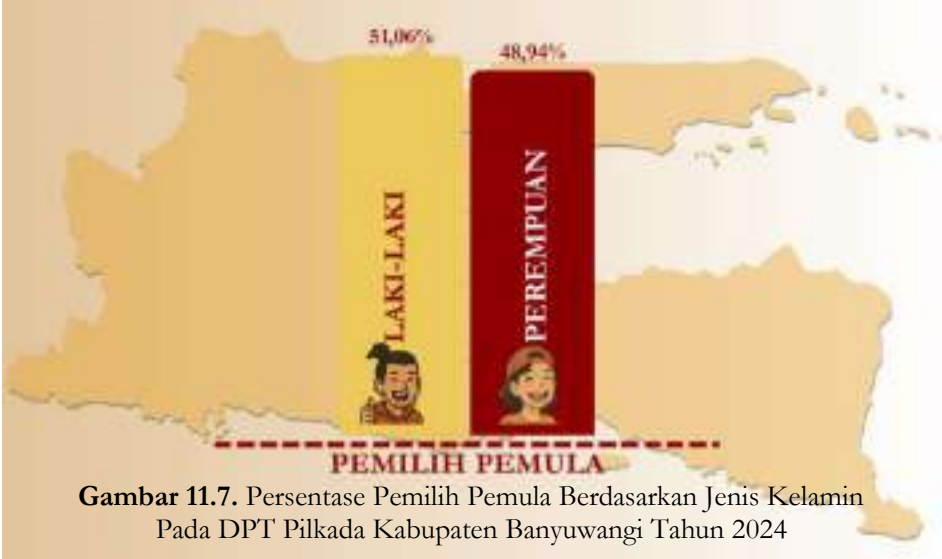
Pada tahap awal, jumlah Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi (DPHS) tercatat sebanyak 1.361.025 pemilih. Setelah dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Pantarlih serta klarifikasi bersama masyarakat melalui forum tanggapan publik, ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 1.350.080 pemilih. Tahap selanjutnya menghasilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan total sebanyak 1.348.925 pemilih. Penurunan jumlah ini mencerminkan efektivitas proses verifikasi dan validasi, di mana pemilih yang tidak memenuhi syarat (misalnya karena pindah domisili, meninggal dunia, atau data ganda) telah dihapus dari daftar. Hasil akhir ini menunjukkan bahwa KPU Banyuwangi telah menjalankan proses pemutakhiran data secara akurat dan partisipatif untuk memastikan kualitas daftar pemilih yang valid dan sah. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 11.6 berikut.



Gambar 11.6. Persentase Tingkat Pendidikan Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

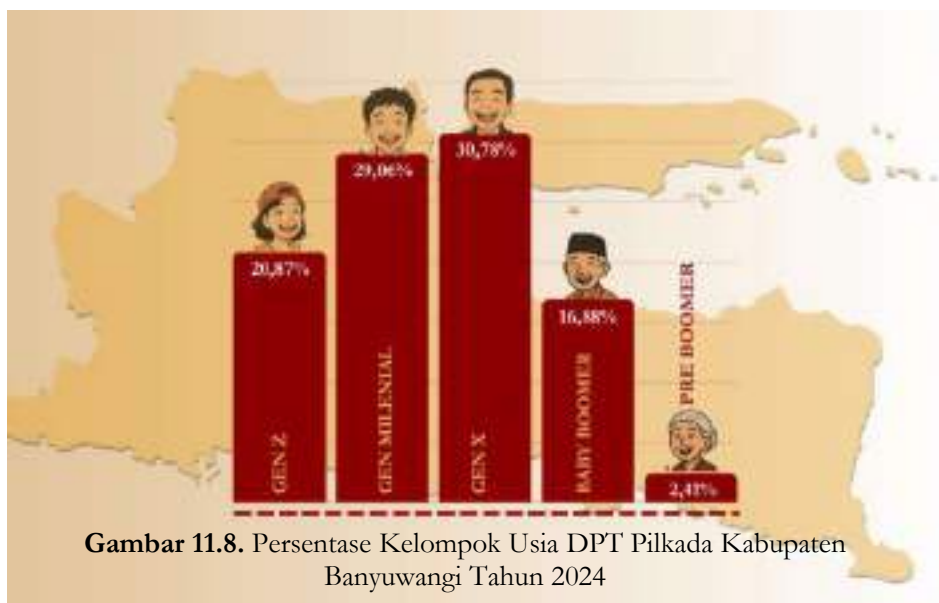
Sebaran demografi DPT Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan proporsi yang relatif seimbang antara pemilih laki-laki dan perempuan. Dari total 1.348.925 pemilih, sebanyak 668.659 orang (49,57%) adalah laki-laki, sementara 680.266 orang (50,43%) adalah perempuan. Komposisi ini mencerminkan representasi gender yang hampir setara, yang juga menjadi indikator positif bagi pelaksanaan Pilkada yang inklusif dan representatif.

Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam kategori utama, yakni pemilih pemula. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 11.7 berikut.



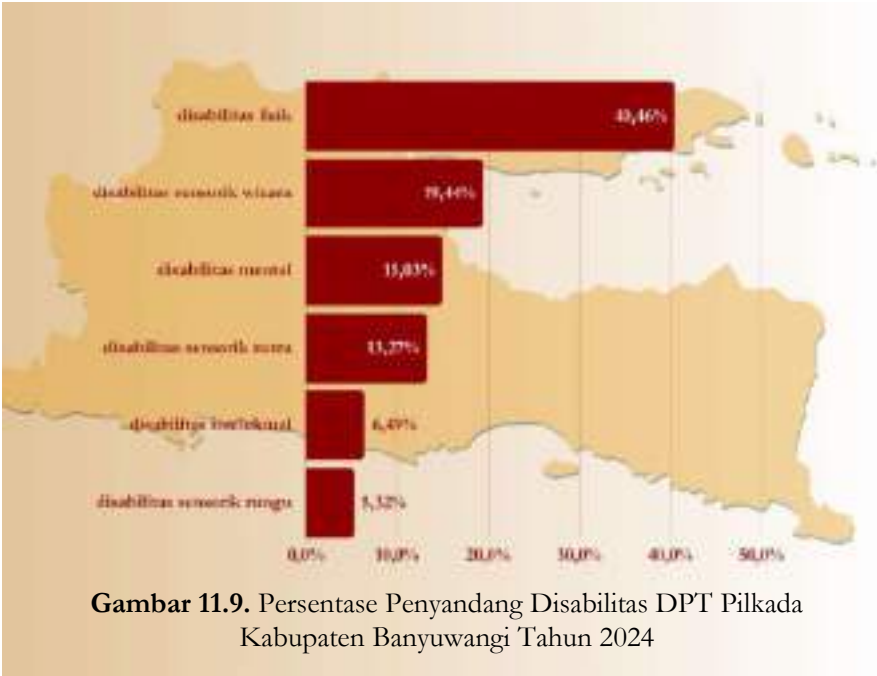
Sebaran demografi DPT Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 berdasarkan status pemilih menunjukkan bahwa dari total 1.348.925 pemilih, terdapat 17.312 pemilih pemula (sekitar 1,28% dari total DPT), yang terdiri atas 8.840 laki-laki (51,06%) dan 8.472 perempuan (48,94%). Komposisi ini memperlihatkan partisipasi yang cukup besar dari kelompok pemilih berpengalaman, dengan keterwakilan gender yang seimbang. Kehadiran pemilih pemula menjadi penanda penting akan tumbuhnya partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi lokal dalam Pilkada Serentak Jatim 2024.

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 11.8.



Sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa mayoritas pemilih berada pada rentang usia produktif. Usia 44–59 tahun mendominasi dengan 415.162 orang (30,78%), diikuti oleh kelompok usia 28–43 tahun sebanyak 391.996 orang (29,06%), dan usia 18–27 tahun sebanyak 259.196 orang (19,22%). Kelompok usia 60–78 tahun tercatat sebanyak 227.705 orang (16,88%), sementara pemilih usia >79 tahun berjumlah 32.573 orang (2,41%). Adapun pemilih usia 17 tahun yang baru mendapatkan hak pilih sebanyak 22.293 orang (1,65%). Data ini mencerminkan distribusi pemilih yang merata di berbagai kelompok umur, dengan dominasi usia produktif yang berpotensi aktif dalam partisipasi politik.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 disajikan pada gambar 11.9, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



KPU Kabupaten Banyuwangi mencatat sebanyak 5.304 pemilih penyandang disabilitas dalam DPT Pilkada Serentak Tahun 2024 yang tersebar dalam enam kategori disabilitas. Disabilitas fisik mendominasi dengan jumlah 2.146 orang (40,46%), diikuti oleh disabilitas sensorik wicara sebanyak 1.031 orang (19,44%), dan disabilitas mental 797 orang (15,03%). Selanjutnya, terdapat 704 pemilih (13,27%) dengan disabilitas sensorik netra, 344 orang (6,49%) dengan disabilitas intelektual, serta 282 orang (5,32%) dengan disabilitas sensorik runggu. Komposisi ini menunjukkan perhatian terhadap inklusivitas pemilih disabilitas dalam pilkada, sekaligus menjadi dasar untuk memastikan akomodasi dan aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

4. Pencalonan

Tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pada tahap awal, KPU Kabupaten Banyuwangi membuka kesempatan pencalonan melalui dua jalur, yaitu jalur perseorangan dan jalur partai politik. KPU Kabupaten Banyuwangi menetapkan dua bakal pasangan calon yang telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan dukungan partai politik. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut

peserta disajikan pada gambar11.10 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.

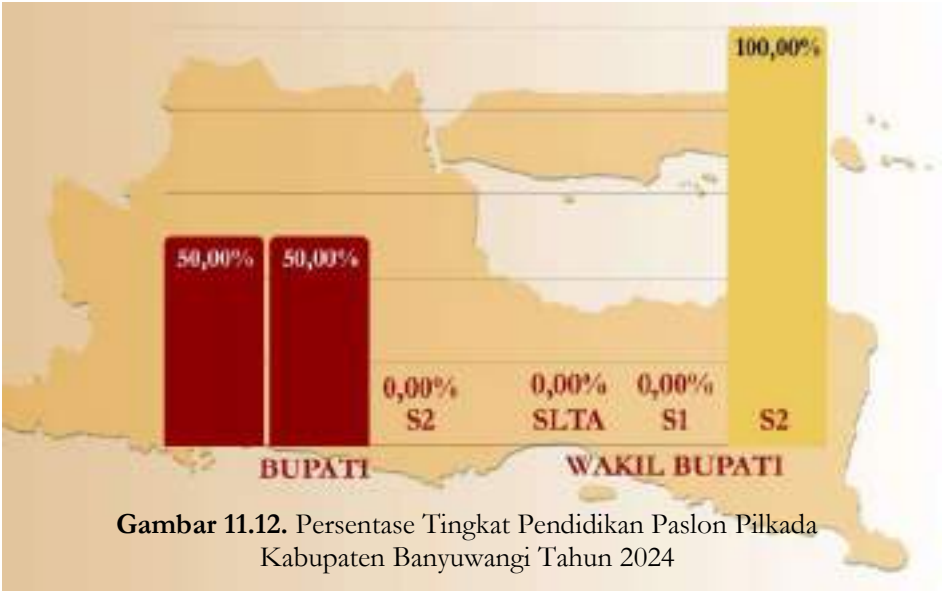


Gambar 11.10. Daftar Nama Paslon Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi disajikan pada gambar 11.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi disajikan pada gambar 11.12.



Gambar 11.11. Persentase Jenis Kelamin Paslon Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024



Gambar 11.12. Persentase Tingkat Pendidikan Paslon Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

Sebaran demografi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin (Gambar ()) menunjukkan bahwa dari total empat individu calon, tiga di antaranya adalah laki-laki (75%) dan satu perempuan (25%). Komposisi ini terdiri atas dua calon Bupati yang masing-masing satu laki-laki dan satu perempuan, serta dua calon Wakil Bupati yang seluruhnya berjenis kelamin laki-laki (100%).

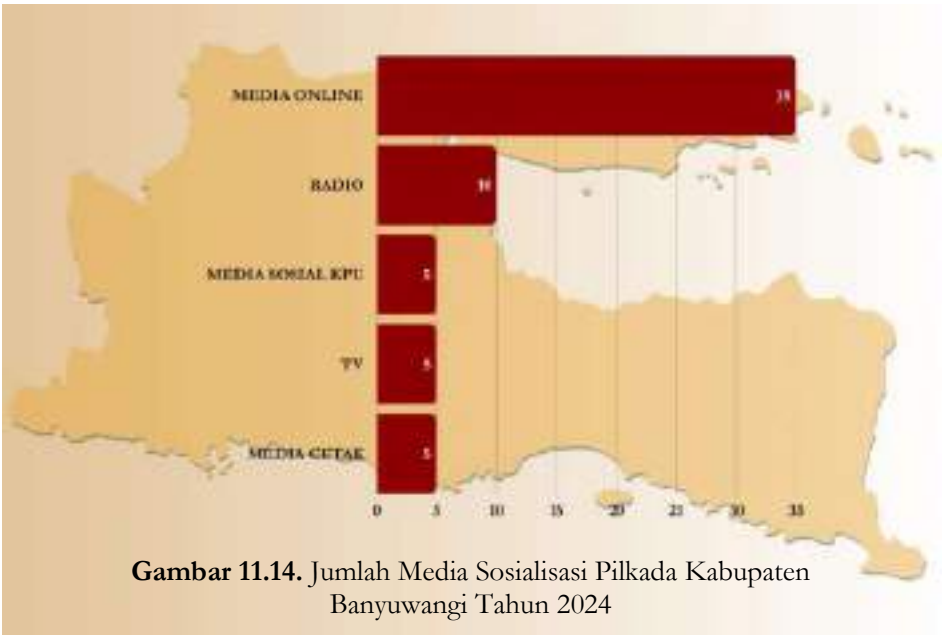
Dari sisi latar belakang pendidikan (Gambar ()), para calon menunjukkan latar belakang akademik yang beragam namun cukup tinggi. Sebanyak satu orang (25%) merupakan lulusan SLTA, satu orang (25%) lulusan S1, dan dua orang (50%) telah menempuh pendidikan jenjang S2. Kedua calon Bupati masing-masing berasal dari jenjang SLTA dan S1, sementara kedua calon Wakil Bupati seluruhnya berpendidikan Magister (S2), menunjukkan tingkat kualifikasi akademik yang cukup baik untuk mendukung kapabilitas dalam pemerintahan daerah.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 11.13, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



5. Sosialisasi dan Kampanye

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pemahaman pemilih, KPU Kabupaten Banyuwangi menerapkan berbagai metode sosialisasi yang menysasar beragam segmen masyarakat. Sosialisasi tatap muka dilakukan langsung kepada kelompok-kelompok strategis seperti pemilih pemula, tokoh masyarakat, dan penyandang disabilitas, guna memberikan edukasi secara interaktif dan mendalam. Sementara itu, penyebaran informasi juga diperluas melalui berbagai media, baik cetak, online, televisi, maupun radio. Di era digital, KPU Banyuwangi turut memaksimalkan pemanfaatan media sosial resmi sebagai kanal utama untuk menjangkau pemilih, khususnya generasi muda yang aktif di platform digital. Pendekatan multikanal ini dirancang agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses informasi Pilkada secara merata dan akurat.



Gambar 11.14. Jumlah Media Sosialisasi Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024



Gambar 11.15. Maskot Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

Maskot *SI WANGI* (Suara Aspirasi Banyuwangi) mengusung simbol seekor penyu, yang merupakan hewan khas Banyuwangi dan dikenal sebagai lambang panjang umur, kebijaksanaan, serta keadilan. Kehadiran penyu dalam maskot ini merepresentasikan harapan agar seluruh proses demokrasi berlangsung dengan bijak dan adil. Selain itu, *SI WANGI* juga menampilkan

kotak suara yang tertutup rapat, mencerminkan komitmen KPU Banyuwangi untuk menjalankan tugasnya secara jujur dan menjaga integritas dalam setiap tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Kombinasi elemen ini menegaskan nilai-nilai transparansi, kepercayaan publik, dan keadilan yang dijunjung dalam penyelenggaraan pilkada di Banyuwangi.

KPU Kabupaten Banyuwangi memberikan fasilitasi kampanye kepada dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk kegiatan debat publik serta penyediaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK). Fasilitasi ini bertujuan untuk memastikan kampanye berlangsung secara adil, informatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Debat pasangan calon diselenggarakan sebanyak tiga kali dengan tema yang berbeda pada setiap sesi. Debat pertama mengusung tema *"Memajukan Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Banyuwangi"*, debat kedua bertema *"Menyelesaikan Persoalan Daerah dan Meningkatkan Pelayanan Masyarakat"*, dan debat pamungkas bertajuk *"Menyeraskan Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi dengan Nasional, serta Memperkokoh NKRI dan Kebangsaan."*

Selain itu, masing-masing pasangan calon juga difasilitasi APK dan BK dengan jumlah yang sama, yaitu: 5 baliho, 434 spanduk, 500 umbul-umbul, serta masing-masing 1.000 lembar brosur, poster, pamflet, dan flyer. Total pengadaan APK dan BK yang disediakan KPU meliputi 868 spanduk, 1.000 umbul-umbul, 10 baliho, serta 2.000 lembar untuk masing-masing jenis bahan kampanye. Fasilitasi ini mencerminkan prinsip kesetaraan, transparansi, dan penyebaran informasi yang merata kepada masyarakat pemilih.

Jumlah media sosial yang dimiliki oleh pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 mencerminkan pemanfaatan teknologi informasi dalam strategi kampanye digital. Dengan jumlah pasangan calon sebanyak dua pasang, masing-masing kandidat diketahui mengelola lima jenis media sosial utama, yaitu Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan Twitter (X). Kehadiran di berbagai platform ini digunakan untuk memperluas jangkauan informasi kampanye, membangun interaksi dengan pemilih, serta meningkatkan partisipasi, khususnya dari kalangan pemilih muda dan pemilih digital.

6. Logistik

Proses pengadaan logistik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan pendampingan dari Sekretariat

Jenderal KPU, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengadaan dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan sehat, keadilan, dan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan logistik yang diperoleh tepat jenis, jumlah, kualitas, tujuan, dan waktu.

Langkah-langkah dalam proses pengadaan mencakup: (1) identifikasi kebutuhan logistik; (2) penetapan jumlah dan jenis logistik; (3) penyusunan rancangan kontrak pengadaan; (4) pemilihan metode pengadaan; (5) seleksi penyedia barang/jasa; dan (6) penandatanganan kontrak pengadaan. Pendekatan ini memastikan setiap tahapan pilkada dapat berjalan lancar dengan dukungan logistik yang memadai dan tepat sasaran. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 11.16.



Gambar 11.16. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

Distribusi logistik Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara bertahap dengan menggunakan moda transportasi yang disesuaikan dengan tingkat wilayah distribusi. Sebanyak 18 unit mobil truk digunakan untuk mengangkut logistik dari Gudang KPU Kabupaten ke tingkat PPK. Selanjutnya, distribusi dari PPK ke 217 PPS dilanjutkan dengan menggunakan mobil pick-up. Moda transportasi yang sama, yaitu mobil pick-up, juga digunakan untuk mendistribusikan logistik dari PPS ke 2.732 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemanfaatan armada ini

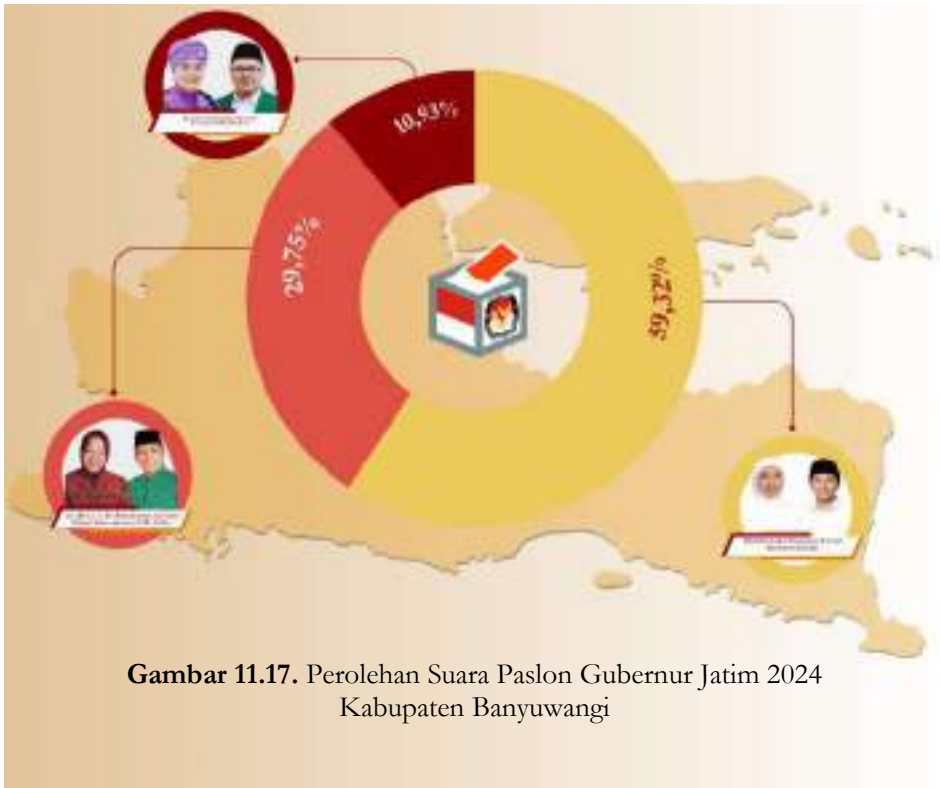
menunjukkan perencanaan distribusi logistik yang terstruktur dan adaptif terhadap kondisi geografis dan kebutuhan operasional di tiap tingkatan.

Tabel 11.1. Daftar TPS Sulit Terjangkau Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

No	Alamat	TPS	Keterangan
1	Dsn Sukomade. Desa Sarongan, Kec Pesanggaran	TPS 001, TPS 002, TPS 003	Berbukit dan sulit dijangkau
2	Desa Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru	TPS 029-038, TPS 046	Pegunungan/berbukit, jalan bebatuan, dan sulit dijangkau
3	Desa Kebonrejo, Kecamatan Kalibaru	TPS 022-024, TPS 030-031	Pegunungan/berbukit, jalan bebatuan, dan sulit dijangkau
4	Dsn Karangbaru, Desa Alasbulu, Kecamatan Wongsorejo	TPS 027, TPS 031-034	Berbukit dan sulit dijangkau
5	Desa Bangsring, Kec Wongsorejo	TPS 010	Berbukit dan sulit dijangkau
6	Desa Watukebo, Wongsorejo	TPS 012, TPS 020	Berbukit dan sulit dijangkau
7	Desa Barurejo, Siliragung	TPS 034-035, TPS 044	Pegunungan/berbukit dan sulit dijangkau

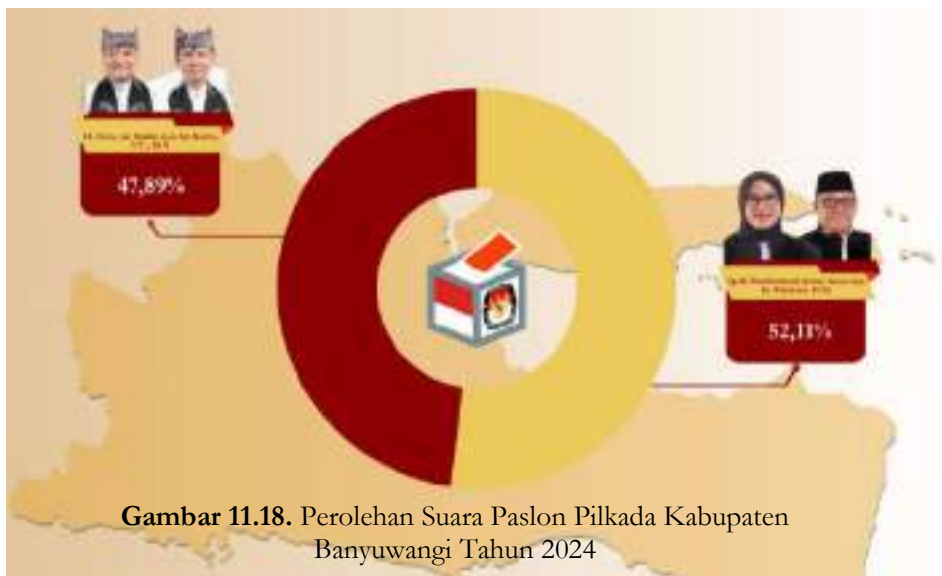
7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Banyuwangi disajikan pada gambar 11.17.



Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak memperoleh dukungan tertinggi di Kabupaten Banyuwangi dengan total 456.856 suara atau sebesar 59,32%. Posisi kedua diraih oleh pasangan Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) dengan perolehan 229.140 suara atau 29,75%. Sementara itu, pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah dan H. Lukmanul Hakim memperoleh 84.161 suara atau 10,93% dari total suara sah sebanyak 770.157 suara.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 11.18.



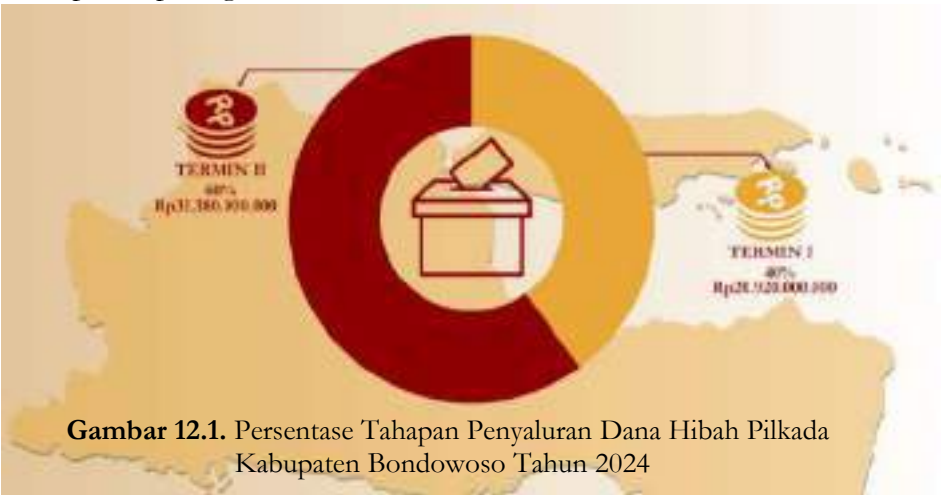
Berdasarkan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, pasangan Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Ir. Mujiono, M.Si. berhasil meraih kemenangan dengan total 404.366 suara atau 52,11%. Mereka unggul dari pasangan H. Moh. Ali Makki dan Ali Ruchi, S.T., M.Si. yang memperoleh 371.688 suara atau setara dengan 47,89% dari total 776.054 suara sah.

BAGIAN 12

KABUPATEN BONDOWOSO

1. Perencanaan Program dan Anggaran

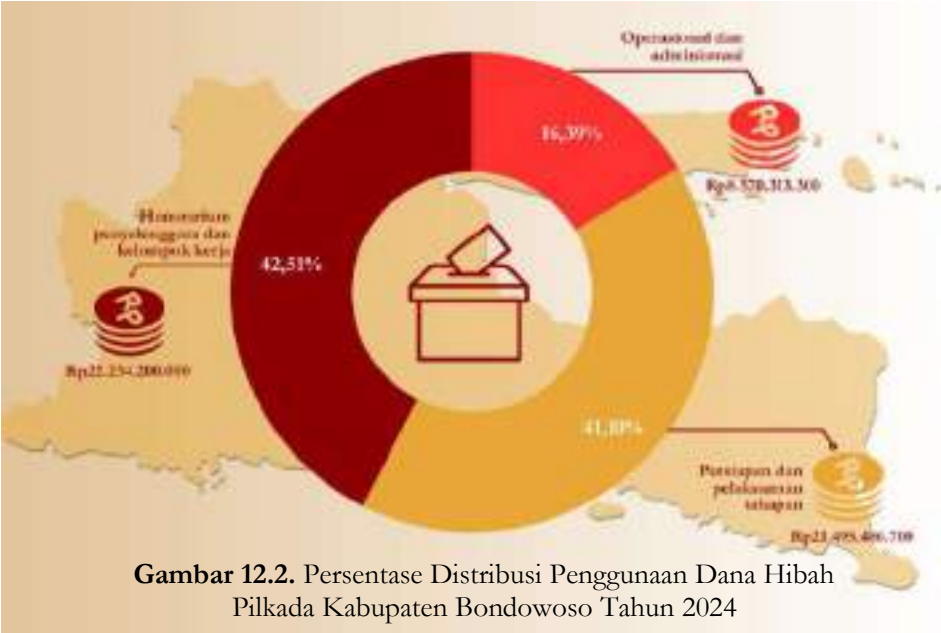
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso memperoleh Dana Hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Dana tersebut dicairkan melalui dua tahap berdasarkan kesepakatan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 November 2023. Tahap pertama pencairan dilakukan pada tanggal 28 November 2023, sebagai modal awal untuk mendukung persiapan penyelenggaraan. Selanjutnya, tahap kedua diterima pada tanggal 13 Juni 2024 untuk membiayai kegiatan lanjutan, termasuk pelaksanaan tahapan inti seperti kampanye, pemungutan suara, dan pengadaan logistik. Skema pencairan bertahap ini bertujuan untuk menjamin kelancaran dan keberlanjutan seluruh tahapan Pilkada secara terstruktur, efisien, dan akuntabel. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 12.1 berikut.



Dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp52.300.000.000, yang dicairkan dalam dua termin. Termin pertama sebesar Rp20.920.000.000 atau 40% dari total

dana dicairkan pada 28 November 2023, untuk mendukung kebutuhan awal tahapan persiapan Pilkada. Termin kedua dicairkan pada 13 Juni 2024 sebesar Rp31.380.000.000, setara 60%, digunakan untuk membiayai tahapan lanjutan seperti pelaksanaan kampanye, pengadaan logistik, dan pemungutan suara. Skema pencairan dua tahap ini bertujuan memastikan setiap proses berjalan efektif dan berkesinambungan.

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 12.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.

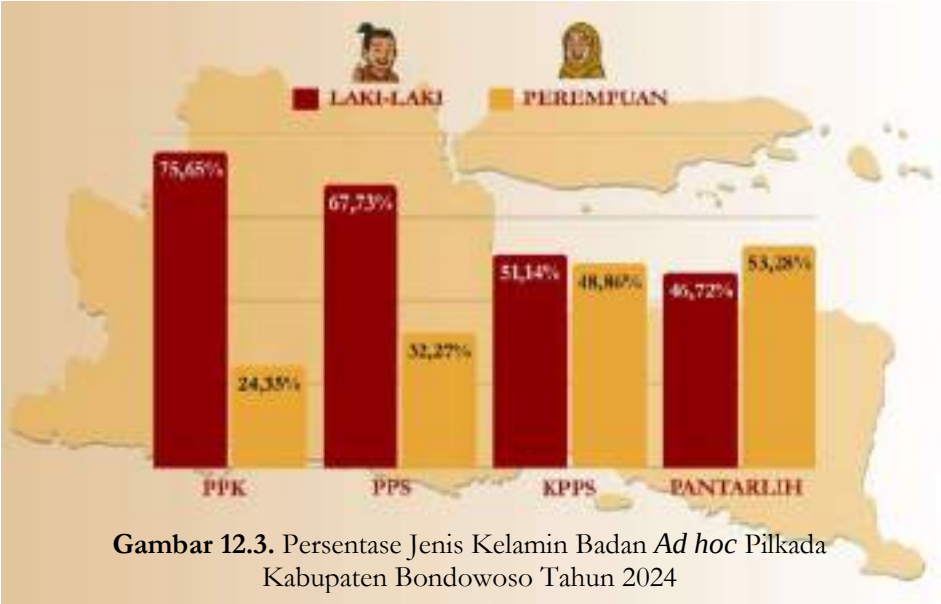


Alokasi dana hibah Pilkada Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 terbagi ke dalam tiga komponen utama. Komponen terbesar diperuntukkan bagi honorarium kelompok kerja dan penyelenggara pemilihan, yang menyerap anggaran sebesar Rp22.234.200.000 atau 42,51% dari total hibah. Ini menunjukkan fokus utama pembiayaan berada pada dukungan terhadap kinerja badan *ad hoc* seperti PPK, PPS, KPPS, dan lainnya. Selanjutnya, tahapan persiapan dan pelaksanaan menyerap Rp21.495.486.700 atau 41,10%, digunakan untuk mendanai kegiatan seperti sosialisasi, pencalonan, pemutakhiran data pemilih, hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Sementara itu, komponen operasional dan administrasi perkantoran memperoleh alokasi Rp8.570.313.300 atau 16,39%, meliputi kebutuhan administrasi sekretariat, dukungan fasilitas kerja, dan biaya penunjang operasional. Distribusi ini

mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan teknis penyelenggaraan pemilihan, pembiayaan sumber daya manusia, dan dukungan administratif.

2. **Badan *Ad hoc***

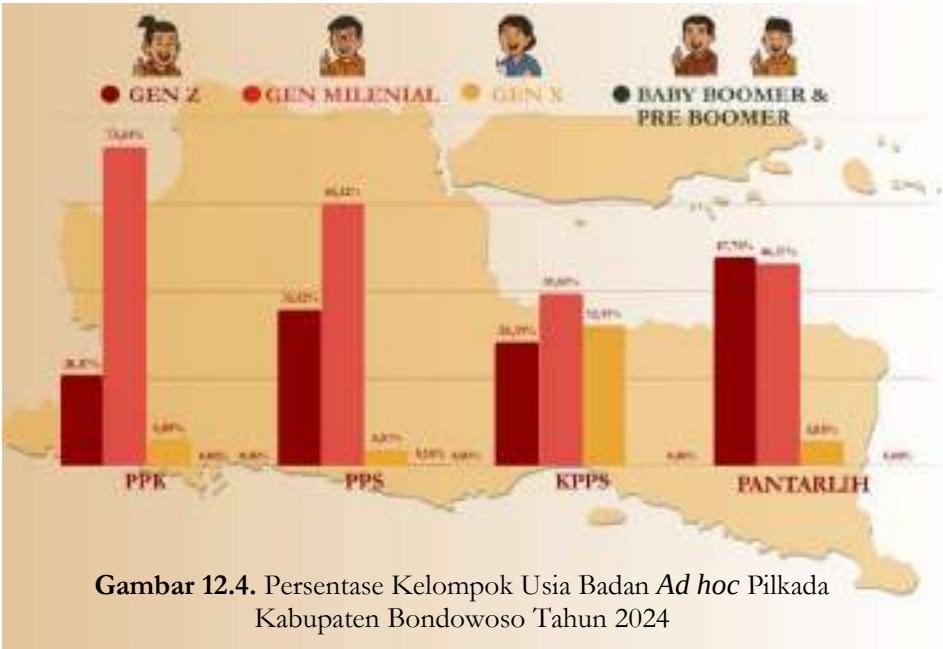
Pembentukan Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 mencakup empat kategori utama penyelenggara di tingkat lapangan, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Jumlah personel yang dilibatkan cukup besar dan mencerminkan partisipasi yang luas dari masyarakat. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 12.3.



Sebaran demografi petugas *ad hoc* Pilkada Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan keragaman antara laki-laki dan perempuan di setiap jenjang. Pada tingkat PPK, sebanyak 87 orang (75,65%) adalah laki-laki dan 28 orang (24,35%) perempuan. Komposisi serupa juga tampak pada PPS, dengan 445 laki-laki (67,73%) dan 121 perempuan (32,27%). Namun, proporsi ini berbeda pada Pantarlih, di mana jumlah perempuan justru lebih besar, yakni 1.211 orang (53,28%), dibandingkan laki-laki 1.062 orang (46,72%). Untuk KPPS, distribusinya lebih merata, dengan 4.303 laki-laki (51,14%) dan 4.111 perempuan (48,86%). Kondisi ini mencerminkan adanya keterlibatan

perempuan yang signifikan terutama pada lapisan teknis pelaksanaan di lapangan, menandakan bahwa partisipasi gender dalam penyelenggaraan Pilkada di Bondowoso semakin inklusif dan representatif.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 12.4 berikut.

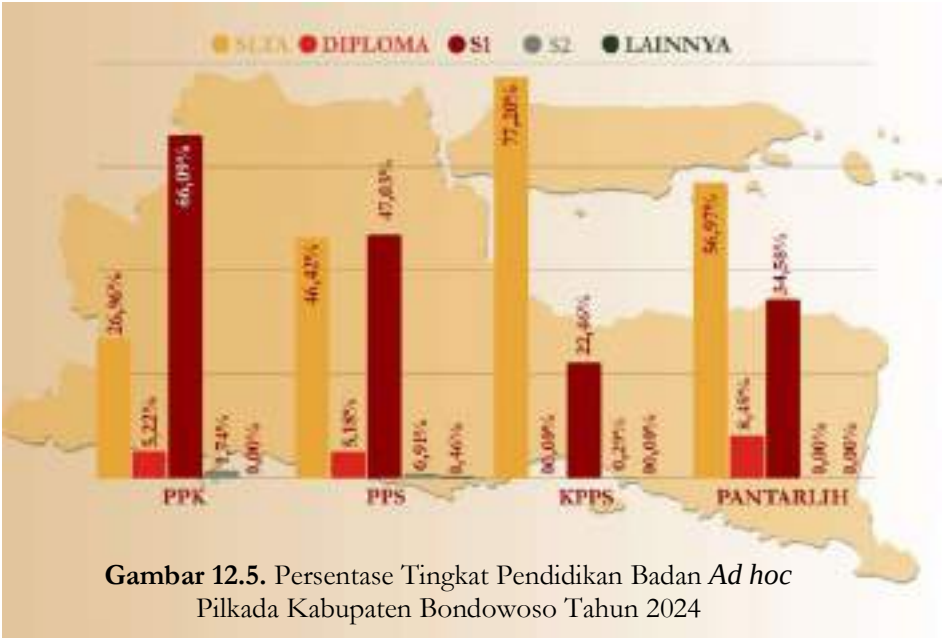


Sebaran demografi petugas *ad hoc* Pilkada Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi usia produktif, khususnya pada rentang 28–43 tahun. Pada kelompok PPK, sebanyak 84 orang (73,04%) berada pada usia 28–43 tahun, diikuti oleh 24 orang (20,87%) pada usia 18–27 tahun, dan 7 orang (6,09%) berusia 44–59 tahun. Di tingkat PPS, distribusi serupa terlihat, dengan mayoritas 395 orang (60,12%) berada pada usia 28–43 tahun. Untuk KPPS, kelompok usia 28–43 tahun tetap mendominasi dengan 3.324 orang (39,51%), disusul oleh usia 44–59 tahun sebanyak 2.705 orang (32,15%), dan usia 18–27 tahun sebanyak 2.385 orang (28,35%). Sementara itu, pada Pantarlih, proporsi terbesar berasal dari usia 18–27 tahun, yaitu 1.086 orang (47,78%), diikuti usia 28–43 tahun sebanyak 1.054 orang (46,37%), dan sisanya berusia 44–59 tahun (133 orang atau 5,85%).

Data ini mengindikasikan bahwa mayoritas petugas berada pada usia yang relatif muda dan produktif, sehingga diharapkan memiliki kapasitas fisik dan kognitif yang optimal dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada

yang efisien dan profesional.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *Ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 12.5.



Gambar 12.5. Persentase Tingkat Pendidikan Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

Sebaran demografi petugas *ad hoc* Pilkada Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas petugas memiliki latar belakang pendidikan menengah atas (SLTA) dan sarjana (S1). Pada tingkat PPK, sebanyak 76 orang (66,09%) berlatar belakang S1, disusul 31 orang (26,96%) lulusan SLTA, dan sisanya terdiri dari lulusan Diploma (5,22%) dan S2 (1,74%). Untuk petugas PPS, distribusi relatif seimbang antara SLTA (46,42%) dan S1 (47,03%), sedangkan lulusan diploma dan S2 masing-masing hanya menyumbang kurang dari 6%. Di tingkat KPPS, sebagian besar (77,20%) merupakan lulusan SLTA, menunjukkan bahwa lapisan pelaksana teknis di TPS masih didominasi oleh jenjang pendidikan menengah. Hanya 22,46% yang berlatar belakang S1, dan sangat sedikit yang berasal dari pendidikan S2 (0,29%) maupun kategori lainnya. Pada Pantarlih, mayoritas juga lulusan SLTA (56,97%), diikuti oleh S1 (34,58%), dan Diploma (8,45%).

Secara umum, mayoritas petugas *ad hoc* memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup memadai untuk menjalankan tugas-tugas teknis kepilkadaan, dengan porsi lulusan sarjana yang cukup dominan di jenjang PPK dan PPS.

Dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 tidak

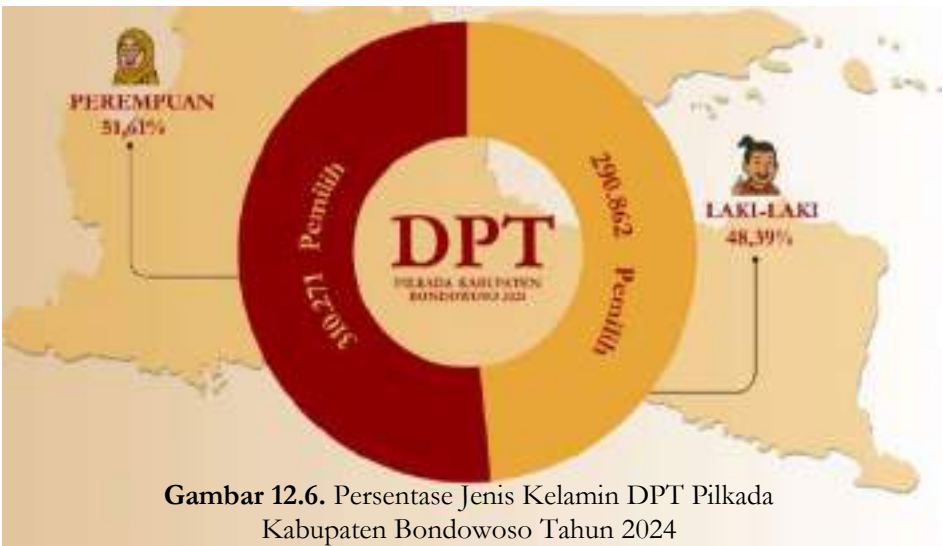
terdapat petugas badan *ad hoc* yang berasal dari kelompok penyandang disabilitas. Ketiadaan penyandang disabilitas dalam jajaran badan *ad hoc* menjadi catatan penting bagi KPU Kabupaten Bondowoso untuk memperkuat strategi afirmatif ke depan, meliputi penguatan akses informasi dan komunikasi yang ramah disabilitas, pemberian ruang partisipasi yang adaptif, serta pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam proses sosialisasi dan rekrutmen.

3. Pemutakhiran Data

Proses pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Bondowoso untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang, dimulai dari penyusunan Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi (DPHS) yang mencatat total 609.470 pemilih. Selanjutnya, setelah dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 602.444 pemilih.

Melalui uji publik dan proses pencermatan yang melibatkan masyarakat, pengawas pilkada, serta perangkat desa/kelurahan, dilakukan perbaikan terhadap DPS. Hasil akhir dari tahapan ini adalah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bondowoso yang didokumentasikan melalui Berita Acara Nomor: 146/PL.02.1-BA/3511/2024, dengan total jumlah DPT sebanyak 601.133 pemilih.

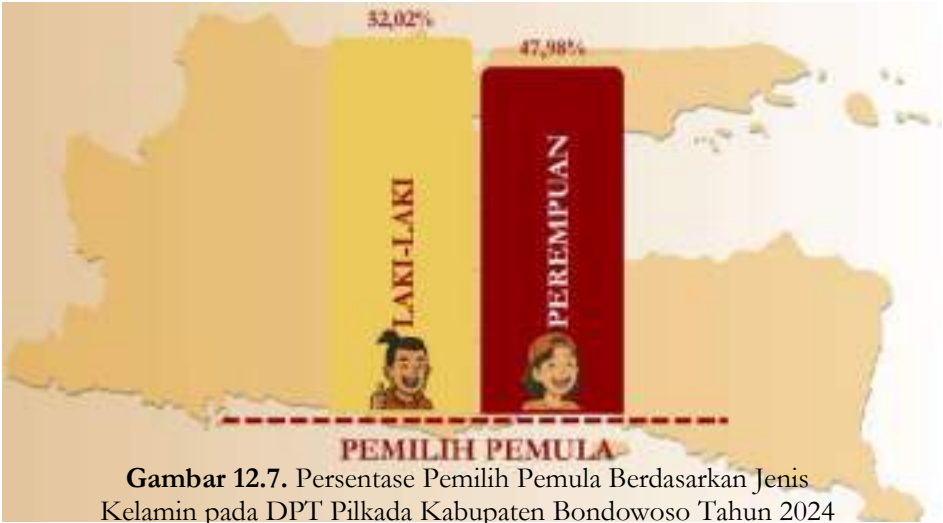
Penurunan jumlah dari DPHS ke DPT menunjukkan adanya penyaringan yang ketat dan akurat dalam proses verifikasi, guna memastikan bahwa setiap pemilih yang tercantum benar-benar memenuhi syarat konstitusional untuk memberikan suara dalam Pilkada 2024. Proses ini menjadi wujud komitmen KPU Kabupaten Bondowoso dalam menjamin daftar pemilih yang akurat, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 12.6 berikut.



Gambar 12.6. Persentase Jenis Kelamin DPT Pilkada Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

Sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa dari total 601.133 pemilih, sebanyak 290.862 orang (48,39%) adalah laki-laki dan 310.271 orang (51,61%) adalah perempuan. Komposisi ini mencerminkan partisipasi pemilih perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang sekaligus menunjukkan potensi besar perempuan dalam menentukan arah demokrasi lokal melalui Pilkada Serentak 2024.

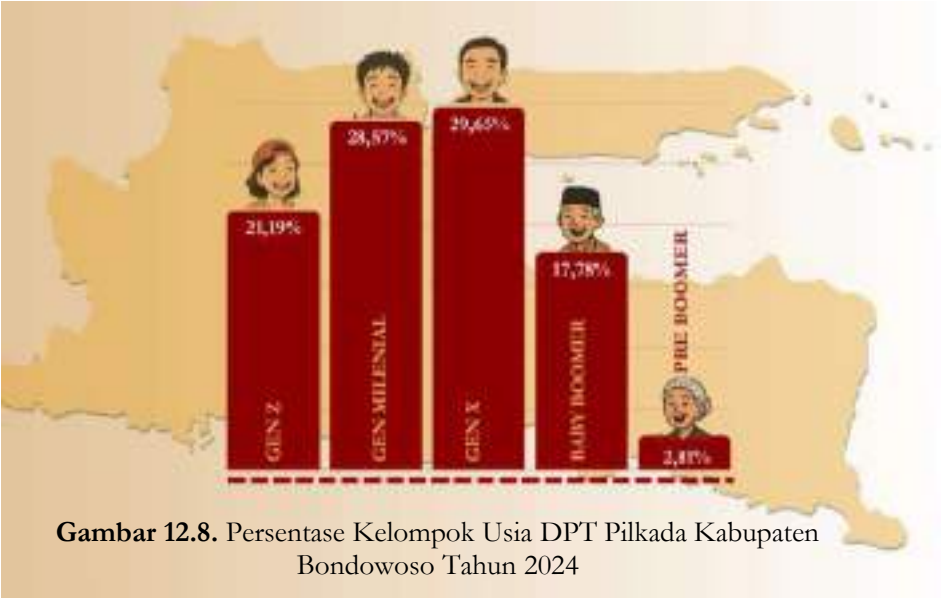
Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam kategori utama, yakni pemilih pemula. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 12.7 berikut.



Gambar 12.7. Persentase Pemilih Pemula Berdasarkan Jenis Kelamin pada DPT Pilkada Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

Berdasarkan status pemilih, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 berjumlah 8.725 pemilih pemula. Pemilih pemula terdiri dari 4.539 laki-laki (52,02%) dan 4.186 perempuan (47,98%). Data ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pemula di Pilkada Kabupaten Bondowoso didominasi oleh pemilih laki-laki, meskipun selisihnya tidak terlalu signifikan. Kehadiran pemilih pemula menjadi penanda penting akan tumbuhnya partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi lokal dalam Pilkada Serentak Jatim 2024.

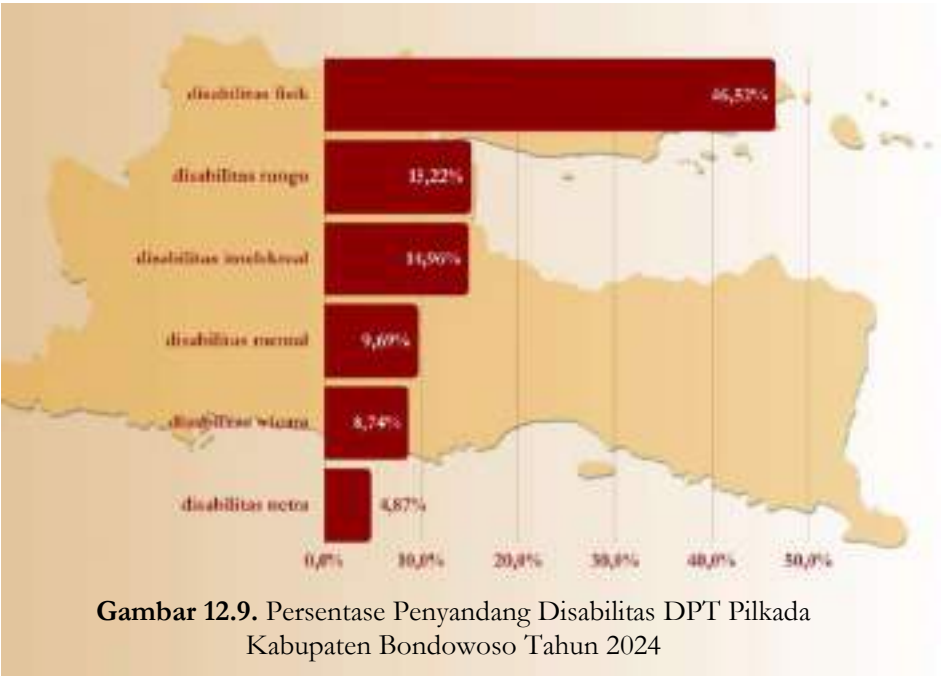
Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 12.8.



Sebaran demografi DPT Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa mayoritas pemilih berada pada rentang usia produktif. Kelompok usia 44–59 tahun mencatat jumlah tertinggi dengan 178.229 pemilih (29,65%), disusul usia 28–43 tahun sebanyak 171.747 pemilih (28,57%), dan 18–27 tahun sebesar 117.687 pemilih (19,58%). Kelompok usia lanjut (60–78 tahun) berjumlah 106.901 pemilih (17,78%), sementara pemilih usia 17 tahun sebanyak 9.679 (1,61%), dan pemilih berusia di atas 79 tahun tercatat 16.890 orang (2,81%). Komposisi ini mencerminkan dominasi usia dewasa dan paruh baya dalam struktur pemilih di Bondowoso, yang penting untuk diperhatikan dalam strategi sosialisasi dan pelayanan di TPS.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten

Bondowoso Tahun 2024 disajikan pada Gambar (), yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Pada Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 4.540 pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan disabilitas fisik sebanyak 2.112 orang (46,52%), diikuti oleh disabilitas rungu (15,22%), intelektual (14,96%), mental (9,69%), wicara (8,74%), dan netra (4,87%). Informasi ini menjadi pijakan penting dalam penyediaan fasilitas aksesibel di TPS demi menjamin terpenuhinya hak pilih kelompok disabilitas secara adil dan setara.

4. Pencalonan

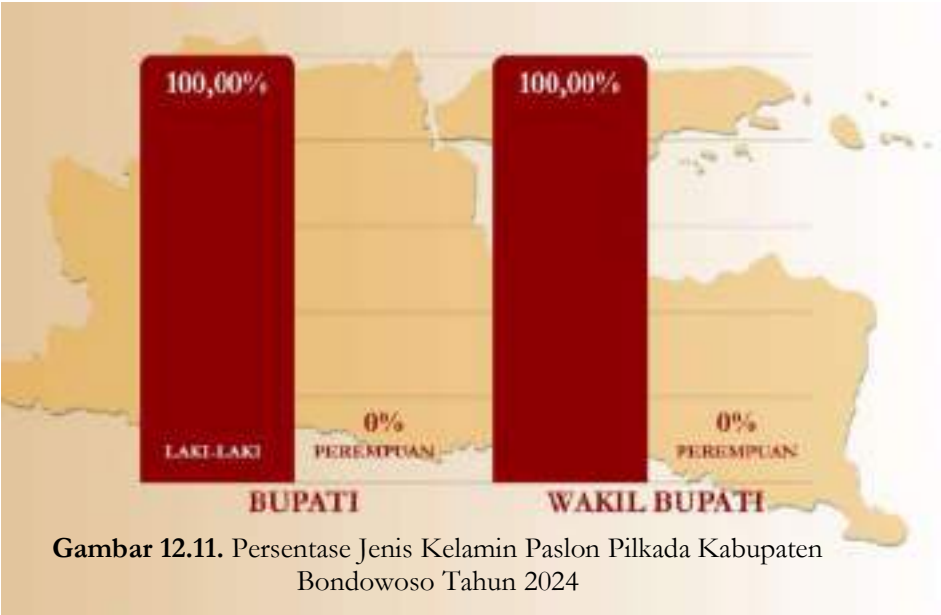
Tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pada tahap awal, KPU Kabupaten Bondowoso membuka kesempatan pencalonan melalui dua jalur, yaitu jalur perseorangan dan jalur partai politik. KPU Kabupaten Bondowoso menetapkan dua bakal pasangan calon yang telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan dukungan partai politik. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung,

serta nomor urut peserta disajikan pada gambar 12.10 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.

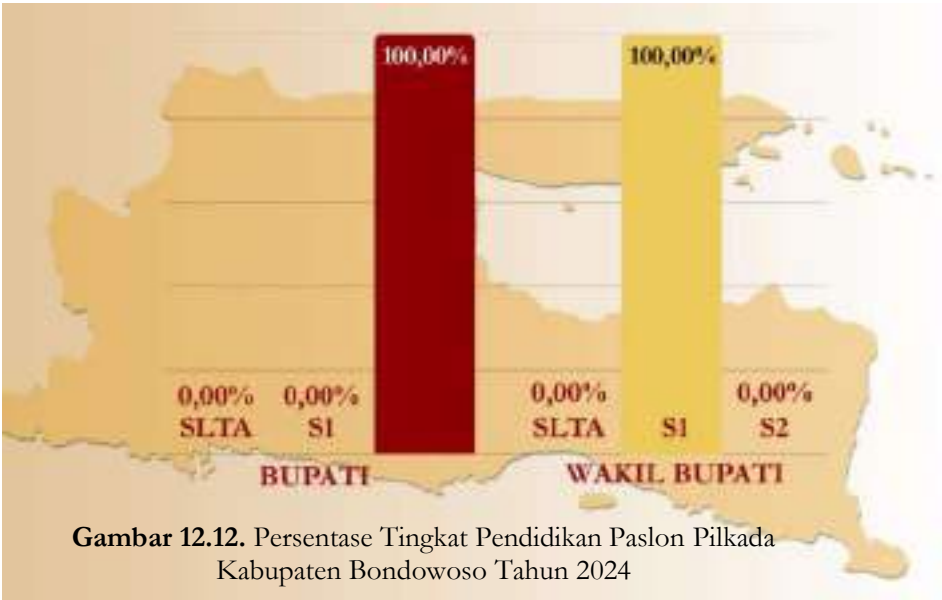


Gambar 12.10. Daftar Nama Paslon Pilkada Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso disajikan pada gambar 12.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso disajikan pada gambar 12.12.



Gambar 12.11. Persentase Jenis Kelamin Paslon Pilkada Kabupaten Bondowoso Tahun 2024



Dalam Pilkada Kabupaten Bondowoso Tahun 2024, seluruh pasangan calon terdiri dari laki-laki, baik pada posisi Bupati maupun Wakil Bupati, dengan komposisi 100% laki-laki dan tidak ada calon perempuan. Hadirnya kedua pasangan calon tersebut menunjukkan belum adanya keterwakilan perempuan dalam kontestasi kepala daerah di wilayah Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan latar belakang pendidikan, kedua calon Bupati tercatat memiliki gelar S2 (100%), sementara kedua calon Wakil Bupati memiliki pendidikan terakhir S1 (100%). Tidak terdapat pasangan calon yang berlatar belakang pendidikan SLTA maupun jenjang diploma. Komposisi ini mencerminkan bahwa seluruh pasangan calon memiliki latar belakang pendidikan tinggi, yang dapat menjadi modal penting dalam mengelola pemerintahan daerah secara profesional dan visioner.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 12.13, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



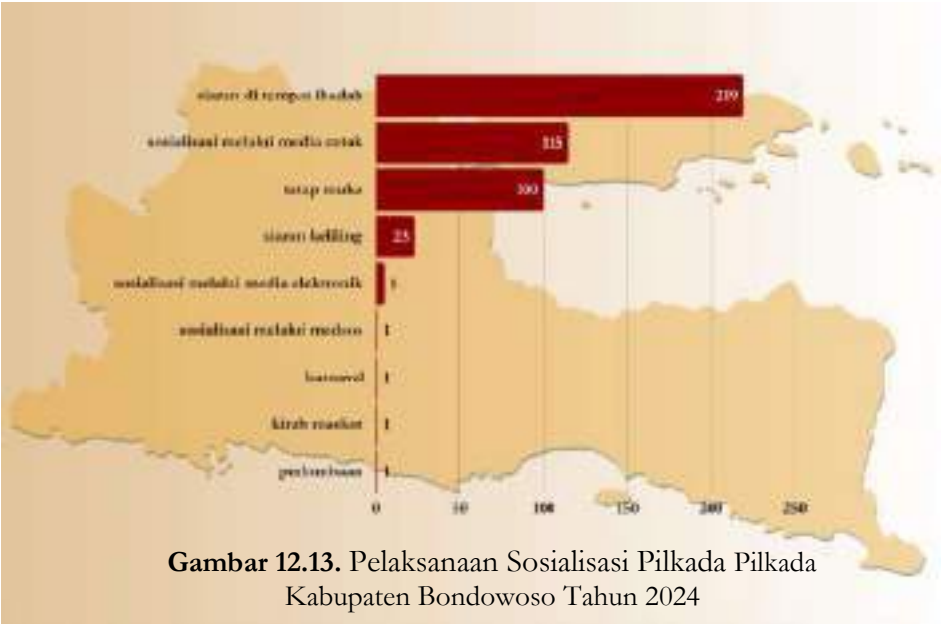
Gambar 12.13. Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

KPU Kabupaten Bondowoso menerapkan berbagai metode sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Secara keseluruhan, terdapat sepuluh metode sosialisasi dengan total target peserta mencapai sekitar 1.044.750 orang. Metode yang menjangkau peserta terbanyak adalah sosialisasi di tempat ibadah, dengan estimasi menjangkau 400.000 orang, diikuti oleh pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) sebanyak 250.000 orang, serta melalui media sosial yang diperkirakan menjangkau 141.000 pemilih.

Metode lainnya yang juga berkontribusi signifikan dalam menjangkau masyarakat antara lain siaran keliling dengan target 109.500 peserta, sosialisasi media elektronik (50.000), serta media cetak (15.000). Selain itu, kegiatan partisipatif seperti kirab maskot (47.500), perlombaan (9.000), karnaval (5.000), dan tatap muka (17.750) juga dilaksanakan untuk menciptakan atmosfer Pilkada yang inklusif dan meriah. Strategi ini menunjukkan upaya KPU dalam menyasar seluruh lapisan masyarakat

melalui pendekatan langsung maupun digital demi meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih.



Gambar 12.13. Pelaksanaan Sosialisasi Pilkada Pilkada Kabupaten Bondowoso Tahun 2024



Gambar 12.14. Maskot Pilkada Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

Maskot Sè Kona pada Pilkada Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 diadaptasi dari sosok Topeng Kona, tokoh sentral dalam tari tradisional asal Desa Blimbing, Kecamatan Klabang. Tokoh ini menggambarkan figur legendaris bernama Juk Sèng, pemimpin karismatik yang dikenal bijaksana

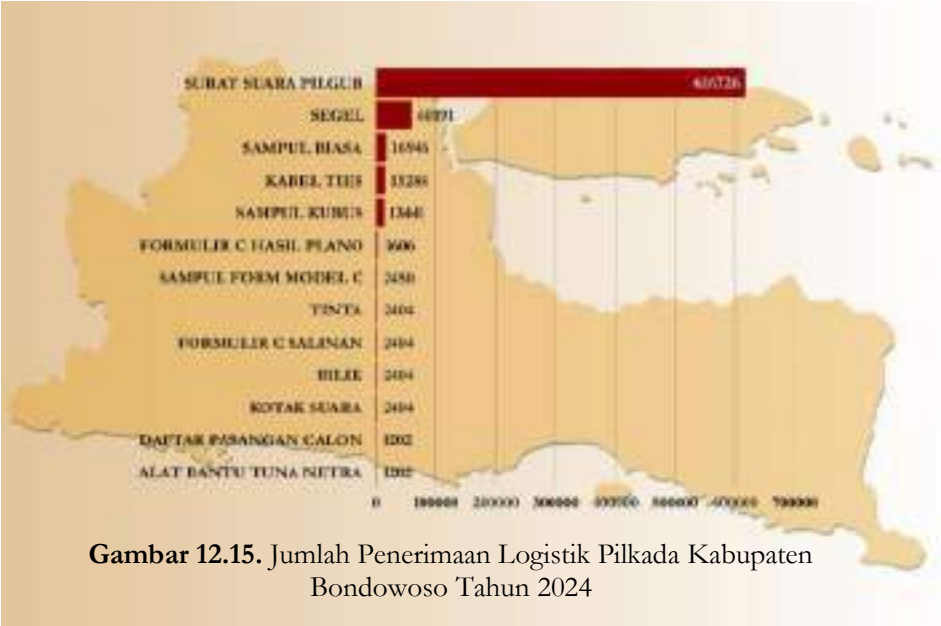
dan memiliki kelebihan spiritual dalam membangun serta membimbing masyarakat. Dipilihnya Topeng Kona sebagai inspirasi maskot merepresentasikan harapan agar Pilkada Bondowoso melahirkan pemimpin yang sejalan dengan karakter dan nilai luhur masyarakat setempat. Nilai-nilai tersebut mencakup Ngabdhi, yakni pengabdian yang mendalam kepada Tuhan; Nyâghârâ, yaitu keluasan pemikiran, ketajaman rasa, dan keluwesan dalam berinteraksi sosial dan ekologis; Tarbhuka, yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan ke depan dan menjaga keseimbangan regenerasi; serta Satrèya, yakni keberanian, kejujuran, dan sikap visioner dalam mengambil keputusan. Maskot Sè Kona diharapkan mampu menjadi simbol kepemimpinan yang berakar pada budaya lokal, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Pilkada yang bermartabat.

Fasilitasi kegiatan kampanye yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bondowoso pada Pilkada Serentak Tahun 2024 mencakup pelaksanaan debat pasangan calon serta penyediaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) bagi masing-masing pasangan calon. Debat publik diselenggarakan sebanyak tiga kali, yakni pada tanggal 28 Oktober 2024 (debat pertama), 8 November 2024 (debat kedua), dan 19 November 2024 (debat ketiga). Tujuan dari pelaksanaan debat ini adalah untuk memberikan ruang kepada publik dalam menilai visi, misi, dan program kerja masing-masing paslon secara langsung dan terbuka. Adapun bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Bondowoso terdiri dari selebaran, brosur, pamflet, dan poster. Seluruh bahan tersebut dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari segi jumlah maupun kontennya. Sebelum digunakan, desain dan isi materi kampanye terlebih dahulu melalui proses verifikasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip keadilan, netralitas, dan etika kampanye. Fasilitasi ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan kampanye yang informatif, edukatif, dan sesuai dengan semangat demokrasi yang jujur dan adil.

6. Logistik

Pengadaan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bondowoso dengan pendampingan dari Sekretariat Jenderal KPU, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip pengadaan seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan sehat, keadilan, dan akuntabilitas diterapkan untuk memastikan logistik diperoleh secara tepat jenis, jumlah, kualitas, tujuan, dan waktu. Proses pengadaan

meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan jumlah, penyusunan kontrak, pemilihan metode dan penyedia, hingga penandatanganan kontrak. Seluruh tanggung jawab pengadaan berada pada Sekretaris KPU Kabupaten Bondowoso, dengan pembiayaan berdasarkan anggaran yang telah disetujui baik oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 12.15.

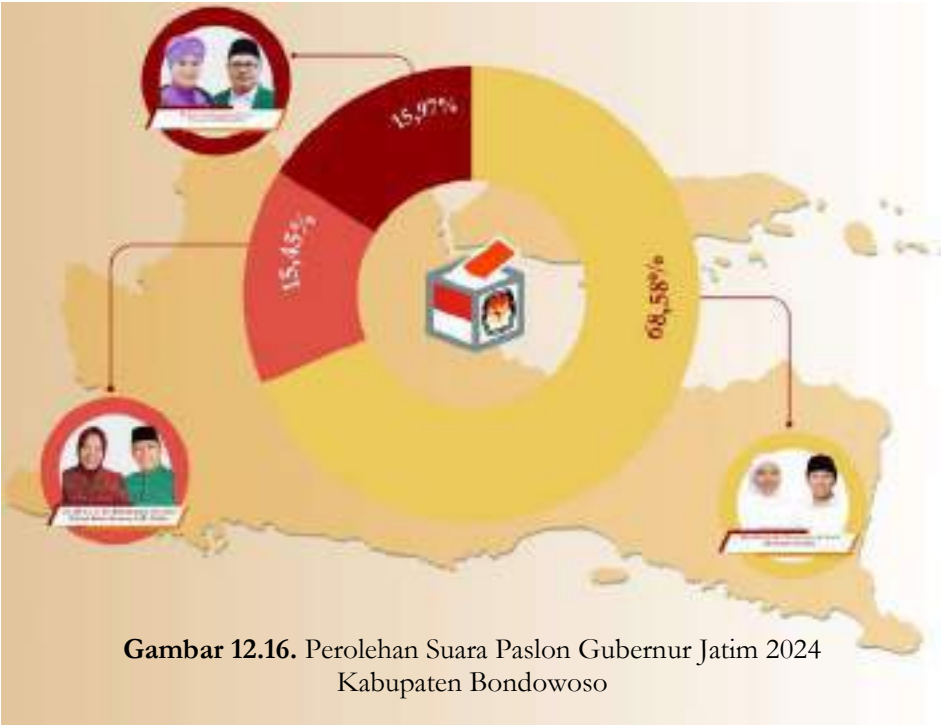


Distribusi logistik Pilkada Kabupaten Bondowoso menggunakan moda transportasi yang disesuaikan dengan tingkat wilayah administratif. Sebanyak 23 armada mobil truk digunakan untuk mendistribusikan logistik dari Gudang KPU Kabupaten ke tingkat PPK. Selanjutnya, 219 unit mobil pick-up digunakan untuk mengangkut logistik dari PPK ke PPS. Sementara itu, distribusi dari PPS ke TPS dilakukan dengan 1.202 unit mobil pick-up, mengingat jangkauan yang lebih luas dan kebutuhan distribusi yang lebih merata ke seluruh TPS yang tersebar di wilayah Bondowoso.

7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di

Kabupaten Bondowoso disajikan pada gambar 12.16.



Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso, pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestjanto Dardak memperoleh dukungan suara terbanyak, yaitu sebanyak 294.701 suara atau sebesar 68,58% dari total suara sah. Di posisi kedua, pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah – H. Lukmanul Khakim meraih 68.631 suara (15,97%), diikuti oleh pasangan Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta dengan 66.374 suara atau setara dengan 15,45%. Jumlah total suara sah mencapai 429.706 suara, mencerminkan partisipasi politik masyarakat Bondowoso dalam pemilihan kepala daerah tingkat provinsi secara demokratis.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 12.17.



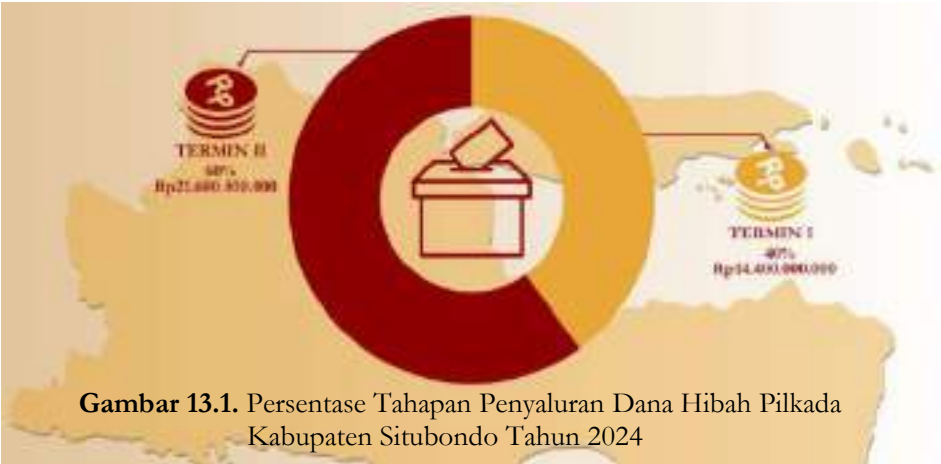
Berdasarkan hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024, pasangan calon H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag – As'ad Yahya Syafi'i, S.E. berhasil meraih kemenangan dengan jumlah suara sebesar 223.907, atau 51,33% dari total suara sah. Sementara itu, pasangan Drs. Bambang Soekwanto, M.M – Moh. Baqir, S.Pd. memperoleh 212.295 suara, atau 48,67%. Dengan selisih tipis sebesar 11.612 suara, hasil ini menunjukkan kontestasi yang kompetitif dan antusiasme tinggi masyarakat dalam menentukan pilihan kepemimpinan daerah untuk periode mendatang.

BAGIAN 13

KABUPATEN SITUBONDO

1. Perencanaan Program dan Anggaran

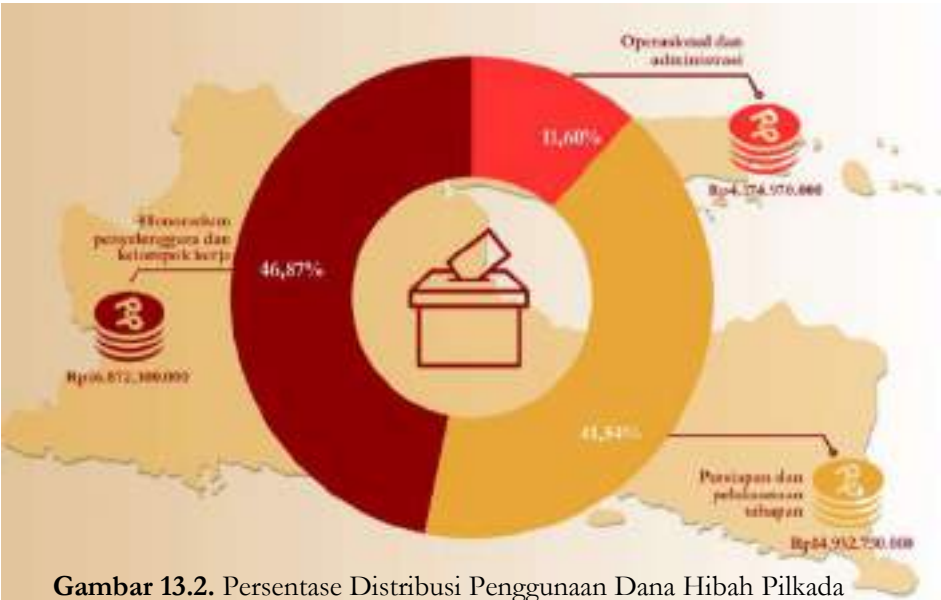
Proses perencanaan dan penganggaran Pilkada 2024 di Kabupaten Situbondo diawali dengan negosiasi Dana Hibah antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo dan Pemerintah Daerah. Proses ini dimulai sejak September 2022, di mana KPU Situbondo menginisiasi pembahasan bersama DPRD terkait kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada. Namun, proses negosiasi sempat mengalami deadlock yang cukup panjang, yakni sekitar satu tahun. Kondisi ini disebabkan oleh perbedaan pendapat antara Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan KPU Kabupaten Situbondo yang diwakili oleh Ketua KPU, terutama terkait besaran nominal hibah yang akan diberikan. Kebuntuan tersebut akhirnya dapat diatasi setelah adanya intervensi dan desakan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Pemerintah Daerah. Pada akhirnya, KPU Kabupaten Situbondo memutuskan untuk menerima nilai hibah yang ditawarkan. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pun dilakukan pada tanggal 8 Desember 2023, menandai dimulainya komitmen anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada Gambar 13.1 berikut.



Gambar 13.1. Persentase Tahapan Penyaluran Dana Hibah Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Total dana hibah yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2024 mencapai Rp36.000.000.000. Dana tersebut disalurkan dalam dua tahap pencairan, yakni pada termin pertama sebesar Rp14.400.000.000 atau setara dengan 40% dari total anggaran, dan termin kedua sebesar Rp21.600.000.000, yang mewakili 60% sisanya.

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada Gambar 13.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.



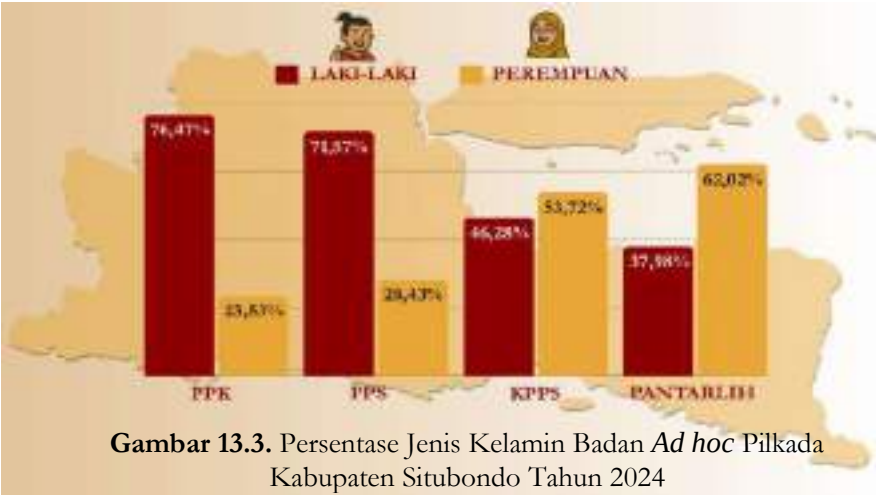
Gambar 13.2. Persentase Distribusi Penggunaan Dana Hibah Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2024 yang berjumlah Rp36.000.000.000 terbagi ke dalam tiga komponen utama pembiayaan. Pertama, sebesar Rp14.952.730.000 atau 41,54% dari total anggaran dialokasikan untuk mendukung tahapan persiapan dan pelaksanaan Pilkada, termasuk kegiatan teknis dan operasional lapangan. Kedua, komponen operasional dan administrasi perkantoran mendapatkan alokasi sebesar Rp4.174.970.000, setara dengan 11,60%, yang digunakan untuk menunjang kebutuhan penunjang kantor dan logistik internal. Terakhir, porsi terbesar yaitu Rp16.872.300.000 atau 46,87% diperuntukkan bagi pembayaran honorarium Kelompok Kerja (Pokja) dan penyelenggara pemilihan, termasuk badan *ad hoc* seperti PPK, PPS, dan KPPS. Pembagian ini mencerminkan prioritas anggaran yang berfokus pada

dukungan langsung terhadap pelaksanaan tahapan serta penghargaan atas kerja penyelenggara.

2. **Badan Ad hoc**

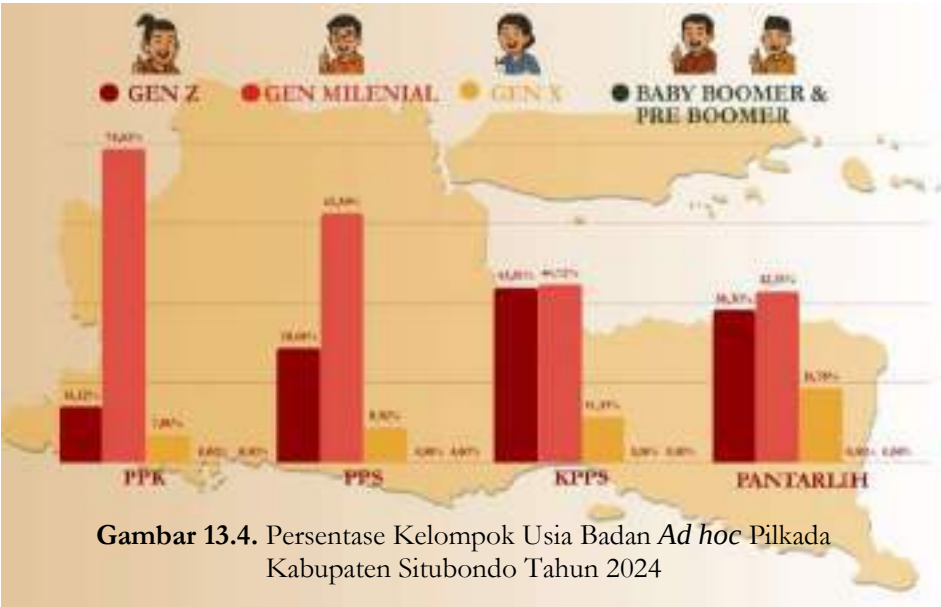
Pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024, KPU Kabupaten Situbondo membentuk badan *ad hoc* dengan jumlah keseluruhan mencapai 9.583 orang. Rincian formasi tersebut mencakup 85 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tersebar di seluruh kecamatan, 408 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bertugas di tingkat desa/kelurahan, serta 1.880 orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang menjalankan tugas pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Pembentukan badan *ad hoc* ini dilakukan melalui proses rekrutmen terbuka dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memastikan kualitas dan integritas penyelenggara di setiap tingkatan. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada Gambar 13.3.



Sebaran demografi badan *ad hoc* penyelenggara Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2024 menunjukkan keterwakilan gender yang cukup berimbang, meskipun didominasi oleh laki-laki pada jenjang struktural awal. Untuk PPK, dari total 85 orang, sebanyak 65 orang (76,47%) berjenis kelamin laki-laki dan 20 orang (23,53%) perempuan. Pada tingkat PPS yang berjumlah 408 orang, 292 orang (71,57%) merupakan laki-laki, sementara 116 orang (28,43%) adalah perempuan. Sementara itu, pada jenjang teknis lapangan seperti KPSS dan Pantarlih, keterlibatan perempuan justru lebih

dominan. Dari total 7.210 anggota KPPS, 3.873 orang (53,72%) adalah perempuan dan 3.337 orang (46,28%) laki-laki. Begitu pula pada Pantarlih, dari 1.880 orang, 1.166 orang (62,02%) adalah perempuan, sedangkan 714 orang (37,98%) laki-laki. Data ini menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan, khususnya di tingkat pelaksana langsung, yang mencerminkan komitmen KPU dalam mendorong inklusivitas dan kesetaraan gender dalam proses demokrasi.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada Gambar 13.4 berikut.

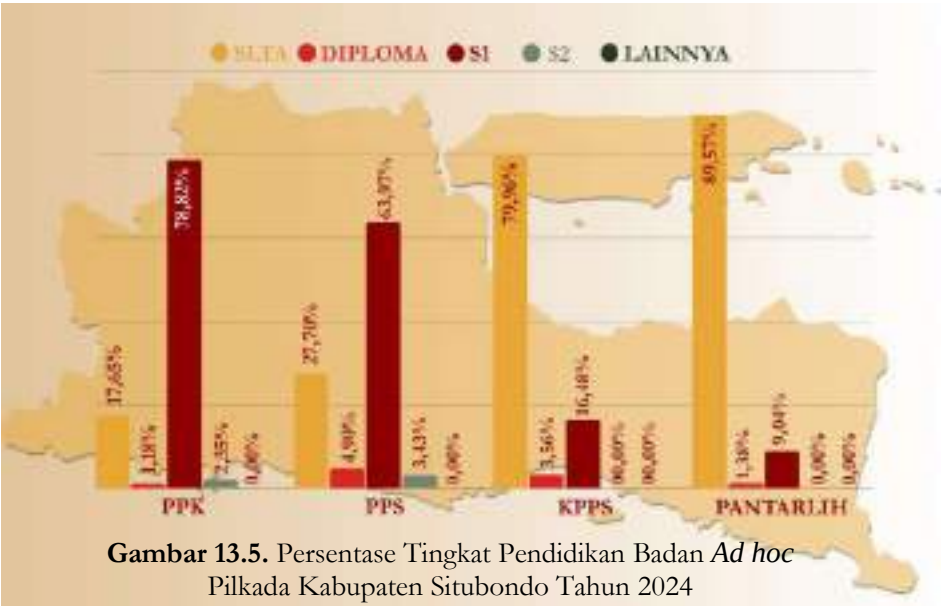


Gambar 13.4. Persentase Kelompok Usia Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Komposisi usia badan *ad hoc* penyelenggara Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2024 didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z, yang secara umum mencerminkan keterlibatan aktif generasi muda dalam proses demokrasi. Pada PPK, dari total 85 orang, sebanyak 67 orang (78,82%) berasal dari kelompok usia 28–43 tahun (generasi milenial), diikuti oleh 12 orang (14,12%) dari kelompok usia 17–27 tahun (generasi Z), dan sisanya 6 orang (7,06%) dari kelompok generasi X (44–59 tahun). Tren yang sama tampak pada PPS, di mana 255 orang (62,50%) merupakan milenial dan 117 orang (28,68%) berasal dari generasi Z. Sementara itu, pada tingkat KPPS dan Pantarlih, distribusi usia lebih merata antara generasi Z dan milenial. Dari total 7.210 anggota KPPS, 3.224 orang (44,72%) adalah milenial, diikuti oleh 3.166 orang (43,91%) generasi Z, dan

820 orang (11,37%) generasi X. Untuk Pantarlih, dari 1.880 orang, 807 orang (42,93%) berasal dari generasi milenial, 720 orang (38,30%) dari generasi Z, dan 353 orang (18,78%) dari generasi X. Tidak terdapat partisipasi dari kelompok usia *Baby Boomer* (60–78 tahun) maupun *Pre-Boomer* (>79 tahun) pada seluruh jenjang badan *ad hoc*.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *Ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Gambar 13.5.



Dari segi tingkat pendidikan, komposisi badan *ad hoc* penyelenggara Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2024 memperlihatkan variasi yang menarik antar jenjang. Pada tingkat PPK, mayoritas anggota merupakan lulusan Strata 1 (S1) sebanyak 67 orang (78,82%), diikuti oleh lulusan SLTA sebanyak 15 orang (17,65%), serta masing-masing satu orang lulusan Diploma (1,18%) dan dua orang lulusan Strata 2 (S2) atau 2,35%. Sementara itu, pada tingkat PPS, proporsi terbesar juga berasal dari lulusan S1 sebanyak 261 orang (63,97%), disusul oleh 113 orang (27,70%) lulusan SLTA, serta lulusan Diploma dan S2 masing-masing sebesar 4,90% dan 3,43%. Di jenjang teknis pelaksanaan, yakni KPPS dan Pantarlih, mayoritas anggotanya merupakan lulusan SLTA. Sebanyak 5.765 anggota KPPS (79,96%) dan 1.684 petugas Pantarlih (89,57%) memiliki latar belakang pendidikan SLTA. Lulusan S1 di KPPS tercatat sebanyak 1.188 orang (16,48%), sedangkan lulusan Diploma hanya 257 orang (3,56%). Hal yang

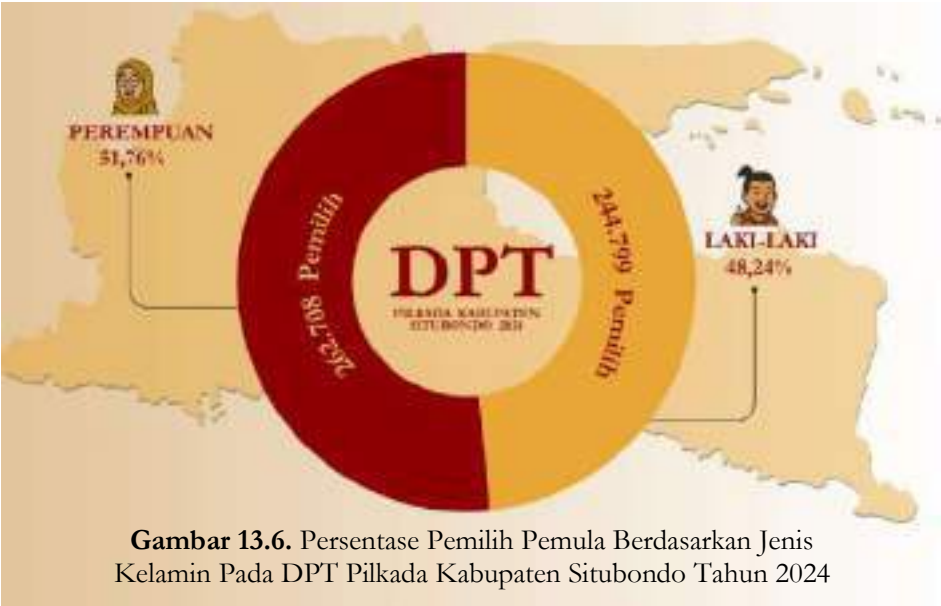
sama juga terlihat pada Pantarlih, di mana lulusan S1 hanya berjumlah 170 orang (9,04%), dan Diploma 26 orang (1,38%). Tidak terdapat anggota KPPS maupun Pantarlih yang berasal dari lulusan S2 atau kategori pendidikan lainnya.

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang inklusif, KPU Kabupaten Situbondo turut melibatkan penyelenggara dari kelompok difabel pada badan *ad hoc* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024. Pada jenjang PPK, tercatat terdapat 1 orang penyandang disabilitas fisik dari total 85 anggota PPK yang dilantik. Kehadiran penyelenggara difabel ini mencerminkan komitmen KPU terhadap prinsip kesetaraan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi dalam proses demokrasi, meskipun secara kuantitatif keterwakilannya masih perlu ditingkatkan di masa mendatang.

3. Pemutakhiran Data

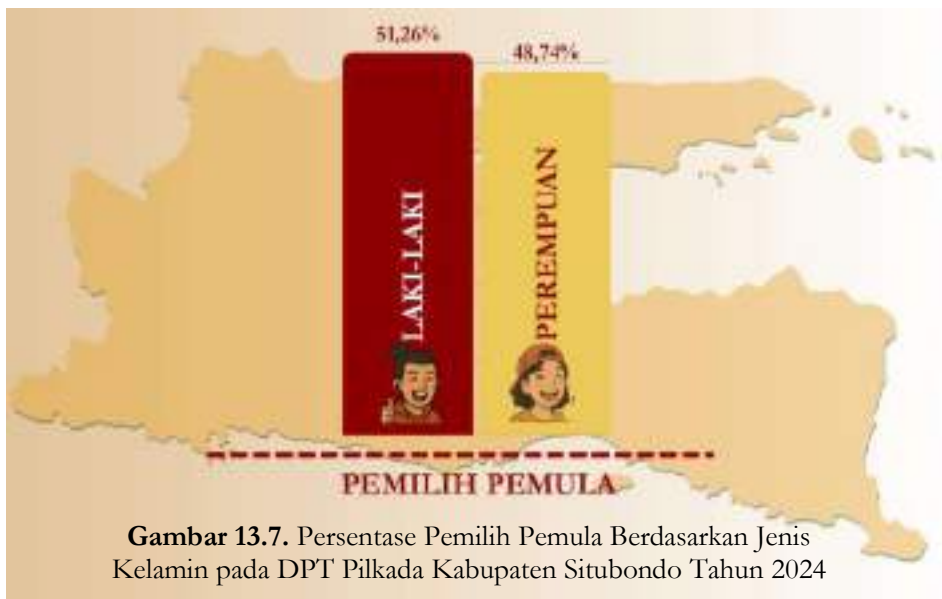
Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan krusial dalam menjamin keakuratan dan validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024. KPU Kabupaten Situbondo melaksanakan tahapan ini melalui pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilaksanakan oleh 1.880 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH) yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan pada 17 kecamatan. Proses coklit dilakukan secara door-to-door pada tanggal 24 Juni hingga 25 Juli 2024, di mana petugas melakukan verifikasi faktual langsung ke rumah pemilih. Setiap PANTARLIH dibekali dengan formulir Model A-KWK dan menggunakan aplikasi Sidalih dan E-Coklit sebagai bagian dari digitalisasi dan modernisasi sistem data pemilih. Berdasarkan hasil coklit dan sinkronisasi data, diperoleh Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi (DPHS) sebanyak 518.691 pemilih. Setelah dilakukan proses uji publik dan verifikasi administrasi, KPU Situbondo menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 509.074 pemilih. Melalui tahapan perbaikan dan klarifikasi, baik dari tanggapan masyarakat maupun rekomendasi dari Bawaslu, jumlah ini kemudian dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 507.507 pemilih. Penurunan jumlah dari DPHS ke DPT mencerminkan proses pemutakhiran yang ketat dan akuntabel, termasuk penghapusan data ganda, pencoretan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), serta pembaruan data pemilih pemula, pindah domisili, dan kelompok rentan. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis

kelamin dapat dilihat pada Gambar 13.6 berikut.



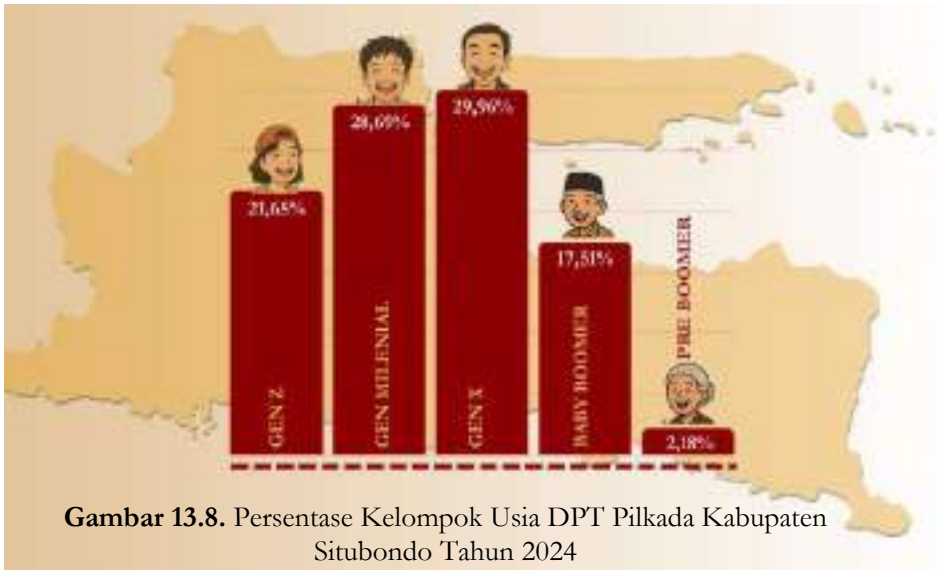
Sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah pemilih perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan pemilih laki-laki. Dari total 507.507 pemilih, sebanyak 262.708 orang (51,76%) merupakan pemilih perempuan, sedangkan 244.799 orang (48,24%) merupakan pemilih laki-laki. Komposisi ini mencerminkan peran strategis pemilih perempuan dalam menentukan arah kepemimpinan daerah, serta menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis gender dalam strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam kategori utama, yakni pemilih pemula. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 13.7 berikut.



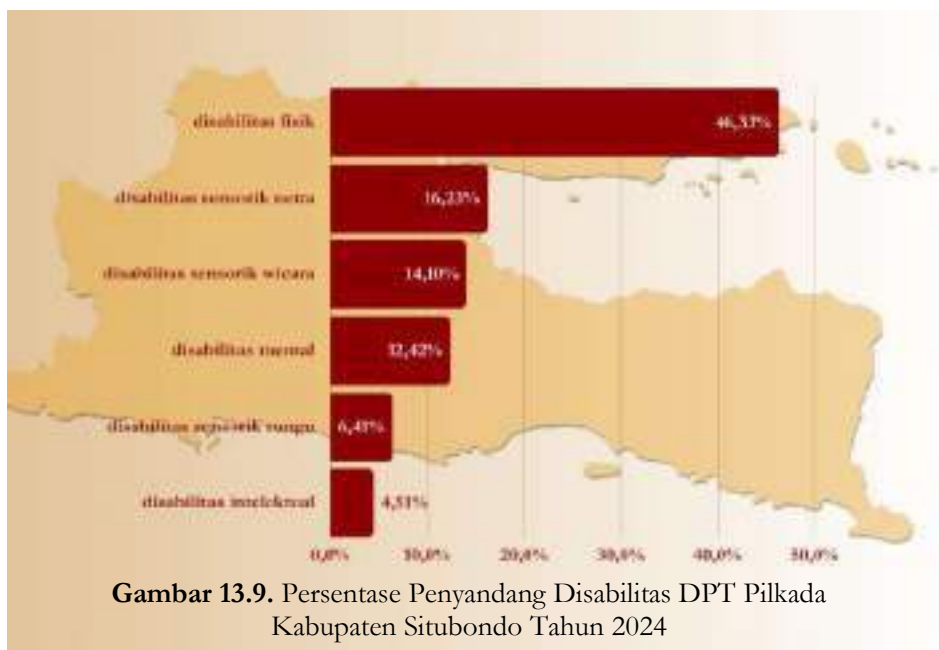
Berdasarkan status pemilih, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Situbondo Tahun 2024 terdiri atas pemilih pemula. Dari total 507.507 pemilih, sebanyak 8.736 orang (1,72%) merupakan pemilih pemula, yaitu warga yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, terdiri dari 4.478 laki-laki (51,26%) dan 4.258 perempuan (48,74%). Kehadiran pemilih pemula menjadi penanda penting akan tumbuhnya partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi lokal dalam Pilkada Serentak Jatim 2024. Keberadaan pemilih pemula menjadi perhatian khusus dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, mengingat pentingnya memberikan pemahaman yang baik mengenai hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam pemilihan umum.

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 13.8.



Berdasarkan gambar 13.8 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Situbondo Tahun 2024 menunjukkan komposisi lintas generasi yang cukup seimbang. Dari total 507.507 pemilih, kelompok usia terbesar berasal dari Generasi X (44–59 tahun) sebanyak 152.066 orang (29,96%), diikuti oleh Generasi Milenial (28–43 tahun) sebanyak 145.625 orang (28,69%), dan Generasi Z (17–27 tahun) sebanyak 109.888 orang (21,65%). Sementara itu, kelompok *Baby Boomer* (60–78 tahun) tercatat sebanyak 88.883 orang (17,51%), dan *Pre-Boomer* (>79 tahun) sebanyak 11.045 orang (2,18%). Komposisi ini menunjukkan bahwa hampir 80% pemilih berasal dari usia produktif (17–59 tahun), yang memiliki potensi tinggi dalam mempengaruhi arah kebijakan daerah melalui partisipasi elektoral. Keterwakilan generasi muda (Gen Z dan Milenial) yang mencapai hampir 50% dari total DPT juga menjadi indikator penting bagi strategi penyelenggara pilkada dalam hal komunikasi publik, pendekatan digital, dan penyediaan informasi yang relevan. Sementara itu, keberadaan pemilih lanjut usia tetap menjadi perhatian khusus dalam penyediaan fasilitas TPS yang ramah lansia dan aksesibel.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten Situbondo Tahun 2024 disajikan pada gambar 13.9, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Sebagai bagian dari komitmen terhadap penyelenggaraan pilkada yang inklusif, KPU Kabupaten Situbondo mencatat sebanyak 3.149 pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2024. Kategori disabilitas terbanyak adalah disabilitas fisik, yang berjumlah 1.459 orang (46,33%), diikuti oleh disabilitas sensorik netra sebanyak 511 orang (16,23%), dan disabilitas sensorik wicara sebanyak 444 orang (14,10%). Selanjutnya, terdapat 391 pemilih (12,42%) penyandang disabilitas mental, 202 orang (6,41%) penyandang disabilitas sensorik rungu, serta 142 orang (4,51%) penyandang disabilitas intelektual. Kehadiran data ini menjadi dasar penting bagi KPU dalam menyediakan layanan pemungutan suara yang ramah disabilitas, termasuk penempatan TPS yang aksesibel, penggunaan alat bantu khusus, serta pendampingan bagi pemilih disabilitas sesuai ketentuan perundang-undangan. Pendataan yang akurat atas kelompok pemilih rentan ini juga menunjukkan komitmen KPU terhadap penghormatan hak politik setiap warga negara, termasuk kelompok disabilitas, agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi secara setara dan bermartabat.

4. Pencalonan

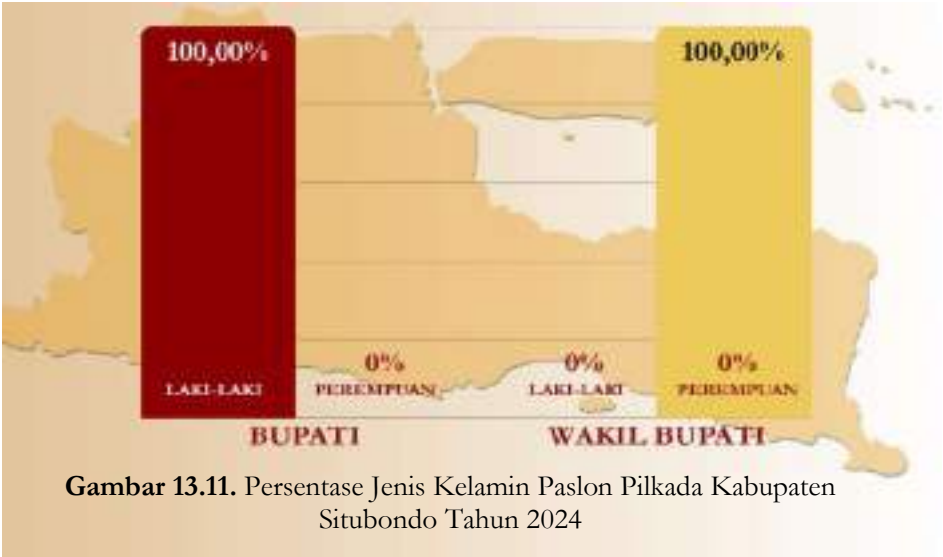
Tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pada tahap awal, KPU Kabupaten Situbondo membuka kesempatan pencalonan melalui dua jalur, yaitu jalur perseorangan dan jalur partai politik. KPU Kabupaten Situbondo menetapkan dua bakal pasangan calon yang telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan dukungan partai politik. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada gambar 13.10 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.

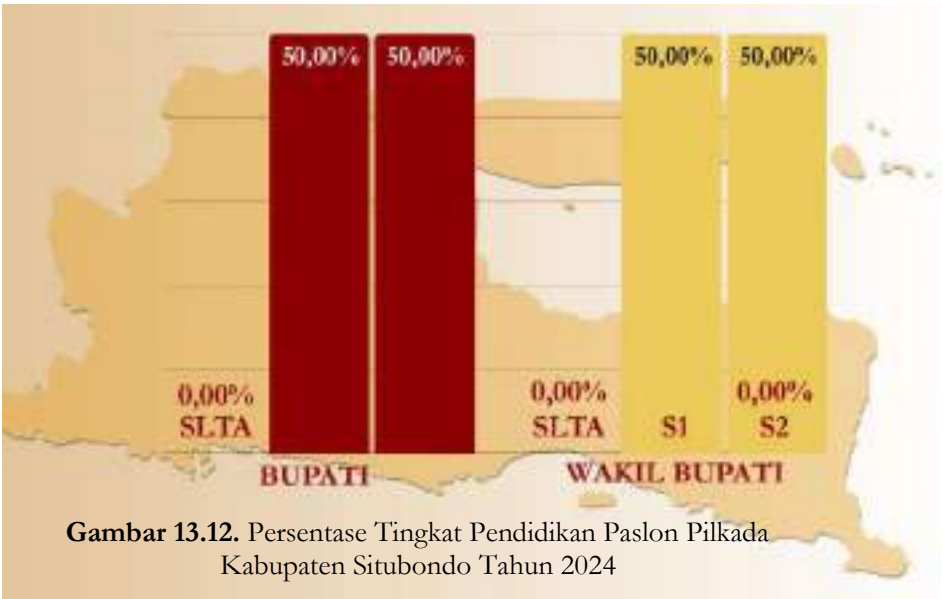


Gambar 13.10. Daftar Nama Paslon Pilkada Kabupaten Situbondo

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo disajikan pada gambar 13.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo disajikan pada gambar 13.12.



Gambar 13.11. Persentase Jenis Kelamin Paslon Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2024



Gambar 13.12. Persentase Tingkat Pendidikan Paslon Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Dalam Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2024, komposisi pasangan calon yang ditetapkan pada Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2024 mencerminkan keterwakilan gender yang seimbang. Kedua calon bupati berjenis kelamin laki-laki (100%), sementara kedua calon wakil bupati adalah perempuan (100%), sehingga secara keseluruhan terdapat dua laki-laki (50%) dan dua perempuan (50%) dalam komposisi pasangan calon. Komposisi ini menunjukkan adanya afirmasi dan partisipasi aktif perempuan dalam posisi strategis politik di tingkat daerah.

Sementara itu, seluruh calon menunjukkan latar belakang akademik yang tinggi. Sebanyak dua orang tercatat sebagai lulusan Strata Satu (S1), dan dua orang lainnya merupakan lulusan Strata Dua (S2). Masing-masing jenjang pendidikan ini terbagi merata antara calon bupati dan calon wakil bupati, dengan komposisi 50% lulusan S1 dan 50% lulusan S2. Komposisi ini mencerminkan kualitas akademik yang baik dari para calon, serta diharapkan dapat mendukung kapabilitas mereka dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Situbondo.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 13.13, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



Gambar 13.13. Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

KPU Kabupaten Situbondo melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai bagian dari tahapan strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Kegiatan ini merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 630 Tahun 2024 tentang

Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, yang membagi metode sosialisasi ke dalam dua kategori, yaitu sosialisasi secara langsung dan sosialisasi secara tidak langsung.



KPU Kabupaten Situbondo melaksanakan 10 kegiatan sosialisasi langsung melalui seminar, diskusi, dan dialog publik yang menyasar beragam segmen masyarakat, seperti pemilih pemula, pemuda, kelompok keagamaan, dan perempuan. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran kritis serta mendorong partisipasi elektoral yang inklusif. Sementara itu, sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui Kirab Maskot di 17 kecamatan, woro-woro di 136 desa, serta kampanye digital lewat media sosial yang mencakup video ajakan memilih dan informasi rekrutmen badan *ad hoc*. Perpaduan kedua metode ini menunjukkan komitmen KPU Situbondo dalam menjalankan regulasi secara inovatif serta menjangkau pemilih secara luas, guna meningkatkan literasi dan partisipasi dalam Pilkada 2024.



Gambar 13.15. Maskot Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Maskot resmi Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2024 yang diberi nama SI MESI, mengusung karakter burung merak sebagai simbol utama, terinspirasi dari satwa ikonik Taman Nasional Baluran yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Desain maskot mencerminkan bentuk dan warna merak, dilengkapi dengan Odheng Jhanggar, ikat kepala khas Situbondo, yang melambangkan kepemimpinan dan budaya lokal. Elemen pilkada seperti paku coblos, kotak suara, kertas suara, serta logo KPU dan bendera Merah Putih turut ditampilkan untuk mempertegas identitas demokrasi. Gabungan simbol-simbol ini merepresentasikan bahwa masyarakat Situbondo adalah pelaku utama Pilkada, sementara KPU hadir sebagai fasilitator yang siap mengawal proses demokrasi. Secara keseluruhan, maskot SI MESI dirancang untuk menyampaikan pesan penting kepada masyarakat Situbondo agar berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024. Ia menjadi simbol ajakan untuk datang ke TPS dan memilih berdasarkan hati nurani, sebagai wujud nyata dari pelaksanaan hak demokrasi. Seperti merak yang menjadi kebanggaan Situbondo, pemilih, penyelenggara, dan para calon adalah bagian penting dari identitas lokal yang adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang merusak semangat demokrasi.

Pelaksanaan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024, yang mengatur bahwa

jadwal kampanye dimulai maksimal tiga hari setelah penetapan pasangan calon. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, KPU Kabupaten Situbondo menetapkan jadwal kampanye selama 30 hari, yaitu mulai 25 September hingga 23 November 2024, sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 927 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye.

Dalam rangka memfasilitasi kampanye yang adil dan berimbang, KPU Kabupaten Situbondo menyelenggarakan beberapa bentuk fasilitasi kampanye, meliputi: debat publik antar pasangan calon, pencetakan bahan kampanye, penyediaan alat peraga kampanye, serta media iklan kampanye.

1. Debat Publik Antar Pasangan Calon

Debat publik diselenggarakan sebanyak tiga kali, seluruhnya dilaksanakan di studio JTV Surabaya, dengan tema sebagai berikut:

- Debat pertama pada 10 Oktober 2024, mengangkat tema *“Penguatan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Situbondo”*.
- Debat kedua pada 25 Oktober 2024, dengan tema *“Strategi Peningkatan Pelayanan Dasar sebagai Upaya Penyelesaian Persoalan Daerah”*.
- Debat ketiga pada 22 November 2024, bertema *“Menyeraskan Pembangunan Kabupaten dengan Nasional untuk Memperkokoh NKRI dan Kebangsaan”*.

2. Bahan Kampanye

KPU Situbondo mencetak 63.000 lembar bahan kampanye, yang terdiri dari selebaran, brosur, pamflet, dan poster, sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Nomor 927 Tahun 2024. Bahan ini didistribusikan secara proporsional untuk digunakan oleh pasangan calon dalam menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat.

3. Alat Peraga Kampanye (APK)

KPU Kabupaten Situbondo memfasilitasi alat peraga kampanye (APK) bagi setiap pasangan calon, yang terdiri dari 5 baliho, 2 spanduk, dan 20 umbul-umbul. Seluruh APK ditempatkan sesuai zona yang telah ditetapkan, guna menjaga ketertiban ruang publik serta memastikan prinsip kesetaraan antar kandidat tetap terjaga.

4. Media Iklan Kampanye

KPU Kabupaten Situbondo menayangkan iklan pasangan calon

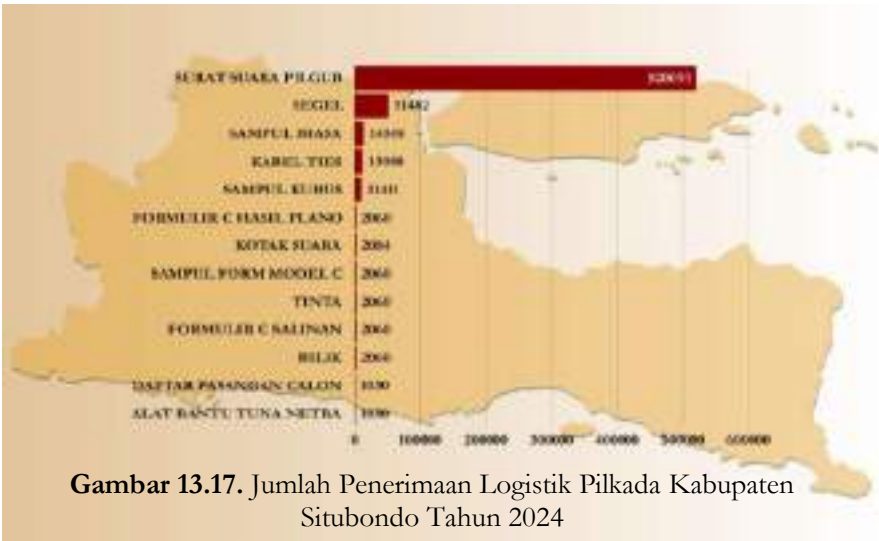
melalui berbagai media, sesuai Berita Acara Nomor 183/PL.02.4-BA/3512/2024. Jenis media yang digunakan meliputi maksimal 5 spot iklan radio, 1 materi media cetak, dan 1 video kampanye untuk televisi. Fasilitasi ini bertujuan menciptakan ruang kampanye yang adil, menjangkau pemilih secara luas, serta mendukung transparansi informasi program pasangan calon.



Gambar 13.16. Jumlah Media Sosial Kampanye Paslon Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2024

6. Logistik

Seluruh proses pengadaan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024 dilakukan melalui metode konsolidasi, sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa di lingkungan KPU. Dari 13 item logistik yang diadakan, pembagian tanggung jawab pelaksanaannya terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu pengadaan oleh KPU Kabupaten, KPU Provinsi, serta pengadaan yang dikelola secara gabungan antara KPU Kabupaten dan KPU Provinsi. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 13.17.



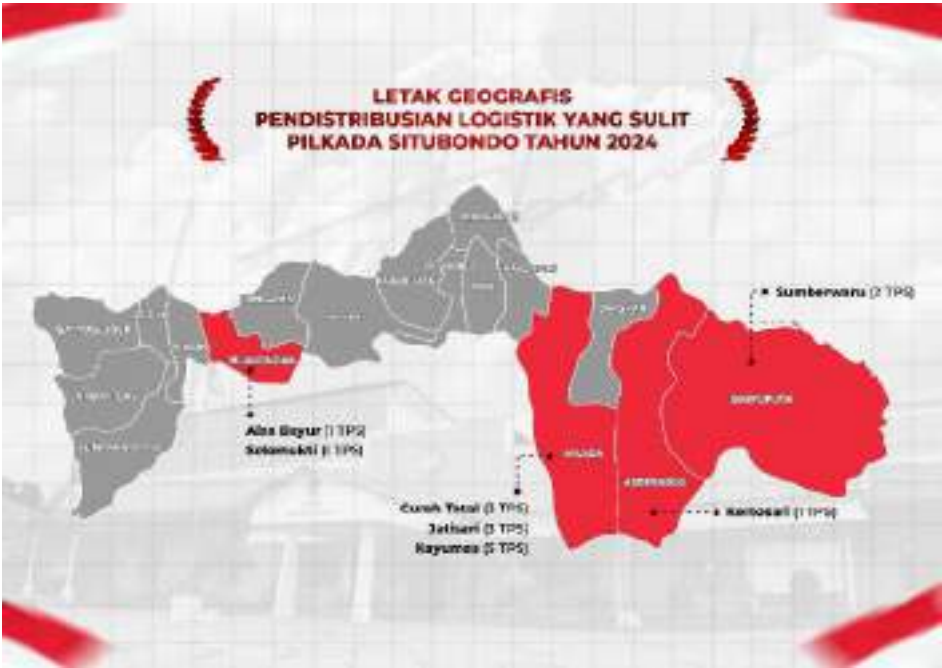
Gambar 13.17. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Distribusi logistik Pilkada 2024 ke seluruh wilayah Kabupaten Situbondo dilakukan menggunakan armada truk, mobil pickup, sepeda motor, dan speedboard yang menjangkau 17 kecamatan dan 136 desa/kelurahan. Pemilihan moda transportasi ini mempertimbangkan efisiensi waktu, daya angkut, serta kemampuan menjangkau berbagai medan wilayah, termasuk daerah dengan akses geografis terbatas.



Gambar 13.18. Moda Transportasi Distribusi Logistik Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Dalam upaya mendukung proses persiapan dan pengemasan logistik, KPU Kabupaten Situbondo menugaskan 13 orang petugas setting dan packing. Seluruh petugas tersebut berjenis kelamin laki-laki, yang telah dilatih untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pengemasan logistik sebelum proses distribusi dilakukan ke tingkat kecamatan dan desa. Sementara itu, dalam proses distribusi logistik Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2024, terdapat beberapa wilayah yang dikategorikan sebagai daerah dengan akses geografis sulit. Sehingga, menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Situbondo dalam memastikan logistik pilkada sampai ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara tepat waktu dan aman. Adapun wilayah-wilayah dengan kendala distribusi tersebut tersebar di beberapa kecamatan.



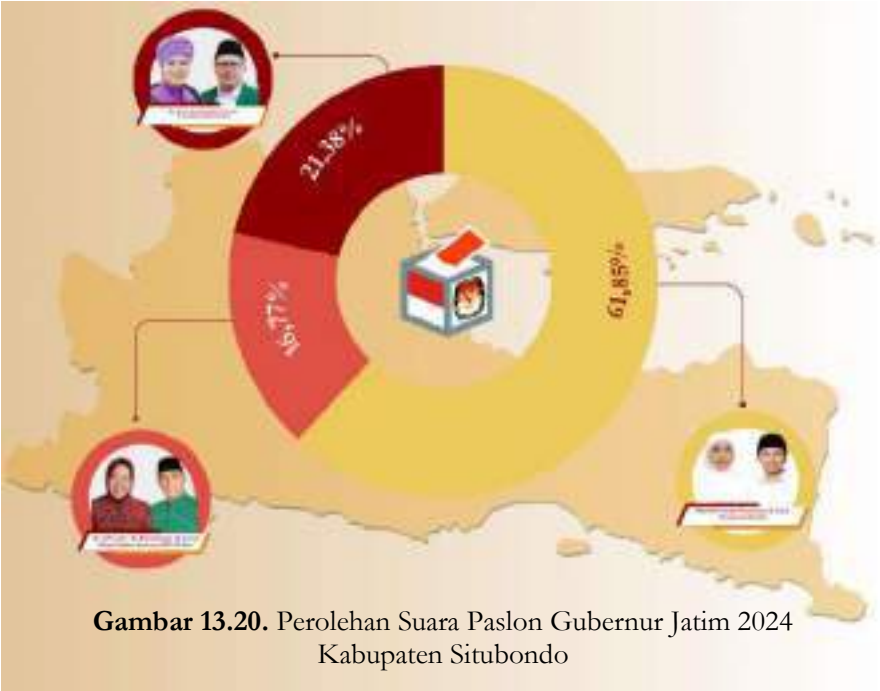
Gambar 13.19. Geografis Pendistribusian Sulit Dijangkau Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Kondisi geografis seperti jalan sempit, tanjakan terjal, dan minimnya infrastruktur di beberapa titik memerlukan strategi khusus, seperti penggunaan kendaraan ringan tambahan atau penjadwalan distribusi lebih awal. KPU Kabupaten Situbondo bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk aparat keamanan dan pemerintah desa setempat, untuk memastikan seluruh logistik tiba di lokasi sesuai jadwal dan dalam kondisi aman. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen KPU dalam menjamin

kesetaraan layanan pilkada bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau.

7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Situbondo disajikan pada gambar 13.20.



Gambar 13.20. Perolehan Suara Paslon Gubernur Jatim 2024 Kabupaten Situbondo

Hasil pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Situbondo Tahun 2024 menunjukkan bahwa pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak memperoleh dukungan suara terbanyak. Pasangan ini meraih 235.274 suara (61,85%) dari total 380.377 suara sah yang masuk. Di posisi kedua, pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah, M.Si. – H. Lukmanul Hakim, M.Si. memperoleh 81.310 suara (21,38%), disusul oleh pasangan Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T. – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), S.IP., M.Kes. yang meraih 63.793 suara (16,77%).

Komposisi hasil ini mencerminkan dominasi dukungan terhadap petahana Khofifah-Emil di Kabupaten Situbondo, serta menunjukkan pola

preferensi pemilih terhadap figur dan rekam jejak kepemimpinan. Seluruh tahapan penghitungan dan rekapitulasi dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 13.21.



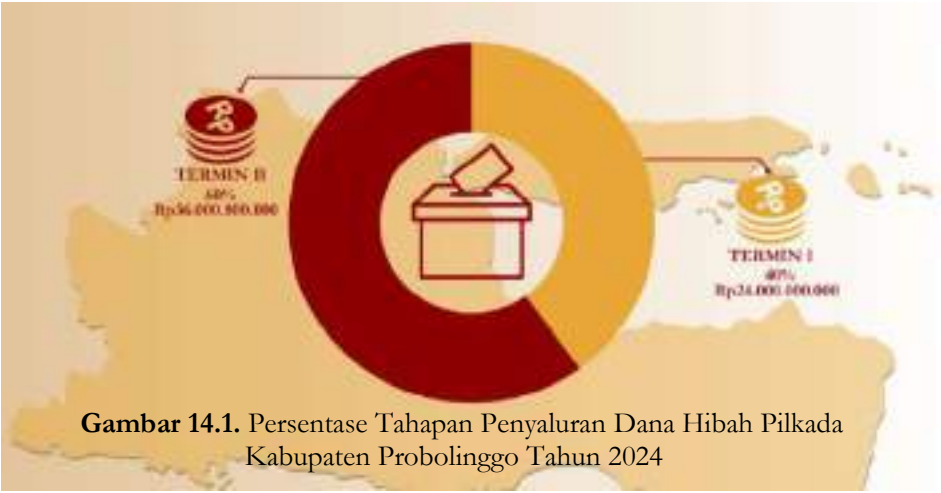
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024, pasangan Yusuf Rio Wahyu Prayogo, S.Sos–Ulfyah, S.Pd.I berhasil meraih suara terbanyak dengan perolehan 202.479 suara atau 51,75% dari total 391.271 suara sah. Sementara itu, pasangan Drs. Karna Suswandi, MM–Hj. Khoirani, S.Pd., M.H. memperoleh 188.792 suara atau 48,25%. Hasil ini menunjukkan bahwa kontestasi Pilkada Situbondo berlangsung kompetitif dengan selisih suara yang relatif tipis. Proses pemungutan dan penghitungan suara telah dilaksanakan secara terbuka dan demokratis, serta diawasi oleh berbagai pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemenangan pasangan Yusuf Rio–Ulfyah mencerminkan preferensi pemilih Situbondo terhadap figur baru yang diharapkan mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi daerah.

BAGIAN 14

KABUPATEN PROBOLINGGO

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Proses perencanaan anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Probolinggo diawali dengan pembahasan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Probolinggo. Pertemuan yang dilaksanakan pada 21 Agustus 2023 menghasilkan Kesepakatan Bersama mengenai besaran pendanaan Pilkada, serta teknis pencairannya. Dari hasil pembahasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Probolinggo menyetujui alokasi anggaran hibah untuk Pilkada 2024 sebesar Rp60.000.000.000. Anggaran tersebut kemudian dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi dasar hukum pemberian dan pencairan dana hibah dari pemerintah daerah kepada KPU Kabupaten Probolinggo. Dana tersebut digunakan untuk membiayai seluruh tahapan Pilkada, mulai dari perencanaan, pembentukan badan *ad hoc*, logistik, sosialisasi, kampanye, hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 14.1 berikut.

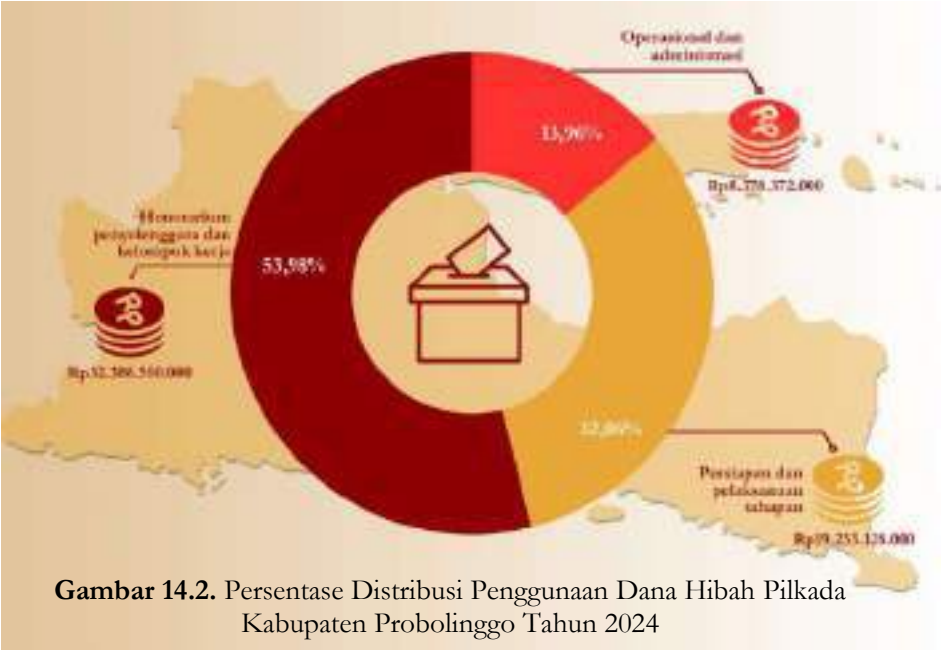


Gambar 14.1. Persentase Tahapan Penyaluran Dana Hibah Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

Dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 disalurkan dalam dua tahap pencairan. Termin pertama sebesar

Rp24.000.000.000 atau setara dengan 40% dari total anggaran dicairkan pada tahun 2023, sedangkan termin kedua sebesar Rp36.000.000.000 atau 60% sisanya dicairkan pada tahun 2024. Skema pencairan dua termin ini disusun untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran pada masing-masing tahapan Pilkada, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian. Pembagian dana secara proporsional ini bertujuan untuk menjamin kelancaran operasional dan kesinambungan seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada secara efektif dan akuntabel.

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 14.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.

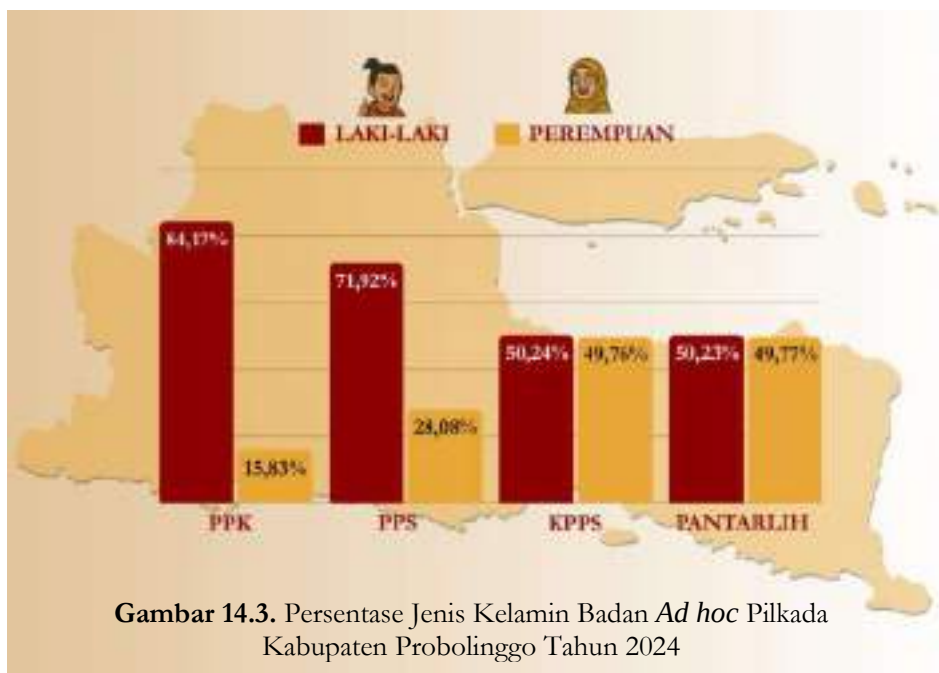


Dana hibah Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 sebesar Rp60.000.000.000 dialokasikan ke dalam tiga komponen utama pengeluaran. Sebagian besar dana, yakni sebesar Rp32.388.500.000 atau 53,98%, digunakan untuk membiayai honorarium kelompok kerja (Pokja) dan penyelenggara pemilihan, termasuk PPK, PPS, KPPS, dan badan *ad hoc* lainnya. Selanjutnya, dana sebesar Rp19.233.128.000 atau 32,06% dialokasikan untuk mendukung tahapan persiapan dan pelaksanaan Pilkada, meliputi kegiatan teknis lapangan dan operasional pilkada. Sementara itu, sebesar Rp8.378.372.000 atau 13,96% digunakan untuk mendanai operasional dan administrasi perkantoran, seperti kebutuhan

logistik internal, pengadaan sarana kerja, serta dukungan teknis penyelenggaraan. Pembagian anggaran ini mencerminkan fokus KPU Kabupaten Probolinggo dalam memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang profesional, kesiapan teknis tahapan, dan dukungan administratif yang memadai, guna menjamin terselenggaranya Pilkada secara lancar, transparan, dan demokratis.

2. Badan *Ad hoc*

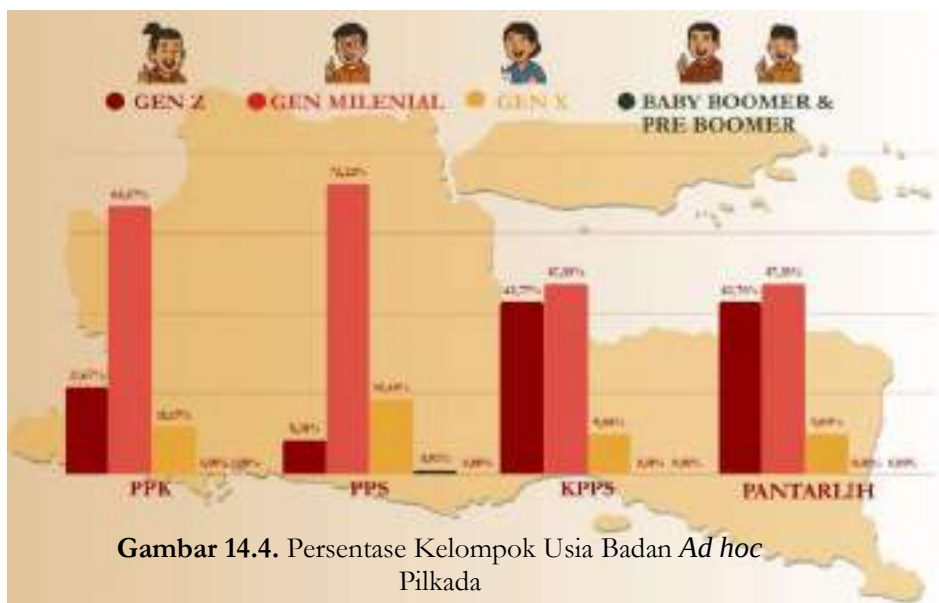
Pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Tahun 2024, KPU Kabupaten Probolinggo membentuk badan *ad hoc* secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahapan pemilihan. Total badan *ad hoc* yang dibentuk mencapai 19.988 orang, terdiri dari 120 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tersebar di seluruh kecamatan, 990 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bertugas di setiap desa/kelurahan, serta 15.651 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bertugas langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara. Selain itu, KPU Kabupaten Probolinggo juga merekrut 3.227 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH) untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) dalam rangka penyusunan daftar pemilih. Proses rekrutmen seluruh badan *ad hoc* dilaksanakan secara terbuka dan transparan, melalui tahapan seleksi administrasi dan wawancara, serta dilanjutkan dengan bimbingan teknis guna memastikan kompetensi dan integritas penyelenggara pilkada di tingkat lokal. Kehadiran badan *ad hoc* ini menjadi ujung tombak pelaksanaan Pilkada di lapangan dan berperan strategis dalam menjaga kualitas serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Kabupaten Probolinggo. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 14.3.



Sebaran demografi badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan partisipasi yang cukup merata, khususnya pada tingkat pelaksana lapangan. Pada jenjang PPK, dari total 120 anggota, terdapat 101 laki-laki (84,17%) dan 19 perempuan (15,83%). Komposisi serupa terlihat pada PPS yang terdiri dari 712 laki-laki (71,92%) dan 278 perempuan (28,08%) dari total 990 anggota. Menariknya, pada jenjang KPPS yang berjumlah 15.651 orang, distribusi gender nyaris seimbang dengan 7.863 laki-laki (50,24%) dan 7.788 perempuan (49,76%). Hal serupa juga tampak pada Pantarlih sebanyak 3.227 orang, dengan 1.621 laki-laki (50,23%) dan 1.606 perempuan (49,77%).

Data ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Probolinggo cukup tinggi, terutama pada tingkat KPPS dan Pantarlih, yang menjadi garda terdepan dalam pemutakhiran data dan pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Komposisi ini mencerminkan komitmen terhadap inklusivitas dan keterwakilan gender dalam proses demokrasi lokal.

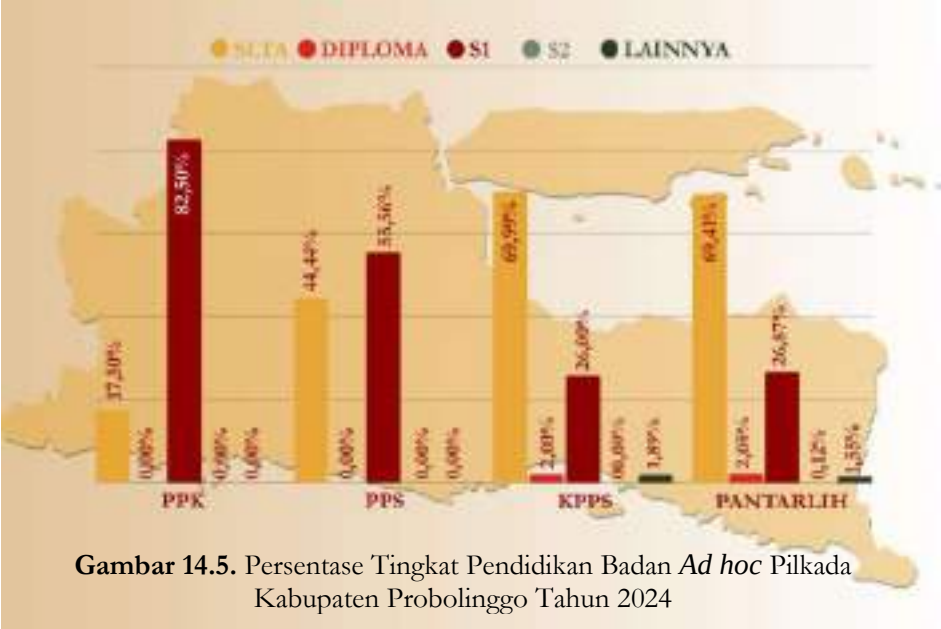
Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 14.4 berikut.



Sebaran usia badan *ad hoc* dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 menunjukkan dominasi generasi muda dan produktif. Pada jenjang PPK, mayoritas berasal dari generasi milenial (28–43 tahun) sebanyak 80 orang (66,67%), diikuti oleh generasi Z (17–27 tahun) sebanyak 26 orang (21,67%), dan generasi X (44–59 tahun) sebanyak 14 orang (11,67%). Komposisi serupa juga terlihat pada PPS, yang didominasi oleh milenial sebanyak 715 orang (72,22%), disusul generasi X sebanyak 183 orang (18,48%), dan generasi Z sebanyak 83 orang (8,38%). Terdapat pula 9 orang (0,91%) dari kalangan *Baby Boomer* (60–78 tahun). Pada jenjang teknis pelaksana, yaitu KPPS, terdapat kecenderungan yang seimbang antara generasi milenial dan Z. Dari total 15.652 anggota KPPS, sebanyak 7.411 orang (47,35%) merupakan milenial, dan 6.694 orang (42,77%) berasal dari generasi Z. Hanya 1.547 orang (9,88%) yang berasal dari generasi X. Pada Pantarlih, di mana 1.528 orang (47,35%) merupakan milenial dan 1.380 orang (42,76%) adalah generasi Z. Sementara generasi X hanya mencakup 319 orang (9,89%). Data ini menunjukkan bahwa dominasi generasi muda, khususnya generasi milenial dan Z, menjadi tulang punggung penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Probolinggo. Keterlibatan aktif generasi muda ini mencerminkan semangat regenerasi, adaptasi terhadap teknologi informasi, serta peran penting mereka dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *Ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada

gambar 14.5.



Gambar 14.5. Persentase Tingkat Pendidikan Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

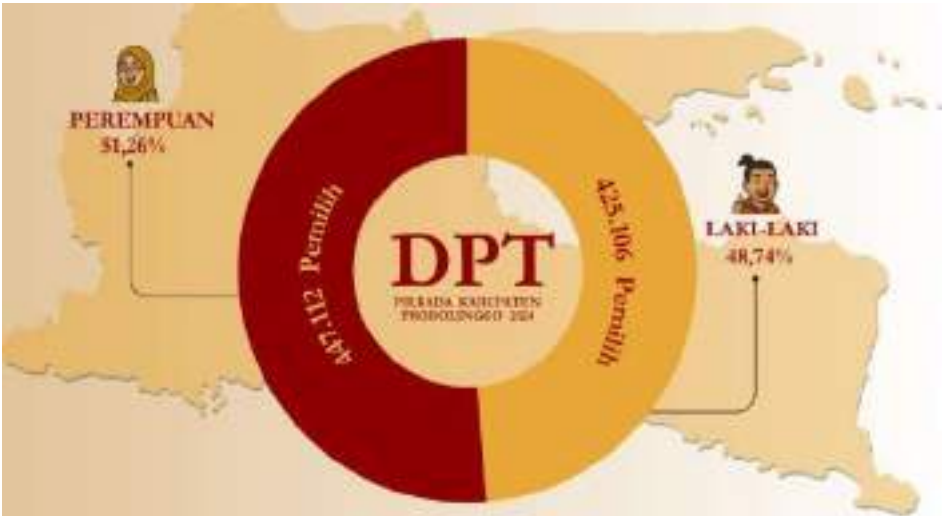
Dari sisi tingkat pendidikan, komposisi badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 menunjukkan bahwa mayoritas anggota berasal dari jenjang pendidikan menengah atas dan sarjana. Pada tingkat PPK, sebagian besar atau 99 orang (82,50%) merupakan lulusan Strata Satu (S1), sementara sisanya sebanyak 21 orang (17,50%) lulusan SLTA. Komposisi serupa juga terlihat pada PPS, di mana 550 orang (55,56%) berlatar belakang pendidikan S1 dan 440 orang (44,44%) berasal dari SLTA. Sementara itu, pada jenjang teknis seperti KPPS dan Pantarlih dominasi lulusan SLTA cukup meningkat. Dari total 15.652 anggota KPPS, sebanyak 10.955 orang (69,99%) merupakan lulusan SLTA, disusul oleh 4.069 orang (26,00%) lulusan S1. Terdapat pula lulusan diploma (313 orang atau 2,00%), S2 (19 orang atau 0,12%), dan kategori lainnya (296 orang atau 1,89%). Komposisi yang sama juga terlihat pada Pantarlih, dengan 2.240 orang (69,41%) lulusan SLTA, 867 orang (26,87%) lulusan S1, serta persentase kecil dari lulusan diploma (66 orang atau 2,05%) dan S2 (4 orang atau 0,12%). Data ini menunjukkan bahwa pelibatan badan *ad hoc* di Kabupaten Probolinggo cukup inklusif dari sisi latar belakang pendidikan, dengan porsi besar berasal dari pendidikan menengah atas dan sarjana. Keterlibatan lulusan SLTA yang dominan di tingkat pelaksana lapangan juga mencerminkan upaya pemberdayaan sumber daya lokal dalam penyelenggaraan demokrasi.

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang inklusif, KPU

Kabupaten Probolinggo turut melibatkan penyelenggara dari kelompok difabel pada badan *ad hoc* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Tahun 2024. Pada jenjang PPS, tercatat terdapat 2 orang penyandang disabilitas fisik dari total 990 anggota PPS yang dilantik. Kehadiran penyelenggara difabel ini mencerminkan komitmen KPU terhadap prinsip kesetaraan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi dalam proses demokrasi, meskipun secara kuantitatif keterwakilannya masih perlu ditingkatkan di masa mendatang.

3. Pemutakhiran Data

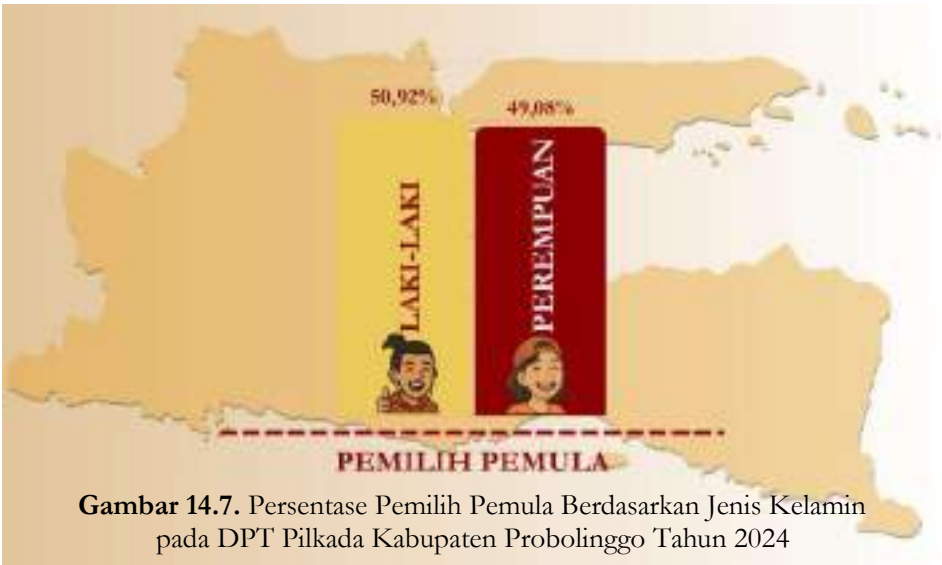
Dalam tahapan pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Probolinggo, KPU telah melalui proses berjenjang yang dimulai dari penetapan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DPHP) sebanyak 875.724 jiwa. Setelah dilakukan verifikasi dan pencermatan lebih lanjut, jumlah ini kemudian mengalami penyesuaian menjadi 873.379 jiwa yang tercatat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Proses ini dilanjutkan dengan perbaikan dan masukan masyarakat hingga akhirnya ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 872.218 pemilih. Penurunan jumlah ini mencerminkan upaya penyaringan yang cermat demi memastikan hanya pemilih yang memenuhi syarat yang tercantum dalam DPT, guna menjamin kualitas dan integritas pemilihan di Kabupaten Probolinggo. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 14.6 berikut.



Gambar 14.6. Persentase Jenis Kelamin DPT Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

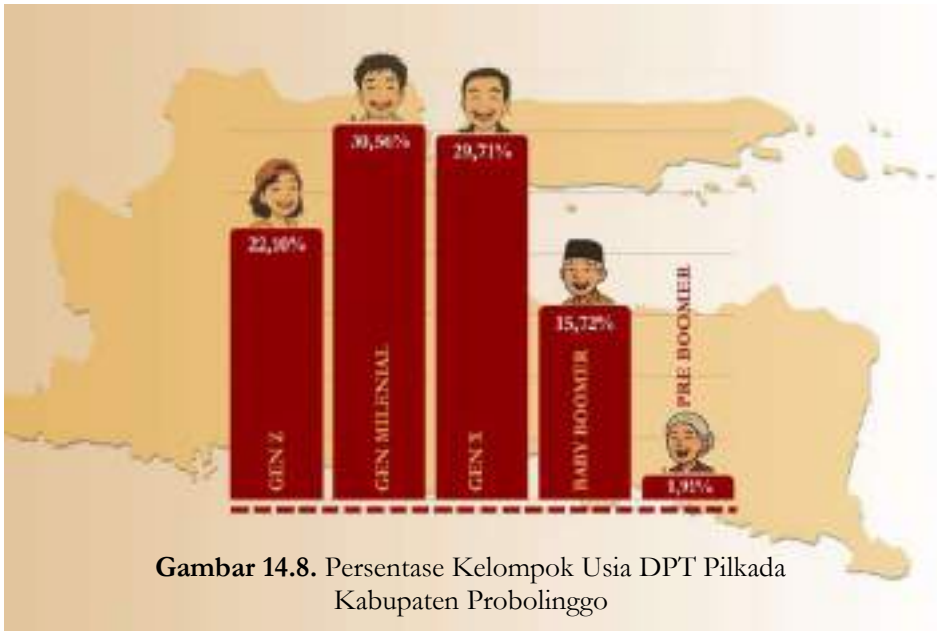
Sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Probolinggo berdasarkan jenis kelamin menunjukkan komposisi yang relatif seimbang, dengan sedikit dominasi pemilih perempuan. Dari total 872.218 pemilih, terdapat 425.106 pemilih laki-laki atau sekitar 48,74%, sementara 447.112 pemilih perempuan tercatat sebanyak 51,26%. Data ini mencerminkan partisipasi yang merata antar gender, sekaligus menunjukkan potensi signifikan pemilih perempuan dalam menentukan hasil Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Probolinggo.

Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam kategori utama, yakni pemilih pemula. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 14.7 berikut.



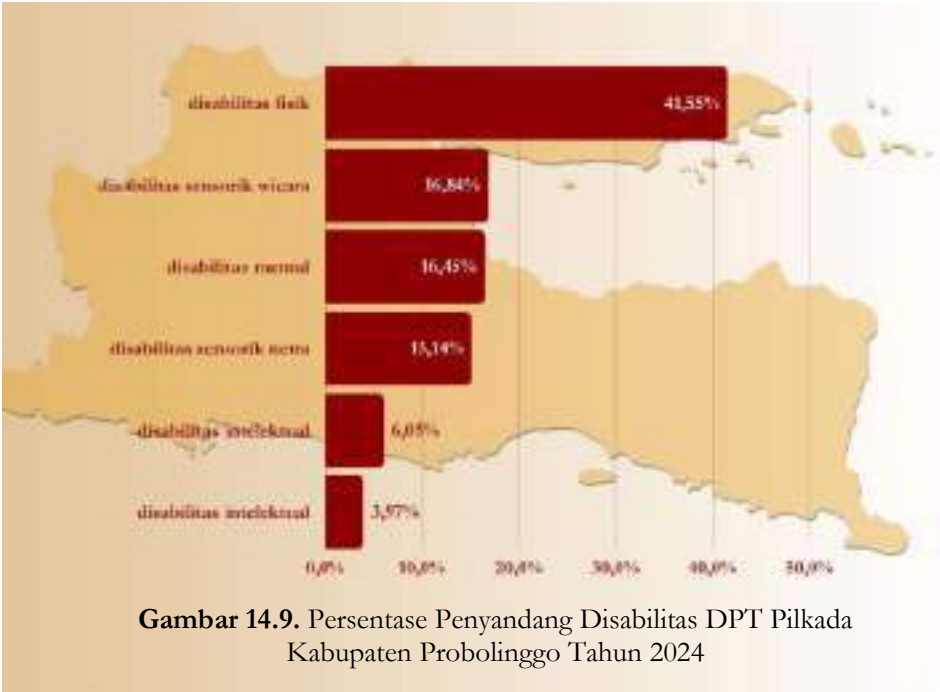
Sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Probolinggo berdasarkan status pemilih menunjukkan bahwa dari total 872.218 pemilih, yang merupakan pemilih pemula, yakni sebanyak berjumlah 13.585 orang, terdiri dari 6.918 laki-laki (50,92%) dan 6.667 perempuan (49,08%). Data ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pemula di Pilkada kabupaten probolinggo didominasi oleh pemilih laki-laki, meskipun selisihnya tidak terlalu signifikan. Kehadiran pemilih pemula menjadi penanda penting akan tumbuhnya partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi lokal dalam Pilkada Serentak Jatim 2024.

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 14.8.



Sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Probolinggo berdasarkan kelompok usia pada Pilkada Serentak 2024 menunjukkan bahwa mayoritas pemilih berasal dari generasi milenial (usia 28–43 tahun), sebanyak 266.538 orang atau 30,56% dari total DPT. Disusul oleh generasi X (usia 44–59 tahun) sebanyak 259.153 orang (29,71%), dan generasi Z (usia 17–27 tahun) sebanyak 192.749 orang (22,10%). Adapun generasi *Baby Boomer* (usia 60–78 tahun) tercatat sebanyak 137.110 orang (15,72%), dan sisanya berasal dari generasi *Pre-Boomer* (di atas 79 tahun) sebanyak 16.668 orang (1,91%). Data ini menunjukkan dominasi generasi produktif dalam struktur pemilih, yang berpotensi memengaruhi dinamika dan orientasi kampanye Pilkada.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 disajikan pada gambar 14.9, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Sebaran demografi pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Probolinggo pada Pilkada Serentak 2024 mencatat total sebanyak 3.124 pemilih. Dari jumlah tersebut, kategori disabilitas fisik mendominasi dengan 1.298 orang atau 41,55% dari total disabilitas. Selanjutnya, disabilitas sensorik wicara sebanyak 526 orang (16,84%), diikuti oleh disabilitas mental sebanyak 514 orang (16,45%), dan disabilitas sensorik netra sebanyak 473 orang (15,14%). Sementara itu, disabilitas intelektual tercatat sebanyak 189 orang (6,05%) dan disabilitas sensorik rungu sebanyak 124 orang (3,97%). Pendataan yang akurat atas kelompok pemilih rentan ini juga menunjukkan komitmen KPU terhadap penghormatan hak politik setiap warga negara, termasuk kelompok disabilitas, agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi secara setara dan bermartabat.

4. Pencalonan

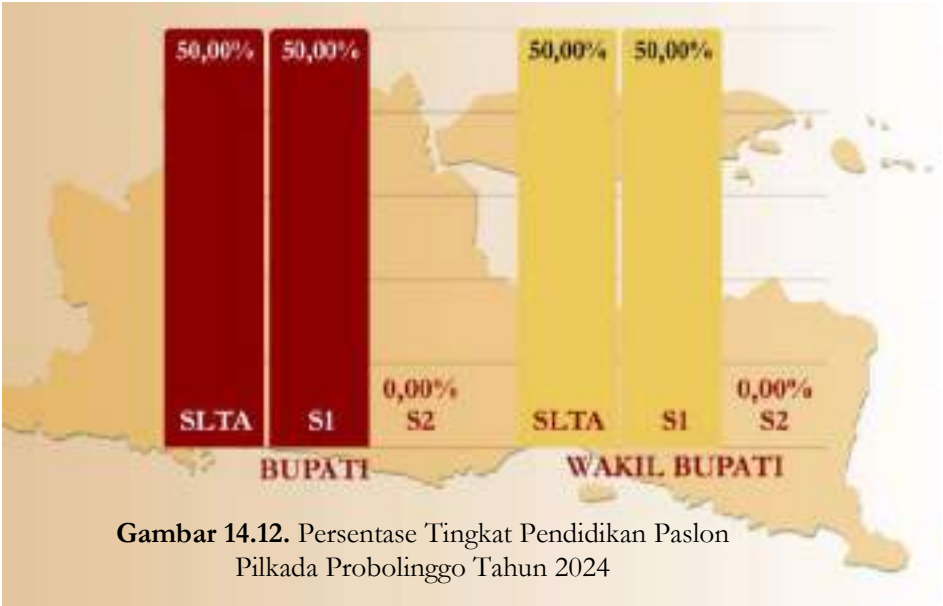
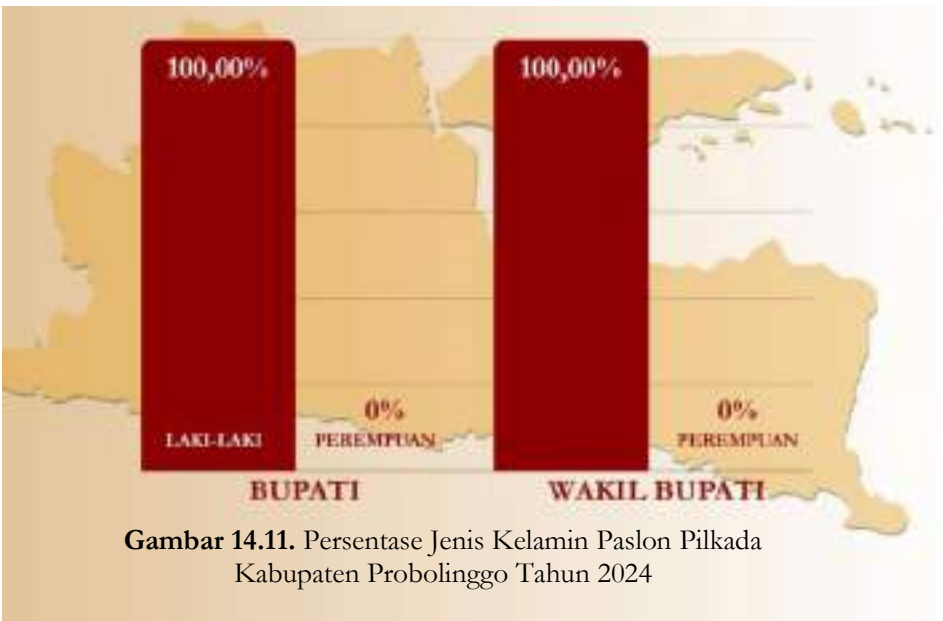
Tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Ponorogo, terdapat dua pasangan calon yang ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Kedua

pasangan calon tersebut telah melalui proses verifikasi administrasi dan faktual yang ketat, meliputi persyaratan pencalonan, pemeriksaan dokumen, serta klarifikasi kebenaran dan keabsahan data. Proses ini dilakukan guna memastikan seluruh calon memenuhi ketentuan perundang-undangan serta memiliki kapasitas, integritas, dan kelayakan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada gambar 14.10 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.



Gambar 14.10. Daftar Nama Paslon Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo disajikan pada gambar 14.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo disajikan pada gambar 14.12.



Komposisi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati didominasi oleh laki-laki. Tercatat sebanyak 4 orang calon yang terdiri dari 2 calon Bupati dan 2 calon Wakil Bupati, semuanya berjenis kelamin laki-laki. Dengan demikian, komposisi jenis kelamin menunjukkan bahwa 100% paslon adalah laki-laki dan tidak terdapat calon perempuan baik pada posisi Bupati maupun Wakil Bupati.

Sementara itu, mayoritas pasangan calon memiliki latar belakang pendidikan menengah atas (SLTA) dan sarjana (S1). Baik untuk posisi Bupati maupun Wakil Bupati, masing-masing terdapat 1 calon dengan pendidikan SLTA dan 1 calon dengan pendidikan S1. Tidak terdapat calon dengan pendidikan S2 atau lebih tinggi. Secara total, dari 4 orang calon, 2 orang (50%) berpendidikan SLTA dan 2 orang (50%) berpendidikan S1.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 14.13, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



Gambar 14.13. Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 serta mendorong partisipasi pemilih yang aktif dan cerdas. Sosialisasi dilakukan secara masif, menyeluruh, dan menysasar semua lapisan

masyarakat. Sepanjang tahapan Pilkada, KPU Kabupaten Probolinggo melaksanakan 15 kegiatan sosialisasi melalui 7 metode utama.



Gambar 14.14. Rincian Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

Selain itu KPU Kabupaten Probolinggo juga mengenalkan maskot Pilkada Serentak 2024 yang digunakan sebagai maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Probolinggo yang diberi nama ”Si Tengger”.



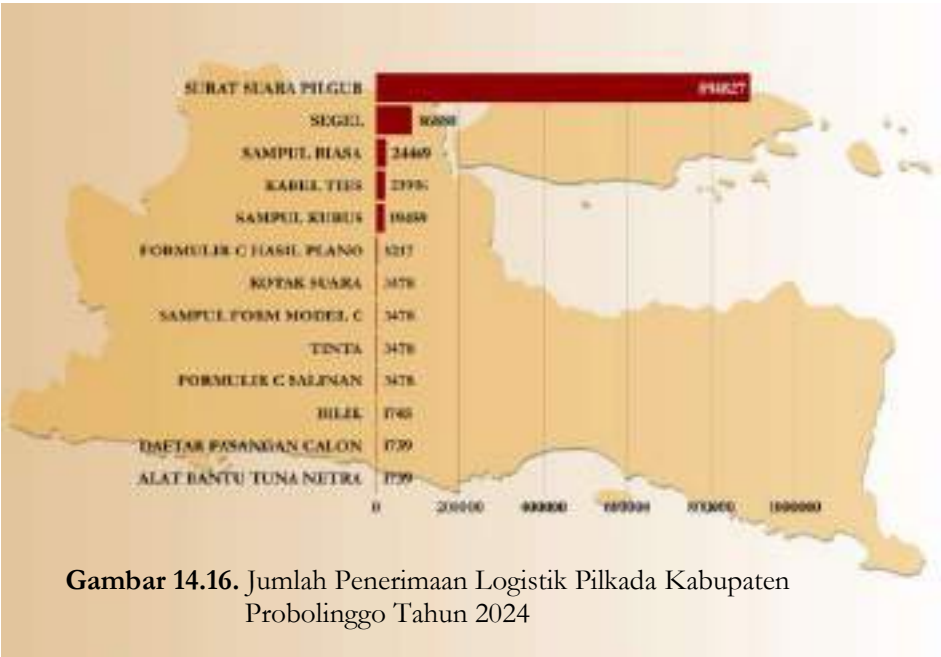
Gambar 14.15. Maskot Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

Nama "Si Tengger" terinspirasi dari tokoh legenda lokal, yaitu Roro Anteng dan Joko Seger, yang kemudian disingkat menjadi Tengger. Dalam konteks ini, "Anteng" dimaknai sebagai *damai* dan *tenang*, sedangkan "Seger" mengandung arti *ceria*, *bermartabat*, dan *bugar*. Makna tersebut diangkat sebagai harapan dan refleksi nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Probolinggo. Pilkada diharapkan berjalan dengan suasana damai, tenang, dan kondusif, meskipun terdapat perbedaan pilihan politik di tengah masyarakat. Lebih dari itu, pilkada juga diharapkan menjadi pesta demokrasi yang ceria, menggembirakan, dan menjunjung tinggi martabat, di mana setiap pilihan dihargai dan setiap warga merasa bugar serta bersemangat dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan semangat "Si Tengger", KPU Kabupaten Probolinggo ingin menanamkan nilai-nilai demokrasi yang beradab, menghormati perbedaan, serta menguatkan kebersamaan, demi mewujudkan pilkada yang berkualitas dan berintegritas.

Pelaksanaan tahapan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kegiatan kampanye berlangsung mulai dari tanggal yang ditentukan hingga menjelang masa tenang, dengan berbagai bentuk aktivitas yang difasilitasi oleh KPU demi menciptakan ruang partisipasi yang adil, setara, dan berintegritas bagi seluruh pasangan calon. Sebagai bentuk fasilitasi dari penyelenggara pilkada, KPU Kabupaten Probolinggo telah menyediakan berbagai alat peraga kampanye (APK) seperti baliho, spanduk, dan umbul-umbul yang tersebar di titik-titik strategis wilayah kabupaten. Selain itu, iklan kampanye melalui media massa (cetak, elektronik, dan online) juga difasilitasi oleh KPU sebagai bentuk pemerataan informasi kepada publik terkait visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon. Salah satu agenda penting dalam tahapan kampanye adalah debat publik pasangan calon yang dilaksanakan dua kali. Debat ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menilai langsung visi, misi, dan komitmen calon kepala daerah, serta disiarkan melalui berbagai media, termasuk live streaming di kanal resmi KPU. Secara keseluruhan, kampanye berlangsung tertib dan demokratis, dengan partisipasi aktif pasangan calon dan tim kampanye yang menaati aturan serta menyampaikan pesan secara santun. Kampanye juga berperan sebagai wahana pendidikan politik bagi pemilih agar dapat menentukan pilihan secara cerdas.

6. Logistik

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, KPU Kabupaten Probolinggo telah menyiapkan seluruh kebutuhan logistik pemilihan secara sistematis dan tepat waktu. Pengadaan logistik dilakukan melalui mekanisme *e-purchasing* dan penyediaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mencakup kebutuhan surat suara, kotak suara, bilik suara, segel, formulir, dan perlengkapan TPS lainnya. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 14.16.

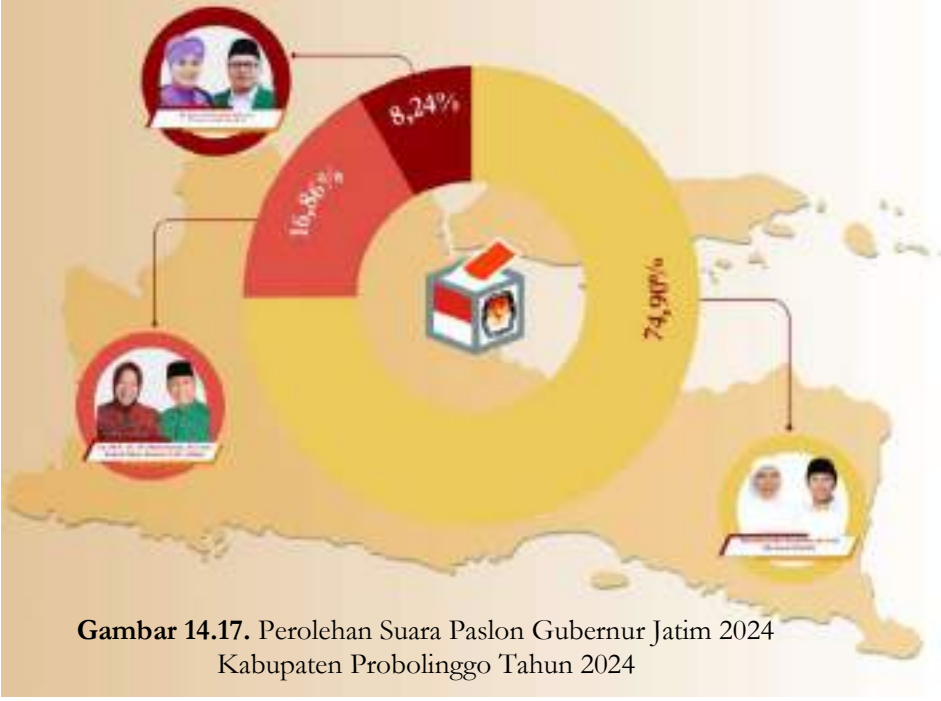


Distribusi logistik Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Situbondo dilakukan dengan memanfaatkan berbagai moda transportasi yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah dan jangkauan masing-masing wilayah kerja PPK, PPS, dan TPS. KPU Kabupaten Situbondo tidak menggunakan moda udara seperti pesawat atau helikopter, tetapi lebih mengandalkan moda darat dan laut. Secara keseluruhan, distribusi logistik ke tingkat PPK menggunakan 36 unit mobil truk, kemudian ke tingkat PPS didukung oleh 41 unit mobil truk, 20 unit mobil pick-up, serta 2 unit sepeda motor. Sementara untuk distribusi hingga ke tingkat TPS, digunakan 15 unit mobil truk, 122 unit mobil pick-up, 294 unit sepeda motor, dan 2 unit perahu/speedboat untuk menjangkau wilayah kepulauan atau daerah yang hanya bisa diakses melalui jalur air. Penggunaan berbagai moda ini menunjukkan komitmen KPU Situbondo dalam menjamin kelancaran dan

ketepatan waktu distribusi logistik ke seluruh pelosok, termasuk wilayah dengan akses yang sulit. Seluruh proses pengiriman dilakukan secara terencana dan berjenjang dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, keamanan, dan akurasi guna mendukung terselenggaranya pemilihan yang lancar dan terpercaya.

7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Probolinggo disajikan pada gambar 14.17.

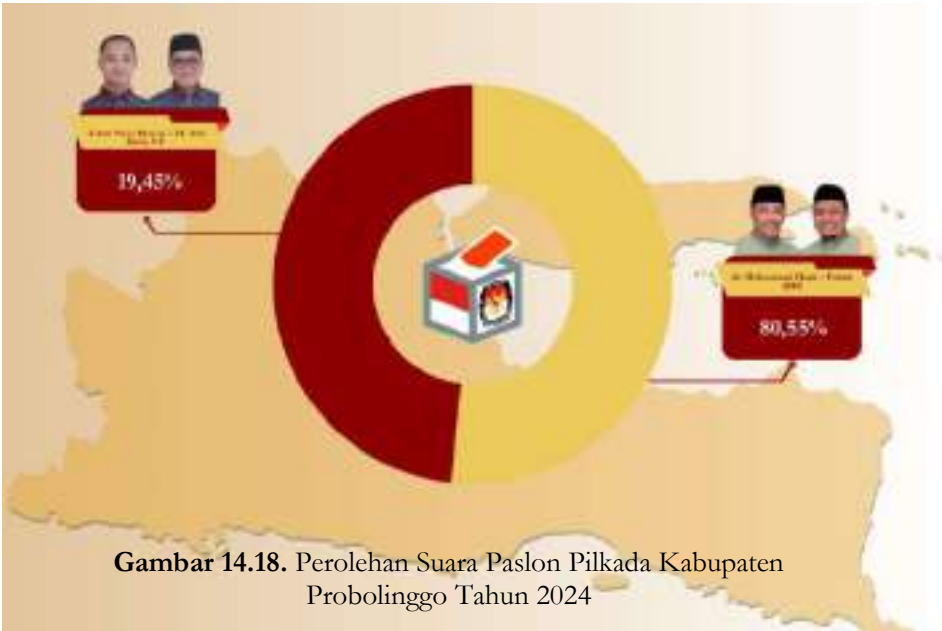


Gambar 14.17. Perolehan Suara Paslon Gubernur Jatim 2024 Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestjanto Dardak memperoleh dukungan suara tertinggi, yaitu sebanyak 448.221 suara atau 74,90% dari total suara sah. Pasangan ini unggul secara signifikan dari dua pasangan calon lainnya. Pasangan Dr. (H.C.) Ir. Tri Rismaharini, M.T. – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), S.IP., M.Kes. menempati posisi kedua dengan perolehan 100.872 suara atau 16,86%, sedangkan pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah, M.Si. – H.

Lukmanul Hakim, M.Si. memperoleh 49.297 suara atau 8,24%. Secara keseluruhan, total suara sah yang masuk dalam Pilgub di Kabupaten Probolinggo mencapai 598.390 suara. Hasil ini mencerminkan dominasi dukungan terhadap pasangan petahana Khofifah–Emil sekaligus menunjukkan tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemilihan kepala daerah tingkat provinsi.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 14,18.



Gambar 14.18. Perolehan Suara Paslon Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 diikuti oleh dua pasangan calon. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, pasangan dr. Mohammad Haris – Fahmi AHZ meraih kemenangan telak dengan memperoleh 492.212 suara atau 80,55% dari total suara sah. Sementara itu, pasangan Zulmi Noor Hasani – H. Abd Rasit, S.E memperoleh 118.827 suara atau 19,45%, menempati posisi kedua dalam kontestasi ini. Secara keseluruhan, jumlah suara sah yang terkumpul mencapai 611.039 suara. Hasil rekapitulasi ini mencerminkan kuatnya dukungan publik terhadap pasangan dr. Mohammad Haris – Fahmi AHZ, sekaligus menandai kepercayaan masyarakat dalam melanjutkan kepemimpinan daerah ke depan.

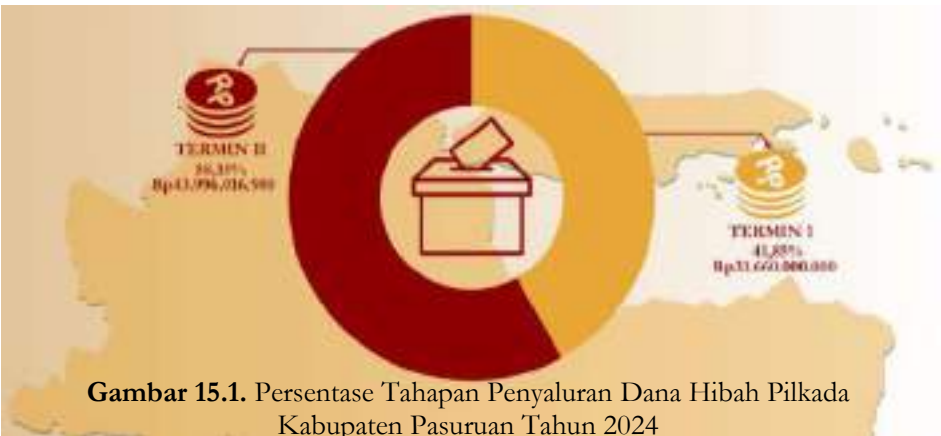
BAGIAN 15

KABUPATEN PASURUAN

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Sebagai bagian dari mandat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan tahapan perencanaan dan penganggaran sebagai landasan awal dalam menjalankan seluruh proses pilkada tahun 2024. Tahapan ini mencakup penyusunan kebutuhan pembiayaan kegiatan pemilihan, mulai dari perencanaan teknis, pembentukan badan *ad hoc*, penyediaan logistik, hingga kegiatan sosialisasi dan kampanye. Seluruh perencanaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan pertanggungjawaban anggaran.

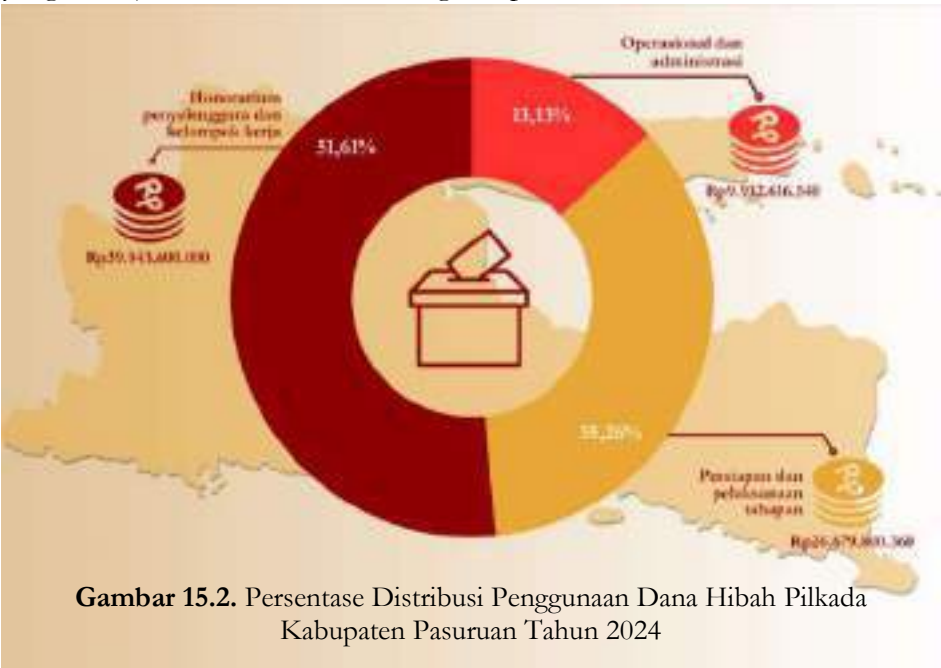
Puncak dari proses perencanaan dan penganggaran ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU Kabupaten Pasuruan dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada tanggal 21 September 2023. Penandatanganan ini tertuang dalam NPHD Nomor 120.22/1091.a/424.104/2023 dan Nomor 1450/KU.07-NK/3514/2023. Melalui NPHD tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara resmi mengalokasikan dana hibah sebagai bentuk dukungan anggaran terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024. Total dana hibah yang dialokasikan untuk pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Pasuruan sebesar Rp75.656.016.900. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 15.1 berikut.



Gambar 15.1. Persentase Tahapan Penyaluran Dana Hibah Pilkada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Distribusi dana hibah Pilkada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disalurkan dalam dua termin, yaitu Termin 1 sebesar Rp31.660.000.000 atau 41,85% dari total anggaran, yang digunakan untuk mendukung tahapan awal seperti pembentukan badan *ad hoc* dan kegiatan sosialisasi. Sementara itu, Termin 2 sebesar Rp43.996.016.900 atau 58,15%, digunakan untuk menunjang pelaksanaan tahapan inti seperti pengadaan dan distribusi logistik, kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara. Penyaluran dana hibah yang terstruktur ini menjadi bukti nyata sinergi antara KPU dan Pemerintah Daerah dalam menjamin kelancaran dan integritas penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Pasuruan.

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 15.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.



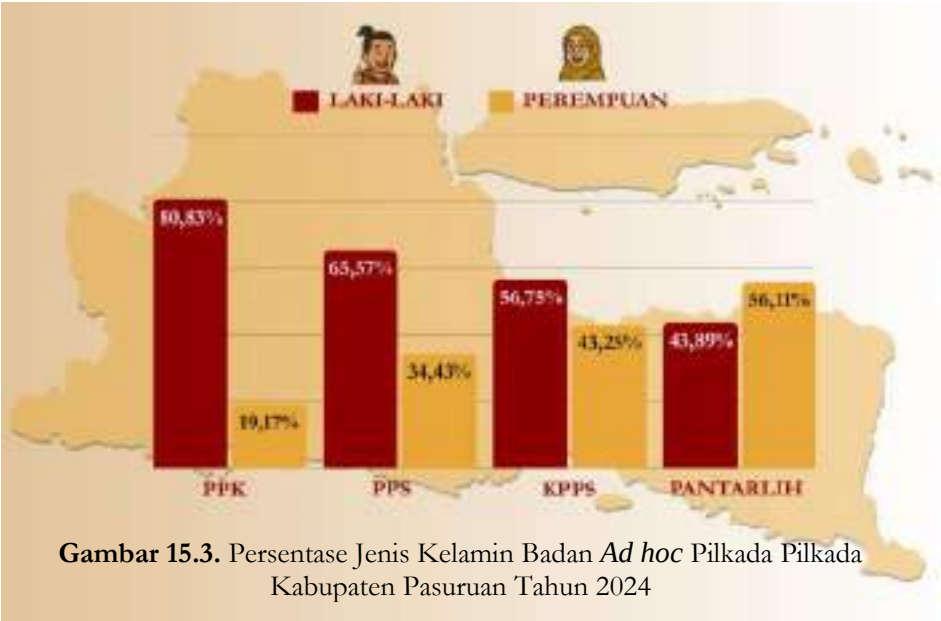
Gambar 15.2. Persentase Distribusi Penggunaan Dana Hibah Pilkada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Dana hibah Pilkada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 tiga komponen utama. Pertama, sebesar Rp26.679.800.360 atau 35,26% dialokasikan untuk mendukung tahapan persiapan dan pelaksanaan, yang mencakup kegiatan teknis seperti penyusunan data pemilih, logistik, serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Kedua, sebesar Rp9.932.616.540 atau 13,13% digunakan untuk mendanai kebutuhan operasional dan administrasi perkantoran, termasuk pengelolaan sumber daya, fasilitas, dan kebutuhan rutin sekretariat. Ketiga, komponen terbesar yaitu Rp39.043.600.000 atau 51,61%

dialokasikan untuk pembayaran honorarium, yang mencakup kompensasi bagi penyelenggara pilkada *ad hoc* seperti PPK, PPS, KPPS, serta petugas pendukung lainnya. Pembagian anggaran ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran difokuskan pada pelibatan sumber daya manusia, mengingat peran strategis penyelenggara lapangan dalam menjamin kelancaran seluruh tahapan pilkada.

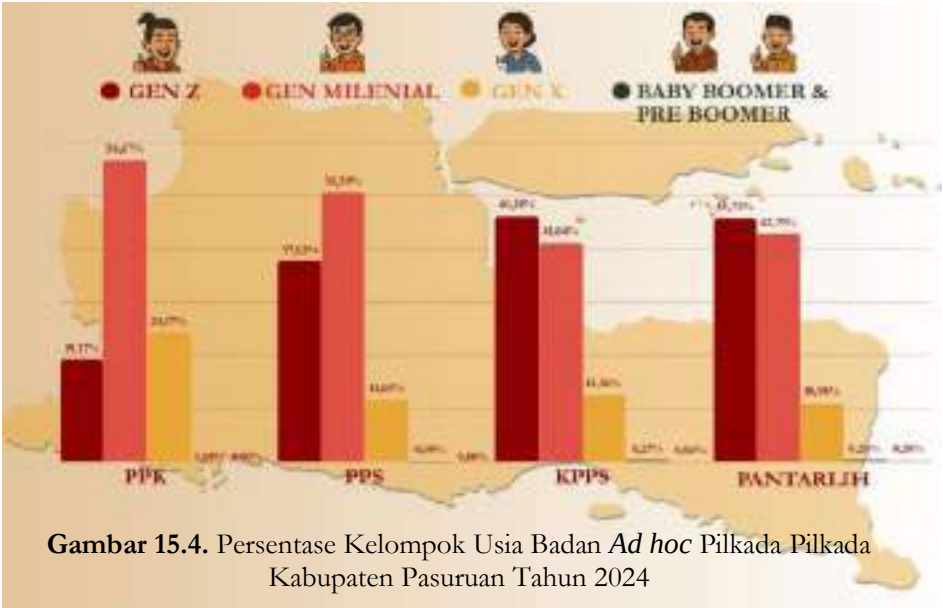
2. **Badan *Ad hoc***

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan proses rekrutmen badan *ad hoc* secara bertahap dan transparan. Jumlah kebutuhan personel badan *ad hoc* mencapai 20.108 orang, yang terdiri dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kebutuhan sumber daya manusia yang besar ini didasarkan pada hasil pemetaan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta pembagian wilayah administrasi yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Pasuruan. Seluruh proses pembentukan badan *ad hoc* ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis dari KPU RI. Rincian jumlah personel dan sebaran struktur badan *ad hoc* disajikan dalam infografis berikut. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 15.3.



Berdasarkan gambar 15.3 distribusi jenis kelamin badan *ad hoc* menunjukkan keterwakilan perempuan yang cukup signifikan, meskipun secara umum masih didominasi oleh laki-laki pada beberapa tingkatan. Pada tingkat PPK, dari total 120 orang, sebanyak 97 orang (80,83%) adalah laki-laki dan 23 orang (19,17%) adalah perempuan. Di tingkat PPS, dari total 1.095 orang, terdapat 718 laki-laki (65,57%) dan 377 perempuan (34,43%). Sementara itu, komposisi lebih berimbang terlihat pada tingkat KPPS dan Pantarlih. Pada KPPS, dari total 16.366 orang, terdapat 9.288 laki-laki (56,75%) dan 7.078 perempuan (43,25%). Sedangkan pada Pantarlih, jumlah perempuan bahkan melampaui laki-laki, yakni 2.540 orang (56,11%) dibandingkan 1.987 orang laki-laki (43,89%), dari total 4.527 orang. Data ini menunjukkan adanya tren positif dalam peningkatan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pilkada di tingkat akar rumput, khususnya pada peran yang bersentuhan langsung dengan pemilih.

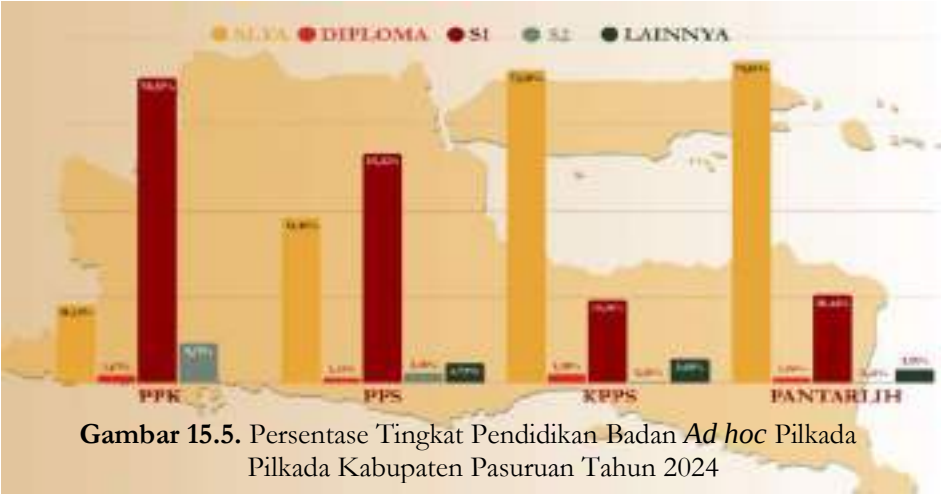
Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 15.4 berikut.



Sebaran demografi badan *ad hoc* berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi generasi muda dalam struktur penyelenggara pilkada di Kabupaten Pasuruan. Pada seluruh jenjang mulai dari PPK, PPS, KPPS, hingga Pantarlih, mayoritas diisi oleh generasi Z (usia 17–27 tahun) dan generasi milenial (usia 28–43 tahun). Pada tingkat PPK, dari 120 orang,

sebanyak 23 orang (19,17%) berasal dari Gen Z dan 68 orang (56,67%) dari Gen Milenial. Sementara itu, 29 orang (24,17%) berasal dari Gen X (usia 44–59 tahun). Di tingkat PPS, Gen Milenial mendominasi dengan 554 orang (50,59%), diikuti Gen Z sebanyak 412 orang (37,63%). Gen X tercatat sebanyak 128 orang (11,69%), sementara hanya 1 orang (0,09%) berasal dari *Baby Boomer*. Komposisi yang serupa terlihat pada KPPS, yang memiliki jumlah personel terbanyak. Dari total 16.366 orang, sebanyak 7.545 orang (46,10%) berasal dari Gen Z dan 6.716 orang (41,04%) dari Gen Milenial. Gen X berjumlah 2.056 orang (12,56%), sedangkan *Baby Boomer* dan *Pre-Boomer* tercatat sangat kecil, masing-masing 45 orang (0,27%) dan 4 orang (0,02%). Untuk Pantarlih, sebanyak 2.071 orang (45,75%) berasal dari Gen Z, diikuti oleh 1.937 orang (42,79%) dari Gen Milenial, 497 orang (10,98%) dari Gen X, serta sisanya berasal dari *Baby Boomer* dan *Pre-Boomer* dengan total 22 orang (0,49%). Dominasi generasi muda ini mencerminkan antusiasme dan partisipasi aktif dari kalangan usia produktif dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *Ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 15.5.



Berdasarkan latar belakang pendidikan, badan *ad hoc* penyelenggara Pilkada 2024 di Kabupaten Pasuruan didominasi oleh lulusan SLTA di hampir seluruh tingkatan. Pada tingkat KPPS dan Pantarlih, proporsi lulusan SLTA mencapai 72,68% dan 74,84%, menunjukkan bahwa sebagian besar penyelenggara pilkada di tingkat TPS berasal dari kelompok dengan pendidikan menengah atas. Di tingkat PPK, komposisi

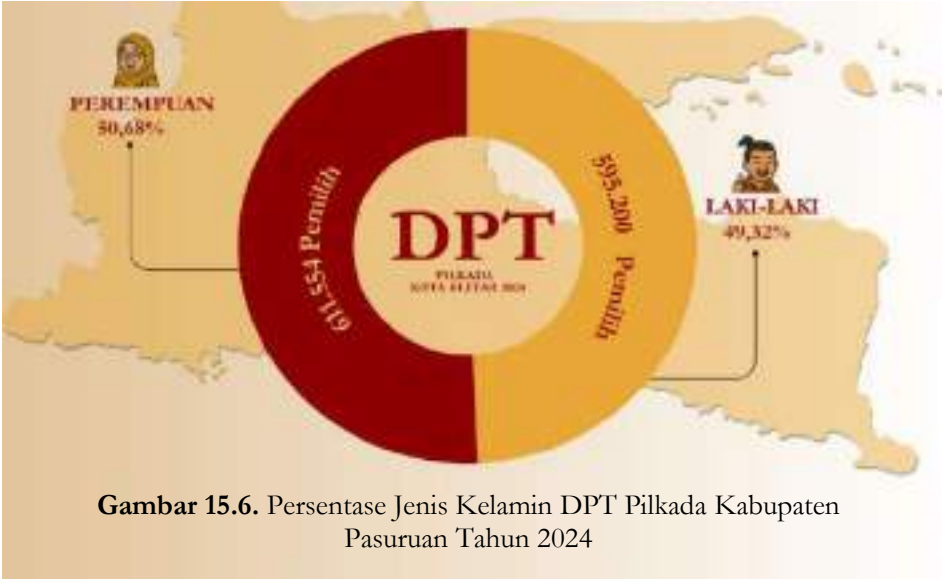
pendidikan cenderung lebih tinggi. Dari total 120 orang PPK, sebanyak 85 orang (70,83%) merupakan lulusan Strata 1 (S1), diikuti oleh 11 orang (9,17%) lulusan S2, dan 22 orang (18,33%) lulusan SLTA. Hanya sebagian kecil berasal dari lulusan diploma dan tidak ada dari kategori pendidikan lainnya. Untuk PPS, proporsi lulusan S1 juga cukup tinggi yakni 53,42%, disusul oleh lulusan SLTA sebanyak 38,36%. Lulusan S2 ada sebanyak 25 orang (2,28%), dan sisanya terdiri dari lulusan diploma serta kategori “lainnya” yang mencakup pendidikan nonformal atau belum tercatat. Sementara itu, meskipun jumlah petugas KPPS dan Pantarlih yang berpendidikan S1 dan S2 masih relatif kecil dibanding SLTA, yaitu masing-masing 19,38% dan 0,35% di KPPS serta 20,46% dan 0,24% di Pantarlih, keberadaan mereka tetap memperkuat kualitas penyelenggaraan pilkada di lapangan. Selain itu, terdapat kategori “lainnya” yang mencapai 5,68% di KPPS dan 3,20% di Pantarlih. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa partisipasi penyelenggara pilkada di Kabupaten Pasuruan sangat terbuka bagi berbagai latar belakang pendidikan.

Meskipun proses rekrutmen badan *ad hoc* berjalan secara terbuka dan inklusif, pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pasuruan telah belum tercatat keterlibatan kelompok disabilitas sebagai bagian dari penyelenggara pilkada masih menjadi tantangan tersendiri. KPU Kabupaten Pasuruan menyadari pentingnya representasi inklusif dalam seluruh struktur penyelenggara, termasuk dari kelompok disabilitas. Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya lebih aktif dan afirmatif untuk mendorong partisipasi penyandang disabilitas, baik melalui penyebaran informasi rekrutmen yang lebih luas, penyediaan aksesibilitas dalam proses seleksi, maupun peningkatan dukungan kelembagaan bagi kelompok rentan agar dapat terlibat sebagai pelaksana teknis di lapangan.

3. Pemutakhiran Data

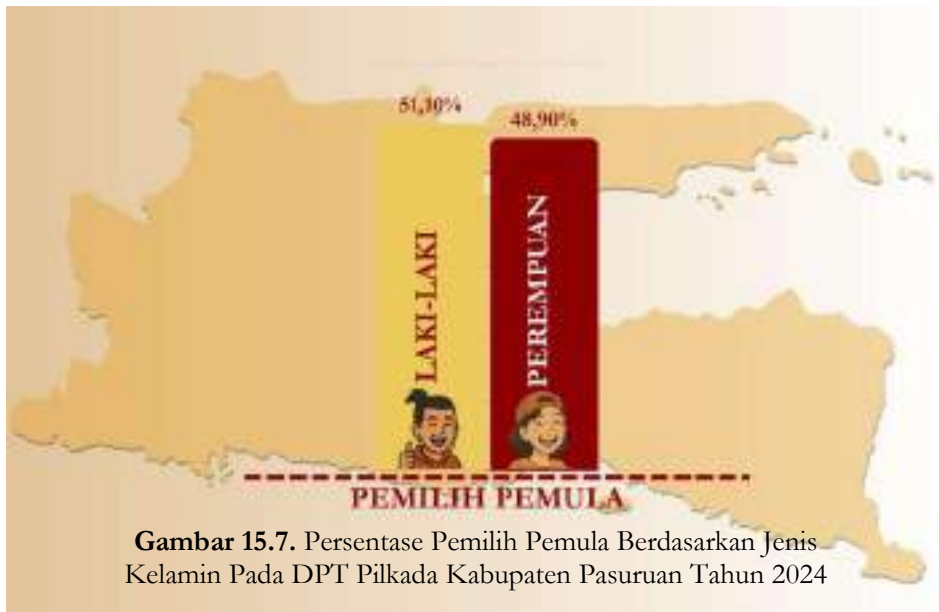
Tahapan pemutakhiran data pemilih menjadi bagian krusial dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Pasuruan. Proses ini dilaksanakan secara berjenjang dan berlandaskan prinsip akurasi, inklusivitas, dan transparansi, guna memastikan bahwa seluruh warga yang memenuhi syarat tercatat sebagai pemilih tetap. Hasil tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), KPU Kabupaten Pasuruan menetapkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DPHP) sebanyak 1.207.867 jiwa. Setelah dilakukan verifikasi dan rekapitulasi melalui proses uji publik serta perbaikan administratif, ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sejumlah 1.208.427 jiwa.

Selanjutnya, melalui masukan masyarakat dan tahapan perbaikan akhir, KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebanyak 1.206.754 pemilih. Penurunan jumlah dari DPS ke DPT ini disebabkan oleh ditemukannya data ganda, pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, serta adanya perpindahan domisili. Proses pemutakhiran data ini menjadi fondasi penting dalam menjamin hak pilih masyarakat terpenuhi secara adil dan tepat, serta mencegah potensi permasalahan pada hari pemungutan suara. KPU Kabupaten Pasuruan berkomitmen menjaga kualitas data pemilih melalui mekanisme koordinasi lintas instansi dan partisipasi aktif masyarakat. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 15.6 berikut.



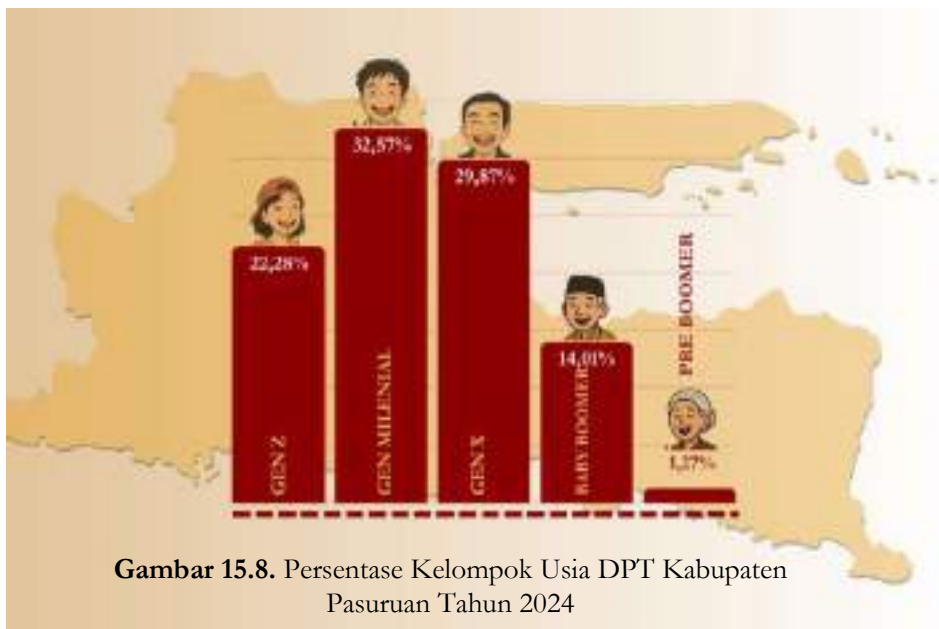
Berdasarkan gambar 15.6 komposisi jenis kelamin DPT relatif seimbang, dengan sedikit dominasi pemilih perempuan. Tercatat sebanyak 595.200 pemilih laki-laki (49,32%) dan 611.554 pemilih perempuan (50,68%). Komposisi ini menjadi dasar penting bagi KPU Kabupaten Pasuruan untuk menyusun strategi sosialisasi dan layanan pemilih yang responsif gender, serta memastikan seluruh pemilih, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan akses dan perlakuan yang setara dalam menggunakan hak pilihnya.

Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam kategori utama, yakni pemilih pemula. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 15.7 berikut.



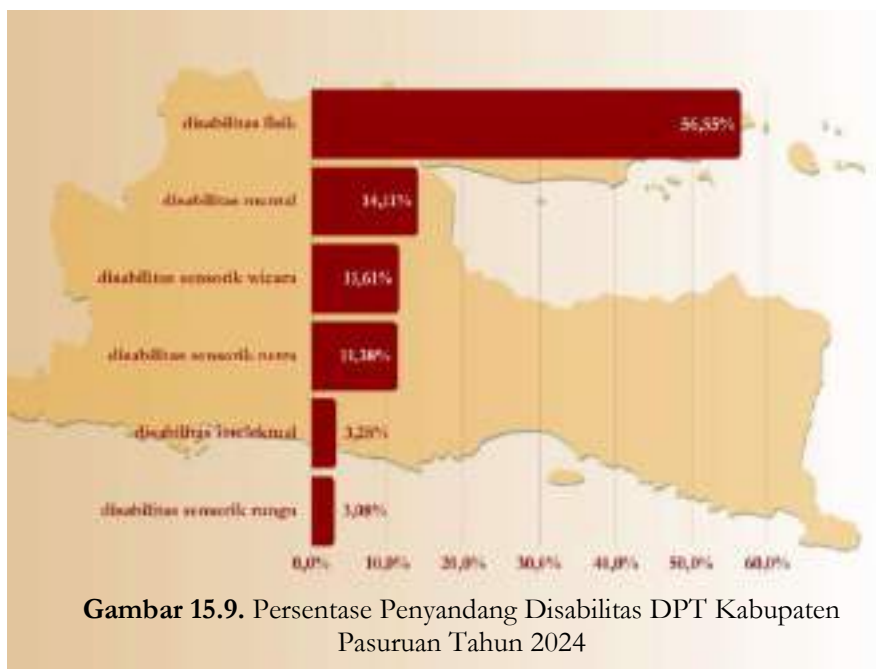
Berdasarkan status pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 18.183 orang (1,51%) merupakan pemilih pemula, yaitu warga yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, umumnya berusia 17 tahun atau baru menikah. Dari jumlah tersebut, 9.291 orang (51,10%) adalah laki-laki dan 8.892 orang (48,90%) adalah perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa meskipun proporsi pemilih pemula relatif kecil, mereka tetap menjadi segmen strategis dalam Pilkada 2024, terutama dalam konteks pendidikan politik dan peningkatan partisipasi generasi muda. KPU Kabupaten Pasuruan memandang penting untuk memberikan perhatian khusus kepada pemilih pemula, melalui pendekatan sosialisasi yang lebih kreatif, inklusif, dan berbasis digital, agar tercipta partisipasi pemilih yang berkelanjutan di masa depan.

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 15.8.



Berdasarkan gambar 15.8, dominasi pemilih dari kalangan generasi milenial dan generasi Z, yang secara kolektif mencakup lebih dari separuh jumlah pemilih. Kelompok usia 28–43 tahun (Generasi Milenial) menjadi segmen terbesar dengan jumlah 393.020 pemilih (32,57%), disusul oleh Generasi Z (usia 17–27 tahun) sebanyak 268.870 pemilih (22,28%). Selanjutnya, Generasi X (usia 44–59 tahun) tercatat sebanyak 360.483 pemilih (29,87%), sementara *Baby Boomer* (usia 60–78 tahun) berjumlah 169.086 pemilih (14,01%). Kelompok *Pre-Boomer* (di atas 79 tahun) merupakan segmen terkecil dengan 15.295 pemilih (1,27%). Data ini mencerminkan bahwa mayoritas pemilih merupakan kalangan usia produktif yang akrab dengan teknologi dan informasi digital. Oleh karena itu, strategi komunikasi dan sosialisasi Pilkada perlu disesuaikan agar efektif menjangkau karakteristik tiap generasi, khususnya Gen Z dan Milenial yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah kepemimpinan daerah.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disajikan pada gambar 15.9, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 Kabupaten Pasuruan, terdapat 3.963 pemilih disabilitas, yang terdiri dari berbagai kelompok disabilitas. Kategori disabilitas dengan jumlah terbanyak adalah disabilitas fisik, sebanyak 2.241 orang (56,55%), diikuti oleh disabilitas mental sebanyak 559 orang (14,11%), disabilitas sensorik wicara sebanyak 460 orang (11,61%), dan disabilitas sensorik netra sebanyak 451 orang (11,38%). Selain itu, terdapat 130 orang (3,28%) penyandang disabilitas intelektual, serta 122 orang (3,08%) dengan disabilitas sensorik runtu. Data ini menjadi landasan bagi KPU dalam menyediakan layanan pemungutan suara yang aksesibel, seperti TPS ramah disabilitas, pendampingan pemilih, hingga materi informasi yang disesuaikan. Kehadiran penyandang disabilitas dalam DPT juga menegaskan komitmen KPU Kabupaten Pasuruan terhadap prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap hak konstitusional setiap warga negara, tanpa diskriminasi.

4. Pencalonan

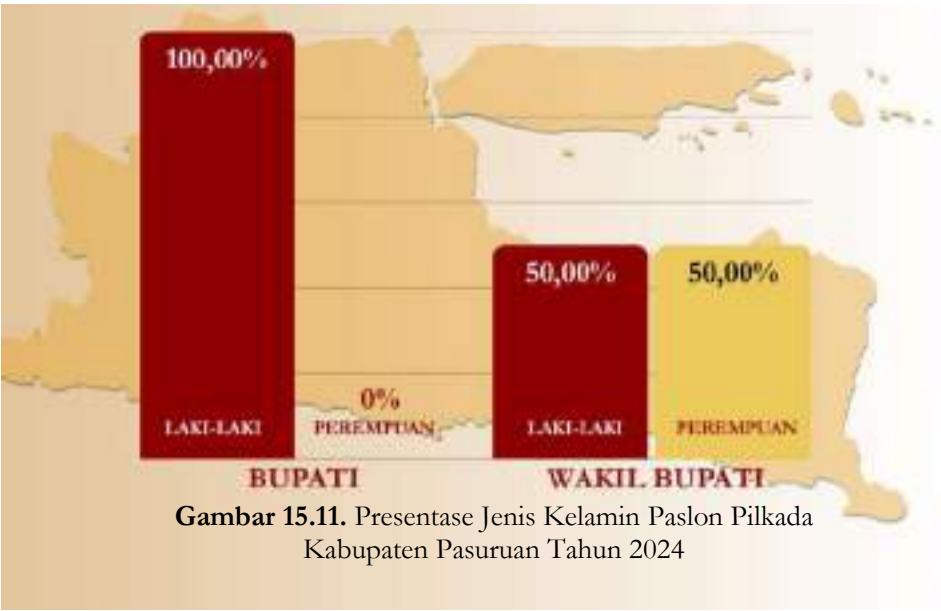
Tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu fase krusial dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Pasuruan. Setelah pengumuman resmi pendaftaran dibuka pada tanggal 24–26 Agustus 2024, proses penerimaan dokumen pendaftaran berlangsung pada tanggal 27–29 Agustus 2024.

Dalam periode tersebut, terdapat dua bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Pasuruan, masing-masing dengan dukungan partai politik pengusung. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada gambar 15.10 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.



Gambar 15.10. Daftar Nama Paslon Pilkada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan disajikan pada gambar 15.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan disajikan pada gambar 15.12.



Gambar 15.11. Presentase Jenis Kelamin Paslon Pilkada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024



Berdasarkan hasil penetapan dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan pada Pilkada Serentak 2024, terlihat bahwa komposisi berdasarkan jenis kelamin masih menunjukkan dominasi laki-laki. Dari total empat orang calon, sebanyak tiga orang (75%) adalah laki-laki dan satu orang (25%) adalah perempuan. Seluruh calon Bupati berjenis kelamin laki-laki (100%), sementara pada posisi Wakil Bupati terdapat distribusi yang lebih seimbang, yakni 50% laki-laki dan 50% perempuan.

Sementara itu, dari sisi tingkat pendidikan, seluruh pasangan calon memiliki latar belakang pendidikan yang relatif tinggi, meskipun tidak ada yang berasal dari jenjang sarjana strata satu (S1). Masing-masing satu calon Bupati dan satu calon Wakil Bupati tercatat berpendidikan terakhir SLTA, dan sisanya adalah lulusan Strata Dua (S2). Dengan demikian, dari total empat calon, 50% merupakan lulusan SLTA dan 50% lulusan S2, tanpa ada calon berlatar belakang pendidikan S1.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 15.13, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



5. Sosialisasi dan Kampanye

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan memastikan seluruh elemen masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan menerapkan berbagai metode sosialisasi yang efektif dan terstruktur. KPU menggunakan tiga pendekatan utama, yakni sosialisasi tatap muka, media elektronik, dan media sosial. Sosialisasi tatap muka dilakukan melalui kegiatan pertemuan langsung dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Di samping itu, KPU juga memanfaatkan media elektronik seperti radio lokal, televisi, serta platform audio digital seperti podcast, untuk menjangkau pemilih secara lebih luas dan menyeluruh.

Sementara itu, pemanfaatan media sosial menjadi strategi penting dalam menjangkau generasi muda dan pemilih pemula. Platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan website resmi KPU Kabupaten Pasuruan digunakan untuk menyebarkan konten informasi secara menarik, cepat, dan mudah diakses. Melalui pendekatan multikanal ini, KPU berharap dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi

masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab.

Tabel 14.1. Rincian Kegiatan Sosialisasi Pilkada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

No	Penyelenggara	Jumlah Kegiatan	Peserta	Media Terlibat
1	KPU	49	2,372	9
2	PPK	36	3,600	7
3	PPS	365	9,125	73

KPU Kabupaten Pasuruan juga mengenalkan maskot Pilkada Serentak 2024 yang digunakan sebagai maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasuruan.



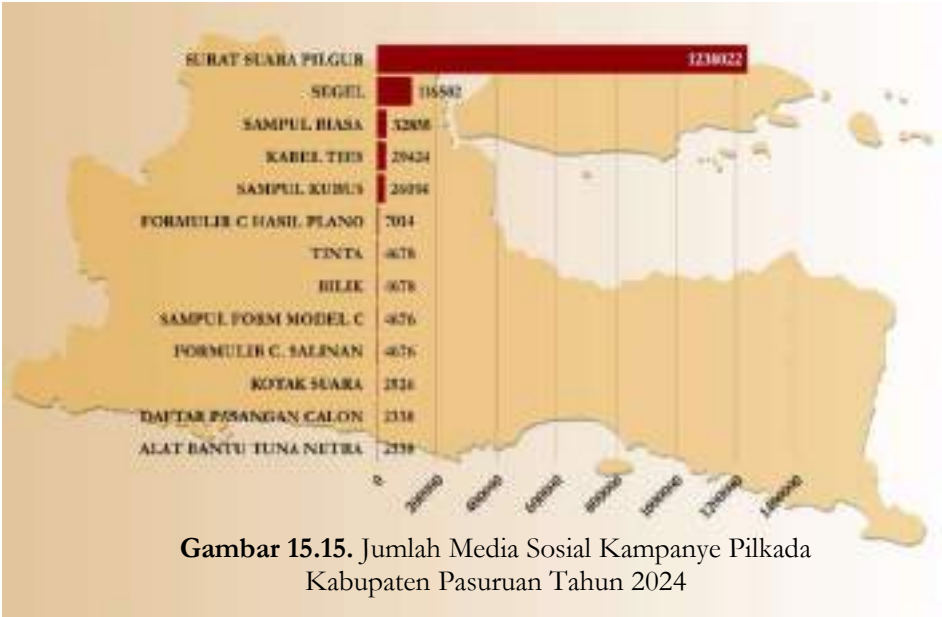
Maskot Pilkada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 diberi nama SAKERA, yang diambil dari tokoh legendaris asal Bangil, Pasuruan. Sakera dikenal sebagai sosok pejuang rakyat yang gagah berani dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-19. Semangat perjuangan Sakera diangkat sebagai simbol harapan agar Pilkada Pasuruan dapat melahirkan pemimpin yang kuat, hebat, dan bermartabat, sebagaimana sifat kepahlawanannya. Lebih dari sekadar tokoh sejarah, SAKERA juga merupakan akronim dari "Sarana Kedaulatan Rakyat", yang merepresentasikan bahwa Pilkada adalah wadah bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam memilih pemimpin daerah secara langsung, bebas, dan berdaulat. Desain maskot Sakera mengandung makna yang dalam. Ia digambarkan membawa alat coblos dan surat suara, sebagai simbol pelaksanaan pilkada yang jujur dan transparan. Kostum yang

dikenakan Sakera mencerminkan kekayaan budaya lokal Kabupaten Pasuruan, termasuk udeng khas Tosari yang identik dengan Suku Tengger, serta hiasan bunga sedap malam yang melambangkan keanekaragaman flora dan keindahan alam daerah. Dengan filosofi ini, Sakera tidak hanya menjadi representasi semangat demokrasi, tetapi juga kebanggaan atas identitas lokal Pasuruan.

Tahapan kampanye merupakan salah satu bagian krusial dalam penyelenggaraan Pilkada yang bertujuan tidak hanya untuk memperkenalkan pasangan calon kepada masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi pemilih secara aktif dan sadar. Melalui kampanye, pemilih diharapkan dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat, adil, dan setara. Berdasarkan ketentuan dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, tahapan pelaksanaan kampanye dimulai pada tanggal 25 September 2024 dan berakhir pada 23 November 2024. Selama masa kampanye tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan telah menyediakan berbagai fasilitas kampanye bagi seluruh peserta pilkada, sebagai bentuk komitmen dalam menjamin keadilan dan keterbukaan informasi dalam kontestasi demokrasi lokal.

KPU Kabupaten Pasuruan telah menyediakan berbagai fasilitas kampanye dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 yang adil, merata, dan informatif. Fasilitas yang disiapkan mencakup media cetak seperti *flyer*, brosur, pamflet, dan poster, masing-masing sebanyak 301.689 lembar. Jumlah yang besar ini menunjukkan komitmen KPU untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses informasi yang setara mengenai pasangan calon kepala daerah. Selain itu, alat peraga kampanye juga disediakan dalam bentuk baliho sebanyak 10 buah, umbul-umbul sebanyak 960 buah, dan spanduk sebanyak 1.460 buah, yang dipasang di titik-titik strategis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tak hanya itu, KPU Kabupaten Pasuruan juga menggelar tiga kali debat publik antar pasangan calon. Debat ini menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menilai secara langsung kapasitas, visi, misi, serta program kerja yang ditawarkan para kandidat. Seluruh fasilitasi tersebut mencerminkan keseriusan KPU Kabupaten Pasuruan dalam menciptakan kampanye yang edukatif, transparan, dan inklusif demi mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024.

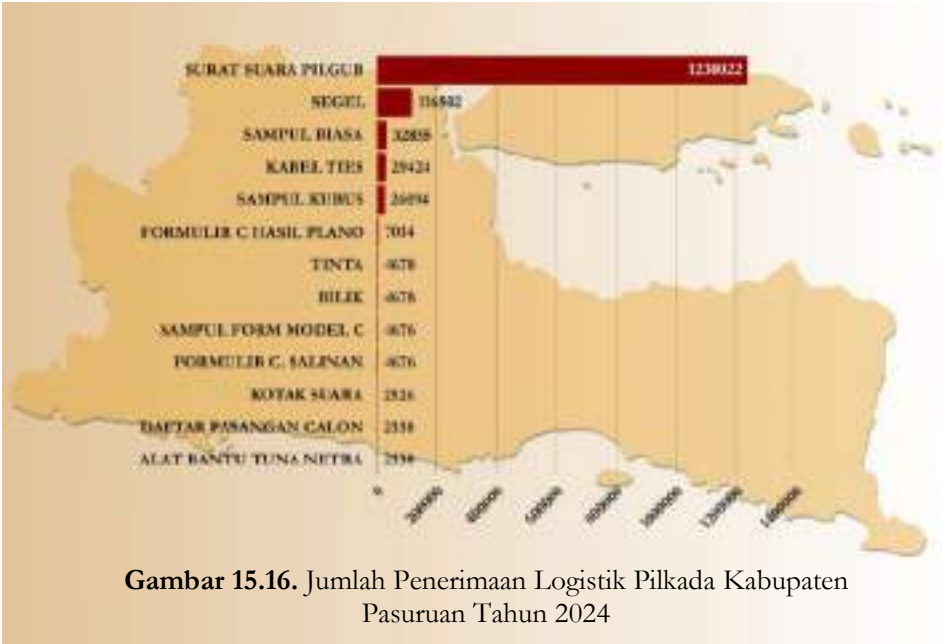
Sementara itu, masing-masing pasangan calon memanfaatkan berbagai platform digital untuk menjangkau pemilih, mencerminkan pergeseran pola komunikasi politik ke ranah digital yang lebih interaktif dan luas. Adapun secara lengkap disajikan pada gambar 15.15.



Gambar 15.15. Jumlah Media Sosial Kampanye Pilkada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

6. Logistik

Salah satu terobosan penting dalam pengelolaan logistik Pilkada 2024 di Kabupaten Pasuruan adalah penerapan metode *e-purchasing* melalui *e-katalog*. Sistem ini memungkinkan proses pengadaan dilakukan secara lebih transparan, cepat, dan efisien, karena KPU dapat langsung memilih penyedia logistik yang telah terverifikasi dalam e-katalog nasional. Dengan demikian, kualitas barang yang dibeli, mulai dari surat suara hingga perlengkapan pemungutan suara, dapat dipastikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Pengelolaan logistik memiliki peran sentral dalam menjamin kelancaran tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Untuk Pilkada 2024, KPU Kabupaten Pasuruan harus mengelola dan mendistribusikan lebih dari 1,2 juta lembar surat suara, yang mencakup kebutuhan untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur dan bupati-wakil bupati. Selain surat suara, logistik lainnya yang disiapkan meliputi kotak suara, bilik suara, tinta, segel, formulir administrasi pemungutan suara, serta alat bantu bagi pemilih disabilitas. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 15.16.



Gambar 15.16. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Berdasarkan data logistik Pilkada 2024 Kabupaten Pasuruan, item dengan jumlah tertinggi antara lain sampul biasa, kabel ties, dan sampul kubus. Kebutuhan ini menegaskan peran penting sektor percetakan dan plastik dalam pengadaan logistik pilkada, yang sekaligus memberi dampak ekonomi bagi industri lokal. Selain itu, kebutuhan akan tanda pengenalan KPPS, kantong plastik, formulir, dan stiker QR Code menunjukkan keterlibatan sektor jasa cetak dan pengemasan. Dengan jumlah TPS yang tersebar luas, distribusi logistik harus tepat waktu, sehingga KPU bermitra dengan PT POS Indonesia sebagai penyedia layanan distribusi resmi. Proses *setting* dan *packing* logistik pun melibatkan tenaga kerja tambahan berjumlah masing-masing 68 orang, yang direkrut melalui pihak ketiga dan pemberdayaan masyarakat lokal, menjadikan tahapan ini tidak hanya administratif tetapi juga bermanfaat secara ekonomi bagi warga sekitar.

Distribusi logistik Pilkada 2024 di Kabupaten Pasuruan mencakup seluruh kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten, dengan tingkat aksesibilitas yang bervariasi. Setiap kecamatan memiliki jumlah desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda, sehingga memerlukan perencanaan logistik yang cermat. Jarak dari masing-masing kecamatan ke gudang logistik utama juga berbeda-beda, mulai dari yang relatif dekat hingga yang cukup jauh, dengan waktu tempuh bervariasi antara beberapa menit hingga lebih dari satu jam, tergantung kondisi geografis dan infrastruktur jalan.

Tabel 15.2. Kondisi Geografis Distribusi Logistik Pilkada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

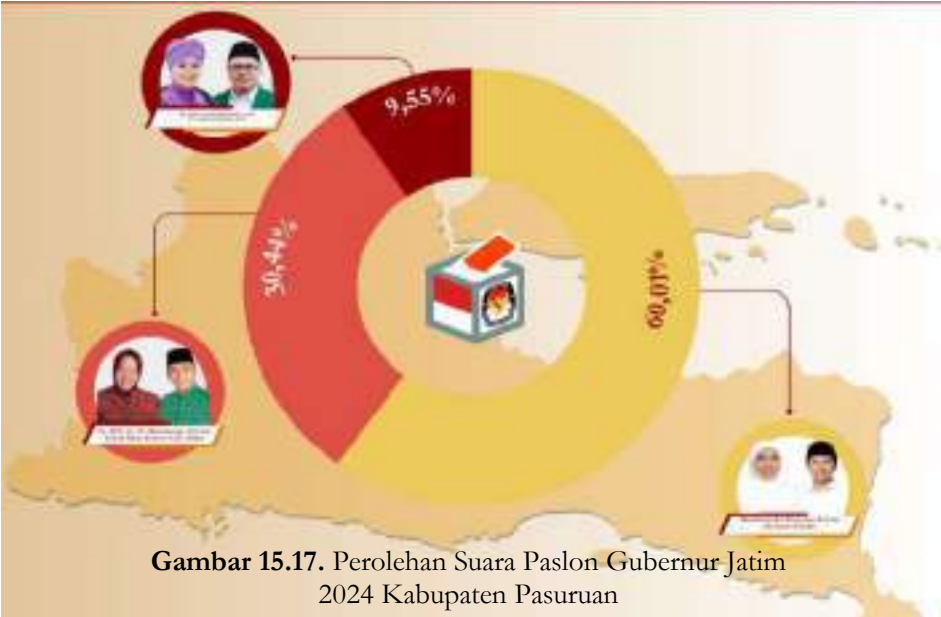
No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jarak ke Gudang (KM)	Waktu Tempuh ke Gudang (Menit)
1	Tutur	12	87	45.2	66
2	Prigen	14	141	37	60
3	Tosari	8	35	34.3	61
4	Lekok	11	101	33	51
5	Pandaan	18	158	31.6	42
6	Gempol	15	177	27.5	50
7	Purwodadi	13	117	26	41
8	Nguling	15	85	26	39
9	Sukorejo	19	124	25	45
10	Beji	14	122	23	40
11	Puspo	7	53	22	40
12	Purwosari	15	117	21	34
13	Bangil	15	115	20	37
14	Lumbang	12	58	19	39
15	Grati	15	108	17	30
16	Pasrepan	17	81	13	30
17	Rembang	17	94	13	25
18	Wonorejo	15	81	12.3	23
19	Rejoso	16	68	11	21
20	Winongan	18	65	10.7	25
21	Kraton	25	122	6.2	13
22	Gondangwetan	20	84	4.4	15
23	Pohjentrek	9	44	3.6	6
24	Kejayan	25	101	2.6	10

KPU Kabupaten Pasuruan menyiapkan berbagai moda transportasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengiriman ke tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Untuk mendistribusikan logistik dari gudang utama ke PPK, KPU Kabupaten Pasuruan menggunakan sebanyak 24 unit mobil truk, yang difungsikan untuk mengangkut logistik dalam jumlah besar secara efisien. Sementara itu, untuk distribusi lanjutan dari PPK ke PPS dan TPS yang umumnya menjangkau area yang lebih kecil dan tersebar, KPU menyediakan 365 unit mobil pick-up. Mobil pick-up ini memungkinkan pengiriman logistik menjangkau lokasi-lokasi yang tidak dapat diakses oleh kendaraan besar, termasuk wilayah pedesaan atau dengan kondisi geografis yang menantang. Dengan total 365 unit moda

transportasi ini, distribusi logistik Pilkada dirancang agar berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai prosedur, guna menjamin kesiapan pelaksanaan pemungutan suara di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.

7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Pasuruan disajikan pada gambar 15.17.

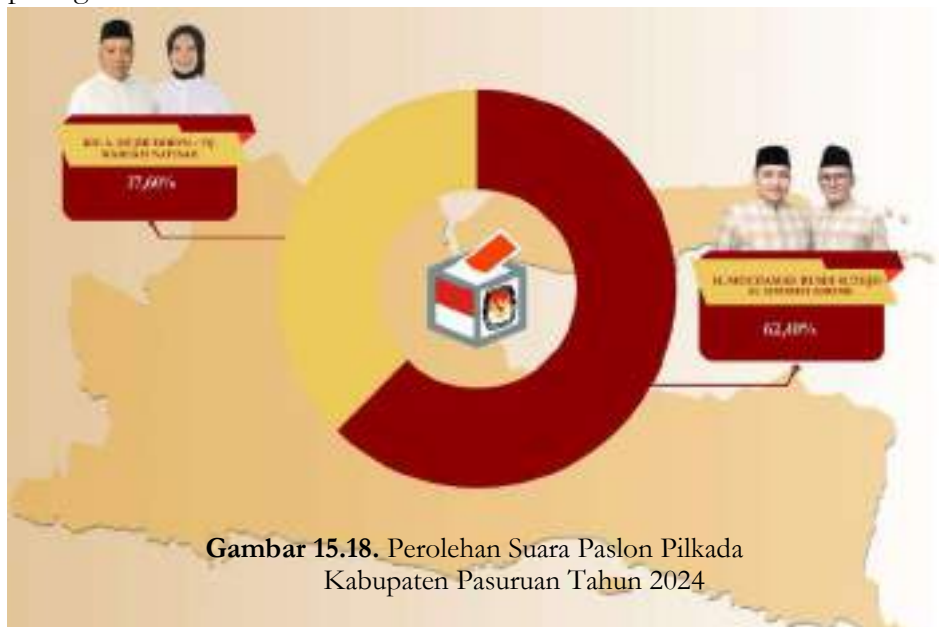


Gambar 15.17. Perolehan Suara Paslon Gubernur Jatim 2024 Kabupaten Pasuruan

Hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Pasuruan menunjukkan kemenangan telak pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak, yang memperoleh dukungan sebanyak 500.938 suara atau sebesar 60,01% dari total suara sah. Pasangan ini unggul jauh dari dua pasangan calon lainnya. Di posisi kedua, pasangan Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) meraih 254.074 suara atau sekitar 30,44%. Sementara itu, pasangan Luluk Nur Ihamidah – Lukmanul Hakim memperoleh 79.743 suara, atau sebesar 9,55%. Dengan total suara sah sebanyak 834.755 suara, hasil ini mencerminkan dominasi pasangan Khofifah–Emil di wilayah Kabupaten Pasuruan, sekaligus mengindikasikan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan mereka.

Keunggulan suara yang signifikan ini juga menjadi sinyal kuat atas pengaruh elektabilitas dan popularitas pasangan petahana di tingkat daerah.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 15.18.



Gambar 15.18. Perolehan Suara Paslon Pilkada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

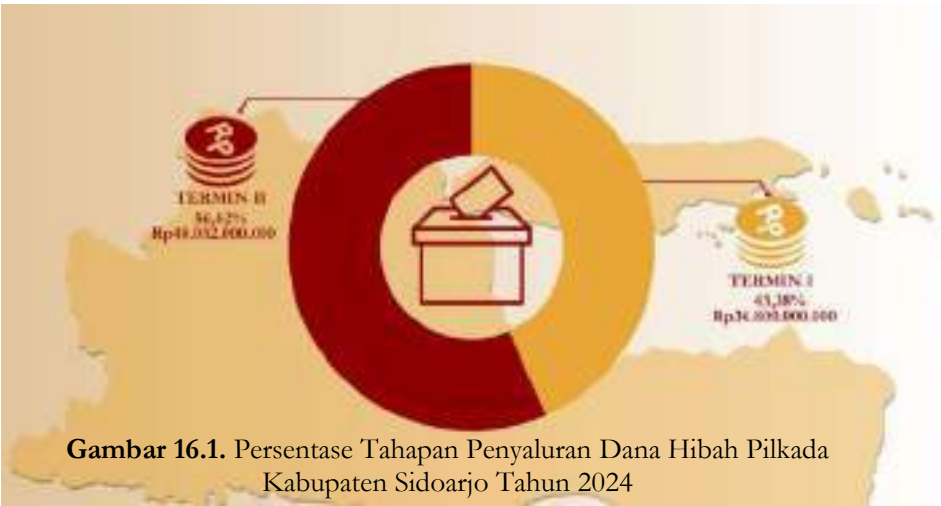
Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan tahun 2024, pasangan H. Mochamad Rusdi Sutejo – M. Shobih Asrori berhasil meraih kemenangan dengan perolehan suara sebanyak 542.876 suara, atau 62,40% dari total suara sah. Pasangan ini unggul signifikan dari pesaingnya, yakni pasangan KH. A. Mujib Imron – Hj. Wardah Nafisah, yang memperoleh 327.126 suara, atau sekitar 37,60%. Dengan total suara sah mencapai 870.002 suara, hasil ini menunjukkan tingkat dukungan masyarakat yang tinggi terhadap pasangan Rusdi–Shobih. Kemenangan ini juga mencerminkan keberhasilan strategi kampanye dan daya tarik program kerja yang ditawarkan kepada pemilih. Perolehan suara yang cukup besar menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Pasuruan menginginkan kepemimpinan baru dengan visi dan arah pembangunan yang diyakini mampu membawa perubahan positif bagi daerah.

BAGIAN 16

KABUPATEN SIDOARJO

1. Perencanaan Program dan Anggaran

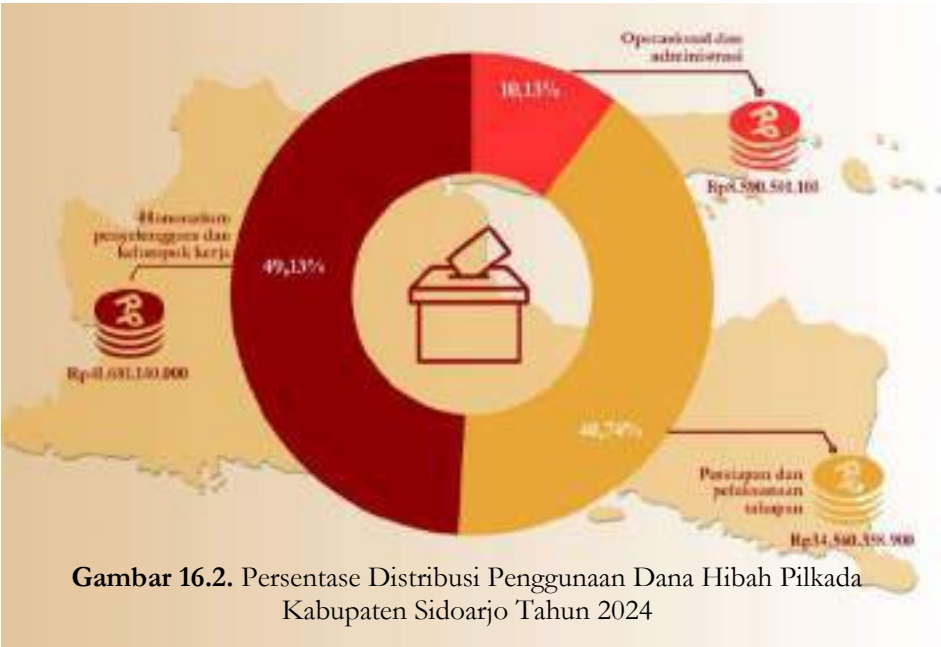
Tahapan perencanaan dan pengajuan anggaran hibah untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Sidoarjo diawali dengan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 188/42/438.1.1.3/2023. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Kabupaten Sidoarjo bersama Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023. NPHD ini menjadi dasar hukum pencairan dana hibah Pilkada yang digunakan untuk membiayai seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Total dana hibah yang diterima oleh KPU Kabupaten Sidoarjo untuk pelaksanaan Pilkada 2024 adalah sebesar Rp84.832.000.000. Pengelolaan anggaran ini menjadi bagian penting dalam mendukung tahapan teknis penyelenggaraan Pilkada agar berjalan sesuai jadwal, transparan, dan akuntabel. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 16.1 berikut.



Distribusi dana hibah Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 disalurkan dalam dua termin, Termin pertama sebesar Rp36.800.000.000 (43,38%) diterima pada tahun 2023, sedangkan termin kedua sebesar Rp48.032.000.000 (56,62%) dicairkan pada tahun 2024. Skema pencairan dua tahap ini dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan pendanaan setiap tahapan Pilkada secara

bertahap, mulai dari perencanaan awal hingga pelaksanaan teknis di lapangan, guna menjamin kelancaran dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sidoarjo.

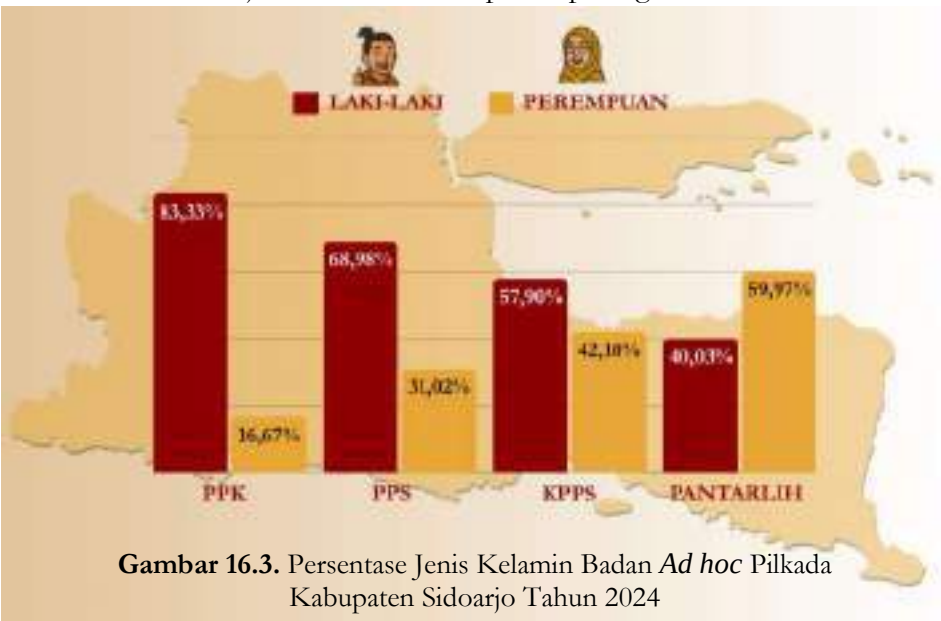
Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 16.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.



Dana hibah Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 tiga komponen utama. Komponen terbesar adalah honorarium, yang mencapai Rp41.681.140.000 (49,13%), mencerminkan besarnya kebutuhan untuk membiayai tenaga *ad hoc* dan penyelenggara pilkada di berbagai tingkatan. Selanjutnya, alokasi untuk tahapan persiapan dan pelaksanaan sebesar Rp34.560.358.900 (40,74%) digunakan untuk mendukung kegiatan teknis seperti pencalonan, sosialisasi, kampanye, logistik, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Sementara itu, anggaran untuk operasional dan administrasi perkantoran dialokasikan sebesar Rp8.590.501.100 (10,13%), yang mencakup kebutuhan pendukung seperti sewa, alat tulis kantor, serta layanan penunjang administratif lainnya. Pembagian anggaran ini menunjukkan fokus KPU Kabupaten Sidoarjo pada efektivitas penyelenggaraan dan penghargaan terhadap kinerja penyelenggara di lapangan.

2. **Badan *Ad hoc***

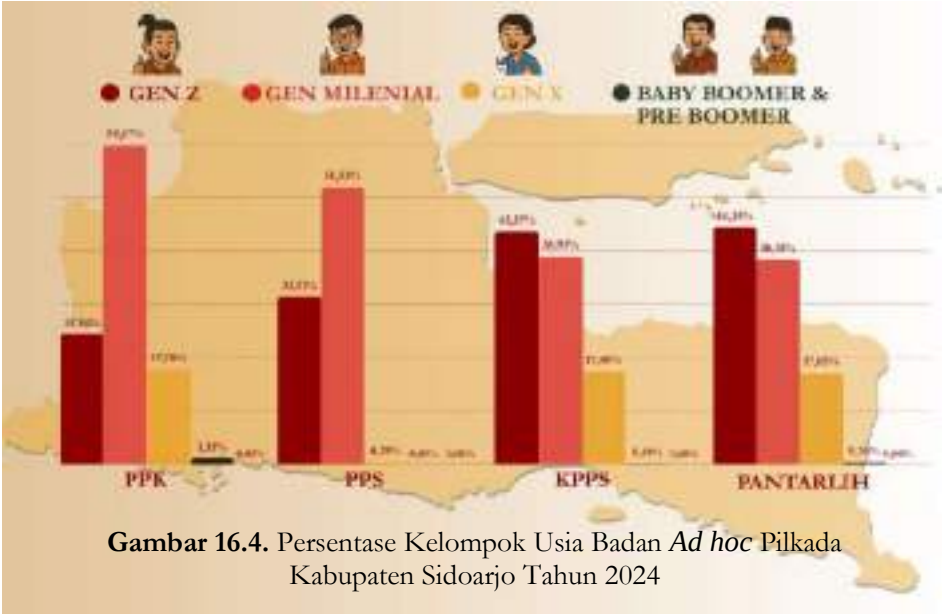
Pembentukan Badan *Ad hoc* Pilkada 2024 Kabupaten Sidoarjo mengacu pada PKPU Nomor 2 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 475 dan 476 Tahun 2024. Seluruh proses rekrutmen dilakukan melalui aplikasi SIAKBA, yang mempermudah tahapan seleksi sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pendaftaran PPK dibuka pada 23–27 April 2024, dengan 362 pendaftar memenuhi syarat. Seleksi dilakukan melalui CAT pada 6–8 Mei dan wawancara pada 11–13 Mei 2024. Hasilnya, 180 peserta ditetapkan, terdiri atas 5 anggota PPK terpilih dan 5 cadangan per kecamatan. Untuk PPS, pendaftaran menjangring 2.258 orang. Setelah seleksi administrasi dan tes tertulis (17–18 Mei), sebanyak 1.839 peserta melanjutkan ke wawancara pada 21–22 Mei 2024. Tiga peserta terbaik dari tiap wilayah ditetapkan sebagai anggota PPS, dan tiga lainnya sebagai cadangan. Pelantikan dilakukan pada 26 Mei 2024. Rekrutmen Pantarlih mengacu pada PKPU Nomor 2 Tahun 2022. Tiap TPS memiliki satu pantarlih, atau dua jika jumlah pemilih melebihi 400 orang. Sebanyak 5.415 pantarlih ditetapkan, dengan pelantikan pada 24 Juni 2024. Sementara itu, KPPS yang terdiri dari 7 orang per TPS akan bertugas di 2.733 TPS dengan total anggota sebanyak 19.131 orang. Proses rekrutmen dimulai 17–21 September 2024, mencakup seleksi administrasi, tanggapan masyarakat, hingga pelantikan sesuai jadwal yang ditetapkan. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 16.3.



Sebaran demografi Badan *Ad hoc* Pilkada 2024 di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan keterlibatan yang cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan, meskipun masih didominasi oleh laki-laki di beberapa tingkatan. Pada tingkat PPK, terdapat 75 laki-laki (83,33%) dan 15 perempuan (16,67%) dari total 90 anggota. Di tingkat PPS, proporsi perempuan lebih besar, dengan 322 orang (31,02%) dari total 1.038 anggota, sedangkan laki-laki berjumlah 716 orang (68,98%). Komposisi serupa terlihat pada KPPS, di mana laki-laki masih mendominasi dengan 11.076 orang (57,90%), sementara perempuan sebanyak 8.055 orang (42,10%) dari total 19.131 anggota. Pada tingkat Pantarlih, jumlah perempuan mencapai 3.247 orang (59,97%), dibandingkan laki-laki sebanyak 2.167 orang (40,03%) dari total 5.414 petugas.

Data ini mencerminkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam struktur penyelenggara pilkada, khususnya pada tingkatan teknis di lapangan seperti Pantarlih, yang berperan penting dalam pemutakhiran data pemilihan.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 16.4 berikut.

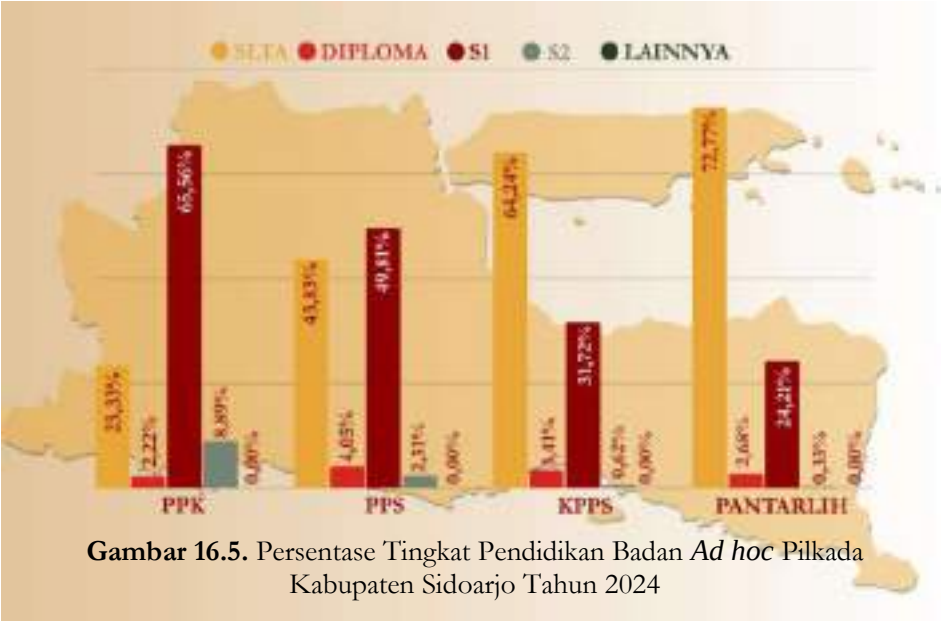


Gambar 16.4. Persentase Kelompok Usia Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Sebaran demografi Badan *Ad hoc* Pilkada 2024 di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi dari generasi muda, khususnya Generasi Z (usia 17–27 tahun) dan Generasi Milenial (usia 28–43 tahun). Pada tingkat PPK, sebagian besar anggota berasal dari kalangan milenial sebanyak 51 orang (56,67%), diikuti oleh Gen Z sebanyak 22 orang

(24,44%), dan Gen X sebanyak 16 orang (17,78%). Hanya 1 orang (1,11%) dari kelompok *Baby Boomer* yang terlibat di tingkat ini. Pada tingkat PPS, Gen Milenial masih mendominasi dengan 539 orang (51,93%), disusul oleh Gen Z sebanyak 325 orang (31,31%), dan Gen X sebanyak 171 orang (16,47%). *Baby Boomer* hanya menyumbang 3 orang (0,29%). Komposisi usia lebih muda terlihat pada KPPS, dengan dominasi Gen Z sebanyak 8.335 orang (43,57%), diikuti Gen Milenial sebanyak 7.448 orang (38,93%), dan Gen X sebanyak 3.329 orang (17,40%). *Baby Boomer* hanya 19 orang (0,10%) dari total 19.131 anggota KPPS. Komposisi serupa juga terjadi pada Pantarlih, di mana Gen Z menjadi mayoritas dengan 2.401 orang (44,35%), disusul Gen Milenial sebanyak 2.074 orang (38,31%), dan Gen X sebanyak 923 orang (17,05%). *Baby Boomer* tercatat hanya 16 orang (0,30%). Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tingginya partisipasi generasi muda dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, yang menjadi modal penting dalam memperkuat regenerasi dan semangat partisipatif dalam demokrasi lokal di Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *Ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 16.5.



Sebaran tingkat pendidikan anggota Badan *Ad hoc* Pilkada 2024 di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan keragaman latar belakang akademik, dengan dominasi lulusan SLTA dan S1 di seluruh jenjang penyelenggara. Pada tingkat

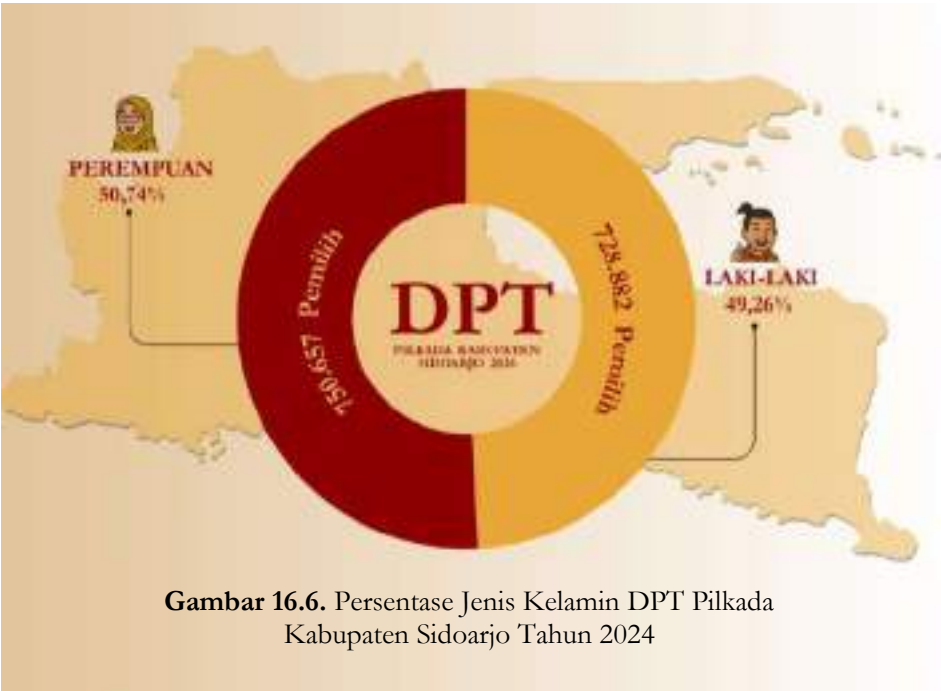
PPK, mayoritas anggota merupakan lulusan S1 sebanyak 59 orang (65,56%), disusul oleh lulusan SLTA sebanyak 21 orang (23,33%), dan 8 orang (8,89%) berpendidikan S2. Lulusan diploma hanya tercatat 2 orang (2,22%). Di tingkat PPS, sebaran pendidikan didominasi oleh lulusan S1 sebanyak 517 orang (49,81%), diikuti oleh lulusan SLTA 455 orang (43,83%). Lulusan diploma dan S2 masing-masing tercatat 42 orang (4,05%) dan 24 orang (2,31%). Pada level teknis, yaitu KPPS, mayoritas anggota berasal dari lulusan SLTA sebanyak 12.289 orang (64,24%), menunjukkan bahwa pendidikan menengah menjadi sumber utama rekrutmen petugas di TPS. Lulusan S1 berjumlah 6.069 orang (31,72%), sedangkan diploma 653 orang (3,41%), dan S2 hanya 119 orang (0,62%). Terdapat satu anggota dari kategori "lainnya", yakni 0,01%. Sementara itu, untuk Pantarlih, lulusan SLTA mendominasi secara signifikan dengan 3.940 orang (72,77%), diikuti oleh lulusan S1 sebanyak 1.311 orang (24,21%), diploma 145 orang (2,68%), dan S2 18 orang (0,33%).

Meskipun proses rekrutmen badan *ad hoc* berjalan secara terbuka dan inklusif, pada Pilkada 2024 di Kabupaten Sidoarjo telah belum tercatat keterlibatan kelompok disabilitas sebagai bagian dari penyelenggara pilkada. KPU Kabupaten Sidoarjo menyadari pentingnya representasi inklusif dalam seluruh struktur penyelenggara, termasuk dari kelompok disabilitas. Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya lebih aktif dan afirmatif untuk mendorong partisipasi penyandang disabilitas, baik melalui penyebarluasan informasi rekrutmen yang lebih luas, penyediaan aksesibilitas dalam proses seleksi, maupun peningkatan dukungan kelembagaan bagi kelompok rentan agar dapat terlibat sebagai pelaksana teknis di lapangan.

3. Pemutakhiran Data

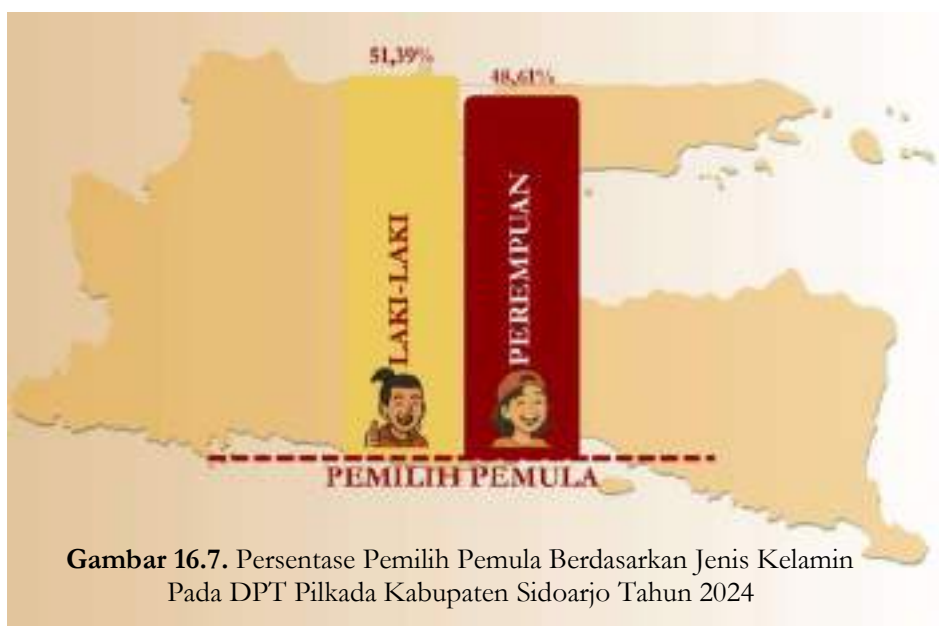
Pemutakhiran data pemilih Pilkada 2024 di Kabupaten Sidoarjo dilakukan secara bertahap, dimulai dari DPHP sebanyak 1.490.102 jiwa, disaring menjadi DPS sebanyak 1.481.457 pemilih, dan ditetapkan sebagai DPT sebanyak 1.479.539 pemilih. Penurunan jumlah ini mencerminkan validasi data yang ketat melalui pencocokan dan penelitian di lapangan, termasuk penghapusan data ganda dan pemilih tidak memenuhi syarat. Sebanyak 2.733 TPS disiapkan, tersebar di seluruh wilayah Sidoarjo. Dari jumlah tersebut, 12 TPS berada di lokasi khusus, yakni Lapas dan Rutan, untuk menjamin hak pilih warga binaan. Rinciannya mencakup 4 TPS di Lapas Kelas I Surabaya, 3 TPS di Lapas Kelas IIA Sidoarjo, 4 TPS di Rutan Kelas I Surabaya, dan 1 TPS di Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya. Dengan jumlah DPT mencapai hampir 1,5 juta jiwa, Kabupaten Sidoarjo

menjadi daerah dengan DPT terbesar keempat di Jawa Timur, setelah Surabaya, Jember, dan Malang. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 16.6.



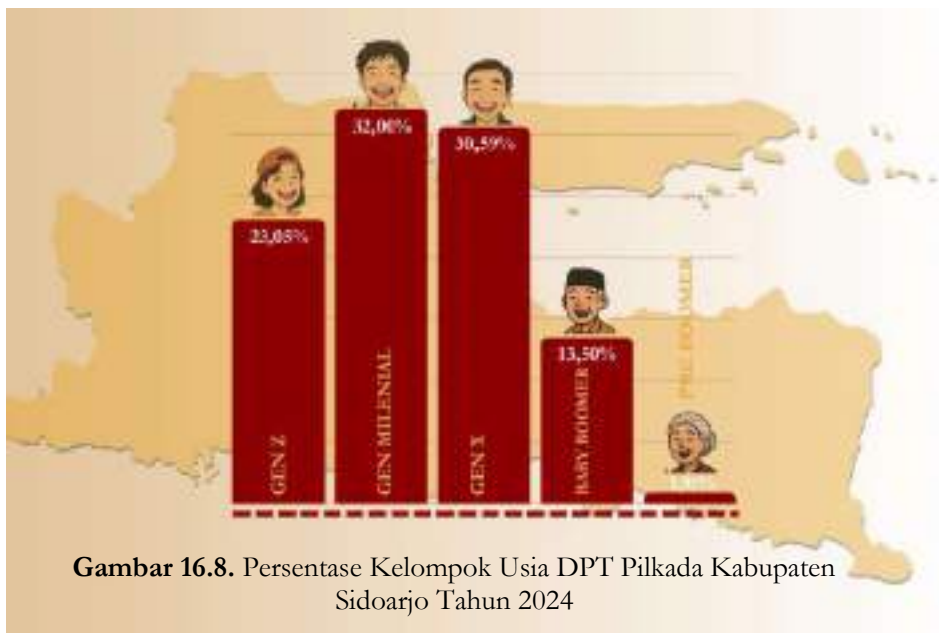
Berdasarkan sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 Kabupaten Sidoarjo, komposisi pemilih berdasarkan jenis kelamin menunjukkan proporsi yang relatif seimbang. Dari total 1.479.539 pemilih (100%), sebanyak 728.882 orang (49,26%) merupakan laki-laki, sementara 750.657 orang (50,74%) adalah perempuan. Data ini menunjukkan bahwa perempuan sedikit mendominasi jumlah pemilih tetap di Kabupaten Sidoarjo, yang sekaligus menunjukkan pentingnya peran perempuan dalam partisipasi politik dan proses demokrasi lokal.

Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam kategori utama, yakni pemilih. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 16.7 berikut.



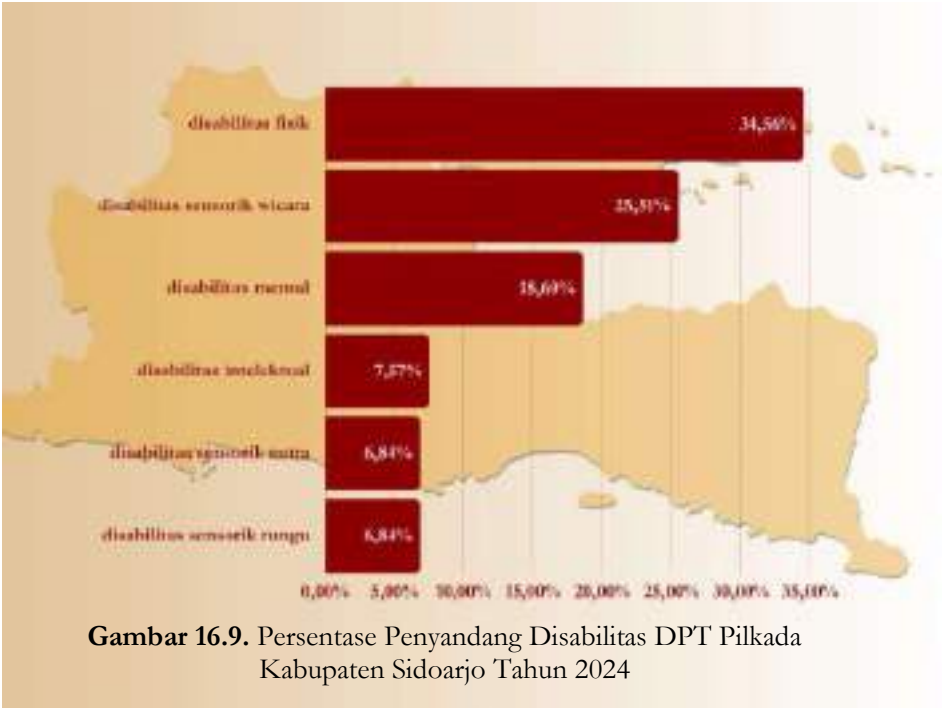
Sebaran DPT Pilkada 2024 Kabupaten Sidoarjo berdasarkan status pemilih menunjukkan bahwa dari total 1.479.539 pemilih, sebanyak 22.413 orang merupakan pemilih pemula, terdiri dari 11.518 laki-laki (51,39%) dan 10.895 perempuan (48,61%). Data ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pemula di Pilkada Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh pemilih laki-laki, meskipun selisihnya tidak terlalu signifikan. Kehadiran pemilih pemula menjadi penanda penting akan tumbuhnya partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi lokal dalam Pilkada Serentak Jatim 2024.

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 16.8.



Sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 Kabupaten Sidoarjo berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi pemilih dari kalangan usia produktif, khususnya Generasi Milenial dan Generasi X. Dari total 1.479.539 pemilih (100%), kelompok Generasi Milenial (usia 28–43 tahun) menjadi yang terbesar dengan jumlah 473.398 orang (32,00%), disusul oleh Generasi X (usia 44–59 tahun) sebanyak 452.585 orang (30,59%). Di urutan ketiga adalah Generasi Z (usia 17–27 tahun) dengan 341.024 pemilih (23,05%), menunjukkan kontribusi signifikan dari kalangan pemilih muda atau pemula. Sementara itu, kelompok *Baby Boomer* (usia 60–78 tahun) berjumlah 199.793 orang (13,50%), dan *Pre-Boomer* (di atas 79 tahun) tercatat sebanyak 12.739 orang (0,86%). Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pemilih di Sidoarjo berada dalam usia produktif, yang menjadi potensi strategis dalam membangun partisipasi politik aktif dan meleak informasi dalam Pilkada 2024.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 disajikan pada gambar 16.9, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Dalam Pilkada 2024, terdapat 5.865 pemilih penyandang disabilitas yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sidoarjo. Komposisi terbesar berasal dari penyandang disabilitas fisik sebanyak 2.032 orang (34,65%), diikuti oleh disabilitas sensorik wicara sebanyak 1.496 orang (25,51%) dan disabilitas mental sebanyak 1.091 orang (18,60%). Sementara itu, disabilitas intelektual tercatat sebanyak 444 orang (7,57%), dan disabilitas sensorik netra dan rungu masing-masing sebanyak 401 orang (6,84%). Data ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo berkomitmen dalam mengakomodasi hak pilih kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemilihan yang inklusif dan menjangkau seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi.

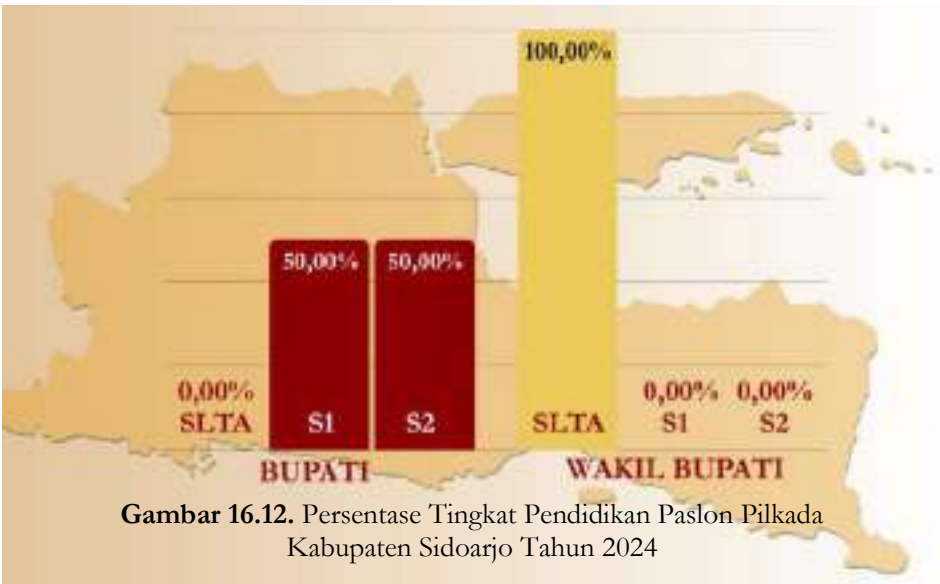
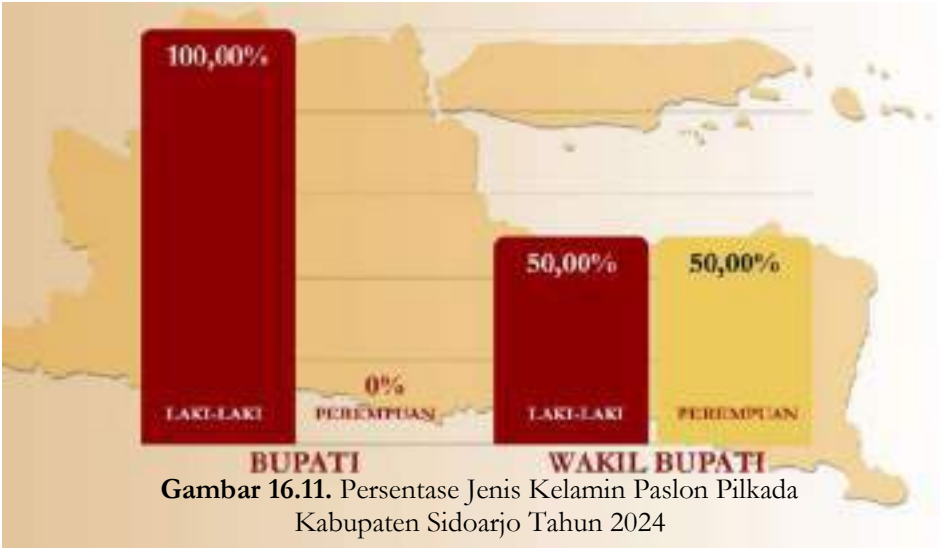
4. Pencalonan

Tahapan pencalonan dalam Pilkada 2024 Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024. Proses ini mencakup pendaftaran, verifikasi administrasi, hingga penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. KPU Kabupaten Sidoarjo memastikan seluruh proses pencalonan berlangsung secara transparan, adil, dan akuntabel, baik untuk pasangan calon yang diusung partai politik maupun yang berasal dari jalur perseorangan.

Pasangan calon wajib menyerahkan dokumen persyaratan administratif, termasuk dokumen identitas, visi-misi, riwayat hidup, serta surat dukungan (bagi calon perseorangan). Seluruh dokumen diverifikasi secara ketat oleh KPU untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan sesuai aturan yang berlaku. Hasil verifikasi tersebut menjadi dasar bagi KPU Kabupaten Sidoarjo dalam menetapkan sebanyak 2 (dua) pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan kampanye dan pemungutan suara. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada gambar 16.10 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.



Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo disajikan pada gambar 16.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo disajikan pada gambar 16.12.



Komposisi jenis kelamin pasangan calon menunjukkan bahwa dari total 4 orang calon, sebanyak 3 orang (75,00%) adalah laki-laki, dan 1 orang (25,00%) adalah perempuan. Semua calon Bupati adalah laki-laki (100%), sementara di posisi Wakil Bupati terjadi keseimbangan, masing-masing satu laki-laki dan satu perempuan. Komposisi ini menunjukkan keterwakilan gender dalam pencalonan meskipun masih didominasi oleh laki-laki.

Berdasarkan latar belakang pendidikan, sebaran pasangan calon menunjukkan keragaman yang cukup menarik. Dari total 4 orang calon, 2

menarik perhatian generasi muda dan anak-anak, guna meningkatkan minat mereka dalam memahami proses demokrasi sejak dini.



Gambar 16.14. Maskot Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

KPU Kabupaten Sidoarjo memperkenalkan maskot resmi Pilkada 2024 bernama "Guk Kasijo", yang merupakan akronim dari "*Ciptakan Pilkada Bersih Sidoarjo*". Sosok maskot ini mengambil bentuk trenggiling, yang dipilih karena merupakan fauna ikonik khas Kabupaten Sidoarjo dan telah ditetapkan sebagai fauna identitas daerah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Guk Kasijo tampil dengan udeng Pacul Gowang, blangkon khas Sidoarjo yang melambangkan kehormatan dan martabat dalam pelaksanaan Pilkada. Ia digambarkan menggenggam paku dan memegang surat suara bertanggal 27 November 2024, sebagai simbol semangat dan optimisme masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi. Sikap siap siaga dan ekspresi gembira pada Guk Kasijo mencerminkan antusiasme dan kesiapan masyarakat Sidoarjo untuk berpartisipasi dalam Pilkada yang jujur dan damai. Guk Kasijo juga mengenakan sarung dengan motif batik khas Sidoarjo, yaitu Udang, Bandeng, dan Beras Utah, yang melambangkan kekayaan budaya serta potensi sumber daya alam Sidoarjo. Kehadiran maskot ini diharapkan dapat mendekatkan nilai-nilai demokrasi kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda dan pemilih pemula, melalui pendekatan yang edukatif, atraktif, dan bernuansa lokal.

Dalam rangka memperluas jangkauan informasi dan edukasi, KPU Sidoarjo menyelenggarakan beragam sesi sosialisasi yang ditujukan kepada berbagai segmen masyarakat. Pemilih muda mendapatkan porsi terbesar dengan 16 sesi sosialisasi, sementara pemilih pemula yang belum memiliki pengalaman dalam pilkada

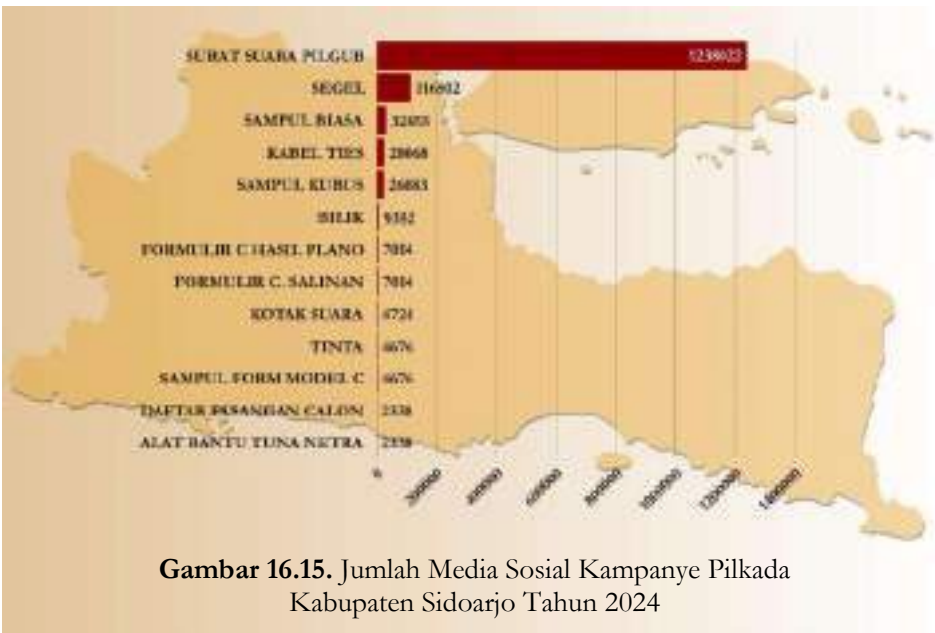
mendapatkan 12 sesi khusus. Komunitas masyarakat juga menjadi sasaran utama dengan 12 sesi sosialisasi. Kelompok keagamaan mendapatkan 4 sesi, sementara kelompok perempuan, kelompok disabilitas, dan wilayah terpencil masing-masing mendapatkan 2 sesi sosialisasi. Adapun kelompok marjinal dan masyarakat umum masing-masing memperoleh 1 sesi.

Melalui pendekatan yang beragam dan inklusif ini, KPU Kabupaten Sidoarjo berupaya memastikan bahwa informasi mengenai Pilkada 2024 dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sekaligus meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi lokal.

Tabel 16.1. Fasilitas KPU Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Kategori	Jenis	Jumlah
Alat Peraga Kampanye	Baliho	10
	Spanduk	1.384
	Umbul-Umbul	720
	Pembersihan APK	1
Bahan Kampanye	Brosur	631.600
	Selebaran	631.600
	Pamflet	8.740
	Poster	8.740
Iklan	Televisi	140
	Radio	140
Kampanye	Kampanye Damai	1
	Debat	3

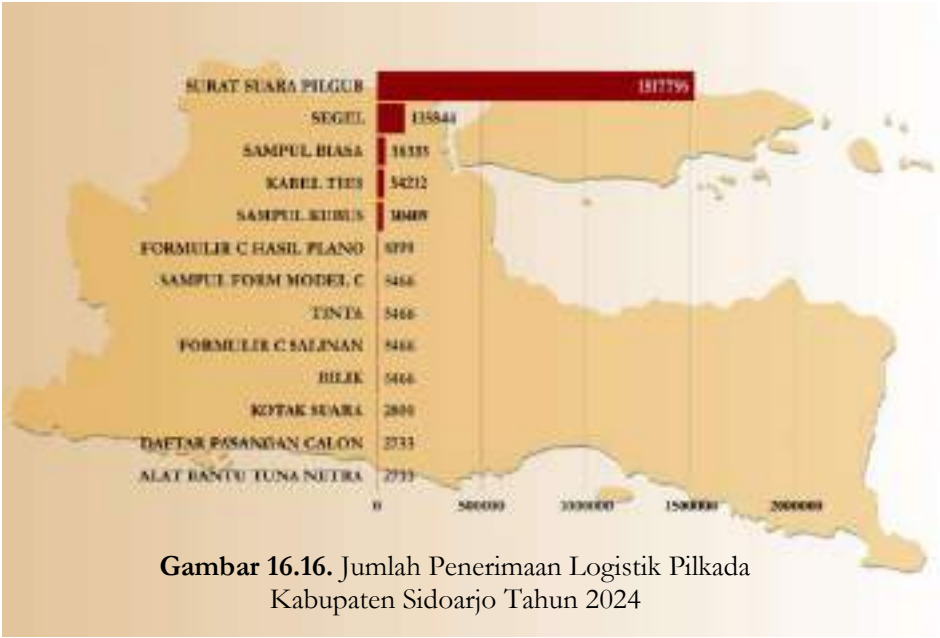
Sementara itu, jumlah media sosial yang digunakan dalam kampanye oleh masing-masing pasangan calon (paslon) pada Pilkada 2024 Kabupaten Sidoarjo secara lengkap disajikan pada gambar 16.15.



Gambar 16.15. Jumlah Media Sosial Kampanye Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

6. Logistik

Perencanaan kebutuhan anggaran logistik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2024 yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota dimulai pada bulan Juni 2024. Tahapan ini diawali dengan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap berbagai barang logistik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilihan. Penyusunan HPS dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo berdasarkan jenis-jenis logistik yang diperlukan untuk mendukung proses pemungutan dan penghitungan suara. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 16.16.



Gambar 16.16. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Sebagai bagian dari persiapan teknis logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2025, KPU Kabupaten Sidoarjo menugaskan sebanyak 150 personel khusus pada masing-masing proses *setting* dan *packing* logistik. Keseimbangan jumlah personel ini menunjukkan bahwa KPU Sidoarjo mengalokasikan sumber daya secara proporsional antara tahapan penyiapan dan pengepakan logistik. Sementara itu, dalam mendukung kelancaran distribusi logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, KPU Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan moda transportasi yang mencakup berbagai tingkatan penyelenggara pilkada, mulai dari PPK, PPS, dan TPS. Jenis moda transportasi yang digunakan didominasi oleh mobil truk, dengan rincian jumlah sebagai berikut:

- Tingkat PPK: 18 unit mobil truk
- Tingkat PPS: 346 unit mobil truk
- Tingkat TPS: 2.733 unit mobil truk

Jumlah moda transportasi ini disesuaikan dengan cakupan wilayah dan kebutuhan pengangkutan logistik, seperti kotak suara, surat suara, bilik, tinta, serta perlengkapan pendukung lainnya. Penyediaan moda transportasi yang memadai menjadi bagian penting dalam menjamin tepat waktu dan keamanan logistik selama proses pilkada berlangsung, khususnya dalam tahap distribusi menuju hari pemungutan suara. Beberapa desa di Kabupaten Sidoarjo

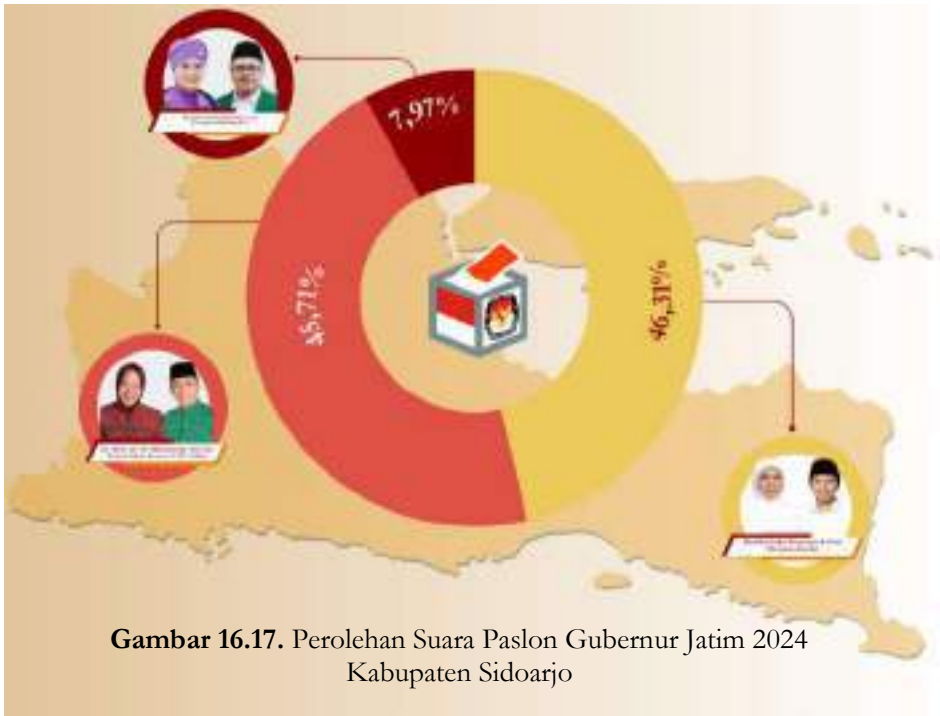
dikategorikan sebagai daerah terpencil, yang memerlukan strategi khusus dalam proses pengiriman logistik, baik dari segi waktu, moda transportasi, maupun kesiapan petugas. Wilayah terpencil ini memiliki akses yang terbatas, baik karena kondisi infrastruktur jalan yang sempit atau berlumpur, maupun karena letaknya yang berada di wilayah pesisir atau kawasan rawa-rawa. Adapun desa-desa terpencil yang menjadi perhatian khusus dalam pendistribusian logistik antara lain:

1. Kecamatan Buduran – Desa Sawohan, khususnya Dusun Kepentingan
2. Kecamatan Sidoarjo – Desa Gebang, khususnya Dusun Kalikajang
3. Kecamatan Porong – Dusun Kali Kendil, Desa Plumbon
4. Kecamatan Jabon – Desa Tambak Kalisogo, khususnya Dusun Tambak Kalisogo

Keempat wilayah ini memerlukan koordinasi lintas sektor dan perencanaan yang matang agar distribusi logistik dapat sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik. KPU Kabupaten Sidoarjo berupaya mengantisipasi hambatan geografis ini dengan pengadaan moda transportasi yang sesuai dan pemberangkatan lebih awal untuk wilayah yang sulit dijangkau.

7. Hasil Pilkada Serentak

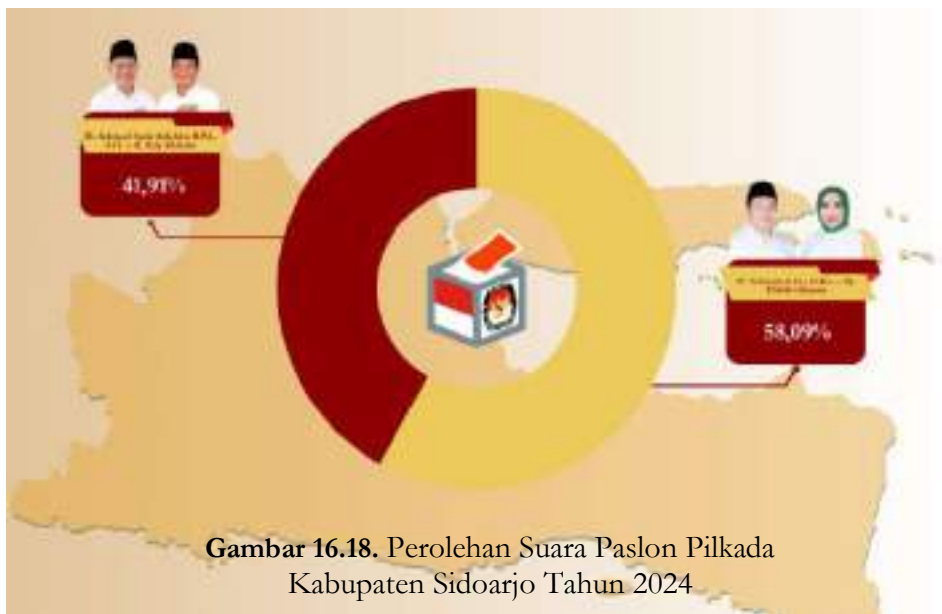
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Sidoarjo disajikan pada gambar 16.17.



Gambar 16.17. Perolehan Suara Paslon Gubernur Jatim 2024 Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestjanto Dardak meraih suara terbanyak dengan jumlah 455.406 suara atau 46,31% dari total suara sah. Di posisi kedua, pasangan Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) memperoleh 449.507 suara atau 45,71%. Sementara itu, pasangan Luluk Nur Ihamidah – Lukmanul Hakim berada di posisi ketiga dengan 78.400 suara atau 7,97%. Total suara sah yang terkumpul mencapai 983.313 suara, mencerminkan tingginya partisipasi pemilih dalam kontestasi Pilgub.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 1618.



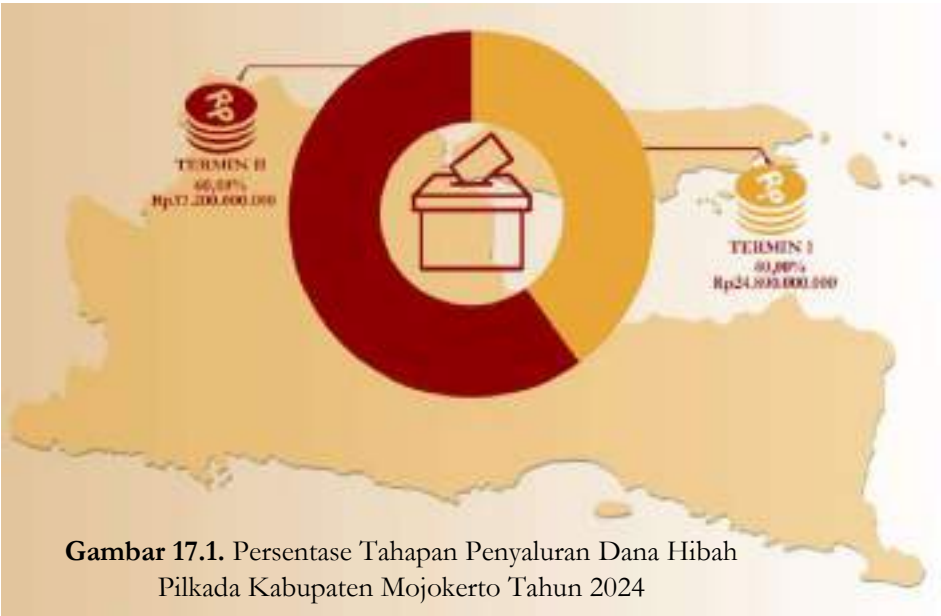
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo, pasangan H. Subandi, S.H., M.Kn. – Hj. Mimik Idayana meraih suara terbanyak dengan perolehan 559.878 suara atau 58,09% dari total suara sah. Sementara itu, pasangan H. Achmad Amir Aslichin, B.Pd., S.H. – H. Edy Widodo memperoleh 403.999 suara atau 41,91%. Total suara sah yang dihimpun dalam Pilkada ini mencapai 963.877 suara, menandakan partisipasi pemilih yang cukup tinggi dalam menentukan kepemimpinan daerah lima tahun ke depan.

BAGIAN 17

KABUPATEN MOJOKERTO

1. Perencanaan Program dan Anggaran

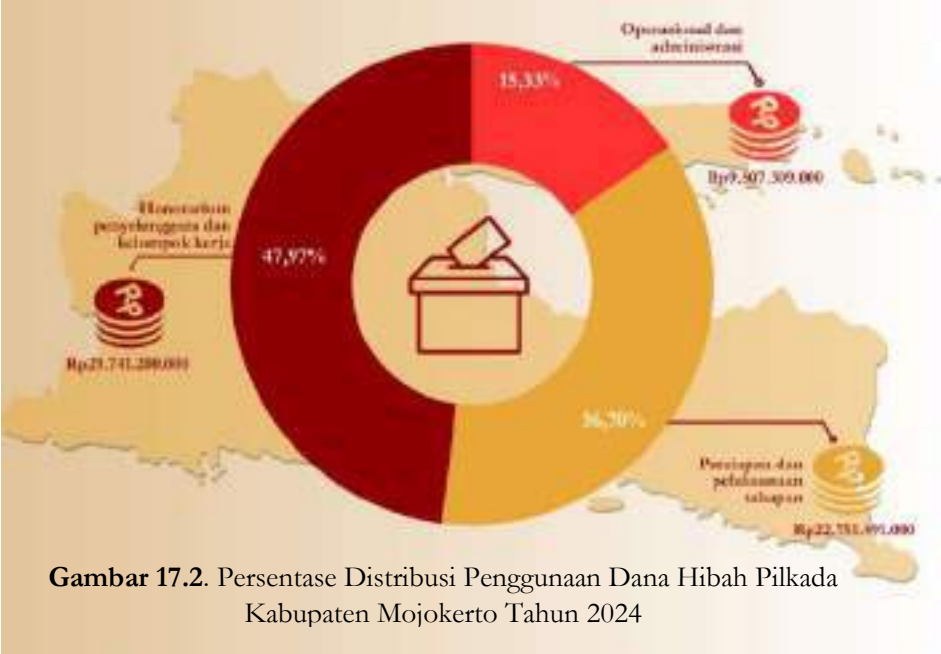
Perencanaan anggaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Penandatanganan ini tertuang dalam dokumen Nomor 39 Tahun 2023 dan Nomor 795/KU.07-NK/3516/2023 yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2023. Berdasarkan NPHD tersebut, KPU Kabupaten Mojokerto memperoleh alokasi dana hibah sebesar Rp62.000.000.000, yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilihan Tahun 2024. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 17.1 berikut.



Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), KPU Kabupaten Mojokerto memperoleh dana hibah untuk yang disalurkan dalam dua termin. Termin pertama sebesar Rp24.800.000.000 (40,00%) dicairkan pada tanggal 20 November 2023, sedangkan termin kedua sebesar

Rp37.200.000.000 (60,00%) dicairkan pada tanggal 24 April 2024. Skema pencairan ini disusun untuk memastikan keberlangsungan setiap tahapan pemilihan secara bertahap dan efisien sesuai kebutuhan operasional.

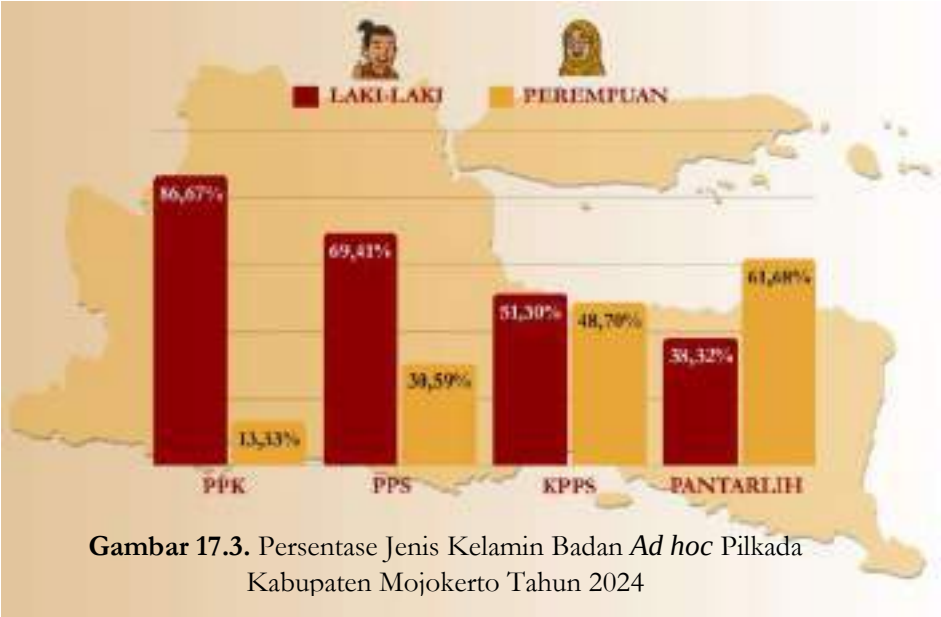
Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 17.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.



Dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dialokasikan ke dalam tiga komponen utama pembiayaan. Alokasi pertama sebesar Rp22.751.491.000 (36,70%) digunakan untuk mendanai tahapan persiapan dan pelaksanaan, meliputi kegiatan teknis seperti sosialisasi, bimbingan teknis, logistik pilkada, dan tahapan penyelenggaraan lainnya. Kemudian, Rp9.507.309.000 (15,33%) dialokasikan untuk operasional dan administrasi perkantoran, yang mencakup kebutuhan alat tulis kantor, komunikasi, perlengkapan kerja, serta penunjang administrasi kelembagaan. Sementara itu, komponen honorarium memperoleh alokasi terbesar, yaitu sebesar Rp29.741.200.000 (47,97%), yang diperuntukkan bagi pembayaran honor bagi penyelenggara di berbagai tingkatan, termasuk badan *ad hoc* dan pelaksana teknis di lapangan. Pembagian anggaran ini dirancang untuk menunjang pelaksanaan Pilkada yang efektif, transparan, dan akuntabel.

2. **Badan *Ad hoc***

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto telah membentuk jajaran badan *ad hoc* yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan teknis pemilihan di lapangan. Terdapat empat jenis badan *ad hoc* yang direkrut dan dilantik, dengan jumlah yang bervariasi sesuai cakupan tugas masing-masing. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berjumlah 90 orang, tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdiri dari 912 orang, mewakili desa dan kelurahan yang ada. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) direkrut sebanyak 3.158 orang untuk menjalankan pencocokan dan penelitian data pemilih. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan kelompok dengan jumlah terbanyak, yaitu 11.326 orang, yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menjadi ujung tombak pelaksanaan pemungutan suara. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 17.3.

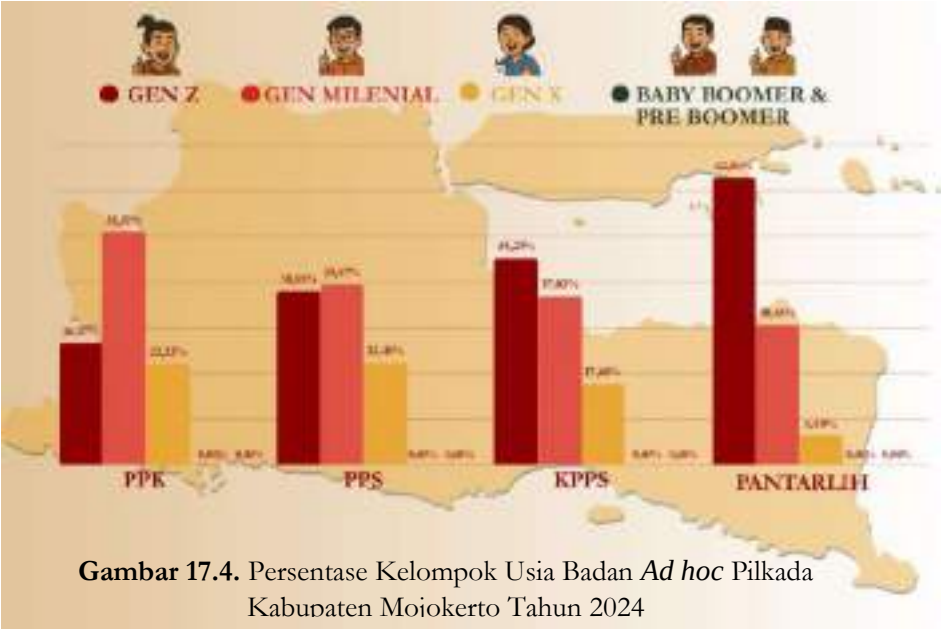


Gambar 17.3. Persentase Jenis Kelamin Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan gambar 17.3. pada tingkat PPK, dari total 90 anggota, sebanyak 78 orang (86,67%) merupakan laki-laki dan 12 orang (13,33%) perempuan. Komposisi serupa terlihat pada PPS, yang terdiri dari 633 laki-laki (69,41%) dan 279 perempuan (30,59%) dari total 912 anggota. Untuk tingkat KPPS yang mencakup 11.326 anggota, terdiri dari 5.810 laki-laki

(51,30%) dan 5.516 perempuan (48,70%). Selanjutnya, pada Pantarlih keterlibatan perempuan justru lebih dominan. Dari total 3.158 anggota Pantarlih, sebanyak 1.948 orang (61,68%) adalah perempuan, sedangkan 1.210 orang (38,32%) laki-laki. Komposisi ini mencerminkan keterlibatan aktif perempuan dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan, khususnya pada proses pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara di tingkat TPS, serta menjadi cerminan penerapan prinsip keadilan gender dalam proses demokrasi di Kabupaten Mojokerto.

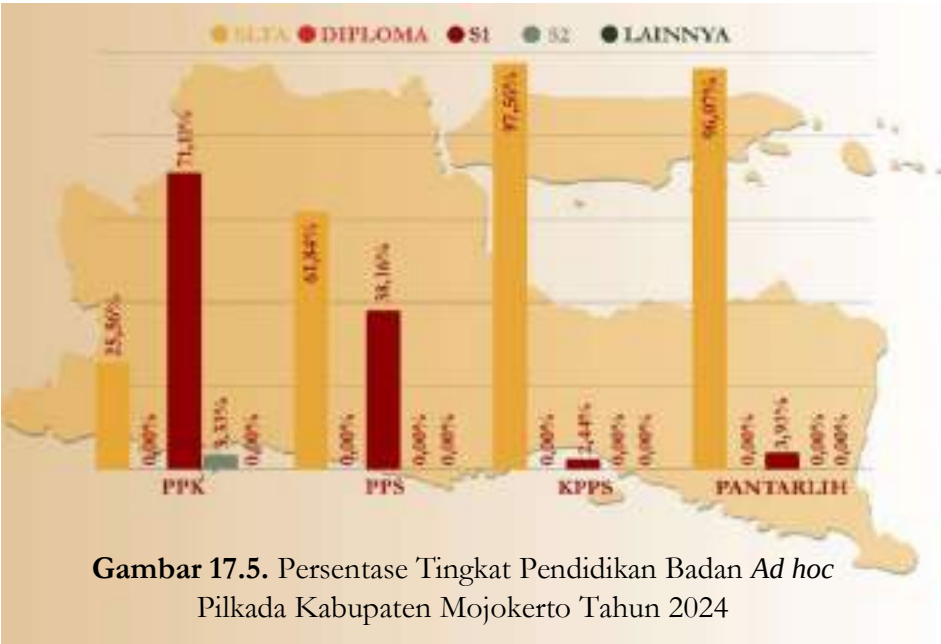
Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 17.4 berikut.



Sebaran demografi badan *ad hoc* Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi generasi muda di seluruh tingkat penyelenggaraan teknis pilkada. Pada tingkat PPK yang berjumlah 90 orang, mayoritas berasal dari Generasi Milenial (28–43 tahun) sebanyak 46 orang (51,11%), diikuti oleh Generasi Z (17–27 tahun) sebanyak 24 orang (26,67%), dan Generasi X (44–59 tahun) sebanyak 20 orang (22,22%). Di tingkat PPS dengan total 912 orang, 360 orang (39,47%) berasal dari Generasi Milenial, 347 orang (38,05%) dari Generasi Z, dan 205 orang (22,48%) dari Generasi X. Sementara itu, pada tingkat KPPS yang terdiri dari 11.326 orang, sebanyak 5.130 orang (45,29%) merupakan Generasi Z, disusul oleh 4.193 orang (37,02%) dari Generasi

Milenial, dan 2.003 orang (17,68%) dari Generasi X. Pada tingkat Pantarlih yang berjumlah 3.158 orang, dominasi Generasi Z terlihat sangat menonjol, yakni sebanyak 1.985 orang (62,86%), diikuti oleh 968 orang (30,65%) dari Generasi Milenial, dan 205 orang (6,49%) dari Generasi X. Seluruh data tersebut menunjukkan bahwa Generasi Z dan Milenial menjadi kelompok usia paling dominan dalam struktur badan *ad hoc*, khususnya pada KPPS dan Pantarlih yang menjadi pelaksana teknis langsung di tingkat TPS dan pemutakhiran data.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *Ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 17.5.



Sebaran tingkat pendidikan badan *ad hoc* Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto menunjukkan, pada tingkat PPK yang berjumlah 90 orang, mayoritas merupakan lulusan Strata 1 (S1) sebanyak 64 orang (71,11%), diikuti oleh lulusan SLTA sebanyak 23 orang (25,56%), dan lulusan Strata 2 (S2) sebanyak 3 orang (3,33%). Untuk tingkat PPS sebanyak 912 orang, sebagian besar berasal dari lulusan SLTA sebanyak 564 orang (61,84%), dan sisanya 348 orang (38,16%) merupakan lulusan S1. Pada KPPS yang berjumlah 11.326 orang, dominasi sangat kuat terlihat pada lulusan SLTA sebanyak 11.050 orang (97,56%), sementara lulusan S1 hanya 276 orang (2,44%). Komposisi serupa juga terjadi pada Pantarlih sebanyak 3.158 orang, yang didominasi

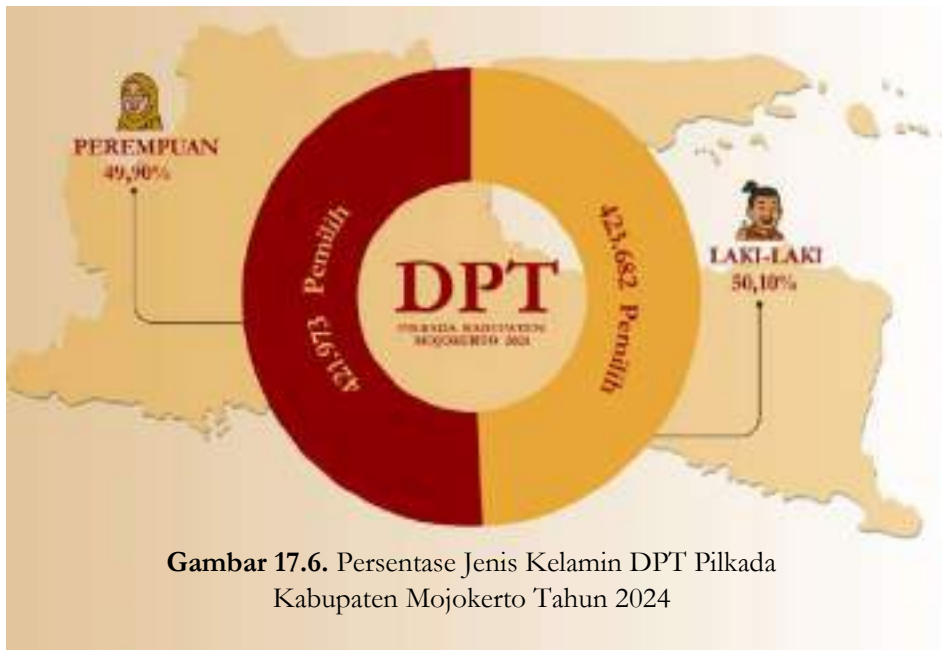
oleh lulusan SLTA sebanyak 3.034 orang (96,07%), dan hanya 124 orang (3,93%) yang berlatar belakang pendidikan S1.

Berdasarkan klasifikasi disabilitas, diketahui bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024, terdapat 2 orang penyandang disabilitas yang terlibat sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Keterlibatan ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Mojokerto dalam mendorong inklusivitas dan memberikan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Keikutsertaan mereka menjadi simbol bahwa proses demokrasi tidak hanya bersifat partisipatif, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip nondiskriminasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

3. Pemutakhiran Data

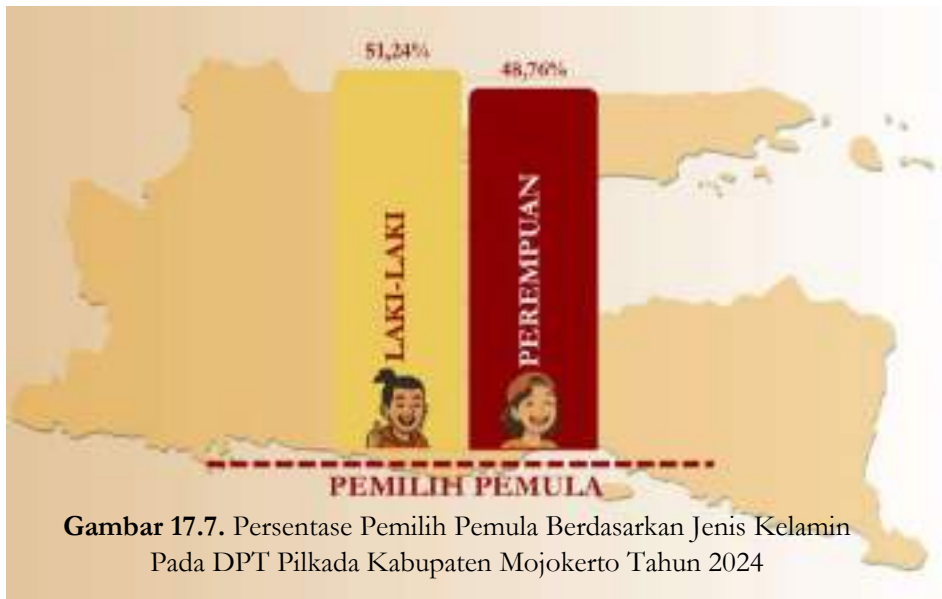
Pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar secara sah dan akurat dalam daftar pemilih. KPU Kabupaten Mojokerto telah menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 20 September 2024, yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 1400 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Kabupaten Mojokerto untuk Pemilihan Tahun 2024.

Hasil pemutakhiran data diketahui bahwa jumlah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) sebanyak 855.422 pemilih. Setelah proses penyusunan dan perbaikan, ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 847.618 pemilih, dan pada tahap akhir penetapan, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat sebanyak 845.655 pemilih. Penurunan jumlah pemilih dari DPHP ke DPT menunjukkan proses validasi yang ketat, termasuk pencoretan data ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat, serta pemilih yang telah meninggal dunia atau pindah domisili. Melalui proses pemutakhiran ini, KPU Kabupaten Mojokerto memastikan bahwa data pemilih yang digunakan pada hari pemungutan suara adalah data yang sah, akurat, dan mutakhir, demi menjamin hak pilih masyarakat secara adil dan demokratis. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 17.6.



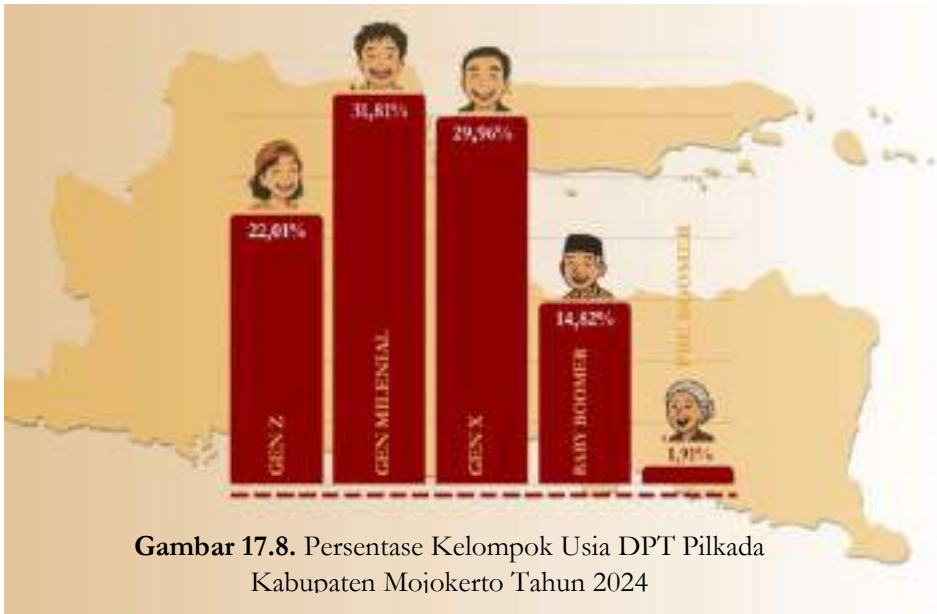
Berdasarkan hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), komposisi berdasarkan jenis kelamin menunjukkan distribusi yang relatif seimbang. Pemilih perempuan tercatat sebanyak 423.682 orang (50,10%), sedikit lebih tinggi dibandingkan pemilih laki-laki yang berjumlah 421.973 orang (49,90%). Komposisi ini mencerminkan keseimbangan partisipasi antara pemilih laki-laki dan perempuan di Kabupaten Mojokerto, serta menjadi indikator penting dalam memastikan keterwakilan dan inklusivitas dalam proses pilkada. Peran aktif kedua kelompok gender ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas demokrasi lokal.

Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni pemilih pemula dan pemilih non-pemula. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 17.7 berikut.



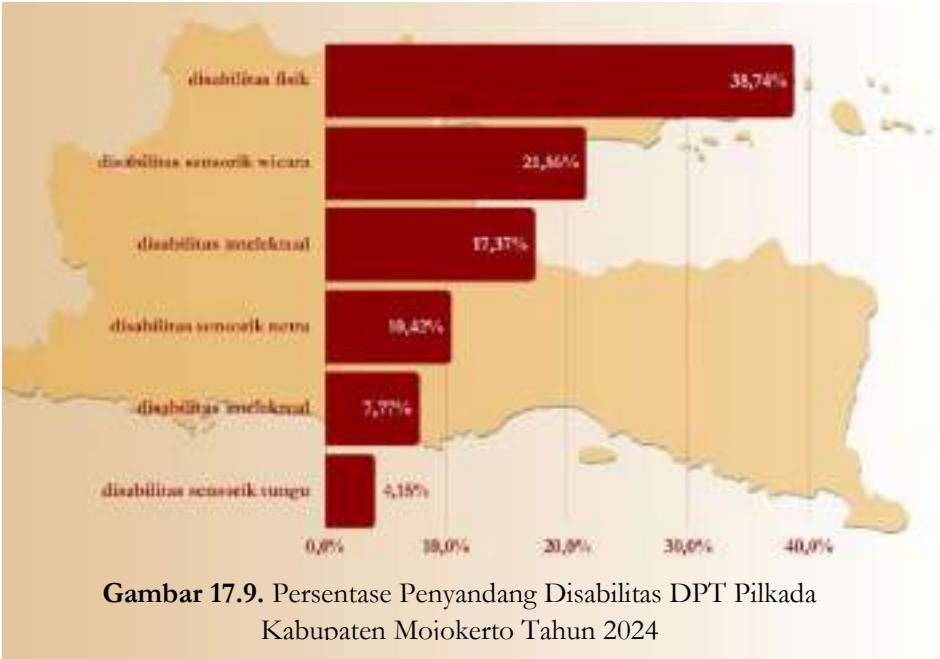
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024 juga dikelompokkan berdasarkan status pemilih, yaitu pemilih pemula. Klasifikasi ini penting untuk menggambarkan keterlibatan generasi baru dalam proses demokrasi. Dari total 845.655 pemilih, terdapat 6.249 pemilih pemula, yakni warga yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Jumlah ini terdiri dari 3.202 laki-laki (51,24%) dan 3.047 perempuan (48,76%), mencerminkan antusiasme generasi muda yang relatif seimbang antar gender. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pemula di Pilkada Kabupaten Mojokerto didominasi oleh pemilih laki-laki, meskipun selisihnya tidak terlalu signifikan. Kehadiran pemilih pemula menjadi penanda penting akan tumbuhnya partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi lokal dalam Pilkada Serentak Jatim 2024.

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 17.8.



Berdasarkan klasifikasi usia, pemilih dikelompokkan menjadi lima generasi yang mencerminkan keragaman usia pemilih di Kabupaten Mojokerto. Kelompok usia terbesar adalah Generasi Milenial (28–43 tahun) yang berjumlah 269.033 orang (31,81%), disusul oleh Generasi X (44–59 tahun) sebanyak 253.340 orang (29,96%), menunjukkan dominasi usia produktif dalam struktur pemilih. Generasi Z (17–27 tahun) yang mencerminkan kelompok pemilih muda tercatat sebanyak 186.087 orang (22,01%), yang menjadi potensi strategis dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula dan pemilih muda. Sementara itu, pemilih dari kalangan *Baby Boomer* (60–78 tahun) tercatat sebanyak 125.305 orang (14,82%), dan kelompok usia *Pre-Boomer* (>79 tahun) berjumlah 11.890 orang (1,41%). Kehadiran pemilih lansia menunjukkan bahwa proses demokrasi tetap inklusif bagi semua usia. Distribusi ini memperlihatkan bahwa mayoritas pemilih berada pada rentang usia 28 hingga 59 tahun, sekaligus menjadi indikasi penting dalam perumusan strategi sosialisasi dan edukasi pemilih yang berbasis usia agar pelaksanaan Pilkada berjalan maksimal dan partisipatif.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 disajikan pada gambar 17.9, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto mencatat sebanyak 2.073 pemilih penyandang disabilitas yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Tahun 2024. Data ini menunjukkan upaya serius KPU dalam mengakomodasi hak pilih seluruh warga, termasuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Mayoritas pemilih disabilitas berasal dari kategori Disabilitas Fisik, sebanyak 803 orang (38,74%), disusul oleh Disabilitas Sensorik Wicara sebanyak 447 orang (21,56%), dan Disabilitas Mental sebanyak 360 orang (17,37%). Selain itu, terdapat 216 orang (10,42%) penyandang Disabilitas Sensorik Netra, 161 orang (7,77%) dengan Disabilitas Intelektual, dan 86 orang (4,15%) dengan Disabilitas Sensorik Rungu. Pencatatan dan pelibatan pemilih disabilitas ini menunjukkan komitmen KPU terhadap pilkada yang inklusif, dengan memastikan bahwa seluruh warga negara, tanpa terkecuali, memiliki akses dan kesempatan yang setara dalam menyalurkan hak pilihnya, sehingga menjadi pijakan penting dalam penyediaan fasilitas layanan pemungutan suara yang ramah disabilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

4. Pencalonan

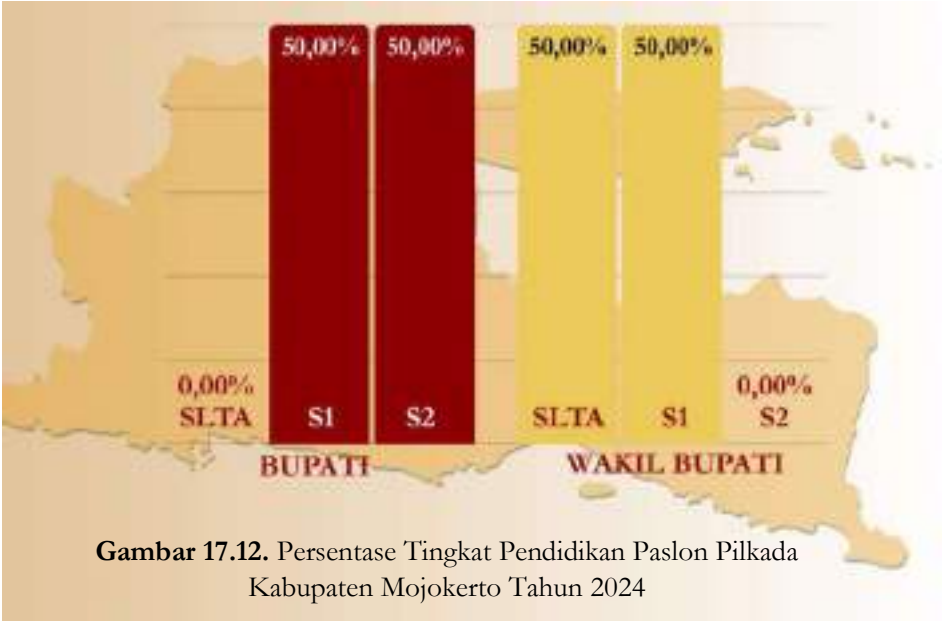
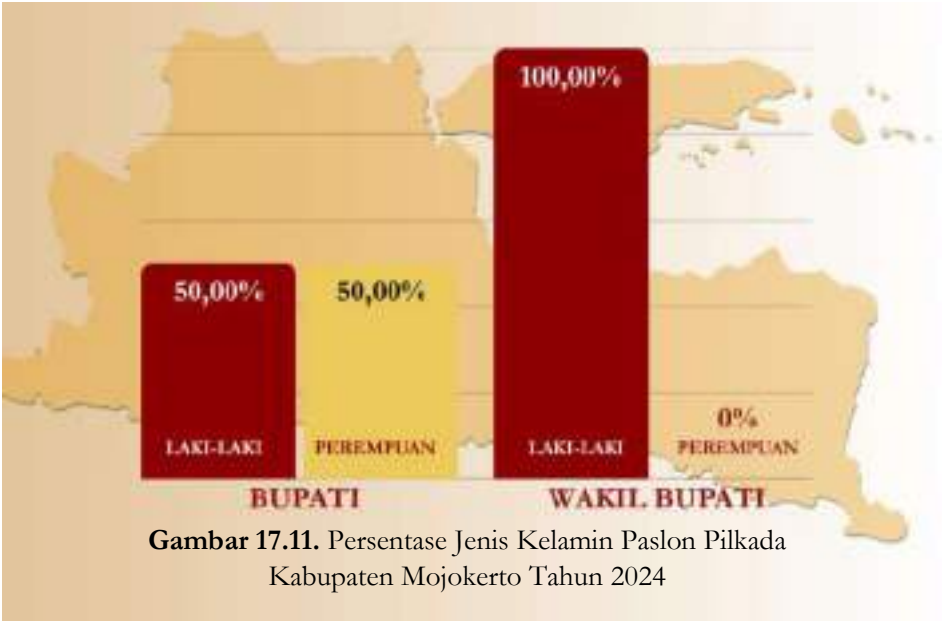
Tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024 mencapai titik penting pada hari Minggu, 22 September 2024, dengan dilaksanakannya Rapat Pleno Terbuka Penetapan

Pasangan Calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini diselenggarakan di kantor KPU Kabupaten Mojokerto sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pilkada. Berdasarkan hasil pleno tersebut, KPU Kabupaten Mojokerto menetapkan dua pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada gambar 17.10 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.



Gambar 17.10. Daftar Nama Paslon Pilkada
Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto disajikan pada gambar 17.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto disajikan pada gambar 17.12.



Berdasarkan komposisi jenis kelamin, terdapat 3 orang laki-laki (75,00%) dan 1 orang perempuan (25,00%). Pada posisi Bupati, proporsi antara laki-laki dan perempuan berimbang, masing-masing 1 orang (50,00%). Sementara itu, pada posisi Wakil Bupati, seluruh kandidat berjenis kelamin laki-laki (2 orang atau 100,00%), tanpa ada keterwakilan perempuan.

Dari aspek latar belakang pendidikan, para calon menunjukkan latar

belakang akademik yang tinggi. Untuk posisi Bupati, masing-masing kandidat memiliki jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang (50,00%) dan S3 sebanyak 1 orang (50,00%). Sementara itu, untuk posisi Wakil Bupati, terdapat 1 orang lulusan S1 (50,00%) dan 1 orang lulusan S2 (50,00%). Secara keseluruhan, dari keempat calon, 2 orang (50,00%) berpendidikan S2, 1 orang (25,00%) berpendidikan S3, dan 1 orang (25,00%) lulusan S1. Komposisi ini mencerminkan bahwa seluruh pasangan calon memiliki latar belakang pendidikan tinggi, yang diharapkan mampu membawa kompetensi dalam memimpin pemerintahan daerah secara efektif dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 17.13, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



Gambar 17.13. Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menerapkan strategi sosialisasi yang partisipatif dan edukatif. KPU menetapkan target maksimal 100 peserta

dalam setiap sesi sosialisasi, dengan tujuan menciptakan suasana diskusi yang lebih interaktif dan mendalam. Melalui pendekatan ini, peserta diharapkan dapat lebih leluasa dalam mengajukan pertanyaan serta memahami berbagai aspek penting seperti tahapan pilkada, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi. Beragam metode sosialisasi digunakan untuk menjangkau masyarakat secara luas, antara lain melalui forum warga, diskusi, ceramah, tatap muka, dan nonton bareng. Pendekatan ini dirancang agar sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat, sekaligus membangun kesadaran kolektif untuk memilih pemimpin secara jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Selain kegiatan sosialisasi langsung, KPU Kabupaten Mojokerto juga menjalin kemitraan dengan 60 media, baik cetak, elektronik, maupun digital, dalam rangka memperluas jangkauan informasi kepada publik. Pelibatan media ini menjadi bagian dari strategi komunikasi KPU untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses mengenai tahapan serta aturan Pilkada. Keterlibatan aktif media dalam mendukung proses sosialisasi menjadi bukti komitmen KPU dalam mewujudkan pilkada yang inklusif, berintegritas, dan mendorong partisipasi masyarakat secara maksimal, sehingga Pilkada 2024 dapat berlangsung secara tertib, aman, dan sukses.

Sebagai bagian dari strategi kampanye kreatif, KPU Kabupaten Mojokerto memperkenalkan maskot resmi Pilkada 2024.



Gambar 17.14. Maskot Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Si GALIH (Warga Memilih) menjadi simbol dan representasi semangat pesta demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024. Sosok Si GALIH digambarkan sebagai burung Garuda, yang tidak hanya

merepresentasikan lambang negara Republik Indonesia, tetapi juga mengandung nilai historis dari Kesultanan Sintang yang berdiri sejak abad ke-13 Masehi. Burung Garuda sebagai lambang negara sendiri merupakan usulan Sultan Pontianak Abdul Hamid II kepada Presiden Soekarno, yang kemudian disempurnakan sebagai representasi ideologis bangsa melalui Pancasila. Sebagai wilayah yang kaya akan nilai budaya dan sejarah, Mojokerto yang dikenal sebagai tanah warisan Kerajaan Majapahit, turut merefleksikan identitas tersebut melalui aksesoris seni budaya yang dikenakan oleh Si GALIH. Tiga elemen utama yang menghiasi Si GALIH, yaitu mahkota, kalung melati, dan ban lengan, merupakan simbol dari kejayaan dan hati yang suci, serta merupakan hasil akulturasi budaya antara Majapahit, Kerajaan Islam (Demak–Mataram), dan masa kolonial Belanda yang lestari hingga kini.

Si GALIH mengenakan pakaian berwarna merah putih, mencerminkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Ekspresi wajah Si GALIH yang ceria dan optimis menggambarkan suka cita masyarakat dalam menyambut Pilkada 2024, sekaligus membawa harapan agar pelaksanaannya berlangsung riang, damai, dan demokratis. Pose melambaikan tangan menjadi simbol ajakan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024. Warna-warna yang digunakan dalam maskot ini memiliki beberapa makna filosofis:

- Hitam sebagai simbol kejayaan dan kehormatan
- Merah sebagai simbol keberanian
- Kuning sebagai simbol harapan dan keyakinan
- Putih sebagai simbol kesucian

Kehadiran Si GALIH sebagai maskot bukan sekadar ornamen visual, melainkan simbol edukatif dan komunikatif dalam membangun kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam berdemokrasi secara sehat, berbudaya, dan bermartabat.

KPU Kabupaten Mojokerto memiliki peran strategis dalam memastikan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berjalan secara adil, tertib, dan demokratis. Untuk itu, KPU memfasilitasi sejumlah metode kampanye yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode kampanye yang difasilitasi meliputi debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK), serta iklan di media cetak dan elektronik.

Dalam hal alat peraga, spanduk menjadi APK terbanyak yang difasilitasi, yaitu sebanyak 1.216 unit, disusul umbul-umbul sebanyak 720 unit, dan baliho

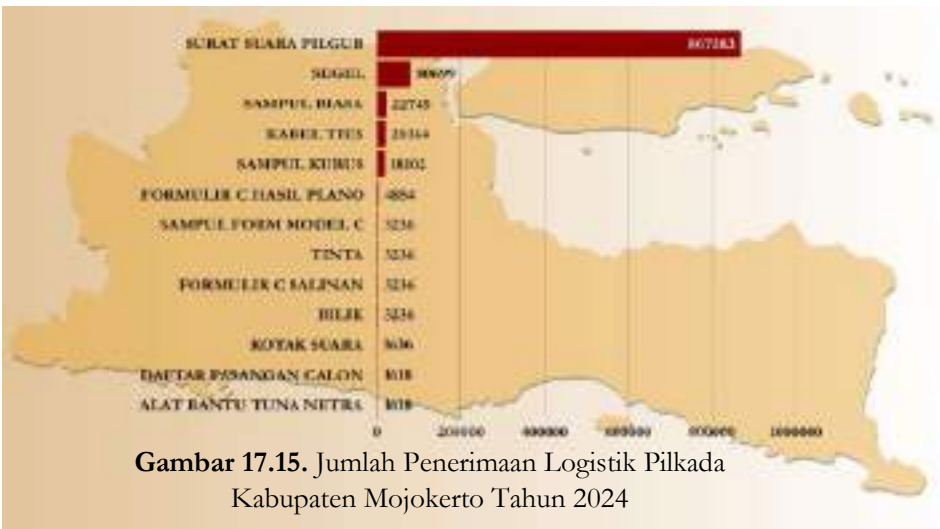
sebanyak 10 unit. Ini menunjukkan fokus distribusi alat kampanye pada titik-titik yang menjangkau wilayah luas dengan intensitas tinggi. Sementara itu, pada kategori bahan kampanye, selebaran menjadi yang paling banyak dicetak, yakni 262.254 eksemplar, disusul oleh brosur dan pamflet masing-masing sebanyak 259.314 eksemplar, dan poster dicetak lebih terbatas yaitu hanya 64.772 eksemplar, mencerminkan pergeseran strategi kampanye ke media yang lebih ringkas dan fleksibel dalam distribusi.

Pada aspek media massa, KPU Kabupaten Mojokerto memfasilitasi 14 kali penayangan iklan di media cetak, 13 kali di televisi, dan 10 kali di radio. Data ini menunjukkan bahwa media cetak dan televisi menjadi saluran utama dalam penyampaian informasi kampanye, sedangkan radio digunakan sebagai pelengkap kanal komunikasi kepada masyarakat. Kegiatan debat publik juga difasilitasi dalam tiga sesi, masing-masing mengusung tema strategis. Debat pertama mengangkat tema *“Strategi Pembangunan Daerah Dalam Menuju Keadilan Masyarakat”*, debat kedua membahas *“Permasalahan, Tantangan, dan Strategi dalam Memajukan Daerah”*, dan debat ketiga mengusung tema *“Peran Pemerintah Daerah dalam Menyelaraskan Program Daerah dengan Nasional serta Strategi Memperkokoh NKRI”*. Debat ini menjadi ruang bagi pasangan calon menyampaikan visi-misi dan adu gagasan secara terbuka kepada masyarakat.

Selain metode konvensional, pasangan calon juga memanfaatkan kanal media sosial secara merata, yakni YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, dan Facebook, dengan frekuensi penggunaan yang sama pada tiap platform (masing-masing 2 akun). Strategi ini menunjukkan bahwa kampanye digital menjadi salah satu pilar utama komunikasi politik dalam Pilkada Mojokerto 2024, dengan tujuan menjangkau pemilih dari berbagai kalangan secara lebih luas dan cepat.

6. Logistik

Dalam rangka memastikan kelancaran dan integritas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto telah melakukan berbagai langkah strategis dalam pengadaan dan distribusi logistik. Proses pengadaan logistik mengacu pada prinsip tepat jenis, jumlah, kualitas, waktu, sasaran, biaya, serta efektif dan efisien. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 17.15.



Proses sortir dan pelipatan surat suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto dimulai sejak tanggal 31 Oktober 2024. Kegiatan ini berlangsung di gudang logistik KPU Kabupaten Mojokerto yang berlokasi di Jalan RA Basoeni, Sooko, dan melibatkan lebih dari 108 petugas. Selanjutnya, proses setting dan packing surat suara ke dalam kotak suara dilakukan secara sistematis oleh 50 petugas yang dibagi ke dalam lima kelompok kerja untuk memastikan efisiensi dan ketepatan pengemasan.

Distribusi logistik dilaksanakan dalam dua tahap, mencakup 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Tahap pertama berlangsung pada 23 November 2024 dan mencakup sembilan kecamatan, yakni Jatirejo, Gondang, Pacet, Trawas, Ngoro, Pungging, Kutorejo, Mojosari, dan Dlanggu, dengan alokasi 828 kotak suara dan 1.656 bilik suara untuk 414 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tahap kedua dilakukan pada 24 November 2024 ke sembilan kecamatan lainnya, yaitu Bangsal, Puri, Trowulan, Sooko, Gedeg, Kemlagi, Jetis, Dawarblandong, dan Mojayanar, dengan pendistribusian 824 kotak suara dan 1.648 bilik suara untuk 412 TPS. Secara keseluruhan, distribusi logistik menjangkau 826 TPS dengan total 1.652 kotak suara dan 3.304 bilik suara, yang dirancang berdasarkan pertimbangan jarak, kondisi geografis, dan jumlah TPS per wilayah.

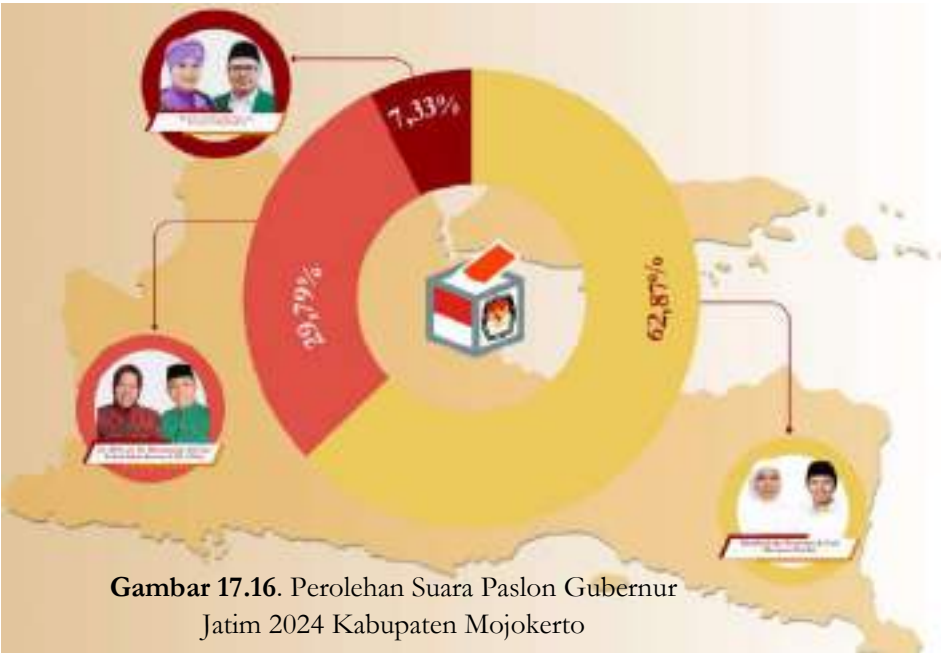
Kondisi geografis Kabupaten Mojokerto menjadi tantangan tersendiri dalam proses distribusi logistik. Beberapa wilayah memiliki akses yang cukup sulit, seperti daerah perbukitan di bagian utara, termasuk Dusun Sumberputung di Kelurahan Sumberjati, Kecamatan Jatirejo, yang dikenal

sebagai daerah kapur yang kurang subur dan terpencil. Selain itu, terdapat pula daerah pelosok seperti Sumberjati secara umum, serta kampung terisolasi seperti Mojokoncot yang seolah membekukan waktu karena keterbatasan aksesibilitas. KPU Kabupaten Mojokerto menjadikan faktor-faktor ini sebagai perhatian khusus guna memastikan seluruh logistik dapat tiba di lokasi tujuan dalam kondisi aman dan tepat waktu.

Dalam mendukung distribusi logistik Pilkada Serentak 2024, KPU Kabupaten Mojokerto mengerahkan dua moda transportasi utama: 36 unit mobil truk untuk distribusi ke 304 titik PPK dan PPS, serta 1.618 unit mobil pick up untuk pengiriman ke tingkat TPS. Pemilihan kendaraan disesuaikan dengan kondisi geografis dan volume logistik, guna menjamin proses distribusi berjalan efisien, tepat waktu, dan aman. Moda transportasi ini berperan penting dalam memastikan seluruh perlengkapan pilkada tiba di lokasi sesuai jadwal.

7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Mojokerto disajikan pada gambar 17.16.



Gambar 17.16. Perolehan Suara Paslon Gubernur
Jatim 2024 Kabupaten Mojokerto

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto, jumlah total suara sah yang tercatat sebanyak 671.076 suara. Pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak memperoleh dukungan terbanyak dengan raihan 421.934 suara (62,87%), menempatkan mereka sebagai peraih suara mayoritas di Kabupaten Mojokerto. Di posisi kedua, pasangan Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) meraih 199.943 suara (29,79%), menunjukkan tingkat dukungan yang juga signifikan dari masyarakat. Sementara itu, pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah – H. Lukmanul Hakim memperoleh 49.199 suara (7,33%). Hasil ini mencerminkan preferensi politik masyarakat Kabupaten Mojokerto yang kuat terhadap kepemimpinan petahana, sekaligus menunjukkan adanya dinamika persaingan yang sehat dalam proses demokrasi tingkat provinsi.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 17.17.



Gambar 17.17. Perolehan Suara Paslon Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024, tercatat sebanyak 697.933 suara sah yang masuk dari seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto. Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa pasangan Dr. H. Muhammad Al Barra, Lc., M.Hum – dr. Muhammad Rizal Oktavian memperoleh suara terbanyak, yaitu sebesar 372.537 suara (53,38%), mengungguli pasangan petahana. Sementara itu, pasangan dr.

Ikfina Fahmawati, M.Si. – Sa’dullah Syarofi, S.E., M.M. meraih 325.396 suara (46,62%). Perolehan suara ini mencerminkan persaingan yang cukup ketat antar kedua pasangan calon, sekaligus menunjukkan dinamika pilihan politik masyarakat Mojokerto yang beragam dan partisipatif. Dengan capaian suara terbanyak, pasangan Al Barra – Rizal Oktavian dipastikan menjadi pemenang Pilkada Mojokerto 2024, yang ke depan diharapkan mampu mengemban amanah masyarakat serta membawa kemajuan bagi Kabupaten Mojokerto secara berkelanjutan.

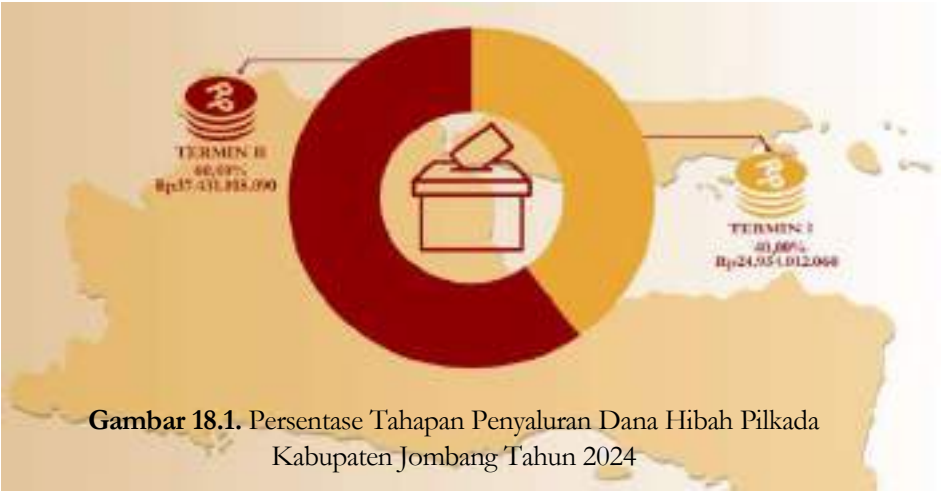
BAGIAN 18

KABUPATEN JOMBANG

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jombang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang telah menyusun rencana program dan anggaran secara bertahap serta berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah.

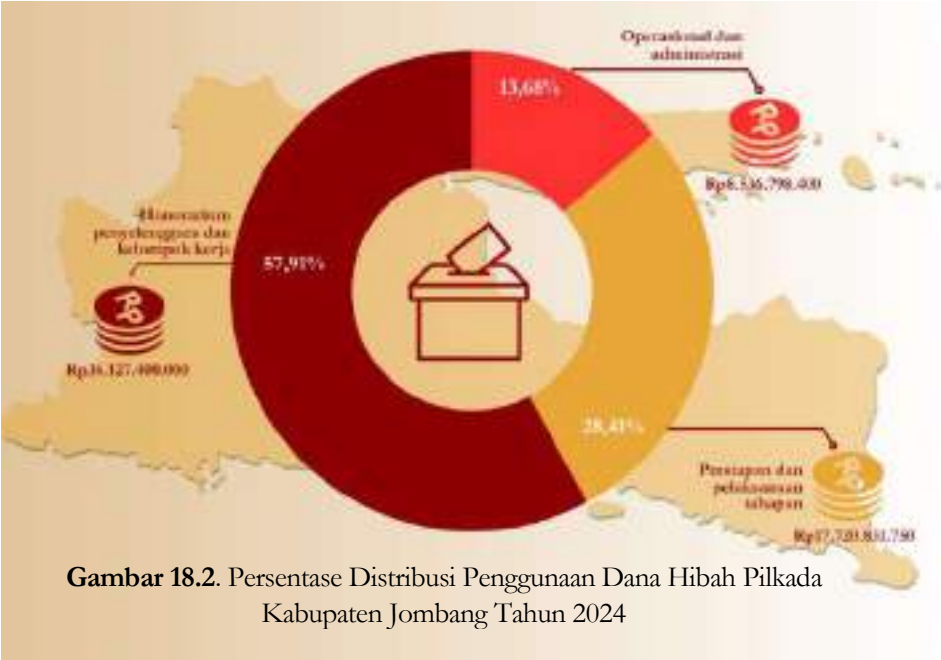
Pengajuan proposal pendanaan awal yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Jombang sebesar Rp72.406.856.750. Namun, setelah proses evaluasi dan penyesuaian terhadap kebutuhan prioritas kegiatan serta mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, KPU melakukan pengajuan proposal kedua dengan nilai sebesar Rp65.425.398.650. Proses pembahasan lebih lanjut dilaksanakan dalam forum rapat bersama antara KPU Kabupaten Jombang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang digelar pada tanggal 22 September 2023. Kesepakatan pendanaan ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 197/494/415.25/2023 tentang Kesepakatan Pendanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jombang Tahun 2024, dengan nilai final sebesar Rp62.385.030.150,00. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 18.1 berikut.



Dana hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jombang Tahun 2024 dicairkan dalam dua tahap, yaitu Termin 1

sebesar Rp24.954.012.060 atau 40,00% dari total keseluruhan dana, yang diterima pada tanggal 17 Oktober 2023. Selanjutnya, Termin 2 dicairkan pada tanggal 4 Maret 2024 dengan nilai sebesar Rp37.431.018.090 atau 60,00% dari total dana hibah. Skema pencairan ini dirancang agar pelaksanaan tahapan Pilkada dapat berjalan efektif dan berkelanjutan sesuai kebutuhan setiap fase penyelenggaraan.

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada Gambar (), yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.



Komponen anggaran hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jombang Tahun 2024 dialokasikan ke dalam tiga kategori utama. Alokasi terbesar terdapat pada komponen honorarium, yang mencapai Rp36.127.400.000 atau setara dengan 57,91% dari total anggaran hibah.

Komponen ini mencakup pembayaran honor bagi penyelenggara pilkada di berbagai tingkatan. Selanjutnya, anggaran untuk tahapan persiapan dan pelaksanaan dialokasikan sebesar Rp17.720.831.750 atau 28,41%, yang mencakup kegiatan teknis seperti logistik, sosialisasi, dan pelaksanaan tahapan pilkada.

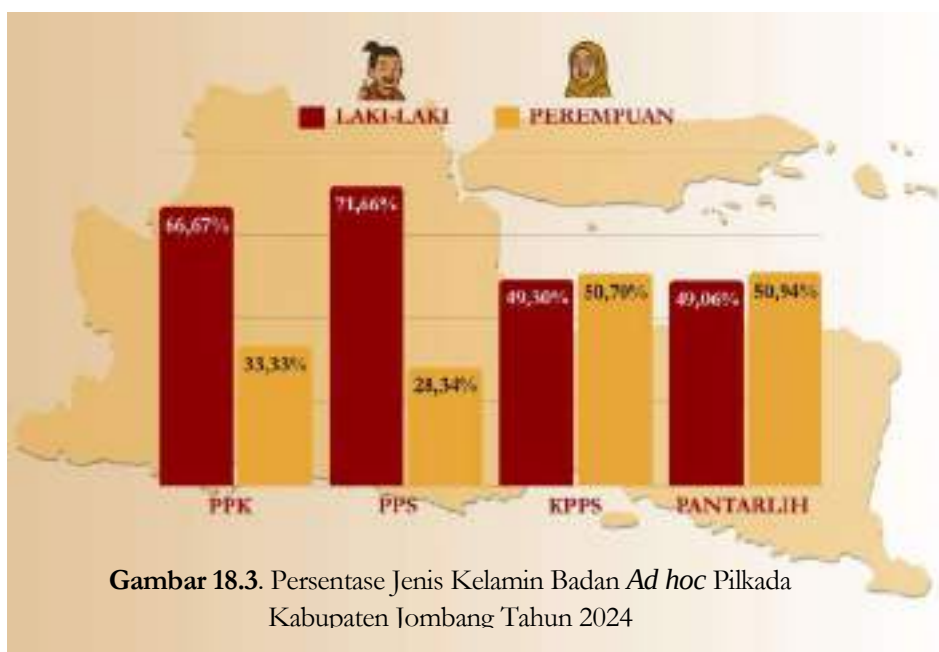
Sementara itu, komponen operasional dan administrasi perkantoran mendapatkan alokasi sebesar Rp8.536.798.400 atau 13,68%, guna menunjang kebutuhan administratif dan operasional KPU Kabupaten Jombang selama

penyelenggaraan Pilkada. Keseluruhan alokasi ini membentuk total anggaran hibah sebesar Rp62.385.030.150, yang dirancang untuk menjamin kelancaran dan profesionalisme penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

2. **Badan *Ad hoc***

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen vital dalam kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jombang Tahun 2024. Dalam konteks ini, keberadaan Badan *Ad hoc* yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan teknis tahapan Pilkada di tingkat wilayah. Pendaftaran anggota badan *ad hoc* dilakukan pada tanggal 23 hingga 29 April 2024 melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Ad hoc* (SIAKBA). Para calon wajib mengunggah dokumen secara daring dan menyerahkan berkas fisik ke Kantor KPU Kabupaten Jombang. Proses seleksi dilakukan secara berlapis, dimulai dari verifikasi administrasi, tes berbasis *Computer Assisted Test* (CAT), hingga wawancara yang menguji pemahaman dan integritas dalam penyelenggaraan pilkada.

Proses pembentukan badan *ad hoc* ini melibatkan mobilisasi SDM internal KPU dan pemanfaatan sarana prasarana secara optimal. Salah satu kegiatan utama adalah pelaksanaan sosialisasi masif di 21 kecamatan dan 106 desa/kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Upaya ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan jumlah petugas: 105 PPK, 918 PPS, 13.595 KPPS, dan 3.812 Pantarlih. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 18.3.

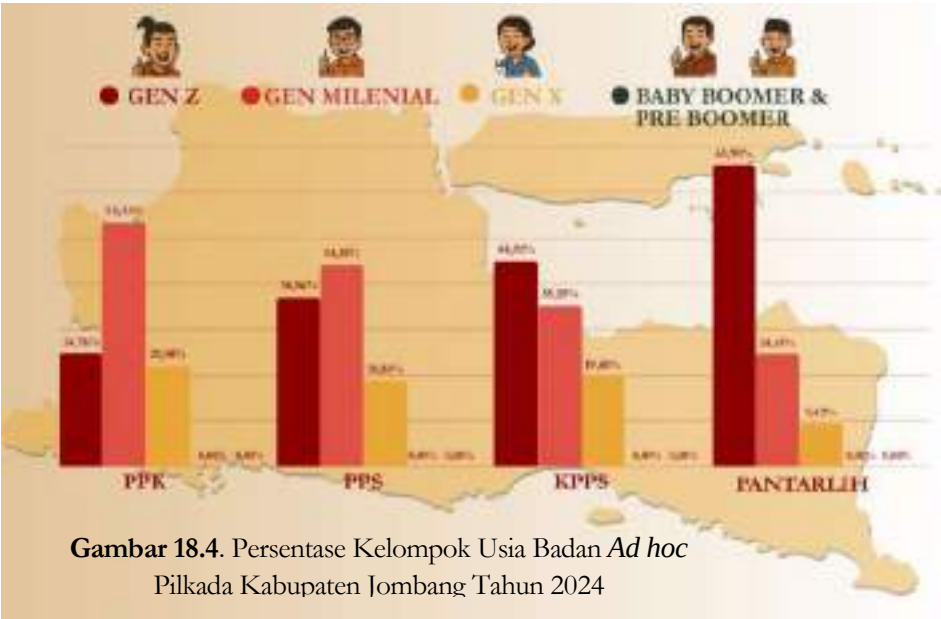


Komposisi badan *ad hoc* dalam Pilkada Kabupaten Jombang Tahun 2024 menunjukkan partisipasi yang cukup berimbang antara laki-laki dan perempuan, mencerminkan prinsip inklusivitas dalam rekrutmen penyelenggara pilkada.

Pada tingkat PPK, terdapat 70 orang laki-laki (66,67%) dan 35 orang perempuan (33,33%), dari total 105 anggota yang dilantik. Komposisi ini sedikit lebih dominan oleh laki-laki, sejalan dengan tren keterlibatan kepilkadaan di tingkat kecamatan yang sering membutuhkan pengalaman teknis dan manajerial. Untuk PPS, dari total 928 anggota, sebanyak 665 orang (71,66%) merupakan laki-laki, sedangkan 263 orang (28,34%) adalah perempuan. Persentase ini masih menunjukkan dominasi laki-laki, namun keterwakilan perempuan tetap terjaga dalam angka yang signifikan. Pada level KPPS, yang berjumlah 13.594 anggota, komposisi justru berbalik, di mana 6.892 orang (50,70%) merupakan perempuan, dan 6.702 orang (49,30%) laki-laki. menunjukkan tingginya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan teknis di TPS, terutama pada hari pemungutan suara. Sementara itu, dalam kelompok Pantarlih yang berjumlah 3.812 orang, proporsi antara laki-laki dan perempuan cukup seimbang, yaitu 1.870 orang laki-laki (49,06%) dan 1.942 perempuan (50,94%). Komposisi ini mencerminkan upaya KPU Kabupaten Jombang dalam memastikan keterwakilan gender yang adil dan proporsional dalam penyelenggaraan

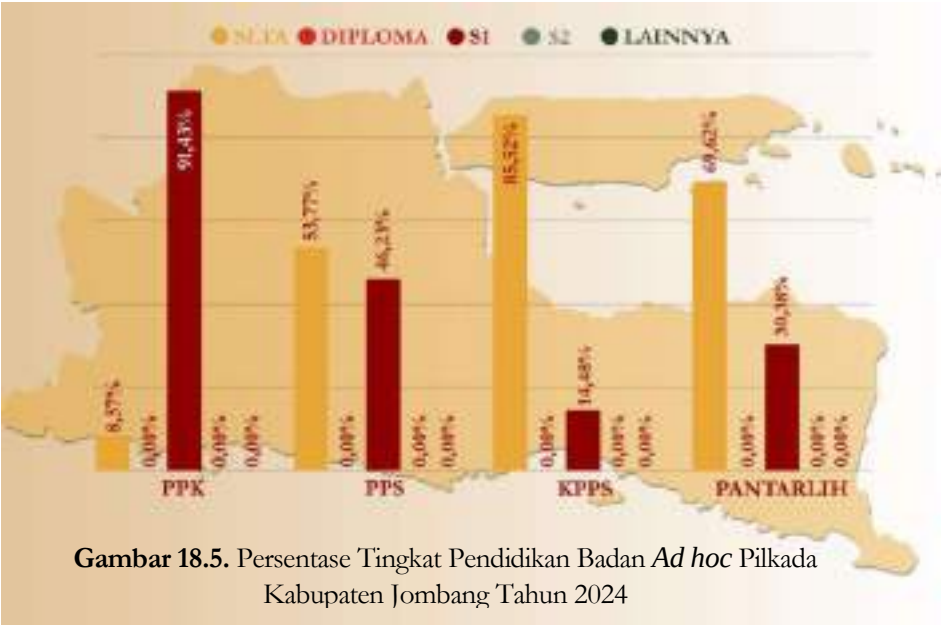
pemilihan, serta memperkuat nilai-nilai demokrasi partisipatif yang inklusif dan berkeadilan.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Jombang Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 18.4 berikut.



Komposisi usia anggota Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Jombang Tahun 2024 memperlihatkan dominasi generasi muda, khususnya Generasi Z dan Generasi Milenial, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterlibatan mereka sebagai penyelenggara pilkada. Pada tingkat PPK, dari total 105 anggota, sebanyak 56 orang (53,33%) berasal dari kelompok usia 28–43 tahun (Generasi Milenial), disusul oleh 26 orang (24,76%) dari Generasi Z (17–27 tahun), dan 23 orang (21,90%) dari Generasi X (44–59 tahun). Untuk PPS, sebanyak 410 orang (44,18%) berasal dari Generasi Milenial, 343 orang (36,96%) dari Generasi Z, dan 175 orang (18,86%) dari Generasi X. Tren keterlibatan Generasi Z lebih menonjol pada KPPS dan Pantarlilh. Dari total 13.594 anggota KPPS, sebanyak 6.107 orang (44,92%) berasal dari Generasi Z, sementara 4.796 orang (35,28%) adalah Generasi Milenial, dan 2.691 orang (19,80%) merupakan Generasi X. Sementara itu, untuk Pantarlilh yang berjumlah 3.812 orang, keterlibatan Generasi Z sangat dominan, yakni sebanyak 2.515 orang (65,98%), diikuti oleh 938 orang (24,61%) dari Generasi Milenial, dan 359 orang (9,42%) dari Generasi X. Dominasi generasi muda ini mencerminkan semangat partisipasi dan kepedulian politik yang tumbuh di

kalangan usia produktif. KPU Kabupaten Jombang memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk berperan aktif dalam proses demokrasi, seraya memastikan adanya bimbingan dan pelatihan yang memadai agar tugas-tugas teknis penyelenggaraan pilkada dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, sebaran demografi Badan *Ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Jombang Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 18.5.



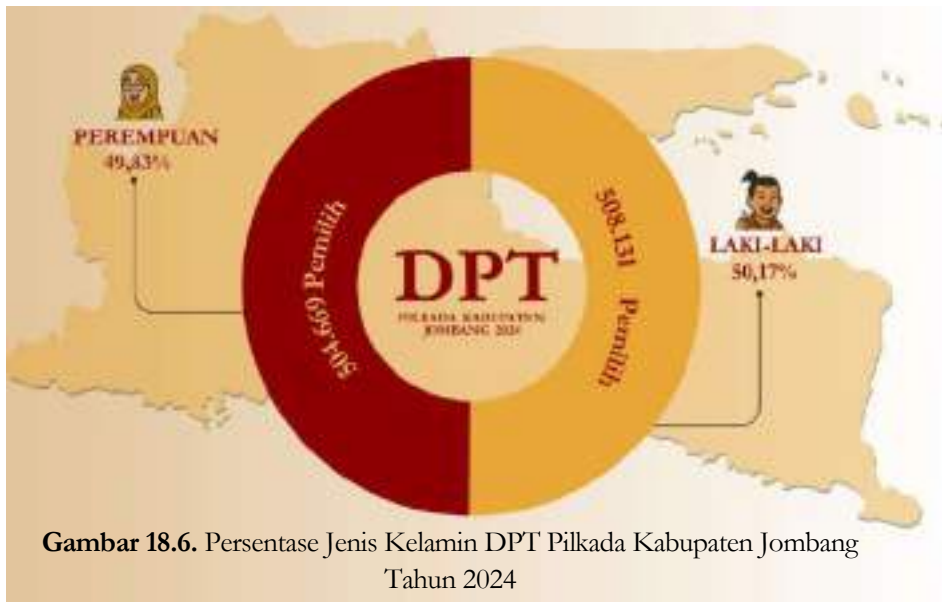
Gambar 18.5. Persentase Tingkat Pendidikan Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Jombang Tahun 2024

Tingkat pendidikan anggota badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Jombang Tahun 2024 menunjukkan keberagaman latar belakang akademik. Pada tingkat PPK yang berjumlah 105 orang, mayoritas besar memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 96 orang (91,43%), sementara sisanya 9 orang (8,57%) berlatar belakang SLTA. Komposisi berbeda tampak pada PPS. Dari total 928 anggota, sebagian besar yaitu 499 orang (53,77%) berlatar belakang pendidikan SLTA, sementara 429 orang (46,23%) merupakan lulusan S1. Di tingkat KPPS, dominasi lulusan SLTA bahkan lebih kuat, yaitu sebanyak 11.626 orang (85,52%) dari total 13.594 anggota. Sementara 1.968 orang (14,48%) adalah lulusan S1. Sementara itu, untuk Pantarlih yang berjumlah 3.812 orang, komposisi pendidikan didominasi oleh SLTA sebanyak 2.654 orang (69,62%), dan S1 sebanyak 1.158 orang (30,38%). Dengan komposisi ini, KPU Kabupaten Jombang terus mendorong peningkatan kapasitas dan kemampuan teknis seluruh anggota badan *ad hoc* melalui program pembekalan dan pelatihan, sehingga kualitas penyelenggaraan

Pilkada tetap terjaga meskipun dengan keragaman latar belakang pendidikan. Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024, tercatat bahwa belum terdapat partisipasi penyandang disabilitas sebagai bagian dari penyelenggara badan *ad hoc*. Meskipun demikian, kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam Pilkada Jombang 2024 masih perlu ditingkatkan karena sejumlah tantangan yang dihadapi di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, KPU Kabupaten Jombang telah melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas, seperti pelatihan teknis dan pengawasan yang ketat, guna memperkuat profesionalisme dan efektivitas kerja para penyelenggara.

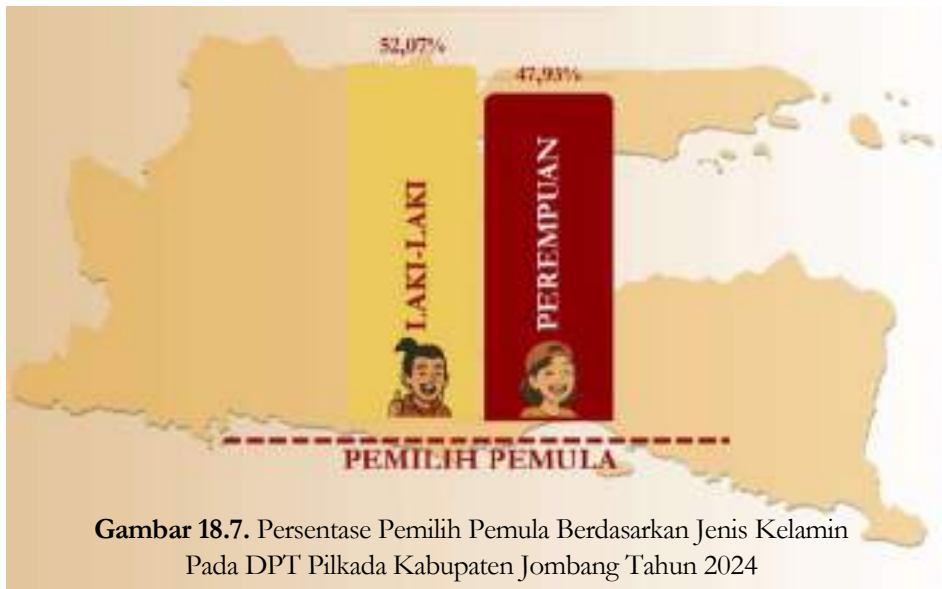
3. Pemutakhiran Data

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang telah melaksanakan rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada Kabupaten Jombang Tahun 2024. Proses dimulai dengan pemetaan TPS dan sinkronisasi data pemilih antara DP4 dari Kemendagri dan DPT Pilkada 2024, berlangsung dari 24 Mei hingga 31 Juli 2024. Hasilnya, ditetapkan sebanyak 1.933 TPS untuk Pilkada 2024 dari sebelumnya 3.196 TPS di Pilkada 2024, dengan tetap memperhatikan prinsip aksesibilitas, integritas keluarga, dan aspek geografis. Berdasarkan hasil sinkronisasi awal antara Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024, KPU Kabupaten Jombang menerima jumlah awal data pemilih sebanyak 1.021.228 jiwa. Setelah dilakukan proses pencocokan dan penelitian (Coklit), disusunlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 1.014.419 pemilih yang ditetapkan dalam rapat pleno tingkat kabupaten. Selanjutnya, setelah tahap perbaikan dan masukan masyarakat, ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.012.800 pemilih. Penurunan angka dari DP4 hingga DPT mencerminkan hasil pemutakhiran yang akurat dan akuntabel, dengan memperhatikan validitas, kelengkapan, dan keabsahan data pemilih untuk menjamin terpenuhinya hak pilih seluruh warga Kabupaten Jombang. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 18.6.



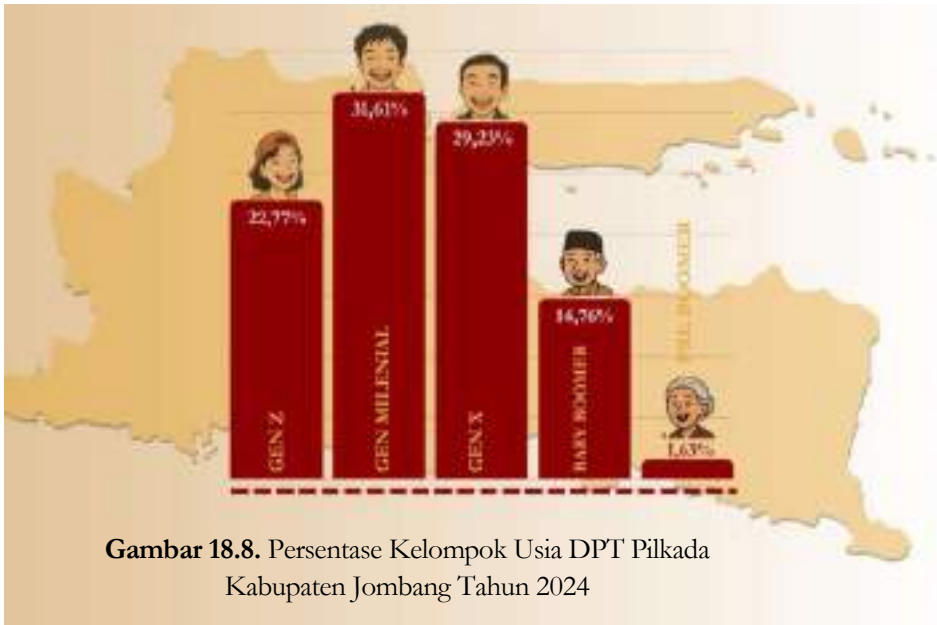
Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024 menunjukkan komposisi yang seimbang antara pemilih laki-laki dan perempuan. Dari total 1.012.800 pemilih, sebanyak 508.131 orang (50,17%) merupakan laki-laki, sedangkan 504.669 orang (49,83%) adalah perempuan. Komposisi ini mencerminkan distribusi gender yang merata dalam basis pemilih, yang menjadi indikator positif terhadap inklusivitas dan kesetaraan akses terhadap hak politik warga di Kabupaten Jombang. Keseimbangan ini juga menjadi landasan penting dalam merancang strategi sosialisasi dan layanan pilkada yang responsif terhadap kebutuhan kedua kelompok gender.

Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam kategori utama, yakni pemilih pemula. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 18.7 berikut.



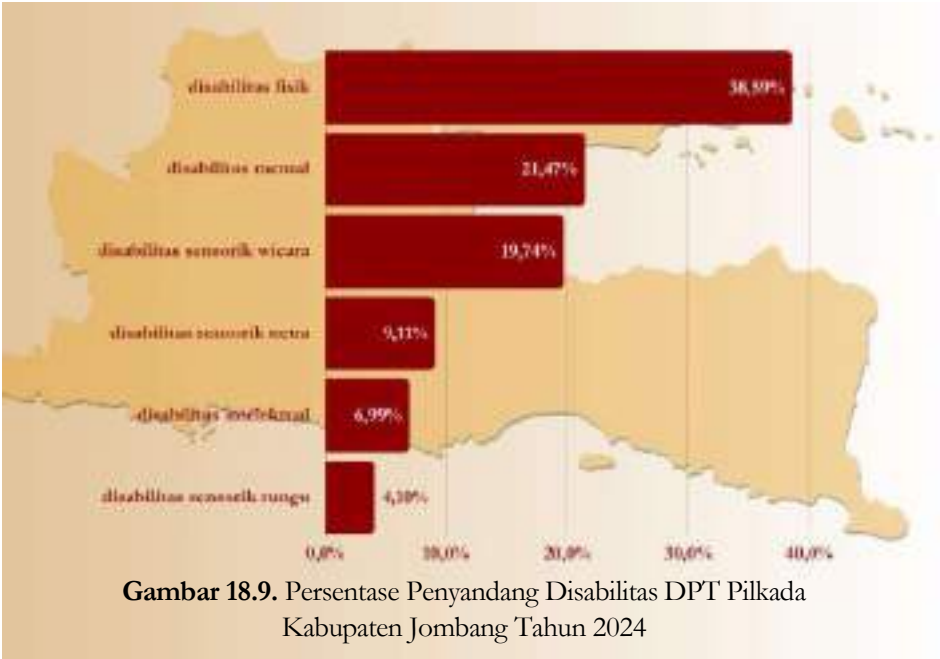
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang juga mengklasifikasikan pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2024 berdasarkan status kepemilihannya, yakni pemilih pemula. Dari total 1.012.800 pemilih, tercatat sebanyak 3.641 orang merupakan pemilih pemula, terdiri dari 1.896 laki-laki (52,07%) dan 1.745 perempuan (47,93%). Kelompok ini mencerminkan partisipasi generasi muda yang baru memasuki usia memilih dan menjadi perhatian utama dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Data ini mencerminkan keseimbangan gender dan keberagaman generasi dalam basis pemilih di Kabupaten Jombang. Adanya pemilih pemula dalam jumlah yang tinggi menegaskan pentingnya pendekatan edukatif untuk mendorong partisipasi aktif mereka dalam pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan inklusif.

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 18.8.



Berdasarkan data sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jombang Tahun 2024 menurut kelompok usia, mayoritas pemilih berasal dari generasi Milenial (usia 28–43 tahun) dengan jumlah mencapai 320.133 pemilih atau 31,61% dari total DPT. Disusul oleh generasi X (usia 44–59 tahun) sebanyak 296.032 pemilih (29,23%) dan generasi Z (usia 17–27 tahun) sebanyak 230.650 pemilih (22,77%). Sementara itu, kelompok usia lanjut yaitu *Baby Boomer* (60–78 tahun) tercatat sebanyak 149.455 pemilih (14,76%), dan *Pre-Boomer* (di atas 79 tahun) merupakan kelompok dengan proporsi paling kecil yakni 16.530 pemilih (1,63%). Komposisi ini menunjukkan dominasi pemilih dari kalangan usia produktif, terutama generasi Milenial dan Gen X, yang secara kumulatif menyumbang lebih dari 60% total pemilih dalam DPT.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten Jombang Tahun 2024 disajikan pada gambar 18.9, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Berdasarkan sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jombang Tahun 2024 penyandang disabilitas, jumlah total pemilih disabilitas tercatat sebanyak 5.566 orang. Kelompok disabilitas fisik merupakan yang paling dominan dengan jumlah 2.148 pemilih atau 38,59% dari total pemilih disabilitas. Disusul oleh disabilitas mental sebanyak 1.195 pemilih (21,47%) dan disabilitas sensorik wicara sebanyak 1.099 pemilih (19,74%). Sementara itu, penyandang disabilitas sensorik netra tercatat 507 pemilih (9,11%), disabilitas intelektual sebanyak 389 pemilih (6,99%), dan yang paling sedikit adalah disabilitas sensorik rungu dengan 228 pemilih (4,10%). Data ini mencerminkan pentingnya penyediaan aksesibilitas dan layanan inklusif bagi berbagai jenis disabilitas dalam penyelenggaraan pilkada.

4. Pencalonan

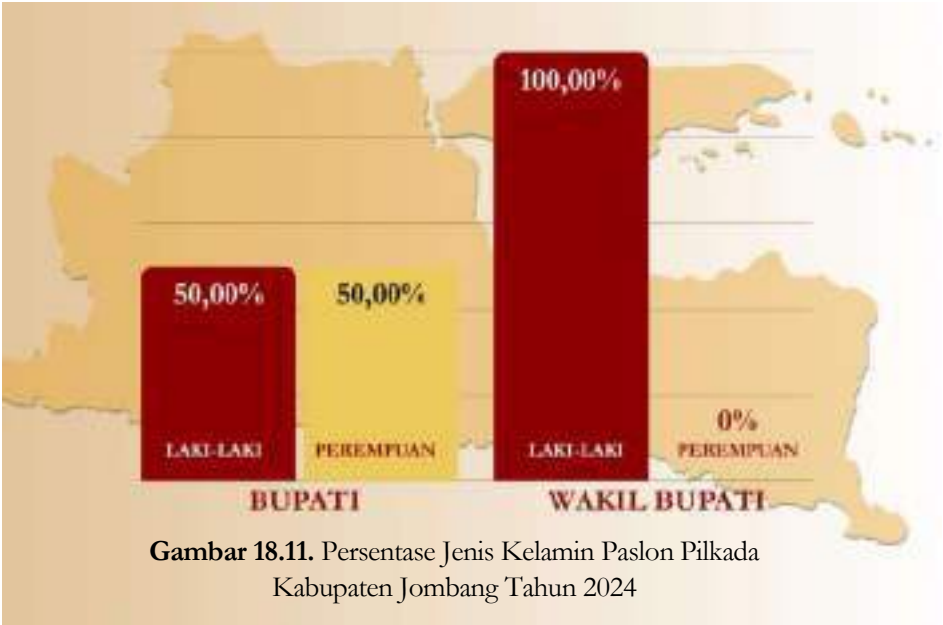
Tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024 diawali dengan pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang pada tanggal 24 Agustus 2024. Pengumuman ini merupakan bagian dari komitmen KPU untuk menyelenggarakan pemilihan secara demokratis, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dalam pengumuman tersebut, KPU mengundang partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan

Keputusan KPU Kabupaten Jombang Nomor 1447 Tahun 2024, syarat minimal perolehan suara sah bagi partai politik atau gabungan partai politik pengusung ditetapkan sebesar 52.479 suara, mengacu pada hasil Pilkada 2024. Proses penerimaan pendaftaran pasangan calon dilaksanakan selama tiga hari, yakni mulai Selasa, 27 Agustus 2024 hingga Kamis, 29 Agustus 2024. Pada dua hari pertama, pendaftaran dibuka pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, sedangkan pada hari terakhir, waktu pendaftaran diperpanjang hingga pukul 23.59 WIB.

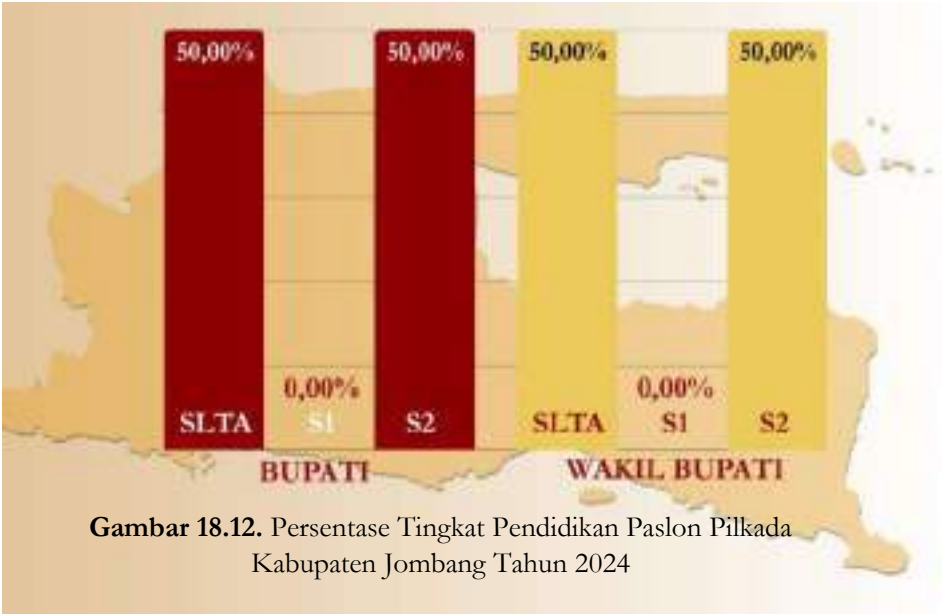
Dalam mendukung kelancaran proses ini, KPU Kabupaten Jombang menyediakan layanan helpdesk pencalonan dan menerapkan penggunaan aplikasi SILONKADA (Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah) guna mengelola pendaftaran secara digital dan efisien. Informasi terkait tahapan dan persyaratan pencalonan disampaikan melalui berbagai kanal, termasuk media cetak, laman resmi KPU, dan media sosial. Proses pendaftaran yang berlangsung hingga batas akhir waktu yang ditentukan, terdapat dua pasangan calon yang resmi mendaftar dan berkasnya dinyatakan lengkap. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada gambar 18.10 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.



Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang disajikan pada gambar 18.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang disajikan pada gambar 18.12.



Gambar 18.11. Persentase Jenis Kelamin Paslon Pilkada Kabupaten Jombang Tahun 2024



Gambar 18.12. Persentase Tingkat Pendidikan Paslon Pilkada Kabupaten Jombang Tahun 2024

Dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024, komposisi jenis kelamin pasangan calon menunjukkan bahwa dari total 4 orang calon yang terdiri dari 2 calon Bupati dan 2 calon Wakil Bupati, sebanyak 3 orang (75%) adalah laki-laki, dan hanya 1 orang (25%) adalah perempuan. Jika dirinci menurut jabatan, posisi Bupati diisi secara seimbang oleh satu laki-laki dan satu perempuan (masing-masing 50%), sedangkan

seluruh calon Wakil Bupati (100%) adalah laki-laki. Data ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan masih terbatas, terutama dalam posisi calon wakil kepala daerah.

Dilihat dari aspek pendidikan, seluruh pasangan calon yang berkontestasi pada Pilkada Jombang 2024 memiliki latar belakang pendidikan menengah dan tinggi. Dari 4 orang calon, sebanyak 2 orang (50%) berpendidikan SMA dan 2 orang lainnya (50%) telah menempuh pendidikan hingga jenjang S2. Tidak terdapat calon yang berlatar belakang pendidikan S1, sehingga distribusi pendidikan paslon hanya berada pada dua tingkat, yakni SMA dan S2. Jika dilihat menurut jabatan, baik calon Bupati maupun Wakil Bupati masing-masing terdiri atas 1 orang lulusan SMA (50%) dan 1 orang lulusan S2 (50%), menunjukkan adanya keseimbangan tingkat pendidikan pada masing-masing posisi jabatan.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 18.13, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



Gambar 18.13. Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kabupaten Jombang Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

Sosialisasi memegang peranan penting dalam menyukseskan Pemilihan Tahun 2024, termasuk di Kabupaten Jombang. Tingginya partisipasi masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan demokrasi. KPU Jombang

menekankan bahwa keterlibatan aktif warga, baik sebagai pemilih maupun pengawas, dapat memperkuat legitimasi pemimpin terpilih, mendorong pemerintahan yang akuntabel, serta mengurangi potensi kecurangan. Untuk itu, peningkatan literasi dan kesadaran politik masyarakat menjadi fokus utama dalam kegiatan sosialisasi.

KPU Kabupaten Jombang menyadari pentingnya penyampaian informasi yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, berbagai metode sosialisasi telah diterapkan guna menjangkau sebanyak mungkin segmen pemilih, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Adapun metode sosialisasi yang dilakukan antara lain sebagai berikut.

1. **Metode Komunikasi Tatap Muka**

KPU melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat melalui forum-forum diskusi, penyuluhan, atau kegiatan tatap muka lainnya untuk memberikan edukasi tentang pentingnya pilkada dan informasi seputar pasangan calon serta tahapan pemilihan.

2. **Pemanfaatan Media Sosial dan Website Resmi**

Sosialisasi dilakukan melalui kanal digital milik KPU Kabupaten Jombang, seperti website resmi, Instagram, Facebook, dan Twitter, guna menjangkau pemilih dari kalangan muda dan pengguna aktif media daring.

3. **Kemitraan dengan Organisasi Media dan Jurnalis**

KPU menggandeng berbagai organisasi pers seperti PWI, IJTI, KJJT, Mio, MPN, SWI, AWDI, dan lainnya, dalam bentuk kegiatan media gathering. Kegiatan ini berfungsi sebagai jembatan pertukaran informasi antara KPU dan masyarakat luas melalui pemberitaan di media cetak, elektronik, maupun online. Materi yang disosialisasikan tidak hanya berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang, tetapi juga mencakup Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Melalui strategi sosialisasi yang terstruktur dan kolaboratif ini, diharapkan masyarakat Jombang memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses dan substansi pemilihan, sehingga terdorong untuk berpartisipasi aktif serta menjadi bagian dari pengawasan demi terciptanya pilkada yang jujur, adil, dan demokratis.



Gambar 18.14. Kegiatan Sosialisasi Pilkada Kabupaten Jombang Tahun 2024

Sebagai bagian dari strategi kampanye kreatif, KPU Kabupaten Jombang memperkenalkan maskot resmi Pilkada 2024.



Gambar 18.15. Maskot Pilkada Kabupaten Jombang Tahun 2024

Si BOKI merupakan akronim dari KeBO Kicak DemoKrasI, yang dihadirkan sebagai maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024. Sosok Si BOKI digambarkan sebagai seekor kerbau humanoid yang terinspirasi dari tokoh legendaris dalam babad tanah Jombang, yaitu Kebo Kicak. Dalam sejarah lokal, Kebo Kicak dikenal sebagai tokoh penting dalam proses penyebaran agama Islam di wilayah Jombang. Nama “Jombang” sendiri diyakini berasal dari gabungan warna sinar hijau (*ijo*) dan merah (*abang*) yang muncul dalam pertarungan Kebo Kicak, membentuk kata “Jombang”. Secara simbolik, kerbau dipilih sebagai representasi nilai-nilai positif seperti kesetiaan, kerja keras, kerendahan hati, kesantunan, dan penghormatan terhadap sesama. Melalui sosok Si BOKI, KPU Kabupaten Jombang ingin menyampaikan pesan bahwa demokrasi seharusnya dijalankan dengan semangat tanggung jawab, kedamaian, serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pemilihan yang berkualitas dan berintegritas. Dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024, KPU Kabupaten Jombang memfasilitasi berbagai metode kampanye agar pasangan calon dapat menyampaikan visi, misi, dan program kerja secara adil dan terbuka. KPU menyelenggarakan dua kali debat publik antar pasangan calon, yaitu pada 19 Oktober dan 16 November 2024, yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube KPU Jombang. Debat ini melibatkan berbagai unsur seperti Bawaslu, pemerintah, masyarakat, akademisi, media, serta tim kampanye.

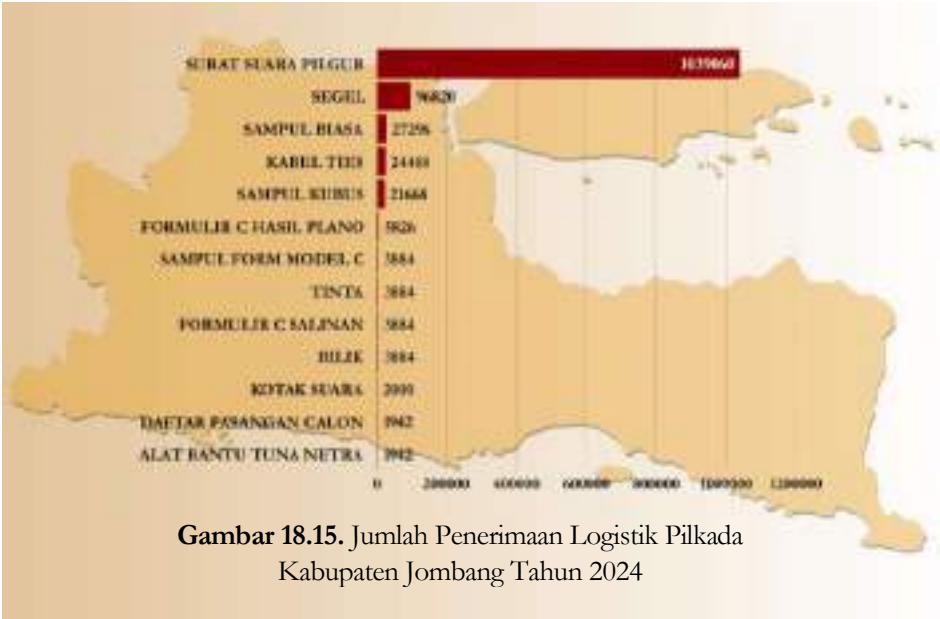
Selain itu, KPU menyediakan bahan kampanye untuk setiap pasangan calon hingga 506.400 eksemplar, berupa selebaran, brosur, pamflet, dan poster, dengan spesifikasi cetak yang telah ditetapkan. KPU juga memfasilitasi alat peraga kampanye seperti baliho, umbul-umbul, spanduk, dan billboard, sesuai ukuran dan bahan yang ditentukan. Semua bentuk fasilitas ini bertujuan untuk menciptakan kampanye yang merata, informatif dan tertib.



Gambar 18.15. Debat Publik Pilkada Kabupaten Jombang Tahun 2024

6. Logistik

KPU Kabupaten Jombang memastikan pemenuhan logistik Pemilihan Tahun 2024 dilakukan secara tepat jenis, jumlah, kualitas, waktu, sasaran, dan biaya. Proses pengadaan dilakukan melalui metode 3-purchasing sesuai ketentuan LKPP, dengan mengutamakan produk dalam negeri, pemberdayaan UMKM, transparansi, efisiensi anggaran, dan percepatan penyerapan dana. Pengadaan logistik mengacu pada Keputusan KPU Nomor 1139 Tahun 2024, dengan tahapan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan jumlah, penyusunan kontrak, pemilihan metode dan penyedia, serta penandatanganan kontrak. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 18.15.



Gambar 18.15. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kabupaten Jombang Tahun 2024

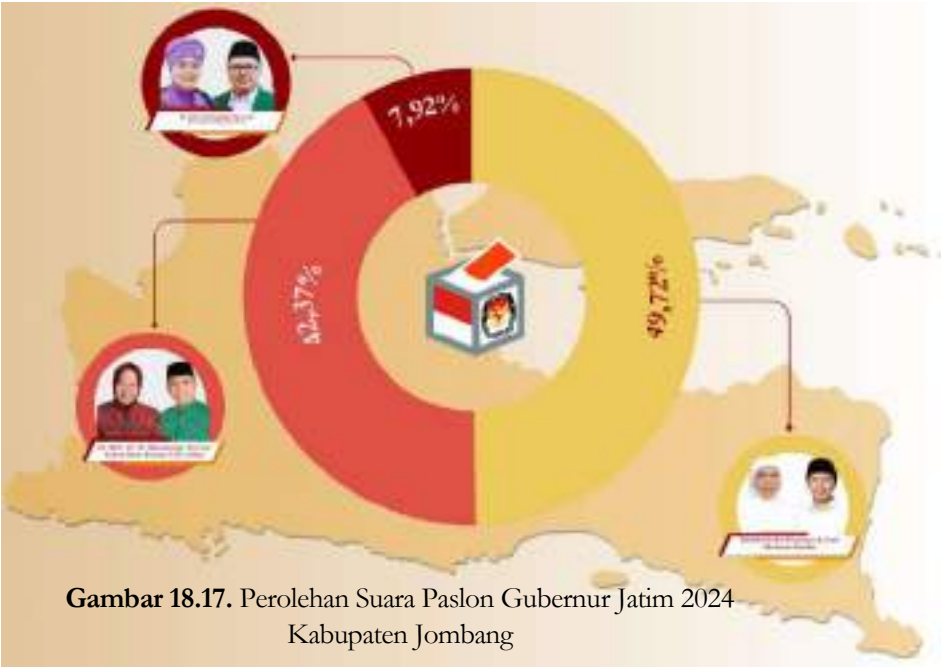
Distribusi logistik menuju 1.942 TPS dilakukan melalui moda darat, yaitu mobil dan truk yang menjangkau seluruh wilayah kerja PPK dan PPS. Moda transportasi lain seperti udara, air, atau hewan tidak digunakan karena karakteristik geografis Jombang yang relatif terjangkau, meskipun beberapa wilayah tetap menghadapi tantangan distribusi akibat keterbatasan akses jalan.



Gambar 18.16. Peta Distribusi Logistik Pilkada Kabupaten Jombang Tahun 2024

7. Hasil Pilkada Serentak

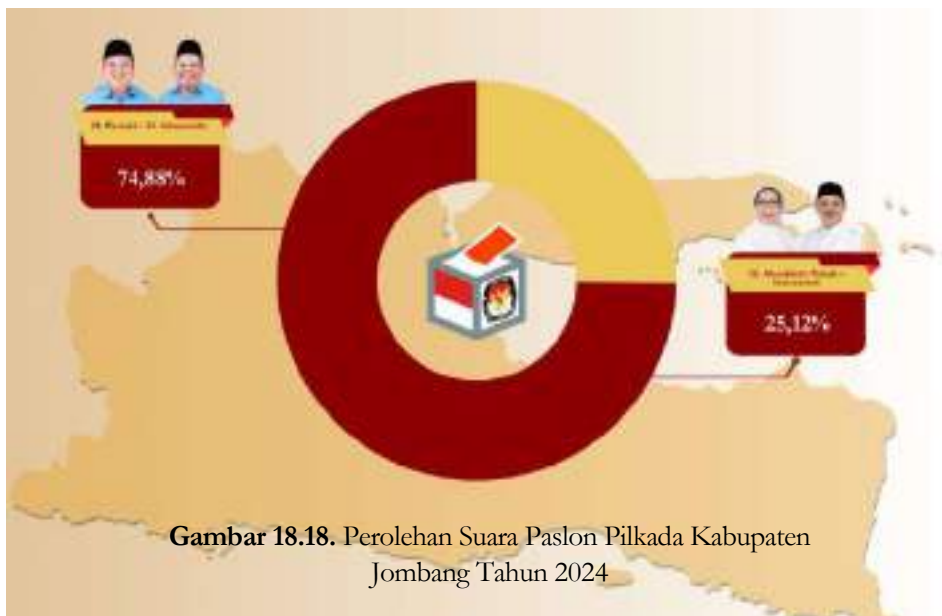
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Jombang disajikan pada gambar 18.17.



Gambar 18.17. Perolehan Suara Paslon Gubernur Jatim 2024 Kabupaten Jombang

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di Kabupaten Jombang, total suara sah yang terkumpul sebanyak 668.486 suara. Dari hasil tersebut, pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak meraih suara terbanyak dengan total 332.342 suara (49,72%), diikuti oleh pasangan Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta dengan 283.224 suara (42,37%). Sementara itu, pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah – H. Lukmanul Khakim memperoleh 52.920 suara (7,92%). Hasil ini menunjukkan dominasi pasangan petahana Khofifah–Emil di Kabupaten Jombang, dengan keunggulan selisih suara yang signifikan dibandingkan pasangan lainnya.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 18.18.



Gambar 18.18. Perolehan Suara Paslon Pilkada Kabupaten Jombang Tahun 2024

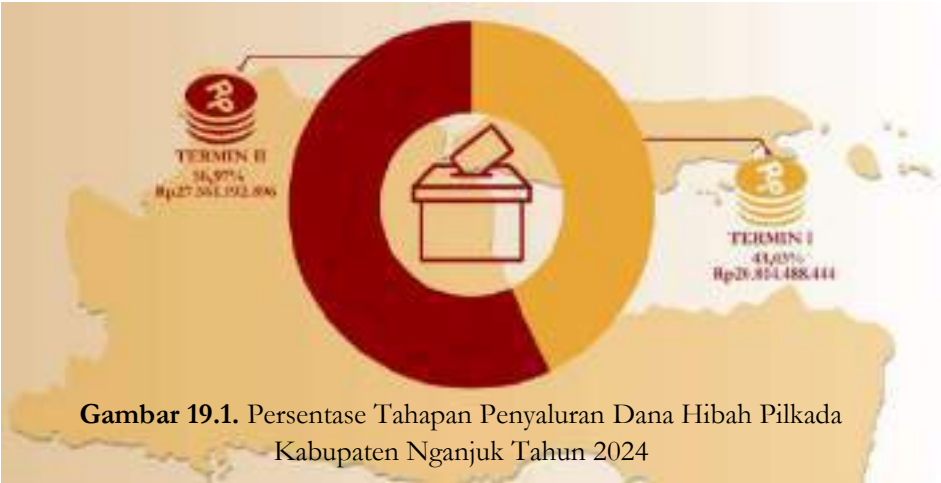
Berdasarkan hasil rekapitulasi resmi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, terdapat dua pasangan calon yang bertarung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024. Dari total suara sah yang dihimpun, pasangan H. Warsubi – M. Salmanudin memperoleh dukungan terbanyak 74,88% dengan total 515.880 suara. Sementara itu, pasangan Hj. Mundjidah Wahab – Sumrambah memperoleh 25,12% dengan total 173.098 suara. Dengan demikian, pasangan Warsubi – Salmanudin unggul secara signifikan dan dinyatakan sebagai pemenang dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Jombang Tahun 2024. Kemenangan ini mencerminkan besarnya dukungan masyarakat terhadap visi, misi, dan program kerja yang diusung pasangan tersebut.

BAGIAN 19

KABUPATEN NGANJUK

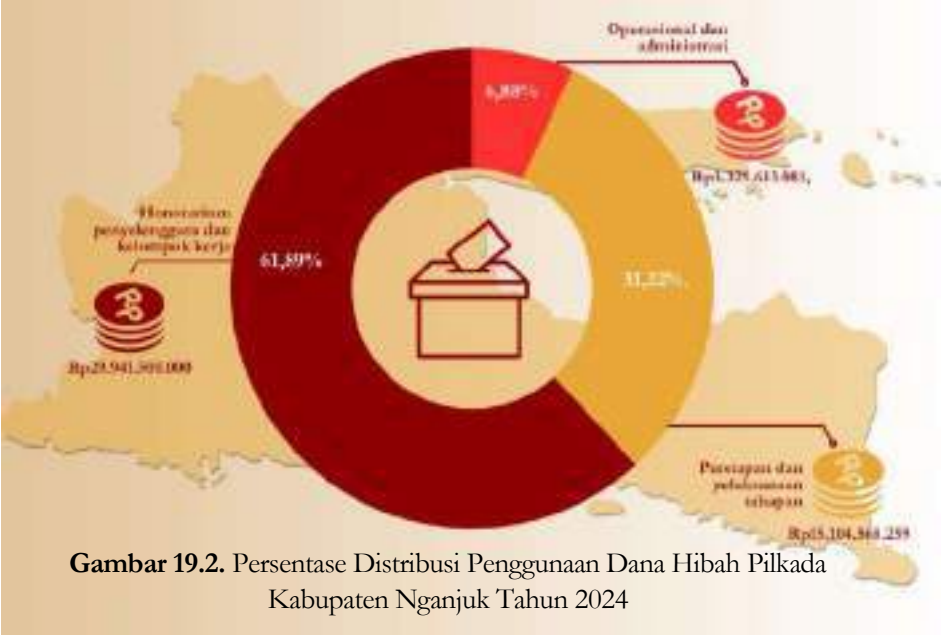
1. Perencanaan Program dan Anggaran

Tahapan perencanaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 diawali dengan pengajuan proposal anggaran awal oleh KPU Kabupaten Nganjuk kepada Pemerintah Daerah pada 22 Desember 2022 sebesar Rp62.868.432.790,00. Melalui proses pembahasan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), akhirnya tercapai kesepakatan pada 18 September 2023 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 200/1834/411.000/2023, dengan nilai anggaran yang disetujui sebesar Rp52.036.221.110,00. Selanjutnya, menindaklanjuti surat dari KPU Provinsi Jawa Timur terkait estimasi jumlah pemilih dan Tempat Pemungutan Suara (TPS), dilakukan optimalisasi jumlah TPS dari semula 2.153 TPS menjadi 1.719 TPS. Pengurangan ini berdampak langsung pada efisiensi anggaran. Hal ini dikukuhkan melalui surat KPU Kabupaten Nganjuk kepada TAPD pada 17 Oktober 2023 (Nomor: 225/PL.01-SD/3518/2023). Hasil finalnya, nilai NPHD yang disepakati menjadi Rp48.375.681.340, yang pencairannya dilakukan dalam dua termin. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 19.1 berikut.



Berdasarkan gambar 19.1, pada termin pertama, dana yang dicairkan sebesar Rp20.814.488.444 atau setara dengan 43,03% dari total hibah. Sementara itu termin kedua mencakup pencairan sebesar Rp27.561.192.896,

yang merupakan 56,97% dari total dana hibah. Skema pencairan dua termin ini dirancang untuk mendukung efisiensi dan kesinambungan pembiayaan selama tahapan persiapan hingga pelaksanaan Pilkada. Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 19.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.



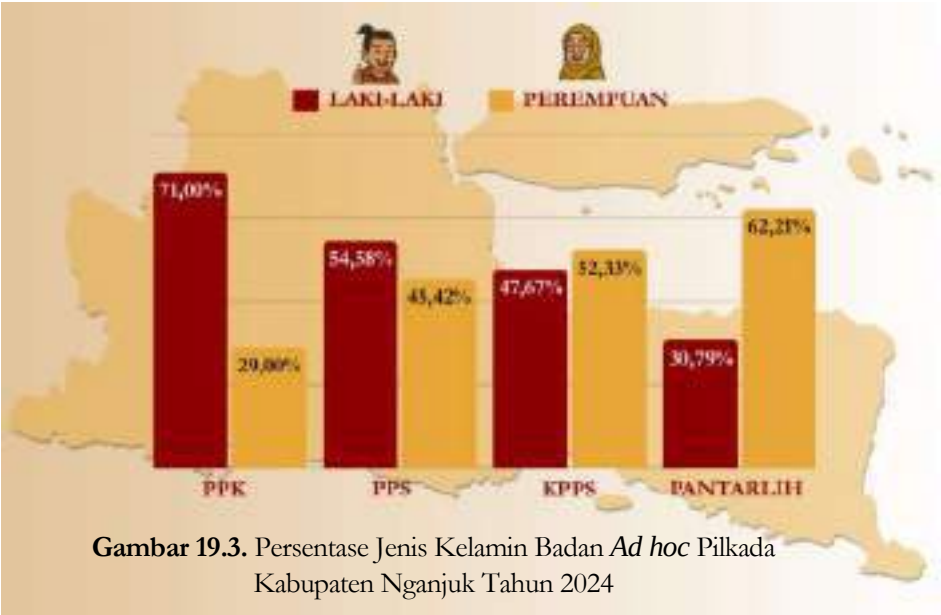
Anggaran hibah untuk Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dialokasikan ke dalam tiga komponen utama. Alokasi terbesar digunakan untuk honorarium badan *ad hoc* dan penyelenggara teknis lainnya sebesar Rp29.941.500.000 atau 61,89% dari total anggaran. Selanjutnya, untuk mendukung berbagai kegiatan dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan, dialokasikan dana sebesar Rp15.104.568.259 atau setara 31,22%. Sementara itu, komponen operasional dan administrasi perkantoran mendapatkan alokasi sebesar Rp3.329.613.081, atau 6,88% dari total keseluruhan dana hibah. Struktur alokasi ini mencerminkan fokus utama pada pelaksanaan teknis pemilihan dan penguatan kelembagaan penyelenggara.

2. **Badan Ad hoc**

Dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, KPU Kabupaten Nganjuk membentuk badan *ad hoc* dengan total personel yang

tersebar di berbagai tingkatan penyelenggara. Jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dibentuk sebanyak 100 orang, sedangkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa dan kelurahan berjumlah 852 orang. Untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU Kabupaten Nganjuk juga membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan total 11.319 orang, serta merekrut 3.180 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang bertugas melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih secara *door to door*.

Pembentukan badan *ad hoc* ini menjadi fondasi penting dalam menjamin kelancaran seluruh tahapan Pilkada, mulai dari pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penghitungan suara di tingkat TPS. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 19.3.

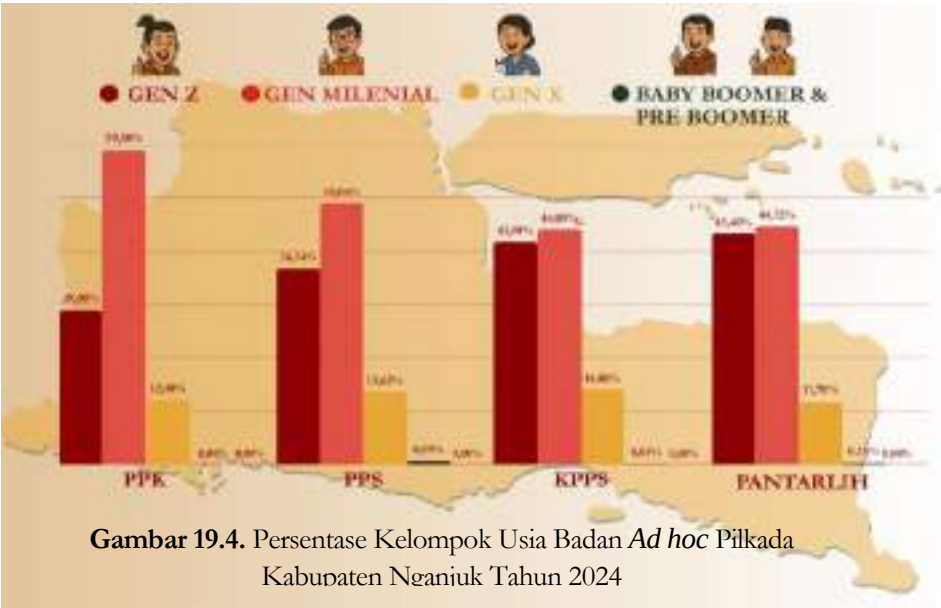


Gambar 19.3. Persentase Jenis Kelamin Badan Ad hoc Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Komposisi jenis kelamin dalam badan *ad hoc* penyelenggara Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 menunjukkan partisipasi yang cukup beragam antara laki-laki dan perempuan di berbagai tingkatan. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dari total 100 anggota, sebanyak 71 orang (71,00%) merupakan laki-laki dan 29 orang (29,00%) adalah perempuan. Sementara itu, di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berjumlah 852 orang, terdapat 465 laki-laki (54,58%) dan 387 perempuan (45,42%). Pada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), proporsi perempuan justru lebih tinggi, yakni 5.923 orang (52,33%), dibandingkan

dengan laki-laki sebanyak 5.396 orang (47,67%) dari total 11.319 anggota KPPS. Komposisi serupa juga terlihat pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), di mana perempuan mendominasi dengan 2.201 orang (69,21%), sedangkan laki-laki berjumlah 979 orang (30,79%) dari total 3.180 Pantarlih. Data ini menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pilkada di tingkat akar rumput, khususnya pada level KPPS dan Pantarlih, yang menjadi garda terdepan dalam melayani pemilih secara langsung di lapangan.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 19.4 berikut.



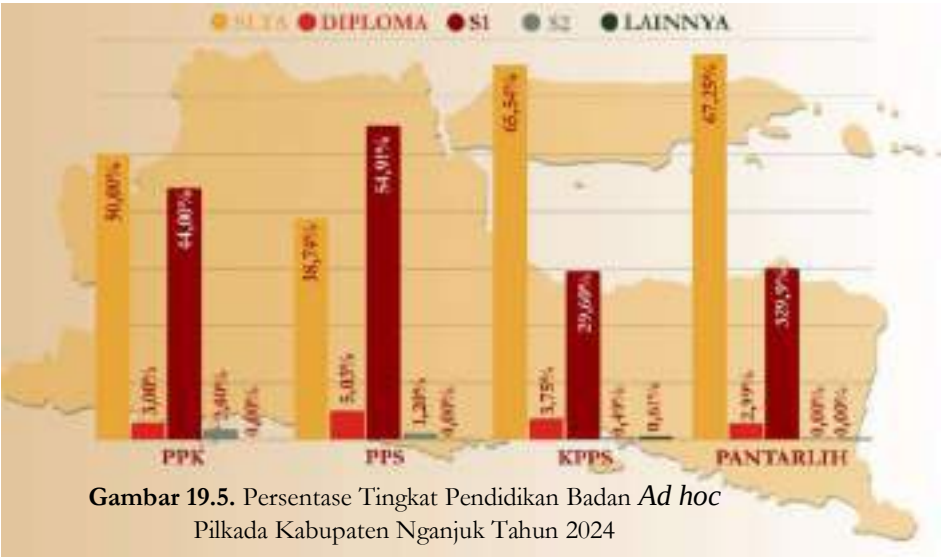
Gambar 19.4. Persentase Kelompok Usia Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Sebaran usia anggota badan *ad hoc* dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 didominasi oleh generasi muda, khususnya Generasi Milenial dan Generasi Z. Pada tingkat PPK, sebanyak 59,00% (59 orang) merupakan Gen Milenial (usia 28–43 tahun), disusul Gen Z sebanyak 29,00% (29 orang), dan Gen X (usia 44–59 tahun) sebesar 12,00% (12 orang).

Komposisi serupa terlihat pada PPS, di mana Gen Milenial mendominasi dengan 49,06% (418 orang), diikuti oleh Gen Z sebesar 36,74% (313 orang), Gen X sebanyak 13,62% (116 orang), dan *Baby Boomer* (usia 60–78 tahun) sebesar 0,59% (5 orang). Pada tingkat KPPS, yang merupakan jumlah terbanyak secara keseluruhan, Gen Milenial tetap menjadi mayoritas dengan 44,09% (4.991 orang), diikuti Gen Z 41,80% (4.731 orang), Gen X 14,06%

(1.591 orang), dan *Baby Boomer* hanya 0,05% (6 orang). Sementara itu, untuk Pantarlih, Gen Milenial tercatat sebanyak 44,72% (1.422 orang), Gen Z 43,40% (1.380 orang), Gen X 11,70% (372 orang), dan *Baby Boomer* sebesar 0,19% (6 orang). Tidak terdapat anggota dari kelompok usia >79 tahun (*Pre-Boomer*) di semua tingkatan. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penyelenggara pilkada tingkat *ad hoc* di Kabupaten Nganjuk berasal dari kalangan usia produktif dan muda, yang mencerminkan semangat partisipatif generasi baru dalam proses demokrasi di daerah.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *Ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 19.5.



Gambar 19.5. Persentase Tingkat Pendidikan Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Tingkat pendidikan anggota badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 menunjukkan latar belakang pendidikan yang bervariasi. Pada tingkat PPK, dari 100 orang, sebanyak 50,00% (50 orang) berpendidikan SLTA, 44,00% (44 orang) merupakan lulusan S1, dan sisanya terdiri dari 3,00% (3 orang) lulusan Diploma, 2,00% (2 orang) lulusan S2, serta 1,00% (1 orang) berasal dari kategori lainnya. Sementara pada PPS, dari total 852 anggota, 54,91% (468 orang) merupakan lulusan S1, diikuti 38,74% (330 orang) lulusan SLTA. Adapun lulusan Diploma sebanyak 5,03% (43 orang), lulusan S2 sebesar 1,20% (10 orang), dan 0,12% (1 orang) dari kategori lainnya. Untuk KPPS, mayoritas anggotanya berasal dari lulusan SLTA dengan proporsi 65,54% (7.419 orang), diikuti oleh lulusan S1 sebanyak 29,60% (3.350 orang). Sementara itu, lulusan Diploma 3,75% (425 orang), S2 0,49% (56 orang), dan kategori lainnya 0,61% (69 orang). Pada tingkat Pantarlih, dari 3.180 petugas,

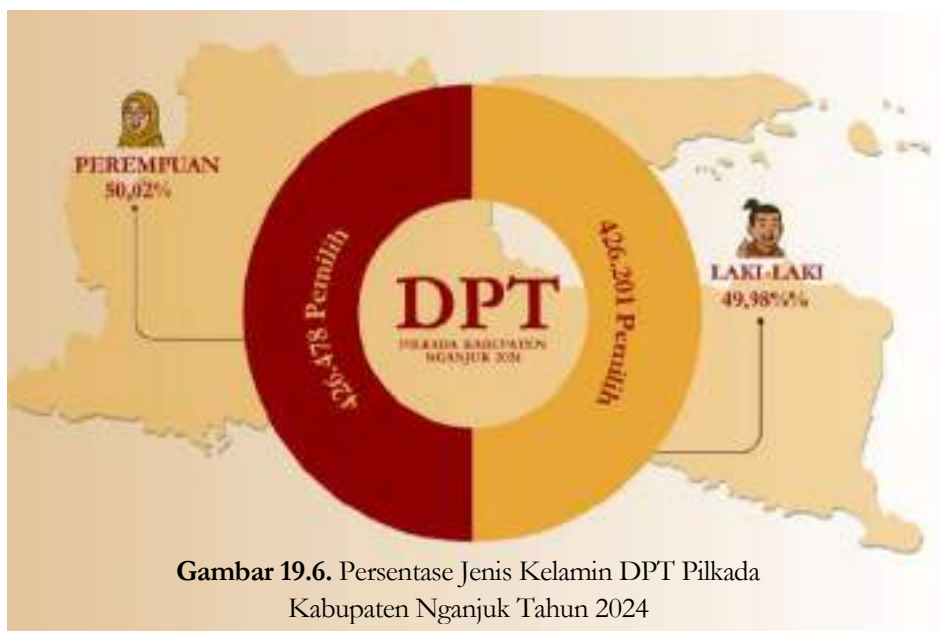
67,52% (2.147 orang) adalah lulusan SLTA, disusul 28,99% (922 orang) lulusan S1. Sisanya terdiri dari lulusan Diploma 2,99% (95 orang), S2 0,28% (9 orang), dan 0,22% (7 orang) dari kategori lainnya. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyelenggara *ad hoc* berasal dari kalangan lulusan SLTA dan S1, yang mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dengan latar belakang pendidikan menengah dan tinggi dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, belum tercatat adanya partisipasi dari penyandang disabilitas sebagai bagian dari penyelenggara badan *ad hoc*, baik di tingkat PPK, PPS, KPPS, maupun Pantarlih. Hal ini menjadi catatan penting bagi KPU Kabupaten Nganjuk dalam upaya mendorong keterlibatan kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, dalam proses demokrasi, tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai penyelenggara pilkada. Ke depan, perlu dilakukan penguatan kebijakan afirmatif dan fasilitasi yang lebih inklusif agar partisipasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pilkada dapat terwujud secara lebih nyata dan merata.

3. Pemutakhiran Data

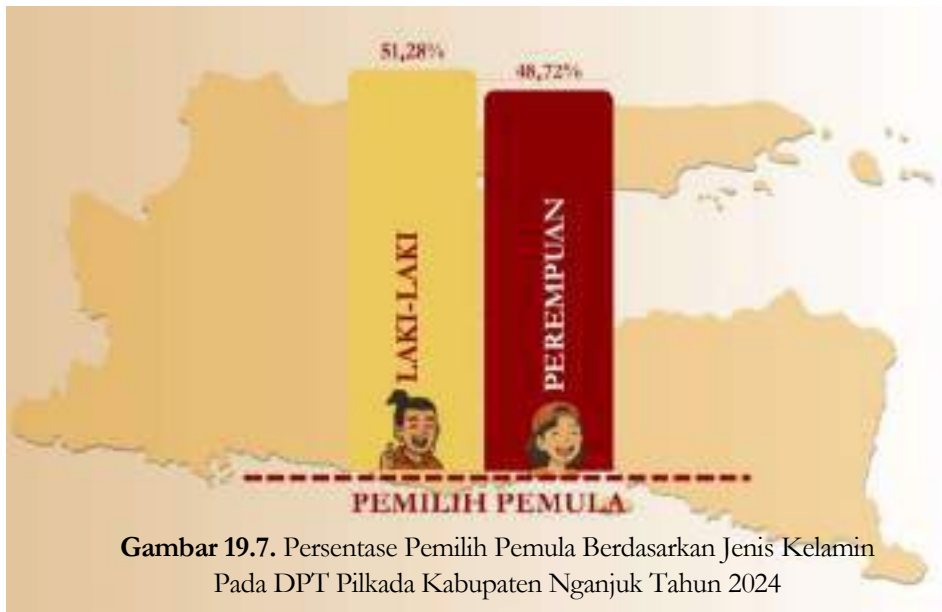
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih sebagai bagian penting dalam menjamin hak konstitusional warga negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. Pemutakhiran data ini mencakup 20 kecamatan, 284 desa/kelurahan, dan tersebar di 1.617 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada tahap awal, KPU Kabupaten Nganjuk menerima Data Pemilih Hasil Sinkronisasi (DPHS) dari KPU RI sebanyak 860.103 pemilih. Data tersebut kemudian diverifikasi secara faktual melalui kegiatan pencocokan dan penelitian (COKLIT) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Berdasarkan hasil COKLIT, ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 853.111 pemilih.

Setelah proses tanggapan masyarakat dan perbaikan, ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah akhir sebanyak 852.679 pemilih. Penurunan jumlah dari data awal ke DPT disebabkan oleh beberapa faktor, seperti temuan data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), serta perpindahan domisili. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 19.6.



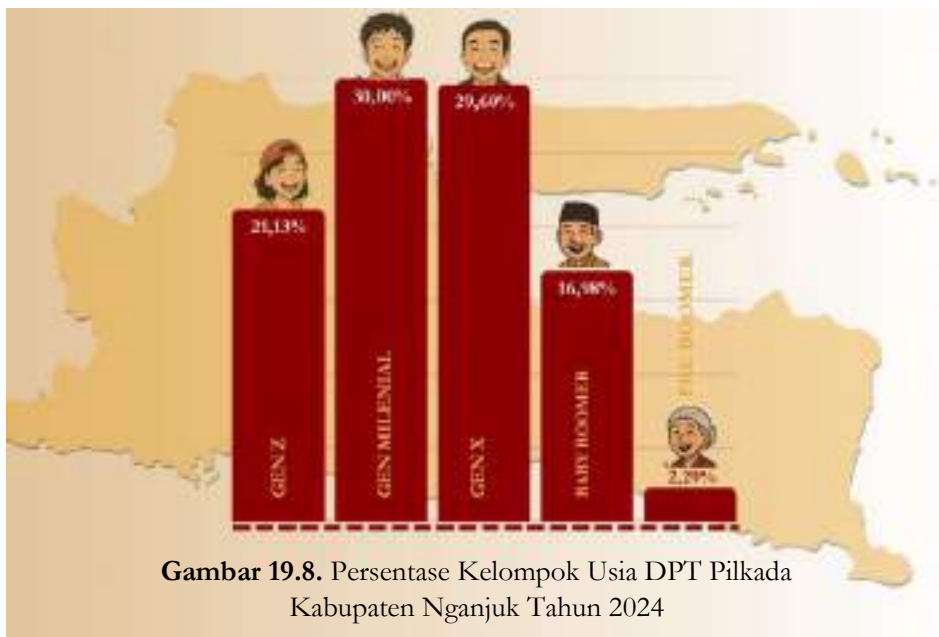
Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, jumlah total pemilih tercatat sebanyak 852.679 orang. Dari jumlah tersebut, pemilih laki-laki berjumlah 426.201 orang (49,98%), sedangkan pemilih perempuan sebanyak 426.478 orang (50,02%). Komposisi ini menunjukkan keseimbangan proporsi antara pemilih laki-laki dan perempuan, dengan selisih yang sangat tipis, yang mencerminkan distribusi gender yang relatif merata dalam DPT, yang juga menjadi indikator penting dalam upaya penyelenggaraan pilkada yang inklusif dan representatif.

Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam kategori utama, yakni pemilih pemula. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 19.7 berikut.



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk mengklasifikasikan pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2024 berdasarkan status kepemilihannya, yakni pemilih pemula. Tercatat sebanyak 13.622 orang (1,6%) merupakan pemilih pemula, yaitu warga yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, dengan komposisi 6.986 laki-laki (51,28%) dan 6.636 perempuan (48,72%). Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah pemilih pemula relatif kecil, keterlibatan mereka tetap berdampak sebagai representasi generasi muda yang mulai berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Partisipasi pemilih pemula di Pilkada Kabupaten Nganjuk didominasi oleh pemilih laki-laki, meskipun selisihnya tidak terlalu signifikan. Kehadiran pemilih pemula menjadi penanda penting akan tumbuhnya partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi lokal dalam Pilkada Serentak Jatim 2024.

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 19.8.



Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 menunjukkan distribusi usia yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Pemilih dari kalangan Generasi Milenial (28–43 tahun) merupakan kelompok terbesar dengan jumlah 255.827 orang (30,00%), diikuti oleh Generasi X (44–59 tahun) sebanyak 252.385 orang (29,60%), dan Generasi Z (17–27 tahun) sebanyak 180.142 orang (21,13%). Sementara itu, pemilih dari kalangan *Baby Boomer* (60–78 tahun) berjumlah 144.817 orang (16,98%), dan kelompok usia *Pre-Boomer* (di atas 79 tahun) tercatat sebanyak 19.508 orang (2,29%). Komposisi ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% pemilih berasal dari generasi produktif (Gen Z, Milenial, dan Gen X), yang memiliki potensi besar dalam menentukan arah kepemimpinan daerah. Keterlibatan lintas generasi ini mencerminkan luasnya cakupan partisipasi pemilih di Kabupaten Nganjuk serta pentingnya pendekatan kampanye yang mampu menjangkau seluruh rentang usia pemilih.

4. Pencalonan

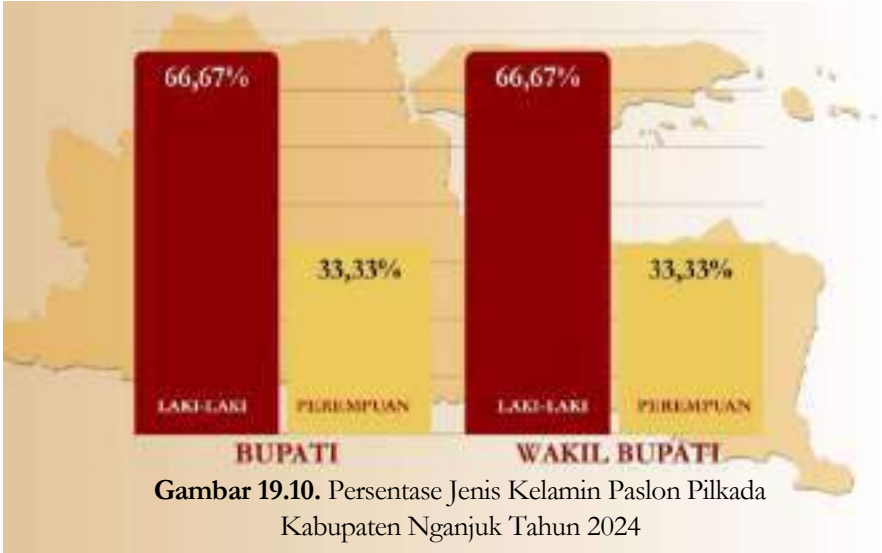
Tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk membuka ruang seluas-luasnya bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon yang

memenuhi persyaratan administratif, hukum, dan dukungan suara sah sebagaimana diatur dalam ketentuan teknis pencalonan. Pada tahapan pendaftaran yang telah ditetapkan, tiga pasangan calon resmi mendaftar dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada gambar 19.9 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.

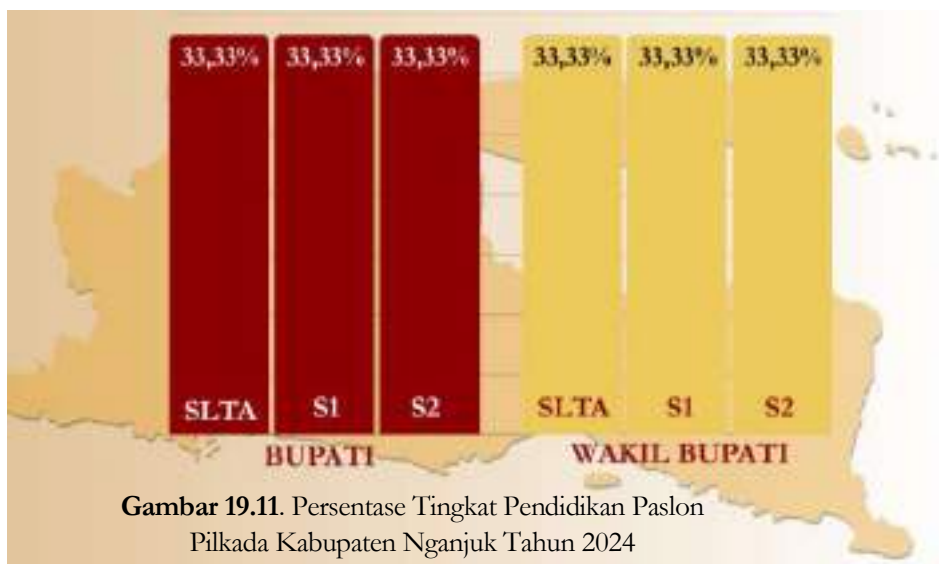


Gambar 19.9. Daftar Nama Paslon Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk disajikan pada gambar 19.10 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk disajikan pada gambar 19.11.



Gambar 19.10. Persentase Jenis Kelamin Paslon Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2024



Dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, terdapat 6 orang calon, yang terdiri dari 3 calon Bupati dan 3 calon Wakil Bupati. Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 4 orang (66,67%) merupakan laki-laki, sementara 2 orang (33,33%) adalah perempuan. Komposisi ini berlaku merata baik pada posisi Bupati maupun Wakil Bupati, masing-masing terdiri atas 2 laki-laki (66,67%) dan 1 perempuan (33,33%), mencerminkan keterwakilan perempuan yang masih terbatas namun tetap hadir dalam kontestasi politik lokal.

Dari sisi tingkat pendidikan, pasangan calon menunjukkan latar belakang akademik yang bervariasi. Tercatat 1 orang (16,67%) merupakan lulusan SLTA, 2 orang (33,33%) lulusan S1, 2 orang (33,33%) lulusan S2, dan 1 orang (16,67%) telah menempuh pendidikan hingga jenjang S3. Untuk posisi Bupati, masing-masing jenjang S1, S2, dan S3 diwakili oleh 1 orang (33,33%). Sementara pada posisi Wakil Bupati, komposisi pendidikannya terdiri dari 1 orang lulusan SLTA (33,33%), 1 orang S1 (33,33%), dan 1 orang S2 (33,33%). Sebaran ini menunjukkan bahwa mayoritas pasangan calon memiliki latar belakang pendidikan tinggi (S1 ke atas), yang diharapkan dapat mendukung kapasitas kepemimpinan mereka dalam mengelola pemerintahan daerah secara kompeten dan berintegritas. Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 19.12, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.

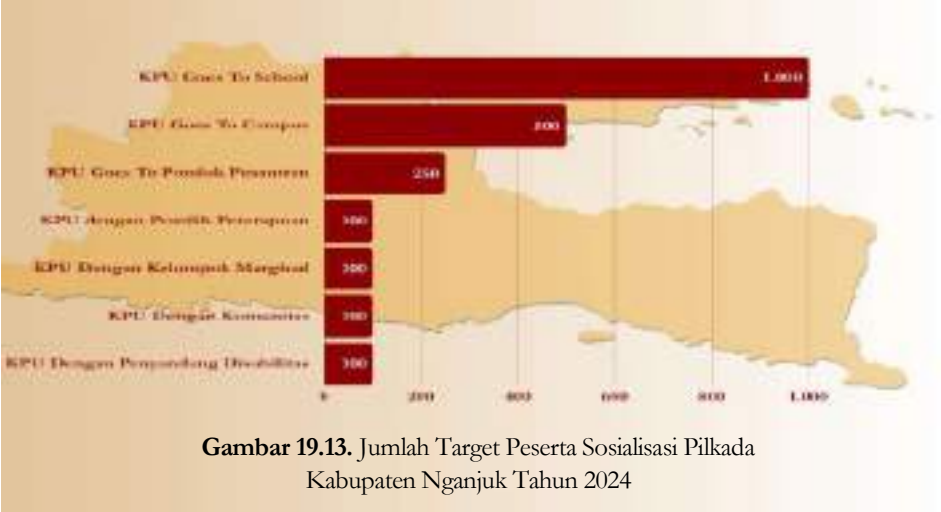


Gambar 19.12. Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih serta memperluas pemahaman masyarakat terhadap tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, KPU Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dengan pendekatan yang terencana dan menasar berbagai segmen masyarakat. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi tatap muka dan pemanfaatan media massa maupun media sosial. Melalui metode tatap muka, KPU Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi secara langsung kepada lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, komunitas pemuda, dan kelompok-kelompok strategis lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan interaktif mengenai pentingnya keterlibatan dalam Pilkada, termasuk informasi tentang waktu pelaksanaan, tata cara pemungutan suara, dan profil pasangan calon.

Sementara itu, untuk menjangkau *audiens* yang lebih luas, sosialisasi juga dilakukan melalui media cetak, media elektronik, serta kanal digital seperti *website* resmi KPU, Instagram, Facebook, dan platform media sosial lainnya. Strategi ini dirancang untuk menjangkau pemilih dari berbagai usia, terutama generasi muda dan pemilih pemula yang aktif di dunia digital. Adapun pada setiap kegiatan sosialisasi tatap muka, jumlah peserta disesuaikan dengan segmen sasaran dan kapasitas ruang, dengan tetap memperhatikan efektivitas penyampaian materi dan interaksi dua arah antara penyelenggara dan peserta.



Gambar 19.13. Jumlah Target Peserta Sosialisasi Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Sebagai bagian dari strategi sosialisasi yang kreatif dan komunikatif, KPU Kabupaten Nganjuk memperkenalkan maskot resmi Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. Kehadiran maskot ini bertujuan untuk mendekatkan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat melalui simbol yang mudah dikenali dan diterima oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda dan pemilih pemula.



Gambar 19.14. Maskot Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

KPU Kabupaten Nganjuk memperkenalkan maskot resmi yang dinamai “SANG BRAM”, sebuah akronim dari “Sumber Alam Nganjuk Berguna untuk Rakyat Adil Makmur.” Nama “SANG BRAM” terinspirasi dari kata “brambang”, yang dalam bahasa Jawa berarti bawang merah, komoditas unggulan khas Kabupaten Nganjuk. Maskot ini tidak hanya menjadi simbol visual dari Pilkada, tetapi juga mencerminkan potensi lokal, semangat demokrasi, serta harapan akan terselenggaranya pemilihan yang damai dan berkualitas.

Maskot “SANG BRAM” tampil dengan desain khas:

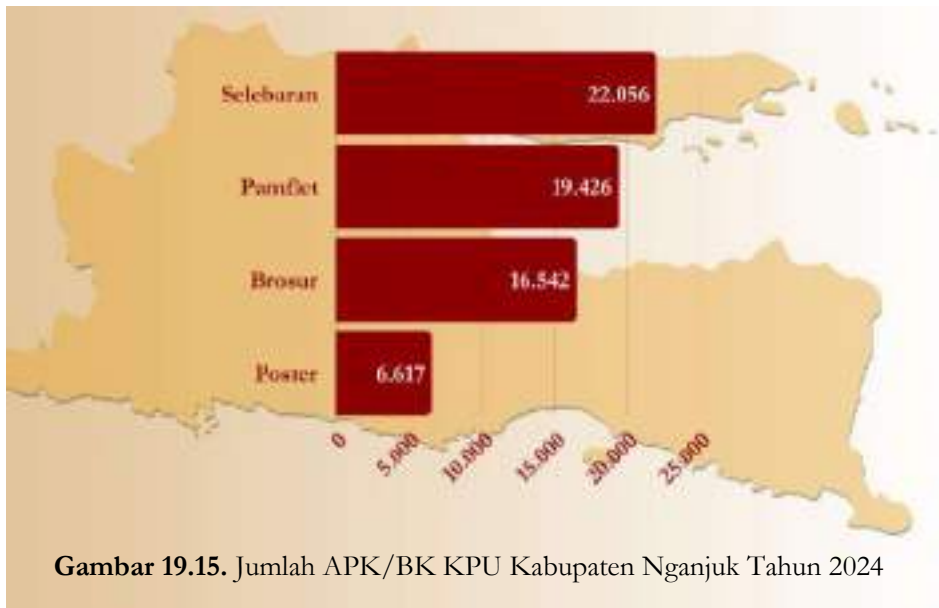
- Daun bawang merah berjumlah 5 melambangkan Pancasila, sebagai dasar negara dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Warna hijau pada daun mencerminkan keseimbangan alam dan kedamaian.
- Kepala berwarna merah muda keunguan alami melambangkan kasih sayang, keanggunan, dan kebijaksanaan.
- Pakaian putih melambangkan keterbukaan, sementara celana hitam menunjukkan ketenangan dan ketegasan.
- Sepatu yang dikenakan menggambarkan kesiapan untuk bergerak maju seiring perkembangan zaman.

Maskot “SANG BRAM” digambarkan membawa surat suara dan alat coblos, sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak

pilihnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER-JURDIL). Wajah ceria dan ekspresi gembira dari maskot melambangkan semangat menyambut pesta demokrasi dengan optimisme dan antusiasme menuju masa depan Kabupaten Nganjuk yang lebih baik. *Tagline* Pilkada Nganjuk 2024 adalah “Nganjuk Sayuk”, yang bermakna Nganjuk Rukun. Ungkapan ini menjadi harapan sekaligus komitmen untuk menciptakan penyelenggaraan pemilihan yang damai, harmonis, serta menjunjung nilai-nilai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, KPU Kabupaten Nganjuk memfasilitasi sejumlah sarana kampanye bagi seluruh pasangan calon. Fasilitasi ini meliputi penyediaan Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye (BK), penayangan iklan kampanye di media massa, serta pelaksanaan debat publik antar pasangan calon. Salah satu bentuk dukungan KPU adalah penayangan iklan kampanye serentak yang dilaksanakan melalui media televisi, surat kabar, dan radio lokal. Masing-masing pasangan calon menyerahkan materi iklan kampanye kepada KPU Kabupaten Nganjuk untuk dilakukan proses validasi dan verifikasi konten, bekerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Nganjuk dan perwakilan dari tim kampanye masing-masing pasangan calon. Validasi tersebut memastikan bahwa seluruh materi kampanye telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memuat unsur SARA, ujaran kebencian, *boaks*, atau informasi menyesatkan.

Penyerahan bahan kampanye dan APK/BK dilakukan secara resmi di kantor KPU Kabupaten Nganjuk pada tanggal 5 Oktober 2024, dan disaksikan langsung oleh perwakilan Bawaslu. Verifikasi terhadap isi dan desain dilakukan secara paralel dengan validasi konten iklan kampanye. Hasil verifikasi menjadi dasar untuk mendistribusikan bahan kampanye yang difasilitasi KPU kepada masing-masing pasangan calon. Pelaksanaan kampanye ini diharapkan dapat memberikan ruang yang adil dan proporsional bagi seluruh peserta pemilihan untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja mereka kepada masyarakat Nganjuk secara informatif, damai, dan berintegritas.



Gambar 19.15. Jumlah APK/BK KPU Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Debat publik untuk 3 (tiga) pasangan calon dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

- Debat pertama tanggal 16 Oktober 2024 di Gedung/studio JTV Surabaya dengan tema “*Kebutuhan Dasar Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Nganjuk*”.
- Debat kedua tanggal 6 November 2024 di Gedung Wanita Kabupaten Nganjuk dengan tema “*Memajukan Daerah Kabupaten Nganjuk Melalui Sektor Ekonomi dan Infrastruktur*”.
- Debat pertama tanggal 20 November 2024 di Hotel Marina Darmo Surabaya dengan tema “*Mengelola Birokrasi Yang Akuntabel Demi Kepentingan Masyarakat Serta Komitmen Membuat Berkeadilan*”.

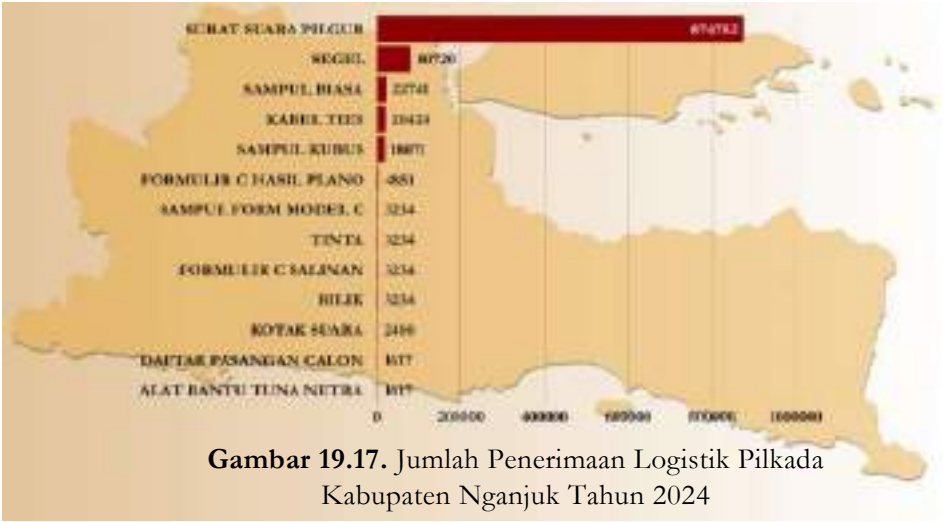
Selain fasilitas yang telah diberikan dari pihak KPU Kabupaten kepada ketiga paslon untuk berkampanye. Terdapat pula akun media sosial resmi dari ketiga paslon yang digunakan sebagai media kampanye.



Gambar 19.16. Jumlah Media Sosial Kampanye Paslon Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

6. Logistik

Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dilaksanakan melalui sistem *E-Purchasing* atau *E-Katalog*. Proses ini dimulai dengan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh KPU Kabupaten Nganjuk pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) KPU, sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kebutuhan logistik meliputi kotak suara, bilik suara, surat suara, tinta, segel, formulir, alat bantu tuna netra, dan perlengkapan lainnya yang secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 19.17.



Gambar 19.17. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

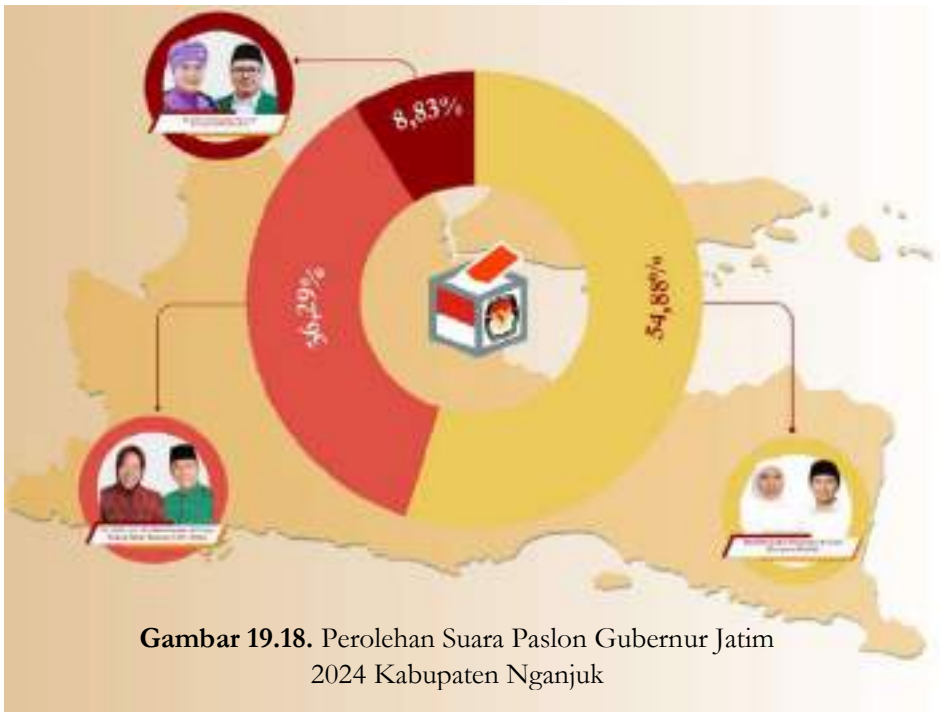
Setelah seluruh logistik diterima, proses setting dan packing dilakukan oleh 15 orang petugas logistik, sebelum akhirnya didistribusikan ke seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Dalam proses distribusi logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, KPU Kabupaten Nganjuk memanfaatkan dua jenis moda transportasi utama, yaitu mobil truk dan mobil *pick-up*, untuk menjangkau seluruh wilayah kerja penyelenggara di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tercatat sebanyak 34 unit mobil truk digunakan untuk mendistribusikan logistik ke tingkat PPK dan PPS, menjangkau 20 kecamatan dan gudang logistik tingkat desa. Sementara itu, untuk pengiriman logistik langsung ke TPS yang tersebar di 284 desa/kelurahan, digunakan 284 unit mobil *pick-up*, masing-masing melayani distribusi logistik ke TPS di wilayah desa atau kelurahan yang bersangkutan. Pemilihan moda transportasi ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi, ketepatan waktu, serta kemampuan menjangkau wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi, termasuk daerah dengan akses jalan terbatas.

Tabel 19.1. Kondisi Geografis Distribusi Logistik Pilkada
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

KECAMATAN	PEGUNUNGAN	RAWAN LONGSOR & BANJUR	DATARAN RENDAH
SAWAHAN	✓	✓	
NGETOS	✓	✓	
BERBEK			✓
LOCERET	✓	✓	
PACE			✓
PRAMBON			✓
NGRONGGOT			✓
KERTOSONO			✓
PATIANROWO			✓
BARON			✓
TANJUNGANOM			✓
SUKOMORO			✓
NGANJUK			✓
BAGOR			✓
WILANGAN			✓
REJOSO			✓
GONDANG			✓
NGLUYU	✓	✓	
LENGKONG			✓
JATIKALEN			✓
TOTAL	4	4	16

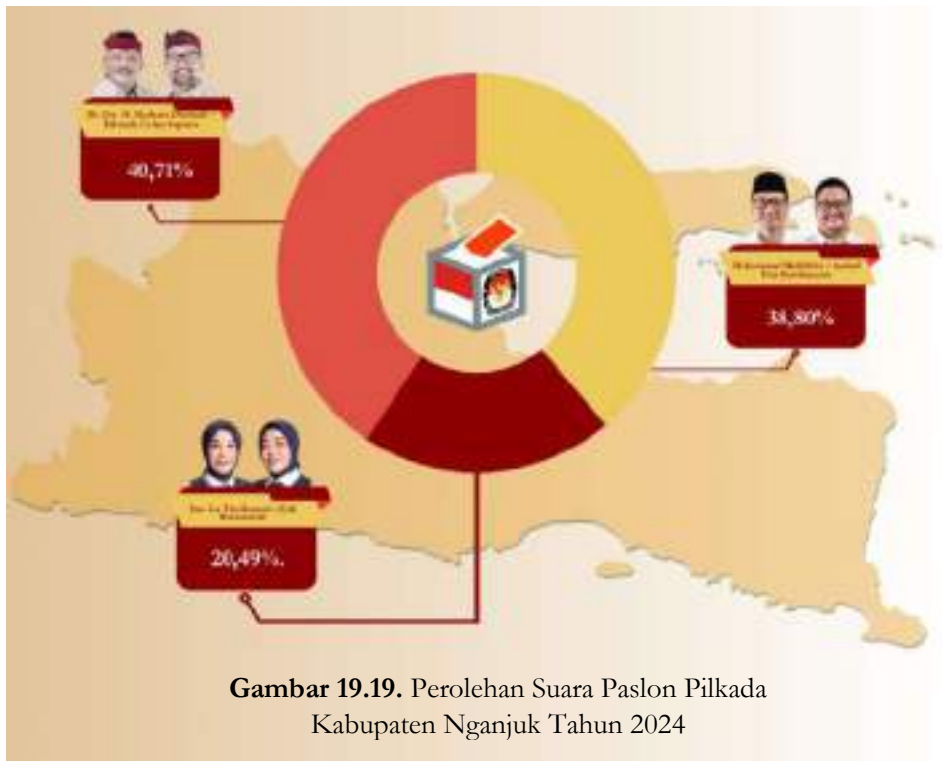
7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Nganjuk disajikan pada gambar 19.18.



Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, jumlah total suara sah di Kabupaten Nganjuk tercatat sebanyak 616.061 suara. Dari hasil tersebut, pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak memperoleh suara terbanyak dengan dukungan 338.120 suara atau 54,88%, menempatkan mereka sebagai peraih suara mayoritas di Kabupaten Nganjuk. Di posisi kedua, pasangan Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta meraih 223.565 suara atau 36,29%, sementara pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah – H. Lukmanul Khakim memperoleh 54.376 suara atau 8,83%. Hasil ini mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat Kabupaten Nganjuk terhadap pasangan petahana Khofifah–Emil yang kembali unggul secara signifikan, serta menggambarkan kompetisi yang cukup ketat dengan pasangan Tri Rismaharini–Gus Hans. Sementara itu, pasangan Luluk–Lukmanul mendapatkan dukungan lebih kecil secara persentase namun tetap menunjukkan kontribusi elektoral dalam dinamika Pilkada tingkat provinsi di wilayah ini.

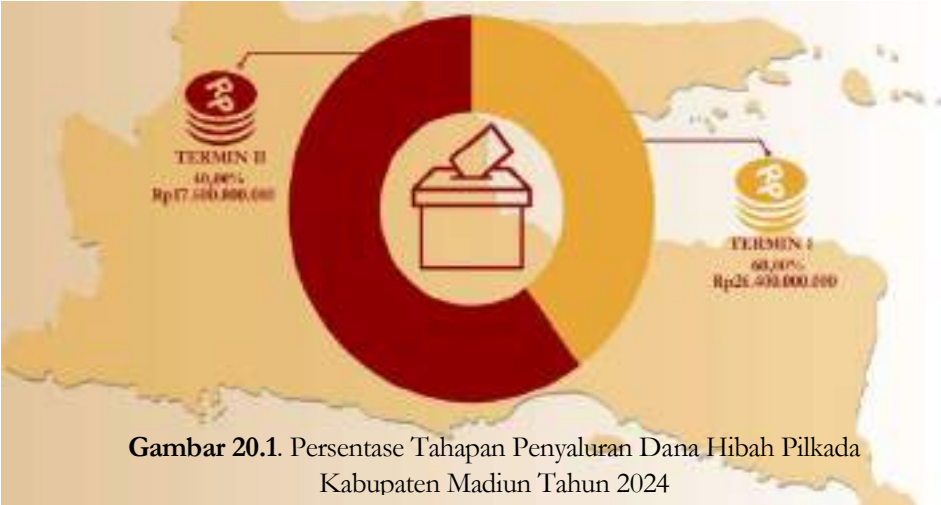
Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 19.19.



Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, jumlah total suara sah yang terkumpul sebanyak 636.626 suara. Dari hasil rekapitulasi, pasangan Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi – Trihandy Cahyo Saputro memperoleh suara terbanyak dengan 259.179 suara atau 40,71%, menempatkan mereka sebagai pasangan calon dengan dukungan tertinggi dari masyarakat Nganjuk. Di posisi kedua, pasangan Muhammad Muhibbin – Aushaf Fajr Herdiansyah memperoleh 246.993 suara atau 38,80%, disusul oleh pasangan Dra. Ita Triwibawati – Zuli Rantauwati yang memperoleh 130.454 suara atau 20,49%. Hasil ini menunjukkan bahwa persaingan dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk cukup kompetitif, khususnya antara dua pasangan teratas. Kemenangan pasangan Marhaen–Trihandy mengindikasikan dukungan kuat masyarakat terhadap keber-lanjutan kepemimpinan dan program yang ditawarkan, sementara tingginya suara untuk pasangan Muhibbin–Aushaf mencerminkan aspirasi perubahan dari sebagian besar masyarakat. Pasangan Ita–Zuli turut memberi warna dalam dinamika politik lokal dengan kontribusi suara yang cukup signifikan.

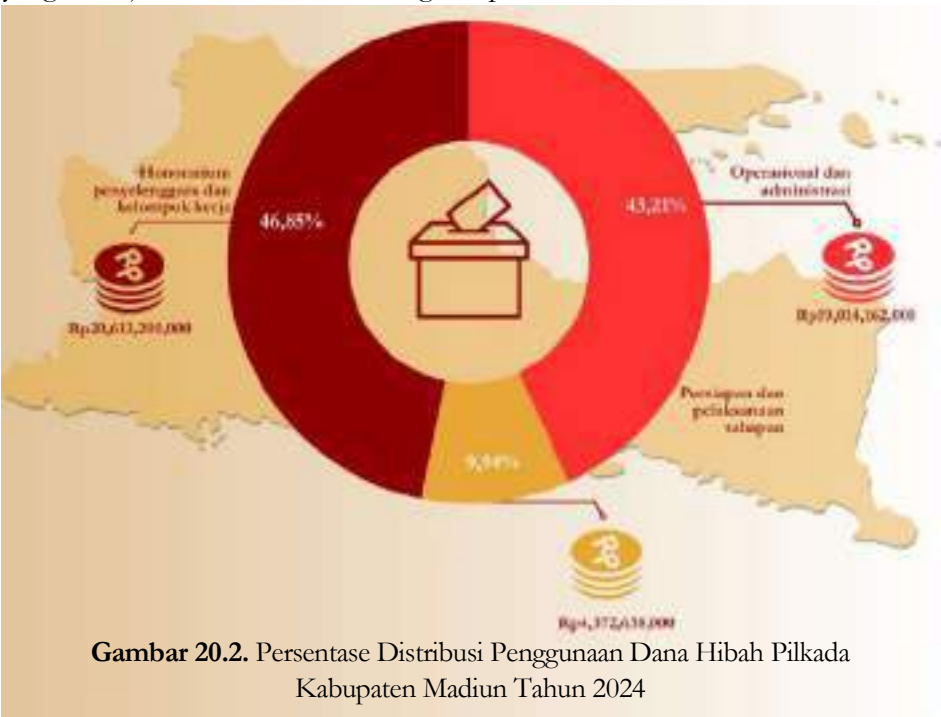
1. Perencanaan Program dan Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang demokratis, transparan, dan akuntabel, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun melakukan perencanaan hibah secara terstruktur dan terukur. Perencanaan ini menjadi dasar dalam menjamin tersedianya sumber daya keuangan yang memadai untuk mendukung seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. KPU Kabupaten Madiun mengajukan usulan awal anggaran hibah sebesar Rp65.334.458.450. Namun, setelah proses evaluasi dan penyesuaian komponen dana *sharing* dengan pemerintah daerah, nilai usulan mengalami penyesuaian menjadi Rp57.372.812.500. Pada akhirnya, nilai final yang disepakati dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah sebesar Rp44.000.000.000. Penetapan nilai tersebut mencerminkan hasil koordinasi intensif antara KPU Kabupaten Madiun dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mempertimbangkan efisiensi belanja daerah, optimalisasi alokasi anggaran, serta tetap menjaga kualitas pelaksanaan tahapan Pilkada. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 20.1 berikut.



Dana hibah yang telah disepakati untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2024 disalurkan dalam dua termin. Termin pertama dialokasikan sebesar Rp17.600.000.000 atau setara 40,00% dari total hibah. Sementara itu, termin kedua disalurkan sebesar Rp26.400.000.000 atau 60,00%, yang digunakan untuk membiayai tahapan lebih lanjut dalam pelaksanaan Pilkada. Skema dua termin ini disusun untuk memastikan efektivitas penyerapan anggaran dan keberlangsungan kegiatan tahapan secara bertahap sesuai kebutuhan operasional.

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 20.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.

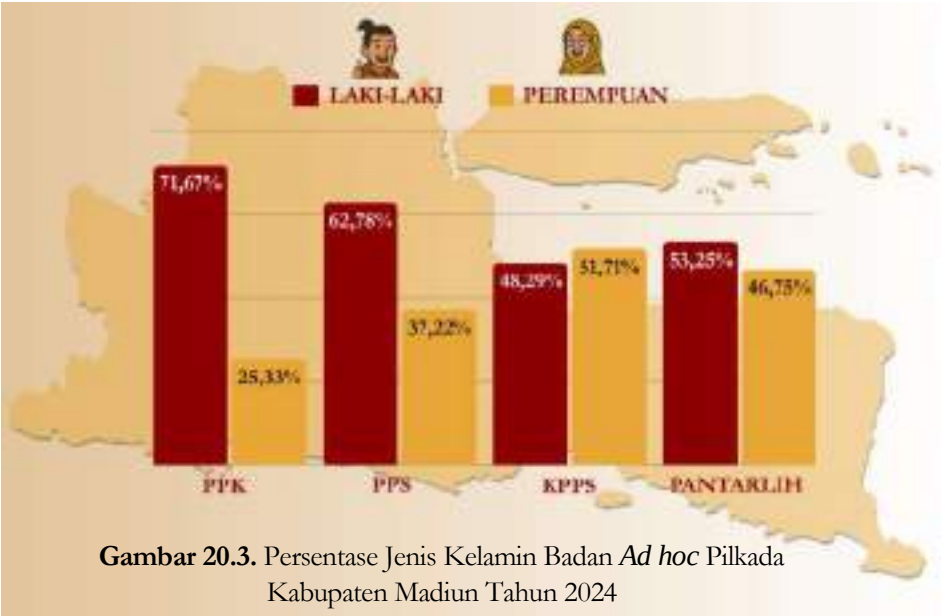


Komponen anggaran hibah untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2024 terdiri dari tiga alokasi utama. Honorarium badan *ad hoc* dan penyelenggara menjadi komponen terbesar dengan alokasi sebesar Rp20.613.200.000 atau 46,85% dari total anggaran hibah. Selanjutnya, operasional dan administrasi perkantoran memperoleh alokasi sebesar Rp19.014.162.000 atau 43,21%. Sementara itu, untuk tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilihan, dialokasikan sebesar

Rp4.372.638.000 atau 9,94%. Komposisi ini mencerminkan fokus utama anggaran pada dukungan sumber daya manusia dan kelancaran operasional kegiatan Pilkada.

2. **Badan *Ad hoc***

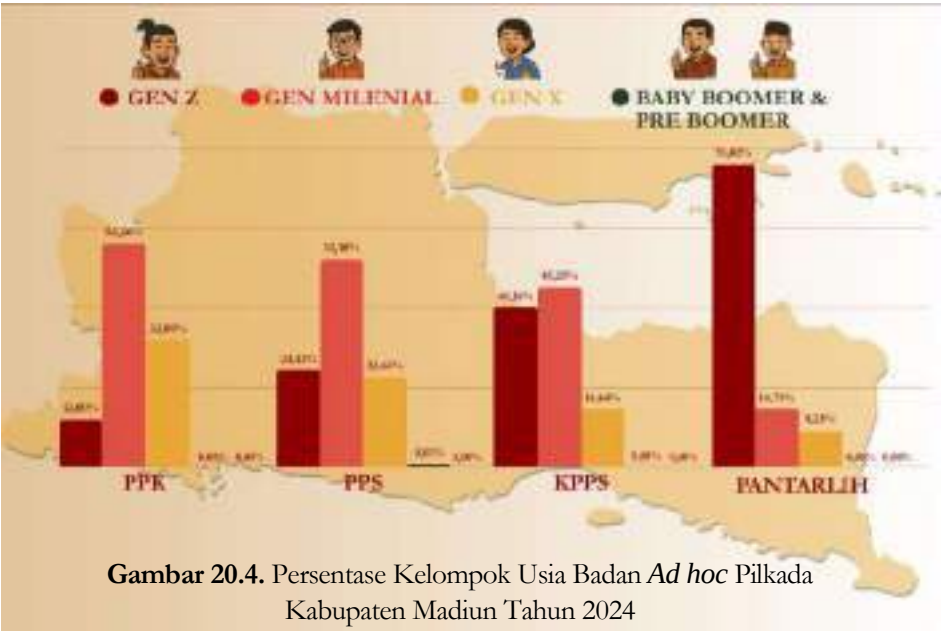
Dalam rangka menjamin kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun membentuk badan *ad hoc* sebagai bagian dari struktur pelaksana teknis di lapangan. Badan *ad hoc* ini memiliki peran strategis dalam menangani berbagai tugas operasional dan administratif selama tahapan pemilihan berlangsung. Keberadaan badan *ad hoc* bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan pemilihan agar berlangsung secara tertib, efisien, dan demokratis, serta bebas dari segala bentuk intimidasi dan potensi kecurangan. Melalui peran aktif badan *ad hoc*, diharapkan setiap tahapan pemilihan dapat terlaksana secara profesional dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 20.3.



Komposisi jenis kelamin penyelenggara badan *ad hoc* Pilkada 2024 di Kabupaten Madiun menunjukkan keterwakilan yang relatif berimbang, khususnya di tingkat lapangan. Pada tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), sebanyak 74.67% atau 56 orang adalah laki-laki dan 25.33% atau 19 orang adalah perempuan dari total 75 anggota. Di tingkat PPS (Panitia

Pemungutan Suara), dari total 618 orang, 62.78% (388 orang) adalah laki-laki dan 37.22% (230 orang) adalah perempuan. Sementara pada KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), terjadi dominasi relatif seimbang dengan 48.29% (3.860 orang) laki-laki dan 51.71% (4.134 orang) perempuan dari total 7.994 anggota. Adapun pada Pantarlih, dari total 2.167 petugas, 53.25% (1.154 orang) adalah laki-laki dan 46.75% (1.013 orang) adalah perempuan. Proporsi ini mencerminkan keterlibatan perempuan yang cukup tinggi, khususnya di tingkat KPPS dan Pantarlih, yang menunjukkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pilkada semakin meningkat.

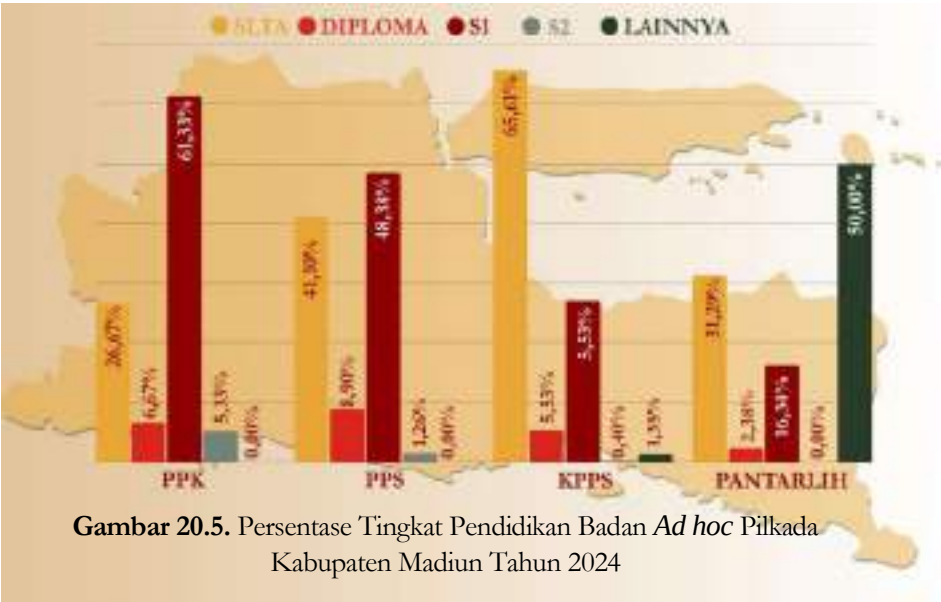
Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 20.4. berikut.



Komposisi usia penyelenggara badan *ad hoc* Pilkada 2024 di Kabupaten Madiun didominasi oleh generasi muda, terutama pada tingkat KPPS dan Pantarlih. Pada tingkat PPK, sebanyak 56,00% (42 orang) berasal dari kelompok usia 28–43 tahun (Generasi Milenial), diikuti oleh 32,00% (24 orang) dari Generasi X (44–59 tahun), dan 12,00% (9 orang) dari Generasi Z (17–27 tahun). Untuk PPS, mayoritas berasal dari Generasi Milenial sebanyak 52,10% (322 orang), disusul oleh 24,43% (151 orang) dari Generasi Z, 22,65% (140 orang) dari Generasi X, dan sisanya 0,81% (5 orang) dari *Baby Boomer*. Di tingkat KPPS, dominasi usia muda sangat terlihat, dengan 40,16% (3.210 orang) berasal dari Generasi Z, 45,20% (3.613 orang) dari Generasi Milenial,

dan 14,64% (1.170 orang) dari Generasi X. Sementara itu, Pantarlih didominasi oleh Generasi Z secara signifikan, yaitu 76,05% (3.296 orang), diikuti oleh 14,70% (637 orang) dari Generasi Milenial, dan 9,25% (401 orang) dari Generasi X. Tidak ada partisipasi dari kelompok *Baby Boomer* maupun *Pre-Boomer* pada tingkat Pantarlih.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *Ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 20.5.



Gambar 20.5. Persentase Tingkat Pendidikan Badan *Ad hoc* Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024

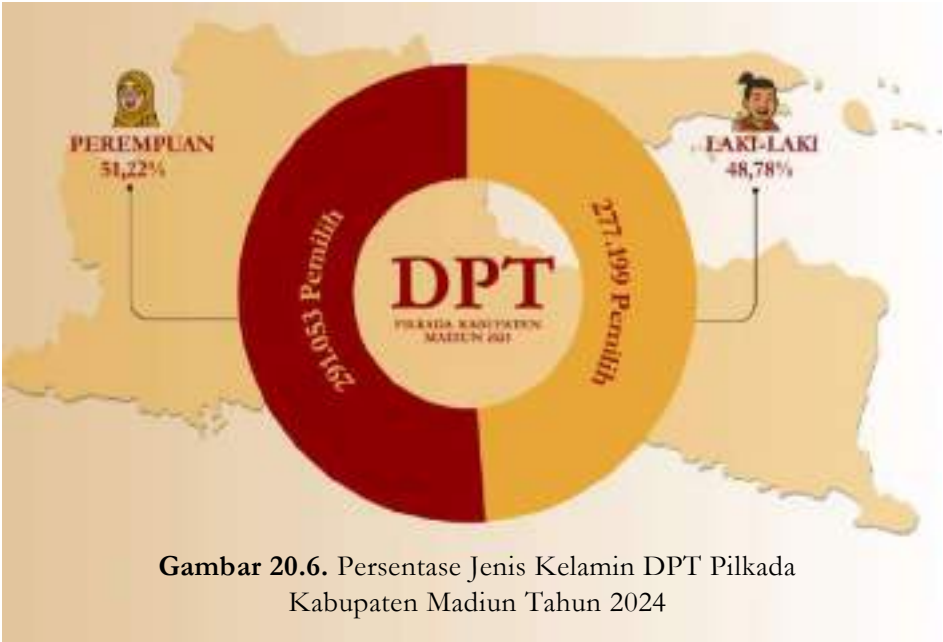
Tingkat pendidikan para penyelenggara badan *ad hoc* Pilkada 2024 di Kabupaten Madiun menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar tingkatan. Pada tingkat PPK, mayoritas berpendidikan S1 (61,33% atau 46 orang), diikuti oleh lulusan SLTA (26,67% atau 20 orang), serta S2 (5,33% atau 4 orang) dan Diploma (6,67% atau 5 orang). Untuk tingkat PPS, komposisinya didominasi oleh S1 (48,38% atau 299 orang), kemudian SLTA (41,10% atau 254 orang), Diploma (8,90% atau 55 orang), dan S2 (1,20% atau 10 orang). Di tingkat KPPS, lulusan SLTA mendominasi dengan jumlah 65,61% (5.245 orang), sedangkan lulusan S1 sebanyak 27,11% (2.167 orang), Diploma sebesar 5,53% (442 orang), dan S2 hanya 0,40% (32 orang). Terdapat juga kategori “lainnya” sebanyak 1,35% (108 orang) yang mencakup pendidikan nonformal atau tidak tercatat. Pada tingkat Pantarlih, kategori “lainnya” (tidak teridentifikasi secara spesifik) sebesar 50,00% (2.167 orang), sementara lulusan SLTA sebanyak 31,29% (1.356 orang), S1 sebesar 16,34% (708 orang), dan

Diploma sebesar 2,38% (103 orang). Data ini menggambarkan bahwa pada tingkatan strategis seperti PPK dan PPS, dominasi berasal dari lulusan perguruan tinggi (S1), sedangkan pada tingkatan teknis lapangan seperti KPPS dan Pantarlih, lulusan SLTA masih menjadi mayoritas.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2024, belum tercatat adanya partisipasi dari penyandang disabilitas sebagai bagian dari penyelenggara badan *ad hoc*, baik di tingkat PPK, PPS, KPPS, maupun Pantarlih. Hal ini menjadi catatan penting bagi KPU Kabupaten Madiun dalam upaya mendorong keterlibatan kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, dalam proses demokrasi, tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai penyelenggara pilkada. Ke depan, perlu dilakukan penguatan kebijakan afirmatif dan fasilitasi yang lebih inklusif agar partisipasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pilkada dapat terwujud secara lebih nyata dan merata.

3. Pemutakhiran Data

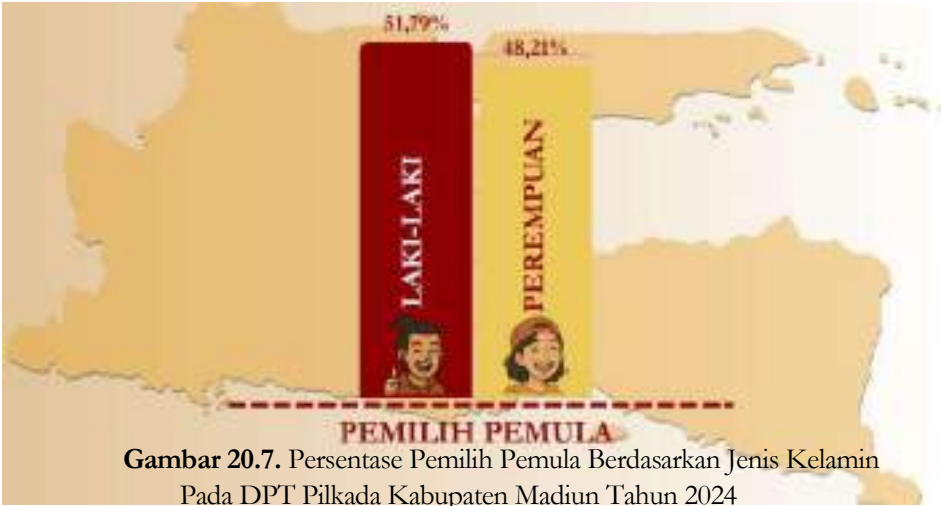
Pada tahapan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun menerima Data Pemilih Hasil Sinkronisasi (DPHS) sejumlah 574.622 pemilih. Setelah dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 569.441 pemilih. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan perbaikan dan validasi hingga akhirnya ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 568.252 pemilih. Penurunan jumlah pemilih dari DPHS ke DPT ini disebabkan oleh validasi data ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat, serta pemilih yang pindah domisili. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 20.6.



Gambar 20.6. Persentase Jenis Kelamin DPT Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024

Sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Madiun Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa dari total 568.252 pemilih, terdapat 277.199 pemilih laki-laki atau sebesar 48,78%, dan 291.053 pemilih perempuan atau sebesar 51,22%. Proporsi ini menunjukkan bahwa pemilih perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki dalam Pilkada Kabupaten Madiun tahun ini.

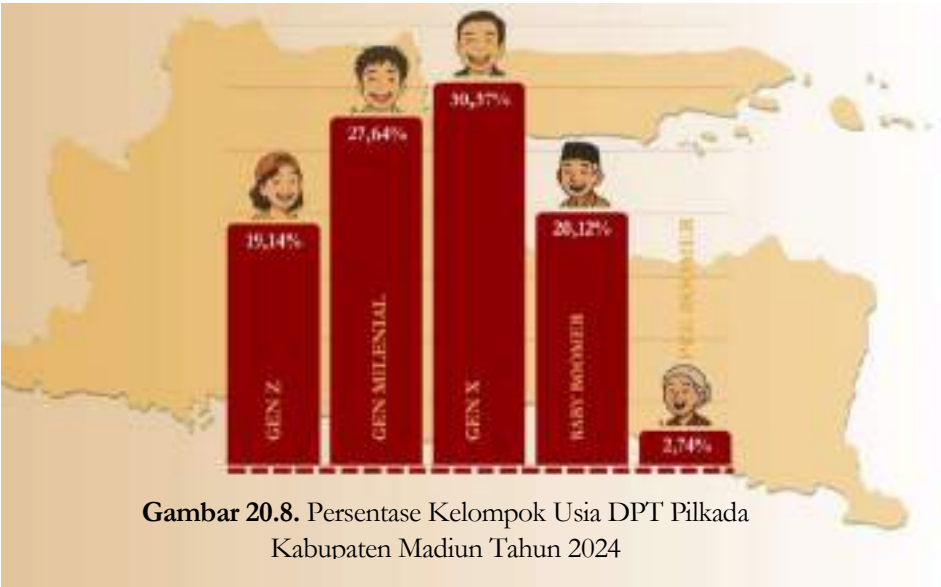
Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam kategori utama, yakni pemilih pemula Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 20.7. berikut.



Gambar 20.7. Persentase Pemilih Pemula Berdasarkan Jenis Kelamin Pada DPT Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024

Sebaran demografi DPT Kabupaten Madiun Tahun 2024 berdasarkan status pemilih menunjukkan bahwa dari total 568.252 pemilih, terdapat 8.055 pemilih pemula yang terdiri dari 4.172 laki-laki (51,79%) dan 3.883 perempuan (48,21%). Data ini menunjukkan dominasi pemilih pemula serta proporsi pemilih perempuan yang sedikit lebih besar dibandingkan laki-laki.

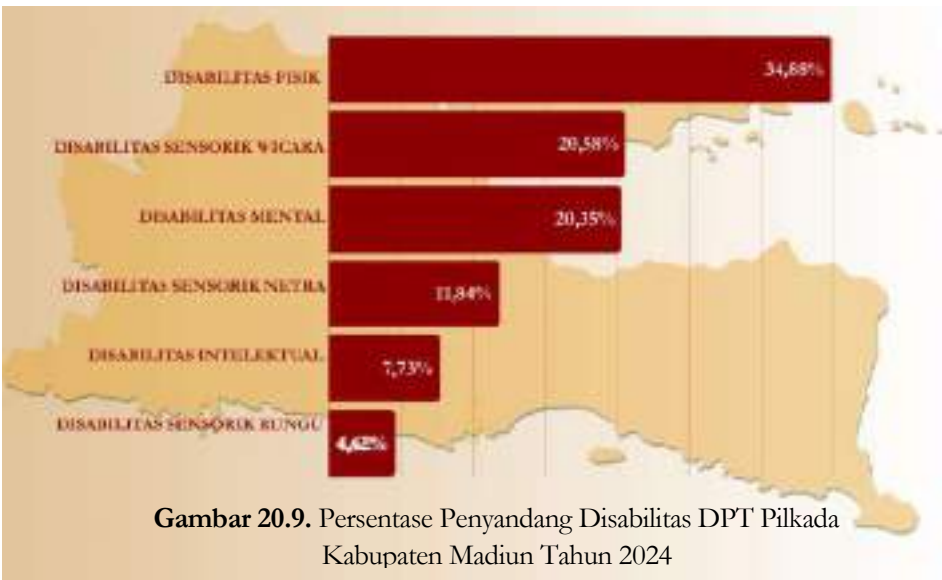
Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 20.8.



Gambar 20.8. Persentase Kelompok Usia DPT Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024

Sebaran demografi DPT Kabupaten Madiun Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa pemilih didominasi oleh Generasi X (usia 44–59 tahun) sebanyak 172.589 orang atau 30,37% dari total DPT. Disusul oleh Generasi Milenial (usia 28–43 tahun) sebanyak 157.045 orang (27,64%) dan *Baby Boomer* (usia 60–78 tahun) sebanyak 114.311 orang (20,12%). Sementara Generasi Z (usia 17–27 tahun) tercatat sebanyak 108.760 pemilih (19,14%), dan *Pre-Boomer* (usia di atas 79 tahun) sebanyak 15.547 orang atau 2,74%. Distribusi ini menunjukkan keterlibatan lintas generasi dalam Pilkada, dengan dominasi pemilih usia produktif dan dewasa.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten Madiun Tahun 2024 disajikan pada gambar 20.9, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Madiun Tahun 2024 berdasarkan kategori penyandang disabilitas mencatat total 4.309 pemilih dengan berbagai kelompok disabilitas. Kelompok terbesar berasal dari penyandang disabilitas fisik sebanyak 1.503 orang atau 34,88% dari total. Selanjutnya, disabilitas sensorik wicara tercatat sebanyak 887 orang (20,58%), diikuti oleh disabilitas mental sebanyak 877 orang (20,35%). Kelompok disabilitas sensorik netra tercatat 510 orang (11,84%), disabilitas intelektual sebanyak 333 orang (7,73%), dan disabilitas sensorik rungu sebanyak 199 orang (4,62%). Data ini menunjukkan komitmen inklusif dalam penyelenggaraan Pilkada, dengan memastikan aksesibilitas bagi seluruh kelompok masyarakat.

4. Pencalonan

Dalam rangkaian tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun telah melaksanakan proses pencalonan dengan tertib dan demokratis. Tahapan ini diawali dengan pendaftaran pasangan calon, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun dari jalur perseorangan yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Setelah proses pendaftaran, KPU Kabupaten Madiun melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dokumen persyaratan calon. Seluruh tahapan pencalonan berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan kemudian diumumkan secara resmi dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja

mereka kepada publik dalam masa kampanye. Tahapan ini menjadi langkah penting dalam menjamin transparansi dan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah yang kredibel dan berintegritas. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada gambar 20.10 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.

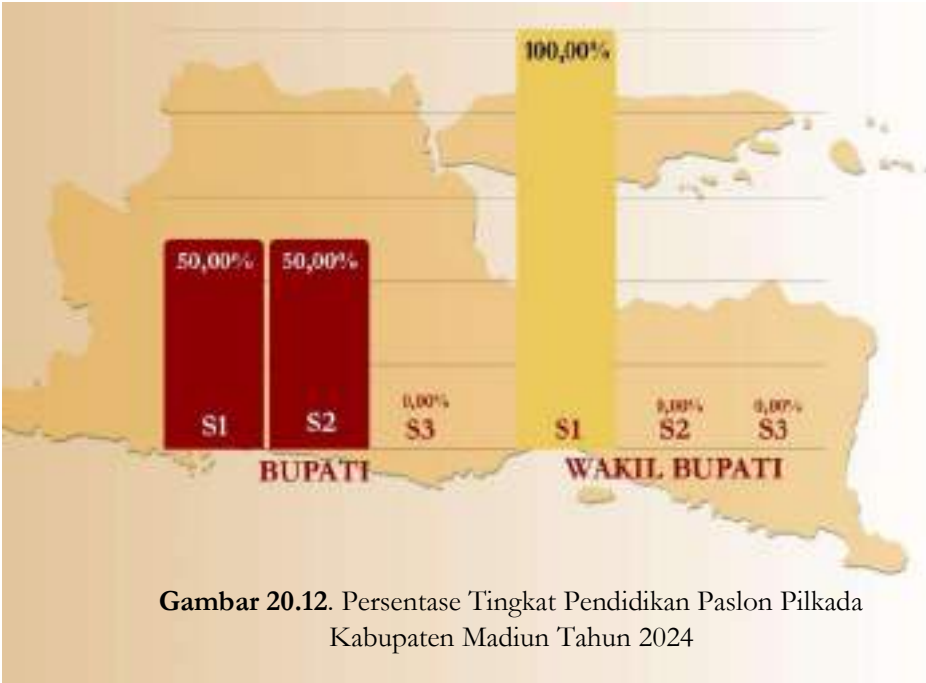


Gambar 20.10. Daftar Nama Paslon Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun disajikan pada gambar 20.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun disajikan pada gambar 20.11.



Gambar 20.11. Persentase Jenis Kelamin Paslon Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024



Gambar 20.12. Persentase Tingkat Pendidikan Paslon Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024

Sebaran demografi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh kandidat, baik pada posisi Bupati maupun Wakil Bupati, berjenis kelamin laki-laki. Dari total 4 orang calon, sebanyak 100,00% merupakan laki-laki dan tidak terdapat calon perempuan (0,00%).

Dari sisi tingkat pendidikan, sebanyak 1 orang calon Bupati memiliki pendidikan Strata 1 (S1) atau 50,00%, dan 1 orang lainnya memiliki pendidikan Strata 2 (S2) sebesar 50,00%, sementara tidak ada yang berpendidikan S3 (0,00%). Sementara itu, kedua calon Wakil Bupati (100,00%) seluruhnya berpendidikan S1. Secara keseluruhan, dari total 4 orang pasangan calon, terdapat 3 orang (75,00%) berpendidikan S1 dan 1 orang (25,00%) berpendidikan S2.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 20.13, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.

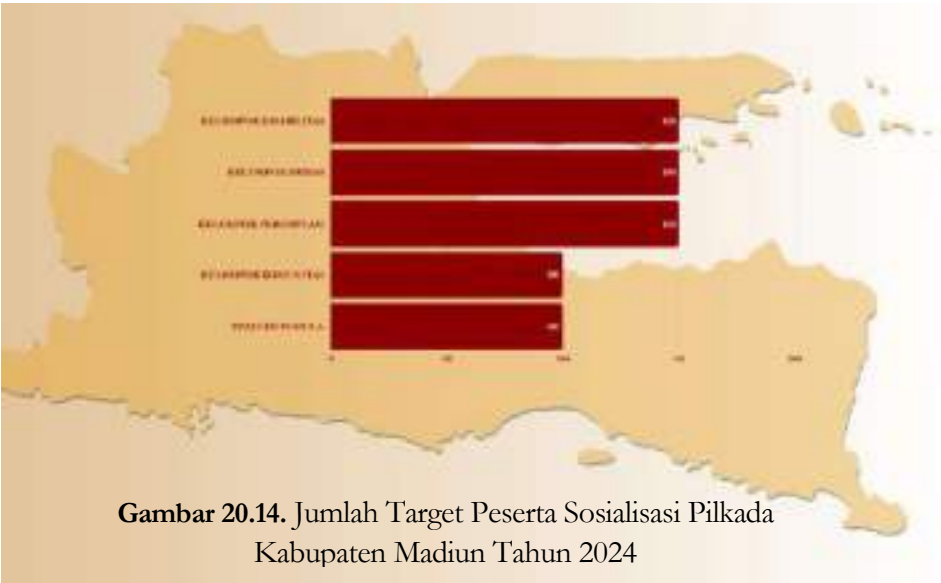


5. Sosialisasi dan Kampanye

Sosialisasi menjadi salah satu tahapan strategis dalam mendukung suksesnya Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Madiun. KPU Kabupaten Madiun menjalankan kegiatan ini guna memastikan masyarakat memahami hak, kewajiban, dan mekanisme dalam proses pilkada, sekaligus mendorong partisipasi aktif dan cerdas dalam menentukan pemimpin daerah. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai metode, seperti tatap muka kepada kelompok masyarakat, organisasi pemuda, tokoh agama, serta pemilih pemula. Selain itu, penyebaran informasi juga dilakukan melalui media massa, media

sosial, dan alat peraga kampanye. Metode ini terbukti efektif menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas.

Jumlah target peserta sosialisasi mencapai 1.350 orang, dengan pelaksanaan kegiatan yang dirancang untuk diikuti oleh 100–150 peserta dalam setiap sesi. Target ini meliputi pemilih pemula, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat di daerah terpencil, serta masyarakat umum yang perlu diberikan edukasi mengenai prosedur pemilihan. Dukungan media turut memperkuat upaya sosialisasi ini, dengan keterlibatan sekitar 15 media yang aktif meliput dan menyebarluaskan informasi pilkada melalui televisi, radio, dan platform digital. Kehadiran media turut memastikan pesan-pesan demokrasi tersampaikan secara luas dan efektif kepada publik.



Gambar 20.14. Jumlah Target Peserta Sosialisasi Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024

Sebagai bagian dari strategi sosialisasi yang kreatif dan komunikatif, KPU Kabupaten Madiun memperkenalkan maskot resmi Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024. Kehadiran maskot ini bertujuan untuk mendekatkan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat melalui simbol yang mudah dikenali dan diterima oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda dan pemilih pemula.



Gambar 20.15. Maskot Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024

Keris Tundung Madiun dihadirkan sebagai simbol filosofis dalam Pilkada Kabupaten Madiun 2024. Keris ini dimaknai sebagai penolak segala bentuk kebodohan, kemiskinan, dan kejahatan, seraya menjadi lambang harapan atas hadirnya pemimpin yang cerdas, sejahtera, dan mampu menghadirkan rasa aman bagi masyarakat. Nilai-nilai Keris Tundung menekankan pentingnya kepemimpinan yang legitimate dan berdaya gagasan dalam menundung ketidakbaikan dari kehidupan rakyat Madiun. Pakaian hitam yang dikenakan oleh maskot ini juga sarat makna melambangkan ketabahan, ketahanan, dan kesabaran. Warna hitam menggambarkan keuletan dalam menghadapi dinamika kehidupan serta tekad untuk terus menebar rahmat dan kasih demi kemaslahatan bersama, sejalan dengan filosofi Jawa *memayu bayuning bawana*, yaitu memperindah dan menjaga harmoni dunia.

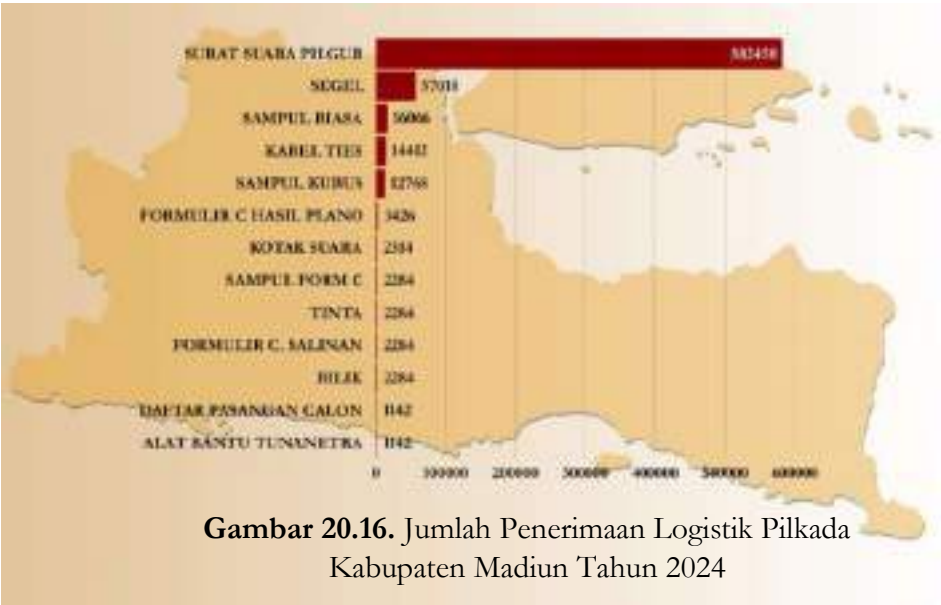
Tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024 dimulai setelah penetapan resmi pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun. Kampanye menjadi ruang bagi para calon kepala daerah untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja mereka kepada masyarakat luas. Strategi kampanye dilaksanakan secara beragam, mulai dari pemanfaatan media sosial dan platform digital, hingga kegiatan debat publik yang difasilitasi oleh KPU sebagai sarana penyampaian gagasan secara terbuka dan transparan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan kampanye yang damai dan tertib, KPU Kabupaten Madiun menyelenggarakan deklarasi kampanye damai di awal masa kampanye. Kegiatan ini diikuti oleh

seluruh pasangan calon dan tim kampanye, serta disaksikan langsung oleh unsur Forkopimda dan berbagai organisasi kemasyarakatan. Menjelang masa tenang, KPU bersama tim kampanye dan badan *ad hoc* bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Madiun untuk melakukan pembersihan seluruh alat peraga kampanye (APK) di seluruh wilayah. Langkah ini dilakukan guna menciptakan suasana yang kondusif dan tertib menjelang hari pemungutan suara.

6. Logistik

Tahapan logistik merupakan bagian krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun melaksanakan tahapan ini secara sistematis dan terencana guna menjamin kelancaran distribusi perlengkapan serta kesiapan sarana pendukung pemungutan suara. Proses logistik diawali dengan penyusunan perencanaan kebutuhan, yang mencakup identifikasi jumlah dan jenis perlengkapan yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah TPS dan karakteristik wilayah. Setelah perencanaan selesai, tahap berikutnya adalah pengadaan logistik melalui mekanisme e-purchasing dan e-katalog, disesuaikan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah diumumkan melalui LPSE. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 20.16.



Gambar 20.16. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024

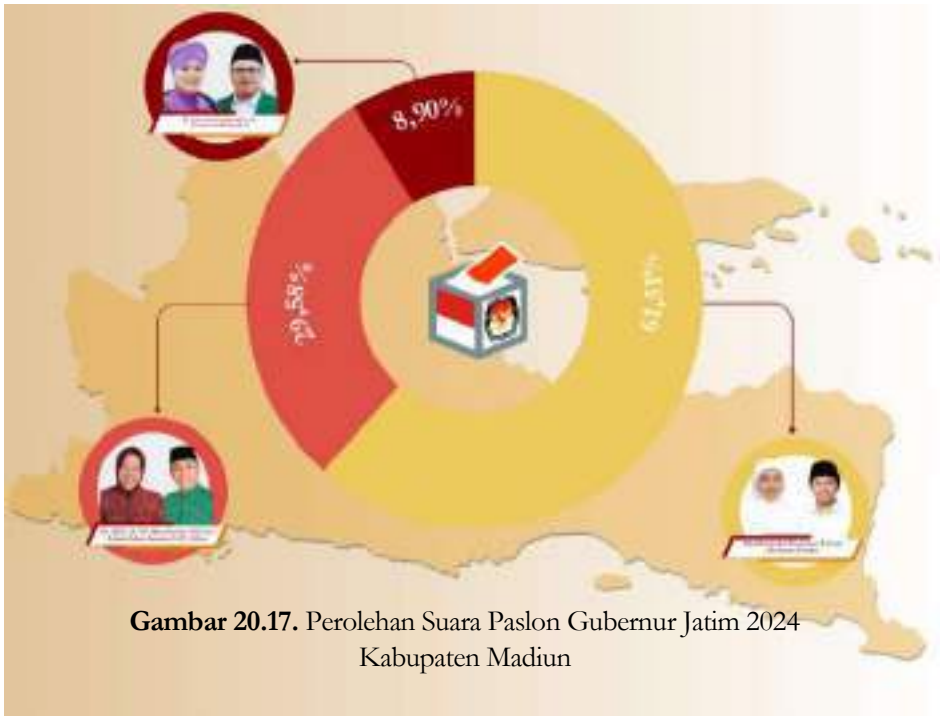
Selanjutnya, proses *setting* dan *packing* logistik dilakukan secara kolaboratif bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sortir dan pelipatan surat suara dilaksanakan secara terpusat di kantor KPU Kabupaten Madiun untuk menjaga kualitas dan ketepatan jumlah.

Untuk mendukung kelancaran distribusi logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun menggunakan dua jenis moda transportasi utama, yaitu mobil truk dan mobil pick-up. Mobil truk digunakan untuk distribusi logistik dari tingkat KPU menuju PPK sebanyak 36 unit dan ke PPS sebanyak 304 unit, mengingat kapasitas angkut yang besar sangat mendukung untuk jangkauan distribusi skala kecamatan dan kelurahan/desa. Sementara itu, mobil pick-up menjadi andalan dalam distribusi ke level TPS, yang jumlahnya mencapai 1.618 unit. Penggunaan pick-up dipilih karena lebih fleksibel dalam menjangkau lokasi-lokasi terpencil atau dengan akses jalan yang sempit.

Dalam proses distribusi, KPU Kabupaten Madiun memperhatikan kondisi geografis wilayah, terutama untuk kecamatan dengan medan sulit seperti Dagangan, Kare, Gemarang, dan Saradan. Penyusunan jadwal dan moda transportasi disesuaikan agar seluruh logistik dapat tiba tepat waktu dan dalam kondisi baik, sebagai bagian dari komitmen penyelenggaraan pemilihan yang profesional dan tepat sasaran.

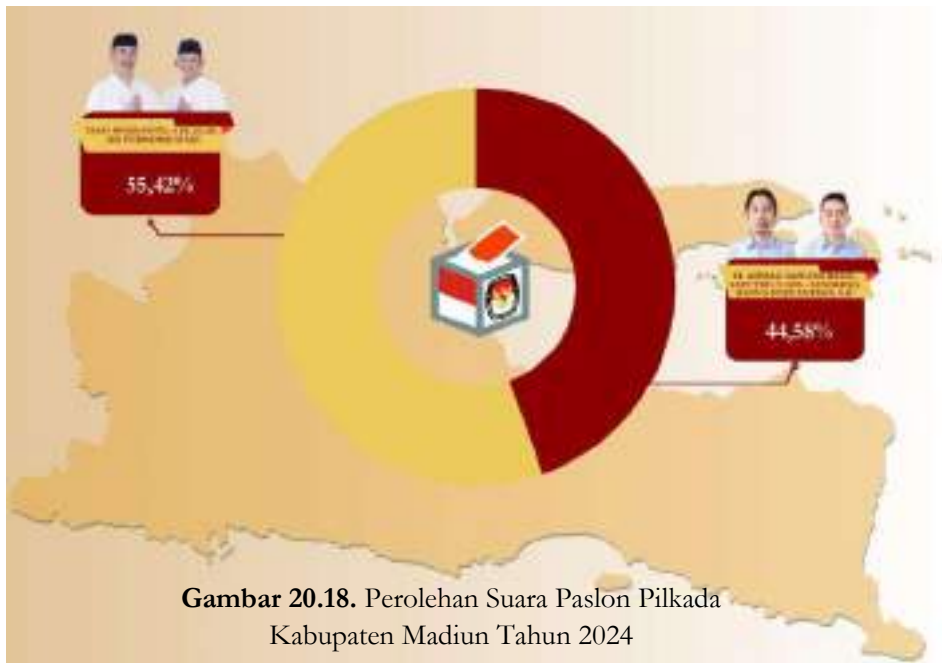
7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Madiun disajikan pada gambar 20.17.



Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di Kabupaten Madiun, pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestjanto Dardak meraih suara terbanyak dengan 257.801 suara atau sebesar 61,51% dari total suara sah. Di posisi kedua, pasangan Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T. – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), S.IP., M.Kes. memperoleh 123.982 suara (29,58%). Sementara itu, pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah, M.Si. – H. Lukmanul Hakim, M.Si. memperoleh 37.315 suara atau 8,90%. Total suara sah yang tercatat di Kabupaten Madiun adalah 419.098 suara. Hasil ini menunjukkan dominasi dukungan masyarakat Madiun terhadap pasangan petahana.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 20.18.



Gambar 20.18. Perolehan Suara Paslon Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024

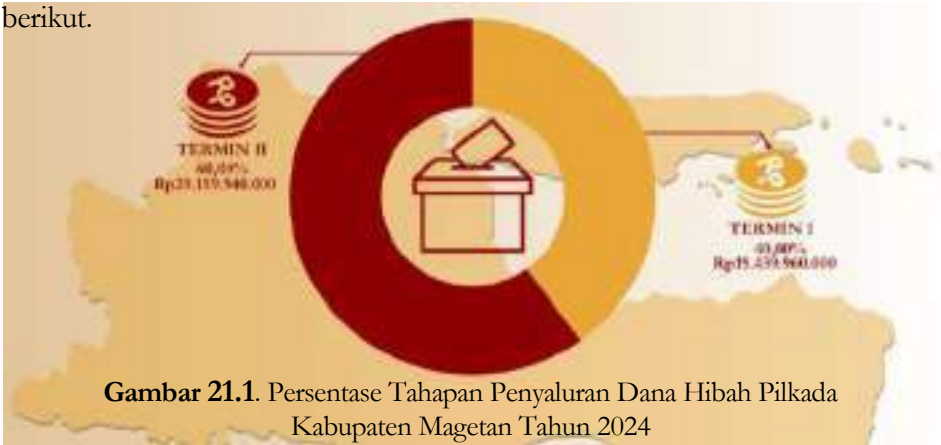
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2024, pasangan H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak – dr. Purnomo Hadi berhasil meraih suara terbanyak dengan 241.652 suara atau sebesar 55,42% dari total suara sah. Sementara itu, pasangan Ahmad Dawami – Sandhika R. Ferryantiko memperoleh 194.421 suara, yang setara dengan 44,58%. Total suara sah yang dihimpun dalam proses pemilihan ini berjumlah 436.073 suara, mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam menentukan kepemimpinan daerah untuk lima tahun ke depan.

BAGIAN 21

KABUPATEN MAGETAN

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan melaksanakan perencanaan program dan anggaran secara terstruktur, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah utama dalam mendukung kelancaran tahapan Pilkada ini adalah menjalin kerja sama pendanaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan melalui mekanisme hibah daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kesepakatan pendanaan tersebut dituangkan secara resmi dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dengan nilai total hibah yang disetujui sebesar Rp 48.599.900.000. Dana hibah ini menjadi fondasi utama bagi pembiayaan seluruh tahapan pemilihan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Selain untuk mendanai kebutuhan rutin tahapan Pilkada, perencanaan ini juga memperhitungkan dinamika yang mungkin terjadi, termasuk kemungkinan adanya pemungutan suara ulang, sebagaimana yang akhirnya terjadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi di 4 TPS wilayah Magetan. Oleh karena itu, perencanaan anggaran dilakukan secara adaptif dan disusun melalui Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang fleksibel, namun tetap mengedepankan prinsip efektivitas dan akurasi alokasi. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 21.1 berikut.



Dana hibah yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 disalurkan dalam dua termin, dengan Termin 1 sebesar Rp19.439.960.000 atau 40,00% dari total hibah, yang digunakan untuk mendanai tahapan awal pelaksanaan Pilkada. Sementara itu, Termin 2 disalurkan sebesar Rp29.159.940.000 atau 60,00%, yang dialokasikan untuk mendukung tahapan-tahapan berikutnya, termasuk pelaksanaan pemungutan suara, distribusi logistik, dan honorarium penyelenggara *ad hoc*. Pembagian ini dirancang untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran secara bertahap sesuai kebutuhan operasional.

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 21.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.



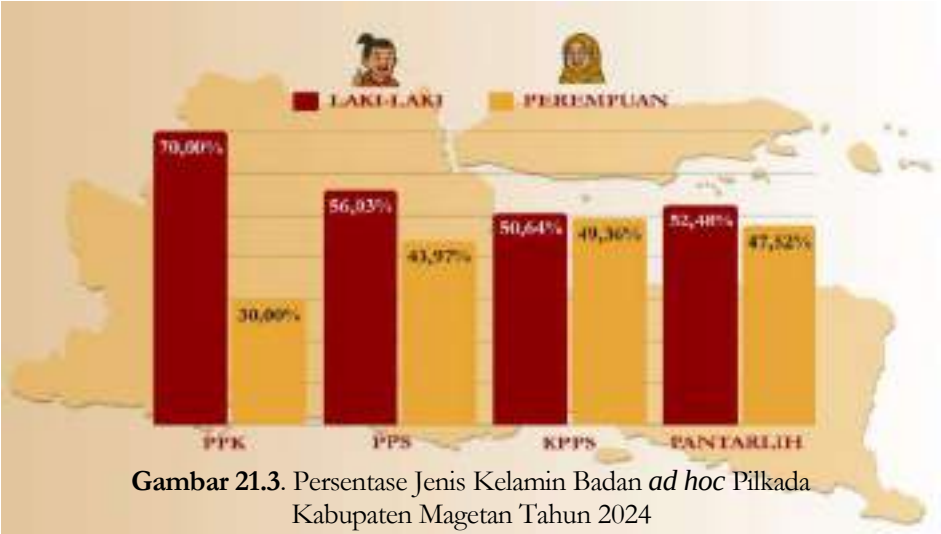
Gambar 21.2. Persentase Distribusi Penggunaan Dana Hibah Pilkada Kabupaten Magetan Tahun 2024

Komponen anggaran hibah yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 terdiri dari tiga pos utama. Pos terbesar dialokasikan untuk honorarium penyelenggara pemilihan dan kelompok kerja, yakni sebesar Rp21.590.700.000 atau 44,43% dari total anggaran hibah. Selanjutnya, pos tahap persiapan dan pelaksanaan memperoleh alokasi sebesar Rp18.355.981.830 atau 37,77%, yang mencakup berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pembentukan badan *ad hoc*, kampanye, serta bimbingan teknis.

Adapun operasional dan administrasi perkantoran dialokasikan sebesar Rp8.653.218.170 atau 17,81%, mencakup kebutuhan logistik, belanja modal, dan dukungan administratif lainnya. Komposisi anggaran ini mencerminkan pendekatan yang seimbang antara pembiayaan kegiatan teknis, operasional, dan dukungan sumber daya manusia.

2. *Badan Ad Hoc*

Pembentukan badan *ad hoc* merupakan elemen penting dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan melaksanakan proses rekrutmen secara terbuka melalui tahapan seleksi administrasi, Computer Assisted Test (CAT), dan wawancara untuk memastikan terpilihnya sumber daya yang kompeten dan profesional. Badan *ad hoc* ini memiliki peran strategis dalam menangani tugas teknis dan administratif pada setiap tahapan pemilihan, sehingga dapat berjalan tertib, efisien, dan bebas dari intimidasi maupun kecurangan. Sebanyak 90 orang ditetapkan sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 705 orang sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), 7.231 orang sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan 2.033 orang sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Melalui peran aktif badan *ad hoc* tersebut, diharapkan pelaksanaan Pilkada Magetan 2024 dapat berlangsung secara profesional, partisipatif, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 21.3.

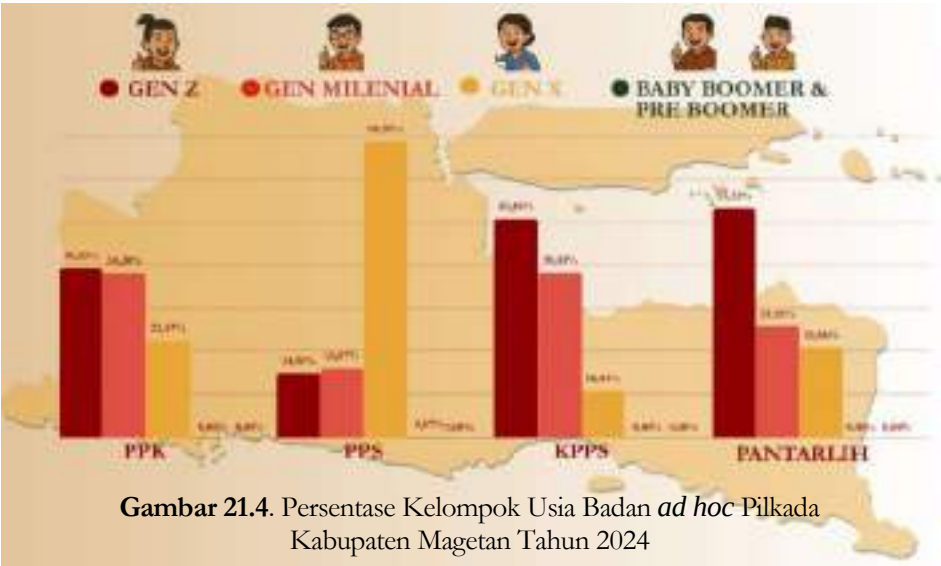


Gambar 21.3. Persentase Jenis Kelamin Badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Magetan Tahun 2024

Sebaran demografi berdasarkan jenis kelamin pada badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Magetan Tahun 2024 menunjukkan proporsi yang cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan, meskipun masih didominasi oleh laki-laki di sebagian besar tingkatan. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), terdapat 63 laki-laki (70,00%) dan 27 perempuan (30,00%) dari total 90 anggota. Di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), dari total 705 anggota, sebanyak 395 orang (56,03%) adalah laki-laki dan 310 orang (43,97%) adalah perempuan.

Sementara itu, di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah 7.231 orang, komposisi laki-laki sebanyak 3.662 orang (50,64%) dan perempuan sebanyak 3.569 orang (49,36%). Pada tingkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlif), dari total 2.033 orang, terdapat 1.067 laki-laki (52,48%) dan 966 perempuan (47,52%). Data ini mencerminkan keterlibatan perempuan yang cukup meningkat dalam struktur badan *ad hoc*, khususnya pada tingkatan KPPS dan Pantarlif.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Magetan Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 21.4 berikut.

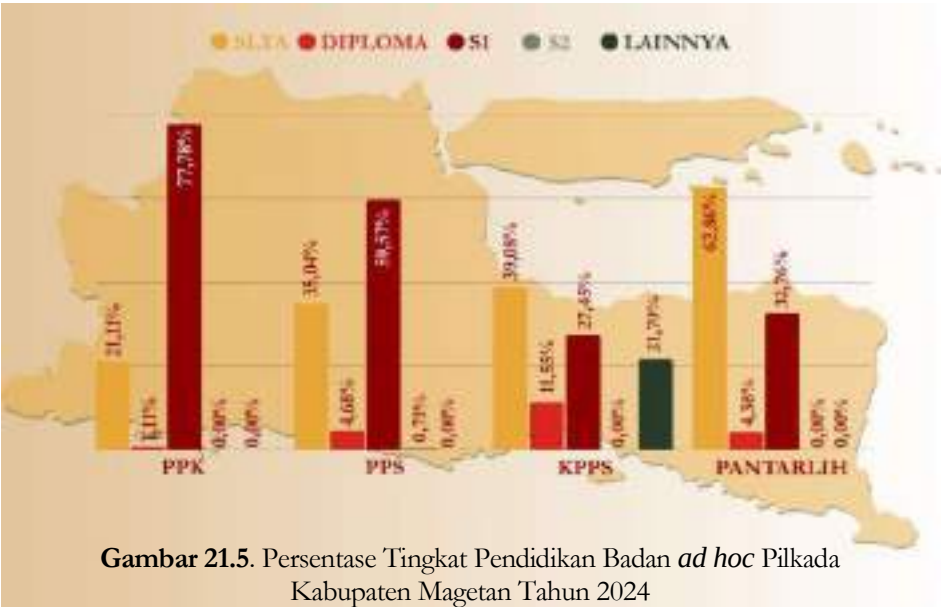


Gambar 21.4. Persentase Kelompok Usia Badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Magetan Tahun 2024

Sebaran demografi badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Magetan Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi generasi muda, khususnya dari kalangan Gen Z dan Gen Milenial. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dari total 89 orang, sebanyak 35 orang (39,33%) berasal dari Gen Z (usia 17–27 tahun), disusul Gen Milenial sebanyak 34 orang

(38,20%), dan Gen X sebanyak 20 orang (22,47%). Pada tingkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berjumlah 1.525 orang, komposisi didominasi oleh Gen X sebanyak 1.051 orang (68,92%), sedangkan Gen Z dan Gen Milenial masing-masing berjumlah 228 orang (14,95%) dan 245 orang (16,07%), serta hanya 1 orang (0,07%) berasal dari kelompok *Baby Boomer*. Di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang melibatkan 8.921 orang, Gen Z mendominasi dengan 4.536 orang (50,85%), diikuti oleh Gen Milenial sebanyak 3.418 orang (38,31%) dan Gen X sebanyak 967 orang (10,84%). Sedangkan pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebanyak 2.033 orang, mayoritas juga berasal dari Gen Z yaitu 1.082 orang (53,22%), diikuti Gen Milenial sebanyak 527 orang (25,92%) dan Gen X sebanyak 424 orang (20,86%). Data ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Magetan melibatkan peran aktif generasi muda sebagai garda depan demokrasi.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Magetan Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 21.5.



Gambar 21.5. Persentase Tingkat Pendidikan Badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Magetan Tahun 2024

Sebaran demografi badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Magetan Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan keragaman latar belakang pendidikan para penyelenggara Pilkada. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terdiri dari 90 orang, sebagian besar memiliki pendidikan sarjana (S1) sebanyak 70 orang (77,78%), diikuti lulusan SLTA

sebanyak 19 orang (21,11%), dan satu orang lulusan Diploma (1,11%). Sementara itu, pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berjumlah 705 orang, mayoritas juga berasal dari lulusan S1 sebanyak 420 orang (59,57%), diikuti oleh lulusan SLTA sebanyak 247 orang (35,04%), Diploma 33 orang (4,68%), dan S2 sebanyak 5 orang (0,71%). Untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah 8.921 orang, sebagian besar adalah lulusan SLTA sebanyak 3.486 orang (39,08%), diikuti oleh lulusan S1 sebanyak 2.449 orang (27,45%), Diploma sebanyak 1.030 orang (11,55%), dan terdapat 20 orang lulusan S2 (0,22%). Menariknya, terdapat kategori “lainnya” sebanyak 1.936 orang (21,70%) yang kemungkinan mencakup lulusan non-formal atau belum teridentifikasi dalam klasifikasi umum. Pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dari total 2.033 orang, sebanyak 1.278 orang (62,86%) berlatar belakang pendidikan SLTA, kemudian 666 orang (32,76%) merupakan lulusan S1, dan 89 orang (4,38%) merupakan lulusan Diploma. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun dominasi lulusan SLTA masih tinggi pada tingkatan KPPS dan Pantarlih, namun jenjang pendidikan sarjana mendominasi pada tingkat PPK dan PPS, yang berpotensi menunjukkan distribusi tugas berdasarkan kompleksitas tanggung jawab dan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam pelaksanaan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pilkada Kabupaten Magetan Tahun 2024, tercatat terdapat 1 orang penyelenggara dari kalangan penyandang disabilitas berjenis kelamin laki-laki. Keterlibatan penyandang disabilitas ini mencerminkan komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang inklusif, memberikan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, serta mendorong representasi kelompok rentan dalam proses demokrasi.

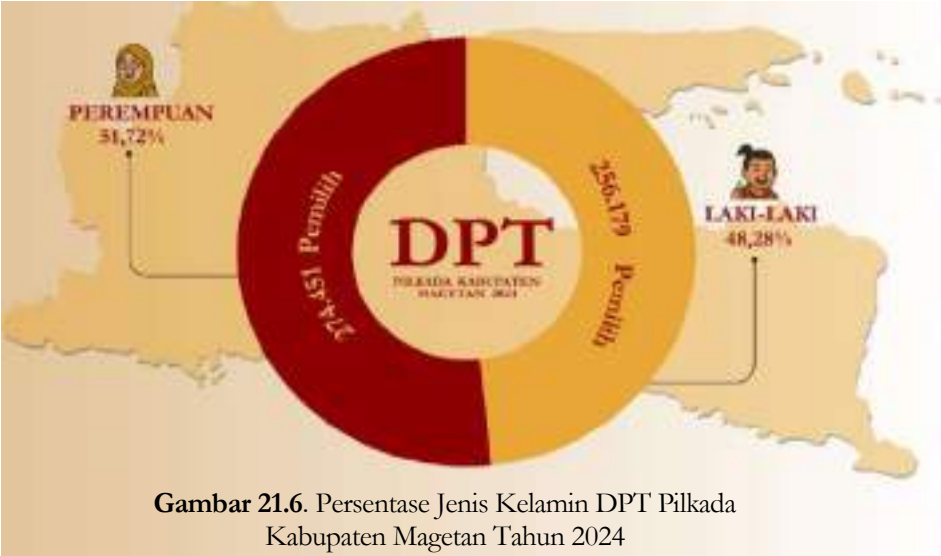
3. Pemutakhiran Data

Perjalanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan dalam menyiapkan data pemilih untuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 dimulai dari diterimanya Data Pemilih Hasil Sinkronisasi (DPHS) yang berjumlah 536.041 pemilih. Data ini kemudian dipetakan ke dalam 1.033 Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai langkah awal untuk pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit).

Hasil dari proses Coklit ini menghasilkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 532.010 pemilih, yang berarti terjadi penurunan sebesar 4.031 pemilih (0,75%) dari jumlah DPHS awal. DPS tersebut kemudian dimutakhirkan kembali melalui mekanisme perbaikan dan validasi, hingga akhirnya ditetapkan

sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 20 September 2024, dengan jumlah pemilih sebanyak 530.630. Dengan demikian, DPT mengalami penurunan sebanyak 1.380 pemilih (0,26%) dibandingkan DPS sebelumnya.

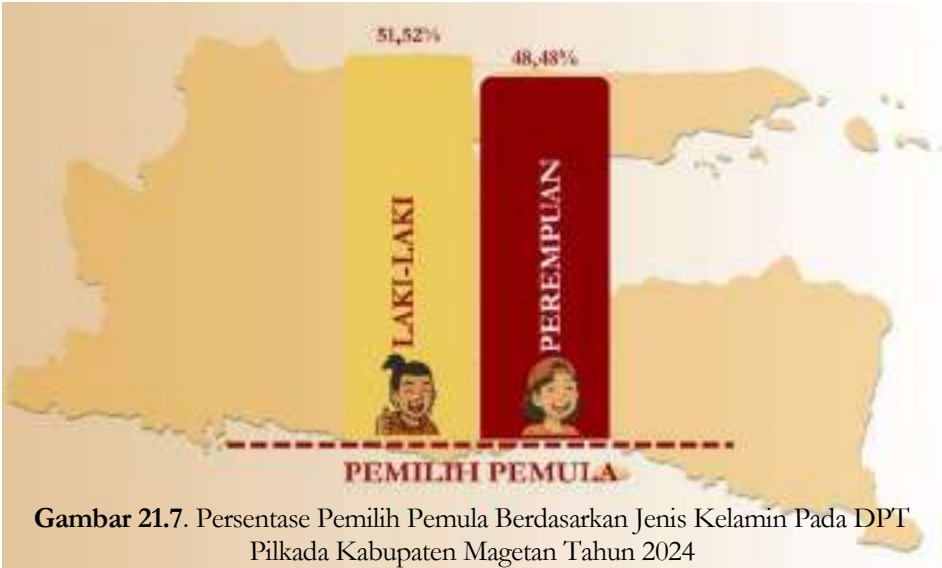
Penurunan jumlah pemilih dari tahap ke tahap ini umumnya disebabkan oleh berbagai faktor seperti pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat karena meninggal dunia, pindah domisili, atau tidak memiliki dokumen kependudukan yang sah. Proses pemutakhiran ini menjadi kunci dalam menjamin akurasi dan validitas data pemilih demi terwujudnya Pilkada yang demokratis dan berkualitas. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 21.6.



Gambar 21.6. Persentase Jenis Kelamin DPT Pilkada Kabupaten Magetan Tahun 2024

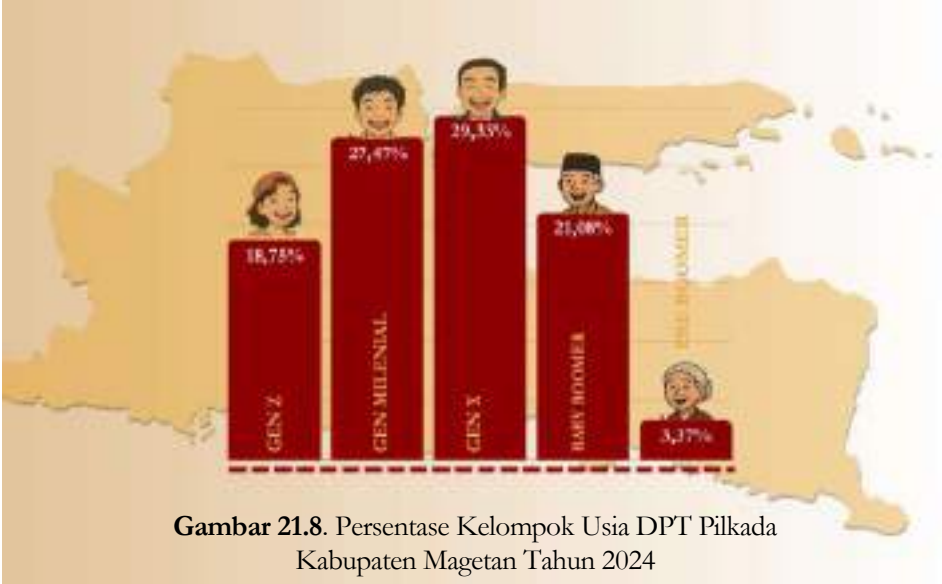
Berdasarkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024, jumlah pemilih tercatat sebanyak 530.630 orang. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 256.179 pemilih (48,28%), sedangkan pemilih perempuan sebanyak 274.451 pemilih (51,72%). Data ini menunjukkan bahwa keterwakilan pemilih perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang mencerminkan pentingnya peran dan partisipasi perempuan dalam proses demokrasi di Kabupaten Magetan.

Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni pemilih pemula dan pemilih non-pemula. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 21.7 berikut.



Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Magetan Tahun 2024, terdapat status pemilih pemula, dimana pemilih pemula laki-laki sebanyak 3.772 (51,52%) dan pemilih pemula perempuan sebanyak 3.550 (48,48%).

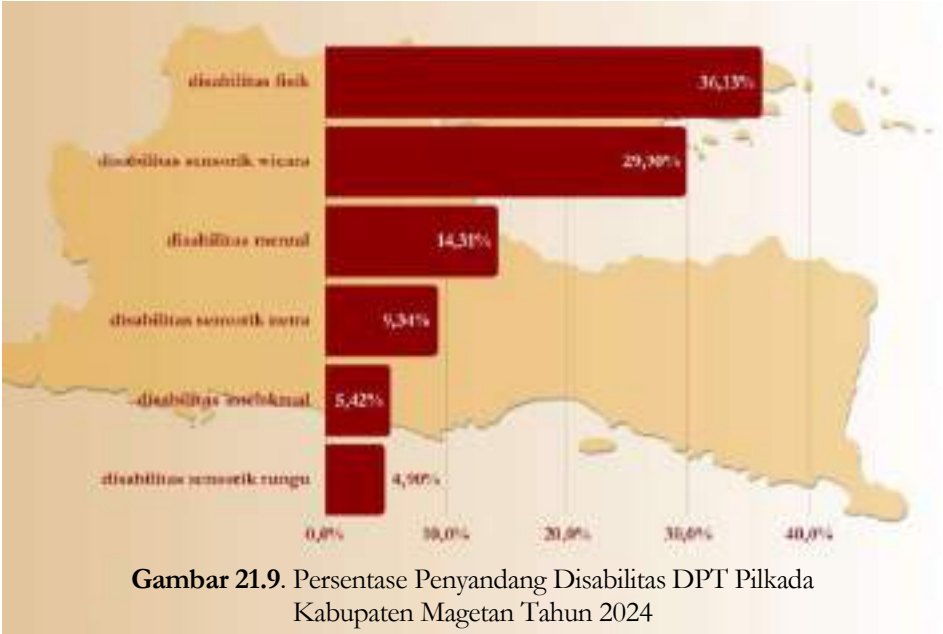
Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 21.8.



Distribusi pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Magetan Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia menunjukkan keterwakilan

lintas generasi yang cukup merata. Kelompok usia 44–59 tahun (Generasi X) mendominasi jumlah pemilih dengan 155.654 orang (29,33%), diikuti oleh Generasi Milenial (28–43 tahun) sebanyak 145.767 orang (27,47%). Kelompok usia 60–78 tahun (*Baby Boomer*) menyumbang 111.860 pemilih (21,08%), sedangkan Generasi Z (17–27 tahun) mencakup 99.469 pemilih (18,75%), yang menunjukkan partisipasi pemilih muda yang cukup signifikan. Sementara itu, kelompok usia lebih dari 79 tahun (*Pre-Boomer*) berjumlah 17.880 orang (3,37%), tetap menunjukkan eksistensi partisipasi dari kalangan usia lanjut. Komposisi ini mencerminkan pentingnya pendekatan kampanye dan sosialisasi yang inklusif dan menyesuaikan karakteristik antar generasi dalam Pilkada Magetan 2024.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten Magetan Tahun 2024 disajikan pada gambar 21.9, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Magetan Tahun 2024, tercatat sebanyak 5.023 pemilih penyandang disabilitas, yang mencerminkan komitmen inklusivitas dalam penyelenggaraan Pilkada. Dari total tersebut, penyandang disabilitas fisik merupakan kelompok terbanyak dengan jumlah 1.815 orang (36,13%), diikuti oleh disabilitas sensorik wicara sebanyak 1.502 orang (29,90%). Kelompok disabilitas

mental menempati urutan berikutnya dengan 719 orang (14,31%), disusul oleh disabilitas sensorik netra sebanyak 469 orang (9,34%), disabilitas intelektual sebanyak 272 orang (5,42%), dan disabilitas sensorik rungu sebanyak 246 orang (4,90%). Data ini menegaskan pentingnya penyediaan fasilitas dan layanan Pilkada yang ramah disabilitas, agar seluruh warga negara, tanpa terkecuali, dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan bermartabat.

4. Pencalonan

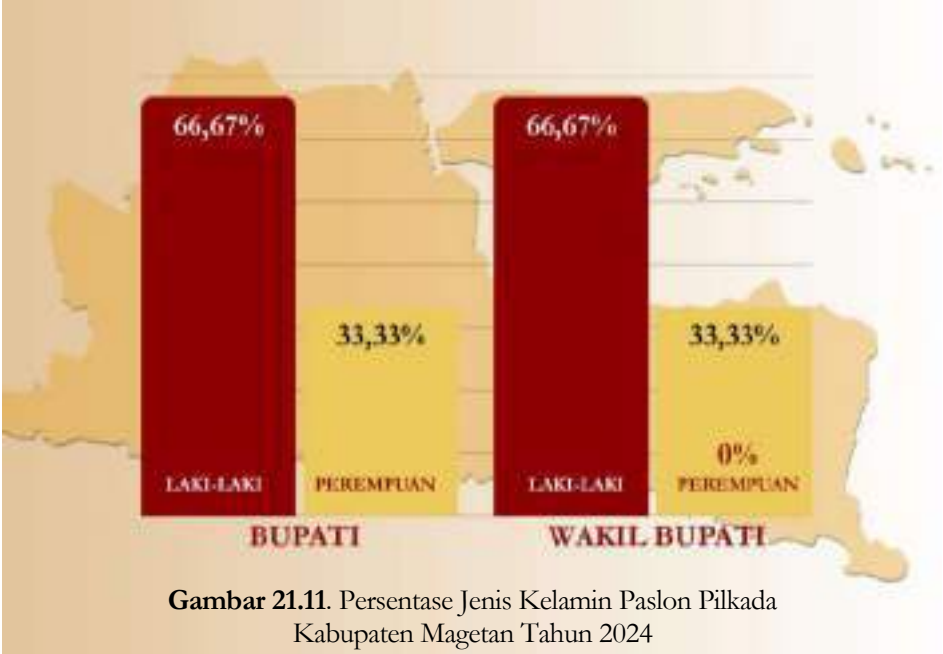
Tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Proses ini menjadi salah satu fase krusial dalam menentukan figur-figur yang akan melanjutkan kepemimpinan di Kabupaten Magetan.

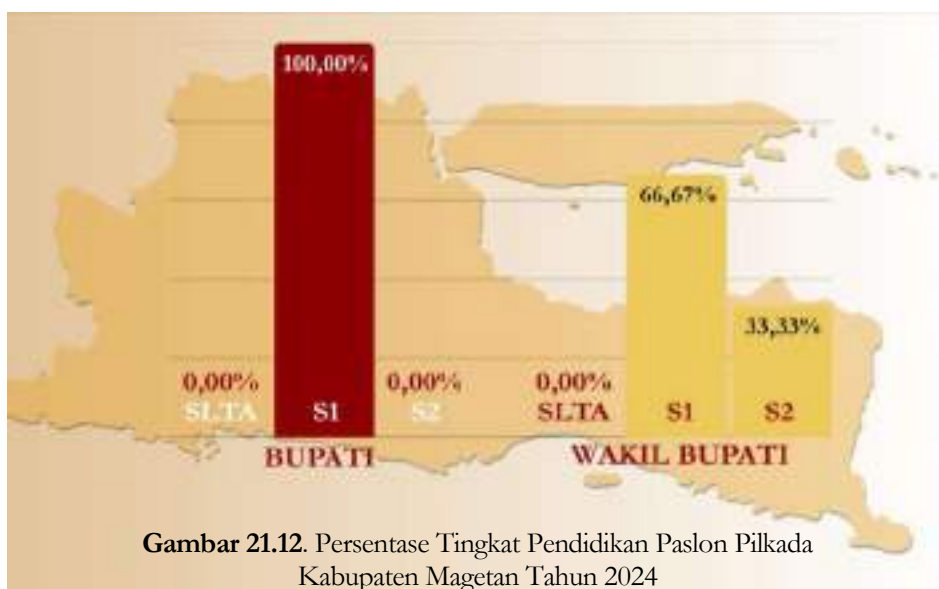
Pada hari pertama pendaftaran, pasangan calon H. Sujatno, SE, M.M dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd, M.Pd secara resmi mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Magetan dengan didampingi oleh sejumlah partai politik pengusung. Hari kedua pendaftaran diisi oleh pasangan calon Hj. Nanik Endang R, M.Pd dan Suyatni Priasmoro, SH, MH yang juga hadir bersama tim serta partai pengusul untuk menyerahkan dokumen pencalonan mereka. Sementara itu, pasangan Ir. Hergunadi, MT dan Dr. A. Basuki Babussalam, SH, MH memilih mendaftar pada hari ketiga, yang sekaligus menjadi hari terakhir tahapan pendaftaran.

Seluruh berkas persyaratan pencalonan dari ketiga pasangan calon tersebut kemudian diperiksa dan diteliti oleh tim KPU Kabupaten Magetan. Hasil dari proses verifikasi administrasi menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan telah lengkap dan diterima secara resmi. Hal ini menandai keberhasilan pelaksanaan tahapan pencalonan yang transparan, tertib, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada gambar 21.10 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.



Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan disajikan pada gambar 21.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan disajikan pada gambar 21.12.





Gambar 21.12. Persentase Tingkat Pendidikan Paslon Pilkada Kabupaten Magetan Tahun 2024

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024, tercatat sebanyak tiga pasangan calon yang resmi mendaftar dan diterima berkas pencalonannya. Berdasarkan data jenis kelamin, dari total enam individu calon (bupati dan wakil bupati), sebanyak empat orang atau 66,67% merupakan laki-laki, dan dua orang atau 33,33% merupakan perempuan. Komposisi ini berlaku seimbang pada posisi bupati dan wakil bupati, masing-masing diisi oleh dua laki-laki dan satu perempuan.

Dari sisi latar belakang pendidikan, para pasangan calon menunjukkan tingkat pendidikan yang tinggi. Seluruh calon bupati tercatat memiliki pendidikan magister (S2), atau sebesar 100%, sementara tidak ada yang berlatar belakang pendidikan sarjana (S1) maupun doktoral (S3). Untuk calon wakil bupati, dua orang (66,67%) berpendidikan magister (S2) dan satu orang (33,33%) telah menempuh pendidikan doktoral (S3). Dengan demikian, dari total enam calon, terdapat lima orang berpendidikan S2 (83,33%) dan satu orang berpendidikan S3 (16,67%), tanpa ada yang berlatar pendidikan S1. Komposisi ini menggambarkan bahwa mayoritas pasangan calon memiliki kapasitas akademik yang kuat, dengan dominasi pendidikan pascasarjana, yang diharapkan mampu menunjang kompetensi dan kualitas kepemimpinan di Kabupaten Magetan.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 21.13, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



5. Sosialisasi dan Kampanye

Sosialisasi menjadi pilar strategis dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan menerapkan pendekatan ganda dalam menyampaikan informasi ke Pilkadaan, yakni melalui metode tatap muka dan media sosial. Sosialisasi tatap muka menyasar secara langsung 20.000 pemilih dari berbagai lapisan masyarakat melalui pertemuan dengan kelompok pemilih pemula, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga komunitas perempuan.

Sementara itu, metode sosialisasi digital juga dioptimalkan dengan memanfaatkan kanal media sosial resmi KPU Magetan, yang ditargetkan mampu menjangkau 35.000 pemilih. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menyasar segmen pemilih yang aktif di platform digital, terutama generasi muda. Peran media massa turut menjadi komponen penting dalam sosialisasi Pilkada. Sebagai bagian dari pilar demokrasi, media berfungsi sebagai penyambung informasi antara KPU dan masyarakat. Informasi yang akurat, cepat, dan terpercaya mengenai seluruh tahapan Pilkada disebarkan melalui kerja sama antara KPU Magetan dan berbagai media lokal. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan atmosfer Pilkada yang terbuka, informatif, dan damai, serta

mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab.

Sebagai bagian dari strategi sosialisasi yang kreatif dan komunikatif, KPU Kabupaten Magetan memperkenalkan maskot resmi Pilkada Kabupaten Magetan Tahun 2024. Kehadiran maskot ini bertujuan untuk mendekatkan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat melalui simbol yang mudah dikenali dan diterima oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda dan pemilih pemula.



Gambar 21.14. Maskot Pilkada Kabupaten Magetan Tahun 2024

Nama SI BOLIH merupakan akronim dari *“Bolu Memilih”*, yang terinspirasi dari salah satu ikon khas Kabupaten Magetan, yaitu Kue Bolu Rahayu. Kue tradisional ini tidak hanya dikenal sebagai makanan khas, tetapi juga sarat akan nilai budaya dan tradisi. Setiap tahun, masyarakat Magetan menggelar prosesi adat Kirab Nayoko Projo dan Andum Berkah Bolu Rahayu, sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur yang masih terjaga hingga kini.

Dalam prosesi tersebut, Bolu Rahayu yang telah dihias dengan indah diarak dari Pendopo Surya Graha mengelilingi pusat kota Magetan. Arak-arakan ini diikuti oleh pasukan berkuda dari berbagai kecamatan, diiringi alunan gamelan dan kereta hias yang menambah semarak perayaan. Tradisi Andum Berkah Bolu Rahayu diyakini membawa berkah bagi siapa pun yang berhasil mendapatkan kue tersebut, sehingga tidak jarang masyarakat rela berdesak-desakan demi memperoleh bolu berkah tersebut.

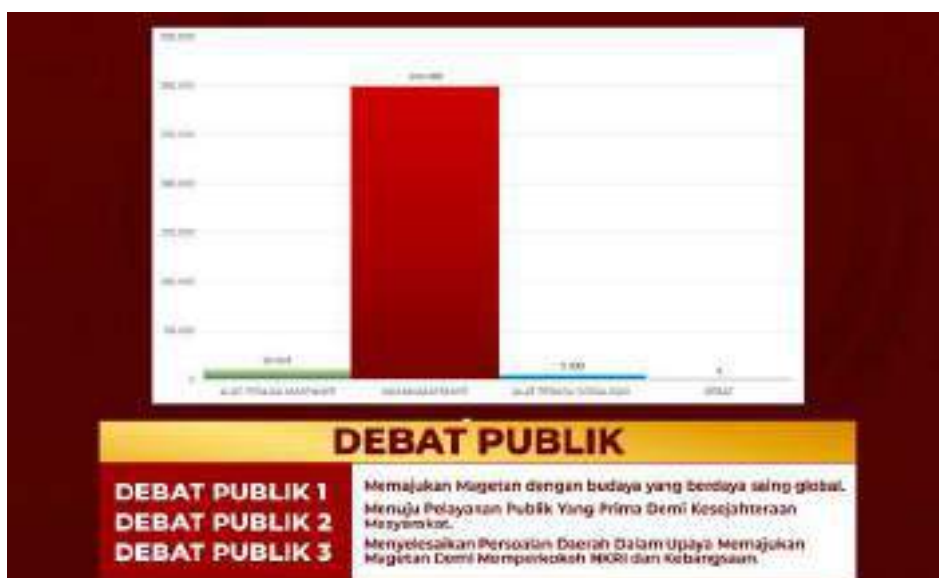
Berdasarkan nilai filosofis dan semangat kebersamaan dari tradisi ini, maskot SI BOLIH hadir sebagai simbol penyelenggaraan Pilkada Magetan 2024 yang berkah, berintegritas, dan inklusif. Diharapkan, kehadiran SI BOLIH dapat menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi, serta menghadirkan pemimpin yang lahir dari proses langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL). Pemimpin yang terpilih nantinya diharapkan mampu mengayomi seluruh masyarakat dan membawa keberkahan bagi Kabupaten Magetan ke depan.

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Magetan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan memberikan fasilitasi kampanye secara adil dan proporsional kepada seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Fasilitasi tersebut mencakup penyediaan ribuan Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye (BK), serta Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang disalurkan kepada masing-masing pasangan calon. Selain penyediaan materi kampanye fisik, KPU juga menetapkan zona larangan pemasangan APK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tak hanya dalam bentuk fisik, kampanye juga difasilitasi melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Setiap pasangan calon mendapatkan alokasi waktu, ukuran, dan durasi penayangan iklan kampanye yang sama dan berimbang. Materi iklan tersebut dapat berupa tulisan, suara, gambar, atau kombinasi dari ketiganya, yang berisi informasi penting mengenai pasangan calon, seperti nama, nomor urut, visi-misi, dan foto resmi.

KPU Kabupaten Magetan juga menyelenggarakan debat publik sebagai salah satu metode kampanye yang krusial. Terdapat tiga kali pelaksanaan debat yang dilaksanakan secara terbuka namun dengan pembatasan jumlah partisipan sebanyak 50 orang per pasangan calon demi menjaga kondusivitas acara. Debat pertama mengusung tema “Budaya yang Bersaing Secara Global”, sementara debat kedua bertemakan “Pilkada Magetan 2024 Menuju Pelayanan Publik yang Prima Demi Kesejahteraan Masyarakat”. Adapun debat pamungkas mengangkat isu strategis dengan tema “Menyelesaikan Persoalan Daerah dalam Upaya Memajukan Magetan Demi Memperkokoh NKRI dan Kebangsaan”.

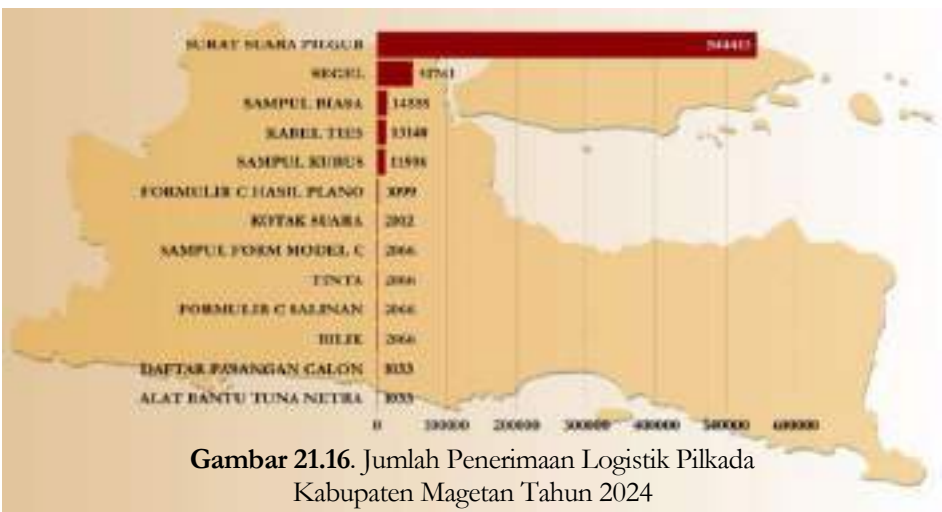
Seluruh tahapan kampanye difasilitasi dengan prinsip kesetaraan, transparansi, dan profesionalitas, guna menciptakan suasana Pilkada yang damai, demokratis, serta menghasilkan pemimpin yang visioner dan amanah.



Gambar 21.15. Fasilitas Kampanye oleh KPU Pilkada Kabupaten Magetan Tahun 2024

6. Logistik

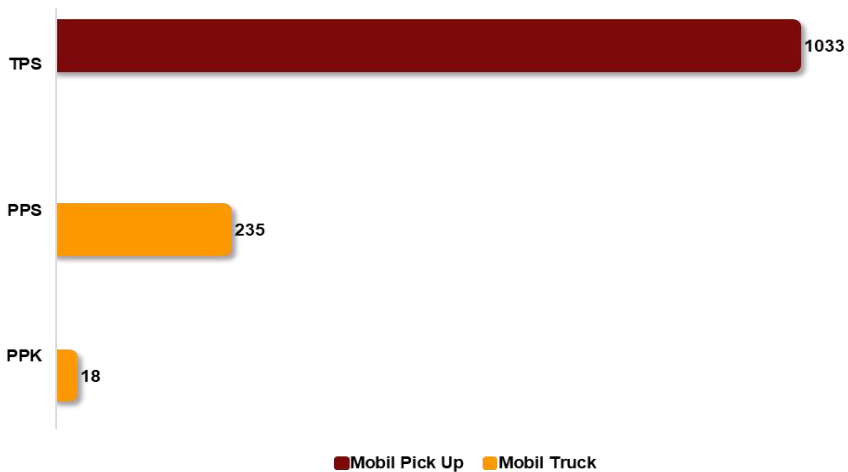
Pengelolaan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. KPU Kabupaten Magetan berkomitmen untuk melaksanakan pengadaan logistik secara transparan, efisien, dan akuntabel, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri (PDN), pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK-Koperasi), serta percepatan penyerapan anggaran melalui metode e-purchasing dan pengadaan langsung. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 21.16.



Gambar 21.16. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kabupaten Magetan Tahun 2024

Setelah logistik diterima dari penyedia, KPU Magetan melakukan verifikasi fisik, termasuk penghitungan jumlah dan penyortiran terhadap potensi kerusakan. Jika ditemukan kekurangan jumlah atau kerusakan barang, KPU segera meminta pemenuhan atau penggantian kepada penyedia, baik melalui pengiriman ulang atau pengambilan langsung (jemput bola). Proses penyortiran surat suara dilakukan selama lima hari, yakni pada tanggal 28 September hingga 2 Oktober 2024, bertempat di Gudang KPU Magetan yang berlokasi di Desa Baron, Kecamatan Magetan. Sebanyak 116 petugas sortir yang berasal dari seluruh kecamatan di Kabupaten Magetan dikerahkan untuk memastikan kelayakan dan kelengkapan logistik surat suara.

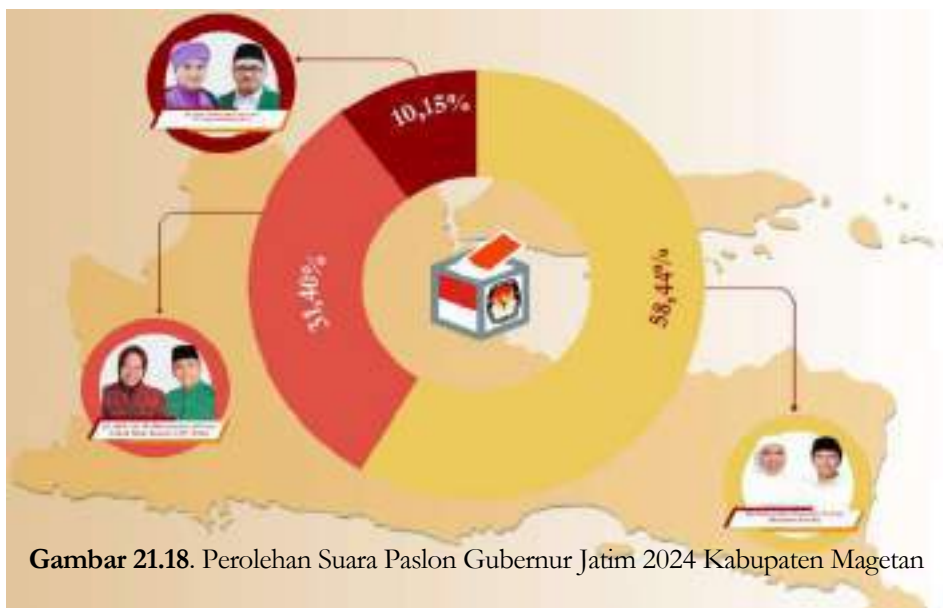
Distribusi logistik dilakukan secara berjenjang mulai dari KPU Kabupaten ke PPK, lalu ke PPS, dan akhirnya ke TPS. Untuk pengiriman dari KPU Kabupaten ke tingkat PPK, digunakan jasa PT. Pos Indonesia, sedangkan distribusi dari PPK ke PPS dan TPS dilaksanakan melalui mekanisme swakelola dengan anggaran yang diserahkan langsung ke badan *ad hoc* terkait. Moda transportasi yang digunakan meliputi truk dan mobil pickup, yang dinilai cukup memadai untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Magetan, mengingat topografi daerah yang masih dapat diakses tanpa memerlukan kendaraan khusus.



Gambar 21.17. Moda Transportasi Logistik Pilkada Kabupaten Magetan Tahun 2024

7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Magetan disajikan pada gambar 21.18.



Gambar 21.18. Perolehan Suara Paslon Gubernur Jatim 2024 Kabupaten Magetan

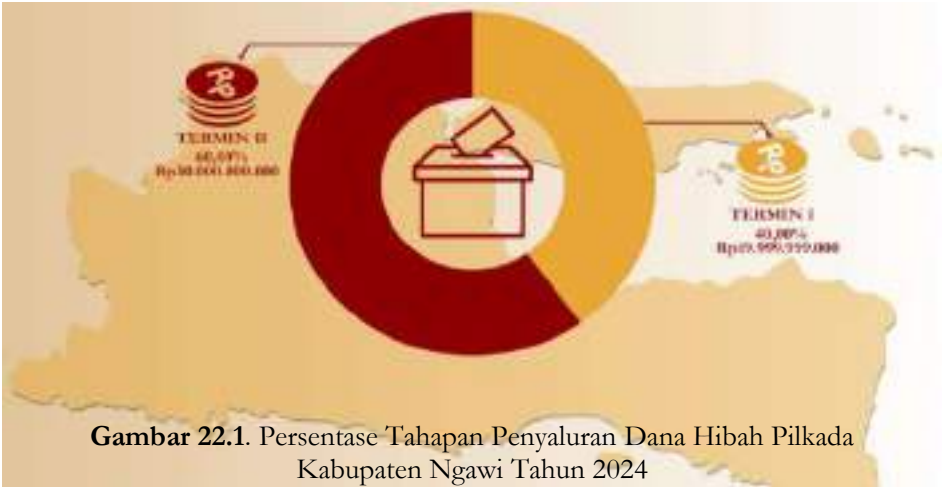
Babussalam, S.H., M.H. memperoleh 130.947 suara atau 32,35% dari total suara sah. Perbedaan suara antar pasangan sangat tipis, mencerminkan tingginya persaingan dan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kepemimpinan Magetan lima tahun ke depan.

KABUPATEN NGAWI

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Perencanaan anggaran merupakan salah satu aspek krusial dalam tahapan non-teknis yang harus diselesaikan oleh penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2024. Dalam pelaksanaannya, KPU Kabupaten Ngawi mengacu pada Keputusan KPU Nomor 543 Tahun 2022 sebagai pedoman utama. Pada Tahap I, tepatnya tanggal 18 Januari 2022, KPU Kabupaten Ngawi mengajukan usulan anggaran sebesar Rp69.437.981.550 kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pada 2 Februari 2022, Gubernur Jawa Timur menerbitkan Keputusan Nomor 188/87/KPTS/013/2022 mengenai Komponen Pendanaan Bersama. Berdasarkan ketentuan dalam keputusan tersebut, dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran, yang kemudian diajukan kembali pada Tahap II tanggal 29 Maret 2022 dengan nilai sebesar Rp63.494.332.967.

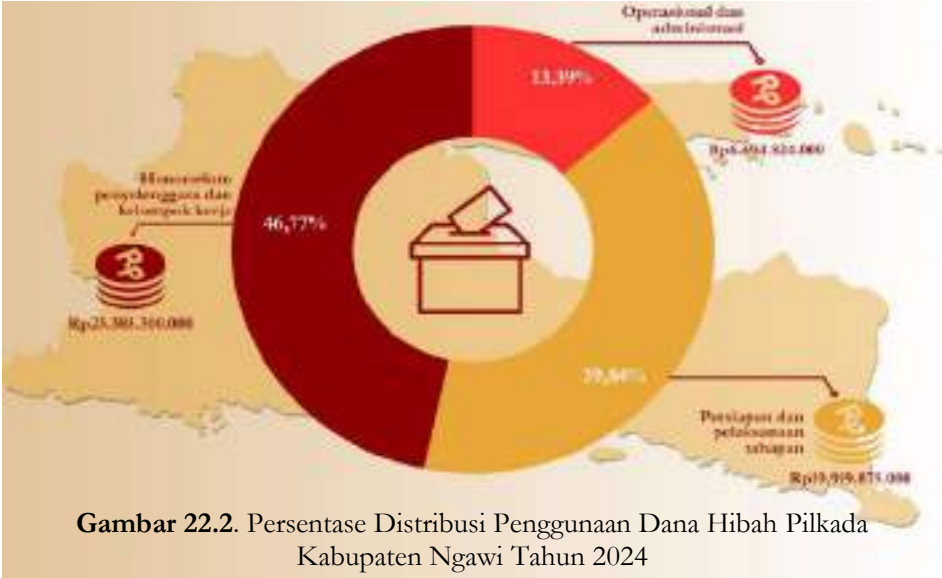
Penyesuaian berikutnya dilakukan setelah terbitnya Surat Dinas Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tertanggal 16 Desember 2022 perihal Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML). Proses penyesuaian ini dilaksanakan melalui serangkaian koordinasi intensif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Ngawi, hingga akhirnya disepakati besaran anggaran hibah Pilkada Ngawi Tahun 2024 sebesar Rp49.999.999.000. Kesepakatan tersebut difinalisasi melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dengan KPU Kabupaten Ngawi pada hari Jumat, 10 November 2023. NPHD tersebut dituangkan dalam dokumen Nomor 200.1.5.9/1730/404.404/2023 dari pihak Pemerintah Daerah dan Nomor 558/KU.07-NK/3521/2023 dari pihak KPU. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 22.1 berikut.



Gambar 22.1. Persentase Tahapan Penyaluran Dana Hibah Pilkada Kabupaten Ngawi Tahun 2024

Realisasi pencairan dana hibah Pilkada Kabupaten Ngawi Tahun 2024 dilakukan dalam dua termin. Pada Termin 1, dana yang dicairkan sebesar Rp19.999.999.000 (40,00%) dari total anggaran hibah. Selanjutnya, Termin 2, pencairan dilakukan sebesar Rp30.000.000.000 (60,00%), sehingga secara keseluruhan jumlah dana hibah yang diterima oleh KPU Kabupaten Ngawi mencapai Rp49.999.999.000 (100%) sesuai dengan nilai yang telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 22.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.

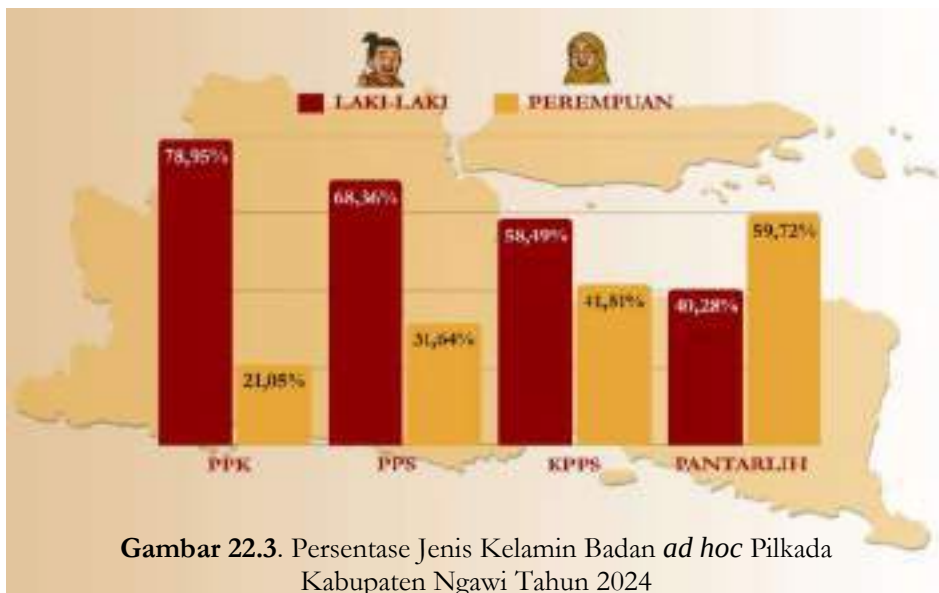


Gambar 22.2. Persentase Distribusi Penggunaan Dana Hibah Pilkada Kabupaten Ngawi Tahun 2024

Komponen anggaran hibah Pilkada Kabupaten Ngawi Tahun 2024 terbagi ke dalam tiga kategori utama. Pertama, alokasi untuk Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan sebesar Rp19.919.875.000 (39,84%), yang mencakup berbagai kegiatan inti dalam proses penyelenggaraan Pilkada. Kedua, anggaran untuk Operasional dan Administrasi Perkantoran dialokasikan sebesar Rp6.694.824.000 (13,39%), guna menunjang kebutuhan logistik dan administrasi kelembagaan. Ketiga, komponen terbesar adalah untuk Honorarium yang mencapai Rp23.385.300.000 (46,77%), sebagai bentuk penghargaan atas kinerja penyelenggara *ad hoc* dan personel yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Pilkada. Komposisi anggaran ini mencerminkan pendekatan yang seimbang antara pembiayaan kegiatan teknis, operasional, dan dukungan sumber daya manusia.

2. Badan *Ad Hoc*

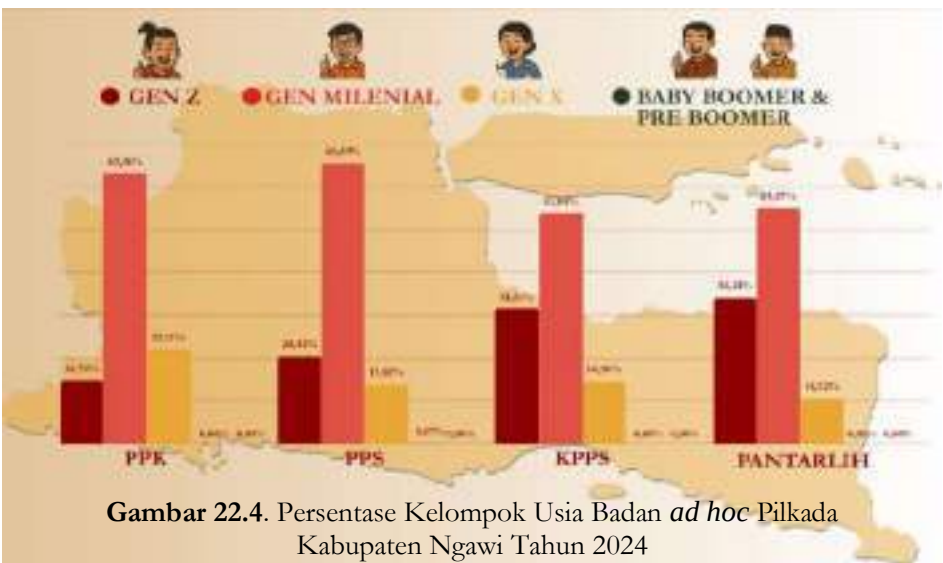
Dalam mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi membentuk Badan *Ad hoc* sebagai ujung tombak penyelenggaraan Pilkada di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kabupaten Ngawi terdiri dari 19 kecamatan dan 217 desa/kelurahan, dengan jumlah TPS yang ditetapkan sebanyak 1.374 lokasi. Berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan, KPU Kabupaten Ngawi merekrut dan menetapkan sebanyak 95 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 651 Panitia Pemungutan Suara (PPS), 2.573 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dan 9.618 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Untuk mendukung pelaksanaan tugas PPK dan PPS, dibentuk pula sekretariat yang terdiri dari 57 orang untuk Sekretariat PPK dan 651 orang untuk Sekretariat PPS, yang merupakan personel dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dan pemerintahan desa di wilayah masing-masing. Selain itu, setiap TPS juga dilengkapi dengan 2 orang petugas ketertiban, sehingga total terdapat 2.748 orang petugas ketertiban TPS yang turut berperan menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara. Rekrutmen Badan *Ad hoc* dilakukan secara terbuka untuk menjaring partisipasi masyarakat secara luas. Khusus untuk seleksi PPK dan PPS, KPU Kabupaten Ngawi menyelenggarakan ujian tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas dalam proses seleksi. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 22.3.



Sebaran demografi Badan *ad hoc* Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Ngawi menunjukkan keterwakilan jenis kelamin yang bervariasi pada setiap tingkatan penyelenggara. Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dari total 95 orang, sebanyak 75 orang (78,95%) berjenis kelamin laki-laki dan 20 orang (21,05%) perempuan. Pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berjumlah 651 orang, laki-laki mendominasi sebanyak 445 orang (68,36%), sementara perempuan berjumlah 206 orang (31,64%).

Sebaliknya, proporsi jenis kelamin pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) cenderung berimbang namun sedikit didominasi oleh perempuan, yakni sebanyak 1.515 orang (59,72%) dari total 2.537 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 1.022 orang (40,28%). Untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dari total 9.618 orang, sebanyak 5.626 orang (58,49%) adalah laki-laki dan 3.992 orang (41,51%) adalah perempuan. Data ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki keterwakilan yang tinggi, terutama pada level Pantarlih, sementara dominasi laki-laki masih terlihat pada jenjang PPK, PPS, dan KPPS.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Ngawi Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 22.4 berikut.

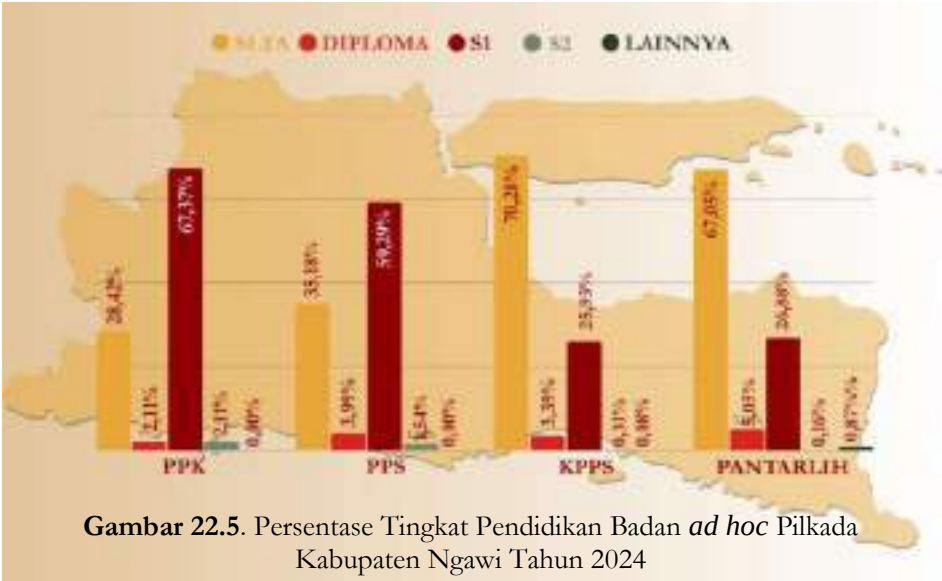


Gambar 22.4. Persentase Kelompok Usia Badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Ngawi Tahun 2024

Sebaran demografi Badan *ad hoc* Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Ngawi berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi generasi muda dan produktif. Pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), mayoritas berasal dari Generasi Milenial (usia 28–43 tahun) sebanyak 60 orang (63,16%), diikuti oleh Generasi X (usia 44–59 tahun) sebanyak 21 orang (22,11%), dan Generasi Z (usia 17–27 tahun) sebanyak 14 orang (14,74%).

Pola serupa juga terlihat pada Panitia Pemungutan Suara (PPS), di mana 427 orang (65,59%) merupakan Generasi Milenial, 133 orang (20,43%) Generasi Z, dan 90 orang (13,82%) Generasi X, serta hanya 1 orang (0,15%) dari kelompok Baby Boomer (usia 60–78 tahun). Untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), proporsi terbesar juga berasal dari Generasi Milenial sebanyak 5.178 orang (53,84%), disusul Generasi Z sebanyak 3.040 orang (31,61%), dan Generasi X sebanyak 1.400 orang (14,56%). Sementara itu, pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), mayoritas berasal dari Generasi Milenial sebanyak 1.397 orang (55,07%), Generasi Z sebanyak 868 orang (34,21%), dan Generasi X sebanyak 272 orang (10,72%). Data ini menunjukkan bahwa pelibatan generasi muda, khususnya Milenial dan Gen Z, sangat dominan dalam struktur Badan *ad hoc* Pilkada 2024 di Kabupaten Ngawi, mencerminkan semangat partisipasi Pilkada dari generasi produktif dan melek teknologi.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Ngawi Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 22.5.



Tingkat pendidikan anggota Badan *ad hoc* Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Ngawi menunjukkan keragaman latar belakang pendidikan, dengan dominasi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Strata-1 (S1). Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagian besar merupakan lulusan S1 sebanyak 64 orang (67,37%), disusul lulusan SLTA sebanyak 27 orang (28,42%), serta masing-masing dua orang (2,11%) lulusan Diploma dan S2.

Pada Panitia Pemungutan Suara (PPS), komposisi serupa terlihat dengan mayoritas lulusan S1 sebanyak 386 orang (59,29%), diikuti SLTA sebanyak 229 orang (35,18%), Diploma sebanyak 26 orang (3,99%), dan S2 sebanyak 10 orang (1,54%). Sementara itu, untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mayoritas besar merupakan lulusan SLTA sebanyak 6.760 orang (70,28%), sedangkan lulusan S1 sebanyak 2.494 orang (25,93%), Diploma 326 orang (3,39%), S2 sebanyak 30 orang (0,31%), dan lainnya sebanyak 8 orang (0,08%). Pola serupa juga terlihat pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), di mana 1.701 orang (67,05%) adalah lulusan SLTA, 682 orang (26,88%) lulusan S1, 128 orang (5,05%) lulusan Diploma, 4 orang (0,16%) lulusan S2, dan 22 orang (0,87%) dengan kategori lainnya.

Dalam pelaksanaan rekrutmen Badan *ad hoc* Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Ngawi, belum terdapat anggota yang berasal dari kelompok penyandang disabilitas pada tingkat PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih. Sebagai perbaikan dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Ngawi ke depan, keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen Badan *ad*

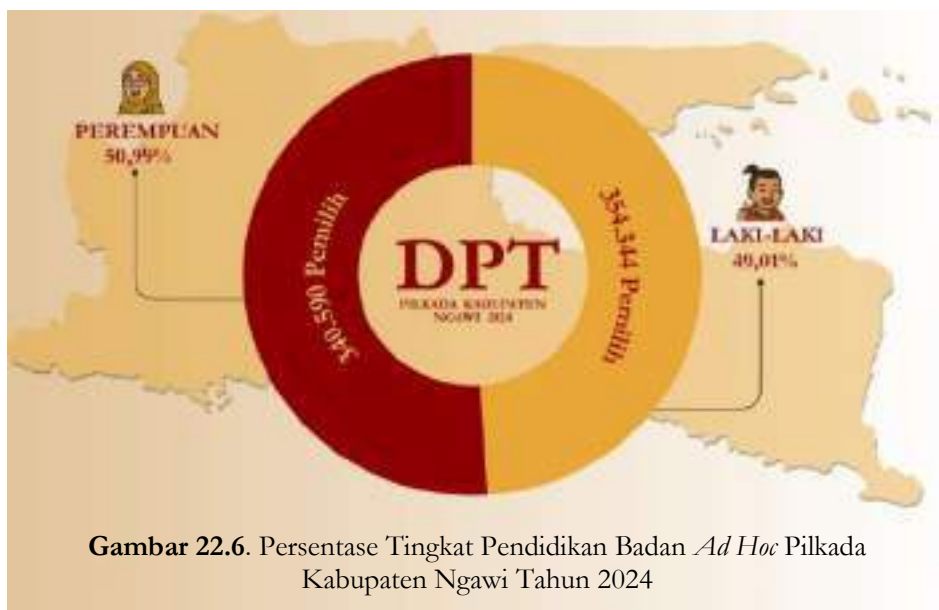
hoc perlu mendapatkan perhatian lebih, guna mendorong inklusivitas dan representasi yang lebih setara dalam penyelenggaraan Pilkada.

3. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan penting dalam Pilkada Serentak 2024. KPU Kabupaten Ngawi bertanggung jawab memastikan keakuratan dan validitas data pemilih. Proses ini diawali dengan penyerahan DP4 dari Kemendagri kepada KPU RI pada 2 Mei 2024, kemudian disusul DP4 Hasil Sinkronisasi (DP4 HS) dari KPU Provinsi Jawa Timur kepada KPU Ngawi pada 19 Mei 2024. Berdasarkan data tersebut, dilakukan pemetaan TPS dan penyusunan bahan Coklit yang menghasilkan 1.370 TPS, 2.537 Pantarlih, 329.458 KK, dan total 702.126 pemilih, sebag-aimana tercantum dalam Berita Acara tertanggal 30 Mei 2024.

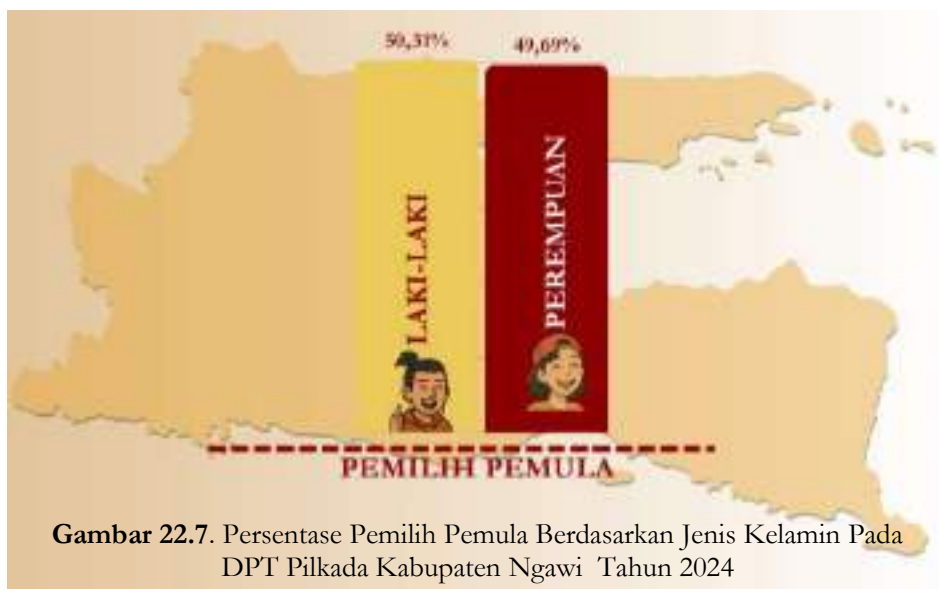
Coklit dilaksanakan oleh Pantarlih pada 24 Juni–24 Juli 2024 menggunakan aplikasi *e-Coklit*. PPS kemudian menyusun DPHP pada 25–31 Juli, yang dilanjutkan dengan pleno tingkat desa pada 1–3 Agustus dan kecamatan pada 5–7 Agustus. Selama proses ini, KPU Ngawi juga mengusulkan lima TPS Lokasi Khusus (Loksus) di lembaga seperti Lapas IIB dan Pondok Gontor, dan disetujui empat TPS oleh KPU Provinsi Jawa Timur.

Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilakukan pada 11 Agustus 2024 dengan jumlah 695.940 pemilih di 1.374 TPS. DPS diumumkan oleh PPS pada 18–27 Agustus untuk menerima tanggapan masyarakat, yang juga dapat mengakses data melalui laman *cekdpdtonline*. Proses perbaikan dilakukan pada awal September, dan DPT ditetapkan pada 20 September 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Ngawi Nomor 1069 Tahun 2024, dengan jumlah 694.934 pemilih. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 22.6.



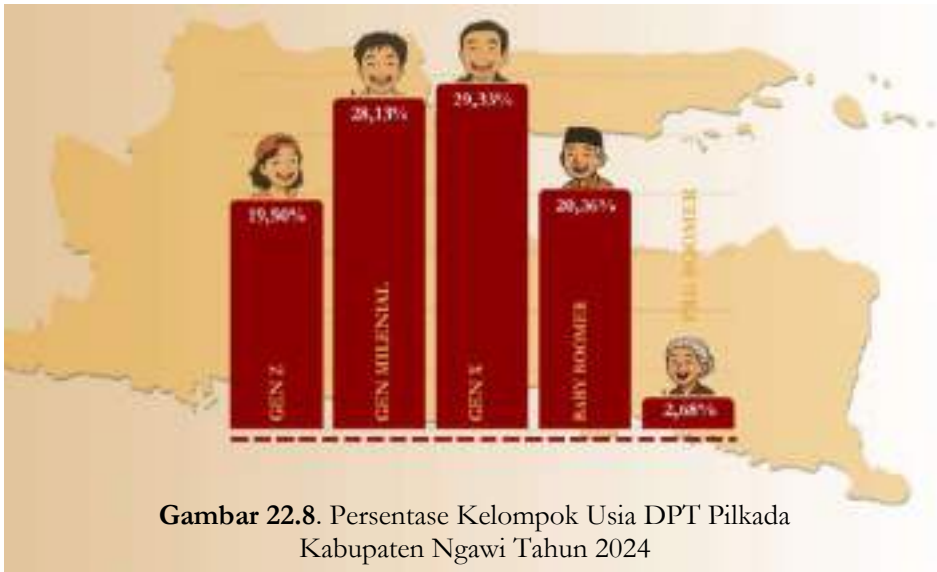
Sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Ngawi berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah pemilih perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki. Dari total 694.934 pemilih, sebanyak 340.590 orang (49,01%) merupakan pemilih laki-laki, sementara 354.344 orang (50,99%) adalah pemilih perempuan. Data ini mencerminkan keterwakilan gender yang seimbang serta potensi partisipasi yang signifikan dari kelompok perempuan dalam pelaksanaan Pilkada.

Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni pemilih pemula dan pemilih non-pemula. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 22.7 berikut.



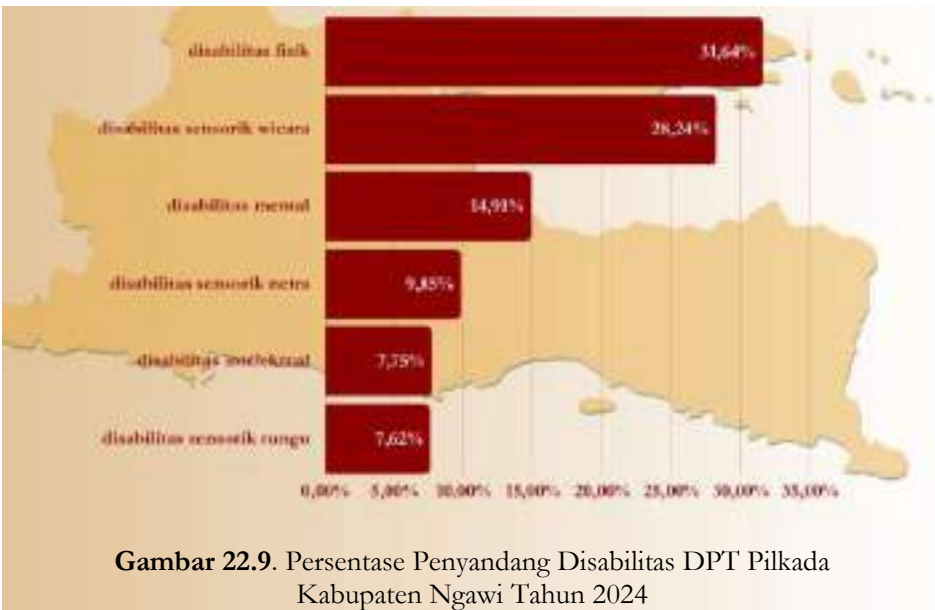
Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ngawi Tahun 2024, terdapat status pemilih pemula, dimana pemilih pemula laki-laki sebanyak 5.010 (50,31%) dan pemilih pemula perempuan sebanyak 4.948 perempuan (49,69%). menunjukkan komposisi yang relatif seimbang antara kedua jenis kelamin. Secara keseluruhan, dari total 694.934 pemilih, dominasi jumlah pemilih perempuan masih sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Data ini menegaskan pentingnya peran generasi muda dan perempuan dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Ngawi.

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 22.8.



Sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Ngawi berdasarkan kelompok usia menunjukkan distribusi yang merata di berbagai generasi. Kelompok usia terbanyak berasal dari Generasi X (usia 44–59 tahun) sebanyak 203.829 pemilih (29,33%), disusul oleh Generasi Milenial (usia 28–43 tahun) sebanyak 195.474 pemilih (28,13%), dan Baby Boomer (usia 60–78 tahun) sebanyak 141.454 pemilih (20,36%). Sementara itu, Generasi Z (usia 17–27 tahun) tercatat sebanyak 135.520 pemilih (19,50%), serta Pre-Boomer (usia >79 tahun) berjumlah 18.657 pemilih (2,68%). Komposisi ini menunjukkan dominasi kelompok usia produktif dalam DPT, sekaligus mencerminkan potensi partisipasi yang tinggi dari kalangan muda hingga dewasa dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Ngawi.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten Ngawi Tahun 2024 disajikan pada gambar 22.9, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Ngawi, tercatat sebanyak 3.938 pemilih penyandang disabilitas. Kelompok disabilitas terbesar adalah penyandang disabilitas fisik sebanyak 1.246 orang (31,64%), diikuti oleh disabilitas sensorik wicara sebanyak 1.112 orang (28,24%), serta disabilitas mental sebanyak 587 orang (14,91%). Selain itu, terdapat 388 penyandang disabilitas sensorik netra (9,85%), 305 penyandang disabilitas intelektual (7,75%), dan 300 penyandang disabilitas sensorik rungu (7,62%). Data ini menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Ngawi dalam memastikan hak pilih bagi seluruh warga, termasuk kelompok disabilitas, agar dapat berpartisipasi secara setara dalam Pilkada 2024.

4. Pencalonan

Tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 dimulai dengan proses pendaftaran bakal pasangan calon yang dibuka oleh KPU Kabupaten Ngawi pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Selama periode tersebut, hanya terdapat satu bakal pasangan calon yang mendaftar. Meskipun telah diberikan masa perpanjangan pendaftaran, tidak ada bakal pasangan calon tambahan yang mengajukan pendaftaran.

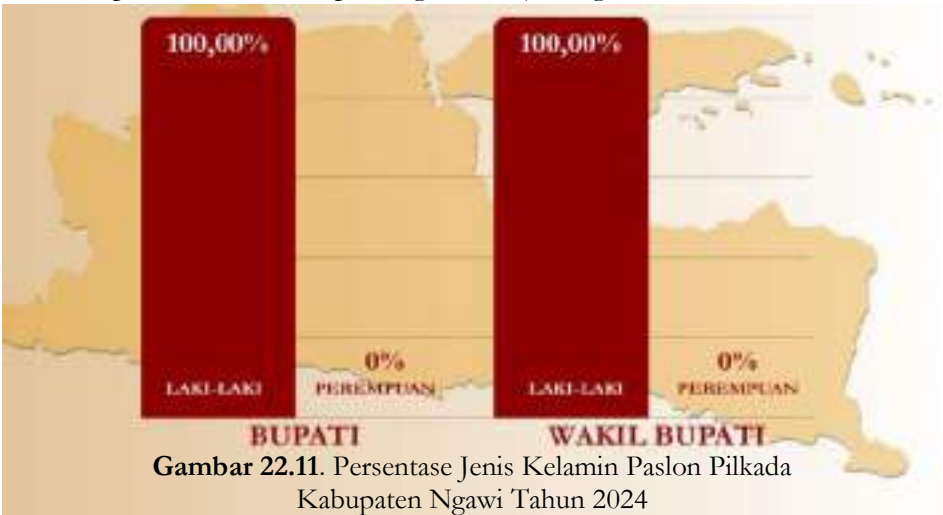
Berdasarkan hasil verifikasi dan pemenuhan syarat pencalonan, KPU Kabupaten Ngawi menetapkan satu pasangan calon sebagai peserta resmi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 melalui Keputusan Nomor 1077 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024. Pasangan calon tersebut adalah

H. Ony Anwar Harsono, S.T., M.H. sebagai Calon Bupati dan Dr. Dwi Rianto Jatmiko, M.H., M.Si. sebagai Calon Wakil Bupati. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada gambar 22.10 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.

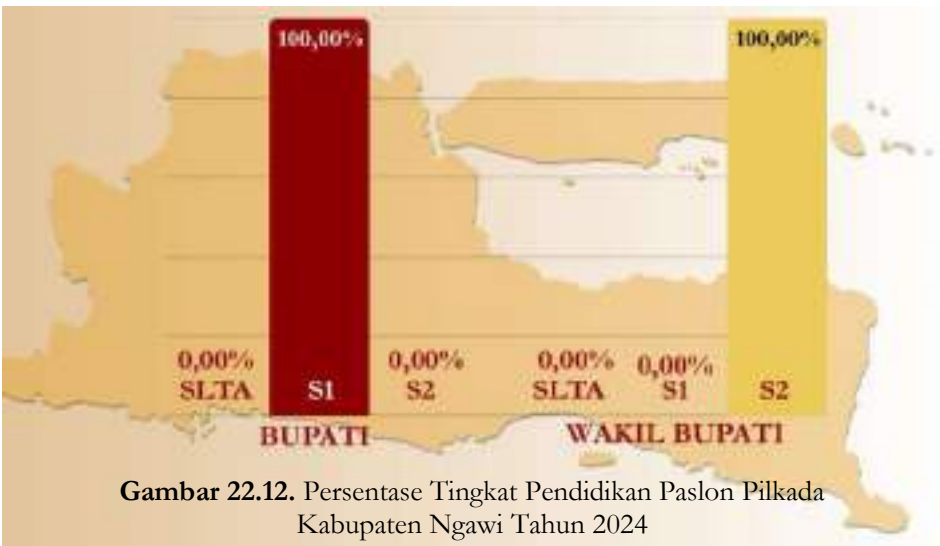


Gambar 22.10. Daftar Nama Paslon Pilkada Kabupaten Ngawi Tahun 2024

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi disajikan pada gambar 22.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi disajikan gambar 22.12.



Gambar 22.11. Persentase Jenis Kelamin Paslon Pilkada Kabupaten Ngawi Tahun 2024



Gambar 22.12. Persentase Tingkat Pendidikan Paslon Pilkada Kabupaten Ngawi Tahun 2024

Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi, pasangan calon yang ditetapkan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki, baik untuk posisi Calon Bupati maupun Calon Wakil Bupati. Dengan demikian, dari total dua orang kandidat, 100% merupakan laki-laki dan tidak ada keterwakilan perempuan dalam kontestasi pencalonan kepala daerah tahun ini.

Dari segi tingkat pendidikan, pasangan calon menunjukkan latar belakang akademik yang tinggi. Calon Bupati merupakan lulusan jenjang Magister (S2), sementara Calon Wakil Bupati telah menempuh pendidikan hingga Doktoral (S3). Komposisi ini mencerminkan bahwa pasangan calon yang maju pada Pilkada Ngawi 2024 memiliki kapasitas pendidikan yang mumpuni, yang diharapkan mampu mendukung pengambilan kebijakan secara strategis dan berbasis keilmuan.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 22.13, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



5. Sosialisasi dan Kampanye

Dalam rangka menyemarakkan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Ngawi memperkenalkan maskot resmi Pilkada sebagai simbol penyelenggaraan Pilkada yang ramah, partisipatif, dan dekat dengan masyarakat. Maskot ini dirancang dengan mengangkat nilai-nilai lokal dan kearifan budaya Kabupaten Ngawi, mencerminkan semangat demokrasi yang berakar pada gotong royong, kebersamaan, dan kesantunan. Kehadiran maskot Pilkada bertujuan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat, khususnya kalangan muda dan pemilih pemula, agar lebih terlibat aktif dalam seluruh tahapan Pilkada.



Gambar 22.14. Maskot Pilkada Kabupaten Ngawi Tahun 2024

Maskot Pilkada Kabupaten Ngawi Tahun 2024 diberi nama "Sang Pendem", sebuah akronim dari "Penegak Demokrasi", yang merepresentasikan semangat masyarakat Ngawi dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi secara damai dan berintegritas. Karakter utama maskot ini mengambil inspirasi dari Benteng Pendem (Van Den Bosch), salah satu bangunan bersejarah dan ikon kebanggaan Kabupaten Ngawi. Bentuk maskot yang menyerupai benteng melambangkan kekuatan dan keteguhan dalam menjaga proses demokrasi. Pada bagian tubuhnya terdapat lima jendela yang terbuka, sebagai simbol lima sila Pancasila, sekaligus mencerminkan keterbukaan dan transparansi dalam setiap tahapan Pilkada.

Wajah maskot dengan senyum lebar dan ekspresi bersahabat menggambarkan karakter masyarakat Ngawi yang dikenal "RAMAH", serta mencerminkan semangat dan optimisme dalam menggunakan hak pilih. Maskot ini mengenakan kostum tradisional daerah dengan motif batik Wijaya Kusuma bermotif tumbuhan, sebagai bentuk kecintaan dan penghargaan terhadap warisan budaya lokal. Dalam genggamannya, Sang Pendem memegang paku dan kertas suara, yang menjadi pengingat simbolik bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Melalui desain yang kaya makna ini, maskot Sang Pendem diharapkan mampu menjadi ikon yang menginspirasi, mengedukasi, sekaligus menyemarakkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Ngawi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi juga telah melaksanakan berbagai strategi sosialisasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 guna memastikan informasi tersampaikan secara luas, merata, dan efektif kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satu kegiatan sosialisasi berskala besar adalah Peluncuran Maskot dan Jingle Pilkada yang dikemas dalam acara konser musik menampilkan artis Denny Caknan di Alun-Alun Ngawi, dengan estimasi penonton langsung mencapai 5.000 orang. Acara ini juga disiarkan secara daring melalui berbagai kanal YouTube, yakni Channel KPU Ngawi (56.000 penonton), Channel Pemkab Ngawi (92.000 penonton), dan Channel EO Cita Entertainment (243.000 penonton), sehingga total jangkauan audiens daring mencapai lebih dari 390.000 penonton.

Selain itu, KPU Kabupaten Ngawi juga menggelar Kirab Maskot Pilkada yang dilaksanakan di seluruh kecamatan, dengan melibatkan seban-yak 1.800 peserta dan menyasar keterlibatan langsung seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi. Acara kirab ini turut disiarkan secara *livestreaming* melalui *Channel* YouTube KPU Ngawi dan ditonton oleh 1.695 penonton. Metode sosialisasi tatap muka turut dilaksanakan dengan menyasar berbagai elemen strategis masyarakat seperti tokoh agama, organisasi kepemudaan, tokoh perempuan, dan perwakilan partai politik, dengan total peserta yang hadir mencapai 3.300 orang. Selain itu, KPU juga memaksimalkan penyebaran informasi melalui alat peraga kampanye berupa spanduk, poster, dan brosur yang disebarluaskan di titik-titik strategis untuk memastikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat umum.

Di tingkat desa, PPS melaksanakan sosialisasi menggunakan *bende* atau *speaker* keliling pada H-1 menjelang hari pemungutan suara, dengan menyusuri wilayah desa/kelurahan masing-masing untuk menging-atkan masyarakat. Sementara itu, KPPS diwajibkan melakukan “woro-woro” atau pengumuman lisan di masjid atau mushola setempat pada sore hari H-1, sebagai upaya terakhir menjangkau pemilih secara langsung menjelang hari pemungutan suara. Beragam metode ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Ngawi dalam membangun partisipasi pemilih yang inklusif, informatif, dan partisipatif.



Gambar 22.15. Sosialisasi Pilkada Kabupaten Ngawi Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kampanye yang adil dan berimbang, KPU Kabupaten Ngawi memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) serta pencetakan bahan kampanye bagi pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024. Fasilitasi ini bertujuan untuk memberikan ruang yang setara bagi pasangan calon dalam menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Pemasangan APK dilakukan di lokasi-lokasi strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, guna menjaga ketertiban umum serta keindahan dan estetika lingkungan.

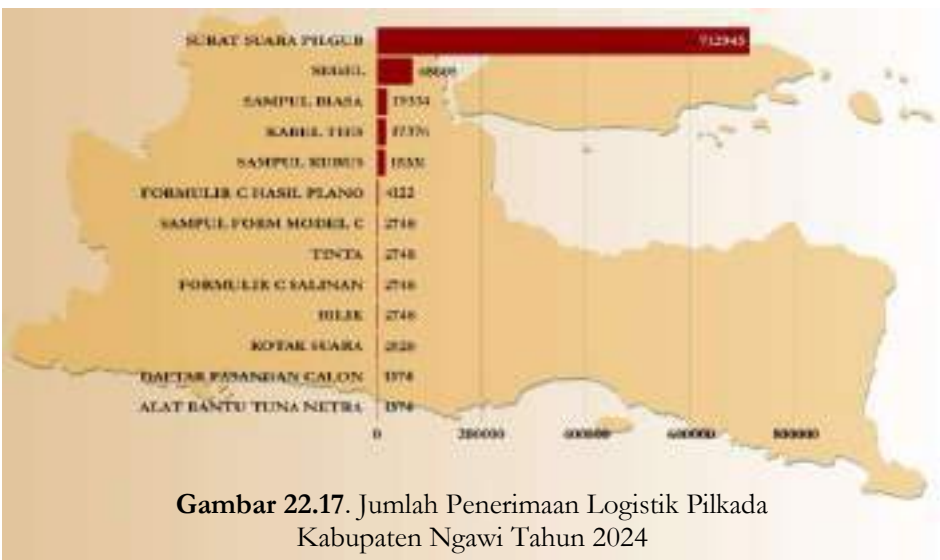
Selain distribusi APK dan bahan kampanye, KPU Kabupaten Ngawi juga menyelenggarakan debat publik, yang menjadi forum penting bagi pasangan calon untuk memaparkan gagasan, menjawab pertanyaan dari panelis, serta berdiskusi secara terbuka mengenai isu-isu strategis pembangunan daerah. Debat ini tidak hanya meningkatkan transparansi dalam Pilkada, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menilai langsung kualitas dan visi kepemimpinan dari pasangan calon. Seluruh fasilitasi ini merupakan bentuk komitmen KPU dalam menciptakan Pilkada yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat, serta memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan objektif sebagai dasar dalam menentukan pilihan politiknya secara cerdas dan bertanggung jawab.

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE			
✓ BILLBOARD 5 buah	✓ SPANDUK 434 buah	✓ LIMBUL-UMBUL 380 buah	
FASILITASI BAHAN KAMPANYE			
✓ POSTER 380 buah	✓ BROSUR 173.733 lembar	✓ PAMFLET 380 buah	✓ SELEBARAN 173.734 lembar
FASILITASI DEBAT PUBLIK			
✓ JUMLAH KEGIATAN 1 kegiatan	✓ JUMLAH PASLON 1 Paslonpartai Cakot	✓ PANELIS Adhikman, Lc., M. A., Ph.D. Dr. Suci Wicada, Des., M.Si Dr. Sukarna, M. Pd. s. En Purwaka Widjanta, ST Minatul Huda	
✓ PELAKSANAAN 17 November 2024 Pukul 13.00 WIB Di Nalla Azura Hotel	✓ TEMA DEBAT Perkembangan Nila dan Nila Pemerintah Cakot Berman dan Pemerintah Cakot Berman		
FASILITASI IKLAN KAMPANYE			
Jumlah penyediaan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik yang diizinkan KPU Kabupaten Ngawi untuk Paslonpartai Cakot Berman dan Nila dan Nila 1 (satu) hari sebelum hari pengumuman hasil pemilihan umum tingkat kabupaten/kota 14 (empat belas) hari sejak tanggal 10 – 22 November 2024			
PLATFORM KAMPANYE MEDIA SOSIAL			
✓ JUMLAH PLATFORM 3 Platform	✓ JUMLAH AKUN 8 Akun	✓ JENIS PLATFORM   	

Gambar 22.16. Fasilitas Kampanye oleh KPU Kabupaten Ngawi Tahun 2024

6. Logistik

Pengadaan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 dilakukan dengan mengacu pada prinsip efisiensi, akuntabilitas, serta pemenuhan standar kualitas yang ditetapkan oleh KPU RI. Untuk menjamin hal tersebut, proses pengadaan dilaksanakan melalui mekanisme e-Katalog Konsolidasi Nasional dan *e-Purchasing*, yang memungkinkan proses belanja logistik dilakukan secara lebih terintegrasi, transparan, dan tepat waktu. Melalui sistem ini, KPU Kabupaten Ngawi dapat memperoleh berbagai jenis logistik Pilkada dengan harga yang kompetitif, waktu pengadaan yang lebih cepat, dan jaminan mutu barang yang sesuai dengan spesifikasi teknis. Pengadaan logistik mencakup berbagai kebutuhan utama seperti surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta, segel, formulir, serta perlengkapan TPS lainnya, yang seluruhnya disesuaikan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 22.17.



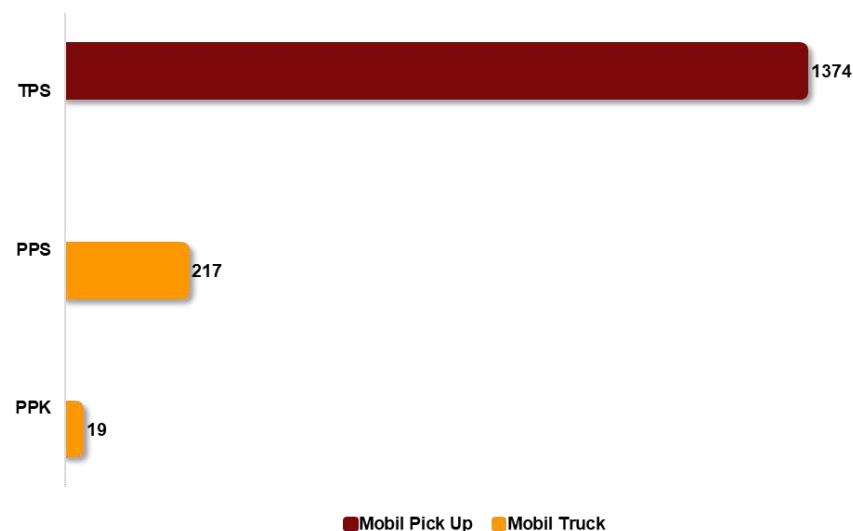
Gambar 22.17. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kabupaten Ngawi Tahun 2024

Dalam rangka mendukung kelancaran distribusi dan kesiapan logistik pada Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Ngawi merekrut petugas untuk kegiatan sortir, lipat, serta *setting* dan *packing* logistik pemilihan. Terdapat dua jenis kegiatan utama yang dilaksanakan, yaitu Sortir dan Lipat Surat Suara serta *Setting* dan *Packing* Logistik Pemilihan. Pada kegiatan sortir dan lipat surat suara, dilibatkan sebanyak 165 orang, terdiri dari 79 laki-laki dan 86 perempuan. Sedangkan untuk kegiatan *setting* dan *packing* logistik, dilibatkan 30 orang, terdiri dari 22 laki-laki dan 8 perempuan.

Distribusi logistik dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi menghadapi tantangan tersendiri, khususnya di wilayah-wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Salah satu contohnya terdapat di Kecamatan Karanganyar, yang terdiri dari 7 desa, 49 TPS, dan total 22.936 DPT. Beberapa desa seperti Pandean dan Gembol tercatat sebagai desa yang berjarak cukup jauh dari pusat kecamatan, dengan jarak tempuh mencapai ± 10 kilometer menuju kantor desa. Selain itu, desa-desa tersebut termasuk wilayah yang paling sulit dijangkau, terutama saat musim penghujan, karena akses jalan menuju sejumlah TPS menjadi licin dan rawan terganggu.

Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Karanganyar, yang memiliki beberapa TPS dengan medan yang licin saat hujan. Situasi ini menuntut perencanaan distribusi logistik yang lebih matang, baik dari sisi pengaturan waktu pengiriman, pemilihan moda transportasi yang sepadan, hingga penyiapan sumber daya cadangan untuk mengantisipasi keterlambatan atau hambatan teknis. Upaya antisipatif ini penting untuk memastikan seluruh

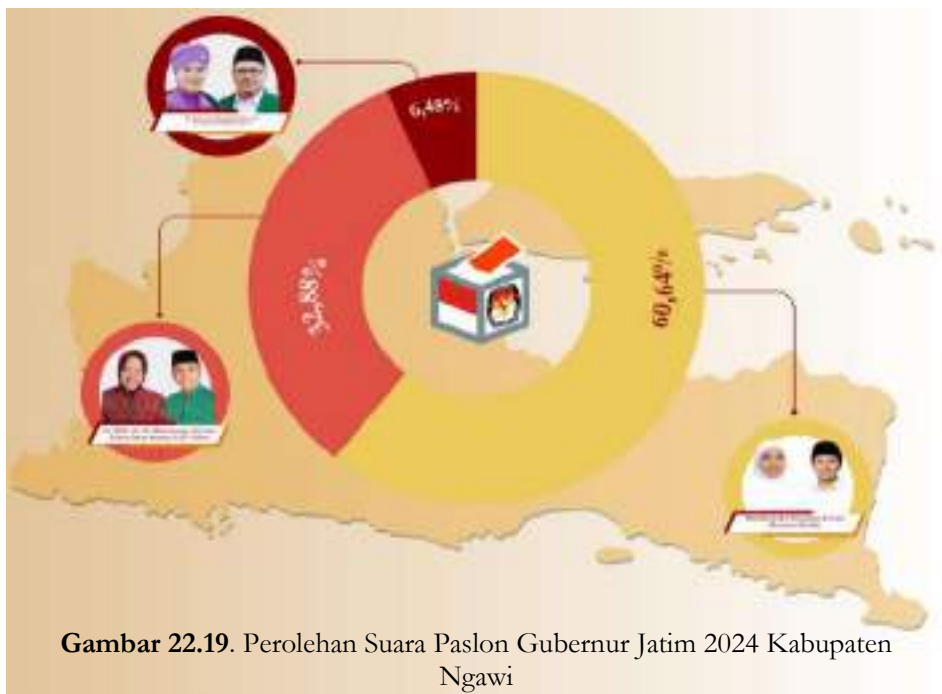
perlengkapan pemungutan suara tiba tepat waktu dan dalam kondisi baik di setiap TPS, sehingga hak pilih masyarakat tetap terjamin meskipun berada di wilayah dengan akses terbatas.



Gambar 22.18. Moda Transportasi Logistik Pilkada Kabupaten Ngawi Tahun 2024

7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Ngawi disajikan pada gambar 22.19.



Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi menunjukkan dominasi perolehan suara oleh pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak, yang memperoleh 267.142 suara atau 60,64% dari total suara sah. Pasangan ini unggul jauh dibandingkan dua pasangan lainnya. Di urutan kedua, pasangan Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) meraih sebanyak 144.823 suara atau 32,88%, sedangkan pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah – H. Lukmanul Khakim memperoleh 28.555 suara atau 6,48%. Total suara sah yang tercatat dalam pemilihan ini mencapai 440.520 suara, mencerminkan partisipasi pemilih yang signifikan di wilayah Kabupaten Ngawi. Hasil ini menegaskan tingkat kepercayaan masyarakat Ngawi terhadap kepemimpinan pasangan petahana Khofifah–Emil dalam melanjutkan pembangunan di tingkat provinsi.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 22.20.



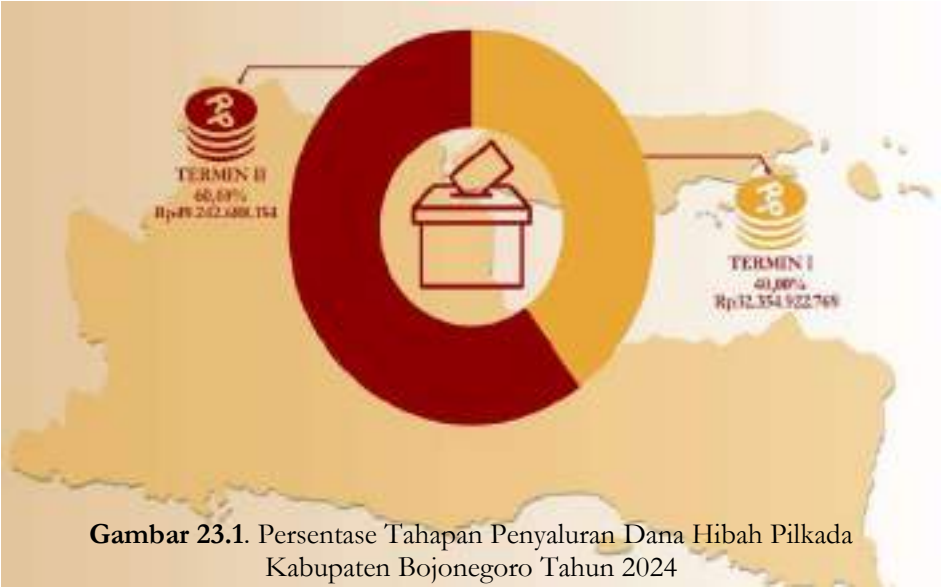
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 menunjukkan bahwa pasangan calon tunggal Ony Anwar Harsono, S.T., M.H. – Dr. Dwi Rianto Jatmiko, M.H., M.Si. memperoleh dukungan yang sangat dominan dari masyarakat. Dari total 435.255 suara sah, pasangan ini meraih 409.499 suara atau 94,08%, sedangkan kotak kosong mendapatkan 25.756 suara atau 5,92%. Meskipun hanya terdapat satu pasangan calon, keberadaan suara kotak kosong mencerminkan partisipasi kritis sebagian pemilih. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan tingkat legitimasi dan kepercayaan publik yang tinggi terhadap kepemimpinan pasangan Ony–Antok dalam melanjutkan pembangunan Kabupaten Ngawi ke depan.

BAGIAN 23

KABUPATEN BOJONEGORO

1. Perencanaan Program dan Anggaran

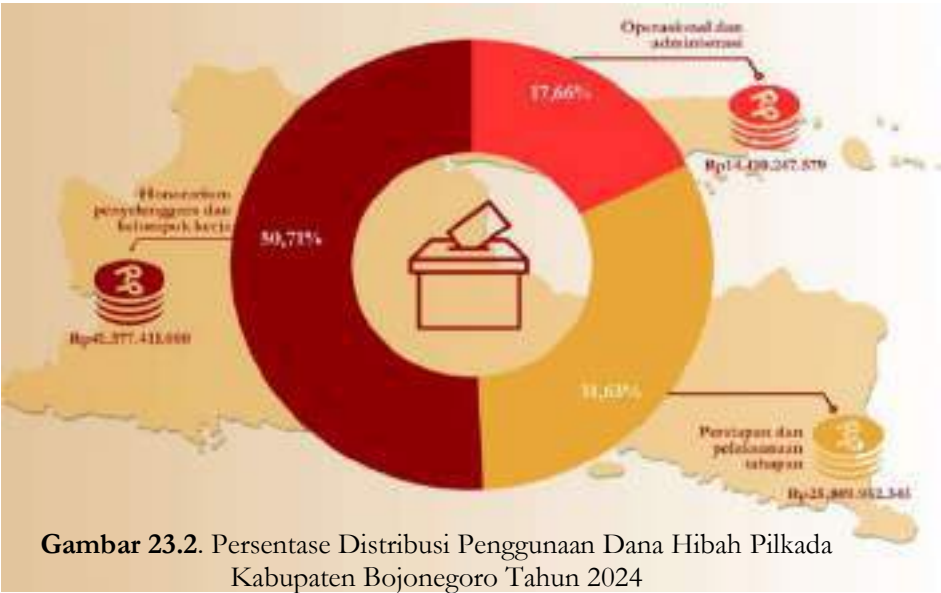
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) melalui rapat koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada bulan Oktober 2022. Berdasarkan hasil perencanaan tersebut, KPU Kabupaten Bojonegoro secara resmi mengajukan proposal anggaran hibah Pilkada kepada Bupati Bojonegoro pada 14 Februari 2023. Setelah melalui serangkaian pembahasan dan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten, proses tersebut mencapai titik final dengan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 7 November 2023, dengan nomor NPHD: 270/877/412.305/2023 dan juga 1024/PP.01.2/PKS/3522/2023. Berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam NPHD tersebut, besaran anggaran hibah untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp81.597.610.923. Proses perencanaan ini menjadi fondasi awal yang penting dalam menjamin kesiapan teknis, logistik, dan operasional penyelenggaraan Pilkada di daerah. Rincian dis-tribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 23.1 berikut.



Gambar 23.1. Persentase Tahapan Penyaluran Dana Hibah Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

KPU Kabupaten Bojonegoro menerima dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam dua tahap (termin) pencairan. Termin pertama sebesar 40% dari total anggaran, yaitu sejumlah Rp32.354.922.769, diterima pada tanggal 17 November 2023. Selanjutnya, termin kedua sebesar 60%, yakni Rp49.242.688.154, diterima pada tanggal 22 Februari 2024. Dengan demikian, total dana hibah yang diterima oleh KPU Kabupaten Bojonegoro mencapai Rp81.597.610.923, sebagaimana telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Skema pencairan dua termin ini dirancang untuk mendukung kesinambungan pembiayaan seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada secara tepat waktu dan akuntabel.

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 23.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.



Komponen anggaran hibah Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 terbagi ke dalam tiga kategori utama yang mencerminkan prioritas pembiayaan dalam penyelenggaraan Pilkada. Alokasi terbesar dialokasikan untuk komponen honorarium, yakni sebesar Rp41.377.411.000 atau 50,71% dari total anggaran hibah, yang digunakan untuk membiayai honor bagi penyelenggara *ad hoc* dan personel pendukung lainnya. Selanjutnya, untuk tahapan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Pilkada, dianggarkan sebesar Rp25.809.952.345 atau 31,63% dari total anggaran. Sementara itu, komponen

operasional dan administrasi perkantoran dialokasikan sebesar Rp14.410.247.579 atau 17,66%. Secara keseluruhan, jumlah anggaran hibah yang diterima KPU Kabupaten Bojonegoro dirancang untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada secara profesional, efektif, dan akuntabel.

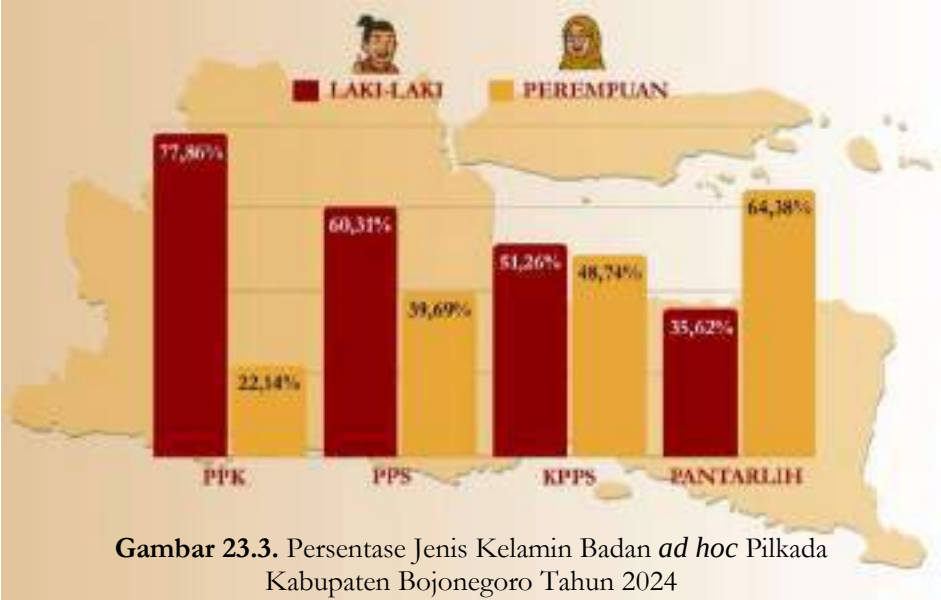
2. **Badan *Ad Hoc***

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, KPU Kabupaten Bojonegoro membentuk Badan *ad hoc* yang terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Proses pembentukan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari PPK pada 23 April–16 Mei 2024, PPS pada 2–26 Mei 2024, Pantarlih pada 13–23 Juni 2024, dan KPPS pada 17 September–7 November 2024.

Tahapan pembentukan badan *ad hoc* diawali dengan pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran yang disampaikan melalui media massa, laman resmi KPU Kabupaten Bojonegoro, serta media sosial resmi KPU. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *ad hoc* (SIKBA). Pendaftaran PPK dibuka pada 23–29 April 2024, PPS pada 2–8 Mei 2024, Pantarlih pada 13–19 Juni 2024, dan KPPS pada 17–28 September 2024. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap proses demokrasi lokal tercermin dari jumlah total pendaftar Badan *ad hoc* yang mencapai 24.798 orang. Hal ini menunjukkan partisipasi publik yang kuat serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada yang transparan, inklusif, dan akuntabel.

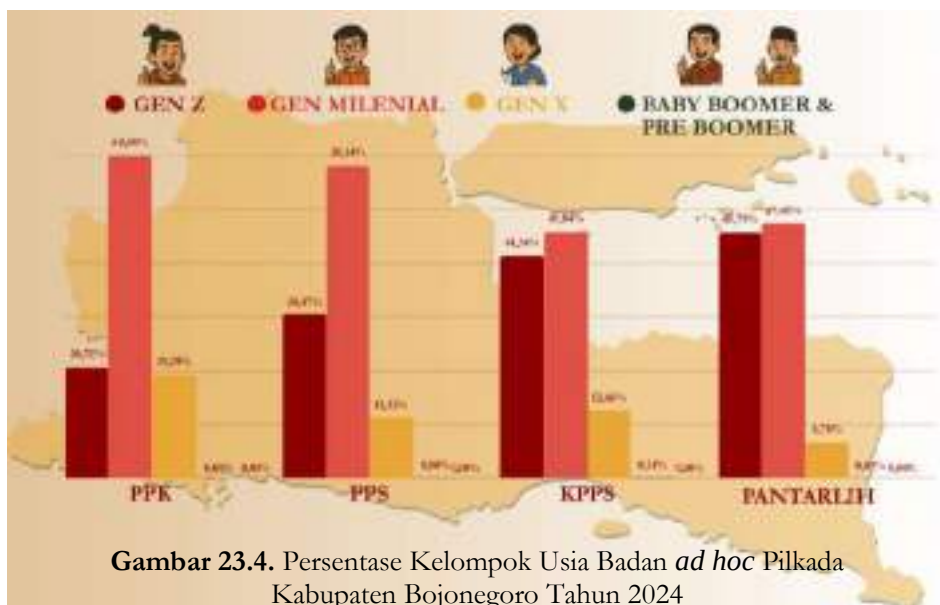
Badan *ad hoc* yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bojonegoro untuk penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024, tercatat total jumlah petugas *ad hoc* mencapai 21.259 orang. Komposisi terbesar berasal dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah 14.840 orang, mengingat perannya langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Selanjutnya, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menempati posisi kedua dengan jumlah 3.989 orang, yang berperan penting dalam proses pencocokan dan penelitian data pemilih. Sementara itu, Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berada di tingkat desa/kelurahan berjumlah 1.290 orang, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan berjumlah 140 orang. Jumlah ini mencerminkan skala pelibatan sumber daya manusia yang besar dan tersebar dalam menyukseskan tahapan-tahapan Pilkada secara menyeluruh di Kabupaten Bojonegoro. Adapun

komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 23.3.



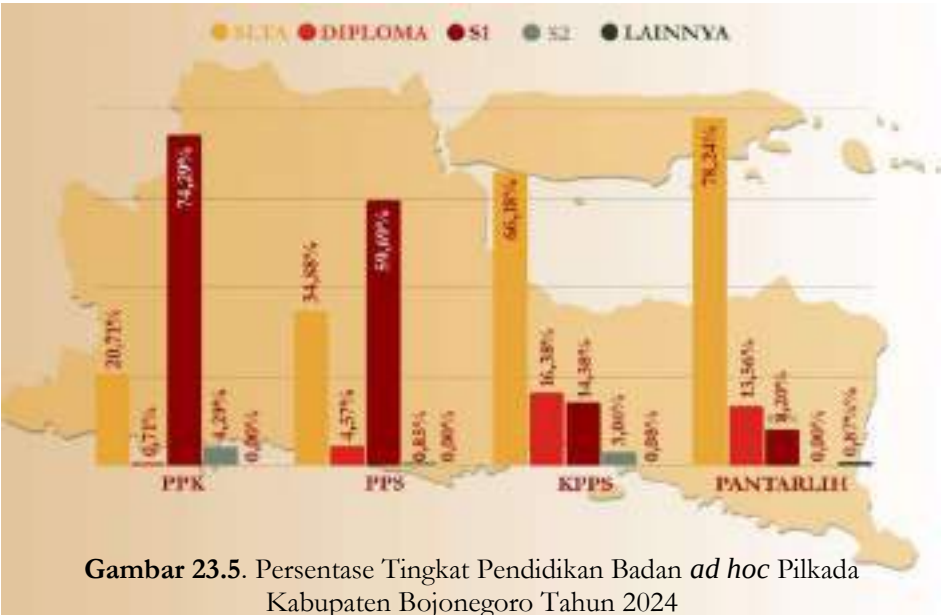
Sebaran demografi Badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan keterlibatan yang cukup berimbang antara laki-laki dan perempuan, meskipun terdapat variasi pada setiap jenjang. Pada tingkat kecamatan (PPK), proporsi laki-laki mendominasi dengan jumlah 109 orang (77,86%), sementara perempuan hanya 31 orang (22,14%). Komposisi serupa juga terlihat pada tingkat desa/kelurahan (PPS), di mana laki-laki berjumlah 778 orang (60,31%) dan perempuan 512 orang (39,69%). Namun, tren berbeda tampak pada struktur KPPS dan Pantarlih, di mana perempuan justru mendominasi. Pada KPPS, terdapat 7.607 perempuan (51,26%) diban-dingkan 7.233 laki-laki (48,74%), sementara pada Pantarlih, jumlah perempuan mencapai 2.568 orang (64,38%), jauh lebih banyak di-bandingkan laki-laki yang hanya 1.421 orang (35,62%). Data ini mencerminkan tingginya partisipasi perempuan, khususnya pada lini teknis penyelenggaraan Pilkada di tingkat TPS dan proses pemutakhiran data, serta menjadi indikasi positif terhadap keterlibatan gender dalam proses demokrasi di Kabupaten Bojonegoro.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 23.4 berikut.



Sebaran usia Badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 menunjukkan dominasi dari kalangan usia produktif, khususnya Generasi Milenial (usia 28–43 tahun) dan Generasi Z (usia 17–27 tahun). Pada jenjang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), mayoritas berasal dari Generasi Milenial sebanyak 84 orang (60,00%), diikuti oleh Generasi Z sebanyak 29 orang (20,71%), dan Generasi X sebanyak 27 orang (19,29%). Tren serupa terlihat pada Panitia Pemungutan Suara (PPS), di mana 750 orang (58,14%) berasal dari Generasi Milenial dan 393 orang (30,47%) dari Generasi Z. Sedangkan Generasi X hanya mencakup 146 orang (11,32%), dan Baby Boomer sebanyak 1 orang (0,08%). Pada jenjang teknis di tingkat TPS, yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Generasi Milenial juga mendominasi dengan 6.802 orang (45,84%), disusul oleh Generasi Z sebanyak 6.138 orang (41,36%), sementara Generasi X berjumlah 1.879 orang (12,66%), dan Baby Boomer hanya 21 orang (0,14%). Sementara itu, untuk Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), sebanyak 1.896 orang (47,42%) merupakan Generasi Milenial, dan 1.829 orang (45,75%) dari Generasi Z, sedangkan Generasi X sebanyak 271 orang (6,78%), dan *Baby Boomer* hanya 2 orang (0,05%). Tidak terdapat petugas Badan *ad hoc* yang berasal dari kelompok usia Pre-Boomer (>79 tahun) di seluruh jenjang. Data ini mencerminkan kuatnya keterlibatan generasi muda dan usia produktif dalam mendukung suksesnya Pilkada 2024, serta menjadi indikator positif terhadap regenerasi partisipasi demokratis di tingkat lokal.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 23.5.



Gambar 23.5. Persentase Tingkat Pendidikan Badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan, struktur Badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dari jenjang PPK hingga Pantarlih menunjukkan latar belakang pendidikan yang beragam pada setiap tingkatan. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), mayoritas anggotanya merupakan lulusan Strata 1 (S1) sebanyak 104 orang (74,29%), disusul lulusan SLTA sebanyak 29 orang (20,71%), dan S2 sebanyak 6 orang (4,29%), sedangkan lulusan Diploma hanya 1 orang (0,71%). Pada jenjang Panitia Pemungutan Suara (PPS), lulusan S1 masih mendominasi dengan jumlah 770 orang (59,69%), diikuti oleh lulusan SLTA sebanyak 450 orang (34,88%), kemudian Diploma sebanyak 59 orang (4,57%), dan S2 sebanyak 11 orang (0,85%). Namun, ketika beralih ke jenjang teknis di lapangan seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), proporsi lulusan SLTA meningkat signifikan menjadi 9.821 orang (66,18%), sedangkan lulusan Diploma mencapai 2.431 orang (16,38%), lulusan S1 sebanyak 2.134 orang (14,38%), dan S2 sebanyak 454 orang (3,06%). Tren serupa terlihat pada Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), di mana dominasi lulusan SLTA makin tinggi, yakni 3.121 orang (78,24%), diikuti oleh Diploma sebanyak 541 orang (13,56%), dan S1 sebanyak 327 orang (8,20%), tanpa ada lulusan dari jenjang S2. Pola ini mencerminkan bahwa jenjang manajerial

seperti PPK dan PPS didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi, sedangkan pada tingkat pelaksana teknis seperti KPPS dan Pantarlih, keterlibatan lulusan SLTA sangat dominan, menandakan terbukanya ruang partisipasi luas bagi masyarakat dari berbagai jenjang pendidikan dalam proses demokrasi lokal.

Dalam pelaksanaan rekrutmen Badan *ad hoc* Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bojonegoro, belum terdapat anggota yang berasal dari kelompok penyandang disabilitas pada tingkat PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih. Sebagai perbaikan dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bojonegoro ke depan, keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen Badan *ad hoc* perlu mendapatkan perhatian lebih, guna mendorong inklusivitas dan representasi yang lebih setara dalam penyelenggaraan Pilkada.

3. Pemutakhiran Data

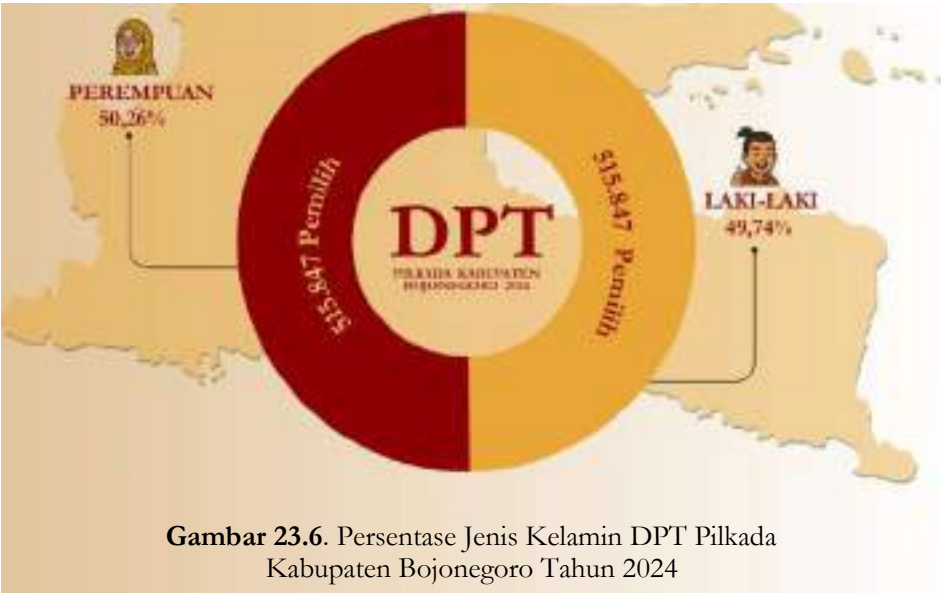
KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan serangkaian kegiatan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sebagai bagian krusial dalam menyukseskan Pilkada Tahun 2024. Tujuannya adalah untuk menghasilkan data pemilih yang akurat, akuntabel, dan berkualitas. Proses diawali dengan penyerahan Data Pemilih Hasil Sinkronisasi (DPHS) dari KPU RI pada 24–25 Mei 2024, di mana jumlah data pemilih Kabupaten Bojonegoro tercatat sebanyak 1.059.673 pemilih.

Tahap berikutnya adalah penyusunan daftar pemilih awal, dimulai dengan pemetaan TPS dan penyusunan bahan Coklit oleh PPK dan PPS pada 25 Mei–23 Juni 2024, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Pantarlih pada 24 Juni–24 Juli 2024. Setelah Coklit, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilakukan secara bertahap, diawali dengan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) oleh PPS pada 25–31 Juli 2024, lalu disusul rapat pleno rekapitulasi DPHP tingkat desa/kelurahan (1–3 Agustus 2024) dan tingkat kecamatan oleh PPK (5–7 Agustus 2024).

Selanjutnya, KPU Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Pleno Penetapan DPS tingkat Kabupaten pada 11 Agustus 2024, dengan hasil DPS sejumlah 1.028.635 pemilih, tersebar di 28 wilayah kecamatan, 430 desa/kelurahan, dan 2.120 TPS. DPS tersebut diumumkan oleh PPS kepada masyarakat pada 18–27 Agustus 2024 untuk mendapatkan tanggapan dan masukan publik. Tahapan berlanjut pada proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang dimulai dengan analisis data ganda dan invalid serta

sinkronisasi data ke PPK dan PPS pada 18 Agustus–4 September 2024. Selanjutnya dilakukan perbaikan DPS dan penyusunan DPSHP oleh PPS (28 Agustus–1 September), diikuti dengan persiapan rekapitulasi DPSHP (1–4 September). Rapat pleno rekapitulasi tingkat desa/kelurahan dan kecamatan dilakukan pada 5–7 September dan 9–11 September 2024.

Tahap akhir dari proses ini adalah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Bojonegoro melalui Rapat Pleno pada 20 September 2024, dengan hasil final sebanyak 1.026.363 pemilih tersebar di 28 kecamatan, 430 desa/kelurahan, dan 2.120 TPS. Penetapan ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 303/PL.02.1-BA/3522/2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro Nomor 1518 Tahun 2024. Setelah penetapan, PPS melakukan pengumuman DPT kepada masyarakat pada rentang waktu 22 September hingga 27 November 2024, sebagai bagian dari transparansi dan layanan informasi publik dalam proses Pilkada. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 23.6.

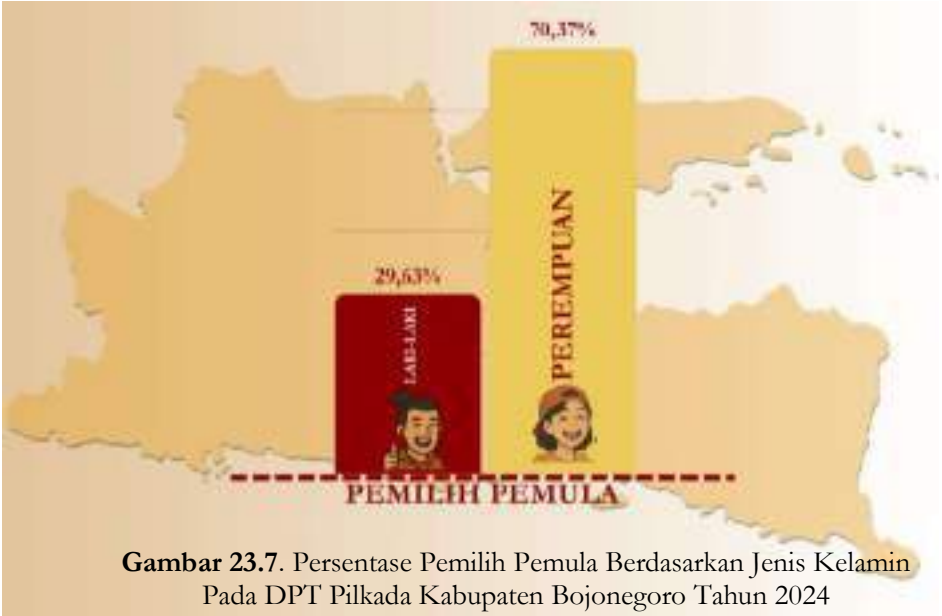


Gambar 23.6. Persentase Jenis Kelamin DPT Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

Berdasarkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, jumlah pemilih tercatat sebanyak 1.026.363 orang, yang terdiri dari 510.516 pemilih laki-laki (49,74%) dan 515.847 pemilih perempuan (50,26%). Data ini menunjukkan bahwa proporsi pemilih antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang, dengan dominan tipis dari pemilih perempuan. Sebaran ini mencerminkan keterwakilan gender yang inklusif dalam basis pemilih, serta menjadi

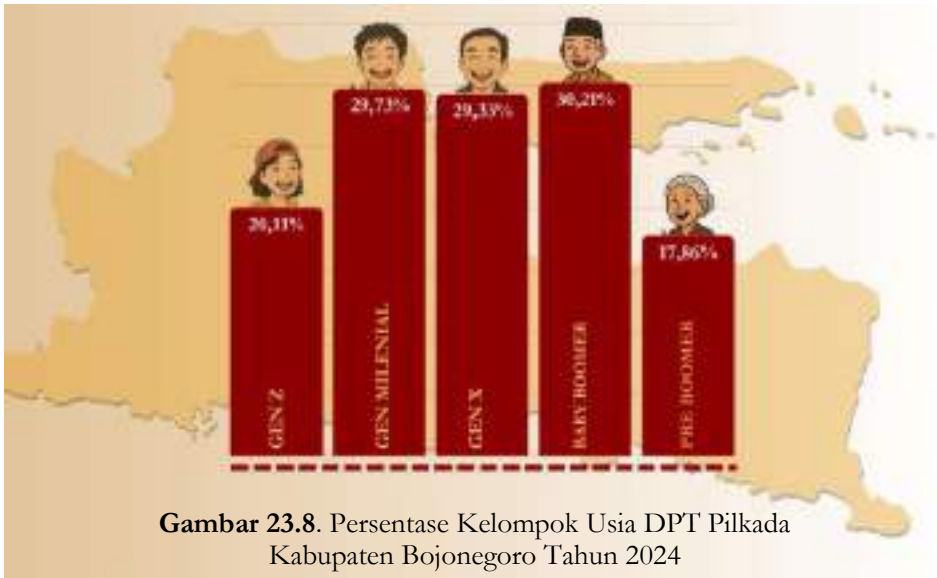
indikator positif terhadap potensi partisipasi aktif perempuan dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni pemilih pemula dan pemilih non-pemula. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 23.7 berikut.



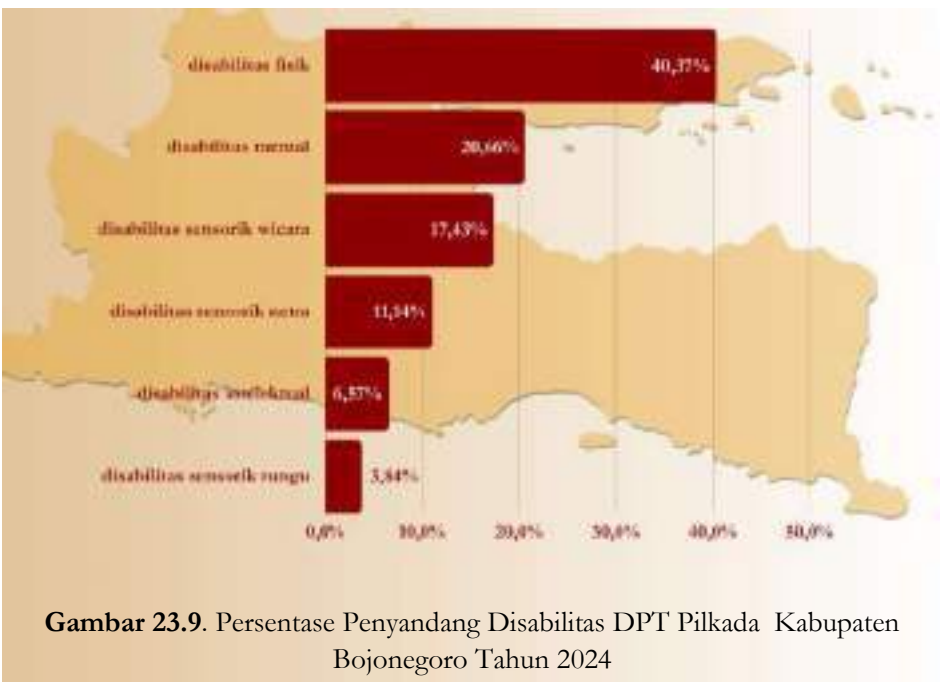
Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, terdapat status pemilih pemula. . Jumlah pemilih pemula tercatat sebanyak 27 orang, dimana pemilih pemula laki-laki sebanyak 8 (29,63%) dan pemilih pemula perempuan sebanyak 19 (70,37%). menunjukkan dominasi pemilih pemula perempuan meskipun jumlahnya sangat kecil secara keseluruhan.

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 23.8.



Sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi dari generasi produktif, dengan kontribusi terbesar berasal dari Generasi X (usia 44–59 tahun) sebanyak 310.054 pemilih (30,21%). Disusul oleh Generasi Milenial (usia 28–43 tahun) sebanyak 305.128 pemilih (29,73%), dan Generasi Z (usia 17–27 tahun) sebanyak 206.433 pemilih (20,11%). Sementara itu, pemilih dari kelompok usia lanjut Baby Boomer (usia 60–78 tahun) tercatat sebanyak 183.318 pemilih (17,86%), dan Pre-Boomer (usia >79 tahun) berjumlah 21.430 pemilih (2,09%). Komposisi ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% pemilih berada pada rentang usia produktif, yang mencerminkan potensi partisipasi pemilih aktif dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 secara demokratis dan inklusif.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 disajikan pada gambar 23.9, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, tercatat sebanyak 3.592 pemilih penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai kategori. Jumlah tertinggi berasal dari penyan-dang disabilitas fisik, yakni sebanyak 1.450 orang (40,37%), diikuti oleh disabilitas mental sebanyak 742 orang (20,66%), dan disabilitas sensorik wicara sebanyak 626 orang (17,43%). Sementara itu, penyandang disabilitas sensorik netra tercatat sebanyak 400 orang (11,14%), disabilitas intelektual 236 orang (6,57%), dan disabilitas sensorik rungu 138 orang (3,84%). Data ini menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Bojonegoro dalam menjamin hak pilih bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok penyandang disabilitas, serta menjadi wujud dari penyelenggaraan Pilkada yang inklusif dan setara. Kehadiran penyandang disabilitas dalam DPT juga mendorong perlunya penyediaan fasilitas aksesibel di Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar semua pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan bermartabat.

4. Pencalonan

Tahapan pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dimulai dengan pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran oleh KPU Kabupaten Bojonegoro yang

disampaikan melalui media massa, website resmi, dan media sosial KPU pada 24–26 Agustus 2024. Pendaftaran bakal pasangan calon (paslon) dibuka selama tiga hari, mulai 27 hingga 29 Agustus 2024. Tahapan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba bagi bakal paslon pada 29 Agustus–2 September 2024, serta penelitian persyaratan administrasi terhadap paslon yang telah mendaftar melalui aplikasi Silon pada 29 Agustus–4 September 2024. Penetapan pasangan calon dilakukan pada 22 September 2024, dan pengundian nomor urut pasangan calon pada 23 September 2024.

Pada hari pertama pendaftaran (27 Agustus 2024), belum ada bakal pasangan calon yang mengajukan pendaftaran. Hari kedua (28 Agustus 2024), pasangan Setyo Wahono dan Nurul Azizah datang mendaftar, namun status pendaftarannya dikembalikan atas permintaan sendiri. Kemudian pada hari ketiga (29 Agustus 2024), pasangan Teguh Haryono dan Farida Hidayati mendaftar dan pendaftarannya diterima serta diberikan tanda terima. Pada hari yang sama, pasangan Setyo Wahono dan Nurul Azizah kembali melakukan pendaftaran dan kali ini diterima serta mendapatkan tanda terima pendaftaran.

Dengan demikian, pada akhir masa pendaftaran, terdapat dua bakal pasangan calon yang mendaftar dan memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti proses tahapan selanjutnya dalam Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024. Data lengkap mengenai rekapitulasi pendaftaran dapat dilampirkan dalam bentuk tabel untuk memperjelas kronologi dan status administratif masing-masing pasangan calon. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada gambar 23.10 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO



BerAKHLAK



#bongga meyakini bongga

Penetapan

**NOMOR URUT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOJONEGORO
TAHUN 2024**

23 SEPTEMBER 2024

1

2



CALON BUPATI
Dr. Ir. H. TEGUH
HARTONO, MBA

CALON WAKIL BUPATI
H. FARIDA
HIDAYATI, S.P., M.H.



PARTAI POLITIK PENGUSUL



CALON BUPATI
SETYO WAHONO

CALON WAKIL BUPATI
NUZUL AZIZAN



PARTAI POLITIK PENGUSUL

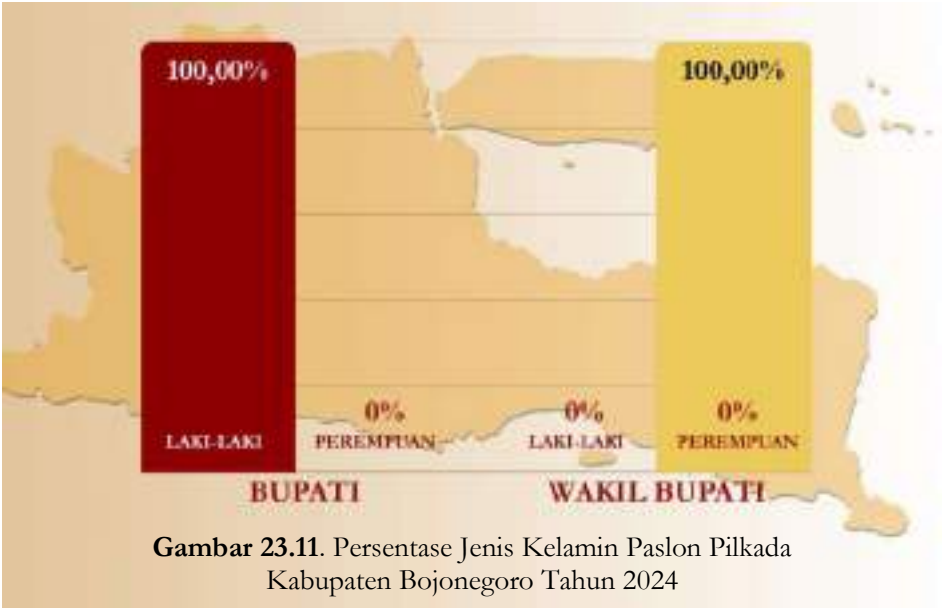
Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor 1026 tentang
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro
Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024



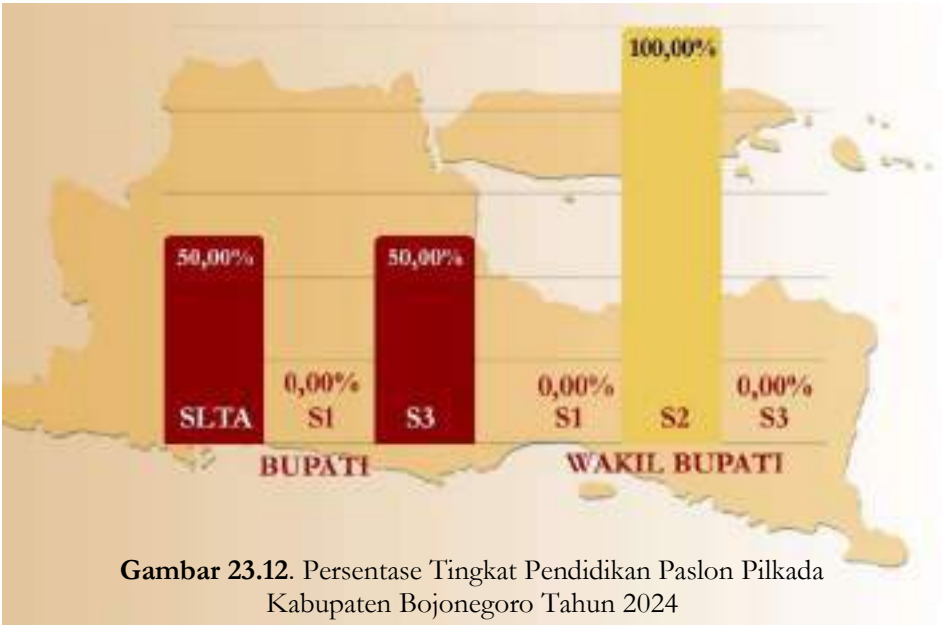
Gambar 23.10. Daftar Nama Paslon Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro disajikan pada gambar 23.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro disajikan pada gambar 23.12.

Pilkada Serentak Jatim 2024 | 441



Gambar 23.11. Persentase Jenis Kelamin Paslon Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024



Gambar 23.12. Persentase Tingkat Pendidikan Paslon Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

Sebaran demografi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 menunjukkan komposisi gender yang seimbang, yaitu dua calon laki-laki (50%) dan dua calon perempuan (50%) dari total empat orang calon. Menariknya, kedua calon Bupati merupakan laki-laki (100%), sedangkan seluruh calon Wakil Bupati adalah perempuan (100%),

mencerminkan kolaborasi gender yang harmonis dalam struktur pasangan calon yang maju dalam kontestasi Pilkada tahun ini.

Dari sisi tingkat pendidikan, pasangan calon memiliki latar belakang akademik yang tinggi. Untuk posisi Bupati, terdapat satu orang lulusan Strata-1 (S1) atau sarjana (50%), dan satu orang lulusan Strata-3 (S3) atau doktor (50%). Sementara itu, kedua calon Wakil Bupati berasal dari lulusan Strata-2 (S2) atau magister (100%). Secara keseluruhan, dari total empat orang calon, terdapat 1 orang lulusan S1 (25%), 2 orang lulusan S2 (50%), dan 1 orang lulusan S3 (25%). Komposisi ini menunjukkan bahwa seluruh pasangan calon memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap kepemimpinan yang berkualitas di Kabupaten Bojonegoro.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 23.13, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



Dr. Ir. H. Teguh Haryono dan
Faida Hidayati, M.B.A

VISI:
Mewujudkan Bojonegoro sebagai sentra agribisnis dan energi, menuju masyarakat yang kreatif, produktif, dan energik.

MISI:

1. Meningkatkan SDM yang unggul dan berakhlak.
2. Memperkuat perekonomian berbasis nilai ekonomi hijau dan kerakyatan.
3. Meningkatkan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas.
4. Mewujudkan ketahanan pangan dengan memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan perikanan.
5. Mempercepat literasi teknologi dan sains melalui riset dan inovasi.
6. Mendukung partisipasi inklusif, dengan fokus pada perempuan, pemuda, dan disabilitas melalui pelatihan dan akses kerja.
7. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan kolaboratif.



Setyo Waluyo dan Hs. Nurul
Anisah, B.E., M.Ed.

VISI:
Terwujudnya Bojonegoro yang sejahtera dan berkembang.

MISI:

1. Membangun SDM Bojonegoro yang unggul, berbudaya, berakhlak, dan berkeadilan.
2. Membangun perekonomian daerah yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
3. Menciptakan lingkungan yang sehat dan melakukan transisi energi baru terbarukan.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, partisipatif, inklusif, dan inovatif.
5. Menyajikan kebudayaan dan kebanggaan daerah.

Gambar 23.13. Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

Sosialisasi merupakan salah satu tahapan penting yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro dalam rangka memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait peraturan perundang-undangan, tahapan Pilkada, serta proses penyelenggaraan Pilkada. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

1) Metode Sosialisasi

Untuk menjangkau seluruh segmen masyarakat, KPU Kabupaten Bojonegoro menggunakan beragam metode sosialisasi. Metode yang digunakan antara lain:

- Tatap muka, yang mencakup sosialisasi langsung mengenai PKPU, *Goes to School*, *Goes to Pesantren*, *Goes to Campus*, kerja sama dengan 23 ORMAS, peluncuran tahapan Pilkada, jingle, maskot, nonton bareng film “Tepatilah Janji”, serta Kirab Pilkada;
- Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) di titik strategis;
- Penyebaran Bahan Sosialisasi (BS) dalam bentuk brosur, leaflet, dan poster;
- Iklan sosialisasi di media massa cetak, elektronik, media sosial, dan *platform online*;
- Debat publik, sebagai media penyampaian visi-misi pasangan calon secara terbuka.

Metode-metode tersebut dirancang untuk menyampaikan informasi secara komprehensif dan berlapis, sesuai karakteristik sasaran masing-masing segmen masyarakat.

2) Target Peserta Sosialisasi

Sosialisasi Pilkada Kabupaten Bojonegoro menyasar berbagai segmen masyarakat, termasuk pemilih pemula, mahasiswa, kelompok perempuan, ORMAS, OKP, partai politik, media, stakeholder, dan masyarakat umum. Melalui strategi menyeluruh, KPU berhasil menjangkau sebanyak 2.065.156 orang, yang mencerminkan komitmen kuat dalam memperluas jangkauan informasi Pilkada dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih berkualitas.

3) Media yang Terlibat

Peran media menjadi krusial dalam mendukung efektivitas sosialisasi. Sebanyak 57 media terlibat dalam penyebaran informasi Pilkada, yang terdiri dari:

- Media cetak seperti *Radar Bojonegoro*, *Surya*, dan *Memorandum*,

- Media elektronik seperti *JTV*, *TVRI*, dan *Radio Istana FM*,
- serta media sosial dan *platform online*.

Keterlibatan media ini tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bojonegoro. Melalui dukungan media, informasi tentang tahapan dan aturan Pilkada dapat diakses secara mudah, cepat, dan menyeluruh oleh masyarakat.

Dalam rangka menyemarakkan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Bojonegoro memperkenalkan maskot resmi Pilkada sebagai simbol penyelenggaraan Pilkada yang ramah, partisipatif, dan dekat dengan masyarakat.



Gambar 23.14. Maskot Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

Maskot Pilkada Kabupaten Bojonegoro terinspirasi dari ikon lokal yang sarat nilai sejarah dan budaya, yakni Sumur Minyak Tua Wonocolo. Sumur minyak ini merupakan peninggalan zaman Belanda yang hingga kini masih dikelola secara tradisional oleh masyarakat sekitar. Pengambilan minyak dilakukan dengan cara yang khas dan turun-temurun, tidak hanya menjadi sumber penghidupan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berkembang menjadi destinasi wisata geologi unggulan di Bojonegoro. Maskot ini diberi nama Si Bolih, yang merupakan akronim dari “*Bojonegoro Lestari, Inovatif, dan Harmonis*”, menggambarkan semangat masyarakat yang menjaga warisan sejarah sambil terus bergerak maju dalam semangat demokrasi dan partisipasi aktif pada Pilkada 2024.

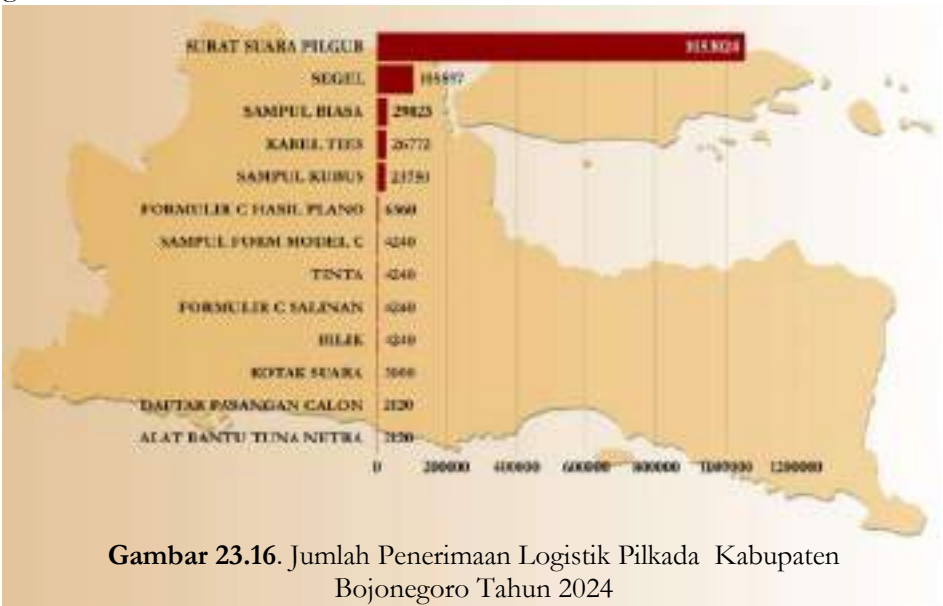
Tahapan kampanye Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 menjadi sarana penting bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, program kerja, serta membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat guna mendorong partisipasi pemilih yang berkualitas. Kampanye dilaksanakan mulai 25 September hingga 23 November 2024, melalui metode yang difasilitasi oleh KPU maupun yang didanai langsung oleh partai politik atau pasangan calon. Dalam rangka menjamin keadilan dan keterjangkauan informasi, KPU Kabupaten Bojonegoro memfasilitasi beragam metode kampanye, seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK) sebanyak 1.420 buah, penyebaran bahan kampanye (BK) sebanyak 500.000 lembar per pasangan calon, serta penayangan iklan kampanye melalui media cetak dan elektronik. Selain itu, KPU juga memfasilitasi pelaksanaan rapat umum masing-masing satu kali untuk tiap pasangan calon, serta tiga kali debat publik yang disiarkan oleh TV9 dan TVRI. Debat publik ini dirancang untuk memperdalam pemahaman masyarakat terkait profil, visi, misi, serta program pasangan calon sebagai pertimbangan rasional dalam menentukan pilihan. Di sisi lain, pasangan calon juga aktif memanfaatkan platform media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dengan total 28 akun kampanye yang dikelola secara profesional. Seluruh rangkaian kampanye ini mencerminkan komitmen penyelenggara dan peserta Pilkada untuk menghadirkan ruang demokrasi yang terbuka, informatif, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Bojonegoro.



6. Logistik

Pengelolaan logistik dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 merupakan aspek krusial yang melibatkan proses terencana dan terkoordinasi mulai dari perencanaan kebutuhan,

pengadaan barang, produksi, hingga distribusi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan perencanaan logistik secara sistematis agar seluruh kebutuhan logistik dapat tersedia secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan, dan tepat waktu. Pengadaan logistik Pilkada dilaksanakan menggunakan metode E-Purchasing Konsolidasi Nasional, dan distribusi dari penyedia ke KPU Kabupaten Bojonegoro dilakukan berdasarkan Bukti Tanda Terima Barang (BTTB). Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 23.16.

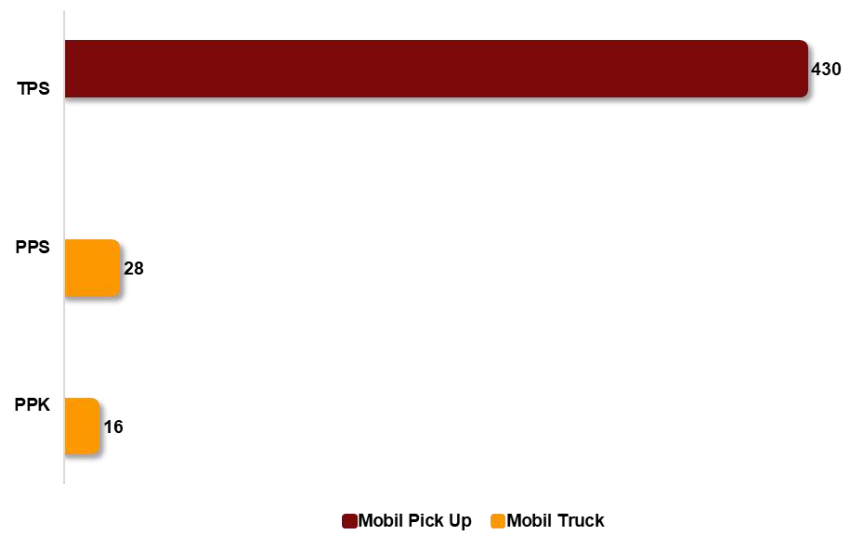


Gambar 23.16. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

Setelah logistik diterima, dilakukan tahapan sortir, penyettingan, pengecekan, dan pengepakan sebelum dikirim ke masing-masing TPS. Proses ini dikelola melalui kerja sama antara KPU, masyarakat sekitar, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) secara swakelola. Tercatat sebanyak 120 orang petugas terlibat dalam proses setting dan packing logistik Pilkada.

Distribusi logistik dari penyedia ke gudang KPU dilaksanakan bertahap mulai tanggal 17 September hingga 29 Oktober 2024 dengan menggunakan moda transportasi truk. Selanjutnya, pendistribusian dari KPU ke seluruh 2.120 TPS di 430 desa/kelurahan dilakukan secara serentak pada 23–26 November 2024 menggunakan truk atau mobil pick-up. Seluruh tahapan logistik ini tidak hanya menekankan ketepatan teknis,

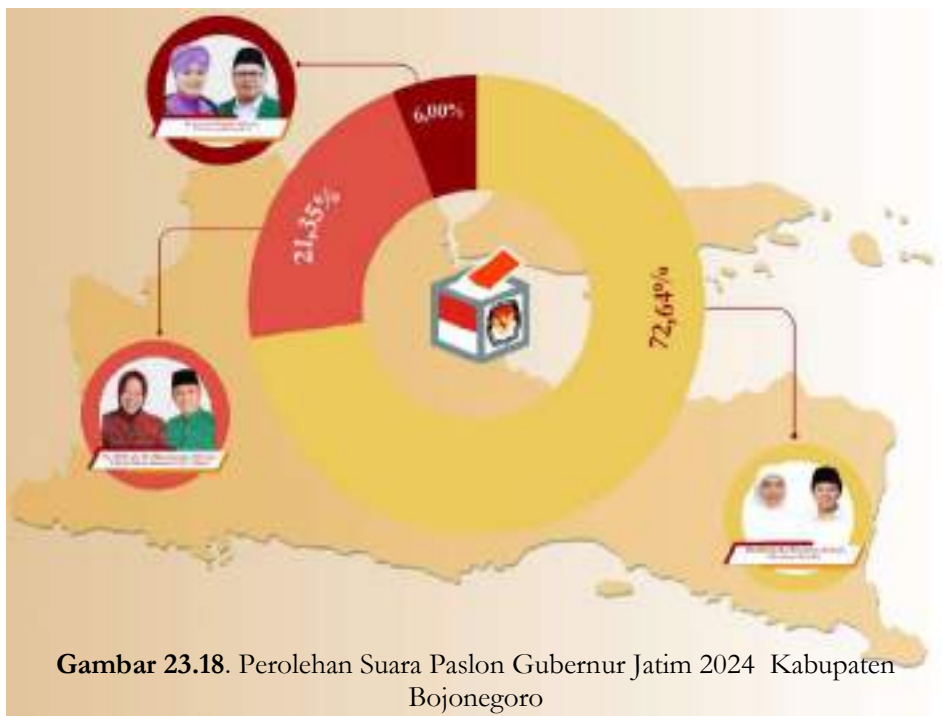
tetapi juga menjamin akuntabilitas dan efisiensi dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.



Gambar 23.17. Moda Transportasi Logistik Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

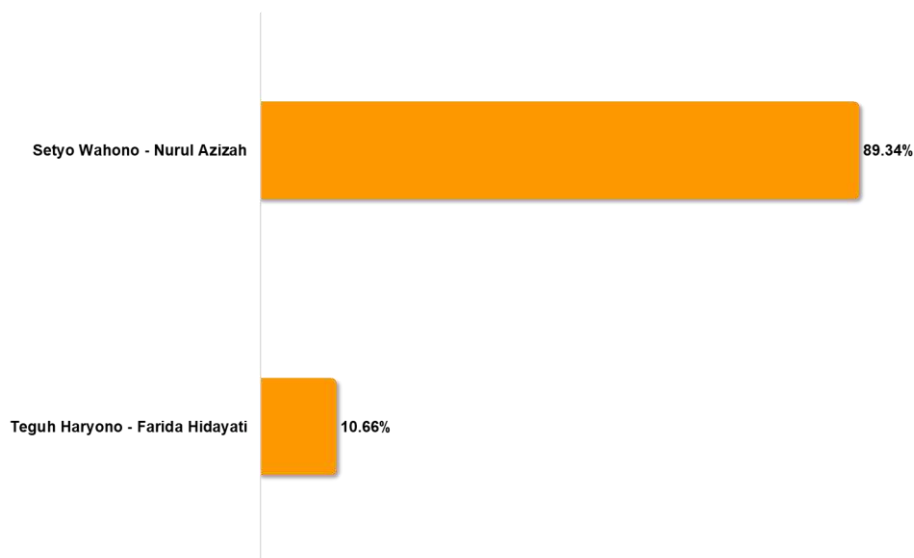
7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Bojonegoro disajikan pada gambar 23.18.



Hasil rekapitulasi suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan dominasi pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestjanto Dardak, yang memperoleh suara terbanyak sejumlah 543.131 suara atau sebesar 72,64% dari total suara sah. Pasangan ini unggul jauh dari dua pasangan lainnya. Di posisi kedua, pasangan Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) meraih 159.643 suara atau 21,35%, sedangkan pasangan Luluk Nur Ihamidah – Lukmanul Hakim memperoleh 44.889 suara atau sebesar 6,00%. Total keseluruhan suara sah pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Bojonegoro tercatat sebanyak 747.663 suara. Hasil ini mencerminkan tingginya dukungan masyarakat Bojonegoro terhadap kepemimpinan petahana Khofifah-Emil dalam melanjutkan pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 23.19.



Gambar 23.19. Perolehan Suara Paslon Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

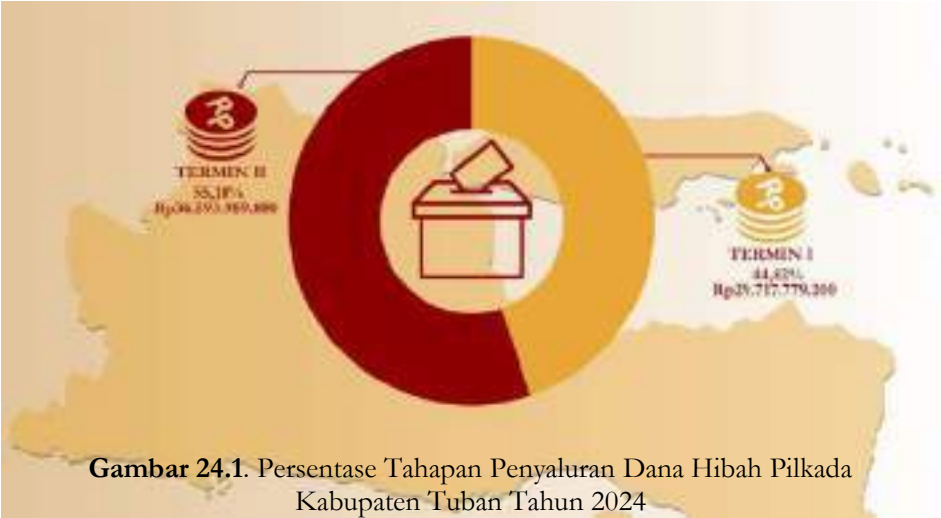
Hasil akhir rekapitulasi suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 menunjukkan kemenangan telak pasangan Setyo Wahono – Nurul Azizah yang meraih dukungan sebesar 701.249 suara atau 89,34% dari total suara sah. Sementara itu, pasangan Teguh Haryono – Farida Hidayati hanya memperoleh 83.709 suara, setara dengan 10,66%. Dari total 784.958 suara sah, perolehan ini mencerminkan kepercayaan yang sangat besar dari masyarakat Bojonegoro terhadap kepemimpinan pasangan Setyo-Nurul untuk memimpin Kabupaten Bojonegoro lima tahun ke depan.

BAGIAN 24

KABUPATEN TUBAN

1. Perencanaan Program dan Anggaran

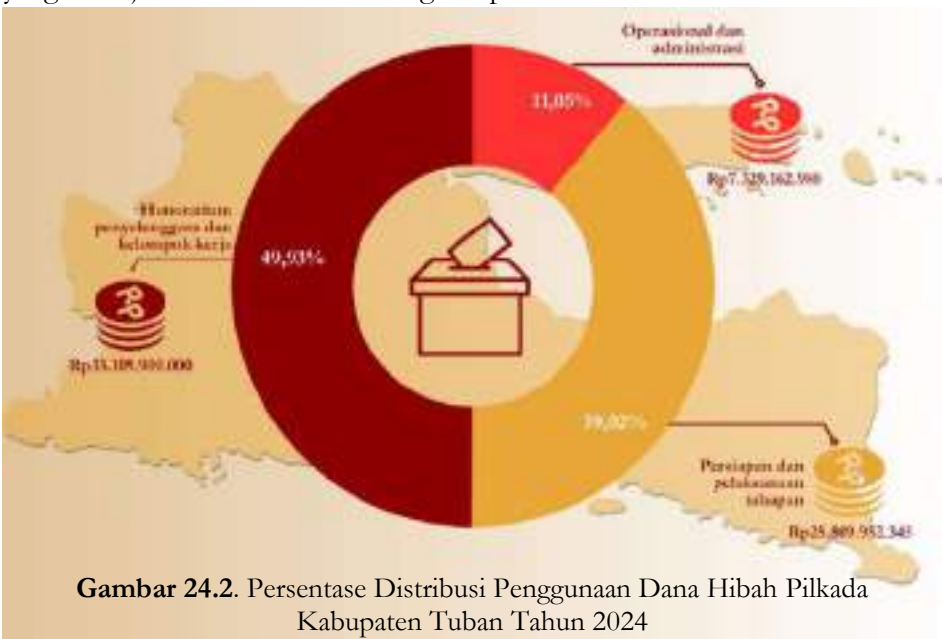
Tahapan perencanaan Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2024 diawali dengan proses pengajuan anggaran oleh KPU Kabupaten Tuban kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada tanggal 3 Mei 2023. Dalam proposal awal, KPU mengusulkan kebutuhan dana hibah sebesar Rp74.321.548.000, dengan fokus utama pada honorarium bagi kelompok penyelenggara pemilihan, seperti PPK, PPS, KPPS, dan Sekretariat. Anggaran ini disusun berdasarkan estimasi kebutuhan riil pada setiap tahapan pilkada, serta mengakomodasi kelengkapan teknis dan dukungan administratif. Setelah melalui pembahasan dan rasionalisasi bersama TAPD, disepakati jumlah anggaran final sebesar Rp66.311.769.000, yang kemudian secara resmi dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Nomor: 188/01/414.011/2023 ; 607/KU.07-NK/3523/2023, dan ditetapkan efektif pada 10 November 2023. Kesepakatan ini menjadi dasar penting dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada Kabupaten Tuban, memastikan kesiapan logistik, sumber daya manusia, serta penyelenggaraan pemilihan yang akuntabel dan transparan. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 24.1 berikut.



Gambar 24.1. Persentase Tahapan Penyaluran Dana Hibah Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2024

Distribusi dana hibah Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2024 dilakukan melalui dua tahap pencairan. Termin pertama dicairkan pada bulan November 2023 sebesar Rp29.717.779.200 atau setara 44,82% dari total anggaran hibah. Sementara itu, termin kedua direalisasikan pada bulan Juli 2024 dengan nilai Rp36.593.989.800, yang mencakup 55,18% dari keseluruhan dana hibah. Dengan demikian, total dana hibah yang telah dialokasikan dan disepakati mencapai Rp66.311.769.000, memastikan ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada secara efektif dan tepat waktu.

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 24.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.



Struktur alokasi anggaran hibah Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2024 terbagi ke dalam tiga komponen utama. Komponen terbesar dialokasikan untuk honorarium penyelenggara pemilihan, yakni sebesar Rp33.109.900.000 atau 49,93% dari total anggaran. Tahapan persiapan dan pelaksanaan mendapatkan alokasi sebesar Rp25.872.706.020 atau 39,02%, mencakup kegiatan seperti sosialisasi, pemutakhiran data pemilih, kampanye, dan pelatihan teknis. Sementara itu, operasional dan administrasi perkantoran memperoleh porsi anggaran sebesar Rp7.329.162.980 atau 11,05%. Ketiga komponen ini menunjukkan komitmen pengelolaan

anggaran yang proporsional untuk mendukung kelancaran seluruh tahapan Pilkada.

2. **Badan *Ad Hoc***

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Tuban membentuk jajaran badan *ad hoc* yang berperan di seluruh tingkatan wilayah, mulai dari kecamatan hingga tempat pemungutan suara (TPS). Proses pembentukan badan *ad hoc* dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dari berbagai latar belakang. Pada tingkat kecamatan, dibentuk sebanyak 100 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tersebar di 20 kecamatan, dengan masa kerja terhitung mulai 16 Mei 2024 hingga 27 Januari 2025. Selanjutnya, di tingkat kelurahan/desa, ditetapkan 984 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tersebar di 328 wilayah administratif, dengan masa tugas dari 26 Mei 2024 hingga 27 Januari 2025.

Untuk menjamin kelancaran pemungutan suara di lapangan, KPU juga membentuk 13.069 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di 1.867 TPS. KPPS dilantik serentak pada 7 November 2024 dan menyelesaikan tugas pada 8 Desember 2024. Di sisi lain, guna mendukung validitas daftar pemilih, KPU Tuban juga mengangkat 3.667 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang tersebar di 1.865 TPS, dengan masa tugas berlangsung dari 24 Juni hingga 25 Juli 2024.

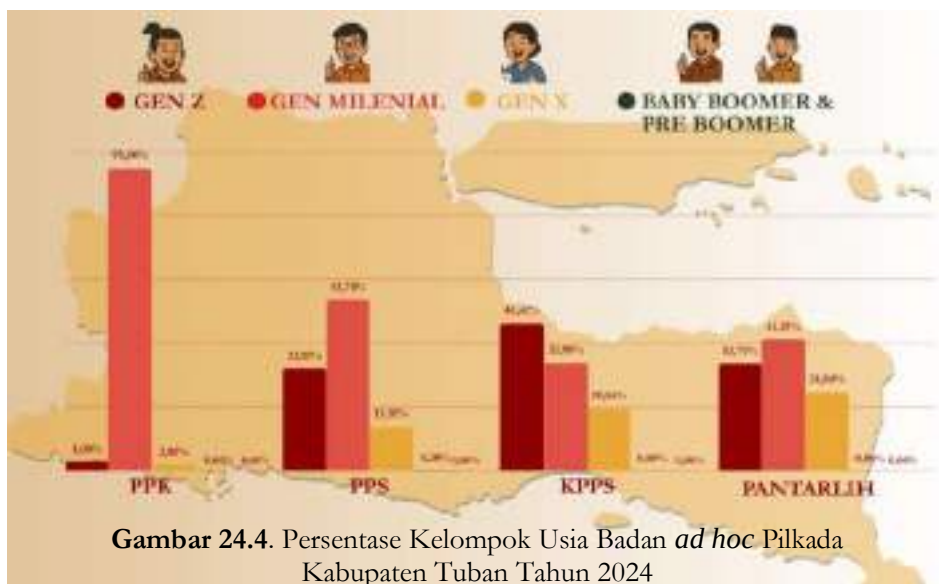
Pembentukan dan manajemen badan *ad hoc* ini tidak hanya mencerminkan kesiapan teknis dan administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Tuban dalam menciptakan proses demokrasi yang profesional, inklusif, serta partisipatif. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 24.3.



Gambar 24.3. Persentase Jenis Kelamin Badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2024

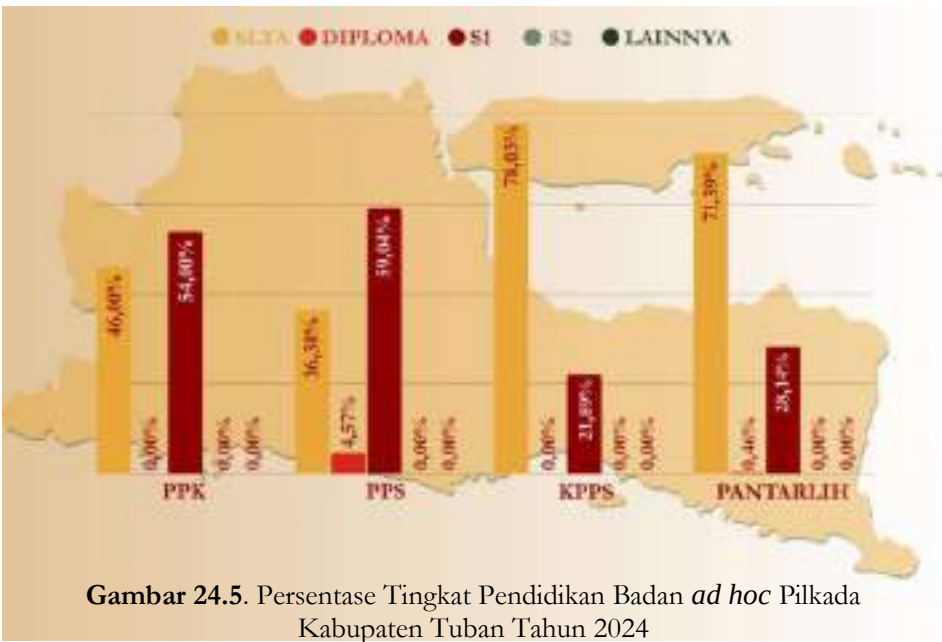
Sebaran demografi badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan keterwakilan yang cukup beragam. Pada tingkat kecamatan, dari total 100 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebanyak 81 orang (81,00%) adalah laki-laki dan 19 orang (19,00%) perempuan. Sementara itu, pada tingkat kelurahan/desa, dari total 984 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), terdapat 446 laki-laki (45,33%) dan 538 perempuan (54,67%), mencerminkan dominasi partisipasi perempuan dalam struktur PPS. Di tingkat teknis TPS, dari 13.069 anggota KPPS, mayoritas juga diisi oleh perempuan, yaitu 7.279 orang (55,70%), sedangkan laki-laki berjumlah 5.790 orang (44,30%). Hal serupa terlihat pada komposisi 3.667 Pantarlih, di mana 2.423 orang (66,08%) merupakan perempuan dan 1.244 orang (33,92%) laki-laki. Data ini menunjukkan bahwa perempuan memainkan peran signifikan dalam struktur badan *ad hoc* Pilkada Tuban 2024, terutama pada level PPS, KPPS, dan Pantarlih.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 24.4 berikut.



Sebaran demografi badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi generasi muda dalam keanggotaan penyelenggara di semua tingkatan. Pada jenjang PPK, sebanyak 95 orang (95,00%) berasal dari generasi milenial (usia 28–43 tahun), sementara 3 orang (3,00%) dari generasi Z (17–27 tahun), dan 2 orang (2,00%) dari generasi X (44–59 tahun). Komposisi di tingkat PPS lebih merata, dengan 529 orang (53,76%) dari generasi milenial, 316 orang (32,11%) dari generasi Z, dan 137 orang (13,92%) dari generasi X. Sisanya, terdapat 2 orang (0,20%) dari *baby boomer* (60–78 tahun). Untuk KPPS, dominasi generasi Z sangat menonjol, yakni 6.067 orang (46,42%), diikuti generasi milenial sebanyak 4.441 orang (33,98%), dan generasi X sebanyak 2.554 orang (19,54%). Sementara itu, terdapat 7 orang (0,05%) dari kalangan *baby boomer*. Pada Pantarlih, proporsi terbesar berasal dari generasi milenial sebanyak 1.514 orang (41,29%), disusul generasi Z sebanyak 1.239 orang (33,79%), dan generasi X sebanyak 911 orang (24,84%). Hanya 3 orang (0,08%) yang berasal dari baby boomer, dan tidak ada dari pre-boomer (>79 tahun). Data ini mengindikasikan bahwa generasi muda, khususnya generasi milenial dan Z, menjadi tulang punggung dalam struktur badan *ad hoc* Pilkada Tuban 2024.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 24.5.



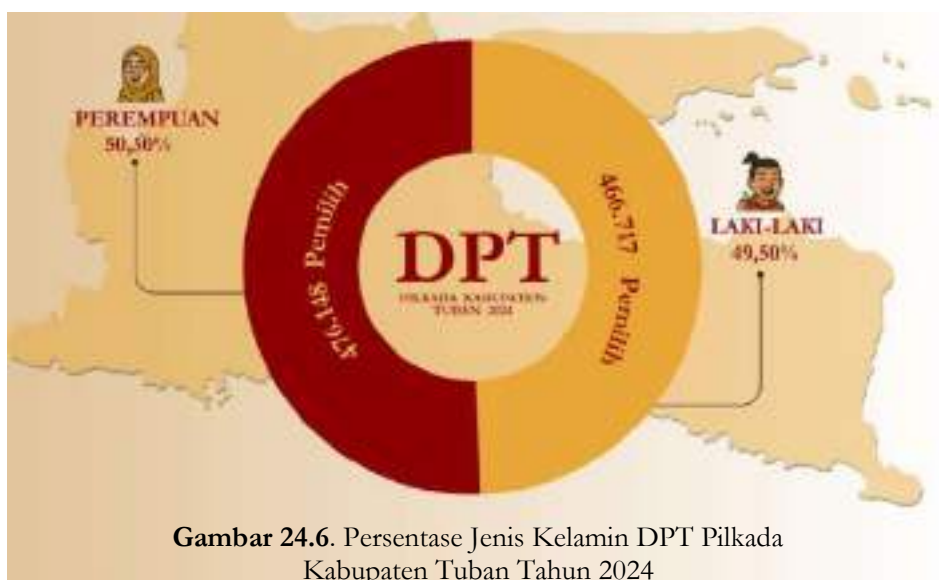
Sebaran demografi berdasarkan tingkat pendidikan badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2024 menunjukkan bahwa mayoritas anggota KPPS dan Pantarlih berlatar belakang pendidikan menengah atas (SLTA). Di tingkat KPPS, sebanyak 10.198 orang (78,03%) merupakan lulusan SLTA, sementara hanya 2.861 orang (21,89%) berpendidikan sarjana (S1), dan sisanya sangat kecil yaitu 6 orang (0,05%) lulusan diploma, 3 orang (0,02%) lulusan S2, serta 1 orang (0,01%) berasal dari kategori lainnya. Untuk Pantarlih, sebanyak 2.618 orang (71,39%) berpendidikan SLTA, dan 1.032 orang (28,14%) lulusan S1, serta 17 orang (0,46%) dari lulusan diploma. Sementara itu, pada tingkat PPK, distribusi pendidikan didominasi oleh lulusan S1 sebanyak 54 orang (54,00%), diikuti lulusan SLTA sebanyak 46 orang (46,00%), tanpa ada yang berasal dari diploma maupun S2. Untuk PPS, komposisi pendidikan terdiri dari 581 orang (59,04%) lulusan S1, 358 orang (36,38%) lulusan SLTA, dan 45 orang (4,57%) lulusan diploma. Data ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan sarjana (S1) lebih dominan di jenjang PPK dan PPS, sementara pendidikan menengah (SLTA) lebih mendominasi komposisi badan *ad hoc* pada tingkat pelaksana teknis di TPS seperti KPPS dan Pantarlih.

Dalam pelaksanaan rekrutmen Badan *ad hoc* Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tuban, belum terdapat anggota yang berasal dari kelompok penyandang disabilitas pada tingkat PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih.

Sebagai perbaikan dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Tuban ke depan, keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen Badan *ad hoc* perlu mendapatkan perhatian lebih, guna mendorong inklusivitas dan representasi yang lebih setara dalam penyelenggaraan Pilkada.

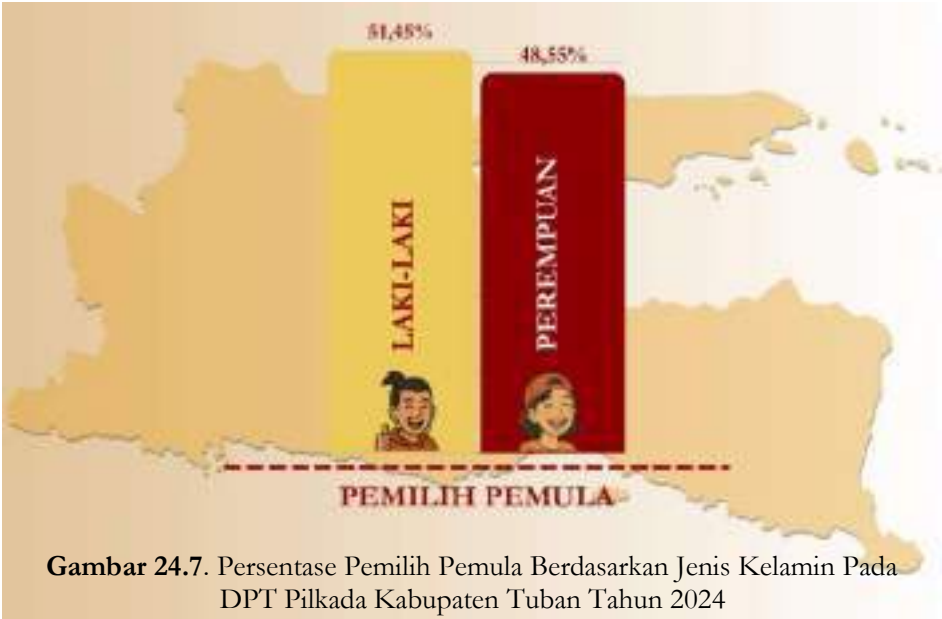
3. Pemutakhiran Data

Tahapan pemutakhiran data pemilih menjadi bagian krusial dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2024. Setelah penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), KPU Kabupaten Tuban melanjutkan proses verifikasi melalui analisis data ganda dan data tidak valid yang dilaksanakan pada 18 Agustus–4 September 2024. Kegiatan ini melibatkan PPS dan PPK dalam melakukan perbaikan dan pen-yusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Kemudian, penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan pada 5–20 September 2024, dan ditetapkan melalui Rapat Pleno Rekapitulasi pada 20 September 2024. Rapat ini juga melibatkan saran dan masukan dari peserta pleno untuk menjaga akurasi data. Hasil akhir menunjukkan jumlah DPT sebanyak 942.865 pemilih. Jika dibandingkan dengan tahapan sebelumnya, yaitu Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DPHP) sebesar 971.029 jiwa, dan DPS sebanyak 944.304 orang, maka terjadi penurunan sejumlah 1.439 pemilih dari DPS ke DPT. Penurunan ini mencerminkan efektivitas proses verifikasi, seperti pembersihan data ganda, penghapusan data pemilih tidak memenuhi syarat, meninggal, atau pindah domisili. KPU Kabupaten Tuban berkomitmen kuat menghadirkan daftar pemilih yang bersih, akurat, dan mutakhir demi menjamin hak pilih masyarakat secara optimal. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 24.6.



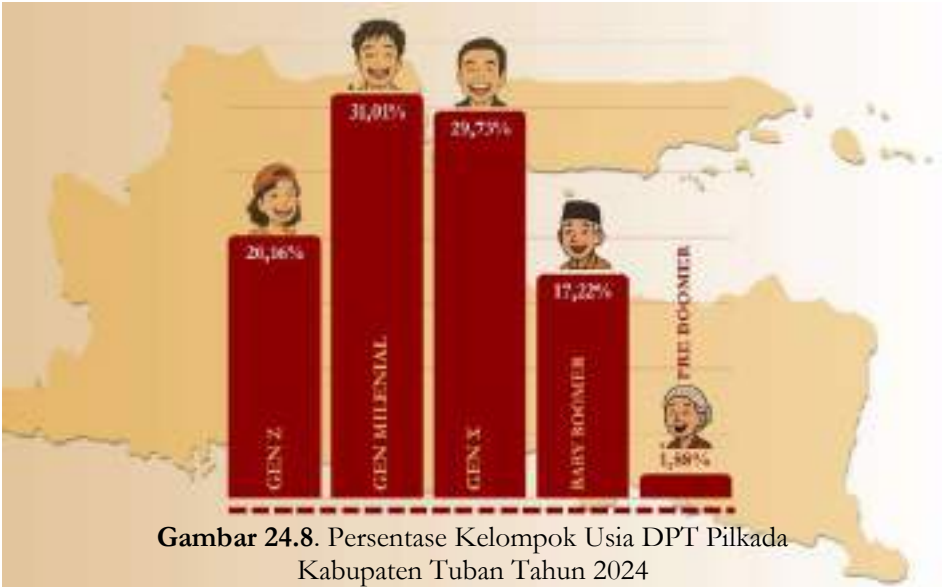
Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2024, jumlah pemilih laki-laki tercatat sebanyak 466.717 orang atau sebesar 49,50% dari total pemilih. Sementara itu, pemilih perempuan berjumlah 476.148 orang atau 50,50%. Dengan demikian, menunjukkan proporsi relatif seimbang antara pemilih laki-laki dan perempuan, dengan sedikit dominasi jumlah pemilih perempuan. Komposisi ini menjadi indikator penting dalam menyusun strategi sosialisasi dan layanan kePilkadaan yang inklusif dan merata.

Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni pemilih pemula dan pemilih non-pemula. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 24.7 berikut.



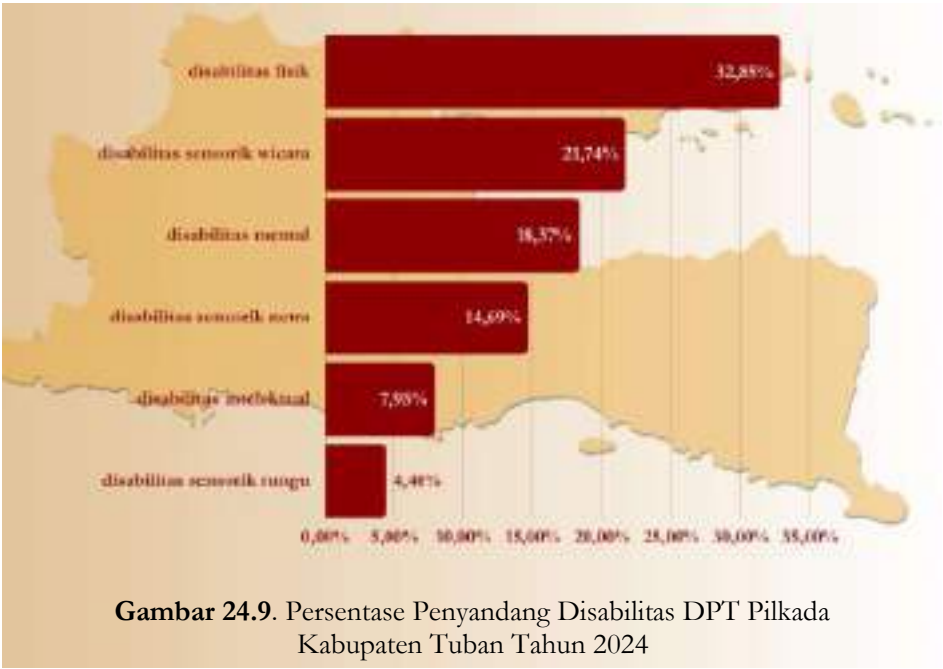
Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tuban Tahun 2024, terdapat status pemilih pemula, dimana pemilih pemula laki-laki sebanyak 6.901 (51,45%) dan pemilih pemula perempuan sebanyak 6.511 (48,55%).

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 24.8.



Sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa pemilih didominasi oleh generasi milenial dan generasi X. Generasi milenial (usia 28–43 tahun) tercatat sebagai kelompok usia terbanyak dengan jumlah 292.370 pemilih atau sebesar 31,01% dari total DPT. Disusul oleh generasi X (usia 44–59 tahun) sebanyak 280.337 pemilih (29,73%) dan generasi Z (usia 17–27 tahun) sebanyak 190.064 pemilih (20,16%). Sementara itu, kelompok usia yang lebih tua seperti *baby boomer* (usia 60–78 tahun) tercatat sebanyak 162.387 pemilih (17,22%) dan *pre-boomer* (usia di atas 79 tahun) sebanyak 17.707 pemilih (1,88%). Komposisi ini mencerminkan bahwa mayoritas pemilih berada pada usia produktif, yang menjadi modal penting dalam mendorong partisipasi pemilih dan merancang strategi sosialisasi yang efektif, khususnya bagi kelompok usia muda yang erat dengan perkembangan teknologi dan media digital.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten Tuban Tahun 2024 disajikan pada gambar 24.9, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2024 berdasarkan penyandang disabilitas mencatat total sebanyak 2.341 pemilih dengan berbagai jenis disabilitas. Mayoritas berasal dari

kelompok disabilitas fisik sebanyak 769 orang (32,85%), diikuti oleh disabilitas sensorik wicara sebanyak 509 orang (21,74%), dan disabilitas mental sebanyak 430 orang (18,37%). Selanjutnya, disabilitas sensorik netra tercatat sebanyak 344 orang (14,69%), disabilitas intelektual sebanyak 186 orang (7,95%), serta disabilitas sensorik rungu sebanyak 103 orang (4,40%). Data ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Tuban memberikan perhatian inklusif terhadap hak politik warga dengan kebutuhan khusus melalui pendataan yang akurat, sebagai dasar perencanaan fasilitasi Pilkada yang ramah disabilitas.

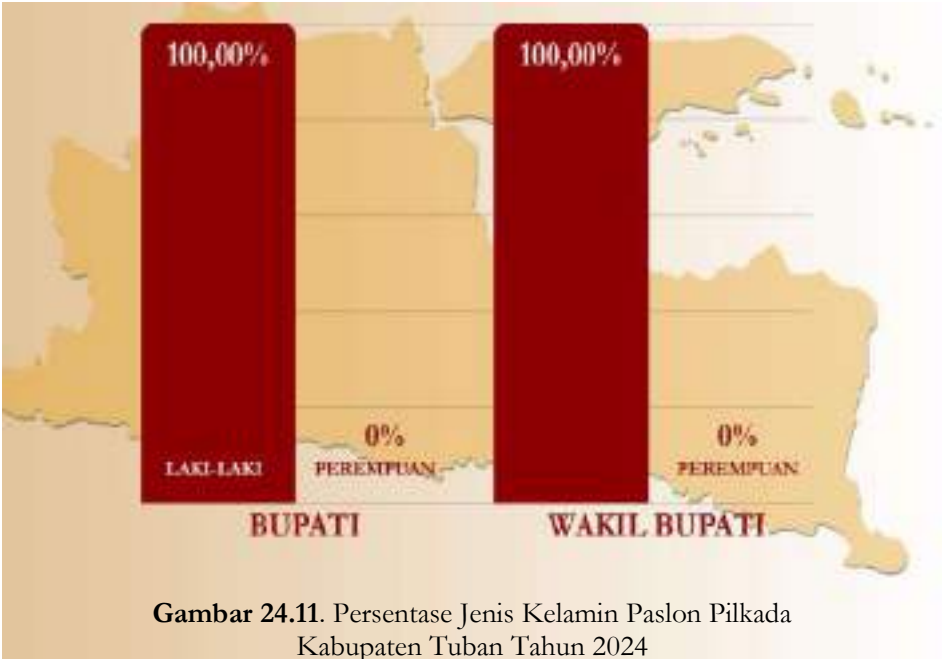
4. Pencalonan

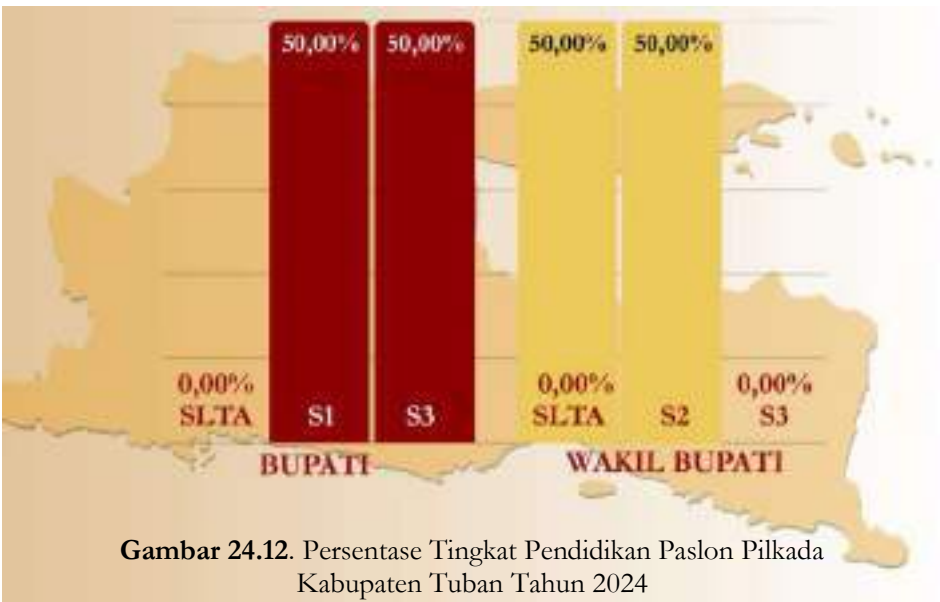
Sebagai langkah awal dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban secara resmi membuka pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Proses ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah. Setelah masa pendaftaran ditutup, tahapan penting selanjutnya adalah rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut pasangan calon, yang dilaksanakan pada 23 September 2024.

Dalam proses pengundian tersebut, pasangan Riyadi – Wafi Abdul Rosyid mendapatkan nomor urut 1, sedangkan pasangan Aditya Halindra Faridzky – Joko Sarwono memperoleh nomor urut 2. Penetapan nomor urut ini menjadi tonggak awal bagi masing-masing pasangan calon dalam menyusun dan menyesuaikan strategi kampanye mereka. Selanjutnya, kedua pasangan calon memasuki masa kampanye yang berlangsung mulai 25 September hingga 23 November 2024. Dalam rentang waktu tersebut, mereka memiliki kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat Tuban melalui berbagai metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Seluruh proses pencalonan ini menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan Pilkada yang demokratis, inklusif, dan transparan menuju hari pemungutan suara yang dijadwalkan pada 27 November 2024. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada gambar 24.10 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.



Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban disajikan pada gambar 24.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban disajikan pada gambar 24.12.





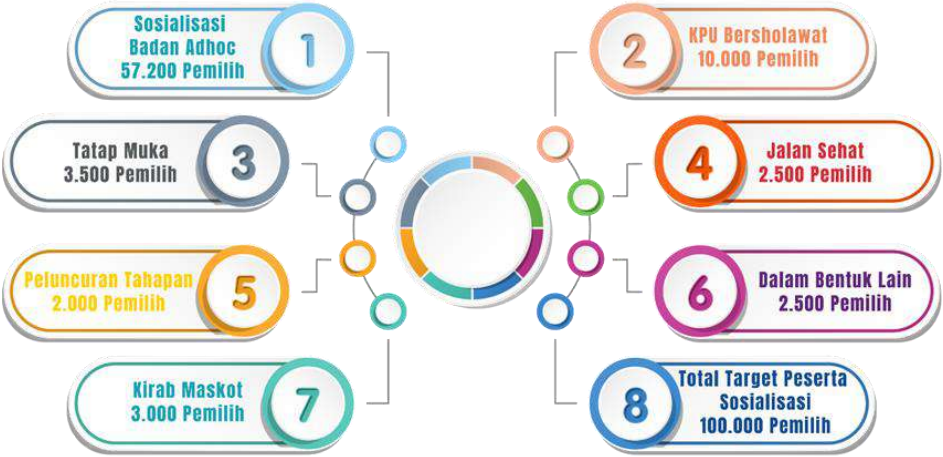
Berdasarkan data demografi, seluruh pasangan calon (paslon) yang berpartisipasi dalam Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2024 terdiri dari empat orang calon, masing-masing dua orang sebagai calon Bupati dan dua orang sebagai calon Wakil Bupati. Dari sisi jenis kelamin, seluruh calon merupakan laki-laki (100,00%), dengan tidak terdapat perempuan sebagai calon pada posisi Bupati maupun Wakil Bupati.

Dari sisi tingkat pendidikan, terdapat keberagaman latar belakang pendidikan di antara para calon. Untuk posisi Bupati, satu orang berlatar belakang pendidikan Sarjana (S1) dan satu orang Pascasarjana (S2), sehingga masing-masing mewakili 50,00%. Sementara pada posisi Wakil Bupati, satu orang berlatar belakang SLTA (50,00%), dan satu orang Sarjana (S1) sebanyak 50,00%, dengan tidak ada yang berpendidikan Pascasarjana. Secara keseluruhan, komposisi pendidikan paslon menunjukkan bahwa 50% berlatar belakang S1, 25% S2, dan 25% SLTA, menggambarkan tingkat pendidikan yang relatif tinggi di antara para kontestan Pilkada.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 24.13, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



**TARGET SOSIALISASI
PEMILIHAN TAHUN 2024 KPU TUBAN**



Gambar 24.14. Target Kegiatan Sosialisasi Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2024

Dalam rangka menyemarakkan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Tuban memperkenalkan maskot resmi Pilkada sebagai simbol penyelenggaraan Pilkada yang ramah, partisipatif, dan dekat dengan masyarakat.



Gambar 24.15. Maskot Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2024

Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024 terinspirasi dari pohon buah khas daerah yang sangat melekat dengan identitas masyarakat Tuban, yaitu pohon lontar atau lebih dikenal dengan siwalan. Tanaman ini merupakan ikon lokal yang mudah dijumpai hampir di setiap sudut wilayah Kabupaten Tuban, sekaligus menjadi bagian penting dari kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

Pohon lontar dipilih sebagai maskot karena memiliki multifungsi dan filosofi yang kuat. Setiap bagiannya memiliki manfaat yang mendalam:

- Daunnya sering dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan dan media tradisional penulisan naskah lontar. Kerajinan dari daun lontar mencerminkan kekayaan budaya lokal, seperti pembuatan kipas, tikar, topi, dan berbagai jenis keranjang.
- Batangnya digunakan sebagai bahan bangunan atau bahan dasar pembuatan perkakas, menunjukkan kekuatan dan ketahanan yang menjadi simbol harapan terhadap penyelenggaraan Pilkada yang kokoh dan terpercaya.
- Karangan bunganya, khususnya tongkol bunga betina, menghasilkan nira yang dapat dimasak menjadi gula merah atau difermentasi menjadi minuman tradisional seperti legen dan tuak, mencerminkan nilai kearifan lokal dan kemandirian ekonomi masyarakat.
- Buah siwalan, dengan tekstur lembut dan rasa menyerupai kolang-kaling atau kelapa muda, menjadi sumber nutrisi alami dan menggambarkan kesegaran serta harapan baru dalam proses demokrasi.

Dengan filosofi yang menyatu antara nilai kultural dan manfaat ekologis, pohon lontar menjadi simbol yang merepresentasikan kekayaan daerah, keberlanjutan, dan kebijaksanaan lokal dalam menyongsong Pilkada 2024. Maskot ini diharapkan dapat membangun kedekatan emosional dengan masyarakat dan memperkuat semangat partisipasi aktif dalam setiap tahapan Pilkada.

Setelah proses pengundian nomor urut pasangan calon, tahapan Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2024 memasuki masa kampanye yang berlangsung selama hampir dua bulan, yakni sejak tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Dalam masa ini, kedua pasangan calon diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat Tuban melalui berbagai media dan metode kampanye. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban telah menetapkan bahwa

seluruh kegiatan kampanye harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Aturan ini mencakup penggunaan alat peraga kampanye (APK), penyelenggaraan pertemuan terbuka dan tertutup, hingga pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban umum, mencegah konflik horizontal, serta menjamin proses demokrasi yang sehat, inklusif, dan berintegritas.



Gambar 24.16. Fasilitas Kampanye oleh KPU Kabupaten Tuban Tahun 2024

Selain itu, sebagai bagian dari fasilitasi KPU juga diselenggarakan tiga kali debat publik antar pasangan calon. Debat ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menilai kualitas dan gagasan para calon pemimpin daerah secara langsung. Melalui debat, publik dapat memahami lebih dalam orientasi kebijakan, prioritas pembangunan, serta kemampuan komunikasi politik masing-masing pasangan calon. Dengan pengawasan ketat dan pendekatan edukatif, kampanye Pilkada 2024 diharapkan tidak hanya menjadi sarana promosi kandidat, tetapi juga menjadi ajang pendidikan politik yang mencerahkan dan mendorong peningkatan partisipasi

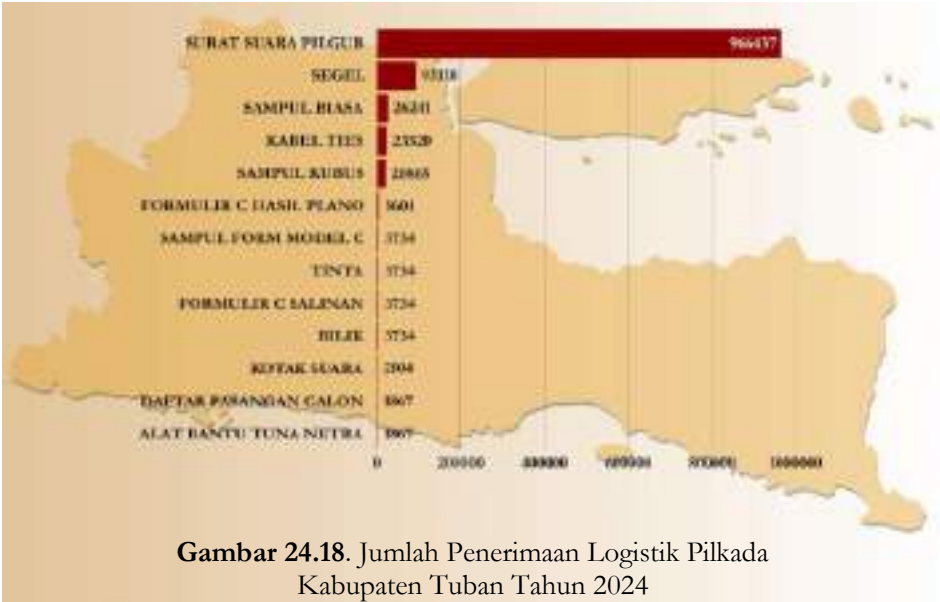
masyarakat dalam menggunakan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab.



Gambar 24.17. Jumlah Media Sosial Kampanye Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2024

6. Logistik

Pengelolaan logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tuban dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi sejak tahap perencanaan hingga distribusi ke tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Metode pengadaan logistik dilakukan melalui E-Katalog, baik secara konsolidasi nasional maupun pengadaan mandiri, setelah sebelumnya diunggah ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima pada Tahun Anggaran 2024. Dalam beberapa kebutuhan logistik tertentu, metode pengadaan langsung juga diterapkan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengadaan. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 24.18.



Distribusi logistik Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2024 dilaksan-akan secara bertahap dan terjadwal, guna menjamin kelancaran, ketepatan waktu, serta keamanan pengiriman ke seluruh wilayah. Proses distribusi dari KPU Kabupaten ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) men-ggunakan armada truk, kemudian dilanjutkan ke 328 Panitia Pemungutan Suara (PPS) menggunakan mobil pickup, dan diteruskan ke 328 TPS menggunakan kendaraan roda dua atau sepeda oleh petugas lokal. Seluruh proses ini melibatkan 389 petugas setting dan packing logistik.

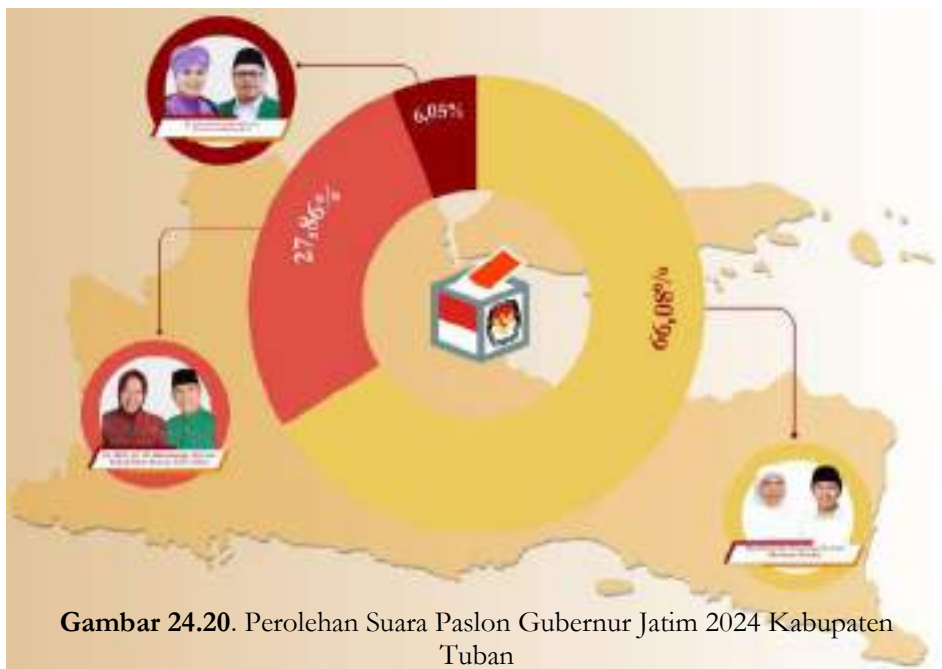
Distribusi logistik dilakukan mulai tanggal 14 November 2024, dimulai dari wilayah Jatirogo, Bancar, Tambakboyo, dan Jenu dengan melibatkan 97 petugas, dan berlanjut setiap hari hingga 20 November 2024, mencakup wilayah Semanding, Tuban, dan Palang dengan 68 petugas. Setiap tahapan distribusi mendapat pengawalan ketat dari aparat Polri, dan khusus untuk distribusi kotak suara dari PPS ke TPS pada H-1 pemungutan suara, pengamanan diperkuat oleh Linmas guna memastikan keamanan dan integritas logistik Pilkada hingga hari pemungutan suara tiba.



Gambar 24.19. Moda Transportasi Logistik Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2024

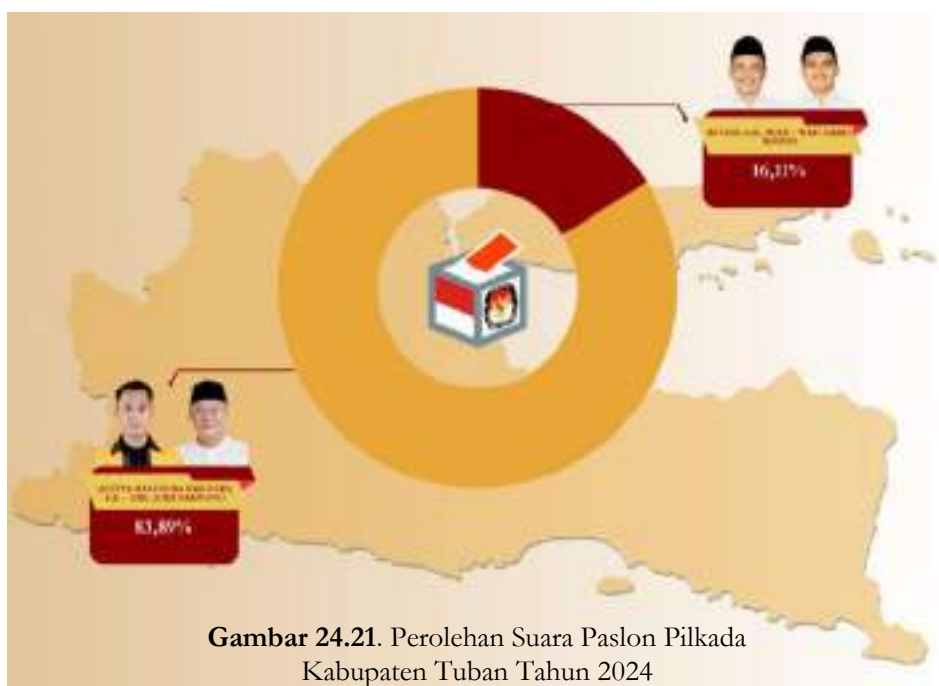
7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Tuban disajikan pada gambar 24.20.



Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Tuban Tahun 2024, pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestjanto Dardak meraih perolehan suara terbanyak dengan jumlah 386.812 suara atau sebesar 66,08% dari total suara sah. Di posisi kedua, pasangan Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) memperoleh 163.095 suara (27,86%), sementara pasangan Luluk Nur Ihamidah – Lukmanul Hakim memperoleh 35.439 suara atau 6,05%. Total suara sah yang diperoleh di Kabupaten Tuban mencapai 585.346 suara, mencerminkan partisipasi pemilih yang signifikan dalam menentukan arah kepemimpinan Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 24.21.



Hasil rekapitulasi suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2024 menunjukkan kemenangan telak diraih oleh pasangan Aditya Halindra Faridzky, S.E. – Drs. Joko Sarwono yang memperoleh dukungan sebanyak 528.942 suara atau 83,89% dari total suara sah. Sementara itu, pasangan Riyadi, S.H., M.KP. – Wafi Abdul Rosyid memperoleh 101.562 suara atau 16,11%. Dari total 630.504 suara yang masuk, hasil ini mencerminkan dominasi kuat pasangan Aditya Halindra Faridzky, S.E. – Drs. Joko Sarwono dalam meraih kepercayaan publik untuk memimpin Kabupaten Tuban lima tahun ke depan.

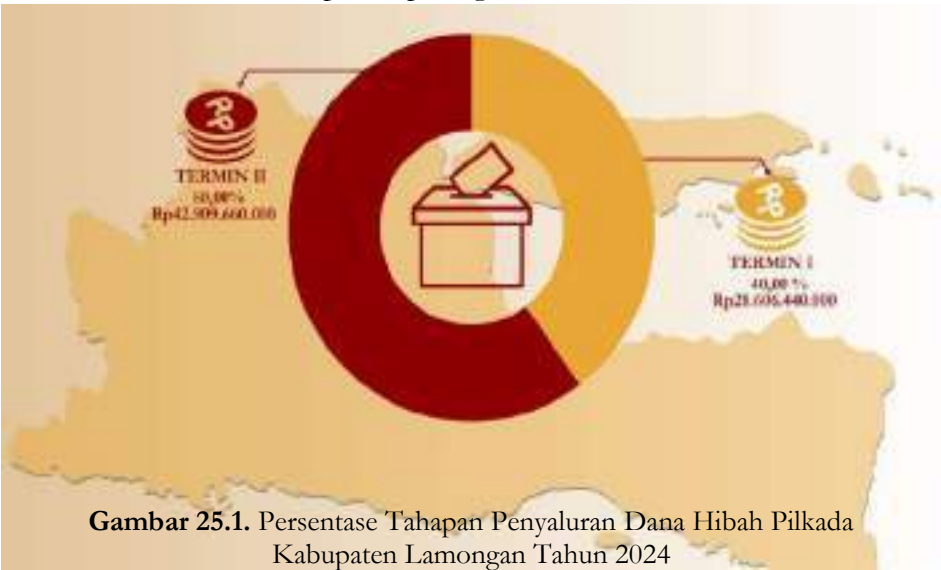
BAGIAN 25

KABUPATEN LAMONGAN

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 didanai melalui Anggaran Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dana hibah ini merupakan hasil dari proses rapat koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyusunan anggaran pemilihan.

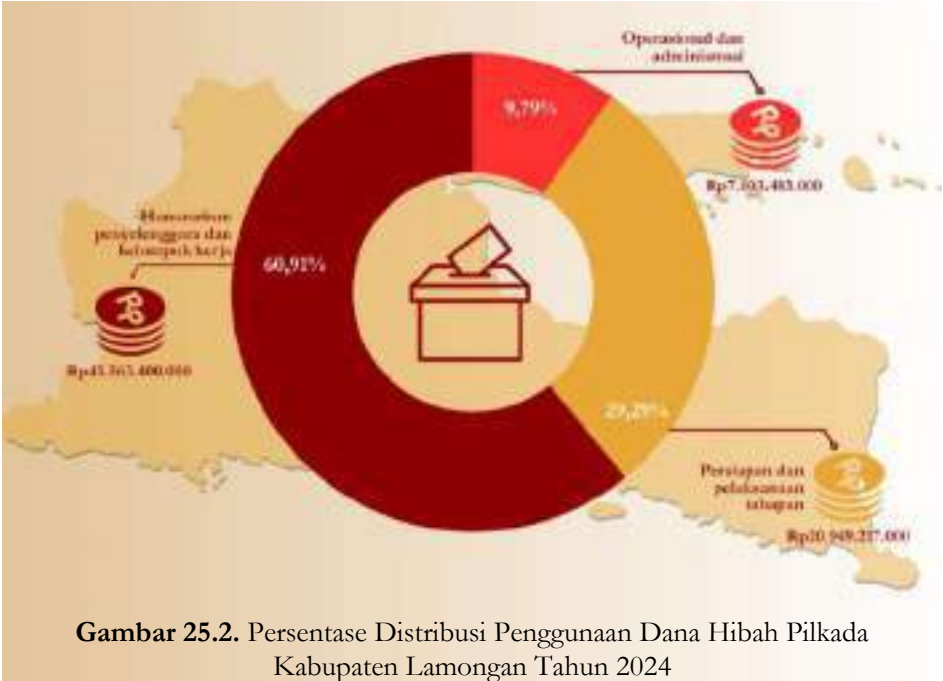
Sebagai hasil dari koordinasi tersebut, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, bertempat di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan, telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dan KPU Kabupaten Lamongan. Penandatanganan dituangkan dalam dokumen resmi dengan nomor: 188/553/413.207/2023 dari Pemerintah Daerah dan nomor: 364/KU.07-NK/3524/2023 dari KPU Kabupaten Lamongan. Total nilai anggaran hibah yang disepakati sebesar Rp71.516.100.000. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 25.1 berikut.



Gambar 25.1. Persentase Tahapan Penyaluran Dana Hibah Pilkada Kabupaten Lamongan Tahun 2024

Distribusi dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 dicairkan dalam dua termin. Termin pertama sebesar Rp28.606.440.000 atau 40% dari total anggaran, sedangkan termin kedua sebesar Rp42.909.660.000 atau 60%. Skema pencairan dua tahap ini dirancang untuk mendukung kebutuhan operasional penyelenggaraan Pilkada secara berkelanjutan dan tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 25.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.

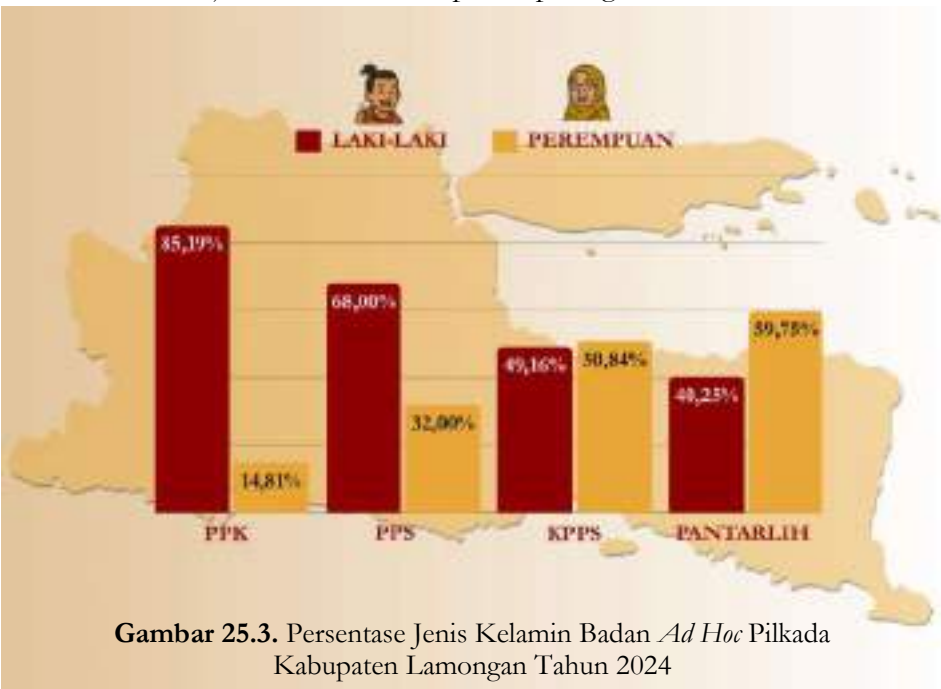


Komponen penggunaan dana hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 terbagi ke dalam tiga kategori utama. Alokasi terbesar diperuntukkan bagi Honorarium sebesar Rp43.563.400.000 atau 60,91% dari total anggaran. Selanjutnya, untuk Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan dialokasikan dana sebesar Rp20.949.217.000 atau 29,29%, sedangkan untuk Operasional dan Administrasi Perkantoran dianggarkan sebesar Rp7.003.483.000 atau 9,79%. Komposisi ini menunjukkan bahwa prioritas utama pendanaan difokuskan pada pemberian honorarium badan *ad hoc* serta kelancaran tahapan teknis pelaksanaan pemilihan.

2. **Badan *Ad Hoc***

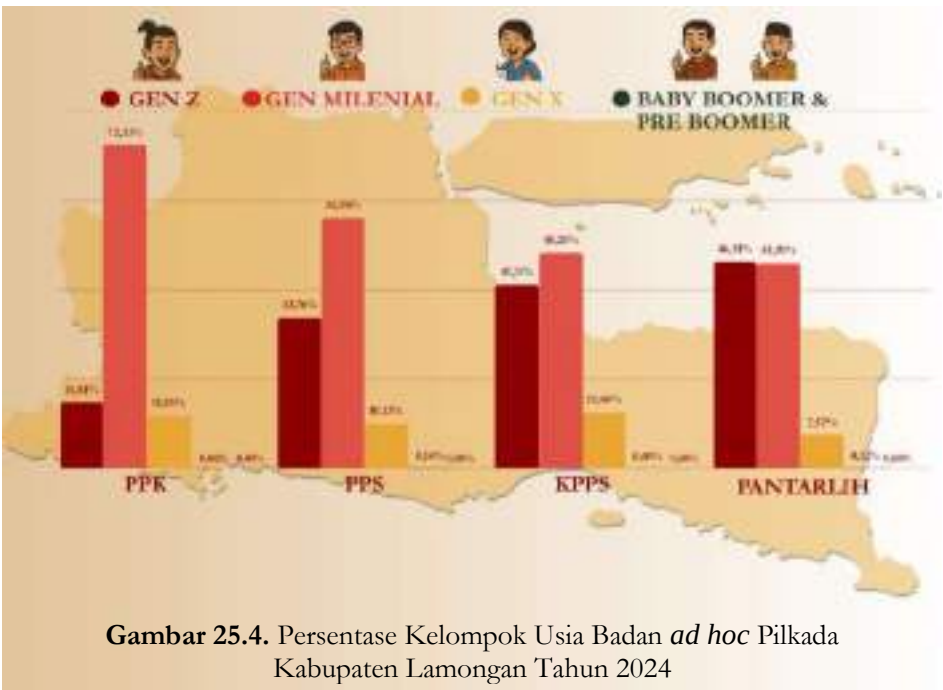
Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan membentuk badan *ad hoc* yang tersebar mulai dari tingkat kecamatan, desa, hingga tempat pemungutan suara (TPS). Pembentukan ini dilakukan secara berjenjang melalui proses seleksi terbuka yang transparan serta berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam tahapan pemilihan.

Pada tanggal 16 Mei 2024, sebanyak 135 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tersebar di 27 kecamatan secara resmi dilantik. Pelantikan dilaksanakan di Aula Lantai 2 Rumah Makan Aqilla Lamongan. Sementara itu, Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berjumlah 1.422 orang tersebar di 474 desa dan dilantik secara serentak pada 26 Mei 2024 di Gedung Sasana Budaya dan Olahraga Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan. KPU Kabupaten Lamongan juga melantik 4.027 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada 24 Juni 2024, yang tersebar di 2.067 TPS. Pantarlih bertugas selama satu bulan penuh untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih di wilayahnya masing-masing. Kemudian, pada 7 November 2024, dilaksanakan pelantikan sebanyak 14.511 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bertugas di 2.073 TPS se-Kabupaten Lamongan. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 25.3.



Sebaran demografi badan *ad hoc* KPU Kabupaten Lamongan Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan keterlibatan perempuan yang cukup signifikan, terutama pada tingkat KPPS dan Pantarlih. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dari total 135 anggota, sebanyak 115 orang atau 85,19% adalah laki-laki, dan 20 orang atau 14,81% adalah perempuan. Di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), dari total 1.422 anggota, 967 orang (68,00%) adalah laki-laki dan 455 orang (32,00%) perempuan. Pada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), proporsi lebih seimbang, dengan 7.134 laki-laki (49,16%) dan 7.377 perempuan (50,84%) dari total 14.511 anggota. Sementara itu, pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), partisipasi perempuan lebih dominan, yaitu 2.406 orang (59,75%) dibandingkan 1.621 laki-laki (40,25%) dari total 4.027 anggota. Data ini mencerminkan semakin me-ningkatnya peran perempuan dalam kePilkadaan, khususnya di tingkat akar rumput.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Lamongan Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 25.4 berikut.

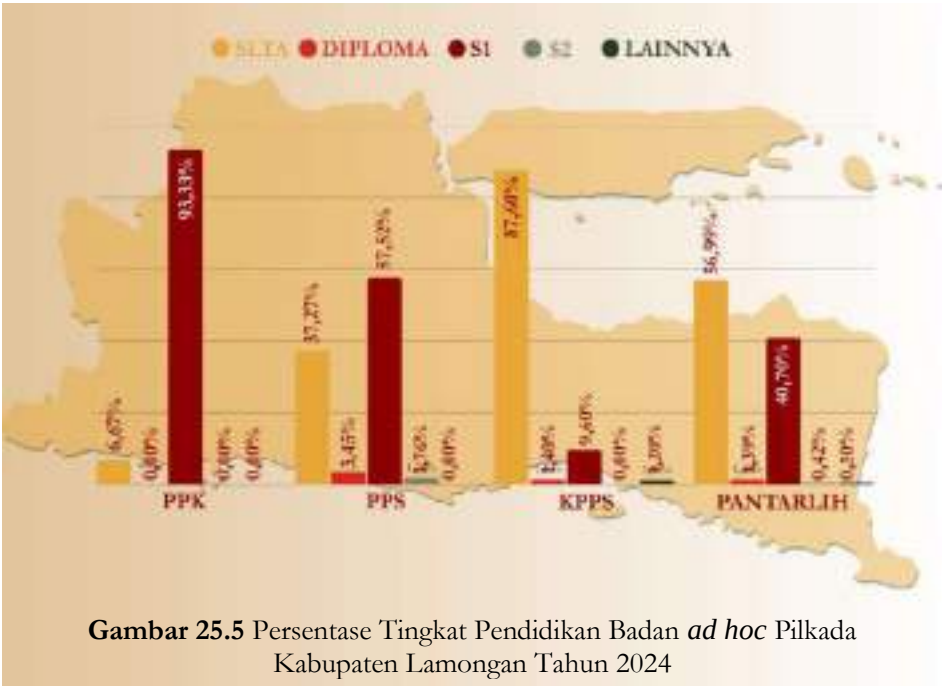


Gambar 25.4. Persentase Kelompok Usia Badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Lamongan Tahun 2024

Sebaran demografi badan *ad hoc* KPU Kabupaten Lamongan Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi generasi muda, khususnya Gen Z dan Milenial. Pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dari 135

anggota, 99 orang (73,33%) berasal dari kelompok usia 28–43 tahun (Gen Milenial), disusul 20 orang (14,81%) dari kelompok usia 17–27 tahun (Gen Z), dan 16 orang (11,85%) dari Gen X. Untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berjumlah 1.422 orang, mayoritas juga berasal dari Gen Milenial sebanyak 796 orang (55,98%), diikuti Gen Z sebanyak 480 orang (33,76%), dan Gen X sebanyak 144 orang (10,13%). Sementara itu, pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dari total 14.511 anggota, 6.713 orang (46,26%) merupakan Gen Milenial, 5.966 orang (41,11%) Gen Z, dan 1.828 orang (12,60%) Gen X. Pada Pantarlih yang berjumlah 4.027 orang, dominasi juga ditunjukkan oleh Gen Z sebanyak 1.865 orang (46,31%) dan Gen Milenial sebanyak 1.852 orang (45,99%), sedangkan sisanya 305 orang (7,57%) berasal dari Gen X. Data ini menunjukkan bahwa pelibatan generasi muda dalam badan *ad hoc* Pilkada 2024 di Kabupaten Lamongan sangat mencerminkan semangat regenerasi dan keterlibatan aktif kelompok usia produktif dalam penyelenggaraan Pilkada.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *Ad Hoc* pada Pilkada Kabupaten Lamongan Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 25.5.



Sebaran demografi badan *ad hoc* KPU Kabupaten Lamongan Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas

anggota berasal dari latar belakang pendidikan menengah atas (SLTA), khususnya pada posisi KPPS dan Pantarlih. Dari 135 anggota PPK, 126 orang (93,33%) berpendidikan Sarjana (S1), sementara hanya 9 orang (6,67%) lulusan SLTA. Untuk anggota PPS yang berjumlah 1.422 orang, komposisinya lebih beragam, dengan dominasi lulusan S1 sebanyak 818 orang (57,52%), diikuti SLTA sebanyak 530 orang (37,27%), serta sisanya lulusan Diploma, S2, dan lainnya. Pada badan *ad hoc* KPPS yang melibatkan 14.511 anggota, mayoritas mutlak merupakan lulusan SLTA sebanyak 12.712 orang (87,60%), sementara lulusan S1 hanya 1.393 orang (9,60%), dan lainnya Diploma (1,40%), S2 (0,20%), serta kategori pendidikan lainnya (1,20%). Adapun pada Pantarlih yang berjumlah 4.027 orang, SLTA juga menjadi latar belakang pendidikan terbanyak dengan 2.295 orang (56,99%), disusul lulusan S1 sebanyak 1.639 orang (40,70%). Sisanya berasal dari lulusan Diploma, S2, dan kategori lainnya. Data ini mencerminkan bahwa perekrutan badan *ad hoc* mengakomodasi berbagai jenjang pendidikan, dengan kecenderungan dominan pada tingkat SLTA terutama untuk posisi teknis lapangan seperti KPPS dan Pantarlih.

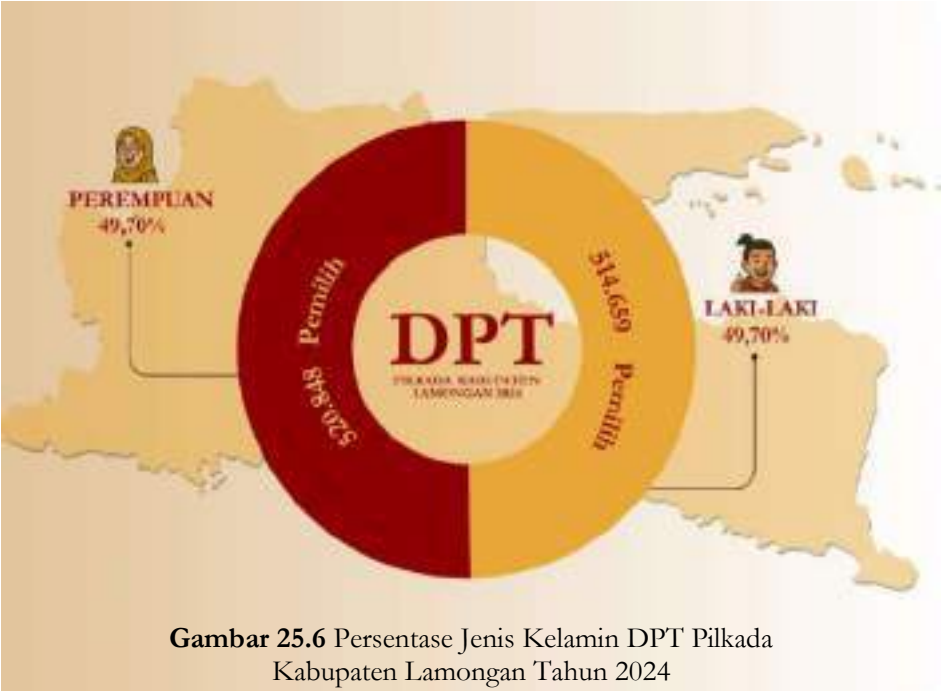
Dalam pelaksanaan rekrutmen Badan *ad hoc* Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Lamongan, belum terdapat anggota yang berasal dari kelompok penyandang disabilitas pada tingkat PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih. Sebagai perbaikan dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Lamongan ke depan, keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen Badan *ad hoc* perlu mendapatkan perhatian lebih, guna mendorong inklusivitas dan representasi yang lebih setara dalam penyelenggaraan Pilkada.

3. Pemutakhiran Data

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan melaksanakan tahapan penting dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 melalui proses pemutakhiran data pemilih. Setelah melakukan pencocokan dan penelitian, KPU menyusun Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 20 September 2024. Penetapan ini dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Lamongan Nomor 145/PL.01.2-BA/3524/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Lamongan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024.

Berdasarkan data, jumlah awal pemilih yang tercatat dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DPHP) adalah sebanyak 1.056.229 jiwa.

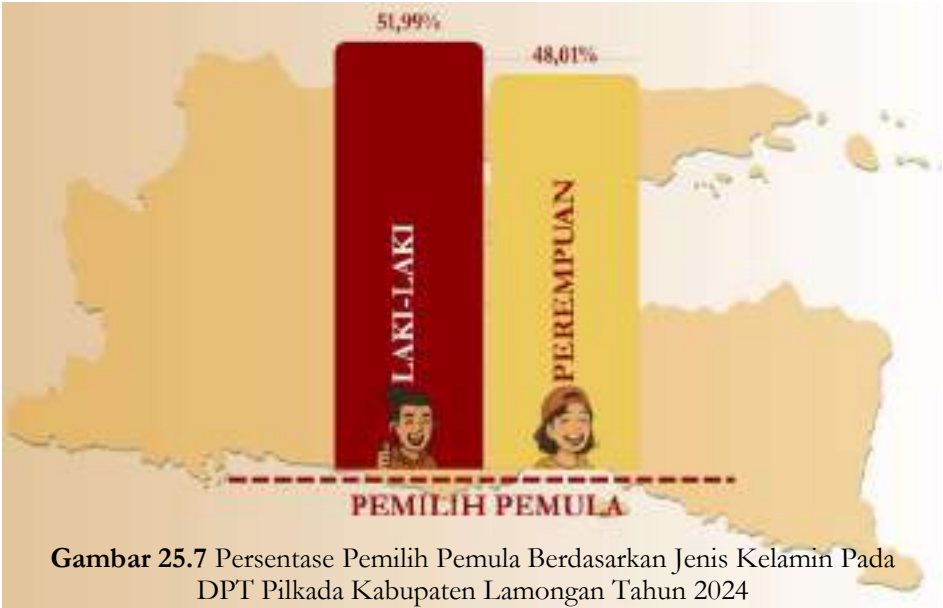
Setelah dilakukan penyusunan DPS, jumlahnya berkurang menjadi 1.038.060 jiwa, dan hasil final yang tercatat dalam DPT adalah 1.035.507 jiwa. Penurunan data dari tahap DPS ke DPT sebanyak 2.553 jiwa me-nunjukkan adanya upaya verifikasi dan validasi yang cermat dari KPU untuk memastikan bahwa hanya pemilih yang memenuhi syarat yang terdaftar. Proses ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Lamongan dalam menghadirkan daftar pemilih yang bersih, mutakhir, dan akurat sebagai dasar pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan berkualitas. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 25.6.



Berdasarkan sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 menurut jenis kelamin, tercatat bahwa jumlah pemilih laki-laki sebanyak 514.659 jiwa atau 49,70% dari total DPT. Sementara itu, jumlah pemilih perempuan mencapai 520.848 jiwa atau 50,30%. Dengan total keseluruhan sebanyak 1.035.507 pemilih, data ini menunjukkan komposisi yang relatif seimbang antara pemilih laki-laki dan perempuan, dengan proporsi perempuan sedikit lebih banyak. Data ini mencerminkan keterwakilan gender yang hampir setara dalam partisipasi pemilih di Kabupaten Lamongan.

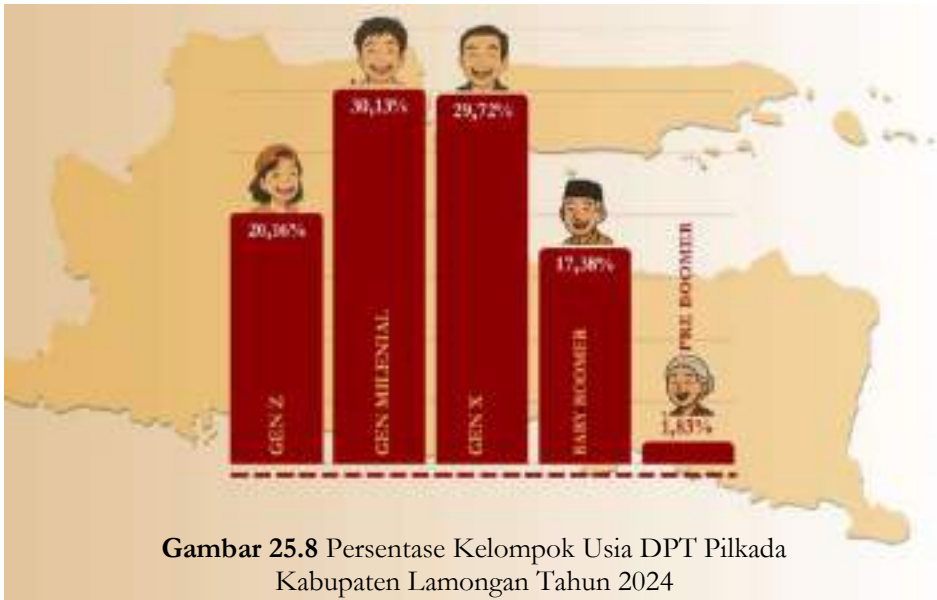
Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni pemilih pemula dan

pemilih non-pemula. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 25.7. berikut.



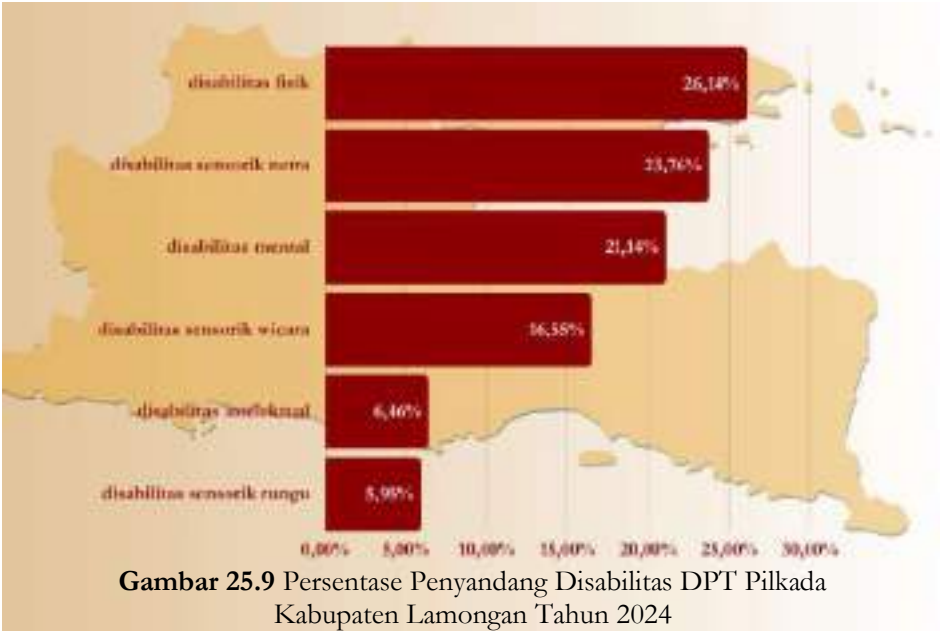
Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lamongan Tahun 2024, terdapat status pemilih pemula, dimana pemilih pemula laki-laki sebanyak 7.835 (51,99%) dan pemilih pemula perempuan sebanyak 7.235 (48,01%). Sementara itu, pemilih non-pemula mendominasi dengan total 1.020.437 jiwa, terdiri dari 506.824 laki-laki (49,67%) dan 513.613 perempuan (50,33%). Data ini mencerminkan bahwa mayoritas pemilih merupakan kelompok non-pemula, namun keterlibatan generasi muda sebagai pemilih pemula juga cukup signifikan.

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada Gambar 25.8.



Berdasarkan sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lamongan Tahun 2024 menurut kelompok usia, mayoritas pemilih berasal dari Generasi Milenial (usia 28–43 tahun) sebanyak 311.951 jiwa atau 30,13% dari total pemilih. Disusul oleh Generasi X (usia 44–59 tahun) sebanyak 307.718 jiwa (29,72%), dan Generasi Z (usia 17–27 tahun) sebanyak 216.913 jiwa (20,95%). Sementara itu, kelompok usia *Baby Boomer* (60–78 tahun) mencakup 179.959 jiwa (17,38%) dan *Pre-Boomer* (di atas 79 tahun) berjumlah 18.966 jiwa (1,83%). Data ini menunjukkan bahwa pemilih usia produktif (Gen Z dan Milenial) mendominasi struktur pemilih, yang menjadi potensi besar dalam mendorong partisipasi Pilkada di kalangan muda.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten Lamongan Tahun 2024 disajikan pada gambar 25.9, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lamongan Tahun 2024 berdasarkan kategori penyandang disabilitas menunjukkan bahwa dari total 4.120 pemilih disabilitas, kelompok terbesar berasal dari disabilitas fisik sebanyak 1.077 orang atau 26,14%. Disusul oleh disabilitas sensorik netra sebanyak 979 orang (23,76%), disabilitas mental sebanyak 871 orang (21,14%), dan disabilitas sensorik wicara sebanyak 682 orang (16,55%). Sementara itu, disabilitas intelektual mencakup 266 orang (6,46%), dan disabilitas sensorik rungu sebanyak 245 orang (5,95%). Data ini mencerminkan upaya KPU Kabupaten Lamongan dalam memastikan inklusivitas dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat dalam proses demokrasi, termasuk pemilih dengan kebutuhan khusus.

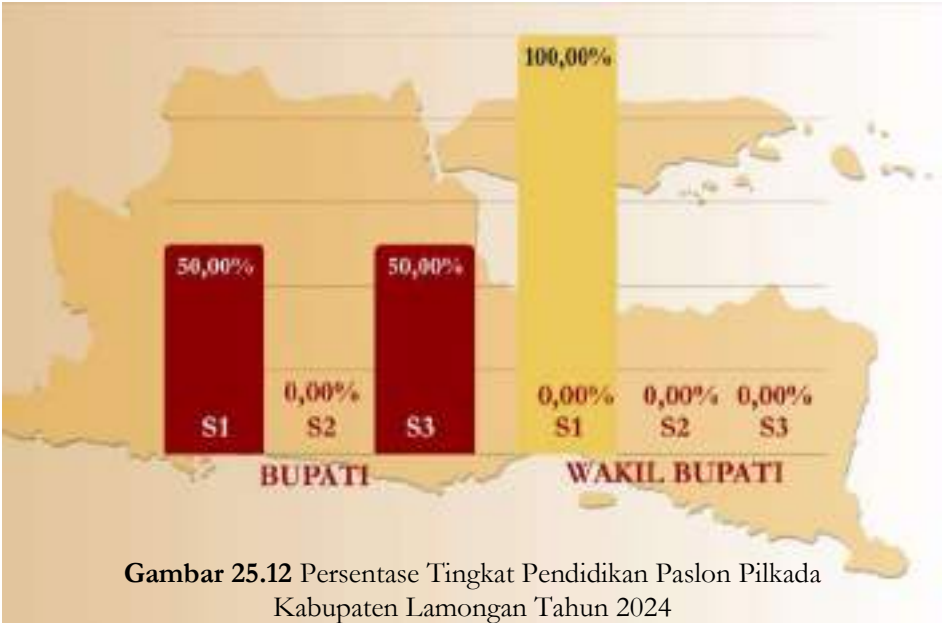
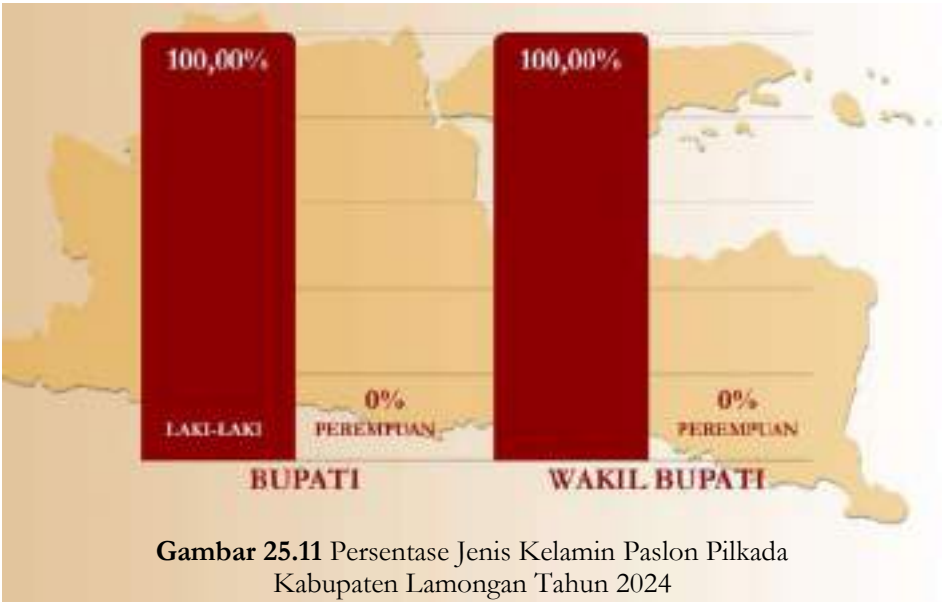
4. Pencalonan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan secara resmi membuka pendaftaran bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 mulai tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Proses pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam regulasi pemilihan kepala daerah yang berlaku. Selama periode pendaftaran berlangsung, KPU Kabupaten Lamongan menerima berkas pencalonan dari dua pasangan calon. Setelah melalui proses verifikasi administrasi dan faktual sesuai prosedur, KPU Kabupaten Lamongan

menetapkan dua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan sebagai peserta Pilkada 2024. Penetapan ini telah dituangkan secara resmi dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 2023 Tahun 2024. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada gambar 25.10. sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.



Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan disajikan pada gambar 25.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan disajikan pada gambar 25.12.



Dari aspek jenis kelamin, seluruh pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lamongan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 didominasi oleh laki-laki. Tercatat sebanyak 4 orang kandidat terdiri atas 2 calon Bupati dan 2 calon Wakil Bupati, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki (100%), sedangkan tidak ada kandidat perempuan (0%) yang mencalonkan diri pada Pilkada Kabupaten Lamongan Tahun 2024.

Dari sisi tingkat pendidikan, pasangan calon menunjukkan latar belakang akademik yang cukup baik. Untuk posisi Bupati, terdapat 1 orang berpendidikan S1 (50%) dan 1 orang lainnya bergelar S3 (50%). Sementara itu, kedua calon Wakil Bupati tercatat seluruhnya memiliki pendidikan terakhir S1 (100%). Dengan demikian, secara keseluruhan, dari 4 orang pasangan calon, 3 orang (75%) berpendidikan S1 dan 1 orang (25%) telah menempuh pendidikan hingga jenjang doktoral (S3), menunjukkan bahwa para kandidat memiliki kapasitas akademik yang relatif tinggi dalam memimpin pemerintahan daerah.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada Gambar 25.13, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.

Abdul Ghofor, S.T. – Finasya Sholah, S.T.

VISI
Mewujudkan Asah Perubahan Lamongan Yang Lebih Maju, Makmur dan Bermartabat

MISI

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka terdapat partisipasi masyarakat dengan berlandaskan ahlulakal karimah
2. Mewujudkan infrastruktur yang adil dan merata dan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah dan mengurangi kemiskinan antar wilayah
3. Mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Lamongan

Memilahkan insan Lamongan yang Unggul, Cerdas, Mandiri, Sehat dan Bermartabat

Dr. Yuhonur Kienri, M.B.A., M.E.K. – Didiham Akbar Alotua, S.T.

VISI
Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan

MISI

1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif melalui optimalisasi potensi unggul daerah
2. Mengoptimalkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak serta adaptif terhadap perubahan zaman
3. Meningkatkan kemampuan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan
4. Memerint harmonisasi sosial di tengah kehidupan masyarakat yang religius, bertadara dan partisipatif dalam pembangunan

Pemcepatan reformasi birokrasi berdampak melalui digitalisasi manajemen pemerintahan yang akuntabel dan birokrasi yang responsif

Gambar 25.13 Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kabupaten Lamongan Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dan memperluas jangkauan informasi terkait tahapan serta teknis Pemilihan Serentak Tahun 2024,

KPU Kabupaten Lamongan menerapkan berbagai metode sosialisasi yang strategis dan adaptif terhadap kondisi masyarakat.

Tabel 25.1. Target Kegiatan Sosialisasi Pilkada
Kabupaten Lamongan Tahun 2024

NO	METODE	BENTUK KEGIATAN	TARGET/SASARAN
1.	Tatap Muka	- Rapat Koordinasi - Sosialisasi PKPU terbaru - Sosialisasi Tahapan Pilkada - Sosialisasi kepada pemilih pemula, penyandang disabilitas, ormas dan berbagai elemen masyarakat lainnya - Bimbingan Teknis	Badan <i>ad hoc</i> KPU, organisasi masyarakat, pemilih usia 17 tahun dan berbagai elemen masyarakat lainnya
2.	Penyuluhan	- Bimtek pada TPS Lokasi Khusus	Badan <i>ad hoc</i> yang berada di Lokasi Khusus
3.	Iklan	Pemasangan iklan pada media masa, media cetak dan radio	Seluruh masyarakat
4.	Video	Live streaming melalui podcast KPU Lamongan	Seluruh masyarakat
5.	Berita	Berupa hasil produk hukum KPU Lamongan yang sudah diunggah ke Website	Seluruh masyarakat
6.	Penyebaran Brosur	Penyebaran brosur ajakan memilih dilakukan pada rangkaian Kirab Pilkada. Brosur dibagikan kepada masyarakat yang melintas di jalan-jalan yang sudah ditentukan sebagai lokasi yang strategis.	Seluruh masyarakat

Dalam rangkaian pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan, keterlibatan media massa menjadi elemen penting, khususnya dalam kegiatan sosialisasi. Peran media diarahkan untuk turut

aktif dalam menyampaikan perkembangan informasi tahapan Pilkada kepada masyarakat. Tercatat sebanyak 9 media lokal yang berperan aktif dalam mendukung penyebaran informasi dari KPU kepada publik, yaitu Surabaya Pagi, Bhirawa, Harian Duta, Surya, Memorandum, Radar Lamongan, Koran Memo, Harian Bangsa, dan Pojok Kiri.

Untuk menyemarakkan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Lamongan memperkenalkan maskot resmi Pilkada sebagai simbol penyelenggaraan Pilkada yang ramah, partisipatif, dan dekat dengan masyarakat.



Gambar 25.14 Maskot Pilkada Kabupaten Lamongan Tahun 2024

Desain maskot Pilkada Kabupaten Lamongan Tahun 2024 terinspirasi dari bentuk gapura paduraksa yang dipadukan dengan unsur busana khas daerah Lamongan. Maskot tersebut dinamai SI DURA, yang merupakan akronim dari "*Demokrasi untuk Rakyat*", sekaligus merujuk pada kata "Paduraksa". Kehadiran SI DURA diharapkan menjadi simbol yang menarik dan menginspirasi antusiasme masyarakat Lamongan dalam menyambut pelaksanaan Pilkada serta mendorong partisipasi aktif dalam menggunakan hak pilih pada 27 November 2024 mendatang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kampanye yang adil, transparan, dan merata bagi seluruh peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan telah memfasilitasi berbagai bentuk kampanye sesuai ketentuan teknis yang berlaku. Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis dan berita acara persetujuan KPU

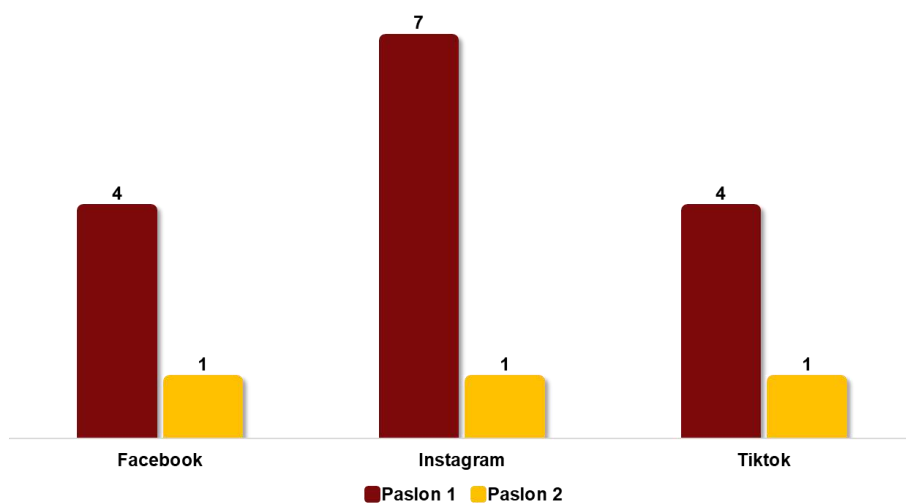
Lamongan. Setiap pasangan calon, yakni nomor urut 01 dan 02, memperoleh fasilitas pencetakan APK sesuai jumlah dan spesifikasi yang telah ditetapkan. KPU juga melakukan pemasangan APK di titik-titik lokasi yang ditentukan serta memastikan pemeliharaan dan penertiban APK berjalan tertib sesuai regulasi. Ketentuan teknis pelaksanaan ini merujuk pada Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 2032 Tahun 2024, yang juga mengatur perubahan jadwal serta spesifikasi teknis APK.

Fasilitasi Bahan Kampanye (BK) juga diberikan kepada masing-masing pasangan calon berdasarkan desain yang telah disetujui oleh KPU. Pencetakan BK dilakukan dengan spesifikasi yang telah ditentukan untuk menjamin keadilan dan pemerataan dalam proses kampanye. Iklan Kampanye menjadi bagian penting dari fasilitasi KPU Lamongan. Setiap pasangan calon mendapatkan dukungan dalam bentuk iklan cetak di media massa, video kampanye, dan rekaman suara yang telah melalui proses persetujuan desain oleh KPU. Upaya ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat pemilih.

Selain itu, Debat Publik diselenggarakan sebanyak tiga kali selama masa kampanye sebagai wadah resmi bagi pasangan calon dalam menyampaikan visi, misi, dan program kerja secara langsung kepada publik. Debat dilaksanakan dengan melibatkan moderator independen dan panelis ahli, serta disiarkan melalui media massa untuk memastikan akses informasi yang luas dan akuntabel bagi pemilih.

Tabel 25.2. Kegiatan Debat Publik Pilkada
Kabupaten Lamongan Tahun 2024

URAIAN	TANGGAL KEGIATAN	Tempat Pelaksanaan	TEMA
DEBAT KESATU	24 Oktober 2024	Studio JTV Surabaya	Strategi Menuju Jalan Berekah Dalam Bangsa Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan
DEBAT KEDUA	07 November 2024	Hotel Harris Surabaya	Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif, Inklusif, dan Berkeadilan dalam Upaya Menyempurnakan Pemerintahan Daerah
DEBAT KETIGA	21 November 2024	Consentration Hall Arief Rahman Hakim, Surabaya	Integritas Pembangunan Daerah Dalam Bangsa Menggerakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan



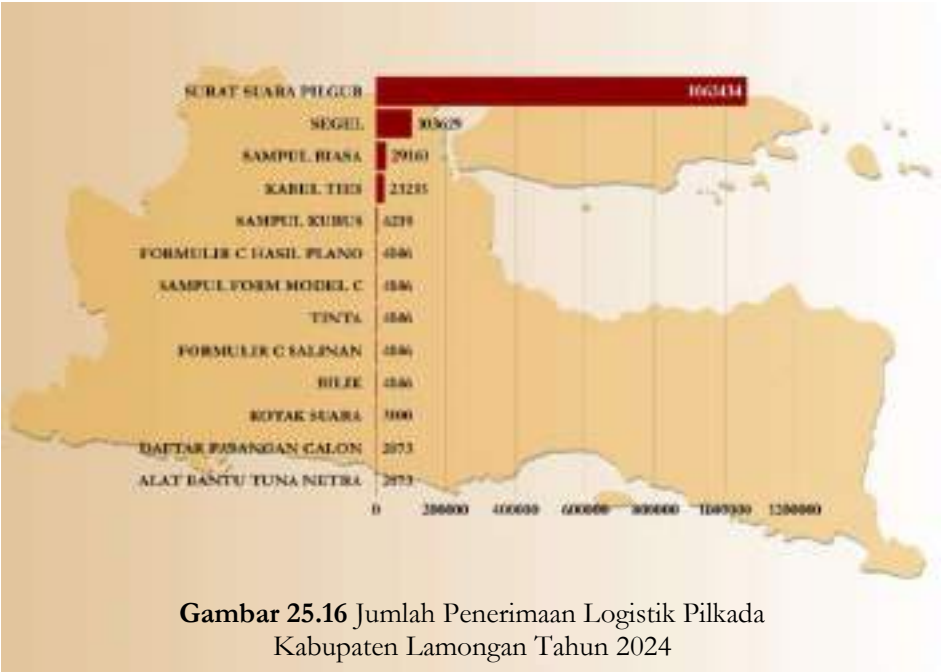
Gambar 25.15 Jumlah Media Sosial Kampanye Pilkada Kabupaten Lamongan Tahun 2024

Dalam era digital, KPU Lamongan juga mencatat dan memfasilitasi penggunaan Platform Media Sosial sebagai sarana kampanye daring. Masing-masing pasangan calon mendaftarkan akun resmi mereka agar pengawasan dan transparansi kampanye daring tetap terjaga. Secara keseluruhan, fasilitasi kampanye yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lamongan bertujuan untuk menciptakan ruang kampanye yang setara, informatif, dan tertib demi terwujudnya Pilkada yang demokratis dan berintegritas.

6. Logistik

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan melalui dua metode, yaitu swakelola dan/atau penyedia. Seluruh proses pengadaan dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan pemerintah yang mencakup efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, daya saing, keadilan, akuntabilitas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Pelaksanaan pengadaan logistik disusun dan dijalankan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan dengan pembagian klasifikasi berdasarkan jenis kebutuhan logistik, metode pengadaan, serta tahapan dan waktu pelaksanaan. Metode yang digunakan telah disesuaikan dengan karakteristik barang dan kebutuhan teknis lapangan, guna memastikan

ketersediaan logistik tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 25.16.



Distribusi logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 berjalan dengan lancar karena didukung oleh kondisi geografis Kabupaten Lamongan yang berupa dataran rendah dan memiliki aksesibilitas yang baik. Tidak terdapat daerah dengan medan sulit, sehingga moda transportasi darat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjangkau seluruh titik distribusi hingga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

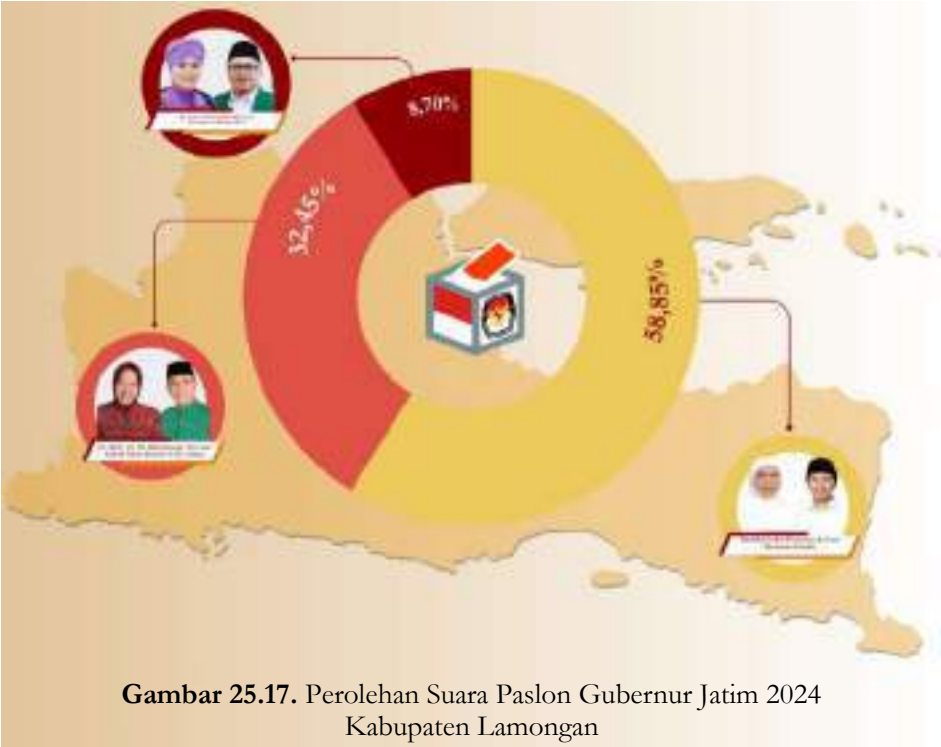
Distribusi logistik dilakukan secara bertahap dari Gudang Logistik KPU Kabupaten Lamongan menuju Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dilanjutkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan terakhir ke TPS. Untuk mendukung kelancaran distribusi ini, digunakan berbagai moda transportasi yang terdiri dari 25 unit mobil truk untuk pengiriman ke PPK, 80 unit mobil pickup untuk PPS, dan 116 unit pickup yang digunakan untuk mendistribusikan logistik dari PPS ke TPS.

Selain moda transportasi, KPU Kabupaten Lamongan juga melibatkan tenaga kerja khusus untuk proses setting dan packing logistik. Tercatat sebanyak 38 orang tenaga kerja, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki, bertugas dalam proses pengemasan logistik agar pengiriman dapat dilakukan dengan aman dan tepat waktu. Dengan perencanaan yang baik, dukungan infrastruktur, serta koordinasi lintas tingkatan penyelenggara, proses

distribusi logistik di Kabupaten Lamongan dapat berlangsung secara efisien dan tanpa hambatan berarti.

7. Hasil Pilkada Serentak

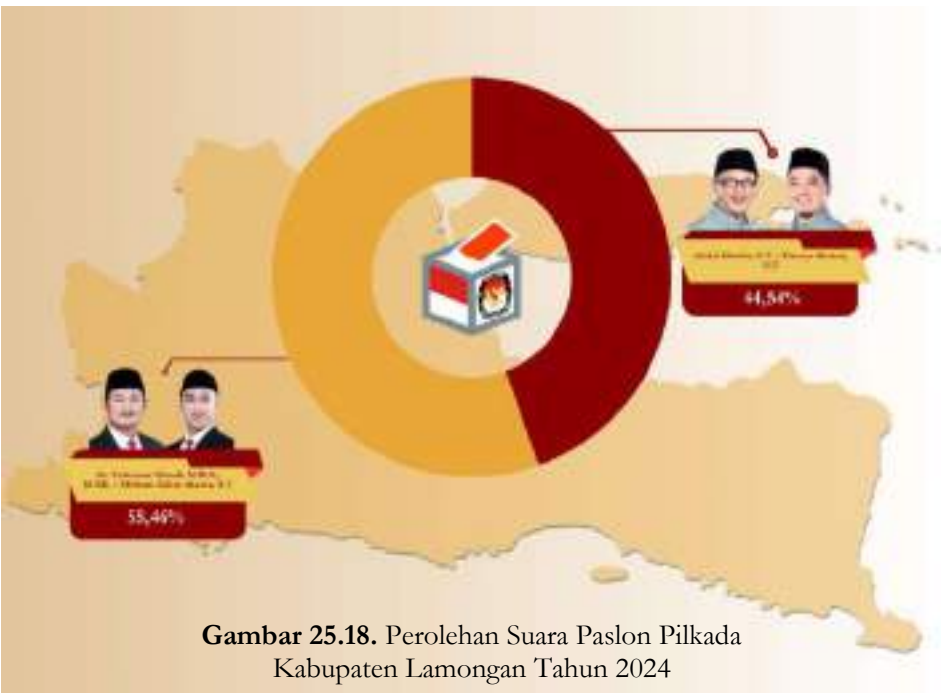
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Lamongan disajikan pada gambar 25.17.



Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan, pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestjanto Dardak meraih suara terbanyak dengan total 418.121 suara atau setara dengan 58,85% dari total suara sah. Di urutan kedua, pasangan Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta memperoleh 230.546 suara atau sebesar 32,45%. Sementara itu, pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah – H. Lukmanul Hakim memperoleh 61.807 suara atau sekitar 8,70%. Total suara sah yang tercatat dalam pemilihan ini mencapai 710.474 suara. Hasil ini mencerminkan dominasi dukungan masyarakat Lamongan terhadap

pasangan petahana, Khofifah-Emil, dalam kontestasi Pilgub 2024.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada Gambar 25.18.



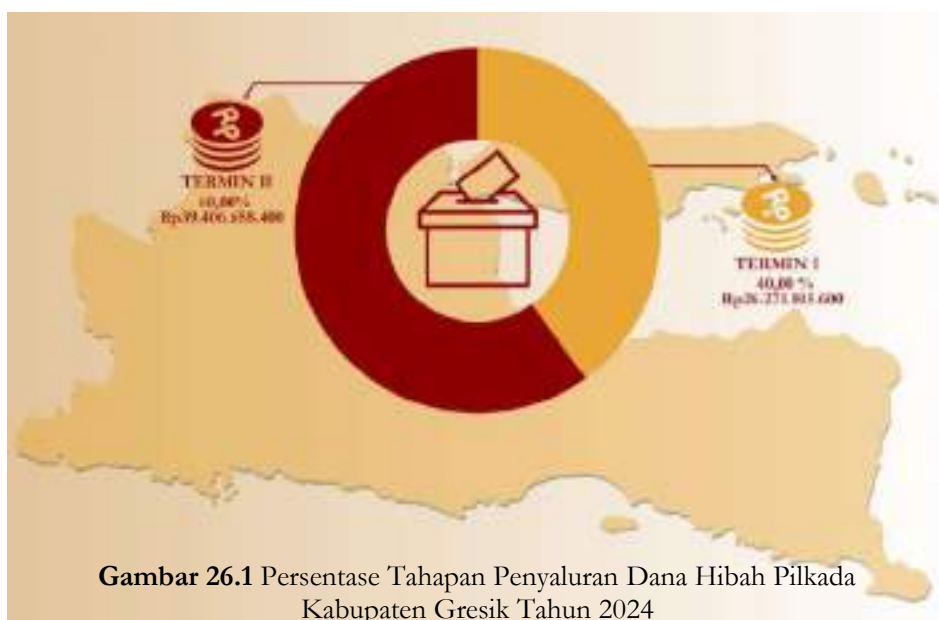
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024, pasangan Dr. Yuhronur Efendi, M.B.A., M.EK. – Dirham Akbar Aksara, S.T. berhasil meraih suara terbanyak dengan perolehan 407.541 suara atau sebesar 55,46% dari total suara sah. Sementara itu, pasangan Abdul Ghofur, S.T. – Firosha Shalati, S.T. memperoleh 327.345 suara atau 44,54%. Total suara sah yang tercatat dalam kontestasi ini mencapai 734.886 suara. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Lamongan memberikan kepercayaan lebih besar kepada pasangan Yuhronur Efendi – Dirham Akbar untuk memimpin periode mendatang.

KABUPATEN GRESIK

1. Perencanaan Program dan Anggaran

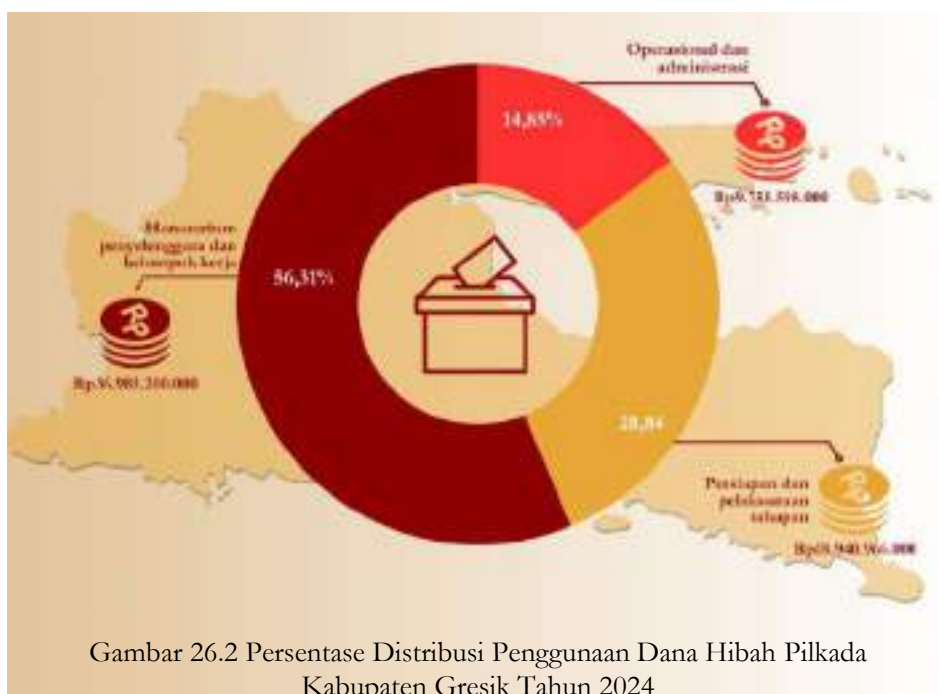
Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024, telah dilaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik. Penandatanganan tersebut dilakukan secara resmi pada tanggal 13 November 2023, bertempat di Kantor Bupati Gresik, dan dituangkan dalam dua dokumen bernomor 270/8/43.12/2023 dan 2064/KU.07-NK/3525/2023.

Melalui NPHD tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik menyepakati alokasi dana hibah sebesar Rp65.677.764.000 yang ditujukan untuk membiayai seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Gresik. Proses perencanaan dan penetapan nilai hibah ini dilakukan melalui mekanisme koordinasi antara KPU Kabupaten Gresik dengan para pemangku kepentingan di tingkat daerah. Hasil koordinasi tersebut mencerminkan sinergi yang baik antara penyelenggara Pilkada dan pemerintah daerah dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis dan berintegritas. Pengalokasian dana hibah ini juga menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen untuk menjamin kelancaran, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam setiap proses tahapan pemilihan kepala daerah. Dengan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan seluruh kegiatan teknis dan administratif dalam Pilkada 2024 dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 26.1. berikut.



Dana hibah yang telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dicairkan dalam dua termin sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan tahapan penyelenggaraan. Termin pertama sebesar Rp26.271.105.600 atau setara 40% dari total dana dicairkan pada tanggal 29 Desember 2023, sedangkan termin kedua sebesar Rp39.406.658.400 atau 60% dari total hibah dicairkan pada tanggal 18 Juli 2024. Skema pencairan dua termin ini dirancang agar pelaksanaan tahapan Pilkada dapat berjalan sesuai jadwal dan kebutuhan anggaran pada masing-masing fase, dari persiapan awal hingga pelaksanaan teknis di lapangan. Dengan pembiayaan yang tertib dan terencana, KPU Kabupaten Gresik diharapkan mampu menjaga kelancaran setiap tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran.

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 26.2., yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.

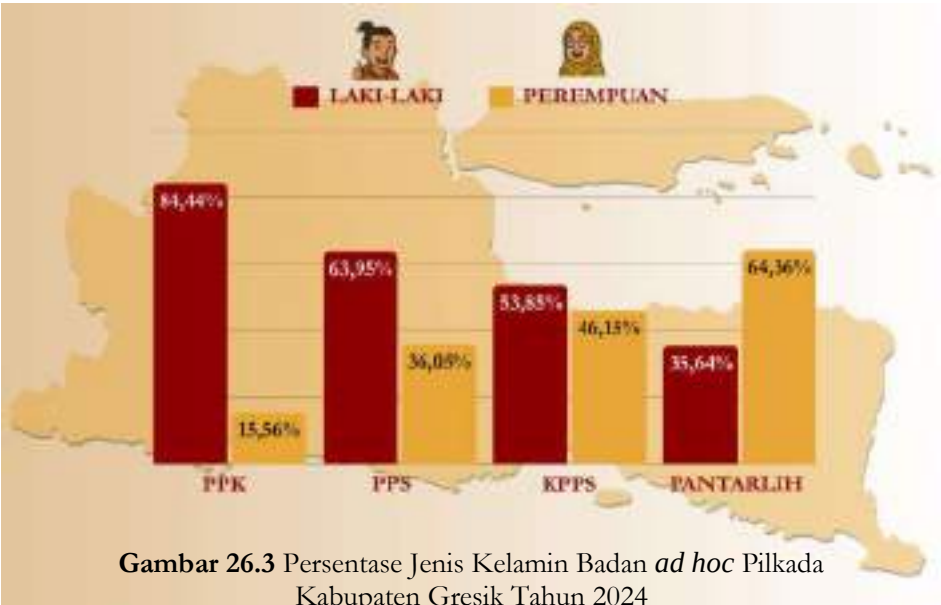


Gambar 26.2 Persentase Distribusi Penggunaan Dana Hibah Pilkada Kabupaten Gresik Tahun 2024

Dana hibah yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik dialokasikan ke dalam tiga komponen utama. Komponen pertama yaitu Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan, menyerap dana sebesar Rp18.940.966.000 atau 28,84% dari total hibah. Anggaran ini mencakup berbagai kegiatan teknis seperti sosialisasi, pencalonan, kampanye, dan logistik Pilkada. Komponen kedua adalah Operasional dan Administrasi Perkantoran, yang mendapat alokasi sebesar Rp9.751.598.000 atau 14,85%. Dana ini digunakan untuk mendukung kegiatan administratif, termasuk kebutuhan perlengkapan kantor, perjalanan dinas, serta operasional kesekretariatan yang mendukung pelaksanaan tahapan Pilkada. Sementara itu, porsi terbesar dari anggaran hibah yaitu Rp36.985.200.000 atau 56,31%, dialokasikan untuk komponen Honorarium. Dana ini ditujukan untuk memberikan honor kepada jajaran penyelenggara pemilihan di tingkat kabupaten hingga tingkat TPS, termasuk PPK, PPS, KPPS, dan petugas Pantarlih. Pembagian alokasi ini mencerminkan fokus KPU Kabupaten Gresik dalam menjamin pelaksanaan Pilkada berjalan optimal, adil, dan partisipatif di setiap lini.

2. **Badan *ad hoc***

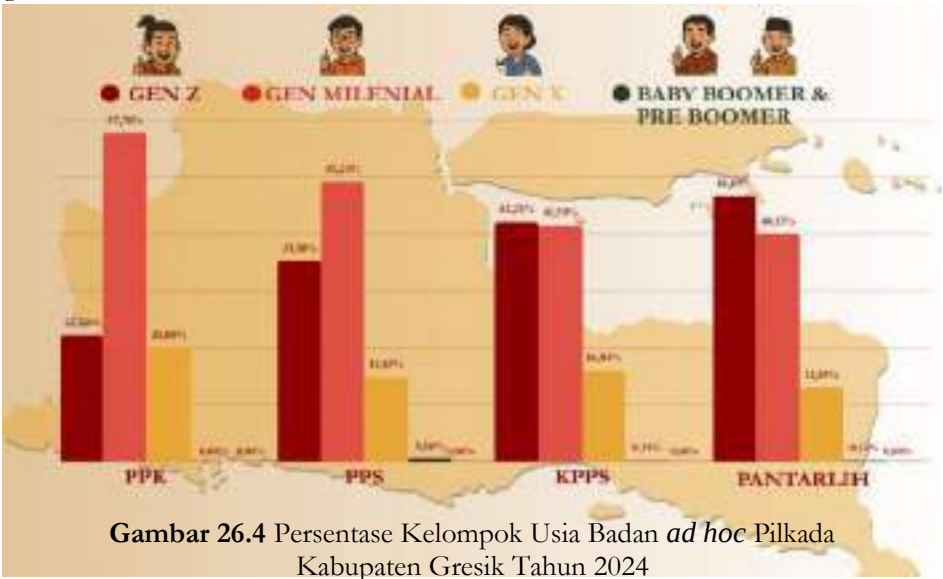
Dalam rangka menyukseskan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik membentuk badan *ad hoc* yang terdiri dari empat tingkatan, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Jumlah anggota badan *ad hoc* yang direkrut dan dilantik oleh KPU Gresik terdiri dari 90 orang PPK, 1.068 orang PPS, 3.594 orang Pantarlih, serta 13.076 orang KPPS. Perekrutan dilaksanakan secara terbuka dan sesuai regulasi yang ditetapkan dalam Peraturan KPU, dengan memperhatikan prinsip transparansi, profesionalitas, dan keterwakilan masyarakat. Para anggota badan *ad hoc* ini akan bertugas di seluruh wilayah administrasi Kabupaten Gresik selama masa tahapan Pilkada berlangsung. Mereka memiliki peran penting dalam memastikan setiap tahapan berjalan lancar, mulai dari pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, pelaksanaan pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil pemilihan. Keberadaan badan *ad hoc* ini menjadi tulang punggung utama dalam penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan partisipatif di tingkat lokal. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 26.3.



Sebaran demografi berdasarkan jenis kelamin pada Badan *ad hoc*

Pilkada Kabupaten Gresik Tahun 2024 menunjukkan keterlibatan yang cukup seimbang, khususnya pada tingkat KPPS dan Pantarlih. Dari total 90 anggota PPK, sebanyak 84,44% merupakan laki-laki (76 orang) dan 15,56% perempuan (14 orang). Pada tingkat PPS yang berjumlah 1.068 orang, sebanyak 63,95% adalah laki-laki (683 orang) dan 36,05% perempuan (385 orang). Komposisi lebih berimbang terlihat pada kelompok KPPS, yang terdiri atas 13.076 orang, dengan proporsi 53,85% laki-laki (7.041 orang) dan 46,15% perempuan (6.035 orang). Sementara itu, pada kelompok Pantarlih, jumlah perempuan justru lebih dominan, yaitu 64,36% (2.313 orang), dibandingkan laki-laki yang hanya 35,64% (1.281 orang) dari total 3.594 orang. Komposisi ini mencerminkan partisipasi aktif perempuan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada di tingkat akar rumput, terutama dalam proses pemutakhiran data dan penyelenggaraan pemungutan suara.

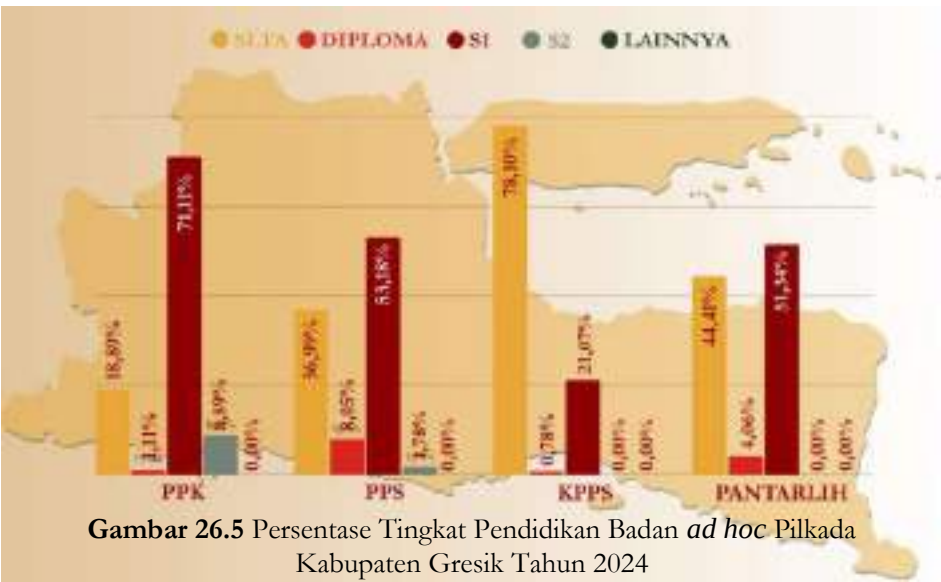
Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Gresik Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 26.4 berikut.



Sebaran demografi berdasarkan kelompok usia Badan *ad hoc* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 menunjukkan dominasi usia produktif, khususnya dari Generasi Z dan Milenial. Pada tingkat PPK yang berjumlah 90 orang, sebanyak 22,22% (20 orang) berasal dari Generasi Z (17–27 tahun), 57,78% (52 orang) dari Generasi Milenial (28–43 tahun), dan 20,00% (18 orang) dari Generasi X (44–59 tahun). Tidak terdapat anggota PPK dari kelompok usia *Baby Boomer* dan *Pre-*

Boomer. Sementara itu, dari 1.068 anggota PPS, sebanyak 35,30% (377 orang) merupakan Generasi Z, 49,25% (526 orang) dari Generasi Milenial, dan 14,89% (159 orang) dari Generasi X. Hanya 0,56% (6 orang) yang berasal dari kelompok usia *Baby Boomer*, dan tidak ada dari kelompok *Pre-Boomer*. Komposisi usia yang hampir serupa juga terlihat pada 13.076 anggota KPPS, di mana 42,25% (5.525 orang) berasal dari Generasi Z, 41,59% (5.438 orang) dari Generasi Milenial, dan 16,04% (2.097 orang) dari Generasi X. Kelompok usia *Baby Boomer* hanya berjumlah 0,12% (16 orang). Sedangkan pada 3.594 orang Pantarlih, 46,69% (1.678 orang) berasal dari Generasi Z, diikuti 40,12% (1.442 orang) dari Generasi Milenial, dan 13,05% (469 orang) dari Generasi X. Kelompok usia *Baby Boomer* hanya menyumbang 0,14% (5 orang), dan tidak ada anggota dari kelompok *Pre-Boomer*. Data ini menunjukkan bahwa pelibatan Badan *ad hoc* dalam Pilkada Gresik 2024 mayoritas berasal dari usia muda dan produktif, yang diharapkan mampu menjalankan tugas kePilkadaan secara dinamis dan adaptif.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Gresik Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 26.5.



Sebaran demografi berdasarkan tingkat pendidikan Badan *ad hoc* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 memperlihatkan dominasi lulusan jenjang SLTA dan S1 di seluruh tingkatan badan *ad hoc*. Pada level PPK yang berjumlah 90 orang,

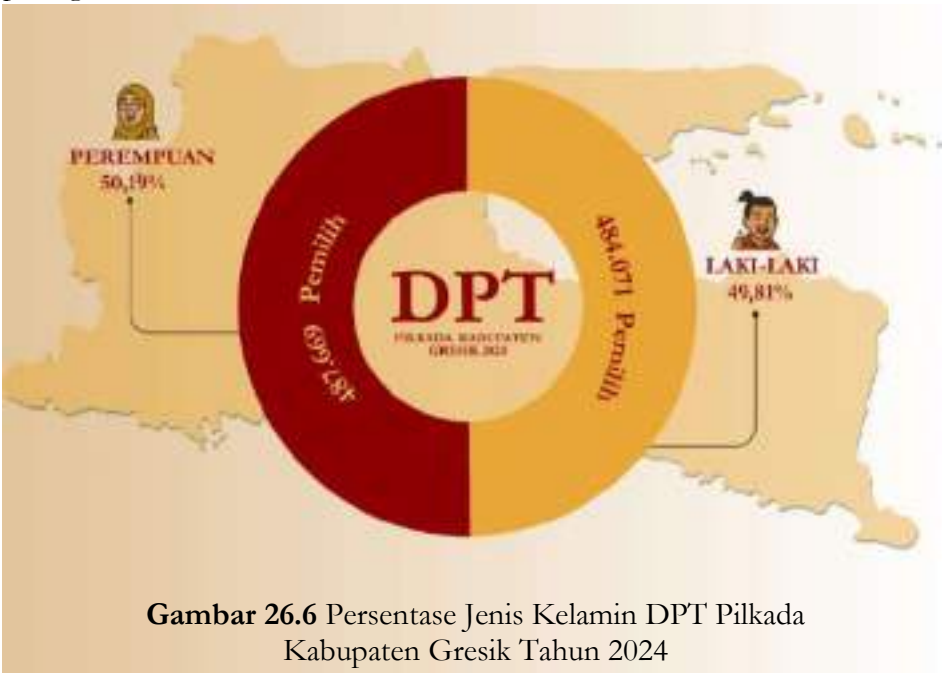
mayoritas merupakan lulusan S1 sebanyak 71,11% (64 orang), diikuti oleh lulusan SLTA sebanyak 18,89% (17 orang), dan S2 sebanyak 8,89% (8 orang). Hanya 1,11% (1 orang) yang berlatar belakang pendidikan Diploma, dan tidak terdapat PPK dari kategori pendidikan lainnya. Di tingkat PPS yang berjumlah 1.068 orang, komposisi terbanyak berasal dari lulusan S1 sebesar 53,18% (568 orang), kemudian SLTA sebanyak 36,99% (395 orang), Diploma 8,05% (86 orang), dan S2 hanya 1,78% (19 orang). Tidak terdapat PPS dengan latar pendidikan di luar kategori tersebut. Untuk anggota KPPS yang berjumlah 13.076 orang, mayoritas berpendidikan SLTA sebanyak 78,10% (10.212 orang), kemudian S1 sebanyak 21,07% (2.755 orang), serta kelompok kecil dari Diploma 0,78% (102 orang) dan S2 0,03% (4 orang). Terdapat juga 3 orang (0,02%) dari kategori pendidikan lainnya. Sedangkan untuk Pantarlih yang berjumlah 3.594 orang, sebagian besar juga lulusan S1 sebesar 51,34% (1.845 orang), diikuti oleh lulusan SLTA sebesar 44,41% (1.596 orang). Latar belakang Diploma tercatat 4,06% (146 orang) dan S2 sebanyak 0,19% (7 orang), tanpa ada dari kategori pendidikan lainnya. Secara umum, data ini mengindikasikan bahwa penyelenggara *ad hoc* Pilkada Gresik 2024 didominasi oleh individu dengan latar belakang pendidikan menengah dan tinggi, khususnya jenjang SLTA dan S1, yang menunjukkan kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan Pilkada secara profesional dan berkualitas.

Dalam pelaksanaan rekrutmen Badan *ad hoc* Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Gresik, belum terdapat anggota yang berasal dari kelompok penyandang disabilitas pada tingkat PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih. Sebagai perbaikan dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Gresik ke depan, keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen Badan *ad hoc* perlu mendapatkan perhatian lebih, guna mendorong inklusivitas dan representasi yang lebih setara dalam penyelenggaraan Pilkada.

3. Pemutakhiran Data

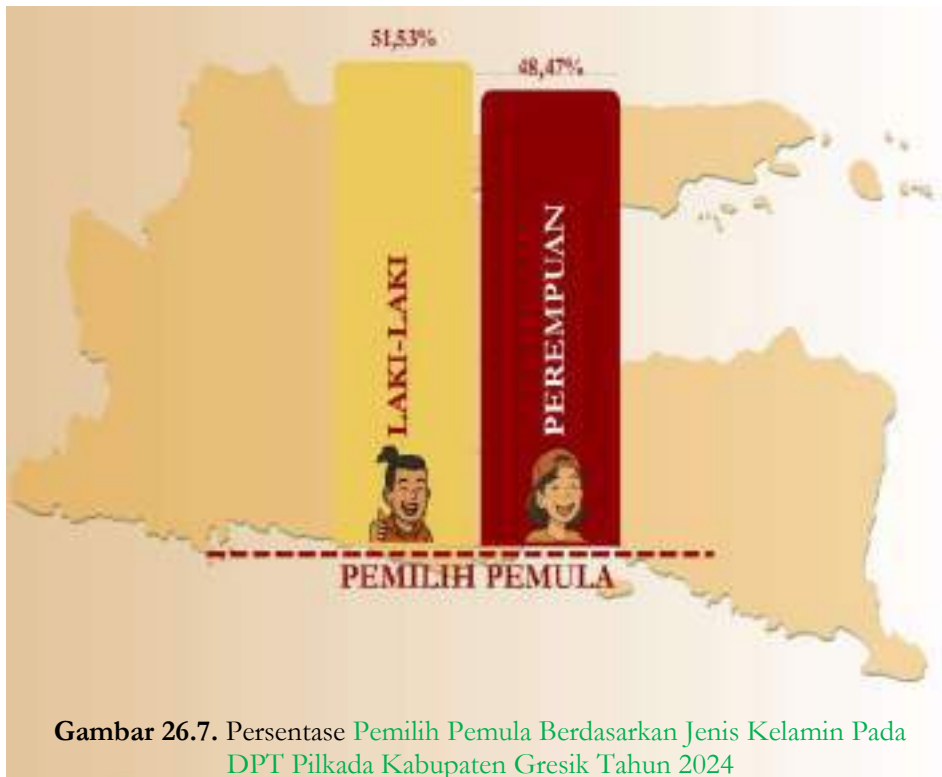
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik telah melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih sebagai bagian dari tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi dan verifikasi data yang dilakukan secara berjenjang, KPU Kabupaten Gresik menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 19 September 2024, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 324/PL.01.2-BA/3525/2024. Penetapan DPT ini mencakup 971.011 pemilih yang tersebar di 1.866 Tempat Pemungutan

Suara (TPS) Reguler, serta 729 pemilih yang terdaftar di 2 TPS Lokasi Khusus (Loksus). Dengan demikian, total jumlah DPT yang ditetapkan untuk seluruh wilayah Kabupaten Gresik adalah 971.740 pemilih. Proses pemutakhiran ini mencerminkan komitmen KPU dalam menjamin hak pilih warga negara secara akurat, inklusif, dan transparan sesuai prinsip demokrasi. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 26.6.



Berdasarkan jenis kelamin, sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Gresik Tahun 2024 menunjukkan komposisi yang relatif seimbang antara pemilih laki-laki dan perempuan. Dari total 971.740 pemilih, sebanyak 484.071 orang (49,81%) merupakan pemilih laki-laki, sementara 487.669 orang (50,19%) adalah pemilih perempuan. Data ini mencerminkan keterwakilan gender yang hampir setara dalam partisipasi Pilkada di Kabupaten Gresik, yang menjadi salah satu indikator inklusivitas dalam penyelenggaraan demokrasi lokal.

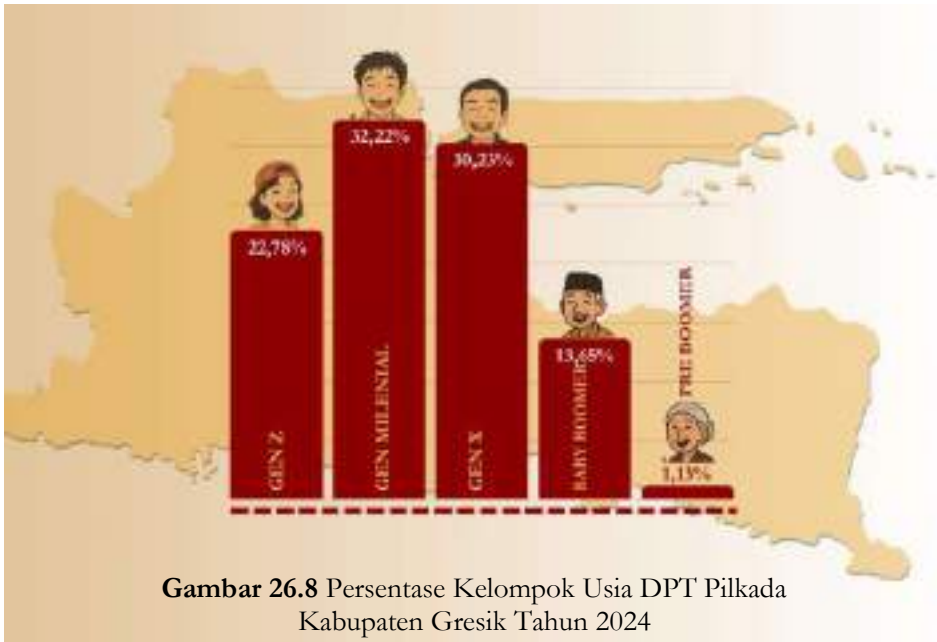
Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni pemilih pemula dan pemilih non-pemula. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 26.7 berikut.



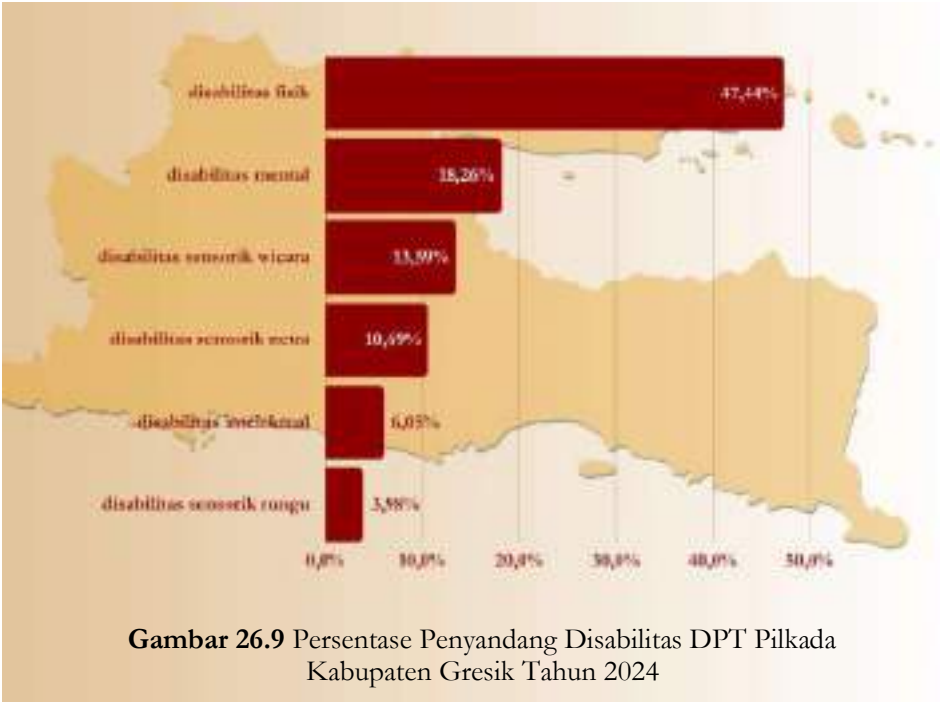
Gambar 26.7. Persentase Pemilih Pemula Berdasarkan Jenis Kelamin Pada DPT Pilkada Kabupaten Gresik Tahun 2024

Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Gresik Tahun 2024, terdapat status pemilih pemula, dimana Jumlah pemilih pemula tercatat sebanyak 14.073 orang. Pemilih pemula laki-laki sebanyak 7.252 (51,53%) dan pemilih pemula perempuan 6.821 (48,47%). Komposisi ini menunjukkan bahwa meskipun proporsi pemilih non-pemula mendominasi, partisipasi pemilih pemula tetap signifikan dan menunjukkan antusiasme generasi muda dalam proses demokrasi.

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada Gambar 26.8.



Berdasarkan kelompok usia, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Gresik Tahun 2024 didominasi oleh Generasi Milenial sebanyak 313.084 orang (32,22%), diikuti oleh Generasi X sebanyak 293.731 orang (30,23%), dan Generasi Z sebanyak 221.372 orang (22,78%). Sementara itu, kelompok usia *Baby Boomer* berjumlah 132.606 orang (13,65%), dan *Pre-Boomer* atau pemilih berusia di atas 79 tahun tercatat sebanyak 10.947 orang (1,13%). Komposisi ini mencerminkan dominasi pemilih usia produktif, khususnya generasi milenial dan gen Z, yang berperan penting dalam menentukan arah demokrasi di Kabupaten Gresik. Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten Gresik Tahun 2024 disajikan pada gambar 26.9., yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Berdasarkan data penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Gresik Tahun 2024, terdapat total 3.143 pemilih disabilitas. Dari jumlah tersebut, kategori disabilitas terbanyak adalah Disabilitas Fisik sebanyak 1.491 orang (47,44%), disusul oleh Disabilitas Mental sebanyak 574 orang (18,26%), Disabilitas Sensorik Wicara sebanyak 427 orang (13,59%), dan Disabilitas Sensorik Netra sebanyak 336 orang (10,69%). Sementara itu, Disabilitas Intelektual berjumlah 190 orang (6,05%), dan Disabilitas Sensorik Rungu sebanyak 125 orang (3,98%). Data ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Gresik dalam memastikan hak pilih kelompok rentan tetap terakomodasi dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.

4. Pencalonan

KPU Kabupaten Gresik membuka pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada 27–29 Agustus 2024. Hingga batas akhir, hanya satu pasangan yang mendaftar, yakni H. Fandi Akhmad Yani dan dr. H. Asluchul Alif, yang awalnya didukung oleh delapan partai politik. Karena tidak ada pasangan tambahan, masa pendaftaran diperpanjang hingga 4 September 2024, namun tetap tidak ada pendaftar baru. Pasangan calon tunggal ini kemudian memperluas dukungan menjadi 17 partai

politik. Pada 22 September 2024, KPU Gresik menetapkan mereka sebagai peserta resmi Pilkada melalui Keputusan Nomor 1594 Tahun 2024. Dengan hanya satu pasangan, Pilkada Gresik 2024 dipastikan berlangsung dengan skema calon tunggal sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada gambar 26.10. sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.



Dalam Pilkada Kabupaten Gresik Tahun 2024, pasangan calon yang ditetapkan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Kedua calon, baik Bupati maupun Wakil Bupati, memiliki latar belakang pendidikan Magister (S2), yang menunjukkan tingkat pendidikan yang tinggi dari para kontestan pada pemilihan kepala daerah tersebut.

Dengan mengusung visi "Pembangunan Gresik Baru yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat", pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 menegaskan komitmen mereka untuk mendorong percepatan pembangunan yang adil, inovatif, dan berorientasi pada potensi lokal. Untuk mewujudkan visi tersebut, lima misi strategis yang akan menjadi pijakan utama pembangunan Gresik selama lima tahun ke depan dipaparkan, yaitu:

1. Membangun insan Gresik yang unggul, sehat, cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah;

2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang merata, berbasis potensi lokal yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Menyelesaikan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
4. Memperkuat sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat;
5. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.

5. Sosialisasi dan Kampanye

Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik telah melaksanakan berbagai metode sosialisasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi ini dikemas melalui pendekatan langsung dan tidak langsung dengan cakupan kegiatan yang luas serta melibatkan media massa sebagai mitra penyebaran informasi.

1. Metode Sosialisasi:

KPU Gresik melaksanakan sosialisasi melalui empat metode utama, yaitu:

- Penyuluhan, termasuk kegiatan seperti *Launching* Pilkada dan Gresik Bershalawat, Kirab Maskot, Jalan Sehat, Deklarasi Kampanye Damai, serta sosialisasi keliling menggunakan mobil ledang dan penyuluhan di tempat ibadah/musholla.
- Tatap Muka, ditujukan kepada 24 segmen pemilih seperti pemilih muda, disabilitas, perempuan, tokoh agama, hingga warga binaan, dengan estimasi 50 orang per segmen.
- Tatap Muka Pemilih Pemula, dilakukan di sekolah dan pondok pesantren dengan target 50 peserta per institusi.
- Sosialisasi Alat Peraga, seperti pemasangan 5 baliho, 2 videotron, 6.768 spanduk, 2.244 T-banner, 50.490 pamflet, dan 13.464 poster di seluruh penjuru Gresik.

2. Media yang Terlibat:

Sebanyak lebih dari 30 media, baik cetak maupun daring, turut berkontribusi dalam penyebaran informasi Pilkada. Materi yang disampaikan mencakup ajakan memilih, jadwal debat publik, informasi nomor urut paslon, dan pengingat hari pemungutan suara. Media cetak yang terlibat antara lain Harian Surya, sedangkan media daring meliputi surabayapagi.com,

jatimtimes.com, kabargresik.com, pojokkiri.com, hingga tribunnews.com.

3. Media Gathering dan Sosialisasi Pemantau:

KPU juga menyelenggarakan media gathering sebanyak dua segmen yang diikuti 66 orang wartawan, serta rapat koordinasi dan sosialisasi pendaftaran pemantau yang melibatkan 36 orang dari ormas, ormek, dan lembaga lainnya.

Berbagai inisiatif sosialisasi ini menunjukkan komitmen KPU Gresik dalam memastikan pemilih memperoleh informasi secara merata dan dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas, bijak, dan bertanggung jawab pada 27 November 2024 mendatang. Untuk menyemarakkan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Gresik memperkenalkan maskot resmi Pilkada sebagai simbol penyelenggaraan Pilkada yang ramah, partisipatif, dan dekat dengan masyarakat.



Gambar 26.11 Maskot Pilkada Kabupaten Gresik Tahun 2024

Maskot Pilkada Kabupaten Gresik 2024 diberi nama Cak “RUSBAN”, singkatan dari “Rusa Bawean” dan kepanjangan makna “Demokrasi untuk Rakyat”. Sosok maskot ini terinspirasi dari Rusa Bawean, fauna endemik khas Pulau Bawean yang telah menjadi ikon kebanggaan masyarakat Gresik, bahkan pernah tampil dalam ajang Asian Games 2018.

Desain stilasi Cak RUSBAN tidak hanya merepresentasikan bentuk fisik hewan, tetapi juga memuat nilai sejarah dan kearifan lokal. Rusa Bawean dipilih karena kedekatannya dengan identitas warga Gresik serta menjadi simbol penting perlindungan alam. Filosofi ini selaras dengan semangat Pilkada, yaitu memilih pemimpin yang mampu menjaga kekayaan daerah dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Cak RUSBAN menggambarkan semangat kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Pilkada 2024. Dengan visual yang kekinian, postur yang unik, dan perpaduan warna artistik, maskot ini diharapkan menarik perhatian semua kalangan, baik tua maupun muda. Ia merepresentasikan perpaduan budaya dan modernitas, serta semangat demokrasi yang inklusif dan bermartabat. Selain sebagai simbol, Cak RUSBAN juga siap hadir dalam berbagai media sosialiasi (baik digital maupun cetak) serta dapat diaplikasikan dalam bentuk cinderamata seperti boneka, kaos, plakat, dan lainnya. Harapannya, maskot ini bukan hanya menjadi ikon Pilkada, tapi juga menjadi bagian dari upaya pelestarian Rusa Bawean serta penguat identitas Kabupaten Gresik di tengah masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kampanye yang adil, merata, dan sesuai dengan regulasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik telah memfasilitasi berbagai bentuk media kampanye bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024. Fasilitasi ini mencakup Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye (BK), Iklan Kampanye, serta penyelenggaraan Debat Publik dan pemantauan aktivitas kampanye daring melalui media sosial.

Tabel 26.1. Fasilitas Kampanye oleh KPU
Kabupaten Gresik Tahun 2024

Fasilitas	Media	Jumlah Item
APK	Baliho	5
	Umbul-umbul	360
	Spanduk	712
BK	Poster	242.935
	Pamflet	242.935
	Brosur	242.935
	Selebaran	242.935
Iklan Kampanye	Televisi	58
	Media Cetak	14
Debat Publik	Televisi	2

Sebagai bagian dari upaya transparansi dan pengawasan terhadap aktivitas kampanye daring, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik menerima laporan resmi dari pasangan calon terkait penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye. Berdasarkan laporan yang diterima, jumlah platform media sosial kampanye yang didaftarkan sebanyak 7 akun Instagram. Akun-akun ini menjadi kanal resmi penyampaian informasi, visi-misi, serta program kerja pasangan calon kepada masyarakat secara digital. Penggunaan media sosial ini diharapkan dapat memperluas jangkauan kampanye, terutama bagi pemilih muda yang aktif di ruang digital, serta mendukung terciptanya kampanye yang kreatif, informatif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. KPU Gresik secara aktif melakukan pemantauan terhadap akun-akun ini guna memastikan bahwa seluruh aktivitas kampanye digital tetap berada dalam koridor hukum dan etika Pilkada.

6. Logistik

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik melaksanakan pengadaan logistik dengan menerapkan metode yang transparan dan akuntabel. Pengadaan logistik dilaksanakan melalui skema E-Purchasing (E-Katalog) dengan pendekatan mini kompetisi sebagai bentuk konsolidasi pengadaan yang dikoordinasikan oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Dalam skema ini, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen kontrak dan menjalin perjanjian kerja sama dengan penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemenang mini kompetisi. Selain mini kompetisi, terdapat pula beberapa jenis logistik yang pengadaannya dilakukan secara langsung oleh KPU Kabupaten/Kota melalui negosiasi harga, tetap dalam kerangka ketentuan peraturan yang berlaku. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas sekaligus memastikan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengadaan.

Pengadaan logistik ini mengacu pada Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam regulasi tersebut, ditetapkan nomenklatur dan klasifikasi logistik pemilihan yang digunakan sebagai pedoman dalam setiap tahapan pelaksanaan logistik Pilkada Serentak

2024. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 26.12.



Gambar 26.12 Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kabupaten Gresik Tahun 2024

Moda transportasi yang digunakan untuk distribusi logistik disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing wilayah. Untuk kecamatan-kecamatan yang terletak di wilayah daratan, logistik dikirim menggunakan truk boks, kendaraan *pick-up*, dan sepeda motor. Sementara itu, untuk wilayah kepulauan, moda transportasi diperluas mencakup kapal laut, truk, *pick-up*, sepeda motor, dan perahu agar distribusi dapat menjangkau seluruh lokasi secara merata.

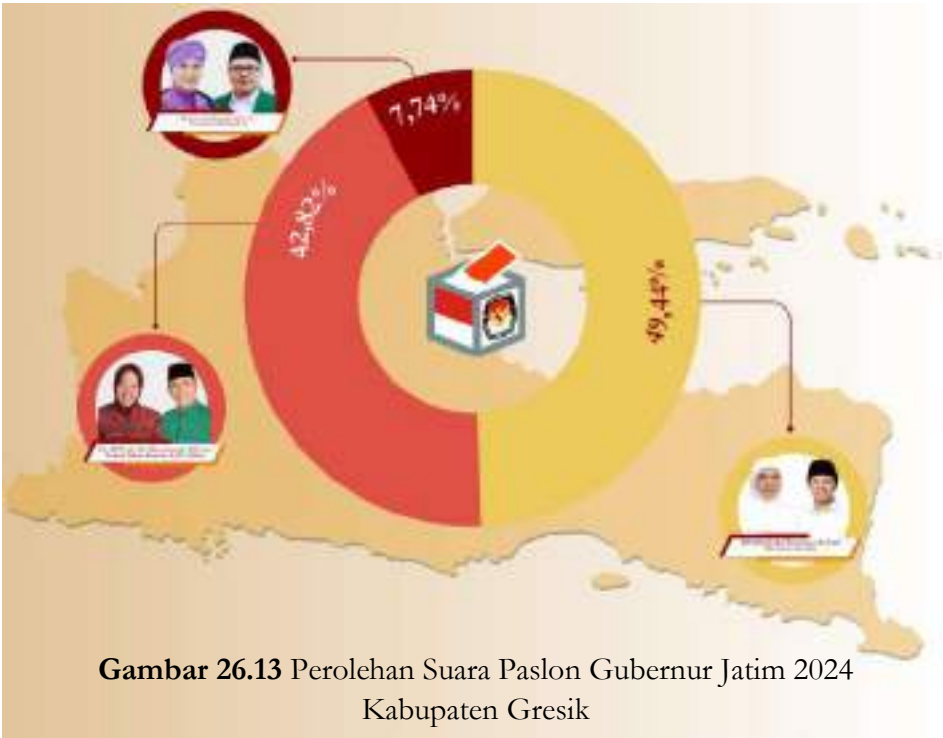
Proses penyortiran, pelipatan, dan penghitungan surat suara dilakukan melalui metode swakelola yang melibatkan masyarakat setempat. Kegiatan ini terbagi dalam dua hari dan dua sesi (*shift*) setiap harinya. Pada masing-masing *shift*, melibatkan ratusan petugas dan pengawas guna menjamin ketelitian dan efisiensi proses. *Shift* pertama melibatkan 248 orang dan 10 pengawas, sedangkan *shift* kedua melibatkan 212 orang dan 10 pengawas. Adapun untuk kegiatan setting dan packing logistik, jumlah petugas yang dilibatkan sebanyak 10 orang untuk pengepakan dan 9 orang untuk pengesetan, masing-masing dibantu oleh 3 pengawas.

Sebagai bentuk perhatian terhadap daerah terpencil, KPU Kabupaten Gresik juga telah mengidentifikasi dua TPS kategori wilayah 5T (Terdepan, Terluar, Tertinggal, Terlampa, dan Tersulit), yaitu TPS 8 dan TPS 9 di

Dusun Gili Noko, Desa Sidogedungbatu, yang terletak di Pulau Gili Noko. Distribusi logistik ke wilayah ini dilakukan menggunakan perahu, mengingat akses darat tidak memungkinkan. Kegiatan distribusi dan pengelolaan logistik ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Gresik untuk menghadirkan pemilihan yang terencana, adil, inklusif, dan merata, dengan memastikan setiap TPS mendapatkan perlengkapan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Gresik disajikan pada gambar 26.13.

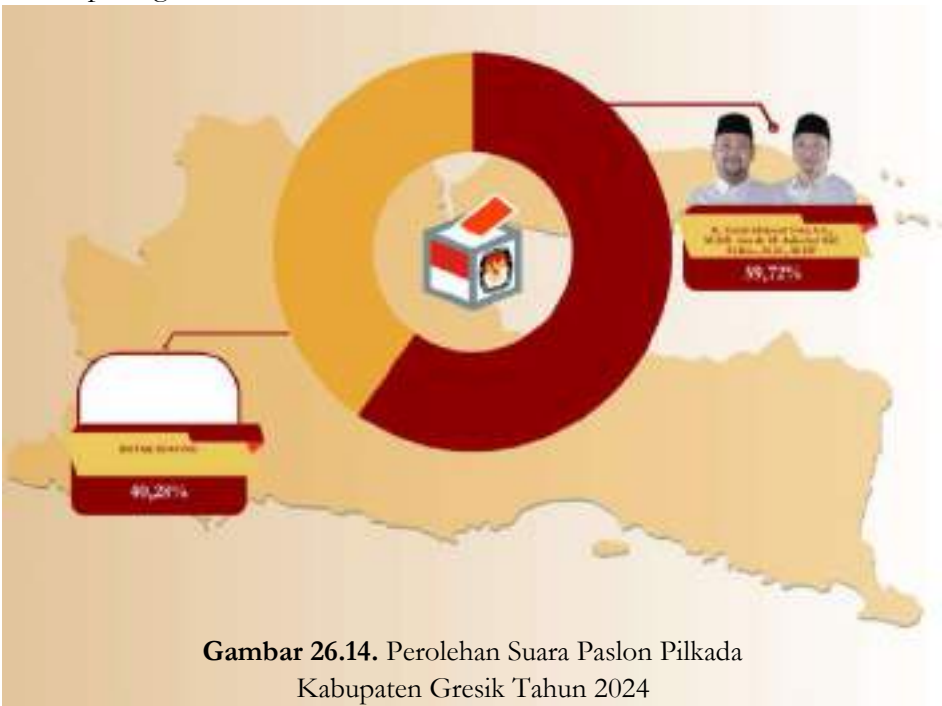


Gambar 26.13 Perolehan Suara Paslon Gubernur Jatim 2024 Kabupaten Gresik

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Kabupaten Gresik, total suara sah yang tercatat mencapai 610.300 suara. Dari tiga pasangan calon yang berkompetisi, pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak memperoleh dukungan tertinggi

dengan 301.722 suara atau 49,44% dari total suara sah. Pasangan Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T. dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), S.IP., M.Kes. menyusul dengan jumlah suara sebanyak 261.319 suara atau 42,82%, menempati posisi kedua. Sementara itu, pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah, M.Si. dan H. Lukmanul Hakim, M.Si. berada di posisi ketiga dengan 47.259 suara atau 7,74%. Hasil ini menunjukkan bahwa pasangan Khofifah–Emil berhasil meraih suara terbanyak di Kabupaten Gresik dan memperoleh dukungan yang signifikan dari masyarakat dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur 2024.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 26.14.



Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024, terdapat satu pasangan calon tunggal, yaitu H. Fandi Akhmad Yani, S.E., M.MB. dan dr. H. Asluchul Alif, M.Kes., M.M., M.HP., yang berhadapan dengan opsi kotak kosong sesuai mekanisme pemilihan calon tunggal dalam peraturan perundang-undangan. Dari total 614.423 suara sah, pasangan calon tersebut memperoleh 366.944 suara atau 59,72%, menunjukkan mayoritas dukungan masyarakat Gresik terhadap pasangan ini. Sementara itu, kotak kosong mendapatkan 247.479 suara atau 40,28%,

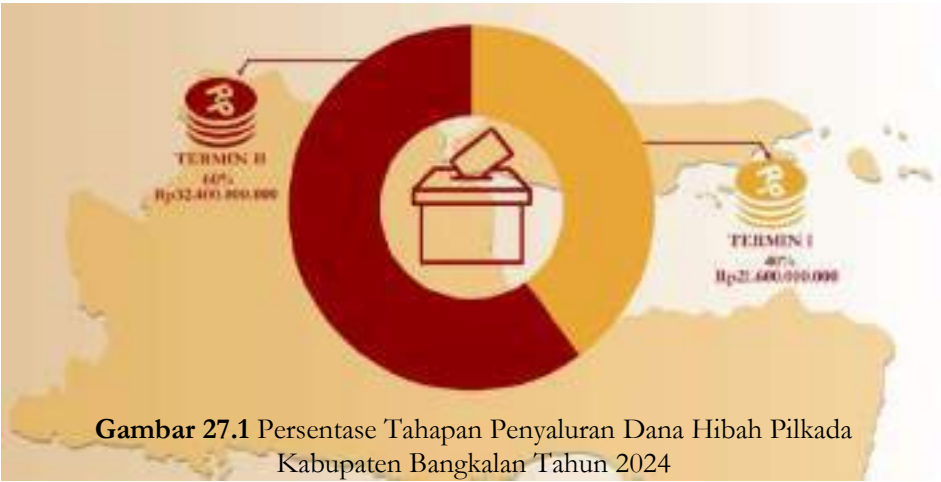
mencerminkan bagian pemilih yang menyatakan ketidaksepakatan atau memilih untuk tidak mendukung pasangan calon yang ada. Dengan perolehan tersebut, pasangan Fandi Akhmad Yani – Asluchul Alif secara resmi dinyatakan menang dalam Pilkada Gresik 2024, melanjutkan mandat kepemimpinan untuk periode berikutnya.

BAGIAN 27

KABUPATEN BANGKALAN

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan bersama Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada tanggal 10 November 2023 bertempat di Pendopo Agung Bangkalan. Penandatanganan tersebut menghasilkan kesepakatan total nilai hibah sebesar Rp54.000.000.000 yang digunakan untuk mendukung pembiayaan seluruh tahapan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Bangkalan. Dokumen NPHD ini telah teregistrasi dengan Nomor: 200.2.1/6900/433.207/2023 dan 971/KU.07-NK/3526/2023, dengan tanggal penutupan hibah ditetapkan hingga 30 April 2025. Seluruh dana hibah disalurkan melalui Rekening Penampung Dana Hibah Bank Tabungan Negara (BTN) atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan hibah daerah yang berlaku. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada Gambar 27.1 berikut.

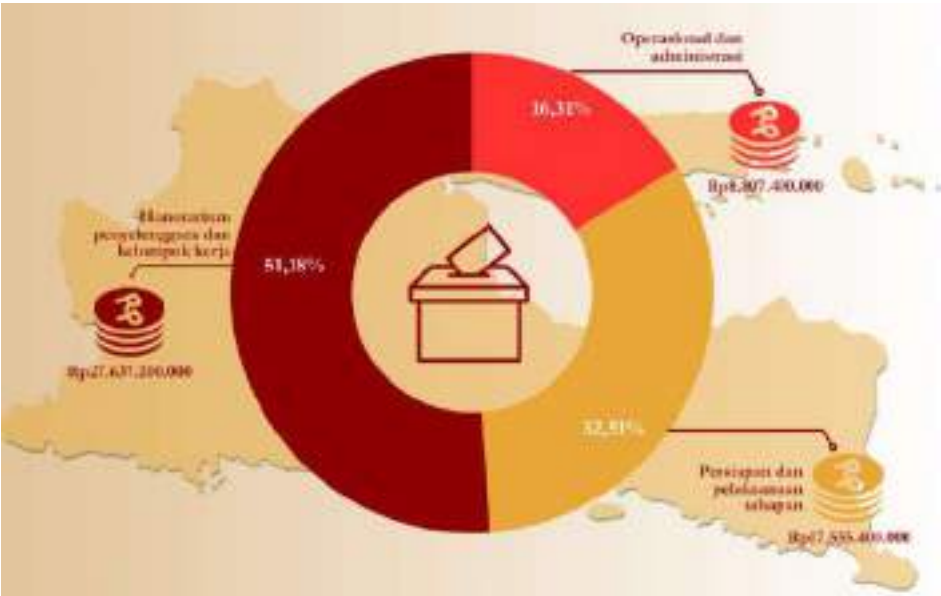


Gambar 27.1 Persentase Tahapan Penyaluran Dana Hibah Pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

Distribusi dana hibah untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 dialokasikan dalam dua termin pencairan. Termin pertama disalurkan pada 29 November 2023 dengan

nilai sebesar Rp21.600.000.000 atau setara 40% dari total hibah. Selanjutnya, termin kedua dicairkan pada 27 Juni 2024 sebesar Rp32.400.000.000 atau 60% dari total nilai hibah. Penyaluran dalam dua termin ini dirancang untuk menjamin kelancaran pembiayaan setiap tahapan Pilkada, mulai dari persiapan hingga penyelesaian kegiatan, serta memastikan pengelolaan dana berjalan secara akuntabel dan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan.

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 27.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.



Gambar 27.2 Persentase Distribusi Penggunaan Dana Hibah Pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

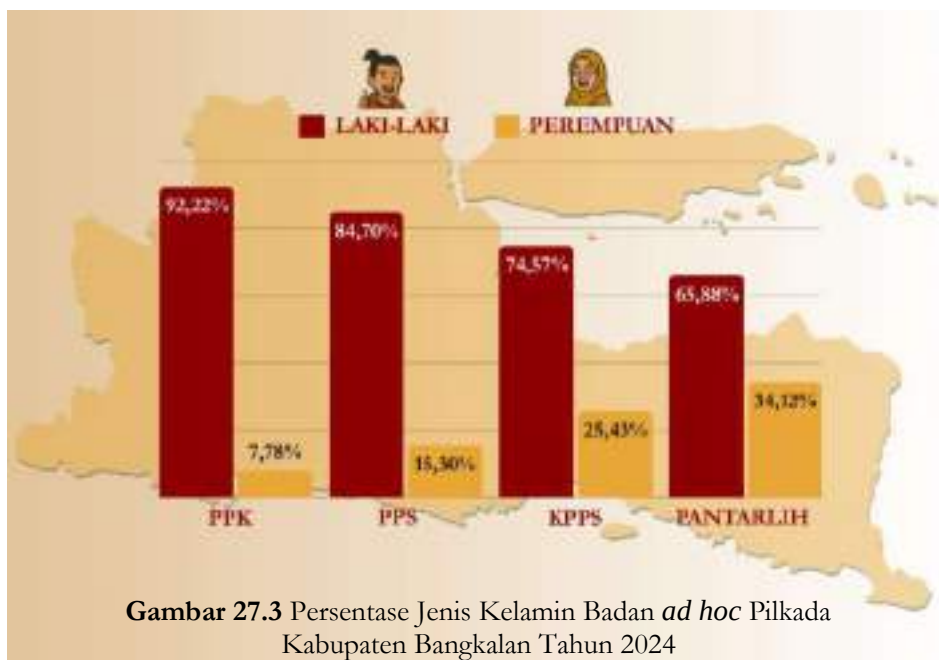
Alokasi dana hibah yang diterima oleh KPU Kabupaten Bangkalan untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 terbagi ke dalam tiga komponen utama pembiayaan. Komponen terbesar dialokasikan untuk honorarium sebesar Rp27.637.200.000 atau 51,18%, mencerminkan besarnya kebutuhan pembiayaan sumber daya manusia, termasuk badan *ad hoc* penyelenggara di tingkat bawah. Selanjutnya, alokasi untuk tahapan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Pilkada mencapai Rp17.555.400.000 atau 32,51%, digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan teknis tahapan penyelenggaraan Pilkada seperti logistik, sosialisasi, serta pengawasan. Sementara itu, operasional dan administrasi perkantoran dialokasikan sebesar

Rp8.807.400.000 atau 16,31%, mencakup pembiayaan kebutuhan rutin kantor, dukungan teknis administrasi, dan pelaporan. Pola pembagian anggaran ini diharapkan mampu memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan lancar, transparan, dan akuntabel sesuai dengan regulasi dan prinsip efisiensi pengelolaan anggaran negara.

2. **Badan *Ad Hoc***

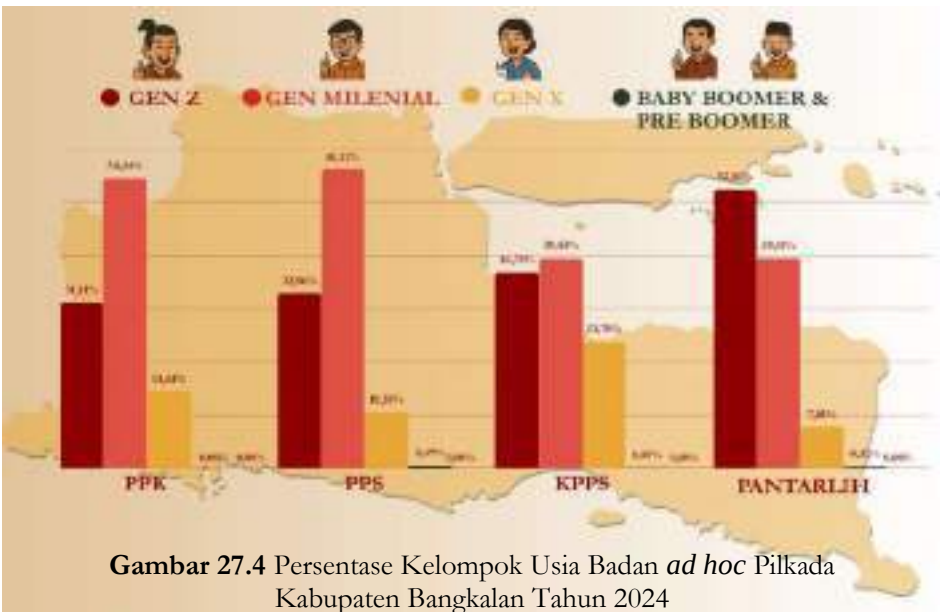
Sebagai bagian dari kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan telah melantik sejumlah badan *ad hoc* di berbagai tingkatan. Pada tanggal 16 Mei 2024, KPU Kabupaten Bangkalan secara resmi melantik 90 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan bertugas di 18 kecamatan. Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Ratoh Ebuh, Jalan A. Yani, Bangkalan. Kemudian, pada 26 Mei 2024, sebanyak 843 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) resmi dilantik. Kegiatan pelantikan juga dilaksanakan di Gedung Ratoh Ebuh dan dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bangkalan, yang menunjukkan dukungan lintas sektor terhadap tahapan Pilkada.

Tahapan berikutnya adalah pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang dilaksanakan pada 24 Juni 2024. Setelah dilantik, Pantarlih langsung melaksanakan tugas pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih selama periode 24 Juni hingga 24 Juli 2024. Berdasarkan laporan, progres coklit telah melampaui 90% pada akhir Juli 2024, menunjukkan dedikasi dan kinerja yang optimal dari jajaran petugas di lapangan. Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilakukan secara serentak pada 7 November 2024 di seluruh 18 kecamatan. Sebanyak 10.331 anggota KPPS dilantik, dengan masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) diisi oleh tujuh anggota. Usai pelantikan, seluruh anggota KPPS mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang difasilitasi oleh PPK. Tujuannya adalah memastikan setiap anggota KPPS memahami regulasi, teknis pemungutan suara, serta menjalankan tugas dengan profesionalisme, netralitas, dan integritas tinggi. Langkah strategis KPU Kabupaten Bangkalan dalam membentuk badan *ad hoc* ini mencerminkan komitmen untuk menghadirkan Pilkada yang berkualitas dan terpercaya di Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya, komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 27.3.



Sebaran demografi badan *ad hoc* dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 memperlihatkan dominasi partisipasi laki-laki di hampir seluruh tingkatan. Dari total 90 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebanyak 83 orang (92,22%) berjenis kelamin laki-laki dan hanya 7 orang (7,78%) perempuan. Kondisi serupa terlihat pada 843 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), di mana 714 orang (84,70%) merupakan laki-laki dan 129 orang (15,30%) perempuan. Komposisi 10.311 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga didominasi laki-laki sebanyak 7.689 orang (74,57%), sedangkan perempuan berjumlah 2.622 orang (25,43%). Sementara itu, dari 2.855 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang dilantik, 1.881 orang (65,88%) adalah laki-laki dan 974 orang (34,12%) adalah perempuan.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 27.4. berikut.

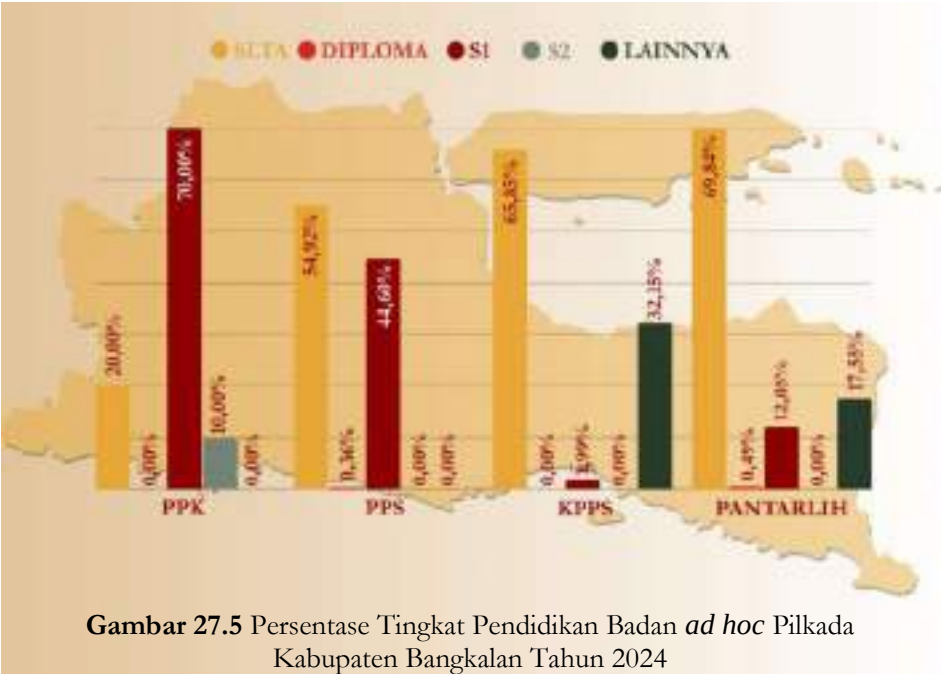


Gambar 27.4 Persentase Kelompok Usia Badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

Komposisi usia badan *ad hoc* yang terlibat dalam Pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 menunjukkan dominasi generasi muda, khususnya dari kalangan Gen Z dan Milenial. Dari total 90 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), mayoritas berasal dari Gen Milenial sebanyak 49 orang (54,44%), disusul oleh Gen Z 28 orang (31,11%), dan Gen X 13 orang (14,44%). Pada tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), dari 843 anggota, Gen Milenial mendominasi dengan 473 orang (56,11%), diikuti oleh Gen Z 277 orang (32,86%), Gen X 89 orang (10,56%), dan *Baby Boomer* 4 orang (0,47%). Jumlah terbesar terlihat di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah 10.311 orang, dengan komposisi Gen Milenial sebanyak 4.066 orang (39,43%), Gen Z 3.786 orang (36,72%), Gen X 2.452 orang (23,78%), serta jumlah kecil dari *Baby Boomer* sebanyak 7 orang (0,07%). Sementara itu, pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang berjumlah 2.855 orang, Gen Z menjadi mayoritas dengan 1.495 orang (52,36%), diikuti oleh Gen Milenial 1.128 orang (39,51%), Gen X 223 orang (7,81%), dan *Baby Boomer* 9 orang (0,32%). Data ini memperlihatkan bahwa generasi muda, khususnya Gen Z dan Milenial, memegang peran penting dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Bangkalan yang menjadi indikasi positif atas meningkatnya partisipasi pemuda dalam proses demokrasi lokal.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *ad hoc* pada Pilkada

Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 27.5.



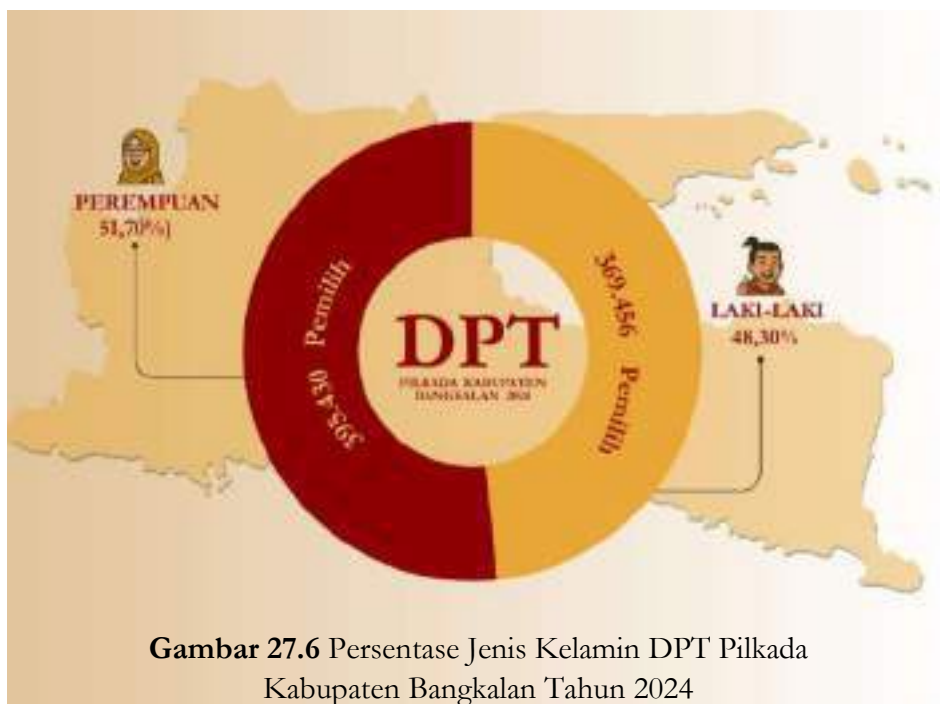
Tingkat pendidikan badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 menunjukkan keragaman latar belakang akademik. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dari 90 orang anggota, sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan S1 sebanyak 63 orang (70,00%), disusul oleh lulusan SLTA sebanyak 18 orang (20,00%), dan lulusan S2 sebanyak 9 orang (10,00%). Komposisi berbeda terlihat pada Panitia Pemungutan Suara (PPS), di mana dari 843 anggota, mayoritas merupakan lulusan SLTA sebanyak 463 orang (54,92%), diikuti lulusan S1 376 orang (44,60%), serta jumlah kecil dari jenjang diploma 3 orang (0,36%) dan S2 1 orang (0,12%). Pada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dari total 10.311 orang, proporsi terbanyak berasal dari lulusan SLTA sebanyak 6.790 orang (65,85%), namun terdapat pula data “lainnya” (tidak terklasifikasi) sebanyak 3.315 orang (32,15%). Lulusan S1 hanya berjumlah 205 orang (1,99%), dan lulusan S2 hanya 1 orang (0,01%). Sementara itu, pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dari 2.855 orang, lulusan SLTA tetap mendominasi dengan 1.994 orang (69,84%), disusul oleh lulusan S1 sebanyak 344 orang (12,05%), dan data “lainnya” sebanyak 501 orang (17,55%). Lulusan

diploma berjumlah 14 orang (0,49%), dan S2 hanya 2 orang (0,07%).

Dalam pelaksanaan rekrutmen Badan *ad hoc* Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bangkalan, belum terdapat anggota yang berasal dari kelompok penyandang disabilitas pada tingkat PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih. Sebagai perbaikan dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bangkalan ke depan, keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen Badan *ad hoc* perlu mendapatkan perhatian lebih, guna mendorong inklusivitas dan representasi yang lebih setara dalam penyelenggaraan Pilkada.

3. Pemutakhiran Data

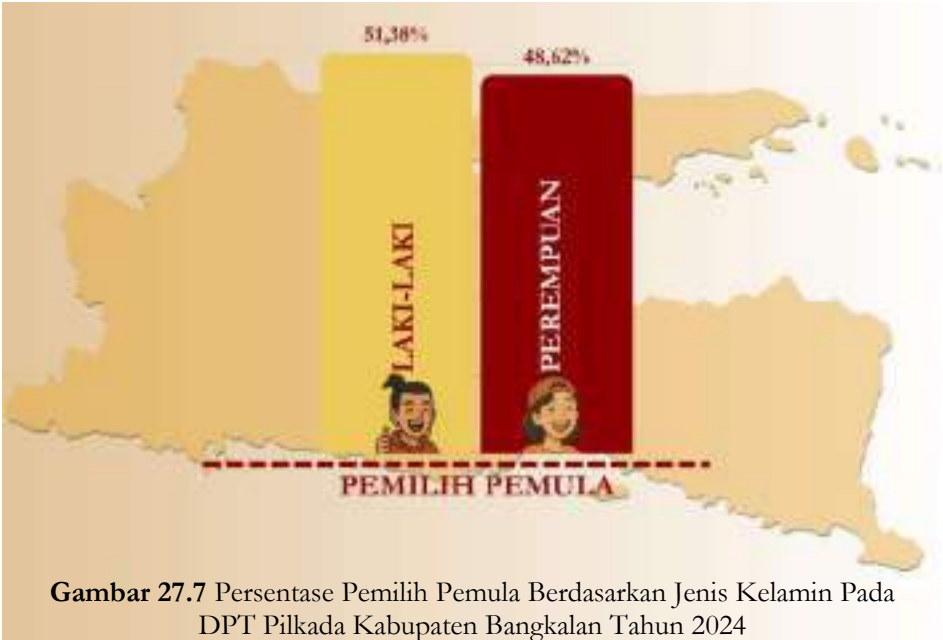
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebanyak 764.886 pemilih pada tanggal 20 September 2024. Jumlah tersebut tersebar di 1.473 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di 281 desa/kelurahan pada 18 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, KPU Kabupaten Bangkalan secara resmi mengumumkan hasil penetapan DPT tersebut pada tanggal 22 September 2024, dengan cara menempelkan salinan DPT di kantor desa dan kelurahan setempat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses informasi dan dapat memverifikasi secara langsung keberadaan namanya dalam daftar pemilih, serta memberikan ruang untuk mengajukan koreksi jika terdapat kekeliruan. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 27.6.



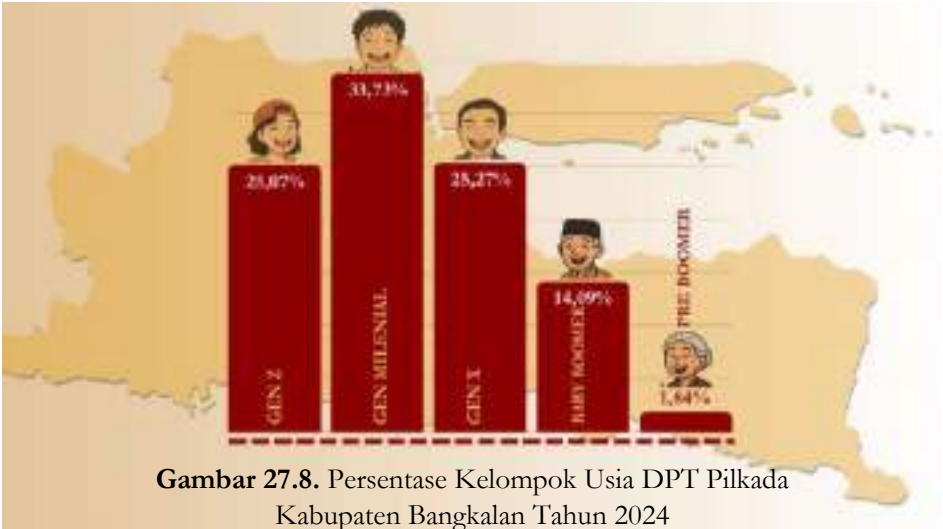
Gambar 27.6 Persentase Jenis Kelamin DPT Pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

Sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah pemilih perempuan lebih tinggi dibandingkan pemilih laki-laki. Dari total 764.886 pemilih, sebanyak 395.430 orang (51,70%) merupakan pemilih perempuan, sedangkan 369.456 orang (48,30%) merupakan pemilih laki-laki. Distribusi ini mencerminkan partisipasi yang cukup merata antar jenis kelamin, dengan kecenderungan dominasi jumlah pemilih perempuan dalam Pilkada di Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni pemilih pemula dan pemilih non-pemula. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada Gambar 27.7. berikut.

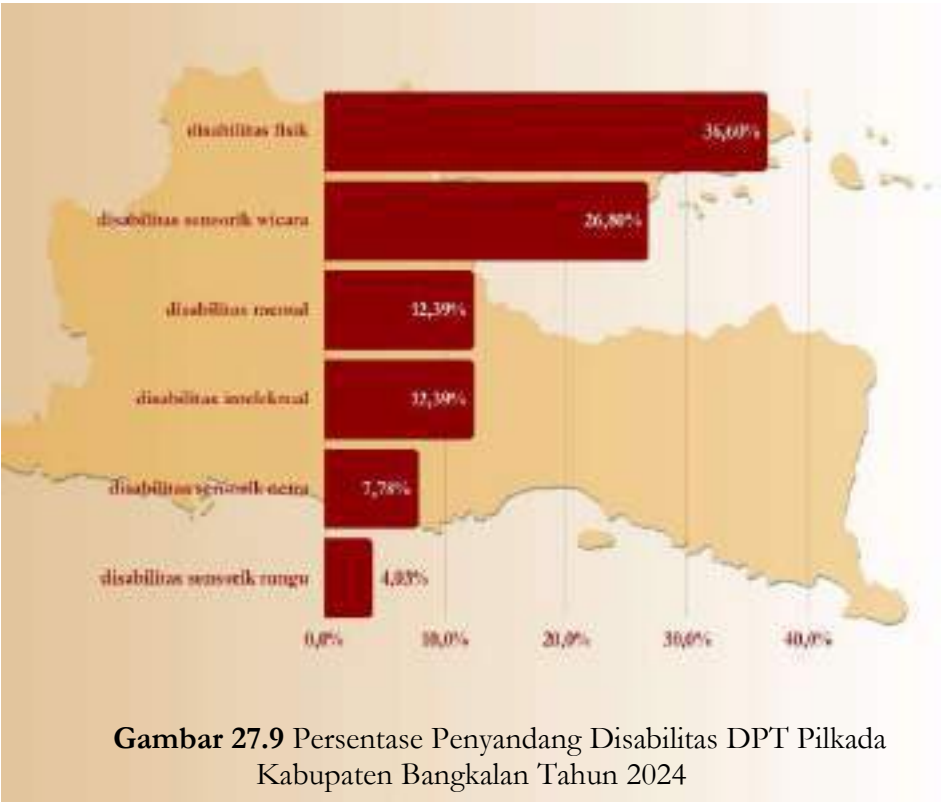


Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, terdapat status pemilih pemula. Ada sebanyak 2.933 orang (0,38%) tergolong sebagai pemilih pemula, dimana pemilih pemula laki-laki sebanyak 1.507 (51,38%) dan pemilih pemula perempuan sebanyak 1.426 (48,62%). Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar27.8.



Sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi generasi muda dan produktif. Dari total 764.886 pemilih, kelompok usia 28–43 tahun (Generasi Milenial) merupakan yang terbanyak, yakni 258.011 orang (33,73%), diikuti oleh Generasi X (usia 44–59 tahun) sebanyak 193.302 orang (25,27%), dan Generasi Z (usia 17–27 tahun) sebanyak 191.746 orang (25,07%). Selanjutnya, Baby Boomer (usia 60–78 tahun) mencakup 107.767 orang (14,09%), dan kelompok usia tertua, Pre-Boomer (>79 tahun) sebanyak 14.060 orang (1,84%). Komposisi ini menegaskan bahwa mayoritas pemilih di Bangkalan berada pada rentang usia produktif, yang menjadi segmen strategis dalam pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan partisipasi pemilih.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 disajikan pada gambar 27.9., yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 berdasarkan kategori penyandang disabilitas mencatat total 347 pemilih disabilitas yang tersebar di berbagai wilayah. Dari jumlah tersebut, kelompok terbanyak berasal dari penyandang disabilitas fisik, yakni 127 orang (36,60%), diikuti oleh disabilitas sensorik wicara sebanyak 93 orang (26,80%). Selanjutnya, disabilitas intelektual dan disabilitas mental masing-masing berjumlah 43 orang (12,39%), disabilitas sensorik netra sebanyak 27 orang (7,78%), dan disabilitas sensorik rungu sebanyak 14 orang (4,03%). Data ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Bangkalan memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak pilih kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, agar tetap dapat berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024 secara inklusif.

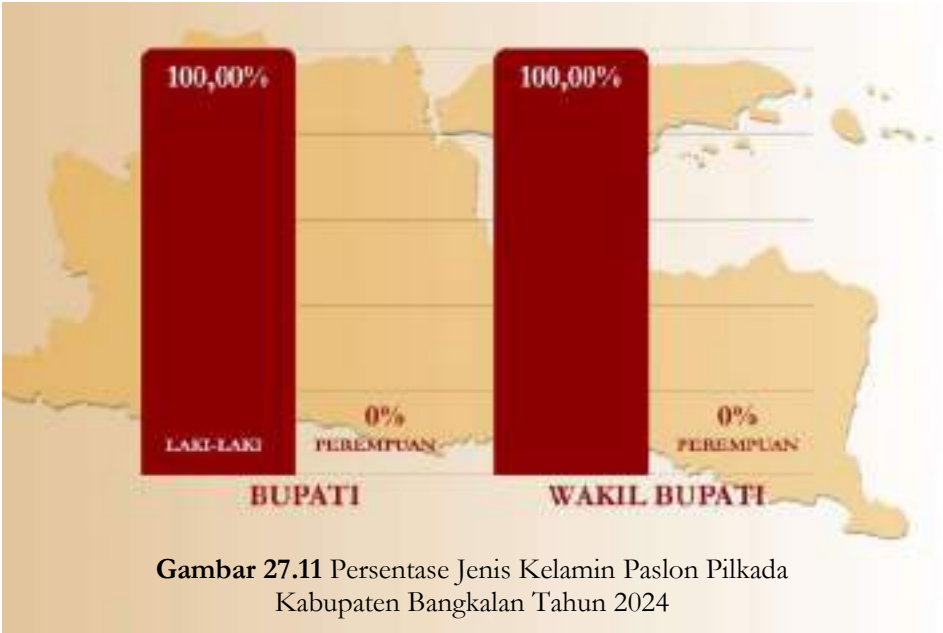
4. Pencalonan

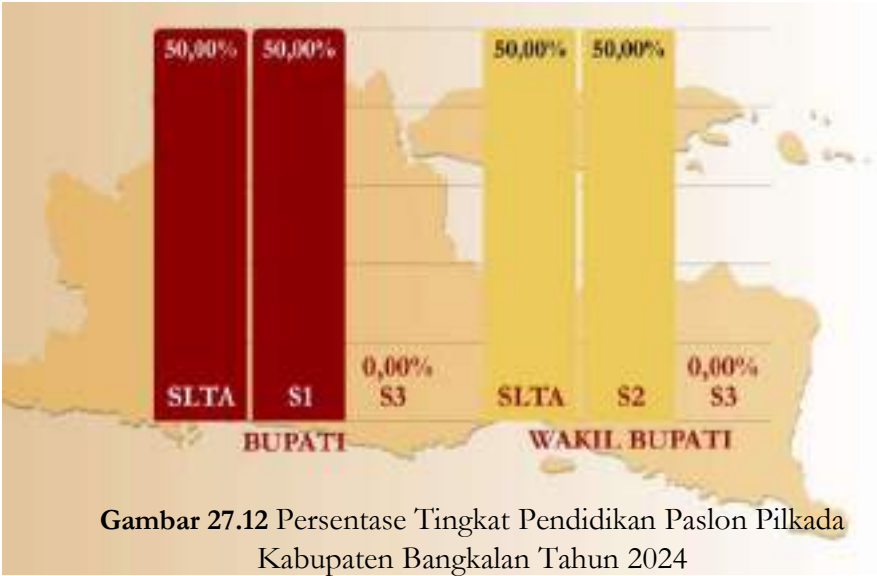
Pada tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, dua pasangan calon resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan pada hari terakhir masa pendaftaran, yakni tanggal 28 Agustus 2024, sesuai dengan jadwal tahapan pencalonan yang telah ditetapkan. Proses ini menunjukkan dinamika politik lokal yang cukup ketat, di mana kedua pasangan calon memanfaatkan batas waktu maksimal untuk merampungkan proses administratif dan koalisi dukungan politik.

Setelah melalui tahapan verifikasi dan penelitian dokumen pencalonan, KPU Kabupaten Bangkalan secara resmi menetapkan dua pasangan calon sebagai peserta Pilkada pada tanggal 22 September 2024. Penetapan ini menjadi tonggak awal dimulainya masa kampanye secara resmi. Keesokan harinya, yakni pada tanggal 23 September 2024, KPU Kabupaten Bangkalan menyelenggarakan pengundian dan penetapan nomor urut bagi kedua pasangan calon. Pengundian nomor urut merupakan bagian penting dalam memberikan identitas resmi pada masing-masing calon selama masa kampanye, serta untuk memudahkan pemilih dalam mengenali dan menentukan pilihannya saat hari pemungutan suara. Seluruh proses ini dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai regulasi, serta dihadiri oleh perwakilan pasangan calon dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada gambar 27.10. sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.



Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan disajikan pada gambar 27.11. dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan disajikan pada gambar 27.12.





Gambar 27.12 Persentase Tingkat Pendidikan Paslon Pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

Seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang berpartisipasi dalam Pilkada Bangkalan Tahun 2024 terdiri dari laki-laki, dengan total empat orang calon (dua calon Bupati dan dua calon Wakil Bupati) yang kesemuanya berjenis kelamin laki-laki (100%), tanpa ada calon perempuan.

Dari segi latar belakang pendidikan, seluruh pasangan calon memiliki tingkat pendidikan tinggi. Masing-masing terdapat satu calon Bupati dan satu calon Wakil Bupati yang bergelar Sarjana (S1), serta satu calon Bupati dan satu calon Wakil Bupati yang telah menyelesaikan pendidikan Magister (S2). Dengan demikian, dari total empat calon, dua orang (50%) bergelar S1 dan dua orang (50%) bergelar S2. Hal ini menunjukkan bahwa para kandidat memiliki latar belakang akademik yang memadai untuk menjalankan tugas pemerintahan di tingkat daerah.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 27.13 yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



Gambar 27.13 Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang menysar sembilan basis pemilih strategis dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024. Pendidikan pemilih ini bertujuan untuk membentuk karakter pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya. Adapun sembilan basis yang menjadi sasaran utama meliputi: pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih lansia, pemilih marginal, komunitas adat dan kepercayaan, kelompok keagamaan, serta kelompok profesional. Setiap kelompok disasar melalui metode sosialisasi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing, baik melalui pertemuan langsung, media sosial, hingga

pendekatan berbasis komunitas. Melalui pendekatan ini, KPU Kabupaten Bangkalan berharap partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 meningkat secara signifikan, tidak hanya dari segi jumlah pemilih yang datang ke TPS, tetapi juga dari kualitas pemilih yang memahami hak dan tanggung jawabnya dalam proses demokrasi.



Gambar 27.14 Media Sosialisasi Pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

Untuk menyemarakkan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Bangkalan memperkenalkan maskot resmi Pilkada sebagai simbol penyelenggaraan Pilkada yang ramah, partisipatif, dan dekat dengan masyarakat.



Gambar 27.15. Maskot Pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

Maskot Pilkada Bangkalan Tahun 2024 mengusung karakter ayam Gaok jantan dan betina yang diberi nama “BANG JAGO” (singkatan dari *Bangkalan Jangan Golput*) dan “JEBBHING RAMA” (*Joblosan Bangkalan Rakyat Makmur*). Ayam Gaok dipilih sebagai ikon karena merupakan hewan khas Kabupaten Bangkalan sekaligus menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat setempat. Selain aspek kultural dan ekonomi, maskot ini juga menyimbolkan nilai-nilai demokrasi. Mulut ayam Gaok yang tampak tersenyum menggambarkan semangat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan dalam menyelenggarakan Pilkada yang ramah, melayani, dan damai. Warna-warna mencolok seperti merah, oranye, dan kuning yang digunakan pada desain maskot melambangkan kobaran semangat dan energi dalam menyukseskan pesta demokrasi. Dengan filosofi ini, maskot “BANG JAGO” dan “JEBBHING RAMA” diharapkan mampu menjadi media edukatif dan komunikatif dalam mengajak masyarakat Bangkalan untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan berperan aktif dalam memastikan pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan regulasi. KPU memfasilitasi beberapa metode kampanye utama, antara lain: debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK), serta penayangan iklan di media cetak dan elektronik. Fasilitasi ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang dan kesempatan yang setara bagi seluruh pasangan calon dalam menyampaikan visi, misi, serta program kerja kepada masyarakat. Melalui dukungan ini, KPU Kabupaten Bangkalan berharap proses kampanye dapat berlangsung tertib, damai, dan mencerminkan semangat demokrasi yang inklusif dan berintegritas.



Gambar 27.16 Fasilitas Kampanye oleh KPU Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

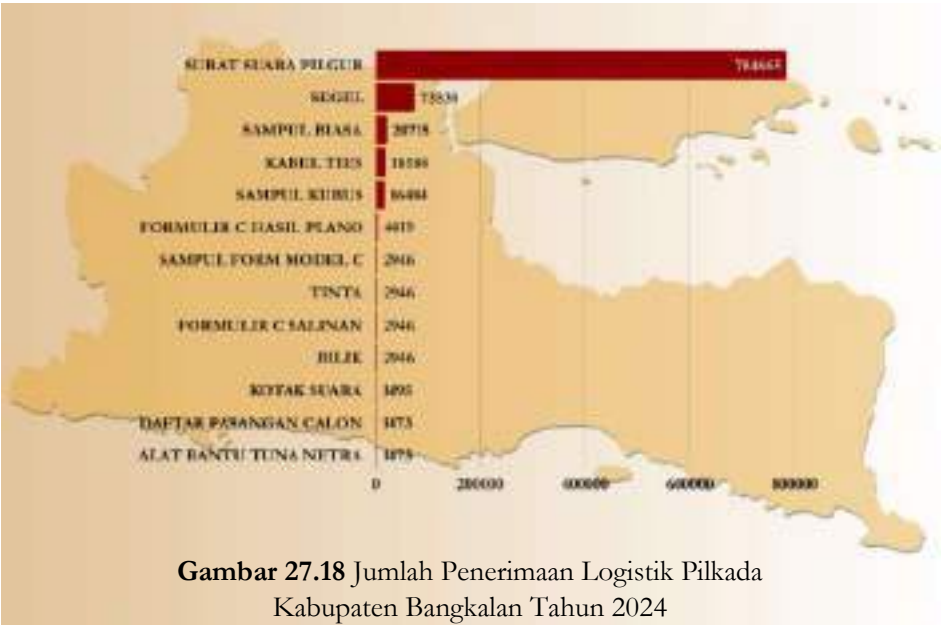
Dalam era digital, KPU Bangkalan juga mencatat dan memfasilitasi penggunaan Platform Media Sosial sebagai sarana kampanye daring. Masing-masing pasangan calon mendaftarkan akun resmi mereka agar pengawasan dan transparansi kampanye daring tetap terjaga. Secara keseluruhan, fasilitasi kampanye yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bangkalan bertujuan untuk menciptakan ruang kampanye yang setara, informatif, dan tertib demi terwujudnya Pilkada yang demokratis dan berintegritas.



Gambar 27.17 Jumlah Media Sosial Kampanye Pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

6. Logistik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan memulai proses distribusi logistik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 pada tanggal 23 November 2024, dengan Kecamatan Socah menjadi wilayah pertama yang menerima pengiriman logistik. Distribusi ini dijadwalkan selesai pada 25 November 2024, dua hari sebelum hari pemungutan suara. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada Gambar 27.18.



Gambar 27.18 Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

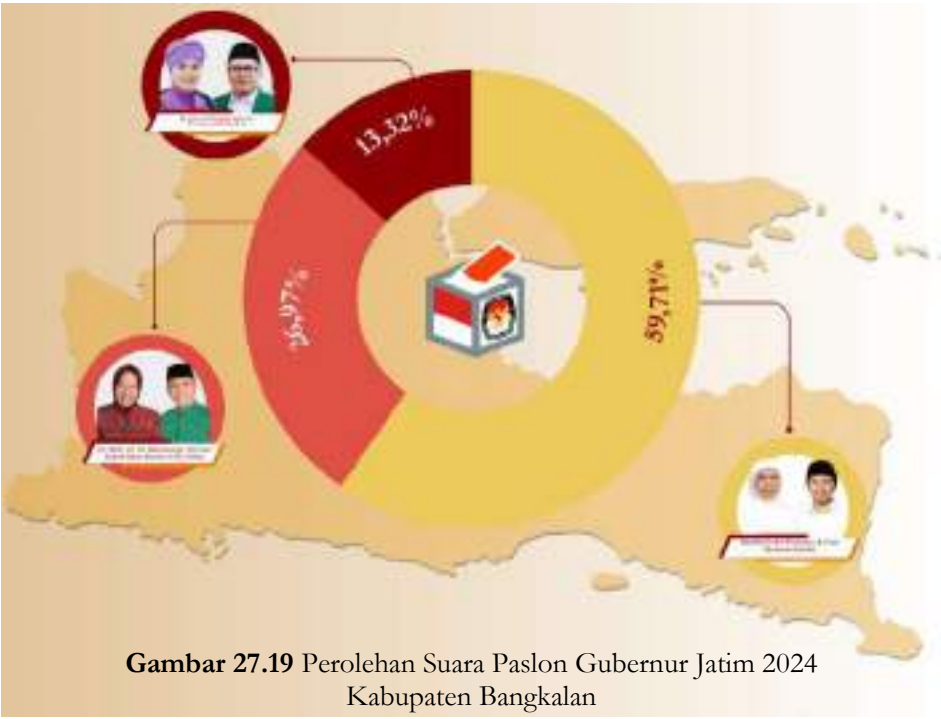
Distribusi logistik dilaksanakan dengan bekerja sama bersama PT Pos Indonesia dan melibatkan 15 armada utama, terdiri dari berbagai moda transportasi sesuai kondisi geografis wilayah. Distribusi ke kecamatan di wilayah daratan menggunakan 10 unit mobil truk dan 281 unit mobil pick up, sementara distribusi ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan menggunakan 1.743 kendaraan pick up. Untuk mendukung kelancaran proses, KPU Kabupaten Bangkalan melibatkan 200 orang petugas sortir dan pelipat surat suara, serta 45 orang petugas pengepakan (packing) logistik. Proses ini dilakukan secara swakelola dengan memberdayakan masyarakat sekitar gudang logistik.

Bawaslu Kabupaten Bangkalan aktif melakukan pengawasan selama proses distribusi guna memastikan integritas dan keamanan logistik. Aparat TNI dan Polri turut dilibatkan dalam pengamanan distribusi menuju kecamatan dan TPS, guna menjamin logistik tiba dengan

selamat dan tepat waktu. Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan juga melakukan peninjauan langsung ke beberapa TPS dan pos pengamanan untuk memastikan kesiapan teknis dan operasional pelaksanaan Pilkada 2024. Dengan koordinasi lintas sektor yang kuat serta pengawasan yang ketat, distribusi logistik Pilkada 2024 di Kabupaten Bangkalan berjalan lancar, aman, dan sesuai jadwal, mendukung terciptanya penyelenggaraan pemilihan yang demokratis, tertib, dan berintegritas.

7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Bangkalan disajikan pada gambar 27.19.

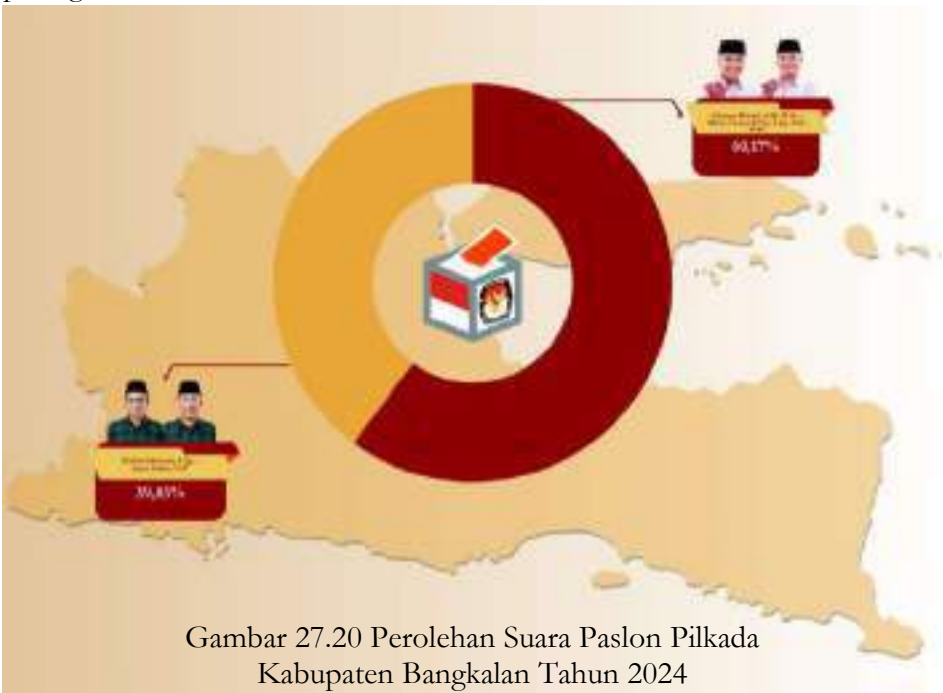


Gambar 27.19 Perolehan Suara Paslon Gubernur Jatim 2024 Kabupaten Bangkalan

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, total suara sah di Kabupaten Bangkalan mencapai 525.866 suara. Dari total tersebut, pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak memperoleh dukungan terbesar dengan 313.975 suara atau sebesar

59,71%. Di posisi kedua, pasangan Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) meraih 141.832 suara atau 26,97%, sedangkan pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah – H. Lukmanul Hakim memperoleh 70.059 suara atau 13,32%. Hasil ini menunjukkan dominasi pasangan petahana di Kabupaten Bangkalan, yang memperoleh dukungan lebih dari separuh jumlah suara sah.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 27.20.



Gambar 27.20 Perolehan Suara Paslon Pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, pasangan Lukman Hakim, S.IP., M.H. – Moch. Fauzan Ja’far, S.Ag., S.H., M.H. memperoleh suara terbanyak dengan total 319.072 suara atau sebesar 60,17% dari total suara sah. Sementara itu, pasangan Mathur Husyairi, S.Ag – Jayus Salam, S.IP memperoleh dukungan sebanyak 211.201 suara, atau setara dengan 39,83%. Jumlah total suara sah yang masuk sebanyak 530.273 suara. Dengan hasil ini, pasangan Lukman Hakim – Fauzan Ja’far dinyatakan sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan 2024, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil ini mencerminkan partisipasi masyarakat Bangkalan dalam menentukan arah kepemimpinan daerah untuk lima tahun ke depan.

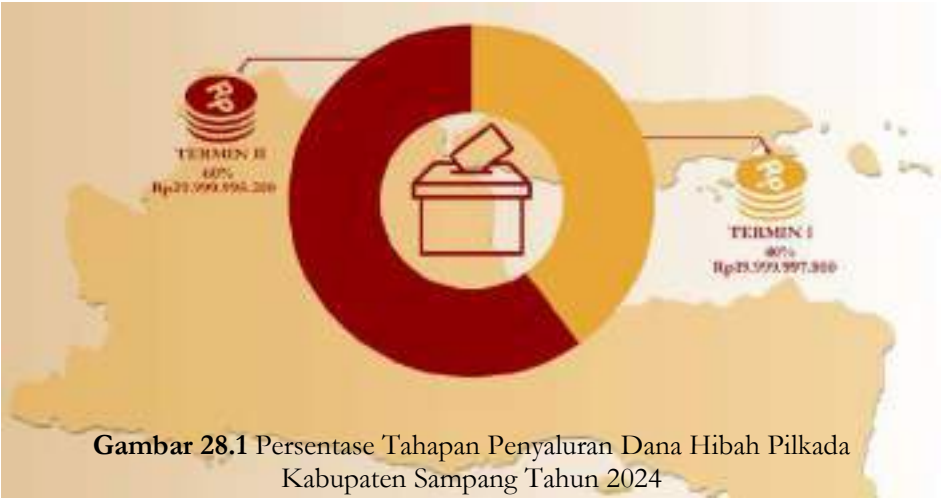
BAGIAN 28

KABUPATEN SAMPANG

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Proses perencanaan dan pengajuan dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 dilakukan dengan waktu dan tahapan yang cukup panjang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang mulai menyusun perencanaan anggaran sekitar satu tahun sebelum penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). NPHD tersebut resmi ditandatangani pada tanggal 9 November 2023 dan teregister dengan dua nomor dokumen, yakni 900/73043.304/2023 dan 582/KU.07-nk/3527/2023. Kedua dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pilkada Sampang 2024.

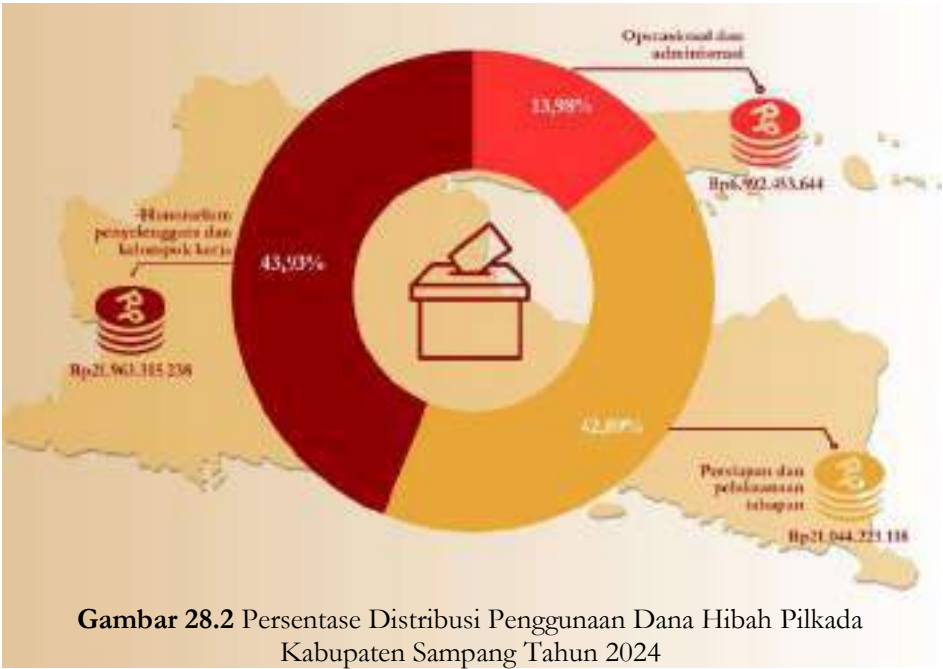
Pada tahap awal, KPU Kabupaten Sampang mengajukan usulan dana hibah sebesar Rp80.000.000.000 kepada Pemerintah Kabupaten Sampang. Namun, setelah melalui berbagai tahapan pembahasan dan dinamika negosiasi, jumlah yang akhirnya disetujui sebesar Rp49.999.992.000. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk mendukung seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada secara transparan, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 28.1. berikut.



Gambar 28.1 Persentase Tahapan Penyaluran Dana Hibah Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2024

Dana hibah yang disepakati untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 dicairkan dalam dua termin, sebagaimana tertuang dalam perjanjian NPHD antara KPU Kabupaten Sampang dan Pemerintah Kabupaten Sampang. Termin I sebesar 40% atau senilai Rp19.999.997.800 dicairkan pada tahun 2023, tak lama setelah penandatanganan NPHD pada 9 November 2023. Sementara itu, Termin II sebesar 60% atau senilai Rp29.999.995.200 dicairkan pada bulan Februari 2024, guna mendukung kelanjutan pelaksanaan tahapan Pilkada secara menyeluruh. Skema pencairan ini menjadi bentuk komitmen antara KPU dan Pemkab Sampang dalam menjamin keberlangsungan dan kesiapan penyelenggaraan Pilkada secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 28.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.



Anggaran hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 dialokasikan ke dalam tiga komponen utama. Alokasi terbesar diperuntukkan bagi pembayaran honorarium penyelenggara sebesar Rp21.963.315.238 atau setara 43,93% dari total dana hibah. Selanjutnya, untuk menunjang tahapan persiapan dan pelaksanaan Pilkada, dialokasikan dana sebesar Rp21.044.223.118 atau

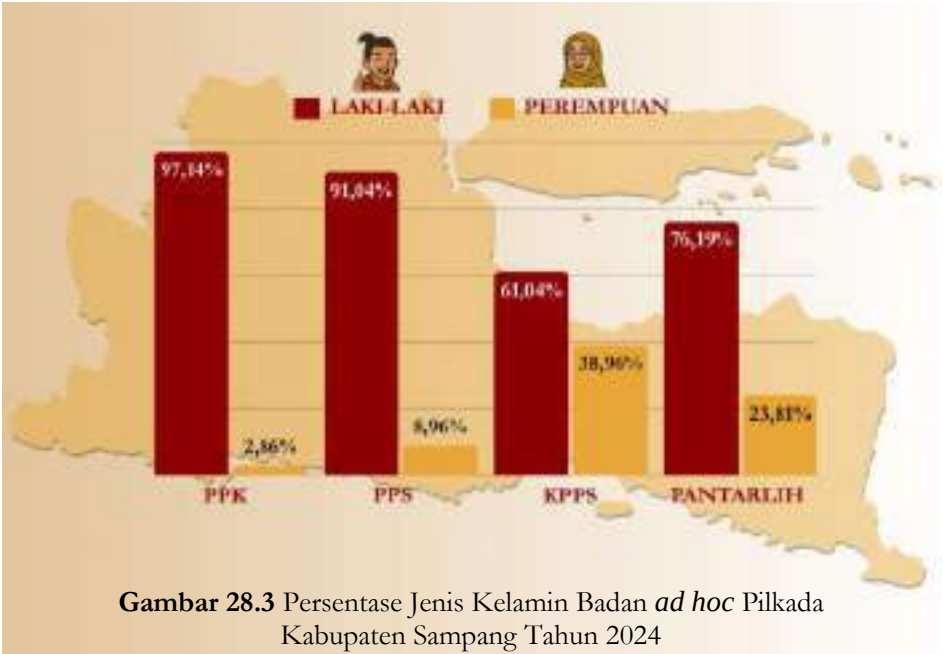
42,09% dari total anggaran. Sementara itu, sisanya digunakan untuk mendukung operasional dan administrasi perkantoran, yaitu sebesar Rp6.992.453.644 atau 13,98%. Pembagian komponen anggaran ini mencerminkan strategi pengelolaan yang proporsional, dengan fokus utama pada kelancaran tahapan serta kesejahteraan penyelenggara di semua level kePilkadaan.

2. Badan *Ad Hoc*

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang telah membentuk empat jenis badan *ad hoc*, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Total anggota badan *ad hoc* yang direkrut mencapai 12.623 orang, tersebar di seluruh wilayah administratif Kabupaten Sampang.

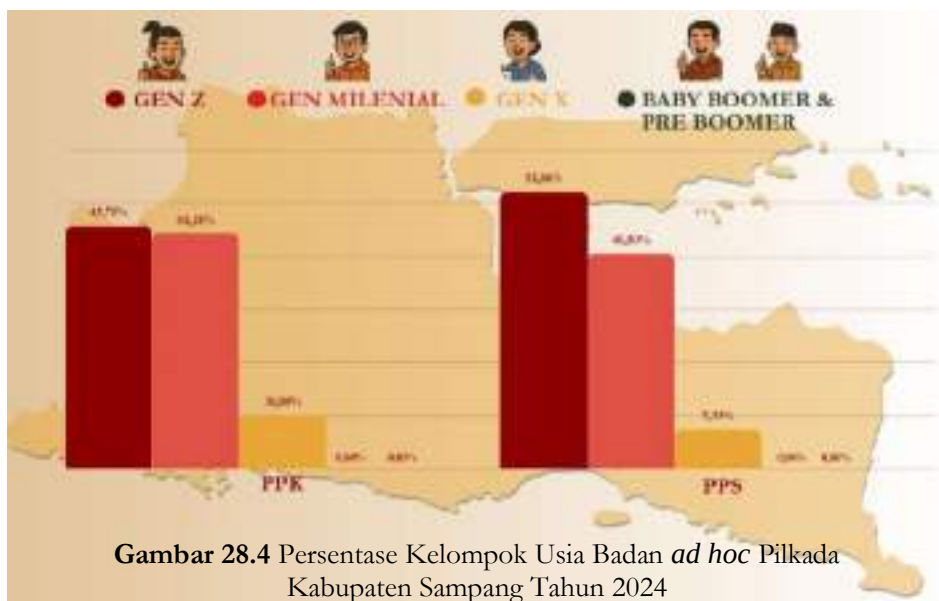
Proses pembentukan PPK diawali dengan pengumuman pendaftaran pada 23 April 2024 dan diikuti oleh 510 pelamar, proses seleksi menggunakan metode CAT yang dilaksanakan pada 7 Mei 2024 di Politeknik Negeri Madura (Poltera), bekerja sama dengan KPU Sampang. Hasil seleksi menetapkan 70 anggota PPK yang tersebar di 14 kecamatan, ditetapkan secara resmi pada 15 Mei 2024. Selanjutnya, rekrutmen PPS dimulai dengan pengumuman pendaftaran dan seleksi yang dilaksanakan melalui ujian tulis pada 17 Mei 2024 di GOR Indoor Sampang, diikuti oleh 2.351 peserta. Proses wawancara dilakukan oleh PPK sesuai wilayah kerja masing-masing. Berdasarkan hasil seleksi, KPU Sampang menetapkan 558 anggota PPS pada 25 Mei 2024. Untuk pemutakhiran data pemilih, KPU Sampang merekrut 2.587 orang Pantarlih dari total 2.713 pendaftar yang tersebar di 1.312 TPS di 186 desa/kelurahan di 14 kecamatan. Proses seleksi dilakukan oleh PPS berdasarkan wilayah kerja masing-masing, dan penetapan resmi dilakukan pada 23 Juni 2024. Terakhir, proses rekrutmen KPPS dimulai pada 17 September 2024 dan diikuti oleh 11.088 pendaftar. Setelah melalui tahapan seleksi, sebanyak 9.408 anggota KPPS ditetapkan pada 7 November 2024 untuk bertugas di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Sampang. Pembentukan badan *ad hoc* ini menjadi pondasi penting dalam mendukung keberhasilan seluruh tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Sampang, serta menjamin pelaksanaan Pilkada yang

partisipatif, profesional, dan berintegritas. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 28.3.



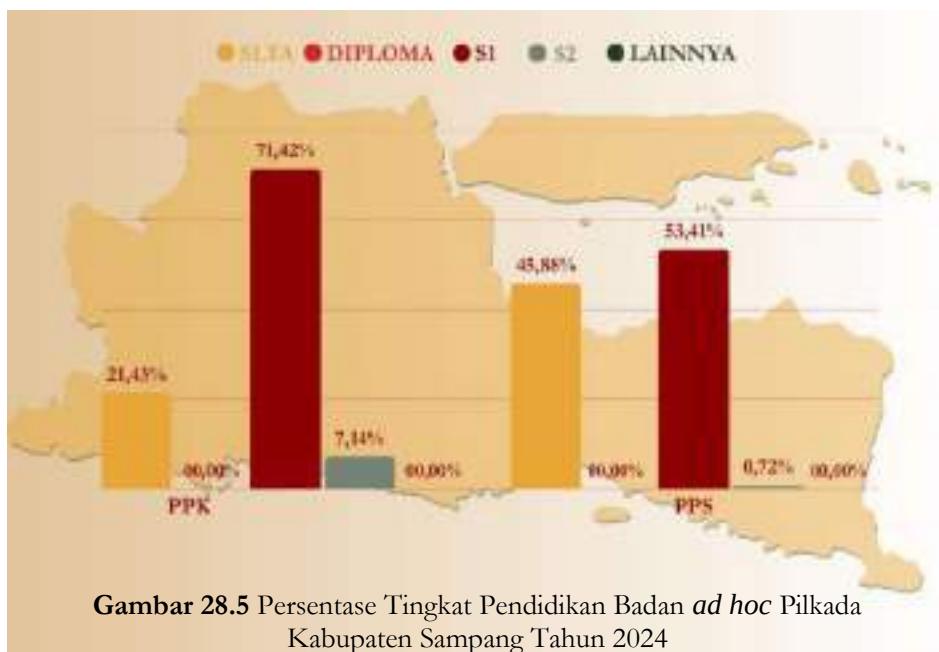
Komposisi badan *ad hoc* Pilkada Sampang Tahun 2024 didominasi oleh laki-laki di setiap tingkat penyelenggara. Pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebanyak 97,14% atau 68 orang adalah laki-laki, sementara hanya 2 orang atau 2,86% merupakan perempuan. Komposisi serupa terjadi pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan 508 laki-laki (91,04%) dan 50 perempuan (8,96%). Pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), proporsi laki-laki sebesar 61,04% atau 6.768 orang, sementara perempuan sebanyak 4.320 orang (38,96%). Adapun pada tingkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), terdapat 1.971 laki-laki (76,19%) dan 616 perempuan (23,81%). Dominasi partisipasi laki-laki dalam struktur badan *ad hoc* ini mencerminkan kecenderungan gender yang masih kuat dalam keterlibatan teknis Pilkada, meskipun partisipasi perempuan tetap menunjukkan peran penting di berbagai level.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 28.4 berikut.



Sebaran demografi badan *ad hoc* berdasarkan kelompok usia pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 menunjukkan dominasi generasi muda. Pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), kelompok usia 17–27 tahun (Generasi Z) menduduki proporsi terbesar dengan 45,71% atau 32 orang, disusul oleh kelompok usia 28–43 tahun (Generasi Milenial) sebesar 44,29% atau 31 orang, dan kelompok usia 44–59 tahun (Generasi X) sebesar 10,00% atau 7 orang. Komposisi serupa juga terlihat pada Panitia Pemungutan Suara (PPS), di mana Generasi Z mencakup 52,15% atau 291 orang, kemudian Generasi Milenial sebanyak 40,50% atau 226 orang, dan Generasi X sebesar 7,35% atau 41 orang. Tidak terdapat anggota PPK maupun PPS yang berasal dari kelompok usia Baby Boomer (60–78 tahun) maupun Pre-Boomer (>79 tahun). Data ini menggambarkan bahwa keterlibatan generasi muda dalam penyelenggaraan Pilkada Sampang cukup dominan, yang mencerminkan semangat partisipatif dan regenerasi dalam kePilkadaan.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 28.5.



Sebaran demografi berdasarkan tingkat pendidikan pada badan *ad hoc* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 menunjukkan bahwa mayoritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Pada PPK, sebanyak 71,43% atau 50 orang merupakan lulusan Strata 1 (S1), diikuti oleh lulusan Strata 2 (S2) sebesar 7,14% atau 5 orang, serta lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 21,43% atau 15 orang. Sementara itu, pada PPS, proporsi terbanyak juga berasal dari lulusan S1 sebesar 53,41% atau 298 orang, kemudian SLTA sebanyak 45,88% atau 256 orang, dan S2 hanya 0,72% atau 4 orang. Tidak terdapat anggota PPK maupun PPS yang berasal dari lulusan diploma ataupun kategori pendidikan lainnya. Data ini mencerminkan bahwa penyelenggara Pilkada di Kabupaten Sampang didominasi oleh individu dengan pendidikan tinggi, yang diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel.

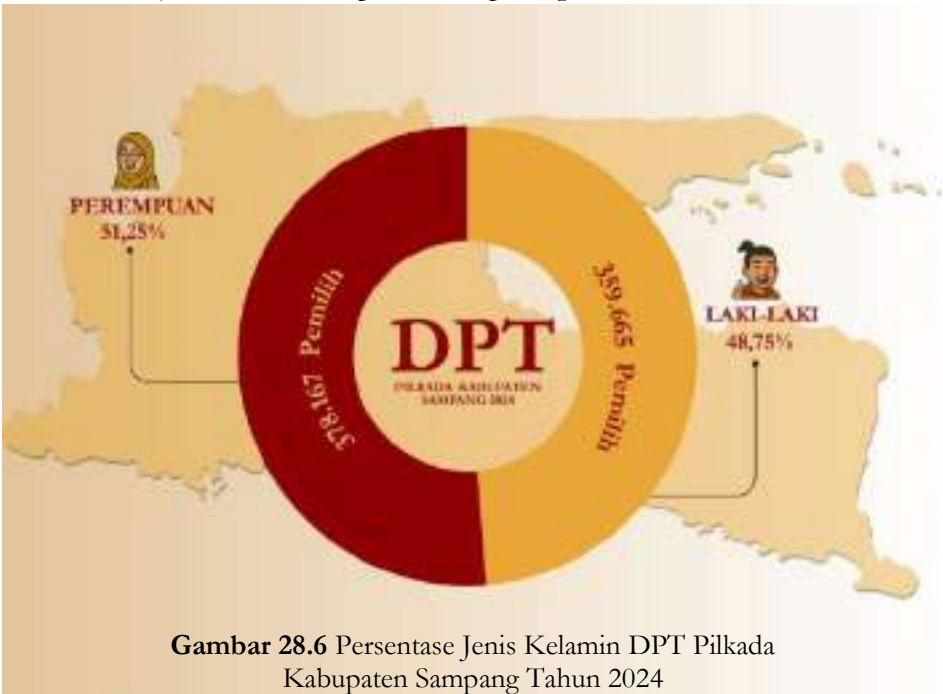
Dalam pelaksanaan rekrutmen Badan *ad hoc* Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sampang, belum terdapat anggota yang berasal dari kelompok penyandang disabilitas pada tingkat PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih. Sebagai perbaikan dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sampang ke depan, keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen Badan *ad hoc* perlu mendapatkan perhatian lebih, guna mendorong

inklusivitas dan representasi yang lebih setara dalam penyelenggaraan Pilkada.

3. Pemutakhiran Data

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 sebanyak 737.832 pemilih. Penetapan ini dilakukan pada tanggal 20 September 2024 melalui Berita Acara Nomor: 180/PL.01.2-BA/3527/2024 dan dituangkan secara resmi dalam Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 803 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Kabupaten Sampang.

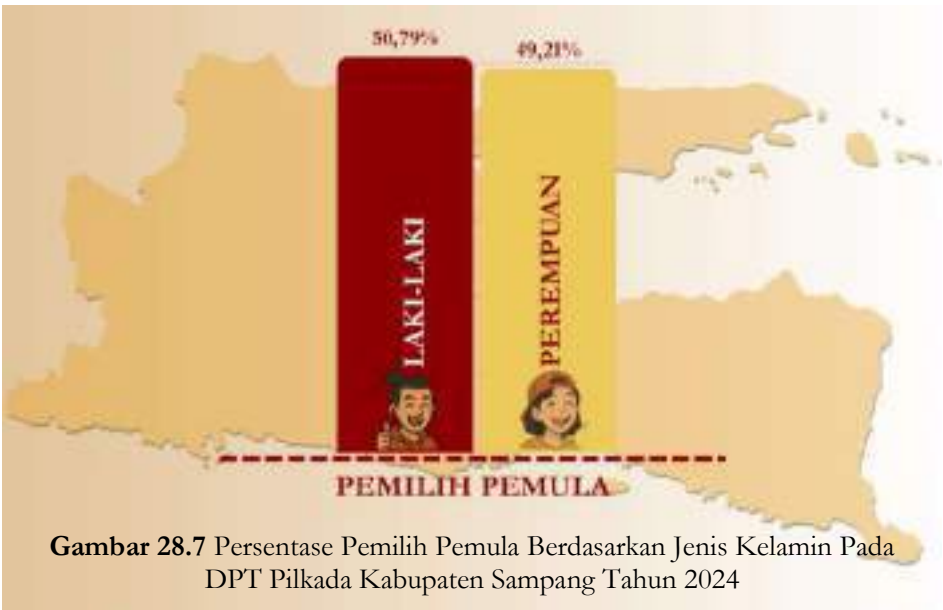
Validitas DPT ini terkonfirmasi dengan selisih jumlah sebesar 27% dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Sampang menurut Data Agregat Kependudukan (DAK2) Tahun 2024 yang berjumlah 1.007.272 jiwa. Selisih ini menunjukkan proporsi pemilih yang realistis berdasarkan populasi usia memilih dan hasil pemutakhiran yang akurat, serta mencerminkan upaya optimal KPU dalam memastikan bahwa data pemilih yang digunakan dalam Pilkada benar-benar mencerminkan kondisi demografis riil masyarakat Kabupaten Sampang. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 28.6.



Gambar 28.6 Persentase Jenis Kelamin DPT Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2024

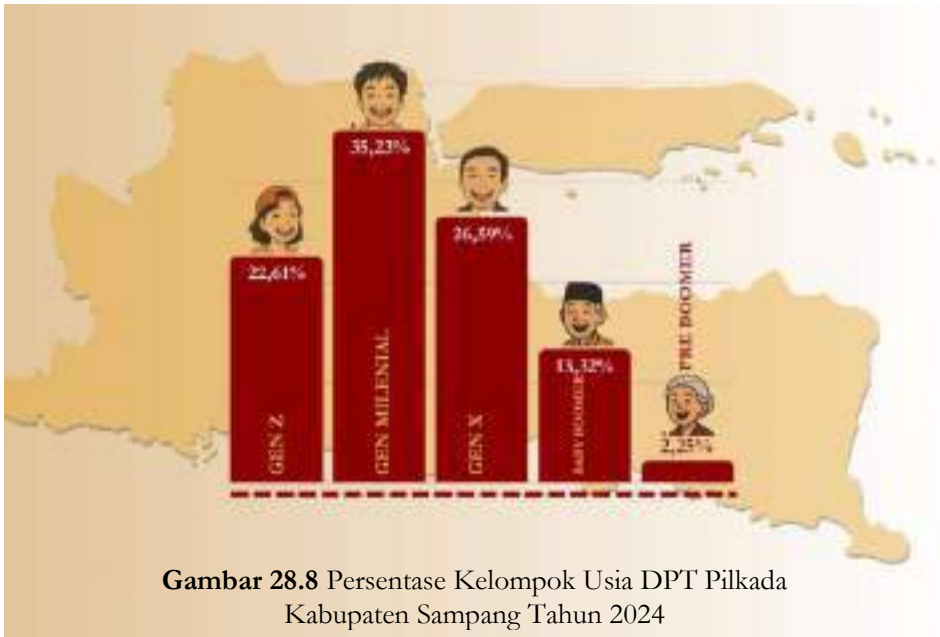
Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2024, jumlah pemilih terbanyak berasal dari jenis kelamin perempuan. Tercatat sebanyak 378.167 pemilih perempuan (51,25%), lebih tinggi dibandingkan jumlah pemilih laki-laki yang berjumlah 359.665 orang (48,75%). Komposisi ini menunjukkan adanya partisipasi yang seimbang namun tetap didominasi oleh pemilih perempuan dalam struktur demografi pemilih di Kabupaten Sampang.

Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni pemilih pemula dan pemilih non-pemula. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 28.7 berikut.



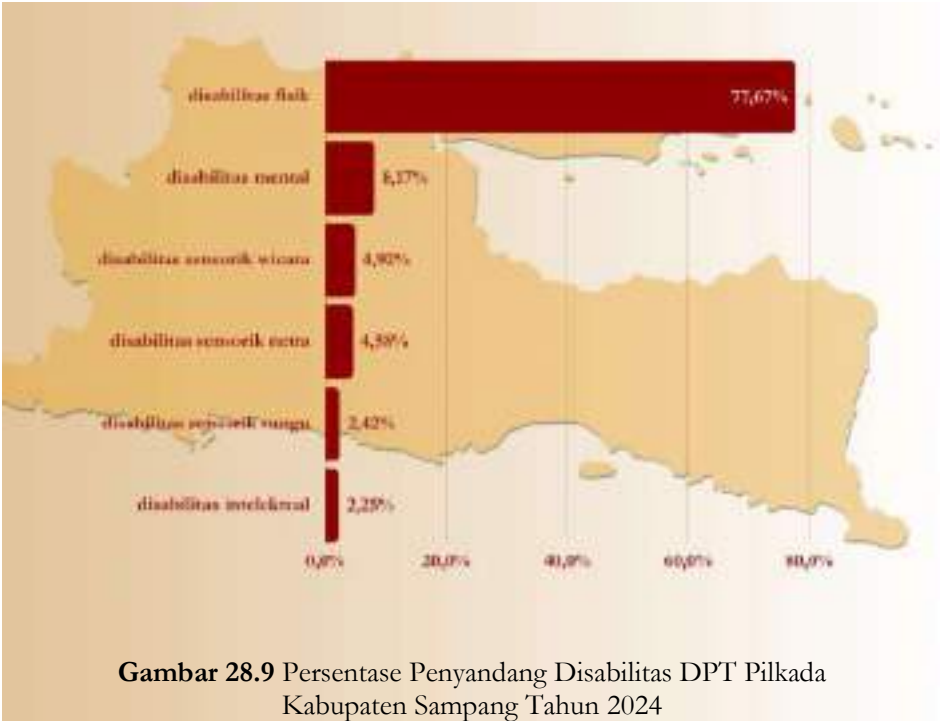
Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sampang Tahun 2024, terdapat status pemilih pemula. jumlah pemilih pemula tercatat sebanyak 4.721 orang, terdiri dari 2.398 laki-laki (50,79%) dan 2.323 perempuan (49,21%).

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada Gambar 28.8.



Komposisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sampang Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa kelompok usia 28–43 tahun (Generasi Milenial) mendominasi dengan jumlah 259.973 pemilih atau 35,23% dari total DPT. Disusul oleh Generasi X (44–59 tahun) sebanyak 196.192 pemilih (26,59%), dan Generasi Z (17–27 tahun) dengan 166.805 pemilih (22,61%). Sementara itu, kelompok usia 60–78 tahun (*Baby Boomer*) berjumlah 98.267 pemilih (13,32%), dan *Pre-Boomer* (>79 tahun) tercatat sebanyak 16.595 pemilih (2,25%). Data ini mengindikasikan bahwa mayoritas pemilih berasal dari usia produktif, khususnya generasi milenial dan gen Z.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten Sampang Tahun 2024 disajikan pada gambar 28.9, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sampang Tahun 2024, tercatat sebanyak 1.200 pemilih penyandang disabilitas yang tersebar dalam berbagai kategori. Mayoritas pemilih disabilitas berasal dari kelompok disabilitas fisik dengan jumlah 932 orang (77,67%), disusul oleh disabilitas mental sebanyak 98 orang (8,17%), disabilitas sensorik wicara sebanyak 59 orang (4,92%), dan disabilitas sensorik netra sebanyak 55 orang (4,58%). Sementara itu, penyandang disabilitas sensorik rungu berjumlah 29 orang (2,42%) dan disabilitas intelektual tercatat sebanyak 27 orang (2,25%). Data ini menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Sampang untuk mengakomodasi hak pilih seluruh warga, termasuk kelompok disabilitas.

4. Pencalonan

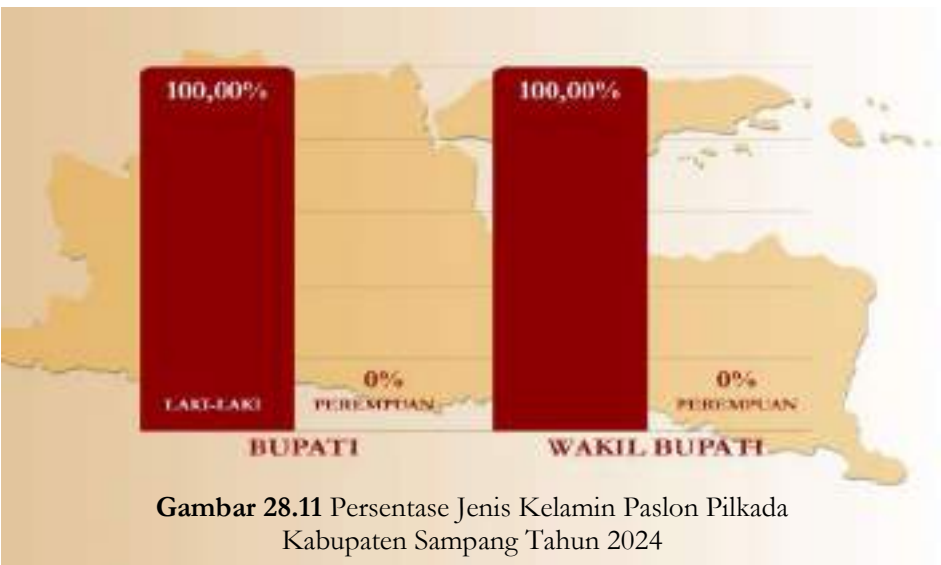
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, kontestasi diikuti oleh dua pasangan calon yang masing-masing memperoleh dukungan dari gabungan partai politik yang ada di Kabupaten Sampang. Kedua pasangan calon tersebut mendaftar secara resmi sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses pencalonan ini mencerminkan dinamika politik lokal yang kompetitif dan partisipatif, serta menjadi

cerminan dari keterlibatan aktif partai politik dalam menghadirkan kepemimpinan daerah yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada gambar 28.10 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.

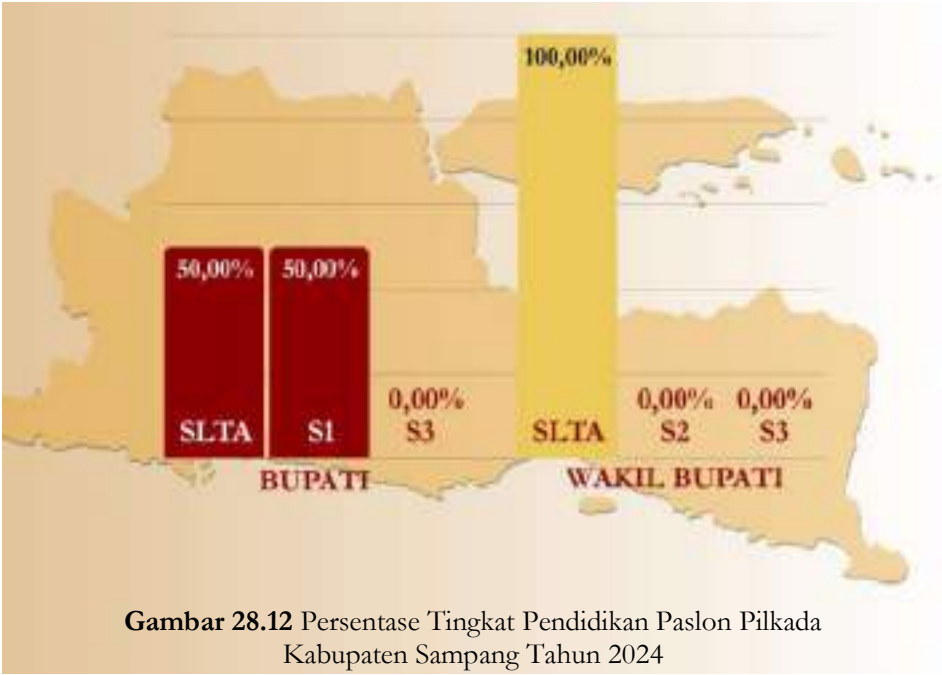


Gambar 28.10 Daftar Nama Paslon Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2024

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang disajikan pada gambar 28.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang disajikan pada gambar 28.12.



Gambar 28.11 Persentase Jenis Kelamin Paslon Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2024



Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, seluruh pasangan calon terdiri dari laki-laki, baik untuk posisi Bupati maupun Wakil Bupati. Secara keseluruhan terdapat 4 orang calon yang seluruhnya adalah laki-laki, sehingga sebaran berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa 100% calon berasal dari kelompok laki-laki.

Dari sisi latar belakang pendidikan, mayoritas pasangan calon memiliki tingkat pendidikan menengah atas (SLTA), yaitu sebanyak 3 orang (75%), sementara 1 orang lainnya memiliki pendidikan sarjana (S1) atau sebesar 25%.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 28.13, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



Gambar 28.13 Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat serta pemahaman terhadap seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan beragam metode yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi tatap muka secara langsung kepada masyarakat, kirab maskot Pilkada sebagai sarana edukasi yang atraktif, pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) di berbagai titik strategis, penyebaran bahan sosialisasi yang informatif, serta pelibatan media melalui kegiatan media gathering bersama insan pers.

Kegiatan ini menargetkan capaian sebanyak 10.000 peserta sosialisasi, baik dari basis pemilih umum maupun kelompok strategis lainnya. Untuk menunjang publikasi dan penyebaran informasi yang lebih luas, KPU Kabupaten Sampang juga menggandeng 58 media, baik cetak, elektronik, maupun digital. Kehadiran media menjadi mitra strategis dalam menyampaikan pesan-pesan kePilkadaan secara massif, kredibel, dan

berimbang kepada masyarakat. Melalui pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif ini, KPU Sampang berkomitmen menciptakan pemilih yang cerdas dan berdaya dalam menentukan hak pilihnya secara demokratis.

Untuk membangun kedekatan dengan budaya lokal serta meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap Pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang memperkenalkan maskot Pilkada 2024 dengan mengangkat buah khas daerah yaitu *Jambu Air* atau yang lebih dikenal dengan sebutan Klampok dalam bahasa Madura. Buah ini dipilih sebagai simbol karena memiliki keterikatan erat dengan identitas masyarakat Sampang.



Maskot ini terdiri dari dua karakter: **Sakor** dan **Sami**. Sakor digambarkan mengenakan pakaian adat Madura khas *Sakera*, berdiri tegap dengan senyum lebar, menyimbolkan semangat positif dan kegembiraan dalam menjalani proses demokrasi. Sementara Sami tampil mengenakan busana *Marlena*, dengan jari kelingking kirinya tercelup tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilih, dan tangan kanannya memegang surat suara bertuliskan tanggal pelaksanaan Pilkada serta sebuah paku khas pencoblosan yang dihiasi daun segar di atasnya. Daun ini melambangkan harapan akan pertumbuhan dan kemajuan Kabupaten Sampang melalui pemimpin yang terpilih. Dominasi warna hijau pada maskot tetap mempertahankan warna asli buah Klampok, tanpa ada kecenderungan pada simbol warna partai politik tertentu. Kotak suara yang ditampilkan dalam desain hanya digunakan sebagai ornamen visual menarik dan tidak

merepresentasikan bentuk sebenarnya kotak suara Pilkada. Dengan maskot Sakor dan Sami, KPU Sampang ingin menghadirkan nuansa edukatif, meriah, dan membumi dalam menyambut Pilkada Serentak 2024, sekaligus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan ceria dalam perhelatan demokrasi lima tahunan ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang memiliki peran strategis dalam menjamin pelaksanaan kampanye yang adil, transparan, dan setara bagi seluruh pasangan calon. Dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, KPU menyediakan berbagai fasilitas kampanye, yang mencakup penyediaan Bahan Kampanye (BK), Alat Peraga Kampanye (APK), iklan kampanye di media massa, serta pelaksanaan debat publik antar pasangan calon.

Fasilitas Bahan Kampanye (BK) yang disediakan oleh KPU meliputi pamflet, brosur, poster, dan selebaran yang dapat digunakan pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Sementara itu, untuk APK, KPU menyediakan baliho, umbul-umbul, dan spanduk yang ditempatkan di titik-titik strategis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KPU juga memfasilitasi iklan kampanye melalui media massa, baik radio maupun televisi lokal, sebagai upaya untuk menjangkau pemilih yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi pemilih.

Sebagai bagian dari edukasi politik dan transparansi publik, KPU Kabupaten Sampang menyelenggarakan dua kali debat publik antar pasangan calon. Debat pertama dilaksanakan pada 4 November 2024 dengan tema *“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memajukan Daerah”*. Sedangkan debat kedua diselenggarakan pada 12 November 2024 dengan tema *“Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif, Inklusif, dan Berkeadilan dalam Upaya Menyelesaikan Persoalan Daerah”*. Dengan fasilitasi kampanye yang menyeluruh ini, KPU Kabupaten Sampang berharap proses kampanye berlangsung secara informatif, kondusif, dan berkontribusi pada meningkatnya kualitas demokrasi lokal.



Gambar 28.15 Kegiatan Debat Publik Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2024



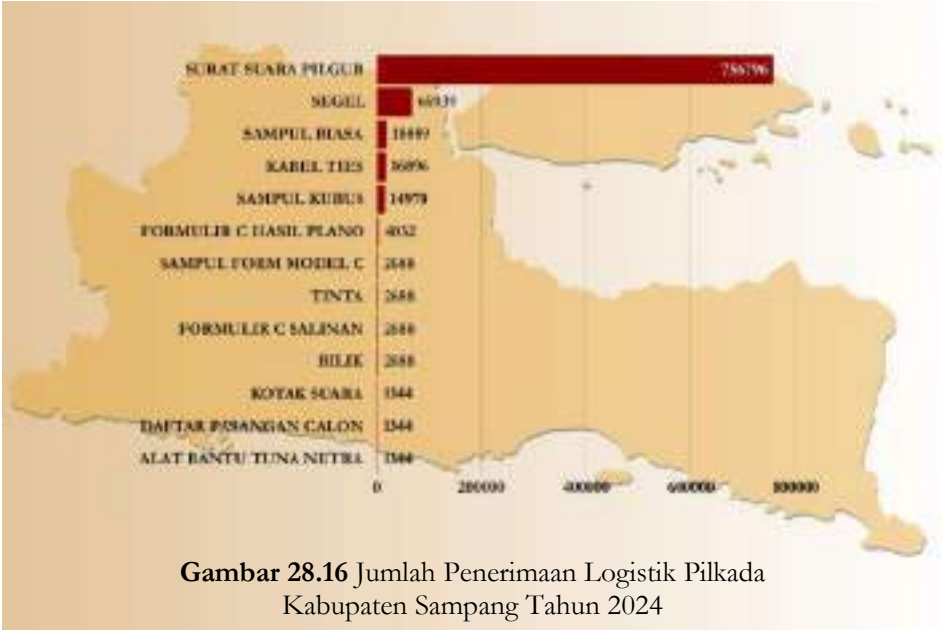
Gambar 28.15 Fasilitas Kampanye oleh KPU Kabupaten Sampang Tahun 2024

6. Logistik

Dalam rangka menjamin tersedianya perlengkapan dan kebutuhan logistik secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang melaksanakan proses pengadaan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 melalui dua mekanisme utama, yaitu *e-Purchasing* melalui *e-Katalog* dan Penunjukan Langsung.

Metode *e-Purchasing* dilakukan dengan memanfaatkan sistem *e-Katalog* yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), guna memastikan transparansi, efisiensi anggaran, dan

kemudahan dalam proses pengadaan barang. Sementara itu, untuk kebutuhan logistik yang bersifat mendesak atau tidak tersedia di *e-Katalog*, KPU Sampang menggunakan metode Penunjukan Langsung sesuai ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya. Kedua metode ini digunakan untuk menjamin bahwa seluruh kebutuhan logistik Pilkada, seperti kotak suara, bilik suara, formulir, tinta, dan perlengkapan TPS lainnya, dapat tersedia tepat waktu, dalam jumlah yang cukup, dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 28.16.



Dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang menyelenggarakan proses sortir dan pelipatan surat suara secara intensif pada tanggal 28 Oktober hingga 13 November 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di gudang logistik KPU di Jalan Wahid Hasyim, Sampang, dengan melibatkan 75 orang petugas yang bertanggung jawab dalam proses sortir, *setting*, *checking*, dan *packing* logistik Pilkada.

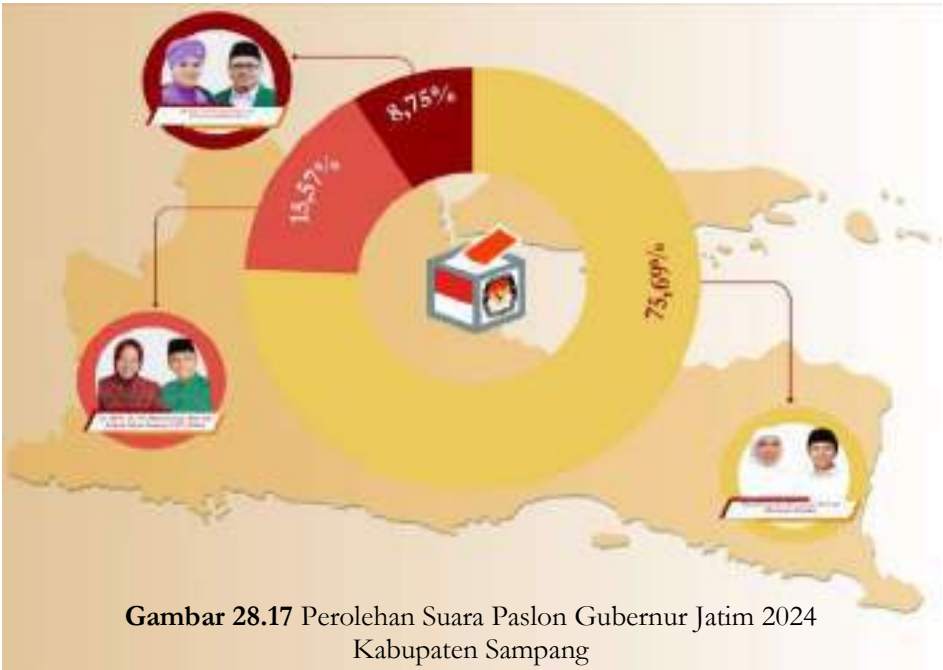
Untuk distribusi logistik ke seluruh wilayah di Kabupaten Sampang, KPU memanfaatkan 14 unit mobil truk dan 186 unit mobil *pick-up*, yang secara total melakukan 1.344 kali pengiriman ke seluruh kecamatan dan desa. Distribusi dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi untuk

menjamin logistik sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik. Namun demikian, terdapat tantangan geografis dalam proses pendistribusian, khususnya di dua kecamatan dan tiga desa dengan akses yang sulit dijangkau. Lokasi tersebut meliputi Desa Pulau Mandangin di Kecamatan Sampang, serta Desa Marparan dan Desa Disanah di Kecamatan Sreseh. Untuk wilayah-wilayah tersebut, KPU bekerja sama dengan pihak keamanan serta mengoptimalkan moda transportasi agar distribusi logistik tetap terlaksana dengan aman, tepat waktu, dan menjangkau seluruh pemilih.

Dengan sinergi antar berbagai pihak dan perencanaan yang matang, distribusi logistik Pilkada 2024 di Kabupaten Sampang berjalan lancar sebagai bagian dari komitmen mewujudkan Pilkada yang demokratis dan profesional.

7. Hasil Pilkada Serentak

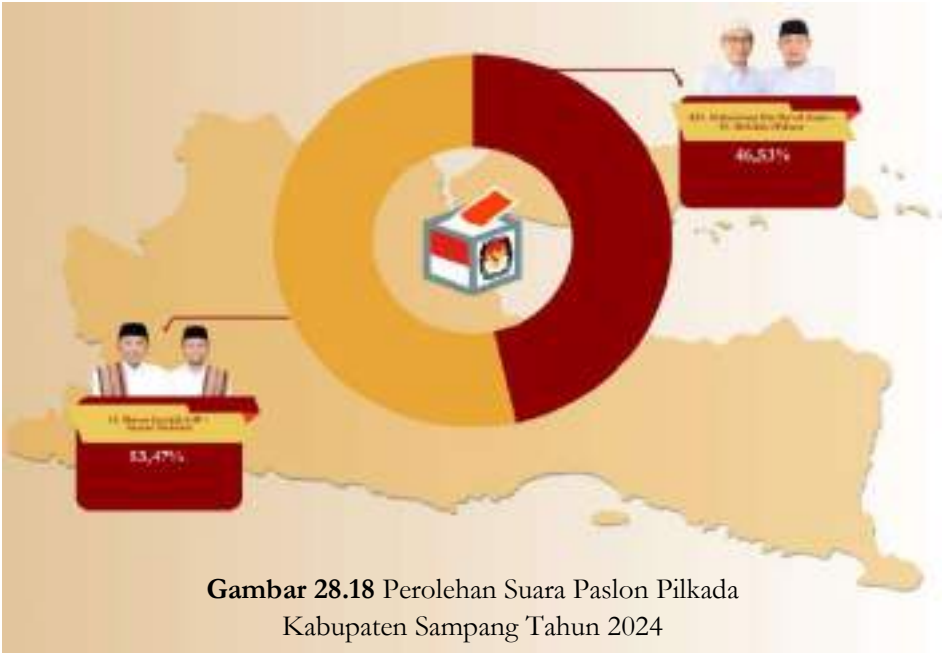
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Sampang disajikan pada gambar 28.17.



Gambar 28.17 Perolehan Suara Paslon Gubernur Jatim 2024 Kabupaten Sampang

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di Kabupaten Sampang, pasangan Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestjanto Dardak meraih perolehan suara terbanyak dengan jumlah 469.124 suara atau sebesar 75,69% dari total suara sah. Di posisi kedua, pasangan Tri Rismaharini - Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) memperoleh 96.486 suara atau 15,57%, sedangkan pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah - H. Lukmanul Hakim meraih 54.206 suara atau 8,75%. Total suara sah yang tercatat dalam pemilihan ini mencapai 619.816 suara, mencerminkan partisipasi masyarakat Sampang dalam menentukan kepemimpinan Provinsi Jawa Timur secara demokratis.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 28.18.



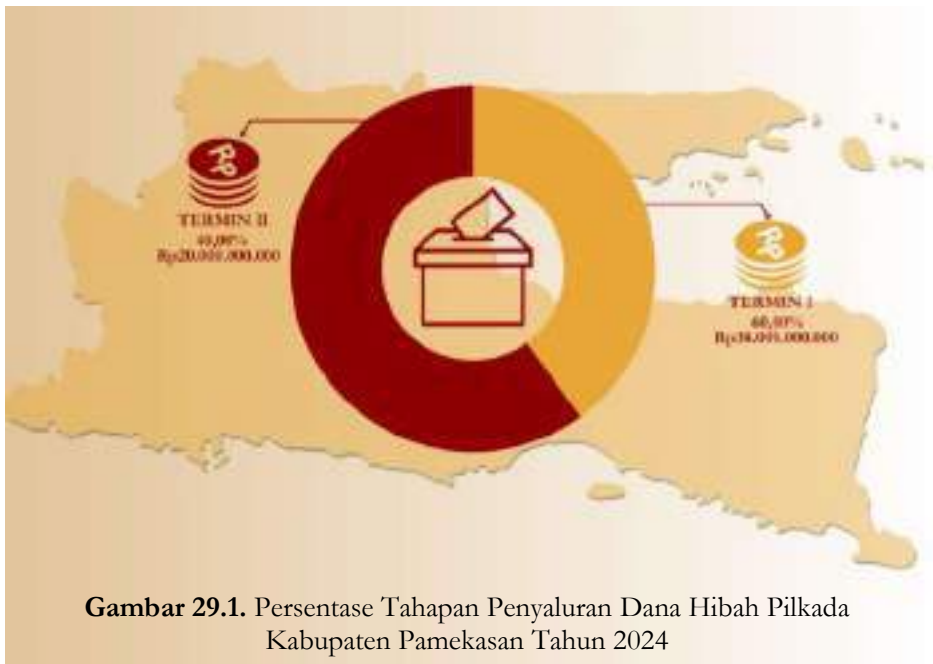
Dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, pasangan H. Slamet Junaidi, S.IP – Ahmad Mahfudz unggul dengan memperoleh 338.482 suara atau sebesar 53,47% dari total suara sah. Sementara itu, pasangan KH. Muhammad Bin Mu'afi Zaini – H. Abdullah Hidayat meraih 294.605 suara, setara dengan 46,53%. Jumlah total suara sah yang tercatat mencapai 633.087 suara, menunjukkan antusiasme masyarakat Kabupaten Sampang dalam menyalurkan hak pilihnya secara demokratis dan damai.

KABUPATEN PAMEKASAN

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan memulai proses pengajuan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 dengan mengadakan rapat koordinasi awal bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pamekasan pada tanggal 6 Februari 2023. Dalam pertemuan tersebut, KPU mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp69.073.587.736. Selanjutnya, pembahasan berlanjut dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan yang dilaksanakan pada 24 Mei 2023, serta beberapa kali pertemuan lanjutan guna menyesuaikan alokasi anggaran sesuai kemampuan fiskal daerah.

Pada 3 November 2023, dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan KPU Kabupaten Pamekasan dengan nilai yang disepakati sebesar Rp50.000.000.000. Penandatanganan dilakukan oleh Pj. Bupati Pamekasan, Bapak Masrukin, dan Ketua KPU Kabupaten Pamekasan, Moh. Halili, bertempat di Ruang Peringgitan Jalan Rong-gosukowati, serta disaksikan oleh Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, Bapak Miftahur Rozak. Proses ini mencerminkan sinergi antara KPU dan Pemerintah Daerah dalam memastikan terselenggaranya Pilkada yang efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada Gambar 29.1 berikut.

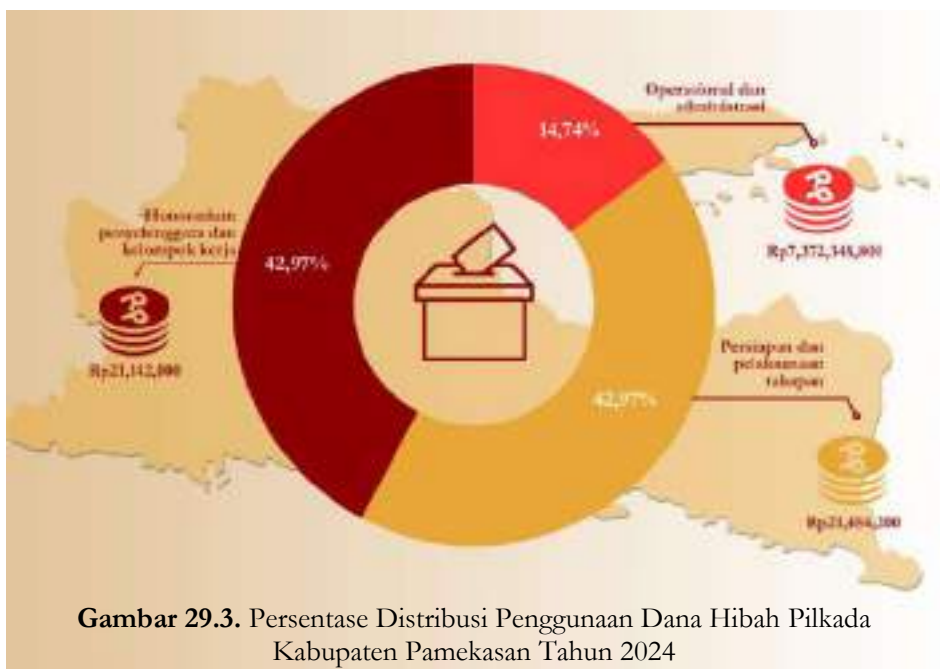


Distribusi dana hibah Pilkada Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 disalurkan melalui dua termin. Termin pertama dicairkan tanggal 14 November 2023 sebesar Rp20.000.000.000 atau 40% dari total anggaran, dan termin kedua dicairkan tanggal 10 Juni 2024 sebesar Rp30.000.000.000 atau 60% dari total anggaran. Skema pencairan ini disesuaikan dengan kebutuhan tahapan penyelenggaraan Pilkada dan kapasitas fiskal daerah. Pembagian dana ini diharapkan mampu mendukung kelancaran seluruh proses penyelenggaraan Pilkada, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga tahapan akhir secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu.



Gambar 29.2. Penandatanganan Dana Hibah Pilkada Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada Gambar 29.3, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.



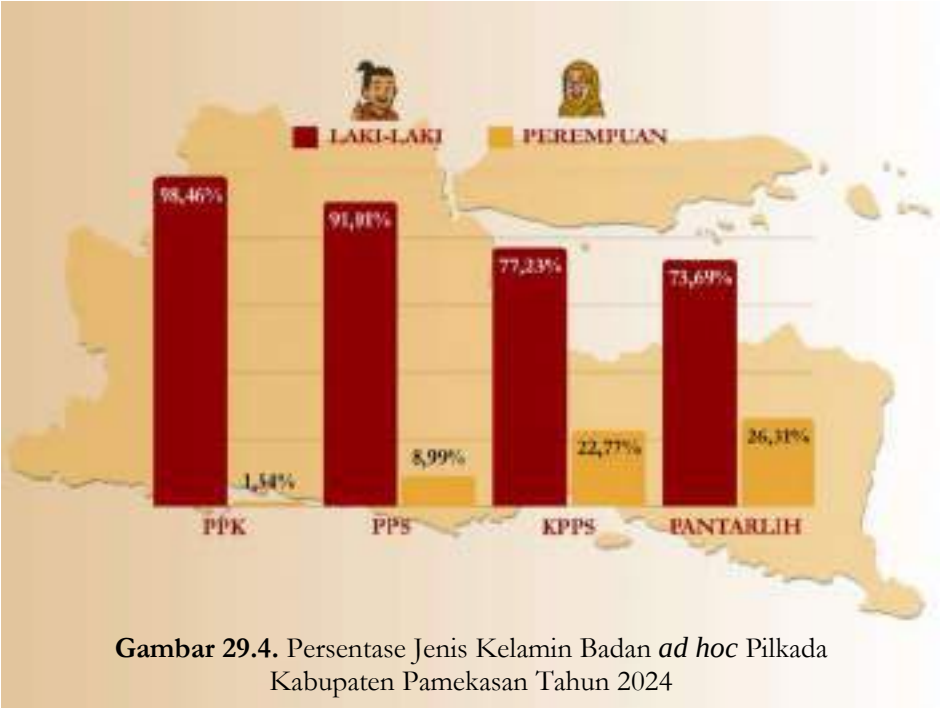
Anggaran hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 dialokasikan ke dalam tiga komponen utama. Pertama, anggaran untuk Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan sebesar Rp21.484.754.200 atau 42,97% dari total anggaran. Alokasi ini mencakup seluruh kegiatan teknis dan operasional penyelenggaraan tahapan Pilkada mulai dari perencanaan, pemutakhiran data, logistik, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Kedua, untuk Operasional dan Administrasi Perkantoran, dialokasikan dana sebesar Rp7.372.345.800 atau 14,74%, yang digunakan untuk mendukung kebutuhan fasilitas kerja, peralatan, dan penunjang administrasi lainnya. Ketiga, komponen terbesar kedua adalah Honorarium, yang dialokasikan sebesar Rp21.142.900.000 atau 42,29%, digunakan untuk pembayaran honor bagi badan *ad hoc* penyelenggara Pilkada, seperti PPK, PPS, KPPS, dan petugas lainnya. Komposisi alokasi anggaran ini menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Pamekasan untuk memastikan tahapan Pilkada berjalan efisien dan akuntabel, dengan memperhatikan proporsionalitas kebutuhan teknis dan administratif.

2. Badan *Ad Hoc*

Dalam rangka menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan membentuk badan *ad hoc* yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan

Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pembentukan badan *ad hoc* ini mengacu pada Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 dan dilakukan secara terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi melalui tahapan seleksi administratif, *Computer Assisted Test* (CAT), dan wawancara.

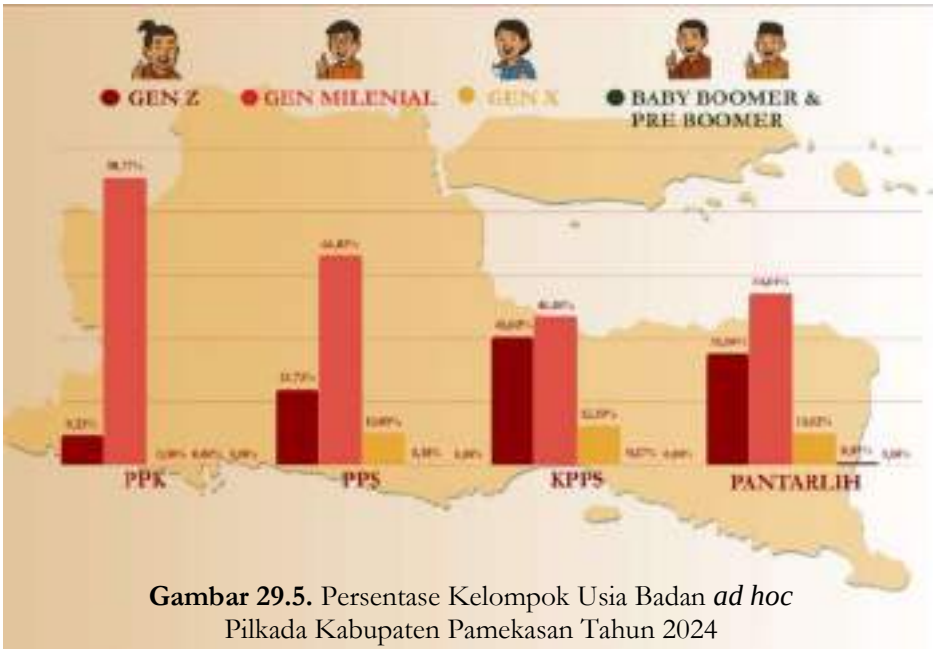
KPU Kabupaten Pamekasan berhasil merekrut 65 anggota PPK di 13 kecamatan, 567 anggota PPS untuk 178 desa dan 11 kelurahan, serta 2.474 Pantarlih yang bertugas di 1.270 TPS. Selain itu, sebanyak 8.890 anggota KPPS juga ditetapkan untuk memastikan kelancaran pemungutan suara di seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan. Proses rekrutmen ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, integritas, dan partisipatif, serta melibatkan koordinasi aktif dengan pemangku kepentingan lokal. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada Gambar 29.4.



Sebaran demografi berdasarkan jenis kelamin pada badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 menunjukkan dominasi keterlibatan laki-laki di seluruh tingkatan. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari total 65 orang, sebanyak 64 orang atau 98,46% merupakan laki-laki, sedangkan hanya 1 orang atau 1,54% merupakan perempuan. Di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), dari

567 orang, terdapat 516 orang laki-laki (91.01%) dan 51 orang perempuan (8.99%). Untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah 8.890 orang, 6.866 orang (77.23%) adalah laki-laki dan 2.024 orang (22.77%) adalah perempuan. Sementara itu, di tingkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dari total 2.474 orang, 1.823 orang (73.69%) adalah laki-laki dan 651 orang (26.31%) adalah perempuan. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun partisipasi perempuan masih tergolong lebih rendah, keikutsertaannya dalam penyelenggaraan Pilkada mulai menunjukkan tren positif, khususnya pada tingkat KPPS dan Pantarlih.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada Gambar 29.5 berikut.

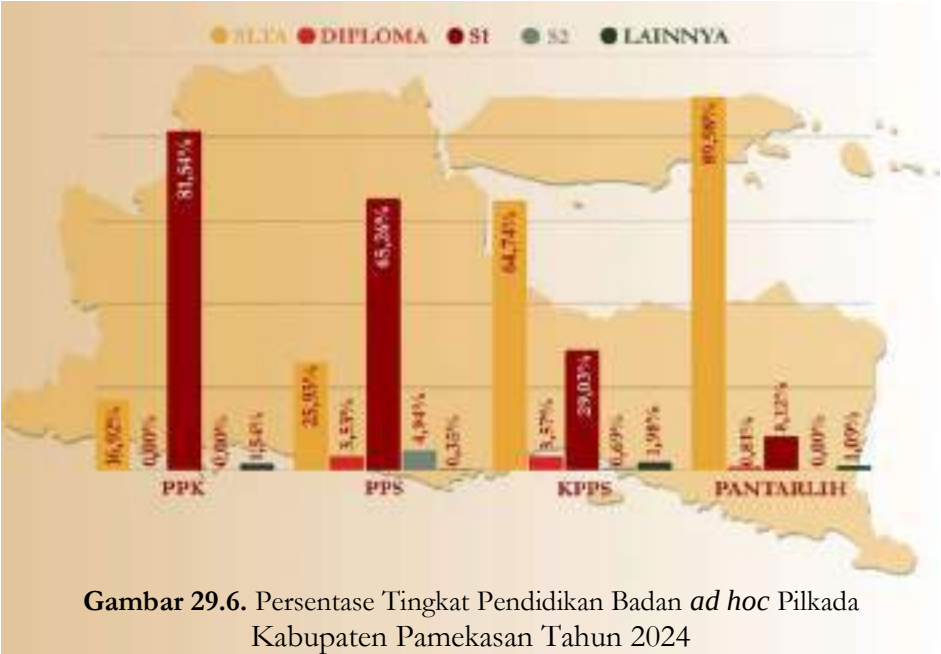


Gambar 29.5. Persentase Kelompok Usia Badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

Berdasarkan kelompok usia, anggota badan *ad hoc* Pilkada 2024 di Kabupaten Pamekasan didominasi oleh generasi milenial (usia 28–43 tahun). Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebanyak 90.77% atau 59 orang berasal dari generasi milenial, sedangkan sisanya 9.23% atau 6 orang dari generasi Z (usia 17–27 tahun). Pada Panitia Pemungutan Suara (PPS), generasi milenial mendominasi sebesar 66.02% (373 orang), diikuti oleh generasi Z sebanyak 23.72% (134 orang), dan generasi X (usia 44–59 tahun) sebesar 10.09% (57 orang). Komposisi serupa juga tampak

pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), di mana 46.84% (4.154 orang) berasal dari generasi milenial, disusul oleh generasi Z sebanyak 40.60% (3.601 orang), generasi X sebanyak 12.39% (1.099 orang), dan sisanya dari generasi *Baby Boomer* (60–78 tahun) sebesar 0.17% (15 orang). Sedangkan untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), sebanyak 54.04% (1.337 orang) merupakan generasi milenial, 35.08% (868 orang) generasi Z, 10.02% (248 orang) generasi X, dan 0.85% (21 orang) berasal dari generasi *Baby Boomer*. Tidak terdapat anggota dari kelompok usia *Pre-Boomer* (>79 tahun) di semua kategori badan *ad hoc*. Data ini menunjukkan keterlibatan aktif generasi muda dalam mendukung proses demokrasi di Pamekasan.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Gambar 29.6.



Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas anggota Badan *ad hoc* Pilkada Kabupaten Pamekasan 2024 untuk PPK didominasi oleh lulusan Sarjana (S1) sebanyak 53 orang (81.54%), diikuti oleh lulusan SLTA sebanyak 11 orang (16.92%), dan lainnya 1 orang (1.54%). Untuk anggota PPS, komposisi pendidikan terbanyak juga berasal dari lulusan S1 sebanyak 370 orang (65.26%), diikuti oleh lulusan SLTA 147 orang (25.93%), S2 sebanyak 28 orang (4.94%), Diploma 20 orang (3.53%), dan lainnya 2 orang

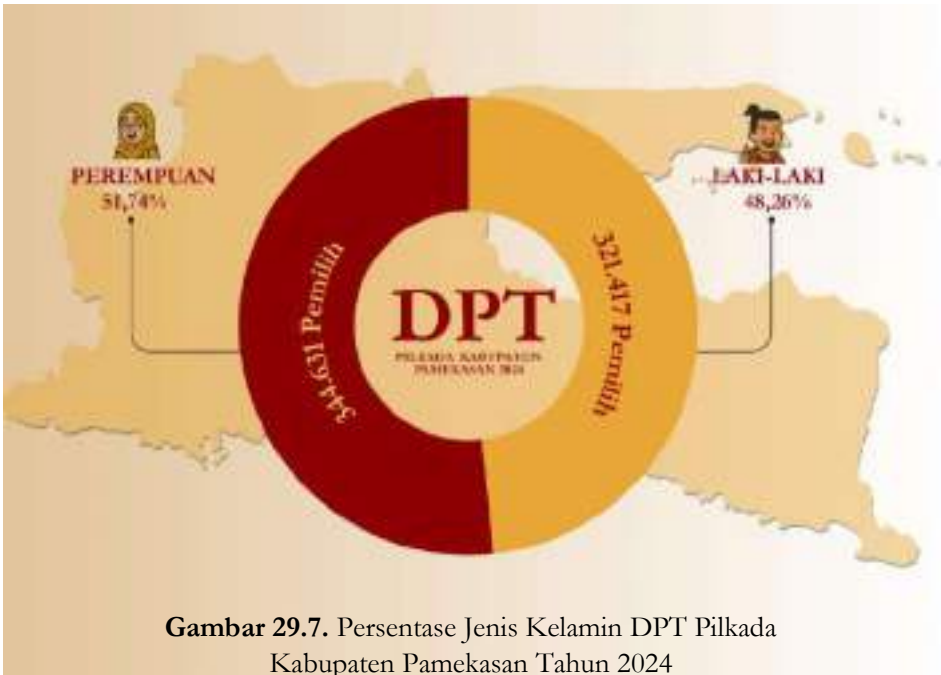
(0.35%). Pada kelompok KPPS, mayoritas berasal dari lulusan SLTA sebanyak 5.755 orang (64.74%), diikuti oleh lulusan S1 sebanyak 2.581 orang (29.03%), Diploma 317 orang (3.57%), S2 sebanyak 61 orang (0.69%), dan lainnya 176 orang (1.98%). Sementara itu, anggota Pantarlih paling banyak berasal dari lulusan SLTA sebanyak 2.226 orang (89.98%), diikuti oleh lulusan S1 sebanyak 201 orang (8.12%), Diploma 20 orang (0.81%), dan lainnya 27 orang (1.09%). Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyelenggara Pilkada di tingkat teknis memiliki latar belakang pendidikan menengah atas hingga sarjana.

Dalam pelaksanaan rekrutmen Badan *ad hoc* Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Pamekasan, belum terdapat anggota yang berasal dari kelompok penyandang disabilitas pada tingkat PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih. Sebagai perbaikan dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Pamekasan ke depan, keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen Badan *ad hoc* perlu mendapatkan perhatian lebih, guna mendorong inklusivitas dan representasi yang lebih setara dalam penyelenggaraan Pilkada.

3. Pemutakhiran Data

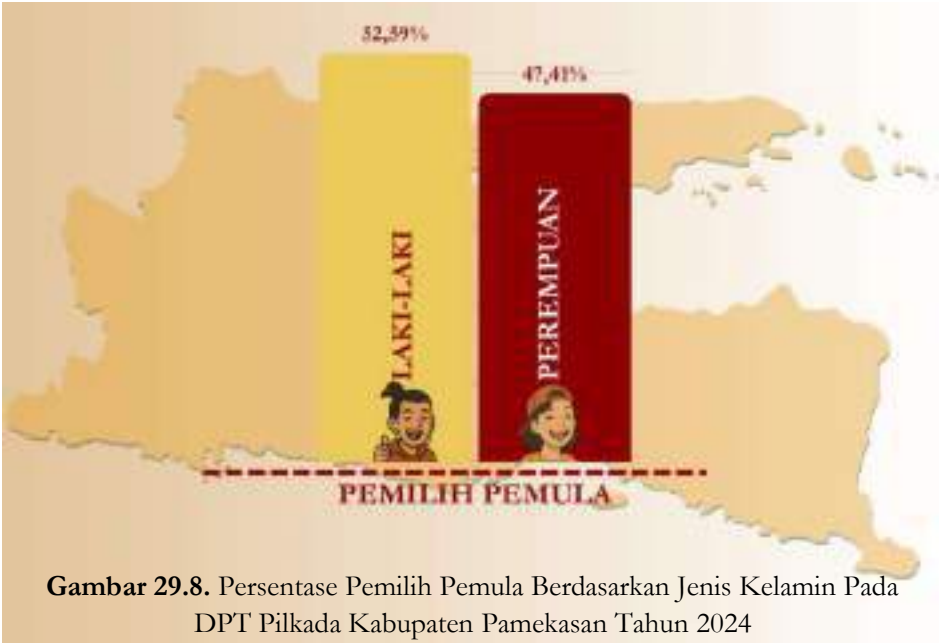
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 sebanyak 666.048 pemilih. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan Pilkada 2024 sebelumnya yang mencapai 676.308 pemilih, serta berkurang dari jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebesar 666.992 pemilih. Penetapan DPT dilakukan melalui rapat pleno terbuka yang diselenggarakan pada Kamis, 19 September 2024 di Hotel Azana, dan merupakan hasil dari proses pencermatan berlapis oleh KPU, masukan masyarakat, serta rekomendasi dari Bawaslu Pamekasan pada tahap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Beberapa data pemilih dinyatakan tidak memenuhi syarat karena faktor meninggal dunia, pindah domisili, belum cukup umur, menjadi anggota TNI/Polri, serta adanya data ganda. Untuk mendukung kelancaran proses pemungutan suara pada 27 November 2024, KPU Pamekasan menyiapkan 1.270 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan. Selain itu, layanan pindah memilih dibuka sejak 20 September hingga 20 November 2024. Langkah ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk memastikan seluruh warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya

dengan baik. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 29.7.



Berdasarkan sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 di Kabupaten Pamekasan menurut jenis kelamin, tercatat bahwa jumlah pemilih laki-laki sebanyak 321.417 orang atau 48,26% dari total DPT. Sementara itu, pemilih perempuan berjumlah 344.631 orang atau 51,74%. Dengan demikian, terdapat dominasi jumlah pemilih perempuan dibandingkan laki-laki dalam komposisi DPT yang total keseluruhannya mencapai 666.048 pemilih. Hal ini mencerminkan proporsi gender yang cukup seimbang, dengan sedikit keunggulan pada jumlah pemilih perempuan.

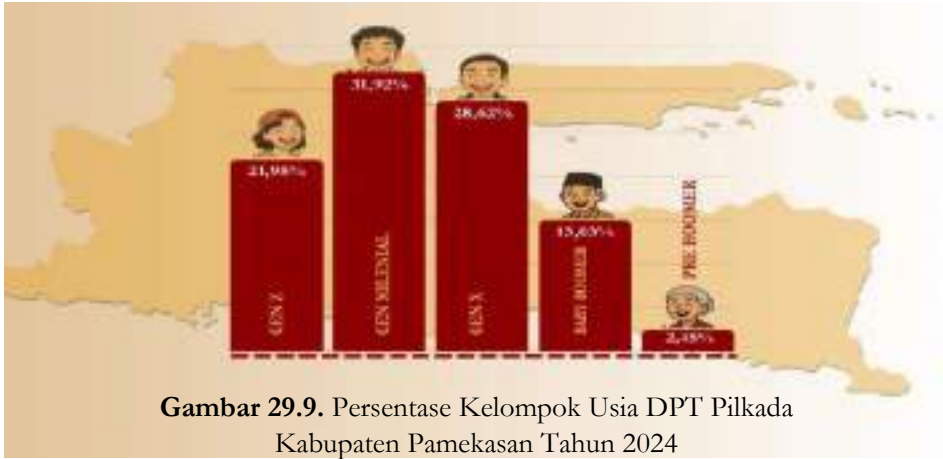
Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni pemilih pemula dan pemilih non-pemula. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada Gambar 29.8 berikut.



Gambar 29.8. Persentase Pemilih Pemula Berdasarkan Jenis Kelamin Pada DPT Pilkada Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, terdapat status pemilih pemula, dimana jumlah pemilih pemula mencapai 4.385 orang. Pemilih pemula laki-laki sebanyak 2.306 (52,59%) dan pemilih pemula perempuan sebanyak 2.079 (47,41%).

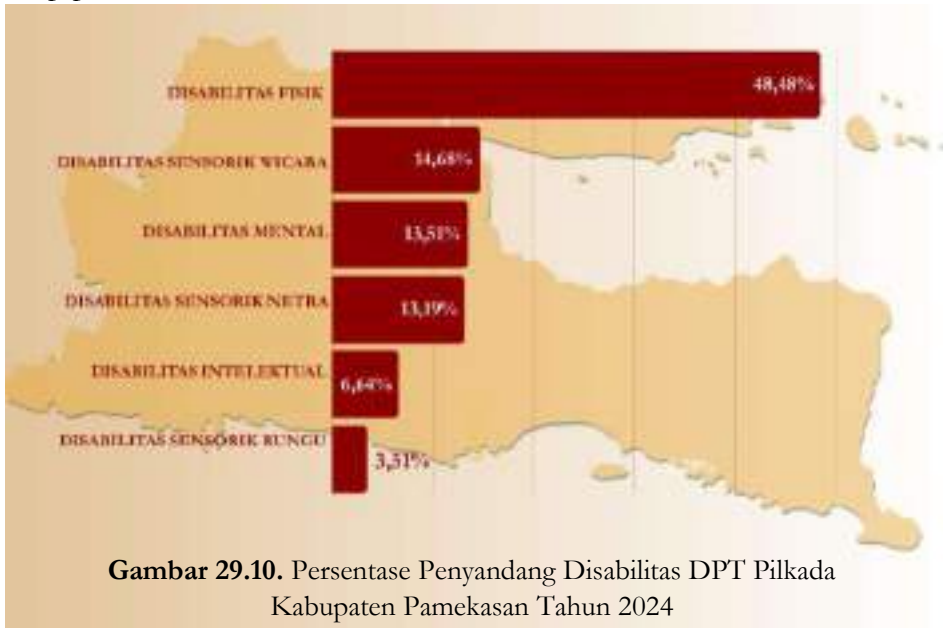
Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada Gambar 29.9.



Gambar 29.9. Persentase Kelompok Usia DPT Pilkada Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

Berdasarkan sebaran demografi DPT Kabupaten Pamekasan pada Pilkada 2024 menurut kelompok usia, pemilih didominasi oleh generasi milenial (usia 28–43 tahun) sebanyak 212.612 orang (31,92%), disusul oleh generasi X (usia 44–59 tahun) sebanyak 190.618 orang (28,62%). Selanjutnya, generasi Z (usia 17–27 tahun) tercatat sebanyak 146.401 orang (21,98%), *baby boomer* (usia 60–78 tahun) sebanyak 100.102 orang (15,03%), dan *pre-boomer* (usia di atas 79 tahun) sebanyak 16.315 orang (2,45%). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas pemilih berada pada rentang usia produktif, yakni 28–59 tahun, yang secara total mencakup lebih dari 60% dari keseluruhan DPT.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 disajikan pada Gambar 29.10, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

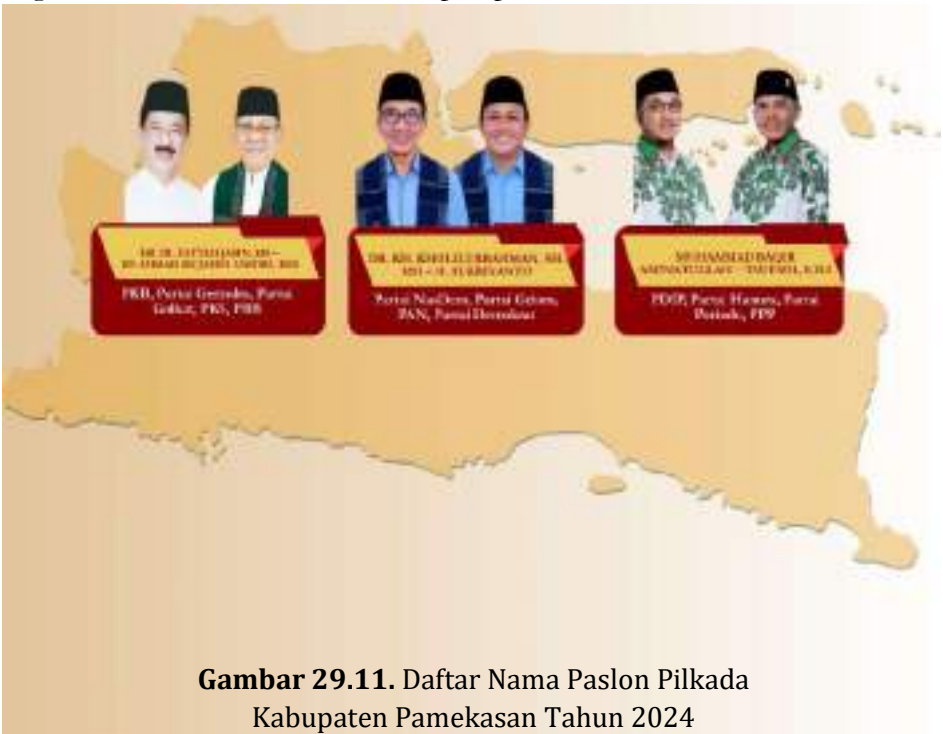


Berdasarkan sebaran demografi DPT Kabupaten Pamekasan pada Pilkada 2024 menurut penyandang disabilitas, terdapat 1.281 pemilih disabilitas yang tercatat. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan penyandang disabilitas fisik sebanyak 621 orang (48,48%). Selanjutnya, disabilitas sensorik wicara sebanyak 188 orang (14,68%), disabilitas mental sebanyak 173 orang (13,51%), disabilitas sensorik netra sebanyak 169 orang (13,19%), disabilitas intelektual sebanyak 85 orang (6,64%), dan disabilitas sensorik rungu sebanyak 45 orang (3,51%). Data ini menunjukkan bahwa

pemilih disabilitas juga memiliki keragaman kebutuhan aksesibilitas yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pilkada yang inklusif dan ramah disabilitas.

4. Pencalonan

Pada tahapan pendaftaran bakal calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 yang berlangsung selama tiga hari, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan secara resmi menerima pendaftaran dari tiga pasangan calon (paslon). Pada hari kedua, 28 Agustus 2024, dua pasangan yang mendaftar adalah KH Kholilurrahman – Sukriyanto dan Fattah Jasin – Ahmad Mujahid Ansori. Sementara pada hari ketiga, 29 Agustus 2024, pasangan Mohammad Baqir Aminatullah – Taufadi melengkapi daftar bacalon dengan menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU Pamekasan. Hasil rapat pleno tertutup KPU Pamekasan kemudian menetapkan ketiga pasangan tersebut sebagai peserta resmi Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada Gambar 29.11 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.





Gambar 29.12 Pengundian No Urut Paslon Pilkada Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

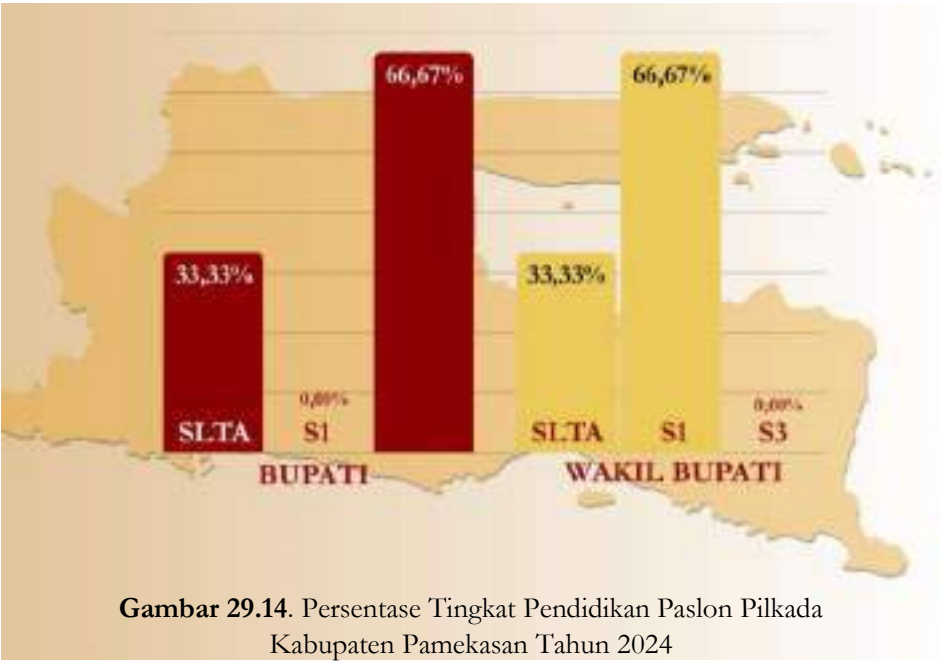
Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan disajikan pada Gambar 29.13 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan disajikan pada Gambar 29.13.



Gambar 29.13. Persentase Jenis Kelamin Paslon Pilkada Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

Berdasarkan Jenis Kelamin, seluruh pasangan calon yang mengikuti kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 didominasi oleh laki-laki. Terdapat total 6 orang calon, yang terdiri dari 3 calon Bupati dan 3 calon Wakil Bupati, dan semuanya adalah laki-laki (100,00%). Tidak terdapat calon perempuan dalam Pilkada Kabupaten Pamekasan Tahun 2024.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, dari enam orang calon, mayoritas memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Sebanyak 2 orang (33,33%) berpendidikan SLTA, 2 orang (33,33%) memiliki gelar Sarjana (S1), dan 2 orang lainnya (33,33%) telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Doktor (S3). Khusus pada posisi calon Bupati, sebanyak dua orang (66,67%) berlatar belakang pendidikan S3, dan satu orang (33,33%) SLTA. Sementara itu, untuk calon Wakil Bupati, mayoritas atau dua orang (66,67%) merupakan lulusan S1, dan satu orang (33,33%) berpendidikan SLTA.



Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada Gambar 29.15, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



Gambar 29.15. Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

Kegiatan sosialisasi merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat mengenai proses, tahapan, dan pentingnya partisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Sosialisasi ini diharapkan mampu mendorong keterlibatan aktif warga dalam setiap proses demokrasi, serta meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

KPU Kabupaten Pamekasan melaksanakan beragam metode sosialisasi, antara lain melalui kegiatan jalan sehat, debat kandidat, KPU *Goes to Campus*, *Goes to School*, hingga kunjungan ke pondok pesantren. Metode penyampaian informasi dilakukan secara langsung (tatap muka), melalui siaran media massa baik cetak maupun elektronik, serta melalui pengumuman keliling menggunakan pengeras suara di kendaraan maupun dari masjid. Jumlah target peserta dalam kegiatan sosialisasi bervariasi, antara lain sekitar 100 orang untuk tiap kegiatan tatap muka, serta mencapai 1.000 hingga 2.000 orang pada kegiatan besar seperti kirab sosialisasi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga melibatkan sekitar 30 media lokal dan regional sebagai mitra penyebaran informasi kepada publik secara luas dan berkesinambungan.



Gambar 29.16. Sosialisasi Pilkada Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat serta mendekatkan semangat demokrasi kepada seluruh elemen warga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan menghadirkan maskot Pilkada 2024 yang diberi nama "Si Pisan". Maskot ini terinspirasi dari kekayaan budaya lokal masyarakat Madura, khususnya tradisi kerapan sapi, yang telah menjadi identitas kuat Kabupaten Pamekasan.



Gambar 29.17. Maskot Pilkada Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

Si Pisan digambarkan sebagai seekor sapi khas kerapan yang mengenakan pakaian adat Pamekasan bernama Pesaan, lengkap dengan

ekspresi wajah ceria dan bersahabat. Senyumnya yang lebar melambungkan semangat keceriaan, harapan, dan optimisme dalam menyongsong pesta demokrasi lima tahunan ini. Selain sebagai representasi budaya, "Si Pisan" juga merupakan akronim dari "Demokrasi Pilihan Rakyat Pamekasan", yang menggambarkan esensi utama Pilkada sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Diharapkan, kehadiran Si Pisan mampu menghidupkan suasana Pilkada yang damai, menggembirakan, dan partisipatif, sekaligus menjadi simbol komitmen untuk melahirkan pemimpin yang mampu menyejahterakan masyarakat Pamekasan.

Dalam rangka menciptakan kampanye yang adil, informatif, dan merata bagi seluruh pasangan calon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan memberikan berbagai bentuk fasilitasi kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024. Fasilitas ini mencakup penyediaan Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye (BK), penayangan Iklan Kampanye, serta pelaksanaan Debat Publik antar pasangan calon.

Untuk bahan kampanye, KPU Pamekasan mencetak dan mendistribusikan sebanyak:

- 1.404 lembar umbul-umbul/T-banner
- 15 lembar baliho atau billboard berukuran 4x6 meter
- 8.505 lembar banner

Sedangkan untuk alat peraga kampanye, jumlah yang difasilitasi adalah:

- 180.000 lembar selebaran
- 75.000 lembar brosur
- 21.000 lembar pamflet
- 30.000 lembar poster

KPU juga memfasilitasi kegiatan Debat Publik Pasangan Calon (Paslon) yang diselenggarakan sebanyak tiga kali dengan jadwal sebagai berikut:

- Debat Pertama: 20 Oktober 2024
- Debat Kedua: 2 November 2024
- Debat Ketiga: 15 November 2024

Debat ini bertujuan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui visi, misi, serta program kerja dari masing-masing pasangan

DEBAT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAMEKASAN TAHUN 2024

1

CALON BUPATI
DR. Ir. FATTAH JASIN, M.S.
CALON WAKIL BUPATI
**RP. AHMAD MUJAHID
ANSORI, Drs.**

2

CALON BUPATI
H. SUKRITYANTO
CALON WAKIL BUPATI
H. SUKRITYANTO

3

CALON BUPATI
**MUHAMMAD BAQIR
AMINATULLAH**
CALON WAKIL BUPATI
TAUFADI, S.H.

DEBAT PERTAMA

20 Oktober 2024

“Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dalam Memajukan Kabupaten Pamekasan”

DEBAT KEDUA

2 November 2024

“Peningkatan Tata Kelola Layanan Publik dalam rangka penyelesaian permasalahan di Kabupaten Pamekasan”

DEBAT KETIGA

15 November 2024

“Menyelaraskan pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pamekasan dengan Pemerintahan Provinsi dan Pusat dalam rangka memperkokoh NKRI dan Kebangsaan”

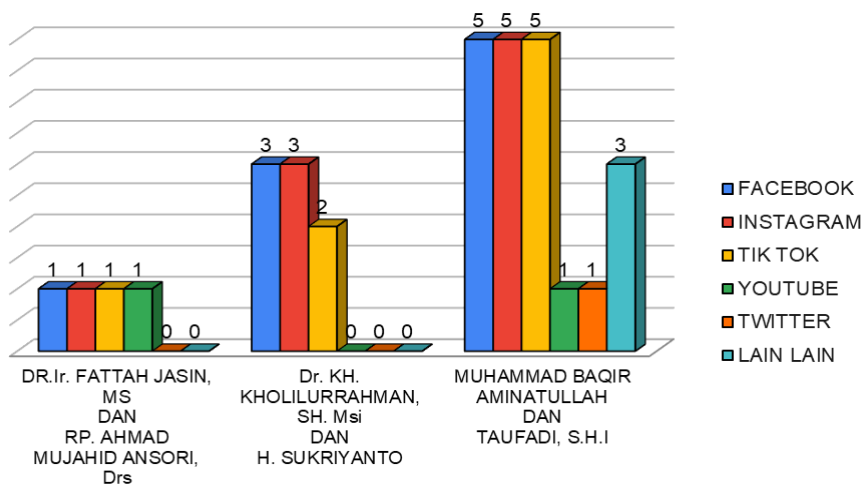
570 | Pilkada Serentak Jatim 2024



Gambar 29.19. Kegiatan Kampanye KPU Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

Dalam pelaksanaan kampanye Pilkada Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, masing-masing pasangan calon memanfaatkan berbagai platform media sosial sebagai sarana strategis untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Melalui akun resmi masing-masing, para calon secara aktif mengunggah konten kampanye berupa video, poster digital, infografis, dan siaran langsung untuk menjalin

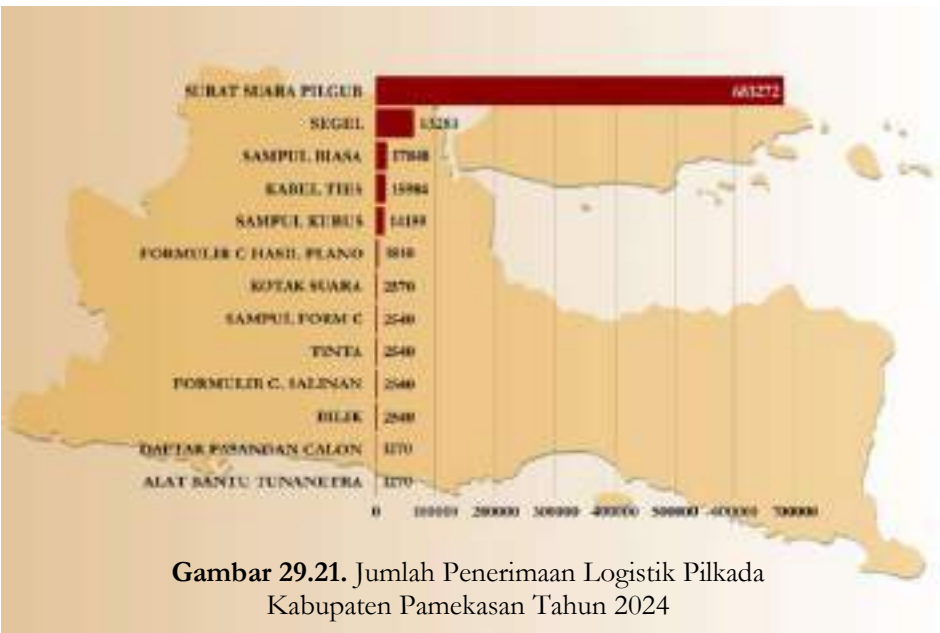
interaksi langsung dengan masyarakat. Pemanfaatan media sosial ini memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat para calon pemimpin mereka, serta memungkinkan penyebaran informasi kampanye yang lebih cepat, luas, dan hemat biaya. Di sisi lain, aktivitas kampanye digital juga diawasi oleh KPU dan Bawaslu guna memastikan bahwa konten yang disampaikan tetap sesuai dengan regulasi dan etika kampanye yang telah ditetapkan.



Gambar 29.20. Platform Media Sosial Kampanye Pilkada Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

6. Logistik

Dalam rangka menjamin tersedianya perlengkapan dan kebutuhan logistik secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan melaksanakan proses pengadaan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada Gambar 29.21.



Gambar 29.21. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

Dalam pelaksanaan distribusi logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, KPU Kabupaten Pamekasan menyiapkan beragam moda transportasi guna menjangkau seluruh wilayah secara efektif, termasuk daerah yang memiliki akses terbatas. Moda transportasi yang digunakan meliputi 18 unit mobil truk, 26 unit mobil pick-up milik instansi, 189 unit mobil pick-up sewaan, serta 378 unit sepeda motor atau sepeda kayuh yang digunakan untuk menjangkau lokasi TPS terpencil dan sulit diakses kendaraan roda empat.

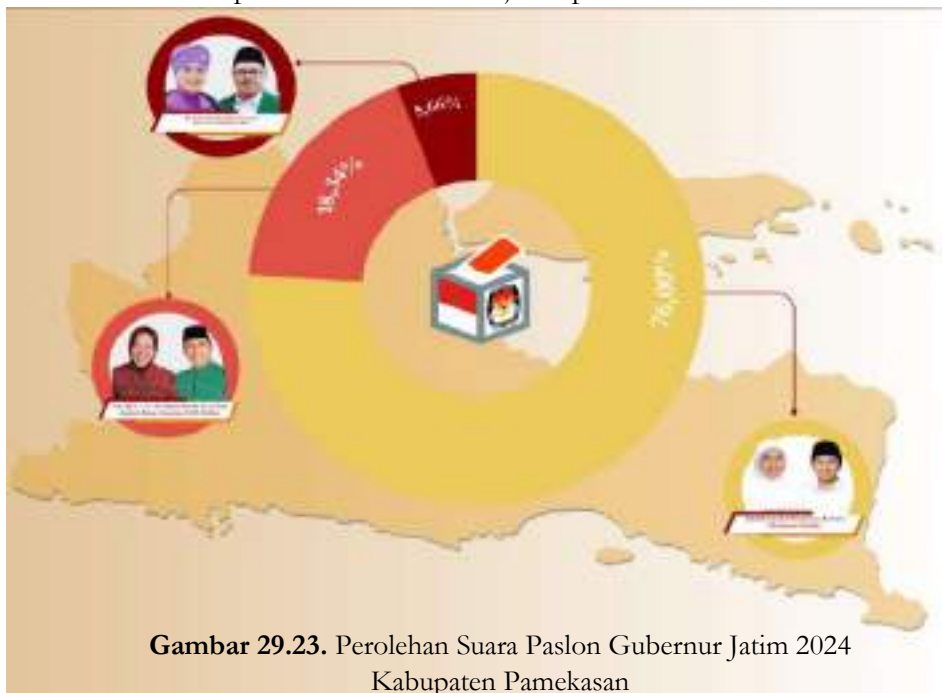
Dalam proses setting dan packing logistik, KPU melibatkan sebanyak 48 orang petugas, terdiri dari 34 laki-laki dan 14 perempuan, yang bekerja secara intensif untuk memastikan semua logistik dalam kondisi lengkap, rapi, dan siap didistribusikan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Seluruh kegiatan logistik dilakukan dengan sistem kerja yang terorganisir, memperhatikan akurasi serta efisiensi waktu. Secara keseluruhan, proses pendistribusian logistik berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Tidak terdapat kendala signifikan yang menghambat distribusi ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Pamekasan. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara KPU, pihak keamanan, serta dukungan masyarakat dalam menjaga kelancaran tahapan Pilkada 2024.



Gambar 29.22. Peta Distribusi Logistik Pilkada Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

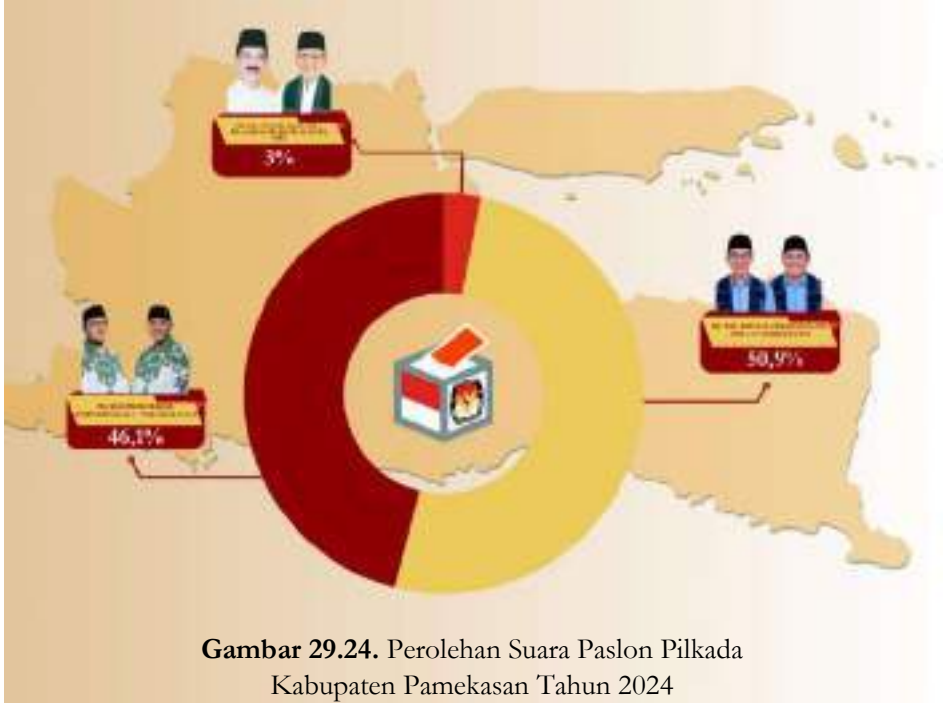
7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Pamekasan disajikan pada Gambar 29.23.



Pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di Kabupaten Pamekasan, pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak memperoleh perolehan suara terbanyak dengan jumlah 424.476 suara atau sebesar 76,00% dari total suara sah. Pasangan Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) menempati posisi kedua dengan perolehan 102.424 suara atau 18,34%, sedangkan pasangan Luluk Nur Ihamidah – Lukmanul Hakim memperoleh 31.604 suara, setara dengan 5,66% dari total suara sah yang mencapai 558.504 suara. Hasil ini menunjukkan dominasi kuat pasangan Khofifah–Emil di Kabupaten Pamekasan dalam kontestasi Pilgub Jatim 2024.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada Gambar 29.24.



Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, pasangan Dr. KH. Kholilurrahman, SH., M.Si dan H. Sukriyanto berhasil meraih suara terbanyak dengan perolehan sebesar 291.246 suara atau 50,90%, sehingga unggul tipis dari pesaing terdekatnya. Di posisi kedua, pasangan Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi, S.H.I memperoleh 263.740 suara, yang setara dengan 46,10% dari total suara sah. Sementara itu,

pasangan Dr. Ir. Fattah Jasin, MS dan RPAhmad Mujahid Ansori, Drs hanya memperoleh 17.307 suara atau sebesar 3,00%. Dengan demikian, pasangan Kholilurrahman–Sukriyanto unggul dalam kontestasi Pilkada Pamekasan 2024 dan berhasil meraih kepercayaan mayoritas pemilih untuk memimpin Kabupaten Pamekasan.

BAGIAN 30

KABUPATEN SUMENEP

1. Perencanaan Program dan Anggaran

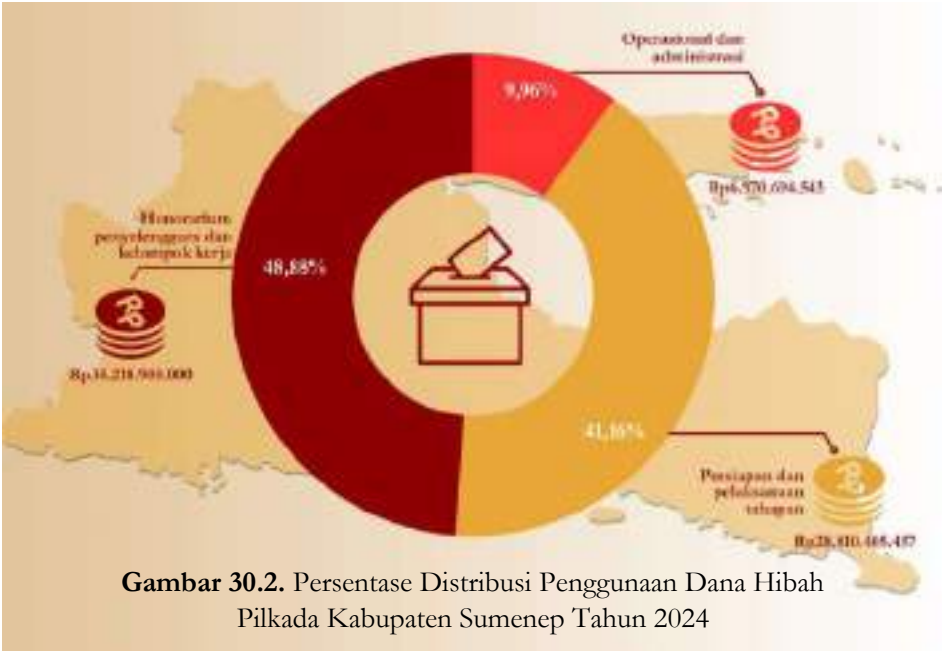
Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep bersama Pemerintah Daerah telah menyepakati besaran anggaran hibah daerah untuk kegiatan Pilkada sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh miliar rupiah). Kesepakatan mengenai alokasi anggaran ini dituangkan secara resmi dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Nomor: 270/2172/NPHD/-2/XI/2023. Dokumen ini menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada di Kabupaten Sumenep, serta mencerminkan komitmen dan sinergi antara penyelenggara Pilkada dengan pemerintah daerah demi terselenggaranya Pilkada yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada Gambar 30.1 berikut.



Gambar 30.1. Persentase Tahapan Penyaluran Dana Hibah

Distribusi dana hibah dilakukan dalam dua termin. Termin pertama sebesar Rp28.000.000.000 atau 40% dari total anggaran telah dicairkan pada tanggal 15 Desember 2023. Selanjutnya, termin kedua sejumlah Rp42.000.000.000 atau 60% dari total anggaran dicairkan pada tanggal 25 Juli 2024. Pencairan dua tahap ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam mendukung kelancaran seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024, dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian. Dana hibah ini menjadi salah satu fondasi penting bagi KPU Kabupaten Sumenep dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pilkada secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada Gambar 30.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.



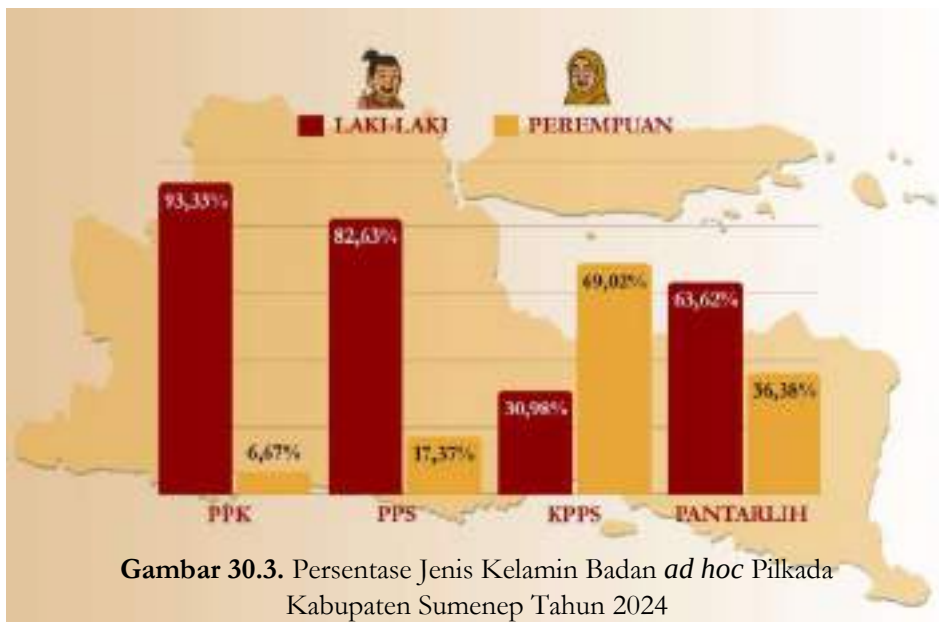
Komposisi penggunaan anggaran hibah Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sumenep dialokasikan ke dalam tiga komponen utama. Komponen Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan mendapatkan alokasi sebesar Rp28.810.405.457 atau 41,16% dari total anggaran. Komponen Operasional dan Administrasi Perkantoran dialokasikan sebesar Rp6.970.694.543 atau 9,96%, sebagai penunjang kebutuhan administratif dan operasional KPU dalam menyelenggarakan Pilkada. Sementara itu, porsi terbesar dari anggaran diberikan untuk komponen Honorarium, yakni

sebesar Rp34.218.900.000 atau 48,88%, yang digunakan untuk membiayai honorarium bagi badan *ad hoc* dan penyelenggara lainnya dalam setiap tahapan Pilkada. Struktur alokasi anggaran ini mencerminkan fokus utama pada pelaksanaan teknis dan pemberian insentif yang layak kepada penyelenggara Pilkada di tingkat pusat hingga akar rumput.

2. Badan *Ad Hoc*

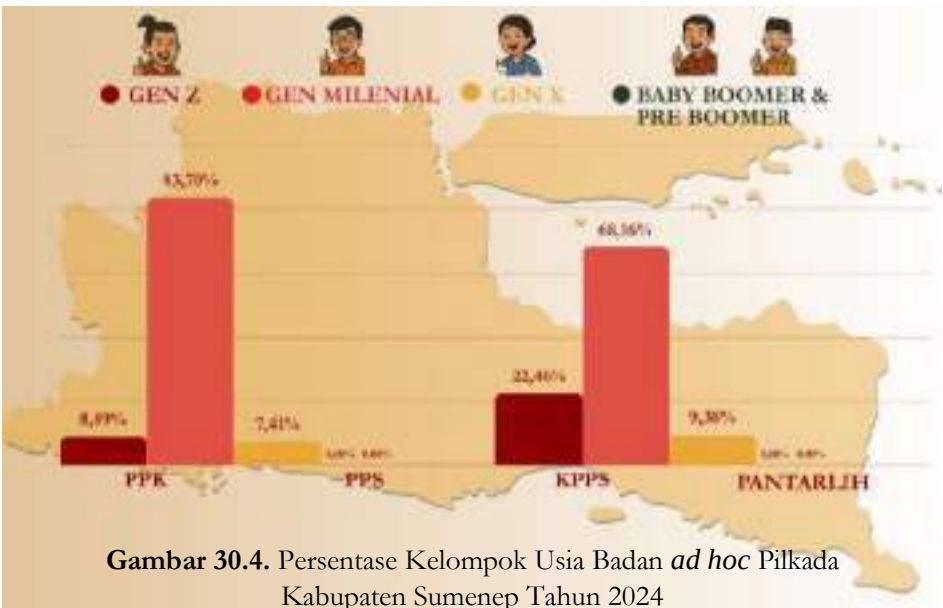
Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep membentuk Badan *ad hoc* yang terdiri atas empat tingkatan penyelenggara teknis, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH). Pembentukan badan *ad hoc* ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tahapan Pilkada berjalan secara berjenjang dan efektif, mulai dari tingkat kecamatan, tingkat desa, hingga pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Berdasarkan hasil proses rekrutmen terbuka dan penetapan melalui keputusan resmi KPU Kabupaten Sumenep, jumlah anggota Badan *ad hoc* yang ditugaskan adalah sebagai berikut: 135 orang PPK, 1.002 orang PPS, 13.797 orang KPPS, dan 3.340 orang PANTARLIH. Keterlibatan badan *ad hoc* ini menjadi tulang punggung dalam menyukseskan Pilkada 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Kabupaten Sumenep. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada Gambar 30.3.



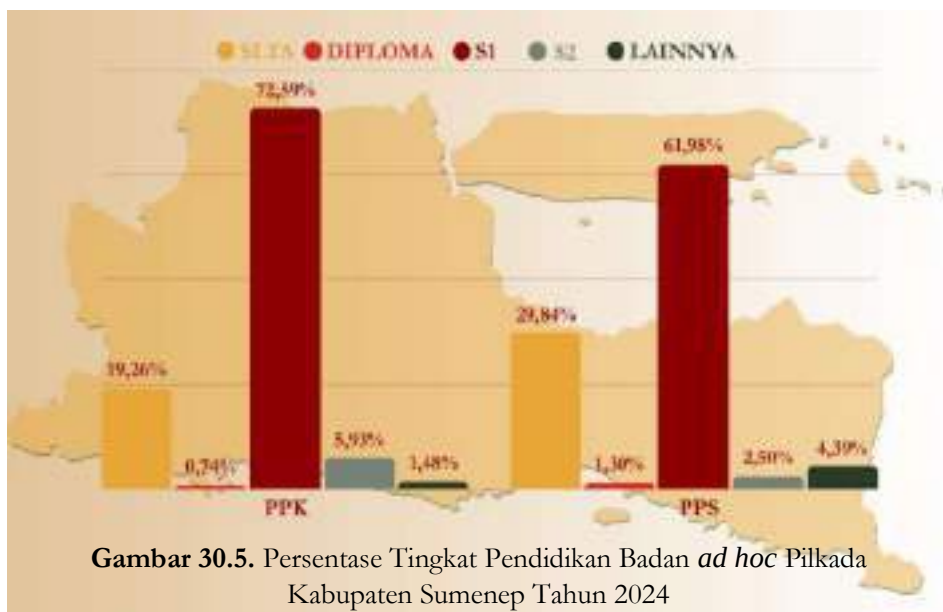
Sebaran Demografi Badan *ad hoc* Berdasarkan Jenis Kelamin menunjukkan adanya keterlibatan kedua gender yang bervariasi antar jenjang penyelenggara. Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), terdapat 126 laki-laki (93,33%) dan 9 perempuan (6,67%) dari total 135 orang. Pada tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), dari total 1.002 anggota, sebanyak 828 orang (82,63%) berjenis kelamin laki-laki dan 174 orang (17,37%) berjenis kelamin perempuan. Komposisi berbeda terlihat pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), di mana perempuan menjadi mayoritas dengan jumlah 9.523 orang (69,02%), sedangkan laki-laki sebanyak 4.274 orang (30,98%) dari total 13.797 anggota. Sementara itu, untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan (PANTARLIH), dari total 3.340 petugas, sebanyak 2.125 orang (63,62%) adalah laki-laki dan 1.215 orang (36,38%) adalah perempuan. Sebaran ini mencerminkan partisipasi aktif dari masyarakat Kabupaten Sumenep, baik laki-laki maupun perempuan, dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2024 melalui peran mereka sebagai bagian dari badan *ad hoc*.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Sumenep Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada Gambar 30.4 berikut.



Sebaran Demografi Badan *ad hoc* Berdasarkan Kelompok Usia pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep menunjukkan dominasi kelompok usia produktif. Pada jenjang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), mayoritas anggotanya berasal dari generasi milenial (usia 28–43 tahun) sebanyak 113 orang (83,70%), disusul oleh generasi Z (usia 17–27 tahun) sebanyak 12 orang (8,89%), dan generasi X (usia 44–59 tahun) sebanyak 10 orang (7,41%). Sementara itu, untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), pola serupa juga terlihat dengan dominasi generasi milenial sebanyak 683 orang (68,16%), kemudian generasi Z sebanyak 225 orang (22,46%), dan generasi X sebanyak 94 orang (9,38%). Sebaran usia ini mencerminkan komitmen dan keterlibatan tinggi dari kalangan usia muda dan produktif dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Sumenep, dengan harapan penyelenggaraan yang enerjik, profesional, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *ad hoc* pada Pilkada Kabupaten Sumenep Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Gambar 30.5.



Sebaran Demografi Badan *ad hoc* Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa mayoritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) berasal dari latar belakang pendidikan tinggi. Pada jenjang PPK, sebagian besar anggotanya berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 98 orang (72,59%), diikuti oleh lulusan SLTA sebanyak 26 orang (19,26%). Sementara lulusan Magister (S2) berjumlah 8 orang (5,93%), Diploma hanya 1 orang (0,74%), dan sisanya 2 orang (1,48%) berasal dari kategori pendidikan lainnya. Untuk jenjang PPS, pola sebaran pendidikan juga memperlihatkan dominasi lulusan Sarjana (S1) sebanyak 621 orang (61,98%), kemudian diikuti oleh SLTA sebanyak 299 orang (29,84%), S2 sebanyak 25 orang (2,50%), Diploma sebanyak 13 orang (1,30%), dan lainnya sebanyak 44 orang (4,39%). Komposisi ini menggambarkan bahwa penyelenggara Pilkada di tingkat kecamatan dan desa di Kabupaten Sumenep didominasi oleh sumber daya manusia dengan kualifikasi pendidikan tinggi, yang diharapkan mampu menjalankan tugas-tugas kePilkadaan secara profesional, akuntabel, dan berkualitas.

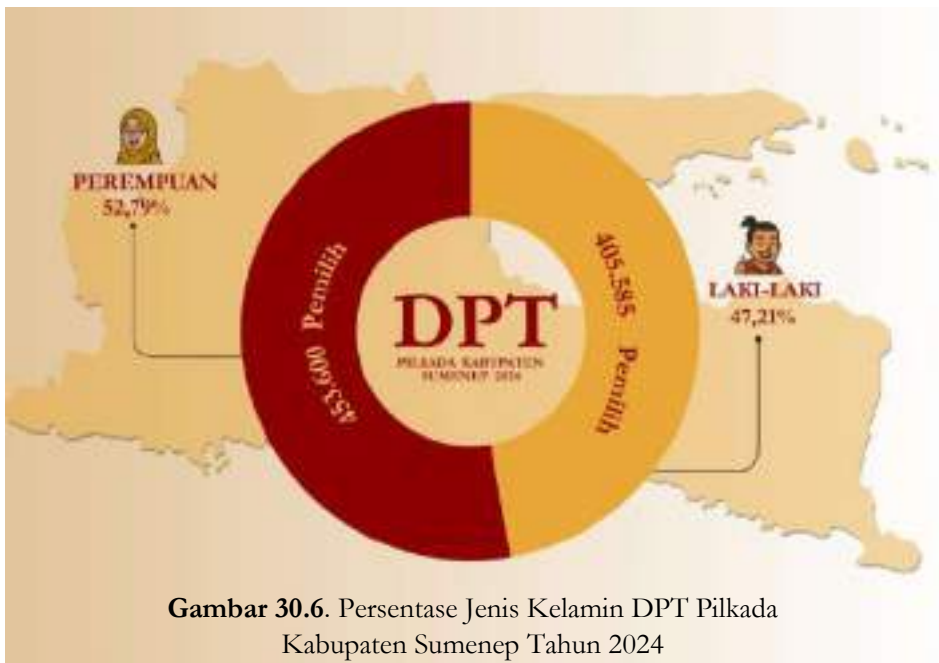
Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep, tercatat adanya representasi dari kelompok penyandang disabilitas yang turut berperan aktif sebagai penyelenggara badan *ad hoc*. Salah satu di antaranya adalah adanya anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang

merupakan penyandang disabilitas berjumlah 1 orang berjenis kelamin laki-laki. Keikutsertaan individu dengan disabilitas ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan prinsip inklusivitas dan kesetaraan, sekaligus memberikan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang latar belakang kemampuan fisik. Keterlibatan ini diharapkan menjadi inspirasi dan motivasi bagi penyandang disabilitas lainnya untuk terus aktif dalam proses demokrasi di Indonesia.

3. Pemutakhiran Data

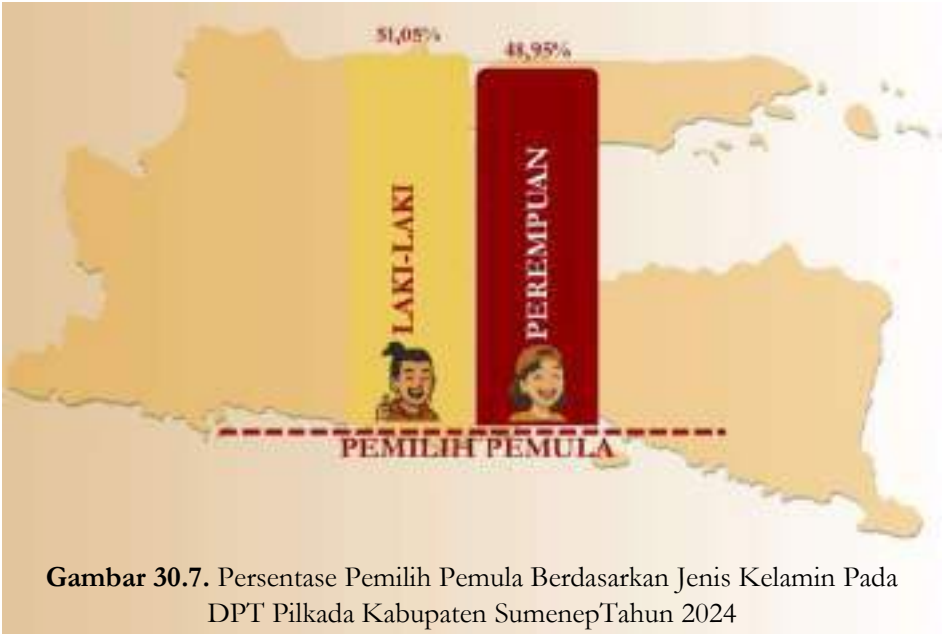
Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024. Penetapan ini dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Nomor: 370/PL.01.2-BA/3529/2024, serta diperkuat dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor: 1568 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Kabupaten Sumenep. Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT Pilkada 2024 sebanyak 859.185 orang. Jumlah ini merupakan hasil akhir dari rangkaian panjang tahapan pemutakhiran data pemilih yang melibatkan proses pencocokan dan penelitian (coklit), penyampaian tanggapan masyarakat, perbaikan data, hingga validasi bersama Bawaslu dan para pemangku kepentingan terkait. Proses ini dilaksanakan secara akuntabel dan partisipatif guna memastikan akurasi serta keabsahan data pemilih.

Sebaran DPT tersebut mencakup 27 kecamatan dan 334 desa/kelurahan di seluruh wilayah administratif Kabupaten Sumenep. Untuk menjamin aksesibilitas pemilih dalam menyalurkan hak suara, KPU Kabupaten Sumenep telah menyiapkan 1.971 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdiri atas TPS Reguler dan TPS di Lokasi Khusus. Penempatan TPS di lokasi khusus, seperti di lembaga pemasyarakatan dan pondok pesantren, merupakan bentuk komitmen untuk menyediakan sarana pemungutan suara yang inklusif serta menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Dengan penetapan DPT ini, KPU Kabupaten Sumenep menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 demi terwujudnya Pilkada yang demokratis dan berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 30.6.



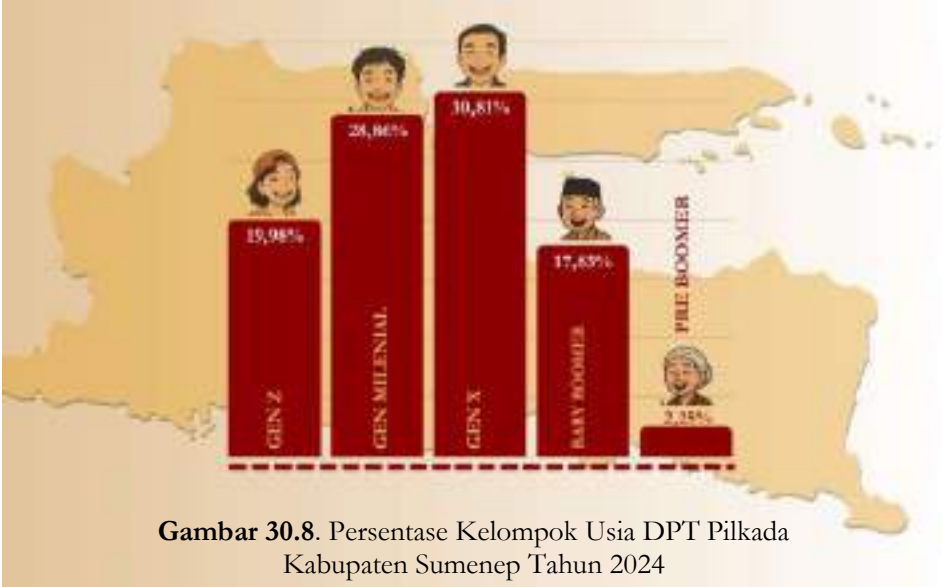
Berdasarkan hasil rekapitulasi, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sumenep pada Pilkada 2024 yang berjumlah 859.185 pemilih terdiri dari 405.585 pemilih laki-laki (47,21%) dan 453.600 pemilih perempuan (52,79%). Komposisi ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan pemilih laki-laki. Distribusi ini menjadi salah satu indikator penting dalam penyusunan strategi sosialisasi dan pelaksanaan teknis pemungutan suara, guna memastikan keterjangkauan layanan Pilkada yang setara dan inklusif bagi seluruh pemilih.

Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni pemilih pemula dan pemilih non-pemula. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada Gambar 30.7 berikut.



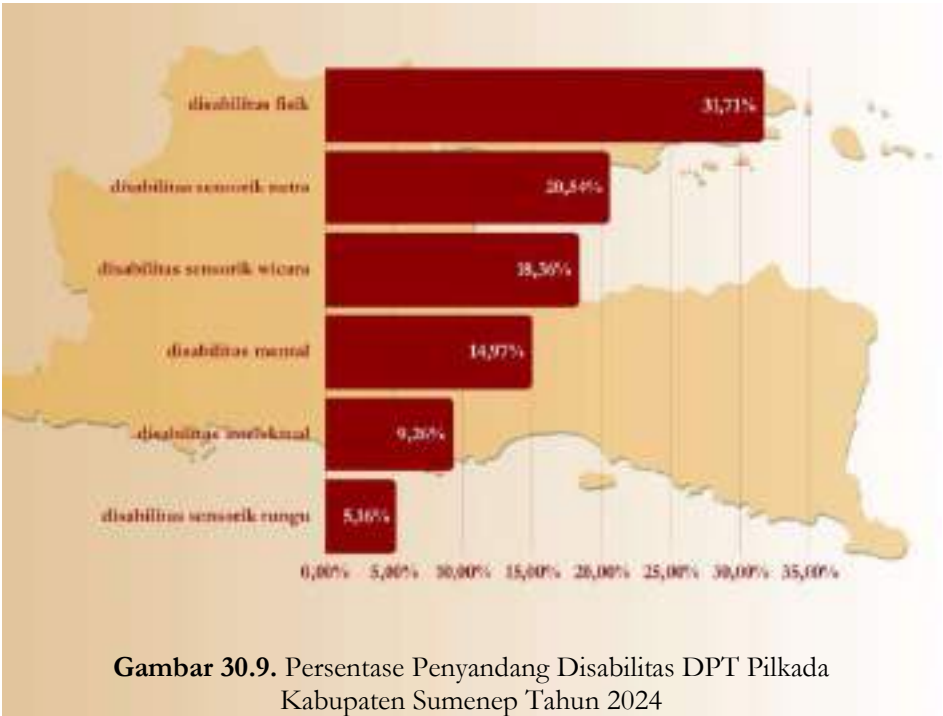
Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sumenep Tahun 2024, terdapat status pemilih pemula sebanyak 5.164, dimana pemilih pemula terdiri dari 2.636 laki-laki (51,05%) dan 2.528 perempuan (48,95%).

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada Gambar 30.8.



Sebaran demografi DPT berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa dari total 859.185 pemilih yang tercatat pada Pilkada Kabupaten Sumenep Tahun 2024, mayoritas berasal dari kelompok usia 44–59 tahun (Generasi X) sebanyak 264.708 pemilih (30,81%), disusul oleh Generasi Milenial (usia 28–43 tahun) sebanyak 247.966 pemilih (28,86%), dan Generasi Z (usia 17–27 tahun) sebanyak 171.663 pemilih (19,98%). Sementara itu, kelompok usia *Baby Boomer* (60–78 tahun) berjumlah 153.163 pemilih (17,83%), dan *Pre-Boomer* (>79 tahun) sebanyak 21.685 pemilih (2,52%). Data ini menggambarkan bahwa proporsi pemilih usia produktif mendominasi DPT, yaitu kelompok usia 28–59 tahun, yang secara keseluruhan mencakup lebih dari 59% dari total pemilih. Informasi ini penting dalam merancang strategi sosialisasi dan kampanye yang relevan dan efektif berdasarkan karakteristik demografi usia pemilih di Kabupaten Sumenep.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disajikan pada Gambar 30.9, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Sebaran demografi penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Sumenep Tahun 2024 menunjukkan total

sebanyak 1.977 pemilih yang tercatat sebagai penyandang disabilitas. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan penyandang disabilitas fisik, yaitu sebanyak 627 orang (31,71%), diikuti oleh disabilitas sensorik netra sebanyak 406 orang (20,54%), dan disabilitas sensorik wicara sebanyak 363 orang (18,36%).

Selain itu, terdapat 296 pemilih (14,97%) yang teridentifikasi sebagai penyandang disabilitas mental, 183 orang (9,26%) dengan disabilitas intelektual, serta 102 orang (5,16%) dengan disabilitas sensorik rungu. Keberadaan kelompok pemilih disabilitas ini menjadi perhatian khusus dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, guna memastikan inklusivitas dan aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat menggunakan hak pilihnya secara aman, nyaman, dan setara.

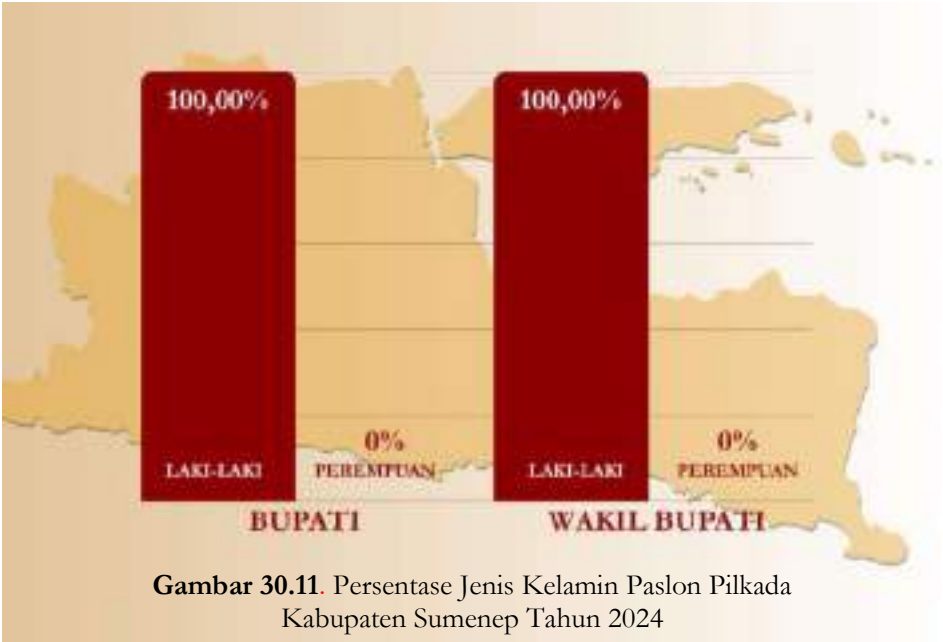
4. Pencalonan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep secara resmi menetapkan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 melalui Pengumuman Nomor 340/PL.02.3-Pu/3529/2024 tertanggal 22 September 2024. Penetapan pasangan calon ini merupakan hasil dari proses verifikasi administrasi dan faktual terhadap dokumen persyaratan calon yang diajukan selama masa pendaftaran. Penetapan pasangan calon ini menjadi tonggak penting dalam tahapan Pilkada 2024, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang dilaksanakan secara jujur, adil, dan akuntabel. Selanjutnya, setiap pasangan calon akan melanjutkan ke tahap kampanye untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat Sumenep. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada Gambar 30.10 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.

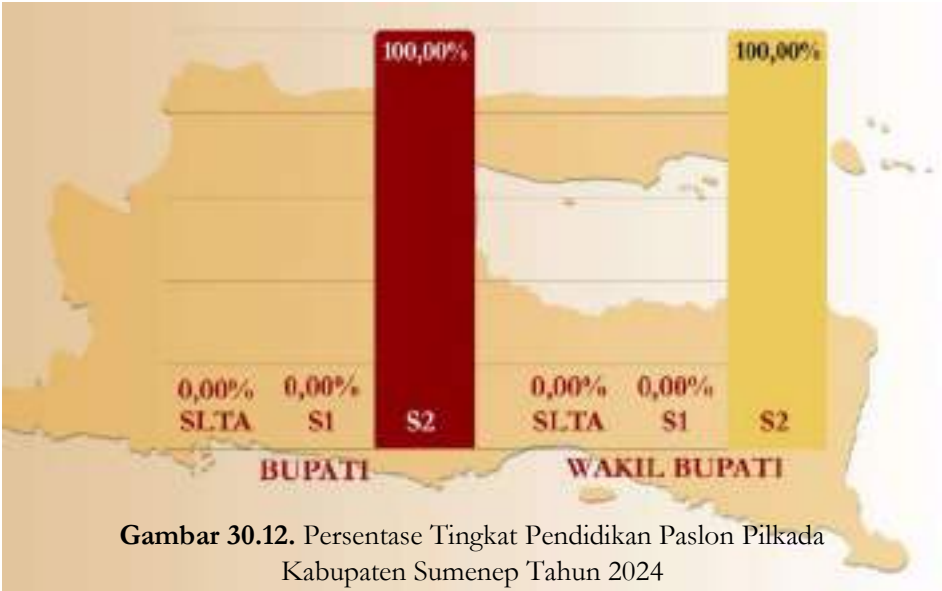


Gambar 30.10 . Paslon Pilkada Kabupaten Sumenep Tahun 2024

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep disajikan pada Gambar 30.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep disajikan pada Gambar 30.12.



Gambar 30.11. Persentase Jenis Kelamin Paslon Pilkada Kabupaten Sumenep Tahun 2024



Gambar 30.12. Persentase Tingkat Pendidikan Paslon Pilkada Kabupaten Sumenep Tahun 2024

Seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 didominasi oleh laki-laki. Berdasarkan data yang dihimpun, baik calon Bupati maupun calon Wakil Bupati berjumlah masing-masing dua orang, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki (100,00%), tanpa ada perwakilan perempuan. Dengan demikian, dari total empat orang kandidat, seluruhnya adalah laki-laki.

Dari sisi tingkat pendidikan, seluruh calon menunjukkan latar belakang pendidikan tinggi. Sebanyak dua orang calon Bupati dan dua orang calon Wakil Bupati tercatat memiliki jenjang pendidikan Strata Dua (S2), atau 100,00% masing-masing pada kedua kategori. Sehingga, mencerminkan bahwa seluruh pasangan calon memiliki kapasitas akademik tinggi untuk bersaing dalam kontestasi Pilkada Sumenep 2024.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada Gambar 30.13, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



Gambar 30.13. Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada

5. Sosialisasi dan Kampanye

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyuk-seskan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan berbagai metode. Terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan.

Pertama, komunikasi tatap muka dilakukan melalui pertemuan dalam bentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, pendidikan pemilih, ceramah, dan simulasi. Kedua, komunikasi melalui media massa disalurkan dalam bentuk tulisan, gambar, audio visual, website, iklan layanan masyarakat (PSA), dan talk show. Ketiga, mobilisasi sosial dilaksanakan melalui himbauan partisipatif yang melibatkan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, LSM, kelompok media, sekolah, instansi pemerintah, hingga partai politik. Mobilisasi ini hadir dalam bentuk gerakan masyarakat yang mendukung pelaksanaan sosialisasi pada setiap tahapan, seperti Deklarasi Kampanye Damai, Road Show, Panggung Hiburan Rakyat, serta Launching Pilkada Legislatif yang dirangkaikan dengan kegiatan jalan santai berhadiah di Aloon-Aloon Sumenep (Taman Bunga).

Media penyampaian informasi dalam kegiatan sosialisasi dibagi menjadi tiga kategori, yakni media utama, media pendukung, dan media lainnya.

Media utama mencakup surat kabar cetak/online dan media elektronik seperti JTV dan Radio Sakti Sumenep. Untuk memperluas jangkauan informasi, KPU juga memanfaatkan media pendukung seperti poster, brosur, spanduk, banner, baliho, stiker, billboard, dan x-banner.

Sasaran sosialisasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat, yang mencakup masyarakat umum, remaja dan pemilih pemula, perempuan, tokoh masyarakat dan tokoh agama, pedagang, petani, buruh, kelompok pekerja, wartawan dan kelompok media, PNS, partai politik, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), pengawas atau pemantau Pilkada-kada, serta kelompok pemilih berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas dan penghuni lembaga pemasyarakatan.





Gambar 30.14. Sosialisasi Pilkada Kabupaten Sumenep Tahun 2024



Gambar 30.15. Maskot Pilkada Kabupaten Sumenep Tahun 2024

Kucing Busok merupakan ras kucing asli Indonesia yang berasal dari Pulau Ra'as, Kabupaten Sumenep, dan telah memperoleh pengakuan internasional dari *World Cat Federation*. Dengan penampilan yang eksotis, liar, dan memikat layaknya macan tutul kecil, Kucing Busok kerap dijadikan hadiah istimewa bagi tamu kehormatan. Namun, seiring waktu, populasi kucing ini semakin menurun hingga dikategorikan sebagai satwa langka yang perlu dilindungi. Berangkat dari semangat pelestarian fauna lokal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep menetapkan Kucing Busok

sebagai maskot resmi Pilkada 2024. Maskot ini diberi nama “Si Busok”, yang merupakan akronim dari “Siap, Bebas, Umum, Serentak, Orientasi Kesejahteraan”, mencer-minkan komitmen terhadap prinsip demokrasi yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Filosofi di balik Si Busok sarat makna. Pertama, penetapan maskot ini mencerminkan kepedulian KPU Sumenep terhadap pelestarian kekayaan hayati daerah, khususnya Kucing Busok sebagai satwa lokal yang istimewa. Kedua, Si Busok mengenakan *beskap*, pakaian adat Madura, yang merepresentasikan penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal serta semangat kekeluargaan dalam pelaksanaan Pilkada. Ketiga, tangan kanan Si Busok memegang paku, sebagai simbol ajakan kepada masyarakat untuk menyalurkan hak pilih di TPS dengan penuh kesadaran dan ketulusan, sebagaimana keteguhan paku saat digunakan mencoblos surat suara. Keempat, tangan kirinya memegang surat suara bertuliskan "PILKADA SUMENEP, Rabu 27 November 2024", sebagai pengingat bagi masyarakat akan pentingnya berpartisipasi aktif pada hari pemilihan.

Selain itu, Si Busok juga mengenakan *sampir* bermotif warna pastel yang melambangkan kedekatan dengan generasi milenial, sebagai bentuk ajakan partisipatif kepada pemilih pemula untuk turut belajar dan terlibat dalam proses demokrasi sejak dini. Terakhir, celana *pesa* yang dikenakannya melambangkan inklusivitas, bahwa Pilkada bukan hanya milik generasi muda, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sumenep. Dengan seluruh simbolisme tersebut, Si Busok diharapkan tidak hanya menjadi ikon yang menarik secara visual, tetapi juga menjadi media edukatif yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam mewujudkan Pilkada yang bermartabat, demokratis, dan berakar pada nilai-nilai budaya lokal.

Dalam rangka menciptakan pemilihan yang demokratis, adil, dan setara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep menyediakan berbagai fasilitas kampanye bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024. Fasilitas kampanye tersebut meliputi penyediaan bahan kampanye, alat peraga kampanye (APK), media iklan kampanye, serta pelaksanaan debat publik antar pasangan calon.

Fasilitas bahan kampanye yang disediakan oleh KPU mencakup pamflet, brosur, poster, dan selebaran yang bertujuan untuk membantu penyebaran visi, misi, dan program kerja pasangan calon secara luas kepada masyarakat. Untuk alat peraga kampanye (APK), KPU menyediakan baliho, umbul-umbul, dan spanduk yang ditempatkan di titik-titik strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu,

KPU Kabupaten Sumenep juga memfasilitasi penyiaran iklan kampanye melalui media elektronik, yaitu radio dan televisi lokal. Langkah ini diambil sebagai bentuk pemerataan akses informasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil.

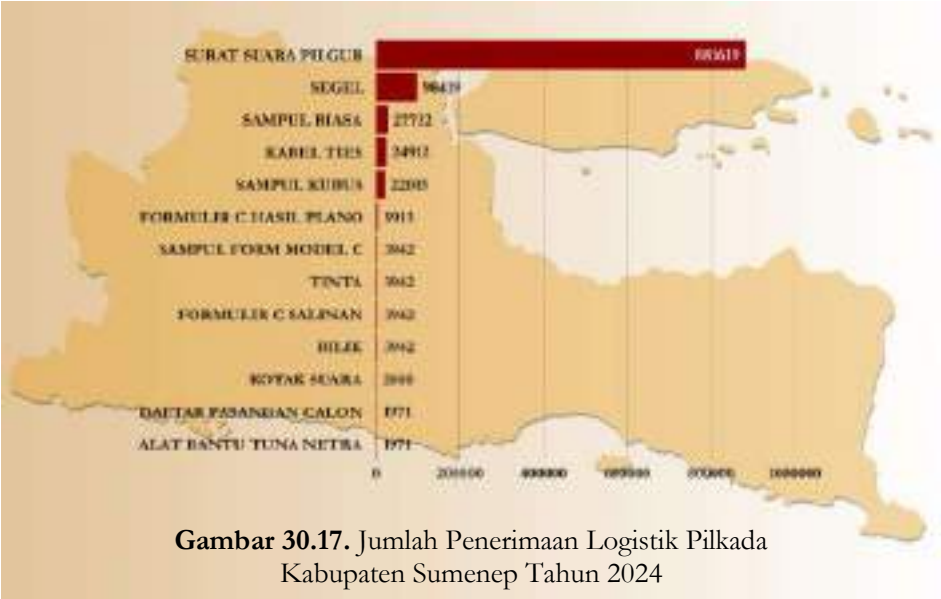
Sebagai bagian dari penyampaian program secara terbuka dan transparan, KPU Sumenep juga mengadakan tiga kali Debat Publik/ Terbuka antar pasangan calon. Debat pertama dilaksanakan pada 26 Oktober 2024 di Ballroom Tuan Gubhe Uniba Madura dengan tema “Strategi dalam Mengatasi Permasalahan Daerah untuk Kemajuan Masyarakat Sumenep”. Debat kedua diselenggarakan pada 9 November 2024 di Aula Pesantren Uniba Madura dengan tema “Tata Kelola Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sumenep”. Sementara itu, debat ketiga digelar pada 20 November 2024 dengan mengangkat tema “Harmonisasi Pembangunan Pusat hingga Daerah, serta Penguatan Kearifan Lokal dan Wawasan Kebangsaan”. Dengan berbagai fasilitas dan agenda kampanye yang telah disediakan tersebut, diharapkan proses kampanye dapat berjalan secara adil, informatif, dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi, sehingga masyarakat Kabupaten Sumenep dapat menentukan pilihan secara bijak dan berdasarkan pertimbangan rasional.



Gambar 30.16. Debat Publik Pilkada Kabupaten Sumenep Tahun 2024

6. Logistik

Pengadaan logistik untuk mendukung seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Dalam pelaksanaannya, metode pengadaan yang digunakan oleh KPU Kabupaten Sumenep meliputi dua mekanisme utama, yaitu *e-Purchasing* melalui *e-Katalog* dan Penunjukan Langsung. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada Gambar 30.17.



Gambar 30.17. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kabupaten Sumenep Tahun 2024

Distribusi logistik untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dilaksanakan secara bertahap mulai tanggal 21 hingga 26 November 2024. Proses distribusi dimulai dari gudang logistik KPU Kabupaten Sumenep menuju Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tanggal 21–24 November 2024, dilanjutkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal 24–25 November 2024, dan akhirnya diteruskan ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Sumenep pada tanggal 26 November 2024.

Kabupaten Sumenep memiliki karakteristik geografis yang menantang, terdiri dari 27 kecamatan, dimana 9 di antaranya merupakan wilayah kepulauan, serta 334 desa/kelurahan, dengan 88 desa terletak di wilayah kepulauan dan 20 desa terpisah dari daratan kecamatan induknya. Oleh

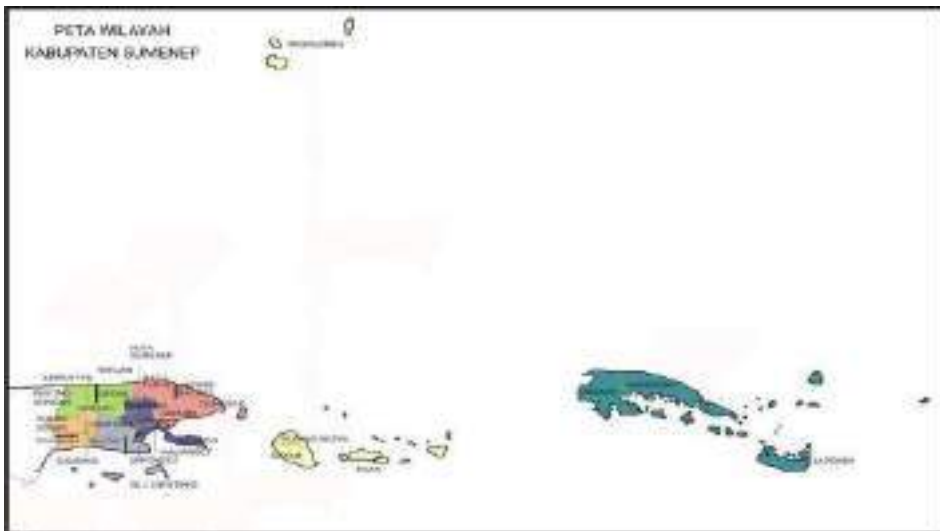
karena itu, moda transportasi yang digunakan dalam pendistribusian logistik sangat beragam, mencakup transportasi darat seperti truk, mobil pick-up, dan sepeda motor, serta transportasi laut seperti kapal dan perahu. Dalam pelaksanaannya, KPU Kabupaten Sumenep bekerja sama dengan PT. Pos Sumenep untuk distribusi logistik ke PPK. Untuk wilayah kepulauan seperti Arjasa, Kangayan, Sapeken, Ra’as, Gayam, dan Nonggunong, distribusi logistik dilakukan melalui kerja sama dengan PT. Sumekar, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang transportasi laut. Sementara untuk wilayah Masalembu, Giligenting, dan Talango, pengiriman dilakukan dengan menggunakan kapal/perahu reguler.

Tabel 30.1. Moda Transportasi Distribusi Logistik Pilkada Kabupaten Sumenep Tahun 2024

No	Jenis Transportasi	PPK	PPS	TPS
1	Mobil Truk	27	-	-
2	Mobil Pick-up	-	27	-
3	Sepeda Motor/Sepeda Kayuh	-	-	1971
4	Speedboat/Perahu	4	16	5

Untuk menunjang kelancaran distribusi, KPU Kabupaten Sumenep menggunakan dua gudang logistik, yaitu satu gudang pinjaman dari Pemerintah Daerah yang berlokasi di Jalan Asta Tinggi No. 99 Kebunagung (satu area dengan kantor KPU) dan satu gudang sewa di Jalan Lingkar Barat, Babbalan, Kecamatan Batuan yang digunakan sejak pengelolaan logistik Pilkada 2024. Proses sortir dan pelipatan surat suara untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Sumenep melibatkan 27 petugas setting dan packing.

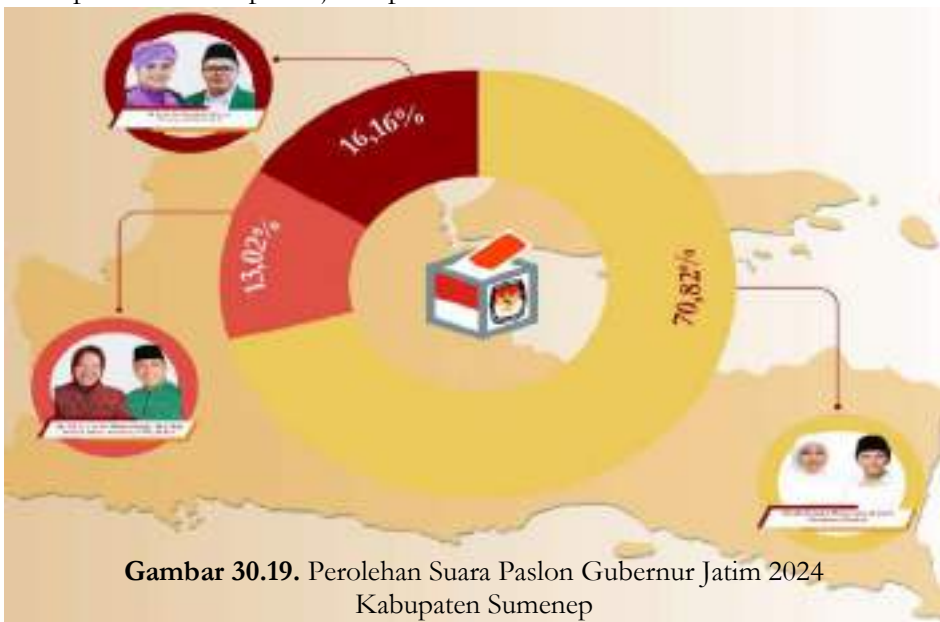
Distribusi logistik menghadapi tantangan geografis, terutama pada wilayah kepulauan. Salah satu kecamatan terjauh adalah Masalembu, yang membutuhkan waktu tempuh hingga 16 jam menggunakan kapal laut. Oleh karena itu, pendistribusian logistik ke wilayah tersebut dilakukan lebih awal dengan memperhatikan kondisi cuaca dan jadwal pelayaran agar tidak mengganggu tahapan pelaksanaan Pilkada.



Gambar 30.18. Peta Distribusi Logistik Pilkada Kabupaten Sumenep Tahun 2024

7. Hasil Pilkada Serentak

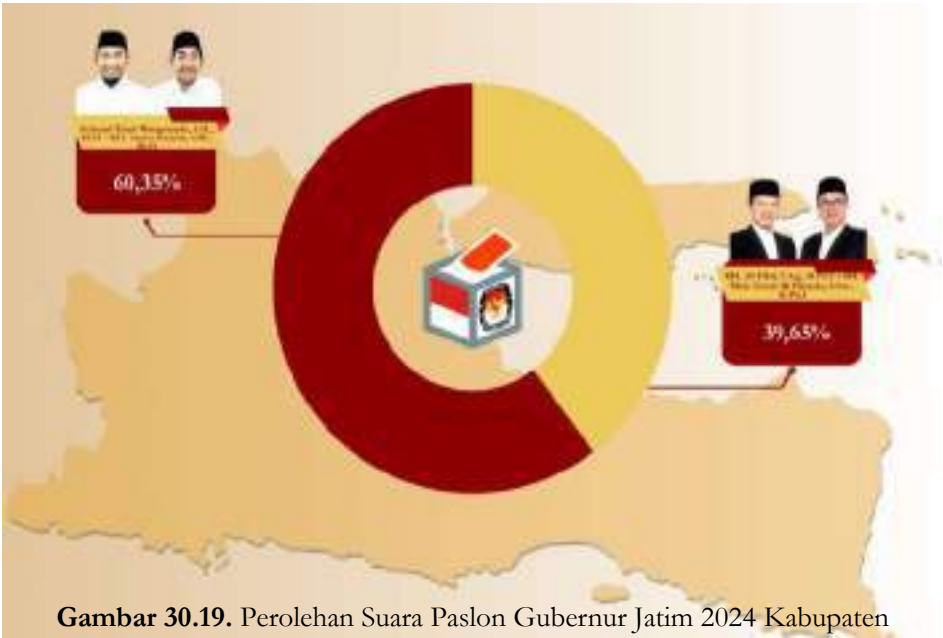
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Sumenep disajikan pada Gambar 30.19.



Gambar 30.19. Perolehan Suara Paslon Gubernur Jatim 2024
Kabupaten Sumenep

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep, pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestjanto Dardak memperoleh suara tertinggi dengan jumlah 425.040 suara, atau sebesar 70,82% dari total suara sah. Pasangan ini unggul jauh dibanding dua pasangan calon lainnya. Di urutan kedua, pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah, M.Si – H. Lukmanul Khakim, M.Si meraih 97.003 suara atau 16,16%, sedangkan pasangan Dr. (H.C.) Ir. Tri Rismaharini, M.T – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), S.IP., M.Kes. memperoleh 78.115 suara, setara dengan 13,02%. Total suara sah yang masuk tercatat sebanyak 600.158 suara. Hasil ini menunjukkan dominasi suara yang signifikan untuk pasangan Khofifah – Emil di wilayah Kabupaten Sumenep.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada Gambar 30.20.



Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024, pasangan Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H – KH. Imam Hasyim, S.H., M.H memperoleh suara terbanyak dengan perolehan 379.858 suara, atau sebesar 60,35% dari total suara sah. Sementara itu, pasangan KH. Ali Fikri, S.Ag., M.Pd.I – KH. Muh. Unais Ali Hisyam, S.Sos., M.Pd.I memperoleh 249.597 suara, atau setara dengan 39,65%. Total suara sah

yang masuk sebanyak 629.455 suara, menandakan bahwa pasangan Achmad Fauzi – KH. Imam Hasyim unggul secara signifikan dan berhasil memenangkan kontestasi Pilkada Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

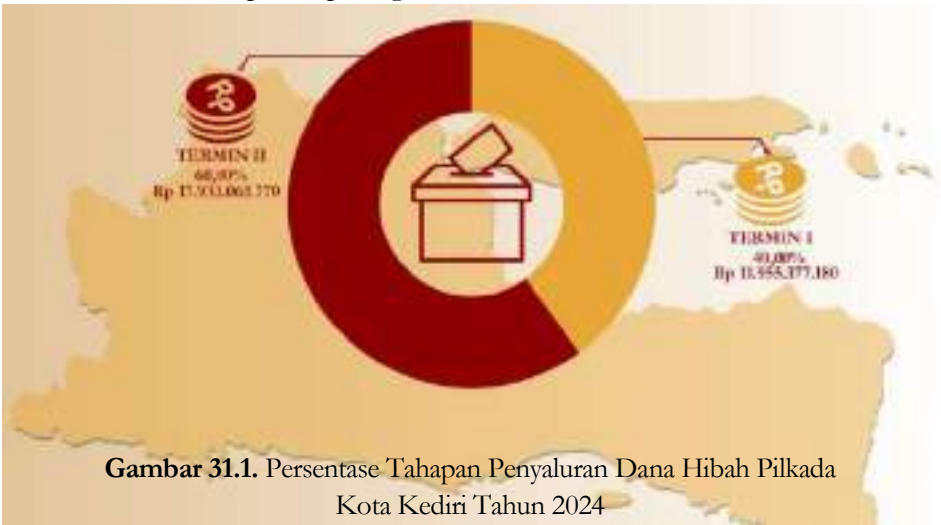
BAGIAN 31

KOTA KEDIRI

1. Perencanaan Program dan Anggaran

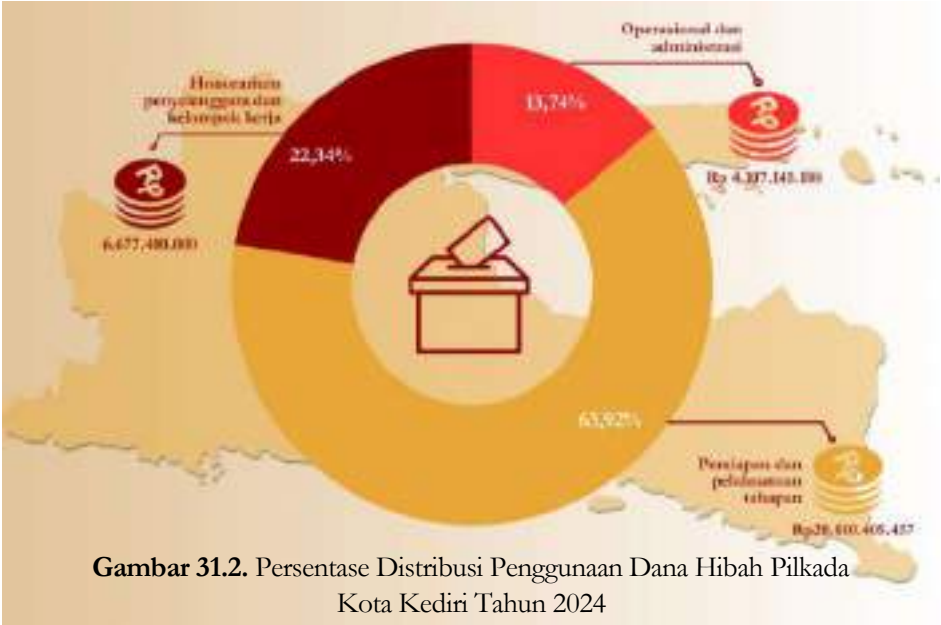
Pelaksanaan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Kediri Tahun 2024 diawali dengan perencanaan anggaran yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Kediri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri. Berdasarkan NPHD dengan nomor 180/522/419.300/2023 dan nomor 414/KU.07-NK/3571/2023 yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2023, Pemerintah Kota Kediri mengalokasikan dana hibah sebesar Rp29.888.442.950 kepada KPU Kota Kediri.

Dana hibah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri, dan digunakan untuk membiayai seluruh tahapan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Kediri Tahun 2023 dan 2024. Pembiayaan ini mencakup kebutuhan operasional kelembagaan, logistik pilkada, honorarium badan *ad hoc*, kegiatan sosialisasi dan kampanye, serta dukungan teknis lainnya yang diperlukan untuk menjamin kelancaran dan integritas proses pemilihan. Penandatanganan NPHD ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan berkualitas di wilayahnya. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 31.1 berikut.



Dana hibah Pilkada Kota Kediri Tahun 2024 disalurkan dalam dua termin. Termin pertama dicairkan sebesar Rp11.955.377.180 atau setara dengan 40% dari total nilai hibah. Sementara itu, termin kedua dicairkan sebesar Rp17.933.065.770 atau 60% dari keseluruhan dana. Pembagian pencairan ini dilakukan secara bertahap dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tahapan penyelenggaraan Pilkada yang terus berkembang serta untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran sesuai dengan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Kediri.

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 31.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.



Gambar 31.2. Persentase Distribusi Penggunaan Dana Hibah Pilkada Kota Kediri Tahun 2024

Dana hibah Pilkada Kota Kediri Tahun 2024 dialokasikan dalam tiga komponen utama. Komponen terbesar dialokasikan untuk Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan dengan total anggaran sebesar Rp19.103.897.762,-, atau setara dengan 63,92% dari total hibah. Anggaran ini mencakup seluruh kegiatan inti penyelenggaraan pemilihan seperti verifikasi calon, penyusunan daftar pemilih, logistik pilkada, hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya, anggaran untuk Honorarium dialokasikan sebesar Rp6.677.400.000 atau 22,34%, yang digunakan untuk pembayaran honor badan *ad hoc* penyelenggara pilkada di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga TPS. Sementara itu, sebesar Rp.

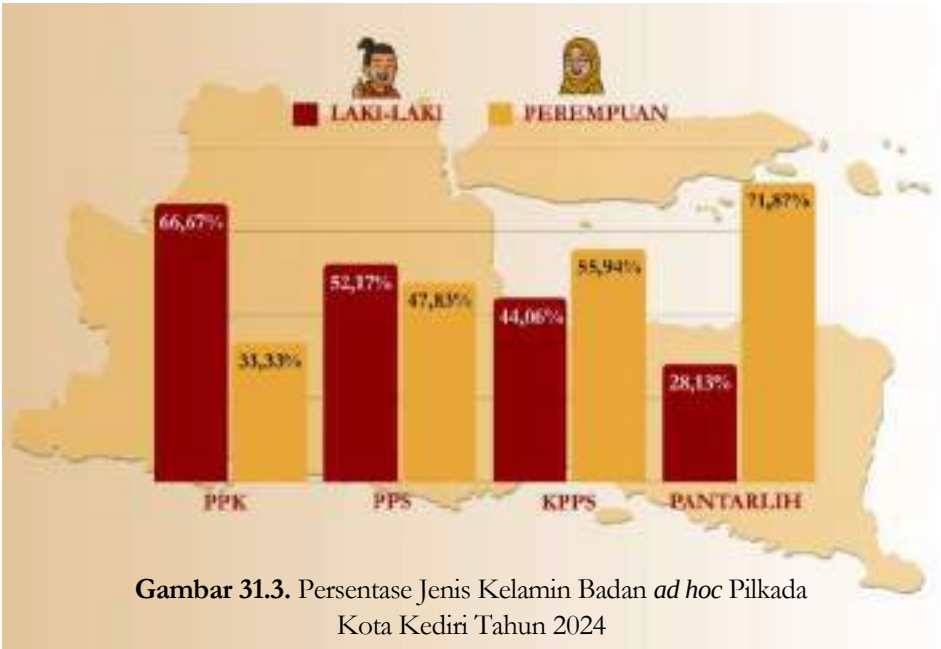
4.107.145.188,- atau 13,74% digunakan untuk menunjang operasional dan administrasi perkantoran, termasuk pengadaan alat tulis kantor, dukungan sarana kerja, komunikasi, serta kebutuhan administratif lainnya dalam mendukung kinerja KPU Kota Kediri secara keseluruhan. Dengan perencanaan dan alokasi anggaran yang terukur dan proporsional ini, diharapkan proses Pilkada di Kota Kediri dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

2. **Badan *Ad hoc***

Dalam rangka melaksanakan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri merekrut sebanyak 3.770 personil badan *ad hoc* yang tersebar di seluruh wilayah administrasi Kota Kediri. Personil tersebut terdiri atas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Rekrutmen badan *ad hoc* mengacu pada struktur administrasi wilayah Kota Kediri yang terdiri atas 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Pesantren. Berdasarkan struktur ini, ditetapkan sebanyak 15 anggota PPK (masing-masing 5 orang per kecamatan). Untuk tingkat kelurahan, Kota Kediri memiliki 46 kelurahan, sehingga jumlah anggota PPS yang direkrut sebanyak 138 orang (3 orang per kelurahan).

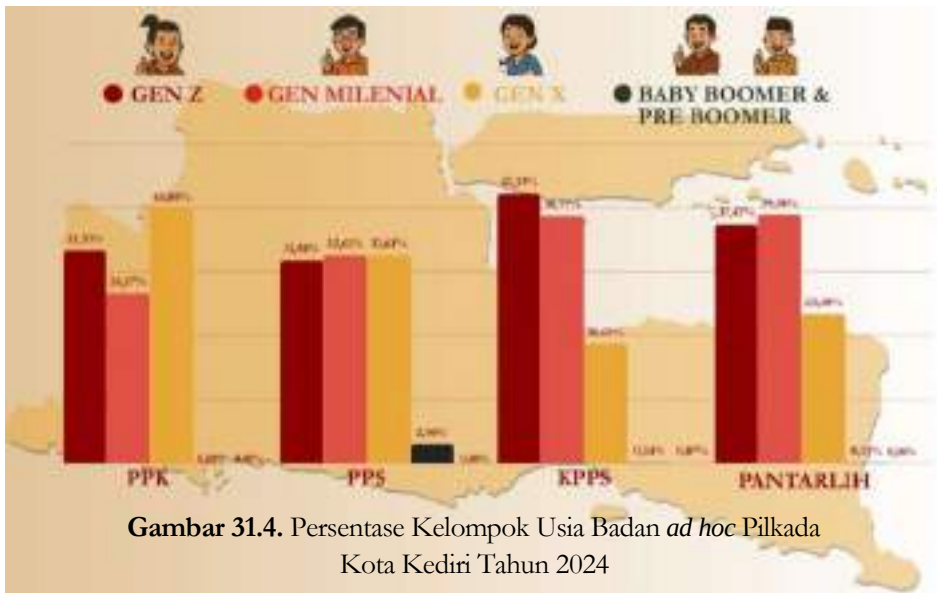
Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara KPU Kota Kediri Nomor 231/PL.01.2-BA/3571/2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Rekapitulasi Pemetaan TPS Data Pemilih Hasil Sinkronisasi, ditetapkan bahwa terdapat 401 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Untuk memenuhi kebutuhan pemutakhiran data pemilih melalui kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit), KPU merekrut sebanyak 782 orang Pantarlih, berdasarkan prinsip bahwa satu orang pantarlih melayani maksimal 300 pemilih, dengan tetap mempertimbangkan kondisi geografis dan demografis masing-masing wilayah. Adapun penetapan final jumlah TPS didasarkan pada Berita Acara KPU Kota Kediri Nomor 282/PL.01.2-BA/3571/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Pendirian TPS Lokasi Khusus, yang diperbarui melalui Berita Acara Nomor 336/PL.01.1-BA/3571/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Rekapitulasi Penetapan DPT, sehingga jumlah TPS secara keseluruhan menjadi 405 TPS. Seiring dengan hal tersebut, KPU Kota Kediri menetapkan jumlah anggota KPPS sebanyak 2.835 orang, berdasarkan komposisi 7 anggota KPPS di setiap TPS. Rekrutmen badan *ad hoc* ini dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan perundang-undangan,

guna menjamin terselenggaranya Pilkada yang profesional, partisipatif, dan berintegritas di Kota Kediri. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 31.3.



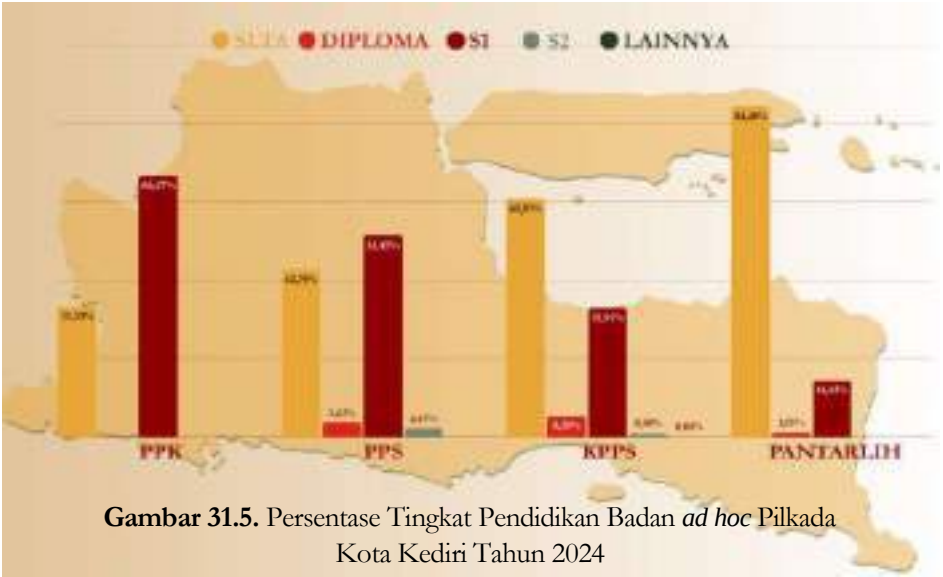
Sebaran demografi badan *ad hoc* Pilkada berdasarkan jenis kelamin menunjukkan variasi yang signifikan di setiap jenjang. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebanyak 66,67% atau 10 orang merupakan laki-laki, sementara 33,33% atau 5 orang adalah perempuan dari total 15 anggota. Pada tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), komposisi antara laki-laki dan perempuan lebih seimbang, yaitu 52,17% atau 72 orang laki-laki dan 47,83% atau 66 orang perempuan dari total 138 anggota. Sementara itu, pada kelompok Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), terjadi dominasi perempuan sebesar 55,94% atau 1.586 orang, sedangkan laki-laki berjumlah 44,06% atau 1.249 orang dari total 2.835 anggota. Komposisi serupa juga terlihat pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH), di mana 71,87% atau 562 orang merupakan perempuan dan hanya 28,13% atau 220 orang adalah laki-laki dari total 782 petugas. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam struktur badan *ad hoc* Pilkada meningkat secara nyata, terutama pada tingkat pelaksana teknis di lapangan seperti KPPS dan Pantarlih.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kota Kediri Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 31.4 berikut.



Sebaran demografi berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa generasi muda mendominasi keanggotaan badan *ad hoc* Pilkada di berbagai tingkatan. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), mayoritas anggota berasal dari Generasi X (usia 44–59 tahun) sebanyak 40,00% atau 6 orang, diikuti oleh Generasi Z (usia 17–27 tahun) sebesar 33,33% atau 5 orang, serta Generasi Milenial (usia 28–43 tahun) sebesar 26,67% atau 4 orang dari total 15 anggota. Di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), komposisi usia cukup merata antara Generasi Z, Milenial, dan Gen X, masing-masing sebesar 31,88% (44 orang), 32,61% (45 orang), dan 32,61% (45 orang). Sementara itu, Generasi *Baby Boomer* (usia 60–78 tahun) hanya mencakup 2,90% (4 orang) dan tidak ada anggota dari kelompok usia *Pre-Boomer* (> 79 tahun). Kelompok usia muda semakin mendominasi pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), di mana Generasi Z mencakup 42,33% atau 1.200 orang, dan Generasi Milenial sebesar 38,77% atau 1.099 orang. Hanya 18,69% atau 530 orang yang berasal dari Generasi X, sementara kelompok usia *Baby Boomer* dan *Pre-Boomer* masing-masing sangat kecil, yaitu 0,14% (4 orang) dan 0,07% (2 orang). Kondisi serupa juga terlihat pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), di mana Generasi Milenial mendominasi sebesar 39,00% atau 305 orang, diikuti oleh Generasi Z sebesar 37,47% (293 orang), dan Generasi X sebesar 23,40% (183 orang). Sementara itu, *Baby Boomer* hanya berjumlah 0,13% (1 orang) dan tidak terdapat anggota dari kelompok *Pre-Boomer*. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pelibatan generasi muda, khususnya Generasi Z dan Milenial, sangat dominan dalam struktur badan *ad hoc* Pilkada.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kota Kediri Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 31.5.



Sebaran demografi badan *ad hoc* Pilkada berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas anggota memiliki latar belakang pendidikan menengah dan sarjana. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagian besar anggota merupakan lulusan Strata 1 (S1) sebanyak 66,67% atau 10 orang, sedangkan sisanya 33,33% atau 5 orang merupakan lulusan SLTA (SMA/SMK). Komposisi serupa juga terlihat di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), di mana dominasi lulusan S1 tetap tinggi sebesar 51,45% atau 71 orang. Lulusan SLTA mencakup 42,75% atau 59 orang, sementara sisanya berasal dari jenjang Diploma (3,62% atau 5 orang) dan S2 (2,17% atau 3 orang). Pada kelompok Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPSS), proporsi tertinggi berasal dari lulusan SLTA sebanyak 60,81% atau 1.724 orang. Disusul oleh lulusan S1 sebanyak 32,91% atau 933 orang, Diploma sebesar 5,36% atau 152 orang, S2 sebesar 0,88% atau 25 orang, dan 1 orang atau 0,04% tercatat dalam kategori pendidikan lainnya. Sementara itu, pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), hampir seluruh petugas merupakan lulusan SLTA sebesar 84,40% atau 660 orang. Lulusan S1 menyumbang 14,45% atau 113 orang, dan lulusan Diploma hanya 1,15% atau 9 orang. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan menengah (SLTA) masih mendominasi struktur badan *ad hoc* pada level teknis seperti KPSS dan Pantarlih, sementara lulusan S1 lebih banyak mengisi posisi pada jenjang

koordinatif seperti PPK dan PPS. Kondisi ini mencerminkan peran pendidikan tinggi dalam menjangkau level pengambilan keputusan, sementara pendidikan menengah tetap menjadi tulang punggung pelaksanaan teknis di lapangan.

Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Kediri, tercatat belum adanya representasi dari kelompok penyandang disabilitas yang turut berperan aktif sebagai penyelenggara pada badan *ad hoc*, baik di tingkat PPK, PPS, KPPS, maupun Pantarlih. Ketidakterlibatan ini menjadi catatan penting dalam upaya mewujudkan pilkada yang inklusif dan ramah disabilitas. Meskipun hak partisipasi politik bagi seluruh warga negara telah dijamin, realisasi partisipasi kelompok disabilitas sebagai bagian dari penyelenggara pilkada masih menghadapi tantangan, baik dari sisi aksesibilitas, informasi, maupun kesempatan. Ke depan, diperlukan langkah afirmatif, pelatihan yang adaptif, serta perluasan jangkauan rekrutmen yang lebih inklusif untuk mendorong keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam setiap tahapan pilkada, guna memastikan pelaksanaan demokrasi yang setara dan partisipatif bagi semua lapisan masyarakat.

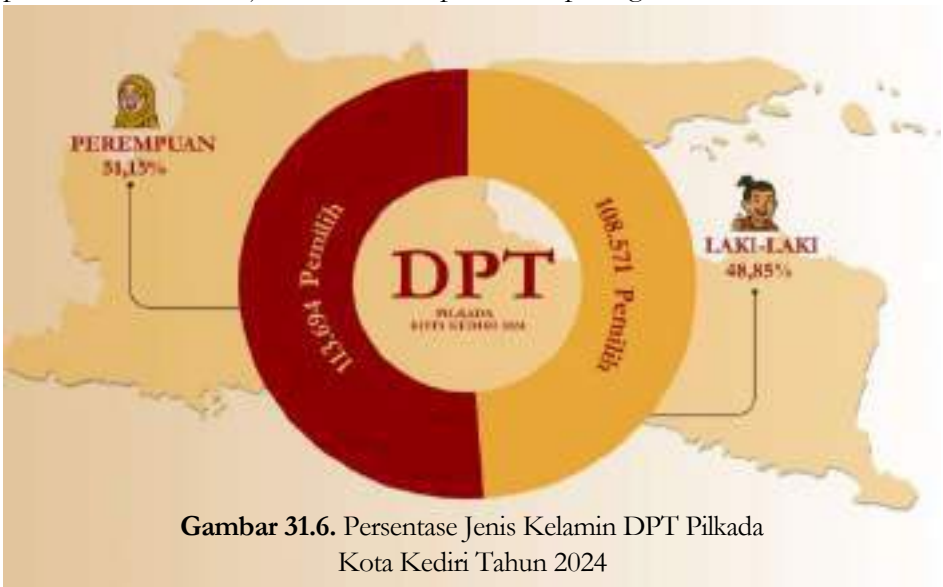
3. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu tahapan strategis dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk memberikan suara pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Di Kota Kediri, proses ini diawali dengan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi (DPS), yang menjadi dasar pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta penugasan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Selanjutnya, Pantarlih melaksanakan pencocokan dan penelitian (Coklit) terhadap data pemilih secara faktual di lapangan. Hasil dari kegiatan Coklit ini kemudian ditetapkan dalam rapat pleno menjadi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Data DPHP tersebut menjadi acuan bagi KPU Kota Kediri untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) melalui rapat pleno di tingkat kabupaten/kota. Setelah penetapan DPS, KPU membuka ruang partisipasi masyarakat dan instansi/lembaga terkait untuk memberikan masukan dan tanggapan atas data tersebut. Masukan tersebut diakomodasi dan diplenokan di tingkat PPS dan PPK untuk menghasilkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kota Kediri.

Penetapan DPT dilakukan melalui rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan

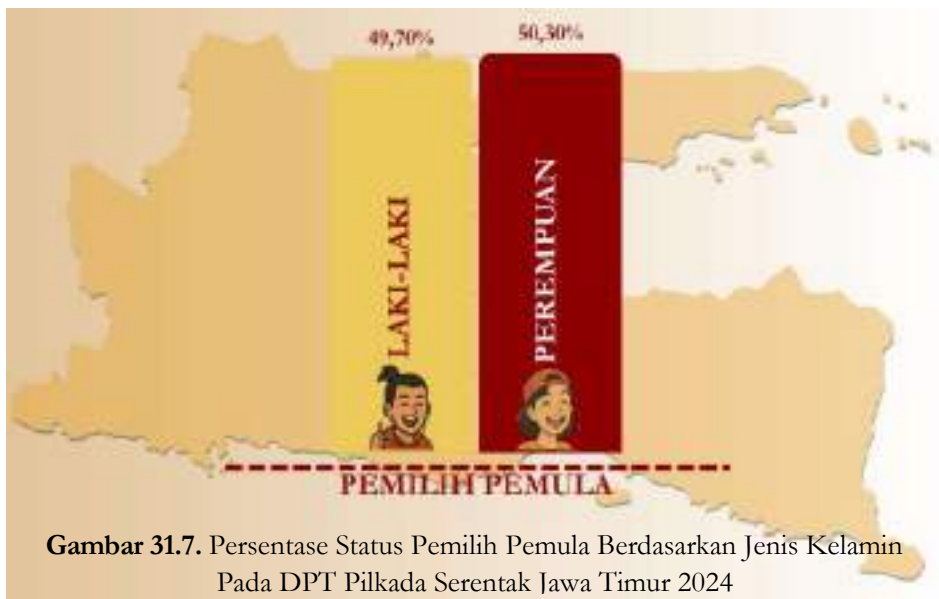
KPU Kota Kediri Nomor 377 Tahun 2024. Berdasarkan keputusan tersebut, jumlah DPT di Kota Kediri sebanyak 222.265 pemilih, tersebar di 401 TPS Reguler dan 4 TPS Lokasi Khusus. Adapun TPS Lokasi Khusus tersebut berada di Lapas Kelas IIA Kediri (2 TPS), Pondok Pesantren Al Amien (1 TPS), dan Pondok Pesantren Wali Barokah (1 TPS). Tahapan pemutakhiran ini mencerminkan komitmen KPU Kota Kediri untuk menjamin data pemilih yang akurat, mutakhir, dan inklusif, guna mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan partisipatif. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 31.6.



Gambar 31.6. Persentase Jenis Kelamin DPT Pilkada Kota Kediri Tahun 2024

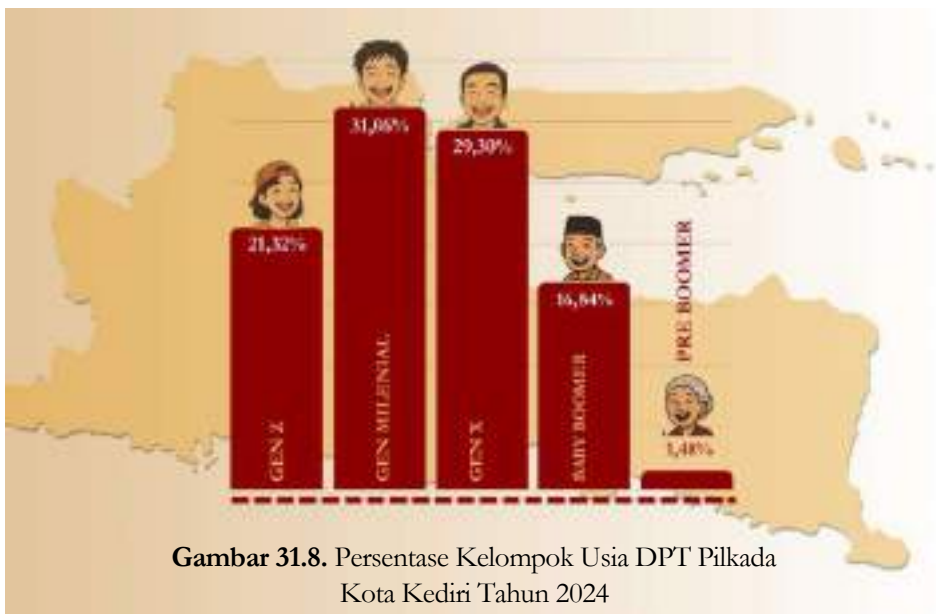
Sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Kediri menunjukkan komposisi yang cukup seimbang antara pemilih laki-laki dan perempuan, dengan sedikit dominasi dari pemilih perempuan. Dari total 222.265 pemilih, sebanyak 108.571 orang (48,85%) merupakan pemilih laki-laki, sementara 113.694 orang (51,15%) merupakan pemilih perempuan. Data ini mencerminkan bahwa keterlibatan pemilih perempuan dalam Pilkada Kota Kediri cukup signifikan dan menjadi bagian penting dalam menentukan arah demokrasi lokal. Keseimbangan gender dalam DPT ini juga menjadi indikator positif terhadap keterwakilan dan partisipasi politik yang lebih inklusif.

Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam kategori utama, yakni pemilih pemula. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 31.7 berikut.



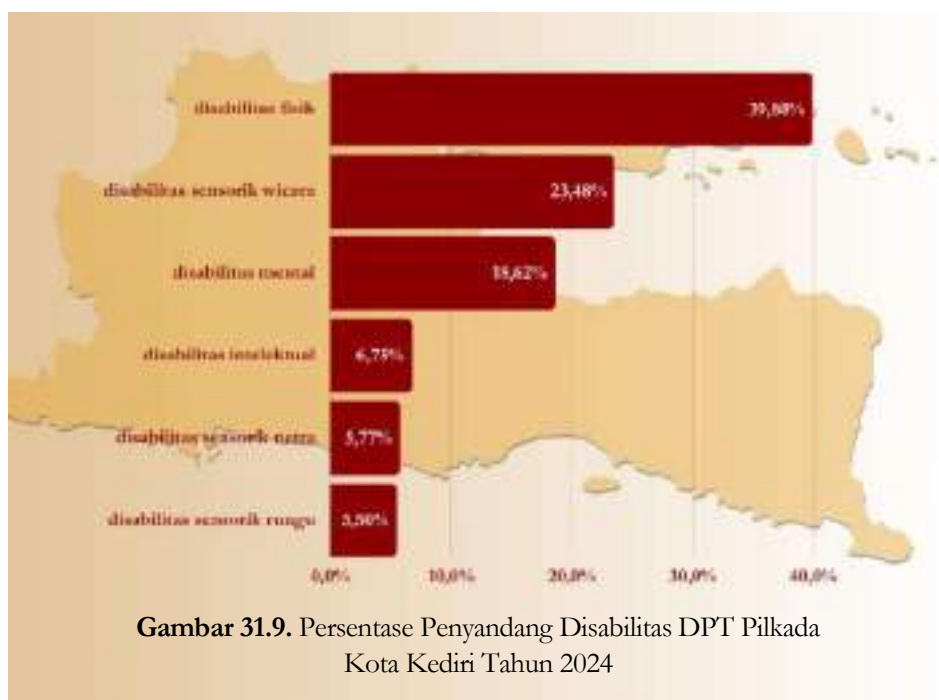
Sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan status pemilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Kediri menunjukkan bahwa mayoritas pemilih berasal dari kategori pemilih pemula tercatat sebanyak 5.137 orang atau 2,31%, yang terdiri atas 2.553 laki-laki (49,70%) dan 2.584 perempuan (50,30%). Distribusi ini menunjukkan bahwa proporsi gender relatif seimbang baik pada kelompok pemilih pemula, dengan sedikit dominasi dari pemilih perempuan di kedua kategori. Kehadiran pemilih pemula, meskipun secara persentase kecil, tetap menjadi indikator penting dalam regenerasi partisipasi politik, dan menunjukkan adanya partisipasi aktif dari kalangan usia muda dalam proses demokrasi di Kota Kediri.

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 31.8.



Sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Kediri berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi pemilih dari generasi produktif, khususnya Generasi Milenial dan Generasi X. Dari total 222.265 pemilih, kelompok usia 28–43 tahun (Generasi Milenial) mendominasi dengan jumlah 69.027 pemilih (31,06%), disusul oleh kelompok usia 44–59 tahun (Generasi X) sebanyak 65.130 pemilih (29,30%). Sementara itu, kelompok usia 17–27 tahun (Generasi Z) yang merupakan pemilih muda mencakup 47.390 orang (21,32%), menunjukkan partisipasi yang cukup dominan dari kalangan pemula dan pemilih muda. Adapun kelompok usia 60–78 tahun (*Generasi Baby Boomer*) tercatat sebanyak 37.422 pemilih (16,84%), dan kelompok usia di atas 79 tahun (*Pre-Boomer*) berjumlah 3.296 pemilih (1,48%). Komposisi ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% pemilih berada pada rentang usia produktif, mencerminkan potensi kuat partisipasi elektoral dari generasi yang aktif secara sosial dan ekonomi. Data ini juga dapat menjadi dasar strategis dalam penyusunan metode sosialisasi yang relevan dan segmentatif, sesuai karakteristik demografis pemilih di Kota Kediri.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kota Kediri Tahun 2024 disajikan pada gambar 31.9, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Dalam rangka mewujudkan pilkada yang inklusif, KPU Kota Kediri mencatat sebanyak 1.853 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan penyandang disabilitas. Berdasarkan jenis disabilitas, mayoritas pemilih disabilitas adalah penyandang disabilitas fisik, yang mencapai 739 orang (39,88%). Disusul oleh penyandang disabilitas sensorik wicara sebanyak 435 orang (23,48%), dan disabilitas mental sebanyak 345 orang (18,62%). Sementara itu, terdapat pula 125 orang (6,75%) penyandang disabilitas intelektual, 107 orang (5,77%) dengan disabilitas sensorik netra, dan 102 orang (5,50%) dengan disabilitas sensorik runtu. Data ini mencerminkan pentingnya perhatian terhadap aksesibilitas dan akomodasi khusus dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada, mulai dari sosialisasi, pemutakhiran data, hingga pelaksanaan pemungutan suara. Kehadiran pemilih disabilitas dalam DPT menjadi bukti nyata komitmen untuk memberikan hak politik secara setara tanpa diskriminasi.

4. Pencalonan

Tahapan pencalonan Wali kota dan Wakil Wali kota merupakan fase penting dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Kediri. Proses ini diawali dengan pengumuman jadwal pendaftaran bakal pasangan calon (paslon) yang dilaksanakan pada 24–26 Agustus 2024, sebagai bentuk

keterbukaan informasi kepada publik dan partai politik.

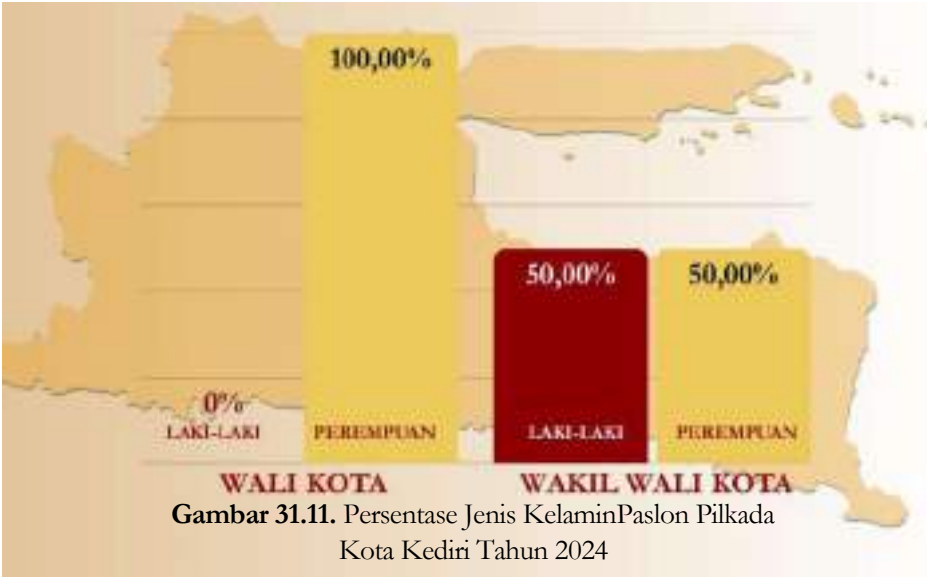
Selanjutnya, pendaftaran resmi bakal paslon dibuka pada 27–29 Agustus 2024. Dalam rentang waktu tersebut, dua pasangan calon secara resmi mendaftarkan diri ke KPU Kota Kediri, lengkap dengan dokumen persyaratan dan dukungan dari partai politik pengusung. Pasangan pertama yang mendaftar adalah Vinanda Prameswati, SH., M.Kn. dan Qowimuddin, yang mencalonkan diri sebagai Wali kota dan Wakil Wali kota. Pasangan kedua adalah Ferry Silviana Feronica dan Regina Nadya Suwono, yang turut mendaftar sebagai kontestan dalam kontestasi Pilkada Kota Kediri. Kehadiran dua pasangan calon ini mencerminkan dinamika politik yang kompetitif dan terbuka, serta menjadi bagian dari proses demokratis dalam menentukan pemimpin daerah lima tahun ke depan. Seluruh tahapan pencalonan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang tinggi.

Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada gambar 31.0 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.



Gambar 31.10. Daftar Nama Paslon Pilkada Kota Kediri Tahun 2024

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Kediri disajikan pada gambar 31.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Kediri disajikan pada gambar 31.12.



Komposisi pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Kediri Tahun 2024 menunjukkan keterwakilan gender yang cukup mencolok, terutama pada posisi calon Wali kota. Dari total empat orang calon, tiga di antaranya adalah perempuan (75%) dan hanya satu orang laki-laki (25%). Kedua kandidat untuk posisi Wali kota berasal dari kalangan perempuan (100%), sedangkan pada posisi Wakil Wali kota, terdapat komposisi seimbang antara laki-laki dan perempuan masing-masing 50%. Komposisi ini menandai penguatan

representasi perempuan dalam kontestasi kepala daerah di Kota Kediri, dan mencerminkan peningkatan partisipasi perempuan dalam arena politik lokal.

Berdasarkan tingkat pendidikan, seluruh pasangan calon menunjukkan latar belakang akademik yang relatif tinggi. Dari empat orang calon, dua orang (50%) merupakan lulusan Strata 1 (S1), satu orang (25%) lulusan Strata 2 (S2), dan satu orang (25%) tercatat sebagai lulusan SLTA. Untuk posisi calon Wali kota, masing-masing satu orang merupakan lulusan S1 dan S2, mencerminkan latar belakang pendidikan yang tinggi pada posisi kepemimpinan utama. Sementara itu, pada posisi Wakil Wali kota, satu calon berasal dari jenjang SLTA dan satu lainnya dari S1. Komposisi ini menunjukkan bahwa para kontestan Pilkada Kota Kediri memiliki bekal pendidikan yang memadai sebagai modal dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan pemerintahan daerah.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada Tabel 31.1, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



**VINANDA PILAMIRWATI, S.P.,
M.Kn. – QOWTHUDDEN**

VISI :
"MEREMANJUTIN KOTA KEDIRI YANG
MAMPAK, BERTU YANG BAKU, AGAMAH,
PRODUKTIF, AMAN, NGANGENI"

MISI :
1. **Maka**
Mempajukan Kota Kediri menjadi pusat
sumber pertumbuhan, pembangunan, kesehatan,
ekonomi dan pendidikan yang berkeadilan
2. **Agama**
Mempajukan pelayanan keagamaan melalui
sumber daya manusia yang berkeadilan
dengan nilai kearifan lokal yang berkeadilan
3. **Pendidikan**
Mempajukan sumber daya manusia dan
kearifan lokal yang berkeadilan melalui
pendidikan, ekonomi dengan peningkatan nilai
kearifan lokal yang berkeadilan yang berkeadilan
4. **Kesehatan**
Mempajukan tata laksana pelayanan yang
berkeadilan, amanah, transparan dan berkeadilan
5. **Keberdayaan**
Mempajukan tata laksana pelayanan yang
berkeadilan, amanah, transparan dan berkeadilan
6. **Keberdayaan**
Mempajukan tata laksana pelayanan yang
berkeadilan, amanah, transparan dan berkeadilan



**FITHRY SILVIANA PURBONICA, S.P.,
HEKINA NAFWA SUWONO, S.H.**

VISI :
"KOTA KEDIRI LINDUNG, AMAN,
BERKUALITAS DAN BERKEadilan"

MISI :
1. **Membangun Sumber Daya Manusia**
Membangun sumber daya manusia yang berkeadilan
dengan nilai kearifan lokal yang berkeadilan yang
berkeadilan
2. **Membangun Tata Kelola Pemerintahan**
Membangun tata kelola pemerintahan yang berkeadilan
dengan nilai kearifan lokal yang berkeadilan yang
berkeadilan
3. **Membangun Tata Kelola Pemerintahan**
Membangun tata kelola pemerintahan yang berkeadilan
dengan nilai kearifan lokal yang berkeadilan yang
berkeadilan
4. **Membangun Tata Kelola Pemerintahan**
Membangun tata kelola pemerintahan yang berkeadilan
dengan nilai kearifan lokal yang berkeadilan yang
berkeadilan
5. **Membangun Tata Kelola Pemerintahan**
Membangun tata kelola pemerintahan yang berkeadilan
dengan nilai kearifan lokal yang berkeadilan yang
berkeadilan
6. **Membangun Tata Kelola Pemerintahan**
Membangun tata kelola pemerintahan yang berkeadilan
dengan nilai kearifan lokal yang berkeadilan yang
berkeadilan

Gambar 31.13. Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada
Kota Kediri Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

Partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak, sebagai wujud pelibatan publik dalam proses demokrasi yang inklusif dan berintegritas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri sebagai penyelenggara pilkada, secara konsisten melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan, guna menjamin pemahaman serta keterlibatan aktif masyarakat dalam memilih pemimpin daerah. Tujuan utama dari pelaksanaan sosialisasi adalah untuk menyebarluaskan informasi tentang Pilkada, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta mendorong peningkatan partisipasi pemilih. Selain itu, sosialisasi juga diarahkan untuk menjangkau kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, agar tercipta kesetaraan kesempatan dalam menggunakan hak pilih.

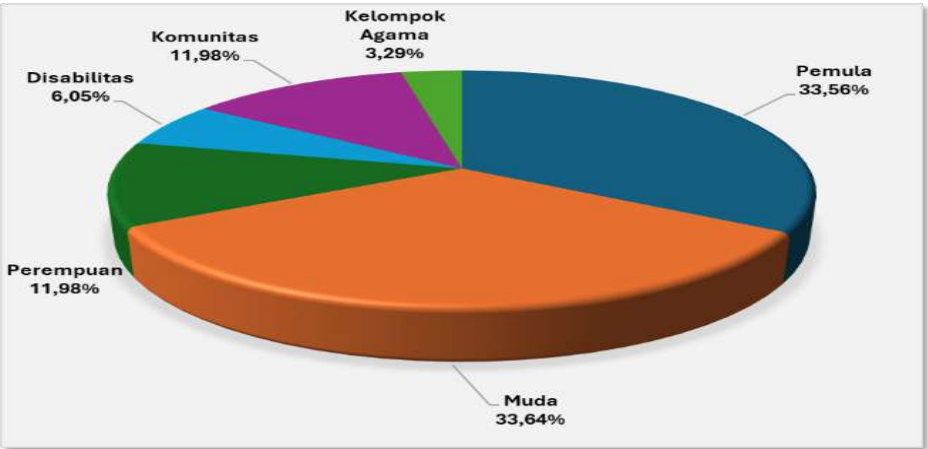
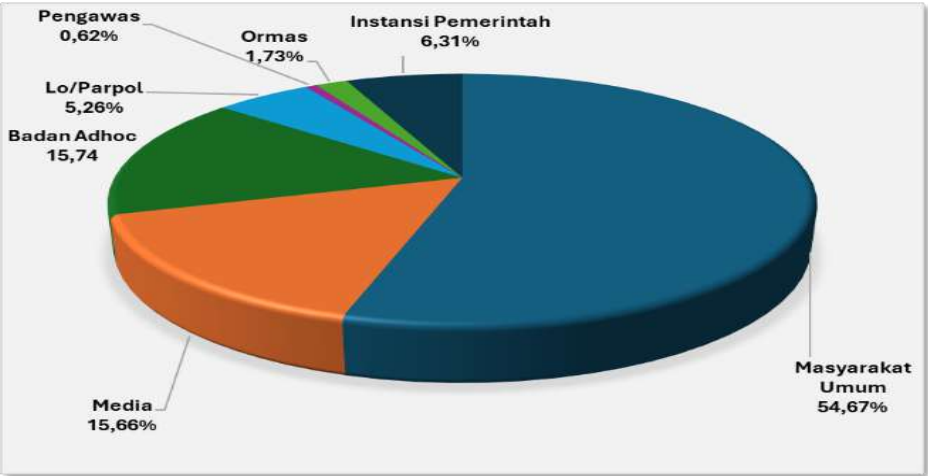
Prinsip-prinsip pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Pilkada dijalankan secara netral, tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu, tidak mengganggu proses penyelenggaraan, serta bertujuan menciptakan suasana yang kondusif, aman, damai, dan tertib. KPU Kota Kediri juga memastikan bahwa kegiatan sosialisasi membuka akses seluas-luasnya kepada semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marjinal. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih mengacu pada Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota. Sosialisasi dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu:

1. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Secara Langsung, yang dilakukan dengan metode tatap muka, diskusi kelompok, pengumpulan massa, simulasi pemungutan suara, forum warga, serta pemutaran film atau talkshow.
2. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Secara Tidak Langsung, yang menggunakan media seperti brosur, poster, media sosial, media massa cetak dan elektronik, serta siaran radio atau televisi.

Kegiatan sosialisasi ini dirancang untuk menjangkau seluruh segmen masyarakat, termasuk pemilih pemula, pemilih muda, kelompok perempuan, masyarakat adat, komunitas keagamaan, serta kelompok disabilitas. Pelaksanaan sosialisasi dikemas secara kreatif dan interaktif, dengan menyesuaikan kebutuhan lokal masyarakat Kota Kediri.

Tabel 31.1. Kegiatan Sosialisasi Pilkada Kota Kediri Tahun 2024

Bentuk dan Jenis Kegiatan	Pelaksanaan
Sosialisasi Pembentukan Badan Ad hoc Pilkada Serentak Tahun 2024	1 Kegiatan Sosialisasi (1%)
Sosialisasi Produk Hukum	2 Kegiatan Sosialisasi (3%)
Sosialisasi Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024	6 Kegiatan Sosialisasi (9%)
Sosialisasi Kemitraan	40 kegiatan Sosialisasi (60%)
Sosialisasi Kerja Sama Instansi	1 kegiatan Sosialisasi (1%)
Sosialisasi Pelajar (KPU Goes to School & Campus)	7 kegiatan Sosialisasi (10%)
Sosialisasi Car Free Day	1 kegiatan Sosialisasi (1%)
Kirab Maskot Pilkada Serentak Tahun 2024	2 kegiatan Sosialisasi (3%)
Ledang	2 kegiatan Sosialisasi (3%)
Media Gathering	4 kegiatan Sosialisasi (6%)
Deklarasi Damai	1 kegiatan Sosialisasi (1%)
JUMLAH	67 Kegiatan Sosialisasi (100%)
Sosialisasi Media Cetak	7 ILM/Adv, 16 Media Cetak
Sosialisasi Media Online/Elektronik	4 kegiatan Sosialisasi,
	120 Media Online,
	6 Media Sosial KPU Kota Kediri
Alat Peraga dan Bahan Sosialisasi	11 Bahan Sosialisasi,
	5 Alat Peraga Sosialisasi



Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan semangat kolaboratif yang positif dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kota Kediri memperkenalkan maskot resmi bernama “Si Tatak”. Maskot ini merupakan wujud dari kolaborasi antara simbol kekayaan alam, kuliner, budaya, dan semangat masyarakat Kota Kediri dalam menyambut pesta demokrasi lima tahunan.



Gambar 31.15. Maskot Pilkada Kota Kediri Tahun 2024

Nama “Si Tatak” merupakan anagram dari “Tahu Takwa”, salah satu kuliner khas Kota Kediri, yang sekaligus mencerminkan identitas lokal yang kuat. Penggunaan nama ini diharapkan mampu membangun kedekatan emosional dengan masyarakat serta meningkatkan daya ingat terhadap simbol Pilkada. Desain “Si Tatak” sengaja dibuat sederhana dan tidak terlalu imajinatif, agar mudah diaplikasikan ke berbagai media kampanye, termasuk dalam bentuk kostum atau maskot berjalan (badut). Warna yang digunakan pada maskot pun mengadopsi warna dasar identitas Kota Kediri, dikombinasikan dengan estetika khas KPU yang menunjukkan unsur netralitas dan inklusivitas. Melalui “Si Tatak”, KPU Kota Kediri berharap dapat membangun komunikasi visual yang bersahabat dan mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat, sekaligus menggugah semangat partisipasi aktif dan sadar demokrasi menjelang hari pemungutan suara pada 27 November 2024.

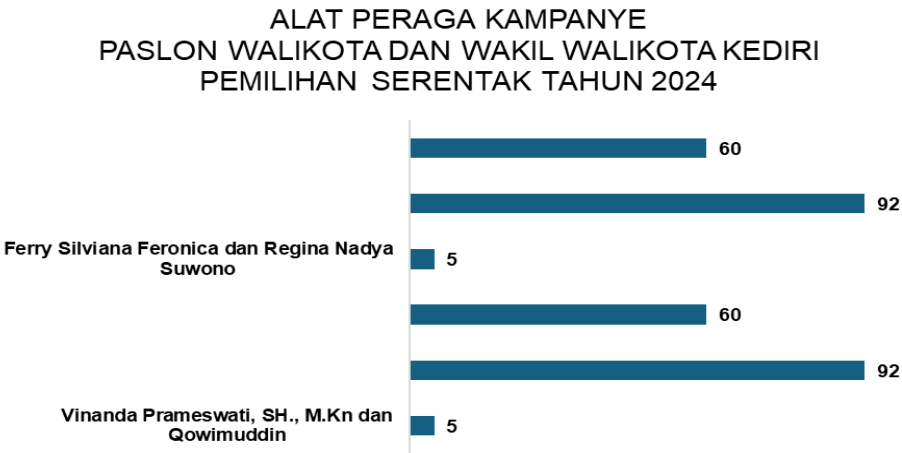
Tahapan kampanye dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Kediri merupakan bagian integral dari proses demokrasi yang memberi ruang bagi pasangan calon (paslon) untuk menyampaikan visi, misi, program kerja, dan gagasan kebijakan kepada masyarakat pemilih. Kampanye menjadi momentum strategis dalam memperkenalkan diri kepada publik serta membangun kedekatan dengan konstituen. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri sebagai penyelenggara pilkada memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi jalannya kampanye, guna memastikan seluruh aktivitas kampanye berlangsung dalam koridor hukum yang berlaku, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan.

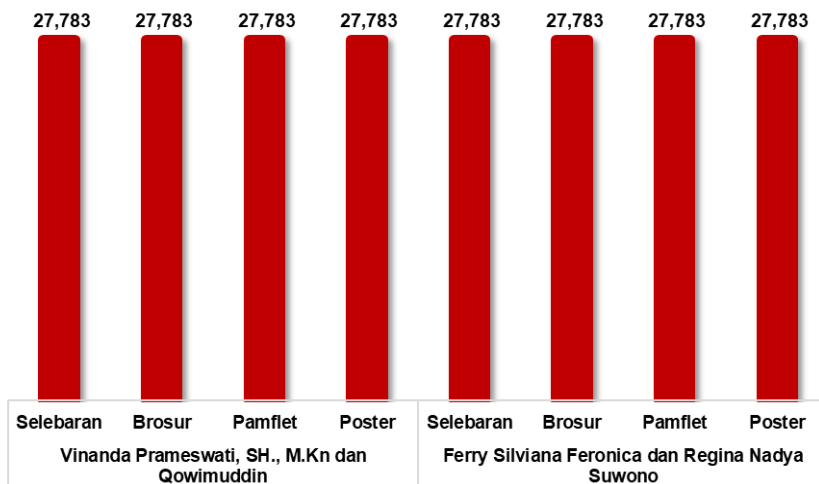
Tahapan kampanye diatur dalam peraturan KPU yang mencakup masa kampanye aktif, masa tenang kampanye, dan masa tenang menjelang pemungutan suara.

Salah satu bentuk fasilitasi kampanye yang menjadi sorotan publik adalah debat publik pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota, yang difasilitasi oleh KPU Kota Kediri sebagai sarana edukasi politik dan penyampaian gagasan kepada masyarakat secara terbuka. Debat publik dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu:

- 1. Debat Pertama: Dilaksanakan pada 1 November 2024 dengan tema *“Peningkatan Sumber Daya Manusia, Kualitas Hidup, dan Layanan Publik Menuju Kota Kediri yang Lebih Baik”*. Tema ini menggali pemikiran dan komitmen paslon terhadap pembangunan sosial dan pelayanan dasar bagi warga.
- 2. Debat Kedua: Dilaksanakan pada 20 November 2024 dengan tema *“Pembangunan Manusia Berbasis Kearifan Budaya Lokal, Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, dan Pemerintahan Daerah yang Bersih Menuju Indonesia Emas 2045”*. Tema ini menitikberatkan pada arah pembangunan jangka panjang yang berlandaskan budaya lokal, inovasi ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang transparan.

Melalui debat publik ini, masyarakat diharapkan dapat menilai secara langsung kualitas kepemimpinan, integritas, serta kapasitas pasangan calon dalam menghadapi tantangan pembangunan Kota Kediri. Kegiatan kampanye secara keseluruhan diharapkan dapat memperkuat pendidikan politik, memperluas informasi, dan mendorong peningkatan partisipasi pemilih secara bermartabat.





Gambar 31.16. Fasilitas Kampanye oleh KPU
Kota Kediri Tahun 2024

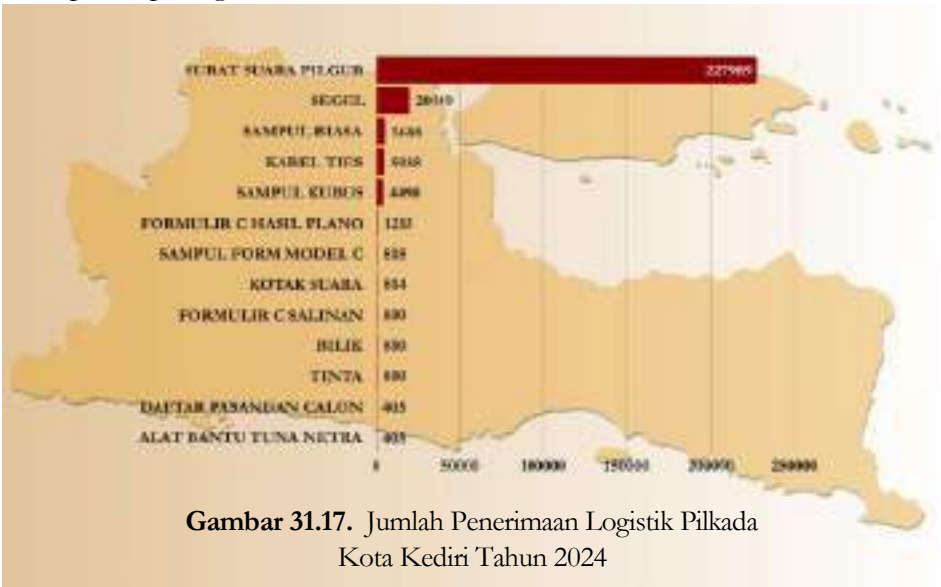
Salah satu indikator pemanfaatan teknologi informasi dalam kampanye Pilkada 2024 di Kota Kediri dapat dilihat dari jumlah akun media sosial (medsos) yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon (paslon). Berdasarkan data yang ditampilkan, pasangan Ferry Silviana Feronica dan Regina Nadya Suwono tercatat memiliki 4 akun media sosial (Facebook, Instagram, twitter/X, dan TikTok), lebih banyak dibandingkan pasangan Vinanda Prameswati, SH., M.Kn. dan Qowimuddin yang memiliki 3 akun media sosial (Instagram, twitter/X, dan TikTok). Perbedaan jumlah akun media sosial ini dapat mencerminkan strategi komunikasi digital yang digunakan masing-masing paslon dalam menjangkau pemilih, khususnya kalangan muda yang aktif di platform digital. Kehadiran di media sosial menjadi instrumen penting dalam menyampaikan visi, misi, dan program kerja, serta membangun citra diri secara interaktif dan real-time. Penggunaan media sosial secara optimal juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat literasi politik digital masyarakat Kota Kediri selama tahapan kampanye berlangsung.

6. Logistik

Logistik merupakan salah satu komponen kunci dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Pengelolaan logistik yang terencana dan akurat menjadi fondasi penting dalam menjamin terselenggaranya pemilihan yang sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Dalam konteks ini,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri memegang peran vital dalam merancang perencanaan kebutuhan logistik secara komprehensif. Proses ini diawali dengan identifikasi jenis logistik yang dibutuhkan pada berbagai tahapan, mulai dari pemungutan suara, penghitungan suara, hingga rekapitulasi perolehan suara di seluruh jenjang.

Perencanaan kebutuhan logistik dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), jumlah pemilih, dan kebutuhan spesifik penyelenggara di tiap tingkat. Selain itu, KPU Kota Kediri juga menyusun estimasi anggaran pengadaan logistik, yang mencakup biaya pemeliharaan, inventarisasi, dan distribusi logistik hingga ke lokasi TPS, termasuk di daerah dengan akses sulit atau lokasi khusus. Pengelolaan logistik Pilkada tidak hanya menuntut ketelitian dalam perhitungan jumlah kebutuhan, namun juga keterampilan dalam manajemen distribusi, termasuk penjadwalan pengiriman dan koordinasi dengan pihak terkait agar seluruh logistik dapat tiba tepat waktu dan dalam kondisi yang layak digunakan. KPU Kota Kediri berkomitmen untuk menjalankan pengelolaan logistik secara profesional dan akuntabel, guna mendukung terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang demokratis dan partisipatif. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 31.17.



Gambar 31.17. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kota Kediri Tahun 2024

Pendistribusian logistik merupakan bagian krusial dalam tahapan akhir persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, khususnya untuk menjamin kesiapan sarana pendukung saat pemungutan dan penghitungan suara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri telah melaksanakan proses

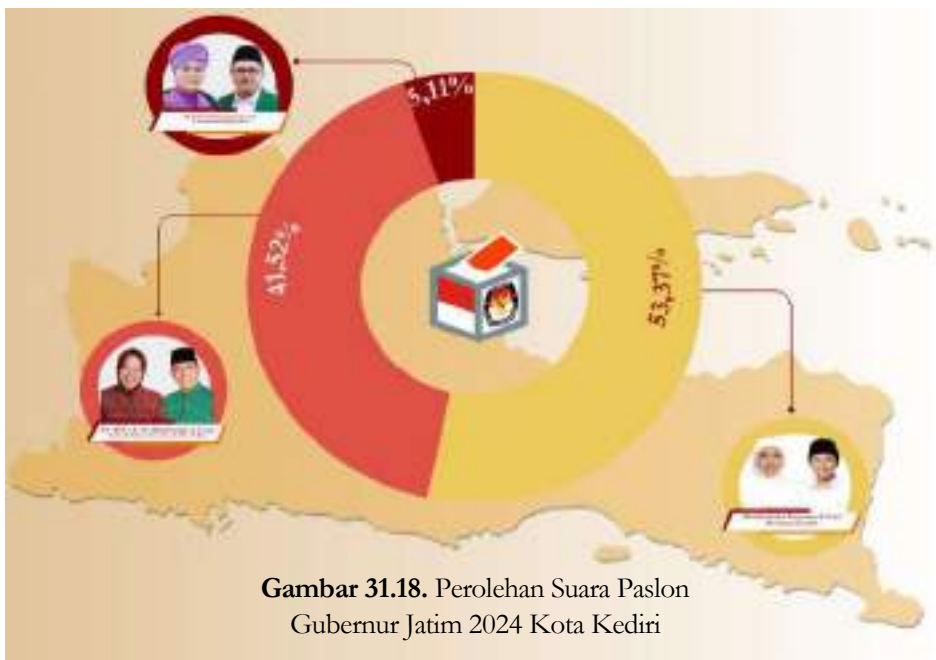
distribusi logistik secara terjadwal dan sistematis guna memastikan seluruh perlengkapan tiba tepat waktu di lokasi pemungutan suara.

Proses pendistribusian dilakukan dalam dua tahap. Bilik Pemungutan Suara mulai didistribusikan pada tanggal 23 November 2024, sedangkan Kotak Suara dan Logistik Luar Kotak Suara didistribusikan pada tanggal 26 November 2024, atau sehari sebelum hari pemungutan suara. Distribusi dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB dari Gudang Logistik KPU Kota Kediri menuju Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing kelurahan. Untuk mendukung kelancaran proses distribusi, KPU Kota Kediri bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia sebagai penyedia jasa pengangkutan logistik. Proses distribusi dilakukan menggunakan 6 unit truk box, dengan pembagian 2 truk box untuk masing-masing dari 3 kecamatan yang ada di Kota Kediri.

Selama proses pendistribusian logistik, tidak ditemukan kendala berarti. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Kota Kediri yang relatif mudah diakses dan terjangkau oleh armada transportasi. Keberhasilan distribusi logistik yang lancar ini menjadi salah satu indikator kesiapan teknis KPU dalam mendukung terselenggaranya pemungutan dan penghitungan suara secara tepat waktu dan efisien.

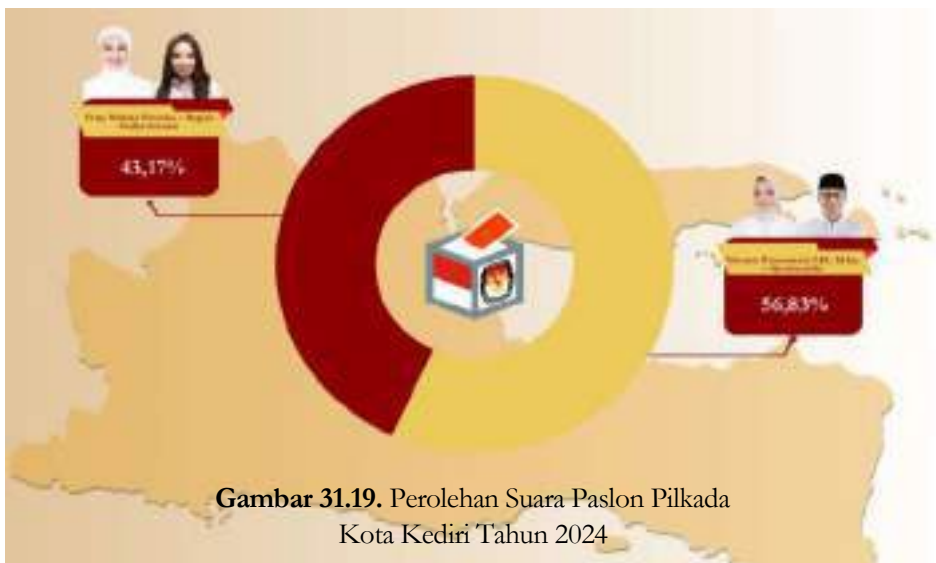
7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Kediri disajikan pada gambar 31.18.



Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kota Kediri pada Pilkada Serentak Tahun 2024, jumlah total suara sah yang masuk mencapai 171.190 suara. Dari jumlah tersebut, pasangan calon Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestjanto Dardak memperoleh suara terbanyak, yakni sebanyak 91.371 suara atau 53,37%, menjadikannya pasangan dengan dukungan tertinggi di Kota Kediri. Posisi kedua diraih oleh pasangan Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T. dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), S.IP., M.Kes., dengan perolehan 71.072 suara atau 41,52% dari total suara sah. Sementara itu, pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah, M.Si. dan H. Lukmanul Hakim, M.Si. memperoleh dukungan sebesar 8.747 suara atau setara dengan 5,11% dari total suara sah. Distribusi perolehan suara ini menunjukkan dominasi suara dari pasangan Khofifah–Emil di Kota Kediri, sekaligus mencerminkan preferensi pemilih terhadap rekam jejak dan visi kepemimpinan pasangan petahana tersebut.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Kediri pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 31.19.



Berdasarkan hasil rekapitulasi resmi yang ditetapkan oleh KPU Kota Kediri melalui Keputusan Nomor 620 Tahun 2024, pasangan calon Vinanda Prameswati, S.H., M.Kn. – Qowimuddin memperoleh dukungan terbanyak dengan total suara sah sebanyak 98.205 suara atau 56,83% dari total suara sah. Sementara itu, pasangan calon Ferry Silviana Feronica – Regina Nadya Suwono memperoleh 74.615 suara, setara dengan 43,17% dari total suara sah. Adapun total jumlah suara sah tercatat sebanyak 172.820 suara, dan jumlah suara tidak sah sebanyak 5.766 suara. Sehingga secara keseluruhan, total jumlah suara sah dan tidak sah yang masuk berjumlah 178.586 suara. Hasil ini menunjukkan bahwa pasangan Vinanda–Qowimuddin unggul secara signifikan atas pasangan Ferry–Regina, dan memperoleh mandat mayoritas dari masyarakat Kota Kediri untuk memimpin sebagai Wali kota dan Wakil Wali kota periode mendatang.

BAGIAN 32

KOTA BLITAR

1. Perencanaan Program dan Anggaran

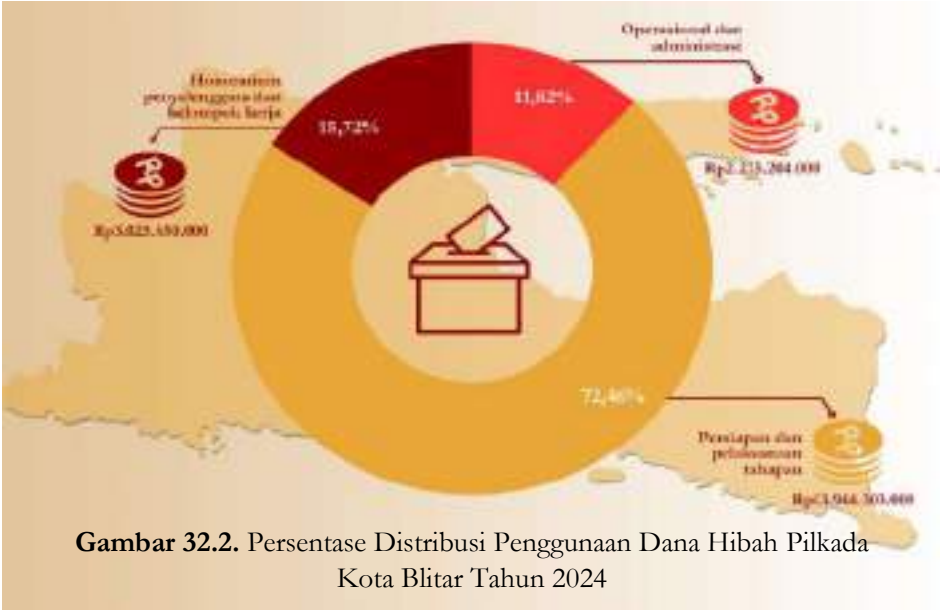
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Pemerintah Kota Blitar sebagai bentuk dukungan pendanaan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Total anggaran hibah yang disepakati dan diterima oleh KPU Kota Blitar adalah sebesar Rp. 19.245.157.000. Dalam pelaksanaannya, NPHD ini mengalami dua kali perubahan rincian, yakni pada tanggal 6 Agustus 2024 dan 26 November 2024. Meski terjadi perubahan dalam rincian penggunaan anggaran, nilai total NPHD tidak mengalami perubahan. Hal ini mencerminkan fleksibilitas dalam penyesuaian teknis kebutuhan anggaran pelaksanaan tahapan Pilkada tanpa mempengaruhi komitmen awal nilai dukungan dana hibah. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 32.1 berikut.



Dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada Kota Blitar Tahun 2024 dicairkan dalam dua termin. Termin pertama sebesar Rp. 7.698.062.800 atau setara dengan 40,00% dari total anggaran, sedangkan termin kedua sebesar Rp. 11.547.094.200 atau 60,00% dari total anggaran hibah. Skema pencairan secara bertahap ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam memberikan dukungan anggaran yang terukur dan tepat waktu, sesuai

dengan kebutuhan nyata di setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 32.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.

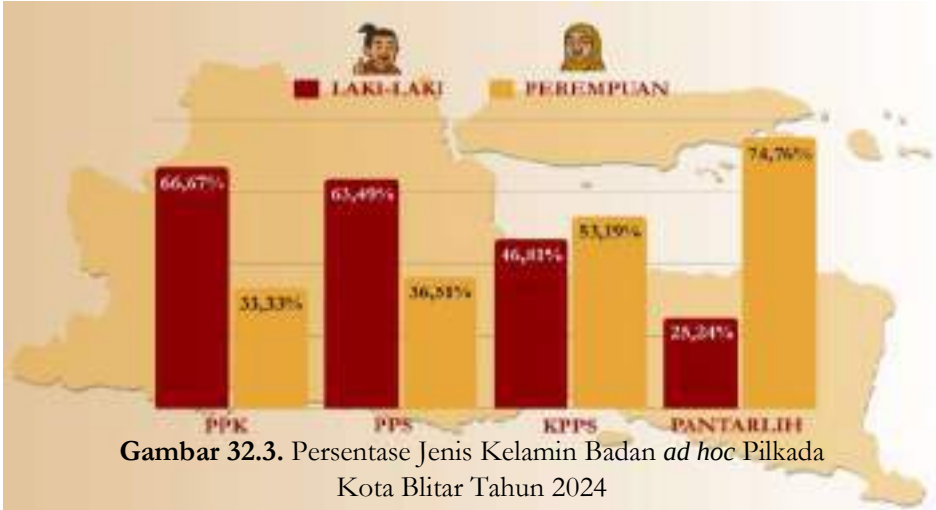


Anggaran hibah untuk Pilkada Kota Blitar Tahun 2024 sebesar Rp. 19.245.157.000 dialokasikan ke dalam tiga komponen utama. Sebagian besar anggaran, yaitu sebesar Rp. 13.944.303.000 atau 72,46%, digunakan untuk mendukung tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilihan. Selanjutnya, sebesar Rp. 3.025.650.000 atau 15,72% dialokasikan untuk honorarium penyelenggara *ad hoc* dan tenaga pendukung. Sementara itu, kebutuhan operasional dan administrasi perkantoran mendapat alokasi sebesar Rp. 2.275.204.000 atau 11,82%. Struktur alokasi ini mencerminkan fokus penggunaan anggaran yang proporsional, dengan penekanan pada keberlangsungan tahapan inti Pilkada serta dukungan administratif yang memadai.

2. Badan Ad Hoc

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar telah melaksanakan proses rekrutmen badan *ad hoc* untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Antusiasme masyarakat tercermin dari tingginya jumlah pendaftar yang secara keseluruhan telah melebihi tiga kali

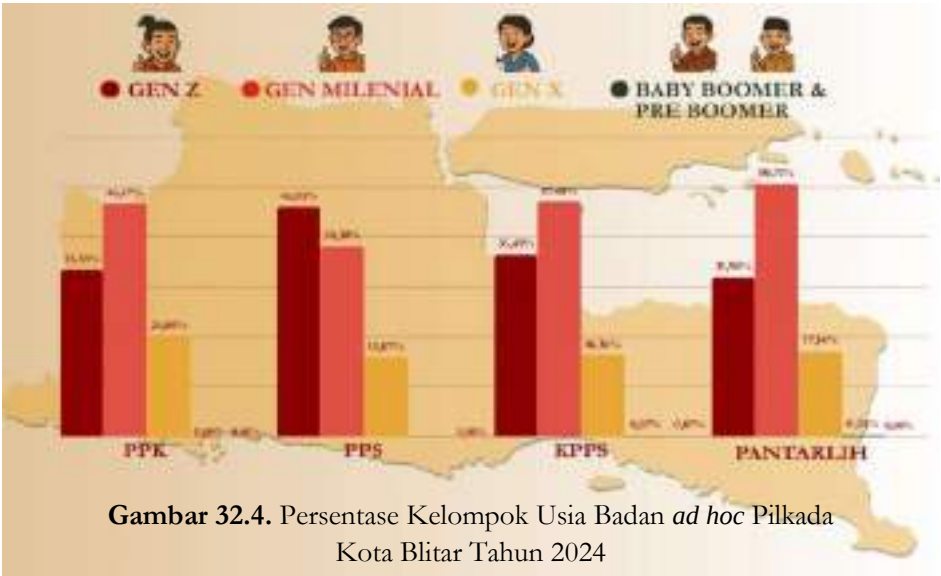
lipat dari kebutuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU. Jumlah pendaftar untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tercatat sebanyak 62 orang. Sementara itu, pendaftar Panitia Pemungutan Suara (PPS) berjumlah 187 orang. Untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), jumlah pendaftar mencapai 556 orang. Adapun pendaftar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjadi yang terbanyak, yaitu sebanyak 2.061 orang. Jumlah kebutuhan badan *ad hoc* KPU Kota Blitar sendiri meliputi 15 orang untuk PPK, 63 orang untuk PPS, 420 orang untuk Pantarlih, dan 1.491 orang untuk KPPS. Masa kerja untuk PPK dan PPS berlangsung selama delapan bulan, sedangkan untuk Pantarlih dan KPPS masing-masing selama satu bulan. Tingginya minat pendaftar memungkinkan KPU Kota Blitar melakukan seleksi secara optimal guna mendapatkan personel yang kompeten dan berintegritas dalam menyelesaikan tahapan Pilkada 2024. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 32.3.



Sebaran demografi badan *ad hoc* KPU Kota Blitar Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan keterwakilan yang cukup beragam antara laki-laki dan perempuan. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dari total 15 orang yang direkrut, sebanyak 10 orang atau 66,67% merupakan laki-laki, sementara 5 orang atau 33,33% merupakan perempuan. Untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berjumlah 63 orang, sebanyak 40 orang atau 63,49% adalah laki-laki, sedangkan 23 orang atau 36,51% adalah perempuan. Sebaliknya, pada tingkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), justru didominasi oleh perempuan, yakni sebanyak 793 orang atau 53,19%, sementara laki-laki

sebanyak 698 orang atau 46,81% dari total 1.491 anggota KPPS. Pola serupa juga terlihat pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), di mana dari total 420 orang, sebanyak 314 orang atau 74,76% adalah perempuan dan hanya 106 orang atau 25,24% merupakan laki-laki. Data ini mencerminkan tingginya partisipasi perempuan, khususnya pada level pelaksana teknis di lapangan seperti KPPS dan Pantarlih, dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada Kota Blitar 2024.

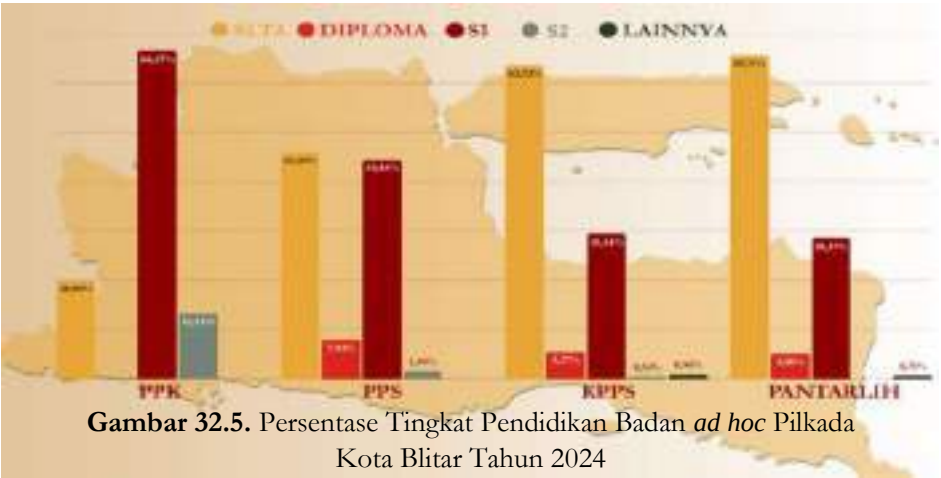
Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kota Blitar Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 32.4 berikut.



Sebaran demografi badan *ad hoc* KPU Kota Blitar Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi generasi muda, terutama dari kelompok Generasi Milenial dan Generasi Z. Pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dari total 15 orang, sebanyak 7 orang atau 46,67% berasal dari Generasi Milenial (usia 28–43 tahun), diikuti oleh Generasi Z (usia 17–27 tahun) sebanyak 5 orang atau 33,33%, dan sisanya 3 orang atau 20,00% berasal dari Generasi X (usia 44–59 tahun). Untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), dari total 63 orang, sebanyak 29 orang atau 46,03% berasal dari Generasi Z, kemudian 24 orang atau 38,10% dari Generasi Milenial, dan 10 orang atau 15,87% dari Generasi X. Sementara itu, pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah 1.491 orang, Generasi Milenial menjadi yang paling dominan dengan jumlah 702 orang atau 47,08%, diikuti oleh Generasi Z sebanyak 544 orang atau 36,49%, Generasi X sebanyak 244 orang atau 16,36%, dan terdapat 1 orang atau

0,07% dari kelompok Baby Boomer (usia 60–78 tahun). Pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dari total 420 orang, sebanyak 213 orang atau 50,71% berasal dari Generasi Milenial, diikuti oleh Generasi Z sebanyak 134 orang atau 31,90%, dan Generasi X sebanyak 72 orang atau 17,14%. Terdapat pula 1 orang atau 0,24% dari kelompok Baby Boomer. Data ini menunjukkan bahwa dominasi usia produktif muda sangat kuat dalam struktur badan *ad hoc* Pilkada Kota Blitar 2024, mencerminkan semangat partisipasi aktif generasi muda dalam demokrasi lokal.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *ad hoc* pada Pilkada Kota Blitar Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 32.5.



Sebaran demografi badan *ad hoc* KPU Kota Blitar Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas anggota berasal dari jenjang pendidikan menengah atas (SLTA) dan sarjana (S1), dengan proporsi yang bervariasi di setiap tingkatan badan *ad hoc*. Pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dari total 15 orang, sebanyak 10 orang atau 66,67% merupakan lulusan S1, 3 orang atau 20,00% lulusan SLTA, dan 2 orang atau 13,33% merupakan lulusan S2. Untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 63 orang, sebanyak 29 orang atau 46,03% merupakan lulusan SLTA, diikuti oleh 28 orang atau 44,44% lulusan S1, 5 orang atau 7,94% lulusan Diploma, dan 1 orang atau 1,59% lulusan S2. Pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah 1.491 orang, mayoritas berpendidikan SLTA sebanyak 950 orang atau 63,72%, diikuti oleh lulusan S1 sebanyak 439 orang atau 29,44%, Diploma sebanyak 80 orang atau 5,37%, S2 sebanyak 8 orang atau 0,54%, dan lainnya sebanyak 14 orang atau 0,94%. Sementara itu, dari total

420 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), sebanyak 276 orang atau 65,71% adalah lulusan SLTA, 120 orang atau 28,57% lulusan S1, 21 orang atau 5,00% lulusan Diploma, dan 3 orang atau 0,71% berasal dari kategori pendidikan lainnya. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa mayoritas anggota badan *ad hoc* berasal dari kalangan beRpendidikan SLTA dan S1, yang dinilai cukup memadai untuk mendukung tugas teknis dan administratif dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada.

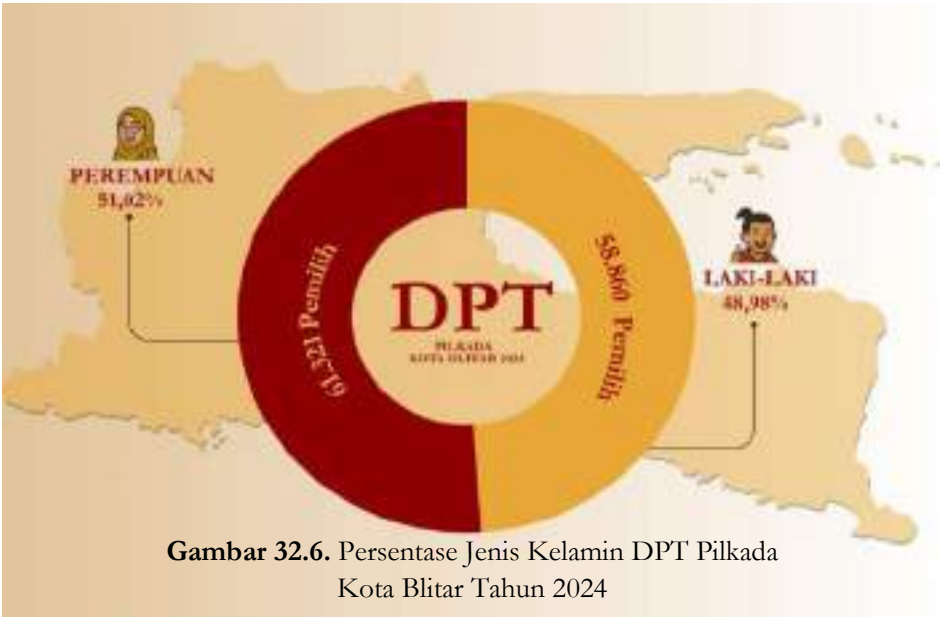
Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Blitar, tercatat belum adanya representasi dari kelompok penyandang disabilitas yang turut beRperan aktif sebagai penyelenggara pada badan *ad hoc*, baik di tingkat PPK, PPS, KPPS, maupun Pantarlih. Ketidakterlibatan ini menjadi catatan penting dalam upaya mewujudkan pilkada yang inklusif dan ramah disabilitas. Meskipun hak partisipasi politik bagi seluruh warga negara telah dijamin, realisasi partisipasi kelompok disabilitas sebagai bagian dari penyelenggara pilkada masih menghadapi tantangan, baik dari sisi aksesibilitas, informasi, maupun kesempatan. Ke depan, diperlukan langkah afirmatif, pelatihan yang adaptif, serta perluasan jangkauan rekrutmen yang lebih inklusif untuk mendorong keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam setiap tahapan pilkada, guna memastikan pelaksanaan demokrasi yang setara dan partisipatif bagi semua lapisan masyarakat.

3. Pemutakhiran Data

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar telah melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih secara cermat dan berjenjang untuk memastikan akurasi daftar pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Proses ini diawali dengan penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DPHP) yang kemudian disempurnakan menjadi Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi (DPS) sebanyak 120.218 pemilih. Melalui tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) serta uji publik, data tersebut difinalisasi menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 120.177 pemilih.

Setelah dilakukan perbaikan dan penyusunan berdasarkan masukan masyarakat dan temuan penyelenggara, KPU Kota Blitar menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 sebanyak 120.181 pemilih. Jumlah ini mencerminkan peningkatan dibandingkan DPT pada Pilkada 2024 yang sebelumnya berjumlah 119.082 pemilih. Proses pemutakhiran ini menunjukkan komitmen KPU Kota Blitar dalam menjamin teRpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk memilih, sekaligus memperkuat integritas

dan transparansi dalam penyelenggaraan pilkada yang demokratis dan inklusif. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 32.6.



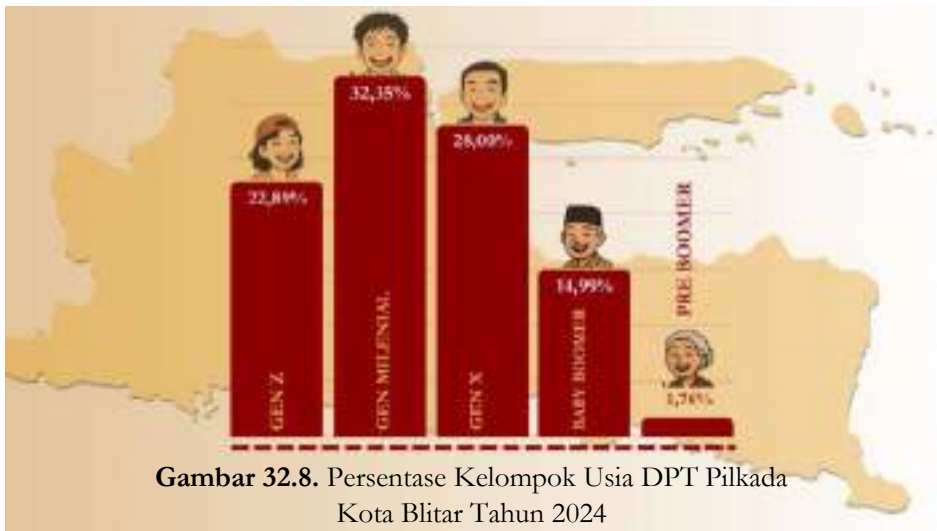
Sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Blitar Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan proporsi yang relatif berimbang antara pemilih laki-laki dan perempuan. Dari total 120.181 pemilih, sebanyak 58.860 orang atau 48,98% merupakan pemilih laki-laki, sedangkan 61.321 orang atau 51,02% merupakan pemilih perempuan. Data ini mengindikasikan bahwa partisipasi perempuan dalam daftar pemilih sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang sekaligus mencerminkan peran penting pemilih perempuan dalam menentukan arah demokrasi lokal di Kota Blitar.

Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni pemilih pemula dan pemilih. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 32.7 berikut.



Sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Blitar Tahun 2024 berdasarkan pemilih terdiri dari dua kategori utama, yaitu pemilih pemula. Jumlah pemilih pemula tercatat sebanyak 2.084 orang, yang terdiri dari 1.047 laki-laki (50,24%) dan 1.037 perempuan (49,76%), menunjukkan komposisi yang hampir seimbang antara kedua jenis kelamin. Data ini menunjukkan bahwa meskipun proporsi pemilih pemula relatif kecil, keterwakilan gender tetap terjaga, dan dominasi pemilih perempuan secara umum masih terlihat pada keseluruhan komposisi DPT.

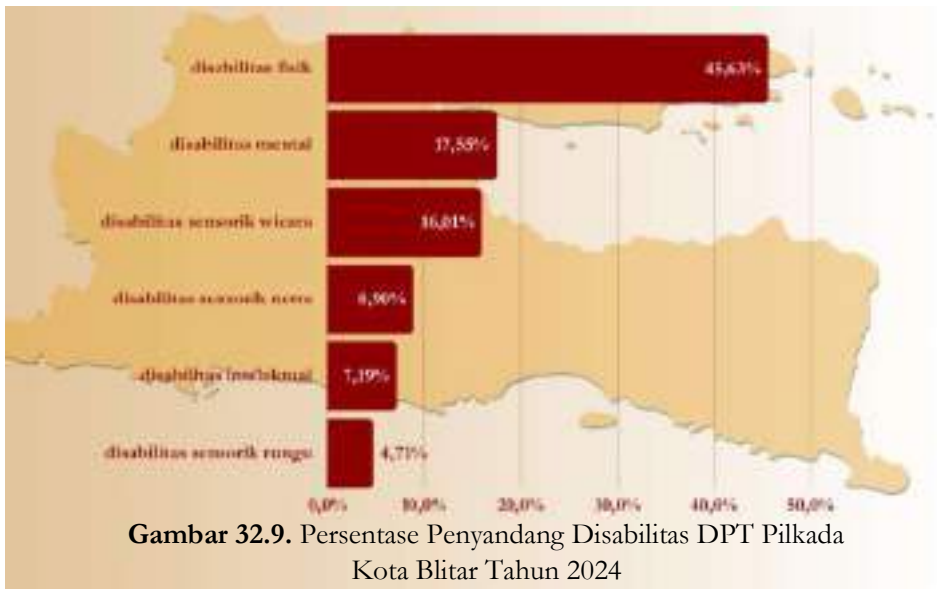
Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 32.8.



Gambar 32.8. Persentase Kelompok Usia DPT Pilkada Kota Blitar Tahun 2024

Sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Blitar Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi pemilih dari generasi produktif. Dari total 120.181 pemilih, kelompok usia 28–43 tahun (Generasi Milenial) menduduki proporsi tertinggi dengan jumlah 38.884 orang atau 32,35%. Disusul oleh Generasi X (usia 44–59 tahun) sebanyak 33.649 orang atau 28,00%, dan Generasi Z (usia 17–27 tahun) sebanyak 27.512 orang atau 22,89%. Sementara itu, pemilih dari kelompok *Baby Boomer* (usia 60–78 tahun) berjumlah 18.017 orang atau 14,99%, dan *Pre-Boomer* (di atas 79 tahun) sebanyak 2.119 orang atau 1,76%. Data ini menggambarkan bahwa pemilih dari generasi muda dan usia produktif masih menjadi kekuatan utama dalam kontestasi Pilkada Kota Blitar, serta mencerminkan potensi partisipasi pemilih aktif yang cukup besar dalam menentukan arah kepemimpinan daerah.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kota Blitar Tahun 2024 disajikan pada gambar 32.9, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Sebagai bentuk komitmen terhadap inklusivitas dan penghormatan atas hak politik seluruh warga negara, KPU Kota Blitar mencatat sebanyak 1.168 orang penyandang disabilitas tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Tahun 2024. Sebaran jenis disabilitas menunjukkan bahwa pemilih dengan disabilitas fisik mendominasi, yakni sebanyak 533 orang atau 45,63% dari total pemilih disabilitas. Selanjutnya, terdapat 205 orang (17,55%) dengan disabilitas mental, 187 orang (16,01%) dengan disabilitas sensorik wicara, serta 104 orang (8,90%) dengan disabilitas sensorik netra. Sementara itu, 84 orang (7,19%) tercatat memiliki disabilitas intelektual, dan 55 orang (4,71%) merupakan penyandang disabilitas sensorik rungu. Data ini menegaskan bahwa KPU Kota Blitar telah mengakomodasi hak pilih kelompok rentan dengan memastikan keterlibatan penyandang disabilitas dalam Pilkada 2024, serta menyiapkan layanan yang ramah disabilitas untuk mendukung partisipasi mereka secara maksimal.

4. Pencalonan

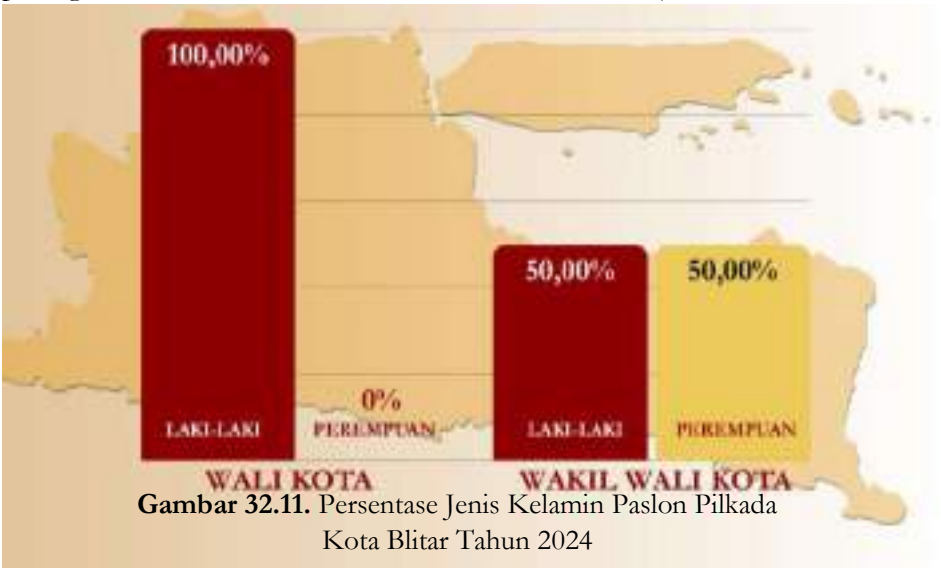
Pada tahapan pencalonan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Blitar Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar secara resmi telah menetapkan dua Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada Serentak 2024. Tahapan pendaftaran dibuka sejak tanggal 27 Agustus 2024, dan berlangsung hingga tahapan penetapan calon selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan KPU. Selama periode tersebut, tidak terdapat pasangan calon dari jalur perseorangan yang

mendaftar hingga batas akhir pendaftaran calon perseorangan ditutup. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon, partai politik pengusung, serta nomor urut peserta disajikan pada gambar 32.10, sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.

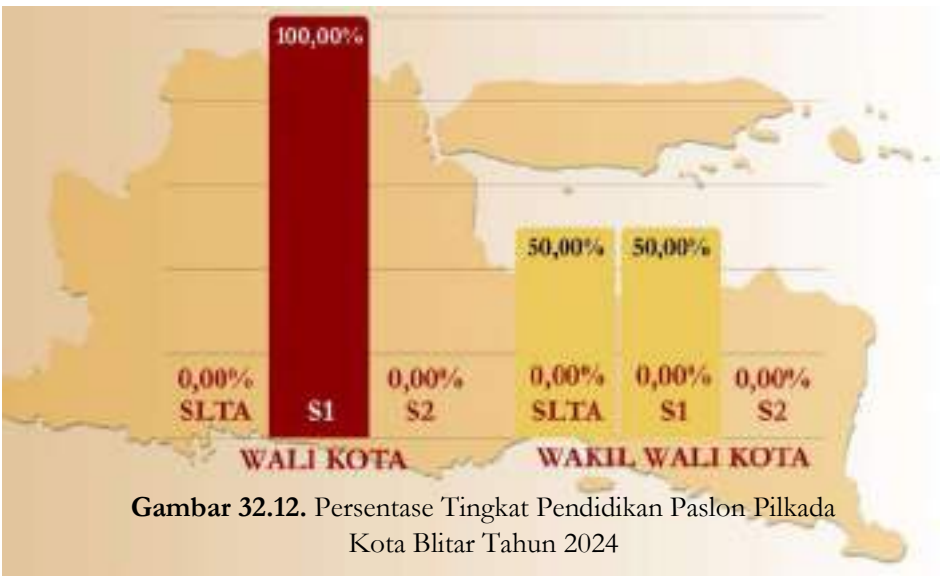


Gambar 32.10. Paslon Pilkada Kota Blitar tahun 2024

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Blitar disajikan pada gambar 32.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Blitar disajikan Gambar 32.12.



Gambar 32.11. Persentase Jenis Kelamin Paslon Pilkada Kota Blitar Tahun 2024



Sebaran demografi pasangan calon (Paslon) Wali kota dan Wakil Wali kota Blitar pada Pilkada Serentak Tahun 2024 menunjukkan keberagaman dalam aspek jenis kelamin dan latar belakang pendidikan. Dari total empat orang calon yang terdiri dari dua calon Wali kota dan dua calon Wakil Wali kota, terdapat tiga laki-laki (75,00%) dan satu perempuan (25,00%). Seluruh calon Wali kota merupakan laki-laki (100,00%), sementara pada posisi Wakil Wali kota terdapat komposisi yang berimbang, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan (masing-masing 50,00%).

Dari sisi pendidikan, sebagian besar calon memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Sebanyak 3 orang (75,00%) merupakan lulusan S1, dan 1 orang (25,00%) lulusan SLTA, sedangkan tidak ada calon yang berlatar belakang pendidikan S2. Seluruh calon Wali kota berpendidikan S1 (100,00%), sementara untuk Wakil Wali kota, satu orang berlatar belakang pendidikan S1 (50,00%) dan satu orang lainnya lulusan SLTA (50,00%). Komposisi ini mencerminkan bahwa para calon kepala daerah di Kota Blitar umumnya memiliki tingkat pendidikan yang memadai untuk mendukung kapasitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan daerah.

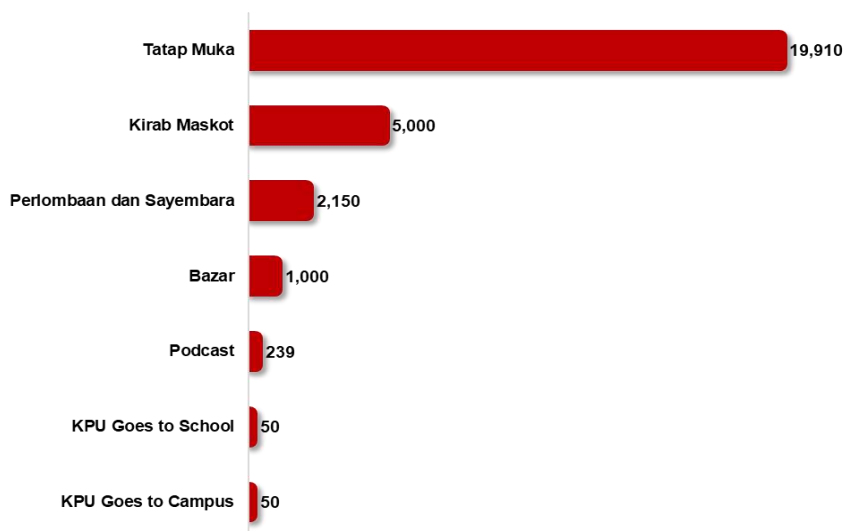
Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 32.13, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



5. Sosialisasi dan Kampanye

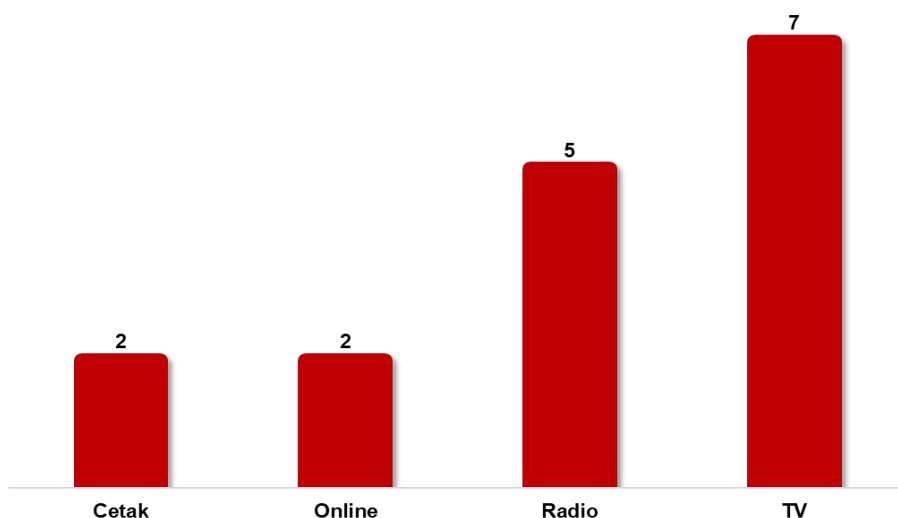
Pada tahapan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan. Beragam metode digunakan untuk menjangkau berbagai segmen pemilih, antara lain melalui tatap muka, perlombaan dan sayembara, KPU Goes to Campus, KPU Goes to School, kirab maskot, bazar, serta media podcast. Inovasi pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyosialisasikan tahapan Pilkada, tetapi juga memperkuat literasi pemilih, khususnya di kalangan pemilih pemula dan kelompok strategis lainnya.

KPU Kota Blitar menetapkan target peserta sosialisasi sebanyak 28.105 orang selama masa tahapan Pilkada 2024. Hingga pelaksanaan sosialisasi berakhir, tercatat sebanyak 28.399 orang telah mengikuti kegiatan sosialisasi, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi sosialisasi yang dilakukan, serta antusiasme masyarakat Kota Blitar dalam menyambut dan berpartisipasi aktif pada Pilkada Serentak 2024.



Gambar 32.14. Jumlah Peserta Sosialisasi Pilkada Kota Blitar Tahun 2024

Selain itu, sebanyak 16 media turut terlibat dalam mendukung kegiatan sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Blitar, yang terdiri dari media radio, televisi, cetak, dan media online. Keterlibatan media massa ini memegang peran strategis dalam menyebarkan informasi tahapan Pilkada kepada masyarakat secara luas, merata, dan tepat sasaran. Melalui publikasi materi sosialisasi di berbagai platform media, KPU Kota Blitar dapat menjangkau pemilih dari berbagai latar belakang dan kelompok usia. Peran aktif media menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan Pilkada yang informatif, partisipatif, dan demokratis, sekaligus memperkuat keterbukaan informasi publik yang menjadi prinsip utama dalam proses pilkada yang berintegritas.



Gambar 32.15. Jumlah Media Sosialisasi Pilkada Kota Blitar Tahun 2024

Sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas lokal dan membangun semangat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Blitar Tahun 2024, KPU Kota Blitar memperkenalkan maskot Pilkada dengan nama “Bung Padana.” Maskot ini dirancang dengan mengangkat unsur-unsur budaya khas Kota Blitar. Nama "Bung" merupakan panggilan akrab yang melekat pada sosok Bung Karno, tokoh proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia yang dimakamkan di Kota Blitar. Sementara itu, kata "Padana" diambil dari motif batik "Puspa Dahana", yang menjadi ciri khas pakaian tradisional masyarakat Blitar. Kombinasi tersebut merepresentasikan semangat nasionalisme dan kearifan lokal yang diusung dalam pesta demokrasi tahun ini.

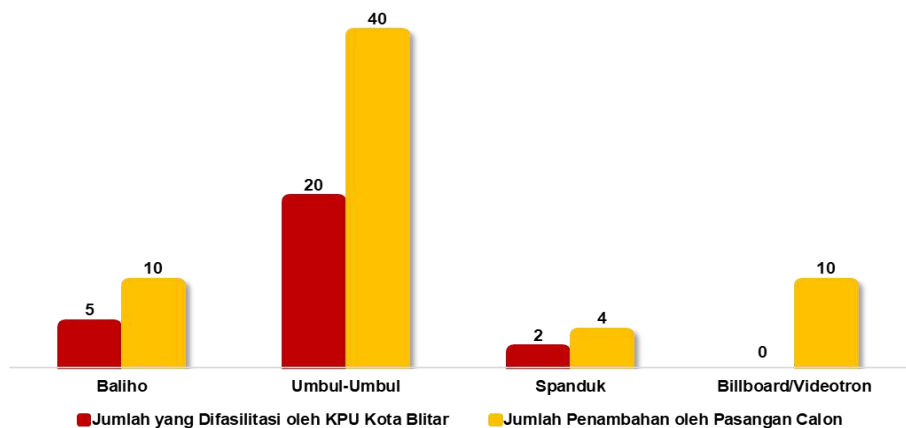


Gambar 32.16. Maskot Pilkada Kota Blitar Tahun 2024

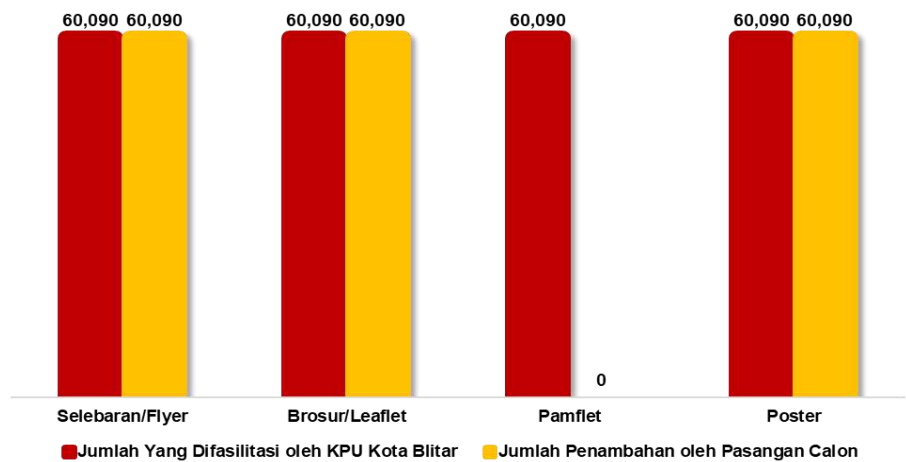
Secara visual, bentuk kepala maskot mengadopsi desain pendopo Makam Bung Karno, sebagai simbol ikon kebanggaan masyarakat Blitar. Makna filosofis dari desain ini menggambarkan bahwa nilai-nilai yang diperjuangkan Bung Karno—seperti kebangsaan, patriotisme, dan kerakyatan—diangkat sebagai inspirasi utama bagi pemimpin Kota Blitar yang akan terpilih. Sementara itu, busana maskot menggunakan pakaian khas Blitar dengan motif Puspa Dahana, yang berasal dari relief Candi Gedog di Kecamatan Sananwetan. Motif ini mengandung nilai filosofis mendalam sebagai simbol pengendalian diri, penolakan terhadap malima (lima hal negatif), serta penguatan nilai-nilai Pancasila. Melalui Bung Padana, KPU Kota Blitar berharap maskot ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, sekaligus menghadirkan nuansa kegembiraan dan kultural dalam pelaksanaan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pada tanggal 27 November 2024.

Pada tahapan kampanye Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Blitar Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar telah memberikan fasilitasi kepada pasangan calon dalam bentuk Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitasi APK mengacu pada Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 414 Tahun 2024, yang mencakup penyediaan baliho, umbul-umbul, spanduk, dan billboard/videotron. Jumlah dan spesifikasi masing-masing alat peraga telah ditentukan secara rinci dalam keputusan tersebut serta disesuaikan dengan wilayah sebaran dan asas keadilan antarpasangan calon. Sementara itu,

untuk Bahan Kampanye, KPU Kota Blitar merujuk pada Keputusan Nomor 415 Tahun 2024, yang mencakup media kampanye seperti selebaran/flyer, brosur atau leaflet (posisi terbuka), pamflet, dan poster. Seluruh bahan kampanye ini didistribusikan secara proporsional untuk menjamin setiap pasangan calon memiliki kesempatan yang setara dalam menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat.



Gambar 32.17. Fasilitas Alat Peraga Kampanye oleh KPU Kota Blitar Tahun 2024

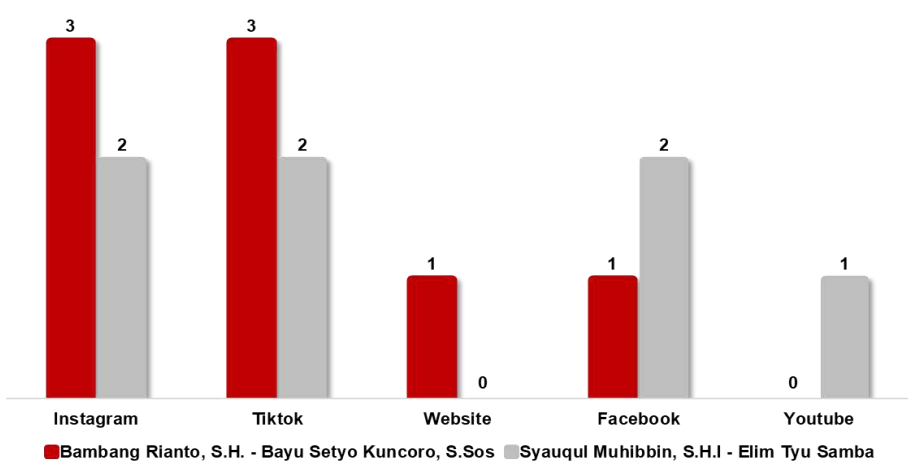


Gambar 32.18. Fasilitas Bahan Kampanye oleh KPU Kota Blitar Tahun 2024

Sebagai bagian dari upaya edukasi politik yang terbuka dan informatif, KPU Kota Blitar juga menyelenggarakan tiga kali debat publik bagi pasangan calon. Debat pertama dilaksanakan pada 16 Oktober 2024 dengan

tema “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memajukan Daerah”. Debat kedua digelar pada 30 Oktober 2024 dengan tema “Pelayanan Masyarakat dan Solusi Permasalahan Daerah”. Selanjutnya, debat ketiga yang juga menjadi debat pamungkas dilaksanakan pada 13 November 2024, dengan tema “Persatuan dan Keselarasan Pembangunan”. Ketiga debat ini disiarkan melalui media untuk menjangkau pemilih secara luas dan menjadi salah satu sarana utama bagi masyarakat dalam menilai kualitas dan kapasitas pasangan calon.

Di era digital, KPU Kota Blitar juga memberikan ruang kampanye melalui media sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024. Masing-masing pasangan calon memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter/X, YouTube, dan TikTok sebagai saluran komunikasi politik dan penyebaran informasi kampanye kepada pemilih, khususnya generasi muda. Kampanye digital ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dari kampanye konvensional yang telah difasilitasi, serta meningkatkan partisipasi publik dalam Pilkada Kota Blitar secara aktif.



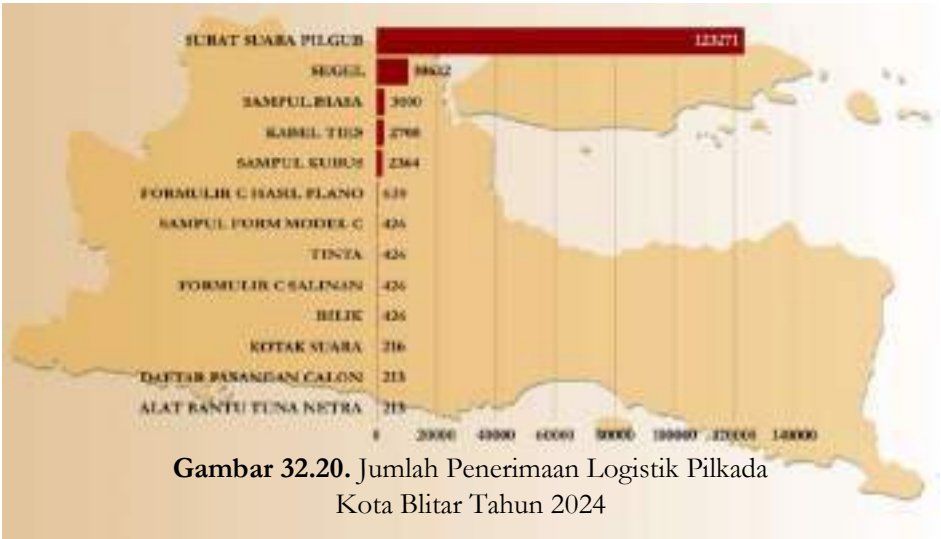
Gambar 32.19. Media Sosial Kampanye Pilkada Kota Blitar Tahun 2024

6. Logistik

Kesiapan logistik menjadi salah satu elemen krusial dalam menjamin kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Blitar Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar telah mempersiapkan sarana dan prasarana logistik pemilihan secara profesional dengan mengacu pada prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya. Logistik Pilkada mencakup seluruh perlengkapan pemungutan suara yang menjadi fasilitas konversi suara

dari pemilih ke hasil resmi, sehingga keakuratannya menjadi sangat vital dalam menjaga integritas pilkada.

Dalam proses pengadaan, KPU Kota Blitar menerapkan metode e-purchasing dan pengadaan langsung, sesuai dengan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel menjadi landasan utama dalam setiap tahapan pengadaan logistik. Seluruh kebutuhan logistik telah dipenuhi sesuai jadwal tahapan pemilihan, termasuk alat kelengkapan pemungutan suara yang akan digunakan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 32.20.

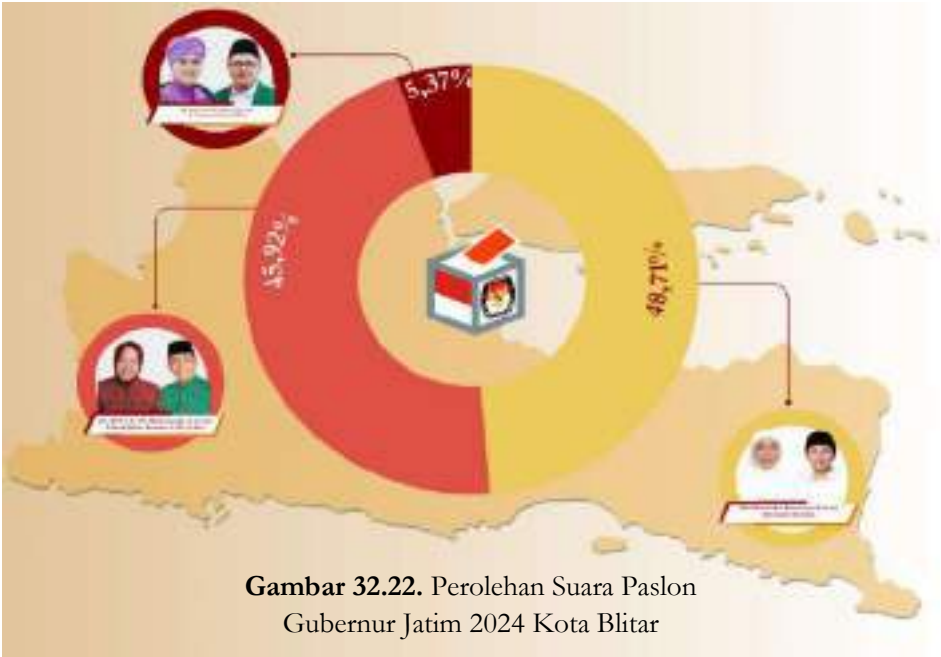


Gambar 32.20. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kota Blitar Tahun 2024

Untuk mendukung distribusi logistik ke wilayah Kota Blitar, KPU menggunakan angkutan darat berupa mobil truk dan mobil box, yang disesuaikan dengan kondisi geografis Kota Blitar yang relatif datar dan mudah dijangkau. Proses setting dan packing logistik melibatkan 78 orang tenaga kerja, yang terdiri dari 15 anggota PPK dan 63 anggota PPS, guna memastikan setiap logistik tersusun rapi dan siap distribusi sesuai kebutuhan masing-masing TPS. Kesiapan logistik yang optimal menjadi bentuk nyata komitmen KPU Kota Blitar dalam mewujudkan Pilkada yang tertib, efisien, dan berintegritas.

7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Blitar disajikan pada gambar 32.22.

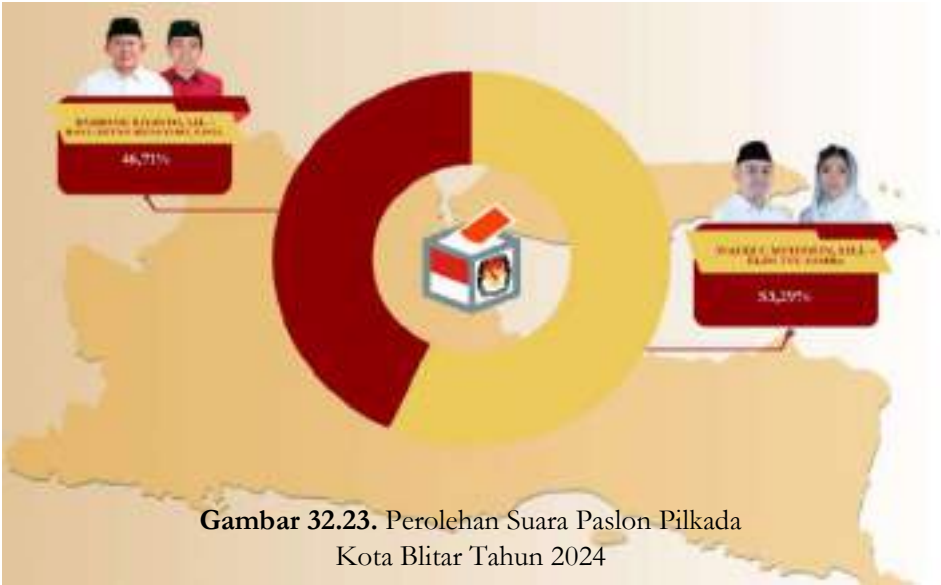


Gambar 32.22. Perolehan Suara Paslon Gubernur Jatim 2024 Kota Blitar

Hasil rekapitulasi suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di Kota Blitar menunjukkan tingkat partisipasi yang kompetitif antar pasangan calon. Dari total 92.654 suara sah, pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestjanto Dardak memperoleh dukungan tertinggi dengan 45.130 suara atau 48,71%. Disusul oleh pasangan Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T. – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), S.IP., M.Kes., yang meraih 42.550 suara atau 45,92%. Seme-ntara itu, pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah, M.Si. – H. Lukmanul Khakim, M.Si. memperoleh 4.974 suara, setara dengan 5,37%. Hasil ini mencer-minkan persaingan yang cukup ketat antara dua pasangan utama, sekaligus menunjukkan keberagaman preferensi politik pemilih di Kota Blitar dalam menentukan arah kepemimpinan provinsi ke depan.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Blitar pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada

gambar 32.23.



Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Blitar Tahun 2024 berlangsung dengan antusiasme tinggi dari masyarakat. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, pasangan Syauquul Muhibbin, S.H.I – Elim Tyu Samba meraih kemenangan dengan memperoleh 49.674 suara, atau sebesar 53,29% dari total 93.217 suara sah. Sementara itu, pasangan Bambang Rianto, S.H. – Bayu Setyo Kuncoro, S.Sos. memperoleh 43.543 suara, atau setara dengan 46,71%. Selisih suara yang relatif tipis mencerminkan kompetisi yang cukup ketat antar pasangan calon dalam merebut kepercayaan pemilih Kota Blitar. Kemenangan ini menandai kepercayaan masyarakat terhadap visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh pasangan Syauquul–Elim dalam memimpin Kota Blitar ke depan.

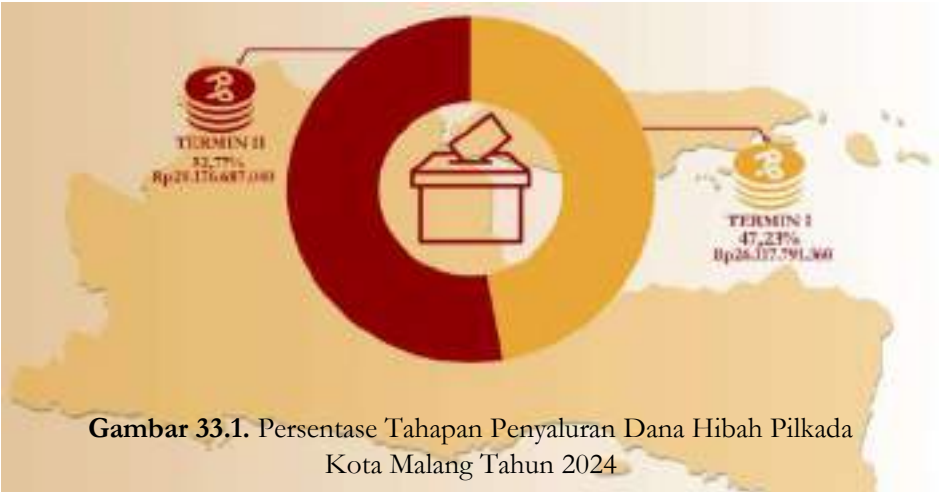
BAGIAN 33

KOTA MALANG

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Malang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang menerima dukungan dana hibah sebesar Rp. 55.294.478.400 dari Pemerintah Kota Malang. Dana hibah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya tahapan Pilkada secara profesional, transparan, dan akuntabel. Proses penetapan anggaran telah melalui mekanisme perencanaan dan rasionalisasi yang melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna memastikan kecukupan serta efisiensi alokasi pembiayaan pada setiap tahapan penyelenggaraan.

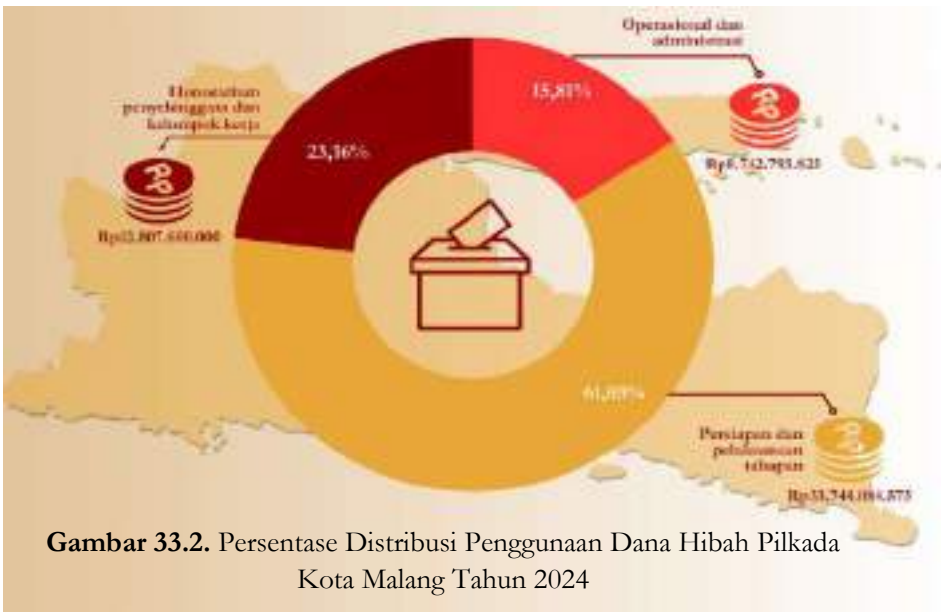
Penggunaan dana hibah ini dialokasikan untuk berbagai keperluan strategis, seperti tahapan persiapan, pemutakhiran data pemilih, pembentukan badan *ad hoc*, logistik, sosialisasi, kampanye, serta dukungan teknis lainnya. Seluruh proses perencanaan anggaran disusun berdasarkan prinsip tepat sasaran dan sesuai regulasi, sehingga diharapkan mampu mendukung kelancaran Pilkada Kota Malang Tahun 2024 secara menyeluruh dan berintegritas. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 33.1, berikut.



Gambar 33.1. Persentase Tahapan Penyaluran Dana Hibah Pilkada Kota Malang Tahun 2024

Dana hibah yang diterima oleh KPU Kota Malang dari Pemerintah Kota Malang dicairkan melalui dua termin. Termin pertama sebesar Rp. 26.117.791.360 atau 47,23% dari total dana, dan termin kedua sebesar Rp. 29.176.687.040 atau 52,77%. Skema pencairan bertahap ini dirancang agar penyaluran anggaran dapat disesuaikan secara proporsional dengan kebutuhan tahapan pelaksanaan Pilkada. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan penggunaan dana hibah dapat lebih terukur, efisien, dan tepat waktu, serta mendukung kelancaran pelaksanaan setiap aspek penyelenggaraan pilkada di Kota Malang secara optimal.

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 33.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.



Anggaran hibah untuk Pilkada Kota Malang Tahun 2024 dialokasikan ke dalam tiga komponen utama berdasarkan kebutuhan strategis penyelenggaraan Pilkada. Komponen terbesar dialokasikan untuk Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan, yaitu sebesar Rp. 33.744.084.575 atau 61,03%, mencakup kebutuhan teknis mulai dari pemutakhiran data pemilih, logistik, hingga tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya, alokasi untuk Honorarium badan *ad hoc* dan pelaksana teknis mencapai Rp. 12.807.600.000 atau 23,16%, yang mencerminkan pentingnya penghargaan atas kerja penyelenggara di lapangan. Sedangkan

untuk kebutuhan Operasional dan Administrasi Perkantoran, dialokasikan sebesar Rp. 8.742.793.825 atau 15,81%. Komposisi anggaran ini menunjukkan fokus KPU Kota Malang dalam mengedepankan efisiensi pelaksanaan tahapan inti pilkada, dengan dukungan administratif dan sumber daya manusia yang memadai.

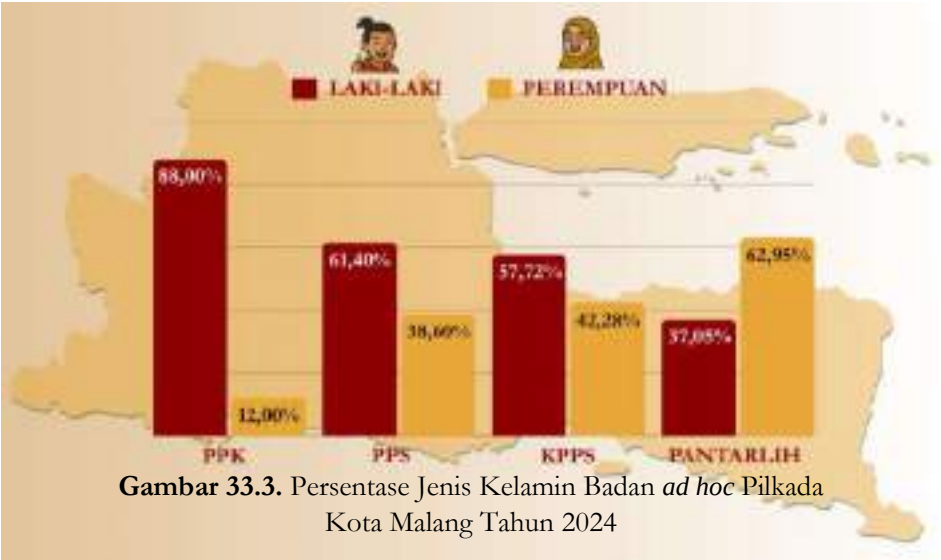
2. Badan Ad Hoc

Rekrutmen badan *ad hoc* untuk Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Malang Tahun 2024 merupakan tahapan strategis yang berperan penting dalam menjamin kelancaran dan integritas pelaksanaan setiap proses pemilihan. Badan *ad hoc* yang dibentuk oleh KPU Kota Malang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Setiap struktur memiliki fungsi yang spesifik dan vital, mulai dari koordinasi teknis di tingkat kecamatan, pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, hingga pencocokan dan penelitian data pemilih.

Proses rekrutmen dilaksanakan secara terbuka dan berbasis merit melalui tahapan seleksi administrasi, tes tertulis, dan wawancara yang dapat diakses secara transparan oleh publik. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin bahwa individu yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, serta komitmen terhadap asas pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keberadaan badan *ad hoc* ini menjadi tulang punggung teknis di lapangan dan berkontribusi besar dalam mewujudkan penyelenggaraan Pilkada Kota Malang 2024 yang demokratis dan berkualitas.

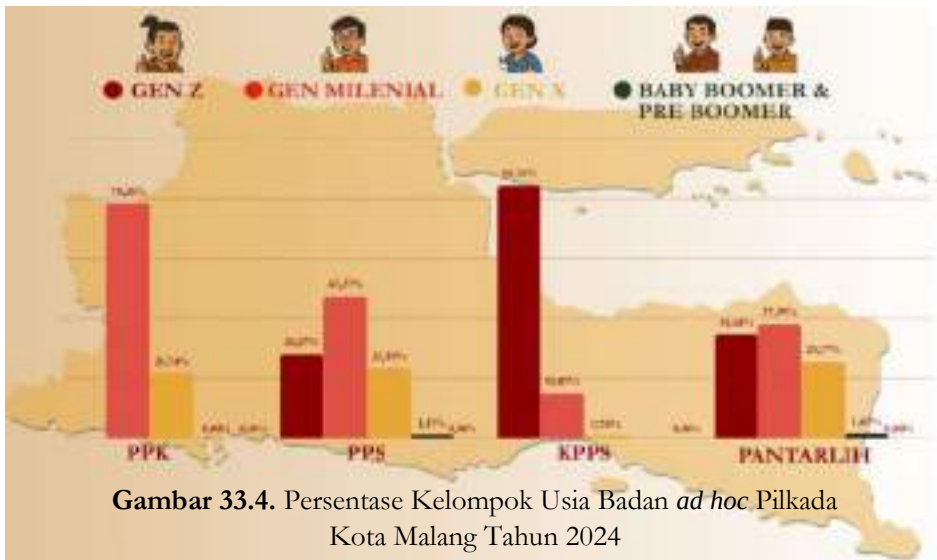
Jumlah badan *ad hoc* yang direkrut oleh KPU Kota Malang untuk penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 menunjukkan skala yang cukup besar, mencerminkan luasnya cakupan teknis pelaksanaan pilkada di tingkat lokal. Tercatat sebanyak 25 anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) telah ditetapkan untuk mengelola tahapan pilkada di tingkat kecamatan. Sementara itu, 171 anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) bertugas di tingkat kelurahan/kelurahan. Jumlah terbesar terdapat pada KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), yakni sebanyak 8.316 anggota, yang tersebar di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Malang. Selain itu, terdapat 2.332 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang berperan penting dalam memastikan akurasi dan validitas daftar pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit). Adapun

komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 33.3.



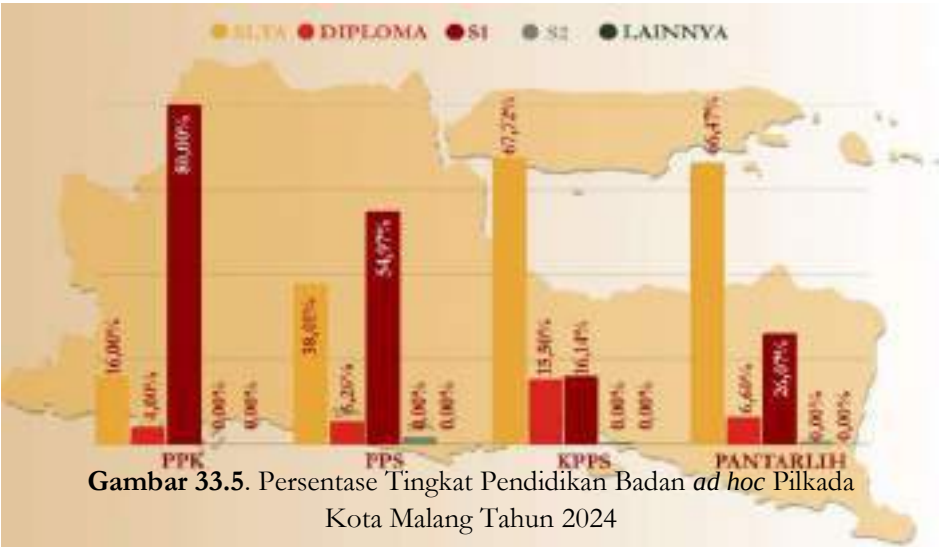
Sebaran demografi badan *ad hoc* Pilkada Kota Malang Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan komposisi yang beragam dengan keterwakilan perempuan yang cukup baik, terutama pada tingkat pelaksana teknis di lapangan. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari total 25 orang, sebanyak 22 orang (88,00%) merupakan laki-laki dan 3 orang (12,00%) perempuan. Untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berjumlah 171 orang, 105 orang (61,40%) adalah laki-laki dan 66 orang (38,60%) perempuan. Sementara itu, pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah 8.316 orang, laki-laki mendominasi dengan jumlah 4.800 orang (57,72%), sedangkan perempuan berjumlah 3.516 orang (42,28%). Menariknya, pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), justru terjadi dominasi oleh perempuan, yakni 1.468 orang (62,95%), dibandingkan laki-laki sebanyak 864 orang (37,05%). Data ini mencerminkan bahwa partisipasi perempuan dalam kepilkadaan di Kota Malang cukup kuat, khususnya pada peran yang bersentuhan langsung dengan pemilih, seperti pantarlih dan KPPS, yang menjadi ujung tombak suksesnya tahapan pemutakhiran data dan pemungutan suara.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kota Malang Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 33.4, berikut.



Sebaran demografi badan *ad hoc* Pilkada Kota Malang Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi generasi muda, khususnya Generasi Z dan Generasi Milenial, terutama pada level teknis di lapangan. Pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sebanyak 6.998 orang (84,15%) berasal dari Generasi Z (usia 17–27 tahun), sedangkan 1.253 orang (15,07%) dari Generasi Milenial (usia 28–43 tahun), dan sisanya hanya 65 orang (0,78%) dari Generasi X (usia 44–59 tahun). Komposisi ini menunjukkan bahwa KPPS didominasi oleh kelompok usia muda yang energik dan adaptif terhadap teknologi serta dinamika lapangan. Pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), sebaran usia lebih merata, meskipun Generasi Milenial tetap mendominasi sebanyak 886 orang (37,99%), diikuti oleh Generasi Z sebanyak 807 orang (34,61%), Generasi X sebanyak 601 orang (25,77%), dan *Baby Boomer* (60–78 tahun) sebanyak 38 orang (1,63%). Sementara itu, pada PPK, mayoritas berasal dari Generasi Milenial, yakni 18 orang (78,26%), dan Generasi X sebanyak 5 orang (21,74%). Pada PPS, proporsinya lebih bervariasi dengan 48 orang (28,07%) dari Generasi Z, 81 orang (47,37%) dari Generasi Milenial, 40 orang (23,39%) dari Generasi X, dan 2 orang (1,17%) dari *Baby Boomer*. Data ini mencerminkan bahwa Pilkada Kota Malang 2024 didukung oleh keterlibatan aktif generasi muda, terutama dalam pelaksanaan teknis di tingkat TPS dan proses pemutakhiran data pemilih, serta sekaligus menjadi indikator positif terhadap regenerasi dan peningkatan literasi demokrasi di kalangan generasi muda.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kota Malang Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 33.5.



Sebaran demografi badan *ad hoc* Pilkada Kota Malang Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan dominasi lulusan SLTA dan S1, dengan variasi yang mencerminkan jenjang kebutuhan di masing-masing struktur. Pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mayoritas anggota merupakan lulusan SLTA, yaitu sebanyak 5.632 orang (67,72%), diikuti oleh lulusan Diploma sebanyak 1.289 orang (15,50%), lulusan S1 sebanyak 1.342 orang (16,14%), dan hanya 53 orang (0,64%) yang merupakan lulusan S2. Pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), pola serupa terlihat, dengan dominasi lulusan SLTA sebanyak 1.550 orang (66,47%), disusul oleh lulusan S1 sebanyak 608 orang (26,07%), lulusan Diploma sebanyak 154 orang (6,60%), dan lulusan S2 sebanyak 19 orang (0,81%). Terdapat pula 1 orang (0,04%) dari kategori pendidikan lainnya. Sementara itu, di tingkat PPK, sebanyak 20 dari 25 orang (80,00%) merupakan lulusan S1, dengan 4 orang (16,00%) lulusan SLTA, dan 1 orang (4,00%) lulusan Diploma. Untuk PPS, dari total 171 orang, sebanyak 94 orang (54,97%) berlatar belakang pendidikan S1, 65 orang (38,01%) lulusan SLTA, 9 orang (5,26%) lulusan Diploma, dan 3 orang (1,75%) lulusan S2. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas badan *ad hoc* Pilkada Kota Malang berasal dari latar pendidikan menengah dan tinggi, yang menggambarkan kesiapan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas teknis dan administratif

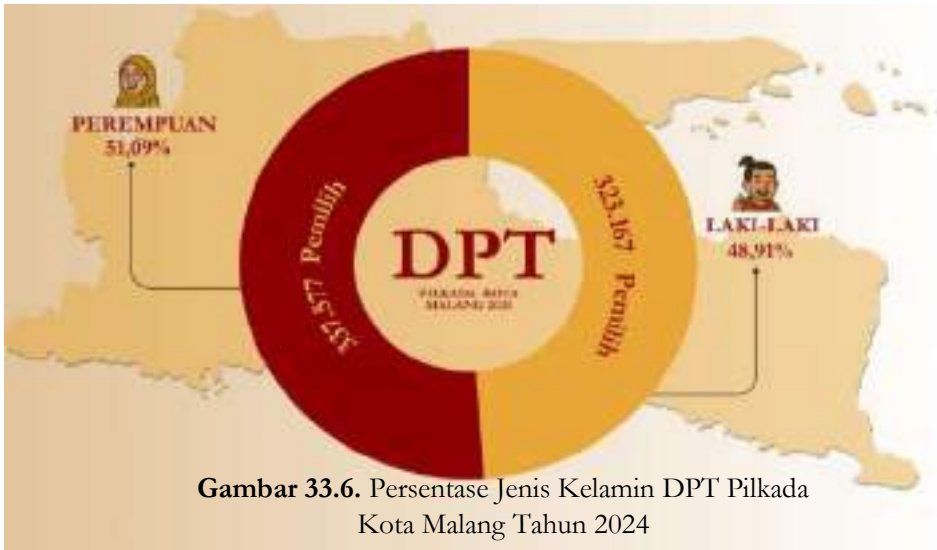
pemilihan dengan kapasitas dan kompetensi yang memadai.

Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Malang, tercatat belum adanya representasi dari kelompok penyandang disabilitas yang turut berperan aktif sebagai penyelenggara pada badan *ad hoc*, baik di tingkat PPK, PPS, KPPS, maupun Pantarlih. Ketidakterlibatan ini menjadi catatan penting dalam upaya mewujudkan pilkada yang inklusif dan ramah disabilitas. Meskipun hak partisipasi politik bagi seluruh warga negara telah dijamin, realisasi partisipasi kelompok disabilitas sebagai bagian dari penyelenggara pilkada masih menghadapi tantangan, baik dari sisi aksesibilitas, informasi, maupun kesempatan. Ke depan, diperlukan langkah afirmatif, pelatihan yang adaptif, serta perluasan jangkauan rekrutmen yang lebih inklusif untuk mendorong keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam setiap tahapan pilkada, guna memastikan pelaksanaan demokrasi yang setara dan partisipatif bagi semua lapisan masyarakat.

3. Pemutakhiran Data

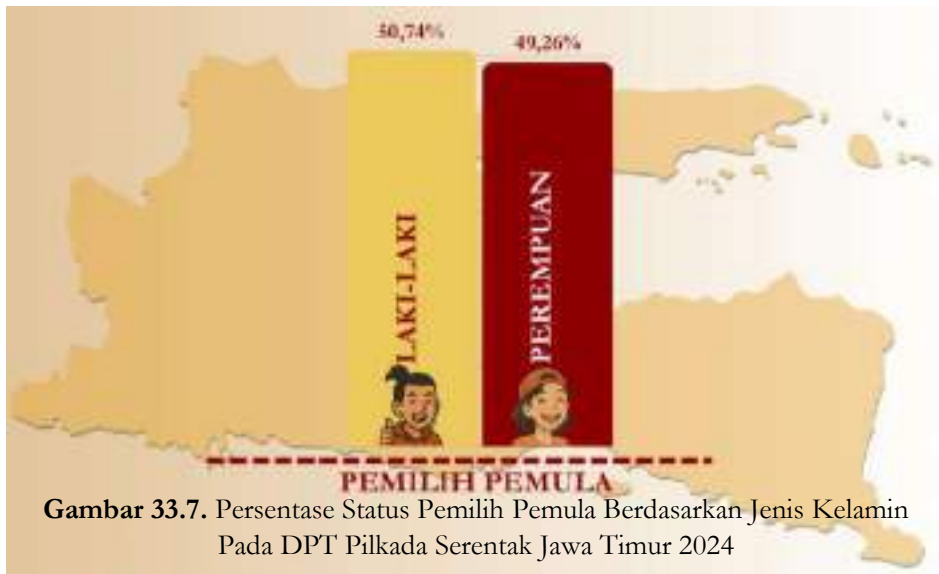
Pada penyelenggaraan Pilkada Kota Malang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 660.774 orang, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan DPT pada Pilkada Tahun 2024 yang tercatat sebanyak 651.758 pemilih. Peningkatan ini merupakan hasil dari proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara menyeluruh dan berjenjang oleh KPU, melalui tahapan sinkronisasi, pencocokan dan penelitian (coklit), serta uji publik.

Kenaikan jumlah pemilih ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain bertambahnya pemilih pemula yang telah mencapai usia 17 tahun, adanya perpindahan penduduk yang masuk ke wilayah Kota Malang, serta pendaftaran pemilih dari kalangan purna tugas TNI dan Polri yang kini telah memiliki hak pilih. Berdasarkan tahapan pemutakhiran data, jumlah Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi (DPS) tercatat sebanyak 662.155 pemilih, yang kemudian disempurnakan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 660.783 pemilih, dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 660.744 pemilih. Selisih ini mencerminkan hasil perbaikan dan penyesuaian dari temuan serta masukan masyarakat dalam proses pemutakhiran data, yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menjamin hak pilih seluruh warga Kota Malang. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 33.6.



Sebaran demografi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Malang Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan proporsi yang relatif seimbang antara pemilih laki-laki dan perempuan. Dari total 660.744 pemilih, sebanyak 323.167 orang (48,91%) merupakan pemilih laki-laki, sedangkan 337.577 orang (51,09%) merupakan pemilih perempuan. Data ini mencerminkan bahwa keterlibatan pemilih perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang sekaligus menunjukkan pentingnya peran serta perempuan dalam proses demokrasi lokal di Kota Malang. Keseimbangan gender dalam komposisi DPT ini juga menjadi indikator positif terhadap keterwakilan dan inklusivitas dalam penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan setara.

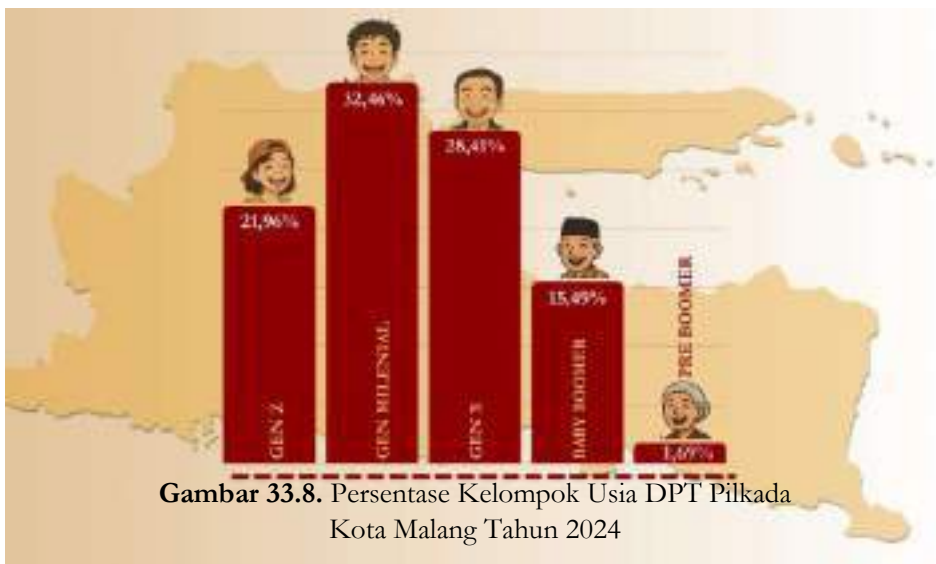
Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 33.7 berikut.



Gambar 33.7. Persentase Status Pemilih Pemula Berdasarkan Jenis Kelamin Pada DPT Pilkada Serentak Jawa Timur 2024

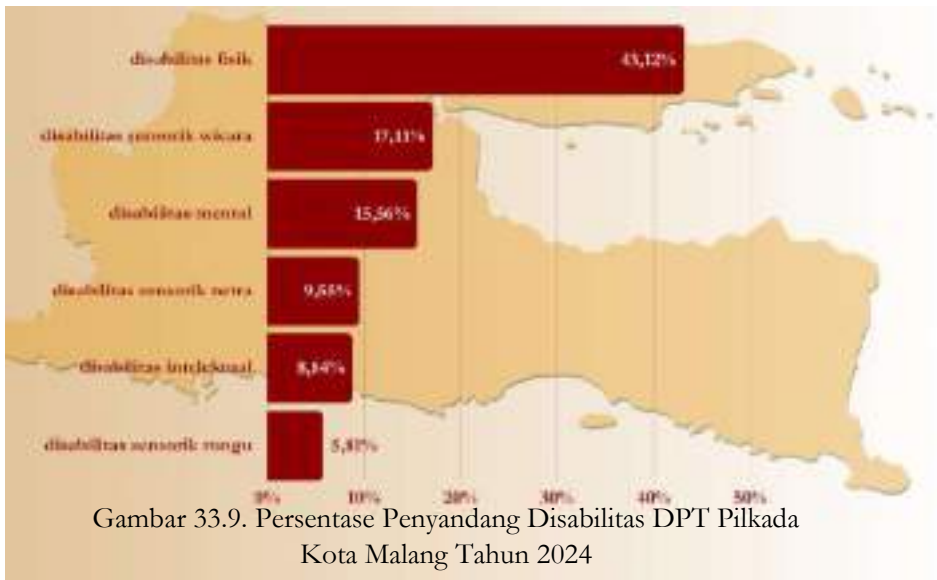
Sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Malang Tahun 2024 berdasarkan status pemilih terbagi menjadi dua kategori. Dari total 660.744 pemilih, sebanyak 26.944 orang tergolong sebagai pemilih pemula, yang terdiri dari 13.671 laki-laki (50,74%) dan 13.273 perempuan (49,26%). Data ini menunjukkan bahwa pemilih pemula memiliki keterwakilan gender yang cukup seimbang, sementara dalam kelompok non-pemula, pemilih perempuan mendominasi tipis. Komposisi ini mencerminkan keberagaman usia pemilih di Kota Malang serta adanya regenerasi pemilih baru yang telah memasuki usia 17 tahun atau memenuhi syarat administratif untuk menggunakan hak pilih. Keterlibatan pemilih dari berbagai kategori usia dan jenis kelamin menjadi cerminan positif terhadap partisipasi elektoral yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 33.8.



Sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Malang Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi pemilih dari kalangan usia produktif. Dari total 660.744 pemilih, kelompok usia 28–43 tahun (Generasi Milenial) menduduki proporsi tertinggi dengan jumlah 214.477 orang (32,46%). Disusul oleh Generasi X (usia 44–59 tahun) sebanyak 187.696 orang (28,41%), serta Generasi Z (usia 17–27 tahun) sebanyak 145.091 orang (21,96%) yang merupakan kelompok pemilih pemula dan muda. Sementara itu, kelompok *Baby Boomer* (usia 60–78 tahun) tercatat sebanyak 102.339 orang (15,49%), dan *Pre-Boomer* (di atas 79 tahun) sebanyak 11.141 orang (1,69%). Komposisi ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% pemilih di Kota Malang berada pada usia produktif, yang mengindikasikan potensi partisipasi aktif dan rasional dalam Pilkada. Selain itu, besarnya proporsi Generasi Z dan Milenial menegaskan pentingnya pendekatan kampanye dan edukasi pemilih yang adaptif terhadap generasi digital dan partisipatif.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kota Malang Tahun 2024 disajikan pada gambar 33.9, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang mencatat sebanyak 3.098 orang penyandang disabilitas terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Tahun 2024. Sebaran penyandang disabilitas ini terdiri dari berbagai jenis, dengan jumlah terbanyak berasal dari kelompok disabilitas fisik, yaitu sebanyak 1.336 orang (43,12%). Diikuti oleh penyandang disabilitas sensorik wicara sebanyak 530 orang (17,11%), disabilitas mental sebanyak 482 orang (15,56%), serta disabilitas sensorik netra sebanyak 296 orang (9,55%). Selanjutnya, terdapat 274 orang (8,84%) penyandang disabilitas intelektual, dan 180 orang (5,81%) dengan disabilitas sensorik rungu. Data ini mencerminkan komitmen KPU Kota Malang dalam menjamin hak pilih seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan. Keberadaan penyandang disabilitas dalam DPT menunjukkan bahwa proses pemutakhiran data dilakukan secara inklusif, dengan pendekatan yang menghormati prinsip kesetaraan dan aksesibilitas. Dengan demikian, diharapkan seluruh pemilih, tanpa terkecuali, dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bermartabat dalam Pilkada 2024.

4. Pencalonan

Sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota, tahapan pendaftaran pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 27–29 Agustus

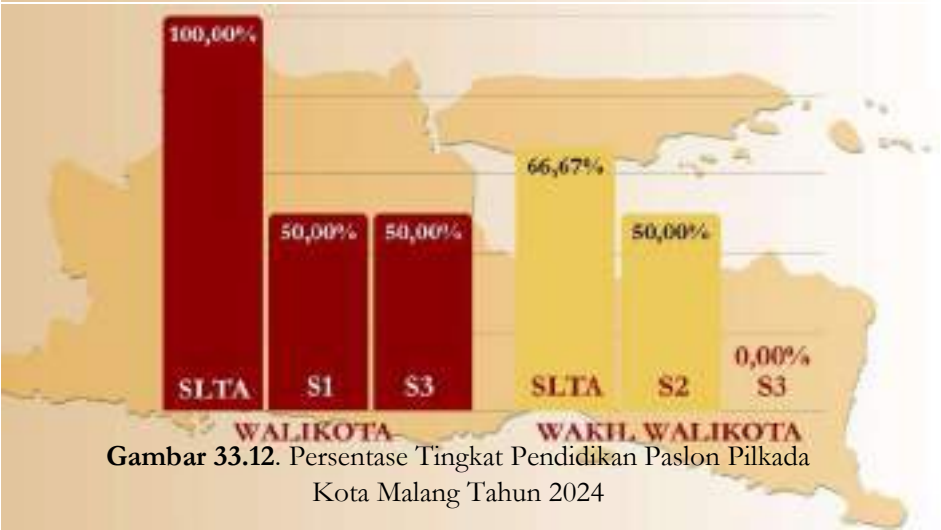
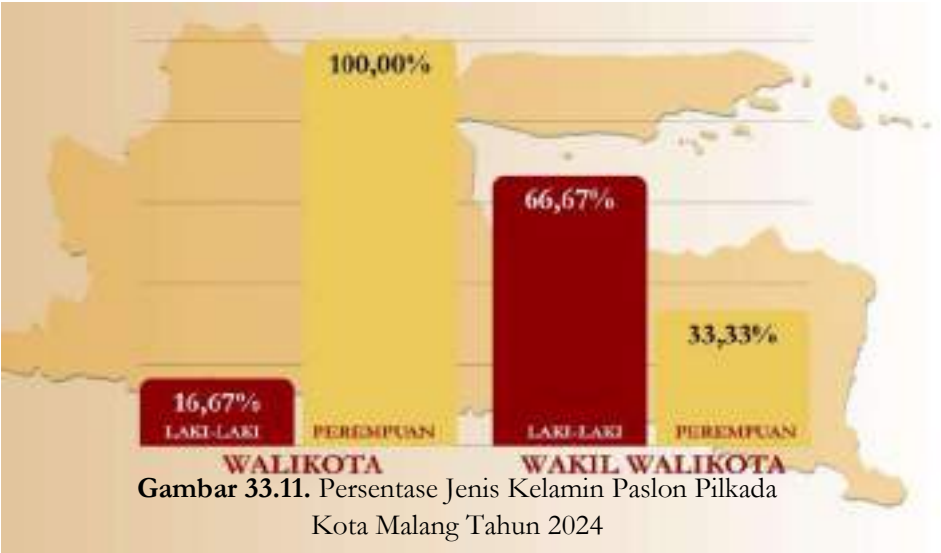
2024. Di Kota Malang, terdapat tiga bakal pasangan calon (bapaslon) Wali kota dan Wakil Wali kota yang seluruhnya mendaftarkan diri pada hari yang sama, yaitu Rabu, 28 Agustus 2024. Ketiga bapaslon tersebut adalah: H. Mochammad Anton – Dimiyati Ayatullah (Abadi), Wahyu Hidayat – Ali Muthohirin (Wali), dan Heri Cahyono – Ganisa Pratiwi Rumpoko.

Setelah pendaftaran, KPU Kota Malang melaksanakan tahapan penelitian persyaratan calon hingga 21 September 2024, yang mencakup verifikasi dokumen, klarifikasi calon, serta tanggapan masyarakat terhadap para bapaslon. Sebanyak 105 tanggapan dan masukan publik diterima dan diproses secara akuntabel oleh KPU. Setelah melalui seluruh tahapan tersebut, ketiga bapaslon resmi ditetapkan sebagai pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Kota Malang melalui rapat pleno pada Minggu, 22 September 2024. Selanjutnya, KPU Kota Malang melaksanakan pengundian nomor urut paslon pada Senin, 23 September 2024, bertempat di Hotel Ijen Suites Nirwana. Hasil pengundian menetapkan bahwa pasangan Wahyu Hidayat – Ali Muthohirin (Wali) memperoleh nomor urut 1, pasangan Heri Cahyono – Ganisa Pratiwi Rumpoko mendapat nomor urut 2, dan pasangan H. Mochammad Anton – Dimiyati Ayatullah (Abadi) ditetapkan dengan nomor urut 3. Proses pencalonan ini mencerminkan komitmen KPU Kota Malang dalam menyelenggarakan Pilkada yang terbuka, adil, dan demokratis. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon dan partai politik pengusung disajikan pada gambar 33.10, sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.



Komposisi jenis kelamin pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Malang disajikan pada gambar 33.11 dan sebaran tingkat

pendidikan pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Malang disajikan pada gambar 33.12.



Sebaran demografi pasangan calon (paslon) Wali kota dan Wakil Wali kota Malang pada Pilkada Tahun 2024 menunjukkan dominasi laki-laki dalam komposisi pencalonan. Dari total enam calon, sebanyak lima orang (83,33%) adalah laki-laki, dan hanya satu orang (16,67%) merupakan perempuan. Seluruh calon Wali kota (sebanyak 3 orang) adalah laki-laki (100,00%), sedangkan pada posisi Wakil Wali kota, terdapat dua laki-laki (66,67%) dan satu perempuan (33,33%). Kehadiran salah satu calon Wali kota perempuan menunjukkan adanya kontribusi perempuan dalam kontestasi politik lokal di Kota Malang.

Dari sisi tingkat pendidikan, mayoritas paslon berlatar belakang pendidikan SLTA, yakni 5 dari 6 calon (83,33%). Hanya satu calon yang memiliki latar belakang pendidikan S3 (33,33%), yaitu dari calon Wali kota. Seluruh Wakil Wali kota merupakan lulusan SLTA (100%), sedangkan di antara calon Wali kota, dua orang berlatar pendidikan SLTA (66,67%), dan satu orang memiliki gelar doktor (S3). Komposisi ini memperlihatkan keragaman latar belakang pendidikan paslon yang maju dalam Pilkada Kota Malang, dengan dominasi lulusan menengah atas namun juga terdapat representasi akademik tinggi yang dapat membawa perspektif baru dalam kepemimpinan kota.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 33.13, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



5. Sosialisasi dan Kampanye

Sosialisasi dalam Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Malang Tahun 2024 merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara inklusif dan partisipatif. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tahapan pilkada, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya memilih secara bijak dan bertanggung jawab. Berbagai bentuk kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan oleh KPU Kota Malang, antara lain:

1. Penyuluhan tatap muka di komunitas dan wilayah padat penduduk;
2. Pemasangan spanduk, banner, dan poster di tempat strategis;

3. Penyebaran informasi digital melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube;
4. Dialog interaktif yang menghadirkan calon wali kota dan wakil wali kota untuk menyampaikan visi dan misi mereka secara langsung kepada publik;
5. Diskusi publik dan edukasi pemilih yang memberi ruang tanya-jawab antara masyarakat dan paslon.

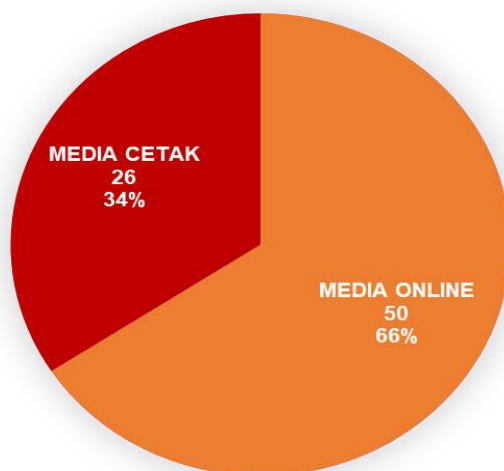
Salah satu fokus utama sosialisasi adalah kelompok pemilih pemula, yakni warga yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. KPU Kota Malang melakukan kegiatan "*KPU Goes to School*" ke 29 SMA/SMK negeri dan swasta. Dalam kegiatan tersebut, KPU bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) untuk melaksanakan jemput bola perekaman e-KTP bagi siswa yang genap berusia 17 tahun menjelang atau pada tanggal 27 November 2024. Langkah ini tidak hanya memastikan kelayakan administratif mereka sebagai pemilih, tetapi juga mengedukasi mereka tentang tata cara pencoblosan, pentingnya suara sah, dan nilai partisipasi dalam menentukan arah pembangunan daerah. Diharapkan upaya ini dapat mengurangi angka golput, khususnya di kalangan muda.

Dalam mendukung efektivitas sosialisasi tahapan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Malang Tahun 2024, KPU Kota Malang bekerja sama dengan berbagai platform media, baik media cetak maupun media daring (online). Keterlibatan media *online* mendominasi karena kemampuannya menjangkau masyarakat secara cepat, luas, dan dinamis, terutama generasi muda yang aktif di ruang digital. Sementara itu, media cetak tetap memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada segmen masyarakat yang lebih konvensional atau berada di wilayah dengan akses digital terbatas. Kolaborasi dua jenis media ini menjadi elemen penting dalam menciptakan penyebaran informasi yang merata, inklusif, dan terpercaya selama masa sosialisasi Pilkada 2024 di Kota Malang. Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara luas dan merata, KPU Kota Malang memaksimalkan penggunaan berbagai media, baik digital maupun tradisional:

1. Media Sosial: *Instagram, Facebook, YouTube* sebagai kanal informasi resmi dan interaktif.
2. Website Resmi KPU Kota Malang: Menyediakan akses informasi tentang tahapan pilkada, DPT, jadwal kampanye, dan hasil penghitungan suara.

3. Media Tradisional: Televisi, radio, dan surat kabar lokal digunakan untuk menjangkau masyarakat yang tidak aktif di media digital.
4. Relawan dan komunitas lokal: Berperan langsung memberikan penyuluhan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan internet.

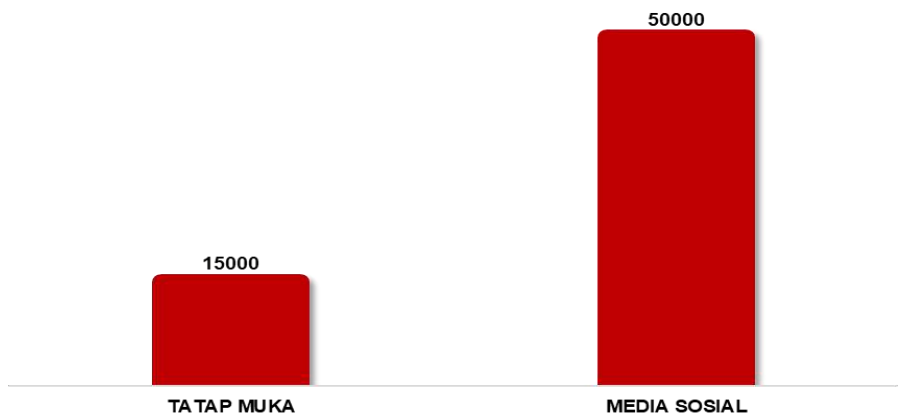
Melalui strategi sosialisasi yang menyeluruh dan multi-platform ini, KPU Kota Malang menargetkan terciptanya pilkada yang demokratis, transparan, dan inklusif, serta mendorong tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi pada Pilkada 2024. Edukasi pemilih yang dilakukan secara sistematis diharapkan mampu membentuk pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menentukan masa depan Kota Malang melalui pilihan mereka.



Gambar 33.14. Jumlah Media Sosialisasi Pilkada Kota Malang Tahun 2024

Pada tahapan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan. Beragam metode digunakan untuk menjangkau berbagai segmen pemilih, antara lain melalui tatap muka, perlombaan dan sayembara, *KPU Goes to Campus*, *KPU Goes to School*, kirab maskot, bazar, serta media *podcast*. Inovasi pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyosialisasikan tahapan Pilkada, tetapi juga memperkuat literasi pemilih, khususnya di kalangan pemilih pemula dan kelompok strategis lainnya.

KPU Kota Malang menetapkan target peserta sosialisasi sebanyak 28.105 orang selama masa tahapan Pilkada 2024. Hingga pelaksanaan sosialisasi berakhir, tercatat sebanyak 28.399 orang telah mengikuti kegiatan sosialisasi, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi sosialisasi yang dilakukan, serta antusiasme masyarakat Kota Malang dalam menyambut dan berpartisipasi aktif pada Pilkada Serentak 2024.



Gambar 33.15 Jumlah Peserta Sosialisasi Pilkada Kota Malang Tahun 2024

Dengan mengusung tagline “Suara Malang Mbois Ilakes – Satu Jiwa, Memilih untuk Kota Malang”, KPU Kota Malang memperkenalkan maskot baru yang merepresentasikan identitas budaya lokal serta semangat partisipasi dalam Pilkada 2024. Maskot ini terinspirasi dari kekayaan kesenian tradisional Topeng Malangan, sebagai bentuk pelestarian budaya asli daerah.



Gambar 33.16. Maskot Pilkada Kota Malang Tahun 2024

Maskot Pilkada 2024 terdiri dari dua tokoh, yaitu Sam Suma dan Mbak Sawa, yang tidak hanya memperkenalkan budaya lokal, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan. Maskot ini juga dapat berkolaborasi secara simbolik dengan maskot ikonik Kota Malang, Osi Ji, sehingga menambah kedekatan dengan masyarakat.

- Sam Suma (Suara Malang) digambarkan sebagai tokoh yang mengedepankan integritas, kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga negara. Karakternya diadaptasi dari Panji Asmoro Bangun, tokoh legenda yang dikenal jujur dan bijak. Ia mengenakan batik motif ceplok, yang melambangkan nilai kejujuran, serta aksesoris kepala berbentuk bulat menyerupai Alun-Alun Tugu, simbol pusat kegiatan pemerintahan di Kota Malang.
- Mbak Sawa (Satu Jiwa) mewakili nilai sinergi, harmoni, demokrasi, dan semangat kebersamaan dalam kehidupan sosial. Tokoh ini terinspirasi dari Dewi Sekartaji, sosok yang lemah lembut dan penuh welas asih. Ia mengenakan batik motif pring sedapur yang mencerminkan kebersamaan dan kesatuan, serta aksesoris kepala berbentuk kotak, menyerupai Alun-Alun Merdeka, pusat interaksi sosial masyarakat.

Penggunaan istilah “*Mbois Ilakes*” sebagai jargon utama menekankan pentingnya Pilkada sebagai momen keren (mbois) dan menyenangkan (ilakes) untuk membangun Kota Malang yang lebih baik. Maskot Sam Suma dan Mbak Sawa diharapkan menjadi media komunikasi yang edukatif, menarik, dan dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam meningkatkan partisipasi pemilih secara kreatif dan bermakna.

Pelaksanaan kampanye Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Malang Tahun 2024 dilakukan melalui berbagai metode yang dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kampanye ini menjadi sarana penting bagi pasangan calon dalam menyampaikan visi, misi, dan program kerja, sekaligus menjadi ruang interaktif untuk menyerap aspirasi warga. Berbagai bentuk kampanye tatap muka seperti pertemuan terbatas, dialog publik, serta debat kandidat yang diselenggarakan oleh KPU Kota Malang memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menilai secara langsung kapabilitas dan komitmen pasangan calon dalam memimpin Kota Malang ke depan.

Di era digital, kampanye juga dilakukan secara masif melalui media sosial dan platform daring seperti *Instagram*, *Facebook*, *YouTube*, dan *X (Twitter)*. Saluran ini sangat efektif dalam menjangkau generasi muda yang aktif di ruang digital. Materi kampanye dalam bentuk video, infografis, hingga siaran langsung menjadi alat komunikasi utama dalam membangun narasi kampanye yang interaktif dan adaptif. Di sisi lain, media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar lokal tetap memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi kampanye secara mendalam, khususnya kepada segmen masyarakat yang tidak terjangkau oleh teknologi digital. Kampanye visual seperti pemasangan baliho, spanduk, dan poster juga dilakukan secara strategis di titik-titik keramaian dan fasilitas umum. Selain untuk memperkenalkan pasangan calon, media kampanye visual ini juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi jadwal pilkada, lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta tata cara pencoblosan. Seluruh aktivitas kampanye tersebut berada dalam pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pilkada (Bawaslu) untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk batas waktu kampanye, materi yang diperbolehkan, serta prinsip kampanye yang damai, adil, dan setara. Dengan integrasi antara metode kampanye langsung dan digital, serta keterlibatan media massa dan masyarakat, kampanye Pilkada Kota Malang 2024 diharapkan menjadi instrumen penting dalam menciptakan pilkada yang demokratis, transparan, dan partisipatif. Melalui kampanye yang edukatif dan informatif, pemilih dapat menentukan pilihan secara rasional dan cerdas demi memilih pemimpin yang membawa kemajuan bagi Kota Malang.

Tabel 33.1. Fasilitas Kampanye oleh KPU
Kota Malang Tahun 2024

NO	URAIAN	KINCIAN				KET
1	Alat Peraga Kampanye					
	a. Reklame/ Baliho/Billboard	5	lbr	x	1 Kota	Setiap Calon
	b. Spanduk	2	Lbr	x	57 Kelurahan	Setiap Calon
	c. Umbul-Umbul	20	lbr	x	5 Kecamatan	Setiap Calon
2	Bahan Kampanye					
	a. Selebaran	55,065	lbr	x	1	Setiap Calon
	b. Brosur	55,065	lbr	x	1	Setiap Calon
	c. Pamflet	55,065	lbr	x	1	Setiap Calon
	d. Poster	55,065	lbr	x	1	Setiap Calon

Saksikan
DEBAT PUBLIK II
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG
TAHUN 2024

TEMA 1
MERINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN MEMATIKAN DARI RAS

1
DR. H. WATU SEWAK, S.P.
DR. ALBERTUS

2
DR. H. WATU SEWAK, S.P.
DR. ALBERTUS

3
DR. H. WATU SEWAK, S.P.
DR. ALBERTUS

HOTEL GRAND MERCURE MALANG MERAMA | 26 OKTOBER 2024
PUKUL 12.00 WIB

LIVE **19.30 WIB** **SARDEVA TV**

DEBAT PUBLIK II
WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA MALANG
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

1
DR. H. WATU SEWAK, S.P.
DR. ALBERTUS

2
DR. H. WATU SEWAK, S.P.
DR. ALBERTUS

3
DR. H. WATU SEWAK, S.P.
DR. ALBERTUS

LIVE
SABTU 09 NOV 2024
19.30 WIB

27

KOSAH PUTRI, S.P.



Gambar 33.17. Debat Publik Pilkada
Kota Malang Tahun 2024

6. Logistik

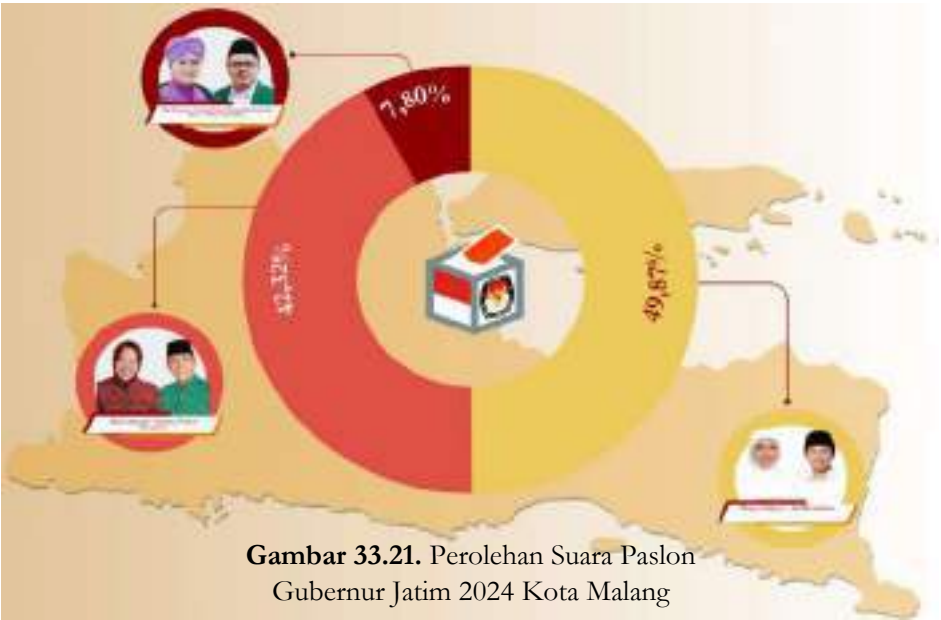
Pengelolaan logistik merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin keberhasilan penyelenggaraan Pilkada Kota Malang Tahun 2024. Pengadaan logistik pemilihan dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kota Malang, dengan pendampingan dari KPU Republik Indonesia, sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Proses pengadaan logistik ini diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengedepankan asas efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Seluruh proses pengadaan dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan, dan tepat waktu, guna memastikan logistik pemilihan tersedia sesuai kebutuhan tahapan pilkada dan tiba di lokasi secara tepat sasaran. Proses ini meliputi beberapa langkah utama, yaitu identifikasi kebutuhan logistik, penetapan jumlah masing-masing jenis logistik, penyusunan rancangan kontrak, pemilihan metode pengadaan, penentuan penyedia barang, dan diakhiri dengan penandatanganan kontrak pengadaan.

KPU Kota Malang memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan pengadaan logistik berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Proses ini diawasi secara ketat agar setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui tata kelola logistik yang sistematis dan profesional, KPU Kota Malang berkomitmen menghadirkan penyelenggaraan Pilkada yang efektif, efisien, dan mendukung kelancaran seluruh tahapan pemilihan secara menyeluruh.

7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Malang disajikan pada gambar 33.21.



Gambar 33.21. Perolehan Suara Paslon Gubernur Jatim 2024 Kota Malang

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Malang, tercatat sebanyak 412.103 suara sah diberikan oleh pemilih untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestjanto Dardak memperoleh suara tertinggi dengan 205.529 suara, atau sebesar 49,87% dari total suara sah. Di posisi kedua, pasangan Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T. – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), S.IP., M.Kes. meraih 174.417 suara atau 42,32%, disusul oleh pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah, M.Si. – H. Lukmanul Khakim, M.Si. yang memperoleh 32.157 suara atau 7,80%. Hasil ini menunjukkan dominasi dukungan terhadap pasangan petahana, namun juga mencerminkan adanya persaingan yang kompetitif dengan kehadiran kandidat-kandidat kuat lainnya dalam kontestasi di wilayah Kota Malang.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan

calon Wali kota dan Wakil Wali kota Malang pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 33.22.



Hasil rekapitulasi suara Pilkada Kota Malang Tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total 409.682 suara sah, pasangan Wahyu Hidayat – Ali Muthohirin berhasil meraih dukungan terbanyak dengan perolehan suara sebesar 203.257 suara, atau 49,61% dari total suara sah. Pasangan ini unggul cukup signifikan dari pesaing terdekatnya, yaitu pasangan H. Mochammad Anton – Dimiyati Ayatullah, yang memperoleh 132.258 suara atau 32,28%. Sementara itu, pasangan Heri Cahyono – Ganisa Pratiwi Rumpoko mendapatkan 74.167 suara, atau 18,10%. Hasil ini menegaskan kemenangan pasangan Wahyu–Ali dalam satu putaran, karena berhasil memperoleh suara lebih dari 40% dengan minimal dua pasangan calon, sesuai ketentuan yang berlaku di daerah dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa. Kemenangan ini juga mencerminkan kepercayaan masyarakat Kota Malang terhadap visi, program, dan rekam jejak pasangan tersebut.

BAGIAN 34

KOTA PROBOLINGGO

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Kota Probolinggo Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo menerima dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Dana hibah tersebut disalurkan dalam dua termin, sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 900.1.10/712/ 423.206/2023–1/KU.07-SJ/3574/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pilwali Probolinggo Tahun 2024. Pemberian dana hibah dilakukan melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dan APBD Tahun Anggaran 2024, yang disusun berdasarkan kebutuhan riil dan rasionalisasi anggaran dalam mendukung seluruh tahapan pemilihan. Proses penyusunan dan penetapan anggaran hibah ini telah dilakukan melalui koordinasi antara KPU Kota Probolinggo dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan memperhatikan prinsip efisiensi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam penggunaan dana publik. Alokasi dana hibah ini menjadi salah satu komponen utama untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kota Probolinggo secara demokratis, transparan, dan sesuai regulasi yang berlaku. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 34.1 berikut.



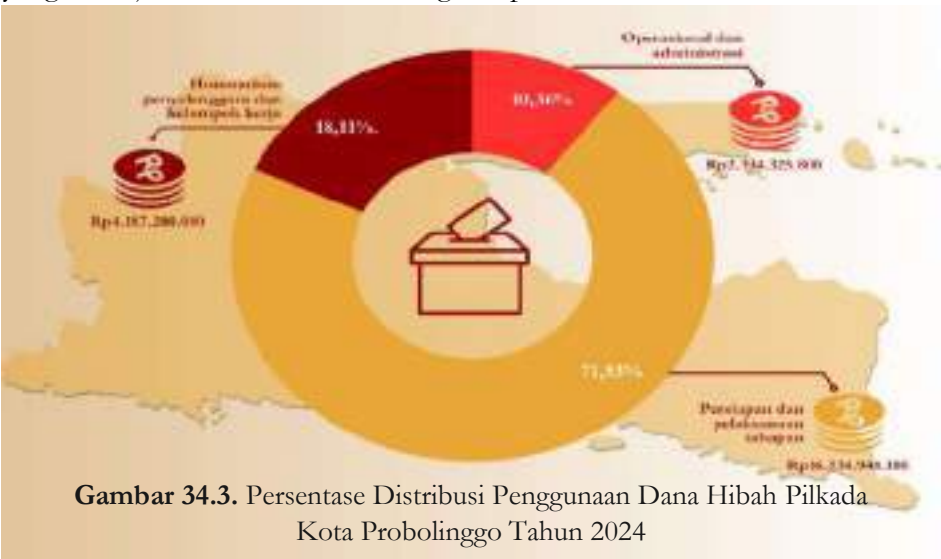
Gambar 34.1. Persentase Tahapan Penyaluran Dana Hibah Pilkada Kota Probolinggo Tahun 2024

Distribusi dana Pilkada Kota Probolinggo Tahun 2024 disalurkan dalam dua termin. Termin pertama sebesar Rp. 1.302.900.000 atau 5,64% berasal dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sedangkan termin kedua sebesar Rp. 21.813.573.980 atau 94,36% berasal dari APBD Tahun Anggaran 2024. Proses penganggaran ini dirancang secara transparan, efisien, dan akuntabel melalui koordinasi antara KPU dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), guna menjamin seluruh tahapan Pilkada 2024 berjalan lancar, tertib, dan sesuai prinsip tata kelola keuangan yang baik.



Gambar 34.2. Penandatanganan NPHD Pilkada Kota Probolinggo Tahun 2024

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 34.3 yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.

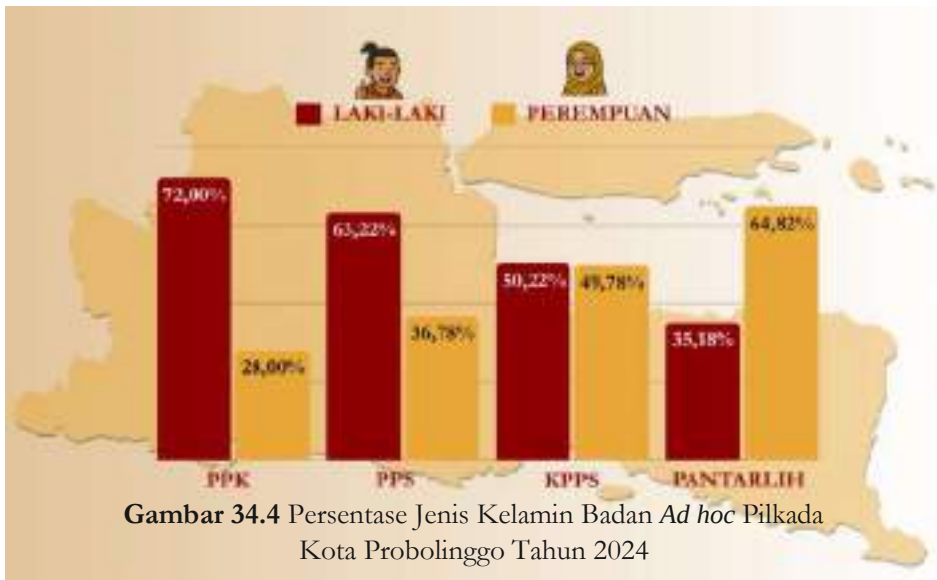


Gambar 34.3. Persentase Distribusi Penggunaan Dana Hibah Pilkada Kota Probolinggo Tahun 2024

Komponen alokasi anggaran hibah Pilkada Kota Probolinggo Tahun 2024 menunjukkan proporsi terbesar diperuntukkan bagi tahapan persiapan dan pelaksanaan, yakni sebesar Rp. 16.534.948.180 atau 71,53% dari total anggaran. Alokasi ini mencakup seluruh kebutuhan teknis dan operasional yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemilihan, seperti logistik, sosialisasi, dan pelatihan. Sementara itu, anggaran untuk operasional dan administrasi perkantoran dialokasikan sebesar Rp. 2.394.325.800 atau 10,36%, digunakan untuk menunjang kebutuhan rutin dan fasilitas penunjang kerja. Adapun anggaran untuk honorarium penyelenggara dan badan *ad hoc* dialokasikan sebesar Rp. 4.187.200.000 atau 18,11%. Seluruh komponen anggaran ini mengacu pada prinsip efisiensi dan akuntabilitas guna memastikan terselenggaranya PilWali kota Probolinggo 2024 secara demokratis dan tepat sasaran.

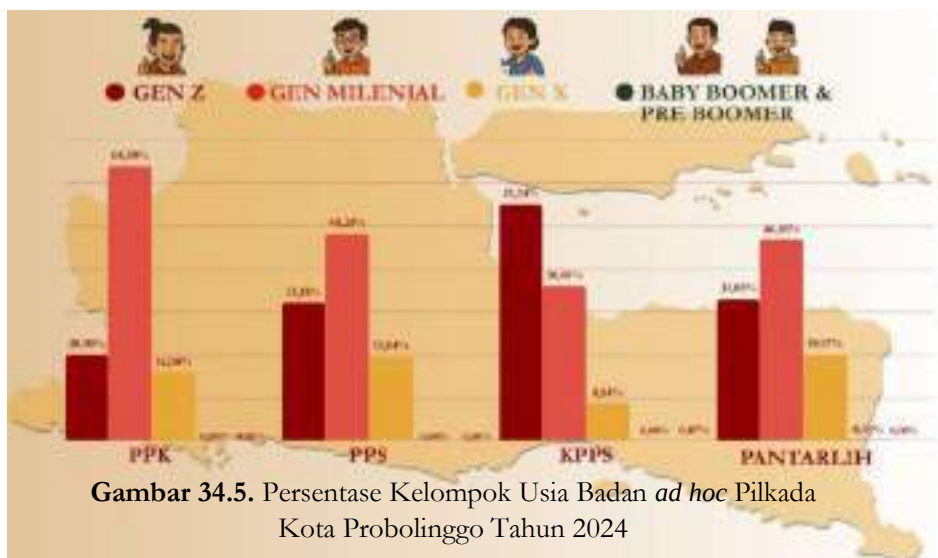
2. Badan Ad Hoc

Pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Probolinggo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo membentuk sejumlah badan *ad hoc* untuk mendukung kelancaran seluruh tahapan pemilihan. Jumlah personel badan *ad hoc* yang direkrut meliputi 25 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 87 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), 2.296 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan 651 orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Keberadaan badan *ad hoc* ini menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pilkada di tingkat lapangan karena mereka bertugas secara langsung dalam proses pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, pelaksanaan pemungutan suara, serta penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Rekrutmen badan *ad hoc* dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel, dengan memperhatikan prinsip profesionalitas, integritas, dan netralitas sebagai penyelenggara pilkada. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 34.4.



Sebaran demografi berdasarkan jenis kelamin pada badan *ad hoc* Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Probolinggo menunjukkan adanya partisipasi yang cukup seimbang, khususnya pada level KPPS dan Pantarlih. Dari total 25 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebanyak 18 orang atau 72% merupakan laki-laki dan 7 orang atau 28% perempuan. Pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berjumlah 87 orang, 55 orang atau 63,22% adalah laki-laki dan 32 orang atau 36,78% perempuan. Sementara itu, pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pemungutan suara di TPS, komposisi antara laki-laki dan perempuan cukup merata, yakni 1.153 orang (50,22%) laki-laki dan 1.143 orang (49,78%) perempuan dari total 2.296 anggota KPPS. Adapun pada posisi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), keterlibatan perempuan lebih dominan dengan 422 orang (64,82%) dibandingkan laki-laki sebanyak 229 orang (35,18%) dari total 651 petugas. Data ini mencerminkan *inklusivitas* dan representasi gender yang baik dalam pelibatan badan *ad hoc* pilkada di Kota Probolinggo.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kota Probolinggo Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 34.5, berikut.

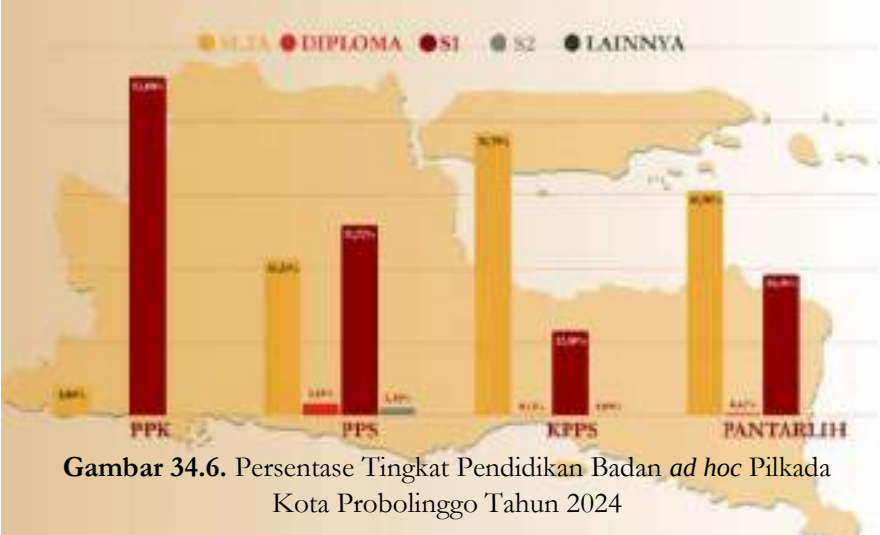


Gambar 34.5. Persentase Kelompok Usia Badan *ad hoc* Pilkada Kota Probolinggo Tahun 2024

Sebaran demografi badan *ad hoc* Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Probolinggo berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi dari generasi muda, khususnya Generasi Z dan Generasi Milenial. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dari total 25 anggota, sebanyak 5 orang (20%) berasal dari Generasi Z (usia 17–27 tahun), 16 orang (64%) dari Generasi Milenial (usia 28–43 tahun), dan 4 orang (16%) dari Generasi X (usia 44–59 tahun). Komposisi serupa juga terlihat di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), di mana Generasi Milenial mendominasi dengan 42 orang (48,28%), disusul Generasi Z sebanyak 28 orang (32,18%), dan Generasi X sebanyak 17 orang (19,54%). Pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), partisipasi Generasi Z sangat signifikan, mencapai 1.266 orang atau 55,14% dari total 2.296 anggota, menunjukkan antusiasme tinggi dari pemuda dalam mendukung proses demokrasi. Generasi Milenial berjumlah 827 orang (36,02%), sementara Generasi X menyumbang 203 orang (8,84%). Untuk posisi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dari total 651 petugas, 305 orang (46,85%) berasal dari Generasi Milenial, diikuti oleh Generasi Z sebanyak 215 orang (33,03%), Generasi X 130 orang (19,97%), dan hanya 1 orang (0,15%) dari kelompok usia *Baby Boomer* (60–78 tahun). Tidak terdapat anggota dari kelompok usia *Pre-Boomer* (>79 tahun) pada seluruh jenjang badan *ad hoc*. Data ini mengindikasikan bahwa keterlibatan generasi muda dalam penyelenggaraan pilkada di Kota Probolinggo cukup tinggi dan strategis.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *ad hoc* pada Pilkada Kota

Probolinggo Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 34.6.



Gambar 34.6. Persentase Tingkat Pendidikan Badan *ad hoc* Pilkada Kota Probolinggo Tahun 2024

Sebaran tingkat pendidikan anggota badan *ad hoc* Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Probolinggo memperlihatkan variasi latar belakang akademik yang cukup beragam, dengan dominasi lulusan strata satu (S1) pada tingkat struktural dan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) pada level operasional. Pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dari total 25 anggota, sebanyak 23 orang (92%) memiliki latar belakang pendidikan S1 dan sisanya 2 orang (8%) berpendidikan SLTA. Komposisi serupa terlihat di Panitia Pemungutan Suara (PPS), di mana mayoritas berpendidikan S1 sebanyak 45 orang (51,72%), diikuti oleh 37 orang (42,53%) yang merupakan lulusan SLTA. Terdapat pula 3 orang lulusan diploma (3,45%) dan 2 orang lulusan S2 (2,30%). Pada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), lulusan SLTA mendominasi secara signifikan dengan jumlah 1.763 orang (76,79%) dari total 2.296 anggota. Sebanyak 528 orang (23%) berpendidikan S1, sedangkan sisanya terdiri dari 3 orang lulusan diploma (0,13%) dan 2 orang lulusan S2 (0,09%). Sementara itu, pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), komposisi pendidikan menunjukkan 397 orang (60,98%) merupakan lulusan SLTA, 250 orang (38,40%) lulusan S1, dan hanya 4 orang (0,61%) lulusan diploma. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar petugas di tingkat teknis berasal dari pendidikan menengah (SLTA), namun pada tingkat pengambil keputusan di badan *ad hoc* seperti PPK dan PPS, mayoritas anggotanya memiliki latar pendidikan tinggi, sehingga diharapkan

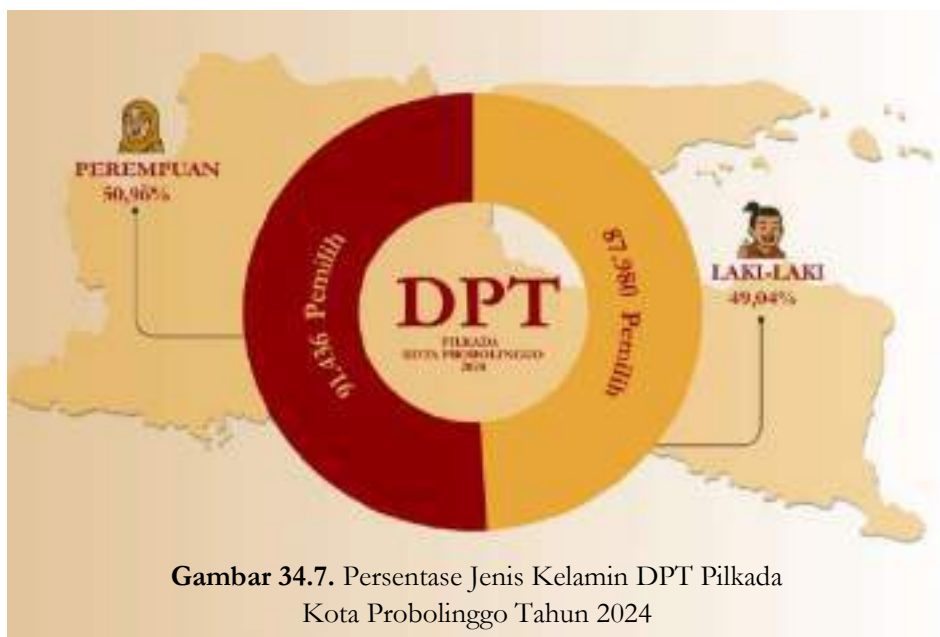
dapat menunjang pelaksanaan tugas yang kompleks dalam penyelenggaraan Pilkada.

Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Probolinggo, tercatat satu orang anggota PPS merupakan laki-laki penyandang disabilitas. Kehadiran individu tersebut mencerminkan inklusivitas dan komitmen KPU Kota Probolinggo dalam memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas, untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi sebagai bagian dari penyelenggara pilkada, yang sejalan dengan prinsip nondiskriminatif serta semangat partisipatif dalam mewujudkan pilkada yang adil dan berkeadilan bagi semua.

3. Pemutakhiran Data

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Berdasarkan hasil proses pemutakhiran dan verifikasi yang dilakukan secara berjenjang serta partisipatif, jumlah pemilih yang terdaftar sebagai DPT di Kota Probolinggo adalah 179.416 orang.

Penetapan DPT ini mencerminkan komitmen KPU dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih, sekaligus memastikan bahwa setiap pemilih yang memenuhi syarat telah tercatat secara sah. Pemutakhiran data ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan masyarakat, guna menghindari terjadinya data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, serta memastikan pemilih baru telah tercatat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan DPT yang telah ditetapkan, tahapan Pilkada selanjutnya dapat dilaksanakan dengan lebih tertib, akurat, dan akuntabel. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 34.7.



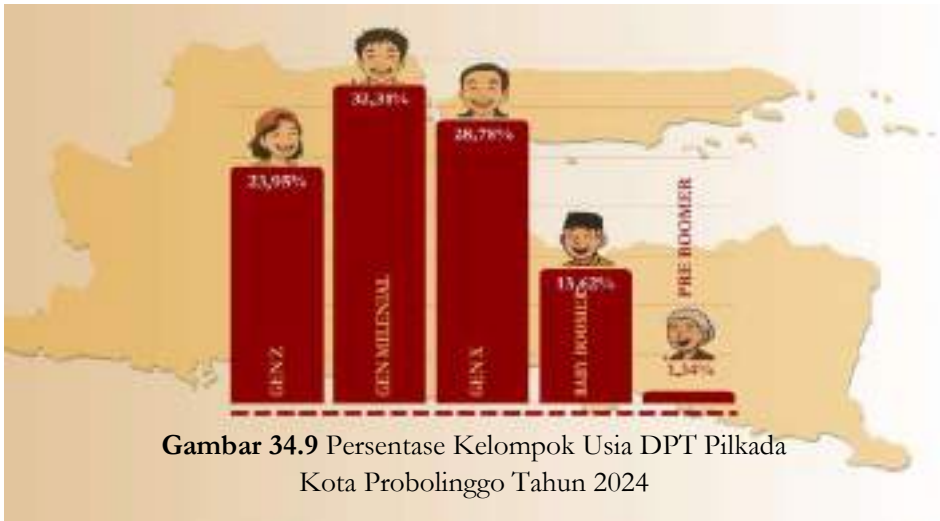
Berdasarkan hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Probolinggo Tahun 2024, total jumlah pemilih sebanyak 179.416 orang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 87.980 orang (49,04%) dan perempuan sebanyak 91.436 orang (50,96%). Data ini menunjukkan bahwa proporsi pemilih perempuan di Kota Probolinggo sedikit lebih tinggi dibandingkan pemilih laki-laki. Komposisi gender yang relatif seimbang ini menjadi indikator penting dalam strategi sosialisasi dan edukasi pemilih, terutama untuk menjangkau semua kelompok masyarakat secara merata dan inklusif.

Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam kategori utama, yakni pemilih pemula. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 34.8 berikut.



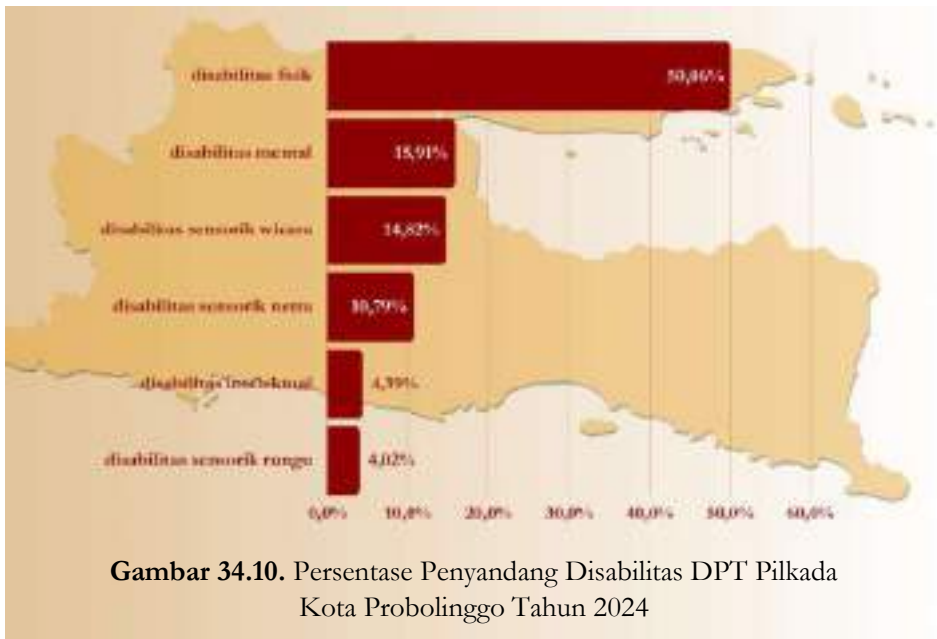
Berdasarkan statusnya, pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Probolinggo Tahun 2024 terdiri dari 3.177 pemilih pemula. Dari total pemilih pemula, sebanyak 1.635 orang (51,46%) merupakan laki-laki dan 1.542 orang (48,54%) perempuan. Proporsi ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemilih pemula tetap menjadi segmen penting, khususnya dalam strategi peningkatan partisipasi pilkada. Selain itu, distribusi gender yang cukup seimbang mengindikasikan pentingnya pendekatan komunikasi yang inklusif dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 34.9.



Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Probolinggo Tahun 2024, Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 179.416 orang terbagi dalam lima kelompok usia yang merepresentasikan berbagai generasi. Kelompok usia 28–43 tahun (Generasi Milenial) mendominasi dengan jumlah 57.977 orang (32,31%), disusul oleh Generasi X (usia 44–59 tahun) sebanyak 51.635 orang (28,78%). Pemilih dari Generasi Z (usia 17–27 tahun) juga berkontribusi signifikan dengan 42.962 orang (23,95%), menunjukkan partisipasi tinggi dari pemilih muda dan pemula. Sementara itu, *Baby Boomer* (60–78 tahun) berjumlah 24.429 orang (13,62%), dan *Pre-Boomer* (di atas 79 tahun) tercatat sebanyak 2.413 orang (1,34%). Distribusi ini menunjukkan bahwa mayoritas pemilih berada dalam kelompok usia produktif dan usia muda, sehingga pendekatan sosialisasi dan kampanye yang adaptif terhadap karakteristik generasi milenial dan Z menjadi sangat krusial untuk mendorong partisipasi pemilih secara maksimal di Pilkada Kota Probolinggo 2024.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kota Probolinggo Tahun 2024 disajikan pada gambar 34.10, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Probolinggo Tahun 2024, tercatat sebanyak 1.640 orang pemilih merupakan penyandang disabilitas. Mayoritas pemilih disabilitas berasal dari kategori Disabilitas Fisik, yakni sebanyak 821 orang (50,06%), mencerminkan kebutuhan signifikan akan aksesibilitas fisik di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Disusul oleh penyandang Disabilitas Mental sebanyak 261 orang (15,91%), Disabilitas Sensorik Wicara sebanyak 243 orang (14,82%), serta Disabilitas Sensorik Netra sebanyak 177 orang (10,79%). Sementara itu, penyandang Disabilitas Intelektual dan Disabilitas Sensorik Rungu masing-masing tercatat sebanyak 72 orang (4,39%) dan 66 orang (4,02%). Data ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap inklusivitas dalam proses pemilihan, baik dari sisi infrastruktur, pelayanan di TPS, maupun informasi kepilkadaan yang ramah disabilitas. KPU Kota Probolinggo diharapkan dapat memastikan seluruh penyandang disabilitas mendapatkan hak pilihnya secara adil dan setara.

4. Pencalonan

Pada pelaksanaan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Probolinggo Tahun 2024, terdapat empat pasangan calon (paslon) yang secara resmi mendaftar dan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo. Proses pendaftaran dan penetapan pasangan

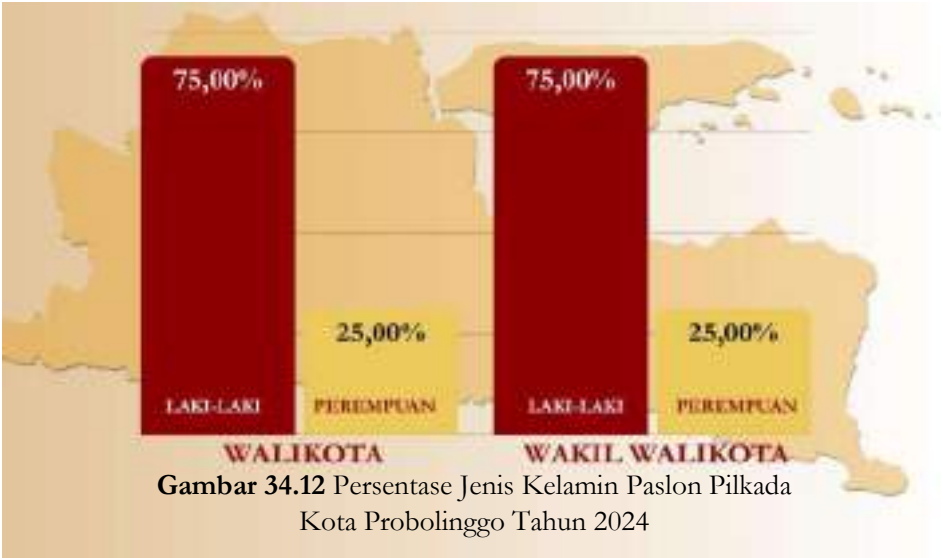
calon ini telah melalui tahapan verifikasi administratif dan faktual yang ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat paslon tersebut mencerminkan keberagaman latar belakang, pengalaman, dan pendekatan dalam menawarkan solusi untuk pembangunan Kota Probolinggo ke depan. Masing-masing paslon hadir dengan membawa visi, misi, serta program kerja strategis yang ditujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mendorong kemajuan kota secara berkelanjutan.

Dengan kehadiran empat paslon dalam kontestasi ini, masyarakat Kota Probolinggo diberikan ruang demokratis untuk mempertimbangkan dan memilih pemimpin yang paling mampu mewujudkan masa depan kota yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera. Tahapan pencalonan ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan Pilkada yang kompetitif, adil, dan bermartabat. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon dan partai politik pengusung disajikan pada gambar 34.11, sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.



Gambar 34.11. Daftar Nama Paslon Pilkada Kota Probolinggo Tahun 2024

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Probolinggo disajikan pada gambar 34.12. dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Probolinggo disajikan pada gambar 34.13.



Dalam kontestasi Pilkada Kota Probolinggo tahun 2024, tercatat terdapat empat pasangan calon yang terdiri dari delapan individu (calon Wali kota dan wakil Wali kota). Berdasarkan komposisi jenis kelamin, sebanyak 75% atau enam orang merupakan laki-laki, sedangkan 25% atau dua orang adalah perempuan, baik pada posisi calon Wali kota maupun wakil Wali kota. Komposisi ini menunjukkan dominasi laki-laki dalam keterwakilan paslon, meskipun keterlibatan perempuan mulai terlihat sebagai bagian dari dinamika politik lokal yang inklusif.

Dari sisi tingkat pendidikan, mayoritas paslon berlatar belakang pendidikan menengah atas (SLTA), yaitu sebanyak 62,5% atau lima orang.

Kemudian, satu orang lulusan Strata 1 (S1), dan dua orang lainnya telah menempuh pendidikan hingga jenjang Strata 3 (S3) dan Strata 2 (S2). Tidak adanya dominasi dari jenjang pendidikan tinggi menunjukkan bahwa Pilkada kali ini diikuti oleh figur dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam, dari tingkat menengah hingga pendidikan pascasarjana. Variasi ini memberi gambaran bahwa kompetensi kepemimpinan tidak semata ditentukan oleh latar belakang akademik, tetapi juga pengalaman serta dukungan masyarakat.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 34.14 yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



Gambar 34.14 Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kota Probolinggo Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperluas pemahaman publik terhadap tahapan serta mekanisme Pilkada 2024, KPU Kota Probolinggo melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dengan pendekatan yang menyesuaikan karakteristik masyarakat. Sosialisasi diselenggarakan melalui beberapa metode pendidikan pemilih yang menjangkau beragam lapisan sosial dan komunitas di wilayah kota.

Metode pertama adalah sosialisasi tatap muka yang ditujukan kepada berbagai elemen masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), komunitas, segmen-segmen masyarakat, pengurus RT/RW, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan. Kegiatan ini dikemas secara interaktif dengan menyasar sekitar

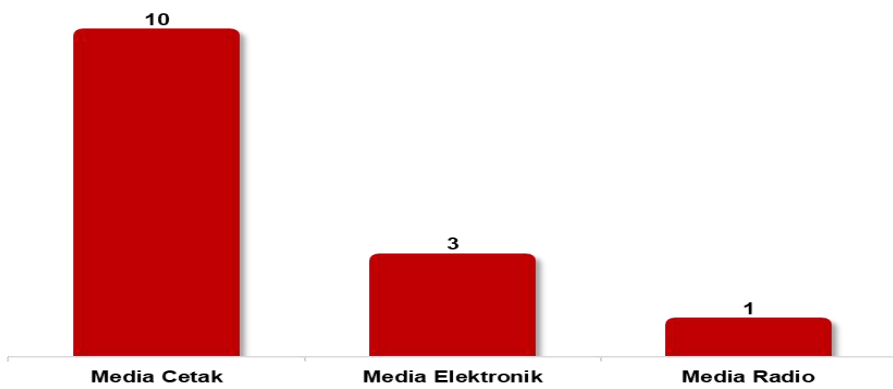
100 orang peserta dalam setiap pelaksanaannya, dan bertujuan untuk membangun pemahaman langsung mengenai pentingnya partisipasi dalam pilkada. Metode kedua dilakukan melalui even jalan sehat dan kegiatan massal, yang berhasil menarik ribuan warga Kota Probolinggo pada tanggal 27 September 2024. Acara ini dimulai dan diakhiri di kawasan Alun-Alun Kota Probolinggo, dan menjadi momentum yang meriah untuk menyebarkan bahan sosialisasi seperti flayer, brosur, dan pamflet yang memuat informasi penting terkait tahapan Pilkada. Selain itu, metode ketiga dilakukan melalui talk show dan publikasi di berbagai media massa, baik media cetak, televisi, maupun online, yang melibatkan media lokal dan nasional. Metode ini dinilai efektif dalam menjangkau masyarakat yang tidak dapat hadir secara langsung dalam kegiatan tatap muka, serta memberikan ruang bagi penyampaian pesan-pesan edukatif secara luas dan berkelanjutan.

Melalui ketiga pendekatan ini, KPU Kota Probolinggo berkomitmen menciptakan Pilkada yang inklusif, informatif, dan partisipatif, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan masa depan kepemimpinan di Kota Probolinggo.





Gambar 34.15. Kegiatan Sosialisasi Pilkada Kota Probolinggo Tahun 2024



Gambar 34.16. Jumlah Media Terlibat Kegiatan Sosialisasi Pilkada Kota Probolinggo Tahun 2024



Gambar 34.17. Maskot Pilkada Kota Probolinggo Tahun 2024

Maskot Pilkada Kota Probolinggo Tahun 2024 terinspirasi dari karapan kambing, sebuah tradisi khas masyarakat Pendalungan yang masih

eksis dan dilestarikan hingga saat ini. Karapan kambing tidak hanya menjadi simbol budaya lokal, tetapi juga kerap dijadikan bagian dari berbagai perayaan penting seperti Hari Jadi Kota Probolinggo atau acara tahunan Seminggu di Probolinggo. Tradisi ini dipilih sebagai dasar identitas maskot karena mencerminkan semangat, sportivitas, dan daya juang masyarakat dalam mengawal proses demokrasi di daerahnya.

Maskot ini diberi nama Si Kaka, singkatan dari Karapan Kambing Kota Probolinggo. Sosok Si Kaka digambarkan mengenakan rompi dan udeng bermotif anggur dan mangga, yang merupakan simbol komoditas unggulan sekaligus kekhasan identitas lokal Kota Probolinggo. Pemilihan motif tersebut memperkuat karakter Si Kaka sebagai representasi masyarakat yang membumi, penuh semangat, dan menjunjung tinggi budaya daerah. Melalui kehadiran Si Kaka, KPU Kota Probolinggo ingin menghadirkan nuansa edukatif dan kultural dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Maskot ini diharapkan tidak hanya menjadi ikon visual, tetapi juga media komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih akrab, menyenangkan, dan inspiratif, terutama dalam meningkatkan kesadaran partisipasi pemilih di seluruh segmen masyarakat.

Kampanye Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Probolinggo Tahun 2024 dilaksanakan mulai 25 September hingga 23 November 2024 dengan berbagai metode, seperti pertemuan terbatas, dialog publik, pemasangan alat peraga, dan penyebaran bahan kampanye. Masing-masing pasangan calon mendapat jadwal rapat umum, serta kesempatan tampil dalam tiga kali debat publik untuk menyampaikan visi, misi, dan gagasan terhadap isu strategis daerah, termasuk ekonomi sirkular, sinergi antarwilayah, serta pembangunan kota hijau yang berkelanjutan. Selain itu, kampanye juga disebarluaskan melalui media cetak, online, dan elektronik pada 14–23 November 2024. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami dengan baik komitmen dan kapasitas para calon dalam menentukan arah masa depan Kota Probolinggo.

Tabel 34.1. Fasilitas Kampanye oleh KPU Kota Probolinggo Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Rapat Umum		
	Pasangan Calon Fernanda Zulkarnain- Abdullah Zabut (FAAZA)	16-Nov-24	
	Pasangan Calon dr. Aminuddin, Sp.OG(K)-Ina Dwi Lestari, S.A.P., M.M (AMANAHI)	17-Nov-24	
	Pasangan Calon Sri Setyo Pertiwi Moh. Rachman Sawaluddin (SETIAMU)	20-Nov-24	
	Pasangan Calon Dr. Hadi Zainal Abidin, S.Pd., M.HP - Zainal Arifin (HANDAL BERSINAR)	22-Nov-24	
3.	Debat Publik	3 Kali	
4.	Iklan media massa cetak, media massa dalam jaringan, dan media massa elektronik	14-Nov	23-Nov

Tabel 34.2. Kegiatan Debat Publik Pilkada Kota Probolinggo Tahun 2024

No.	Subtema	Ulasan	Pertanyaan
1	Pelibatan swasta dalam membangun <i>economic circle</i> dan	Sejak beberapa tahun terakhir, konsep <i>economic circle</i> atau ekonomi sirkular	Menurut Anda, potensi pertumbuhan ekonomi baru apa yang saat ini dapat diandalkan Kota

No.	Subtema	Ulasan	Pertanyaan
	upaya menggalang investasi untuk membangun sentra ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja	banyak menarik perhatian. Itu merupakan sebuah sistem atau model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan. Konsep ekonomi circle ini sesungguhnya sejalan dengan konsep SDGs (tujuan pembangunan berkelanjutan) dan tertuang dalam RPJPD Kota Probolinggo 2025-2045 yang berkaitan dengan isu strategis tentang penguatan dan pengembangan wirausaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Harapannya, konsep ini mampu menciptakan perluasan sumber pertumbuhan	Probolinggo, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar konsep tersebut mampu memaksimalkan peran swasta untuk menjadi bagian penting bagi keberhasilan ekonomi sirkular, sekaligus berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi baru?

No.	Subtema	Ulasan	Pertanyaan
		ekonomi baru bagi terciptanya lapangan pekerjaan di Kota Probolinggo. Dalam RPJPD Kota Probolinggo 2025-2045 tertuang Misi Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang didalamnya memiliki sasaran pokok berupa Peningkatan Investasi Produktif dan Pengembangan Usaha berbasis Potensi Lokal. <i>Baseline</i> realisasi investasi 2025 adalah sekitar 0,78 triliun dan target 2045 sebesar 0,98 triliun. Kalau kita berkaca pada pertumbuhan investasi di Kota Probolinggo pada tahun 2023, ternyata menunjukkan peningkatan signifikan sekitar 0,6 persen dari sebelumnya, tahun 2022. Realisasi pertumbuhan investasi tahun 2022 ke tahun 2023 pada triwulan I sampai III mencapai 272,53 persen dengan total	Menurut anda, agar tren pertumbuhan investasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga mencapai realisasi target sesuai yang diharapkan, langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan agar Kota Probolinggo semakin menarik minat investor untuk berinvestasi, serta investasi bidang apa yang potensial dikembangkan di Kota Probolinggo selama 5 tahun mendatang?

No.	Subtema	Ulasan	Pertanyaan
		investasi sekitar Rp. 4,6 Tiliun. Dari realisasi ini Kota Probolinggo menduduki peringkat ketiga dari kota/ kabupaten di Jawa Timur setelah Kota Pasuruan dan Kabupaten Tulungagung.	
2	Sinergi dengan pemerintah daerah tetangga untuk memperkuat ekonomi daerah	Akumulasi aset dan roda ekonomi, kekayaan, penurunan kualitas akibat polusi dan kekurangan air, banjir, kemiskinan dan sekaligus kemewahan, membuat wilayah-wilayah aglomerasi perkotaan ini pun semakin terkoneksi. Hal ini terjadi akibat kompetisi dan kerjasama antar kota kota tersebut. Dengan demikian, aglomerasi perkotaan berfungsi penting dalam pembangunan wilayah, regional maupun global. Sehingga diperlukan sinergi dan kolaborasi antar daerah yang saling berdekatan. <i>Urban sprawl</i>, atau penyebaran tak	Bagaimana strategi pasangan calon berdasarkan visi dan misi yang telah dibuat dalam membangun sinergi dan kerjasama dengan daerah yang saling berdekatan? Misal dengan Kabupaten Probolinggo dan daerah terdekat lainnya. Bagaimana langkah-langkah dan strategi jika teRpilih

No.	Subtema	Ulasan	Pertanyaan
		terkendali, terjadi bersamaan dengan semakin terkonsentrasi nya kegiatan-kegiatan ekonomi dan industri. Wilayah perkotaan semakin besar, kompleks dan kuat secara ekonomi. Sehingga diperlukan sinergi dan kerjasama antar kota dalam wilayah aglomerasi. Dalam RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2045 tertuang misi Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan dengan sasaran Peningkatan Investasi Produktif dan Pengembangan Usaha berbasis Potensi Lokal dengan target realisasasi Rp. 0,78 triliun pada tahun 2025 dan Rp. 0,98 triliun di tahun 2045.	sebagai wali kota dan wakil wali kota untuk mewujudkan target realisasi investasi produktif sehubungan dengan fenomena <i>urban sprawl</i> dan kerjasama antar daerah?
3	Terciptanya <i>green city</i> atau kota hijau	Pada tahun 2023 Kota Probolinggo meraih Piala Adipura, akan tetapi permasalahan sampah masih menjadi problem di Kota Probolinggo. Pada RPJPD Kota	Langkah strategis apa yang akan paslon lakukan dalam menangani permasalahan sampah untuk mewujudkan Kota Probolinggo menuju <i>green city</i>? Langkah strategis dan

No.	Subtema	Ulasan	Pertanyaan
		Probolinggo 2025-2045, disampaikan isu strategis seperti pengelolaan sanitasi dan air yang aman berkelanjutan, penataan kota yang berkelanjutan dan mewujudkan ketahanan pangan.	kebijakan apa yang akan paslon lakukan dalam mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota yang berkelanjutan dan mewujudkan ketahanan pangan dengan memperhatikan permukiman dan lingkungan hidup?

6. Logistik

Pengadaan dan pendistribusian logistik Pilkada Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan pendampingan dari Sekretariat Jenderal KPU, sesuai kewenangan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang menekankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Proses ini mengacu pada Keputusan KPU Nomor 1519 Tahun 2024 dan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan jumlah logistik, penyusunan kontrak, serta pemilihan penyedia. Adapun jenis logistik yang disiapkan meliputi kotak suara, surat suara, bilik, tinta, alat coblos, hingga alat bantu tunanetra. KPU Kota Probolinggo juga menghitung secara detail jumlah kebutuhan untuk mendukung proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai PKPU Nomor 12 Tahun 2024. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 34.18.



Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Probolinggo Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo melakukan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dengan bekerja sama bersama pihak ketiga, yaitu Kantor Pos Kota Probolinggo. Distribusi logistik ini mencakup seluruh jalur dari KPU ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dilanjutkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta proses pengembalian dari PPS ke PPK dan kembali ke KPU. Kegiatan distribusi ini dilaksanakan dalam rentang waktu 23 hingga 26 November 2024, dengan memperhatikan aspek geografis, keamanan, dan ketepatan waktu. Pengamanan proses distribusi dilakukan dengan pengawasan aparat kepolisian dan TNI.

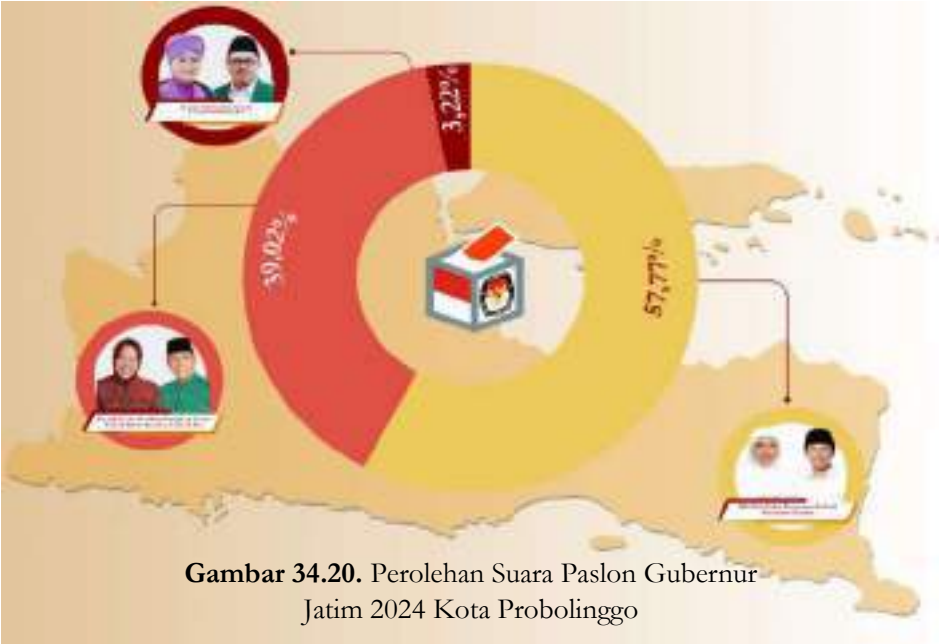
Sebelum proses distribusi berlangsung, KPU Kota Probolinggo telah terlebih dahulu melaksanakan proses penyetelan, pengecekan, pelipatan, dan pengepakan logistik yang dimulai pada 2 November 2024 bertempat di Gudang Logistik KPU di Jalan Anggrek, Kota Probolinggo. Seluruh proses tersebut melibatkan tenaga profesional dari pihak ketiga sebanyak 20 orang yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan logistik Pilkada dan Pilkada. Di samping itu, kegiatan ini juga didukung oleh 10 orang tenaga dari kesekretariatan KPU yang bertugas sebagai pengawas teknis logistik, serta diawasi langsung oleh Bawaslu Kota Probolinggo.

Dari sisi geografis, Kota Probolinggo merupakan wilayah strategis yang menjadi simpul penghubung antara kawasan timur Pulau Jawa dan Bali. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo di sisi barat, selatan,

dan timur, serta dengan Selat Madura di sebelah utara. Secara administratif, Kota Probolinggo terdiri atas 5 kecamatan dan 29 kelurahan yang saling berdekatan dan mudah dijangkau. Dengan kondisi wilayah yang demikian, proses distribusi logistik dapat berlangsung dengan lancar tanpa hambatan berarti, dan tidak ditemukan kendala geografis yang signifikan (nihil kendala).

7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Probolinggo disajikan pada gambar 34.20.

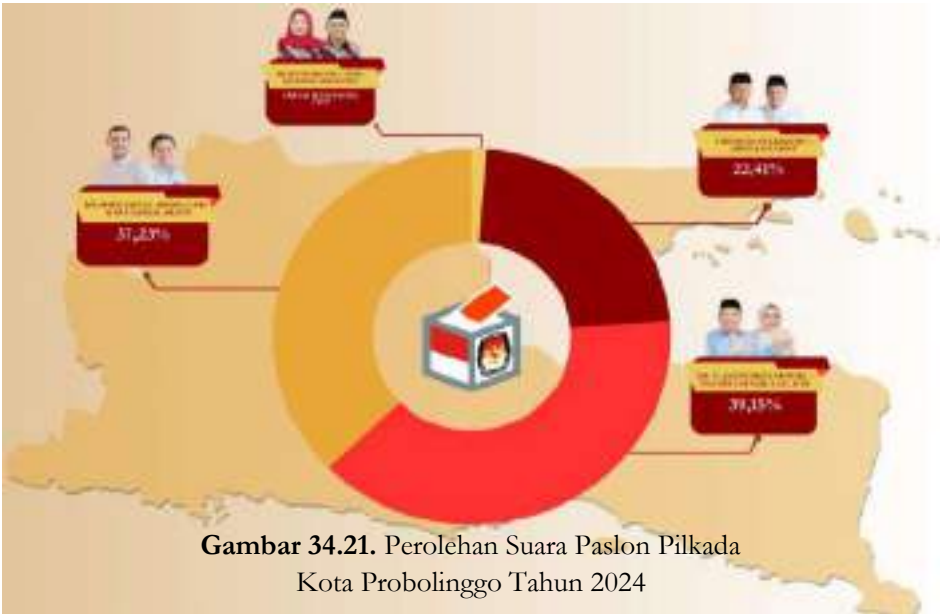


Gambar 34.20. Perolehan Suara Paslon Gubernur
Jatim 2024 Kota Probolinggo

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di Kota Probolinggo, pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak meraih perolehan suara tertinggi dengan dukungan sebanyak 76.722 suara atau 57,77% dari total suara sah. Disusul oleh pasangan Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) yang memperoleh 51.820 suara atau 39,02%. Sementara itu, pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah – H. Lukmanul Hakim memperoleh 4.271 suara, yang setara

dengan 3,22% dari total suara. Jumlah keseluruhan suara sah pada pemilihan ini mencapai 132.813 suara. Hasil ini menunjukkan dominasi pasangan Khofifah–Emil di Kota Probolinggo, sekaligus mengindikasikan preferensi pemilih terhadap kepemimpinan yang berkelanjutan dan berpengalaman.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Probolinggo pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 34.21.



Gambar 34.21. Perolehan Suara Paslon Pilkada Kota Probolinggo Tahun 2024

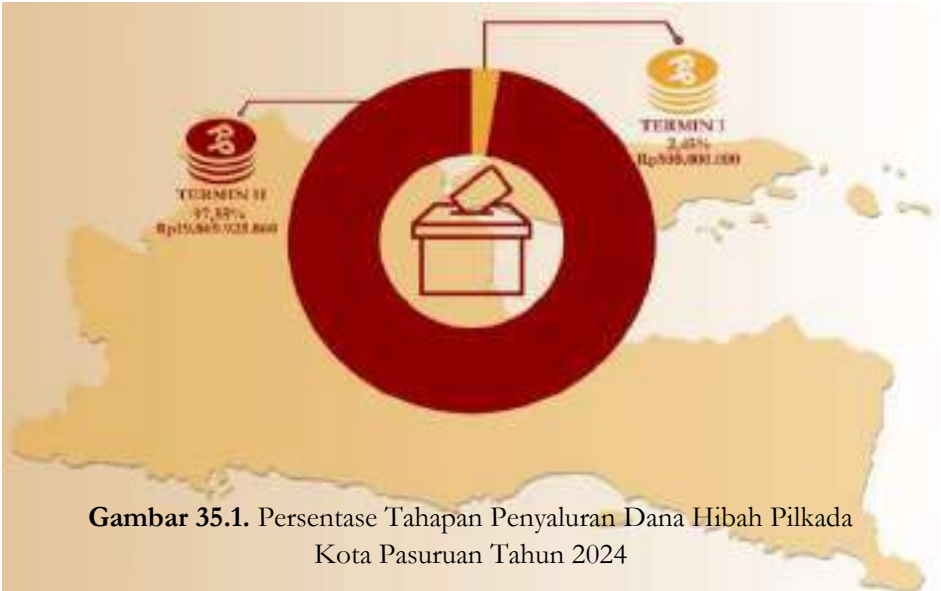
Dalam Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Probolinggo Tahun 2024, pasangan Dr. H. Aminuddin, Sp. OG(K) – Ina Dwi Lestari, S.A.P., M.M. memperoleh suara terbanyak dengan total 53.520 suara atau 39,15% dari keseluruhan suara sah. Disusul oleh pasangan Dr. Hadi Zainal Abidin, S.Pd. – Zainal Arifin dengan 50.897 suara atau 37,23%. Sementara itu, pasangan Fernanda Zulkarnain – Abdullah Zabut mengumpulkan 30.643 suara atau 22,41%, dan pasangan Sri Setyo Pratiwi – Moh. Rachman Sawaludin memperoleh 1.650 suara atau 1,21%. Total suara sah yang tercatat dalam pemilihan ini mencapai 136.710 suara. Hasil ini menunjukkan persaingan ketat antara dua pasangan unggulan, dengan selisih tipis antara peraih suara terbanyak dan *runner-up*.

BAGIAN 35

KOTA PASURUAN

1. Perencanaan Program dan Anggaran

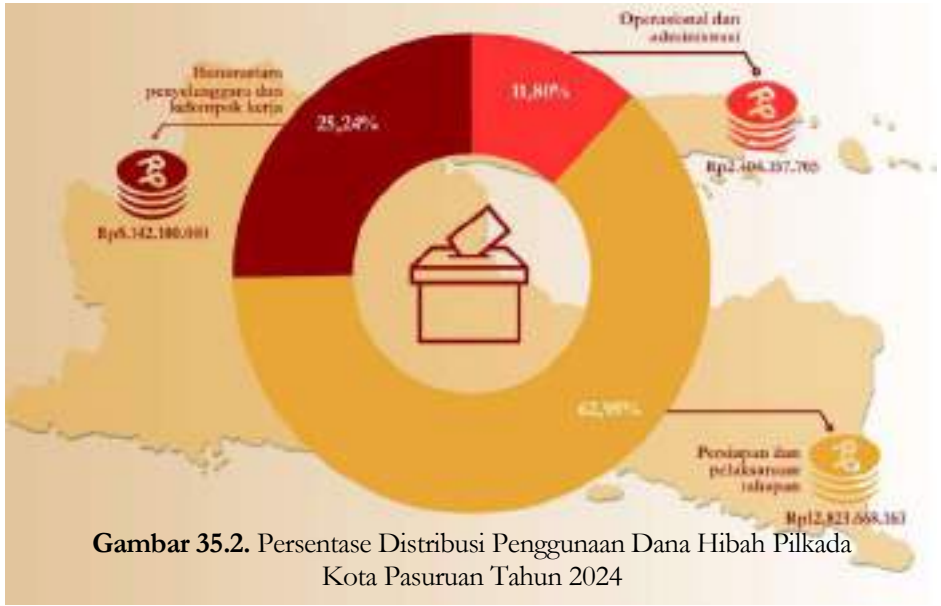
Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Pasuruan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan telah melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Pemerintah Daerah. NPHD tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan pendanaan kegiatan Pilkada, yang memuat kesepakatan antara kedua belah pihak. Salah satu poin utama dalam NPHD adalah nilai total hibah yang disepakati, yakni sebesar Rp. 20.369.925.868. Dana hibah ini diperuntukkan untuk mendukung seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada Wali kota dan Wakil Wali kota Pasuruan Tahun 2024. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 35.1 berikut.



Distribusi dana Pilkada Kota Pasuruan Tahun 2024 disalurkan dalam dua termin. Termin pertama sebesar Rp. 500.000.000,- atau 2,45% dari total nilai hibah, dicairkan pada tanggal 6 Desember 2023. Sementara itu, termin kedua sebesar Rp. 19.869.925.868,- atau 97,55% dicairkan pada tanggal 19 Februari 2024. Meskipun pengajuan awal pada termin pertama adalah sebesar 40% dari

total dana, namun yang disetujui dan dicairkan hanya 2,45%, sedangkan sisanya dicairkan penuh dalam termin kedua.

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 35.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.



Gambar 35.2. Persentase Distribusi Penggunaan Dana Hibah Pilkada Kota Pasuruan Tahun 2024

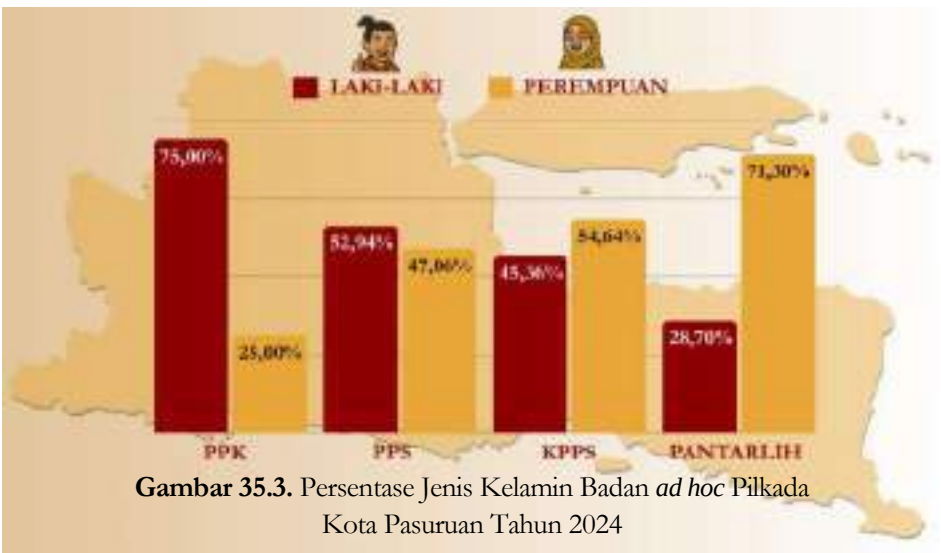
Komponen penggunaan dana hibah dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Pasuruan terbagi ke dalam tiga kategori utama. Alokasi terbesar diarahkan untuk tahapan persiapan dan pelaksanaan, yaitu sebesar Rp. 12.823.668.163,- atau sekitar 62,95% dari total anggaran hibah. Selanjutnya, untuk menunjang kelancaran kegiatan administratif dan dukungan operasional, dana sebesar Rp. 2.404.157.705,- atau 11,80% dialokasikan dalam pos operasional dan administrasi perkantoran. Sementara itu, pos honorarium bagi badan *ad hoc* dan penyelenggara teknis lainnya mendapatkan alokasi sebesar Rp. 5.142.100.000,-, yang mencakup 25,24% dari keseluruhan dana hibah. Pembagian komponen anggaran ini mencerminkan prioritas pelaksanaan yang efisien dan mendukung penyelenggaraan Pilkada yang profesional dan akuntabel.

2. Badan Ad Hoc

Dalam rangka mendukung kelancaran tahapan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Pasuruan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan melaksanakan pembentukan badan *ad hoc* yang terdiri dari Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Proses pembentukan badan *ad hoc* dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka yang transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Proses rekrutmen diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat luas guna memberikan pemahaman terkait peran strategis badan *ad hoc* dalam penyelenggaraan Pilkada. KPU juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan untuk menjangkau peserta dari berbagai latar belakang. Seluruh peserta yang dinyatakan lolos seleksi kemudian mengikuti pelatihan agar memahami tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam proses pemilihan. Tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah pendaftar yang telah melebihi tiga kali lipat kebutuhan. Berdasarkan ketentuan, masa kerja anggota PPK dan PPS berlangsung selama delapan bulan, sedangkan masa kerja Pantarlih dan KPPS hanya satu bulan, menyesuaikan dengan tahapan pelaksanaan teknis pemutakhiran data dan pemungutan suara. KPU Kota Pasuruan juga menekankan pentingnya representasi yang adil, akuntabilitas, serta evaluasi kinerja badan *ad hoc* secara berkala agar proses Pilkada berjalan jujur, adil, dan demokratis. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 35.3.

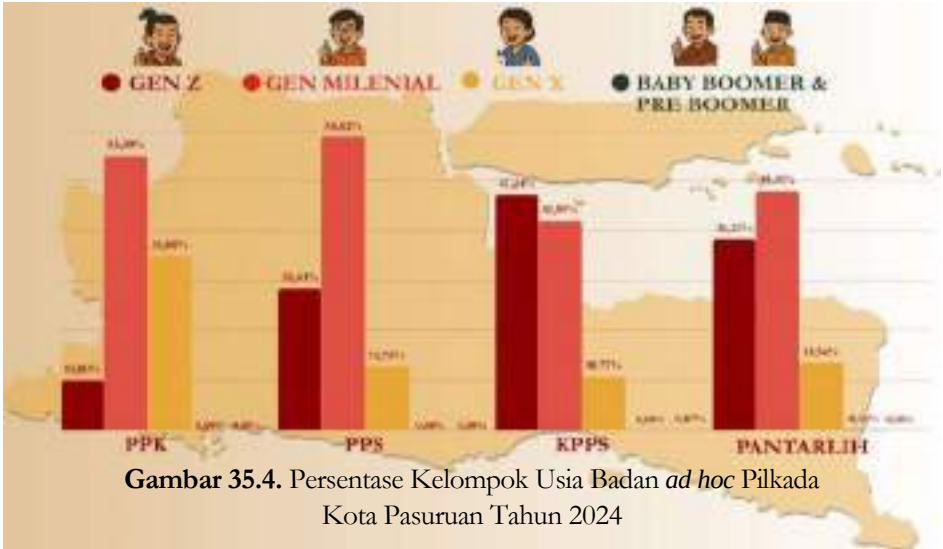


Gambar 35.3. Persentase Jenis Kelamin Badan *ad hoc* Pilkada Kota Pasuruan Tahun 2024

Komposisi gender pada badan *ad hoc* Pilkada Kota Pasuruan Tahun 2024 menunjukkan keterwakilan yang cukup berimbang, khususnya pada tingkat PPS dan KPPS. Untuk PPK, dari total 20 anggota, sebanyak 15 orang (75%)

adalah laki-laki dan 5 orang (25%) perempuan. Pada jenjang PPS, dari total 102 anggota, 54 orang (52,94%) adalah laki-laki dan 48 orang (47,06%) adalah perempuan. Sementara itu, pada tingkat KPPS yang berjumlah 1.960 orang, justru terlihat dominasi keterlibatan perempuan sebanyak 1.071 orang (54,64%) dibandingkan laki-laki yang berjumlah 889 orang (45,36%). Perbedaan yang menarik tampak pada petugas Pantarlih, di mana jumlah perempuan mencapai 395 orang (71,30%), jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebanyak 159 orang (28,70%). Data ini menunjukkan tingginya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Pilkada 2024, terutama pada level KPPS dan Pantarlih yang berperan langsung dalam kegiatan teknis pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kota Pasuruan Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 35.4, berikut.

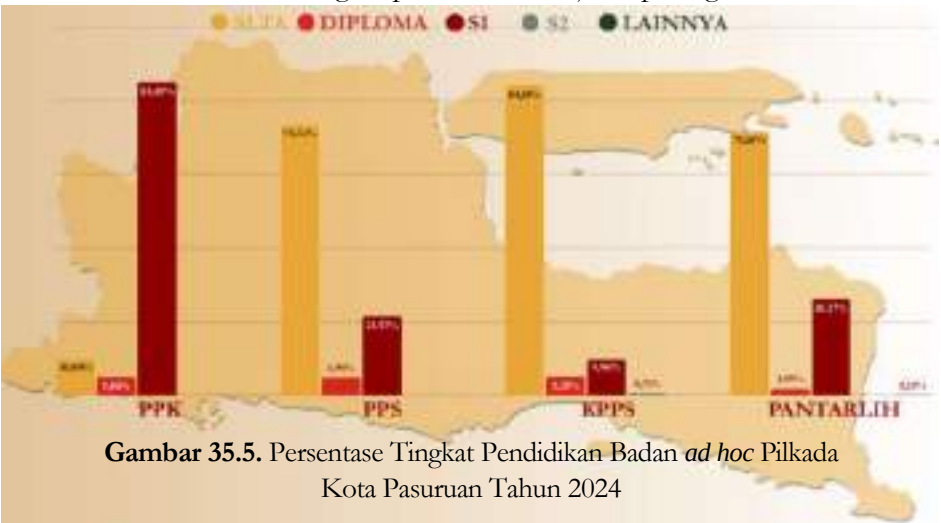


Gambar 35.4. Persentase Kelompok Usia Badan *ad hoc* Pilkada Kota Pasuruan Tahun 2024

Berdasarkan kelompok usia, badan *ad hoc* penyelenggara Pilkada 2024 di Kota Pasuruan didominasi oleh generasi muda, terutama dari kalangan Generasi Z (usia 17–27 tahun) dan Generasi Milenial (usia 28–43 tahun). Di tingkat PPK, mayoritas berusia 28–43 tahun (Gen Milenial) sebanyak 11 orang (55%), disusul oleh Gen X sebanyak 7 orang (35%), dan Gen Z sebanyak 2 orang (10%). Pada tingkat PPS, komposisi usia juga menunjukkan dominasi Gen Milenial sebanyak 60 orang (58,82%), diikuti Gen Z sebanyak 29 orang (28,43%), dan Gen X sebanyak 13 orang (12,75%). Sementara pada KPPS yang jumlahnya mencapai 1.960 orang, sebanyak 926 orang (47,24%) berasal dari Gen Z dan 823 orang (41,99%) dari Gen Milenial, sedangkan Gen X tercatat 211 orang (10,77%). Komposisi usia paling muda tercermin pada

Pantarlih, dengan dominasi Gen Milenial sebanyak 266 orang (48,01%) dan Gen Z sebanyak 212 orang (38,27%). Adapun Gen X hanya mencakup 75 orang (13,54%), dan terdapat satu orang dari kalangan *Baby Boomer*. Data ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pilkada Kota Pasuruan Tahun 2024 mendapatkan dukungan yang kuat dari generasi muda, yang secara kuantitatif mendominasi di hampir semua jenjang badan *ad hoc*, sehingga menjadi indikasi positif terhadap peningkatan partisipasi dan keterlibatan aktif generasi muda dalam proses demokrasi.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *ad hoc* pada Pilkada Kota Pasuruan Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 35.5.



Gambar 35.5. Persentase Tingkat Pendidikan Badan *ad hoc* Pilkada Kota Pasuruan Tahun 2024

Sebaran demografi badan *ad hoc* Pilkada Kota Pasuruan berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa pada jenjang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagian besar anggotanya adalah lulusan S1 sebanyak 85,00% (17 orang), sedangkan lulusan Diploma tercatat 5,00% (1 orang) dan lulusan SLTA sebesar 10,00% (2 orang). Tidak terdapat anggota dari lulusan S2 maupun kategori pendidikan lainnya. Untuk jenjang Panitia Pemungutan Suara (PPS), mayoritas merupakan lulusan SLTA sebanyak 73,53% (75 orang), diikuti oleh S1 sebanyak 21,57% (22 orang) dan Diploma 4,90% (5 orang), tanpa ada lulusan dari jenjang S2 atau lainnya. Pada jenjang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah 1.960 orang, sebagian besar berasal dari lulusan SLTA sebesar 84,18% (1.650 orang), kemudian S1 sebanyak 9,90% (194 orang), Diploma 5,20% (102 orang), dan S2 hanya 0,71% (14 orang), sementara tidak ada yang berasal dari kategori

pendidikan lainnya. Sedangkan pada jenjang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), mayoritas juga lulusan SLTA sebanyak 71,66% (397 orang), disusul oleh lulusan S1 sebesar 26,17% (145 orang), Diploma 1,99% (11 orang), dan kategori pendidikan lainnya sebesar 0,18% (1 orang), tanpa ada dari jenjang S2. Secara umum, distribusi ini menggambarkan bahwa jenjang pendidikan SLTA masih mendominasi rekrutmen badan *ad hoc*, terutama di level teknis seperti KPPS dan Pantarlih, sedangkan lulusan S1 lebih banyak menduduki posisi koordinatif seperti PPK.

Pada pelaksanaan Pilkada Kota Pasuruan Tahun 2024, hingga tahap pembentukan badan *ad hoc* yang mencakup PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih, tercatat belum terdapat partisipasi dari penyandang disabilitas sebagai anggota badan *ad hoc*. Representasi kelompok disabilitas dalam struktur penyelenggara pilkada di Kota Pasuruan masih perlu didorong dan diperhatikan agar tercipta inklusivitas dan keterwakilan yang lebih merata dalam proses demokrasi. Upaya ke depan dapat difokuskan pada peningkatan sosialisasi, aksesibilitas informasi, serta afirmasi rekrutmen yang ramah disabilitas dalam rangka mewujudkan pilkada yang partisipatif dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

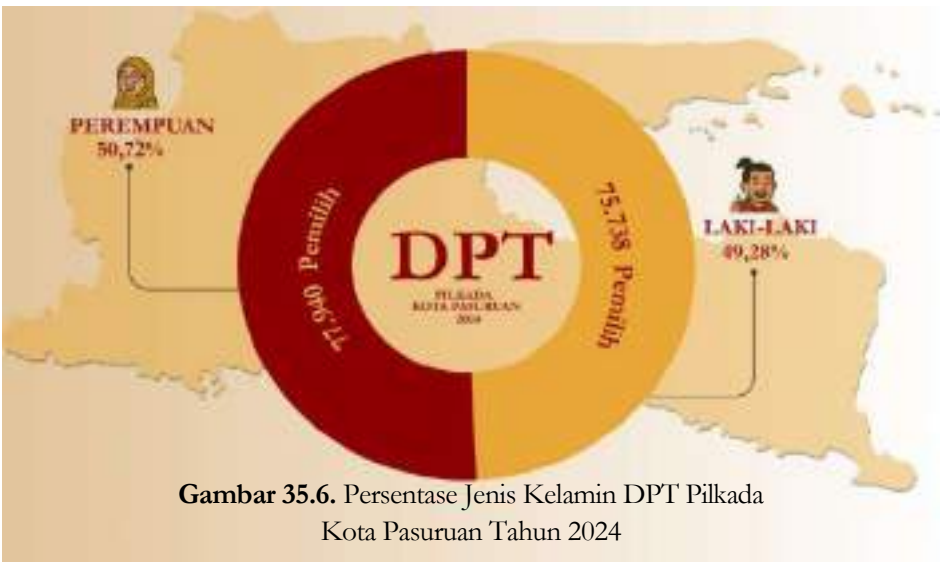
3. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pasuruan Tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah tercatat dalam daftar pemilih secara valid, akurat, dan terkini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan bertanggung jawab penuh dalam menyusun dan menetapkan daftar pemilih yang dapat menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih.

Proses ini dimulai dengan penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DPHP) sebanyak 153.898 pemilih. Setelah dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), data tersebut diperbarui menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 153.922 pemilih. Tahapan ini dilakukan dengan melibatkan pengawasan dan masukan dari masyarakat, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta pengawas pilkada di tingkat kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, setelah dilakukan uji publik serta perbaikan terhadap DPS berdasarkan tanggapan masyarakat, KPU Kota Pasuruan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 18 September 2024 sebanyak 153.678 pemilih, yang telah diumumkan secara resmi melalui laman <https://kota-pasuruan.kpu.go.id>. Penurunan jumlah dari DPS ke DPT

mencerminkan adanya penyisiran data yang lebih akurat, di mana pemilih yang tidak memenuhi syarat (misalnya karena meninggal dunia, pindah domisili, atau memiliki data ganda) telah dihapus dari daftar.

Dalam prosesnya, KPU Kota Pasuruan juga mengedepankan pendekatan partisipatif dan transparan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Disdukcapil, Bawaslu, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil. Sosialisasi juga dilakukan secara massif agar masyarakat mengetahui dan memeriksa hak pilihnya serta dapat menyampaikan keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data. Dengan pemutakhiran data yang dilakukan secara menyeluruh dan akuntabel, diharapkan pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Pasuruan dapat berjalan demokratis, inklusif, dan menjamin seluruh pemilih yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Proses ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pilkada yang berintegritas dan mencerminkan aspirasi rakyat secara sah. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 35.6.

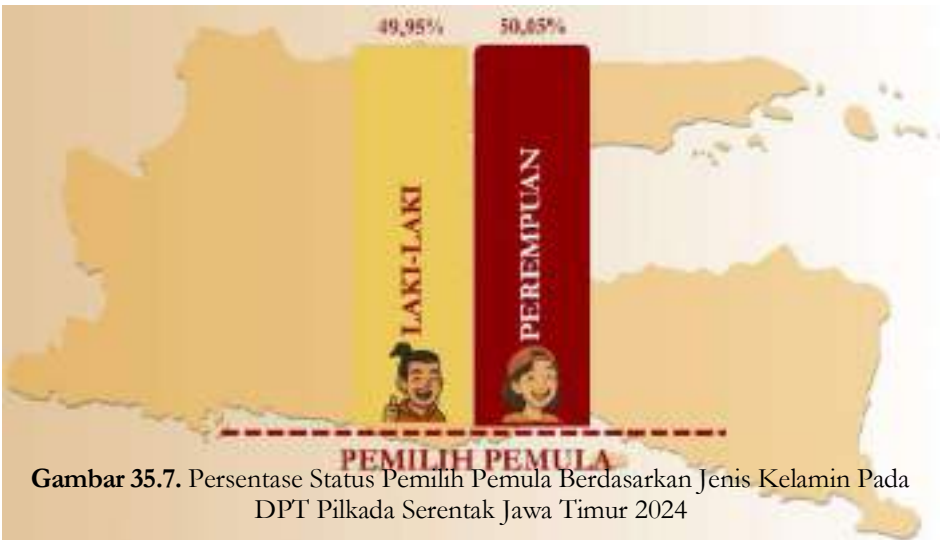


Gambar 35.6. Persentase Jenis Kelamin DPT Pilkada Kota Pasuruan Tahun 2024

Komposisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pasuruan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 menunjukkan keseimbangan gender yang cukup proporsional. Dari total 153.678 pemilih yang telah ditetapkan, sebanyak 75.738 orang atau 49,28% merupakan pemilih laki-laki, sedangkan 77.940 orang atau 50,72% adalah pemilih perempuan. Sebaran ini mencerminkan partisipasi pemilih yang relatif merata antara laki-laki dan perempuan, yang

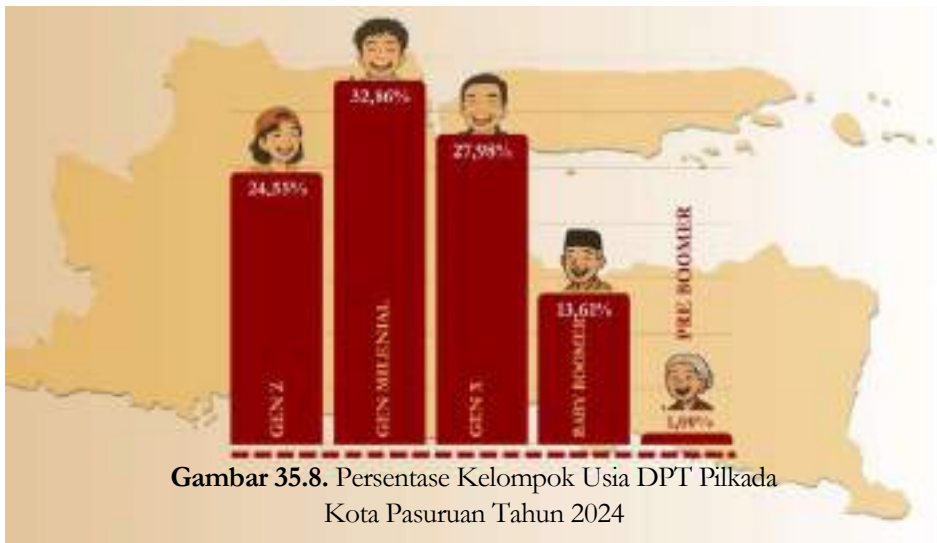
menjadi indikator penting dalam menjamin representasi politik yang inklusif dan setara dalam proses demokrasi di Kota Pasuruan.

Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam kategori utama, yakni pemilih pemula. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 35.7, berikut.



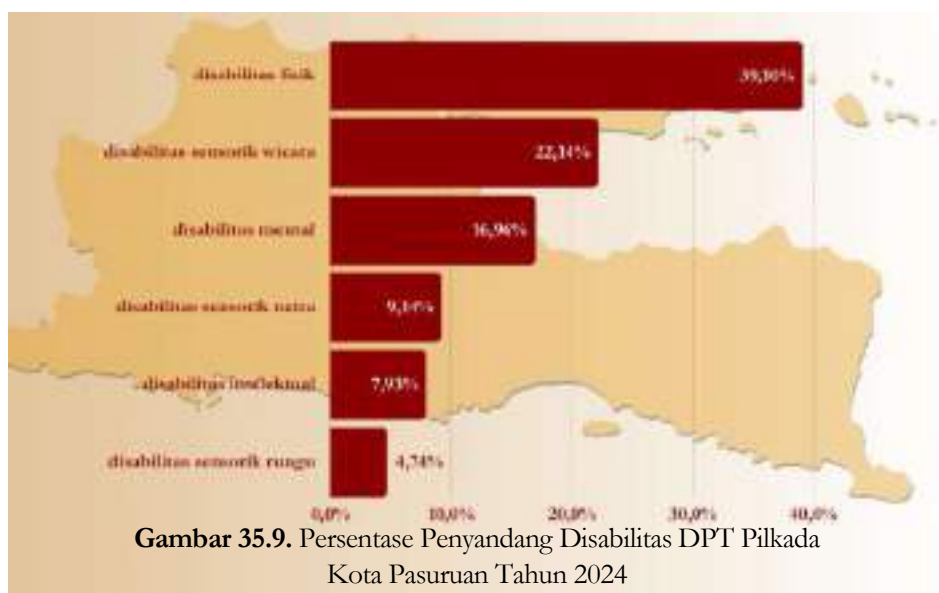
Dalam Pilkada 2024 Kota Pasuruan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) dikelompokkan berdasarkan status pemilih kategori utama, yaitu pemilih pemula. Tercatat sebanyak 2.783 pemilih tergolong sebagai pemilih pemula, terdiri dari 1.390 laki-laki (49,95%) dan 1.393 perempuan (50,05%). Data ini menunjukkan bahwa partisipasi antara pemilih pemula cukup proporsional serta mencerminkan distribusi gender yang relatif seimbang dalam keseluruhan pemilih. Keterlibatan pemilih pemula juga menandakan adanya regenerasi dalam partisipasi demokrasi di Kota Pasuruan.

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 35.8.



Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pasuruan pada Pilkada 2024 menunjukkan distribusi yang dominan pada kelompok usia produktif. Generasi Milenial (usia 28–43 tahun) tercatat sebagai kelompok terbesar dengan jumlah 50.492 pemilih (32,86%), disusul oleh Generasi Z (usia 17–27 tahun) sebanyak 37.730 pemilih (24,55%), serta Generasi X (usia 44–59 tahun) sebanyak 43.003 pemilih (27,98%). Sementara itu, kelompok usia lanjut seperti *Baby Boomer* (60–78 tahun) berjumlah 20.922 pemilih (13,61%), dan *Pre-Boomer* (>79 tahun) sebanyak 1.531 pemilih (1,00%). Data ini mencerminkan dominasi pemilih muda dan usia kerja dalam kontestasi demokrasi di Kota Pasuruan, sekaligus menjadi peluang strategis untuk mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan daerah melalui jalur politik elektoral.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kota Pasuruan Tahun 2024 disajikan pada gambar 35.9, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Pada Pilkada Kota Pasuruan Tahun 2024, terdapat 908 pemilih yang tercatat sebagai penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kelompok disabilitas fisik merupakan jumlah terbesar dengan 355 orang (39,10%), diikuti oleh penyandang disabilitas sensorik wicara sebanyak 201 orang (22,14%), dan disabilitas mental sebanyak 154 orang (16,96%). Selanjutnya, terdapat 83 pemilih (9,14%) penyandang disabilitas sensorik netra, 72 pemilih (7,93%) dengan disabilitas intelektual, serta 43 pemilih (4,74%) dengan disabilitas sensorik rungu. Data ini menunjukkan komitmen inklusivitas dalam proses demokrasi, di mana seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan hak yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

4. Pencalonan

Tahapan pencalonan dalam Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Pasuruan Tahun 2024 diawali dengan pembukaan pendaftaran bakal pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan. Pada hari pertama pembukaan pendaftaran, tercatat tidak ada pasangan calon yang mengajukan berkas pendaftaran (nihil pendaftar). Namun, pada tanggal 28 Agustus 2024, pasangan calon Adi Wibowo, S.T.P., M.Si. dan H. Mokhamad Nawawi, S.Kom., M.Kom. resmi mendaftar sebagai calon Wali kota dan Wakil Wali kota Pasuruan. Proses pendaftaran ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. KPU Kota Pasuruan kemudian melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan

keabsahan dokumen pencalonan untuk menetapkan status pasangan calon tersebut sebagai peserta Pilkada 2024. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon dan partai politik pengusung disajikan pada gambar 35.10, sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.



Pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Pasuruan yang mendaftar pada Pilkada 2024 merupakan dua figur laki-laki yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Calon Wali kota, Adi Wibowo, S.T.P., M.Si., tercatat sebagai lulusan jenjang pendidikan Doktor (S3), sementara calon Wakil Wali kota, H. Mokhamad Nawawi, S.Kom., M.Kom., menyandang gelar Magister (S2). Dengan latar belakang akademik tersebut, keduanya diharapkan mampu membawa kapasitas intelektual dan visi kepemimpinan yang memadai untuk memajukan Kota Pasuruan secara berkelanjutan.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 35.11 yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



Gambar 35.11. Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kota Pasuruan Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

Sosialisasi dalam rangka penyelenggaraan Pilkada Kota Pasuruan Tahun 2024 dilaksanakan secara masif, menyasar berbagai lapisan masyarakat melalui beragam metode yang disesuaikan dengan karakteristik segmen pemilih. Kegiatan sosialisasi mencakup peluncuran maskot dan jingle Pilkada, pertemuan tatap muka, lomba, festival musik pelajar, fun walk, doa bersama lintas agama, pemasangan iklan layanan masyarakat, penyebaran alat peraga sosialisasi, mobil ledang, pengumuman di tempat ibadah, hingga kirab maskot. Pada sosialisasi tatap muka, materi disampaikan langsung oleh komisioner KPU dan narasumber sesuai dengan segmen sasaran, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman peserta. Selain itu, metode sosialisasi juga dilakukan melalui media cetak, elektronik, media sosial, dan mobil keliling (ledang). Pelaksanaan kegiatan semacam fun walk dan festival musik yang bersifat massal membutuhkan anggaran besar dan melibatkan banyak pihak, sehingga transparansi serta akuntabilitas dalam pengadaan

barang dan jasa pemerintah menjadi aspek penting yang dijaga oleh KPU Kota Pasuruan.

Sosialisasi juga menyasar komunitas lokal seperti nelayan, buruh rokok, pengrajin, pedagang pasar, pedagang kopi keliling, komunitas sepeda onthel, komunitas motor, hingga para pengusaha yang tergabung dalam IKADIN. Dalam kegiatan ini, masyarakat diajak aktif menolak praktik golput, politik uang, serta turut menyebarkan informasi yang benar dan kredibel seputar pilkada.

METODE SOSIALISASI TATAP MUKA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 KOTA PASURUAN



Tatap Muka Target RWE Oleh RPS

Jumlah Target Peserta : 30.000 Orang
Tatap muka di Target RWE dilaksanakan 1 kali
mengingat di masing-masing kampung/kelurahan
di Pasuruan terdapat sekitar 30 orang
sachet pengantar
Jumlah Media :
30 Media Sosial Instagram, PPS Kota
Pasuruan



Tatap Muka Target Masyarakat (RPS)

Jumlah Target Peserta : 100 Orang
Tatap muka di masyarakat dilaksanakan
maksudnya 3 kali di masing-masing
kecamatan dengan peserta 30
orang, tiap kegiatan
Jumlah Media Sosial :
4 Media Sosial Instagram PPS Kota
Pasuruan

METODE SOSIALISASI TATAP MUKA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 KOTA PASURUAN



Tatap Muka Segmen Oleh KPU Kota Pasuruan

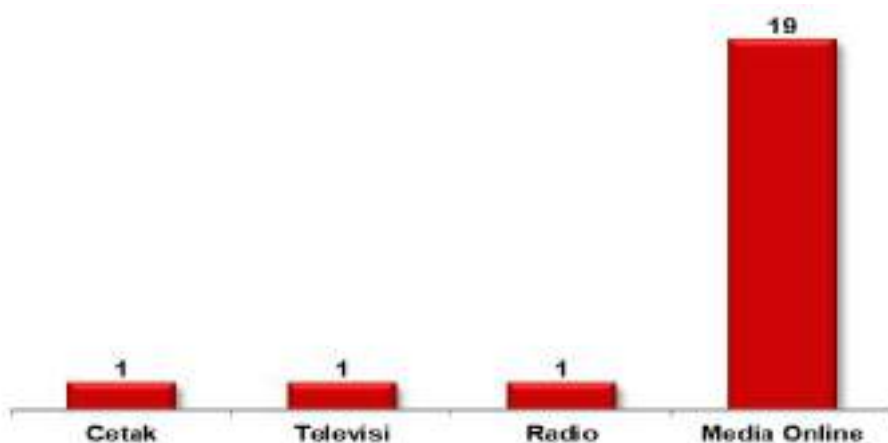
Jumlah Target Peserta : 5.000 Orang
tatap muka segmen KPU Kota Pasuruan dilaksanakan 25 kali
kegiatan dengan jumlah peserta 50 orang setiap kegiatan
Jumlah Media Sosial :
2 Media Sosial Instagram dan Facebook KPU Kota Pasuruan



Gambar 35.12. Metode Sosialisasi Pilkada Kota Pasuruan Tahun 2024

Media massa beRperan besar dalam menyebarluaskan informasi mengenai tahapan Pilkada, pasangan calon, jadwal pemungutan suara, serta edukasi demokrasi.

Terdapat total 22 media yang terlibat, terdiri dari 1 media cetak (Radar Bromo – Jawa Pos), 1 televisi lokal (JTV), 1 radio (Ramapati FM), dan 19 media daring (online) seperti Detik.com, Wartabromo.com, Suarajatimpost.com, RRI.co.id, hingga portal resmi ramapati.pasuruankota.go.id. Kehadiran media sosial dan media daring menjadi elemen kunci dalam menjangkau pemilih milenial dan Gen Z. Melalui sinergi antara KPU, media, dan masyarakat, diharapkan tingkat partisipasi pemilih meningkat serta tercipta Pilkada yang informatif, transparan, dan demokratis.



Gambar 35.13. Media Sosialisasi Pilkada Kota Pasuruan Tahun 2024



Gambar 35.14. Maskot Pilkada Kota Pasuruan Tahun 2024

Maskot Pilkada Kota Pasuruan Tahun 2024 terinspirasi dari burung kepodang, yang merupakan fauna khas daerah setempat dan memiliki filosofi mendalam sebagai simbol kekompakan, keselarasan, serta keindahan akhlak. Maskot ini mengenakan pakaian khas pahlawan nasional Untung Suropati, yang mencerminkan harapan agar Pilkada mampu melahirkan pemimpin yang amanah, tegas, dan bijaksana seperti sosok Untung Suropati yang pernah memimpin Kota Pasuruan pada masa lampau. Motif pakaian menampilkan ikon Tugu Alun-Alun Kota Pasuruan, sementara warna abu-abu dipilih untuk menekankan netralitas dalam proses pemilihan.

Selain itu, maskot juga mengenakan sarung sebagai representasi identitas Kota Pasuruan sebagai Kota Santri. Sarung tersebut bermotif batik sirih, motif batik khas Kota Pasuruan yang sarat nilai budaya lokal. Paruh maskot yang terbuka melambangkan kebebasan dalam menyuarakan aspirasi politik, sementara tangan maskot yang memegang paku dan menunjukkan jari kelingking berwarna ungu menjadi ajakan moral bagi seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan tidak golput. Secara keseluruhan, maskot ini menggambarkan nilai-nilai kultural, integritas demokrasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menyukseskan Pilkada 2024.

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kota Pasuruan memberikan fasilitasi kampanye kepada pasangan calon. Fasilitasi ini mencakup penyediaan Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye (BK), Iklan Kampanye di berbagai media, serta pelaksanaan debat publik antar pasangan calon. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, KPU Kota Pasuruan menyediakan APK bagi setiap pasangan calon dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Jenis dan spesifikasi APK yang difasilitasi mencakup:

- 5 baliho ukuran 3m x 4m berbahan flexy minimal 280 gram, dicetak berwarna satu muka dengan orientasi landscape.
- 80 umbul-umbul (T-Banner) ukuran 0,5m x 2,5m berbahan flexy, satu muka, potrait.
- 68 spanduk ukuran 1,25m x 4m, berbahan flexy, satu muka, orientasi landscape.

Mengacu pada Pasal 25 PKPU No. 13 Tahun 2024, KPU Kota Pasuruan juga mencetak dan mendistribusikan bahan kampanye dengan spesifikasi dan jumlah sebagai berikut:

- Poster: 1.860 lembar, art carton 260 gr, ukuran 40 cm x 60 cm, cetak berwarna satu muka.
- Pamflet: 7.440 lembar, HVS 80 gr, ukuran A4, cetak berwarna satu muka.
- Brosur: 23.100 lembar, HVS 80 gr, ukuran terbuka A4 dan terlipat 1/3 bagian, cetak berwarna dua muka.
- Selebaran: 7.440 lembar, HVS 80 gr, ukuran 10 cm x 21 cm, cetak dua muka.

Penayangan iklan kampanye difasilitasi oleh KPU Kota Pasuruan selama 14 hari, dari tanggal 10 hingga 23 November 2024. Rincian penayangannya meliputi:

- Media cetak: iklan berbentuk gambar berwarna maksimal ukuran 7x500 mm, ditayangkan setiap hari di satu media cetak lokal.
- Radio: rekaman audio berdurasi 60 detik dalam format .mp3 atau .wav ditayangkan 3 kali sehari selama 14 hari.
- Televisi: tayangan audio visual berdurasi 30 detik dalam format H264_Mp4 disiarkan 2 kali sehari selama masa kampanye.

Sebagai bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat, KPU Kota Pasuruan memfasilitasi dua kali debat publik antar pasangan calon:

1. Debat Pertama: bertema “Strategi dan Inovasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Mewujudkan Kota Pasuruan yang Berkeadilan”, dilaksanakan pada 2 November 2024 pukul 19.00 WIB di Gedung JTV Surabaya, disiarkan langsung melalui JTV dan kanal YouTube KPU Kota Pasuruan.
2. Debat Kedua: bertema “Akselerasi Pembangunan dan Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Kota Pasuruan yang Religius dan Beradab”, diselenggarakan pada 17 November 2024 pukul 13.00 WIB di tempat yang sama, dan juga ditayangkan secara langsung.

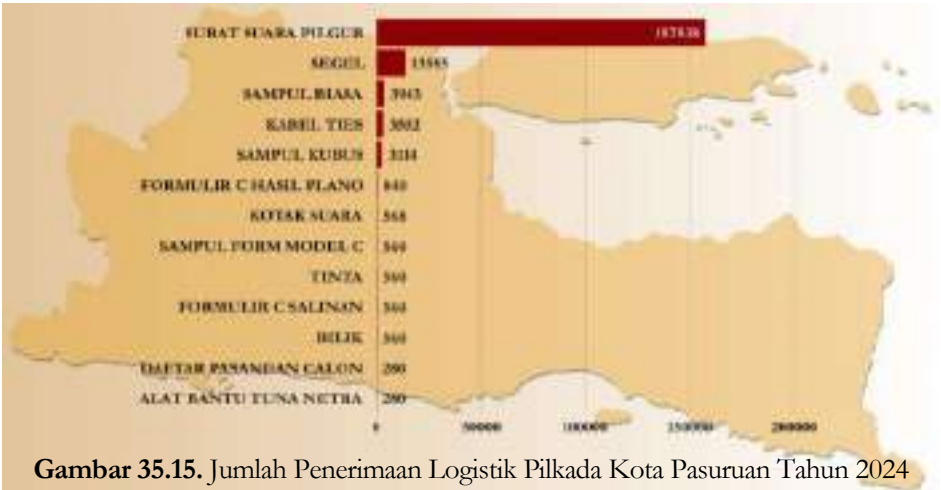
Melalui berbagai bentuk fasilitasi tersebut, diharapkan proses kampanye berjalan secara adil, terbuka, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta mampu meningkatkan kualitas demokrasi lokal di Kota Pasuruan.

6. Logistik

Pengelolaan logistik pada Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan aspek krusial dalam mendukung kelancaran tahapan pemungutan dan penghitungan suara. KPU Kota Pasuruan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan logistik dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadaan logistik meliputi berbagai kebutuhan yang diawali dengan identifikasi kebutuhan logistik secara rinci berdasarkan jumlah pemilih, jumlah TPS, serta kondisi geografis wilayah Kota Pasuruan.

Metode pengadaan yang digunakan oleh KPU Kota Pasuruan mengacu pada sistem *e-purchasing* melalui Katalog Elektronik Sektoral yang disediakan

oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan dikelola oleh KPU RI. Penggunaan katalog elektronik ini bertujuan untuk mempercepat proses pengadaan, meminimalkan risiko penyimpangan, dan memastikan kualitas barang yang diperoleh sesuai dengan standar nasional. Dengan pemanfaatan sistem katalog elektronik, proses pemilihan penyedia logistik dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Penyedia yang tercantum dalam katalog elektronik telah melalui proses verifikasi dan seleksi yang ketat oleh KPU RI, sehingga menjamin mutu barang dan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 35.15.



Gambar 35.15. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kota Pasuruan Tahun 2024

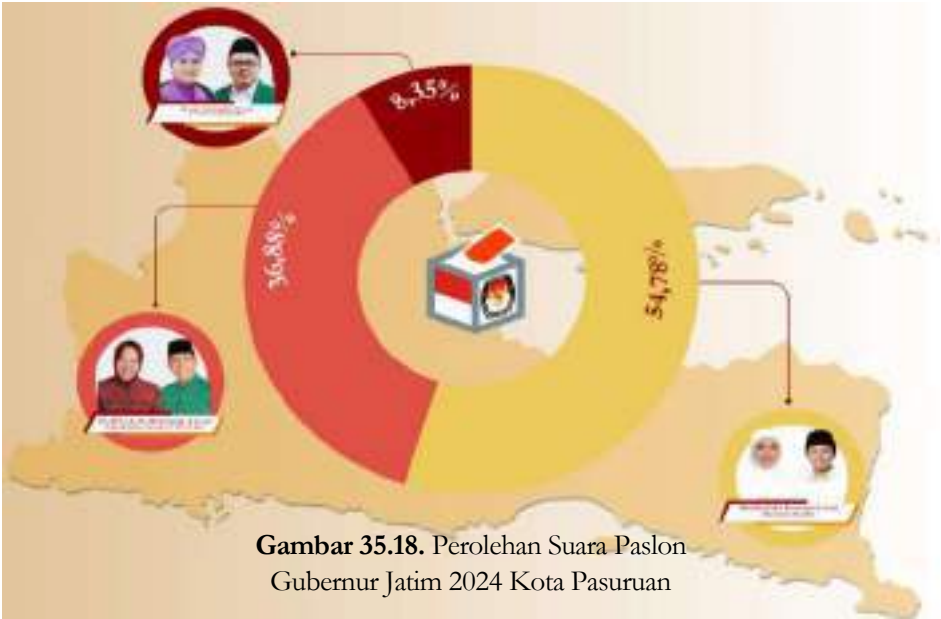
Dari sisi geografis, Kota Pasuruan tergolong wilayah dataran yang memiliki akses jalan yang baik dan merata, sehingga tidak ditemukan hambatan geografis yang signifikan dalam proses distribusi logistik.



Gambar 35.17. Peta Distribusi Logistik Pilkada Kota Pasuruan Tahun 2024

7. Hasil Pilkada Serentak

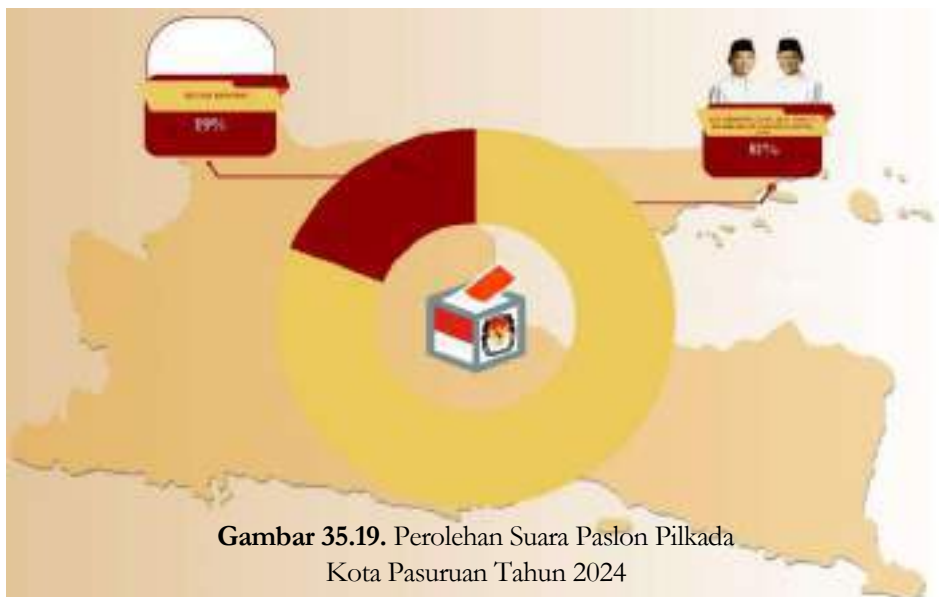
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Pasuruan disajikan pada gambar 35.18.



Gambar 35.18. Perolehan Suara Paslon Gubernur Jatim 2024 Kota Pasuruan

Berdasarkan hasil rekapitulasi, pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak memperoleh suara terbanyak, yakni sebesar 53.069 suara (54,78%) dari total 96.885 suara sah. Pasangan Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T. – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), S.IP., M.Kes. menempati posisi kedua dengan raihan 35.727 suara (36,88%). Sementara itu, pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah, M.Si. – H. Lukmanul Hakim, M.Si. memperoleh 8.089 suara (8,35%). Dengan demikian, pasangan Khofifah – Emil unggul secara signifikan dalam perolehan suara di Kota Pasuruan dan menjadi pilihan mayoritas pemilih di wilayah tersebut. Total suara sah yang dihimpun dalam Pilgub Jatim di Kota Pasuruan sebanyak 96.885 suara atau 100% dari keseluruhan suara yang masuk dan terverifikasi.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Pasuruan pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 35.19.



Gambar 35.19. Perolehan Suara Paslon Pilkada Kota Pasuruan Tahun 2024

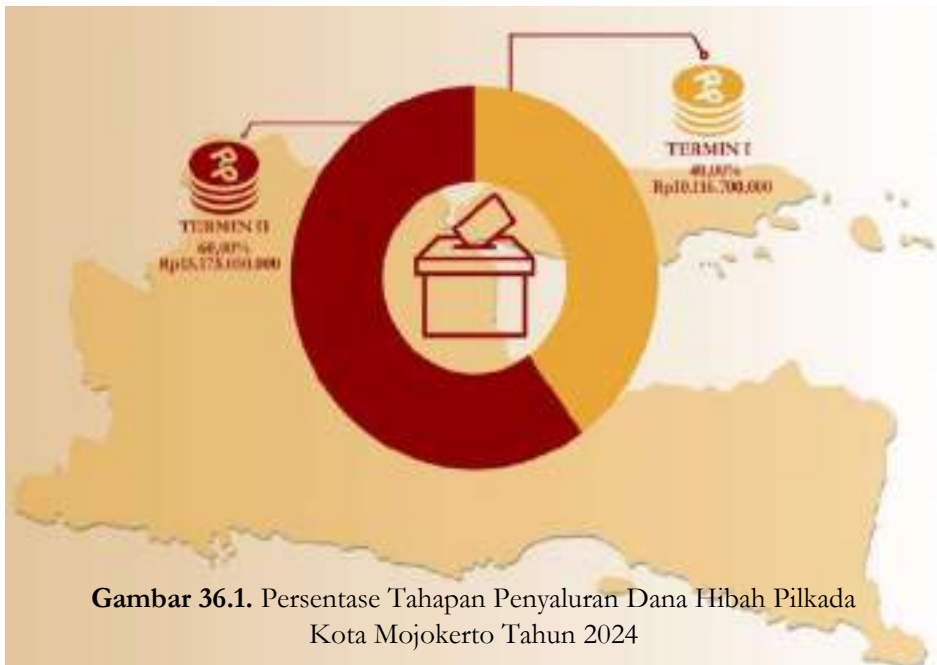
Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Pasuruan Tahun 2024, pasangan calon tunggal Adi Wibowo, S.T.P., M.Si. dan H. Mokhamad Nawawi, S.Kom., M.M. memperoleh dukungan suara sebesar 81% dari total suara sah. Sementara itu, kolom kosong meraih suara sebesar 19%. Dengan perolehan ini, pasangan calon Adi Wibowo – Mokhamad Nawawi dinyatakan unggul secara meyakinkan atas opsi kolom kosong, menandakan tingkat kepercayaan masyarakat Kota Pasuruan yang tinggi terhadap pasangan calon tersebut. Hasil ini merujuk pada data resmi Model D. Hasil Kabko – KWK (Bupati/Wali kota) sebagaimana diumumkan oleh KPU Kota Pasuruan.

KOTA MOJOKERTO

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Mojokerto Tahun 2024 dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2023 oleh Ketua KPU Kota Mojokerto bersama dengan Wali kota Mojokerto. Total nilai hibah yang disepakati dalam NPHD tersebut mencapai Rp. 25.291.750.000. Anggaran hibah ini dialokasikan untuk membiayai 28 item kegiatan yang menunjang seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada. Selama kurun waktu pelaksanaan hingga Maret 2025, anggaran hibah ini telah mengalami sejumlah penyesuaian, yaitu 8 kali revisi DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) dan 10 kali revisi Kanwil (Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan).

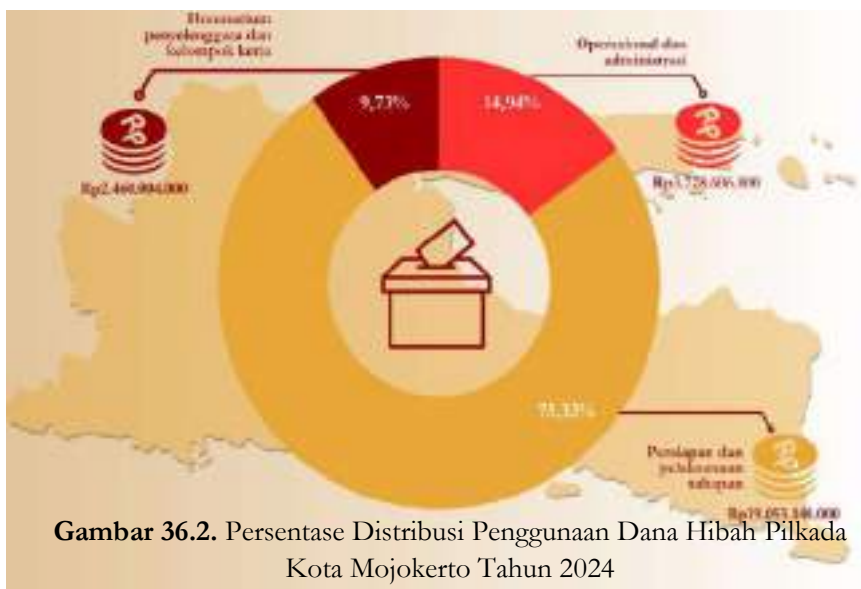
Hingga akhir Tahun Anggaran 2024, realisasi penggunaan anggaran tercatat sebesar Rp. 14.657.025.867, sedangkan sisa anggaran mencapai Rp. 10.634.724.133. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sisa dana tersebut, KPU Kota Mojokerto mengajukan revisi penambahan pagu hibah ke dalam DIPA Tahun Anggaran 2025. Revisi tersebut dilakukan melalui dua kali revisi Kanwil, yaitu sebesar Rp. 3.615.499.000 pada revisi pertama dan Rp. 9.019.225.133 pada revisi kedua. Seluruh proses revisi dan penyesuaian anggaran dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sisa anggaran hibah yang tidak digunakan dir-encanakan akan dikembalikan ke kas negara pada 25 Maret 2025. Proses pengelolaan hibah ini mencerminkan komitmen KPU Kota Mojokerto dalam mengelola keuangan negara secara transparan dan bertanggung jawab demi mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 35.1 berikut.



Gambar 36.1. Persentase Tahapan Penyaluran Dana Hibah Pilkada Kota Mojokerto Tahun 2024

Distribusi dana Pilkada Kota Mojokerto Tahun 2024 disalurkan dalam dua termin. Termin I sebesar Rp. 10.116.700.000 atau setara 40,00% dari total anggaran, dan Termin II sebesar Rp. 15.175.050.000 atau 60,00%. Skema pencairan ini dirancang untuk mendukung pendanaan Pilkada secara bertahap dan efisien, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pada masing-masing tahapan serta sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Mojokerto dalam mewujudkan pilkada yang transparan dan akuntabel.

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 36.2 yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah Pilkada.

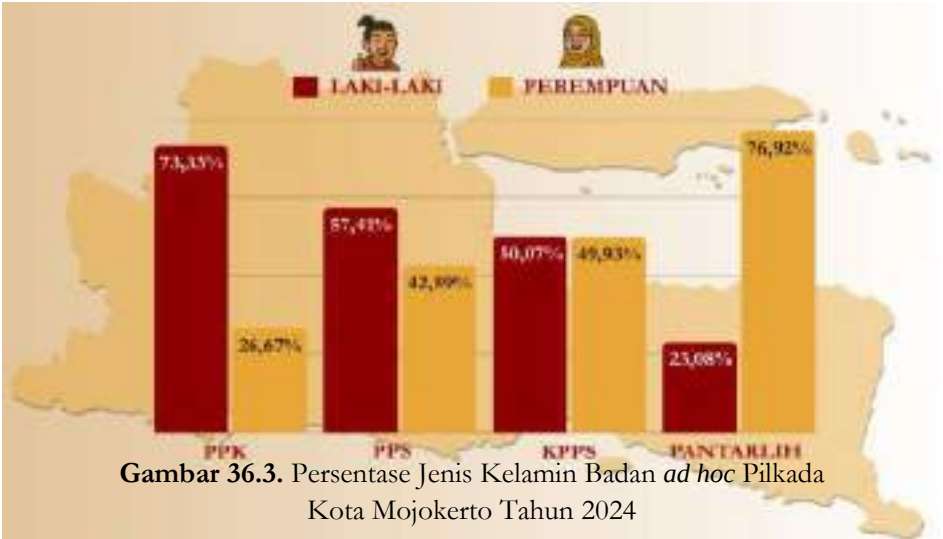


Berdasarkan rincian komponen anggaran hibah Pilkada Kota Mojokerto Tahun 2024, total dana sebesar Rp. 25.291.750.000 dialokasikan ke dalam tiga kategori utama. Alokasi terbesar anggaran digunakan untuk mendukung tahapan persiapan dan pelaksanaan, yaitu sebesar Rp. 19.053.140.000 atau 75,33% dari total hibah. Selanjutnya, komponen operasional dan administrasi perkantoran memperoleh alokasi sebesar Rp. 3.778.606.000 atau 14,94%, yang digunakan untuk menunjang kebutuhan administratif dan operasional KPU selama masa penyelenggaraan. Sementara itu, anggaran honorarium bagi penyelenggara dan badan *ad hoc* dialokasikan sebesar Rp. 2.460.004.000, atau sekitar 9,73% dari total anggaran hibah. Komposisi anggaran ini menunjukkan fokus utama pada kelancaran pelaksanaan tahapan Pilkada, disertai dukungan administratif dan penghargaan bagi pelaksana teknis di lapangan.

2. Badan Ad Hoc

Proses pembentukan Badan *ad hoc* untuk penyelenggaraan Pilkada Kota Mojokerto Tahun 2024 dilakukan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan. Tahapan tersebut meliputi: pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berlangsung mulai 23 April hingga 16 Mei 2024, Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 2 Mei hingga 26 Mei 2024, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada 13 Juni hingga 24 Juni 2024, serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dilaksanakan pada 17 September hingga 7 November 2024.

Dari keseluruhan proses rekrutmen, hanya tahapan pembentukan PPS yang mengalami perpanjangan waktu karena jumlah pendaftar belum memenuhi kuota yang dibutuhkan pada awal masa pendaftaran. Meskipun demikian, seluruh tahapan rekrutmen pada akhirnya dapat diselesaikan sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan, pembentukan badan *ad hoc* untuk Pilkada Kota Mojokerto Tahun 2024 telah berhasil mencukupi kebutuhan teknis, khususnya dalam mempersiapkan 190 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Reguler dan 2 TPS Lokasi Khusus (Loksus). Keberhasilan pemenuhan personel ini menjadi pondasi penting dalam mendukung kelancaran dan integritas pelaksanaan tahapan pilkada di tingkat lokal. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 36.3.

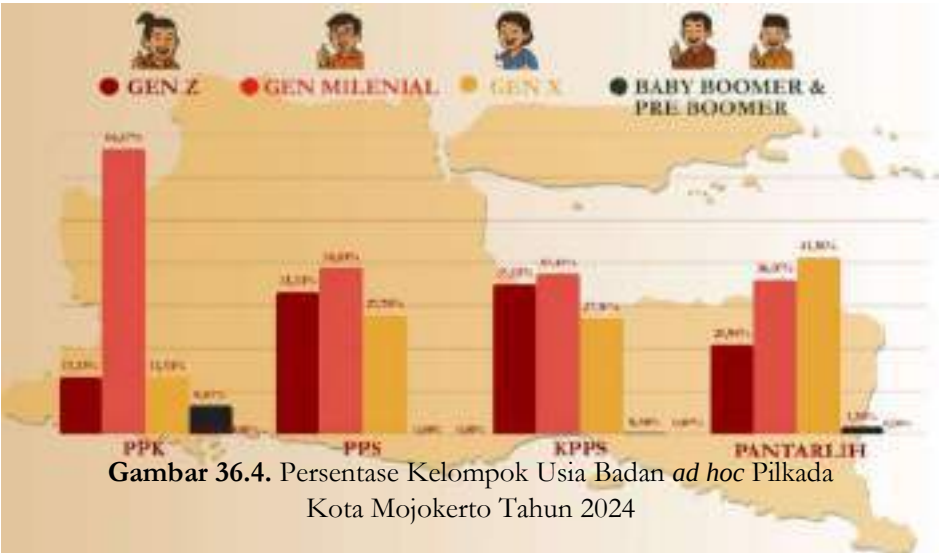


Gambar 36.3. Persentase Jenis Kelamin Badan *ad hoc* Pilkada Kota Mojokerto Tahun 2024

Sebaran komposisi jenis kelamin pada badan *ad hoc* Pilkada Kota Mojokerto Tahun 2024 menunjukkan keberagaman dan keterlibatan aktif antara laki-laki dan perempuan. Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), terdapat 11 laki-laki (73,33%) dan 4 perempuan (26,67%) dari total 15 anggota. Sementara pada Panitia Pemungutan Suara (PPS), dari 54 anggota, 31 orang (57,41%) adalah laki-laki dan 23 orang (42,59%) adalah perempuan. Komposisi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPSS) terbilang seimbang, dengan 673 laki-laki (50,07%) dan 671 perempuan (49,93%) dari total 1.344 orang. Adapun pada Petugas Pe-mutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), keterlibatan perempuan jauh lebih tinggi, yakni sebanyak 290 orang (76,92%) dibandingkan laki-laki yang berjumlah 87

orang (23,08%) dari total 377 petugas. Data ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Mojokerto cukup tinggi, khususnya pada level Pantarlih dan KPPS, mencerminkan semangat inklusivitas dan kesetaraan dalam pelibatan masyarakat dalam proses demokrasi lokal.

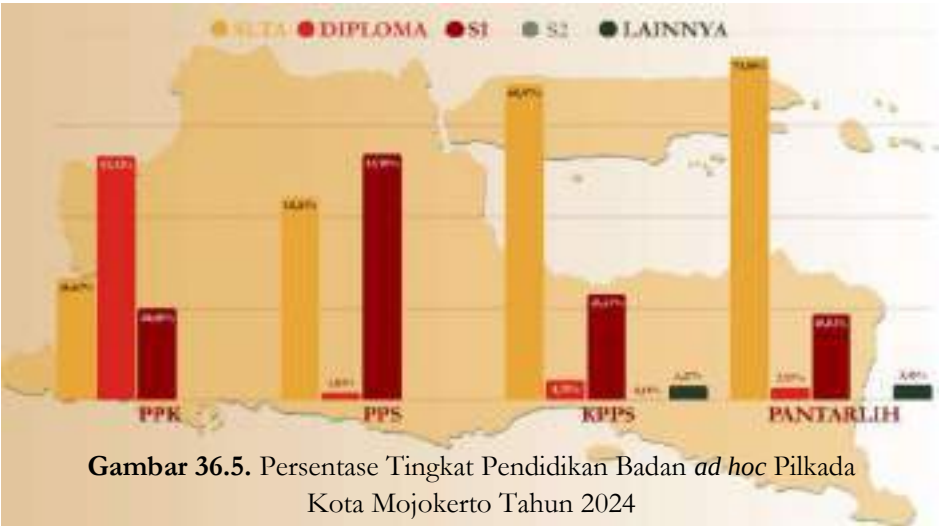
Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kota Mojokerto Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 36.4 berikut.



Komposisi usia badan *ad hoc* Pilkada Kota Mojokerto Tahun 2024 mencerminkan keberagaman generasi yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pilkada. Untuk PPK, mayoritas berasal dari generasi milenial (usia 28–43 tahun) sebanyak 10 orang (66,67%), diikuti Gen Z dan Gen X masing-masing 2 orang (13,33%), serta 1 orang dari kelompok *Baby Boomer* (6,67%). Pada PPS, generasi milenial tetap mendominasi dengan 21 orang (38,89%), disusul Gen Z sebanyak 18 orang (33,33%), Gen X sebanyak 15 orang (27,78%). Sementara itu, KPPS memiliki distribusi yang cukup merata, dengan dominasi dari Gen Milenial sebanyak 503 orang (37,43%) dan Gen Z sebanyak 472 orang (35,12%), diikuti oleh Gen X sebanyak 365 orang (27,16%), serta 4 orang (0,30%) dari *Baby Boomer*. Adapun Pantarlih, paling banyak berasal dari Gen X yaitu 156 orang (41,38%), kemudian Gen Milenial sebanyak 136 orang (36,07%), Gen Z sebanyak 79 orang (20,95%), dan terdapat pula 6 orang (1,59%) dari kelompok *Baby Boomer*. Distribusi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pilkada Kota Mojokerto melibatkan lintas generasi, dengan dominasi tenaga muda dari generasi milenial dan Gen

Z, sekaligus memperkuat kesinambungan pengalaman melalui keterlibatan generasi yang lebih beRpengalaman.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kota Mojokerto Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 36.5.



Gambar 36.5. Persentase Tingkat Pendidikan Badan *ad hoc* Pilkada Kota Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan klasifikasi pendidikan, mayoritas anggota PPK berasal dari lulusan S1 sebanyak 8 orang (53,33%), diikuti oleh lulusan S2 sebanyak 3 orang (20,00%) dan SLTA sebanyak 4 orang (26,67%). Tidak terdapat anggota PPK dari jenjang diploma maupun lainnya. Pada tingkat PPS, sebagian besar juga beRpendidikan S1 sebanyak 29 orang (53,70%), kemudian SLTA sebanyak 24 orang (44,44%), dan hanya 1 orang (1,85%) yang berasal dari jenjang diploma. Sementara itu, anggota KPPS didominasi oleh lulusan SLTA sebanyak 927 orang (68,97%), disusul oleh lulusan S1 sebanyak 312 orang (23,21%). Tercatat 59 orang (4,39%) merupakan lulusan diploma, 2 orang (0,15%) berlatar belakang pendidikan S2, dan 44 orang (3,27%) berasal dari kategori lainnya. Untuk Pantarlih, sebagian besar berasal dari lulusan SLTA yaitu 282 orang (74,80%), diikuti oleh lulusan S1 sebanyak 71 orang (18,83%), lulusan diploma 11 orang (2,92%), dan kategori lainnya sebanyak 13 orang (3,45%). Data ini menunjukkan bahwa lulusan SLTA menjadi mayoritas pada jenjang pelaksana teknis seperti KPPS dan Pantarlih, sedangkan jenjang struktural seperti PPK dan PPS lebih banyak diisi oleh lulusan perguruan tinggi, khususnya S1. Keberagaman latar belakang pendidikan ini mencerminkan upaya inklusif dalam rekrutmen penyelenggara Pilkada.

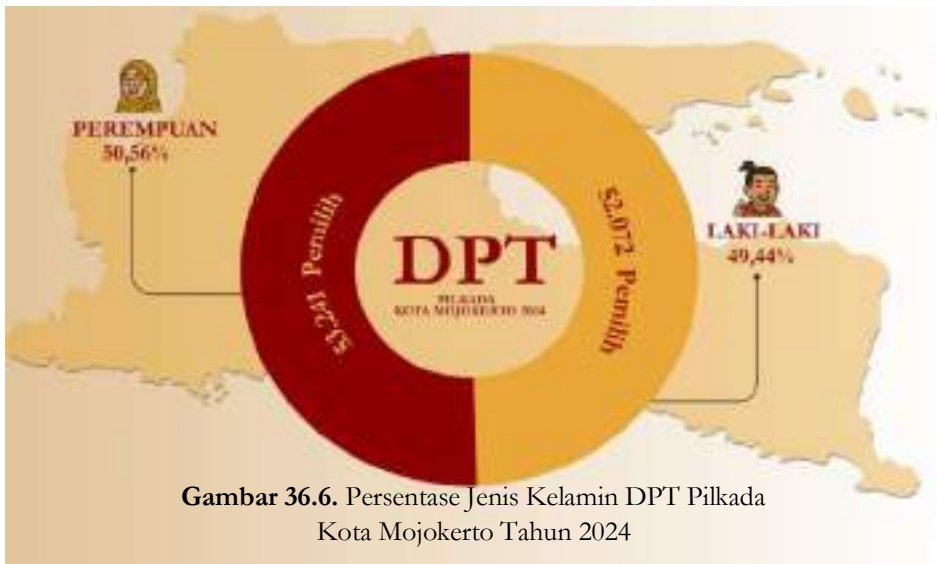
Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Mojokerto, belum tercatat adanya partisipasi dari penyandang disabilitas sebagai bagian dari penyelenggara badan *ad hoc*, baik di tingkat PPK, PPS, KPPS, maupun Pantarlih. Hal ini menjadi catatan penting bagi KPU Kota Mojokerto dalam upaya mendorong keterlibatan kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, dalam proses demokrasi, tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai penyelenggara pilkada. Ke depan, perlu dilakukan penguatan kebijakan afirmatif dan fasilitasi yang lebih inklusif agar partisipasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pilkada dapat terwujud secara lebih nyata dan merata.

3. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan krusial dalam memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada 2024. Proses ini diawali dengan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada tanggal 2 Mei 2024. Selanjutnya, hasil sinkronisasi DP4 diserahkan oleh KPU RI kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 24–25 Mei 2024.

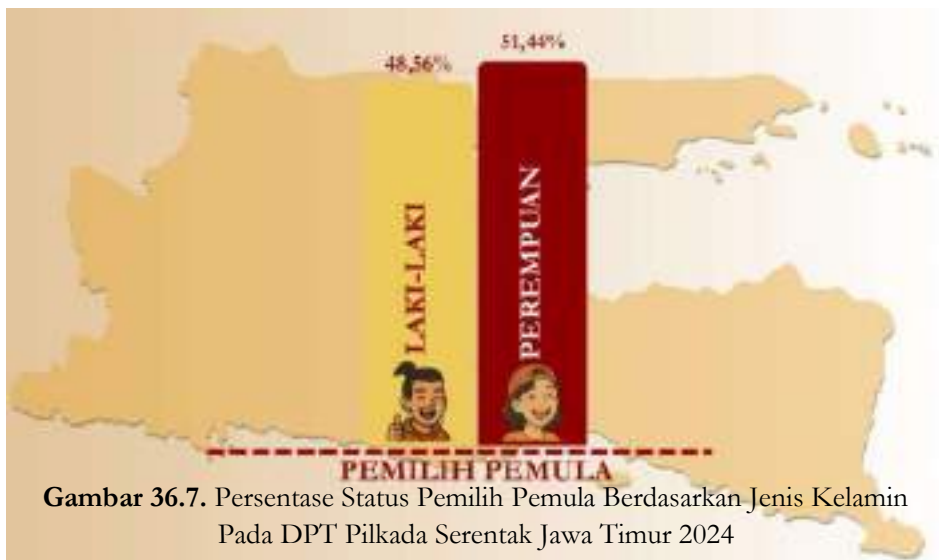
KPU Kota Mojokerto kemudian melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih dimulai dari proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Tahapan ini menghasi-lkan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) sebanyak 104.822 pemilih. Selanjutnya, KPU menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 105.397 pemilih, yang menjadi dasar untuk uji publik dan tanggapan masyarakat. Setelah melalui tahapan pencermatan, masukan dan perbaikan dari berbagai pihak, KPU Kota Mojokerto akhirnya menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 105.313 pemilih, yang terdiri dari 52.072 pemilih laki-laki dan 53.241 pemilih perempuan. Penetapan ini dituangkan secara resmi dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 191 Tahun 2024 pada tanggal 20 September 2024.

Melalui rangkaian tahapan ini, KPU Kota Mojokerto berkomitmen menjaga akurasi dan transparansi data pemilih, guna menjamin hak konstitusional seluruh warga negara serta mendukung terselenggaranya pilkada yang jujur, adil, dan demokratis. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 36.6.



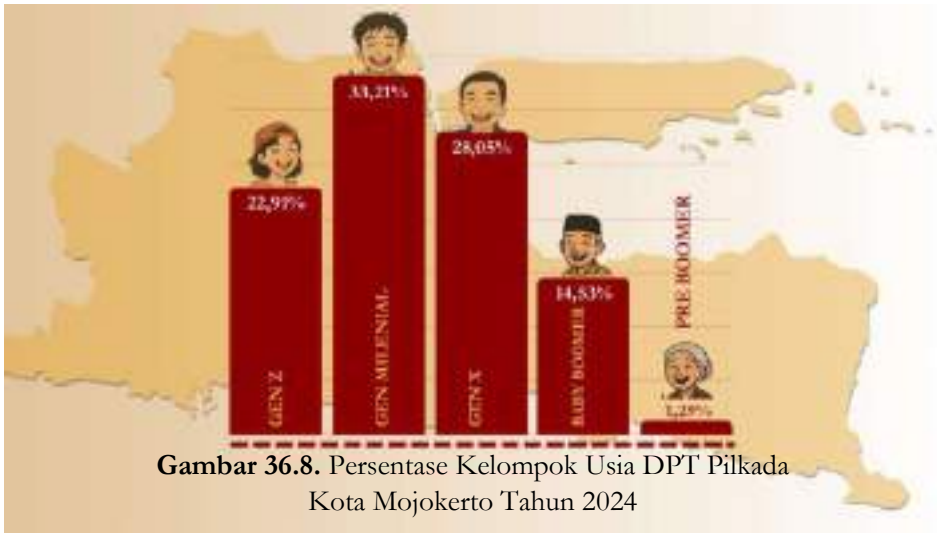
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Mojokerto untuk Pilkada 2024 menunjukkan komposisi pemilih yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dari total 105.313 pemilih, sebanyak 52.072 orang (49,44%) merupakan pemilih laki-laki, sedangkan 53.241 orang (50,56%) merupakan pemilih perempuan. Proporsi ini mencerminkan keterwakilan gender yang setara dalam daftar pemilih, serta memperlihatkan bahwa perempuan memiliki porsi sedikit lebih besar dalam potensi partisipasi pilkada di Kota Mojokerto. Keseimbangan ini diharapkan turut berkontribusi terhadap keberlangsungan demokrasi yang inklusif dan representatif.

Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam dua kategori utama. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 36.7, berikut.



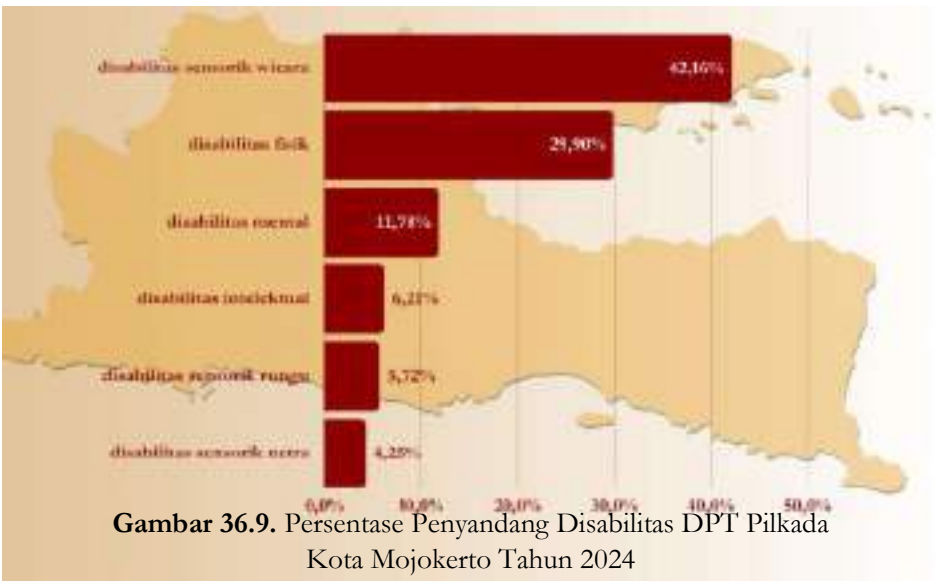
Berdasarkan klasifikasi status pemilih, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Mojokerto pada Pilkada 2024 terdiri dari 1.804 pemilih pemula dan 103.509 pemilih non-pemula. Dari jumlah pemilih pemula, sebanyak 876 orang (48,56%) adalah laki-laki dan 928 orang (51,44%) adalah perempuan. menunjukkan bahwa perempuan mendominasi secara proporsional baik pada kategori pemula maupun non-pemula. Data ini mencerminkan tingginya potensi partisipasi perempuan di Kota Mojokerto, sekaligus menjadi indikator penting dalam mendorong partisipasi politik yang inklusif dan berkeadilan gender.

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 36.8.



Komposisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Mojokerto pada Pilkada 2024 berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi generasi muda. Dari total 105.313 pemilih, kelompok usia 28–43 tahun (Generasi Milenial) tercatat sebagai segmen terbesar dengan jumlah 34.978 orang (33,21%), diikuti oleh Generasi X (usia 44–59 tahun) sebanyak 29.543 orang (28,05%), dan Generasi Z (usia 17–27 tahun) sebanyak 24.129 orang (22,91%). Sementara itu, kelompok Baby Boomer (60–78 tahun) berjumlah 15.305 orang (14,53%), dan kelompok Pre-Boomer (>79 tahun) tercatat sebanyak 1.358 orang (1,29%). Distribusi ini mencerminkan potensi besar dari generasi muda sebagai kekuatan utama dalam menentukan arah demokrasi lokal. Oleh karena itu, strategi sosialisasi dan edukasi pilkada di Kota Mojokerto perlu difokuskan pada pendekatan yang sesuai dengan karakteristik generasi muda, agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih secara nyata.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kota Mojokerto Tahun 2024 disajikan pada gambar 36.9 yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Mojokerto Tahun 2024, tercatat sebanyak 612 pemilih merupakan penyandang disabilitas dengan beragam jenis hambatan. Komposisi terbanyak berasal dari disabilitas sensorik wicara, yaitu 258 orang (42,16%), diikuti oleh disabilitas fisik sebanyak 183 orang (29,90%), dan disabilitas mental sebanyak 72 orang (11,76%). Selanjutnya, penyandang disabilitas intelektual tercatat sebanyak 38 orang (6,21%), disabilitas sensorik rungu sebanyak 35 orang (5,72%), dan disabilitas sensorik netra sebanyak 26 orang (4,25%). Data ini menegaskan pentingnya aksesibilitas dan layanan inklusif dalam setiap tahapan pilkada, mulai dari sosialisasi, penyusunan DPT, hingga pelaksanaan pemungutan suara. KPU Kota Mojokerto diharapkan dapat memberikan fasilitasi yang memadai bagi pemilih disabilitas agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan bermartabat.

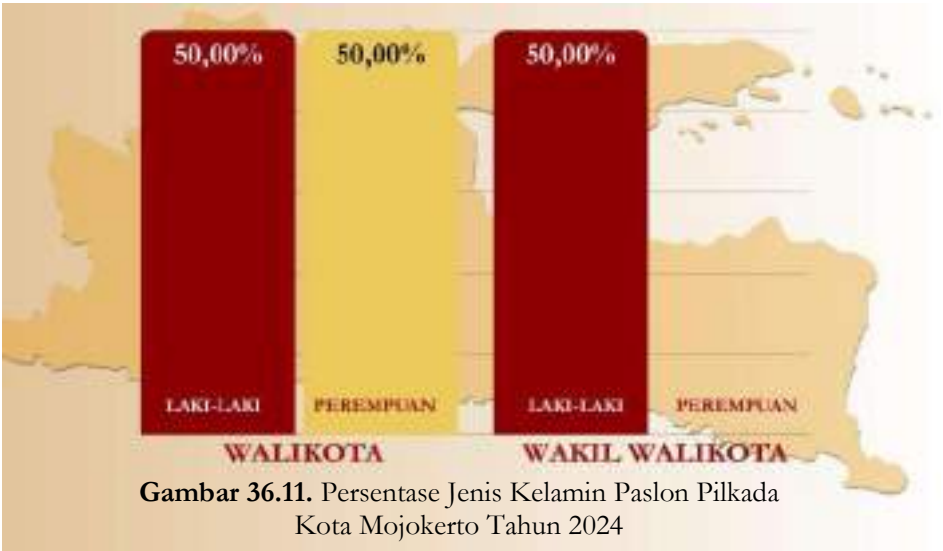
4. Pencalonan

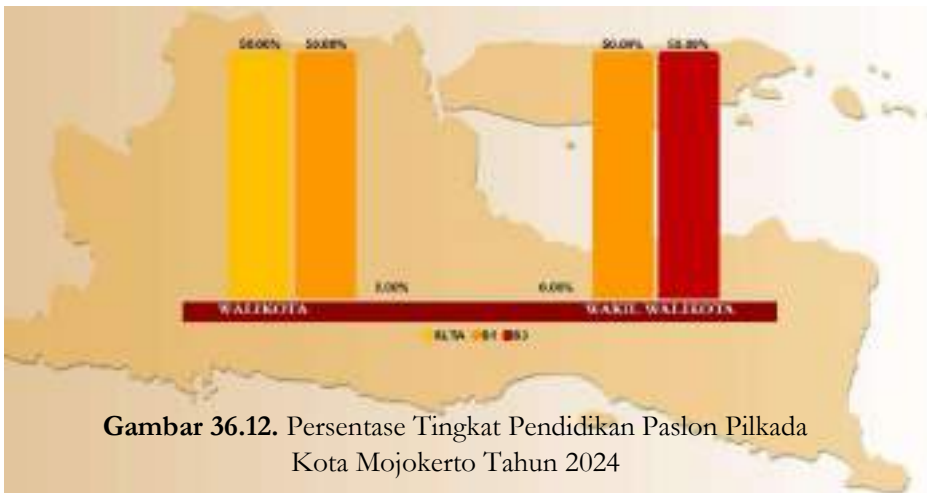
Pada tahapan pencalonan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Mojokerto, terdapat dua pasangan calon yang secara resmi mendaftar ke KPU Kota Mojokerto pada tanggal 29 Agustus 2024. Pasangan calon pertama adalah Ika Puspitasari – Dr. Rachman Sidharta Arisandi, S.IP., M.Si., dan pasangan calon kedua adalah H. Junaedi Malik, S.E. – Drs. H. Khusnun Amin. Setelah melalui proses verifikasi administrasi dan faktual, kedua pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan secara resmi sebagai peserta Pilkada 2024. Penetapan nomor urut pun dilakukan, dengan

hasil H. Junaedi Malik, S.E. dan Drs. H. Khusnun Amin sebagai Paslon Nomor Urut 1, serta Ika Puspitasari dan Dr. Rachman Sidharta Arisandi, S.IP., M.Si. sebagai Paslon Nomor Urut 2. Seluruh tahapan pencalonan tersebut berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon dan partai politik pengusung disajikan pada gambar 36.10, sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.



Komposisi jenis kelamin pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Mojokerto disajikan pada gambar 36.11, dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Mojokerto disajikan pada gambar 36.12.





Dari sisi jenis kelamin, komposisi pasangan calon menunjukkan bahwa keterwakilan laki-laki masih dominan. Tercatat dari total empat orang pasangan calon (dua calon wali kota dan dua calon wakil wali kota), sebanyak tiga orang atau 75% merupakan laki-laki, sementara hanya satu orang atau 25% merupakan perempuan. Kedua calon wali kota masing-masing terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan (50%:50%), sedangkan kedua calon wakil wali kota seluruhnya adalah laki-laki (100%).

Dari aspek tingkat pendidikan, semua pasangan calon menunjukkan latar belakang pendidikan tinggi yang baik. Sebanyak dua orang atau 50% berpendidikan Sarjana (S1), satu orang atau 25% berpendidikan SLTA, dan satu orang atau 25% lainnya telah menyelesaikan pendidikan doktoral (S3). Pada posisi calon wali kota, satu orang berpendidikan SLTA dan satu orang S1. Sedangkan pada posisi calon wakil wali kota, masing-masing satu orang berlatar belakang pendidikan S1 dan S3. Komposisi ini mencerminkan bahwa para kandidat yang maju dalam kontestasi Pilkada Kota Mojokerto memiliki latar belakang pendidikan yang relatif tinggi dan beragam.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 36.13, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



Gambar 36.13. Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kota Mojokerto Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan pemahaman menyeluruh terhadap tahapan Pilkada, KPU Kota Mojokerto telah melaksanakan berbagai metode sosialisasi selama penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan menyeluruh dengan pendekatan partisipatif kepada seluruh lapisan masyarakat.

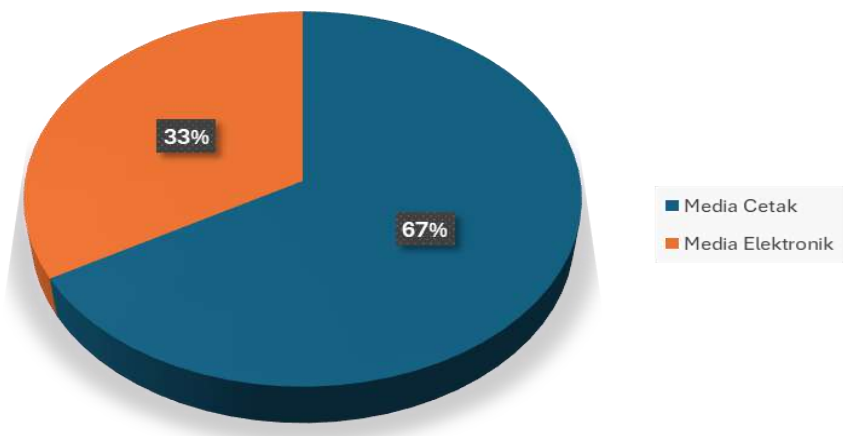
Tabel 36.1. Kegiatan Sosialisasi Pilkada Kota Mojokerto Tahun 2024

Tatap Muka	• Rapat Koordinasi • Sosialisasi PKPU terbaru • Sosialisasi Tahapan Pilkada • Sosialisasi kepada pemilih pemula, penyandang disabilitas, ormas dan berbagai elemen masyarakat lainnya • Bimbingan Teknis	Badan ad hoc KPU, organisasi masyarakat, pemilih usia 17 tahun, pemilih pemula, pemilih perempuan, disabilitas, komunitas dan berbagai elemen masyarakat lainnya
Penyuluhan	Bimtek pada TPS Lokasi Khusus	Badan ad hoc yang berada di Lokasi Khusus
Iklan	Pemasangan iklan pada media masa, media cetak dan radio	Seluruh masyarakat
Video	Live <i>streaming</i> melalui <i>podcast</i> KPU Lamongan	Seluruh masyarakat
Berita	Berupa hasil produk hukum KPU Lamongan yang sudah diunggah ke <i>Website</i>	Seluruh masyarakat
Penyebaran Brosur	Penyebaran brosur ajakan memilih dilakukan pada rangkaian Kirab Pilkada. Brosur dibagikan kepada masyarakat yang melintas di jalan-jalan yang sudah ditentukan sebagai lokasi yang strategis.	Seluruh masyarakat

Dalam pelaksanaan sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kota Mojokerto menggandeng berbagai media untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara luas dan efektif. Sebanyak empat media cetak dan dua media elektronik secara aktif terlibat dalam mendistribusikan informasi mengenai tahapan Pilkada, profil pasangan calon, serta edukasi pemilih. Media cetak mempublikasikan artikel, advertorial, dan pengumuman

resmi KPU terkait pelaksanaan Pilkada melalui surat kabar lokal yang memiliki jangkauan pembaca luas di wilayah Kota Mojokerto. Sementara itu, media elektronik seperti radio dan televisi lokal turut menayangkan iklan layanan masyarakat, siaran dialog interaktif, serta liputan langsung acara sosialisasi dan debat publik pasangan calon.

Selain itu, KPU Kota Mojokerto juga menjalin kerja sama strategis dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Mojokerto dalam pemanfaatan mobil videotron milik Pemerintah Kota Mojokerto. Mobil videotron ini dijadwalkan berkeliling ke berbagai titik strategis di Kota Mojokerto untuk menyampaikan pesan-pesan sosialisasi secara audio-visual. Upaya ini dilakukan guna memperkuat efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat yang berada di berbagai wilayah, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap media cetak dan elektronik.



Gambar 36.14. Media Terlibat Kegiatan Sosialisasi Pilkada Kota Mojokerto Tahun 2024

Maskot Pilkada Kota Mojokerto 2024 mengusung filosofi “Kota Berbudi Pekerti”, yang mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Mojokerto: beretika, sopan santun, dan menjunjung tinggi moralitas dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Maskot ini dirancang untuk menggambarkan karakter pemilih dan pemimpin yang ideal, yakni berintegritas, bijak, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang beradab.



Gambar 36.15. Maskot Pilkada Kota Mojokerto Tahun 2024

Secara visual, maskot ini diwujudkan dalam bentuk karakter yang ramah dan bersahabat, mengenakan pakaian adat khas Mojokerto yang sarat makna budaya dan kearifan lokal. Elemen simbolik seperti sarung batik khas Mojokerto, blangkon, dan jari bertinta ungu menjadi representasi partisipasi aktif masyarakat dalam Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Mojokerto 2024. Nama “Berbudi Pekerti” bukan hanya slogan, tetapi ajakan moral kepada seluruh warga Kota Mojokerto untuk terlibat dalam Pilkada dengan cara-cara yang santun, damai, tanpa hoaks, dan bebas dari politik uang. Maskot ini juga menjadi ikon dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan kampanye partisipatif yang melibatkan berbagai komunitas dan generasi. Dengan semangat “Kota Berbudi Pekerti”, diharapkan pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Mojokerto dapat berjalan dengan aman, tertib, dan berintegritas, serta menghasilkan pemimpin yang mampu membawa kota ini menuju masa depan yang lebih baik.

Dalam rangka pelaksanaan tahapan kampanye pada Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Mojokerto Tahun 2024, KPU Kota Mojokerto memberikan fasilitasi berupa Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye (BK), Iklan Kampanye di media massa, serta penyelenggaraan debat publik. Seluruh fasilitasi tersebut telah diatur dalam Berita Acara Nomor 309/PL.02.4-BA/3576/2024 tentang Perubahan Penetapan Jumlah dan Ukuran BK dan APK yang difasilitasi oleh KPU Kota Mojokerto.

Tabel 36.2. Fasilitas Kampanye oleh KPU Kota Mojokerto Tahun 2024

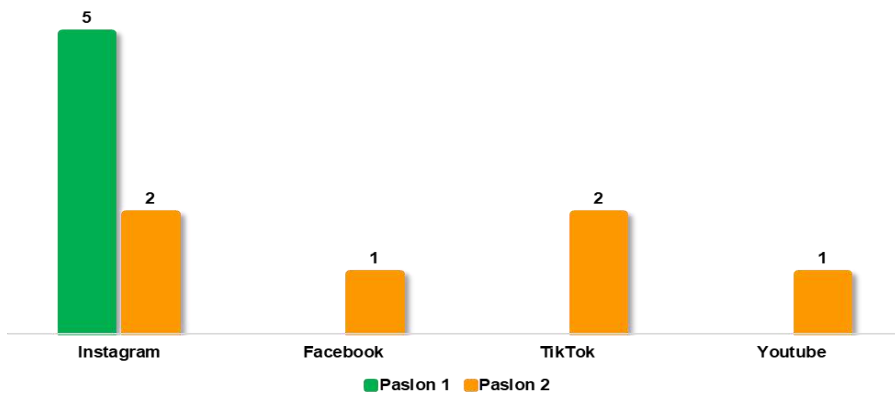
No	Jenis APK dan BK		Jumlah Per Paslon
1.	Bahan Kampanye (BK):		
	a.	Selebaran (flyer) - ukuran maksimal 9,9 cm x 21 cm - Berwarna, dua muka (4/4) - HVS minimal 80 gram	13.164 lembar
	b.	Brosur - Terbuka Ukuran maksimal 21 cm x 29,7 cm; atau - Terlipat ukuran maksimal 21 cm x 9,9 cm - Berwarna, dua muka (4/4) - HVS minimal 80 gram	13.164 lembar
	c.	Pamflet - Ukuran maksimal 21 cm x 29,7 cm - Berwarna, satu muka (4/0) - HVS minimal 80 gram	13.164 lembar
	d.	Poster - Ukuran maksimal 40 cm x 60 cm - Berwarna, satu muka (4/0) - Ivory minimal 80 gram / art paper min 120 gr	13.164 lembar
	Total Jumlah Kumulatif		52.656 lembar
2.	Alat Peraga Kampanye (APK)		
	a.	Baliho Ukuran 4 m x 7 m atau ukuran 3 m x 5 m Bahan Flexy 300 gram (digital printing) Berwarna, satu muka (4/0)	5 buah setiap pasangan calon
	b.	Spanduk Ukuran 1,5 m x 7 m atau ukuran 1m x 6 m Berwarna, satu muka (4/0) Bahan Flexy 300 gram (digital printing)	2 buah setiap pasangan calon per Kelurahan
	c.	Umbul-umbul Ukuran 1,15 m x 5 m atau ukuran 0,5 m x 4 m Berwarna, satu muka (4/0) Bahan Flexy 300 gram (digital printing)	20 buah setiap pasangan calon per Kecamatan
	d.	Billboard/Videotron Ukuran maksimal 4 m x 8 m atau sesuai dengan ketersediaan billboard/videotron.	2 buah setiap pasangan calon

Dalam aspek publikasi, KPU Kota Mojokerto juga memfasilitasi iklan kampanye melalui berbagai media. Penayangan dilakukan di media elektronik seperti JTV dan TV9, radio lokal R FM, serta media cetak seperti Bhirawa, Memorandum, Duta, memo X, Radar Mojokerto, dan Harian Bangsa. Hal ini bertujuan untuk memastikan keterjangkauan informasi kampanye kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, KPU Kota Mojokerto juga menyelenggarakan tiga kali debat publik antar pasangan calon, yang berlangsung aman dan kondusif.

Tabel 36.3. Kegiatan Debat Publik Pilkada Kota Mojokerto Tahun 2024

No	Tanggal	Waktu	Tema
1	Jumat, 25 Oktober 2024	19.00 WIB	Menyelesaikan Persoalan Daerah, Memperkokoh NKRI dan Kebangsaan
2	Kamis, 7 November 2024	19.00 WIB	Membangun Daerah, Menyerasikan Pembangunan Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan Nasional
3	Sabtu, 16 November 2024	19.00 WIB	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Meningkatkan Pelayanan Masyarakat

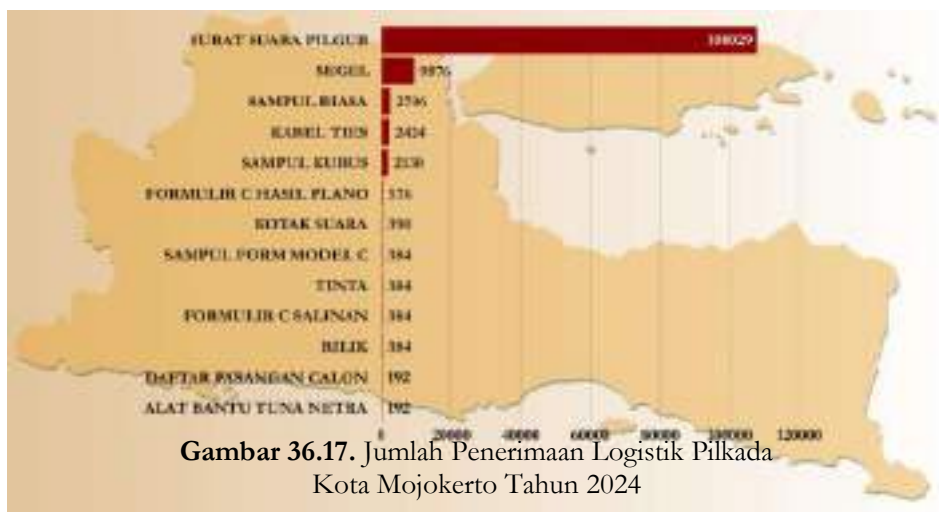
Masing-masing pasangan calon memanfaatkan berbagai platform media sosial sebagai sarana kampanye digital yang efektif dan menjangkau lebih luas segmen pemilih, khususnya generasi muda. Penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube dimanfaatkan untuk menyampaikan visi, misi, program kerja, serta aktivitas kampanye secara real-time. Strategi ini sejalan dengan perkembangan era digital dan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi melalui perangkat daring. Dengan ragam metode dan platform kampanye yang digunakan, baik melalui tatap muka, media cetak dan elektronik, maupun media sosial, diharapkan pelaksanaan kampanye Pilkada Kota Mojokerto Tahun 2024 dapat berlangsung secara demokratis, inklusif, dan partisipatif. Selain itu, pendekatan ini juga ditujukan untuk mendorong kesadaran politik masyarakat agar menggunakan hak pilihnya secara aktif dan bertanggung jawab dalam menentukan pemimpin masa depan Kota Mojokerto.



Gambar 36.16. Media Sosial Kampanye Paslon Pilkada Kota Mojokerto Tahun 2024

6. Logistik

Metode pengadaan logistik untuk Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Mojokerto Tahun 2024 dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. KPU Kota Mojokerto menggunakan dua mekanisme utama dalam proses pengadaan, yaitu metode e-purchasing dan e-purchasing konsolidasi nasional. Pengadaan secara e-purchasing dilakukan melalui Katalog Elektronik (e-katalog) yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sehingga memungkinkan proses yang lebih cepat dan terdokumentasi secara elektronik. Sementara itu, pengadaan secara e-purchasing konsolidasi nasional dilakukan untuk kebutuhan logistik tertentu yang diatur dan difasilitasi langsung oleh KPU RI guna menyatukan pembelian dalam skala nasional, sehingga dapat menekan biaya dan memastikan keseragaman kualitas logistik. Penggunaan kedua metode ini diharapkan dapat mendukung kelancaran tahapan pilkada, khususnya dalam penyediaan kotak suara, bilik suara, formulir, serta perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara lainnya. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 36.17.



Gambar 36.17. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kota Mojokerto Tahun 2024

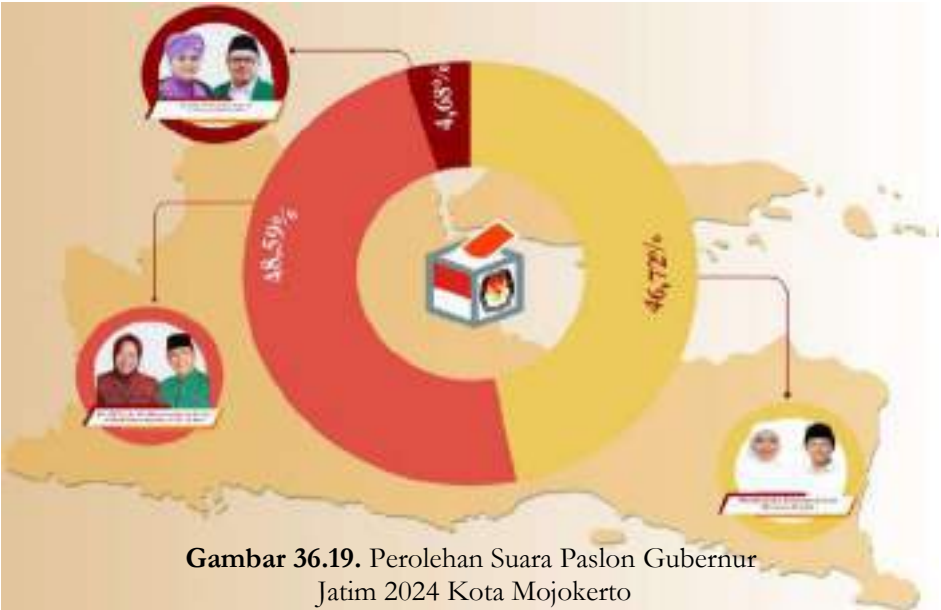
Pendistribusian logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Mojokerto dilakukan serentak bersama seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada tanggal 23 November 2024, berdasarkan instruksi KPU Provinsi Jawa Timur melalui surat Nomor 1796/PP.09.1-SD/35/2024 tentang Apel Kesiapan Distribusi Logistik Serentak.

Dalam rangka mendukung kelancaran proses pengelolaan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kota Mojokerto menetapkan petugas khusus untuk kegiatan rakit kotak suara, setting, checking, dan packing logistik. Karena keterbatasan tenaga internal, KPU juga melibatkan pihak eksternal sebanyak 4 orang, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Mojokerto Nomor 52 Tahun 2024. Jumlah total petugas yang terlibat dalam proses ini sebanyak 17 orang, terdiri dari 13 orang tenaga internal (9 laki-laki dan 4 perempuan) dan 4 orang tenaga eksternal seluruhnya laki-laki. Keterlibatan kedua unsur ini diharapkan dapat memastikan kesiapan logistik secara menyeluruh sebelum didistribusikan ke seluruh wilayah Kota Mojokerto. Secara geografis, Kota Mojokerto tidak memiliki wilayah dengan kondisi yang sulit dijangkau karena merupakan daerah perkotaan dengan cakupan wilayah yang relatif kecil dan infrastruktur yang cukup baik.

7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun

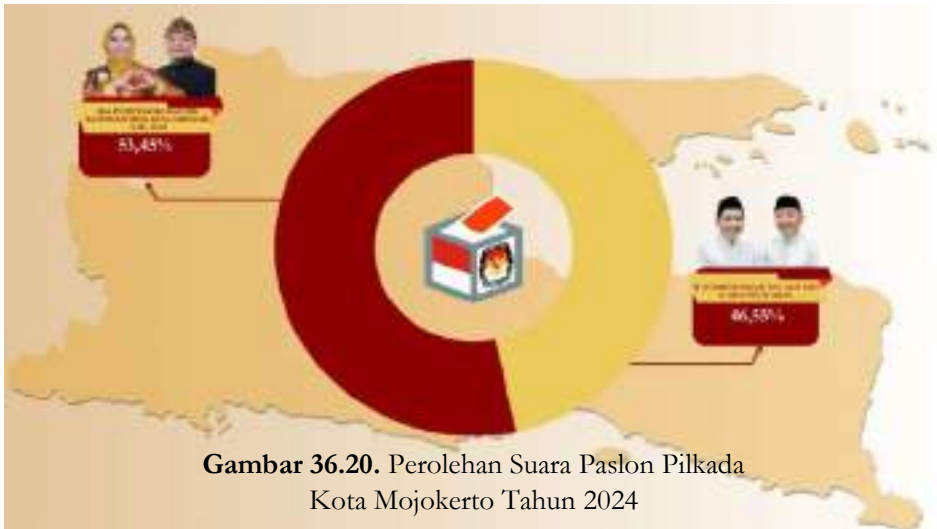
2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Mojokerto disajikan pada gambar 36.19.



Gambar 36.19. Perolehan Suara Paslon Gubernur
Jatim 2024 Kota Mojokerto

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di Kota Mojokerto, total suara sah yang berhasil dihimpun sejumlah 76.290 suara. Dari total tersebut, pasangan calon Hj. Luluk Nur Ihamidah, M.Si. – H. Lukmanul Hakim, M.Si. memperoleh 3.572 suara atau sebesar 4,68%. Pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak meraih 35.646 suara atau sebesar 46,72%. Sementara itu, pasangan Dr. (H.C.) Ir. Tri Rismaharini, M.T. – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), S.I.P., M.Kes. memperoleh suara terbanyak dengan 37.072 suara atau sebesar 48,59%. Hasil ini mencerminkan dinamika politik yang kompetitif di Kota Mojokerto dan menunjukkan tingginya partisipasi pemilih dalam menentukan pemimpin provinsi.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Mojokerto pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 36.20.



Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, pasangan calon nomor urut 1, H. Junaedi Malik, S.E. dan Drs. H. Khusnun Amin memperoleh total 34.913 suara atau sebesar 46,55%. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2, Ika Puspitasari dan Dr. Rachman Sidharta Arisandi, S.IP., M.Si. berhasil meraih 40.091 suara atau sebesar 53,45%. Dengan perolehan suara terbanyak, pasangan Ika Puspitasari – Rachman Sidharta unggul dalam pemilihan dan ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Kota Mojokerto 2024. Hasil ini mencerminkan dukungan masyarakat yang signifikan terhadap pasangan calon nomor urut 2 dalam melanjutkan kepemimpinan di Kota Mojokerto.

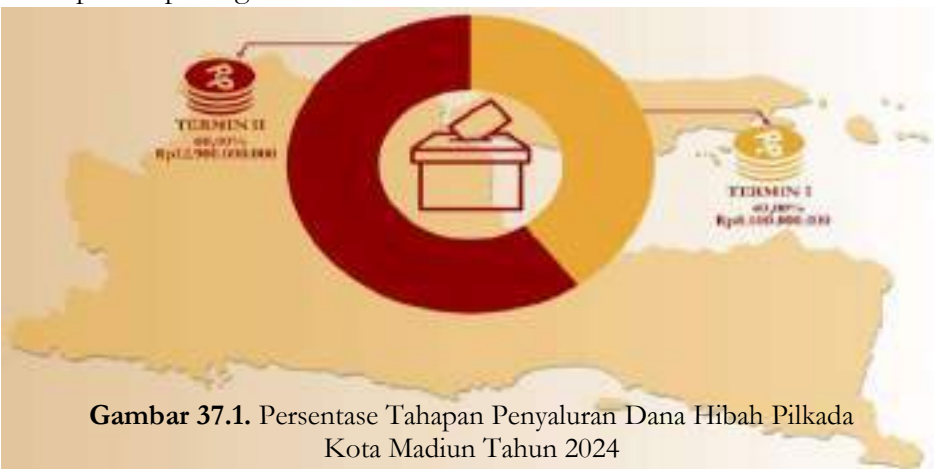
BAGIAN 37

KOTA MADIUN

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang demokratis, transparan, dan akuntabel, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik dari segi pendanaan, personel, maupun logistik. Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui perencanaan hibah yang terstruktur dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

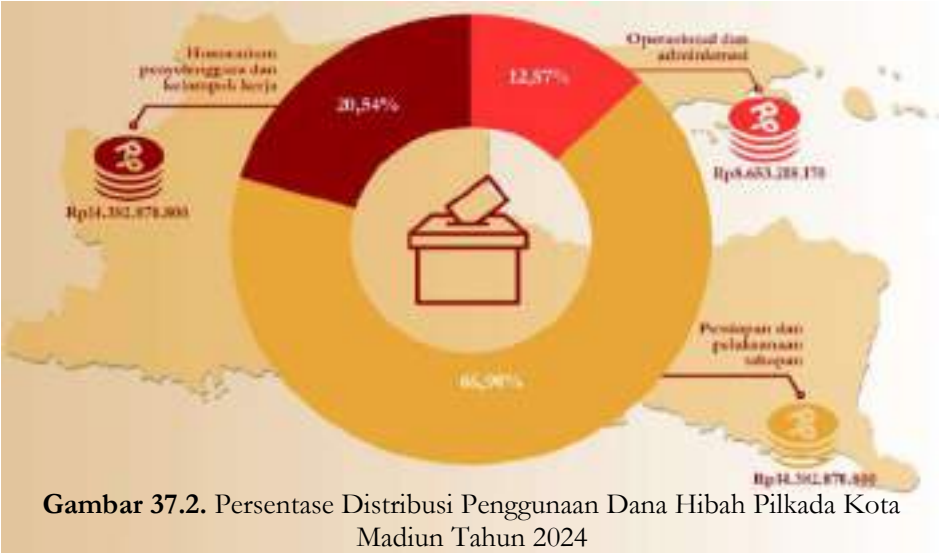
KPU Kota Madiun mengajukan permohonan hibah kepada Pemerintah Kota Madiun untuk pertama kalinya pada tanggal 8 Maret 2023. Menindaklanjuti pengajuan tersebut, dilakukan serangkaian rapat pembahasan antara KPU dan Pemerintah Kota Madiun. Berdasarkan hasil pembahasan, Pemerintah Kota Madiun menyatakan kesanggupan memberikan dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada Kota Madiun Tahun 2024 sebesar Rp. 21.500.000.000. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Anggaran Pendanaan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Madiun Tahun 2024 yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 2023. Selanjutnya, penanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilaksanakan pada tanggal 21 September 2023, bertepatan dengan kegiatan Kirab pilkada 2024 yang diselenggarakan di Kota Madiun. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 37.1 berikut.



Gambar 37.1. Persentase Tahapan Penyaluran Dana Hibah Pilkada Kota Madiun Tahun 2024

Distribusi dana pilkada kota madiun Tahun 2024 disalurkan dalam dua termin. Termin 1 sebesar Rp. 8.600.000.000 atau 40% dari total anggaran, dan Termin 2 sebesar Rp. 12.900.000.000 atau 60% dari keseluruhan nilai hibah. Skema pencairan dua tahap ini dirancang untuk menjamin efisiensi penggunaan anggaran serta memastikan ketersediaan dana yang tepat waktu sesuai kebutuhan tahapan pilkada.

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 37.2, yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah pilkada.

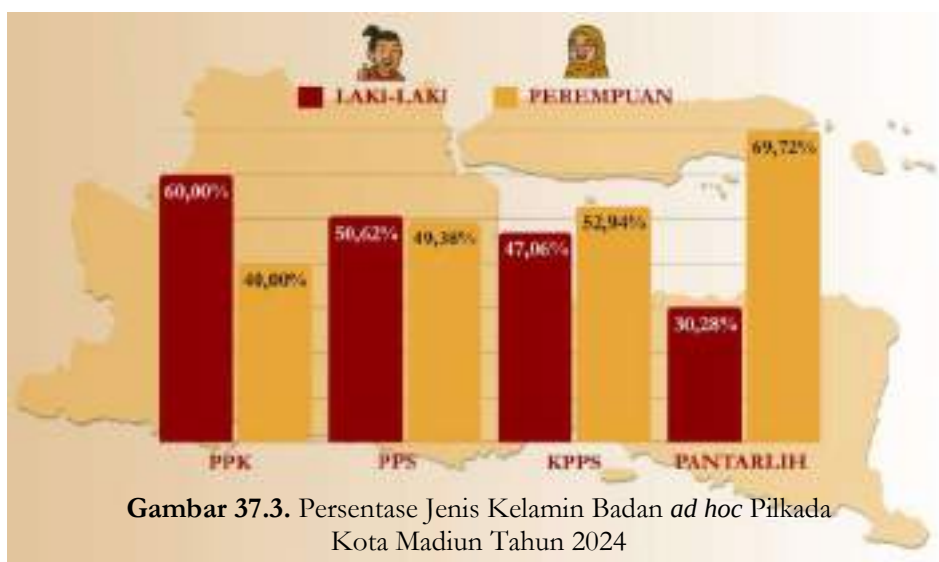


Anggaran hibah yang diterima KPU Kota Madiun untuk penyelenggaraan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024 terbagi ke dalam tiga komponen utama. Komponen terbesar dialokasikan untuk Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan sebesar Rp. 14.382.870.800 atau setara 66,90% dari total anggaran. Dana ini mencakup kebutuhan teknis dan operasional terkait pelaksanaan tahapan inti pilkada seperti logistik, sosialisasi, kampanye, dan pemungutan suara. Selanjutnya, untuk mendukung kelancaran kerja kelembagaan, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.702.029.200 atau 12,57% untuk Operasional dan Administrasi Perkantoran, termasuk pengadaan alat tulis kantor, sewa peralatan, dan kebutuhan operasional lainnya. Adapun komponen Honorarium bagi badan *ad hoc*, staf sekretariat, dan tenaga teknis lainnya memperoleh alokasi sebesar Rp. 4.415.100.000, atau 20,54% dari total anggaran hibah. Pembagian anggaran ini dirancang agar pelaksanaan pilkada berjalan efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola keuangan yang baik.

2. **Badan *Ad Hoc***

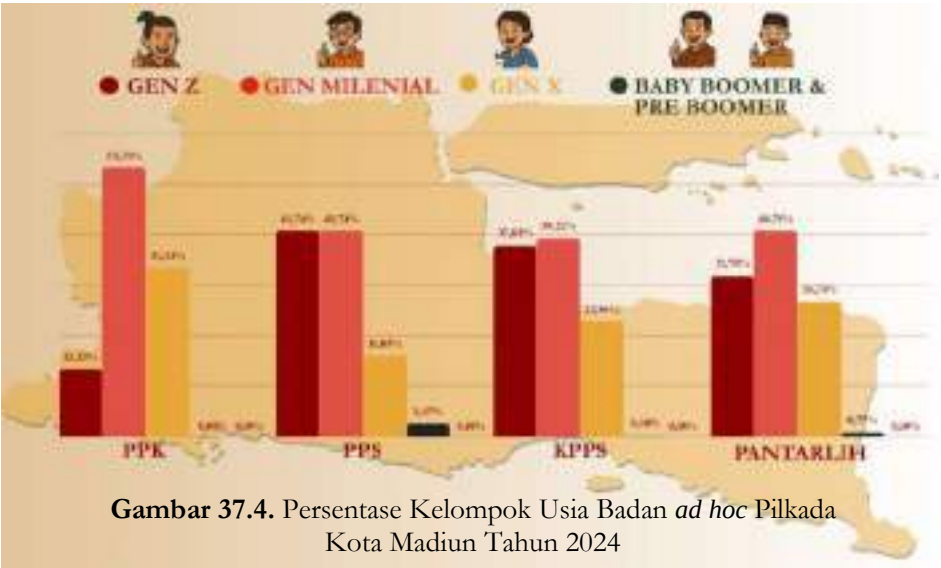
Dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun membentuk badan *ad hoc* sebagai bagian penting dari struktur penyelenggara pilkada di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga tempat pemungutan suara. Badan *ad hoc* ini memiliki peran strategis dalam menjalankan tugas-tugas teknis dan operasional pada setiap tahapan pemilihan, sekaligus memastikan proses pilkada berlangsung secara lancar, jujur, dan adil, serta bebas dari intimidasi dan kecurangan. Proses rekrutmen badan *ad hoc* dilaksanakan melalui tahapan seleksi administratif, tes tertulis berbasis komputer (CAT), dan wawancara. KPU Kota Madiun menekankan prinsip transparansi, integritas, dan kompetensi dalam setiap tahapannya.

Sosialisasi pendaftaran dilakukan secara masif melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, pengumuman publik, serta koordinasi langsung dengan Pemerintah Kota Madiun. Pendaftaran calon anggota dilakukan secara daring melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi KPU dan Badan *ad hoc* (SIKBA). Adapun jumlah badan *ad hoc* yang berhasil direkrut di Kota Madiun meliputi 15 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 81 orang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), 535 orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarli), 1.925 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan 550 orang petugas ketertiban TPS (Linmas). Seluruh anggota badan *ad hoc* ini menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tahapan pilkada dan merupakan representasi partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat daerah. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 37.3.



Sebaran demografi badan *ad hoc* penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Madiun menunjukkan keterlibatan yang cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan, bahkan pada beberapa posisi didominasi oleh perempuan. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dari total 15 anggota, terdapat 9 laki-laki (60,00%) dan 6 perempuan (40,00%). Di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), dari 81 anggota, sebanyak 41 orang (50,62%) adalah laki-laki dan 40 orang (49,38%) perempuan. Komposisi ini menunjukkan distribusi yang hampir merata antara kedua jenis kelamin. Menariknya, pada kelompok - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), keterwakilan perempuan lebih tinggi, yakni 1.019 orang (52,94%) dibandingkan laki-laki sebanyak 906 orang (47,06%) dari total 1.925 anggota. Hal serupa juga terlihat pada posisi Petugas Pemutakhiran Data Pilih (Pantarlih), di mana perempuan mendominasi dengan jumlah 373 orang (69,72%), sedangkan laki-laki sebanyak 162 orang (30,28%) dari total 535 petugas. Data ini mencerminkan bahwa peran perempuan dalam penyelenggaraan pilkada di Kota Madiun sangat signifikan dan menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan dalam ranah demokrasi lokal.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada pilkada Kota Madiun Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar berikut.

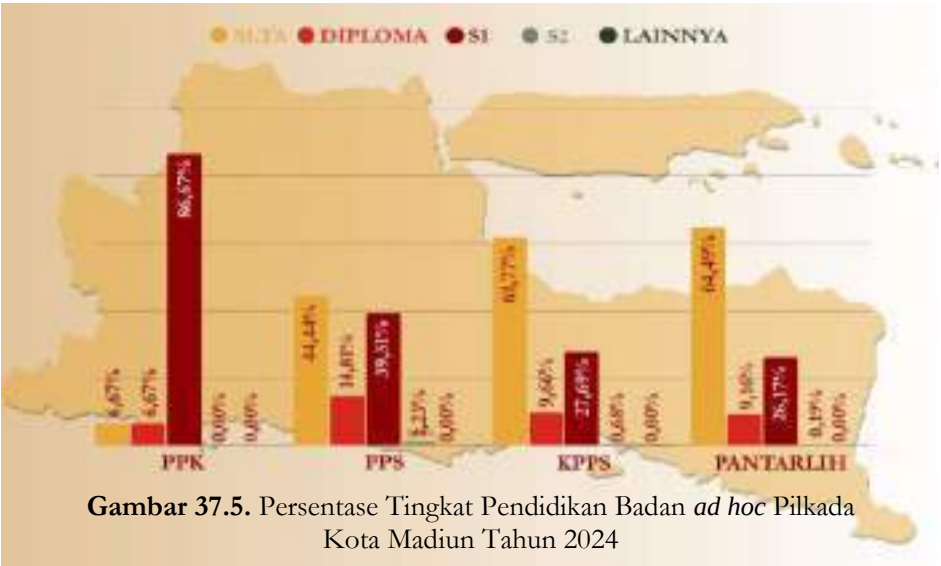


Gambar 37.4. Persentase Kelompok Usia Badan *ad hoc* Pilkada Kota Madiun Tahun 2024

Sebaran demografi badan *ad hoc* KPU Kota Madiun berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi generasi muda, khususnya Generasi Milenial dan Generasi Z, dalam struktur penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dari total 15 anggota, mayoritas berasal dari kelompok usia 28–43 tahun atau Generasi Milenial sebanyak 8 orang (53,33%), disusul oleh Generasi X (44–59 tahun) sebanyak 5 orang (33,33%), dan Generasi Z (17–27 tahun) sebanyak 2 orang (13,33%). Komposisi serupa juga terlihat di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari total 81 anggota, dengan Generasi Z dan Milenial masing-masing berjumlah 33 orang (40,74%), sementara Generasi X sebanyak 13 orang (16,05%) dan *Baby Boomer* (60–78 tahun) hanya 2 orang (2,47%). Pada kelompok Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dari total 1.925 anggota, mayoritas berasal dari Generasi Milenial sebanyak 755 orang (39,22%) dan Generasi Z sebanyak 728 orang (37,82%). Sementara itu, Generasi X tercatat sebanyak 440 orang (22,86%), dan hanya 2 orang (0,10%) berasal dari kelompok usia *Baby Boomer*. Di kelompok Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), proporsi juga didominasi oleh Generasi Milenial dengan 218 orang (40,75%) dan Generasi Z sebanyak 170 orang (31,78%), diikuti oleh Generasi X sebanyak 143 orang (26,73%)

dan *Baby Boomer* 4 orang (0,75%). Tidak terdapat anggota dari kelompok usia di atas 79 tahun (*Pre-Boomer*) pada seluruh tingkatan badan *ad hoc*. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pilkada di kota madiun turut melibatkan generasi muda secara signifikan, memperkuat peran mereka dalam proses demokratisasi di tingkat lokal.

Selanjutnya, sebaran demografi Badan *ad hoc* pada pilkada kota madiun Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 37.5.



Gambar 37.5. Persentase Tingkat Pendidikan Badan *ad hoc* Pilkada Kota Madiun Tahun 2024

Sebaran demografi badan *ad hoc* KPU Kota Madiun berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas penyelenggara pilkada berasal dari kalangan lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi, dengan dominasi pada jenjang SLTA dan Sarjana (S1). Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dari total 15 anggota, sebanyak 13 orang (86,67%) merupakan lulusan Sarjana (S1), sedangkan masing-masing satu orang (6,67%) berpendidikan Diploma dan SLTA. Di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), dari 81 anggota, mayoritas adalah lulusan SLTA sebanyak 36 orang (44,44%), disusul lulusan S1 sebanyak 32 orang (39,51%), lulusan Diploma sebanyak 12 orang (14,81%), dan 1 orang (1,23%) berpendidikan S2. Pada kelompok Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dari total 1.925 anggota, mayoritas merupakan lulusan SLTA sebanyak 1.189 orang (61,77%), kemudian 533 orang (27,69%) lulusan S1, 186 orang (9,66%) lulusan Diploma, dan sisanya terdiri dari 13 orang (0,68%) lulusan S2 serta

4 orang (0,21%) dari kategori pendidikan lainnya. Sementara itu, pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dari total 535 petugas, sebanyak 345 orang (64,49%) merupakan lulusan SLTA, 140 orang (26,17%) lulusan S1, 49 orang (9,16%) lulusan Diploma, dan hanya 1 orang (0,19%) lulusan S2. Tidak terdapat peserta dari kategori “lainnya” pada kelompok ini. Data ini menunjukkan bahwa badan *ad hoc* KPU Kota Madiun mayoritas diisi oleh lulusan SLTA dan S1, mencerminkan keterlibatan masyarakat dengan latar belakang pendidikan menengah hingga tinggi dalam pelaksanaan pilkada.

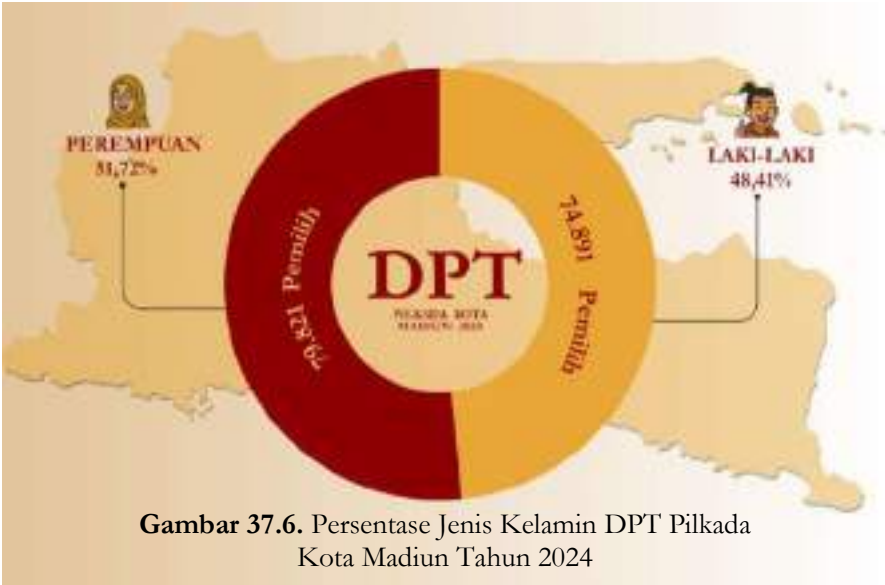
Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang inklusif, KPU Kota Madiun juga memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk berperan aktif sebagai bagian dari badan *ad hoc*. Tercatat terdapat 1 orang laki-laki penyandang disabilitas yang terlibat sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Keterlibatan ini mencerminkan komitmen KPU terhadap prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, serta menjadi langkah nyata dalam mendorong partisipasi penuh semua elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam proses demokrasi lokal.

3. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data pemilih selalu menjadi salah satu tahapan krusial dalam setiap pelaksanaan pemilihan, termasuk pada pilkada Kota Madiun Tahun 2024. Tahapan ini memiliki keterkaitan erat dengan pengadaan logistik dan penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga pengelolaannya memerlukan proses yang cermat dan melewati berbagai dinamika teknis serta administratif. Proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dimulai dengan penerimaan data sinkronisasi dari KPU RI sejumlah 153.692 pemilih. Data ini kemudian digunakan sebagai dasar pemetaan TPS, dengan ketentuan bahwa satu TPS maksimal melayani 600 pemilih. Berdasarkan hasil pemetaan, pada tanggal 30 Mei 2024, KPU Kota Madiun menetapkan sebanyak 271 TPS reguler.

Tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dengan membawa dokumen daftar pemilih dari 271 TPS tersebut. Dalam pelaksanaannya, coklit tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga memanfaatkan aplikasi *e-Coklit* sebagai alat bantu pencatatan elektronik. Pantarlih mencocokkan elemen data pemilih dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh masing-masing pemilih secara langsung di lapangan.

KPU Kota Madiun juga menjalin koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk memastikan hak pilih warga binaan dapat difasilitasi. Hasil koordinasi menetapkan sebanyak 4 TPS lokasi khusus, yang terdiri atas 2 TPS di Lapas Kelas I dan 2 TPS di Lapas Pemuda. Setelah tahapan coklit selesai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyusun rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kota Madiun sejumlah 154.959 pemilih. Tahapan selanjutnya adalah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan dengan mempertimbangkan hasil coklit serta tanggapan masyarakat. Pada tanggal 20 September 2024, ditetapkan DPT sebanyak 154.712 pemilih. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 37.6.



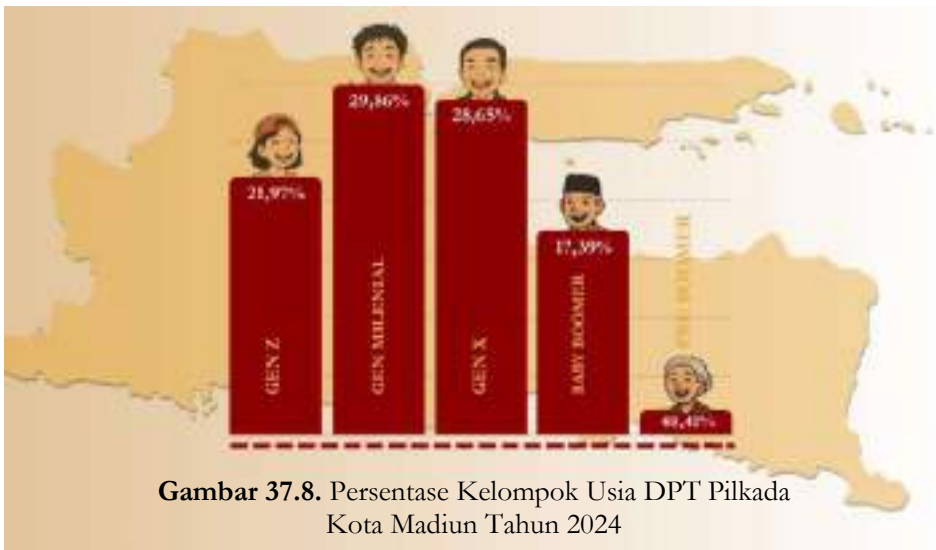
Gambar 37.6. Persentase Jenis Kelamin DPT Pilkada Kota Madiun Tahun 2024

Sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Madiun Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah pemilih perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dari total 154.712 pemilih, sebanyak 74.891 orang (48,41%) merupakan pemilih laki-laki, sedangkan 79.821 orang (51,59%) merupakan pemilih perempuan. Komposisi ini mencerminkan dominasi tipis pemilih perempuan dalam struktur demografi pemilih Kota Madiun, yang perlu menjadi perhatian dalam strategi sosialisasi, penyediaan fasilitas pemungutan suara, serta pendekatan partisipatif yang sensitif terhadap gender.

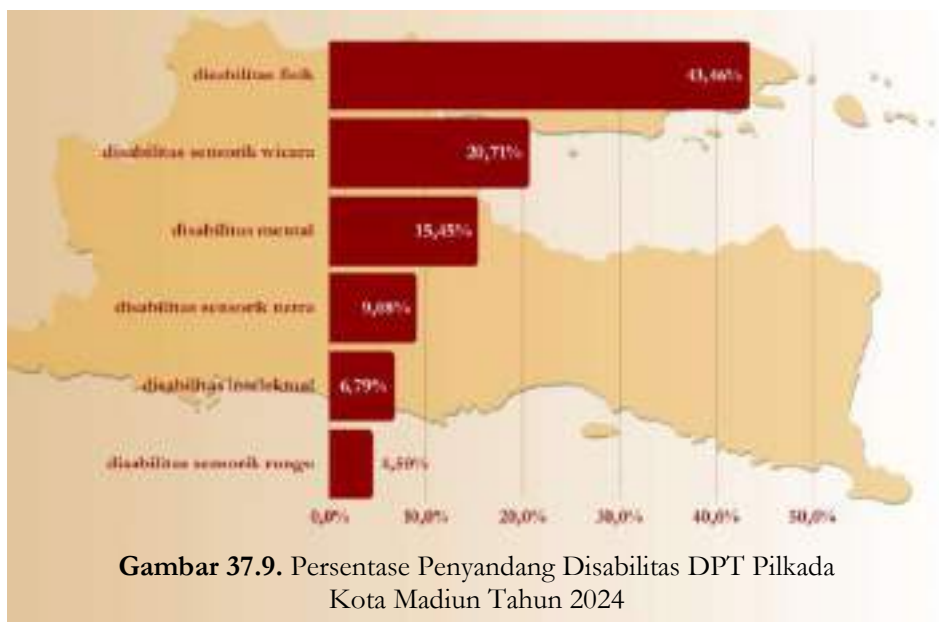
Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni pemilih pemula. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 37.7 berikut.



Berdasarkan status pemilih, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Madiun Tahun 2024 menunjukkan bahwa mayoritas pemilih tergolong dalam kategori non pemula. Dari total 154.712 pemilih, sebanyak 12.466 orang (8,06%) merupakan pemilih pemula, yaitu mereka yang baru pertama kali menggunakan hak pilih. Pemilih pemula didominasi oleh laki-laki sebanyak 11.231 orang (90,09%), sedangkan perempuan hanya 1.235 orang (9,91%). Komposisi ini penting untuk dijadikan pertimbangan dalam penyusunan strategi sosialisasi, pendidikan pemilih, serta pelibatan kelompok usia muda dalam demokrasi lokal. Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 37.8.



Sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Madiun Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi dari generasi muda dan produktif. Dari total 154.712 pemilih, mayoritas berasal dari kelompok Generasi Milenial (usia 28–43 tahun) sebanyak 46.198 orang (29,86%), disusul oleh Generasi X (usia 44–59 tahun) sebanyak 44.325 orang (28,65%), dan Generasi Z (usia 17–27 tahun) sebanyak 33.990 orang (21,97%). Sementara itu, kelompok usia *Baby Boomer* (60–78 tahun) tercatat sebanyak 26.904 orang (17,39%), dan *Pre-Boomer* (usia di atas 79 tahun) sebanyak 3.295 orang (2,13%). Komposisi ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah pemilih berasal dari kelompok usia muda dan produktif, yang berpotensi besar dalam menentukan arah demokrasi lokal. Oleh karena itu, strategi partisipasi dan sosialisasi perlu disesuaikan dengan karakteristik generasi tersebut untuk meningkatkan keterlibatan aktif mereka dalam pilkada. Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kota Madiun Tahun 2024 disajikan pada gambar 37.8, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada pilkada serentak tahun 2024.



KPU Kota Madiun turut memastikan hak pilih kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, dalam Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024. Tercatat sebanyak 1.178 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan penyandang disabilitas, dengan beragam jenis kebutuhan khusus. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan penyandang disabilitas fisik sebanyak 512 orang (43,46%), disusul oleh disabilitas sensorik wicara sebanyak 244 orang (20,71%), dan disabilitas mental sebanyak 182 orang (15,45%). Selain itu, terdapat 107 orang (9,08%) penyandang disabilitas sensorik netra, 80 orang (6,79%) penyandang disabilitas intelektual, serta 53 orang (4,50%) penyandang disabilitas sensorik rungu. Data ini menjadi landasan penting bagi KPU dalam merancang kebijakan yang inklusif, termasuk penyediaan aksesibilitas di TPS, pendampingan, serta pelatihan petugas KPPS agar mampu melayani pemilih disabilitas secara ramah dan setara.

4. Pencalonan

Pada tahapan pencalonan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Madiun Tahun 2024, sebanyak tiga bakal pasangan calon (paslon) mendaftar ke KPU Kota Madiun melalui jalur dukungan partai politik. Seluruh bakal paslon telah menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan secara fisik maupun digital melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Setelah melalui proses verifikasi

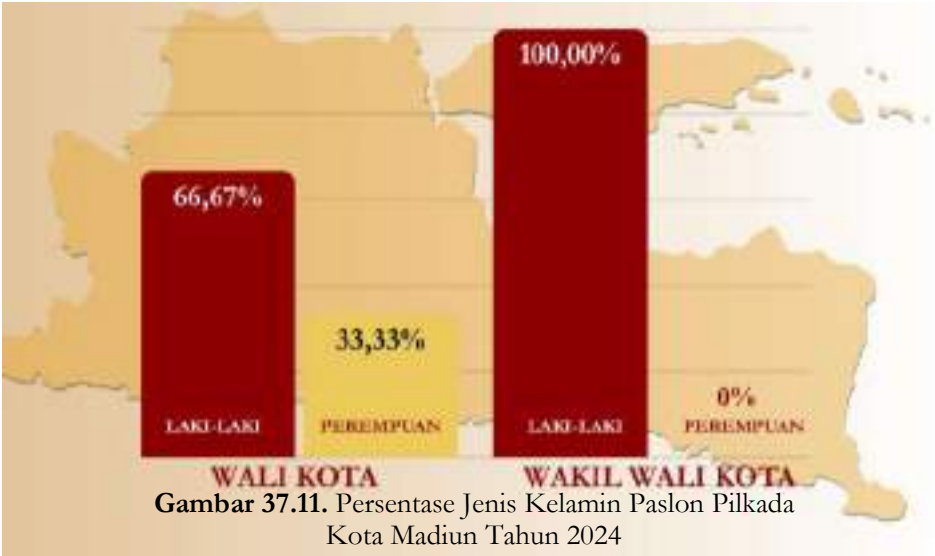
administrasi dan masa perbaikan dokumen, KPU Kota Madiun menyatakan bahwa ketiga bakal paslon memenuhi syarat pencalonan dan dinyatakan sah sebagai peserta pilkada 2024.

Setelah penetapan pasangan calon, KPU Kota Madiun menyelenggarakan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pada tanggal 23 September 2024. Nomor urut yang diperoleh masing-masing pasangan calon kemudian digunakan sebagai identitas resmi selama masa kampanye hingga pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Bagi masing-masing paslon, nomor urut tidak hanya berfungsi sebagai penanda administratif, tetapi juga dimaknai sebagai simbol perjuangan dan strategi kampanye yang membedakan satu dengan yang lain. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon dan partai politik pengusung disajikan pada gambar 37.10 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.

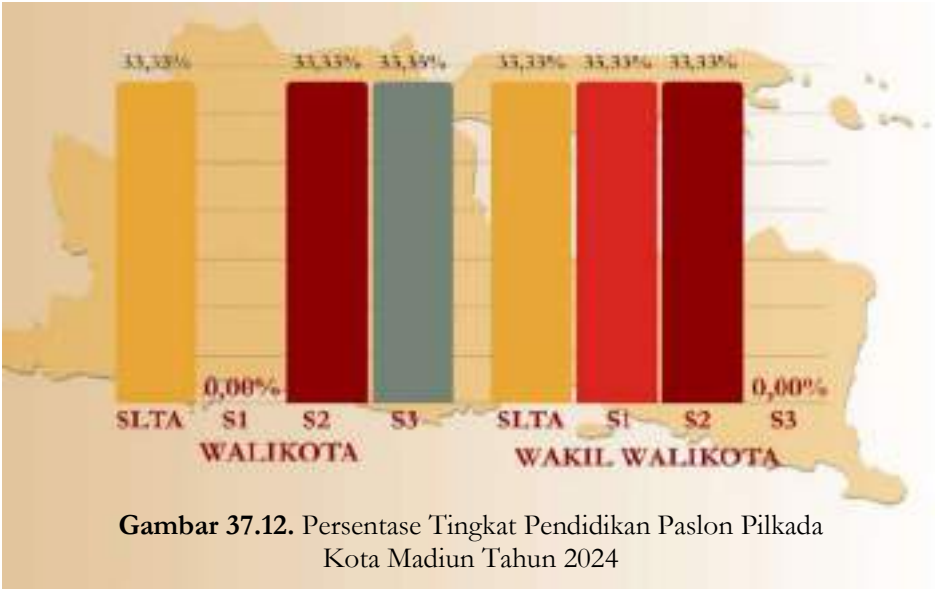


Gambar 37.10. Daftar Nama Paslon Pilkada Kota Madiun Tahun 2024

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Madiun disajikan pada gambar 37.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Madiun disajikan pada gambar 37.12.



Gambar 37.11. Persentase Jenis Kelamin Paslon Pilkada Kota Madiun Tahun 2024



Gambar 37.12. Persentase Tingkat Pendidikan Paslon Pilkada Kota Madiun Tahun 2024

Komposisi demografis pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Madiun Tahun 2024 menunjukkan bahwa keterwakilan laki-laki masih mendominasi kontestasi politik lokal. Dari total 6 orang calon yang terdiri atas 3 calon Wali kota dan 3 calon Wakil Wali kota, terdapat 5 orang laki-laki (83,33%) dan hanya 1 orang perempuan (16,67%). Jika dirinci berdasarkan posisi, dari 3 calon Wali kota, terdapat 2 laki-laki (66,67%) dan 1 perempuan (33,33%), sementara seluruh calon Wakil Wali kota berjumlah 3 orang laki-laki (100%) tanpa keterwakilan perempuan.

5. Sosialisasi dan Kampanye

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Madiun Tahun 2024, KPU Kota Madiun menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang menysasar beragam segmen masyarakat. Sosialisasi ini dirancang secara inovatif dan kolaboratif agar informasi terkait proses pemilihan dapat tersampaikan secara jelas, mudah dipahami, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Beragam metode digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi, antara lain tatap muka, dialog interaktif, simulasi, kuis, penyebaran informasi melalui media massa dan media visual, serta sosialisasi berbasis teknologi. Beberapa kegiatan unggulan yang dilaksanakan antara lain *launching* tahapan pilkada, jalan sehat demokrasi, kirab maskot pilkada, sosialisasi untuk pemilih perempuan, simulasi pemungutan dan penghitungan suara, doa bersama lintas agama, sosialisasi keliling, dan siaran melalui lembaga penyiaran.

KPU Kota Madiun menetapkan minimal 50 peserta untuk setiap kegiatan sosialisasi sebagai bentuk standarisasi keterjangkauan informasi kepada publik. Target peserta ini ditujukan agar pesan sosialisasi dapat merata menjangkau seluruh kelompok usia dan latar belakang masyarakat. Selain itu, dalam upaya memperluas jangkauan informasi, KPU Kota Madiun menggandeng sebanyak 35 media massa, yang terdiri atas media cetak, media elektronik, dan media digital, untuk mendukung publikasi dan distribusi informasi di setiap tahapan penyelenggaraan pilkada. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi menyeluruh untuk memastikan tingginya partisipasi pemilih dan terselenggaranya pilkada yang demokratis, partisipatif, dan inklusif di Kota Madiun.

Sebagai bentuk penguatan identitas lokal dan sarana edukasi pemilih yang kreatif, KPU Kota Madiun memperkenalkan maskot pilkada 2024 yang diberi nama Kang Omah Demokrasi. Nama ini merupakan akronim dari "Kang" yang berarti "Kakang" – panggilan khas masyarakat Madiun untuk saudara laki-laki atau kakak – dan "Omah" yang berarti rumah. Filosofi ini merepresentasikan bahwa KPU Kota Madiun adalah “Rumah Demokrasi”, tempat bernaungnya seluruh proses demokrasi yang inklusif dan partisipatif bagi masyarakat Kota Madiun.



Gambar 37.14. Maskot Pilkada Kota Madiun Tahun 2024

Secara visual, maskot Kang Omah Demokrasi digambarkan dalam bentuk gunung, simbol yang dikenal dalam budaya pewayangan Jawa. Gunung diartikan sebagai rumah besar yang menaungi berbagai unsur kehidupan, yang dalam konteks Pilkada menggambarkan keberagaman karakteristik masyarakat sebagai penghuni demokrasi. Ornamen-ornamen yang terdapat di dalam gunung menggambarkan keragaman latar belakang pemilih yang semuanya memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam menentukan arah masa depan daerahnya melalui pilkada. Dengan maskot ini, KPU Kota Madiun tidak hanya mengangkat nilai budaya lokal, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa demokrasi adalah rumah bersama bagi seluruh warga kota.

Tahapan kampanye pada Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Madiun Tahun 2024. Kampanye menjadi wadah bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja mereka kepada masyarakat secara langsung dan terbuka. Dalam pelaksanaannya, KPU Kota Madiun bertanggung jawab atas penyusunan jadwal kampanye, penetapan lokasi kampanye, serta fasilitasi alat peraga kampanye (APK) dan iklan kampanye, dengan mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh KPU RI. Selain itu, KPU Kota Madiun menjalin koordinasi erat dengan Bawaslu Kota Madiun untuk memastikan seluruh aktivitas kampanye berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan asas keadilan pilkada. Sebagai simbol komitmen terhadap pilkada yang damai dan berintegritas, KPU Kota Madiun menyelenggarakan Deklarasi Kampanye Damai yang diikuti oleh seluruh pasangan calon dan tim kampanye, serta disaksikan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perwakilan

organisasi masyarakat. Ketika memasuki masa tenang, KPU Kota Madiun bersama tim kampanye pasangan calon, badan *ad hoc*, dan Pemerintah Kota Madiun, melakukan pembersihan seluruh APK yang tersebar di wilayah kota sebagai bagian dari penegakan aturan kampanye.

Dalam rangka memastikan kesetaraan akses informasi bagi pemilih, KPU Kota Madiun memfasilitasi berbagai metode kampanye, termasuk penyediaan Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye, Iklan Kampanye di media massa, Deklarasi Kampanye Damai, serta Debat Publik Pasangan Calon. Debat publik diselenggarakan sebanyak dua kali, yaitu pada 16 Oktober 2024 dan 20 November 2024, dengan tema yang mencakup isu-isu krusial seperti ekonomi, lingkungan, sosial, hukum, dan tata kelola pemerintahan. Melalui debat ini, masyarakat diberikan ruang untuk menilai kualitas gagasan dan visi calon pemimpinnya secara langsung, sehingga dapat menjadi pemilih yang rasional dan cerdas.

Tabel 37.1. Fasilitasi APK dan BK oleh KPU Kota Madiun Tahun 2024

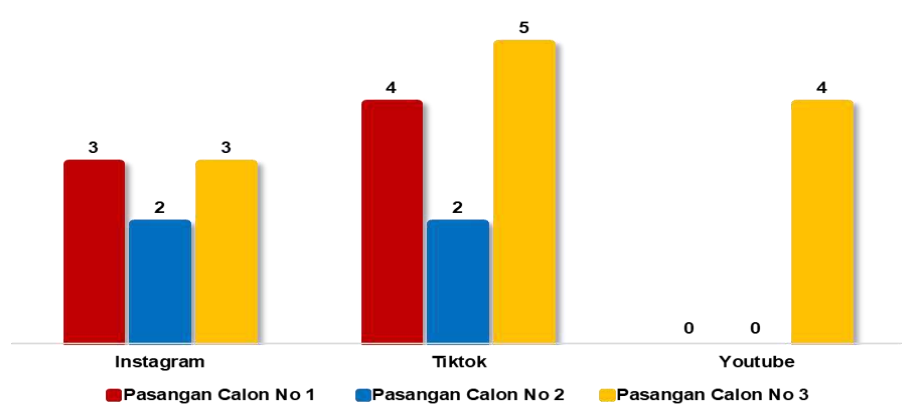
No	Jenis	Ukuran	Jumlah Per Paslon
1	Baliho	4x3	3
2	Videotron	4x6	1
3	Umbul-Umbul	0,80x5	60
4	Spanduk	1,5x5	27
5	Brosur/Leaflet	21x29,7	51.570
6	Poster	40x60	51.570

Tabel 37.2. Fasilitasi Iklan Kampanye oleh KPU Kota Madiun Tahun 2024

No	Jenis Media	Jumlah
1	Cetak	2
2	Elektronik	6

Media sosial menjadi salah satu sarana strategis dalam menyampaikan visi, misi, dan program kerja secara lebih cepat, luas, dan interaktif, terutama untuk menjangkau pemilih dari kalangan muda dan pengguna aktif internet. Setiap pasangan calon memiliki akun media sosial di berbagai *platform* seperti *Instagram*, *Facebook*, *TikTok*, dan *YouTube*, yang dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi kampanye, agenda kegiatan, hingga dokumentasi interaksi langsung dengan masyarakat. Keberadaan akun-akun ini juga

menjadi indikator transparansi dan kedekatan paslon terhadap pemilih, sekaligus menjadi bagian dari transformasi digital dalam proses demokrasi lokal. gambar memperlihatkan komitmen masing-masing paslon dalam memanfaatkan media sosial secara aktif sebagai bagian dari strategi kampanye yang adaptif dan modern.



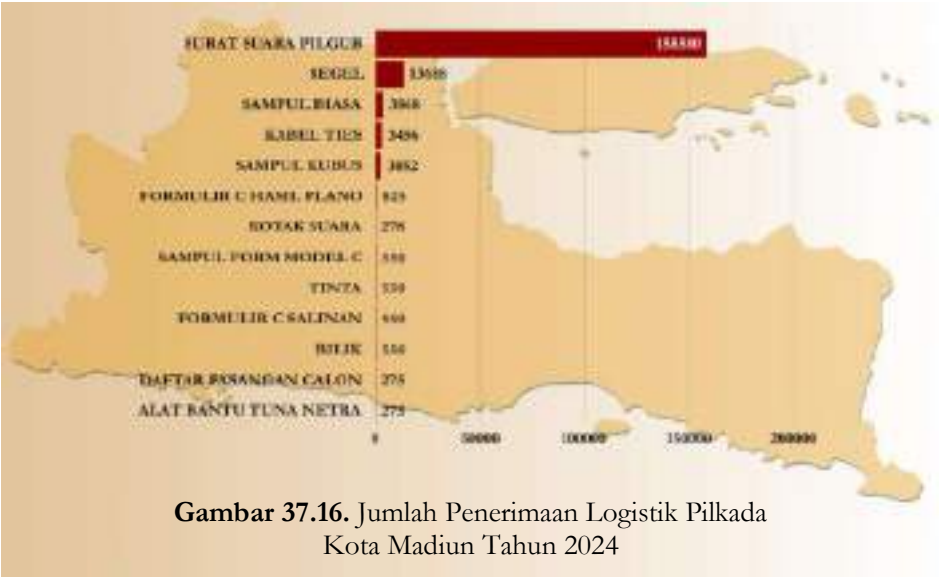
Gambar 37.15. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kota Madiun Tahun 2024

6. Logistik

Penyediaan logistik merupakan salah satu aspek paling krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024. KPU Kota Madiun melaksanakan pengelolaan logistik dengan berpedoman pada prinsip 6T: tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya. Perencanaan kebutuhan logistik dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa tidak ada kekurangan maupun kelebihan dalam pengadaan, baik dari segi jumlah maupun jenis logistik yang dibutuhkan.

Proses pengadaan logistik dibagi menjadi dua tahap. Tahap I diperuntukkan bagi logistik yang tidak memuat identitas pasangan calon, seperti kotak suara, bilik suara, tinta, dan alat bantu disabilitas. Sementara itu, Tahap II ditujukan untuk logistik yang memuat identitas pasangan calon, seperti surat suara dan formulir model C. Untuk menjamin prinsip efisiensi biaya, pengadaan logistik dilakukan melalui mekanisme Katalog Sektoral dan konsolidasi pengadaan antarwilayah guna memperoleh harga terbaik dan penyedia yang kompetitif. Pengadaan logistik yang tidak tersedia dalam katalog sektoral dilakukan melalui metode Pengadaan Langsung, dengan tetap mematuhi asas efektif, efisien, dan

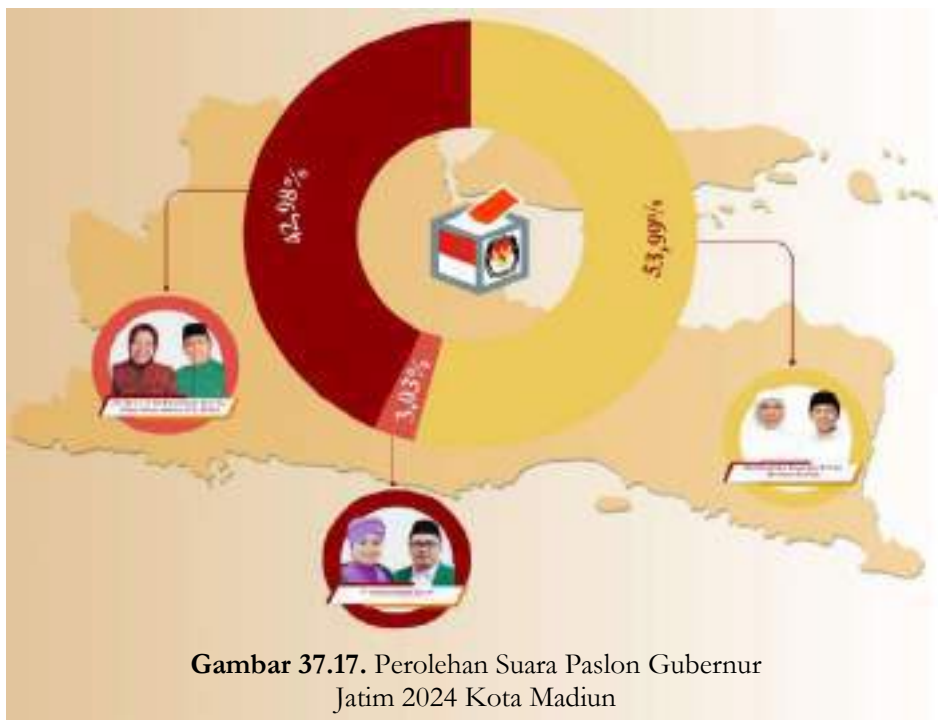
akuntabel. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 37.16.



Kondisi geografis Kota Madiun yang relatif mudah dijangkau mendukung distribusi logistik yang lancar tanpa kendala berarti. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, KPU Kota Madiun juga menggunakan Sistem Informasi Logistik (Silog), yaitu aplikasi berbasis daring yang memungkinkan masyarakat untuk memantau kebutuhan logistik di setiap daerah, termasuk jumlah perlengkapan di TPS, surat suara, hingga jadwal produksi dan distribusi logistik oleh KPU.

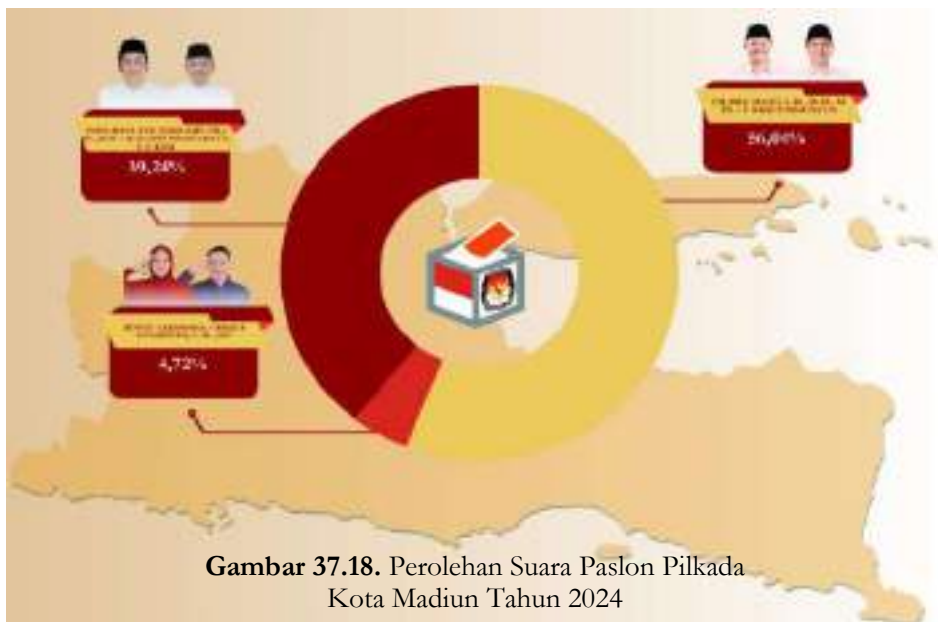
7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Madiun disajikan pada gambar 37.17.



Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di Kota Madiun, pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak memperoleh suara terbanyak dengan total 62.705 suara atau sebesar 53,99% dari total suara sah. Pasangan ini unggul cukup signifikan dari pasangan Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) yang meraih 49.921 suara (42,98%). Sementara itu, pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah – H. Lukmanul Khakim memperoleh suara paling sedikit, yakni 3.525 suara (3,03%). Secara keseluruhan, total suara sah yang masuk pada pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur di Kota Madiun berjumlah 116.151 suara. Hasil ini mencerminkan tingkat partisipasi dan preferensi politik masyarakat Kota Madiun terhadap kepemimpinan provinsi yang akan datang.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Madiun pada pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 37.18.



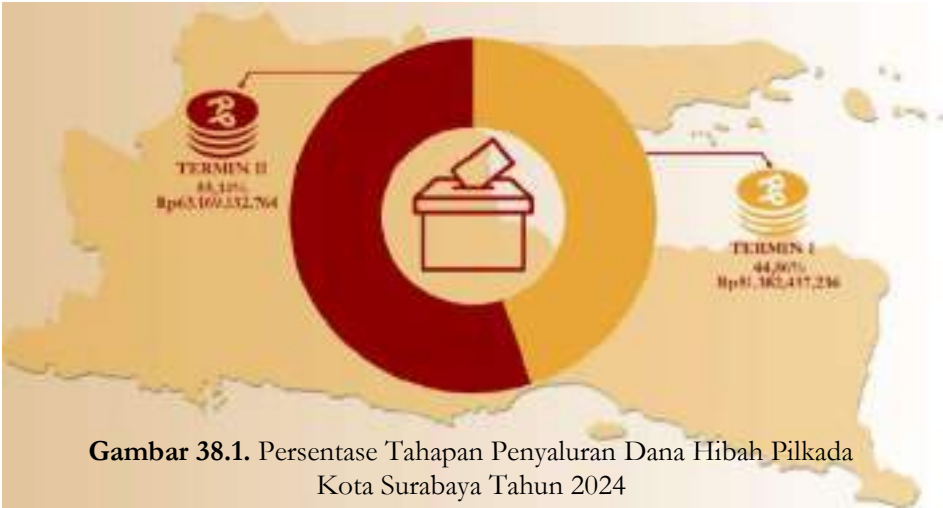
Pada Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Madiun Tahun 2024, pasangan Dr. Drs. Maidi, S.H., M.M., M.Pd dan F. Bagus Panuntun meraih suara terbanyak dengan perolehan sebesar 65.583 suara atau 56,04% dari total suara sah. Pasangan ini unggul atas pasangan Bonie Laksmana dan Bagus Rizki Dinarwan, S.Si., MT, yang menempati posisi kedua dengan total 45.923 suara (39,24%). Sementara itu, pasangan Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE., MIB dan Aldi Dwi Prastianto, S.Ikom memperoleh 5.522 suara atau 4,72% dari total suara sah. Hasil ini menunjukkan dominasi dukungan masyarakat terhadap pasangan Maidi–Panuntun, sekaligus mencerminkan dinamika preferensi politik pemilih Kota Madiun dalam menentukan kepemimpinan daerah lima tahun ke depan.

KOTA SURABAYA

1. Perencanaan Program dan Anggaran

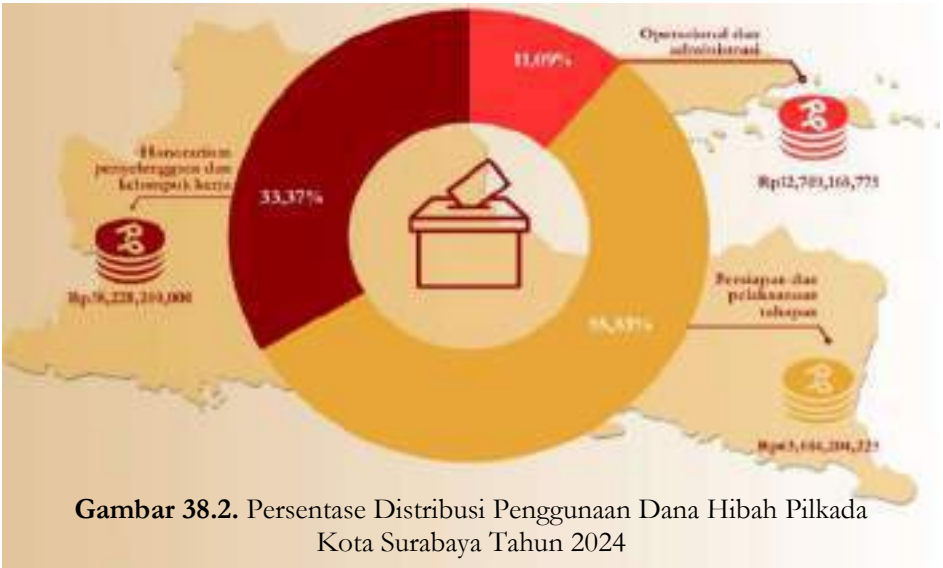
Pelaksanaan Pemilihan Serentak (pilkada) Tahun 2024 di Kota Surabaya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya serta APBD Provinsi Jawa Timur. Proses pengajuan dan pembahasan anggaran hibah dimulai sejak tahun 2022, melibatkan berbagai pihak seperti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), dan KPU Kota Surabaya. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang resmi ditandatangani pada 10 November 2023 oleh Wali kota Surabaya dan Ketua KPU Kota Surabaya.

Nilai total dana hibah yang disepakati untuk mendukung seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada di Kota Surabaya adalah sebesar Rp. 114.551.570.000. Sesuai dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2021, dana hibah dicairkan dalam dua termin, yakni 40% pada tahun anggaran 2023 dan 60% pada tahun 2024. Ketentuan ini berlaku untuk mendukung pelaksanaan tahapan pilkada yang direncanakan berlangsung selama 12 bulan, dan dapat diperpanjang apabila terjadi sengketa hasil sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024. Alokasi penggunaan anggaran tersebut disusun berdasarkan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) yang mengacu pada Keputusan KPU Nomor 543 Tahun 2022. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 38.1 berikut.



Distribusi dana Pilkada Kota Surabaya Tahun 2024 disalurkan dalam dua termin. Termin pertama dicairkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 51.382.437.236 atau setara dengan 44,86% dari total nilai hibah. Selanjutnya, termin kedua dicairkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 63.169.132.764 atau 55,14% dari total anggaran. Skema pencairan dua tahap ini dirancang untuk menjamin ketersediaan anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan tahapan pemilihan yang berlangsung selama 12 bulan, dengan tetap memperhatikan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 38.2 yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah pilkada.



Anggaran hibah pilkada Kota Surabaya Tahun 2024 terbagi ke dalam tiga komponen utama. Komponen terbesar dialokasikan untuk Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan sebesar Rp. 63.614.204.225 atau 55,53% dari total anggaran. Dana ini digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan inti dalam penyelenggaraan pemilihan, mulai dari perencanaan teknis, pembentukan badan *ad hoc*, pemutakhiran data pemilih, kampanye, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya, sebesar Rp. 12.709.165.775 atau 11,09% dialokasikan untuk Operasional dan Administrasi Perkantoran, mencakup kebutuhan logistik non-pilkada, sewa fasilitas, perlengkapan kantor, dan biaya dukungan kelembagaan. Sementara itu, komponen Honorarium bagi penyelenggara *ad hoc* seperti PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih mendapatkan alokasi sebesar Rp. 38.228.200.000 atau 33,37% dari total hibah. Pembagian anggaran ini mencerminkan fokus KPU Kota Surabaya dalam memastikan tahapan pilkada berjalan lancar, profesional, dan akuntabel melalui dukungan pembiayaan yang proporsional dan berbasis kebutuhan.

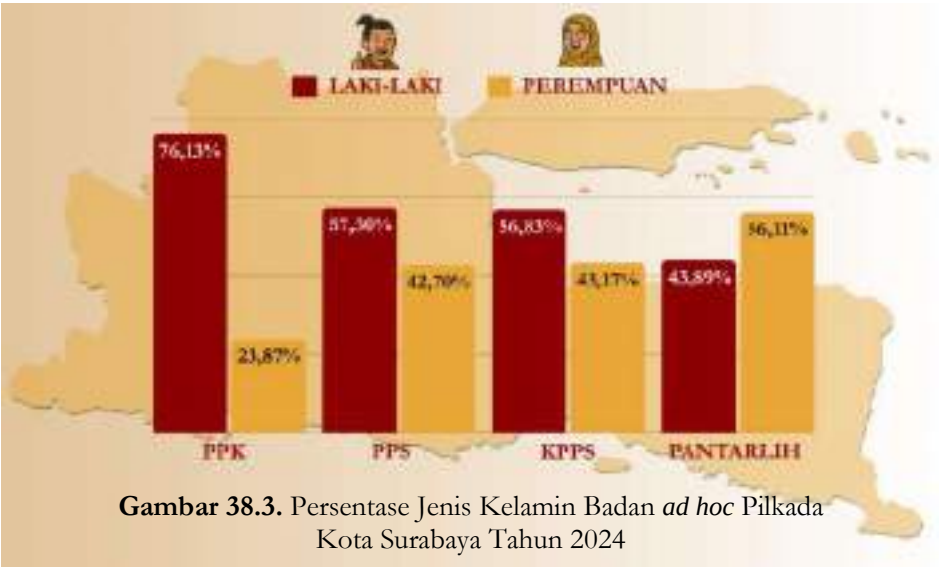
2. Badan Ad Hoc

Sebagai kota metropolitan dan ibukota Provinsi Jawa Timur, Surabaya memiliki cakupan wilayah administratif yang luas, terdiri dari 31 kecamatan dan 153 kelurahan. Luasnya wilayah dan tingginya jumlah pemilih menjadikan kebutuhan akan badan dalam penyelenggaraan pilkada 2024 sangat besar. KPU Kota Surabaya membentuk 155 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 459 orang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk mendukung pelaksanaan tahapan pilkada di tingkat kecamatan dan kelurahan. Peran PPK sangat strategis karena menjadi penghubung utama antara KPU Kota Surabaya dan badan di tingkat kelurahan dan TPS. Proses pendaftaran badan *Ad Hoc*, baik PPK maupun PPS, menunjukkan animo yang tinggi yang disebabkan oleh terbukanya peluang bagi wajah-wajah baru, seiring dengan perubahan regulasi yang tidak lagi membatasi masa tugas badan maksimal dua periode, serta penerapan sistem informasi digital yang menarik minat generasi muda. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan transparan melalui platform SIAKBA, dengan tahapan seleksi administratif, CAT, dan wawancara.

Pada tahapan pemutakhiran data pemilih, KPU Kota Surabaya mencatat jumlah pendaftar Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebanyak 8.515 orang, dan melantik 7.907 orang di antaranya untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) di 3.960 TPS selama masa kerja satu bulan. Pasca coklit, terdapat penambahan 1 TPS di wilayah

Benowo karena pertimbangan geografis, sehingga jumlah TPS total menjadi 3.964, terdiri dari 3.961 TPS reguler dan 3 TPS lokasi khusus yang tersebar di Kecamatan Sambikerep, Sukolilo, dan Jambangan.

Badan dengan jumlah terbanyak berada di tingkat TPS, yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dengan ketentuan 7 orang per TPS, maka jumlah KPPS yang dibentuk mencapai 27.748 orang. Selain itu, terdapat petugas ketertiban TPS sebanyak 2 orang per TPS, sehingga total petugas pengamanan mencapai 7.928 orang. Tingginya partisipasi pendaftar, yakni 986 orang untuk PPK dan 1.567 orang untuk PPS, mencerminkan antusiasme masyarakat Kota Surabaya dalam mendukung penyelenggaraan pilkada yang demokratis dan partisipatif. Melalui proses seleksi yang objektif dan regulatif, KPU Kota Surabaya berkomitmen membentuk badan *Ad hoc* yang profesional, berintegritas, serta mencerminkan keberagaman masyarakat. Adapun komposisi badan *Ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 38.3.

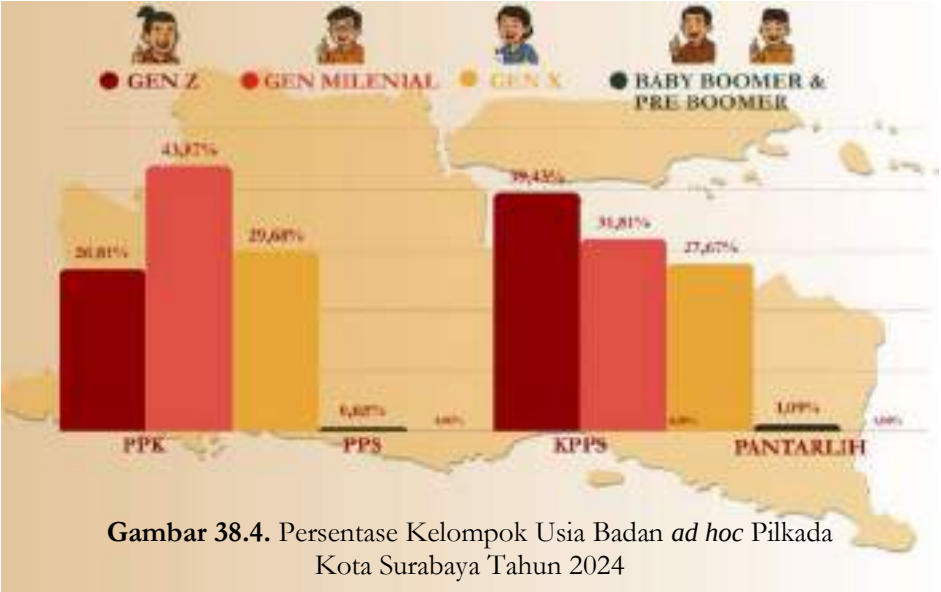


Gambar 38.3. Persentase Jenis Kelamin Badan *ad hoc* Pilkada Kota Surabaya Tahun 2024

Sebaran demografi badan *ad hoc* KPU Kota Surabaya berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa keterlibatan laki-laki masih mendominasi di sebagian besar jenjang penyelenggara, meskipun keterlibatan perempuan juga cukup signifikan, terutama pada posisi tertentu. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dari total 155 orang, sebanyak 118 orang (76,13%) adalah laki-laki, sedangkan perempuan berjumlah 37 orang (23,87%). Di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), komposisi gender mulai menunjukkan kecenderungan yang lebih seimbang, dengan 263 laki-laki

(57,30%) dan 196 perempuan (42,70%) dari total 459 anggota. Pada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang berjumlah 27.748 orang, keterlibatan laki-laki tetap dominan dengan 15.770 orang (56,83%), sementara perempuan berjumlah 11.978 orang (43,17%). Menariknya, komposisi berbeda terjadi pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), di mana perempuan mendominasi sebanyak 4.437 orang (56,11%), dan laki-laki berjumlah 3.470 orang (43,89%) dari total 7.907 petugas. Data ini menunjukkan bahwa perempuan berperan penting, khususnya dalam tahapan pemutakhiran data, dan secara keseluruhan keterlibatan gender dalam badan *ad hoc* pilkada 2024 di Kota Surabaya sudah mulai mengarah pada distribusi yang lebih inklusif dan representatif.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 38.4 berikut.



Sebaran demografi badan *ad hoc* KPU Kota Surabaya berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa mayoritas penyelenggara pilkada berasal dari kalangan muda, khususnya Generasi Z dan Generasi Milenial. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berjumlah 155 orang, komposisi usia didominasi oleh Generasi Milenial (usia 28–43 tahun) sebanyak 68 orang (43,87%), diikuti oleh Generasi Z (usia 17–27 tahun) sebanyak 40 orang (25,81%), dan Generasi X (usia 44–59 tahun) sebanyak 46 orang (29,68%). Sementara itu, hanya 1 orang (0,65%) berasal dari Baby

Boomer (usia 60–78 tahun) dan tidak terdapat anggota dari kelompok usia di atas 79 tahun (*Pre-Boomer*). Di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berjumlah 459 orang, tren keterlibatan generasi muda semakin terlihat. Generasi Z menjadi kelompok usia terbanyak dengan 181 orang (39,43%), disusul Generasi Milenial sebanyak 146 orang (31,81%), dan Generasi X sebanyak 127 orang (27,67%). Terdapat pula 5 orang (1,09%) dari kelompok *Baby Boomer*, dan tidak ada anggota dari *Pre-Boomer*. Data ini mengindikasikan bahwa regenerasi kepilkadaan telah berjalan baik di Kota Surabaya, dengan meningkatnya partisipasi generasi muda dalam penyelenggaraan pilkada di tingkat kecamatan dan kelurahan, yang sekaligus menjadi modal penting untuk membangun pilkada yang adaptif dan inklusif secara berkelanjutan.

Meskipun KPU Kota Surabaya telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pilkada, hingga tahapan pembentukan badan *ad hoc* Pilkada 2024 belum terdapat anggota badan *ad hoc* yang berasal dari kalangan penyandang disabilitas. Hal ini menjadi catatan penting sekaligus tantangan ke depan dalam mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang lebih inklusif. KPU Kota Surabaya tetap berkomitmen untuk mendorong keterlibatan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, baik sebagai pemilih maupun penyelenggara, melalui pendekatan afirmatif dan kampanye kesadaran yang berkelanjutan pada pilkada mendatang.

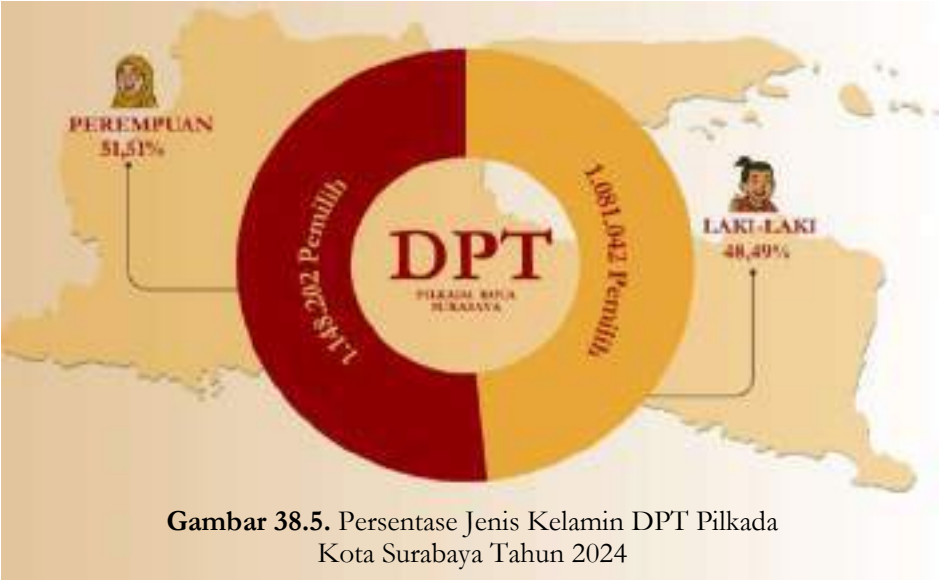
3. Pemutakhiran Data

Kota Surabaya merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak dan tingkat kepadatan tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk, data pemilih juga mengalami peningkatan secara konsisten dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, tahapan pemutakhiran data pemilih menjadi salah satu tahapan yang paling krusial, kompleks, dan melibatkan banyak pihak dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pilkada 2024.

Tahapan ini dimulai dengan penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih pilkada (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri yang kemudian diserahkan kepada KPU untuk dilakukan proses sinkronisasi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari pilkada atau pilkada sebelumnya. Sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan validitas dan akurasi data, serta menghindari potensi duplikasi, data ganda, atau pemilih tidak memenuhi syarat (TMS). Di Kota Surabaya, tahapan ini menghasilkan beberapa produk daftar pemilih secara berjenjang. Berdasarkan hasil pemutakhiran awal, ditetapkan

Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi (DPS) sebanyak 2.251.018 jiwa, yang kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Pantarlih untuk menghasilkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 2.237.452 jiwa. Setelah dilakukan tanggapan masyarakat, perbaikan, dan rekapitulasi, KPU Kota Surabaya akhirnya menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.229.244 pemilih.

Proses ini menunjukkan adanya pemangkasan jumlah pemilih dari tahap DPS ke DPS dan akhirnya DPT sebagai hasil validasi berlapis untuk menjamin akurasi daftar pemilih. Tahapan pemutakhiran data ini melibatkan kerja sama aktif antara KPU, badan *ad hoc* (PPK, PPS, Pantarlih), serta masyarakat, demi memastikan hak konstitusional seluruh warga negara dalam Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Surabaya Tahun 2024 terpenuhi secara adil dan akurat. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 38.5.

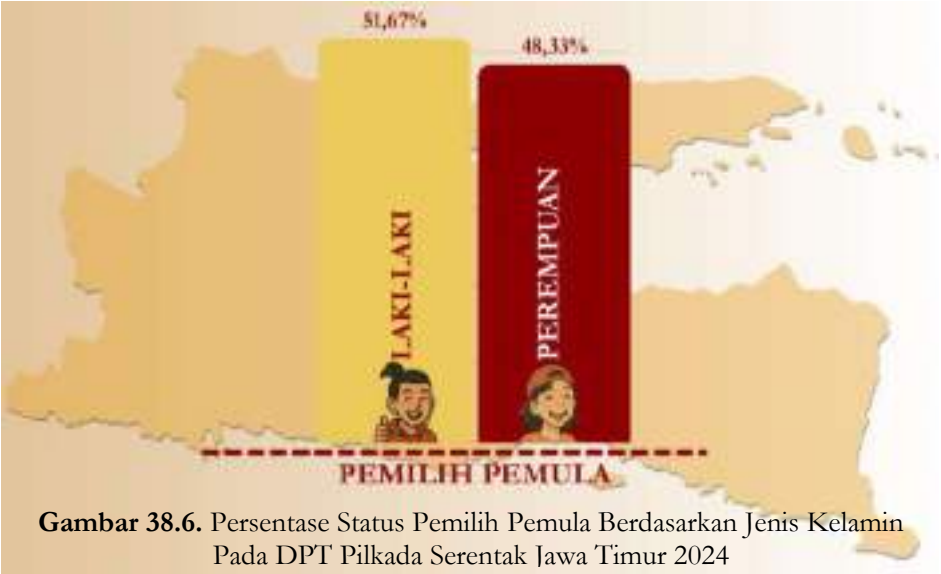


Gambar 38.5. Persentase Jenis Kelamin DPT Pilkada Kota Surabaya Tahun 2024

Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2024, jumlah pemilih di Kota Surabaya tercatat sebanyak 2.229.244 orang. Jika dilihat dari jenis kelamin, komposisi pemilih menunjukkan bahwa perempuan mendominasi dengan jumlah 1.148.202 orang (51,51%), sedangkan pemilih laki-laki sebanyak 1.081.042 orang (48,49%). Selisih proporsional ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam menentukan arah pilkada lokal, sekaligus menjadi kelompok sasaran penting dalam berbagai program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Keterlibatan pemilih perempuan yang

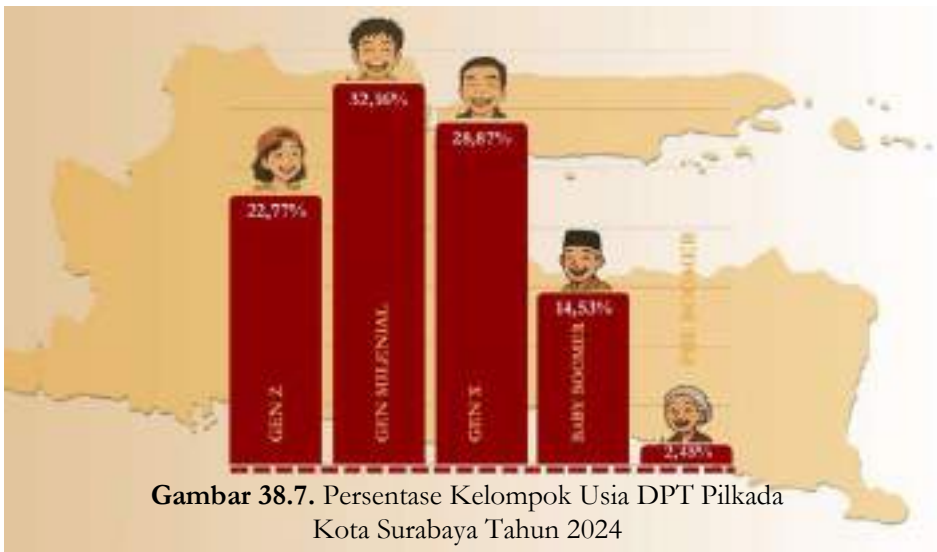
tinggi juga mencerminkan inklusivitas dan partisipasi yang kuat dalam proses demokrasi di Kota Surabaya.

Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni pemilih pemula. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 38.6 berikut.



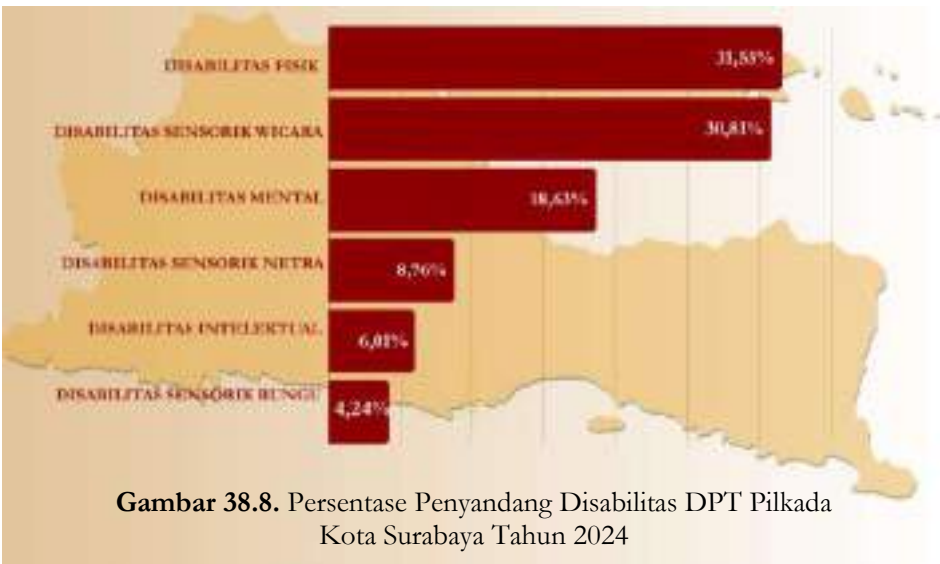
Sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Surabaya Tahun 2024 berdasarkan status pemilih menunjukkan, kelompok pemilih pemula, yaitu warga yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, tercatat sebanyak 38.246 orang atau 1,70% dari total DPT, dengan rincian 19.762 laki-laki (51,67%) dan 18.484 perempuan (48,33%). Data ini menunjukkan bahwa meskipun proporsi pemilih pemula relatif kecil, keterlibatan mereka tetap penting dalam proses regenerasi demokrasi. Sementara itu, dominasi pemilih non pemula mencerminkan pentingnya pendekatan sosialisasi berbasis pengalaman dan rasionalitas dalam upaya meningkatkan partisipasi dan kualitas pilkada di Kota Surabaya.

Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 38.7.



Sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Surabaya Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi dari kelompok usia produktif, khususnya Generasi Milenial dan Generasi Z. Dari total 2.229.244 pemilih, jumlah pemilih terbanyak berasal dari Generasi Milenial (usia 28–43 tahun) sebanyak 716.974 orang (32,16%), diikuti oleh Generasi X (usia 44–59 tahun) sebanyak 643.693 orang (28,87%), dan Generasi Z (usia 17–27 tahun) sebanyak 507.493 orang (22,77%). Sementara itu, pemilih dari kelompok *Baby Boomer* (usia 60–78 tahun) berjumlah 323.939 orang (14,53%), dan *Pre-Boomer* (di atas 79 tahun) sebanyak 37.145 orang (1,67%). Komposisi ini mencerminkan bahwa hampir 83% pemilih berasal dari kelompok usia di bawah 60 tahun, menjadikan generasi muda dan dewasa produktif sebagai penentu utama dalam kontestasi politik lokal. Oleh karena itu, strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih di Kota Surabaya perlu difokuskan pada pendekatan yang sesuai dengan karakteristik generasi digital dan pemilih rasional, tanpa mengabaikan kebutuhan akses informasi bagi kelompok lanjut usia.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kota Surabaya Tahun 2024 disajikan pada Gambar 38.8, yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



KPU Kota Surabaya mencatat sebanyak 5.937 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2024 merupakan penyandang disabilitas, yang tersebar dalam enam kategori disabilitas. Sebagian besar merupakan penyandang disabilitas fisik, yakni sebanyak 1.873 orang (31,55%), disusul oleh disabilitas sensorik wicara sebanyak 1.829 orang (30,81%), dan disabilitas mental sebanyak 1.106 orang (18,63%). Adapun penyandang disabilitas sensorik netra tercatat sebanyak 520 orang (8,76%), disabilitas intelektual sebanyak 357 orang (6,01%), dan disabilitas sensorik rungu sebanyak 252 orang (4,24%). Data ini mencerminkan komitmen KPU Kota Surabaya dalam memastikan pilkada yang inklusif, dengan memberikan perhatian terhadap hak pilih kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan aksesibilitas pemilih disabilitas, termasuk melalui penyediaan formulir dalam format ramah disabilitas, fasilitas di TPS, serta pendampingan saat hari pemungutan suara. Keterlibatan aktif penyandang disabilitas sebagai pemilih merupakan bagian penting dari demokrasi yang setara dan partisipatif.

4. Pencalonan

Tahapan pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2024 dimulai pada 5 Mei 2024, diawali dengan pembukaan jalur pencalonan perseorangan. Hingga akhir masa pendaftaran, terdapat dua pasangan calon perseorangan yang mengajukan diri. Namun, setelah

dilakukan verifikasi, keduanya tidak memenuhi syarat minimal dukungan, yakni 144.209 dukungan, atau 6,5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 di Kota Surabaya. Dengan demikian, tidak ada pasangan calon perseorangan yang dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.

Tahapan berikutnya adalah pencalonan melalui jalur partai politik, yang dibuka mulai 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024. Hingga akhir masa pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mendaftarkan diri. Menindaklanjuti hal tersebut, KPU Kota Surabaya membuka perpanjangan masa pendaftaran sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, hingga masa perpanjangan ditutup, tidak ada tambahan pasangan calon yang mengajukan pendaftaran. Dengan hanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU Kota Surabaya menetapkan bahwa hanya terdapat satu pasangan calon dalam Pilkada Serentak Tahun 2024. Pasangan calon tersebut merupakan incumbent Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya periode 2020–2024, yang keduanya berjenis kelamin laki-laki dan memperoleh dukungan dari 18 partai politik peserta Pilkada 2024. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon dan partai politik pengusung disajikan pada gambar 38.9 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.



Dari sisi latar belakang pendidikan, calon Wali Kota merupakan lulusan program magister (S2) dari Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya, sementara calon Wakil Wali Kota adalah lulusan program sarjana (S1) dari Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS). Keduanya mengusung visi “Transformasi Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan”, yang dijabarkan ke dalam 7 misi strategis untuk

mewujudkan pembangunan Kota Surabaya secara holistik dan berkelanjutan.

Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada Gambar 38.10, yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



Gambar 38.10. Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kota Surabaya Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

Sosialisasi merupakan bagian yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Surabaya. KPU Kota Surabaya, dengan dukungan badan *ad hoc* di tingkat kecamatan dan kelurahan, melaksanakan kegiatan sosialisasi secara luring (tatap muka) untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara intensif di titik-titik strategis yang tersebar di seluruh wilayah kota, guna memastikan bahwa informasi mengenai tahapan pemilihan dapat diterima secara merata dan inklusif.

KPU Kota Surabaya membagi sosialisasi ke dalam 11 segmen strategis, antara lain: penyandang disabilitas, perempuan, kelompok marjinal, netizen, pemuda dan pemilih pemula, kelompok keagamaan, serta segmen masyarakat lainnya. Setiap pertemuan sosialisasi dibatasi dengan jumlah peserta maksimal 50 orang, untuk menjaga efektivitas komunikasi dan interaksi langsung antara penyelenggara dan peserta.

Tabel 38.1. Jumlah Peserta Sosialisasi Pilkada Kota Surabaya Tahun 2024

No	Pelaksana	Peserta	No	Pelaksana	Peserta
1	DPC GMNI Surabaya	50 orang	21	Forum Literasi Jawa Timur Cabang Surabaya (FLJT)	50 orang
2	Korwil FMM Jawa Timur	50 orang	22	KIPP Surabaya	50 orang
3	LPMK Semolowaru Kec. Sukolilo	50 orang	23	Karang Taruna Putat Jaya	50 orang
4	Jamiyyah Yasintah Sholawat AZZAHRA	50 orang	24	Himpunan Mahasiswa Prodi Sosiologi Unesa	50 orang
5	Lentera Muda Berkarya	50 orang	25	Komunitas Peduli Marjinal	50 orang
6	Pusat Informasi Rakyat Kel. Lidah Wetan Kec. Lakarsantri	50 orang	26	Warga Pesisir Nambangan	50 orang
7	Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda	50 orang	27	Aisiyyah Kota Surabaya	50 orang
8	Yayasan Pena Ardama	50 orang	28	DPW Generasi Intelektual Nusantara	50 orang
9	Komunitas UMKM Perempuan Kel. Bangkingan Kec. Lakarsantri	50 orang	29	Forum Penjemur Ikan Asin	50 orang
10	Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Unair	50 orang	30	LPBH NU	50 orang
11	Majelis Taklim Sakinah	50 orang	31	Komunitas Pecinta Pancasila	50 orang
12	Aliansi Masyarakat Selamatkan Demokrasi	50 orang	32	Jama'ah Masjid Baiturrahman Gunung Anyar	50 orang

No	Pelaksana	Peserta	No	Pelaksana	Peserta
13	Forum Pemuda Surabaya	50 orang	33	Karang Taruna Gunung Anyar	50 orang
14	Pusad UM Surabaya	50 orang	34	Komunitas Cinta Bangsa	50 orang
15	Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI)	50 orang	35	HMI Komisariat Sosial Budaya Unesa	50 orang
16	Rumah Aspirasi	50 orang	36	Nasyiatul Aisyiyah	50 orang
17	Karang Taruna Pakal	50 orang	37	PC Fatayat NU	50 orang
18	PC GP Ansor Wonocolo	50 orang	38	PPK Kelurahan Tanah Kali Kediding	50 orang
19	Himap Fisip WR Supratman	50 orang	39	Gerakan Masyarakat Merdeka Jawa Timur (GMM)	50 orang
20	PD Pemuda Muhammadiyah	50 orang			

Selain melalui pertemuan tatap muka, KPU Kota Surabaya juga memanfaatkan berbagai saluran komunikasi massa untuk memperluas jangkauan informasi. Media cetak, radio, dan media daring dilibatkan secara aktif dalam menyuarakan informasi tahapan Pilkada. Dalam kegiatan media *gathering*, KPU Surabaya berkolaborasi dengan tidak kurang dari 75 media lokal dan nasional, yang berperan penting dalam menyampaikan informasi kepilkadaan kepada masyarakat. Di samping itu, akun media sosial resmi KPU Kota Surabaya juga dioptimalkan untuk menyampaikan informasi secara *real time* kepada pemilih, terutama generasi muda dan masyarakat digital. Melalui pendekatan multikanal dan berbasis segmen ini, KPU Kota Surabaya berupaya memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat mendapatkan hak atas informasi yang akurat dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan Pilkada 2024.



Gambar 38.11. Kegiatan Sosialisasi Pilkada Kota Surabaya Tahun 2024

Dalam rangka membangun semangat partisipasi publik dan memperkuat identitas lokal dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2024, KPU Kota Surabaya memperkenalkan maskot resmi bernama “Si Mbois”, yang merupakan akronim dari “Siap Memilih dan Berdemokrasi untuk Surabaya”. Nama ini tidak hanya menjadi simbol penyelenggaraan pilkada yang demokratis, tetapi juga doa dan harapan agar seluruh tahapan Pilkada berjalan lancar, sukses, dan partisipatif.



Gambar 38.12. Maskot Pilkada Kota Surabaya Tahun 2024

Si Mbois mengambil bentuk karakter buaya, hewan yang sangat lekat dengan identitas Kota Surabaya dan menjadi bagian dari cerita sejarah nama kota tersebut. Karakter ini digambarkan sebagai sosok penuh semangat, cerdas, ramah, dan bijaksana dengan nilai-nilai yang mencerminkan karakter ideal pemilih Surabaya. Secara visual, Si Mbois tampil dengan gaya milenial, namun tetap menjunjung tinggi budaya dan kearifan lokal. Ia mengenakan kemeja lengan panjang berwarna oranye (warna identitas KPU) yang memberikan kesan muda, energik, dan terbuka. Penampilannya semakin kuat dengan aksesoris kacamata sebagai simbol kecerdasan, serta udeng/blangkon khas Surabaya dan jarik bercorak batik semanggi, yang mempertegas nilai-nilai budaya lokal dalam balutan kekinian. Dengan desain yang modern namun berakar pada nilai tradisional, Si Mbois menjadi representasi warga Kota Surabaya sebagai masyarakat kota metropolitan yang cerdas, peduli, dan bijak dalam menentukan arah kepemimpinan daerahnya. Maskot ini juga menjadi media edukatif dan komunikatif dalam mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda, untuk aktif berpartisipasi dalam Pilkada 2024 dengan semangat demokrasi yang menyenangkan dan membumi.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tahapan kampanye, KPU Kota Surabaya memfasilitasi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berbagai bentuk dukungan kampanye yang bertujuan untuk memastikan penyampaian informasi yang setara dan menjangkau seluruh masyarakat pemilih. Fasilitas kampanye ini meliputi

penyediaan Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye (BK), iklan kampanye di media massa, serta penyelenggaraan debat publik antar calon.

KPU Surabaya mencetak 3 jenis APK dan 4 jenis BK yang disebarluaskan melalui titik-titik strategis di wilayah Kota Surabaya. Sementara itu, iklan kampanye difasilitasi dan ditayangkan di 10 media cetak harian lokal selama 14 hari, serta disiarkan melalui 10 stasiun televisi dan 10 stasiun radio lokal dengan durasi penayangan yang sama, yaitu 14 hari. Iklan ini bertujuan untuk memperkenalkan visi, misi, dan program kerja pasangan calon kepada masyarakat secara luas.



NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	JUMLAH
1	MEDIA MASSA CETAK	1 HALAMAN SETIAP MEDIA CETAK
2	MEDIA MASSA ELEKTRONIK (30 DETIK)	10 SPOT
3	MEDIA MASSA ELEKTRONIK (60 DETIK)	10 SPOT

Gambar 38.13. Fasilitas Kampanye oleh KPU Kota Surabaya Tahun 2024

Fasilitasi kampanye ini bertujuan tidak hanya untuk menyampaikan informasi tentang pelaksanaan Pilkada, tetapi juga untuk mengenalkan profil pasangan calon secara adil kepada seluruh pemilih. Sesuai regulasi yang berlaku, karena hanya terdapat satu pasangan calon yang mencalonkan diri dalam Pilkada Surabaya 2024, maka pada surat suara akan disediakan kolom kosong sebagai bentuk pilihan alternatif bagi pemilih. Keberadaan kolom kosong ini juga turut disosialisasikan dalam materi kampanye.

KPU Surabaya menyelenggarakan dua kali debat publik dengan tema yang berbeda. Debat pertama mengangkat tema “Meningkatkan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Surabaya”, sedangkan debat kedua mengusung tema “Memajukan dan Menyelesaikan Persoalan Daerah”. Kedua debat ini menjadi sarana penting untuk menguji visi dan program kerja pasangan calon serta memberikan ruang bagi pemilih untuk menilai secara kritis dan terbuka.



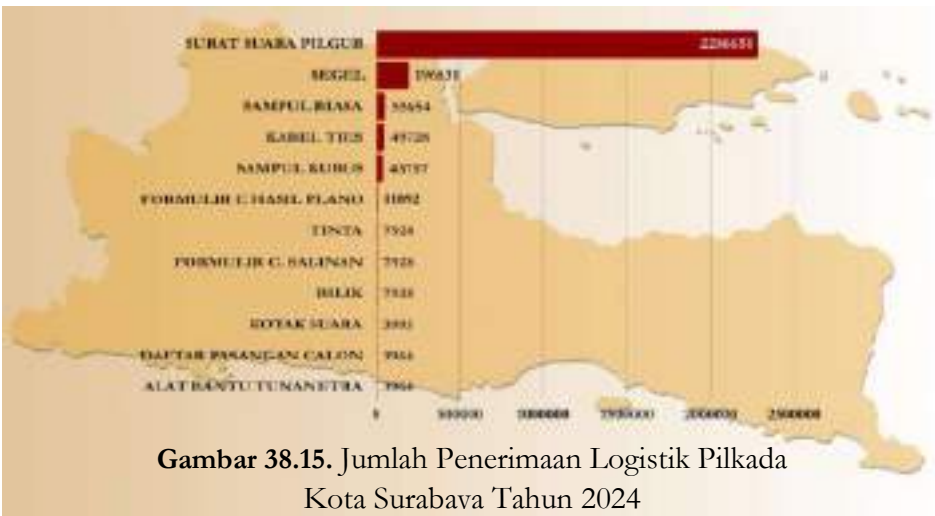


Gambar 38.14. Debat Publik Pilkada
Kota Surabaya Tahun 2024

Dalam pelaporan akun media sosial resmi, tim Liaison Officer (LO) pasangan calon melaporkan kepemilikan 10 akun Instagram dan 3 akun TikTok. Kedua platform ini digunakan secara aktif untuk menyam-paikan agenda kampanye, menyapa pemilih muda, serta memperluas jangkauan interaksi digital selama masa kampanye.

6. Logistik

Pengelolaan logistik menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Surabaya. KPU Kota Surabaya melaksanakan pengadaan logistik melalui sistem e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), guna memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Logistik Pilkada meliputi perlengkapan wajib yang digunakan di TPS, seperti kotak suara, surat suara, tinta, bilik suara, dan segel, serta perlengkapan pendukung lainnya, seperti sampul, formulir, salinan DPT, DPTb, dan perlengkapan administrasi lainnya. Seluruh jenis logistik tersebut disesuaikan dengan kebutuhan riil berdasarkan jumlah TPS dan pemilih. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 38.15.

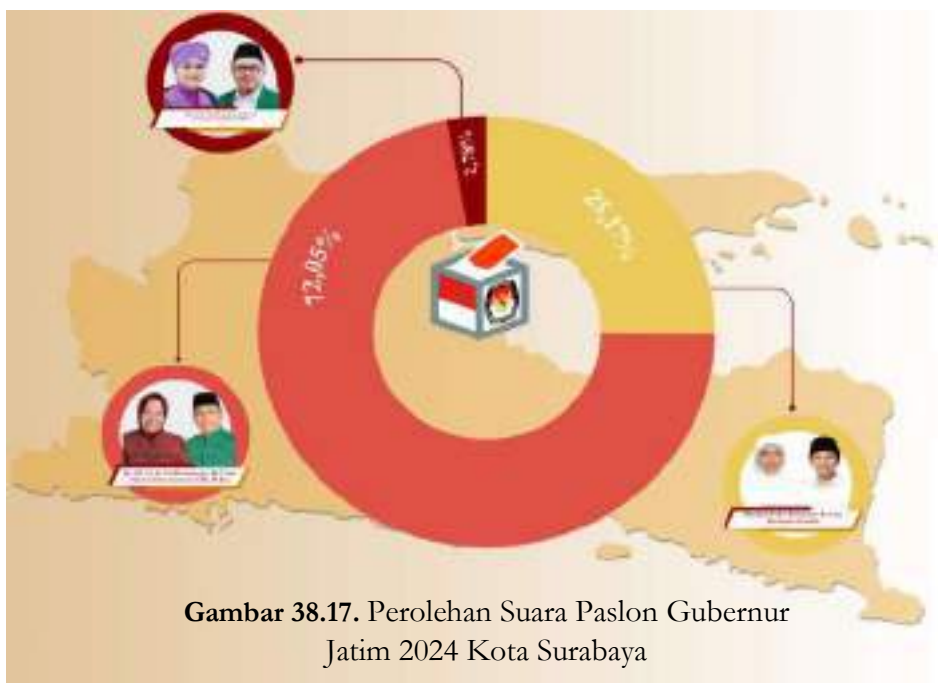


Gambar 38.15. Jumlah Penerimaan Logistik Pilkada Kota Surabaya Tahun 2024

Dengan perencanaan yang matang dan sistem pengawasan yang baik, KPU Kota Surabaya berkomitmen untuk menjaga keandalan logistik sebagai salah satu aspek utama dalam menjamin suksesnya pelaksanaan Pilkada yang efisien, tertib, dan berkualitas.

7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Surabaya disajikan pada Gambar 38.17.



Hasil pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Surabaya menunjukkan dominasi yang sangat kuat dari pasangan Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T. – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), S.IP., M.Kes. yang meraih 882.414 suara atau sebesar 72,05% dari total suara sah. Pasangan ini unggul jauh dibandingkan dua pasangan lainnya. Pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak memperoleh 308.293 suara atau 25,17%, sementara pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah, M.Si. – H. Lukmanul Hakim, M.Si. berada di posisi terakhir dengan perolehan 34.079 suara atau 2,78%. Total suara sah yang masuk sebanyak 1.224.786 suara, mencerminkan tingginya partisipasi pemilih di Kota Surabaya dalam pemilihan kepala daerah tingkat provinsi. Keunggulan pasangan Risma-Gus Hans menunjukkan tingginya dukungan masyarakat terhadap figur kepemimpinan lokal yang sebelumnya telah dikenal publik, khususnya di wilayah Surabaya.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 38.18.

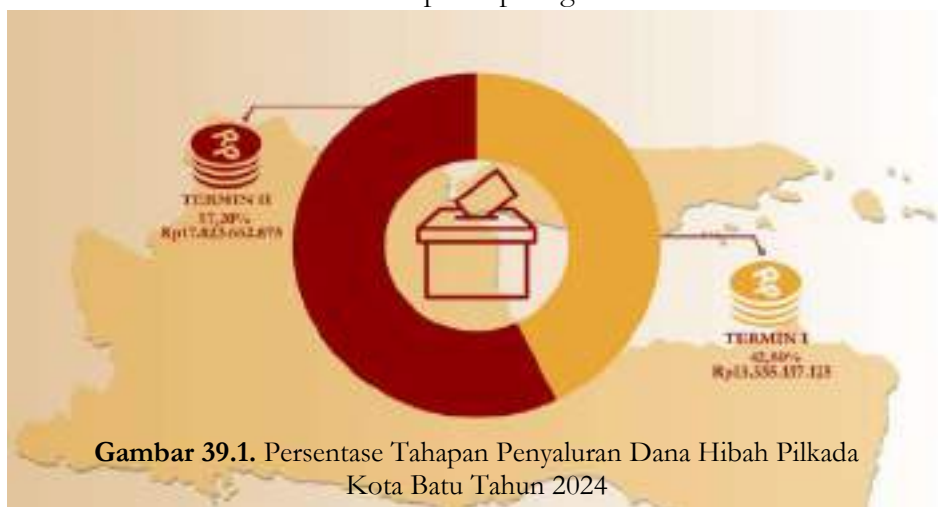


Hasil pemungutan suara Pilkada Kota Surabaya Tahun 2024 menunjukkan bahwa pasangan Eri Cahyadi – Armuji memperoleh 980.380 suara, atau setara dengan 81,38% dari total suara sah. Sementara itu, kotak kosong memperoleh 224.340 suara atau 18,62%, yang mencerminkan bagian masyarakat yang menghendaki alternatif lain atau tidak setuju dengan calon tunggal. Total suara sah mencapai 1.204.720 suara, yang mencerminkan tingginya partisipasi pemilih meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Perolehan suara pasangan petahana yang sangat dominan menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang masih kuat terhadap kepemimpinan mereka di periode sebelumnya, meski demikian jumlah suara untuk kotak kosong juga menjadi catatan penting dalam dinamika demokrasi lokal di Surabaya.

KOTA BATU

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Perencanaan program dan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Batu Tahun 2024 didukung oleh dana hibah sebesar Rp31.158.800.000, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Batu. Dana hibah tersebut disalurkan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Batu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu. NPHD ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2023, berdasarkan dokumen perjanjian bernomor: 979/0843/422.205/2023 dan 324/KU.07-NK/3579/2023. Dana hibah dicairkan dalam dua termin: Termin pertama ditransfer ke rekening KPU Kota Batu pada tanggal 16 November 2023 (dengan Berita Acara Serah Terima tertanggal 13 November 2023) dan Termin kedua pada tanggal 29 Februari 2024 (BAST tertanggal 26 Februari 2024). Dana ini menjadi fondasi utama dalam mendukung seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024 di Kota Batu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian pemilihan. Rincian distribusi dana hibah tersebut ditampilkan pada gambar 39.1 berikut.

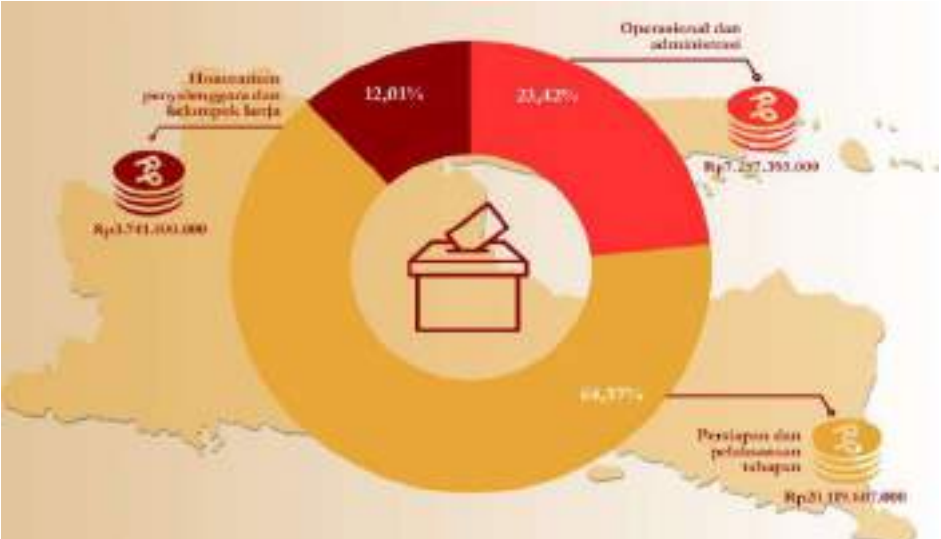


Gambar 39.1. Persentase Tahapan Penyaluran Dana Hibah Pilkada Kota Batu Tahun 2024

Dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada Kota Batu Tahun 2024 dicairkan dalam dua termin sesuai dengan ketentuan regulasi pendanaan pemilihan dari

APBD. Termin pertama dicairkan sebesar Rp. 13.335.137.125, yang setara dengan 42,80% dari total dana hibah. Selanjutnya, termin kedua dicairkan sebesar Rp. 17.823.662.875, atau sebesar 57,20% dari total keseluruhan dana hibah. Pembagian termin ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pilkada secara berkelanjutan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan teknis, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabel.

Adapun alokasi realisasi dana hibah disajikan pada gambar 39.2 yang menyajikan distribusi persentase secara visual guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan informatif mengenai pemanfaatan dana hibah pilkada.



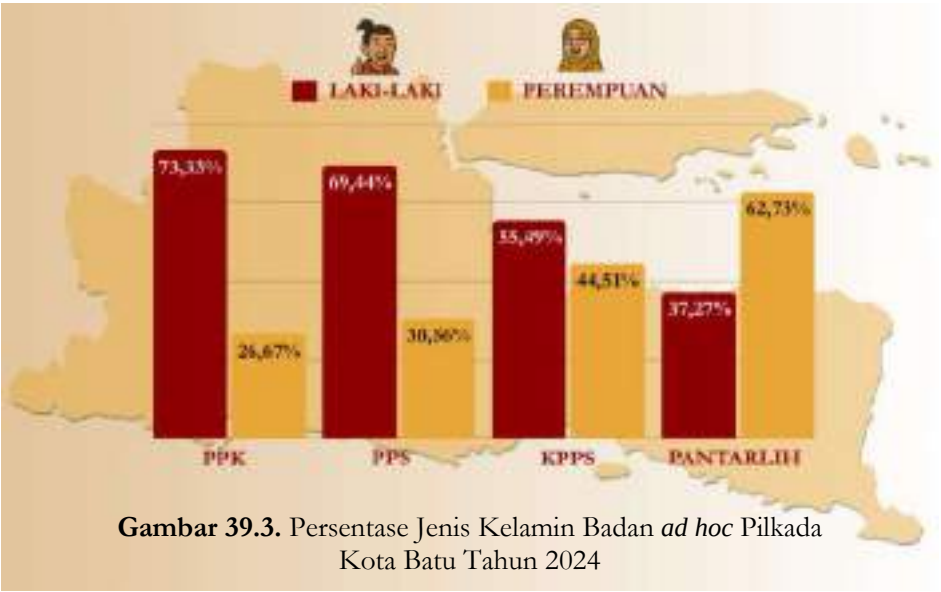
Gambar 39.2. Persentase Distribusi Penggunaan Dana Hibah Pilkada Kota Batu Tahun 2024

Anggaran hibah yang diterima KPU Kota Batu untuk penyeleng-garaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 terbagi ke dalam tiga komponen utama. Proporsi terbesar dialokasikan untuk tahapan persiapan dan pelaksanaan sebesar Rp. 20.119.607.000 atau 64,57% dari total anggaran hibah. Komponen ini mencakup berbagai kegiatan penting seperti penyusunan peraturan, pembentukan badan *ad hoc*, serta pelaksanaan tahapan pencalonan hingga pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya, sebesar Rp.7.297.393.000 atau 23,42% dari dana hibah digunakan untuk mendukung operasional dan administrasi perkantoran, yang meliputi biaya kegiatan teknis, rapat koordinasi, penyusunan laporan, serta kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kerja KPU Kota Batu. Sementara itu, untuk honorarium badan *ad hoc* dialokasikan sebesar Rp. 3.741.800.000, atau 12,01% dari total anggaran,

sebagai bentuk penghargaan atas peran penting petugas dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024 secara profesional dan berintegritas.

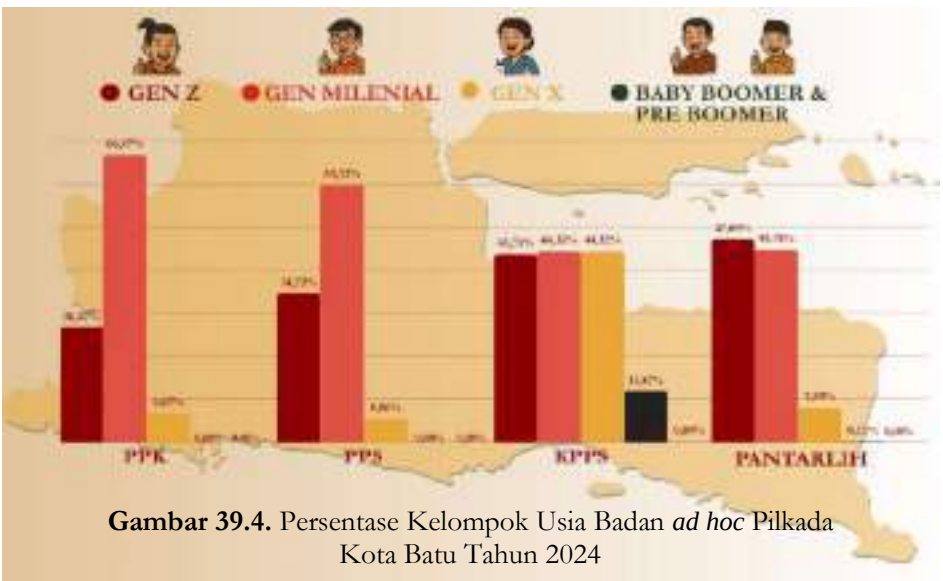
2. **Badan Ad Hoc**

Dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu membentuk badan *ad hoc* sebagai bagian penting dari struktur penyelenggara pilkada di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga tempat pemungutan suara. Badan *ad hoc* ini memiliki peran strategis dalam menjalankan tugas-tugas teknis dan operasional pada setiap tahapan pemilihan, sekaligus memastikan proses pilkada berlangsung secara lancar, jujur, dan adil, serta bebas dari intimidasi dan kecurangan. Proses rekrutmen badan *ad hoc* dilaksanakan melalui tahapan seleksi administratif, tes tertulis berbasis komputer (CAT), dan wawancara. KPU Kota Batu menekankan prinsip transparansi, integritas, dan kompetensi dalam setiap tahapannya. Seleksi tulis bagi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan di MAN 1 Kota Batu, sedangkan seleksi wawancara calon anggota PPK dilangsungkan di *The Onsen Resort* Batu, dan wawancara calon anggota PPS digelar di Hotel Golden Tulip Batu. Seluruh anggota badan *ad hoc* ini menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tahapan Pilkada dan merupakan representasi partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat daerah. Adapun komposisi badan *ad hoc* berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar 39.3.



Sebaran demografi berdasarkan jenis kelamin pada badan *ad hoc* Pemilihan Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2024 menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi di hampir seluruh tingkatan penyelenggara. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dari total 15 orang, sebanyak 73,33% (11 orang) adalah laki-laki, sedangkan 26,67% (4 orang) adalah perempuan. Komposisi serupa juga terlihat pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan total 72 orang, dimana 69,44% (50 orang) merupakan laki-laki dan 30,56% (22 orang) adalah perempuan. Komposisi berbeda terlihat pada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah 2.114 orang. Sebanyak 55,49% (1.173 orang) adalah laki-laki dan 44,51% (941 orang) perempuan. Menariknya, proporsi ini justru berbalik pada tingkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlif), di mana dari total 601 orang, perempuan mendominasi dengan 62,73% (377 orang), sementara laki-laki hanya 37,27% (224 orang). Data ini menunjukkan bahwa meskipun struktur *ad hoc* pada level koordinatif masih didominasi oleh laki-laki, keterlibatan perempuan semakin kuat terutama di level teknis pelaksanaan di lapangan, mencerminkan peningkatan partisipasi dan peran aktif perempuan dalam penyelenggaraan pilkada.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada pilkada Kota Batu Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia disajikan pada gambar 39.4 berikut.

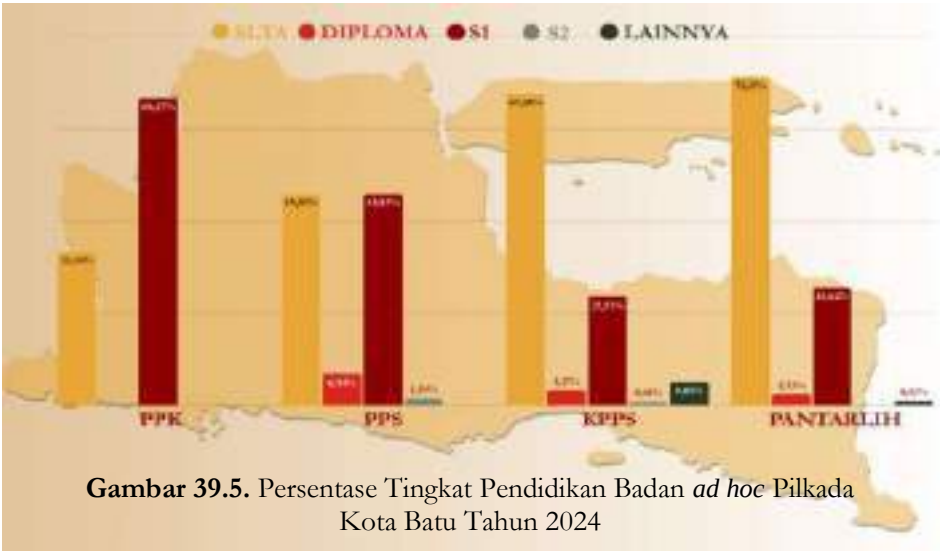


Gambar 39.4. Persentase Kelompok Usia Badan *ad hoc* Pilkada Kota Batu Tahun 2024

Sebaran demografi berdasarkan kelompok usia badan *ad hoc* Pilkada Kota Batu Tahun 2024 menunjukkan bahwa mayoritas penyelenggara berasal dari

generasi muda, khususnya Gen Z dan Gen Milenial. Pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berjumlah 15 orang, 66,67% (10 orang) berasal dari Gen Milenial (usia 28–43 tahun), disusul oleh 26,67% (4 orang) dari Gen Z (usia 17–27 tahun), dan 6,67% (1 orang) dari Gen X (usia 44–59 tahun). Sementara pada tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan total 72 orang, dominasi Gen Milenial tetap terlihat dengan 59,72% (43 orang), kemudian Gen Z 34,72% (25 orang) dan Gen X 5,56% (4 orang). Dominasi Gen Z semakin kuat di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pantarlih. Dari total 2.114 anggota KPPS, 43,71% (924 orang) merupakan Gen Z, sedikit di bawah Gen Milenial yang berjumlah 44,32% (937 orang). Gen X mencakup 11,87% (251 orang), dan terdapat 2 orang dari kelompok *Baby Boomer* (0,09%). Pada Pantarlih, dari 601 orang, 47,09% (283 orang) berasal dari Gen Z, dan 44,76% (269 orang) dari Gen Milenial, menunjukkan bahwa segmen usia muda sangat dominan. Gen X tercatat 7,99% (48 orang), sementara hanya 1 orang (0,17%) dari *Baby Boomer*. Tidak ada penyelenggara dari kelompok *Pre-Boomer* di semua tingkatan. Data ini menggambarkan bahwa pelibatan generasi muda sangat kuat dalam penyelenggaraan pilkada 2024 di Kota Batu, mencerminkan semangat regenerasi dan adaptasi terhadap digitalisasi tahapan pilkada.

Selanjutnya, sebaran demografi badan *ad hoc* pada pilkada Kota Batu Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar 39.5.



Sebaran demografi berdasarkan tingkat pendidikan badan *ad hoc* Pilkada Kota Batu Tahun 2024 menunjukkan bahwa mayoritas penyelenggara berasal dari lulusan SLTA dan Sarjana (S1). Pada tingkat

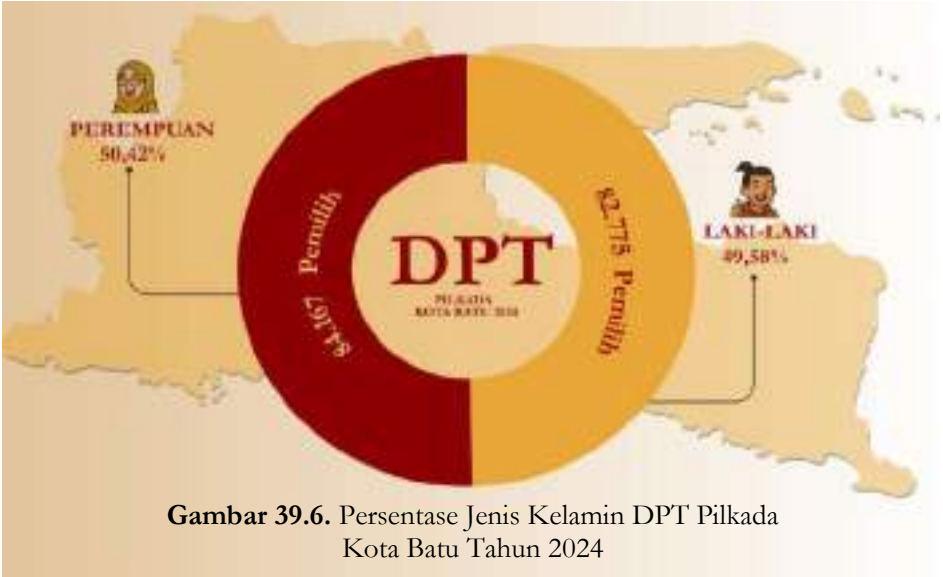
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berjumlah 15 orang, 66,67% (10 orang) merupakan lulusan S1, dan 33,33% (5 orang) lulusan SLTA. Di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berjumlah 72 orang, komposisi pendidikan lebih merata, yaitu 45,83% (33 orang) lulusan SLTA, 45,83% (33 orang) lulusan S1, 6,94% (5 orang) lulusan Diploma, dan 1,39% (1 orang) lulusan S2. Untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah 2.114 orang, mayoritas berasal dari lulusan SLTA sebanyak 67,60% (1.429 orang), disusul oleh lulusan S1 sebesar 23,51% (497 orang), kategori lainnya 5,06% (107 orang), lulusan Diploma 3,17% (67 orang), dan lulusan S2 sebanyak 0,66% (14 orang). Sementara pada Pantarlih, dari total 601 orang, 71,21% (428 orang) adalah lulusan SLTA, 25,62% (154 orang) lulusan S1, 2,33% (14 orang) lulusan Diploma, dan 0,83% (5 orang) dari kategori lainnya. Tidak terdapat lulusan S2 di tingkat Pantarlih. Data ini mengindikasikan bahwa pendidikan tingkat menengah atas (SLTA) masih mendominasi struktur Badan *ad hoc*, terutama di tingkat KPPS dan Pantarlih, sementara di tingkat PPK terlihat dominasi lulusan sarjana. Keterlibatan lulusan perguruan tinggi (Diploma, S1, S2) menunjukkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pilkada di Kota Batu.

Berdasarkan hasil pendataan, tidak terdapat anggota badan *ad hoc* Pilkada Kota Batu Tahun 2024 yang berasal dari kalangan penyandang disabilitas, baik pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), maupun Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Kondisi ini mencerminkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pilkada di Kota Batu masih belum terakomodasi. Ke depan, diperlukan langkah afirmatif dan pendekatan yang lebih inklusif dari penyelenggara pilkada guna mendorong keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam setiap jenjang kepilkadaan, termasuk sebagai bagian dari struktur badan *ad hoc*.

3. Pemutakhiran Data

Tahapan pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Kota Batu. Proses ini dimulai dengan penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian disinkronkan oleh KPU dengan daftar pemilih pada pilkada sebelumnya guna menghasilkan data pemilih yang akurat dan mutakhir.

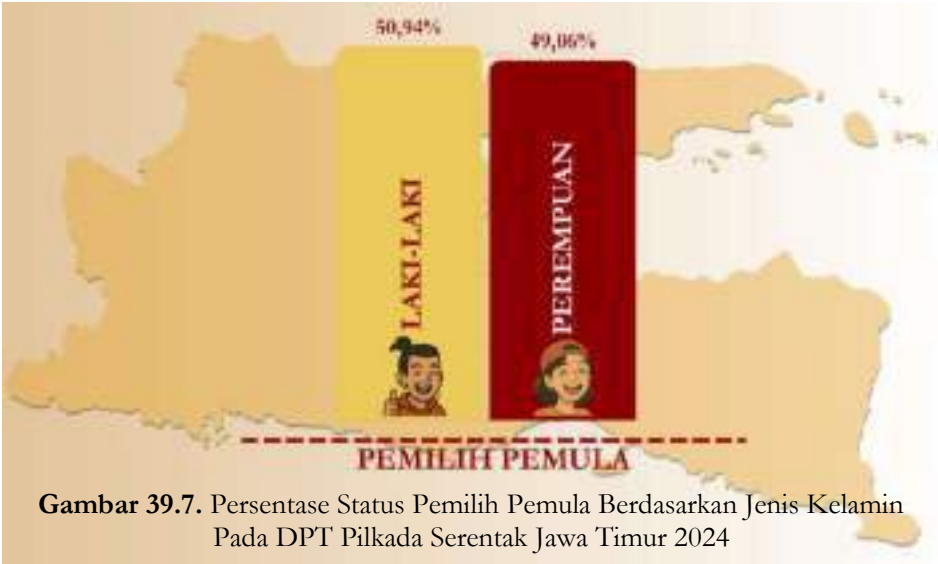
Melalui serangkaian tahapan seperti pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), KPU Kota Batu menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang kemudian diperbaiki dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berdasarkan hasil pleno penetapan DPT, jumlah pemilih tetap di Kota Batu untuk Pilkada 2024 mencapai 166.942 orang. Selain itu, tren penurunan jumlah pemilih dari DPS ke DPT menunjukkan adanya proses pemutakhiran yang cermat, sehingga hanya pemilih yang memenuhi syarat yang tercantum dalam daftar resmi. Dengan data yang valid dan inklusif ini, diharapkan partisipasi pemilih pada hari pemungutan suara dapat meningkat dan mencerminkan kualitas demokrasi yang lebih baik di Kota Batu. Rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 39.6.



Gambar 39.6. Persentase Jenis Kelamin DPT Pilkada Kota Batu Tahun 2024

Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 di Kota Batu, jumlah pemilih terdistribusi secara relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Tercatat sebanyak 82.775 pemilih laki-laki, yang mencakup 49,58% dari total DPT, dan sebanyak 84.167 pemilih perempuan, atau 50,42%. Komposisi ini menunjukkan keterwakilan gender yang proporsional dalam data pemilih, mencerminkan inklusivitas serta potensi partisipasi yang merata dalam proses pemungutan suara mendatang.

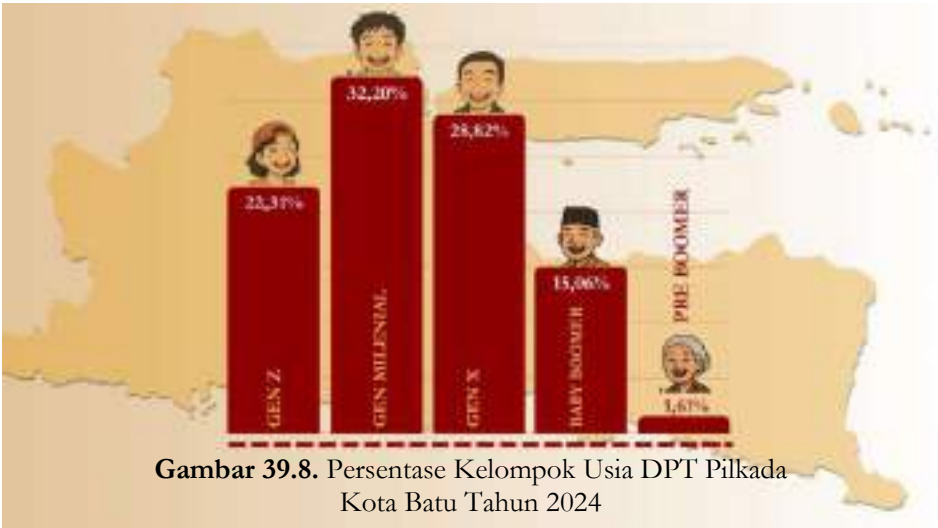
Selanjutnya, pemetaan DPT juga dilakukan berdasarkan status pemilih, yang terbagi ke dalam dua kategori utama. Rincian lengkap mengenai status pemilih dapat dilihat pada gambar 39.7 berikut.



Gambar 39.7. Persentase Status Pemilih Pemula Berdasarkan Jenis Kelamin Pada DPT Pilkada Serentak Jawa Timur 2024

Berdasarkan status pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 Kota Batu, terdapat 2.978 pemilih pemula, terdiri dari 1.517 laki-laki (50,94%) dan 1.461 perempuan (49,06%). Secara keseluruhan, distribusi pemilih laki-laki dan perempuan tetap seimbang, menunjukkan bahwa baik generasi baru maupun pemilih berpengalaman memiliki proporsi yang setara dalam memberikan kontribusi pada pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Batu.

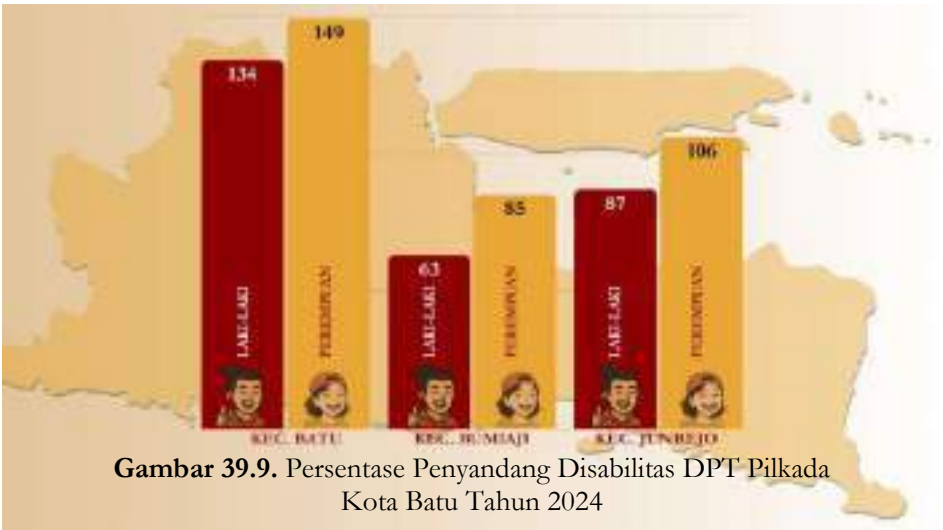
Selanjutnya, sebaran DPT berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik demografis pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana disajikan pada gambar 39.8.



Gambar 39.8. Persentase Kelompok Usia DPT Pilkada Kota Batu Tahun 2024

Berdasarkan data DPT Pilkada 2024 Kota Batu yang dikelompokkan menurut usia, terlihat bahwa generasi milenial (usia 28–43 tahun) mendominasi jumlah pemilih dengan 53.747 orang atau 32,20% dari total DPT. Diikuti oleh generasi X (usia 44–59 tahun) sebanyak 48.112 orang (28,82%), dan generasi Z (usia 17–27 tahun) sebanyak 37.242 orang (22,31%). Sementara itu, baby boomer (usia 60–78 tahun) tercatat sebanyak 25.146 orang (15,06%), dan pre-boomer (di atas 79 tahun) sebanyak 2.695 orang (1,61%). Komposisi ini mencerminkan dominasi pemilih usia produktif dan menengah dalam pilkada 2024 di Kota Batu, sekaligus menunjukkan potensi partisipasi generasi muda yang cukup signifikan.

Selanjutnya, sebaran Pemilih Disabilitas dalam DPT Kota Batu Tahun 2024 disajikan pada gambar 39.9 yang menunjukkan jumlah dan persentase penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap pada pilkada serentak tahun 2024.



Gambar 39.9. Persentase Penyandang Disabilitas DPT Pilkada Kota Batu Tahun 2024

KPU Kota Batu turut memastikan pemenuhan hak pilih bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Sebanyak 624 pemilih disabilitas tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo. Kecamatan Batu menjadi wilayah dengan jumlah pemilih disabilitas tertinggi, yakni 149 pemilih laki-laki dan 134 pemilih perempuan. Di Kecamatan Bumiaji, jumlah pemilih disabilitas terdiri dari 85 laki-laki dan 63 perempuan, sedangkan di Kecamatan Junrejo terdapat 106 pemilih laki-laki dan 87 perempuan. Secara

keseluruhan, jumlah pemilih disabilitas laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan di setiap kecamatan, meskipun selisihnya tidak terlalu signifikan. Sebaran ini mencerminkan perlunya perhatian yang serius terhadap penyediaan layanan pilkada yang inklusif, ramah disabilitas, dan mudah diakses, agar seluruh pemilih disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya secara setara, aman, dan bermartabat di seluruh wilayah Kota Batu.

4. Pencalonan

Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) yang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak mengikuti kontestasi Pilkada Serentak. Ketiga pasangan calon ini telah melalui proses pendaftaran, verifikasi administratif, serta tahapan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran tiga paslon ini memberikan ruang yang luas bagi masyarakat Kota Batu untuk menentukan pilihan terhadap pemimpin yang dinilai paling mampu membawa Kota Wisata Batu menuju arah yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera.

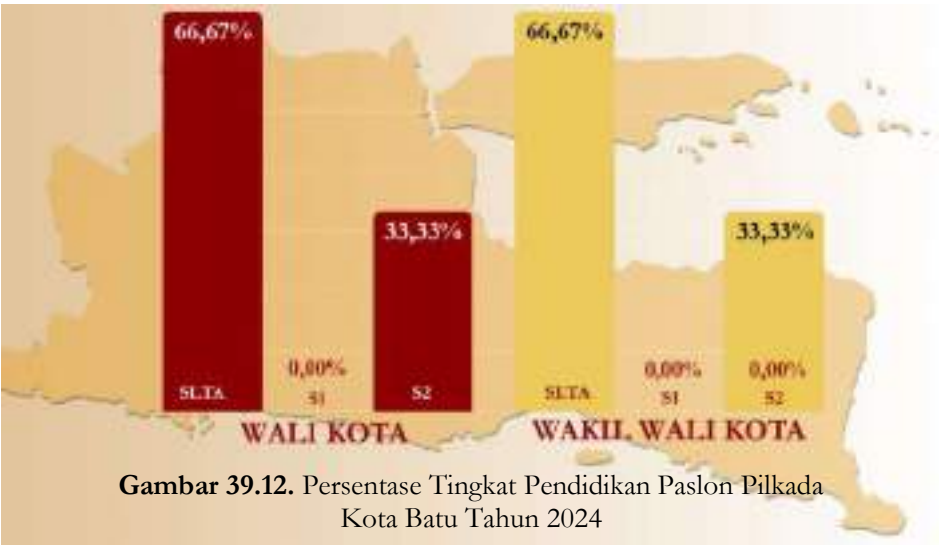
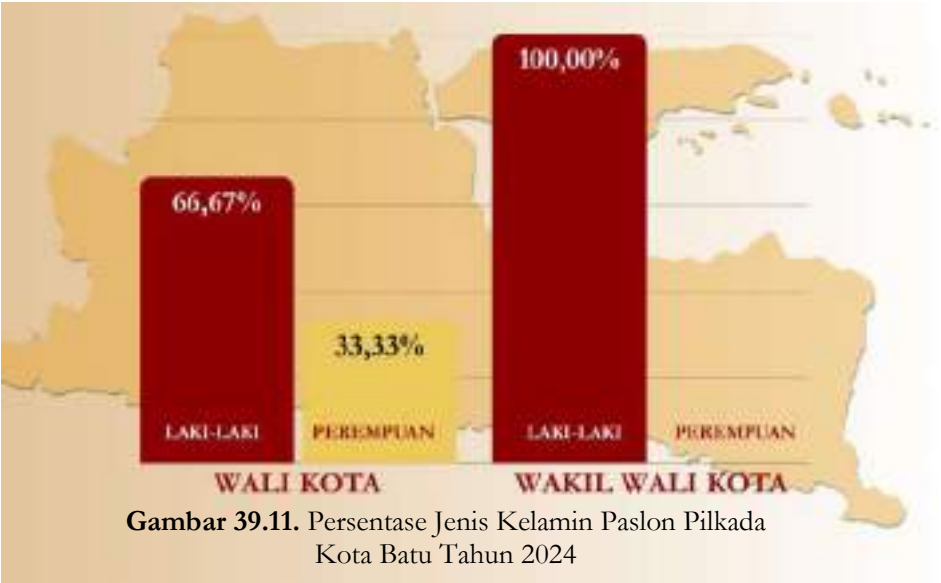
Ketiga pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Batu, yaitu Nurochman – Heli Suyatno, Firhando Gumelar – H. Rudi, dan Kris Dayanti – Kresna Dewanata Prosakh. Informasi lebih lanjut mengenai identitas pasangan calon dan partai politik pengusung disajikan pada gambar 39.10 sebagai bagian dari dokumentasi resmi tahapan pencalonan.



Gambar 39.10. Daftar Nama Paslon Pilkada Kota Batu Tahun 2024

Komposisi jenis kelamin pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu disajikan pada gambar 39.11 dan sebaran tingkat pendidikan pasangan

calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu disajikan pada gambar 39.12.



Dari sisi sebaran demografi berdasarkan jenis kelamin, Pilkada Kota Batu Tahun 2024 diikuti oleh 6 orang calon, yang terdiri dari 3 calon wali kota (bupati) dan 3 calon wakil wali kota (wakil bupati). Dari jumlah tersebut, 5 orang (83,33%) adalah laki-laki, sedangkan hanya 1 orang (16,67%) adalah perempuan, yaitu satu-satunya calon perempuan yang maju sebagai calon wali kota. Secara lebih rinci, posisi calon wali kota diisi oleh 2 laki-laki dan 1

perempuan (66,67% dan 33,33%), sementara seluruh calon wakil wali kota adalah laki-laki (100%).

Dari sisi tingkat pendidikan, mayoritas pasangan calon berlatar belakang pendidikan menengah atas. Tercatat bahwa 4 dari 6 calon (66,67%) merupakan lulusan SLTA, dan 2 calon lainnya (33,33%) adalah lulusan S2 (magister). Tidak terdapat calon yang memiliki latar belakang pendidikan S1, baik dari calon wali kota maupun wakil wali kota. Distribusi ini berlaku sama pada masing-masing posisi, baik di tingkat wali kota maupun wakil wali kota, yaitu 66,67% SLTA dan 33,33% S2.

Komposisi ini menggambarkan bahwa Pilkada Kota Batu 2024 diikuti oleh calon-calon dengan latar belakang pendidikan yang beragam, dan meskipun dominasi laki-laki masih sangat tinggi, kehadiran satu calon perempuan menjadi representasi penting dalam mendorong partisipasi perempuan dalam politik lokal. Ke depan, diharapkan keterwakilan perempuan dan keberagaman latar belakang pendidikan dalam kontestasi kepala daerah semakin meningkat demi memperkuat kualitas demokrasi lokal yang inklusif dan kompetitif.

Dengan latar belakang, visi, dan misi yang beragam, ketiga pasangan calon diharapkan mampu menyuguhkan gagasan dan program kerja terbaik selama masa kampanye, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan secara rasional dan berdasarkan pertimbangan kepentingan masa depan Kota Batu. Ringkasan visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada gambar 39.13 yang memberikan gambaran arah kebijakan dan prioritas program masing-masing pasangan dalam lima tahun ke depan.



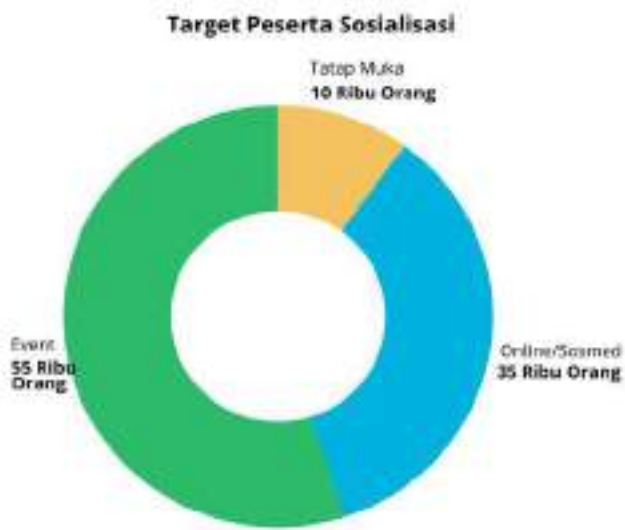
Gambar 39.13. Ringkasan Visi dan Misi Paslon Pilkada Kota Batu Tahun 2024

5. Sosialisasi dan Kampanye

Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara aktif dan berkelanjutan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses dan tahapan pilkada, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam menggunakan hak pilih sebagai wujud nyata demokrasi yang berdaulat dan bertanggung jawab. Sosialisasi dilakukan melalui beragam metode yang menysasar seluruh lapisan masyarakat, baik secara luring maupun daring.

Metode luring mencakup forum warga seperti pertemuan PKK, kegiatan tahlilan, serta rapat tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, yang menjadi sarana efektif dalam menyampaikan pesan-pesan kepilkadaan secara langsung. Selain itu, KPU Kota Batu juga menyelenggarakan seminar dan ceramah, baik sebagai pelaksana utama maupun sebagai narasumber dalam undangan komunitas atau lembaga lokal. Kegiatan *talkshow* di media elektronik seperti radio dan televisi lokal Malang Raya turut dimanfaatkan untuk menjangkau *audiens* yang lebih luas. Tak kalah penting, pendekatan sosial budaya turut dilakukan melalui kegiatan jalan sehat, senam massal, pertunjukan seni seperti

kuda lumping, hingga konser musik, yang dikemas dengan pesan kepilkadaan agar lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat.

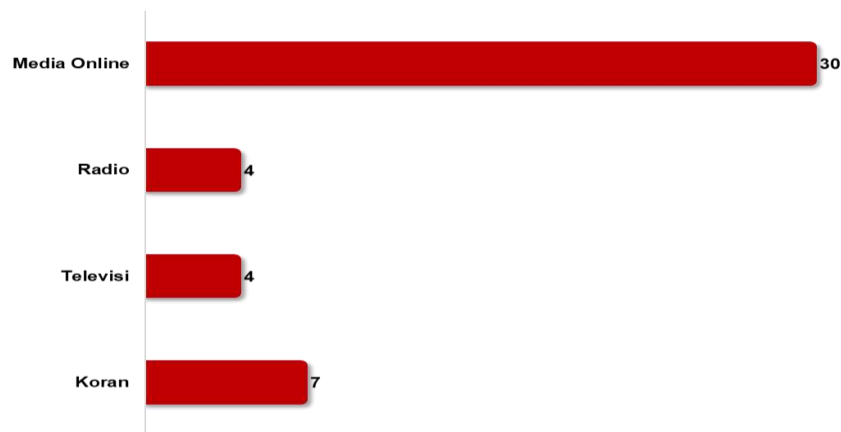


Gambar 39.14. Target Peserta Sosialisasi Pilkada Kota Batu Tahun 2024

Di sisi lain, strategi digital juga menjadi fokus penting KPU Kota Batu, terutama dalam menjangkau pemilih muda dan masyarakat perkotaan. Penyebaran informasi dilakukan melalui media sosial resmi seperti *Instagram*, *Facebook*, dan *WhatsApp*. KPU Kota Batu secara konsisten membagikan konten edukatif terkait tahapan Pilkada, prosedur pemungutan suara, dan ajakan untuk beRpartisipasi aktif. Selain itu, spanduk, baliho, dan poster dipasang di titik-titik strategis, serta kegiatan edukatif seperti lomba desain poster, diskusi publik, dan simulasi pemungutan suara turut digelar sebagai upaya meningkatkan literasi kepilkadaan masyarakat.

Peran media massa dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Batu Tahun 2024 terbukti sangat signifikan, terutama dalam mendukung diseminasi informasi kepada masyarakat secara luas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu secara proaktif menjalin kolaborasi dengan berbagai media lokal maupun nasional untuk menyosialisasikan seluruh tahapan dan agenda penting Pilkada. Salah satu bentuk konkret dari kolaborasi ini adalah penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) dan media gathering bersama para jurnalis. Tujuannya adalah untuk mengajak insan pers beRperan aktif dalam memberikan edukasi politik kepada publik, sekaligus menjadi mitra strategis dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Selain kerja sama dengan media cetak dan elektronik, KPU Kota Batu juga secara intensif memanfaatkan

kekuatan media sosial sebagai kanal komunikasi publik. Melalui akun Instagram resminya, KPU rutin membagikan pembaruan informasi terkait tahapan pilkada, kegiatan sosialisasi, serta edukasi pemilih dalam format yang lebih atraktif dan mudah diakses oleh pemilih muda. Keterlibatan aktif media dalam meliput tahapan Pilkada turut memperkuat kepercayaan publik terhadap transparansi proses demokrasi di tingkat daerah.



Gambar 39.15. Jumlah Media Sosialisasi Pilkada Kota Batu Tahun 2024

Sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pilkada, KPU Kota Batu juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para pemangku kepentingan. FGD ini menjadi ruang diskusi terbuka untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada, sekaligus menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai unsur masyarakat. Dengan demikian, sinergi antara penyelenggara pilkada dan media massa tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi yang partisipatif dan berintegritas di Kota Batu.

Dalam menyemarakkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Batu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu memperkenalkan maskot resmi berupa dua karakter saudara kembar bernama Angga dan Anggi. Angga adalah karakter laki-laki yang digambarkan memegang paku dan kertas suara, melambangkan kesiapan serta semangat pemuda dalam menyalurkan hak pilih. Sementara Anggi, saudari perempuannya, digambarkan memegang kotak suara dan menunjukkan jari bertinta sebagai simbol partisipasi aktif dan legitimasi pilkada.

Filosofi nama Angga dan Anggi berasal dari kata "anggrek", bunga yang identik dengan keindahan dan kemuliaan. Nama Angga melambang-

"raga" atau badan, sebagai pengingat pentingnya kehadiran fisik masyarakat dalam proses pilkada sebagai bentuk nyata dari kedaulatan rakyat. Sedangkan Anggi, yang berarti kecantikan dan keanggunan, mencerminkan nilai-nilai luhur demokrasi seperti kejujuran, transparansi, dan integritas.



Gambar 39.16. Maskot Pilkada Kota Batu Tahun 2024

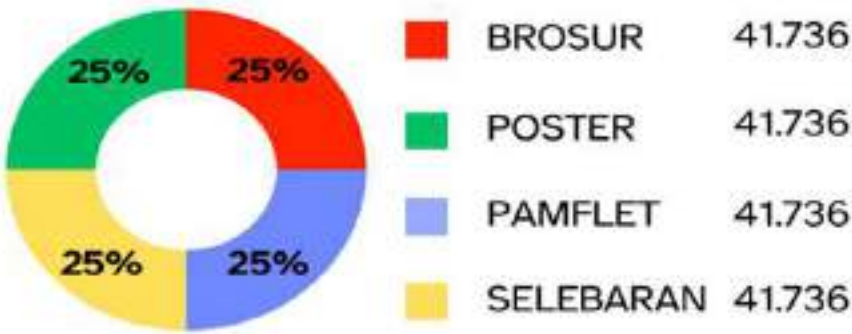
Penggambaran Angga dan Anggi tidak sekadar simbol visual, tetapi sarat makna edukatif. Layaknya anggrek yang mekar dengan indah, proses Pilkada diharapkan menjadi momen yang memukau dan bermartabat, di mana rakyat bebas menentukan pilihannya dengan penuh tanggung jawab. Maskot ini menjadi representasi dari semangat demokrasi yang inklusif dan partisipatif, sekaligus ajakan kepada generasi muda untuk aktif mengambil peran dalam menentukan arah masa depan daerah. Upaya ini diperkuat dengan kegiatan penyuluhan yang menyasar kalangan pelajar di sekolah-sekolah sebagai bagian dari strategi sosialisasi. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran politik sejak dini serta mendorong partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2024. Melalui kehadiran maskot Angga dan Anggi, KPU Kota Batu menegaskan komitmennya untuk menjadikan Pilkada sebagai perayaan demokrasi yang mencerdaskan, menyenangkan, dan bermartabat.

Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu melaksanakan fasilitasi kampanye yang adil, merata, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh pasangan calon memiliki akses yang setara dalam menyampaikan visi, misi, serta program kerja kepada masyarakat pemilih. KPU Kota Batu memfasilitasi berbagai bentuk Alat Peraga Kampanye (APK) yang meliputi baliho, spanduk, umbul-umbul, dan media visual lainnya. Pendistribusian APK dilaksanakan

secara proporsional dan merata kepada masing-masing pasangan calon, dengan memperhatikan prinsip keadilan serta efektivitas penyebaran informasi. Selain APK, pasangan calon juga difasilitasi dalam bentuk Bahan Kampanye (BK) berupa brosur, pamflet, dan selebaran yang informatif dan mudah dipahami. BK tersebut bertujuan membantu pemilih mengenal calon secara utuh, mulai dari rekam jejak hingga rencana kerja yang diusung selama masa kampanye. KPU juga menyediakan fasilitas iklan kampanye di media cetak dan media elektronik lokal, agar penyebaran informasi mengenai pasangan calon dapat menjangkau pemilih yang lebih luas dan beragam.



FASILITASI BK PASANGAN CALON





Gambar 39.17. Fasilitas Kampanye oleh KPU Kota Batu Tahun 2024

KPU Kota Batu turut menyelenggarakan debat publik pasangan calon sebanyak tiga kali sebagai bagian dari fasilitasi kampanye Pilkada 2024. Debat ini bertujuan untuk memberikan ruang terbuka bagi masing-masing pasangan calon dalam menyampaikan visi, misi, serta program kerja mereka secara langsung kepada masyarakat. Melalui debat, pemilih dapat menilai dan membandingkan kapasitas, integritas, serta komitmen setiap calon dalam menjawab isu-isu strategis yang dihadapi Kota Batu.

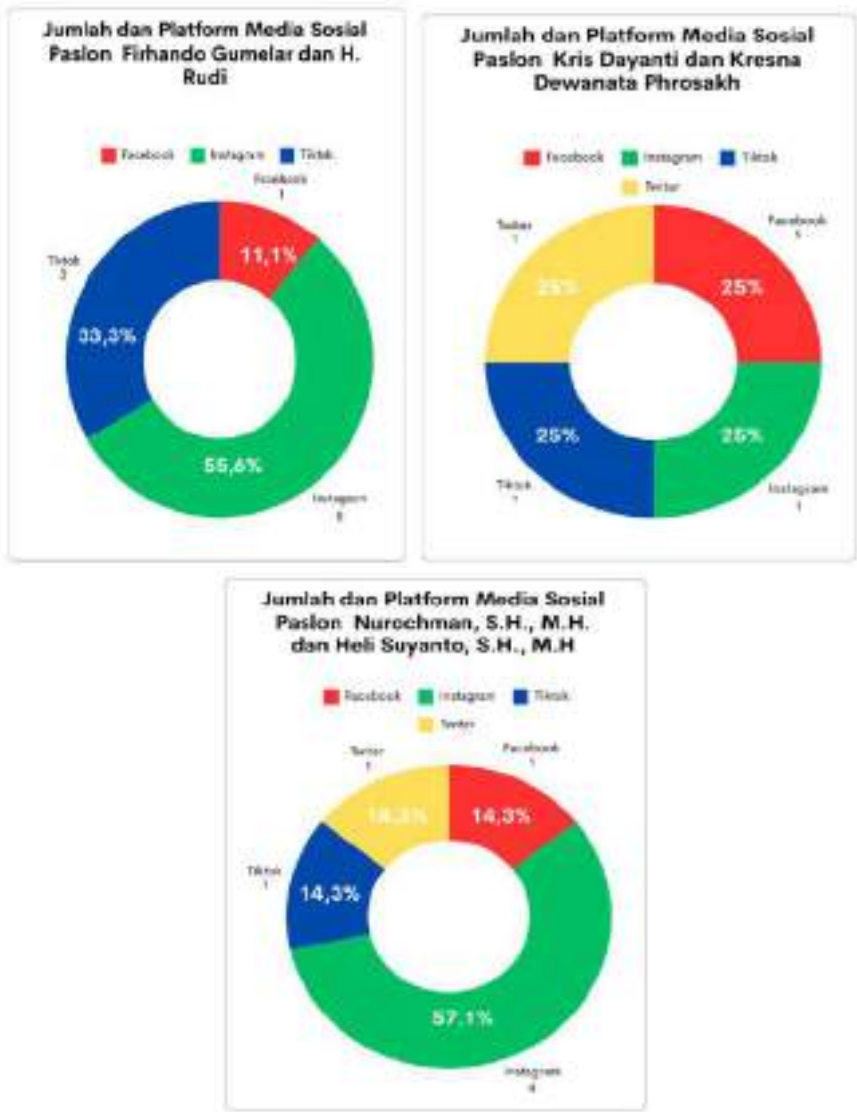
Tabel 39.1. Debat Publik Pilkada Kota Batu Tahun 2024

No	Tanggal	Tempat	Tema
1.	21 Oktober 2024	Golden Tulip Hotel	Pariwisata, Pertanian, Agraria, dan Lingkungan Hidup
2.	8 November 2024	Singhasari Hotel & Resort	Pendidikan, Perlindungan Anak, Kesehatan, dan Kebudayaan
3.	21 November 2024	Golden Tulip Hotel	Ekonomi, dan Tata Kelola Pemerintahan

Sebagai bagian dari upaya transparansi dan keterbukaan informasi publik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu mencatat keberadaan serta pemanfaatan media sosial resmi oleh masing-masing pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pilkada 2024. Media sosial telah menjadi salah satu alat komunikasi strategis yang digunakan untuk menjangkau pemilih secara lebih luas, khususnya generasi muda dan masyarakat urban yang aktif di ruang digital.

Setiap pasangan calon diketahui menggunakan sejumlah platform media sosial sebagai sarana kampanye digital. Platform yang paling umum digunakan

meliputi Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube, yang berisi konten-konten kampanye seperti pengenalan calon, visi-misi, program unggulan, hingga kegiatan tatap muka atau dialog publik. Kehadiran akun media sosial ini tidak hanya menjadi alat penyebaran informasi, namun juga menjadi wadah interaktif antara calon pemimpin dan pemilih. Pemanfaatan kanal digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara cepat, sekaligus menilai karakter dan gagasan pasangan calon dari rekam jejak digital yang ditampilkan.



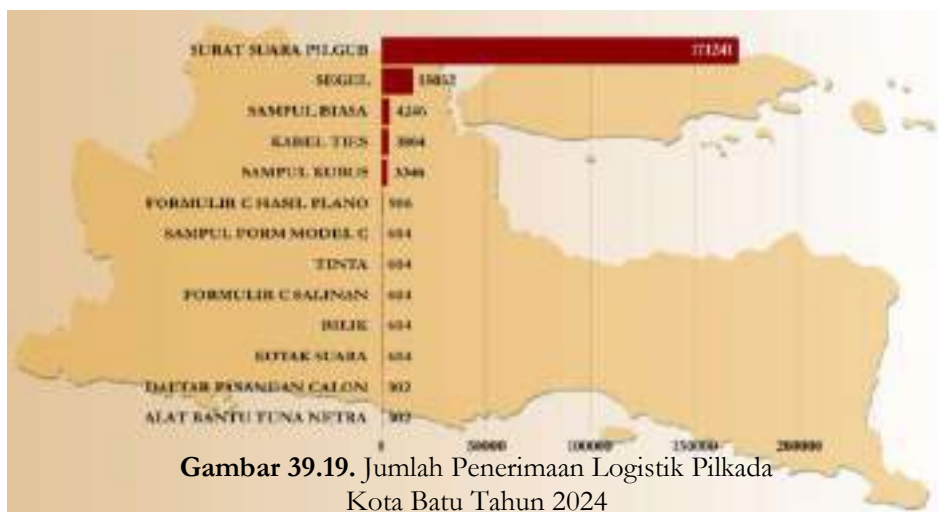
Gambar 39.18. Jumlah Media Sosial Paslon Pilkada Kota Batu Tahun 2024

KPU Kota Batu memastikan bahwa seluruh aktivitas kampanye digital ini tercatat dan dipantau secara administratif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan informasi, menghindari hoaks, serta menjamin bahwa seluruh proses kampanye berjalan dalam koridor etika dan keadilan demokrasi. Dengan adanya transparansi terhadap penggunaan media sosial oleh pasangan calon, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang akurat dan mendalam sebelum menentukan pilihannya pada hari pemungutan suara.

6. Logistik

Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu menyelenggarakan serangkaian tahapan penting dalam pengadaan logistik pilkada. Proses pengadaan dilaksanakan secara cermat, sistematis, dan transparan guna memastikan seluruh kebutuhan logistik dapat terpenuhi tepat waktu dan sesuai standar kualitas. Pelaksanaan pengadaan menjadi tanggung jawab Sekretariat KPU Kota Batu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengadaan dilakukan melalui dua mekanisme, yakni secara swakelola dan melalui penyedia (vendor), dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) KPU Kota Batu menyusun pemaketan kegiatan pengadaan logistik berdasarkan klasifikasi jenis pekerjaan untuk menentukan metode pengadaan yang tepat. Selanjutnya, dilakukan survei harga pasar guna menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar pengambilan keputusan pengadaan. Jenis logistik yang diadakan mencakup perlengkapan utama pemungutan suara seperti kotak suara, bilik suara, surat suara, tinta, segel, formulir, serta alat tulis kantor. Seluruh logistik tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan pilkada di 302 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Batu. Setiap item logistik telah melalui proses verifikasi mutu dan kelayakan guna menjamin kualitas dan keamanannya. Rincian distribusi logistik secara menyeluruh ditampilkan pada gambar 39.19.

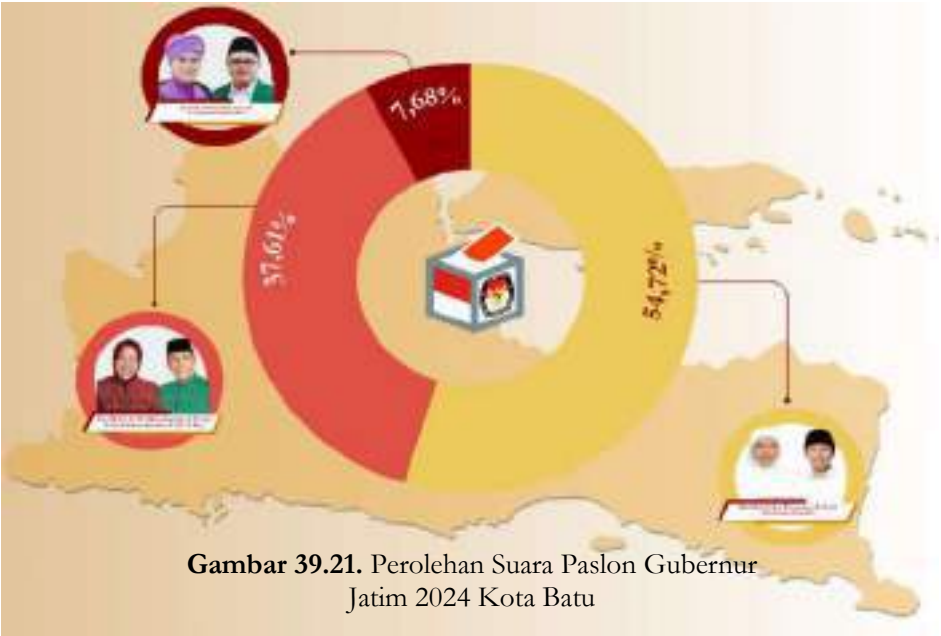


Dalam rangka menjamin keamanan dan kelancaran distribusi logistik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu menyusun strategi distribusi secara bertahap dan terkoordinasi. Logistik yang telah disiapkan dengan cermat dan disimpan di gudang berstandar, didistribusikan ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan pengawasan ketat oleh aparat keamanan untuk memastikan keamanannya selama perjalanan. Distribusi logistik dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), agar seluruh TPS di Kota Batu memperoleh logistik sesuai kebutuhan dan jumlah pemilih masing-masing. Proses ini juga melibatkan pelatihan teknis kepada petugas lapangan untuk memastikan pengelolaan logistik berjalan sesuai prosedur operasional standar.

KPU Kota Batu menugaskan 18 orang petugas setting dan packing untuk menyiapkan logistik sebelum pengiriman. Para petugas ini bertanggungjawab dalam proses perakitan kotak suara, pengecekan kelengkapan perlengkapan TPS, serta pengemasan logistik secara sistematis agar memudahkan distribusi di lapangan. Dalam mengantisipasi kendala geografis dan cuaca ekstrem yang mungkin menghambat pelaksanaan pilkada, KPU Kota Batu mengimbau penggunaan bangunan permanen sebagai lokasi TPS. Langkah ini diambil mengingat Pilkada berlangsung pada musim hujan, sehingga diperlukan kesiapan infrastruktur yang mendukung demi kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara. Melalui strategi distribusi yang terencana, pengamanan ketat, serta dukungan teknis dari seluruh pihak terkait, KPU Kota Batu menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pilkada yang logistiknya dikelola secara profesional, tepat waktu, dan akuntabel di seluruh wilayah Kota Batu.

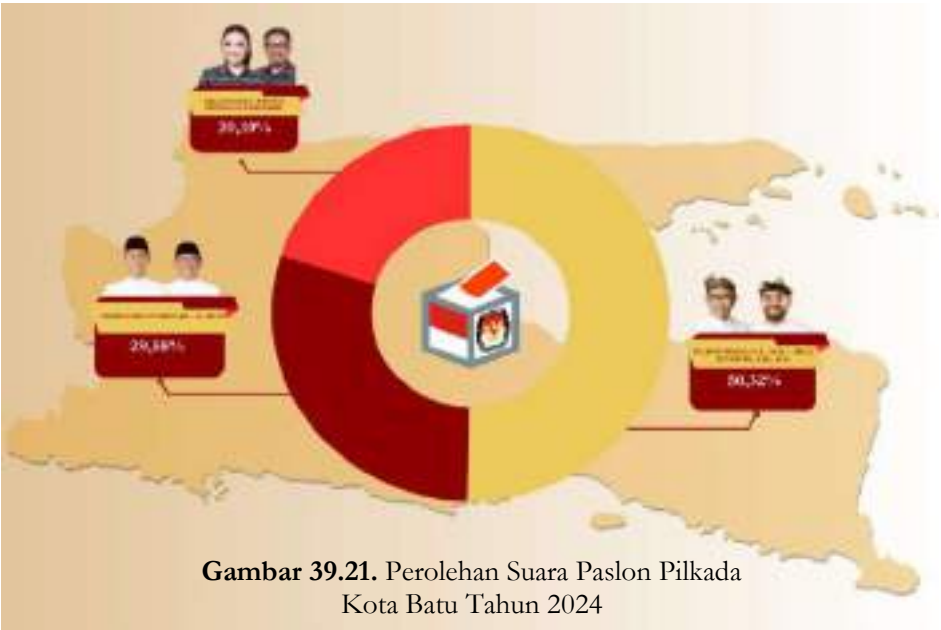
7. Hasil Pilkada Serentak

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.6 BA/35/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 sebagaimana perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Batu disajikan pada gambar 39.21.



Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, partisipasi pemilih di Kota Batu menghasilkan total suara sah sebanyak 129.570 suara. Dari jumlah tersebut, pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestjanto Dardak memperoleh suara terbanyak dengan dukungan sebanyak 70.898 suara atau 54,72% dari total suara sah. Pasangan Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T. – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), S.IP., M.Kes. menempati posisi kedua dengan perolehan 48.725 suara atau 37,61%. Sementara itu, pasangan Hj. Luluk Nur Ihamidah, M.Si. – H. Lukmanul Khakim, M.Si. mendapatkan dukungan sebanyak 9.947 suara atau 7,68%. Hasil ini menunjukkan dominasi pasangan petahana Khofifah–Emil di wilayah Kota Batu, disusul oleh pasangan Tri Rismaharini–Gus Hans yang juga memperoleh dukungan signifikan. Komposisi perolehan suara ini mencerminkan dinamika politik lokal serta preferensi masyarakat Kota Batu terhadap figur dan program yang ditawarkan masing-masing calon.

Selanjutnya, hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu pada Pilkada 2024 dapat dilihat pada gambar 39.22.



Gambar 39.21. Perolehan Suara Paslon Pilkada Kota Batu Tahun 2024

Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu Tahun 2024, jumlah suara sah yang tercatat mencapai 130.528 suara. Dari tiga pasangan calon yang berkompetisi, pasangan Nurochman, S.H., M.H. – Heli Suyanto, S.H., M.H. berhasil meraih suara terbanyak dengan dukungan sebanyak 65.684 suara atau 50,32%, sekaligus menempatkan mereka sebagai pemenang dalam kontestasi ini. Di posisi kedua, pasangan Firhando Gumelar – H. Rudi memperoleh 38.610 suara, yang setara dengan 29,58% dari total suara sah. Sementara itu, pasangan Kris Dayanti – Kresna Dewanata Phrosakh meraih 26.234 suara atau 20,10%. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Batu memberikan kepercayaan tertinggi kepada pasangan Nurochman–Heli, yang unggul secara signifikan atas dua pasangan calon lainnya. Keberhasilan ini mencerminkan penerimaan positif terhadap visi, misi, serta rekam jejak kepemimpinan yang mereka tawarkan kepada masyarakat dalam membangun Kota Wisata Batu ke arah yang lebih maju dan inklusif.

BIOGRAFI PENULIS



Rinda Lolita Melanwati, S.Si., M.Stat. adalah seorang peneliti, praktisi dan konsultan analisis data di bidang Statistika. Lahir di Nganjuk pada tanggal 9 November 1994. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Statistika Universitas Brawijaya (2017) dan S2 Statistika Universitas Brawijaya (2023), melalui Beasiswa Program Pascasarjana (BPPS) FMIPA Universitas Brawijaya. Saat ini, penulis tengah menempuh pendidikan Program Doktor (S3) Matematika, bidang minat Statistika, di FMIPA Universitas Brawijaya, melalui beasiswa yang sama. Selama masa studi, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan, IKA UB, serta terlibat dalam beberapa hibah penelitian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Setelah lulus S1, penulis memulai karier profesionalnya di PT. Global Insight Utama dan *Risk Management Supervisor* di PT. Suzuki Finance Indonesia (*Head Office*) Jakarta. Selain itu, penulis juga aktif sebagai peneliti di Indopol Survey & Consulting dan berkontribusi di dunia akademik sebagai Dosen Praktisi Mengajar Angkatan 4 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Minat penelitian penulis meliputi pemodelan Bayesian, analisis spatio-temporal, khususnya dalam konteks isu sosial, ekonomi, dan masyarakat. Saran, kritik, dan pertanyaan dapat disampaikan melalui email: rindalolitam@gmail.com.



Insan Qoriawan, S.Si., M.Sos. yang akrab disapa Insan lahir di Pemalang pada tanggal 4 September 1975. Ia menyelesaikan pendidikan di Universitas Brawijaya pada tahun 2001. Setelah itu menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Malang (2016-2020). Dalam dunia organisasi, ia pernah menjabat sebagai Ketua HMJ Matematika Universitas Brawijaya (1996-1997) dan Ketua Bidang di Senat Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Brawijaya (1997-1998). Selain itu, ia juga menjadi Sekretaris PTMSI Kabupaten Pasuruan (2005- 2017). Dalam hal pengalaman pekerjaan, Insan memiliki pengalaman luas di bidang pemilihan. Ia memulai kariernya di KPU sebagai anggota KPPS pada tahun 2004, kemudian melanjutkan tugasnya sebagai anggota PPK di KPU pada periode 2008 hingga 2009. Selanjutnya, ia bergabung dengan KPU Kabupaten/Kota dari tahun 2009 hingga 2018, sebelum akhirnya menjabat di KPU Provinsi sejak tahun 2018 hingga sekarang.

Selain itu, Insan juga memiliki pengalaman di non-kepemiluan. Ia pernah bekerja sebagai staf di PT. Kinarya Era Bumi Nusa (2002-2004) dan juga sebagai guru di Perguruan Muhammadiyah (2004-2009). Sebagai seorang profesional, Insan juga aktif menulis, dengan salah satu karya tulisnya yang berjudul "Sedikit Saja Terkait Pencalonan (Catatan Teknis Pilkada 2020)" yang diterbitkan pada tahun 2020.

Buku ini menyajikan potret lengkap Pilkada Serentak 2024 di Jawa Timur dalam format infografis yang informatif. Menyuguhkan data tentang profil pasangan calon, hasil perolehan suara, tingkat partisipasi pemilih, hingga peta dukungan politik di 38 kabupaten/kota. Melalui visualisasi data yang ringkas dan akurat, pembaca diajak memahami dynamics demokrasi lokal dan arah perubahan politik Jawa Timur.

"Face of Democracy" bukan sekadar dokumentasi, melainkan refleksi nyata dari semangat partisipasi rakyat dalam membangun masa depan daerah serta menjadi referensi penting bagi akademisi, peneliti, pemerhati politik, dan masyarakat umum yang ingin memahami proses demokrasi lokal secara komprehensif dan berbasis bukti.



forind
Publishing

Penerbit:
Penerbit Forind

Alamat :
Jl. Raya Tlogomas V No. 24 Malang 65141
Telp. 081233992973
Email : forind_publishing@yahoo.com

